



INTERNATIONAL CONFERENCE AND CALL FOR PAPER 2022

ISLAMIC STUDIES IN GLOBALIZING CHALLENGES

Dr. Adri Efferi, M. Ag | Dr. Hj. Muzdalifah, S.Psi., M.Si
Dr. M. Husni Mubarak, SE., MM | Dr. Fifi Nofiaturrehman, M. Pd, I
Dr. Mualimul Huda, M. Pd. I | Dr. Fauzan Adim, MA

PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE AND CALL FOR PAPER 2022

ISLAMIC STUDIES IN GLOBALIZING CHALLENGES

PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE AND CALL FOR PAPER 2022

ISLAMIC STUDIES IN GLOBALIZING CHALLENGES

Editor:

Dr. Adri Efferi, M. Ag, Dr. Hj. Muzdalifah, S.Psi., M.Si,
Dr. Muhammad Husni Mubarok, S.E., M.M., Dr. Fifi Nofiaturrehmah, M. Pd, I,
Dr. Muallimul Huda, M. Pd. I, Dr. Fauzan Adim, MA

ISLAMIC STUDIES IN GLOBALIZING CHALLENGES

© Adri Efferi, dkk

1157 halaman + xiv, 15,5 cm x 23 cm

ISBN 978-623-88388-6-8

Diterbitkan pertama kali oleh Duta Dinamika Media Kudus (2022)

Editor : Dr. Adri Efferi, M. Ag
Dr. Hj. Muzdalifah, S.Psi., M.Si
Dr. Muhammad Husni Mubarak, S.E., M.M.
Dr. Fifi Nofiaturrahmah, M. Pd, I
Dr. Muallimul Huda, M. Pd. I
Dr. Fauzan Adim, MA

Desain Sampul : Teguh Heri Purwanto

Penata letak isi : Khoiril Anwar, SH., MH

Diterbitkan Oleh :



DUTA
dinamika media

Diterbitkan oleh : Duta Dinamika
Media email : dutadinamikamedia@yahoo.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang,
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit.

Dirancang dikudus dan dicetak di Yogyakarta.

PENGANTAR

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN KUDUS

Pascasarjana sudah seharusnya menjadi *center of excellence* bagi sebuah perguruan tinggi. Hal tersebut bisa tercermin pada civitas akademika, baik dosen, mahasiswa, maupun alumni Pascasarjana yang memenuhi standar akademik yang ditentukan. Oleh itu, civitas akademika Pascasarjana juga bisa saling bersinergi untuk mencari solusi dan memecahkan problem akademik dari program pascasarjana sendiri. Pascasarjana dapat membawa sosok mahasiswa sukses untuk melaju ke depan pada *track studi* yang lebih tinggi. Berjalan, berlari, melompat, berenang, bahkan terbang untuk menggapai kualifikasi akademik yang diharapkan.

Melihat fenomena ini Pascasarjana IAIN Kudus mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan berkaitan dengan bidang kajiannya, yaitu pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam. Apalagi jika dikaitkan dengan Kurikulum KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), alumni Magister berada pada level 8, yang tercermin dalam 3 standar: *pertama*, Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. *Kedua*, Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. *Ketiga*, Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Pada umumnya masyarakat berharap bahwa keberadaan Pascasarjana IAIN Kudus dapat memenuhi dua harapan sekaligus. *Pertama*, harapan yang terkait dengan eksistensinya sebagai lembaga keilmuan. Sebagai lembaga keilmuan ia dituntut untuk dapat memenuhi tugas-tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan agama islam serta pengabdian kepada masyarakat. *Kedua*, harapan yang terkait erat dengan kelembagaan sebagai lembaga pendidikan agama Islam. Sebagai lembaga keagamaan ia dituntut untuk memenuhi misi dakwah dan pengembangan masyarakat Islam.

Satu kenyataan obyektif, bahwa sebagian besar dari masyarakat Indonesia menuntut pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan agama, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang bernafaskan nilai-nilai keislaman. Tuntutan tersebut tidak bisa dihindarkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kehadiran Pascasarjana IAIN Kudus diharapkan mampu mengembangkan ilmu-ilmu Islam terapan, secara terpadu dengan ilmu-ilmu modern yang merupakan keniscayaan.

Untuk mewujudkan harapan-harapan mulia dari masyarakat ilmiah khususnya di IAIN Kudus, Pascasarjana memiliki kegiatan-kegiatan ilmiah penunjang, salah satunya adalah International Conference and Call for Paper yang kita singkat dengan ICCP. Rencananya kegiatan ini akan diagendakan setiap tahun. Adapun keluaran dari kegiatan ini, produk ilmiah berbentuk artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal, ebook, proceeding dan media sejenis lainnya. Adapun untuk pertemuan pertama ini, keluaran yang ditargetkan baru sebatas proceeding ber-ISBN. Hal ini karena terkendala persiapan yang pendek dan juga ketersediaan anggaran pendukung.

Kami selaku pengelola Pascasarjana IAIN Kudus sangat mengapresiasi penerbitan proceeding ini. Selain sebagai media untuk menyemai gagasan yang cerdas dalam melihat dinamika keilmuan yang berkembang, juga menjadi bagian dari upaya merespon adanya aturan untuk publikasi ilmiah bagi mahasiswa maupun dosen. Tentunya tidak lupa diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, dan permohonan maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Dengan satu harapan mulia, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan menjadi penyemat bagi kita semua untuk terus berkarya. Aamiin.

Kudus, Agustus 2022

Direktur

Dr. Adri Efferi, M.Ag

FOREWORD

POSTGRADUATE DIRECTOR OF IAIN KUDUS

Postgraduate should be the center of excellence for a higher education. It can be reflected in the academic communities, either postgraduate lecturers, students, or alumni, who meet the specified academic standards. To that end, the postgraduate academic communities can collaborate to find solutions and solve academic problems from the postgraduate program itself. Postgraduates can also bring successful students to advance on a higher study track, walking, running, jumping, swimming, and even flying to reach the expected academic qualifications.

Seeing this phenomenon, IAIN Kudus Postgraduate has formidable duties and responsibilities concerning the field of study, i.e., the development and application of science, technology, and art, which has an Islamic spirit. Moreover, if it is related to the KKNi (Indonesian National Qualifications Framework) curriculum, master's alumni are at level 8, which is reflected in three standards. The first is developing knowledge, technology, and/or art in the field of science or professional practice through research until producing innovative and tested works. The second is solving science, technology, and/or art problems in their scientific fields through an inter or multidisciplinary approach. The third is being able to manage beneficial research and development for society and science and can gain national and international recognition.

In general, people hope that the existence of the IAIN Kudus Postgraduate can fulfill two expectations at once. First, the expectation is associated with its existence as a scientific institution. As a scientific institution, it is required to fulfill the tasks of education and teaching, research and development of Islamic religious knowledge, and community service. Second, the expectation is closely related to the institution as an Islamic educational institution. As a religious institution, it is also required to fulfill the mission of da'wah and the development of Islamic society.

Moreover, one objective fact is that most Indonesian people demand the implementation of the development of religious knowledge as well as science and technology enriched by Islamic values. These demands cannot be avoided in the context of the nation's intellectual life. For this reason, the presence of the IAIN Kudus Postgraduate is expected to be able to develop applied Islamic sciences in an integrated manner with modern sciences, which is a necessity.

To realize the noble hopes of the scientific community, specifically at IAIN Kudus, the Postgraduate Program has supported scientific activities, one of which is the International Conference and Call for Paper, abbreviated as ICCP. It is planned that this will be an annual activity. The outputs of this activity are scientific products in the form of scientific articles published in journals, eBooks, proceedings, and other similar media. Meanwhile, for this first meeting, the targeted output is still limited to the ISBN procedure. It is due to the constraints of short preparation and the availability of a supporting budget.

As the IAIN Kudus Postgraduate managers, we appreciate this procedure's publication. Aside from being a medium for sowing smart ideas in seeing the dynamics of scientific development, it is also part of an effort to respond to regulations for scientific publications for students and lecturers. Certainly, we do thank all those who have supported us and apologize for many shortcomings. With one noble hope, we hope this simple work can be useful and become an inspiration for all of us to continue working. Amen.

Kudus, August 2022

Director

Dr. Adri Efferi, M.Ag

DAFTAR Isi

PENGANTAR DIREKTUR PASCASARJANA IAIN KUDUS	V
FOREWORD POSTGRADUATE DIRECTOR OF IAIN KUDUS	VII
DAFTAR ISI	IX
METODE AT-TAYSIIR DALAM PEMBELAJARAN MAKHORIJUL HURUF DAN TAJWID DI PONDOK PESANTREN TAHFIZUL QURAN MAZRO'ATUL 'ULUM DAMARAN KUDUS	1
IMPLEMENTATION OF INTERRELIGIOUS TOLERANCE FOR MUSLIM MINORITY COMMUNITIES	16
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM : REFLEKSI PEMIKIRANKH HASYIM ASY'ARI DI MASA KONTEMPORER	40
PERAN ZAKAT GUNA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN AGENDA <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i>	54
KEPEMIMPINAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN; MENELADANI KEPRIBADIAN RASULULLAH SAW	67
VALUES OF TOLERANCE THROUGH RELIGIOUS LEARNING AT AL HIKMAH LASEM ISLAMIC BOARDING SCHOOL (CONCEPTS, STRATEGIES AND CHALLENGES)	86
PENGORGANISASIAN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS	113

KEBIJAKAN KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DI MI MIFTAHUL HUDA TAYU.....	127
THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP STYLE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: THE ROLE OF JOB SATISFACTION AS A MEDIATOR AT PESANTREN	149
EFEKTIVITAS <i>CASH WAQF LINKED SUKUK</i> DALAM MENDUKUNG AKSELERASI APBN DI MASA COVID-19	247
NEXUS BETWEEN INTELLECTUAL CAPITAL AND PROFITABILITY: DATA EVIDENCE FROM THE INDONESIAN CONSUMER GOODS INDUSTRY	269
PERMASALAHAN DAN KRISIS PENDIDIKAN ISLAM HARI INI DAN DI MASA DEPAN.....	287
PEMANFAATAN MEDIA <i>GOOGLE CLASSROOM</i> PADA MATA PELAJARAN PAI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS.....	304
METODE QIRO'ATI UNTUK MENINGKATKAN MEMBACA AL-QUR'AN ANAK USIA DINI	329
REKONSTRUKSI PASAL HADHANAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM: STUDI PEMENUHAN HAK ANAK DI KUDUS.....	340
PENDIDIKAN TINGGI ISLAM INDONESIA DAN TANTANGAN GLOBALISASI	357
THE SOUTH CHINA SEA MARITIME DISPUTES AND EXECUTION OF ISLAMIC INTERNATIONAL RELATIONS AS A JIHAD STRATEGY IN BALANCING THE WORLD'S AUTHORITATIVE POWERS	379
MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSI DI SD IT NURUL FIKRI JUWANA	422

SOLIDARITAS SOSIAL MASYARAKAT BERIMAN DI DESA PENAMBUNGAN MARGOREJO PATI PADA MASA PANDEMI COVID-19	433
DIGITAL MARKETING STRATEGY BASED ISLAMIC VALUE: HOW TO ACHIEVE COMPETITIVE ADVANTAGE?.....	453
PENANAMAN NILAI-NILAI KARAKTER REMAJA MELALUI FESTIVAL PAGER MANGKOK DI KAMPUNG BUDAYA PIJI.....	475
KONSTRUKSI KEKELUARGAAN (STUDI DI PONDOK PESANTREN MTS MA ASSALAM KUDUS).....	488
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DENGAN METODE INSERSI...	502
URGENSI FATWA MUI TENTANG HUKUMAN KEBIRI DI TENGAH POLEMIK	516
AGAMA SEBAGAI HIPERREALITAS (PENDEKATAN KRITIS JEAN BAUDRILLARD)	543
IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA M. QURAISH SHIHAB DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	561
INTERNALIZATION OF RELIGIOUS MODERATION VALUES IN ISLAMIC EDUCATION LEARNING	600
NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM TRADISI MAKAN NAMPANAN DI PONDOK PESANTREN	623
PRAKTIK KEAGAMAAN DI MASYARAKAT PESISIR DESA SEDAN KABUPATEN REMBANG PADA MASA PANDEMI COVID-19	635
EFEKTIVITAS KOMUNIKASI KEPALA MADRASAH DALAM MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI DI MI NU RAUDLATUT THOLIBIN JEPANGPAKIS	654

PEMBENTUKAN AHLAK KARIMAH ANAK MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI LINGKUNGAN KELUARGA	676
THE ROLE OF PESANTREN IN DEFENDING INDONESIA REPUBLIC A PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW PERSPECTIVE; CASE STUDY OF JIHAD RESOLUTION	692
RELIGIOUS ORTHODOXY OR ENVIRONMENTAL DISASTER? FINDING THE CAUSE FOR THE ABSENCE OF FIGURATIVE MOTIFS IN THE INDIGENOUS TEXTILES OF LOMBOK	711
PENGARUH BRAND, PRICE DAN QUALITY KOSMETIK HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN	724
PENGARUH KEPEDULIAN ORANG TUA DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF MATA PELAJARAN IPA KELAS IV DI MI MAMBA'UNNIDHOM BULUNGAN PATI TAHUN PELAJARAN 2021/2022	740
PELAKSANAAN (ACTUATING) DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF QUR'AN HADITS	753
PERAN KETELADANAN GURU DALAM MEMBENTUK AKHLAK PESERTA DIDIK DI TPQ SABILAL MUHTADIN CLERING	767
IMPROVEMENT OF MEMORY WITH DISCIPLINED BEHAVIOR OF STUDENTS IN MEMORY OF THE QUR'AN IN ROUDLOTUL MUTA'ALLIMAT BOARDING SCHOOL	784
PENGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PAI DI SMP NEGERI 1 JUWANA..	794
PERSEPSI PEDAGANG MUSLIM TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT PERDAGANGAN (STUDI KASUS PEDAGANG DI LINGKUNGAN KAMPUS IAIN KUDUS).....	810

ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS AS A DOCTRINE OF REDUCING POVERTY.....	831
RELIGIOUS MODERATION IN REFLECTION OF ISLAMIC EDUCATION PATTERNS IN THE ERA OF DISRUPTION.....	844
PENGARUH IBN 'ATIYYAH ATAS AL-QURTHUBI DALAM TAFSIR <i>AL-JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN</i>	859
THE CONCEPT OF HADHARAH (CIVILIZATION) ACCORDING O THE THOUGHT AF SHAIKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI	881
.IMPLEMENTATION OF MULTICULTURAL VALUES IN THE CURRICULUM OF THE ISLAMIC EDUCATION MANAGEMENT STUDY PROGRAM ..	894
PENANAMAN NILAI-NILAI RELIGIUS DALAM KEGIATAN MANAQIB SYEH ABDUL QODIR ALJAILANI.....	913
MENYATUKAN YANG BERBEDA: UPAYA PONDOK PESANTREN LA ROYBA DALAM MEMBANGUN KERUKUNAN BERAGAMA	925
MODEL OF ISLAMIC EDUCATION WITH NATIONALITY INSIGHT FOR TERRORIST PRISONERS IN CLASS II B PRISONS, LAMONGAN REGENCY	938
URGENSI SEJARAH DALAM KEBERAGAMAAN DI INDONESIA.....	957
THE POLITICAL FACE BEHIND RELIGIOUS SYMBOLS (ISLAMIC STUDIES WITH A POLITICAL APPROACH)	970
PERADABAN ISLAM PADA MASA KHULAFAUURASYIDIN.....	992
ANALISIS KURIKULUM PAI PERSPEKTIF SEJARAH KURIKULUM DI INDONESIA DALAM MENJAWAB ERA 5.0.....	1018

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM AL-QURAN SURAH AL-AN'AM AYAT 151-153 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (STUDI ANALISIS TERHADAP TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH AZ-ZUHAILI).....	1037
SISI PERADABAN DINASTI LAIN DALAM ISLAM; STUDY HISTORISITAS	1057
PENDIDIKAN ISLAM DALAM TANTANGAN ERA METAVERSE	1072
KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF IMAM GHAZALI	1085
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PERSPEKTIF MANAJEMEN SYARIAH (STUDI KASUS BPR SYARIAH ARTHA MAS ABADI).....	1099
PENERAPAN PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR'AN DENGAN METODE QIRO'ATI.....	1121
EXAMINING THE FUTURE OF CHARACTER EDUCATION IN ISLAMIC EDUCATION IN THE VUCA ERA	1141

METODE AT-TAYSIIR
DALAM PEMBELAJARAN MAKHORIJUL HURUF DAN TAJWID
DI PONDOK PESANTREN TAHFIZUL QURAN
MAZRO'ATUL 'ULUM DAMARAN KUDUS

Aan Heri Ustadzi, Machmud Mubarak

IAIN Kudus

Email: aanheri2929@gmail.com

Abstrak:

Pondok Pesantren Maz'roatul 'Ulum Damaran 78 Kudus merupakan Pondok Pesantren tertua di Kudus bahkan mungkin di kawasan Jawa Tengah yang berdiri pada tahun 1750 an. Tak heran pondok Maz'roatul 'Ulum Damaran memiliki kontribusi urgen dalam mencetak ulama besar yang tersebar di Indonesia termasuk Beliau KH. Sholeh Darat Semarang. Dalam perjalanan kepengasuhan pesantren tersebut sudah 9 generasi sampai sekarang termasuk diantaranya adalah KH.R. Asnawi, KH. Arwani Amin, dan sekarang diasuh oleh KH. A. Bahauddin Nursalim (Gus Baha). Dan dalam perjalanan basis kepesantrenan Pondok Pesantren Maz'roatul 'Ulum sempat mengalami pergantian, yang awalnya berbasis salaf dengan fokus kajian kitab-kitab kuno menjadi pesantren Tahfizul Qur'an hal ini mengakibatkan perubahan pada strategi dan metode pembelajarannya. Dan metode At-Taysiir merupakan metode yang di gagas oleh Pesantren Maz'roatul 'Ulum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan field research (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai insrumen kunci. Metode ini mencoba meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun objek kajian dalam penelitian ini adalah pembelajaran makhorijul huruf dan tajwid di Pondok Pesantren Maz'roatul 'Ulum dengan metode At-taysiir.

Kata Kunci: *Pesantren; metode at-taysiir; makhroj dan tajwid*

Abstract:

Pondok Pesantren Maz'roatul 'Ulum Damaran 78 Kudus is the oldest Pesantren Hut in Kudus even maybe in the Central Java area which was established in the 1750s. No wonder Maz'roatul 'Ulum Damaran hut has an urgent contribution in printing great scholars spread in Indonesia including He KH. Sholeh Darat Semarang. In the course of the fulfillment of the pesantren has been 9 generations until now including KH.R. Asnawi, KH. Arwani Amin, and now taken care of by KH. A. Bahauddin Nursalim (Gus Baha). And in the course of the leadership base of Pondok Pesantren Maz'roatul 'Ulum had experienced a change, which was originally based on salaf with the focus of studying ancient books into pesantren Tahfizul Qur'an this resulted in changes in its learning strategies and methods. The At-Taysiir method is a method that was stuttered by Pesantren Maz'roatul 'Ulum. This research uses qualitative type research methods with a field research approach. Qualitative research is research based on the philosophy of postpositivism, used to examine the condition of natural objects, where the researcher is as a key insrumen. This method attempts to examine the status of a group of people, an object, a condition, a system of thought or a class of events in the present. The object of study in this study is the learning of makhoriijul letters and tajwid at Pondok Pesantren Maz'roatul 'Ulum with the At-taysiir method.

Keywords: *Pesantren; at-taysiir method; makhroj; tajwid*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan lembaga yang punya potensi besar dalam memberikan solusi (*problem solver*). Salah satu lembaga pendidikan yang peduli akan tersebut adalah pesantren. Mengangkat signifikansi peran pondok pesantren dalam pembentukan dan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan Islam, di Indonesia nyaris tidak perlu diperdebatkan dan diragukan lagi. Jauh sebelum Indonesia merdeka instansi yang di bidani oleh ulama (Kyai) ini hadir di bumi nusantara. (Abd. A'la, 2016: 97)

Kedudukan pondok pesantren hampir-hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan tempat pendidikan Islam berupa Pesantren. (Nasharuddin Umar, 2014: X) Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang pertama di Indonesia. Bahkan Yasmadi (2002: 59) mengatakan bahwa Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Artinya bahwa lembaga pendidikan yang berbentuk pesantren dapat dikatakan lembaga pendidikan khas dari Indonesia.

Lembaga pendidikan Islam tertua ini sudah dikenal semenjak agama Islam masuk ke Indonesia. Sejarah pondok pesantren merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah pertumbuhan masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan bahwa semenjak kurun kerajaan Islam pertama di Aceh abad-abad pertama Hijriyah, kemudian di kurun walisongo sampai permulaan abad ke-20 banyak dari para wali dan ulama yang menjadi cikal-bakal Desa baru. Pengakuan masyarakat atau jamaah sekalilingnya atas kehadiran seorang Kyai atau Ulama merupakan modal dasar bagi berdirinya suatu pondok pesantren dan dari pesantren inilah kelak terbentuknya suatu masyarakat dan desa baru. Dalam sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, kedudukan pondok pesantren selalu berada di depan. (Marwan Saridjo dkk, 1979: 7)

Pesantren selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam. Namun demikian, sesungguhnya pesantren turut memainkan peranan yang cukup signifikan dalam membina dan mengembangkan SDM untuk menggapai keunggulan (*excellence*). Sebagai lembaga pendidikan Islam pondok pesantren sepanjang sejarahnya telah berperan besar dalam upaya-upaya meningkatkan kecerdasan dan martabat manusia. (M. Fajrul Falakh, 1999: 134)

Sejarah yang dilalui memperlihatkan bahwa pesantren bukan sekadar mampu menjaga kebertahanan dari terpaan zaman, tetapi juga dapat merawat perkembangannya yang terus meningkat dari saat ke saat. Menurut data yang ada, lembaga ini pertama kali didirikan, khususnya di tanah Jawa, pada abad ke-15 oleh Maulana Malik Ibrahim (salah satu walisongo tertua) dan kemudian ditumbuh kembangkan oleh para walisongo yang lain pada akhir abad ke-19. (abd A'la, 2016: 97)

Dari data yang di akses dari website Ditpontren kemenag.go.id, Indonesia adalah pemilik jumlah pesantren terbanyak. Dari Sabang hingga Merauke, dari Melauboh hingga pulau Rote data saat ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 27.722 dengan jumlah santri sebanyak 4.175.531 yang tersebar meluas di seluruh tanah pusaka ini. (ditpdpontren.kemenag.go.id, 2022) Hal tersebut merupakan pesantren mempunyai peran besar dalam corak pendidikan di Indonesia.

Selain menjadi tempat untuk pembinaan moral kesalehan santri dan pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam, pesantren seyogyanya perlu juga melakukan diversifikasi keilmuan unggulan khusus dan atau melakukan diversifikasi keahlian praktis tertentu. Artinya, setiap pesantren perlu membuat satu keunggulan (nilai plus) tertentu yang membedakan pesantren satu dengan pesantren lainnya, misalnya dengan meningkatkan keunggulan dalam keahlian ilmu tertentu seperti keunggulan keahlian dalam tahfizul Quran dan pendalamannya, kajian hadits, atau disiplin ilmu agama tertentu, atau bisa juga dalam bentuk keahlian praktis lain misalnya keahlian bahasa atau keahlian pertanian.

Beberapa pesantren di tanah air telah mencoba melakukan hal seperti itu terbukti telah menunjukkan keberhasilan, seperti Pesantren Yanbuul Qur'an Kudus dengan *tahsin* dan *tahfiz* nya, Gontor dengan penekanan pada aspek kemampuan berbahasa asing (Arab dan Inggris), dan Pesantren Darul Falah Bogor yang membekali santri dengan keahlian pertanian. Dalam memasuki dunia yang semakin kompetitif, pesantren-pesantren semacam itu perlu terus dikembangkan, bahkan kalau memungkinkan variasi kompetensi perlu diperbanyak lagi. Misalnya di bidang keahlian keilmuan ada pesantren yang menambah nilai *plus* nya dengan kepakaran dibidang *tafsir*, *fiqh*, *aqoid*, ilmu *falak*(astronomi), dan sebagainya. Di bidang keahlian praktis misalnya perlu ada pesantren bercorak nelayan, pesantren otomotif, pesantren elektronik dan sebagainya. yang semuanya itu kalau diteliti sumbernya adalah Al Quran dan Hadits.

Al-Qur'an mukjizat yang paling besar dari segala mukjizat yang pernah diberikan Allah Swt kepada seluruh Nabi dan Rasul-Nya karena al-Qur'an bukan saja untuk mematahkan segala bantahan dan argumen kaum musyrikin kepada kebenaran wahyu yang dibawah Rasulullah Muhammad Saw, tetapi ia juga ditujukan kepada seluruh umat manusia. Al-Qu'an sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad Saw, isinya tidak bertentangan dengan teknologi modern, bahkan mengungkapkan kebenaran al-Qur'an. Di antara ayatayat al-Qur'an yang mengungkapkan tentang masalah teknologi modern adalah: Angin disebut al-Qur'an, mengawinkan tumbuhtumbuhan dan lain-lain dalam QS. al-Hijr (15):22:

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَافِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ

Artinya: *"Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuhtumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamudengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya"*.

Mengingat pentingnya peran AlQur'an bagi kehidupan manusia, maka pengenalan Al-Qur'an mutlak diperlukan. Upaya mengenalkan AlQur'an itu bukan hanya mengetahui dari segi fisik dan aspek sejarah semata, namun yang lebih penting adalah bagaimana umat Islam mampu membaca sekaligus memahami makna terkandung dalam butir-butir ayat demi ayat dari Al-Qur'an. (Fintri Indriyani, 2015)

Agar mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah dan aturan maka dibutuhkan yang namanya ilmu tajwid dan makhraj. Maka dengan ilmu tajwid dan makhraj akan diketahui cara membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, umat Islam wajib mempunyai pedoman belajar agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca al-Quran dan membacanya tidak sia-sia, yaitu dengan Ilmu tajwid dan makhraj. (Roudhotun Ni'mah, 2021) Dikarenakan mempelajari tajwid hukumnya wajib maka dibutuhkan metode-metode tertentu dalam pembelajaran tajwid dan makhraj sebagai mana metode *At-taysiir* di Pondok Pesantren Mazroatul Ulum damaran Kudus Jawa Tengah.

Pembelajaran tajwid dan Makhraj diterapkan betujuan, *pertama* untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam membaca Al-Qur'an yang hal tersebut membawa kepada perubahan arti. *Kedua* adalah untuk membantu memahami Al- Qur'an dengan baik dan benar. Selain itu Pembelajaran Tajwid dan makhraj di Pondok Pesantren Mazroatul Ulum bertujuan untuk mempersiapkan santri yang akan memasuki tingkat *tahfiz Al-Quran*(menghafal Alquran).

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan/dilingkungan tertentu. (Mahmud, 2011: 89) Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti melakukan studi ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit tentang Pelaksanaan "*Metode At-Taysiir Dalam Pembelajaran Makhorijul Huruf dan Tajwid di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Mazro'atul 'Ulum Damaran Kudus*"

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai insrumen kunci. Metode ini mencoba meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. (Moh. Nazir, 1988: 63) Pendekatan kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. (Anselm Straus dan Juliantn Corbin, 2003: 4)

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah memahami sistem makna yang menjadi prinsip umum dari suatu gejala yang ada dalam kehidupan suatu masyarakat. (Mahmud, 2011: 91) Dalam objeknya penelitian ini berfokus pada metode pembelajaran *At-taysiir* di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Mazro'atul 'Ulum Damaran Kudus yang juga menjadi salah satu khazanah pedagogi metode pembelajaran pesantren.

PEMBAHASAN

A. Pesantren

Pesantren sesungguhnya merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, yang secara nyata telah melahirkan banyak *ulama'*. Tidak sedikit tokoh Islam lahir dari lembaga pesantren. Bahkan Prof.Dr.Mukti Ali pernah mengatakan bahwa tidak pernah ada ulama yang lahir dari lembaga selain pesantren. (Imam Syafi'i, 2017) Istilah "pesantren" berasal dari kata pe-"santri"-an, dimana kata "santri" berarti murid dalam bahasa Jawa. Istilah "pondok" berasal dari bahasa Arab "*funduuq*" (فونءوق) yang berarti penginapan. Khusus di Aceh, pesantren disebut juga dengan nama "*dayah*".

Biasanya pesantren dipimpin oleh seorang kyai. Untuk mengatur kehidupan pondok pesantren, kyai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya, mereka biasanya dalam pesantren *salaf*(tradisional) disebut "*lurah pondok*". Tujuan para santri dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka adalah agar mereka belajar hidup mandiri agar dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan kyai dan juga Tuhan. Ada beberapa elemen pesantren yang membedakan dengan lembaga pendidikan lain, yaitu; (1) pondok tempat menginap para santri, (2) santri: peserta didik, (3) masjid: sarana ibadah dan pusat kegiatan pesantren, (4) kyai: tokoh atau sebutan seseorang yang memiliki kelebihan dari sisi agama, dan kharisma yang dimilikinya, (5) kitab kuning: sebagai referensi pokok dalam kajian keislama. Di awal munculnya pesantren, pembelajarannya bersifat nonklasikal, dimana seorang kyai mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam yang ditulis pada abad pertengahan.

B. Profil Pondok Pesantren Mazro'atul 'Ulum

Pondok pesantren Mazro'atul 'Ulum terletak kurang lebih 30 meter di sebelah barat kompleks pemakaman Sunan Kudus. Nama "*Mazro'atul 'Ulum*" pertama kali di kenal sejak era kepengasuhan KH. Noor Muttaqien yang konon katanya nama tersebut adalah pemberian sang guru, yakni KH. Arwani Amien. Sebelumnya, Pondok pesantren Mazro'atul 'Ulum sering dikenal dengan "*Pondok Damaran 78*", hal ini dikarenakan pesantren tersebut terletak di desa Damaran dengan nomor bangunan 78. Meskipun di desa Damaran terdapat beberapa pesantren, akan tetapi penyebutan pondok pesantren Mazro'atul 'Ulum dengan sebutan "*Pondok Damaran*" ini sudah menjadi hal yang lazim dikarenakan pondok pesantren tersebut adalah pesantren tertua di kawasan tersebut. (Dokumentasi)

Menurut informasi sejarah yang penulis dapat dari *ndalem*, pondok Damaran ini berdiri sejak tahun 1750 TU. Pendirinya adalah KH. Sholeh bin KH. Asnawi Sepuh. Akan tetapi menurut rumor yang beredar, pengajian berbasis salaf ini telah dimulai sejak era KH. Asnawi Sepuh, namun pada saat itu belum terdapat bangunan pesantren.

Di usia 272 tahun ini, ada banyak ulama' yang tercetak dari pesantren tersebut. Salah satu santri angkatan pertama yang menghuni pondok Damaran adalah Kai Sholeh Darat Semarang di era kepengasuhan KH. Sholeh bin Asnawi Sepuh. Tak heran jika KH. Sholeh bin Asnawi Sepuh dan KH. Asnawi Sepuh ini dijuluki sebagai "*bapaknya para kiai jawa*".

Genealogi kepengasuhan pondok pesantren Maro'atul 'Ulum telah mencapai sembilan generasi. Setelah pendiri dan pengasuh pertama wafat,, yakni KH. Sholeh bin Asnawi Sepuh, kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu KH. Ma'shum bin KH. Sholeh. Sepeninggalan KH. Ma'shum, kepengasuhan pesantren dilanjutkan oleh putranya, yaitu KH. Fauzan. Beliau adalah salah seorang yang berpengaruh di masyarakat luas, dan juga organisai, terlebih organisasi NU, terbukti beliau juga turut di undang dalam acara muktamar NU di Bandung pada tahun 1932 TU.

Dikarenakan pernikahan KH. Fauzan dan sang istri yakni Ny. Hj. Munijah hanya dikaruniai seorang putri yang bernama Ny. Hj. Azizah, maka kepengasuhan selanjutnya dipasrahkan kepada menantu beliau yang merupakan suami dari Ny. Hj. Azizah yakni KH. Muslihan bin Adjhuri. KH. Muslihan merupakan kakak kandung dari KH. Turaikhan Adjhuri sang maestro falak dari Kudus.

Namun pernikahan KH. Muslihan dengan Ny. Hj. Azizah juga hanya dikaruniai seorang putri, yakni Ny. Hj Aminah. Sehingga pada saat KH. Muslihan wafat, pondok pesantren Mazro'atul 'Ulum mengalami kekosongan kepengasuhan. Oleh sebab itu kepengasuhan pesantren dipasrahkan kepada KHR. Asnawi yang merupakan cucu keponakan dari KH. Sholeh Asnawi yang juga termasuk salah satu pendiri Jamiyyah Nahdlotul Ulama'. Akan tetapi beliau tidak bermukim di ndalem inti pesantren, karena masih ditempati oleh Ny. Hj. Munijah dan cucunya, Ny. Hj. Aminah.

Setelah KHR. Asnawi wafat, kepengasuhan dilanjutkan oleh KH. Arwani Amin. Beliau adalah murid dari KHR. Asnawi. Pada saat itu, beliau berkedudukan sebagai pengasuh sedangkan Ny. Hj. Munijah sebagai pemegang penuh kuasa pesantren. Diera kepengasuhan KH. Arwani inilah terjadi revormasi basis pesantren. Yang semula berbasis pesantren kitab dengan fokus kajian kitab-kitab salaf, berubah menjadi pesantren tahfidhul qur'an yang mencetak generasi-generasi penghafal qur'an sampai sekarang. Pada tahun 1970 beliau mendirikan pesantrennya sendiri yang diberi nama Yanbu'ul Qur'an. Sehingga pada tahun 1971 TU. pengasuh pesantren damaran digantikan oleh KH. Nor Muttaqien, yang merupakan murid beliau.

Disamping itu, KH. Nor Muttaqien juga dinikahkan dengan Ny. Hj. Aminah atas dawuh KH. Arwani. Sampai akhir hayat beliau pada tahun 2004, pernikahan beliau dengan Ny. Hj. Aminah tidak dikaruniai putra. Setelah KH. Noor Muttaqin wafat, kemudian tahta kepengasuhan pesantren dipegang oleh Ny. Hj. Aminah. Pada saat itu beliau menunjuk salah seorang santri untuk

menjadi putra angkat beliau dan mengurus semua santri. Santri tersebut adalah KH. Ali Imron Zubaidi. Sejak saat itu, beliaulah yang menerima setoran hafalan para santri dan mengurus semua tata kepesantrenan sampai sekarang.

Pada tahun 2019, Ny. Hj. Aminah kembali kerahmatullah. Akan tetapi beliau berpesan kepada KH. Ahmad Bahaudin Nur Salim (Gus Baha) untuk menjadi penerus pengasuh pondok pesantren Mazro'atul 'Ulum. Sehingga sejak saat itu, pesantren Mazro'atul 'Ulum di asuh oleh dua Pengasuh. Yakni, mulai tahun 2019 sampai sekarang Gus Baha berkedudukan sebagai Pengasuh utama, sedangkan KH. Ali Imron Zubaidi sebagai pengasuh II dan pengasuh harian.

C. Tajwid dan Makhraj

Ilmu tajwid adalah ilmu tentang cara baca al-Quran secara tepat, yaitu dengan mengeluarkan bunyi huruf dari asal tempatnya (*makhraj*), sesuai dengan karakter bunyi (*sifat*) dan konsekuensi dari sifat yang dimiliki huruf tersebut, mengetahui dimana harus berhenti (*waqaf*) dan dimana harus memulai bacaannya kembali (*ibtida'*). Hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, tetapi menerapkan ilmu tajwid pada bacaan al-Quran itu hukumnya menjadi fardu 'ain bagi orang islam laki-laki dan perempuan. Tujuan adanya ilmu tajwid adalah agar umat Islam bisa membaca al-Quran sesuai dengan bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sebagaimana al-Quran diturunkan. Oleh karena itu membaca al-Quran sesuai dengan tajwid merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Muzammil ayat 4:

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

Artinya: "Atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah al-Quran itu dengan perlahan-lahan". (QS. Al-Muzammil/73: 4).

Pada ayat diatas, perlahan-lahan yang dimaksud yaitu tartil, artinya membaca al-Quran dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru, dengan bacaan yang baik dan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya. (Muh. Fatihuddin dan Abd. Majid Abror, 2020)

Adapun Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf ketika huruf tersebut dibunyikan atau diucapkan. Kedua hal tersebut sangat berkaitan untuk menuju pembacaan Qur'an yang benar dan baik menurut riwayat tertentu.

D. Metode Pembelajaran *At-taysiir*

Metode *At-taysiir* merupakan salah satu diantara banyak metode dalam belajar membaca Al Qur'an beserta tajwidnya. Metode ini lahir atau digagas oleh dewan asatidz Pondok Pesantren Mazro'atul 'Ulum Damaran 78 Kudus Jawa Tengah dari riwayat Imam Ashim dari Imam Hafsh. Metode *At taysiir* adalah sebuah tehnik yang menerapkan pengajaran ayat-ayat Al-Quran dengan memperbaiki bacaan per huruf hijaiyyah yang sesuai ilmu tajwid disertai penguasaan huruf dan sifat huruf. Metode ini merupakan sebuah pengajaran yang telah diterapkan para ulama salaf yang menekankan pada praktik perhafalan huruf hijaiyyah disertai dengan penguasaan *makharijul huruf* (tempat keluarnya huruf) dan *shifatul huruf* (sifat-sifat huruf) yang sesuai dengan ilmu tajwid. (Buku Panduan, 2013) Dalam metode *At-taysiir* tersusun dari 2 jilid kitab atau buku yang diterbitkan oleh pesantren Mazroatul ulum Damaran sendiri berbahasa Indonesia.

1. Aplikasi metode *At-taysiir*

Dalam penerapannya perlu mengetahui mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam metode ini, yaitu tentang *makharijul huruuf*, proses kejadian huruf, beberapa tempat yang menjadi pusatnya huruf, dan *sifatul huruf*. Berikut dibawah ini:

a. *Makharijul huruf*

Adalah tempat keluarnya huruf ketika huruf tersebut dibunyikan atau diucapkan.

b. Proses kejadiannya huruf

Proses kejadiannya huruf adalah pertama huruf itu dari suara, sedang suara itu bbahannya dari nafas yang ddpasang oleh Allah disetiap makhluk hidup yang bernyawa. Nafas adalah angin yang dikeluarkan dari dalam dada sampai dengan mulut. Angin atau udara yang keluar dengan tekanan biasa namanya nafas, kalau dengan tekanan kuat akan menjadi suara. Suara kalau dipusatkan ditempat tertentu akan menjadi huruf.

c. Pusat keluarnya huruf

Terdapat lima tempat keluarnya huruf yaitu: *Jauf*, *al halq*, *lisan*, *Assyafatain* dan *Al Khoisyum*. Didalam lima tempat tersebut mengeluarkan 17 *makhraj* dan 17 *makhraj* itu mengeluarkan 29 huruf(hijaiyyah).

d. Sifaat-sifat huruf

Menjelaskan tentang sifat-sifat huruf yaitu suatu huruf dapat diketahui ciri dan cara serta gaya dan model masing-masing huruf seperti gaya *hams* (nafas dilepas) atau *jahr*(nafas ditahan) dan lain-lain. Dan sifat yang melekat pada huruf yang mempunyai lima sifat, enam sifat, hingga tujuh. Sifat-sifat bacaan yang menetap pada huruf itu semuanya ada 19 sifat, yang terdiri dari 10 sifat yang berlawanan (yakni 5 sifat yang lemah dan 5 sifat yang kuat) dan 9 sifat yang tidak berlawanan.

2. Teknik pengajaran bagi Ustadz Pembimbing *makharijul huruf*

Dalam metode At-taysir terdapat pedoman yang harus dipegang dan di terapkan oleh ustadz pembimbing saat menjajarkannya yaitu:

- a. Pembimbing mempunyai niat baik dan ikhlas karena Allah
- b. Salam pembuka mengawali pembelajaran
- c. Santri membaca doa *Kalamun*, dilanjutkan membaca surat Al fatihah dan membaca bacaan tahiyat yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk pembimbing sebelum membaca surat al fatihah, membaca tawassul kepada *masyayih* semoga mendapat ridho Allah Swt.
- d. Terrangkan tempat keluarnya huruf, sifat-sifat huruf dan contohkan secara benar cara melafalkan huruf secara baik.
- e. Santri menghafalkan tempat keluarnya huruf (makhraj) dan dan *shifatul huruf* (sifat-sifat huruf).
- f. Setelah hafal, santri maju satu persatu dihadapan pembimbing untuk mempraktikkann hafalan dan huruf secara benar disertai dengan contoh yang sesuai dengan huruf yang diajarkan.
- g. Durasi sekitar 10 menit untuk mentashih dihadpan pembimbing.
- h. Berikan centangan dalam kartu makhraj apabila santri sudah sempurna melafalkan huruf yang diajarkan.
- i. Tidak diluluskan apabila santri belum sempurna cara bacaan makhraj menurut kaidahnya.

Dalam satu majlis kegiatan berlangsung satu ruangan diisi sekitar 12 murid atau santri dan 1 Pembimbing untuk memaksimalkan pembelajaran dengan durasi satu jam pembelajaran.

3. Evaluasi

Dalam evaluasi pembelajaran metode *At-taysiir* terdiri atas:

- a. Pertanyaan mengenai *makharijul huruf* (tempat keluarnya huruf) dan sifat-sifatnya.
- b. Mencari contoh di dalam Al-Quran sesuai huruf yang dipelajarinya.

4. Daftar isi Buku *At-taysiir*

a. Buku 1

Buku ini di susun oleh dewan *Asatidz* Mazroatul Ulum daan terbitkan oleh Pondok Pesantren Mazroatul Ulum berbahasa Indonesia dengan tebal 37 halaman adapun edisi cetaknya sudah mengalami beberapa kali cetak. Yang berisi:

- a) Bagan *makharijul huruf*
- b) Sifat huruf yang berlawanan
- c) Sifat huruf yang tidak berlawanan
- d) Al jauf
- e) Al Halqi
- f) Al lisan
- g) Al khoisyum
- h) *Khatimat* (penutup)

b. Buku 2

Buku ini di susun oleh dewan *Asatidz* Mazroatul ulum dengan riwayat Imam Hafs dari Imam 'Asgim diterbitkan pertamakali oleh Pondok Pesantren Mazroatul Ulum pada tahun 2013 berbahasa Indonesia dengan tebal 96 halaman adapun edisi cetaknya sudah mengalami beberapa kali cetak. Yang berisi tentang:

- a) Muqadimah (pembukaan)
- b) Tawasul
- c) Silsilah imam-imam Qiraah (sanad qiraah Sab'ah)
- d) Silsilah sanad qiraah imam Hafs
- e) Doa-doa
- f) Hukum-hukum Ilmu Tajwid
- g) Makharijul Huruf
- h) Gharaibul qiraat
- i) Sholawat quraniyyah
- j) Khatimah (Penutup)
- k) Daftar Pustaka

5. Sistematika keterangan Buku *At taysiir*

Untuk memudahkan dalam memahami keteeerantgan dalam buku metode At-taysiir telah dilengkapi berbagaiketerangan:

- a. Tempat makharijul huruf
- b. Sifat-sifat huruf
- c. Cara pembacaan
- d. Contoh
- e. Gambar
- f. Keterangan
- g. Evaluasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan tempat pendidikan Islam berupa Pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang pertama di Indonesia. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang didalamnya biasanya dipimpin oleh pengasuh yang disebut “Kyai” dan terdapat santri, asrama santri, tempat mengaji, serta biasanya terdapat mushala atau masjid didalamnya. Pembelajaran di pesantren adalah ilmu-ilmu islam yang bersumber dari Alquran dan hadist seperti Tauhid, tajwid, nahwu, sorof, fiqih tafsir dan lain sebagainya. Metode yang digunakan biasanya menggunakan metode-metode klasik turun temurun, namun seiring perkembangan zaman banyak metode yang ditemukan dan digunakan dalam proses pembelajaran dipesantren.

Metode *At-taysiir* merupakan salah satu diantara banyak metode dalam belajar membaca Al Qur’an beserta tajwidnya. Metode ini lahir atau digagas oleh dewan asatidz Pondok Pesantren Mazro’atul ‘Ulum Damaran 78 Kudus Jawa Tengah dari riwayat Imam Ashim dari Imam Hafsh. Metode At taysiir adalah sebuah tehnik yang menerapkan pengajaran ayat-ayat Al-Quran dengan memperbaiki bacaan per huruf hijaiyyah yang sesuai ilmu tajwid disertai penguasaan huruf dan sifat huruf.

Ilmu tajwid merupakan hal yang paling penting dalam memahami bacaan AlQur’an, dan masuk pada bagian materi ruang lingkup pembelajaran Al-Qur’an. Pembelajaran tajwid dan Makhraj diterapkan bertujuan, *pertama* untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam membaca Al-Qur’an yang hal tersebut membawa kepada perubahan arti. *Kedua* adalah untuk membantu memahami Al- Qur’an dengan baik dan benar) selain itu Pembelajaran Tajwid dan makhraj di Pondok Pesantren Mazroatul Ulum bertujuan untuk mempersiapkan santri yang akan memasuki tingkat *tahfiz Al –Quran*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. A'la. *Strategi Pesantren Menuju pendidikan Internasional: Pendidikan Islam memajukan umat dan memperkuat bela negara*, (Jakarta: Kencana, 2016), 97. Cetakan pertama
- Nasharuddin Umar, *Rethinking Pesantren*, (Jakarta: Quanta, 2014), X
- Yasmadi, *Modernisasi Pesantren, Kritik Nurcholish Madjid terhadap Pendidikan Islam tradisional* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 59.
- Drs. Marwan Saridjo, Drs Abd. Rachman Shaleh, dan Mustofa Syarif, BA., *sejarah pondok pesantren di Indonesia*, (Jakarta: Dharma Bhakti, 1979), 7.
- M. Fajrul Falakh, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 134.
- Abd. A'la. *Strategi Pesantren Menuju Pendidikan Internasional: Pendidikan Islam Memajukan Umat dan Memperkuat Bela Negara*, 97.
- "Statistik Pesantren, Pangkalan Data Pondok Pesantren,"* ditpdpontren.kemenag.go.id. diakses Senin 23 Mei 2022. <http://pbsb.ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/>.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pustaka Setia, Bandung, 2011), 89.
- Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988), 63.
- Anselm Straus dan Juliantn Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Terj. Muhammad Shodiq Dan Imam Muttaqin. (Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2003), 4.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, 91.
- Imam Syafe'i. "PONDOK PESANTREN: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter" *Jurna Al-Tadzkiyyah: I, Volume 8, Mei 2017* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, ISSN: 20869118 E-ISSN: 2528-247

Muh. Fatihuddin dan Abd. Majid Abror *“Edukasi Ilmu Tajwid Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran Santri Pondok Pesantren Hidayatul Mustaqim Bulusari Tarokan Kediri”* Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa Volume 1, Number 3, Institut Agama Islam Faqih Asy’ari Kediri, Indonesia Desember 2020 e-ISSN: 2745-5947 <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/jpmd>

Fintri Indriyani *“Rancangan Pembelajaran Ilmu Tajwid Berbasis Multi Media Untuk Siswa Tingkat Dasar Pada Taman Pendidikan Al-Qur’an Dta At-Taqwa”* Jurnal PARADIGMA Vol. XVII. No.2 September 2015 ter Bina Sarana Informatika AMIK BSI Jakarta

Roudhotun Ni’mah *“Meningkatkan Mutu Membaca Al-Qur’an Melalui Metode Yanbu’a Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021”* Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman Vol. 7, No. 2 Juli-Desember 2021

Data Pondok Pesantren Mazrolatul Ullum Damaran 78 Kudus 2022

Implementation of Interreligious Tolerance For Muslim Minority Communities

Abdul Aziz, Siti Khusniyati Sururiyah, Azizah Reni Ismawati, Nurjanah,
Aniqoh, Najanuddin

azizsanje551@gmail.com
STAI Nahdlatul Ulama Purworejo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendepelintikan tentang kondisi keagamaan masyarakat di Dusun Daratan III Sendangarum, bagaimana implementasi toleransi antar umat beragama bagi masyarakat Muslim minoritas, dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat terjadinya toleransi di Dusun Daratan III Desa Sendangarum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mengambil lokasi di Dusun Daratan III Desa Sendangarum Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan/ verifikasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa toleransi antar umat beragama bagi masyarakat muslim minoritas di Dusun Daratan III Desa Sendangarum berjalan dengan sangat baik hidup berdampingan antar satu sama lain tanpa adanya perselisihan apapun, meskipun hidup di dalam lingkungan yang minoritas muslimnya dari pada yang non Muslim, itu tidak menjadi masalah bagi masyarakat Dusun Daratan III Desa Sendangarum. Faktor pendukung berjalannya toleransi di Dusun Daratan III Desa Sendangarum adalah adanya kebersamaan dan kekompakan warga seperti kerja bakti dan kumpulan warga, adanya musyawarah dalam setiap penyelesaian masalah, dan adanya pengaruh positif tinggi dari masyarakat sehingga menjadikan mereka mengenali satu dengan yang lainnya walaupun berbeda agama. Faktor penghambat berjalannya toleransi di Dusun Daratan III Desa Sendangarum yaitu adanya sikap saling tidak terbuka terhadap lingkungan sekitar, adanya oknum warga yang kurang memiliki sikap toleransi dan adanya oknum warga yang kurang bisa diajak kerja sama.

Kata Kunci: toleransi; umat beragama; muslim minoritas.

Abstract

This study aims to describe the religious conditions of the people in Dusun Darat III Sendangarum, how the implementation of inter-religious tolerance for the Muslim minority community, and to find out what are the supporting and inhibiting factors for tolerance in Dusun Darat III, Sendangarum Village. This research is a qualitative descriptive study which took place in the hamlet of Mainland III, Sendangarum Village, Kapanewon Minggir, Sleman Regency, Yogyakarta. Techniques used in data collection are observation, documentation and interviews. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification.

The results of this study indicate that inter-religious tolerance for the minority Muslim community in Dusun Darat III, Sendangarum Village is going very well living side by side with each other without any disputes, even though they live in an environment where the Muslim minority is rather than non-Muslim. not a problem for the people of Dusun Mainland III, Sendangarum Village. Factors that support the passage of tolerance in Dusun Darat III, Sendangarum Village, are the togetherness and cohesiveness of the residents such as community service and community groups, the existence of deliberation in every problem solving, and the high positive influence of the community so that they recognize one another even though they have different religions. The inhibiting factors for the passage of tolerance in Dusun Mainland III, Sendangarum Village, are the existence of an open attitude towards the surrounding environment, the existence of unscrupulous citizens who lack tolerance and the existence of unscrupulous residents who are less able to cooperate.

Keywords: *tolerance; religious people; muslim minority.*

INTRODUCTION

Humans are one of the creatures created by Allah SWT in addition to Jinn, demons, animals, plants, and other creatures of the universe. Humans are creatures who are given reason and lust that make them more perfect than other creatures. Because his mind makes him able to think and develop a mindset that then forms a culture. Human culture is different in every place. Then it appears in international areas such as Eastern and Western cultures, which sometimes become the mecca of other countries that are categorized as still developing. Indonesia is a country that has an ideology based on the agreement of the ancestors that is adapted to the cultural, ethnic, religious and geographical conditions of the Indonesian state. At the time of independence, Indonesia had a motto, namely *Bhineka Tunggal Ika*, which means exactly one difference. The motto then becomes the grip of every citizen living in Indonesia in maintaining unity and integrity. These things are then called tolerance.

Tolerance is not only in life in general, in Islam it is called *tasamuh*, namely mutual respect and respect between humans and others. This is also in line with one of the precepts in Pancasila, namely a just and civilized humanity. Where in these precepts highly upholds human rights and dignity without distinction of ethnicity, race, religion, culture and others. Indonesia has six recognized religions, namely: Islam, Christianity, Protestantism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. Globally, Islam is the religion of the majority of the Indonesian nation. However, in some places religions other than Islam sometimes become the majority and Islam becomes the minority.

August Corneles Tamawiy (2019: 191-192) has written about this in a journal on terrorism related to socio-political. Based on this analysis, terrorism was born from the identity crisis of the perpetrator. Because the perpetrators live in an isolated political system and colonize themselves, there is a sense of frustration towards the state which is seen as the guilty person. According to them, acts of terror are considered as an attempt to rebuild their lost identity. Even so, it turns out that social, economic, and political injustice are not the only strongest factors that can encourage terrorists to die in order to fight for the identity of the oppressed group. There is something greater, greater, beyond history, and metaphysics that enables them to do this.

This is shown from the suicide bombing that occurred in Surabaya in May 2018. By taking the decision to take their entire family and their identity cards with them, these terrorists deliberately blew themselves up in churches and the Surabaya Police Headquarters. By looking at the example of the May 2018

Surabaya Bombing, a socio-political analysis alone is not enough to reveal that every religion has the potential to breed violence and even become the basis for acts of terrorism. Economic, sociological, political and anthropological analysis alone is not enough to show the roots of acts of terrorism in Indonesia. Terrorism in Indonesia is a religious issue, more precisely, contains theological elements, and thus becomes a theological issue. (August Corneles Tamawiy, 2019: 193)

Indonesia in the era of President Soeharto discriminated against Chinese citizens. This period of discrimination occurred for approximately 32 years or during the reign of the New Order. Then in the reformation period, Confucians were free from discrimination, because the government at the time of Gus Dur opened the door wide for the existence of the Confucian religion in Indonesia until now. Chinese New Year which is commemorated every year by Confucians in particular and Indonesians in general adds to the richness of culture for the Indonesian people, because Chinese and local cultures are mixed. This makes the Lunar New Year celebration not exactly the same as in China but has its own identity because of the mixing of cultures. (Faur Rasid, 2017: 79)

The beauty of religious tolerance had actually happened several years earlier, one of which was in the era KH. Abdurrahman Wahid or Gus Dur. However, sometimes conflicts arise from several individuals who tarnish tolerance in Indonesia. Such is the case at SMAN 2 Padang where school rules require non-Muslim students to wear a headscarf. However, one of the parents responded that it was included in the lie of identity against his non-Muslim religion. The incident that occurred in Papua began when Muslims were carrying out Eid prayers in the Koramil yard and an unknown group of people set fire to the prayer room and kiosk near the Evangelical Youth Evangelical Awakening Seminar and Service. (Solopos.com, 2021)

As in the case above, it did not only happen in some areas in Indonesia, but also in a hamlet of Mainland III Kapanewon Minggir, Sleman Regency, Yogyakarta, where there have been acts of intolerance between religious communities. The occurrence of intolerance between religious communities, for example there are things that indicate the harassment of one of the religious practices there, the incompatibility of thoughts between religious communities. However, after a deliberation was held between the two religions, they were finally able to live side by side.

This research was conducted in Dusun Daratan III, Sendangarum Village, Sleman, Yogyakarta, because the residents there have a high tolerance value. They do not discriminate against each other both in terms of religion and in terms of the economy, religious leaders, whether Muslim or non-Muslim, are very intolerant, and when there is a citizen who needs help, both material and non-material, they help each other regardless of religion. which he adheres to.

One of the suras in the Qur'an that emphasizes tolerance is QS. Al-Kafirun verses 1-6. In this verse, Allah has explained how the value of tolerance and peace is interfaith. If someone has worshiped the God that he believes in, then he should not worship the God that other people believe in, and vice versa. So that his religion becomes absolute and the religion that other people believe in is also only for him. Based on this verse it can be understood that everyone has the freedom to practice worship and respect each other.

There are several studies that examine the implementation of inter-religious tolerance for minority Muslim communities. For example, Desti Noviantri with the title *The Role of Islamic Education Teachers in Fostering Ethical Tolerance among Religious Students at SMP Negeri Rejotangan Tulungagung*. However, this research only focuses on tolerance in educational institutions and the research subject is not the community. Meanwhile, this research has a social-community subject and is located in a rural area, not an institution. In addition, there is also Nurul Hakim's research, entitled *The Role of Islamic Boarding Schools in Fostering Tolerance for Harmony Between Diverse Peoples* which resulted in a study on the implementation of tolerance in Islamic boarding schools. While this research focuses on the implementation of tolerance in the social environment of society. Here is the gap from the results of previous research with this research.

Based on the above background, it is important to conduct research specifically on "Implementation of Interreligious Tolerance for Minority Muslim Communities: A Case Study in Dusun Darat III, Sendangarum Village, Kapanewon Minggir, Sleman Regency, Yogyakarta". The purpose of this research is to describe the implementation of inter-religious tolerance for the minority Muslim community in Dusun Darat III, Sendangarum Village, Kapanewon Minggir, Sleman Regency, Yogyakarta. In addition to implementation, this study also aims to analyze the supporting and inhibiting factors in the implementation of inter-religious tolerance for the minority Muslim community in Dusun Darat III, Sendangarum Village, Kapanewon Minggir, Sleman Regency, Yogyakarta. This research is expected to add and expand existing knowledge, as a material for consideration and development of future research as well as a foundation for tolerant thinking so that they want to respect followers of other religions.

KAJIAN LITERATUR

Several studies that are relevant and have been carried out by previous researchers, so that they can be used as references and differences in research that the authors examine with previous research include:

First, the research conducted by Desti Noviantri, a student at the Islamic Religious Education (PAI) Faculty of Tarbiyah IAIN Tulung Agung and Teacher Training in 2018 with the title “The Role of Islamic Education Teachers in Fostering Ethics of Tolerance among Religious Students at SMP Negeri Rejotangan Tulungagung”. This study shows that the role of Islamic Religious Education teachers as educators in fostering an ethic of tolerance between religious students at SMP Negeri 1 Rejotangan Tulungagung has been implemented well through various forms of education that become a means of fostering an ethic of tolerance, namely by providing reinforcement and understanding as well as an assessment of education. religion, providing activities that are religious in nature and instilling mutual respect and respect between religious communities.

The difference between the research written by Desti Noviantri and this research is that the previous research discussed the effectiveness of the role of Islamic religious education teachers in fostering an ethic of tolerance between religious students at SMP Negeri 1 Rejotangan Tulungagung in 2018. While the research in this study is about inter-religious tolerance. for the minority Muslim community in Dusun Mainland III, Sendangarum Village, Kapanewon Minggir, Sleman Regency, Yogyakarta. The similarity between this study and previous research is that they both discuss tolerance between different religious communities.

Second, research written by Nurul Hakim, a student of the Faculty of Ushuluddin, Walisongo State Islamic University, Semarang in 2015 entitled, “The Role of Islamic Boarding Schools in Fostering Tolerance of Harmony Between Religious People”. The results of this study indicate efforts through habituation in the daily life of Islamic boarding schools. Pondok Pesantren Saafiyah Az-Zuhri Ketileng Semarang has basically carried out, activities for students in strengthening the religious base by increasing the study of the Koran and religious development both individually and comprehensively. Pesantren’s efforts to develop inter-religious tolerance for santri are carried out through mutual cooperation activities, whether initiated by residents or by pesantren administrators and joint sports and jointly funded environmental security, intended for Pesantren residents and local community members.

Exemplary Kyai The existence of a kyai in an Islamic boarding school Salafiyah Az-Zuhri Ketileng Semarang is an idea and a person who directs where the education of the Islamic boarding school is directed. The Kyai's example, which includes all the attitudes and behavior of the kyai, is usually used as an example, including in fostering inter-religious harmony at the Salafiyah Islamic Boarding School Az-Zuhri Ketileng, Semarang. The learning program in every learning program at the Salafiyah Islamic Boarding School Az-Zuhri Ketileng Semarang, always inserts moral teachings such as doing good to others, tolerance for people of other religions, politeness, sharing with others and so on.

The difference between the research written by Nurul Hakim and the research in this study is that the previous research discussed the Role of Islamic Boarding Schools in Fostering Tolerance for Inter-religious Harmony in 2015 with several steps taken by the teacher. While the author's research is the implementation of inter-religious tolerance for the minority Muslim community in the hamlet of the Land of Sendangarum Village, Kapanewon Minggir, Sleman Regency, Yogyakarta. The similarity between the author's research and previous research is that they both explain tolerance between religious communities.

Third, research written by Muhamad Burhanuddin, a student of the Ushuluddin and Humanities study program at the State Islamic University of Walisongo Semarang in 2016 entitled, "Tolerance between Muslims and Tri Dharma". The results of the study show the stereotypes between Muslims and "Tri Dharma" in Karangturi village, Lasem district, Rembang district. The stereotype is that Chinese people like to be in groups, they distance themselves from social interactions and prefer to live in separate areas. They always cling to the culture of their ancestral country. Their loyalty to Indonesia is at best dubious, at worst, hostile to Indonesia. The Chinese who seem to be siding with Indonesia are not sincere, they only pretend to do it for opportunistic reasons, rather than their true feelings to side with their country and people.

This kind of opportunism is the hallmark of a person who only cares about money, trade and business. They are not like Indonesians who have a sense of devotion to their ideals. On the other hand, it is said that in Java the Chinese have no need to convert to Islam because of the large group of Javanese who have embraced Islam in name only (the Abang). These stereotypes do not really occur in the Lasem area, because only certain groups cannot understand one another with the right view, based on actual

conditions. Every time there are activities that are carried out there must be obstacles or obstacles that come as well as religious guidance carried out at the Raudhatussshalihin Islamic Boarding School in increasing the spiritual intelligence of female students, namely: Lack of time between mentors and female students, (2) low interest of female students in participating in activities, (3) different characters, (4) lack of facilities and infrastructure, (5) supervising teacher education. The results of religious guidance through the dhuha prayer held at the pesantren were effective and good even though some of the santri did not feel anything and only did it to the extent of the rules of the pesantren.

The difference between the research written by Muhamad Burhanuddin and the research in this study is that the previous research discussed Tolerance Between Muslims and Tri Dharma. While the research in this study is about the implementation of inter-religious tolerance for the minority Muslim community in Dusun Darat III, Sendangarum Village, Kapanewon Minggir, Sleman Regency, Yogyakarta. The similarity between the author's research and previous research is that they both explain tolerance between religious communities.

Some of the research results above, there is no similarity in the title of the research at all. Although the title above uses almost similar variables, the objects and results of the research are different from the others. Therefore, the research entitled "Implementation of Interreligious Tolerance for Minority Muslim Communities in Dusun Darat III, Sendangarum Village, Kapanewon Minggir, Sleman Regency, Yogyakarta" deserves to be continued because the title above has not been researched and there are no similarities regarding the object of research.

METODE PENELITIAN

The type of research used in this research is field research, which is a type of research that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people or behaviors that can be observed and interviewed. The data is very scientific data, meaning data that is empirical, rational, and proven true. (M Djamal, 2017: 17) To be able to obtain real data in the field, the researchers went directly to the field. The research method is a qualitative method.

The research approach used is phenomenology with the aim of using Understanding the meaning of something based on everyday experience and understanding. Research that uses a phenomenological approach seeks to understand the meaning of events and interactions with ordinary people in certain situations. (M Djamal, 2017: 9) While the data collection techniques using observation, interviews and documentation. In terms of data collection techniques using data reduction, data encoding and drawing conclusions (verification).

PEMBAHASAN

A. Toleransi Antar Umat Beragama

Tolerance is mutual respect and respect for differences of opinion. (A. Ubaedillah & Abdul Rozak, 2014: 226) The term tolerance also comes from the Latin, "tolerare" which means patient with something. So tolerance is an attitude or human behavior that follows the rules, where one can respect, respect the behavior of others. The term tolerance in the socio-cultural and religious context means attitudes and actions that prohibit discrimination against different groups or groups in a society, such as tolerance in religion, where religious groups are the majority in a society, providing a place for other religious groups to live in the community. environment. However, the word tolerance is still controversial and has received criticism from various circles regarding the principles of tolerance, both from liberals and conservatives. However, inter-religious tolerance is an attitude to respect and appreciate other religious groups. This concept is not against Islam. (Abu Bakar, 2015)

Tolerance always allows and accepts differences both temporarily and for a long time. So that tolerance is the right of every citizen to be treated equally without taking into account religious background, ethnicity, and the nature of a person. What guarantees the realization of tolerance is no longer individuals or certain groups against other groups, but state institutions. Under the umbrella of the constitution, every person or group has the same right to manifest themselves, but at the same time has equal obligations. (Suryana & Rusdiana, 2015: 158)

Tolerance experiences success in the Modern West as a political principle but tolerance, as a virtue of the ethical life of individuals is an idea that dates back to the golden age of Greek philosophy. Modern Western society has institutionalized the idea that state power should be limited, differences of

opinion should be protected and equality of opinion unnecessary for social stability. However, the idea of tolerance that we should allow the freedom of others to find the truth for themselves dates back to Socrates' time. Tolerance according to Socrates assumes knowledge produces wisdom, but wisdom cannot be produced by force but rather tolerant dialogue.

Tolerance in Greek is called *sophrosyne*, which means moderation or taking the middle ground. While the term tolerance comes from the Latin "tolerantia" which means to hold back. Thus tolerance is a term for withholding from things that are considered negative. If it is associated with differences of opinion and belief, then tolerance is an attitude of refraining from using negative ways in dealing with opinions and differences of belief. (Irwan Masduqi, 2011: 6)

B. Forms of Tolerance

Pluralism

Pluralism is a framework in which there are several interactions between groups that show mutual respect, respect and tolerance between human beings. In a multicultural society, ethnic groups can enjoy their equal and equal rights, maintain and protect themselves because they carry out their cultural traditions. Pluralism is closely related to the basis of multiculturalism, ideally a multicultural society is a continuation of pluralism. Multicultural society usually occurs in plural societies. On the other hand, pluralism is nothing without multiculturalism. Pluralism can also be interpreted as an absolute requirement so that a pluralistic Indonesian nation can unite and if a nation that does not respect pluralism is a nation that needs itself. (Elly M. Setiadi & Usman Kolip, 2011: 491)

Pluralism describes the fact that in society there are ethnic groups that are not acculturated in ethnic cultural identity. In general, group cultures like this display different cultural behaviors, for example embracing a different religion from the ethnic majority religion. They display a value system that is different from their ethnic values. Structural pluralism is also formed in society which describes cultural differences between ethnic groups, but these differences only lie in the area of social structure. This means that although ethnic groups have some cultural elements in common with the dominant culture, they always appear with a certain culture (subculture) that is separate from the dominant group. (Suryana & Rusdiana, 2015: 96)

An example of the application of pluralism in Indonesia is when Gus Dur is an inclusive and tolerant kiai figure who does not hesitate to risk his image in defending their rights as citizens. Thanks to his struggle, Gus Dur was nicknamed the Father of Pluralism. The Chinese consider Gus Dur not only the president, but a hero and the father of the Chinese because of the Presidential Decree No. 6/2000 that he issued, the Chinese in Indonesia feel the freedom to express their culture and beliefs.

The Qur'an states that racial and ethnic pluralism must be recognized and that the various racial and ethnic groups must know each other well in order to pave the way for a constructive exchange of ideas and experiences and for them to work together in efforts to develop humanity and the world in which they live together. There are no barriers to cross-representation, whether between races, ethnicities or social status. In fact, marriage with slaves was permitted and even encouraged, in certain cases, a teaching which could lead to the continuous improvement of the condition of the slave and perhaps to the gradual liberation of slavery. (Mohamed Fathi Osman, 2012: 29-30) As explained in QS. Ar-Rum: 22 and QS. Al-Hujurat: 13 which explains about tolerance and harmonization between religious communities.

An example of religious differences occurred during the bloody events that occurred in the 1998-2000 period in Ambon, Maluku. At that time, a prolonged riot broke out between religious community groups involving 43 Christian and Muslim groups. The conflict, which lasted for years and claimed many lives and property, actually started from a conflict between preman from South Sulawesi and a city transportation driver. Then it expanded into a conflict between the Ambonese community group and the Bugis, Buton and Makassar community groups. Because the conflict then involved religion, it later became a conflict between the Ambonese Christian community group and the Ambonese Muslim community group. This conflict became one of the largest and longest conflicts in the country and can be regarded as a national disaster that resulted in the loss of many lives, as well as property. Conflicts involving the name of religion also occurred in North Maluku, which involved two groups of people with different religions. (Suheni Harahap, 2021)

Multiculturalism

The term multiculturalism is not only an acknowledgment of diverse cultures (cultures), but also an acknowledgment that has political, social, economic and other implications. According to the Big Indonesian Dictionary, multiculturalism is a symptom of a person or a society characterized by the habit of using more than one culture. As in the Sociological Dictionary, multiculturalism is a celebration of cultural diversity in a society of diversity which is usually brought about through immigration. Multiculturalism is also a term used to describe a person's view of the variety of life in the world, or cultural policies that emphasize acceptance of the royalty of diversity and various cultures (multicultural) that exist in people's lives regarding values, systems, cultures, habits and politics. what they profess. (Suryana & Rusdiana, 2015: 99-100)

The difference between pluralism and multiculturalism is that pluralism recognizes the existence of pluralism and in a pluralistic society there are differences in treatment, both between members of the community and between community groups, there is a strong domination of the weak, the dominance of the majority over the minority so that conflicts often occur. Meanwhile, multiculturalism requires people to live with tolerance, mutual understanding between cultures and between nations in building a new world. (Suryana & Rusdiana, 2015: 103-104)

An example of multiculturalism in Indonesia when the Youth Pledge was held in 1928 was an awareness of the need to create differences as well as to open up unity and unity when facing the Dutch colonialists later as the forerunner to the emergence of Indonesian nationalism. And another example is in the preparation for Indonesian independence in the BPUPKI sessions where the founders of this republic highly respected the sense of respect for pluralism, difference (multiculturalism) both in social and political contexts. Where the deletion of the seven words in the Jakarta Charter, precisely in the first precept, can be understood as a context of appreciating multiculturalism in a broad sense.

C. Tolerance and Conflict Resolution

Tolerance has enormous benefits in increasing the values of harmony and peace. The existence of tolerance is able to minimize and even eliminate divisions. This means that when religious people always prioritize tolerance, of course the problem of conflict and division will not occur, this can happen because through this attitude of tolerance religious people interact and exchange ideas to understand and respect each other more. In addition to avoiding division, tolerance is also able to strengthen relations between religious communities. In this case, there is a close relationship between religious communities because of the attitude of tolerance. Because it is impossible for a close relationship to just happen without a meeting between one community and another.

Tolerance helps religious communities to get to know each other better, and exchange ideas about things that can be realized together for the sake of creating close relationships and especially creating a just, peaceful and peaceful society. In addition, tolerance is also able to strengthen the faith of religious people. It can be understood that tolerance, especially respecting and respecting people of other religions, is one example of the manifestation of faith itself. Participants' faith was clarified thanks to the encounter or tolerance of religious communities to try to revise the wrong views of the people, the participants' faith was deepened again by knowing and appreciating each other based on the foundation of truth and justice without being affected by the attitudes and behavior of extreme groups.

Then tolerance can also foster a sense of nationalism. As an Indonesian nation, we need to instill Pancasila values in our daily life. Especially related to religious aspects, such as the first precepts of Pancasila. This shows that religion is one of human freedom to believe what they believe. This means that all religious people are given the freedom to worship according to their religion. For that, it is no longer necessary to demand that other religions must be the same as our teachings. (Sejuk, 2021)

The way to avoid horizontal conflicts in society is through several things, including; (1) dodge; (2) make compromises with other parties; (3) active role; (4) reducing conflict; and (5) conflict accommodation. Avoiding here does not mean leaving the problem but forcing one's own will on others and adapting to the wishes of others. And making compromises with other parties is the same as entering into mergers with other parties. In general, there are two ways to avoid conflict, namely by avoiding or joining the positive and negative sides.

In dealing with conflict, there are three roles, namely mediator, facilitator and broker. The mediator plays a role when the conflict takes place, while the facilitator and broker play a role during the fight, if there are physical clashes that have decreased. This stage is often used when conflict prevention or before a conflict takes place. From the existence of social conflicts, there must be a resolution process to reduce the conflicts that occur. There are social conflicts that are temporary and some are permanent which lead to the formation of social integrity. (Suryana & Rusdiana, 2015: 36-37) Meanwhile, conflict resolution can also be done through accommodation. Accommodation has two meanings, namely the process and as a condition or condition. Accommodation as a process is an attempt to defuse a conflict that occurs. While accommodation as a condition or condition is a collaborative interaction within individuals or groups related to the rules in the community environment.

Factors in Conflict

Several factors tend to sharpen inter-group conflict, namely; (1) underlying ideological conflict due to displeasure with the values of other groups; (2) a changing system of social stratification and status mobility which tends to force contacts between individuals and groups who were more or less socially separated; (3) the increasingly sharp struggle for political power to fill the void left by the colonial government, which tends to mix religious differences with political interests; (4) the need to find a scapegoat to concentrate the tension due to rapid social change. (Roland Robertson, 1998: 207)

In addition to the above factors that exacerbate conflict, there are also things that reduce conflict, namely; (1) a sense of belonging to one culture, including the growing importance of nationalism, which places greater emphasis on the similarities that Javanese or Indonesians have in common than on their differences; (2) the fact that religious patterns are not expressed directly in social forms, purely and simply, but through a complicated process, so that religious commitments and commitments to class, neighbors and so on tend to be balanced, so that various individuals and groups emerge. "mixed type", which can act as an intermediary; (3) general tolerance based on something "contextual relativism" which considers certain values something with the context and thus minimizes "missionization"; (4) the steady growth of social mechanisms leading to pluralistic and non-secretistic forms of social integrity in which people with radically different social views and basic values can get along well enough with one another to keep society intact. working. (Roland Robertson, 1998: 208)

D. Tolerance in Abdurrahman Wahid's Perspective

Abdurrahman Wahid is also known as Gus Dur. People often accused him of being a neo-PKI for proposing the repeal of MPRS Decree Number XXV of 1966 concerning the ban on the PKI and the spread of communism and Marxism/Leninism in Indonesia. There are those who claim he has apostatized because he was baptized in the church and defends pluralism and is suspected by conservative groups as an agent of the Jewish Zionists because he is often involved in meetings with Israeli figures. His friends at the Islamic boarding school knew Gus Dur as a refining student but liked to read. NU residents respect him as a charismatic kiai. (Irwan Masduqi, 2011: 132)

For the oppressed minority groups, Gus Dur is an inclusive and tolerant kiai figure who does not hesitate to risk his image in defending their rights as citizens. Thanks to his struggle, Gus Dur was nicknamed the Father of Pluralism. The ethnic Chinese consider Gus Dur not only the president, but a hero and father of the Chinese because of the Presidential Decree No. 6/2000 that he issued, ethnic Chinese in Indonesia feel the freedom to express their culture and beliefs. Gus Dur's uniquely pluralist and tolerant thinking was shaped by a long adventure expedition. Gus Dur grew up in the traditional pesantren of Tebuireng Jombang, Krapyak and Tegalrejo Magelang. From the three Islamic boarding schools, Gus Dur drew on traditional Islamic scientific disciplines such as fiqh, interpretation of the Qur'an, hadith, Sufism and so on. Gus Dur discovered the principle of tolerance which was absorbed from the Prophet's hadith that the seeker of legal truth will get two rewards if he is right and one reward if he is wrong. The seeker of truth is rewarded by God even though he is wrong. Therefore all opinions must be respected and should not be muzzled. (Irwan Masduqi, 2011: 135)

The jargon of tolerance that Gus Dur got at the pesantren was al-Syafi'i; "Our opinion is right but it may be wrong, while yours is wrong but it may be right" (ra'yuna sawabun yahtamilu al-khata' wa ra'yu ghayrina khata'un yahtamilu al-sawab). The jargon explains that the truth of human thought is not absolute and one should not feel right, let alone to mislead the opinions of others. Gus Dur really did not like fanaticism and dogmatic attitude because of that Gus Dur studied al-Shafi'i's tolerant principle which was born from humility, possibly also wrong with himself.

The culture of tolerance in the pesantren environment moves because Sufism occupies a central position. The nuances of Sufism in the pesantren greatly influenced Gus Dur's tolerance and pluralistic views. Tolerance,

moderation, coexistence and other humanistic values are the teachings of Sufism because this is the metaphysical view in Sufism that there is unity among all things that exist. While the differences, diversity and contradictions between human groups, customs. And culture is also superficial. Thus, Sufism teaches respect for differences and low self-esteem. Gus Dur in his tolerance in the form of essays is very supportive especially with the popular slogan "The difference of Muslims is a blessing". Difference should not cause enmity and division but difference is the emergence of compassion in the midst of diversity. This principle later became the national principle of Bhineka Tunggal Ika so that according to Gus Dur, tolerance did not question differences in religion, belief, ethnicity, skin color and social position.

According to Gus Dur, the Qur'an explains that religion is a personal area that cannot be intervened or forced and plurality is a necessity. God did not make humans in one belief because everyone has different opinions. Pluralism for Gus Dur is diversity that recognizes the diversity of Muslims and non-Muslims. This principle must exist in the nation's generation for the sake of the unity of peace and coexistence with the adherents of various religions. With this Gus Dur rejected the death penalty in the case of apostasy (apostasy). Gus Dur continued his studies at the Al-Azhar University in Cairo and the University of Baghdad to get the idea of Islamic reform which is very developed in the Middle East. The oldest Islamic University is Al-Azhar which strongly carries out moderation (*wasatiyyah*) and tolerance (*tasamuh*). Al-Azhar's vision is the same as the vision adopted by NU in realizing Islamic moderation in Indonesia. (Irwan Masduqi, 2011: 135)

In the process of seeking a tolerant Islam, Gus Dur admitted that Gus Dur had followed the ideas of extremists who considered Islam as an alternative religion to Western thought patterns. The influence that Gus Dur gained occurred in the 50s when he was in the Muslim Brotherhood movement in Jombang. However, when Gus Dur saw the fighting between the Muslim Brotherhood and radical ideology and after studying Arab Nationalism in Egypt in the 1950s and Socialism in Baghdad, Gus Dur realized that Islam was a way of life (*shari'ah*) that took and learned from each other. kinds of non-religious ideologies as well as various views of other religions. (Irwan Masduqi, 2011: 139)

Like Willian James in *Varieties of Religious Experience*, Gus Dur realized that his intellectual odyssey was a unique personal experience and would never be felt or experienced by others. Whether Gus Dur's odyssey ended

in cosmopolitan eclecticism, while other people's odyssey brought different results was not a problem for Gus Dur. People's personal experiences are never the same as other people's experiences. Thus, Gus Dur felt he had to respect the diversity of experiences and be tolerant of the thoughts of others.

Gus Dur's experiences living in Egypt, Baghdad, the Netherlands, Germany and France, whether he admits it or not, has enriched his insight into Western culture. This experience was very influential in the formation of Gus Dur's traditionalist as well as modernist thinking. The synergy of various insights from various sources and civilizations has made Gus Dur an ideal figure who appreciates good ancient traditions and is willing to adopt better modern values. Gus Dur finally came to the conclusion that the Islam he thought about and experienced in the process of intellectual pursuit is something unique, which he calls "my Islam", to its character. It should be understood as a personal experience and appreciated by others without having any coercive power. (Irwan Masduqi, 2011: 141)

E. Implementation of Tolerance Between Religious Muslim Minorities

Tolerance in Sendangarum Village, Minggir Sleman

Sendangarum is a village located in the eastern region of Kapanewon Minggir. The history of the formation of the Sendangarum Village is an amalgamation of 2 (two) Kalurahan areas, namely the Old Village of Ngijon and the Old Village of Mainland. Based on the Decree of the Yogyakarta Special Region Government issued in 1957, the two Kalurahan were merged into one with the name Sendangarum Village. The Sendangarum Village Head in 2021 is led by the Sendangarum Village Head as a result of the e-voting for the 2020 simultaneous village head election for Sleman Regency. The Sendangarum Village Head is now held by Wiwik Retno Yulianti, whose address is Ngijon, Sendangarum, Minggir. After about 3 (three) years there was no definitive village head, he was finally inaugurated on December 26, 2020. During the vacancy. The village head of Sendangarum is held by the official of the village head who worked at Kapanewon Minggir, namely Tri Laksana Kodar Raharjo for approximately 2 years. Subsequently, Singgih Budiyanah held the position for approximately 8 months. Sendangarum Village is a small village in Sleman Regency. The definitive list of village heads or lurah before the current period includes R. Citro Diharjo, R. Suto Hadi Wibawa, Djaja Widjaja, Suryono, Suwito (2012-2018) and Wiwik Retno Yulianti (2021-present).

There are only 3 religions in Sendangarum Village, namely Islam, Christianity and Catholicism. There are no residents who are Hindus, Buddhists, Confucians and Beliefs. As stated above, Islam is the religion with the highest number of adherents, followed by Catholicism and Christianity. The number of religious adherents in Sendangarum Village are 2758 Muslims, 987 Catholics and 39 Christians. Meanwhile, the number of religious adherents of Dusun Mainland III, Sendangarum Village, namely Islam is 112 people and Catholic is more than 315 people. While the worship facilities in Sendangarum Village, there are 15 mosques and prayer rooms, 1 chapel and no places of worship other than the two.

Based on the findings from interviews, Dusun Darat III, Sendangarum Village, Kapanewon Minggir, Yogyakarta Regency in the 1950s had a population of 90% Muslim. At first, before there was a place of worship for all religious circles, the residents of the hamlet carried out worship in their respective homes. This is because there are no facilities for congregational worship. However, at the time of the author's research in 2021, it turns out that the religious conditions in Dusun Darat III have changed, namely the Muslim population has begun to decrease due to the large number of non-Muslim immigrants. So that the Muslim population turned into a minority. A few years later, two places of worship were built for Islam and Catholicism. The mosque as a place of worship was built first, which was initiated by KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Religious Life

Religious life runs between Islam and Catholicism. In its development there is a conflict between religious communities that makes an intolerant so that there is an imbalance in the relationship between religious communities. After the incident, figures from the Islamic religion came to meet Catholic religious leaders with the aim of deliberation so that the next young generation would not engage in activities that make them intolerant. From the deliberation, it was agreed by both parties to return to peace and live in harmony. This was implemented by Catholics coming to the homes of the youths by giving explanations to the parents of the youths so as not to be intolerant between religious communities.

Based on the results of the researcher's observations about the economic conditions, the majority of the residents of Dusun Darat III are farmers and

farm laborers because they can see from the towering rice fields and fertile land. However, here what is more proud of the residents of Dusun Darat III has a side business to help the economy of each family which has been developed for a long time, namely making besek and processing coconut.

Implementasi Toleransi

Tolerance is important for inter-religious harmony. If you look at its implementation, tolerance between religious communities in the hamlet of Mainland III, Sendnagarum Village, Kapanewon Minggir, Sleman Regency, Yogyakarta, can be seen from the socio-religious activities that exist in the community. For example, when a villager dies, the process of managing the corpse depends on their respective religions. If the deceased is a Muslim, then the process of managing the corpse is in an Islamic way and vice versa if the deceased is a Christian, the process for managing the corpse is in a Christian way. Then, in Dusun Darat III when there is a wedding ceremony for one of the residents, they do not look at their religious background and help each other so that the event can be carried out smoothly.

In addition, during Islamic holidays such as Eid al-Fitr, non-Muslims there come to the homes of Muslims as a form of connecting brotherhood ties. On the other hand, when non-Muslims celebrate Christmas, Muslims also wish them a happy holiday. Then when there is mutual cooperation in social activities, such as during the Covid-19 pandemic, the residents of Sendangarum Village help each other by providing raw and cooked food, medicines and other necessities needed by isoman residents regardless of religion. In major national activities such as the commemoration of the independence of the Republic of Indonesia on August 17, residents jointly held competitions and healthy walks which were attended by all residents of Dusun Darat III. On the other hand, during the lurah and regional elections, they help each other regardless of religious background.

Supporting and Inhibiting Actors

Based on the findings in the field, there are supporting factors in the implementation of inter-religious tolerance for minority Muslims there. One of the factors is the existence of good togetherness among each other. According to Veronika, one of the residents there, the supporting factors in the realization of religious tolerance all depend on their inner attitude. In fact,

everyone there does not have an attitude of not hating each other, but on the contrary they respect each other and uphold tolerance. In addition, the role of public figures in this area is nurturing and fair. The majority village leaders uphold the values of peace and togetherness. They are also neutral, not inclined and fanatical to one side. With the neutral attitude shown by these leaders, harmonization can be created in a pluralistic religious life.

Another factor that drives the high value of tolerance for deliberation in every problem solving is the high level of tolerance (*tepo sliro*) in dealing with all existing problems, both social, religious and cultural problems. So, the people there are very obedient to the leader and respect each other's differences of opinion. All problems that exist in society are always resolved through deliberation. The togetherness and cohesiveness of the residents are also factors that support the implementation of tolerance between religious communities there, especially with minority Muslims. Mursih explained, the supporting factor for inter-religious tolerance is the high awareness of the community in every activity in the hamlet. Then according to Agus Waluyo, as a citizen, the supporting factor in tolerance is the awareness of everyone in helping people who need help. The positive influence of immigrants is also important in supporting inter-religious tolerance. It was also conveyed by Suratman that the arrival of an outsider who had extensive knowledge and higher education was able to realize inter-religious tolerance in the Mainland III Hamlet.

In addition to supporting factors, in the implementation of religious tolerance there are also inhibiting factors. One of these factors according to comes from oneself. A closed character in a person will make it difficult for him and others to communicate through social activities and so on. So that the process of tolerance and harmonization will be difficult to realize in a diverse life. Closeness can lead to a lack of harmonious relationships and cooperation with the social environment. So that individuals are required to be able to adapt and be open (self-disclosure). Self-disclosure according to Lumsden in Maryam B. Garinau can help a person communicate with others, increase self-confidence and make relationships more intimate. In addition, self-disclosure can release feelings of anxiety and guilt. In fact, Gus Dur had the idea that the formation of tolerance through three things, namely tolerance between fellow-religionists, tolerance in fellow nations and tolerance among human beings. This means that tolerance can be formed with self-disclosure within a person, both with his fellow religion, his nation and fellow human beings.

Another factor that is quite hindering the establishment of tolerance between religious communities there is the presence of some people who are less able to respect and respect older people. If you see this, of course there are problems and their own causes why this can happen. It may be because of his bitter experience in the past related to differences in religious thought. It could also be due to their educational and economic background. Some people there are still someone who sorts and chooses a certain religion. For example, there are still some who think I'm a Christian, he's a Muslim and vice versa. Although this is conveyed by only a few, not the majority. Here, it can be seen that one of the inhibiting factors for inter-religious tolerance is the attitude of taking sides with one group that individuals like and ignoring other groups so that tolerance is difficult. This was also conveyed by other residents, that another obstacle is usually religious figures who usually highlight their respective religions.

F. Conclusion

The results of this study indicate that inter-religious tolerance for the minority Muslim community in Dusun Darat III, Sendangarum Village, Kapanewon Minggir, Sleman Regency, Yogyakarta is going very well living side by side with each other without any disputes, even though they live in an environment where the Muslim minority is not. non-Muslims, it's not a problem for the people there. Factors that support the running of tolerance in Dusun Darat III, Sendangarum Village, Sleman, Yogyakarta are the togetherness and cohesiveness of the residents such as community service and community groups, the existence of deliberation in every problem solving, and the high positive influence of the community so that they make them recognize one another even though they have different religions. . The inhibiting factors for the passage of tolerance in Dusun Mainland III, Sendangarum Village, are the existence of an open attitude towards the surrounding environment, the existence of unscrupulous citizens who lack tolerance and the existence of unscrupulous citizens who are less able to cooperate.

BIBLIOGRAPHY

- A.Ubaedillah & Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Abu Bakar. "Konsep toleransi dan kebebasan beragama", *Jurnal Media Komunikasi Umat Beragama*, Riau, Vol. 7, No 2 Juli- Desember 2015, dalam file:///C:/ASUS/AppData/Local/Temp/1426-3326-1-SM.pdf, diakses pada 13 Oktober 2021.
- Agus Sunyoto. *ATLAS WALISONGO*, Tangerang Selatan: PUSTAKA IIMaN, 2018.
- August Corneles Tamawiyw, "Bom Surabaya 2018 Terorisme dan Kekerasan Atas Nama Agama", dalam *Jurnal Gema Teologika*, Vol. 4 No. 2, Oktober 2019.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Elly M. Setiadi & Usman Kolip. *PENGANTAR PSIKOLOGI" Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya"*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek>, diakses pada 7 Januari 2022.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Minoritas>, diakses pada tanggal 7 Januari 2022.
- Irwan Masduqi. *Berislam Secara Toleran*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011.
- KAELAN, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: PARADIGMA, 2014.
- Masrukin. *Metode Penelitian Kulitatif*, Kudus: Media Ilmu Press, 2015.
- Maunah, Binti. "Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan", *Jurnal IAIN Tulungagung*, dalam <http://ejournal.iain.tulungagung.ac.id/index.php/taalum/article/view/334/268>, diakses pada 7 Januari 2022.
- Mohamed Fathi Osman, *Islam, Pluralisme & Toleransi Keagamaan*, Jakarta: Democracy Project, 2012.

- Mudjia Raharjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs.*, UIN Malik Ibrahim Malang, 2011, dalam <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/> , diakses pada hari Kamis, 11 November 2021.
- Noviantri, Desti. “Peran Guru Pendidikan Islam Dalam Membina Etika Toleransi Antar Umat Beragama Siswa Di SMP Negeri Rejotangan Tulungagung”.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, 2014, dalam <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>, diakses pada hari Kamis, 11 November 2021.
- Piotr Sztompka. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.
- Pudjiwati Sajogyo. *Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: P.T. Etasa Dinamika, 1985.
- Rasid, Faur. “*Gus Dur Dan Agama Khonghucu Di Indonesia*”, Skripsi, Jakarta: Program Studi Agama Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Roland Robertson, ed., *AGAMA: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi*, Jakarta: CV Rajawali, 1998.
- Sejuk. *Cara Menumbuhkan Sikap Toleransi Antarumat Beragama*, dalam <https://sejuk.org/2019/04/14/pentingnya-menumbuhkan-sikap-toleransi-antar-umat-beragama-di-indonesia%E2%BB%BF/> diakses pada tanggal 27 Desember 2021.
- Solopos. “*MASJID DI PAPUA DIBAKAR: Kemenag Kirim Tim ke Karubaga Telusuri Akar Masalah Konflik*”, dalam https://www.solopos.com/masjid-di-papua-dibakar-kemenag-kirim-tim-ke-karubaga-telusuri-akar-masalah-konflik-625585?utm_source=terkini_desktop, diakses pada hari Sabtu, 20 November 2021.
- Subadi, Djipto. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas, 2006, dalam <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/> diakses pada hari Sabtu, 16 April 2022.

- Suheni Harahap. “*Konflik Etnis Dan Agama di Indonesia*”, Jurnal UIN Sumatra Utara, dalam <file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/5096-10209-1-PB.pdf>, diakses pada 27 Desember 2021.
- Suliyanto. “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, Bumiayu: Pelatihan Metodologi Penelitian, Universitas Peradaban, 2017. Dalam <http://eprints.peradaban.ac.id/>. Diakses pada hari Jum’at, 14 Agustus 2020
- Suryana dan Rusdiana, *Pendidikan Multikultural*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Tanjung, Erict. “Siswi Non-Muslim Dipaksa Pakai Hijab di Padang, KPAI: *Melanggar HAM!*”, dalam <https://www.suara.com/news/2021/01/23/165824/siswi-non-muslim-dipaksa-pakai-hijab-di-padang-kpai-melanggar-ham?page=all>, diakses pada hari Kamis, 18 November 2021.
- Yaya Suryana dan Rusdiana, *Pendidikan Multikultural*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM : REFLEKSI PEMIKIRANKH HASYIM ASY'ARI DI MASA KONTEMPORER

ABDUL GHOFUR
ghofursjd98@gmail.com
IAIN Kudus

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui refleksi pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dalam pendidikan terhadap manajemen pendidikan islam. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) penelitian ini menggali pemikiran tokoh dari kitab Adab al-'Alim wa al-Muta'allim karya KH. Hasyim Asy'ari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan islam menurut KH Hasyim Asy'ari dapat dilihat dari bagaimana beliau dengan adab, etika, moral, dan akhlak yang baik sebagai sesuatu yang utama baik bagi guru maupun peserta didik. Setidaknya terdapat tiga poin penting yang relevan dan dapat direfleksikan dari pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dalam pendidikan terhadap manajemen pendidikan islam yaitu: profesionalitas, karakter individu yang baik, dan leadership.

Abstract

This study aims to determine the reflection of thought KH. Hasyim Asy'ari in education on Islamic education management. By using library research methods, this research explores the thoughts of characters from the book of Adab al-'Alim wa al-Muta'allim by KH. Hasyim Asy'ari. The results of the research show that Islamic education according to KH Hasyim Asy'ari can be seen from how he is with good manners, ethics, morals, and character as something that is the main thing for both teachers and students. There are at least three important points that are relevant and can be reflected of thought KH. Hasyim Asy'ari in education on Islamic education management, namely: professionalism, good individual character, and leadership.

PENDAHULUAN

Pendidikan islam awal abad 20 tepatnya sekitar tahun 1900-an merupakan era pendidikan yang diwarnai dengan adanya perang banya negara di dunia. Baik itu Negara islam maupun Negara non islam, kesemuanya terdampak buruk di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, humaniora, hingga psikologis. Berbagai dampak tersebut menimbulkan efek signifikan dalam pendidikan islam era tersebut. Dalam upaya membangun pendidikan islam dan penyebaran dakwah islam saat itu, muncul beberapa tokoh ulama islam yang memiliki hubungan dengan ulama hijaz kala itu untuk mempertahankan eksistensi islam ala aswaja.

Tidak terlepas dari semua itu, terdapat sosok terkenal yang berperan aktif dalam mensyiarkan islam melalui jalur pendidikan pondok pesantren khususnya di pulau Jawa. Beliau adalah KH. Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan pendiri salah satu organisasi isla terbesar di Indonesia yakni NU. Zamarkhasy seperti dikutip oleh Dhevin M.Q mengemukakan bahwa beliau KH. Hasyim Asy'ari terkenal ketokohnya bukan semata-mata hanya karena aktifitas dakwahnya melalui NU, melainkan juga karena termasuk tokoh pemikir dan pembaharu pendidikan isla di Indonesia.(M.Q Agus Puspita W, 2019, hal. 51)

Sejatinya, penelitian yang membahas tentang pemikiran KH Hasyim Asy'ari dalam pendidikan telah banya dilakukan. Dalam hal ini, Penelitian Roy Bagaskara menyebutkan bahwa dalam pendidikan islam menurut KH. Hasyim Asy'ari terdapat salah satu aspek penting yaitu etika dalam proses belajar mengajar.(Bagaskara, 2019) Mardiah Astuti dkk dalam penelitiannya menunjukkan bahwa konsep pendidikan pesantren tradisional KH. Hasyim Asy'ari setidaknya memenuhi 6 konsep yaitu pertama, tujuan pendidikan islam yakni mengahrap rida Allah SWT. Kedua, etika pendidik, kepada peserta didik. Ketiga, etika peserta didik. Keempat, kurikulum terkait pengetahuan agama yang bersumber dari kitab kuning dan pengetahuan umum. Kelima, metode pembelajaran yakni metode wetonan dan sorogan. Dan keenam, evaluasi pembelajaran terkait tes lisan, tertulis, dan pengamatan.(Astuti, 2021) Senada dengan itu, M. Faiz Amiruddin juga mengemukakan hakikat dari pendidikan islam adalah manusia sadar dengan sendirinya serta mengetahui haikat diciptakannya manusia oleh Tuhan. Selain itu juga perlu adanya kesadaran peserta didik ketika bersama gurunya, sesama teman. Ia juga menyebutkan bahwa materi pembelajaran yang terdapat di pesantren Tebu Ireng menggunakan materi yang komprehensif yakni memuat pembelajaran

agama dan non-agama.(Faiz Amiruddin, 20181) Sugeng Riyadi dalam tesisnya mengemukakan pemikiran pendidikan islam KH Hasyim Asy'ari diklasifikasikan dalam tiga hal yakni pertama, rujukan pemikiran KH Hasyim Asy'ari berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis, murid dan guru harus memiliki niat yang lurus, memiliki pribadi yangberahla mulia, saling menghormati, saling menghargai, saling memuliaan. Kedua, pemikiran beliau berpijak pada pemikiran tasawuf serta mengandung makna filosofis. Ketiga, pemikiran pendidikan akhlak KH. Hasyim Asy'ari sangat relevan dengan pendidikan karakter dalam pendidikan nasional.(Riyadi, 2021) Ada lagi penelitian yang dilakukan Dhevin yang mengemukakan bahwa terdapat tiga konsep utama KH Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul 'Alim Wal Muta'allim yaitu signifikansi pendidikan, tugas dan tanggung jawab murid, dan tugas dan tanggung jawab guru.(M.Q Agus Puspita W, 2019)

Namun demikian, belum banyak yang membahas deskripsi relevansi dan implementasinya dalam manajamen pendidikan islam secara khusus. Penelitian ini akan terfokus pada pemikiran KH Hasyim Asy'ari tentang pendidikan islam Sehingga dapat diketahui reactualisasinya berupa relevansi dan implementasinya dalam manajemen pendidikan islam kontemporer.

KAJIAN LITERATUR

A. Manajemen Pendidikan Islam

Sebelum menjadi sebuah kelembagaan islam hanya berkembang melalui dakwah dan syiar. Hingga pada kurun kekhalifahan bani Umayyah, pendidikan islam mulai dilembagakan hingga saat ini. Diketahui bahwa salah satu fungsi pendidikan islam adalah mengubah perilaku individu menjadi lebih baik sesuai nilai dan ajaran agama islam. Menurut Syeikh Muhammad A. Naquib A. pendidikanislam adalah usaha yang dilaukan pendidik terhadap peserta didik untuk pengenalan dan pengauan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengauan akan tempat Tuhan yang di dalam tatanan wujud dan kepribadian.(Azis, 2019, hal. 5) Muzakkir Ali mengemukakan bahwa pendidikan islam adalah kesatuan ilmu, iman, amal dan akhlak mulia. Menurutnya, keberhasilan keberhasilan pendidikan dalam islam seyogyanya terpenuhinya empat aspek tersebut oleh peserta didik.(Ali, 2012, hal. 24–25)Sedangkan oleh A. Rosmiyati Aziz pendidikan islam diartikan sebagai bimbingan yang dilaukan oleh seorang dewasa kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim.(Azis, 2019, hal. 6)

Untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut, maka perlu penanganan yang terbentuk dengan perencanaan yang tepat guna. Hal yang demikian itu dalam perkembangannya muncul ilmu manajemen. Kemudian, berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu. Manajemen pendidikan Islam merupakan kegiatan terstruktur yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf (karyawan) dan pengawasan dalam seluruh unsur pendidikan yang meliputi kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, pembiayaan, hubungan masyarakat, dan penciptaan budaya kerja pendidikan.(Thoha, 2016, hal. 3)

B. FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Tidak berbeda dari fungsi manajemen pada umumnya, manajemen pendidikan Islam secara konseptual memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Perencanaan yaitu fungsi yang sangat urgen dalam manajemen pendidikan Islam. Fungsi ini berupa perencanaan yang sebisa mungkin harus disusun secara sistematis, rapi, dan rasional.(Hambali & Mualimin, 2020, hal. 30) Dengan perencanaan, diharapkan aktivitas di madrasah akan berjalan dengan lancar menuju pada tujuan yang telah ditetapkan.(Sulhan & Soim, 2013, hal. 35)
2. Fungsi Pengorganisasian yaitu proses penentuan struktur, aktivitas, desain struktur, koordinasi, interaksi, wewenang, serta tugas yang jelas dan transparan. Dalam hal ini, terdapat prinsip-prinsip yang mesti dijalankan oleh manajemen pendidikan Islam dengan konsisten, sebab prinsip inilah yang akan memberikan gambaran seperti apa nantinya organisasi itu berjalan. Prinsip tersebut meliputi kebebasan, keadilan, dan musyawarah.(Hambali & Mualimin, 2020, hal. 33) dengan pengorganisasian maka akan nampak jelas hubungan masing-masing yang pada akhirnya dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.(Sulhan & Soim, 2013, hal. 35) Seberapa tepat fungsi pengorganisasian disusun maka organisasi pendidikan Islam sebesar itu pula kemungkinan berjalan efektif.
3. Fungsi Penggerakan atau pelaksanaan yaitu fungsi yang berupabentuk arahan, motivasi, dan bimbingan yang diberikan kepada semua sumber daya dalam organisasi agar mereka memiliki kesadaran tinggi untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam manajemen pendidikan

Islam, fungsi ini meniscayakan adanya keteladanan, keterbukaan, konsistensi, keramahan, dan kebijaksanaan.(Hambali & Mualimin, 2020, hal. 34–35). Bagaimanapun juga dalam aktivitas pendidikan perlu adanya pengawasan (controlling) agar aktivitas tersebut dapat berjalan dengan lancar dan teratur, sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.(Sulhan & Soim, 2013, hal. 36–37)

4. Fungsi Pengawasan yaitu fungsi yang bertujuan mengawasi berbagai peristiwa yang terjadi dalam suatu organisasi, apakah ia telah sesuai atau tidak dengan rencana yang sudah disusun. Dalam manajemen pendidikan Islam, pengawasan dilakukan terutama untuk mengetahui berbagai kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam proses pembelajaran.(Hambali & Mualimin, 2020, hal. 36)

C. PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM KH HASYIM ASY'ARI

Pemikiran pendidikan islam di Jawa khususnya dapat dikatakan sebagai sebuah adopsi dari pendidikan islam timur tengah namun dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Senada dengan hal ini, pemikiran KH. Hasyim Asy'ari boleh jadi diwarnai dengan keahliannya di bidang hadis, tasawuf dan fiqh. Selain itu juga di dorong pula oleh situasi pendidikan yang ada pada saat itu. Dari pendidikan islam dengan sistem lama yakni pondok kemudian sedikit banyak mengadopsi sistem pendidikan yang di bawa oleh kolonial Belanda.(M.Q Agus Puspita W, 2019, hal. 53)

Jika menengok ke belakang, embrio pemikiran pendidikan islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Timur Tengah terlebih Mekkah. Hal ini dikarenakan para tokoh seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan dan yang lainnya merupakan keluaran dari ulama-ulama Jawi yang kala itu banyak mengajar di Mekkah. Maka dikatakan bahwa yang meletakkan dasar bagi terciptanya jejaring ulama di Nusantara adalah mereka para ulama Nusantara di Mekkah.(Royani, 2018, hal. 127)

Dalam kondisi masih penuh ancaman dari penjajah dan adanya pembaharuan islam dan gerakan wahabi, KH. Hasyim Asy'ari kemudian menyusun sebuah kitab yang berjudul Adab al-'Alim wa al-Muta'allim. Dari kitab tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan islam yang ideal menjunjung tinggi etika atau adab baik etika guru sebagai pendidik maupun siswa sebagai peserta didik. Ini ditunjukkan ketika beliau KH. Hasyim Asy'ari dalam kitabnya

tersebut menukil beberapa hadis yang mengisyaratkan pentingnya posisi adab atau etika bagi seseorang. Salah satu hadis Nabi SAW yang dinukil antara lain: "Hak seorang anak atas orang tuanya antara lain dibuatkan nama yang baik oleh orang tuanya, disusui dengan cara yang baik, dan diajarkan adab yang baik."(Hasyim Asy'ari, n.d., hal. 9).

Selanjutnya beliau mengemukakan dengan jelas bahwa semua amal yang termasuk bersifat keagamaan baik berupa rohaniah, jasmaniah, perkataan, perbuatan tidak dapat dianggap sebagai amal keagamaan (diniyah) jika tidak dibarengi dengan etika atau adab yang baik serta dihiasi dengan sifat-sifat terpuji.(Hasyim Asy'ari, n.d., hal. 11). Hal ini menunjukkan bahwa karakter seseorang baik itu pendidik maupun peserta didik harusnya dibentuk terlebih dahulu sebelum mempelajari sebuah ilmu.

Secara keseluruhan kitab tersebut berisi delapan bab yakni 1. Keutamaan ilmu, orang yang memiliki ilmu, keutamaan belajar, dan mengajar. 2. Adab seorang pelajar mencakup karakter-karakter yang seyogyanya dimilikinya. 3. Adab seorang pelajar terhadap gurunya. 4. Adab seorang pelajar dalam proses belajarnya. 5. Adab seorang guru mencakup karakter-karakter yang seyogyanya dimilikinya. 6. Adab seorang guru dalam proses belajarnya. 7. Adab seorang guru terhadap muridnya, dan 8. Adab dalam upaya menjaga media pembelajaran (buku, kitab dsb).(Hasyim Asy'ari, n.d.) Dari kedelapan rincian bab tersebut jika dikelompokkan akan menjadi empat aspek utama yakni a) Ilmu (pentingnya sebuah ilmu, dan sumber ilmu), b) Pelajar, murid atau peserta didik, c) Pengajar, guru atau pendidik, dan d) Etika atau adab. Empat hal ini kemudian membentuk sebuah pemikiran yaitu pendidikan islam tidak boleh terlepas dari Ilmu, pendidik, peserta didik, dan adab. Andai salah satu dari empat aspek tersebut hilang atau tidak terpenuhi, maka pendidikan islam akan pincang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) berbentuk kajian pemikiran tokoh. Tujuannya untuk menggali pemikiran tokoh melalui karyanya.(Hamzah, 2020, hal. 24)dengan menggunakan analisis deskriptif dari sumber utama kitab Adab al-'Alim wa al-Muta'allim karya KH. Hasyim Asy'ari serta didukung dengan sumber sekunder dari buku-buku yang relevan.

PEMBAHASAN

A. KONDISI PENDIDIKAN ISLAM ERA KH. HASYIM ASY'ARI

Awal abad ke 20, pendidikan islam di Indonesia mulai memasuki era pembaharuan. Setidaknya terdapat dua faktor yang melatarbelakangi nya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Diantara yang termasuk faktor internal dalam hal ini antarlain : dorongan untk meningkatkan perlawanan terhadap kolonial Belanda, rasa tidak puas terhadap sistem pendidikan kolonial, rasa tidak puas terhadap pengalaman islam dan penerapan adat di tenga-tengah masyarakat dan adanya keinginan kalangan kaum muda untuk memurnikan ajaran islam. Sedangkan faktor eksternalnya antarlain masuknya pengaruh pemikiran pembaharu Timur Tengah yang terjadi di akhir abad ke-19.(Rahman, 2015, hal. 175). Meski mengalami pembaharuan, perkembangan islam di nusantara tidak terlepas dari aset-aset lokal. Awalnya, pesantren hanya sebagai sebuah bagian dari lembaga masyarakat islam, namun kemudian berkembang pesat dan signifikan terhadap pendidikan di Indonesia. Tidak terlepas dari itu, kemudian pesantren-pesantren yang ada di Indonesia banyak mengalami penyesuaian dan pembenahan yang dapat dilihat sekarang ini.(Susilo & Wulansari, 2020, hal. 91).

Era pembaharuan tersebut kemudian dikenal dengan era modernisasi pendidikan islam atau reformasi. Harun Asrohah sebagaimana dikutip Syahminan berpendapat bahwa sejak awal abad ke-20, masyarakat muslim di Indonesia telah melakukan modernisasi yang dirintis oleh beberapa tokoh seperti Syeikh Abdulah Ahmad, Zainuddin Labai El-Yunus dan yang lain. Selain itu juga dalam bentuk organisasi islam seperti Jamiat Khair, Al-Arsyad, Persyarikatan Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), dan Nahdatul Ulama.(Syahminan, 2014, hal. 238)

Adapun di Jawa, kondisi pendidikan islam banyak dihiasi dan dikembangkan oleh generasi keluaran Timur tengah dan warisan dari para penyebar islam di tanah jawa kala itu seperti Walisongo dan lain-lain. Pendidikan islam kala itu masih berbentuk pondok pesantren, berbeda dengan sekarang yang dilengkapi dengan satuan pendidikan formal. Generasi selanjutnya yang juga merupakan keluaran Timur Tengah salah satunya adalah KH. Hasyim Asy'ari. Beliau inilah yang kemudian mengembangkan lembaga pendidikan islam berbentuk pondok pesantren di daerah Jombang. Beliau dikenal sebagai seorang kiai pesenatren salafiyah yang menghalau

pemikiran dan gerakan islam puritan di Nusantara.(Fatiyah, 2021, hal. 71) demikian menunjukkan bahwasannya kondisi pendidikan islam di awal abad ke-20 masih di dominasi oleh pesantren salafiyah (pesantren klasik yang menggunakan metode bandongan dan sorogan dalam pembelajarannya, serta menggunakan kitab-kitab-kitab kuning atau klasik.) sebelum akhirnya, ada keinginan dari beberapa kalangan guru yang berpendidikan barat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa cara untuk mencapai kemajuan adalah dengan merombak sistem pendidikan lama dengan sistem pendidikan modern ala barat.(Azra, 2003, hal. 19)

Selain itu, muncul pula konflik intelektual antar ulama. Konflik tersebut salah satunya yakni pertentangan antara ulama tradisional yang dituduh mencampur adukkan agama dengan bid'ah dan khurafat dari adat mereka dan kaum ulama muda yang banyak dipengaruhi oleh gagasan Muhammad Abduh dengan menyerukan gerakan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. (Azra, 2003, hal. 19–20)

B. RELEVANSI PEMIKIRAN KH HASYIM ASY'ARI DENGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Setelah mengetahui bagaimana konsep pendidikan islam dalam kitab Adab Al-Alim wa al-Muta'allim di atas, selanjutnya mengenai relevansikonsep tersebut dalam manajemen pendidikan islam.Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa hal dari pemikiran KH Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Al-Alim wa al-Muta'allim yang dapat direlevansikan dalam manajemen pendidikan islam antara lain sebagai berikut:

1. Profesionalitas

Secara umum, manajemen pendidikan memiliki arti penting yaitu untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pendidikan juga menempatkan posisi personal sesuai dengan keahliannya, sehingga tujuan pendidikan akan tercapai secara optimal.(Farikhah & Wahyudhiana, 2018, hal. 5–6)Terkait dengan ini, KH Hasyim Asy'ari mengutip sebuah syair Arab yang artinya:

“Ilmu adalah sesuatu paling utama yang diperoleh seseorang # Barang siapa tidak memiliki ilmu maka ia bukan menjadi seseorang yang sempurna. Belajarlah ilmu dan amalkanlah wahai saudaraku # Karena ilmu bisa menjadi perhiasan bagi orang mangamalkannya”(Hasyim Asy'ari, n.d., hal. 20)

Syair di atas menunjukkan bahwa orang yang bekerja profesional harus didasari dengan keilmuan, kompetensi dan skill sebagai modal keahliannya. Dengan adanya keahlian tersebut, seseorang dapat menempati posisi yang pas dalam pekerjaannya. Manajemen pendidikan sebagai difungsikan sebagai salah satu alat untuk mengelola suatu lembaga pendidikan memiliki prosedur tersendiri sebelum menempatkan seseorang atau mengelola suatu lembaga pendidikan. Sebagaimana dikatakan bahwa fungsi administrasi pendidikan merupakan alat untuk mengintegrasikan peranan seluruh sumberdaya guna tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu konteks sosial tertentu yang berarti bahwa bidang-bidang yang dikelola mempunyai kekhususan yang berbeda dari manajemen dalam bidang lain (Sewang, 2015, hal. 20), maka seseorang harus memiliki keahlian dan kompeten dengan apa yang menjadi pekerjaannya.

Sama seperti dalam manajemen pendidikan secara umum, dalam konteks manajemen pendidikan islam seorang manajer harus mampu mengelola lembaganya dengan seefektif dan sebaik mungkin. Dalam hal ini KH Hasyim Asy'ari juga mengutip syair yang berarti:

Ilmu dapat mengantarkan orang ke kedudukan mulia # Orang yang memiliki ilmu akan terjaga dari kerusakan. Wahai orang yang berilmu, berhati-hatilah jangan mengotori (berbuat tidak benar) # dengan maksiat, sebab dosa tidak dapat ditebus ilmu. Ilmu akan menegakkan rumah yang tidak bertiang # sedang kebodohan akan merusak rumah mulia (baik)"(Hasyim Asy'ari, n.d., hal. 18)

2. Karakter Individu yang baik seorang manajer

Seorang manajer harus mempunyai kemampuan konseptual (*conceptual skill*), kemampuan teknis (*technical skill*), dan hubungan insani (*human skill*) untuk merencanakan dan mengelola agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan.(Sulhan & Soim, 2013, hal. 32).

3. Leadership

Aktifitas pendidikan di madrasah tidak akan berjalan lancar dan dinamis tanpa adanya motivasi dari pihak atasan (kepala), kepada pihak bawahan (guru dan karyawan), sekalipun telah diadakan perencanaan dan pengorganisasian yang matang. Tanpa motivasi, para bawahan mungkin akan bekerja dengan jiwa yang kosong dan kurang didasari oleh raia tanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakannya,

sehingga eros kerja bawahan menjadi kurang baik.(Sulhan & Soim, 2013, hal. 36)Dalam hal ini, KH Hasyim Asy'ari mengemukakan bahwa seorang pendidik seyogyanya mampu memotivasi dan mengarahkan peserta didiknya untuk mencari atau sibuk dengan sesuatu yang berfaedah dan membawa kemanfaatan.(Hasyim Asy'ari, n.d., hal. 54).

C. REFLEKSI PEMIKIRAN KH. HASYIM ASY'ARI TERHADAP FUNGSI MANAJEMEN

Refleksi dalam KBBI diartikan sebagai gerakan, pantulan di luar kemauan (kesadaran) sebagai jawaban atas suatu hal atau kegiatan yang datang dari luar. Refleksi juga bisa berarti cerminan, gambaran. (Kemendikbud RI, n.d.) Dengan demikian, Refleksi pemikiran KH Hasyim Asy'ari dalam hal ini dimaksudkan sebagai gambaran dari upaya menerapkan pemikiran KH Hasyim Asy'ari terkait tentang pendidikan terhadap manajemen pendidikan islam. Dengan kata lain menarik pemikiran beliau terkait dengan pendidikan untuk dibawa ke ranah manajemen pendidikan islam. Berkaitan dengan hal ini, sebelumnya sudah dipaparkan mengenai kondisi pendidikan islam pada kurun awal abad ke-20.

Pendidikan islam sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Di Indonesia, pendidikan islam pada awalnya masih berupa khalaqah yang dilaksanakan di surau, masjid, dan pesantren tentu memiliki sistem pengelolaan yang berbeda dengan pendidikan Islam yang dilaksanakan pada saat ini.(Hambali & Mualimin, 2020, hal. 128–129) *Khalaqah* digunakan dalam Periode pendidikan islam di Indonesia saat itu setelah datangnya islam ke Indonesia yaitu berupa pengajaran sederhana diawali dengan syahadat sebagai landasan keislaman dan kemudian berkembang ke materi fikih(B, 2018, hal. 56–57). Adapun surau termasuk sebagai suatu lembaga pendidikan islam semacam pesantren saat itu menurut Azyumardi Azra adalah tidak lain disebabkan terdapatnya beberapa karakteristikny yang sama atau mirip dengan pesantren.(Azra, 2003, hal. 7).

Tidak terlepas dari perkembangan lembaga pendidikan islam di Indonesia mulai dari metode khalaqah sampai pendidikan formal yang seperti saat ini, pemikiran pendidikan KH Hasyim Asy'ari dapat diimplementasikan dalam manajemen pendidikan islam saat ini. Berikut bagan yang dapat dilihat.



Bagan 1 Implementasi Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari terhadap manajemen pendidikan islam

Bagan di atas menunjukkan bahwa pendidikan islam secara umum itu luas. Artinya proses pendidikan islam itu adakalanya yang dikelola dengan baik dengan manajemen pendidikan dan ada yang tidak. Jika dikelola dengan manajemen pendidikan islam tentu suatu lembaga pendidikan akan terorganisir dengan baik dan juga dapat mencapai tujuan daripada pendidikan islam itu sendiri dengan lebih matang. Setidaknya terdapat beberapa poin penting yang dapat merefleksikan dari beberapa pemikiran KH. Hasyim Asy'ari terhadap manajemen pendidikan islam agar terorganisir dengan baik. Beberapa hal tersebut meliputi profesionalitas, karakter yang baik dari seorang manajer, leadership. Meskipun demikian dalam implementasinya butuh pelaksanaan yang tepat dan tersusun secara matang agar dapat mencapai tujuan manajemen pendidikan islam sesuai dengan apa yang diharapkan. Manajemen pendidikan islam seyogyanya dibangun dengan konstruksi pemikiran islam seperti pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. Fungsi dari manajemen pendidikan islam yang berupa *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dapat dilandasi dengan sikap profesionalitas dari seorang manajer, karakter yang baik dan sikap leadership yang matang.

SIMPULAN

Pendidikan islam era KH. Hasyim Asy'ari sangat berbeda dengan pendidikan islam saat ini. Perbedaan itu dapat dilihat dari aspek pengelolaan atau manajemennya, sarana dan prasarananya dan juga model dan media pembelajarannya. Meskipun berbeda dari aspek-aspek tersebut, namun substansi daripada pendidikan islam sejatinya sama yaitu bagaimana membentuk pribadi yang berkarakter atau berakhlak baik dan mulia. Pendidikan islam menurut KH Hasyim Asy'ari dapat dilihat dari bagaimana beliau dengan adab, etika, moral, dan akhlak yang baik sebagai sesuatu yang utama baik bagi guru maupun peserta didik. Artinya adalah pendidikan yang baik harus dilandasi dan sikapi dengan adab yang baik pula. Setidaknya terdapat 3 aspek yang bisa direfleksikan dan sangat relevan bagi manajemen pendidikan islam kontemporer antara lain: profesionalitas, karakter individu yang baik dari seorang manajer dan leadership. Dengan kata lain, fungsi dari manajemen pendidikan islam yang berupa *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Semarang: PKPI2 Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Astuti, M. (2021). Pemikiran Pendidikan Pesantren KH Hasyim Asy'ari dan Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia. *Intizar*, 27(1), 45–46. <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8730>
- Azis, A. R. (2019). *Ilmu Pendidikan Islam* (2 ed.). Yogyakarta: Penerbit Sibuku.
- Azra, A. (2003). *Surau : Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. PT Logos Wacana Ilmu.
- B, A. (2018). *Ilmu Pendidikan Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Bagaskara, R. (2019). Reorientasi Pemikiran Pendidikan KH. M. Hasyim Asy'ari: Etika dalam Pendidikan Islam. *ISLAMUNA Jurnal Studi Islam*, 6(2). <https://doi.org/153> DOI:10.19105/ISLAMUNA.V6I2.2545
- Faiz Amiruddin, M. (2018). Konsep Pendidikan Islam menurut KH. Hasyim Asy'ari. *Jurnal Dirasah*, 1. Diambil dari <https://ejournal.iaifa.ac.id>
- Farikhah, S., & Wahyudhiana. (2018). *Manajemen Pendidikan* (2 ed.; F. Juliantina R, Ed.). Sleman: Aswaja Pressindo.
- Fatihah. (2021). Historiografi Pesantren Di Indonesia. *Historia Madania*, 5(1).
- Hambali, M., & Muallimin. (2020). *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer* (1 ed.). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Revisi; F. R. Akbar, Ed.). Malang: Literasi Nusantara.
- Hasyim Asy'ari, M. (n.d.). *Adab al-'Alim Wa al-Mutaallim*. Jombang: Maktabah al-Turats al-Islami.
- Kemendikbud RI. (n.d.). *KBBI V*.
- M.Q Agus Puspita W, D. (2019). Pemikiran Pendidikan Islam Menurut K.H. Hasyim Asy'ari. *Falasifa*, 10(2).
- Rahman, R. (2015). Modernisasi Pendidikan Islam Awal Abad 20 (Studi Kasus di Sumatera Barat). *Humanus*, 14(2).

- Riyadi, S. (2021). *Analisis Pemikiran Pendidikan Islam pada kitab Adabul 'alim wal Muta'alim Karya Hadratus Syeikh K.H Hasyim Asy'ari*. IAIN Purwokerto.
- Royani, A. (2018). Pesantren Dalam Bingkai Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(1).
- Sewang, A. (2015). *Manajemen Pendidikan* (1 ed.). Malang: Wineka Media : Belajar Sepanjang Hayat.
- Sulhan, M., & Soim. (2013). *Manajemen Pendidikan Islam : Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam* (1 ed.). Sleman: Teras.
- Susilo, A., & Wulansari, R. (2020). Sejarah Pendidikan Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Tamaddun*, 20(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/tamaddun.v20i2.6676>
- Syahminan. (2014). Modernisasi Sistem Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Abad 21. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2).
- Thoha, M. (2016). *Manajemen Pendidikan Islam: Konseptual dan Operasional*. Surabaya: Buku Pustaka Radja.

Peran Zakat Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Agenda *Sustainable Development Goals*

Adiba Arifia Fadilah

adibaarifafadilah@gmail.com

IAIN Kudus

Abstrak

Penelitian ini merupakan sebuah kajian untuk melihat peran zakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan sustainable development goals di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran zakat untuk mewujudkan SDGs. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan dari berbagai macam sumber referensi tertulis seperti laporan, jurnal-jurnal hasil penelitian serta referensi lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Lembaga zakat dengan program-program yang didukung oleh dana zakat terbukti dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membantu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Disinilah adanya relevansi antara tujuan Zakat dan SDGs terhadap ketercapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Peran, Zakat, Pertumbuhan Ekonomi, SDGs*

Abstract

This research is a study to see the role of zakat in increasing economic growth in realizing sustainable development goals in Indonesia. The purpose of the study was to determine the role of zakat in realizing the SDGs. In this study using the method of library research (library research). The data used are from various written reference sources such as reports, research journals and other references that can be used as research data. Based on the results of the study, it was concluded that zakat institutions with programs supported by zakat funds were proven to be able to help realize community welfare and help achieve sustainable development goals. This is where the relevance of the goals of Zakat and SDGs to the achievement of sustainable development goals.

Keywords: *Role, Zakat, Economic Growth, SDGs*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2018 terdapat 26.582.990 jiwa penduduk miskin di Indonesia atau sama dengan 10,64% dari total penduduk Indonesia, ini artinya 1 dari 10 penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs melalui berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis.(Fitri 2016)

Pembangunan berkelanjutan mempunyai tujuh belas tujuan yang disebut sebagai SDGs (Sustainable Development Goals) yakni “tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Ikhtiar yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam mengimplementasikan target dari SDGs, salah satunya melalui filantropi Islam yaitu zakat. Dibutuhkan adanya kerjasama pemerintah dengan berbagai pihak lembaga lainnya demi terwujudnya program SDGs. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional n.d.)

Zakat sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mewujudkan pencapaian tujuh belas program Sustainable Development Goals (SDGs), salah satunya melalui zakat. Dalam mencapai tujuan SDGs perlu ada dukungan dari berbagai pihak. Hal ini juga didukung oleh potensi zakat yang sangat besar di Indonesia. Hal ini tentunya bisa menjadi peluang yang sangat baik jika dana zakat, bisa dioptimalkan dan dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu program pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi dalam agenda SDGs.(Utama 2021)

Pengelolaan zakat secara umum dilakukan melalui program-program dan kegiatan, yang jika dikelompokkan ke dalam bidang-bidang, berupa program santunan/ layanan bantuan langsung yang bersifat konsumtif, program pendidikan, program kesehatan, program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi masyarakat, serta program kedaruratan.(Amymie 2019)

Potensi keterkaitan dan irisan antara zakat dengan SDGs tidak hanya pada program, melainkan juga dengan para pelaku yang mungkin terlibat, di samping SDGs juga mensyaratkan adanya kerjasama di antara multi stakeholder di masyarakat. Keterkaitan lainnya juga mungkin muncul dari pendekatan dan cara pengelolaan program, alokasi sumber daya, para beneficiaries/penerima program zakat, hingga pertanggungjawaban dan akuntabilitas di dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 3 di UU tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan; 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (Utama 2021)

Saat ini telah banyak tumbuh lembaga filantropi Islam yang memberikan dananya secara produktif dengan tujuan untuk mengubah keadaan penerima dari mustahik menjadi muzakki. Program-program pendayagunaan zakat ikut serta berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menjalankan program program yang sejalan dengan SDGs.

Grand Desain utama dari tujuan pembangunan berkelanjutan adalah Kesejahteraan hidup, kesejahteraan hidup yang menunjang di dunia adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu di bentuk lembaga-lembaga sosial islam sebagai upaya menanggulangi masalah sosial tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat islam. (Amymie 2019)

Zakat merupakan sarana pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT sekaligus mekanisme redistribusi harta muslim kepada sesama manusia. Oleh karena itu cara memandang hubungan zakat dan SDGs menurut pandangan ini adalah sebagai cara dakwah Islam berkontribusi pada dunia. Dan untuk memastikan keterkaitan keduanya agar setara maka perlu didudukkan pada konsep yang setara pula. (Utama 2021) Dalam Islam, tujuan-tujuan zakat merujuk pada tujuan syariah atau yang disebut maqashid syariah. Di sisi lain SDGs yang berisi tujuan tujuan pembangunan. Sehingga untuk menempatkan peran zakat setara maka yang perlu diperbandingkan adalah dengan melihat relevansi dan prioritas dari masing-masing tujuannya, yaitu maqashid syariah di satu sisi dan SDGs di sisi yang lain.

Di sisi lain tujuan dari zakat sejalan dan relevan dengan pembangun berkelanjutan, terutama pada sisi pengentasan kemiskinan, pengentasan kelaparan, pemerataan pendidikan, kesehatan dan penyediaan air bersih yang layak bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana peran zakat, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam hal meningkatkan ekonomi di masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

Zakat Sebagai Instrument Pembangunan

Salah satu instrument pembangunan yang digunakan oleh ekonomi Islam adalah Zakat. Bukti historis berbicara bahwa zakat dapat menjadi instrumen pembangunan yang penting bagi negara. Terutama dalam perannya untuk mereduksi konsentrasi kekayaan, menyalurkan dana dari yang berlebih kepada yang membutuhkan Dengan demikian, cita-cita pembangunan yang lebih merata dan adil dapat tercapai. Karena perannya yang sangat stretegis tersebutlah beberapa negara termasuk Indonesia melakukan institusionalisasi terhadap pengelolaan zakatnya.(Schearer 1995)

Zakat dapat menjadi instrumen pembangunan yang penting bagi negara,(Chapra 1992) terutama dalam perannya untuk mereduksi kekayaan, menyalurkan dana dari yang berlebih kepada yang membutuhkan, zakat juga merupakan sumber dana pemangunan yang cukup potensial dalam negara islam atau negara yang penduduknya mayoritas muslim. Zakat dalam konteks umat merupakan salah satu sumber dana potensial dan sangat penting yang ditarik dari kaum yang memiliki kekayaan yang telah mencapai batas ukuran yang ditentukan. Sebagian para ulama dan ekonomi islam mengatakan bahwa zakat adalah poros dan pusat keuangan negara islam, dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukkan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya dari tangan pemiliknya.

Zakat bukan hanya merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi islam, maka dari itu pemahaman tentang masalah zakat berarti pula secara bersamaan telah memahami ajaran islam itu sendiri. Untuk itu dalam rangka peningkatan akumulasi dana zakat sebagai salah satu sumber dana pembangunan, maka sosialisasi pemahaman nilai-nilai islam kepada rakyat sangat penting untuk diperhatikan, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kesadaran rakyat untuk mengumpulkan zakatnya. Maka negara-negara islam harus melakukan upaya yang tulus untuk menanamkan jiwa islami dikalangan masyarakat muslim. Dengan demikian, akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Dengan berakhirnya era MDGs, saat ini memasuki era SDGs (sustainable development goals), yang dimulai dengan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (Sustainable Development Goals) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara. Dokumen SDGs pun dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan capaian-capaian MDGs sebelumnya agar langgeng dan berlanjut seterusnya. (Tri Raharjo and Ishartono 2017)

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs, Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu deflation sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih universal. SDGs dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia.

Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (Human Development), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (Social Economic Development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Keterkaitan Zakat dengan SDGs

Ada beberapa perbedaan antara zakat dengan SDGs, zakat secara mendasar berasal dari ajaran Islam sedangkan SDGs tidak memiliki tautan dengan agama. Meski demikian kesepakatan pada Forum Zakat Dunia yang diadakan menyatakan bahwa ada keterkaitan cukup besar antara organisasi zakat untuk mengejar SDGs lebih jauh lagi. Banyak hal yang terdapat dalam SDGs mencerminkan nilai-nilai Islam. Misalnya SDGs adalah tentang

mengurangi kemiskinan, kelaparan, serta mengurangi kesenjangan. Tujuan ini sama seperti prinsip zakat dalam Islam. Ada lima tujuan mendasar yang dikenal, yaitu Maqashid Syariah yang tujuannya adalah perlindungan, keyakinan, kehidupan, keturunan, akal, dan kekayaan. (Noor and Pickup 2017)

Kehidupan (*hifdh ul nafs*), Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs tujuan point 1 dan 2 yaitu tentang menghilangkan kemiskinan dan kerawanan pangan. Kemudian point 3 yaitu tentang menghilangkan sejumlah besar penyakit dan menyampaikan beberapa isu kesehatan yang muncul. Tujuan SDGs ke 6 tentang mengatasi kelangkaan air, kualitas air yang buruk, dan sanitasi yang buruk dan memastikan pekerjaan yang layak bagi semua orang termasuk masyarakat miskin.

METODE PENELITIAN

Penelitian termasuk kedalam penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penelitian studi kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan berbagai macam sumber referensi tertulis seperti laporan, jurnal-jurnal hasil penelitian serta referensi lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan data penelitian. Kemudian dilakukan telaah mengenai masalah yang akan diteliti.

Pada penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk mengetahui zakat memiliki peran dalam mendukung terwujudnya SDGs. Sumber data yang digunakan diambil dari buku, jurnal dan situs internet seperti laman yang berisi program-program pengelolaan zakat, serta sumber lain yang sesuai dengan topik permasalahan penelitian, Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis konten atau isi (*Content Analysis*).

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan mengumpulkan data-data yang telah ada terkait penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Indonesia melalui beberapa jurnal dan artikel tentang zakat (Utama n.d.), laporan tahunan (*annual report*) dan jurnal serta artikel-artikel tentang pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Untuk melihat sejauhmana peran zakat terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Data-data yang ada akan dijabarkan dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan bagaimana relevansi serta peran zakat terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Kesepakatan beberapa negara di dunia untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera tanpa meninggalkan satu orangpun membuat terciptanya konsep SDGs. Pelaksanaan kesepakatan tersebut dihadiri oleh kurang lebih 193 kepala negara. (Muharromah 2021)

Di dunia baru ini, ekonomi perlu berurusan dengan kelaparan yang terus-menerus meningkatnya ketimpangan Untuk menghadapi tantangan tersebut, teori ekonomi perlu memahami pasar dalam ketidakseimbangan, ketidakaturan, bahkan kekacauan. teori ekonomi dan penataan kembali prioritas nasional berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) PBB.(Algarve, and Geneva 2021)

Namun bahwasanya isi kandungan dari SDGs tersbut juga menjadi cita-cita Indonesia. Hal ini membuat perwujudan dari SDGs tidak semata-mata untuk memenuhi kesepakatan global, akan tetapi juga turut mewujudkan cita-cita Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya.(Kementerian PPN. 2017)

Pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam merealisasikan cita-cita tersebut. Maka dari itu dibuatlah Roadmap SDGs atau peta jalan strategi dalam mewujudkan SDGs. Pada Roadmap SDGs disebutkan perlu adanya koordinasi dalam pembiayaan SDGs.(Kementerian PPN. 2017) Salah satunya pembiayaan yang berasal dari non pemerintah yakni dengan zakat,

Oleh karena itu zakat memiliki peran dalam mendukung terwujudnya SDGs. Berikut ini peran zakat yang telah diimplementasikan oleh beberapa lembaga zakat di Indonesia(Maksum et al. 2017) :

Sustainable Development Goals kedelapan yaitu Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi, adalah :

Dalam rangka memelihara pertumbuhan ekonomi per kapita Sesuai dengan Situasi Nasional (0.286), dan Mendorong Kebijakan yang Berorientasi Pembangunan yang Mendukung Aktifitas-aktifitas Produktif Penciptaan Lapangan Kerja, Kreativitas dan Inovasi Kewirausahaan serta Mendorong Pertumbuhan UMKM melalui Akses Pelayanan Pendanaan (0.249). (Pusat Kajian Strategis BAZNAS 2017)

Prioritas berikutnya adalah Mencapai Level yang Lebih Tinggi untuk Produktivitas Ekonomi melalui Disertifikasi Peningkatan Mutu Teknologi dan Inovasi (0.238) serta Penguatan Kapasitas Institusi Keuangan Domestik untuk Mendorong dan Meluaskan Akses terhadap Perbankan, Asuransi dan Layanan Pendanaan untuk Semua (0.227).(Pusat Kajian Strategis BAZNAS 2017)

Berdasarkan hasil analisis ANP, ke-17 kriteria Sustainable Development Goals dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Yang termasuk ke dalam kelompok kedua (Prioritas ke-2) dengan bobot relatif sama 0.063 yaitu: 4. Pendidikan Bermutu, 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 10.(BAZNAS, 2017)

Mengurangi Ketimpangan, dan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Meskipun demikian, pada tataran praksisnya, BAZNAS belum menerapkan beberapa kriteria di dalam goal ke 8 dan 16 dengan secara detil. Kinerja zakat pada sektor ekonomi tentu bukan menjadi wacana baru atau program baru. Peningkatan ekonomi masyarakat miskin menjadi salah satu fokus utama kerja zakat dalam rangka pengentasan kemiskinan di tanah air.(Pusat Kajian Strategis BAZNAS 2017)

Di sisi lain, upaya peningkatan ekonomi masyarakat tersebut merupakan cita-cita kerja zakat yaitu untuk mengubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzaki (pemberi zakat). Berbagai program yang digulirkan seperti program peminjaman atau akses modal, peningkatan keterampilan warga, menciptakan jalur pemasaran produk yang lebih strategis, pendampingan pengelolaan produk dan pengembangan alat-alat produksi seperti mesin produksi jamu (penggiling, pemeras, pencampur, pengering, pemasok dalam kemasan, dll), penggerak turbin pada micro hydro, pengatur irigasi, dll masih banyak lagi ragamnya. Program-program yang sudah ada perlu diperkuat dan ditingkatkan baik kapasitasnya SDMnya, kualitas dan massifikasi produk, membangun lembaga keuangan inklusi yang lebih berpihak pada komunitas dan masyarakat, serta perluasan jaringan dan pasar untuk mengangkat produk yang bersaing di pasar.(Pusat Kajian Strategis BAZNAS 2017)

PEKERJAAN LAYAK & PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Memelihara pertumbuhan ekonomi per kapita 0.286
2. Mencapai level produktivitas ekonomi tinggi 0.238
3. Mendorong kebijakan pro sektor riil 0.249
4. Penguatan financial inclusion 0.227

SDGs dapat dijadikan platform pembangunan melalui zakat

Maka dari itu paradigma zakat juga harus masuk dalam SDGs, bukan hanya dananya. Kembali lagi, paradigm yang secara jelas absen dalam SDGs adalah paradigma bahwa agama merupakan kunci dari kebahagiaan (masalah) di kehidupan setelah kematian. Maka dari itu komponen agama

harus masuk kedalam inisiatif inisiatif SDGs yang ada, agar pembangunan zakat sesuai dengan syariah dan juga berada pada kereta yang sama dengan arus utama (BAZNAS, 2017). SDGs menjadi platform awal yang digunakan dan dimodifikasi untuk menyelenggarakan pembangunan di Indonesia dan Negara Muslim lainnya masih dapat dibenarkan. Hal ini karena sifat SDGs yang sudah universal dan diterima secara umum.

Lembaga zakat filantropi Islam hadir dalam beragam program melalui program ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Sinergi terus dibangun untuk memperluas manfaat dan mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs) pemerintah. Program Ekonomi yaitu Program pemberdayaan ekonomi ini dilakukan oleh lembaga zakat dengan cara meningkatkan pendapatan mustahik dengan membuat program pemberdayaan yang bersifat sustainable mulai dari pembuatan model program agar berkelanjutan dengan karakteristik pemberdayaan ekonomi.

Untuk menjelaskan peranan zakat, infak, dan sedekah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), maka dapat dilihat dengan membaca dan menganalisa laporan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdapat dalam laporan tahunan (annual report) BAZNAS.

Peranan zakat, infak, dan sedekah dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar uang zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan untuk membantu kesejahteraan masyarakat dengan lima (5) pilar program Badan Amil Zakat Nasional (ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, dan dakwah), namun peran zakat, infak, dan sedekah dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan juga dapat dilihat dari seberapa banyak orang-orang yang menerima manfaat dari penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Berikut grafik yang menjelaskan jumlah mustahiq yang sudah dibantu oleh Badan Amil Zakat Nasional.

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Melalui pekerjaan yang layak yang telah dimiliki oleh masyarakat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga tercapainya kesejahteraan. Pendistribusian zakat kepada mustahik tidak hanya dalam bentuk konsumtif, akan tetapi terdapat zakat dalam bentuk produktif. Zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq dapat dimanfaatkan untuk

pemberdayaan ekonomi mustahiq. Selain itu terdapat program OPZ yang didistribusikan dalam bentuk lain dalam mewujudkan SDGs ini. (Muharromah 2021) OPZ tersebut adalah IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) memiliki program Proteksi Pendidikan Mustahiq, fokus bantuan IZI pada siswa lulusan sekolah kejuruan yang mengalami kendala dalam pembebasan ijazah dikarenakan kekurangan biaya. Melalui bantuan tersebut banyak siswa yang terbantu dalam pembebasan ijazah, sehingga siswa tersebut dapat melamar pekerjaan yang layak. Salah satu siswa penerima manfaat dari bantuan tersebut ada yang diterima menjadi pegawai di salah satu perusahaan. Apabila telah mendapatkan pekerjaan yang layak dapat meningkatkan perekonomian keluarga

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Zakat, sebagai salah satu kewajiban dalam Agama Islam memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan umat dengan mendistribusikan kekayaan dari muzakki kepada mustahiq yang secara garis besar tujuannya adalah untuk mencapai maqoshid syari'ah. Hal ini sejalan dan relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tujuan bersama yang harus diwujudkan untuk mencapai kesejahteraan suatu negara.
2. Zakat secara langsung maupun tidak langsung berperan positif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia terutama pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan yang bermutu, pemerataan ekonomi, dan kesehatan yang baik. Lembaga zakat dengan program-program yang didukung oleh dana zakat terbukti dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membantu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Islam sendiri memiliki tradisi turun temurun berdasar masalah 'ammah dalam menghimpun dan menyalurkan zakat sebagai gagasan filantropi. Disinilah adanya relevansi antara tujuan Zakat dan SDGs terhadap ketercapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan secara garis besar gerakan ini berfokus pada 6 isu diantaranya: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, kebersihan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Algarve, S. Th, and R. T. Geneva. 2021. "Measuring Sustainable Developments Goals Performance."
- Amymie, Farhan. 2019. "Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)." *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17(1):1–18. doi: 10.15575/anida.v17i1.5046.
- BAZNAS, D. R. 2017. *Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Chapra, M. U. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Riyadh: The Islamic Foundation dan The International Institute of Islamic Thought.
- Fitri, Meila Riskia. 2016. "Perkembangan Sustainable Development Goals Di Indonesia." *Inafid*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. n.d. "Apa Itu SDGs?"
- Kementerian PPN. 2017. "Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030." *In Kementerian PPN/Bappenas*.
- Maksum, Faizin, Soleh, Thohari, Ali, Subehi, Azizy, Sirin, Khamami, Rohman, Irfan, Arsadani, and Rahmawati. 2017. *Fikih Zakat on SDGs*. UIN Jakarta Press.
- Muharromah, Gabriele Lailatul. 2021. "Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia." 13(1):16.
- Noor, Z. B., and F. Pickup. 2017. *Peran Zakat Dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: BAZNAS dan UNDP.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2017. *Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

- Schearer, S. B. 1995. "The Role of Philanthropy in International Development. Rockefeller Foundation Bellagio Conference Human-Centered Development: The Role of Foundations: FLOs and NGOs."
- Tri Raharjo, Santoso, and Ishartono. 2017. "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan." *Social Network Jurnal* 6 nomor 2.
- Utama, Rizky Putra. 2021. "The Role of Zakat, Infaq, Alms In Realizing Sustainable Development Goals In Indonesia." *Finest Jurnal Riset Dan Pengembangan Ekonomi Islam*.
- Utama, Rizky Putra. n.d. "Peran Zakat, Infak, Sedekah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Di Indonesia." 14.

KEPEMIMPINAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN; MENELADANI KEPERIBADIAN RASULULLAH SAW

Adri Efferi

adri.efferi@iainkudus.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Kudus

Abstrak

Meskipun Rasulullah saw telah wafat ribuan tahun yang lalu, tetapi pengaruhnya tetap abadi hingga sekarang, tidak lapuk dimakan zaman dan tidak leang dimakan usia. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kepemimpinan adalah pengaruh. Makin kuat kepemimpinan seseorang, akan makin kuat pula pengaruhnya. Demikian pula pada sektor dunia pendidikan, para pimpinan seperti kepala dan guru merupakan pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang kuat bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, mereka harus mampu menanamkan nilai-nilai atau karakter yang berguna bagi perkembangan jiwa mereka. Dalam perspektif Islam, nilai-nilai dan karakter itu secara ideal sudah diwariskan dan dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Kata kunci: Kepemimpinan, Keteladanan dan Pendidikan.

Abstract

Although Rasulullah saw had died thousands of years ago, but his influence remains eternal until now, not weathered by the times and ageless. This shows us that leadership is an influence. The stronger a person's leadership, the stronger the influence will be. Similarly, in the education sector, leaders such as heads and teachers are parties who have a strong influence on their students. Therefore, they must be able to instill values or characters that are useful for the development of their psyche. In the Islamic perspective, those values and characters have been ideally inherited and exemplified by Rasulullah saw.

Keywords: Leadership, Exemplary and Education.

A. PENDAHULUAN

Tema kepemimpinan merupakan topik yang selalu menarik diperbincangkan dan tak akan pernah habis dibahas. Masalah kepemimpinan akan selalu hidup dan digali pada setiap zaman, dari generasi ke generasi guna mencari formulasi sistem kepemimpinan yang aktual dan tepat untuk diterapkan pada zamannya. Hal ini mengindikasikan bahwa paradigma kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat dinamis dan memiliki kompleksitas yang tinggi.

Kepemimpinan merupakan salah satu topik yang selalu menarik untuk dikaji dan diteliti, karena paling banyak diamati dan sekaligus fenomena yang paling sedikit dipahami. Suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh faktor kepemimpinan. Suatu ungkapan mulia mengatakan bahwa, pemimpinlah yang bertanggung jawab atas kegagalan suatu pelaksanaan pekerjaan, merupakan ungkapan yang mendudukkan posisi pemimpin dalam suatu organisasi pada posisi yang terpenting.

Keberadaan dan prinsip kepemimpinan pada sebuah organisasi pendidikan, sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan kepemimpinan pada umumnya. Banyak faktor yang harus ada untuk dapat menjadi seorang pemimpin di lembaga pendidikan, agar mampu melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik.

Untuk menjadi seorang pimpinan tidak hanya sekadar memiliki surat keputusan (SK), walaupun SK dapat digunakan untuk membuka kesempatan menjadi pimpinan yang baik. Namun dengan SK saja seseorang belum dapat disebut sebagai seorang pemimpin. Dari berbagai definisi tentang kepemimpinan terlihat bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tingkat yang paling rendah, seorang pemimpin harus mampu memberikan pengaruh kepada orang lain. Itulah sebabnya agar dapat memberikan pengaruh secara maksimal kepada orang yang dipimpinnya seorang pimpinan harus mampu mencintai orang-orang yang dipimpinnya.

Setelah mampu mencintai orang-orang yang dipimpinnya, pemimpin harus menunjukkan keberaniannya untuk menghadapi berbagai tantangan yang menghadangnya dan menunjukkan komitmen yang tinggi. Biasanya faktor-faktor keberanian dan komitmen tersebut akan dapat timbul secara otomatis jika rasa cinta yang ada pada pimpinan tersebut timbul. Kecintaan akan selalu menghasilkan suatu keberanian yang luar biasa. Semakin tinggi kecintaan seseorang, semakin tinggi pula keberanian seseorang untuk membela apa yang dicintainya.

Kondisi inilah yang kemudian akan menghasilkan komitmen dan disiplin diri yang tinggi dari seorang pemimpin untuk mencapai suatu tujuan sebagai perwujudan dari kecintaan tersebut. Dengan komitmen dan disiplin diri tersebut berbagai bukti-bukti hasil pekerjaan dapat ditunjukkan atau prestasi kerja pemimpin akan mulai kelihatan.

Selanjutnya yang harus diperhatikan bahwa siapa pun yang ingin memimpin orang lain, pertama-tama harus menguasai dirinya sendiri. Menguasai dirinya sendiri adalah dengan cara mendisiplinkan diri. Pada level inilah kemudian akan timbul loyalitas dari para pengikut, sehingga pada level ini seseorang mulai memenuhi syarat untuk disebut sebagai pemimpin, karena pada saat inilah seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain.

Dengan kecintaan yang dimiliki tersebut, pimpinan pasti akan berorientasi pada manusia-manusia dalam organisasi, itulah sebabnya kemudian pimpinan dalam hubungannya dengan orang-orang dalam organisasi pendidikan tidak lagi memposisikan diri sebagai atasan-bawahan, tetapi akan memposisikan diri sebagai seorang pembimbing. Pembimbing tidak takut tersaingi oleh orang-orang yang dipimpinya, justru pemimpin menjadi pembimbing orang-orang yang dipimpinya untuk dapat menjadi pemimpin-pemimpin baru yang lebih andal sesuai dengan zamannya.

Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan adalah seorang pemimpin harus mampu menggunakan suara hati atau fitrahnya untuk melaksanakan proses kepemimpinan. Dari berbagai hasil riset pada pemimpin-pemimpin perusahaan besar kelas dunia terlihat bahwa para pemimpin tersebut memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang merupakan percikan dari sifat-sifat Allah. Pemimpin memimpin dengan karakter kepemimpinan yang baik bukan hanya dengan pencitraan saja, tetapi betul-betul memiliki karakter tersebut.

Berdasarkan uraian singkat di atas, pembahasan selanjutnya akan difokuskan untuk menampilkan karakter kepemimpinan dari Rasulullah SAW ketika beliau memimpin umatnya, lalu diadopsi dalam kondisi saat ini khususnya dalam lingkup pendidikan.

B. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini berupa analisis dokumen (*analysis of documents* atau *documentary analysis*). Studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat,

film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. Penelitian jenis ini bisa juga untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Para pendidik menggunakan metode penelitian ini untuk mengkaji tingkat keterbacaan sebuah teks, atau untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah teks.

C. KAJIAN PUSTAKA

1. Profil Kepemimpinan Dalam al Qur'an dan Hadis

Rasulullah SAW memimpin umatnya dengan baik, maka sifat-sifat kepemimpinan beliau dijadikan acuan, khususnya bagi umat Islam. Diantara sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai berikut:

a). Jujur dan tidak menipu

Nabi Muhammad saw melaknat pemimpin yang dipercaya untuk mengurus urusan umat lalu ia malah menipu atau menyengsarakan mereka, sebagaimana dalam sabdanya: *"Ya Allah siapa saja yang diberi kekuasaan untuk mengurus umatku lalu ia menyengsarakan mereka, maka persulitlah ia. Dan siapa saja yang diberi kekuasaan lalu ia mempermudah mereka, maka mudahkanlah ia."* (HR. Muslim) Dalam hadis lain dikatakan, *"pemimpin yang tidak memperhatikan kebutuhan, kedukaan dan kemiskinan umat, maka Allah swt tidak akan memperhatikan kebutuhan, kedukaan dan kemiskinannya pada Hari Kiamat kelak."* (HR. Abu Daud)

b). Adil dan amanah

Islam menempatkan pemimpin yang adil dan amanah dalam derajat manusia yang tertinggi, yang memperoleh berbagai penghargaan dan kehormatan. Diantaranya ia termasuk kelompok pertama yang dinaungi Allah SWT di antara 7 kelompok utama yang dinaungi-Nya pada Hari Kiamat kelak (HR. Bukhari); ia pun akan berada di atas mimbar dan cahaya nanti di Hari Kiamat (HR. Muslim). Dan pemimpin yang demikianlah yang akan senantiasa dicintai dan didoakan rakyatnya karena kebijaksanaannya memimpin rakyatnya (HR. Muslim); Sehingga dalam salah satu Hadisnya Nabi SAW sampai menyatakan,

pemimpin yang demikian termasuk tiga golongan manusia yang paling utama dan paling berhak masuk surga, di samping orang yang lembut dan penyayang pada keluarganya, dan orang miskin yang menjaga dirinya dari meminta-minta. (HR. Muslim)

c). Tidak wajib taat pada pemimpin yang memerintahkan maksiat

Dalam Islam pemimpin yang memiliki sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59 yang berhak dan wajib ditaati. Syarat taat pada pemimpin pada ayat tersebut adalah tergantung (*mu'allaq*) pada apakah ia taat pada Allah swt dan Rasul saw atau tidak, di mana cirinya adalah ia senantiasa kembali kepada Allah swt dan Rasul-Nya saw jika terjadi perbedaan pendapat ataupun perselisihan dan bukan pemimpin yang memiliki sifat sebaliknya, jika ia memiliki sifat sebaliknya, maka tidak wajib sama sekali untuk didengar dan ditaati.

d). Tidak ada batasan ras/kebangsaan

Tentang siapa pemimpin itu, Islam tidak membatasi ia dari ras dan kelompok apa pun, asal mengikuti dan menegakkan syariat maka wajib ditaati, sekalipun ia adalah seorang yang berkulit sangat hitam yang kepalanya bagaikan kismis (saking hitamnya). (HR. Bukhari) Kendatipun demikian, ada ulama yang mengatakan bahwa lebih utama seandainya memilih pemimpin disesuaikan dengan suku/kebangsaan rakyat yang dipimpinya. Hal ini semata-mata dengan pertimbangan psikologis maupun sosiologis, karena pemimpin yang berasal dari ras atau suku yang sama dengan rakyat yang akan dipimpinya, cenderung lebih cepat dan mudah untuk melakukan proses adaptasi

e). Pemimpin wajib memilih bawahan yang jujur

Seorang pemimpin yang adil tentunya akan memilih pembantu-pembantu, wakil-wakil dan menteri-menteri yang adil pula. Tidak mungkin seorang yang baik (tanpa keterpaksaan) akan mengangkat atau memilih wakil dan menteri yang merupakan para musuh Allah swt, seperti para koruptor, kaum oportunist apalagi para pengkhianat. Dasar pijakan yang dipakai adalah surat al Mumtahanah ayat 1: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), Karena rasa kasih sayang; padahal Sesungguhnya mereka Telah ingkar kepada kebenaran yang*

datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu Karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, Karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, Maka Sesungguhnya dia Telah tersesat dari jalan yang lurus. (Q.S. al-Mumtahanah/60: 1)

2. Nilai Kepemimpinan Dalam Kepribadian Rasulullah SAW

Meskipun Rasulullah saw telah wafat ribuan tahun yang lalu, tetapi pengaruhnya tetap abadi hingga sekarang, tidak lapuk dimakan zaman dan tidak lekang dimakan usia. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kepemimpinan adalah pengaruh. Makin kuat kepemimpinan seseorang, akan makin kuat pula pengaruhnya. Fakta inilah yang telah dibuktikan oleh Rasulullah saw.

Lalu, pemimpin seperti apakah Rasulullah saw, sehingga pengaruhnya sedemikian kuat tidak hanya pada saat beliau masih hidup namun sampai meninggal dunia. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah *pertama*, Rasulullah saw selalu mengawali dengan memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Beliau pimpin matanya sehingga tidak melihat apa pun yang akan membusukkan hatinya. Memimpin tutur katanya sehingga tidak pernah berbicara kecuali kata-kata benar, indah, dan padat akan makna. Memimpin nafsunya, keinginannya, dan memimpin keluarganya dengan cara terbaik sehingga beliau mampu memimpin umat dengan cara dan hasil yang terbaik pula.

Contoh-contoh perilaku sebagai seorang pemimpin yang telah dipraktekkan Rasulullah di atas, untuk zaman sekarang sudah menjadi barang langka. Kita sangat banyak menginginkan kedudukan, jabatan, dan kepemimpinan. Padahal, untuk memimpin diri sendiri saja kita sudah tidak sanggup. Itulah yang menyebabkan seorang pemimpin tersungkur menjadi hina. Tidak pernah ada seorang pemimpin jatuh karena orang lain. Seseorang hanya jatuh karena dirinya sendiri.

Kedua, Rasulullah saw memperlihatkan kepemimpinannya tidak dengan banyak menyuruh atau melarang. Beliau memimpin dengan suri teladan yang baik, fakta ini diabadikan dalam al-Qur'an, "*Sesungguhnya telah ada pada*

(diri) Rasulullah saw itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah swt dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah swt” (Q.S. al-Ahzab: 21).

Dalam kehidupannya, Rasulullah saw senantiasa melakukan terlebih dahulu apa yang ia perintahkan kepada orang lain. Keteladanan ini sangat penting karena sehebat apa pun yang kita katakan tidak akan berharga kecuali kalau perbuatan kita seimbang dengan kata-kata. Rasulullah saw tidak menyuruh orang lain sebelum menyuruh dirinya sendiri, tidak melarang sebelum melarang dirinya. Kata dan perbuatannya amat serasi sehingga setiap kata-kata diyakini kebenarannya. Efeknya, dakwah beliau punya kekuatan ruhiyah yang sangat dahsyat. Dalam al-Qur’an Allah swt berfirman, *“Amat besar kebencian di sisi Allah swt bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan” (Q.S shaf: 3).*

Ketiga, kepemimpinan Rasulullah saw tidak hanya menggunakan akal dan fisik, tetapi Beliau memimpin dengan kalbunya. Hati tidak akan pernah bisa disentuh kecuali dengan hati lagi. Dengan demikian, yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah hati nurani, karena itulah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Rasulullah menabur cinta kepada sahabatnya sehingga setiap orang bisa merasakan tatapannya dengan penuh kasih sayang, tutur katanya yang *rahmatan lil alaamiin*, dan perilakunya yang amat menawan. Seorang pemimpin yang hatinya hidup akan selalu merindukan kebaikan, keselamatan, kebahagiaan bagi yang dipimpinya.

Rasulullah saw bersabda: *“Sebaik-baik pemimpin adalah yang kamu mencintainya dan dia mencintai kamu. Dia mendoakan kebaikan bagi kamu dan kamu pun mendoakan kebaikan baginya. Sejelek-jelek pemimpin adalah yang kamu membencinya dan ia pun membenci kamu. Kamu mengutuknya dan ia pun mengutuk kamu.”*

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menjalankan amanahnya dengan tulus dan menafkahkan jiwa raganya untuk kemaslahatan umat. Ia berkorban dengan mudah dan ringan karena merasa itulah kehormatan menjadi pemimpin, bukan mengorbankan orang lain.

Alangkah indah jika yang kita pikirkan adalah bagaimana berusaha menjadi jalan bagi kebaikan orang lain dan berkhidmat pada orang lain, sehingga tiap hari kita berusaha meraup ilmu agar dapat menjadi jalan hidayah. Pemimpin budiman tidak berpikir apa yang akan dia dapatkan dari umat, tetapi apa yang bisa dia berikan kepada umat. Bayangkan andaikata kita bisa menjadi seorang pemimpin yang menjadi suri teladan yang baik di rumah, di kantor, ataupun di lingkungan sekitar.

Terbayang jikalau meninggal, anak-anak dan saudara-saudara kita menabur doa setiap waktu karena terkenang akan keindahan pribadi kita. Bila kita seorang pemimpin di keluarga, tidak cukup hanya bisa memberi harta dan materi pada anak istri kita, karena penjahat pun bisa memberi harta. Yang mereka butuhkan adalah perhatian yang tulus, ucapan yang terjaga, perilaku yang budiman, dan keteladanan yang baik. Mungkin terlalu besar kalau kita berpikir bagaimana mengubah bangsa. Untuk itu, marilah kita berpikir bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri. Minimal, jangan biarkan diri kita menjadi hina karena mata yang tidak terjaga atau karena tutur kata yang penuh kesombongan.

Marilah kita tundukkan hati dan makna hidup dengan berkhidmat kepada orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Inilah "cermin" yang bisa kita raup dari kepemimpinan Rasulullah saw "pribadi agung", yang teladannya terus hidup dalam dada kita, kaum Muslimin hingga akhir zaman.

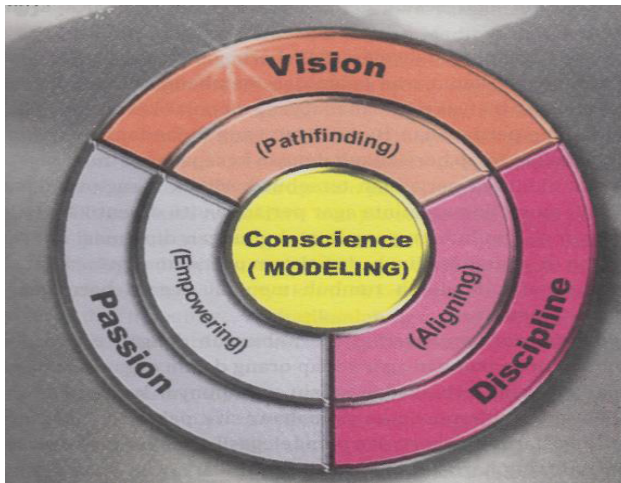
M. H. Hart (1978: 33) telah memilih Rasulullah saw sebagai orang yang paling berpengaruh dari 100 tokoh berpengaruh dunia dalam sejarahnya. Keputusan Hart tersebut tentunya didasarkan pada pertimbangan yang rasional, ia katakan:

"My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential person may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels".

Kenyataan tersebut dijadikan dasar pemikiran Muhammad Syafii Antonio dalam melihat kepribadian Nabi Muhammad saw berkaitan dengan manajemen dan kepemimpinan, ia katakan bahwa "hampir semua teori kepemimpinan ada pada Nabi Muhammad Saw". (Antonio: 2007: 19)

Beberapa contoh teori kepemimpinan yang diutarakan para ahli manajemen modern ternyata telah terdapat pada pribadi Rasulullah saw, misalnya, empat fungsi kepemimpinan (*the 4 roles of leadership*) yang dikembangkan oleh Stephen R. Covey. Konsep ini menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki empat fungsi kepemimpinan, yakni sebagai perintis (*pathfinding*), penyelaras (*aligning*), pemberdaya (*empowering*), dan panutan (*modeling*).

Sebagai penguat, keempat fungsi kepemimpinan itu digambarkan secara apik, seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2. Fungsi Kepemimpinan Stephen Covey

Selanjutnya keempat fungsi kepemimpinan dari Stephen Covey ini, dijabarkan oleh Syafii Antonio dengan sangat jelas sekali sebagaimana uraian berikut. *Fungsi perintis (pathfinding)* mengungkap bagaimana upaya sang pemimpin memahami dan memenuhi kebutuhan utama para *stakeholder-nya*, misi dan nilai-nilai yang dianutnya, serta yang berkaitan dengan visi dan strategi, yaitu ke mana perusahaan akan dibawa dan bagaimana caranya agar sampai ke sana.

Fungsi ini ditemukan pada diri Rasulullah saw karena beliau melakukan berbagai langkah dalam mengajak umat manusia ke jalan yang benar. Rasulullah saw telah berhasil membangun suatu tatanan sosial yang modern dengan memperkenalkan nilai-nilai kesetaraan universal, semangat kemajemukan, *rule of law*, dan sebagainya. Sistem sosial yang diakui terlalu modern dibanding zamannya itu dirintis oleh Rasulullah saw dan kemudian dikembangkan oleh para khalifah sesudahnya.

Fungsi penyelaras (aligning) berkaitan dengan bagaimana pemimpin menyelaraskan keseluruhan sistem dalam organisasi perusahaan agar mampu bekerja dan saling sinergis. Sang pemimpin harus memahami betul apa saja bagian-bagian dalam sistem organisasi perusahaan. Kemudian, ia menyelaraskan bagian-bagian tersebut agar sesuai dengan strategi untuk mencapai visi yang telah digariskan.

Rasulullah saw mampu menyelaraskan berbagai strategi untuk mencapai tujuannya dalam menyiarkan ajaran Islam dan membangun tatanan sosial yang baik dan modern. Ketika banyak para sahabat yang menolak kesediaan beliau untuk melakukan perjanjian perdamaian Hudaibiyah yang dipandang menguntungkan pihak musyrikin, beliau tetap bersikukuh dengan kesepakatan itu.

Terbukti, pada akhirnya perjanjian tersebut berbalik menguntungkan kaum Muslim dan pihak musyrikin meminta agar perjanjian itu dihentikan. Beliau juga dapat membangun sistem hukum yang kuat, hubungan diplomasi dengan suku suku dan kerajaan di sekitar Madinah, dan sistem pertahanan yang kuat sehingga menjelang beliau wafat, Madinah tumbuh menjadi negara baru yang cukup berpengaruh pada waktu itu.

Fungsi pemberdayaan (empowering) berhubungan dengan upaya pemimpin untuk menumbuhkan lingkungan agar setiap orang dalam organisasi perusahaan mampu melakukan yang terbaik dan selalu mempunyai komitmen yang kuat (*committed*). Seorang pemimpin harus memahami sifat pekerjaan atau tugas yang diembannya. Ia juga harus mengerti dan mendelegasikan seberapa besar tanggung jawab dan otoritas yang harus dimiliki oleh setiap karyawan yang dipimpinya. Siapa mengerjakan apa? Untuk alasan apa mereka mengerjakan pekerjaan tersebut? Bagaimana caranya? Dukungan sumber daya apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan bagaimana akuntabilitasnya?

Sejarah kenabian (*sirah nabawiyah*) menceritakan kecakapan Rasulullah saw dalam mensinergikan berbagai potensi yang dimiliki oleh para pengikutnya dalam mencapai suatu tujuan. Sebagai contoh, dalam mengatur strategi dalam peperangan uhud, beliau menempatkan pasukan pemanah di punggung bukit untuk melindungi pasukan infantri Muslim. Beliau juga dengan bijak mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar ketika mulai membangun masyarakat Madinah. Beliau mengangkat para pejabat sebagai *amir* (kepala daerah) atau hakim berdasarkan kompetensi dan rekam jejak (*track record*) yang mereka miliki. Tidak heran, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama (sekitar 10 tahun), beliau telah mampu mendirikan dasar-dasar tatanan sosial masyarakat modern. Pemimpin dunia lainnya mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk mencapai hal semacam ini.

Fungsi panutan (modeling) mengungkap bagaimana agar pemimpin dapat menjadi panutan bagi para pengikutnya. Bagaimana dia bertanggung jawab atas tutur kata, sikap, perilaku, dan keputusan-keputusan yang diambilnya. Sejauh mana dia melakukan apa yang dikatakannya.

Rasulullah saw menjadi panutan dalam melaksanakan nasihat dan saran-sarannya demikian juga dalam menjadi pribadi yang mulia. Beliau adalah seorang yang sangat dermawan kepada siapapun yang datang dan meminta pertolongan jauh sebelum mengatakan, "Tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah."

Tidak bermaksud mengaburkan uraian yang telah dinukil di atas, sekedar mengambil sebuah kesimpulan, menurut hemat penulis inti dari semua teori kepemimpinan itu berpulang kembali pada pribadi sang pemimpin itu sendiri. Dan hal pokok yang harus dimiliki adalah keteladanan. Karena sebaik apapun konsep dan pemikiran yang dimiliki oleh seorang pemimpin, tidak akan berarti apa-apa kalau dia sendiri tidak bisa melaksanakannya.

Rasulullah saw telah melakukan keempat fungsi kepemimpinan tersebut dengan sangat baik dan berhasil, walaupun demikian kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw tidak harus menunggu pembenaran dari teori-teori kepemimpinan dan manajemen modern karena apa yang dilakukannya telah terbukti berhasil.

Begitu juga, sifat-sifat dasar kepemimpinan yang dikembangkan oleh Warren Bennis (1994: 39-42), yaitu: a. *Guiding vision* (visioner), b. *Passion* (berkemauan kuat), c. *Integrity* (integritas), d. *Trust* (amanah), e. *Curiosity* (rasa ingin tahu), f. *Courage* (berani).

Rasulullah saw telah mengekspresikan sifat-sifat dasar kepemimpinan tersebut, yaitu:

- a. *Guiding vision* (visioner); Ia sering memberikan berita gembira mengenai kemenangan dan keberhasilan yang akan diraih oleh pengikutnya di kemudian hari. Visi yang jelas ini mampu membuat para sahabat untuk tetap sabar dan tabah meskipun perjuangan dan rintangan begitu berat.
- b. *Passion* (berkemauan kuat); Berbagai cara yang dilakukan musuh-musuhnya untuk menghentikan perjuangannya tidak pernah berhasil. Ia tetap tabah, sabar dan sungguh-sungguh.
- c. *Integrity* (integritas); Rasulullah saw dikenal memiliki integritas yang tinggi, berkomitmen terhadap apa yang dikatakan dan diputuskannya, dan mampu membangun tim yang tangguh seperti terbukti dalam berbagai ekspedisi militer.

- d. *Trust* (amanah); Ia dikenal sebagai orang yang sangat terpercaya (*al-amin*) dan ini diakui oleh musuh-musuhnya seperti Abu Sufyan ketika ditanya Hiraklius (Kaisar Romawi) tentang perilaku Rasulullah saw.
- e. *Curiosity* (rasa ingin tahu); Wahyu pertama yang diturunkan adalah perintah untuk membaca (*Iqra'*).
- f. *Courage* (berani); Kesanggupan memikul tugas kerasulan dengan segala resiko adalah keberanian yang luar biasa.

Rasulullah saw juga mempunyai ketrampilan-ketrampilan (*skills*) yang diramuskan oleh Burt Nanus (1985: 81-97), yaitu: a. Berpandangan jauh ke depan, b. Menguasai perubahan, c. Disain organisasi, d. Pembelajaran antisipatoris, e. Inisiatif, f. Penguasaan Interdependensi, g. Standar integritas yang tinggi.

Deskripsi beberapa ketrampilan (*skills*) Rasulullah saw dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Berpandangan jauh ke depan; ketika sedang menggali parit (*khandaq*) di sekitar kota Madinah, Nabi 'melihat' kejayaan muslim mencapai Syam, Parsi, dan Yaman.
- b. Menguasai perubahan; hijrah ke Madinah merupakan suatu perubahan yang diprakarsai Muhammad saw dan mampu mempengaruhi peta dan arah peradaban dunia.
- c. Disain organisasi: Ia mendesain bentuk tatanan sosial baru di Madinah segera sesudah hijrah ke kota itu. Misalnya mempersaudarakan *muhajirin* dan *ansar*, menyusun Piagam Madinah, dan membangun pasar dan masjid.
- d. Pembelajaran antisipatoris; Ia selalu mendorong untuk selalu belajar sepanjang hidup, sabdanya "Tuntutlah ilmu sejak dari buaian ibu sampai liang lahat".
- e. Inisiatif; Penaklukan Makkah dengan damai merupakan bukti keberhasilan kepemimpinan Muhammad saw.
- f. Penguasaan Interdependensi; Ia sering meminta pendapat para sahabat dalam persoalan-persoalan strategis misalnya dalam penentuan strategi perang dan urusan sosial kemasyarakatan.
- g. Standar integritas yang tinggi; Ia seorang yang adil dalam memutus perkara, jujur, dan toleran terhadap penganut agama lain.

Karakteristik nilai dasar kepemimpinan oleh James O'Toole telah diapresiasi oleh Muhammad saw sebagai berikut:

- a. *Integrity*; (artinya tidak pernah kehilangan pandangan), Muhammad saw tidak pernah kehilangan samangat meskipun tekanan dan permusuhan datang dari segala arah, hal ini terbukti dalam perang Hunain dan Uhud.
- b. *Trust*; (artinya dapat merefleksikan nilai dan aspirasi pengikutnya, dapat menerima kepemimpinan sebagai suatu tanggung jawab, bukan prestise). Sejak muda Muhammad dikenal sebagai orang yang sangat dipercaya. Ia pernah dipercaya untuk menyelesaikan peletakan Hajar Aswad yang hampir menimbulkan pertikaian di kalangan suku-suku Quraisy.
- c. *Listening*; (artinya mau mendengarkan orang-orang yang dilayani, tetapi tidak terperjara oleh opini publik). Nabi Muhammad saw sangat mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam perang Badar, Uhud dan Khandak.

Gaya dan sifat kepemimpinan yang dikonstruksi oleh para ahli manajemen modern, sesungguhnya telah digunakan oleh Rasulullah saw dalam kepemimpinan prophetiknya selama hidup beliau. Oleh karena itu, kepemimpinan dan manajemen Rasulullah saw harus diteladani oleh umatnya, khususnya lagi para ulama (kyai) sebagai pewaris ajaran para nabi (*warasatul anbiya*).

3. Kualitas dan Efektifitas Kepemimpinan Pendidikan

Pendidikan merupakan proses mendidik dari keadaan seseorang yang tidak mengetahui menjadi mengetahui. Pendidikan juga adalah kegiatan untuk menjadikan manusia unggul, sehingga memberikan kemanfaatan kepada semua orang di muka bumi. Tidak kalah pentingnya, pendidikan akan mampu mengangkat kesejahteraan seseorang, dan menjadikannya lebih terhormat dalam lingkungannya.

Secara umum pendidikan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan non-formal dapat terwujud dalam pembelajaran manusia secara alamiah, tidak memiliki lembaga khusus dan tidak memiliki sistem yang terstruktur.

Tentunya berbeda dengan pendidikan formal, semuanya terkendali dalam sistem yang disebut administrasi pendidikan. Bentuk pendidikan formal tercermin dari lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan seperti ini memiliki proses yang sistematis dalam mencapai kualitas pendidikan.

Produk akhir yang hendak dicapai dari proses pendidikan diawali dengan adanya *input*, yang kemudian menjadi dasar bagi lembaga untuk berproses yang akhirnya menghasilkan *output* pendidikan yakni peningkatan daya pikir, peningkatan daya kalbu dan peningkatan daya fisik. Sistem pendidikan seperti di atas hanya dapat tercapai, apabila memiliki kepemimpinan yang mampu mengarahkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi pendidikan untuk berpartisipasi aktif dan akhirnya terwujud sasaran pendidikan yang dikehendaki.

Terwujudnya sasaran pendidikan biasanya diiringi pula dengan adanya sokongan dari faktor kepemimpinan. Lembaga pendidikan memerlukan figur yang mampu mewujudkan, dan mengelola organisasi dengan efektivitas kepemimpinan yang tinggi. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan mencapai tujuan.

Menilai keefektifan suatu organisasi atau lembaga terdapat empat model pendekatan yaitu: pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment*), pendekatan sistem yang menekankan stabilitas, pendekatan konstituensi strategis yang menekankan terpenuhinya tuntutan para *stakeholder*, dan pendekatan nilai-nilai bersaing yang mempertemukan tiga kriteria yaitu *human relation model*, *open sistem model*, dan *rational goal model*.

lebih spesifik untuk mengukur efektivitas kepemimpinan pada umumnya merujuk pada tiga kelompok teori. *Pertama Traits Theory*. Teori ini berasumsi bahwa terdapat banyak karakteristik pribadi yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi pemimpin yang efektif. Oleh karena itu, efektivitas kepemimpinan seseorang diukur pada seberapa banyak karakteristik yang dipersyaratkan tersebut dimiliki. *Kedua Behavioral Theories*. Teori ini berasumsi bahwa keberhasilan atau efektivitas kepemimpinan dan kepatuhan bawahan terhadap pemimpin ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, efektivitas kepemimpinan seseorang diukur pada seberapa tepat seseorang menerapkan gaya kepemimpinan yang direkomendasikan. *Ketiga Contingency Theoris*. Teori ini mencoba mengakomodasikan variabel spesifik yang terlibat dalam situasi kepemimpinan. Teori Kontingensi menitikberatkan analisisnya pada faktor situasi dan menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah penerapan perilaku kepemimpinan yang tepat pada situasi yang tepat.

Dalam hubungan dengan situasi lembaga, Caplow yang dikutip oleh al Hadja (2003: 25):

Menawarkan suatu formula yang dinamai SIVA Variabel yaitu *Stability*, *Integrity*, *Voluntarism*, dan *Achievement*. *Stability* adalah kemampuan organisasi untuk memelihara atau meningkatkan statusnya dalam hubungannya dengan lingkungannya. *Integrity* ialah kemampuan organisasi untuk mengontrol konflik internal yang ditunjukkan oleh saling penyesuaian, kurangnya friksi, intensifnya komunikasi, dan besarnya konsensus. *Voluntarism* secara sederhana dapat disamakan dengan moral/semangat kerja yang ditunjukkan dengan rasa senang, jalinan persahabatan, kepuasan batin, dan keinginan anggota untuk tetap berpartisipasi sebagai bagian dari organisasi. *Achievement* ialah hasil dari kegiatan organisasi yang ditandai dengan keberhasilan dan kegagalan dalam mendapatkan tujuan umum dan tujuan spesifik dari organisasi.

Penjelasan seperti dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan pendidikan adalah tingkat keberhasilan pemimpin lembaga pendidikan dalam mempengaruhi setiap pengikutnya untuk melakukan aktivitas sehingga dapat mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu menciptakan stabilitas, integritas, voluntaritas, dan prestasi (*achievement*) atas sasaran administratif dan edukatif.

Setelah melihat bagaimana ukuran efektivitas kepemimpinan pendidikan, maka dapat dilihat pula tentang kualitas kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan mengacu pada kualitas tertentu yang harus dimiliki pemimpin pendidikan untuk dapat mengemban tanggung jawabnya secara berhasil. Apa saja kualitas itu?

Menurut Dharma (2003: 30) agar sukses menjadi seorang pemimpin dalam dunia pendidikan, ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu:

Pertama, pemimpin pendidikan harus tahu persis apa yang ingin dicapainya (visi) dan bagaimana mencapainya (misi). Kedua, pemimpin pendidikan harus memiliki sejumlah kompetensi untuk melaksanakan misi guna mewujudkan visi itu. Dan ketiga, pemimpin pendidikan harus memiliki karakter tertentu yang menunjukkan integritasnya.

Berikut ini dapat dilihat ketiga ukuran di atas, yakni sebagai berikut:

a. Visi dan Misi

Barangkali tidak banyak pemimpin pendidikan yang tahu persis apa visi lembaga mereka dan bagaimana caranya mewujudkan visi itu. Bahkan barangkali pula tidak banyak yang memahami benar arti visi dan misi. Hal

yang sama kemungkinan besar berlaku bagi para pejabat dalam jabatan-jabatan pimpinan lainnya. Pemimpin pendidikan yang bertanggungjawab berusaha mengetahui visi lembaganya. Jika belum ada, mereka akan berusaha merumuskannya dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Visi itu kemudian disosialisasikan sehingga menjadi cita-cita bersama. Selanjutnya ia akan berusaha secara konsisten untuk terus berupaya menggalang komitmen untuk mewujudkan visi itu. Ia tidak akan berdiam diri membiarkan visi itu menjadi rumusan indah yang menghiasi dinding kantornya.

b. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan yang diperlihatkan seseorang ketika melakukan sesuatu. Memahami visi dan misi serta memiliki integritas yang baik saja belum cukup. Agar berhasil pemimpin pendidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk dapat mengemban tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Ada kesepakatan bahwa pemimpin pendidikan perlu memiliki sejumlah kompetensi berikut:

- 1) Memfasilitasi pengembangan, penyebaran, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas lembaga.
- 2) Membantu, membina dan mempertahankan lingkungan lembaga dan program pengajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para pengajar dan staf.
- 3) Menjamin bahwa manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya lembaga digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif.
- 4) Bekerjasama dengan orang tua dan anggota masyarakat, menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat.
- 5) Memberi contoh (teladan) tindakan berintegritas.
- 6) Memahami, menanggapi, dan mempengaruhi lingkungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas.

c. Integritas

Integritas adalah ketaatan pada nilai-nilai moral dan etika yang diyakini seseorang dan membentuk perilakunya sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat. Ada ungkapan yang bagus untuk memahami pengertian integritas: integritas Anda tidak diukur dari kemampuan Anda menaklukkan puncak gunung, tetapi diri Anda sendiri. Setidaknya ada sejumlah ciri yang

menggambarkan integritas pemimpin pendidikan: dapat dipercaya, konsisten, komit, bertanggungjawab, dan secara emosional terkendali. Berikut penjelasan lebih lanjut:

- 1) Dapat dipercaya (amanah). Seorang pemimpin pendidikan haruslah orang yang dapat dipercaya. Kepercayaan itu diperolehnya secara sukarela, tidak dengan meminta apalagi memaksa orang lain untuk mempercayainya. Pemimpin pendidikan tidak perlu berpidato di depan para pengajar, peserta didik, atau orang tua bahwa ia adalah orang yang dapat dipercaya. Perilakunya sehari-hari telah menyampaikan informasi yang akurat tentang keamanahan itu.
- 2) Konsisten. Pemimpin pendidikan yang konsisten dapat diandalkan. Pemimpin pendidikan seperti ini perbuatannya taat asas dengan perkataannya. Pemimpin pendidikan seperti ini tidak bermuka banyak. Ia mengoperasionalkan kebijakan pendidikan secara tegas dan bijaksana, dan tidak perlu menjadi anggota bunglon sosial untuk mengamankan kebijakan itu.
- 3) Komit. Pemimpin pendidikan yang komit, terikat secara emosional dan intelektual untuk mengabdikan diri sepenuhnya bagi kepentingan anak didiknya. Pemimpin pendidikan seperti ini tahu persis bahwa tanggung jawabnya tidak mungkin dapat dipikulnya setengah-setengah. Pekerjaan sebagai pimpinan baginya bukan pekerjaan paruh waktu. Ia tidak boleh merangkap-rangkap pekerjaannya dengan pekerjaan lain, atau menjadi pemimpin lembaga pendidikan di lebih dari satu tempat.
- 4) Bertanggung jawab. Pemimpin pendidikan memiliki kewajiban sosial, hukum, dan moral dalam menjalankan perannya. Pemimpin pendidikan yang berintegritas tidak akan menghindar apalagi lari dari tanggungjawabnya. Pemimpin pendidikan yang mengutamakan kepentingan anak didiknya sadar betul bahwa secara sosial, hukum, dan moral ia harus berperilaku yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Secara emosional terkendali. Pemimpin pendidikan yang berkecerdasan emosi tinggi sangat menyadari pengaruh emosinya dan emosi orang lain terhadap proses pemikirannya dan interaksinya terhadap orang lain. Pemimpin pendidikan seperti ini mampu mengaitkan emosi dengan penalaran, menggunakan emosi untuk memfasilitasi penalaran dan secara cerdas menalar emosi. Dengan kata lain, ia menyadari bahwa kemampuan kognitif seseorang diperkaya dengan emosi dan perlunya emosi dikelola secara kognitif.

Setelah mengkaji tentang kepemimpinan pendidikan yang efektif, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan yang baik adalah kepemimpinan yang memiliki berbagai ragam ukuran, yakni memiliki misi, kompetensi, dan integritas. Apabila pemimpin memiliki semua hal tersebut dalam kepemimpinannya maka akan menghasilkan output yang baik, dan menciptakan lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi tinggi setelah selesai dari dunia pendidikan.

D. KESIMPULAN

Membahas tentang kepemimpinan, biasanya kita tidak akan lepas dari wadah dimana aktifitas kepemimpinan itu sering dilaksanakan, lembaga pendidikan adalah salah satunya. Lembaga pendidikan merupakan wadah untuk melaksanakan aktivitas pendidikan guna mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan akan dapat terwujud dengan efektif dan efisien apabila memiliki kepemimpinan yang efektif pula. Efektifnya kepemimpinan apabila para pemimpin bersedia untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi kemajuan lembaga pendidikan.

Berbagai riset juga telah membuktikan bahwa faktor pemimpin memegang peranan penting dalam pengembangan organisasi atau lembaga. Faktor dari pemimpin yang sangat penting adalah karakter yang dimiliki. Hampir 90 persen dari semua kegagalan kepemimpinan adalah kegagalan pada karakter.

Dalam perspektif Islam, karakter kepemimpinan yang ideal tentunya seperti yang telah diteladankan oleh Rasulullah saw kepada para sahabat atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ada beberapa karakter mulia yang telah dicontohkan sekaligus sebagai bahan pelajaran bagi kita semua, seperti: jujur dan tidak menipu, adil dan amanah, tidak wajib taat kepada pemimpin yang memerintahkan maksiat, tidak ada batasan ras atau kebangsaan, dan pemimpin wajib memilih bawahan yang jujur.

Terlepas dari semua itu, nilai karakter pemimpin paling utama yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw adalah keteladanan. Karakter ini akan selalu relevan dan penting, disamping telah diabadikan dalam kitab suci juga diakui oleh para ahli. Sederhananya, Rasulullah saw tidak akan melakukan atau mengucapkan sesuatu, kecuali beliau sendiri telah melakukannya.

Tentunya dalam dunia pendidikan, karakter ini juga sangat relevan untuk dibudidayakan. Karena peserta didik terkadang lebih mudah disentuh, dengan teladan-teladan dari para pendidiknya, dibanding ungkapan-ungkapan verbal. Apalagi kenyataan yang berlaku di lapangan tidak sesuai dengan yang diucapkan.

Daftar Pustaka

- Hart, M.H. (1978), *The 100: A Rangking of The Most Influential Person in History*, New York.
- Antonio, M.S. (2007), *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, Jakarta: PLM.
- Bennis, W. (1994), *On Becomming a Leader*, New York: Addison.
- Burt Nannus. (1985). *Leaders: The Strategies For Taking Changes*. New York: Harper & Row Publisher.
- Dharma, Agus. (2003). *Manajemen Supervisi (Petunjuk Praktis Bagi Para Supervisor)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Values of Tolerance Through Religious Learning at Al Hikmah Lasem Islamic Boarding School (Concepts, Strategies and Challenges)

Ahmad Fatah - ahmadfatah@iainkudus.ac.id,
Hilyatus Saadah - hilyatussaadah6@gmail.com, dan
Fifi Nofiaturrahmah - fifinofiaturrahmah@iainkudus.ac.id

Abstract

This study aims to describe and analyze the internalization of tolerance values through religious learning at the Al Hikmah Lasem Islamic Boarding School. The type of research used is field research, namely research that requires researchers to travel to the field to observe phenomena in a scientific context. The subjects in this study were caregivers, ustaz, head of the boarding school, administrators and students of Al-hikmah Lasem. The criteria for students used by researchers to determine research subjects are students who have lived in Islamic boarding schools for the range of 2-4 years. The result of this study is that the internalization of tolerance values at the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school is achieved through habituation strategies and exemplary strategies. The internalization process is carried out through religious learning both textually through book studies and contextually through examples and procedures for socializing and tolerance with the community. Supporting factors for achieving the internalization of the value of tolerance include: the motivation that is always given by caregivers, Ustaz and administrators to the students of the Al-Hikmah Lasem Islamic Boarding School; the condition or environment of the Al-Hikmah Lasem Islamic Boarding School; the existence of supporting facilities at the Al-Hikmah Lasem Islamic Boarding School. While the inhibiting factors are: the background of students who are different; lack of interaction between students and the Chinatown community.

Keywords: *tolerance value, religious learning, pesantren.*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis internalisasi nilai-nilai toleransi melalui pembelajaran agama di Pondok Pesantren Al Hikmah Lasem. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti melakukan perjalanan ke lapangan untuk mengamati fenomena dalam konteks ilmiah. Subjek pada penelitian ini yaitu pengasuh, ustaz, ketua pondok, pengurus dan santri Al-hikmah Lasem. Adapun kriteria santri yang digunakan peneliti untuk menetapkan subjek penelitian yaitu santri yang sudah tinggal di pesantren kisaran 2-4 tahun. Hasil kajian ini adalah internalisasi nilai-nilai toleransi di pondok pesantren Al- Hikmah Lasem tercapai melalui strategi pembiasaan dan strategi keteladanan. Proses internalisasi tersebut dilakukan melalui pembelajaran keagamaan baik secara tekstual melalui kajian kitab dan secara kontekstual melalui keteladanan dan tata cara bersosialisasi dan cara bertoleransi dengan masyarakat. Faktor pendukung tercapainya internalisasi nilai toleransi diantaranya: motivasi yang selalu diberikan pengasuh, Ustaz dan pengurus kepada santri Pondok pesantren Al-Hikmah Lasem; keadaan atau lingkungan Pondok pesantren Al-Hikmah Lasem; adanya fasilitas yang mendukung di Pondok pesantren Al-Hikmah Lasem. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu: latar belakang santri yang berbeda-beda; kurangnya interaksi antarsantri dengan masyarakat pecinan.

Kata kunci: nilai toleransi, pembelajaran keagamaan, pesantren.

A. INTRODUCTION

Education is the most important part of human life. Through education, humans are expected to play a role in life in society. Indonesia has three types of education, namely formal, informal and non-formal education. The educational institution that becomes the reference for alternative education for the community is the Islamic boarding school. Pondok Pesantren is an original Indonesian educational institution that is still growing rapidly today. Born, developed and integrated using the culture and culture of the Indonesian people, Islamic boarding schools still exist today (Mifachur Rohman, 2021: 31). Islamic boarding schools are believed to have an impact on a good life for the community, therefore making Islamic boarding schools occupy the main position according to the social, cultural and religious dynamics of the community.

At the beginning of its establishment, pesantren became an Islamic-based educational forum that taught about peace and local wisdom. The concepts of *tawassut*, *tasamuh* and *i'tidal* that have been formed by kiai in pesantren are a sign that pesantren is an institution that applies peace values (Irfan Setia, 2019: 3). Pesantren is an institution to deepen religious knowledge and at the same time become a center in the spread of Islam in society. In addition, Islamic boarding schools in their learning use unique methods that do not exist in other institutions (Ali Maksum, 2015: 85).

The Islamic boarding school education system is believed to be able to form a soul that has good morals and forms character in a person such as an attitude of brotherhood, help, independence and diversity (Mustafa, 2011: 162). In Islamic boarding schools, the kiai figure is very influential for his students, where the kiai is used as a role model in everything such as how to behave, speak politely, how to respect someone and so on.

Pesantren as the original educational base of Indonesia, have contributed and succeeded in upholding the values of peace and anti-radicalism. The creation of peace and tolerance between religious communities requires the participation of all parties, especially community leaders and religious leaders. Likewise, Islamic boarding schools teach tolerance based on *ukhuwah*. In its application, *ukhuwah* requires basic attitudes that adapt to social life, such as knowing each other (*ta'aruf*), helping each other (*ta'awun*) and loving each other (*tarahum*) (Irfan, 2019: 8). Tolerance is an attitude of mutual respect and respect for problems related to faith in humans. Tolerance becomes a foundation in shaping the rules of society so that they can live in peace. Therefore, tolerance becomes a desire for a prosperous and peaceful life, especially in a diverse society (Moch Sya'roni, 2019:80-81).

Until now, there are still many cases of intolerance occurring in Indonesia, cases of intolerance in Indonesia that occurred during 2015-2016 were found in several areas, such as Yogyakarta. As an example of the news the author took from Rappler.com:

“The case of the students of the Al Fatah Islamic Boarding School in Bantul is suspected of being victims of intolerance. The Al Fatah Islamic boarding school for transgender women in Bantul Yogyakarta has been closed, but religious activities at the pesantren are still being carried out. Several transgender women who had studied at this pesantren secretly gathered at the lodge to study Islam and pray. The Al Fatah Islamic Boarding School was founded in 2008, it has become a symbol of tolerance in Indonesia but hardliners have challenged the existence of this pesantren. Prior to the closure, there were a number of sympathetic residents living around the lodge. “They want to learn to read the Qur’an, they want to be good and better people than they are drunk,” said a neighbor Aris Susanto. However, the leadership of the Islamic Jihad Front had no mercy, so this Islamic boarding school had to be closed. Even though they also have the right to pray because they are also God’s creation” (Rappler.com).

From this case, we can understand that around us religious tolerance is still at issue, in order to prevent and overcome the problems that lead to the example above, awareness is needed for all humans who adhere to their respective beliefs to apply an attitude of tolerance to one another. So that it does not result in a sense of envy and quarrels between adherents of different beliefs. Allah says in the Qur’an Surah Al-Hujurat verse: 13

“O mankind, indeed we created you from a male and a female and made you into nations and tribes so that you might know one another. Verily, the most honorable of you in the sight of Allah is the most pious among you.”

In the verse it is clear that we were created by God in nations and tribes, so a difference that humans have is a common thing because the main goal is to get to know each other. Thus the importance of internalizing the value of tolerance in various educational institutions, especially when it is associated with Islamic religious learning. Because with Islamic religious education material, a teacher can teach the values of tolerance to students by respecting differences (M. Anas, 2019: 166).

In Islamic teachings, tolerance and religious harmony are attitudes taught by the Prophet. This happens when interacting with the pluralistic Medina community, both Muslim and non-Muslim. Therefore, tolerance is a manifestation of the vision of Islamic belief and is part of the framework of the Islamic theological system. Thus, religious tolerance must be studied in depth and applied in religious life because it is a social necessity for all religious people and is a way for the creation of inter-religious harmony.

Indonesian society is typically a plural society. The diversity of Indonesian society is not only due to the diversity of ethnicity, race and language, but also because of religion. The same thing happened to the people of Lasem Rembang. Religiously, the life of the Lasem community, which is plural, always runs dynamically and is conducive. The tolerant, inclusive and friendly attitude between religious adherents and sects in Lasem is very high. In the history of the Lasem community, Muslims who are dominated by indigenous people can live in peace and harmony with ethnic Chinese (Ahmad Attabik, 2016: 37).

Lasem is a city that has a history of tolerance between tribes and religious communities for centuries, an environment in which there are the largest Chinatowns, namely Chinatowns inhabited by people of Chinese descent. Tolerance in the Lasem Society is reflected through the architecture that has typical Chinese buildings. The proof of the existence of Chinese culture in Lasem is the existence of the three temples that are hundreds of years old. The three temples are Cu An Kiong Temple (located in Dasun Lasem village), Poo An Bio Temple (located in Karangturi Lasem village) and Gie Yong Bio Temple (located in Soditan Lasem village). In addition to cultural acculturation temples in the field of architecture, there are still many houses in the villages of Soditan and Karangturi Lasem which are styled typical of Chinese architecture, many relics of old buildings that have been empty with walls starting to peel which characterize Lasem's typical buildings (Diah Ayuningrum, 2017:131) .

Several studies reveal that the architecture in Lasem is a sign of the interaction between Chinese culture and the Muslim community in Lasem so that the values of tolerance in their lives are reflected. The attitude of tolerance that has been rooted in this city has made riots and conflicts never happen because the people are open in interaction without distinguishing between ethnicity, religion and culture, which has earned Lasem the nickname "Little China Town" (Juan Winy, 2017: 235-236).

Lasem is also known as “the City of Santri” because in Lasem there are 21 Islamic boarding schools spread over five villages, namely Karangturi, Soditan, Sumber Girang, Ngemplak and Gedongmulyo (Dwi Ratna, 2015: 4). The author will examine the Islamic boarding school Al-Hikmah Lasem. Al-Hikmah Lasem Islamic Boarding School is a boarding school located on Gambiran Street, Soditan, Lasem District which is managed by Kyai H. Sholahuddin Fatawi and Mrs. Hj. Hilyatus Sa’adah. The education system at the Al-Hikmah Islamic boarding school is a classical system of learning using the study of yellow books such as Nahwu, Fiqh, Hadith and Tafsir. Al-hikmah Islamic boarding school is also an open boarding school which means to provide a space for interaction between the surrounding community and the students (Sholihuddin Fatawi, 2021).

Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school is one of the Islamic boarding schools that upholds the values of tolerance between religious communities, having different backgrounds, one of which is in terms of religion. One aisle with the church, temple and Islamic boarding school, however, the life between the santri and the non-Muslim community is very harmonious, mutual cooperation and good interaction between the pesantren and the non-Muslim population. All of this is inseparable from the internalization of the values of tolerance instilled by the Al-Hikmah Lasem Islamic Boarding School through religious learning.

In general, religious learning at the Al-Hikmah Islamic boarding school uses a traditional pattern curriculum, namely the sorogan method and the bandongan *method*. get to know each other with caregivers. *Second*, the bandongan method is done by means of a kiai or cleric reading the contents of the book, while the students listen and give meaning to a book. Usually, the bandongan recitation activities are interspersed with good advice from kyai or ustaz who teach with the aim that students can live with respect for differences and can apply an attitude of helping each other (Sholihuddin Fatawi, 2021). The curriculum materials discussed at the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school are nahwu, sharaf, aqa’id, hadith, interpretation and Arabic. Through this religious learning, the process of internalizing the value of tolerance at the Al-hikmah Lasem Islamic boarding school can be realized by students in everyday life.

The process of internalizing the values of tolerance in Islamic boarding schools can be seen when learning takes place, the students must be able to apply and practice the attitude of *ta'awun* in everyday life, so between students one another must help each other and work together in carrying out activities in the community. Islamic boarding school. Al-Hikmah Islamic boarding school internalizes the values of tolerance through eating together on one tray, mutual cooperation with all students, both new and old students, and equal rights in bedding and cupboards. In addition, the Al-hikmah Islamic boarding school interacts with local residents well. Because in the pesantren environment, the people have different beliefs, namely Islam and China, so that students are encouraged to give the same treatment to non-Muslim communities. Between the santri and the Chinese community there is often interaction between the two, for example the Chinese community around attend the Haul and Maulid Nabi events even though they do not participate in praying together, the students also take part in takziah when a Chinese person dies with the intention of honoring him and when doing mutual cooperation between RTs of the Chinatown community. also do not hesitate to help clean up the local environment with the students (M. Mujib, 2022).

However, success in internalizing the values of religious tolerance depends on the strategy used in the process of internalizing the values of tolerance. According to researchers, the learning carried out at the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school is different from other Islamic boarding schools because the learning implemented in Islamic boarding schools emphasizes the internalization of religious tolerance values so that harmonious relationships are established with the surrounding community. Therefore, the researcher wants to reveal the strategies used by the kiai in internalizing the values of tolerance in the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school. Departing from the problems above, the researcher wants to conduct research with the theme "*Values of Tolerance Through Religious Learning at Al Hikmah Lasem Islamic Boarding School (Concepts, Strategies and Challenges)*".

The main objective of this study is to describe and analyze the internalization of tolerance values through religious learning at the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school both in terms of concepts, strategies and challenges. This is very important and useful, because it can be used as a lesson, understanding and role model for a tolerant pesantren, able to live peacefully and side by side in a heterogeneous and dynamic environment.

B. LITERATURE STUDY

1. The Concept of Tolerance Values and Religious Learning in Islamic Boarding Schools

a. Tolerance Values

Linguistically, the term “tolerance” comes from the Latin *tolare* which means to let other parties have other views or attitudes without being hindered. Tolerance does not mean that a person has to leave his own religious beliefs to associate and interact with other people and interact with other religions of a different kind. Tolerance means allowing differences, not forcing different people to be the same. Tolerance is an attitude of respect, allowing the existence of different adherents so that the identity of each group is not removed (Agus Ahmad, 2020: 19-20). Meanwhile, based on the term (*terminology*), tolerance is an attitude of respect, allowing and allowing someone to choose beliefs according to the teachings they hold. The concept of tolerance refers to behavior that can recognize that on this earth there are many differences, both from ethnicity, religion, culture and customs. As human beings, we must follow God’s instructions in dealing with these differences, because God reminds us of the diversity of humans both in terms of religion, ethnicity, skin color, culture and customs (Dwi Ananta, 2019: 2).

b. Forms of

1) Tolerance Religious

Tolerance This tolerance concerns one’s beliefs. Religion as a human belief so that there are still intolerant attitudes, sometimes people feel that their religion is the most correct religion so that it can bring down other religions and a dispute occurs. Islam gives the view that every belief must teach a good thing, so there is no need to feel that the religion he adheres to is the most correct, because everyone has the right to determine the choice of belief in his life.

2) Social tolerance

In Islam, it encourages its people to do social or social tolerance, because we live as social beings who cannot live alone without the help of others. So that God does not forbid to live in society with those of different religions.

c. Principles of Tolerance

Tolerance in Islam has a principle, because we live must know the limits and rules of tolerance. Some of the principles of tolerance include: *Al-hurriyyah al-diniyyah* (freedom of religion and belief). Freedom of religion and belief is a fundamental right that belongs to everyone. And Allah does not forbid each of his servants to be free to choose his belief. In QS Al-Baqarah; 256 Allah forbids forcing humans to choose certain religions and beliefs. One of the principles of religious freedom is to understand and respect differences, so that any differences must be communicated appropriately and wisely. Insulting the teachings of other religions is of course against the principle of freedom of religion. *Al-insaniyah* (humanity). Humans are *caliphs fi al-ardh* (leaders on earth). He was created to coexist in differences. Islamic tolerance teaches the maintenance of human values. One of them is the principle of justice. Justice is the main principle to realize human values in a peaceful life and justice must be the main principle to create a peaceful and harmonious life. Justice includes equality in all aspects of law, politics and security so that discriminatory behavior is not allowed (M. Fuad, 2019: 284-285).

d. Form of Internalization of Tolerance Values The

form of internalization of tolerance values in Islamic Religious Education learning is not only limited to respecting or respecting the beliefs of others, but tolerance in terms of muamalah is also limited. The forms of internalization of values in tolerance are:

- 1) Providing Islamic religious lessons that can be associated with tolerance, for example, moral aqidah lessons, so that students are not unfamiliar with the word tolerance.
- 2) Teach mutual love, help and respect so that students are accustomed to doing this in everyday life.
- 3) Connecting tolerance material with the teachings of Islamic religious education both from the Qur'an and Hadith, so that students understand the basis for tolerance.
- 4) Teachers provide direct examples or examples for students to always do good to friends, teachers and all citizens at school (Rahma, 2020: 64).

2. Religious Learning in Islamic Boarding Schools

a. Understanding Religious

Learning Learning comes from the word learning, which means one's efforts to change behavior as a whole. Learning has meaning as a process of interaction between students and students in a learning environment to achieve predetermined goals. To achieve teaching goals, an educator must provide learning materials according to their respective fields and must be supported by facilities so that learning objectives achieve good results.

The learning process contains four (4) main elements, namely there must be learning objectives, there are teaching materials, methods used are effective and also assessments. These four elements must be related to each other so that learning can be carried out optimally and get satisfactory results (Slameto, 2013: 2).

Religious learning is a process in which students and educators interact in the introduction and understanding of Islamic religious teachings, while advising to respect other religions so that national unity and integrity are realized through the basic teachings contained in the Qur'an and Hadith. Therefore, the purpose of religious learning is to develop people who believe and fear Allah and increase their faith by developing their knowledge and experience of the Islamic religion, thus making it a season that continues to grow in terms of faith and piety in the nation and state so that life can be achieved in the world. and in the afterlife.

According to Zuhairini, Islamic religious education learning materials or materials include:

- 1) The issue of Faith (Aqidah), in matters of faith this explains and teaches that we must believe that the God of the universe is Allah and Allah is one and only.
- 2) Islamic issues (Shari'ah), in Islamic matters there is a rule of God's law that must be carried out by all human beings in order to regulate human relations with God and also regulate human interactions so that there are no riots on this earth.
- 3) The problem of Ihsan (Akhlak), this is complementary and perfect in matters of faith and Islam so that humans can behave well, be polite and respect each other (Muawanah, 2011: 8).

b. Religious Learning

Method Method is an effective and efficient way to achieve the goal. Among the methods that can be used in learning Islamic religious education include:

a. The lecture

method is carried out by conveying learning material that is carried out by the teacher orally, here students only listen and write explanations from the teacher. There are advantages in using this lecture method, namely the efficient use of time and the messages conveyed can be understood clearly so that it can provide motivation to students in learning.

a. The discussion

method is a process that involves two or more individuals interacting, exchanging information and providing opinions. The advantage of this method is that the class atmosphere is more lively because each student can express their own opinion and the results of this discussion are easily understood by students. While the weakness of this method is that students who are not used to being active in class will find it difficult to express opinions or ideas that are on their minds, in this case the teacher must be able to work out how students can get their turn to speak.

b. Question and answer

method The question and answer method is learning that is carried out by the teacher giving questions to students and then students answering them or also conducting questions and answers between students and teachers. The advantage of the question and answer method is that learning in class is more active because this method can train children to express their opinions directly to the teacher and other students and develop students' courage in answering a question (Zuhairini, 2004: 11). While the weakness of this method is that it takes a long time because sometimes students think about whether the question is worth defending or not so students are afraid to ask the teacher.

c. This story

method is usually a teacher tells a story in which there is an impression so that students feel touched and try to do good things and keep away from bad deeds as a result of these stories.

²¹ The method of storytelling in the world of education that is unquestionably true is “the Qur’an and the story of the prophet”.

d. The mudzakarah

method is carried out by holding a scientific meeting in which it discusses religious issues. This mudzakarah method is usually used in Islamic boarding schools by means of a mudzakarah which is directly led by a caregiver then will discuss matters of a religious nature and the results will be assessed in seminars. The mudzakarah method is usually also carried out by fellow students to discuss religious issues that exist within the scope of the Islamic boarding school (Herdianto, 2015: 5-9)

a. The definition of Islamic

Boarding School comes from two words, namely Pondok and Pesantren. Pondok comes from the Arabic “Funduq” which means a place to stay. Meanwhile, pesantren comes from the Tamil language, from the word santri, with the prefix pe and the suffix -an which means student. Pesantren is a place to gain religious knowledge so that a soul can be formed in accordance with Islamic teachings and can be a guide for human life. Pesantren is a unique form of community environment that has its own character as an Islamic educational institution (Jasuri, 2015: 20).

There are differences of opinion about the origin of the term “Islamic boarding school”. Prof. John believes that the word pesantren comes from the word “santri”, which is taken from the Tamil language which means teacher of the Koran. Meanwhile, CC Berg argues that the word santri comes from the Tamil word “*satiri*”, which means people who live in huts or religious buildings in general (Herdianto, 2015: 11).

Abuddin Nata in his book “Kapita Selektta Pendidikan Islam” explains that the word pesantren comes from the word pesantren which means dormitory and a place where students learn the Qur’an. In a general sense, pesantren is a place in which there are kiai and santri who study the yellow book (Zulhingga, 2013: 166)

is a forum for deepening religious knowledge and is expected to be a provision for students in facing life in this world and in the hereafter.

b. Elements of Islamic Boarding School

1) Pondok

Pesantren is a place to live or dormitory for the students as a place to learn to live independently. The construction of this Islamic boarding school is usually on land owned by the kyai with complete facilities and infrastructure provided for the students so that they feel at home living there.

2) Santri

Understanding santri can be interpreted as people who come from distant areas and they live or reside within the scope of the pesantren. There are also students who come from the villages surrounding the pesantren and usually do not stay, but they still follow the activities in the pesantren.

3) Kyai

The existence of the kyai in the history of the pesantren is very important, because the sustainability of the pesantren depends on the role of the kyai in it. To find out who deserves to be called a kyai, has the following characteristics: (1) mastering religious knowledge as a whole, his knowledge gets recognition from the surrounding community (2) mastering religious books (3) obedient in worshipping Allah SWT and (4) have an independent and responsible attitude.

4) Mosques

In Islamic tradition, mosques cannot be separated from the educational process, because mosques can be used as a place to organize education. A kyai who wants to build a pesantren, the first step is usually to build a mosque near his house. It is in this mosque that kyai can instill discipline among students in performing the five daily prayers, studying religion and other knowledge.

a. Classical Islamic Books

What distinguishes learning in Islamic boarding schools from other educational institutions is by studying classical books, classical books are the writings of previous scholars which are still studied by students to this day. All classical books taught in Islamic boarding schools can be classified into 8 groups: Hadith, Fiqh, tafsir, Nahwu, Tawhid, Sufism, ushul fiqh and morality (Abdurrahman Mas'ud, 2013:26).

c. **Islamic Boarding School Learning System**

system is a complete component, each component works according to its function. The education system is an integrated unit of all educational units and related activities, among others, which seeks to achieve educational goals. Whereas in pesantren, the education system used is unique and does not exist in other educational institutions. Another distinctive feature of the education system in pesantren is the following teaching method:

- 1) Sorogan. Which comes from the Javanese language, namely sodoran or proffered means learning that is carried out individually where students face the kyai by reading some of the contents of the book and the kyai listens to them, when there is a wrong reading by the students, the kyai will give guidance until it is correct. The purpose of this sorogan method is that students always try to read and explore the contents of the book. By using this sorogan method, the santri and the kyai can interact more easily and get to know each other so that the students can be closer to the kyai.
- 2) Wetonan

Wetonan is a routine activity for students but is carried out at certain times. For example, it is held every Monday night or after the dawn congregation and so on. This wetonan teaching method is by way of the kiai reading the book at certain times and the santri bringing the same book to listen and listen to the reading. In this teaching system what the kiai reads cannot be ascertained because sometimes the book is not determined and sometimes it is also determined. Meanwhile, in its delivery to students there are various kinds, some are given meaning and some are interpreted as free.

3) Bandongan

In this bandongan system in teaching, the book read by the kiai and the one brought by the santri are the same, then the santri listen and listen to the kiai's reading by giving meaning or important notes in the book. The three learning methods can take place according to the condition of the kiai in each pesantren because everyone has a different way of explaining a lesson (Abudin Nata, 2013: 314).

A. DISCUSSION

1. Internalization of Tolerance Values Through Religious Learning at Al Hikmah Lasem

a. Socio-Historical Al Hikmah

Islamic Boarding School Al-Hikmah Lasem Islamic Boarding School was founded by one of the leaders of tolerance movement in Lasem, namely, KH. Moh. Sholihuddin Fatawi and Nyai Hj. Hilyatus Sa'adah. Al-Hikmah Lasem Islamic Boarding School was founded in 2013, was established in Soditan Village, Lasem District, Rembang Regency. With the help of educators or the Asatidz Council at the Al Hikmah Lasem Islamic Boarding School, a total of 10 people. The Islamic boarding school is relatively young but is the goal of prospective students to come and want to become students at the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school.

Pondok Pesantren Al-Hikmah Lasem is an educational institution that integrates Islamic values so that a generation of intelligent Muslims is created in a diverse social life. With a strong character is expected to be able to color and function in people's lives. As well as being able to increase the rate of rampant moral decadence, shifting values towards a negative direction, and decreasing the quality of education, it is hoped that the Al-Hikmah Lasem Islamic Boarding School can be the best solution in preparing for life from time to time.

Al-Hikmah Lasem Islamic Boarding School does not only focus on salaf education but also follows the times in which its students follow formal education levels, ranging from junior high school, senior high school, to higher education institutions spread across the Lasem area.

This teaches students that they must balance the interests of life in this world and in the hereafter. So the phrase “Intellectual Intelligence, Spiritual Intelligence, and Socially Independent” is suitable as the motto of the Al-Hikmah Lasem Islamic Boarding School.

Around the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school, ethnic Chinese housing is often found. Based on statistical data, the number of yellow-skinned and slanted-eyed residents in this pesantren RW reaches 90%, so it is not surprising that the Lasem people call this area the Chinatown.

The existence of pesantren in the midst of non-Muslim communities is a challenge for all components in pesantren. Despite being in a contradictory environment, the values of tolerance are upheld by the residents of the pesantren and the surrounding community. Mutual respect for religious freedom underlies the creation of a conducive environment, because the behavior of *tasamuh* towards neighbors, which is often taught and exemplified by caregivers, becomes its own philosophy for students so that they do not experience obstacles to interacting with the surrounding community. The harmony and peace of the community in respecting differences in Soditan village, one alley with Islamic boarding schools, temples and churches have really been tested and proven that there has never been a conflict, until now they live side by side in peace.

b. Religious Learning at the Al Hikmah Lasem Islamic Boarding School Religious

learning at the Al-Hikmah Islamic boarding school uses a classical system whose learning uses the study of the yellow book such as Tawhid, Morals, Fiqh, Hadith and Tafsir. While the methods used in the study of books at the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school are the bandongan method, the sorogan method and the marhalah method. The book recitation using the bandongan method at the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school is *first*, after the dawn prayer, namely the study of the Kasyifatun Only book which is supervised directly by the caregiver, namely KH. Sholihuddin Fatawi. *Second*, the recitation of the book of Mukhtarul Ahadist which is taught by Ustadz Mudzakir at 09.30-10.30. *third*, the study of the bandongan book which was conducted after Ba'da Isya', namely the book of Al-Ikhtishor, Tafsir Jalalain and Fathul Qorib.

Meanwhile, using the sorogan method, namely reciting the Qur'an every morning under the guidance of ustaz halim and ustaz jajang, and the ba'da dhuhur activity, where the students memorize the books of Aqidatul Awam and Alala and then offer their memorization to the tutor. And those who use the marhalah method, namely the recitation of books by Ba'da Ashar, this marhalah activity uses different books with different ustaz.

In addition to daily student activities, there are also weekly and annual activities. The weekly santri activities held at the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school include Barzanji and diba'an activities, pilgrimages to the graves of the masses and the reading of Asmaul Husna and Ratib. The barzanji and dhiba'an activities are carried out on Friday nights after the Isha prayers, which are followed by all students. This activity is carried out by chanting praises to the Prophet Muhammad so that later he will receive his intercession. Then the pilgrimage to the masyayikh's tomb was carried out on Friday morning after the morning prayers, the students made a pilgrimage to the masyayikh's grave which was located behind the Jami' Lasem mosque. And the reading of Asmaul Husna and Ratib was carried out on Tuesday night after the congregational Maghrib prayer.

The annual activities of the students include the month of Rajab, there are Rajabbiyah and Rihlah activities. This Rajabbiyyah activity is usually held with a recitation to commemorate the Isra' Mi'raj of the Prophet Muhammad SAW which is attended by the guardians of students, students and the surrounding community. After the Rajabbiyah activities, the caregivers invite the students to make a pilgrimage to the Wali Songo tomb which is held once a year. Then the activities of the month of Sha'ban, namely haflah Akhirussanah, usually this activity includes the students' marhalah exam, providing an evaluation during the year's activities and preparation for the month of Ramadan. In the month of Rabiul Awal there is a KMH event including a khatmil Qur'an event by students who have finished reciting the Amma juz and bin-nadhoh Al-Qur'an so that once a year there is a graduation or khatmil Qur'an, besides that, commemorating the birth of the Prophet Muhammad and the haul of the Lasem mayayikhs which were attended by all students, guardians of students and the general public.

The description of the activities and explanations show that the religious learning of the students includes comprehensive material, both *aqidah*, *sharia* and moral material. This shows that the strengthening of religious learning or often called *tafaqquh fi al din* is a priority in learning at the *pesantren*. On the other hand, the scope of religious learning time is also throughout the day and year. This means that it includes daily and weekly activities carried out throughout the year. This shows the consistency of the management of religious learning.

c. Strategy of Internalizing Tolerance Values Through Religious Learning at Al-Hikmah Islamic Boarding School Lasem

Strategy is a method used to achieve a goal. In internalizing the values of tolerance in the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school, there are several strategies used by KH. Moh. Sholahuddin Fatawi, namely:

a. Habituation

The habituation of the value of tolerance in Al-hikmah Islamic boarding schools is carried out through direct practice to students in the daily life of Islamic boarding schools, namely by getting students to interact more often with non-Muslim surrounding communities. Usually, interactions are established through jointly held activities such as community service among residents and also through large events held at the Al-Hikmah Islamic boarding school such as haul and birthday of the Prophet. This is supported by the researcher's observation that every time there is an event at the Islamic boarding school, the students and the community around the community work together. The community service is routinely carried out when there is a big event, namely the Prophet's haul and birthday at the Al-hikmah Islamic boarding school, even when the event is attended by many non-Muslim residents as a sign of respect.

b. Suri role model

The existence of a *kyai* in a boarding school is a person who directs the direction of education. In addition, all the attitudes and behavior of a *kyai* serve as an example. KH. Moh. Sholahuddin Fatawi or more familiarly called Gus Din is known as a *kyai* figure who is very wise and has a tolerant attitude towards all people. His tolerant attitude is what his students imitate.

The values of tolerance are taught and practiced directly by KH. Moh. Sholahuddin Fatawi as a caregiver and role model for students in building an attitude of tolerance is reflected in mutual respect, acceptance and mutual trust. Santri are educated to put forward a polite and courteous attitude because around the pesantren environment there are many non-Muslim residents. The reality of the tolerance of students with non-Muslim surrounding communities is widely applied in everyday life, as stated by Kang Abdul Mujib. According to researchers from several social activities carried out by Al-Hikmah Lasem students, this reflects their concern for society and the environment, this can also familiarize the relationship between pesantren residents and residents of the surrounding community, especially non-Muslim residents. Researchers are also interested in digging up information on how the Lasem people perceive differences so that they can live in harmony with one another. This is supported by the researcher's observations that the Al-Hikmah Islamic boarding school, both caregivers and students, highly respects the existing values of tolerance, mutual respect, mutual respect and mutual assistance if anyone is in need, both from Chinatown residents and Islamic boarding school students. All of this cannot be separated from the internalization of tolerance values taught by kyai in Islamic boarding schools to make it easier for students to be tolerant.

Furthermore, the caretaker of the Islamic boarding school, Mr. KH. Sholihuddin Fatawi gave examples to his students, such as joining together with neighbors or just being a whiz with the Chinatown residents, and vice versa, the local Chinatown residents also often came to the cottage to talk with the students. With this, students and Chinatown residents can live with respect for the rights of others so as to create a conducive and peaceful environment. The results of observations and interviews conducted by researchers at the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school showed that the students highly respected the values of tolerance as evidenced by the creation of a safe and comfortable environment that was felt by both students and Chinatown residents. The students of the Al-Hikmah Islamic boarding school interact well even though they are social in an atmosphere of different religions, races and ethnicities. This close relationship between students and residents

of Chinatown who do not differentiate can create an inclusive environment, where students and residents of Chinatown do not close themselves off so that they have the right to associate with whomever they wish.

Internalizing the values of tolerance in the Al-Hikmah Islamic boarding school is done through religious learning. Al-Hikmah Lasem Islamic Boarding School is a boarding school that uses a traditional learning system, namely the learning material using classical books and the learning methods used such as bandongan, sorogan and the marhalah method. The learning materials at the Al-Hikmah Lasem Islamic Boarding School are the creations of the pesantren caregivers which include Islamic sciences and Arabic using classical books. Meanwhile, the field of science that becomes a pressing point in the learning of the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school is the science of fiqh and morals.

According to the researcher, the goal to be achieved in providing education at the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school has not changed until now, namely the learning of Islamic religious sciences in the form of recitations of *salafiyah*, namely Nahwu, Sharf, Fiqh, Morals, Usul Fiqh, Tafsir, Hadith and Tasawwuf. The learning material above has been maintained until now. While the methods of learning the books of the Salaf are the sorogan, bandongan and marhalah methods.

a. Sorogan

Method The sorogan method is also known as individual learning in which the students face the kyai and then he reads, interprets words and sentences in a book. According to the researcher, the Sorogan method is very appropriate in evaluating the ability of students to understand the study of the yellow book, indeed this method requires patience and discipline so that students can easily master the learning of books in the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school.

b. Bandongan

Method The bandongan method is also used in the Al-hikmah Lasem Islamic boarding school, in which the boarding school caregivers read and interpret a book, then the students listen to it. Bandongan activities at the Al-Hikmah Lasem Islamic

boarding school are carried out through the yellow book recitation which takes place every day and is carried out at certain hours. This activity starts at 09-30 - finished (observation results). The activities that started at 09.30 were recitation of the book of Mukhtarul Ahadith which was taken care of by Ustadz Mudzakir, in the recitation of the book of Mukhtarul Ahadith there were many meanings contained in it which included law, character or morals, and procedures for socializing (including being taught how to tolerate well) (interview with Muhammad Mujib). According to the researcher, the recitation of the yellow book which is carried out using the bandongan method is one of the typical forms of a santri. The yellow book is one of the guidance for kiai/ustaz in training students to interpret the book in Arabic form of pegon. Santri also get a lot of knowledge that can be applied in practical daily life, one of which is mutual respect and respect between students and the community.

c. Marhalah

Method The Marhalah method is done by studying several books according to the method used by Utaz, some by memorizing, telling stories or interpreting a book. According to the author, this method is very appropriate for developing critical thinking. Marhalah activities at Al-Hikmah Islamic Boarding School are carried out every Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Saturday with different learning books. For Marhalah I, learning the book is easier because it is still in the early stages. Meanwhile, Marhalah II, the study of the book is deepened so that the students have broad religious knowledge. Marhalah learning is carried out at 16.00 - 17.00 if students who do not take part in marhalah activities without permission will be punished by the ustaz.

According to the researcher, both the bandongan, sorogan and marhalah methods are very influential for students in internalizing the values of tolerance, because they are educated and given learning to always be kind, polite and respect each other. Through religious learning through book studies, there are religious values (morals, fiqh and tolerance) that can be embedded and rooted in Al-Hikmah Lasem students and can be implemented in everyday life. In the research conducted, the students were never forced by their caregivers to carry out all learning activities at the Islamic boarding school.

1) Challenges and Opportunities in the Implementation of the Strategy of Internalizing Tolerance Values in Islamic

Boarding Schools Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school in internalizing tolerance values does not always run smoothly, in the sense that there must be an obstacle or something that hinders the process of internalizing tolerance values, There are several factors that support and hinder them, including:

1. Supporting Factors

- a. Motivation that is always given by caregivers, Ustaz and administrators to students at the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school

. Motivational activities at the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school are carried out once a week, this activity contains advice from KH. According to the researcher, motivational activities are very important for students, by providing motivation and fostering a spirit of enthusiasm in students and they will be afraid if they make mistakes or violate the rules in the pesantren so that they live with positive values every day.

According to the researcher, the supporting factors in internalizing the values of tolerance are not only within the pesantren environment but outside the pesantren environment. Residents around the boarding school are never disturbed by the activities in the boarding school. Even when there are activities organized by pesantren such as Haul, Maulid Nabi, Rojabiyyah, the surrounding community always attends the event. This is because the relationship between the surrounding community and all members of the pesantren is very well maintained so that they can live side by side in harmony and harmony.

- b. The existence of supporting facilities at the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school

The existence of supporting facilities at the Islamic boarding school such as the facilities provided also support the internalization of tolerance values. The infrastructure facilities at the Al-Hikmah Islamic boarding school are considered adequate for the daily needs of students.

The researcher concludes that the facilities built by the Islamic boarding school are also one of the factors that encourage internalizing the values of tolerance, the infrastructure at the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school has met the standards of the needs of the students in providing education such as the construction of only student dormitories, prayer rooms and marhalah rooms. .

2. Inhibiting Factors

a. Backgrounds of students are different

Students who are staying at the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school have different backgrounds, some are from Java and outside Java. The researcher concludes that in internalizing tolerance values, it cannot be separated from the inhibiting factors. The problems that occur in the Al-Hikmah Islamic boarding school are the different backgrounds of students so that their understanding is different, but with the strategies and methods used by kyai azan ustaz in religious learning so that students slowly understand the meaning of tolerance.

b. The lack of interaction between the students and the Chinatown community

The lack of interaction between the Chinatown community and the santri is also an inhibiting factor. Based on the results of interviews and observations, the researchers concluded that the lack of interaction between the Chinatown community and Al-Hikmah Lasem's students was not a trigger factor because the tolerance attitude taught to the students looked good, as evidenced by the harmonious living environment in the Chinatown community. strategies taught by kyai to students. In internalizing the values of tolerance in Islamic boarding schools, Al-Hikmah Lasem must have a strategic plan to achieve a satisfactory result in accordance with the vision and mission of the pesantren. Strategy is a plan drawn up to achieve the desired goal. This is in line with the concepts and forms of strategy as quoted by Ali Aziz in the book "Science of Da'wah" regarding the da'wah strategy. Al Bayuni divides da'wah strategies into 3 (three) forms, namely sentimental strategies, rational strategies and sensory strategies (Moh Ali Aziz, 2004: 349).

A. CONCLUSION

Strategy of Internalizing Tolerance Values Through Religious Learning at Al-Hikmah Lasem Islamic Boarding School, it was concluded that:

1. the habituation and exemplary strategies. In internalizing the values of tolerance at the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school, it is carried out through religious learning, one of which is the recitation of the book of Mukhtarul Ahadith, in the study of the book of Mukhtarul Ahadits many meanings are contained in it which include law, character or morals, and procedures for socializing (including in it taught how to tolerate well). So that in religious learning, either directly or indirectly, the kiai or ustad set aside theories about tolerance with the aim that students always remember to honor neighbors and help each other.
2. In the implementation of the internalization of tolerance values at the Al-Hikmah Lasem Islamic boarding school, there are supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors include 1) The motivation that is always given by caregivers, Ustaz and administrators to the students of the Al-Hikmah Lasem Islamic Boarding School, 2) The situation or environment of the Al-Hikmah Lasem Islamic Boarding School, 3) The existence of supporting facilities at the Al-Hikmah Lasem Islamic Boarding School. As for the inhibiting factors, namely 1) the different backgrounds of students, 2) the lack of interaction between students and the Chinatown community.

References

- Abdul Halim, Wawancara dengan Ustaz Pesantren, pada 8 Januari 2022.
- Abdurrahman Mas'ud, *Kyai Tanpa Pesantren*, (Yogyakarta:Gama Media, 2013), 26.
- Abudin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), 314.
- Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Toleransi Kontestasi, Akomodasi, Harmoni*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 19-20.
- Ahmad Atabik, Harmonisasi Kerukunan Antar Etnis dan Penganut Agama di Lasem, *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 4, no. 1 (2016): 37
- Ahmad Azhar Basyir, *Akidah Islam (Beragama Secara Dewasa)*,(Yogyakarta: UII Press, 2013), 23.
- Ali Maksum, Model Pendidikan Toleransi di Pesantren Modern dan Salaf, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2015): 85.
- Diah Ayuningrum, Akulturasi Budaya Cina dan Islam Dalam ArsitekturTempat Ibadah di Kota Lasem, *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 12, no. 2 (2017): 131.
- Dwi Ananta Devi, *Toleransi Beragama*, (Semarang: Alprin, 2019), 2.
- Dwi Ratna Nurhajarini, dkk, *Akulturasi Lintas Zaman Di Lasem Perspektif Sejarah dan Budaya*, (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 2015), 4.
- Fajrun Najah, Wawancara dengan Ustaz Pesantren, pada 8 Januari 2022.
- Hasil Observasi di Pondok Pesantren Al Hikmah Lasem Pada 8 Januari 2022.
- Herdianto Wahyu Pratomo, Metode Pembelajaran dalam Tradisi Pendidikan Islam, *Al-Akhbar* 4, no . 2 (2015): 5-9.
- Hertina, Hasil wawancara dengan warga pecinan desa Soditan Lasem, pada 7 Januari 2022
- Irfan Setia Permana, Implementasi Toleransi Beragama di Pondok Pesantren, Jasuri, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Usia Dini, *Jurnal Madaniyah* 5, no. 1 (2015): 20.

- Juan winy Putra, Gregorius Sri Wuryanto, Akulturasi dalam Arsitektur Lasem Serta Relevansinya dengan Berkelanjutan Kawasan Lasem, *Proseding Seminar Nasional Energi Effecient For Sustanable Living*, 2017: 235-236. *Jurnal Studi Agama-Agama 2*, no. 1 (2019): 3.
- KH. Sholihuddin Fatawi, Wawancara dengan pengasuh pondok Pesantren Al-Hikmah Lasem,
- Lely Nisvilyah, Toleransi Antar Umat Beragama dalam Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan 2*, no. 1, (2013): 383-384.
- Miftachur Rohmah, Moh Yasir Alimi, Eksistensi Pondok Pesantren Di Lingkungan Non Muslim Tionghoa, *Solidariti 10*, no. 1 (2021): 31.
- Moch Sya'roni Hasan, Internalisasi Nilai Toleransi Beragama, *Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora 6*, no. 1 (2019): 80-81
- Moh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 349
- Mohammad Fuad Al Amin, Konsep Toleransi dalam Islam danImplementasinya di Masyarakat Indonesia, *Jurnal Madaniyah 9*, no. 2 (2019): 284-285.
- Mu'awanah, *Strategi Pembelajaran Pedoman Untuk Guru dan Calon Guru*, (Kediri: STAIN KEDIRI PRESS, 2011), 8
- Muhammad Anas Ma'arif, Internalisasi Nilai Multikultural Dalam Mengembangkan Sikap Toleransi, *Jurnal Pendidikan Islam 2*, no. 1 (2019): 166
- Muhammad Bashori, Hasil wawancara dengan Santri Pesantren, pada 6 Januari 2022.
- Muhammad Mujib, Wawancara dengan pengurus pesantren, Pada 06 Januari
- Muhammad Zaeni, Hasil wawancara dengan Santri Pesantren, pada 6 Januari 2022
- Muhammad Zaeni, Hasil wawancara dengan Santri Pesantren, pada 6 Januari 2022
- Mustafa Rahman, *Humanisasi Pendidikan Islam*, (Semarang: Walisongo, 2011), 162

Rahma Fitria Awal, Nilai-nilai Toleransi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, *Tarbiyah Islamiyah* 11, No. 1 (2020): 64.

Rappler.com, *Ketika Santri Transgender Menjadi Korban Intoleransi*, <https://www.rappler.com/world/148702-ketika-santri-transgender-menjadi-korban-intoleransi/>

Sie Hwie Djan, Wawancara dengan masyarakat pecinan Desa Karangturi, pada 15 April 2022

Slameto, *Belajar dan faktor yang mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 2.

Zuhairini, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Malang: UIN Press, 2004), 11.

Zulhimma, Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia, *Jurnal Darul Ilmi* 1, no. 2 (2013): 166.

Pengorganisasian Dalam Manajemen Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits

Anggita Arum Sari

anggitaarumsari18@gmail.com

Pascasarjana IAIN Kudus

Abstrak

Pengorganisasian merupakan aspek penting yang patut diperhatikan selain perencanaan. Apalah arti perencanaan matang tanpa diimbangi dengan pengorganisasi yang baik, tentu perencanaan tersebut akan sulit terealisasi. Karena begitu pentingnya langkah pengorganisasian, Allah SWT sendiri di dalam Al-Quran telah memberikan contoh kepada manusia bagaimana Allah Swt melakukan langkah pengorganisasian setelah Dia melakukan perencanaan yang matang dalam proses penciptaan langit dan bumi. Keberadaan organisasi sangat penting bagi manusia karena alat untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan.

Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman yang jelas mengenai pengorganisasian dalam manajemen pendidikan yakni proses penentuan struktur, aktivitas, interkasi, koordinasi, desain struktur, wewenang, tugas secara transparan, dan jelas. sebagaimana dalam Q.S Az-Zukhruf ayat 32, Q.S Al-Anfal ayat 46 dan Q.S Asy-Syura Ayat 13. Gambaran kisah penerapan pengorganisasian juga dijelaskan dalam Hadits Riwayat Imam al-Bukhari dan Hadits Riwayat Muslim bahwa dalam manajemen pendidikan Islam pengorganisasian harus menjalankan sesuatu sesuai dengan fungsinya, karena dalam prinsip pengorganisasian terdapat pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik dan manusia dalam organisasi. Maka dari itu seseorang yang mendapatkan wewenang harus menjalankan tugas sebaikbaiknya. Hal tersebut bertujuan untuk melakukan wewenang tersebut dengan sebaik-baiknya agar efektif dan efisien dalam memenuhi tujuan pendidikan Islam.

Kata Kunci: *Pengorganisasian; Manajemen Pendidikan Islam*

Abstract

Organizing is an important aspect that deserves attention besides planning. What's the meaning of careful planning without being balanced with a good organizer, of course the planning will be difficult to realize. Because of the importance of organizing steps, Allah SWT himself in the Qur'an has given an example to humans how Allah swt took the steps of organizing after He did careful planning in the process of creating the heavens and the earth. The existence of an organization is very important for humans because it is a tool to achieve the desired life goals.

The Qur'an and Hadith provide clear guidelines regarding organization in education management, namely the process of determining the structure, activities, interactions, coordination, structural design, authority, tasks in a transparent and clear manner. as in Q.S Az-Zukhruf verse 32, Q.S Al-Anfal verse 46 and Q.S Ash-Shura Verse 13. The description of the story of the application of organizing is also explained in the Hadith History of Imam al-Bukhari and Hadith History of Muslim that in the management of Islamic education the organization must carry out something according to its function, because in the principle of organizing there is an arrangement of working together with financial, physical, and human resources in the organization. Therefore, someone who gets the authority must carry out his duties as well as possible. It aims to carry out this authority as well as possible so that it is effective and efficient in meeting the goals of Islamic education.

Keywords: *Organizing; Islamic Education Management*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan hadist merupakan pedoman umat Islam dengan berbagai petunjuk agar manusia dapat menjadi khalifah yang baik di muka bumi ini. Untuk memperoleh petunjuk tersebut diperlukan adanya pengkajian terhadap al-Qur'an dan hadist itu sendiri, sehingga kaum muslimin benar-benar bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pada isi kandungan al-Qur'an tersebut yang di dalamnya kompleks membahas permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang belum terjadi. Semua hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, maupun keberadaan alam ini sudah termaktub dalam al-Qur'an dan hadis. Termasuk permasalahan perencanaan mulai dari asal kejadian manusia, sampai pada aktivitas yang dilakukan manusia semua tertulis di dalam al-Qur'an dan hadis (Muhammad Utsman Najati 2012:11).

pengorganisasian merupakan langkah lanjutan setelah perencanaan yang mencerminkan langkah bagaimana suatu organisasi menyelesaikan rencana tersebut. Sehingga pengorganisasian mencerminkan fungsi manajemen yang berkaitan dengan penetapan dan pengelompokan tugas-tugas kedalam departemen dan pengalokasian sumber daya keberbagai departemen. Dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan sebuah upaya manajerial untuk mengatur sekelompok elemen (anggota/bagian) dari suatu lembaga atau instansi tertentu sehingga tujuan-tujuan organisasi yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam pengorganisasian seorang manajer harus bisa menempatkan suatu pekerjaan kepada orang yang tepat. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam memberikan wewenang untuk seseorang haruslah disesuaikan dengan kriteria standart yang ada dan sesuai kemampuan yang dimiliki, agar pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan lancar. Apabila dalam pengorganisasian terutama dalam lingkup manajemen pendidikan Islam memberikan wewenang kepada yang bukan ahlinya maka tujuan dalam pendidikan tersebut tidak akan tercapai dengan maksimal.

KAJIAN LITERATUR

Manajemen harus mengetahui perbedaan tiap individu pekerjaan mereka dan harus mencoba untuk mengeksplorasi kebutuhan individu dan memotivasi, sehingga guru atau pegawai dapat memberikan yang terbaik di tempat kerja dan tetap terlibat dengan baik dengan pekerjaan dan berkomitmen dengan organisasi juga. Manajemen pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang berupa pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan agar kegiatan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien (Indrawan 2015:2)

Pendidikan Islam akan dapat berhasil dan berjalan dengan efektif dan efisien apabila ditopang dengan adanya pengorganisasian yang baik haruslah mempunyai pijakan yang baik dan etika dalam berorganisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik, kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan non manusia pada pelaksanaan tugas. Semua sumber daya manusia yang ada harus harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi.

Sebuah organisasi atau lembaga dibangun dengan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh seluruh anggota organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan akan tercapai apabila dalam sebuah lembaga atau organisasi mampu secara optimal memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dalam ilmu manajemen dikenal dengan fungsi manajemen. Fungsi dalam manajemen dikenal dengan *Planning, Organizing, Actuating, dan Controring (POAC)* (Aditama 2020:10).

Pengorganisasian yang baik akan menghasilkan organisasi yang baik, mulai dari sturukturnya, sumber daya manusia maupun aspek yang lainnya. Dalam pengorganisasian terdapat proses pembagian kerja dalam tugas-tugas tertentu, membebaskan tugas tersebut kepada seseorang berdasarkan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasi proses tersebut agar terwujud efektifitas dalam organisasi (Sugeng Kurniawan 2015:8).

PEMBAHASAN

Pengorganisasian dalam Manajemen Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an

1. Al-Qur'an Surah Az-Zukhruf ayat 32

Pengorganisasian dalam manajemen Pendidikan Islam, bahwasannya seorang pemimpin memiliki derajat yang lebih tinggi dan wewenang yang lebih tinggi daripada bawahannya, karena dalam pengorganisasian hakikatnya mengelompokkan kegiatan dan diikuti dengan penugasan seorang manajer yang diberi wewenang mengawasi anggota kelompok, maka dari itu dalam kegiatan pengorganisasian seseorang harus menerima dengan baik dan menjalani tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya dengan maksimal agar tercapai keseimbangan dalam lingkup organisasi pendidikan islam. Karena Allah lah yang meninggikan derajat orang tersebut dari sebagian yang lain dalam hal ini seorang pemimpin atau manajer.

Allah Swt berfirman dalam Q.S Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِمًا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا ظُلْمًا أَلَيْسَ لِي عِزٌّ مَّا يَكْفُرُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”

Kandungan ayat tersebut menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menerangkan bahwa Allah-lah yang membagikan rahmat kenabian kepada manusia, bukan orang-orang kafir yang membagi rahmat kenabian sesuai kehendak mereka. Bahwasannya Allah lah yang membagi-bagikan penghidupan bagi mereka, sehingga Allah lebih meridloi beberapa hamba daripada yang lain, dalam hal kekayaan, kemiskinan, kekuatan, kelemahan, pengetahuan dan kebodohan, ketenaran, karena Allah meninggikan Sebagian mereka diatas Sebagian yang lain. Serta rahmat Allah (Kenabian) lebih baik daripada kenikmatan dunia yang mereka kumpulkan.

2. Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 46

Dalam sebuah organisasi tentu ada pemimpin dan bawahan. Sementara itu pengorganisasian dalam kaitannya dengan pendidikan Islam, Pengorganisasian dalam pendidikan Islam adalah proses penentuan struktur, aktivitas, interkasi, koordinasi, desain struktur, wewenang, tugas secara transparan, dan jelas. Dalam lembaga pendidikan Islam, baik yang bersifat individual, kelompok, maupun kelembagaan. Sebuah organisasi dalam manajemen pendidikan Islam akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan organisasi yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika kesemua prinsip ini dapat diaplikasikan secara konsisten dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam akan sangat membantu bagi para manajer pendidikan Islam. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Anfal ayat 46:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.”

Tafsir mufrod dari surah Al-Anfal ayat 46 yaitu: *وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ* adalah kamu berselisih, *فَتَفْشَلُوا* adalah yang menyebabkan kamu menjadi gentar *رِيحُكُمْ* yakni kekuatanmu, *وَاطِيعُوا اللَّهَ* yaitu dan taatilah Allah.

Dalam kaitannya dengan pengorganisasian, Rasulullah SAW telah mencontohkan ketika memimpin perang uhud. Ketika pasukan Islam pimpinan Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan angkatan perang kafir Quraish didekat gunung Uhud. Nabi SAW mengatur strategi peperangan dengan sempurna dalam hal penempatan pasukan. Beberapa orang pemanah ditempatkan pada suatu bukit kecil untuk menghalang majunya musuh.

Pada saat perang berkecamuk, awalnya musuh menderita kekalahan. Mengetahui musuh kocar-kacir, para pemanah muslim meninggalkan pos-pos mereka di bukit untuk mengumpulkan barang rampasan. Pada sisi lain, musuh mengambil kesempatan ini dan menyerang angkatan perang muslim dari arah bukit ini. Banyak dari kaum Muslim yang mati syahid dan bahkan Nabi SAW mengalami luka yang sangat parah. Orang kafir merusak mayat-mayat kaum Muslim dan menuju Makkah dengan merasa suatu kesuksesan.

Dari cerita sejarah Nabi Muhammad SAW yang tertulis di atas, dapat diketahui suatu tindakan pengorganisasian. Nabi Muhammad memerintahkan kepada pasukan pemanah untuk tetap berada di atas bukit dalam keadaan apapun. Ternyata pasukan pemanah lalai dari perintah atasan, kemudian mereka meninggalkan tempat tugasnya dari atas bukit untuk mengambil harta rampasan ketika musuh lari kocar-kacir. Tanpa disadari musuh menyerang balasan dari sebelah bukit yang berakibat pada kekalahan pasukan muslim. Kalau pasukan pemanah memperhatikan dan melaksanakan perintah pimpinan (Nabi Muhammad SAW) tentu ceritanya akan lain.

3. Al-Qur'an Surah Asy-Syura Ayat 13

Dapat dipahami bahwa dalam menjalankan syariat berupa pokok-pokok agama Islam dilarang saling berpecah-belah, meskipun dalam praktiknya banyak perbedaan namun pokok-pokok dalam agama Islam tetaplah sama. Apabila kandungan ayat tersebut ditarik dalam konsep pengorganisasian dalam manajemen Pendidikan Islam memiliki beberapa relevansi. *Pertama* agama Islam dimaknai sebagai sebuah organisasi besar yang memiliki seperangkat aturan yang pokok, sama halnya dengan organisasi Pendidikan Islam, pasti memiliki peraturan yang harus dilaksanakan dengan baik. *Kedua*, umat Islam dilarang bercerai-berai antara satu dengan yang lain hanya karena perbedaan praktik syariat yang dibawa oleh setiap Nabi.

Sama halnya dengan pengorganisasian dalam sebuah organisasi Pendidikan Islam, bahwasannya pengorganisasian menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang didalamnya sehingga akan terwujud satu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Maka setiap orang akan dibebankan dengan pekerjaannya masing-masing dan setiap pekerjaan pasti memiliki karakteristik yang berbeda dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain, maka dari itu dalam sebuah pembagian tugas (pengorganisasian) orang yang terikat didalamnya tidak boleh terpecah belah satu sama lain, karena ada keterkaitan satu sama lain dan membentuk seperti simbiosi mutualisme dalam organisasi Pendidikan Islam (Ngalim Purwanto 2007:16). Allah Swt berfirman dalam Q.S Asy-Syura ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا
الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ
يُنِيبُ

“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).”

Adapun perintah untuk tidak berpecah belah yakni janganlah berselisih di dalam pokok-pokok agama seperti tauhid, shalat, puasa, zakat, haji dan pokok agama yang lain, karena hal tersebut tidak patut untuk diperselisihkan. Sesungguhnya amat berat apa yang diserukan Nabi Muhammad bagi orang-orang kafir untuk mengesakan Allah dan Allah lah yang memilihkan manusia untuk beriman bagi siapapun yang Allah kehendaki. Adapun menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsirnya al-Munir menerangkan bahwa Allah telah mengutus para Nabi dengan syariat yang berbeda-beda, dan menyempurnakan syariat tersebut kepada utusan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad, maka dari itu orang-orang yang beriman dilarang berselisih paham/berpecah-belah tentang hal tersebut. Karena pokok-pokok agama yang diajarkan oleh Nabinabi terdahulu sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Solallahu ‘Alaihi Wa Sallam, yaitu dalam meng-Esakan Allah dan menaatinya beriman kepada Rasul Hari Kiamat dan Ibadah lainnya (M. Wahbah al-Zuhaili 2020:39).

Pengorganisasian Dalam Manajemen Pendidikan Islam Perspektif Hadist

1. Hadist Riwayat Imam al-Bukhori

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُبِعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخارى)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari ‘Atho’ bin yasar dari Abu Hurairah radhilyayhu’anhun mengatakan; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; “bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.”

Dari kandungan hadist tersebut dapat dipahami bahwa ketika manusia menyalahi amanat dengan cara menyerahkan sesuatu perkara kepada orang yang bukan ahlinya maka akan terjadi kehancuran. Apabila makna tersebut dihubungkan dengan pengorganisasian dalam manajemen pendidikan Islam maka sangat dapat diterima, bahwasannya dalam pengorganisasian harus menjalankan sesuatu sesuai dengan fungsinya.

Maka dari itu dibutuhkan orang yang benar-benar ahli dalam menjalankan wewenang yang diamanatkan kepadanya. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan suatu lembaga pendidikan Islam dalam mencapai tujuannya. Apabila wewenang tersebut diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka akan terjadi kekacauan pada sistem dan hasil output, sehingga tujuan tidak dapat dicapai dengan baik. Seperti halnya apabila melakukan pengangkatan seorang kepala sekolah, maka wajib dalam hal ini adalah orang yang sudah ahli dalam bidang kepemimpinan di lembaga Pendidikan, tidak hanya itu melakukan pembagian wewenang seperti halnya guru, staf dan yang lainnya juga harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian masing-masing agar tercapai tujuan suatu lembaga pendidikan Islam dengan baik (Husaini 2019:168).

2. Hadist Riwayat Imam al-Bukhori

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَيْلَ بْنَ زَيْدٍ فَجَعْفَرُ وَإِنْ فَيْلَ بْنَ زَيْدٍ فَجَعْفَرُ فَقَعْبُدُ اللَّهُ بْنُ رَوَاحَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْعَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلِ وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بَضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمِيَةٍ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Bakar Telah menceritakan kepada kami Mughirah bin Abdurrahman dari Abdullah bin Said dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar radhiallahu’anhuma, katanya, Rasulullah dalam perang Mu’tah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai komandan, lantas Rasulullah berpesan, “Jika Zaid bin Haritsah gugur, maka Ja’far yang mengganti, jika Ja’far gugur, maka Abdullah bin Rawahah sebagai penggantinya.” Kata Abdullah, aku berada ditengah-tengah pasukan dalam peperangan itu. Lantas kami mencari-cari Ja’far bin Abu Thalib, dan kami temukan ia di antara para prajurit yang terbunuh dan kudapati ditubuhnya ada sekitar sembilan puluh lebih luka karena tombak atau panah.”

Makna secara umum kandungan hadist tersebut adalah Abdullah bin' Umar menceritakan bahwa Nabi Muhammad telah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi komandan perang mu'tah. Kemudian Rasulullah berpesan kepada pasukannya yang hendak berangkat apabila Zaid gugur maka digantikan oleh Ja'far, dan apabila Ja'far gugur maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Dalam perang tersebut ketiga sahabat tersebut berperang hingga titik darah penghabisan dan semua sahabat yang telah ditunjuk tersebut gugur dalam perang mu'tah. Kemudian Khalid bin Walid menggantikan ketiga sahabat tersebut untuk menjadi komandan perang dan Khalid bin Walid merancang strategi baru dalam perang tersebut hingga membawa pasukan Muslimin menuju keselamatan dalam hal ini perang melawan 200.000 tentara romawi dengan 3000 pasukan muslimin berakhir dengan seimbang (Al-Asqalani 2020:512).

Dari hadist tersebut apabila dihubungkan dengan pengorganisasian dalam manajemen pendidikan Islam dapat diambil beberapa ibrah yaitu *pertama*, organisasi ibarat suatu pasukan dimana perlu adanya pembagian tugas, dalam hal ini adalah pengorganisasian. Rasul mengangkat dan memberi wewenang Zaid bin Haritsah sebagai komandan perang, hal tersebut merupakan contoh dari pengorganisasian yang dilakukan oleh Rasul, karena dalam pengorganisasian memerlukan pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada setiap individu untuk melakukan tugasnya dengan efektif.

Yang *kedua*, Zaid bin Haritsah dipilih menjadi komandan perang berdasarkan kriteria tertentu yang orang lain tidak memilikinya, sama halnya dengan pengorganisasian, apabila menempatkan wewenang kepada seseorang harus berdasarkan kriteria tertentu dan sesuai dengan keahliannya.

Ketiga, Rasul memberi amanat apabila Zaid bin Haritsah gugur maka digantikan oleh Ja'far, apabila Ja'far gugur maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Hal tersebut apabila dimaknai dalam pengorganisasian bermakna bahwasannya setiap pendelegasian wewenang harus memikirkan beberapa kemungkinan yang terjadi dan sebagai seorang manajer harus sudah memiliki cadangan agar tujuan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien (Husain Usman 2019:143).

3. Hadist Riwayat Imam Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُثَيْبَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَخْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَخْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُجِدَّ أَعْنَاقُكُمْ شَفْرَتَهُ فليُرَخَّ ذَبِيحَتَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Ulayyah dari Khalid Al Khaddza’ dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy’ats dari Syaddad bin Aus dia berkata “Dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah, beliau bersabda “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisamu dan senangkanlah hewan sembelihanmu.”

Menurut Imam an-Nawawi dalam kitab syarh Muslim menerangkan bahwa ucapan Rasulullah Sholallahu ‘Alaihiwa Sallam sesungguhnya Allah telah menetapkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu (termasuk kepada hewan) maka Ketika kalian membunuh (menyembelih) maka baguskanlah pada tata cara menyembelihnya dan Ketika kalian menyembelih supaya menajamkan pisanya dan supaya membaringkan hewan tersebut (membaringkan pada posisi nyaman) dan mengistirahatkan hewan tersebut pada saat disembelih. Jadi ucapan nabi bermakna umum untuk semua hewan yang disembelih tidak boleh dianiaya. Kemudian hukum tersebut juga berlaku untuk hukuman *qisash* ataupun *had* (rajam) dimana orang yang akan dieksekusi tidak boleh dianiaya hal tersebut merupakan hukum syara’ dalam agama islam agar memperbaiki cara membunuhnya. Hadis ini termasuk kumpulan sabda Nabi pada dasar agama Islam (Abu Zakariya Muhyiddin Nawawi 2018:106-107).

Apabila makna tersebut dihubungkan pada pengorganisasian manajemen pendidikan Islam maka pada setiap tugas yang di amanatkan baik itu dari atasan ataupun yang lainnya, harus dilakukan dengan sebaikbaiknya. Karena dalam prinsip pengorganisasian terdapat pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik dan manusia dalam organisasi. Maka dari itu seseorang yang mendapatkan wewenang harus menjalankan tugas sebaikbaiknya. Hal tersebut bertujuan untuk melakukan wewenang tersebut dengan sebaik-baiknya agar efektif dan efisien dalam memenuhi tujuan pendidikan Islam (Husaini Usman 2019:144).

SIMPULAN

Pengorganisasian merupakan aspek penting yang patut diperhatikan selain perencanaan. Apalah arti perencanaan matang tanpa diimbangi dengan pengorganisasi yang baik, tentu perencanaan tersebut akan sulit terealisasi, karena begitu pentingnya langkah pengorganisasian. Adapun ayat yang berkaitan dengan pengorganisasian dalam manajemen pendidikan islam terdapat 3 ayat yaitu:

1. Q.S Az-Zukhruf ayat 32

Nilai yang dapat diambil dalam surah tersebut adalah seorang pemimpin memiliki derajat yang lebih tinggi dan wewenang yang lebih tinggi daripada bawahannya, karena dalam pengorganisasian hakikatnya mengelompokkan kegiatan dan diikuti dengan penugasan seorang manajer yang diberi wewenang mengawasi anggota kelompok, maka dari itu dalam kegiatan pengorganisasian seseorang harus menerima dengan baik dan menjalani tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya dengan maksimal agar tercapai keseimbangan dalam lingkup organisasi manajemen pendidikan islam.

2. Q.S Al-Anfal ayat 46

Nilai yang dapat diambil dalam surah tersebut adalah Dalam kaitannya dengan pengorganisasian, Rasulullah SAW telah mencontohkan ketika memimpin perang uhud. Ketika pasukan Islam pimpinan Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan angkatan perang kafir Quraish didekat gunung Uhud. Nabi SAW mengatur strategi peperangan dengan sempurna dalam hal penempatan pasukan.

3. Q.S Asy-Syura ayat 13

Nilai yang dapat diambil dalam surah tersebut adalah pengorganisasian dalam sebuah organisasi Pendidikan Islam, bahwasannya pengorganisasian menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang didalamnya sehingga akan terwujud satu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang ditentukan.

Sedangkan hadist yang berkaitan dengan pengorganisasian dalam pensisipan islam disebutkan terdapat 3 hadist yaitu:

1. Hadist Riwayat Imam al-Bukhori

Nilai yang dapat diambil dalam hadist tersebut adalah dalam manajemen pendidikan Islam maka sangat dapat diterima, bahwasannya dalam pengorganisasian harus menjalankan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Maka dari itu dibutuhkan orang yang benar-benar ahli dalam menjalankan wewenang yang diamanatkan kepadanya. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan suatu lembaga pendidikan Islam dalam mencapai tujuannya.

2. Hadist Riwayat Imam al-Bukhori

Nilai yang dapat diambil dalam hadist tersebut adalah setiap pendelegasian wewenang harus memikirkan beberapa kemungkinan yang terjadi dan sebagai seorang manajer harus sudah memiliki cadangan agar tujuan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

3. Hadist Riwayat Imam Muslim

Nilai yang dapat diambil dalam hadist tersebut adalah setiap tugas yang di amanatkan baik itu dari atasan ataupun yang lainnya, harus dilakukan dengan sebaikbaiknya, karena dalam prinsip pengorganisasian terdapat pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik dan manusia dalam organisasi. Maka dari itu seseorang yang mendapatkan wewenang harus menjalankan tugas sebaikbaiknya. Hal tersebut bertujuan untuk melakukan wewenang tersebut dengan sebaik-baiknya agar efektif dan efisien dalam memenuhi tujuan pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashfihani, Al-Maraghi, *Mufrodad fi Gharib al-Qur'an*, Juz 25, Maktabah Syamilah: Android.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fathal-Bari*, Juz 7, Darul al-Ma'rifah: Bairut Lebanon.
- Al-Zuhaili, M. Wahbah, *Tafsir al-munir*, juz 25, Maktabah Syamilah: Android.
- Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, Bandung, Pustaka Educa, 2010
- Fathurrohman, Muhammad "Pengorganisasian Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist (Kajian Tafsir Tematik), *Edukasi* 04, no. 02, 2016.
- Ibn Isma'il, Muhammad, Shahih Bukhari, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam: Aplikasi Android*, Hadis nomor 3928.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*, Surabaya: Halim Publishing, 2013.
- Kurniawan, Sugeng, "Konsep Manajemen Pendidikan Islam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist (Studi Tentang Perencanaan), *Nur El-Islam* 2, no. 2, 2015.
- Muslim bin al-Hajaj Abu Hasan, *Shahih Muslim*, *Ensiklopedi, Hadis 9 Imam*, Aplikasi Android, Hadis nimir.
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004
- Tajang, Darussalam dan Zulfikar, *Konsep Perencanaan dalam Islam: Suatu Pengantar*, Makassar: Management Departement, 2020.
- Usman, Husaini, *Manajemen Pendidikan: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Utsman Najati, Muhammad, *Al-Qur'an wa ilm Nafs*, terjemahan. Hedi Fajar, ed. II Agus Salim, 2011, Bandung, CV. Marja.
- Zakariya, Abu Muhyiddinan Nawawi, *Syarah Muslim*, Juz 13 Maktabah Syamilah: Android.

KEBIJAKAN KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DI MI MIFTAHUL HUDA TAYU

Arih Wildania

IAIN Kudus

arihwildaniaa@gmail.com

Abstrak

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Guru tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan pengetahuan akademik saja, akan tetapi juga harus bisa membentuk dan memenuhi kebutuhan peserta didik lainnya dari segi moral, serta spiritual. Pemenuhan kebutuhan peserta didik tersebut dapat tercapai apabila guru memiliki kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan suatu kompetensi atau keterampilan yang dimiliki guru dalam melakukan pengelolaan proses pembelajaran dengan peserta didik. Akan tetapi, apabila guru tidak memiliki kompetensi pedagogik yang mumpuni, akan berdampak pada kualitas peserta didik. Untuk itu, perlu adanya kebijakan kepala madrasah dalam upaya meningkatkan kompetensi guru sehingga kepala madrasah dapat lebih mengetahui sejauh mana kemampuan guru baik dari segi ilmu maupun keterampilan yang diperoleh pada saat melakukan proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan dalam pengambilan sumber data dilaksanakan secara purposive dan snowball. Adapun kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru salah satunya dengan mengadakan beberapa program kegiatan pelatihan pembuatan media pembelajaran, pelatihan penyusunan soal ulangan, pelatihan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan lain sebagainya. Selain itu, kepala madrasah juga mempunyai beberapa strategi dalam upaya meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diputuskan kepala madrasah dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagogik guru sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci : kebijakan; guru; kepala madrasah; kemampuan; pedagogik

Abstract

Teachers play a critical role in the educational system. Teacher responsibilities go beyond simply imparting academic information; they also include helping to develop students' moral and spiritual character. The needs of these students can be met if the teacher has pedagogical competence. Furthermore, if a teacher lacks adequate pedagogical skills, it will have an effect on the quality of the students. For this reason, it is important for the head of the madrasa to have a policy to improve teacher competence. This way, the head of the madrasa can better know how much the teacher knows and how well they can teach. This study employed a qualitative descriptive research approach, and data collection was conducted purposefully and by snowballing. In order to improve the pedagogical competence of teachers, the heads of madrasas implement multiple training activity programs for creating learning media, training in the preparation of test questions, training in the preparation of learning implementation plans, etc. In addition, the head of the madrasah has a number of ways to improve the teachers' ability to teach. According to the findings of this study, the policies that the principal of the madrasah decided to implement in order to improve the pedagogical competence of teachers appear to have been successful thus far.

Keyword : policy; teacher; head master; ability; pedagogic

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam bahasa arab dinamakan dengan tarbiyah yang memiliki peranan penting bagi manusia untuk mencerdaskan individu dan kehidupan bangsa. Pendidikan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan supaya dapat mencetak generasi yang berilmu. Dalam sebuah Hadist diterangkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap manusia. Dengan begitu tarbiyah atau pendidikan memang sangatlah penting. Sebagaimana wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang pertama kali yaitu surah Al-'Alaq ayat 1-5, dan ayat yang pertama terdapat kata *Iqro'* yang artinya bacalah. Kata *Iqro'* mempunyai makna yang luas, tidak hanya dimaknai dengan membaca, tetapi lebih dari itu mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan sehingga peradaban keilmuan umat manusia dapat berkembang (Veitzal Rivai Zainal & Fauzi Bahar, 2013).

Mengenai pendidikan termaktub pula dalam undang-undang dasar 1945 setelah amandemen UUD 1945 yang keempat bab VIII yaitu pada pasal 31 ayat 1 berbunyi warga negara berhak mendapat pendidikan, kemudian pasal 2 yakni setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009). Pada pasal yang sudah disebutkan tersebut, mengandung makna bahwa setiap warga negara harus menempuh pendidikan. Pendidikan dapat diperoleh dari madrasah atau sekolah yang tentu dapat mendukung peserta didik mendapatkan ilmu, melatih kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Tercapainya tujuan pendidikan dalam madrasah maupun sekolah, terdapat komponen yang berperan serta didalamnya termasuk kepala madrasah dan juga para pendidik yaitu guru.

Salah satu komponen yang penting dalam keberlangsungan proses pendidikan yaitu guru. Seseorang yang berprofesi sebagai guru tentu harus mempunyai keahlian dan keterampilan yang mumpuni dalam menyampaikan suatu ilmu pengetahuan kepada peserta didik (Moh Uzer Usman, 2003). Tanpa adanya suatu keahlian yang dimiliki dan kurangnya kompetensi dan keterampilan dalam mengajar akan berdampak tidak terlaksananya fungsi dan tugas yang dijalankan sebagai guru. Seorang guru bisa memiliki kompetensi yang baik apabila mempunyai kemampuan yang dapat diperoleh melalui proses pendidikan dan latihan (Sahertian, 1990).

Kompetensi guru yang berkaitan dengan pengelolaan proses belajar mengajar atau pembelajaran peserta didik yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan keahlian yang harus dimiliki guru untuk melakukan pengelolaan pembelajaran pada peserta didik. Pengelolaan

tersebut diantaranya meliputi bagaimana seorang guru bisa memberikan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan penerapan pembelajaran, evaluasi dari hasil belajar, dan pengembangan peserta didik dengan maksud untuk menyalurkan berbagai kompetensi yang dimilikinya (Departemen Pendidikan Nasional RI, 2005).

Kompetensi pedagogik guru mempunyai peran serta yang penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya pendidik yang kompeten akan menunjang berhasilnya tujuan pendidikan. Oleh karena itu perlu diperhatikan akan pentingnya kompetensi pedagogik guru yang mana terdapat keterkaitan antara kompetensi pedagogik guru dengan prestasi belajar siswa. Guru memiliki tanggung jawab untuk membentuk dan memenuhi kebutuhan peserta didik tidak hanya dari segi intelektual, moral, tetapi juga spiritual dan kebutuhan fisik peserta didik lainnya (Samsil Nizal, 2002). Guru yang memiliki kompetensi pedagogik tentu dapat merealisasikan pemenuhan kebutuhan peserta didik tersebut.

Menurut Anifa Alfia Nur dalam jurnal administrasi pendidikan FIP UNP yang berjudul "Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di SD Yayasan Mutiara Gambut" terdapat penjelasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam proses belajar mengajar yaitu latar belakang pendidikan seorang guru dapat mempengaruhi dalam hal pengelolaan peserta didik. Karena apabila pendidikan guru misalnya dalam bidang yang mumpuni seperti jurusan yang diambil merupakan pendidikan keguruan madrasah ibtidaiyan maupun sekolah dasar, tentu akan sangat menunjang kecakapan dan kemampuan dalam mengajar. Pengalaman yang dimiliki guru juga menjadi sorotan, mengingat guru yang berpengalaman atau sudah pernah mengajar bertahun-tahun akan lebih berdampak dalam segala hal positif seperti guru dapat lebih mengembangkan metode dan media dalam proses pembelajaran.

Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pedagogik seorang guru dapat melalui proses yang sistematis dan kontinue, juga dibutuhkan dukungan dan kebijakan dari berbagai pihak salah satunya yang paling berperan yaitu kepala madrasah yang berprofesi sebagai supervisi atau pengawas bagi guru. Kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan memiliki peranan yang penting dalam menempatkan pondasi pendidikan bagi pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lembaganya. Dengan begitu, kepala madrasah perlu membekali dirinya dengan memperdalam jiwa kepemimpinan, kompetensi dan *skill* (keterampilan) supaya lembaganya dapat berkembang lebih baik (Ninie Widiarochmawati, 2010).

Para ahli pendidikan mengamati kebijakan seorang pemimpin di seluruh lembaga pendidikan khususnya yang terkait dengan kebijakan kepala madrasah. Kepala madrasah menjadi pemimpin yang mempunyai tanggung jawab terhadap eksistensi atau keberadaan lembaga pendidikan. Dalam proses pendidikan, pendidik atau guru juga mempunyai tanggung jawab untuk mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan (Samsul Nizal, 2002). Oleh karena itu, guru yang menjadi anggota didalamnya sudah tentu memerlukan dukungan dan motivasi dari pimpinannya.

Ketika seorang pemimpin mampu memberikan motivasi kepada anggotanya pada saat menjalankan tugas, tentu akan berdampak positif bagi guru. Diantaranya yaitu guru akan semakin rajin dan dapat bekerja secara efektif serta mampu memberikan hasil yang baik. Pendidikan di suatu madrasah dapat mencapai keberhasilan pada hakikatnya bergantung kepada kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalitas guru pada saat melaksanakan suatu kepemimpinan pendidikan (Mulyasa, 2009). Untuk meningkatkan profesionalitas guru, kebijakan kepala madrasah sangatlah penting. Dalam meningkatkan profesionalitas guru didasarkan pada kompetensi, tugas, dan fungsi kepala madrasah (*principle planning*) (Hari Suderajat, 2005).

Kepala madrasah sebagai seorang pemimpin memiliki kebijakan dalam mewujudkan dan mengembangkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Kebijakan yang dijalankan kepala madrasah dalam upaya meningkatkan kompetensi guru merupakan salah satu cara kepala madrasah untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh para pendidik yang dipengaruhinya, baik dari segi ilmu maupun keterampilan yang diperoleh selama belajar mengajar (Mulyasa, 2009). Kebijakan kepala madrasah di MI Miftahul Huda Tayu dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru dilakukan dengan cara mengembangkan visi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya.

Hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan di MI Miftahul Huda Tayu, pelaksanaan kebijakan kepala madrasah dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru sudah berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan dan kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Kepemimpinan yang baik perlu dimiliki oleh semua kepala madrasah, dengan kepemimpinan yang sesuai dengan aturan, kepala madrasah nantinya dapat mewujudkan kebijakan-kebijakan yang layak

dan strategis. Dengan begitu dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi melalui pembinaan pedagogik guru dan apa saja hambatan yang di hadapi kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru.

KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Kepala Madrasah

Kebijakan terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti serangkaian dasar dan rencana yang menjadi pedoman dalam beberapa pelaksanaan diantaranya pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan juga dapat berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu maupun beberapa kelompok dengan tujuan supaya tercapai keputusan yang bijaksana. Adapun kebijakan kepala madrasah merupakan kebijakan dalam menentukan keputusan yang telah diputuskan terlebih dahulu secara arif dan bijaksana. Keputusan-keputusan tersebut ditujukan untuk seseorang maupun sekelompok orang dengan maksud agar mencapai tujuan yang sudah di inginkan (Burhanudin, 1994).

Pembahasan kebijakan dalam ranah pendidikan, terbagi menjadi empat bagian yaitu yang pertama kebijakan yang berkaitan dengan fungsi esensial diantaranya seperti kurikulum, rekrutmen, penetapan tujuan serta penerimaan peserta didik. Kedua yaitu kebijakan yang berkenaan dengan madrasah tersebut dan keseluruhan komponen dan sistem kependidikan yang terdapat di madrasah. Kebijakan yang ke tiga berkaitan dengan penerimaan guru, supervisi, promosi, dan penggantian seluruh staf. Dan kebijakan yang terakhir yaitu kebijakan yang berkenaan dengan pengalokasian sumber daya manusia seperti sumber dana atau sumber finansial, sarana dan prasarana, bangunan gedung dan beberapa perlengkapan lainnya (Syaiful Sagala, 2009).

Kebijakan dapat menciptakan dan mengarahkan sasaran dengan jelas atas kegiatan yang ingin di capai. Dengan begitu kebijakan sangatlah penting karena kebijakan dapat pula mewujudkan kinerja yang baik sehingga bawahan dapat termotivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan memaksimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kebijakan yang diputuskan dan diambil oleh seorang pemimpin perlu tertulis agar dapat dievaluasi karena tidak boleh menyimpang dari prosedur yang berlaku (Muzakkie Zabir, 2018).

Pendidikan yang mempunyai mutu baik, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan apabila sumber daya manusia sudah berkualitas akan menjadi penentu tinggi rendahnya suatu bangsa. Perlu dipahami pula bahwa salah satu tujuan pendidikan merupakan bagaimana bisa mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik supaya memiliki keterampilan dan cakap dalam suatu bidang keahlian yang dimilikinya. Pengembangan peserta didik sudah pasti tidak terlepas dari peran pendidik yaitu guru (Bahru Djirimu, 2016)

Kepala madrasah berperan sebagai penentu arah kebijakan dan memberikan keputusan-keputusan yang menentukan bagaimanapun tujuan madrasah dan pendidikan nantinya dapat diwujudkan atau terealisasi, termasuk dalam meningkatkan kompetensi guru. Kepala madrasah sebagai salah satu komponen yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.

Hal tersebut berdasarkan pada undang-undang dasar 1945 pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 menyatakan bahwa “kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana (Mulyana, 2004). Berdasarkan pasal yang sudah dikemukakan tersebut, kepala madrasah perlu memiliki strategi yang tepat dalam meningkatkan kompetensi guru. Karena guru berperan penting dalam suatu lembaga pendidikan.

2. Kompetensi Guru

Kompetensi guru adalah kemampuan atau keterampilan dan keahlian awal yang harus guru miliki dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Tanpa memiliki keahlian maupun kompetensi, guru tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai seorang guru. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pengertian tersebut sesuai dengan yang dikemukakan dalam undang-undang republik Indonesia nomor 14 tahun tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 1.

Banyak definisi kompetensi dari berbagai ahli, salah satunya menurut Mulyasa menyatakan bahwa kompetensi merupakan perpadanan beberapa unsur berupa keterampilan atau kemampuan, pengetahuan, nilai, sikap yang

dapat dilihat dari bagaimana bisa direalisasikan dalam kebiasaan bertindak dan berfikir (E Mulyasa, 2004). Hornby mengemukakan kompetensi adalah orang yang mempunyai kesanggupan, kewenangan, kemampuan, keterampilan, serta pengetahuan untuk menjalankan sesuatu yang memang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang tepat (ASW Hornby, 1982). Sedangkan menurut Sahertian, kemampuan merupakan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam rangka menjalankan sesuatu yang ingin didapat melalui proses latihan dan pendidikan (Sahertian, 1990). Hal tersebut berarti seorang individu, dalam hal ini yaitu seorang guru bisa mendapatkan kompetensi yang mumpuni harus melalui proses pendidikan sehingga nantinya memperoleh kualifikasi akademik tertentu dan bisa dengan cara mengikuti pelatihan.

Makna kompetensi selanjutnya secara lebih luas dimaknai dengan standar kemampuan yang dibutuhkan untuk menggambarkan kualifikasi dan kualitas seseorang yang dilihat tidak hanya secara kuantitatif tetapi juga kualitatif dalam melandasi pelaksanaan tugas dan teknis secara profesional sesuai kemampuan yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kemampuan atau keahlian, dan kecakapan dalam bekerja manakala seseorang tersebut bisa bekerja secara optimal dan sesuai di bidangnya. Dengan begitu menjadi layak dikatakan sebagai seorang yang kompeten atau mumpuni.

3. **Kompetensi Pedagogik Guru**

Departemen Pendidikan R.I dalam peraturan pemerintah republik Indonesia pada pasal 28 ayat 1 mengenai standar nasional pendidikan menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Terdapat beberapa dimensi-dimensi kompetensi pedagogik yang dijabarkan, diantaranya yaitu :

a. Guru harus bisa menguasai karakteristik peserta didik

Guru yang bisa memahami karakteristik dari masing-masing peserta didik tentu sangat diperlukan supaya guru bisa lebih mengetahui bagaimana cara untuk bisa membantu peserta didik melalui proses pembelajaran yang berlangsung. Karakteristik yang perlu guru perhatikan tidak hanya dari aspek fisik, melainkan dari segi intelektual, emosional, sikap dan latar belakang sosialnya juga.

Misalnya ketika dalam satu kelas terdapat anak yang terlihat murung dan susah konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran, tentu seorang guru harus bisa mendalami kenapa anak tersebut begitu. Cara yang dilakukan guru tentu dengan memahami karakteristik peserta didik. Bisa dilihat dari latar belakang, sikap, emosional anak tersebut. Dengan demikian, guru akan mendapatkan solusi sehingga dapat membantu proses pembelajaran anak tersebut.

- b. Guru harus bisa menguasai apa saja prinsip dalam pembelajaran dan teori belajar

Agar dalam proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif, menyenangkan dan tidak membosankan, guru harus mampu memberikan metode yang menarik sehingga menunjang terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan. Apabila guru hanya menerapkan metode konvensional, tentu peserta didik akan merasa bosan dan kurang konsentrasi. Pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan sangat penting apalagi jika diimbangi dengan pemanfaatan media pembelajaran. Dengan begitu, guru perlu menentukan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran sebelum mulai untuk melakukan proses pembelajaran, disitulah mengapa sebelum pelajaran berlangsung guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP.

- c. Pengembangan Kurikulum dengan menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Seorang guru membuat dan menyusun silabus yang merupakan tujuan yang penting dalam kurikulum dan juga RPP sesuai tujuan pembelajaran yang akan diajarkan. Guru harus mampu menyusun dan menata materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan peserta didik.

- d. Guru dapat melakukan pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik

Setiap peserta didik tentu memiliki potensi atau keahliannya masing-masing. Guru juga perlu memperhatikan potensi yang dimiliki peserta didiknya agar potensi yang sudah dimiliki nanti dapat diasah

dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki. Adanya ekstrakurikuler juga dapat mendukung pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Karena setiap anak memiliki bakat yang berbeda-beda, adanya ekstrakurikuler tentu sangat berguna. Maka dari itulah pentingnya guru memahami karakteristik peserta didik sehingga dapat pula membantu mengarahkan sesuai dengan bakat dan minat siswa.

- e. Guru dapat melakukan komunikasi dan interaksi yang baik dengan peserta didik

Komunikasi yang baik antar guru dan peserta didik perlu dibangun untuk menjadikan keharmonisan sehingga tercipta interaksi yang baik. Dalam berkomunikasi tidak serta merta bebas mengucapkan perkataan seperti layaknya teman sejawat, akan tetapi peserta didik juga perlu memperhatikan sopan santun ketika berkomunikasi dengan guru. Maka dari itu pendidikan karakter disini sangatlah penting sekali untuk ditanamkan pada kepribadian peserta didik.

- f. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar yang dilihat dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun lokasi yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data yaitu di MI Miftahul Huda Tayu. Dalam pengambilan sumber data dilaksanakan secara *purposive* dan *snowball*. *purposive* yaitu sumber data yang sudah ditentukan akan dipilih dengan adanya pertimbangan dan tujuan tertentu. Sedangkan *snowball*, yaitu teknik pengambilan sumber data yang mana bermula pada sampel yang sedikit kemudian lama kelamaan menjadi makin banyak (Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, yaitu meliputi kepala madrasah, guru, dan peserta didik yang dianggap berhubungan langsung dengan penelitian ini. Peneliti pada saat melakukan proses pengumpulan data di lapangan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya yaitu melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru

Peneliti sudah melakukan wawancara yang kemudian hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala madrasah dalam mengambil keputusan tentu melibatkan orang-orang yang berkepentingan atau yang mempunyai wewenang lebih. Penelitian yang peneliti lakukan di MI Miftahul Huda Tayu ini merupakan lembaga yang bernaung di bawah yayasan. Maka dari itu, kepala madrasah melibatkan pembina yayasan sebagai pemimpin tertinggi apabila akan mengambil keputusan yang besar atau membutuhkan keterlibatan para petinggi di dalam suatu Yayasan madrasah. Jadi seorang pemimpin yakni kepala madrasah tidak boleh sewenang-wenang mengambil keputusan demi kepentingan pribadi.

Ketika kepala madrasah mengambil keputusan, sudah tentu keputusan yang di kemukakan memiliki makna tersendiri. Makna yang memiliki nilai positif untuk kebaikan bersama demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Keputusan seorang pemimpin sangat berarti sehingga nantinya dapat memberikan pengaruh kepada semua komponen yang ada di dalamnya. Dengan demikian, kepala madrasah dalam menetapkan keputusan haruslah dengan cermat, tegas dan hati-hati serta perlu difikirkan secara matang untuk jangka panjang.

Kepala madrasah dalam mengambil keputusan harus mampu berfikir terbuka, misalnya ketika menghadapi suatu permasalahan, seorang pemimpin harus mengambil langkah dalam rangka memecahkan masalah dan mengambil keputusan untuk mengatasi masalah tersebut. Tidak berhenti di situ, seorang pemimpin juga perlu memikirkan dampak apa nantinya yang akan terjadi dengan segala kemungkinan. Apakah akan berjalan dengan baik atau malah sebaliknya dan memikirkan apa yang terjadi ke depan apabila sudah menemukan suatu keputusan.

Kepemimpinan manajerial kepala madrasah sangat diperlukan untuk menetapkan kebijakan dalam meningkatkan kompetensi guru. Apabila manajerial kepala madrasah dapat berjalan baik dan mempunyai kemampuan yang mumpuni, maka sudah tentu mutu pendidikan semakin baik. Pengambilan kebijakan atau keputusan kepala madrasah menjadi salah satu unsur yang penting dalam manajemen madrasah. *Decision making* atau pengambilan kebijakan diproses oleh orang yang mengambil keputusan atau disebut dengan *decision maker* yang menghasilkan keputusan (*decision*). Beberapa keputusan tersebut yang akan memunculkan aktivitas-aktivitas

sehingga dalam proses manajemen dapat berjalan dan terlaksana dengan tepat. Keputusan ini bisa menimbulkan dua kemungkinan yaitu bisa saja keputusan tersebut menimbulkan aktivitas atau justru sebaliknya yaitu mengakhiri aktivitas (Malayu S.P Hasibuan, 2007).

Membicarakan kurikulum menjadi hal yang perlu diperhatikan. Baik buruknya kurikulum tergantung pada kreativitas guru pada saat melaksanakan dan merealisasikan kebijakan kepala madrasah dan kurikulum tersebut. Guru memang harus mendapat perhatian yang utama karena kurikulum yang baik maupun tidak bergantung pada kualitas dan kreativitas seorang guru. Salah satu peran guru dalam pembelajaran yaitu dalam hal membuat desain intruksional, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dan berperilaku sebagai pendidik (Daryanto, 2005).

Kebijakan pada penelitian yang peneliti lakukan berkenaan dengan usaha untuk meningkatkan kompetensi dengan adanya kebijakan kepala madrasah dan pengaruh kebijakan tersebut pada peningkatan kompetensi pedagogik guru. Kebijakan di rumuskan dan dijalankan oleh kepala madrasah, memberikan solusi apabila terdapat permasalahan, memberikan arahan kepada guru apabila tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang semestinya.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada bapak Agus Miftah selaku kepala madrasah MI Miftahul Huda Tayu pada tanggal 5 desember 2021, beliau menyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan kompetensi yang terfokus pada peningkatan kompetensi pedagogik guru, kepala madrasah mengeluarkan beberapa kebijakan. Maka dari itu kepala madrasah sebagai seorang pemimpin mempunyai peran yang kuat dengan kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Adapun kebijakan yang telah di rumuskan terdapat dalam beberapa program, diantaranya yaitu :

a. Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran

Pelatihan ini diikuti oleh semua dewan guru yang ada di madrasah dengan mendatangkan orang yang ahli dibidangnya kemudian memberikan pelatihan dalam rangka menciptakan media pembelajaran yang menarik dan disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. Media digunakan sebagai alat bantu yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pentingnya pelatihan pembuatan media ini dikarenakan media pembelajaran merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari proses pembelajaran.

Fungsi media yaitu untuk mengatur dan menciptakan hubungan yang efektif antara guru dan murid dalam pembelajaran. Guru lebih bisa terbantu dalam menggunakan media ketika menerangkan materi yang disampaikan, dan peserta didik juga akan lebih mudah menerima dan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, adanya pelatihan pembuatan dan penggunaan media pembelajaran ini menjadi salah satu hal yang direalisasikan melalui kebijakan kepala madrasah agar diikuti semua guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru.

b. Pelatihan Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal Ulangan

Sebelum menyusun soal, hal yang dilakukan guru yaitu membuat kisi-kisi soal terlebih dahulu karena merupakan hal yang penting. Kisi-kisi bisa menjadi suatu pedoman dalam proses pembuatan soal yang mana di dalamnya berisi kriteria soal yang akan disusun dalam tes. Pembuatan kisi-kisi juga harus sesuai dengan silabus mata pelajaran. Ketika guru membuat kisi-kisi tidak boleh asal membuat saja tanpa menggunakan pedoman, akan tetapi guru dalam membuat kisi-kisi harus sesuai dengan standar pedoman penulisan soal yang benar.

Adapun mengenai penyusunan soal, tentu berpedoman juga pada kurikulum, menyusun soal ulangan merupakan tugas yang dilakukan oleh guru. Menyusun butir soal merupakan proses dimana untuk mengetahui kemampuan peserta didik dengan cara penyiapan alat ukur untuk tingkat kemampuan siswa terhadap materi yang telah diajarkan oleh guru. Tujuan utama memberi pertanyaan atau soal kepada peserta didik dimaksudkan untuk mengetahui apakah materi yang diajarkan telah dapat dipahami dan dikuasai oleh peserta didik secara tuntas atau belum.

Dalam menyusun kisi-kisi dan pembuatan soal ulangan, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan yaitu antara kompetensi dasar, materi pelajaran, dan indikator itu harus saling keterkaitan. Dengan begitu, adanya kebijakan kepala madrasah atas diadakannya pelatihan penyusunan kisi-kisi soal tentu akan membantu guru dalam meningkatkan kompetensi. Karena dalam pelatihan tersebut, guru tidak hanya mendapatkan arahan tetapi juga akan mendapatkan pengetahuan yang lebih bagaimana pedoman penyusunan kisi-kisi soal yang meliputi pengetahuan tentang syarat-syarat kisi-kisi, komponen kisi-kisi yang terdiri dari komponen identitas dan komponen matriks.

c. Pelatihan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Pada pelatihan penyusunan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) menjadi sangat diperlukan oleh setiap guru, karena bagi MI Miftahul Huda tersendiri, sebelumnya masih menggunakan kurikulum KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan) sehingga, dengan kebijakan kepala madrasah mengadakan pelatihan atau menyuruh semua guru untuk mengikuti pelatihan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran menjadi salah satu kebijakan yang sangat tepat mengingat di madrasah sekarang ini juga sudah menggunakan kurikulum 2013.

Pelatihan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran berisi materi tentang pengenalan kurikulum 2013 (K-13) dan pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran atau *teaching approach*, pengenalan lebih mendalam mengenai silabus, RPP, dan penilaian autentik. Setelah guru mengikuti pelatihan tersebut nantinya diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dan penyusunan atau pembuatan RPP dan meningkatkan pengetahuan guru mengenai kurikulum 2013.

d. Pengadaan Evaluasi oleh Supervisi Kepala Madrasah

Banyak sekali definisi mengenai supervisi menurut para ahli. Pada bagian ini, peneliti mengemukakan supervisi dalam ranah pendidikan dapat diartikan sebagai upaya dan pelayanan yang dilakukan seorang pemimpin disini yang peneliti maksud adalah kepala madrasah membantu para dewan guru sebagai orang yang dipimpin supaya para guru tersebut dapat menjadi individu yang semakin berkualitas dan cakap sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat meningkatkan efektivitas dalam proses belajar mengajar di madrasah (Ngalim Purwanto, 2009).

Di Madrasah Miftahul Huda Tayu, supervisi kepala madrasah melakukan evaluasi terhadap para dewan guru dalam 1 tahun dilakukan 4 kali, diantaranya yaitu pada saat setelah pelaksanaan MID semester, setelah semester 1, MID semester 2, dan pada saat setelah ulangan akhir semester 2. Kelemahan dan keunggulan guru dalam melakukan pembelajaran dapat diketahui dari hasil supervisi pada saat evaluasi.

Misalnya dari kompetensi guru yang disupervisi nantinya jika terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi guru, atau jika terdapat kesalahan atau kompetensi yang masih kurang yang dimiliki

guru, maka nanti akan diupayakan solusi dan akan dilaksanakan pembinaan serta tindak lanjut yang serius sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada dan sekaligus mempertahankan atau meningkatkan keunggulan dan kemampuan dalam melakukan proses pembelajaran (Daryanto, 2011).

e. Pelatihan atau bimbingan teknis (BIMTEK)

Bimtek merupakan suatu kegiatan yang diikuti oleh beberapa peserta yang mana dalam pembahasan ini pesertanya adalah guru dengan diberikan pelatihan dan penyampaian materi yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan kompetensi guru. Di MI Miftahul Huda, kepala madrasah meminta perwakilan guru untuk mengikuti bimtek. Kemudian dari perwakilan yang sudah mengikuti bimtek apabila pelatihannya sudah selesai, maka akan diadakan rapat yang kemudian hasil dari bimbingan teknis yang diikuti guru akan di sampaikan kepada jajaran guru dalam sebuah forum rapat.

Beberapa program kebijakan kepala madrasah yang telah disusun menjadi salah satu langkah perencanaan dalam menetapkan kebijakan dan serangkaian kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang ditentukan dengan melibatkan berbagai pihak. Keberadaan kepala madrasah yang menjadi pemimpin di madrasah dengan kemampuan dan keterampilan kepemimpinan yang dimiliki akan sangat berdampak bagi para komponen yang ada di dalam madrasah termasuk guru dan para staf. Bahkan kepemimpinan kepala madrasah dapat menentukan pada kemajuan suatu madrasah yang di pimpin.

Kepala madrasah sebagai pengelola pendidikan berperan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan cara menjalankan kepemimpinannya dengan amanah, jujur, profesional, dalam rangka mengelola administrasi madrasah dengan seluruh substansi di dalamnya. Kepala madrasah bertanggung jawab pula untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Pembinaan kepala madrasah kepada guru menjadi tujuan utama karena guru nantinya yang akan menjalankan tugasnya dalam proses belajar mengajar.

Guru yang berkualitas dengan kemampuan pedagogik yang mumpuni akan mengantarkan peserta didik memiliki kecerdasan intelektual, spiritual dan yang penting juga bagaimana peserta didik

memiliki perilaku yang baik (berakhlakul karimah). Dengan ilmu pengetahuan yang diberikan guru kepada murid akan menunjang keberhasilan bagi peserta didik juga meningkatkan mutu pendidikan madrasah tersebut. Dengan demikian, kepala madrasah dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pedagogik guru dengan tujuan supaya tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien.

Dari hasil wawancara pada tanggal 5 Desember 2021 yang peneliti lakukan dengan bapak Agus Miftah selaku kepala madrasah, dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pedagogik guru terdapat langkah yang dilakukan yaitu dengan menelaah kembali kurikulum yang menjadi sumber dasar dalam pengembangan kompetensi guru. Dari penjelasan kepala madrasah tersebut dikuatkan oleh Ibu Solichah pada tanggal 6 Desember 2021 selaku guru di MI Miftahul Huda yang peneliti wawancarai.

Ibu Sholichah mengatakan bahwa sudah ada beberapa kebijakan yang diterapkan kepala madrasah dengan sangat detil dengan tujuan agar para guru dapat terus berproses dan belajar untuk peningkatan kualitas dan kompetensi yang dimiliki. Kepala madrasah juga mengadakan pelatihan-pelatihan yang diadakan di madrasah untuk menunjang mutu pendidikan yang lebih baik, serta kepala madrasah mengizinkan untuk mengikuti diklat maupun pelatihan-pelatihan lainnya.

Berdasarkan data hasil dari wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, pelaksanaan program kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan sudah optimal. Beberapa program atau malah sudah semua program dijalankan sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya masih terus berjalan program-program lain yang nantinya akan dirumuskan dalam kebijakan kepala madrasah.

Berdasarkan hasil yang peneliti peroleh dapat diketahui pula bahwa tercapainya peningkatan kompetensi pedagogik guru juga ditentukan pada kualitas yang guru miliki, karena pada saat proses perekrutan guru juga melalui prosedur yang tidak mudah dan memang sangat diperhatikan sekali dengan melalui beberapa tahap pengujian salah satunya juga dengan menjawab pertanyaan dari segi pedagogik.

2. Strategi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru

Strategi diartikan sebagai bentuk usaha yang memiliki rencana detail dengan maksud agar mencapai rencana yang sudah ditentukan. Adapun strategi menurut William merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu dengan menggabungkan kekuatan strategi dalam suatu organisasi dengan lingkungan yang dihadapinya supaya tercapai tujuan yang diinginkan (William F Glueck, 2008). Peran strategis yang dimiliki kepala madrasah dapat membantu dalam peningkatan mutu pendidikan pada suatu lembaga yang di pimpinnya. Kepala madrasah sebagai pemimpin keseluruhan pada suatu lembaga serta harus menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan yang meliputi perencanaan, koordinasi, pembinaan karir, dan evaluasi (Baharuddin, 2006).

Terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan kepala madrasah untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru diantaranya yaitu :

1. Melalui pembinaan kompetensi pedagogik guru dalam proses pembelajaran.
2. Kepala madrasah membuat strategi dalam meningkatkan kedisiplinan guru dengan cara memperkuat dan mempertegas kedisiplinan guru, meningkatkan standar sikap atau perilaku guru, menekankan pada guru agar melaksanakan dan mematuhi semua peraturan.
3. Strategi yang dilakukan kepala madrasah dalam meningkatkan motivasi guru dengan mewujudkan suasana komunikasi yang harmonis, memenuhi segala sarana prasarana yang dibutuhkan guru, serta bisa juga dengan memberikan *reward* atau penghargaan bagi guru yang berprestasi.
4. Strategi yang dilakukan kepala madrasah selanjutnya dalam meningkatkan kompetensi adalah dengan mengadakan pelatihan yang dilakukan semua guru, seperti yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya dalam wawancara, kemudian pelatihan-pelatihan yang dilakukan tentu dengan mendatangkan ahli atau tutor yang menguasai dalam bidangnya (Kepala madrasah MI Miftahul Huda, 2021).

Berdasarkan dari dokumentasi dalam bentuk data mengenai hasil kinerja guru, menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan atau menunjukkan peningkatan. Berikut ini peneliti sajikan dalam bentuk grafik agar mudah dipahami dari hasil peningkatan kinerja guru.

Dari grafik yang peneliti sajikan dapat diketahui bahwa dari tahun 2018 sampai pada tahun 2021 telah terjadi peningkatan dari hasil kinerja guru. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala madrasah dan kebijakan yang dikeluarkan kepala madrasah sangat memberikan pengaruh terhadap hasil kinerja guru yang dari tahun ke tahun dapat meningkat.

Keberhasilan kepala madrasah sudah pasti tidak terlepas dari peran guru yang mana dari kepemimpinan kepala madrasah bisa memunculkan terciptanya kedisiplinan guru, pengembangan sumber daya guru, kompetensi pedagogik guru yang semakin meningkat pula dan hal-hal positif lainnya yang sudah dicapai seperti yang sudah peneliti kemukakan sebelumnya. Kinerja guru dapat dilihat dari bagaimana guru mengajar peserta didik apakah dalam proses pembelajaran guru sudah mengajar secara efektif. Berhasilnya mutu pendidikan dalam suatu lembaga terdapat pada kinerja dalam melaksanakan tugas.

3. Hambatan-Hambatan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepala madrasah bisa terlaksana sesuai rencana dengan baik, akan tetapi dalam merealisasikan suatu kegiatan terkadang mendapat beberapa kendala atau hambatan, hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan kepala madrasah yaitu bapak Agus Miftah pada saat peneliti melakukan wawancara tanggal 5 Desember 2021.

Adapun hambatan yang dihadapi kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru yaitu dalam pelaksanaannya terkendala dari segi tenaga, kesempatan dan waktu. Terkadang dari kesempatan bisa, secara dari waktunya yang kurang tepat. Jadi harus benar-benar dipikirkan secara matang terkait waktu dan kesempatan serta memaksimalkan tenaga dan pikiran untuk sungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan.

Contoh lain misalnya, ketika mengharuskan guru untuk mengikuti pelatihan diklat dari tenaga pendidikan di luar madrasah terdapat kendala pada segi finansial yang belum mencukupi dananya apabila seluruh guru mengikuti diklat sehingga hanya perwakilan saja yang mengikuti diklat. Tetapi hal tersebut masih bisa ditemukan solusinya karena dari perwakilan guru yang mengikuti diklat nantinya akan menyampaikan hasil dari pelatihan ke dalam forum rapat kepada para dewan guru.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Tsalisus Shofa pada tanggal 06 Desember 2021 sebagai guru di MI Miftahul Huda, beliau mengatakan bahwa semua guru dituntut untuk bisa menguasai bidang ilmu teknologi dan dengan mengikuti pelatihan juga harus mampu mengaplikasikan dalam proses pembelajaran. Akan tetapi ada beberapa guru yang sudah tidak berusia muda lagi sehingga tentu akan kesulitan dalam menggunakan komputer maupun laptop. Meskipun demikian, masing-masing guru bisa diajak untuk bekerja sama, misalnya guru-guru yang lebih muda akan membantu mengarahkan beberapa guru yang terkendala dibidang IT.

Selain itu, di masa pandemi covid-19 ini, mengharuskan semua guru untuk bisa memberikan pembelajaran online, kendala-kendala pasti ada, tetapi para guru selalu mendapat perhatian dan arahan dari kepala madrasah sehingga, segala kendala tersebut bisa mendapatkan solusi terbaik. Dan para gurupun tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran selama pandemi.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan peserta didik pada tanggal 07 Desember 2021 menyampaikan bahwa guru-guru di madrasah memberikan banyak inovasi sehingga dalam pembelajaran jadi lebih menyenangkan, walaupun dulu sempat sering dilakukan pembelajaran daring karena masa pandemi, tapi guru kelas memberikan seperangkat video pembelajaran yang disampaikan guru dengan pengemasan yang baik, materi tersampaikan dan tidak menyenangkan.

Karena kebanyakan guru di MI Miftahul Huda sudah kreatif, inovatif, dan tidak monoton ketika menyampaikan materi pembelajaran. Mungkin ada guru kelas lain yang gurunya belum bisa memberikan video pembelajaran yang menarik, tetapi pada saat mengajar di kelas pun baik guru yang masih muda atau tidak, sama sama memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga (kami) peserta didik semakin semangat dalam belajar.

Berdasarkan beberapa kendala yang sudah disampaikan, kepala madrasah nampaknya sudah siap mengatasi kendala atau hambatan yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari bagaimana beberapa program bisa terlaksana dengan baik, dan dengan adanya upaya kebijakan yang diterapkan kepala madrasah dan didukung kepemimpinan kepala madrasah yang bagus, dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Hal tersebut bisa dilihat juga dari hasil kinerja guru yang dari tahun meningkat.

SIMPULAN

Kepemimpinan kepala madrasah memiliki pengaruh yang besar terhadap tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Apabila kepala madrasah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang strategis tentu akan memberikan pengaruh positif bagi semua komponen yang terdapat di madrasah. Kepala madrasah sebagai seorang pemimpin harus mampu membina, mengarahkan semua komponen yang ada dalam lembaga dan menilai kompetensi guru juga perlu menjadi perhatian yang penting. Tujuan pendidikan dapat berhasil apabila guru memiliki kompetensi pedagogik yang mumpuni dan guru yang berkualitas pula berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di MI Miftahul Huda Tayu, menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diputuskan kepala madrasah dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagogik guru sudah berjalan dengan baik. Adapun beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah kepala madrasah mengadakan pelatihan dalam pembuatan media pembelajaran, pelatihan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pelatihan dalam penyusunan kisi-kisi soal ulangan, pengadaan evaluasi oleh kepala madrasah sebagai supervisi dan pelatihan atau mengikuti bimbingan teknis.

Kepala madrasah dalam upaya merealisasikan beberapa program kebijakan tentu mengalami beberapa kendala, akan tetapi dari beberapa kendala tersebut seperti yang telah peneliti kemukakan sebelumnya bisa diatasi kepala madrasah dengan menentukan solusi yang bijak. Hal tersebut juga dapat menjadi evaluasi bagi kepala madrasah agar nantinya bisa meningkatkan kinerja dan memotivasi kepala madrasah agar mampu lebih berinovasi untuk menentukan kebijakan lain demi tercapainya kesejahteraan lembaga.

Kesejahteraan lembaga termasuk di dalamnya yaitu guru, peserta didik, staf dan komponen lainnya. Dan yang terpenting adalah bagaimana guru dapat selalu meningkatkan potensi dan kemampuan pedagogik yang dimiliki. Karena kemampuan dan keterampilan guru dalam mengajar juga menentukan keberhasilan peserta didik. Dengan semakin berkualitas dari segi kompetensi pedagogik yang dimiliki guru, peserta didik tidak hanya cakap dalam hal pengetahuan tetapi juga munculnya kecerdasan spiritual dan emosional yang selaras sehingga mampu berperilaku dengan baik dan santun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin. *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara. 1994.
- Daryanto. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta. 2005.
- Daryanto. *Kepala Madrasah sebagai Pemimpin Pembelajaran*. Yogyakarta : Gava Media. 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Diponegoro. 2010.
- Depdiknas. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta : Balai Pustaka. 2003.
- Djirimu, Bahrul. *Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru di SD Muhammadiyah 2 Palu*, Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 4, April 2016.
- Glueck, F William. *Manajemen Strategis dalam Kebijakan Perusahaan*. Jakarta : Erlsnggs. 2008.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara. 2007
- Hornby, ASW. *Oxford Advance Dictionary of Current English*. Press : Oxford University. 1982.
- Ibrahim, Ahmad, Abu Sinn. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Indrafachrudi, Soekarto. *Mengantar Bagaimana Memimpin Sekolah yang Baik*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1998.
- Mulyana. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Mensukseskan MBS*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2004.
- Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2009.
- Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2004.

- Nur, Anifa Alfia. Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di SD Yayasan Gambut. *Jurnal administrasi pendidikan FIP UNP*. Volume 2 Nomor 1.
- Purwanto, Ngalim. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2009.
- Sahertian. *Supervisi Pendidikan dalam Rangka Program Inservice Education*. Jakarta : Rineka Cipta. 1990.
- Sagala, Syaiful. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung : Alfabeta. 2009.
- Soetopo, Hendyat. *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta : Bina Aksara. 1998.
- Suderadjat, Hari. *Manajemen Peningkatan Mutu berbasis Sekolah*. Bandung : Cipta Cekas Grafika. 2005.
- Wahdosumidjo. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP STYLE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: THE ROLE OF JOB SATISFACTION AS A MEDIATOR AT PESANTREN

Busthomi Ibrahim 1, Darunnajah University,
email: busthomi.ibrohim@yahoo.com

Prof. Dr. Abdul Rahim Zumrah 2, FKP Universitas Sain Islam Malaysia
email: rahim@usim.edu.my

ABSTRACT

Research related to leadership style, job satisfaction, and organizational commitment is highly important to study, specifically in the context of Pesantren in Indonesia. This is due to the level of the leadership style, job satisfaction, and organizational commitment in this context is considered substantial. Therefore, this research is conducted to identify the issues related to leadership style, job satisfaction, and organizational commitment within this context. First, to determine the level of charismatic, and transformational leadership style among Kyai and job satisfaction as well as the organizational commitment of employees at Pesantren. Second, to examine the contribution of charismatic, and transformational leadership styles to employee job satisfaction. Third, to examine the contribution of charismatic, and transformational leadership styles to employee organizational commitment. Fourth, examine the contribution of employee job satisfaction to employee organizational commitment. Fifth, assess the role of job satisfaction as a mediator in the relationship between charismatic leadership style, transformational and organizational commitment. This research data was collected through a survey question on 556 Educators from Each Branch of Pesantren Darunnajah Indonesia. Data were analyzed using multiple regression analysis to test the hypotheses of the study and the hierarchical regression analysis to test the mediation hypotheses. This study has found that there is a significant relationship between charismatic leadership, and transformational leadership to organizational commitment. in addition, charismatic leadership, transformational leadership have a significant relationship with job satisfaction. Furthermore, job satisfaction has significant relationship with organizational commitment and finally employees' job satisfaction can mediate between charismatic leadership, and transformational leadership with organizational commitment.

ABSTRAK

Penelitian terkait gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi sangat penting untuk dikaji, khususnya dalam konteks Pesantren di Indonesia. Hal ini disebabkan tingkat gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi dalam konteks ini dianggap substansial. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi dalam konteks ini. Pertama, untuk mengetahui tingkat karismatik, dan gaya kepemimpinan transformasional di kalangan Kyai dan kepuasan kerja serta komitmen organisasi pegawai di Pesantren. Kedua, untuk menguji kontribusi gaya kepemimpinan karismatik, dan transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan. Ketiga, untuk menguji kontribusi gaya kepemimpinan karismatik, dan transformasional terhadap komitmen organisasi karyawan. Keempat, menguji kontribusi kepuasan kerja karyawan terhadap komitmen organisasi karyawan. Kelima, menilai peran kepuasan kerja sebagai mediator dalam hubungan antara gaya kepemimpinan karismatik, transformasional dan komitmen organisasi. Data penelitian ini dikumpulkan melalui pertanyaan survei terhadap 556 Pendidik dari Setiap Cabang Pesantren Darunnajah Indonesia. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis penelitian dan analisis regresi hierarkis untuk menguji hipotesis mediasi. Penelitian ini menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepemimpinan karismatik, dan kepemimpinan transformasional terhadap komitmen organisasi. Selain itu, kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transformasional memiliki hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja. Selanjutnya kepuasan kerja memiliki hubungan yang signifikan dengan komitmen organisasi dan pada akhirnya kepuasan kerja karyawan dapat memediasi antara kepemimpinan karismatik, dan kepemimpinan transformasional dengan komitmen organisasi.

ملخص البحث

إن الحاجة ماسة إلى البحث عن أسلوب القيادة وراحة العمال والتعهد المنظمي خاصة لدى المعاهد الإسلامية بإندونيسيا، وتدور هذه الدراسة حول المشكلات التالية: أسلوب الرئاسة لدى مديري المعاهد إما أن يكون جذابا أو تحويليا. وثانيها مدى تأثير ذلك الأسلوب على اقتناع العمال، وثالثها مدى تأثير ذلك على تعهدهم نحو عهود المعاهد، ورابعها مدى تأثير ذلك الاقتناع على تعهدهم وارتباطهم نحو المعهد الذي يعملون فيه وينتسبون إليه. وخامسها تقييم اقتناع العمال كمتغير موصل بين أسلوب الرئاسة وبين التعهد المنظمي.

أما المعلومات لهذا البحث فتم جمعها من قبل خمس مائة ستة وخمسين (٦٥٥) مدرسا في سائر فروع معهد دار النجاح اليلامي بإندونيسيا، وتم تحليل البيانات باستخدام تقنية نموذج المعادلة البنائية. وتكشف هذه الدراسة أن الرئاسة الجذابة والرئاسة التحويلية ترتبط ايجابيا بالتعهد المنظمي والرئاسة الجذابة والرئاسة التحويلية وايضا ترتبط باقتناع العمال وإضافة الى ذلك ان اقتناع العمال يؤثر كوسيط في العلاقة بين الرئاسة الجذابة والرئاسة التحويلية والعهد المنظمي.

A. INTRODUCTION

Organization requires leaders and leadership. The leader becomes a barometer of the success of the group in the process of planning, implementing, giving motivation and supervision to achieve common goals in the group (Nugraha, 2010). The leader also has an active role and always intervenes in all problems relating to the needs of the group members (Anoraga, 1992). Meanwhile, leadership is closely related to the skills or art of influencing someone to do something or the art of influencing and moving people to work in a coordinated manner, where everyone is moved to do their work and accomplish their tasks well based on the program that has been planned in overall organizational performance (Walid, 2010). Similarly, according to Zainuddin and Mustaqim (2008), leadership is an activity or art to influence the behavior of people to work towards a goal that is set or desired together.

Leadership is very important to all types of organization, including Pesantren. Pesantren is an Islamic education organization, which always strives to foster Muslim cadres in the field of the Islamic religion. They are expected to be born as devoted human beings to Allah SWT, who are *tafaqquh fi al-dien* and strive to always socialize Islamic teachings in the midst of the reality of Muslims (Masyhud, 2003).

Pesantren leadership is usually centered on a Kiyai. The Kiyai is the owner, the manager and the teacher at pesantren he leads (Qodir, 2003). Such conditions require a Kiyai in his role and function to have wisdom and insight, skilled in religious sciences, able to instill attitudes and views and must become a top figure (role model) as a good leader.

Furthermore, the Kiyai in pesantren are associated with supernatural power that considered as ulama, so that their existence is considered to have a close relationship with God (Arifin, 2003). The leadership of Kiyai authority can continue to survive as long as the pesantren tradition is maintained, and the charismatic power of Kiyai radiates its charm, as well as a type of leadership that is in the form of a collective Assembly Boarding (Muhajir, 1987). Kiyai also played a role in the transformation process of modern life, particularly in the pesantren context (Dhofier, 1994).

Pesantren

The term pesantren is taken from the basic words of santri with the addition of prefix -pe and suffix – an. The term santri came from Tamil, which meant the teacher recited (Khozin, 2006). Other said the word santri is derived from the word shastri (Daulay, 1997), which is the word absorption from the Indian language, which means people who understand the holy book of Hinduism (Alamsyah, 2000).

The pesantren according to its basic meaning is a place of learning for students (Dhofier, 1994). In specific, Effendi (2008) defines Pesantren as a place where santri (student) live and study Islamic knowledge. It is a traditional institution of Islamic boarding school owned and led by Kiyai.

Historically, the birth of Pesantren as an Islamic institution in the Indonesian archipelago is still debatable among the scholars. For example, as contended by Federspiel (2016), pesantren derives from the sixteenth century, when learning centers were ished, known as a place of learning for the Islamic faithful (santri). While, LukensBull (2008) stated that pesantren emerged earlier, around in the thirteenth century. Its emergence is nearly as old as Islam in Java itself.

Elements of pesantren

There are five important elements associated with any sorts of pesantren. The elements are including Kiyai, pondok pesantren, santri, mosque and classic book or dirasah Islamiah (Dhofier, 1985; Law of Pesatren, 2019; Efendi, 2014) as details below:

1.1.1.1 Kyai

A pesantren cannot be separated from the figure of a Kiyai because the Kiyai is the most essential element (Dhofier, 1994) and a central figure (Masyhud & Khusnuridho, 2003) in pesantren. Some even say that the chaplain is an extension of the mujtahid (Wijaya, 2011) or “little king” (Bull, 2004). Kiyai gives specific, scheduled lectures on certain topics of some classical textbooks (kitab kuning) in front of many intermediate audiences (van Bruinessen, 1990). Kiyai may be defined as the person who has an association with superstition or magic. Kiyai refers to elderly people who are respected by the community. Kiyai also can be identified as a person who has a wide range

of Islamic knowledge. According to Muthohar (2007), the term Kiyai derives from the Javanese word “kijaji” meaning a person who has a qualification in religious teaching. The title of Kiyai is not easily achieved by Muslims and it is not obtained from formal education. Kiyai’s title is a gift of society because he meets several requirements including knowledge, piety, descendants (geneology) from previous Kiyai, and many santri (Steenbrin, 1986).

A Kiyai with his aides is the only power hierarchy that is explicitly acknowledged in the pesantren. This power is absolute, so many students for the whole of his life feel attached to the Kiyai, at least making his Kiyai as a source of inspiration and moral support in private life (Wahid, 1995). This Kiyai power derives from a combination of tradition Islamic education and the charisma gained and inherited from the previous Kiyai (Rohmaniyah & Wordwar, 2012). The power that derives from the Kiyai’s charisma has strong persuasion in instilling ideology. This charismatic power is called ideological / normative power (Romas, 2003)

Pondok Pesantren

Pondok pesantren is a dormitory where santri live and study under the guidance of the Kiyai. The santri themselves will take care of their pondok and their needs under the supervision of senior student (Dhofier, 2011). There are three reasons why pesantren must provide pondok for santri. First, almost all pesantren are located at village where there is no housing to accommodate the santri. Therefore, there is a need for special dormitories for santri. Second, there are reciprocal attitude between Kiyai and santri where the students consider that Kiyai as their own father, while Kiyai treats his santri as an entrusted Gods that must always be protected. This reciprocal attitude raises familiarity and needs to be close within each other (Suparto, 2000). Third, having pondok enables pesantren to integrate all santri’ activities, both academic and social (Saifullah, 1995).

Santri

The third component of pesantren is students. Students of pesantren are called santri. Santri who live in pondok are regarded as having the same social background without allowing privilege to any particular santri. All santri are under one rule which they must obey.

The word *santri* means people who study Islam (The Compilation Team of the Language Center Dictionary, 2008). In the tradition of *pesantren*, *santri* are classified into two groups, namely *santri mukim* and *santri khodim*. *Santri mukim* are students who come from far and settled places and stay in the *pesantren* environment. They cover the entire cost of learning in the *pesantren* by themselves, including the *syahriyah* costs (monthly fees), meal money, learning equipment and other fees according to the *pesantren*'s policy. They oversee the *pondok*'s daily affairs as well as teaching younger student such as elementary version of the classic book (*kitab kuning*). Meanwhile, *Santri khodim* is a student whose tuition fees at the *pesantren* are borne by the *pesantren*. In general, there are from the area around the *pesantren* and do not live in the *pesantren*. They do not stay in the *pondok*, but just come daily to and from the *pesantren* in accordance with their learning timetable (Dhofier; 1994).

Mosque

The mosque has multi functions that support learning activities in *pesantren*. The mosque, in addition to being used as a place to pray five times a day and Friday prayers, also functioned as a place to study books and *santri* development events (e.g., Friday sermon, Barzanji prayer and *Muhadoroh* (Syalaby & Maksum, 1999). In specific, the mosque constitutes a main resource and space in which the *Kiyai* carries out his obligation to educate and train his *santri*, to perform *ibadah*, learning Islamic textbooks and conducting social activities (Zarkasyi, 2009). In addition, the mosque reflects the togetherness of the community (Suparto, 2000). It can be clearly seen in the performance of daily prayer. People perform prayers together, uniting the community in a ritual of submission to Allah almighty. From this point of view, it can be assumed that the mosque is not only beneficial for *pesantren* but also for Muslims in general.

Classic book or *dirasah Islamiah*

In the Islamic intellectual tradition, there are two categories of scientific works. The first category is called classical books (*al-qutub alqadimah*). The second category is called modern books (*al-kutub al-ashriyah*) (Marzuki Wahid, 1999). In *pesantren* context, these books are known as yellow book or the bare book. These are the textbook, references, and curriculum in the *pesantren* education system (Abdullah Aly, 2011). As van Bruinessen (1995) and Dhofier (2011) stated that the yellow book is the source of construction of the knowledge and civilization of the *santri* in *pesantren*.

According to Mukhtar (2001), the classic books are always regarded as Arabic religious scriptures, or Arabic letters, and as the product of thought of past clerics written in a typical pre-modern format. In specific, Mas'di (1988) explains the characteristic of the classic book. First, it is written by Arabs, but are hereditary references made by the scholars of Indonesia. Second, it is also written by Indonesian scholars as an independent paper. Third, it was even written by Indonesian scholars as a commentary or translation of the book of the work of the Eastern cleric who used Arabic (Arabic Malay). According to Nata (1999), the classic book is a book containing the sciences of Islam from various scientific studies written or printed with Arabic letters in Arabic or Malay, Javanese, Sundanese, and so on.

Types of pesantren

In general, there are three types of pesantren in Indonesia; salafi, khalaf and comprehensive (Malik, 2008) as details below:

Salafi

The salafi pesantren still apply the classical traditional education in schools known as Madrasah system (Haedari, 2004, Noor 2006). This type of pesantren only offer religious education and character development. Therefore, the salafi pesantren has been regarded as the best religious education, or at least the most traditional. The pesantren is based on mazhab (Islamic school of law) Shafi'ie, the mazhab of traditional Muslims in Indonesia. In specific, the Salafi pesantren is a boarding school that keeps its original form by only teaching the books written by clergies in 15th century using Arabic. It teaches by using the "halaqah" teaching pattern, which means using discussion to understand the content of the book, not to question whether the teachings are right or wrong, but to understand what it is trying to teach. The students believe that the Kiyai will never teach them wrong things, and they are sure that the content of the book that they learned are true (Bakhtiar, 1990).

Khalaf

Khalaf pesantren promotes *ijtihad* (independent interpretation) as opposed to *taqlid* of salaf pesantren. Most pesantren today are labelled mixed because they engage with traditional religious education and modern

educational needs. The learning of classical books is no longer prominent. Some even become only as a complementary lesson, but becoming a cultural homogeneity lesson, and religion will regress with the variety and complexity of modern Indonesia's social development (Dhopier, 1994). Khalaf pesantren more flexible and receptive to new things (Malik, 2008). This type of pesantren consider the modernization of traditional Islamic education that was born of modernization brought by the European colonizers (Madjid 2010).

Comprehensive

Comprehensive pesantren combined the system implemented by salafi and khalaf pesantren (Bahri, 2011). This type of pesantren organizing religious education, develops agriculture, develop certain types of skills, or developing cultivation of marine (Ghozali, 2003).

B. PROBLEM STATEMENT

Traditionally, the leadership in pesantren is held by one Kiyai who is the founder of the pesantren. The development and continuity of the life of a pesantren depends a lot on the Kiyai's expertise, skills, and depth of knowledge (Hasbullah, 1999). Kiyai also is an absolute source of power and authority in life and pesantren environment (Dhofier, 1994). Therefore, leadership in pesantren is centered on the Kiyai. The leadership of the Kiyai is attached to the personal qualities of the Kiyai (Nugraha, 2010).

Research related to leadership style in the context of pesantren is essential because there is an inconsistent perception about this aspect in the literature. For instance, Nugraha (2010). However, The Prabowo's research results (2016) show that leadership of pesantren tend to be individual that limit the roles and initiatives of subordinates. Another researcher (Abdullah et al, 2008, Anchok & Suroso, 2005) indicated that leadership in pesantren generally apply religious leadership style. Based on these inconsistent arguments, a research that examine leadership style is needed to conclude the leadership style of Kiyai, particularly in the pesantren context.

In addition, there are some leadership problems in pesantren context. First, decision making focused on the personal figure of Kiyai, so that it can produce authoritarian decisions, based on reasoning power and the level of understanding of individual kyai figures. Second, experiencing difficulties in

trying new patterns of development that had not been approved by the Kiyai. Third, leadership succession patterns do not have clear and orderly forms and procedures. Fourth, the Kiyai as the sole leader of the pesantren often cannot keep up with the increasing scope of influence of the pesantren with the improvement in the quality of its leadership (Wahid, 2010).

The previous problems that closely related to leadership style in pesantren may influence the follower level of job satisfaction and organizational commitment. It is due to previous studies have empirically found the link between leadership style, job satisfaction and organizational commitment. For instance, Azim (2019) in his study indicated that leadership style is positively related to employee job satisfaction. The similar finding was found in a study by Siddiq and Sudin (2013). Meanwhile, Wardianto dan Hendrati (2014) found a positive and significant relationship between leadership style and organizational commitment. This study will extend the previous findings by empirically examine the effect of specific leadership style (e.g., charismatic, transformational) on job satisfaction and organizational commitment. Include simultaneously the specific leadership style in a study can generate a significant knowledge about the leadership style in a particular context.

This study further argue that job satisfaction could mediate the relationship between charismatic, and transformational on organizational commitment. There are two reasons to support the potential role of job satisfaction as a mediator. First, job satisfaction has a positive impact on organizational commitment (Mwesigwa, Tusiime & Ssekiziyivu (2020). Second, job satisfaction can play the role as a mediator, which has been justified by previous studies. For instance, Chan and Ao (2019) indicated that job satisfaction mediates the effect of pay satisfaction and work family conflict on turnover intention. Similarly, a study by Riyadi and Soeling (2019) also reveals that job satisfaction becomes the mediator between leadership and employee performance.

This study will be conducted to address the previous gaps. In specific, this study will examine the level of charismatic, and transformational among Kiyai, the leader in pesantren. This study also will examine the effect of charismatic, and transformational leadership on job satisfaction and organizational commitment in the context of pesantren. In addition, this study will examine the role of job satisfaction as a mediator in the relationship between charismatic leadership, transformational leadership, job

satisfaction and organizational commitment. The previous research directions will extend the discussion about leadership issue in pesantren context. It is due to the previous studies in this context focus on the issue related to Kiyai moderate leadership model (Hernawati, 2015), Kiyai leadership model in the development strategy of the participants (Sukowati, Zunaih, Jatmikowati & Nelwan, 2019), the effectiveness of the Kiyai's leadership (Taman, 2015), the behavioral approaches in the context of pesantren leadership (Atiqullah, 2007) and strengthening leadership culture (Alam, 2018).

C. SCOPE OF STUDY

This study is conducted to examine three issues. First, the leadership style of Kiyai at pesantren in Indonesia. Second, the effect of charismatic, and transformational leadership on job satisfaction and organizational commitment. Third, the role of job satisfaction as a mediator in the relationship between charismatic, transformational and organizational commitment. The data of this study will be collected among employees of selected pesantren in Indonesia.

D. LITERATURE REVIEW

Borkowski and colleagues (2011) posit that effective leadership defines the success of any organization. Leadership is defined as the process of influencing others to recognize and agree on what needs to be done and how to do it, and the process of facilitating individual and collective efforts to accomplish shared objectives (Yukl, 2010; Yiing, 2009; Northouse, 2017). In a different perspective, leadership means the way to create a clear vision, filling their subordinates with self-confidence, created through coordination and communication to detail (Mc. Dermott, 2011).

Leadership Theory

Honesty and integrity are highly valued in a leader, and honest, forthright leaders set a standard for others (Kouzes & Posner, 2013) Various experts have proposed identifying several different leadership styles and theories. As Mind Tools stated, There are four core leadership theories categorized based on traits, behavioral, contingency, and power influence theories (Mind Tools Content Team, 2014)."

Trait Theory

Trait theories ignored the assumptions about whether leadership traits were genetic or acquired. Jenkins identified two traits; emergent traits (those which are heavily dependent upon heredity) as height, intelligence, attractiveness, and self-confidence and effectiveness traits (based on experience or learning), including charisma, as a fundamental component of leadership (Ekvall & Arvonen, 1991). This initial focus on intellectual, physical and personality traits that distinguished non-leaders from leaders portended a research that maintained that only minor variances exist between followers and leaders (Burns, 2003).

Contingency Theory

Contingency theory is a leader match theory that explains the match of leaders to appropriate situations. Fiedler (1964) developed contingency theory by studying the styles of leaders who worked in different contexts, primarily military organizations. After analyzing the styles of hundreds of leaders who were both good and bad, Fiedler (1964) and his colleagues were able to make empirically grounded generalizations about which styles of leadership were best and which styles were worst for a given organizational context. These situations that a leader may be in are level of power, structure of work group, and relationship orientation of the leader.

Contingency theory represents a shift in leadership research from focusing on the leader to looking at the leader in conjunction with the situation in which the leader works (Fiedler, 1978). To measure leadership style, a personality measure called the least preferred coworker (LPC) skill is used.

Contingency theory is backed by a considerable amount of research and is one of the first leadership theories to emphasize the impact of situations on leaders. The weakness of this theory is that it has not adequately explained the link between styles and situation and relies too heavily on the LPC scale (Rice, 1978). Furthermore, the contingency theory may not be easily used in organizations and may not fully explain how organizations can use its results in different situations.

Contingency theory suggests that a leader's effectiveness depends on how well the leader's style fits with the context. To understand the performance of leaders, it is essential to understand situations in which they lead. Effective leadership is contingent on matching a leader's style to the

right setting (Fiedler, 1978). The LPC assesses situations in which leaders work and whether or not they are effective. Contingency theory is widely used in organizations and gets mixed reviews from users and theorists, but it does not explain how a leader develops or can develop the followers to achieve high-performance through innovative solutions yielding growth.

Situational Theory

A leader's traits and behaviors play a strong role in the effectiveness, but in addition, the situation and role also largely contribute (Bass, 2008; Farrow, Valenzi & Bass, 1980). Vroom and Jago (2007) determined that leadership was a variable in which the traits and behaviors of leaders became mediating variables between organization cultures and /or construct.

Other scholars and theorists constructed models based on levels of concern for people and productivity (Blake & Mouton, 1975; Blake & McCauley, 1991) and situational leadership life-cycles whereby leaders match behavior with the performance needs of followers (Blanchard & Hersey, 1996). Yukl (1981) though, argued situational leadership research needs to look more at the macro environment such as the type of organization and/or culture, not just the specific situations.

The situational approach provides a model that suggests a leader's attention should be paid to the demands of the particular situation. The situational model describes how different leadership styles can be applied to subordinates who work at different levels of their working experience. Effective leadership occurs when the leader accurately diagnoses the development level of the subordinates in a task situation and then uses a leadership style that matches the situation (Blanchard, Zigarmi, & Nelson, 1993).

Behavioural Theory

The behavior theory assumes the opposite of the traits theory that great leaders are made, not born. The behavior theory believes that an individual can be trained to be a leader, and does not have to have inherent characteristics (Russell et al, 2002). In their narrative review of the leader behavior literature, Fleishman and colleagues (1991) identified 65 distinct classifications of leader behavior, and subsequent reviews have only further highlighted the proliferation of leader behavior typologies and theories (Avolio et al., 2003; Pearce et al.,2003).

One consistent theme in the literature is that behaviors can be fit into four categories: task-oriented behaviors, relational-oriented behaviors, change-oriented behaviors, and what we refer to as passive leadership. In this section, we illustrate how two of the most studied theories of leader behavior, initiating structure-consideration (IS-C; Halpin, 1957; Stogdill, 1963) and transformational-transactional (T-T; Bass, 1985; Burns, 1978), can be arranged along these behavioral dimensions. We also discuss how these theories of leader behavior overlap conceptually in ways that inform our understanding of their relative validities in predicting leadership effectiveness.

Leadership Style

Leadership style is referred to as a set of behavior patterns that occurs during constant organizational work (Vigoda-Gadot, 2007).

Charismatic leadership

2.4.1.1 Concept of charismatic leadership

Charismatic leader refers to individuals who are set apart from ordinary people through their exceptional powers and qualities (Judge et al., 2006). Others described the charismatic leader as leaders who communicate a realistic vision of the future that can be shared by their followers (Waldman et al., 2001).

In general, there are at least three characteristics of charismatic leaders. First, having high emotional sensitivity. Second, able to influence others in an extraordinary manner. Third, not easily influenced by others (Conger, Kanungo, Menon & Mathur, 1997). Other researchers indicated that charismatic leaders enhance followers' identification with and trust in the leader (Shamir et al., 1993). It means, the followers of charismatic leaders are willing to engage in discretionary behavior because of their favorable perceptions of the leader, based on their trust, loyalty, and obedience to the leader (Sosik, 2005). Charismatic leaders also enhance followers' identification with their task or role, namely, stimulating their self-worth and self-perceptions, their intrinsic motivation, and their willingness to commit themselves to performing the task successfully (Dvir, Eden, Avolio & Shamir, 2002; Shamir et al., 1993). In addition, charismatic leaders put emphasis on the collective identity of the group or unit. They strengthen the followers' relationship collectively, increasing their identification with the group and attachment to it (De Cremer & Van Knippenberg, 2002). Moreover, charismatic leaders are visionary, showing high energy and action orientation (Lussier & Achua, 2004).

Theory/model / model charismatic leadership

Conger and Kanungo (1998) developed a model of charismatic leadership which focuses on three stages of the leadership process. In the first stage, the leader assesses the environment as to growth opportunities for the respective organization (sensitivity to the Environment) and carefully evaluates his /her followers' needs (sensitivity to members' needs). In stage two the respective leader formulates a strategic vision which is constantly presented in an inspiring way (strategic vision and articulation). Finally, in the third stage, the leader provides a role model by demonstrating personal risk and unconventional behavior to his/her followers. By means of PR and UB, the leaders build up followers' trust and commitment (Conger et al., 1997). Vision is central to Conger and Kanungo's charismatic leadership theory.

Conger and Kanungo (1998) describe five behavioral attributes of charismatic leaders. First, vision and articulation. Second, sensitivity to the environment. Third, sensitivity to member needs. Fourth, is personal risk-taking. Fifth, performing unconventional behavior. Finally, Riggio (2010) has identified the elements of personal charisma as emotional expressiveness (the ability to express one's feelings both spontaneously and genuinely), emotional sensitivity (the ability to read and decode to other's non-verbal communication, emotional control (the ability to regulate their emotional displays, social expressiveness (a verbal communication skill to engage others in social interaction, social sensitivity (a skill to read, interpret social situations and how to listen to others) and social control (the ability to fit in and connect with all sorts of people) (Riggio, 2010).

The significance of charismatic leadership

Charismatic leaders are proven to be able to induce organizational change by creating a more committed workforce (Kahtani, 2013). Charismatic leadership is also capable to deliver remarkable changes in the organization's systems such as operation (Kakavogianni, 2009). In addition, research suggested that a charismatic leader is found to be able to make their followers trust them and want to be identified with the leader (Bass, 1991; Judge & Piccolo, 2004). Charismatic leadership is also related to the positive work organizational citizenship behavior and perception of job security (Wang, Zhou & Wen, 2014). More importantly, the researcher also pointed out that a charismatic leader is able to yield a greater impact on the organization's members (Lubatkin, Simsek, Ling, & Veiga, 2006) and the transformational process (Appelbaum, Berke, Taylor & Vazquez, 2008; Griffith-Cooper & King, 2007).

Research (Karim, 2020) found the efforts for leaders of IBS to be a charismatic person are by having God's glory and God's blessings, being obedient to God, the efficacy of their prayers, being able to hide themselves away, self-confidence, and having the ability to predict/forecast the future. More than that, charismatic leaders make radical social changes (Abbasiyannejad et al., 2015). Abbasiyannejad et al. (2015), said that charisma without social relationships has no function. Based on this data, the authors prove. Those attributes of charisma shape a regulative and assertive society's compliance (Ziemek, 1986).

Leadership Nyai Hj. Umi Azizah is categorized in the charismatic leadership system because Nyai Umi is considered to have extraordinary power through extraordinary things that can be felt and seen, trusted, and believed by those closest to her (Rohmah, 2020). Rahayu (2015:94) explained that principals/madrasah always helps the teacher with various types of problems, care for their subordinates, and give motivation so that the teachers can work in their maximum effort, while being an example, as well as giving rewards.

Research (Mulyadi, 2017) found The openness of a charismatic leader will imply the development of effective leadership through means like the following (1) communicate clearly and routinely. Explain in detail the purpose, mission statement, and mission implementation that should be done. (2) involves subordinates in setting the destination or the purpose (3) gives authority to the subordinates and builds their responsibility. (4) be responsible for your own as an effect of the policy that is taken. (5) be trustworthy and expand trust to subordinates.

Zubaedi (2011:171) explained that aligned with the principles of modern leadership, where every leader should have visions, where a leader is a learning human, have big ideas that are visionary, and be the main reference for those he leads. Himam (2014) stated that the openness at the end will create horizontal accountability between the leaders with the pesantren members so that the pesantren will create an efficient, effective, accountable, and responsive educational institution to the aspiration and importance of the pesantren members like the teachers, santri, parents, and even the community.

The charismatic leadership in Bengkulu City Harsallakum Al-Quran Pesantren has given the ease to subordinates in doing evaluation towards the result of the work process that they are going through, making leadership effective, creating trust between leaders, and those being led, as well as creating a pesantren and making it as one of the best pesantren in Bengkulu city (Mulyadi, 2017).

According to Weber, charisma occurs when there is a social crisis, a leader comes up with a radical vision that offers a solution to the crisis, the leader attracts followers who believe in the vision, they experience some success that makes the vision visible and followers can trust that leader as a person with exceptional power. According to Weber also that charismatic leaders can be born because leaders gain God's gift (ability) to maintain authority (Mardiyah, 2012).

Research (Toyib, 217) Founded the figure of Dr. KH Ahmad Musthofa Kamal is a kyai who since his youth has had a high charisma value around the people in pesantren Bidayatul Hidayah Pasuruan which is characterized by the adherence and high commitment of them on him, including in the implementation of his pesantren education policy.

Transformational leadership

Transformational leadership can be defined as the process of influencing major changes in the attitudes, beliefs, and values of followers to a point where the goals of an organization and the vision of the leader are internalized and followers achieve performances beyond expectations (Bass, 1985; Yukl, 1999a; 1999b). In specific, transformational leadership consist of four components: idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation and individualized consideration.

Idealized influence has been associated with increased sense of connectedness with others (Zdaniuk & Bobocel, 2015). Feizi, Ebrahimi and Beheshti (2014) suggested that idealized influence corresponds to the leader's charisma and the impression followers have about the leader's abilities. The idealized influence segment describes the reliability and strong model leaders display that result in followers revering the leader as they direct them toward the organizations vision and mission (Teymournejad & Elghaei, 2017). In the idealized influence segment, leaders model the achievement, values, and behavior that followers perceive as having the potential to aid advancing the follower's career (Joo & Lim, 2013). Leaders also set self-interest aside to build follower loyalty, devotion, and identification in the idealized segment (Ghadi et al., 2013). This segment describes the extent of trust, respect, and how much followers identify with the leader (Prasad & Junni, 2016). Jyoti and Dev (2015) suggested that leaders demonstrating the idealized influence segment focus on how the leader's values, beliefs and mission shape the decisions he or she makes and the actions they take. Stempel, Rigotti and Mohr (2015) posited that the factors of idealized influence have more to do with the impression followers have than on any characteristic of the leader themselves.

Inspirational motivation leaders serve as a model for followers to achieve goals and they clearly and confidently communicate vision optimistically and with enthusiasm (Jyoti & Dev, 2015). The inspirational motivation segment describes the increased motivation leaders inspire in followers by focusing on the follower's emotions as opposed to daily interactions (Teymournejad & Elghaei, 2017). Through optimism and excitement, leaders displaying inspirational motivation lead followers toward the goals of the organization and give followers a reason to reach for higher performance (Prasad & Junni, 2016). Inspirational motivation relays extraordinary expectations about performance, resulting in the acceptance of the important role employees play in contributing to the organization and to achieving their own career goals (Joo & Lim, 2013). Inspirational motivation promotes follower participation in the organization by creating an appealing vision (Ghadi et al., 2013). Inspirational motivation leaders use discussions and negotiations, and they emphasize the positive perspective of the future, versus the current state, to encourage followers to support a common vision (Feizi et al., 2014).

Intellectual stimulation leaders encourage followers to question the values, way of thinking, and beliefs of both themselves and their leader (Jyoti & Dev, 2015). They also encourage employees to question assumptions, think non-traditionally, innovate, be risk-takers, and display the intellectual stimulation segment (Ghadi et al., 2013). Joo and Lim (2013) suggested that intellectual stimulation behaviors motivate employees to seek out demanding assignments, new knowledge, skills, abilities, and balance in their personal and professional lives.

In the individualized consideration segment, leaders recognize the differences in followers and provide individualized attention that motivates followers to exercise authority in decision making (Ghadi et al., 2013; Teymournejad & Elghaei, 2017). In this segment, the leader recognizes followers as individuals, attends to their needs, shows concern for their feelings, and motivates followers to take responsibility for developing themselves (Jyoti & Dev, 2015; Prasad & Junni, 2016; Teymournejad & Elghaei, 2017). In individualized consideration also, leaders provide practice, education, and training opportunities to followers to allow them to discover their capabilities and potential (Feizi et al., 2014). Joo and Lim (2013) suggested that in this segment the attention leaders give

to their employees, encourage them to find value in learning and increase career development.

Theory / model transformational leadership

Bass develops the theory of transformational and transactional leadership. The concept “transformational leadership” was first coined by Downton in a work titled *Rebel Leadership* in 1973 (Bass & Avolio, 1994). It emerged as an important approach to leadership, as evidenced by the classic work of the political sociologist James MacGregor Burns in 1978 entitled *Leadership* (Hughes, Ginnet & Curphy, 1999). Burns’ (1978) theory laid a solid foundation for the works of other scholars regarding this perspective on leadership theory (Conger & Kanungo, 1998). Bass (1985) therefore builds on the earlier ideas of Burns (Engelbrecht, 2002; Yukl, 1998), although his theory is not necessarily consistent with Burns’ (Northouse, 2001).

Bass identified four transformational leadership behaviours which represent four basic components or “I’s” of transformational leadership (Avolio, 1999; Bass & Avolio, 1992). Included: Idealised influence (charisma) arouses strong emotions from followers and identification with, and emulation of, the leader (Bass & Avolio, 2001; Yukl, 1998). Individualised consideration involves providing support, encouragement, coaching (Avolio, 1999; Bass, 1998; Yukl, 1998), delegation, advice, and feedback for use in the personal development of followers (Bass & Avolio, 1992). Intellectual stimulation increases awareness of problems and influences followers to view problems from a new point of view (Yukl, 1998). Inspirational motivation includes developing and communicating an appealing vision (Avolio, 1994).

The significance of transformational leadership

Research conducted by Thomson and colleagues (2016) found the association between transformational leadership with organizational increases in citizenship, culture, vision, and employee increases in empowerment, satisfaction, trust, self-efficiency, beliefs, motivation, and decreases in voluntary turnover. Mathew and Gupta (2015) also indicated that the transformational leadership style as one that drives the emotions of followers and influences them to go about expectations. In addition, McCaffrey and Reinoso (2017) suggested that transformational leadership motivates people to the desired change using a strong vision, inspirational guidance, and intellectual stimulation. In another word, transformational leaders are associated with new idea creation, fundamental change in complex situations, and conflict resolution (McCaffrey & Reinoso, 2017).

Recent studies reported this leadership style has a positive effect on the performance of employees (Kahai, Sosik & Avolio, 2000) and groups (Parry & Proctor & Thomson, 2003). Jung and colleagues (2003) also believe the bright prospective for transformational leaders to influence the organization's creativity positively. In addition, research conducted by Effelsberg, Solga, and Gurt (2014) suggested that transformational leadership is positively related to employees' willingness to display selfless pro-organizational behavior. While Morton and colleagues (2010) suggested that transformational leadership is linked to predicting increases in employee self-efficacy, self-determination, and commitment.

Research by Chan and Mak (2014) found that transformational leadership influence affective and normative organizational commitment. Other research also suggested a significant positive relationship between idealized influence, inspirational motivation and organizational commitment (e.g., Mehar et al., 2015; Feizi et al., 2014; Ioannouz, 2016; Ibrahim et al., 2014; Rai & Sinha, 2000; Aydin et al., 2013). Idealized influence also is positively related to career satisfaction (Joo & Lim, 2013) and job involvement (Rana et al., 2016). The literature continues to indicate that transformational style positively influences followers' performance (Dumdum et al., 2002). The transformational leader gives the solution to the problems frequently (Lawler, 2003).

Research by Suradi and Surahman (2020) at an Islamic boarding school in Banyuasin Regency Bengkulu by observing, founded the leadership behavior of the Kiai at the place of this study, the researcher identified that the leadership behavior of Kiai in pesantren was transformational leadership. Coulson and Trafford state that transformational education leaders are characterized by the ability of leaders to respond to various challenges, maintain a vision of the right school and achieve it with high energy and commitment, and show personal qualities that refer to moral integrity (Suradi 2017).

Research by Mahrum, Hajar, and Yusnita (2021) at Mafazah Modern Boarding School, showed: the average score is in the individual consideration dimension with an average score of 3.268 and a percentage of 13.65% which is in the good enough category, while the lowest is in the inspirational motivation dimension with an average score of 2.729 and a percentage of 26.74% was in the good enough category.

Research Eliyana, Ma'arif and Muzakki (2019); Van Dierendonck et al., (2014); Tse, Huang and Lam (2013) and Wang et al., (2011). Transformational leaders are supposed to likely possess members with a high level of commitment, loyalty, and job satisfaction to the organization since they inspired, stimulated, considered, and developed their individual potential (M. Bass & Riggio, 2006)

However, based on teachers' perception, transformational leadership implemented by kyai is not a determinant factor that directly affected their commitment to pesantren. It possibly occurs since kyai's role in PM UQI is decreased in managing the technical problem, i.e., job assignments, academic supervision, etc. (Falaha, Alifahb, Rizal: 2021). The higher the level of transformational leadership implemented by kyai, the higher the level of Islamic organizational culture and Islamic work ethics perceived by teachers in modern pesantren. These findings supported previous studies related to transformational leadership and organizational culture (Pratama, Sunaryo, and Yusnita, 2020; Schein,2010; Jaskyte, 2004).

The implementation of female leader's leadership in PPNU-Pi applies important characteristics in transformational leadership, which include ideal influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, and individual consideration (2019).

Umiarso and Muhith (2019) found that transformational leadership effectively influenced pesantren organizational culture development and ultimately improved pesantren civitas's performance and work outcome, specifically organizational commitment.

Job Satisfaction

The nature of the work performed by the employees has a significant impact on the level of job satisfaction (Joarder, 2010). As Nasrudin (2011) postulates that the most important influence on someone's job satisfaction derives from the nature of the work assigned to him/her with the organization. They claim that if the job requires a quite diverse, the challenges, the wisdom, and the scope for using its own abilities and skills, employees doing the work will likely be experiencing job satisfaction. Similarly, according to Luthans (2009), employees gain satisfaction from the work that is interesting, and challenging and provides them with job status. A variety of tasks also can facilitate job satisfaction (Choo & Bowley, 2009). It is based on the view that the greater the variety of skills the employees can make use of in their work, the higher the level of satisfaction (Khan, 2010). Another specific nature of

work that can influence the employee level of job satisfaction is job security. Chen and Wang (2010) found in their study that job security is the most important factor in job satisfaction for managers at the bottom.

Pay refers to the amount of financial compensation that individuals received as a return for the services they had done. As Rauter (2010) argues that monetary compensation is one of the most significant variables in explaining job satisfaction. Taylor and West (2009) also found that salary levels affect job satisfaction. In addition, salary levels are also associated with organizational performance. In another word, the individual salary satisfaction or dissatisfaction leads to different output behavior of the individual (Crawford, 2010).

Supervision is defined as a process in setting performance measures in taking actions that can support the achievement of the expected results in accordance with the specified size (Bilgin & Demires, 2009). Meanwhile, Mathis and Jackson (2009) states that supervision is a process of monitoring employee performance based on standards for measuring performance to ensure top quality performance assessment. Good supervisors should treat subordinates fairly, they should not play favoritism.

Employee opportunities for promotion are also likely to exert an influence on job satisfaction. Robbins (2009) stated that the promotion gives the opportunity for personal growth, increases responsibilities and enhances social status. Bull (2009) postulated that many people experience satisfaction when they believe that their prospects are good (opportunities for progress and growth in their current place of employment). Similarly, according to Scott (2009), the satisfaction of employees depends on several factors, including the likelihood that employees will be promoted. In fact, James (2009) in his research report indicating opportunities for promotion were found to be the best and only common predictor of job satisfaction at the child welfare, mental health, community, and family service agencies.

Herzberg's Two-Factor Theory (1959) concluded that job satisfiers (motivators) are related to job content and that job dissatisfiers (Hygiene factors) are allied to job context. Motivators relate to the job contents like achievement, recognition, work itself, responsibility and advancement. While the hygiene factors relate to the context of the job such as company policy, administration, supervision, salary, interpersonal relations, supervisor, and working conditions (Herzberg et al., 1959). Job satisfaction is composed of six basic dimensions, namely: the work itself, pay, supervision, promotions, co-workers and working conditions (Herzberg, 1959; Amah, 2009).

According to Khalid (2010), job satisfaction is having a positive attitude toward work in a person. Research of Amah (2009) shows that job satisfaction is dependent on the employee's opportunities for interaction with others in the workplace. Research has shown that a better relationship with co-workers will improve job satisfaction (Choo & Bowley, 2009). According to Rauter (2012), social relationships are an important part of the social climate in the workplace and provide a setting where employees can experience meaning and identity. In another word, when cohesion is evident in the working group usually leads to effectiveness in the group and the work becomes more enjoyable. However, if the opposite situation exists and it is difficult to work with, this may have a negative impact on job satisfaction. Luthans (2009) also argue that the impact of friendship at work is associated with increased job satisfaction, organizational commitment, and job involvement, and with a significant reduction in intent to turnover.

Working conditions is another factor that has an impact on the satisfaction of employees (Luthans, 2009; Moorhead & Griffin, 2009). According to Luthans (2009), if the person works in a place that is clean and environmentally friendly, they will find it easier to come to work. If the opposite should happen, they will find it difficult to complete tasks. Vorster (2011) also stated that the working condition has a significant impact on job satisfaction especially when the working condition is very good. Working conditions are including the physical working environment, lighting, excessive temperature and humidity, noise levels, and storage of hazardous materials (Moorhead & Griffin, 2009).

The level of employee job satisfaction at the La Tansa Islamic Boarding School Business Unit is good, including organizational aspects that reward employee performance, the organization provides opportunities for employees for career development, working relationships with co-workers are very harmonious, and working relationships with leaders are well established, capable of completing a high workload, as for the aspect of being able to complete work well, always receiving guidance from superiors, payment of salaries and incentives has met employee expectations (Agustini, 2013). Research (Muchtar, et al, 2017) teacher job satisfaction state Islamic Senior Hig School in Jambi Province included, the first norm: a) teacher code of ethics, b) discipline, c) loyalty, d) professionalism, e) responsibility. The second ritual and ceremonial: a) create and routine event, b) provide an assessment, and c) give reward and punishment.

Organizational Commitment

commitment as the relative strength of an individual's identification with and involvement in a particular organization. While Zeinabadi (2010) defined an organizational commitment as the strength of an individual's identification and involvement in a particular organization as characterized by a strong belief in and acceptance of the organization's goals and values (value commitment) along with a readiness to exert considerable effort on behalf of the organization and to remain a member (commitment to stay).

Meyer and Allen (1997) defined organizational commitment as a multidimensional construct. Allen and Meyer (1991) classified organizational commitment into three basic elements: affective, continuance, and normative. Affective commitment refers to the employee's emotional attachment to, identification with, and involvement in the organization. In another word, affective commitment represents the feelings an individual has by being connected to an organization. The continuance commitment refers to commitment based on the costs that the employee associates with leaving the organization. In another word, continuance commitment represents the understanding of investment loss or the costs associated with voluntarily leaving an organization.

Meyer & Allen developed the Three-Component Model of Organizational Commitment (TCM; Meyer & Allen, 1991). The model was developed to integrate uni-dimensional organizational commitment concepts and is a dominant organizational commitment research framework (Cheng & Stockdale, 2003). The model defines the mindset that characterizes the components of commitment using the continuance of the term, affective, and normative (Powell & Meyer, 2004). Each component represents how commitment is developed and job behavior implications (Powell & Meyer, 2004). Continuance commitment develops as a response to conditions that result in increased cost to leave (Powell & Meyer, 2004). Affective commitment develops as a response to work experiences (Powell & Meyer, 2004). Normative commitment develops as a response to social pressure (Powell & Meyer, 2004). The original model consisted of eight items, but the model was modified by the creators to remove some commitment scale items, add items, and rewrite items (Ko, Price, & Mueller, 1997). The revised model measures six factors for each of the three commitment components (Cheng & Stockdale, 2003).

Zeinabadi (2010) reported that “Organizational commitment is the strength of an individual’s identification and involvement in a particular organization as characterized by a strong belief in and acceptance of the organization’s goals and values (value commitment) along with a readiness to exert considerable effort on behalf of the organization and to remain a member (commitment to stay) (p.999)”.

Organizational commitment reflects the strength with which employees identify with and are involved in a particular organization (Güteryüz et al. 2008:1627). The identification aspect, on one hand, means that employees have accepted the values and goals of the organization (Jahangir et al. 2004:75). Their involvement aspect, on the other hand, in the organization’s processes and procedures demonstrate their readiness to exert effort in order to promote organizational effectiveness even though the behavior will not result in any incentive or reward (Bogler & Somech 2004:279). Chong and Eggleton (2007:318) add that employees with high OC put organizational interests before their own interests. For this reason, organizational performance will increase in terms of profitability, productivity level, and competitiveness (Law & Ngai 2008:2344).

Wardiyanto (2016), found that the high normative commitment of pesantren administrators showed that the compatibility of personal values with the values brought by the organization had a more important role for pesantren administrators than extrinsic rewards, such as salaries and facilities. Supporting the influence of organizational commitment toward job performance on the teaching staff in state and private universities in Surakarta shows to maintain good work performance of the teaching staff, organizational programs that can improve organizational commitment is important to continue to be implemented by the college management (Wahyudi, 2015).

HYPOTHESIS DEVELOPMENT

Charismatic leadership and job satisfaction

Javidan and Waldman (2003) argued that most of the theoretical and empirical research on charismatic leadership indicates positive outcomes such as delivering high performance and motivated followers. They also indicated that charismatic leadership able to improve followers’ level of satisfaction. Similarly, research by Nguni and colleagues (2006) found that charismatic leadership showed a significant influence and accounts for a large variation in

teachers' job satisfaction. According to Latif (2011), Charismatic leaders may create more satisfaction among their followers since their needs are fulfilled and they feel valued. In addition, the characteristics of charismatic leaders including their educational background, lengths of tenure, gender, and culture could influence an employee's perception of job satisfaction (Amburgey, 2005). Based on the discussion, the following hypothesis is proposed:

H1: Charismatic leadership is positively related to job satisfaction.

Transformational leadership and job satisfaction

The relationship between transformational leadership and job satisfaction has been well established in previous studies (Koh et al, 1995; Bass, 1998; Ejimofor, 2007; Yusof & Shah, 2008; Laohavchien, 2009; Albion & Gagliardi, 2010; Shibru & Darshan, 2011; Omar, 2011). It has been verified in various contexts such as Norway (Hetland & Sandal, 2003), Cyprus (Mine, 2008), Libya (Zahari, 2012), India (Gill et al., 2010), Pakistan (Bushra et al., 2011), and Taiwan (Chi et. al., 2009). The relationship also has been empirically justified in the context of public (Parry & Proctor-Thompson, 2003), education (Mine, 2008), private (Hetland & Sandal, 2003), oil (Zahari, 2012), healthcare (Nielsen et al., 2009), banking (Bushra et al., 2011), non-profit organization (Chi et. al., 2009), and restaurant sector (Gill et al., 2010). In fact, a study by Voon and colleagues (2011) indicates that the transformational leadership style possesses a stronger relationship with job satisfaction. Thus, the following hypothesis is proposed:

H2: Transformational leadership is positively related with job satisfaction.

Leadership style and organizational commitment

Various studies conducted on leadership style claimed that leadership style is considered an antecedent of organizational commitment (Sabir, Sohail, & Asif Khan, 2011). Other researchers also indicated a strong and positive relationship exists between leadership and organizational commitment (Ekaterini, 2010; Sabir et al., 2011). In specific, a recent study showed that charismatic (Mangundjaya, 2021), transformational (Khaola & Rambe, 2021), and autocratic (Ibrahim Radwan, 2020) leadership can have a direct and significant impact on organizational commitment. Thus, the following hypothesis is proposed:

H3: Charismatic leadership is positively related to organizational commitment.

H4: Transformational leadership is positively related to organizational commitment.

Job satisfaction and organizational commitment

The effect of job satisfaction and organizational commitment has been established by previous studies (Oyebi & Abubakar, 2012; Swarnalatha & Sureshkrishna, 2012; Fu & Deshpande, 2014; Neubert & Halbesleben, 2014). In fact, the relationship has been empirically determined in various sector such as retail (Pepe, 2010), health care (Redfern et al., 2002), restaurant (Kim et al., 2005), and high-technology sector (Luthans, 2002). Thus, the following hypothesis is proposed:

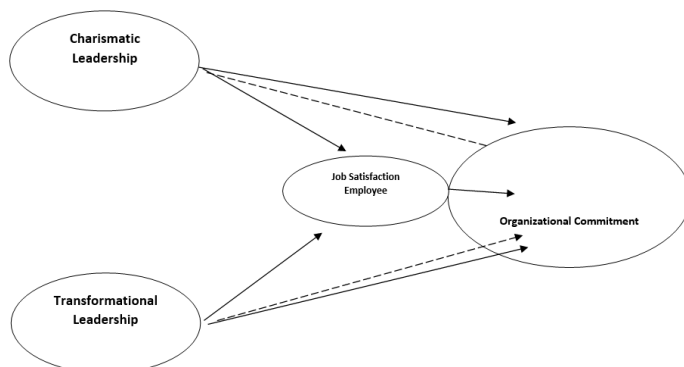
H5: Job satisfaction is positively related to organizational commitment.

Job satisfaction as a mediator

Based on the previous discussion in section 2.7, there is a possibility for job satisfaction to be regarded as a mediator between leadership style (charismatic, transformational) and organizational commitment. In fact, job satisfaction has been verified as a mediator in recent studies. Recent studies showed that job satisfaction plays the role of a mediator between transformational leadership and organizational citizenship behavior (Ahmad & Jameel, 2020), and between safety climate and turnover intention (Balogun, Andel & Smith, 2020). Based on the discussion, there is a potential for job satisfaction to mediate the relationship between leadership style (charismatic, transformational) and organizational commitment, which has not been tested in the literature. Thus, the following hypothesis is proposed:

H6: Job satisfaction mediates the relationship between leadership style (charismatic, transformational) and organizational commitment.

THE RESEARCH FRAMEWORK



E. RESEARCH METHODOLOGY

Research Design

This study will utilize a quantitative research method. This type of research design provides a quantitative or numeric description of trends, attitudes or opinions of a population by studying a sample of that population (Cresswell, 2009). Similarly, according to Babbie (2010), quantitative research can be described as involving a collection of numerical data and as presenting a view of the relationship between theory and research as a deductive and objectivist conception of social reality. An advantage of using quantitative research method is the examination of variables, and the ability to generalize sample results to a larger sample or population (Chintaman, 2014).

A quantitative research method was correlation design. Correlational research is designed to test research hypotheses in cases where it is not possible or desirable to experimentally manipulate the independent variable of interest. It is also desirable because it allows the investigation of behavior in naturally occurring situations. Correlational methods range from analysis of correlations between a predictor and an outcome variable to multiple-regression (Stangor, 2011).

The correlational design has several benefits. First, correlations are a quick and easy way to see whether there is a relationship between two variables that is worth exploring further. They can use preexisting data and if a correlation is found it may be worth investigating why there is a correlation. Second, correlational design is able to describe the strength of a relationship. A correlation coefficient is a simple and objective way to describe the strength of a relationship between two variables. Expressing it as a precise number makes it clear and easy to understand. Third, correlational design can be used to assess behavior as it occurs in people's everyday lives. Forth, the predictor variables cannot be manipulated (Stangor, 2011).

Population and Sample

Krieger (2012) defined population as all members of any well-defined class of people, events or objects. According to Sekaran (2003), population refers to the group of people that a researcher wants to investigate.

The population of this study will be 1028 educators at Darunnajah Pesantren. Darunnajah Pesantren is a private (non-government) Islamic educational institution. This boarding school was established on 1 April 1974 by the late KH. Abdul Manaf Mukhayyar and his colleagues; the late KH. Qomaruzzaman and KH. Mahrus Amin. The presentren implement an integrated curriculum system, which consist of boarding education, intensive Arabic and English teaching. There are 8 types of education level offered by Darunnajah Pesantren; Play Group/PAUD, kindergarten, *Madrasah Diniyah*, Islamic Elementary School, *Tarbiyatul Mu'alliin/Mu'allimat Islamiyah*, Islamic Junior High School, Islamic Senior High School (Social and Religious) and Senior High School (Science), Kindergarten Teacher Education, Islamic High School (STAI).

There are four branches of Darunnajah Pesantren; Jakarta, West Java, Banten and Outside Java. Table 3.1 below shows the distribution of educators for each branch. In

specific, there are 424 educators at Jakarta branch, 360 educators at West Java, 183 educators at Banten branch, and 61 educators at Outside Java branch.

Data Collection Method and Procedure

The data of this study will be collected through a questionnaire. The questionnaire has been regarded as a valid way to collect data for research. O'Leary (2014) suggests some obvious strengths of questionnaires. First, can reach a large number of respondents. Second, can represent an even larger population. Third, allow for comparisons. Fourth, can generate standardized, quantifiable, and empirical data. The fifth can be confidential and even anonymous.

Permission from the management of Darunnajah pesantren will be obtained before distributing the questionnaire to the selected respondents. After getting the permission, the educator's name list will be requested from the human resource department. The sample will be selected randomly from the name list.

The questionnaire will be administered to selected respondents in person. Bell and Waters (2014) highlight the advantage to administering the questionnaire personally, as it enables the researcher to explain the purpose of the study and increases the probability of receiving completed

questionnaires in return. The questionnaire also will be administered to the selected respondents via email. The online questionnaire was adopted as the technique for data collection due to its advantages of low cost and high speed in sending and returning information (Stacks, 2010).

Data Analysis

The data of this study will be analyzed using SPSS software. Below are the steps used by this study to analyze the data:

First, analyzing the demographic variable of respondents which included gender, age, working experience and work status. Frequency and percentage distribution is a display of

data that specifies the percentage of observations that exist for each data point or grouping of data points. It is a particularly to express the relative frequency of survey responses.

Second, conducting an exploratory factor analysis (EFA). In multivariate statistics, exploratory factor analysis (EFA) is a statistical method used to uncover the underlying structure of a relatively large set of variables. EFA also is a technique within factor analysis whose overarching goal is to identify the underlying relationships between measured variables (Norris & Lecavalier, 2010). EFA is commonly used when developing a scale and serves to identify a set of latent constructs underlying a battery of measured variables. Also, it should be used when the researcher has no prior hypothesis about factors or patterns of measured variables (Finch & West, 1997).

The third step was assessing the reliability for each variable based on the Cronbach's alpha value. Cronbach's alpha value determines the internal consistency or average correlation of items in a survey instrument to gauge its reliability. The Cronbach's alpha value ranges in value from 0 to 1. The higher the score, the more reliable the generated scale is. Nunnally (1978) has indicated the value of 0.70 and above to be an acceptable reliability value.

The fourth step was conducting a descriptive analysis. The purpose of doing descriptive statistics was to check the mean and the standard deviation of each variable. In addition, at this stage also a correlation between the variables was examined. If the correlations among all the variables are less than 0.90, this means there is low probability of multicollinearity issue (Tabachnick & Fidell, 2007).

The fifth step involved testing the hypotheses. A regression analysis was conducted to test the proposed hypotheses. The regression analysis can produce the result related to the relationship between the variables and the direction of the relationship, either positive or negative. Moreover, the regression analysis enables checking the significant level of each relationship between variables. The procedure proposed by Baron and Kenny (1986) has been followed to test the mediation effect. Baron and Kenny (1986) proposed a four- step approach to test the mediation as details below:

Step 1: Conduct a simple regression analysis between independent variable (X) and dependent variable (Y).

Step 2: Conduct a simple regression analysis between independent variable (X) and mediator (M).

Step 3: Conduct a simple regression analysis between mediator and dependent variable. The purpose of Steps 1-3 is to establish that zero-order relationships among the variables exist. If one or more of these relationships are non-significant, researchers usually conclude that mediation is not possible or likely. Assuming there are significant relationships from Steps 1 through 3, one proceeds to Step 4. In Step 4, if the relationship between X and Y is no longer significant when M is controlled, the finding supports full mediation. If the relationship between X and Y is still significant when M is controlled, the finding supports partial mediation

F. DISCUSSION/FINDING

Descriptive Statistic

Charismatic Leadership

Charismatic Leadership was measured through 20 items. The result showed that the overall mean for this construct was $M= 3.723$, which indicated that the level of charismatic Leadership was more than moderate level. As seen in Table 4.21, among items related to compensation & benefits, the highest mean belongs to “Kiyai has vision; often brings up ideas about possibilities for the future” with ($M=4.21$, $SD=0.861$). Among related items to compensation & benefits the lowest mean score was observed for “Kiyai engages in unconventional behavior in order to achieve organizational goals ($M=2.99$, $SD=1.083$).

Table 4.21 Descriptive Statistics of Charismatic Leadership

	Item	Mean	Std. Deviation
CL1VA	Kiyai has vision; often brings up ideas about possibilities for the future	4.21	.861
CL2VA	Kiyai provides inspiring strategic and organizational goals	4.13	.808
CL3VA	Kiyai consistently generates new ideas for the future of the organization	4.06	.802
CL4VA	Entrepreneurial; Kiyai seizes new opportunities in order to achieve goals	3.94	.767
CL5VA	Kiyai readily recognizes new environmental opportunities (favorable physical and social conditions) that may facilitate achievement or organizational objectives	3.94	.724
CL6VA	Inspirational; Kiyai, able to motivate by articulating effectively the importance of what organizational members are doing	4.00	.812
CL7VA	Kiyai becomes an exciting Public Speaker	3.98	.863
CL8PR	In pursuing organizational objectives, Kiyai engages in activities involving considerable personal risk	3.47	.966
CL9PR	Kiyai takes high personal risk for the sake of the organization	3.47	.932
CL10PR	Kiyai often incurs high personal cost for good of the organization	3.07	1.044

CL11SE	Kiyai readily recognizes constraints in the physical environment (technological limitations, lack of resources, etc.) that may stand in the way of achieving organizational objectives	3.79	.743
CL12SE	Kiyai Readily recognizes constraints in the organization's social and cultural environment (cultural norms, lack of grass roots support, etc.) that may stand in the way of achieving organizational objectives	3.82	.749
CL13SE	Kiyai recognizes the limitations of other members in the organization	3.70	.745
CL14SE	Kiyai recognizes the abilities and skills of other members in the organization	3.88	.681
CL15SN	Kiyai Shows sensitivity for the needs and feelings of other members in the organization	3.86	.762
CL16SN	Kiyai Influences others by developing mutual liking and respect	3.96	.821
CL17SN	Kiyai often expresses personal concern for the needs and feelings of other members of the organization	3.68	.861
CL18UB	Kiyai engages in unconventional behavior in order to achieve organizational goals	2.99	1.038
CL19UB	Kiyai uses non-traditional means to achieve organizational goals	3.22	.920
CL20UB	Kiyai often exhibits very unique behavior that surprises other members of the organization	3.29	.914
Total		3.723	

Transformational Leadership

Transformational Leadership was measured through 21 items. The result showed that the overall mean for this construct was $M= 3.67$, which indicated that the level of Transformational Leadership was more than moderate level. As seen in Table 4.22, among items related to compensation & benefits, the highest mean belongs to “Kyai makes other people around feel comfortable” and “Others have complete faith with Kyai” with ($M=4.04$, $SD=0.894$ and $SD=0.751$). Among related items to compensation & benefits the lowest mean score was observed for “Kyai provide recognition/ rewards when others reach their goals ($M=2.85$, $SD=1.156$).

Table 4.22 Descriptive Statistics of Transformational Leadership

	Items	Mean	Std. Deviation
TL1II	Kyai makes other people around feel comfortable	4.04	.894
TL2II	Others have complete faith with Kyai	4.04	.751
TL3II	Others are proud to be associated with Kyai	3.73	.812
TL4IM	Kyai express with a few simple words what we could and should do	4.05	.797
TL5IM	Kyai provided an interesting description of what we can do	3.71	.953
TL6IM	Kyai help others find meaning in their work.	3.92	.846
TL7IS	Kyai enable others to think about old problems in new ways	3.13	1.029
TL8IS	Kyai give others a new way of seeing things that are confusing	3.88	.848
TL9IS	Kyai get others to rethink ideas that they had never questioned before	3.86	.784

TL10IC	Kiyai help others develop themselves	3.62	.908
TL11IC	Kiyai let others know how he think thought they are doing	3.78	.736
TL12IC	Kiyai give personal attention to others who seem rejected	3.78	.821
TL13CR	Kiyai tell others what to do if they want to be rewarded for their work	3.20	1.029
TL14CR	Kiyai provide recognition/ rewards when others reach their goals	2.85	1.156
TL15CR	Kiyai call attention to what others can get for what they accomplish.	3.88	.893
TL16ME	Kiyai is am satisfied when others meet agreed-upon standards	3.81	.814
TL17ME	As long as things are working, Kiyai do not try to change anything	3.81	.778
TL18ME	Kiyai tell others the standards they have to know to carry out their work	3.15	1.100
TL9LF	Kiyai content to let others continue working in the same way as always	3.38	1.007
TL20LF	Kiyai doesn't matter whatever others want to do	3.90	.780
TL21LF	Kyai asked no more of others than what is absolutely essential	3.55	.939
Total		3.67	

Job Satisfaction Employee

Job Satisfaction Employee was measured through 36 items. The result showed that the overall mean for this construct was $M= 3.643$, which indicated that the Job Satisfaction Employee was more than moderate level. As seen in Table 4.24, among items related to compensation & benefits, the highest mean belongs to “Kiyai exercises strict discipline over assistants” with ($M=4.13, SD=0.659$). Among related items to compensation & benefits the lowest mean score was observed for “Kiyai scolds us when we can’t accomplish the tasks ($M=2.67, SD=1.139$).

Table 4.24 Descriptive Statistics of Job Satisfaction Employee

	Items	Mean	Std. Deviation
JSE1PP	Kiyai exercises strict discipline over assistants	3.60	.930
JSE2PP	Kiyai scolds us when we can’t accomplish the tasks	3.48	.980
JSE3PP	Kiyai emphasizes that a group must have the best performance of all the units in the organization	3.84	.720
JSE4PP	We have to follow the supervisor’s rules to get things done. If not, he/she punishes us severely	3.00	1.090
JSE5PR	Kiyai exercises strict discipline over assistants	3.91	.794
JSE6PR	Kiyai scolds us when we can’t accomplish the tasks	3.52	1.016
JSE7PR	Kiyai emphasizes that a group must have the best performance of all the units in the organization	3.90	.723
JSE8PR	We have to follow the supervisor’s rules to get things done. If not, he/she punishes us severely	3.06	1.132
JSE9SV	Kiyai exercises strict discipline over assistants	3.88	.772

JSE10SV	Kiyai scolds us when we can't accomplish the tasks	3.70	1.102
JSE11SV	Kiyai emphasizes that a group must have the best performance of all the units in the organization	3.85	.754
JSE12SV	We have to follow the supervisor's rules to get things done. If not, he/she punishes us severely	3.13	.994
JSE13FB	Kiyai exercises strict discipline over assistants	3.95	.776
JSE14FB	Kiyai scolds us when we can't accomplish the tasks	3.24	1.054
JSE15FB	Kiyai emphasizes that a group must have the best performance of all the units in the organization	3.79	.838
JSE16FB	We have to follow the supervisor's rules to get things done. If not, he/she punishes us severely	3.57	.981
JSE17CR	Kiyai exercises strict discipline over assistants	4.04	.687
JSE18CR	Kiyai scolds us when we can't accomplish the tasks	2.67	1.139
JSE19CR	Kiyai emphasizes that a group must have the best performance of all the units in the organization	3.47	1.040
JSE20CR	We have to follow the supervisor's rules to get things done. If not, he/she punishes us severely	3.76	.879
JSE21OC	Kiyai exercises strict discipline over assistants	3.17	.975
JSE22OC	Kiyai scolds us when we can't accomplish the tasks	3.92	.689
JSE23OC	Kiyai emphasizes that a group must have the best performance of all the units in the organization	3.80	.854

JSE24OC	We have to follow the supervisor's rules to get things done. If not, he/she punishes us severely	3.89	.694
JSE25CW	Kiyai exercises strict discipline over assistants	4.13	.659
JSE26CW	Kiyai scolds us when we can't accomplish the tasks	3.39	1.069
JSE27CW	Kiyai emphasizes that a group must have the best performance of all the units in the organization	3.94	.700
JSE28CW	We have to follow the supervisor's rules to get things done. If not, he/she punishes us severely	3.71	.854
JSE29NW	Kiyai exercises strict discipline over assistants	3.92	.792
JSE30NW	Kiyai scolds us when we can't accomplish the tasks	3.81	.739
JSE31NW	Kiyai emphasizes that a group must have the best performance of all the units in the organization	3.83	.890
JSE32NW	We have to follow the supervisor's rules to get things done. If not, he/she punishes us severely	3.37	1.055
JSE33CM	Kiyai exercises strict discipline over assistants	3.96	.827
JSE34CM	Kiyai scolds us when we can't accomplish the tasks	3.55	1.038
JSE35CM	Kiyai emphasizes that a group must have the best performance of all the units in the organization	3.85	.737
JSE36CM	We have to follow the supervisor's rules to get things done. If not, he/she punishes us severely	3.56	1.020
Total		3.643	

Organizational Commitment

Organizational Commitment was measured through 18 items. The result showed that the overall mean for this construct was $M= 3.494$ which indicated that the organizational Commitment was more than moderate level. As seen in Table 4.25, among items related to compensation & benefits, the highest mean belongs to “This organization has a great deal of personal meaning for me” with ($M=4.00, SD=0.659$). Among related items to compensation & benefits the lowest mean score was observed for “I do not feel like “part of my family” at this organization ($M=2.77, SD=1.128$).

Table 4.25 Descriptive Statistics of Organizational Commitment

	Items	Mean	Std. Deviation
OC1AC	I would be very happy to spend the rest of my career in this organization	3.57	.796
OC2AC	I really feel as if this organization’s problems are my own	3.25	1.105
OC3AC	I do not feel like “part of my family” at this organization	2.77	1.128
OC4AC	I do not feel “emotionally attached” to this organization	2.85	1.091
OC5AC	This organization has a great deal of personal meaning for me	4.00	.659
OC6AC	I do not feel a strong sense of belonging to this organization	2.90	1.132
OC7CC	It would be very hard for me to leave my job at this organization right now even if I wanted to	3.68	.800
OC8CC	My life will be disrupted too much if I leave my organization	3.46	.917
OC9CC	Right now, staying with my job at this organization is a matter of necessity as much as desire	3.77	.747
OC10CC	I believe I have too few options to consider leaving this organization	3.64	.790

OC11CC	One of the few negative consequences of leaving my job at this organization would be the scarcity of available alternatives elsewhere	3.47	.931
OC12CC	One of the major reasons I continue to work for this organization is that leaving would require considerable personal sacrifice	3.64	.841
OC13NC	I do not feel any obligation to remain with my organization	3.27	1.035
OC14NC	Even if it were to my advantage, I do not feel it would be right to leave	3.60	.803
OC15NC	I would feel guilty if I left this organization now	3.81	.731
OC16NC	This organization deserves my loyalty	3.78	.738
OC17NC	I would not leave my organization right now because of my sense of obligation to it	3.89	.711
OC18NC	I owe a great deal to this organization	3.55	.872
Total		3.494	

4.6 Summary of exploratory factor analysis (EFA)

Table 4.26 Summary of exploratory factor analysis

Variable/ Items	Original Items	Final items
Vision and articulation	- 7 items (CL1VA, CL2VA, CL3VA, CL4VA, CL5VA, CL6VA, CL7VA).	- 7 items (CL1VA, CL2VA, CL3VA, CL4VA, CL5VA, CL6VA, CL7VA).
Personal risk	- 3 items (CL8PR, CL9PR, CL10PR).	- 3 items (CL8PR, CL9PR, CL9PR).

Sensitivity to the environment	- 4 items (CL11SE, CL12SE, CL13SE, CL14SE)	- 4 items (CL11SE, CL12SE, CL13SE, CL14SE)
Sensitivity to member needs	- 3 items (CL15SN, CL16SN, CL17SN)	- 3 items (CL15SN, CL16SN, CL17SN)
Unconventional behavior	- 3 items (CL18UB, CL19UB, CL20UB).	- 3 items (CL18UB, CL19UB, CL20UB).
Idealized influence	- 3 items (TA1, TA2, TA3).	- 3 items (TA1, TA2, TA3).
Inspirational motivation	- 3 items (TA4, TA5, TA6).	- 3 items (TA4, TA5, TA6).
Intellectual stimulation	- 3 items (TA7, TA8, TA9).	- 3 items (TA7, TA8, TA9).
Individualized consideration	- 3 items (TA10, TA11, TA12).	- 3 items (TA10, TA11, TA12).
Contingent Reward	- 3 items (TA13, TA14, TA15).	- 3 items (TA13, TA14, TA15).
Management by expectation	- 3 items (TA16, TA17, TA18).	- 3 items (TA16, TA17, TA18).
Laissez-faire leadership	- 3 items (TA19, TA20, TA21).	- 3 items (TA19, TA20, TA21).
Pay and pay raise	- 4 items (JSE1PP, JSE2PP, JSE3PP, JSE4PP) - 1 Item (JSE4PP) have been deleted due to cross-loading.	- 3 items (JSE1PP, JSE2PP, JSE3PP).
Promotion	- 4 items (JSE5PR, JSE6PR, JSE7PR, JSE8PR).	- 4 items (JSE5PR, JSE6PR, JSE7PR, JSE8PR).

Supervision	<ul style="list-style-type: none"> - 4 items (JSE9SV, JSE10SV, JSE11SV, JSE12SV). - 1 Item (JSE12SV) have been deleted due to cross-loading. 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 items (JSE9SV, JSE10SV, JSE11SV).
Fringe benefit	<ul style="list-style-type: none"> - 4 items (JSE13FB, JSE14FB, JSE15FB, JSE16FB). 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 items (JSE13FB, JSE14FB, JSE15FB, JSE16FB).
Contingent rewards	<ul style="list-style-type: none"> - 4 items (JSE17CR, JSE18CR, JSE19CR, JSE20CR). 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 items (JSE17CR, JSE18CR, JSE19CR, JSE20CR).
Operating condition	<ul style="list-style-type: none"> - 4 items (JSE21OC, JSE22OC, JSE23OC, JSE24OC). 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 items (JSE21OC, JSE22OC, JSE23OC, JSE24OC).
Co-workers	<ul style="list-style-type: none"> - 4 items (JSE25CW, JSE26CW, JSE27CW, JSE28CW) 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 items (JSE25CW, J S E 2 6 C W , J S E 2 7 C W , JSE28CW)
Nature of work	<ul style="list-style-type: none"> - 4 items (JSE29NW, JSE30NW, JSE31NW, JSE32NW) 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 items (JSE29NW, J S E 3 0 N W , J S E 3 1 N W , JSE32NW)
Communication	<ul style="list-style-type: none"> - 4 items (JSE33CM, JSE34CM, JSE35CM, JSE36CM) 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 items (JSE33CM, J S E 3 4 C M , J S E 3 5 C M , JSE36CM)
Affective Commitment	<ul style="list-style-type: none"> - 6 items (OC1AC, OC2AC, OC3AC, OC4AC, OC5AC, OC6AC) - 2 Items (OC1AC, OC5AC) have been deleted due to cross-loading. 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 items (OC2AC, OC3AC, OC4AC, OC6AC)

Continuance Commitment	<ul style="list-style-type: none"> - 6 items (OC7CC, OC8CC, OC9CC, OC10CC, OC11CC, OC12CC) - 1 Item (OC7CC) have been deleted due to cross-loading. 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 items (OC8CC, OC9CC, OC10CC, OC11CC, OC12CC)
Normative Commitment	<ul style="list-style-type: none"> - 6 items (OC13NC, OC14NC, OC15NC, OC16NC, OC17NC, OC18NC) 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 items (OC13NC, OC14NC, OC15NC, OC16NC, OC17NC, OC18NC)

Correlation between variables

The correlations are presented in Table 4.27 and the result indicate that there are positive relationships among variables. The correlation values fallen between 0.117 and 0.971. The are variable with correlation above 0.80, it can be conclude that there are multicollinearity issues between variable (Hair, et al 2007; Tabachnick and Fidell, 2007).

Table Correlations Matrix Between Variable

	Mean	Std. Deviation	Total_ CL	Total_ TL	Total_ AL	Total_ JSE	Total_ OC
Total_CL	74.43	7.654	1				
Total_TL	77.09	8.819	.447**	1			
Total_JSE	131.18	15.136	.427**	.953**	.390**	1	
Total_OC	62.91	7.193	.432**	.962**	.376**	.971**	1

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hypothesis testing

The Result of multiple regression to test hypothesis 1

Table 4.28 present the result of multiple regressions for the impact of Charismatic Leadership on Organizational Commitment. As shown in Table 4.28 that Charismatic Leadership management practices have a significant relationship to Organizational Commitment (β : 0.0432, $p > 0.000$).

Table Multiple regression result for Charismatic Leadership to Organizational Commitment

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	32.659	2.694		12.124	.000
Total_CL	.406	.036	.432	11.288	.000

a. Dependent Variable: Total_OC

Table Model Summary Charismatic Leadership to Organizational

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.432 ^a	.187	.186	6.492

a. Predictors: (Constant), Total_CL

Table ANOVA^a Charismatic Leadership to Organizational

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5369.469	1	5369.469	127.419	.000 ^b
Residual	23345.668	554	42.140		
Total	28715.137	555			

a. Dependent Variable: Total_OC

b. Predictors: (Constant), Total_CL

The Result of multiple regression to test hypothesis 2

Table 4.31 present the result of multiple regressions for the impact of Transformativ Leadership on Organizational Commitment. As shown in Table 4.31 that Transformativ Leadership have a significant relationship to Organizational Commitment (β : .0.962, $p > 0.000$).

Table Multiple regression result for Transformativ Leadership to Organizational Commitment

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.426	.735		3.301	.001
	Total_TL	.785	.009	.962	82.833	.000

a. Dependent Variable: Total_OC

Table Model Summary Transformativ Leadership to Organizational Commitment

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.962 ^a	.925	.925	1.968

a. Predictors: (Constant), Total_TL

Table ANOVA^a Transformational Leadership to Organizational Commitment

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	26569.796	1	26569.796	6861.226	.000 ^b
	Residual	2145.341	554	3.872		
	Total	28715.137	555			

a. Dependent Variable: Total_OC

b. Predictors: (Constant), Total_TL

The Result of multiple regression to test hypothesis 4

Below table present the result of multiple regressions for the impact of Job Satisfaction employee on Organizational Commitment. As shown in below table that Job Satisfaction employee have a significant relationship to Organizational Commitment (β : 0.971, $p > 0.000$).

Table Multiple regression result for Job Satisfaction Employee to Organizational Commitment

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.361	.635	3.717	.000
	Total_JSE	.462	.005	.971	.000

a. Dependent Variable: Total_OC

Table Model Summary Job Satisfaction Employee to Organizational Commitment

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.971 ^a	.943	.943	1.715

a. Predictors: (Constant), Total_JSE

Table ANOVA^a Job Satisfaction Employee to Organizational Commitment

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	27085.360	1	27085.360	9206.959	.000 ^b
	Residual	1629.777	554	2.942		
	Total	28715.137	555			

a. Dependent Variable: Total_OC

b. Predictors: (Constant), Total_JSE

The Result of multiple regression to test hypothesis 5 (CL to JSE)

Below table present the result of multiple regressions for the impact of Charismatic Leadership on Job Satisfaction employee. As shown in below table that Charismatic Leadership have a significant relationship to Job Satisfaction employee (β : 0.427, $p > 0.000$).

Table Multiple regression result for Charismatic Leadership to Job Satisfaction Employee

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	68.269	5.683		12.012	.000
	Total_CL	.845	.076	.427	11.128	.000

a. Dependent Variable: Total_JSE

Table Model Summary Charismatic Leadership to Job Satisfaction Employee

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.427 ^a	.183	.181	13.696

a. Predictors: (Constant), Total_CL

Table ANOVA^a Charismatic Leadership to Job Satisfaction Employee

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	23230.839	1	23230.839	123.841	.000 ^b
	Residual	103922.449	554	187.586		
	Total	127153.288	555			

a. Dependent Variable: Total_JSE

b. Predictors: (Constant), Total_CL

The Result of multiple regression to test hypothesis 6 (TL to JSE)

Below table present the result of multiple regressions for the impact of Transformational Leadership on Job Satisfaction employee. As shown in below table that Transformational Leadership have a significant relationship to Job Satisfaction employee (β : 0.953, $p > 0.000$).

Table Multiple regression result for Transformational Leadership to Job Satisfaction Employee

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.075	1.712		2.965	.003
Total_TL	1.636	.022	.953	74.161	.000

a. Dependent Variable: Total_JSE

Table Model Summary Leadership to Job Satisfaction Employee

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.953 ^a	.908	.908	4.583

a. Predictors: (Constant), Total_TL

Table ANOVA^a Leadership to Job Satisfaction Employee

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	115517.337	1	115517.337	5499.903	.000 ^b
	Residual	11635.951	554	21.004		
	Total	127153.288	555			

a. Dependent Variable: Total_JSE

b. Predictors: (Constant), Total_TL

The result of the hierarchical regression analysis to test hypothesis 7 to 8

The hierarchical multiple regression analyses were used to explore the mediation effect of Job Satisfaction Employee in the relationship between Charismatic Leadership, Transformational leadership, on one hand, Organizational Commitment on the other hand.

Hypothesis 7: Job Satisfaction Employee mediates the relationship between Charismatic Leadership and Organizational Commitment.

Previous Table 4.28 presented Charismatic Leadership has significant relationship to Organizational Commitment (β : .0432, $p > 0.000$). Moreover, Table 4.48 found that the relationship between Charismatic Leadership and Organizational Commitment positive and significant (β : .933, p : 0.000) when the mediator was controlled. This clearly shows that Job Satisfaction Employee was success to mediate the relationship between Charismatic Leadership and Organizational Commitment.

Table 4.49: Regression analysis result for Charismatic Leadership and Organizational Commitment

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.240	2.477		9.788	.000
	Total_CL	.368	.033	.427	11.128	.000
2	(Constant)	-5.245	1.008		-5.205	.000
	Total_CL	.025	.013	.029	1.930	.054
	Total_JSE_Final	.440	.007	.933	61.433	.000

a. Dependent Variable: Total_OC_Final

Table 4.50 Model Summary Charismatic Leadership and Organizational Commitment

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.427 ^a	.183	.181	5.96846
2	.946 ^b	.896	.895	2.13561

a. Predictors: (Constant), Total_CL

b. Predictors: (Constant), Total_CL, Total_JSE_Final

4.51 ANOVA^a Charismatic Leadership and Organizational Commitment

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4410.856	1	4410.856	123.822	.000 ^b
	Residual	19734.842	554	35.622		
	Total	24145.698	555			
2	Regression	21623.558	2	10811.779	2370.572	.000 ^c
	Residual	2522.140	553	4.561		
	Total	24145.698	555			

a. Dependent Variable: Total_OC_Final

b. Predictors: (Constant), Total_CL

c. Predictors: (Constant), Total_CL, Total_JSE_Final

Hypothesis 8: Job Satisfaction Employee mediates the relationship between Transformativ Leadership and Organizational Commitment.

Previous Table 4.31 presented Transformativ Leadership has significant relationship to Organizational Commitment (β : .962, $p > 0.000$). Moreover, Table 4.51 found that the relationship between Transformativ Leadership and Organizational Commitment positive and significant (β : .561, $p: 0.000$) when the mediator was controlled. This clearly shows that Job Satisfaction Employee was success to mediate the relationship between Transformativ Leadership and Organizational Commitment.

Table 4.52: Regression analysis result for Transformational Leadership and Organizational Commitment

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.432	.854		-2.847	.005
	Total_TL	.702	.011	.938	63.746	.000
2	(Constant)	-4.792	.755		-6.346	.000
	Total_TL	.303	.030	.406	10.058	.000
	Total_JSE_Final	.264	.019	.561	13.905	.000

a. Dependent Variable: Total_OC_Final

Tabel 4.53 Model Summary Transformitaic Leadership and Organizational Commitment

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.938 ^a	.880	.880	2.28671
2	.955 ^b	.911	.911	1.97014

a. Predictors: (Constant), Total_TL

b. Predictors: (Constant), Total_TL, Total_JSE_Final

Table 4.54 ANOVA^a Transformational Leadership and Organizational Commitment

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21248.806	1	21248.806	4063.610	.000 ^b
	Residual	2896.892	554	5.229		
	Total	24145.698	555			
2	Regression	21999.262	2	10999.631	2833.906	.000 ^c
	Residual	2146.435	553	3.881		
	Total	24145.698	555			

a. Dependent Variable: Total_OC_Final

b. Predictors: (Constant), Total_TL

c. Predictors: (Constant), Total_TL, Total_JSE_Final

4.9 Summary of the finding

Table 4.58 Summary of Finding

No.	Hypotheses	Analysis results
H1	Charismatic leadership is positively related with job satisfaction.	Supported (Positive and significant)
H2	Transformational leadership is positively related with job satisfaction.	Supported (Positive and significant)
H3	Charismatic leadership is positively related with organizational commitment.	Supported (Positive and significant)
H4	Transformational leadership is positively related with organizational commitment.	Supported (Positive and significant)
H5	Job satisfaction is positively related with organizational commitment.	Supported (Positive and significant)
H6	Job satisfaction mediate the relationship between leadership charismatic leadership and organizational commitment.	Supported (Positive and significant)
H7	Job satisfaction mediate the relationship between leadership transformational leadership and organizational commitment.	Supported (Positive and significant)

G. IMPLICATION OF THE RESEARCH

This research has a number of theoretical implications and practical that may supply some lights to researchers and practitioners.

Theoretical implication of the research

The present study examined that the leadership styles have an influence on employees' job satisfaction and organizational commitment in context of pesantren in Indonesia. Most of previous researches have been conducted in western countries. It is due the research related to job satisfaction in this context is still scarce especially in non-western countries.

Based on previous discussion of research, there is a possibility for job satisfaction be regarded as mediator between leadership styles (charismatic, transformational), and organizational commitment. In fact, job satisfaction has been verified as a mediator in recent studies, The recent studies showed that job satisfaction play the role as a mediator between transformational leadership and citizenship behavior (Ahmad & Jameel, 2020), and between safety climate and turnover intention (Balogun, Ansel & Smith, 2020).

This reseach according to study Afshinpour (2014), indicates that each of leadership styles (charismatic, transformational) has a positive correlation with employees' job satisfaction. The research finding there is a significant positive relationship between leadership styles and organizational commitment is congruent with the findings of many other studies. (Bannon, 2000; Betsinger, 1997)

Additionally, this study revealed that he job satisfaction shows an essensial role as a mediator in the relationship between leadership styles with organizational commitment. Furthermore, the current study also indicated as above.

Practical implications of the research

First, the findings of current study can be used by Kiyai at pesantren in Indonesia, particularly Pesantren Darunnajah Jakarta in leadership style. It is due that an art to manage pesantren is not absolutely depent on one style of leadership, but all styles of leadership can be implicated in accordance with situation. Kiyai may be some time reveals charismatic leadership style to influence the teachers at pesantren. It's going with the concept of Islam that a leader must be a good example for himself and for all educators at pesantren

as mentioned at Al-Ahزاب : 21, “Surely in the messenger of Allah there is an excellent example for you”. This verse tells believers that the holly Prophet is a role model for believers. His way of doing things, or his sunnah, must be followed by those who wish to please God and attain success in the world and the hereafter. This charismatic leadership style proved successful correlated with job satisfaction and organizational commitment directly and indirectly.

Second, Kiyai may be too reveals transformational leadership style to influence the teachers at pesantren. It’s going with the concept of Islam “And consult with them in (certain) matters” (Ali Imron ; 159). Consulting others and taking their opinions reveals a level of trust and respect for them. The practice of consulting others has many benefits at other verse mentioned. “And (mention, O Muhammad), when you Lord said to the angels, “Indeed, I will make upon the earth a successive authority, “They said, “ Will you place upon it who causes corruption therein and sheds blood, while we declare Your praise and sanctify you ?” Allah said, “Indeed, I know that which you do not know.”. Based on above verses, the leader (Kiyai) allowed to discuss with others the goal of pesantren and for the betterment of organization.

Third, The present study also showed that payment has influenced on employees’ job satisfaction. As in any job, more pay would make the employees happy and satisfied. Kiyai should influence all educators at pesantren Darunnajah Indonesia that job satisfaction is not always identical with payment or salary. In addition, Kiyai should be aware of how employees’ job satisfaction relate to their work, but Kiyai is able to transformate the philosophy of satisfaction according to Islamic concept. Allah said, “We have distributed their livelihood among them in worldly life” (Az-Zuhuf ; 32).

Limitations and Suggestions for Future Research

One limitation of this study is the data were collected at one point in time, applying a cross-sectional design methodology. The cross-sectional method that collects data in a single point of time was insufficient to capture the pattern of change and the magnitude of causal relationships between the studied variable. Although researchers suggest the cross-sectional method (López et al., 2006; Chiaburu and Lindsay: 2008; Dysvik & Kuvass: 2008, Gegenfurtner et al.: 2009; Chiaburu et al., 2010;).

Also, this study applies a quantitative research design where the data were collected through a questionnaire survey. Future studies should consider

collecting more in-depth qualitative data from their respondents. The use of both qualitative and quantitative methods would provide an opportunity for more in-depth and richer explanations of why employees willing to remain in the public sector organization and how the employee retention affects their organizational citizenship behavior and job embeddedness.

Another limitation is that the conclusions of this study only apply to the organization where the research was conducted and does not apply to other organizations outside the research. The data of this study was collected from pesantren as Islamic education institution. Thus, future studies could replicate the proposed conceptual framework used herein other types of organizations such as, scoll institution, sector puvlic, private sector organizations, non-government organization to validate the findings of this study. The questionnaire of length, can not used to this survey method. The length of the questionnaire can affect the level of cooperation of people in responding to the questionnaire (Punch, 2003) and as a long questionnaire can lead to sloppy responses (Breaugh & Colihan, 1994).

Conclusion

This study essential knowledge to the role employee job satisfaction as mediation charismatic, and transformational leadership style on employee's organizational commitment in pesantren. Specifically in the Indonesian education sector organization, specially Islamic education boarding school (pesantren). This study has measurement the grade of charismatic, and transformational leadership, employees' job satisfaction and employee's organizational commitment. The contribution of charismatic, and transformational leadership style on employees' job satisfaction. The contribution of charismatic, and transformational leadership style on employee's organizational commitment. The contribution of employees' job satisfaction on employee's organizational commitment. Also, this study provides empirical about the role of job satisfaction employees as a mediator between leadership style (charismatic, transformational) and organizational learning employees.

H. REFERENCES

- Aaron D Arndt Anusorn, Singhapakdi & Vivian Tam (2015), "Consumers as employees: the impact of social responsibility on quality of work life among Australian engineers", *Social Responsibility Journal*, Vol. 11 Iss 1 pp. 98 – 108.
- Abbasiyannejad et al. (2015), M., Silong, A. D., Ismail, I. A., Othman, J., Wahiza, N., & Wahat, A. (2015). Charismatic Leadership and Society. *International Research Journal of Social Science*, 4(1), 68–73. Retrieved from www.isca.in
- Abdullah, I. Muhammad, Z. and Hasse, J. (Eds), 2008. *Agama, Pendidikan Islam, dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Pascasarjana UGM.
- Abouraija, M. and Othman, S. (2017) Transformational Leadership, Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Turnover Intentions: The Direct Effects among Bank Representatives. *American Journal of Industrial and Business Management*, 7, 404-423. doi: 10.4236/ajibm.2017.74029.
- Abu Md. Taher, (2013), "Variations of quality of work life of academic professionals in Bangladesh", *European Journal of Training and Development*, Vol. 37 Iss 6 pp. 580 – 595.
- Acar, A. Z. (2012). Organizational culture, leadership styles and organizational commitment in Turkish logistics industry. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 217–226. doi:10. 1016/j.sbspro.2012.09.995.
- Adair, J. E. (2002). *Inspiring leadership-learning from great leaders*. Thorogood Publishing .
- Adair, J (2005), *Not bosses but leaders: How to lead the way to success*. MPG book Limited.
- Adebayo, O. O. (2010). Obstetric nurses' perceptions of manager's leadership style on job satisfaction and organizational commitment. (Order No. 3468112, University of Phoenix).
- Affand M, Faqih, Pola Kepemimpinan Kyai dalam Pondok Pesantren, *Jurnal*

Pendidikan Universitas Garut Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan
Universitas Garut,ISSN: 1907-932X, PP. 20-30.

- Afshinpour, S. (2014). Leadership Styles and Employee Satisfaction:A Correlation Study. *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, Vol. 27, pp 156-169 doi:10.18052.
- Agustini, Huriyah; Kurniadi, Dede; and Wildan. (2013). Kontribusi Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Unit Usaha Pondok Pesantren La Tansa Cipanas Di Kabupaten Lebak. *e-jurnal Management Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013*.
- Ahmad, F., Abbas, T., Latif, S. & Rasheed, A. (2014). Impact of Charismatic Leadership on Employee Motivation in Telecommunication Sector. *Journal of Management Policies and Practices*, 2(2), 11-25.
- Akbar, F. H., Hamid, D., & Djudi, M. (2016). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasional dan Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Tetap PG Kebon Agung Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 38(2), 79–12. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1512> [Google Scholar].
- Akbolat, M., Isık, O. & Yılmaz, A. (2013). Dönüşümcü liderlik davranışının motivasyon ve duygusal bağlılığa etkisi. *International Journal of Economic and Administrative Studies*, 6 (11), 35–50.
- Akor, P.U. (2014). Influence of Autocratic Leadership Style on the Job Performance of Academic Librarians in Benue State. *Journal of Educational and Social Research MCSER Publishing, Rome-Italy*. Vol. 4 No.7 November 2014. PP 248-152.
- Alamsyah, Andi Rahman, 2000, *Pesantren, Pendidikan Kewargaan, dan Demokras*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI.
- Albion, M.J. and R.E. Gagliardi, 2011. A Study of Transformational Leadership, Organizational Change and Job Satisfaction, *Journal of Organizational Change Management*, 2(1): 23-32.
- Al-Daibat, B. The impact of leadership styles on organizational commitment at Jordanian banks. *International Journal of Business and Management Review* Vol.5, No.5, pp.25-37, June 2017.

- Ali, Mukti, 2001, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini, dalam Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al Irbili, Muhammad Amin Al Kurdi. (2010). *Tanwirul qulub: fi mu'amalat 'allam al ghuyub*. Lebanon: Dar Al Kotob Al Ilmiyah.
- Al Khajeh, E. H. (2018). Impact of Leadership Styles on Organizational Performance. *Journal of Human Resources Management Research*, 2018, Article ID: 687849.
- Alkreedy, B (2010). leadership styles and their impact on organizational commitment a field study in the faculty of management and economics at qadisiyah university. *qadisiyah journal of administrative and economic sciences* (12) 3, 22-43.
- Aloqla, R. M. A. (2021). The effect of leadership styles on improving communication method among academic administrators. *Cypriot Journal of Educational Science*. 16 (1), 396-410.
- Alvarez, O., Lila, M., Tomas, I., & Castillo, I. (2014). Transformational leadership in the local police in Spain: A leader-follower distance approach. *Spanish Journal of Psychology*, 17(42), 1-9.
- Amal, T.A. (2003), Gurutta Abdurrahman Ambo Dalle: Ulama Besar dari Tanah Bugis, in Jajat Burhanuddin and Ahmad Baedhowi (Ed.), *Transformasi Otoritas Keagamaan: Pengalaman Islam di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama.
- Amanchukwu, R. N., Stanley, G. J. & Ololube, N. P. (2015). A Review of Leadership Theories, Principles and Styles and their Relevance to Educational Management. *Management*, 5(1): 6-14.
- Amburgey, W.O.D., 2005. An Analysis of the Relationship between Job Satisfaction, Organizational Culture and Perceived Leadership Characteristics. Ph. D. Thesis. University of Central Florida.
- Arifin, Zainal. (2017). The Authority of Spiritual Leadership at Pesantren Temboro Based on Jamaah Tabligh Ideology. *Jurnal Pendidikan Islam* : Volume 6, Number 2, December.
- Anderson, C., & Brown, C. E. (2010). The functions and dysfunctions of hierarchy. *Research in organizational behavior*, 30, 55-89.

- Ancok, D.J. dan Suroso, F.N. 2005. Psikologi Islam: Solusi Islam Atas problemProblem Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andersen, J. A. (2015). Barking up the wrong tree. On the fallacies of the transformational leadership theory. *Leadership & Organization Development Journal*, 36(6), 765- 777. doi: 10.1108/LODJ-12-2013-0168.
- Anoraga. 1992. *Psikologi Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Antonakis, J., Cianciolo, A., , & Stenberg (2004). "The Nature of Leadership. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
- Antonakis et al., "Can Charisma Be Taught?" (*Academy of Management Learning & Education*, Sept. 2011).
- Antonakis et al., J. Avolio B., & Sivasubramanian, (2003). "Contex and leadership: AN examination pf the nine-factot fill-range leadership theory using the Multifactor Leadership Questionnaire ". *The Leadership Quarterly* , 14, 261-295. Elsevier Science Inc.
- Ardiansyah. 2012 Analisis Gaya Kepemimpinan Situasional (Situational Leadership) Sebagai Model Kepemimpinan Di Era Modern. Sekolah Tinggi Ilmu Perawat Berau, Kalimantan Timur.<http://kopertis11.net/jurnal/sosial/Vol.4%20No.2%20Juni%202012/Ardiansyah%20editan.pdf> diakses tanggal 18 Januari 2022.
- Arifin, Z. (2016). Efektifitas Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Islam di Pesantren. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 27(1), 40 ~ 64-40 ~ 64. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.258>.
- Arifin, Achmad Z. "Charisma and Rationalisation in a Modernising Pesantren : Changing Values in Traditional Islamic Education in Java." University of Western Sydney (Australia, 2013).
- Armstrong, M. (2012). *Armstrong's Handbook of Management and Leadership: Developing Effective People Skills for Better Leadership and Management* (3rd ed.). London: Kogan Page.
- A.P. Mangkunegara, Miftahuddin. The effect of transformational leadership and job satisfaction on employee performance *Universal Journal of Management*, 4 (4) (2016), pp. 189-195.
- Aryee S., Chen Z. X., Sun L. Y., Debrah Y. A. (2007). Antecedents and outcomes

of abusive supervision: test of a trickle-down model. *J. Appl. Psychol.* 92 191–201. 10.1037/0021-9010.92.1.191 [PubMed] [CrossRef].

Assiri, A (2014). Leadership styles and their relation to organizational commitment of employees in the General Secretariat of the Saudi Shura Council. Unpublished master thesis.. Naif arab university for security sciences.

Atiqullah, “Varian Kepemimpinan Kolektif Pondok Pesantren di Jawa Timur”,*Karsa* ,Vol.20 No. 1 tahun 2012.

Avolio, B. J. & Bass, B. M. (2004). Multifactor Leadership Questionnaire. Manual and sampler set. (3rd ed.) Redwood City, CA: Mind Garden.

Avolio, B. J., Zhu, W., Koh, W., & Bhatia, P. (2004). Transformational leadership and organizational commitment: mediating role of psychological empowerment and moderating role of structural distance. *Journal of Organizational Behavior*, 25(8), 951-968.

Aydin, A., ;, S, A., Sarier, Y., & Uysal, S. (2013). The effect of school principals ' leadership styles on teachers ' organizational commitment and job. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 13(2), 806– 811.

Azra, A. Jamhari, (2006). Pendidikan Islam Indonesia dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Sosio Historis dalam Jajat Burhanuddin, Dina Afrianti (Ed.), *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.

Aycan Z. (2006). “Paternalism: towards conceptual refinement and operationalization,” in *Indigenous and Cultural Psychology: Understanding People in Context* eds Yang K. S., Hwang K. K., Kim U., editors. (New York, NY: Springer;) 445–466. 10.1007/0-387-28662-4_20.

Babbie, E. (2002). *The basics of social research* (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth Bartle, S.A., Dansby, M.R., Landis, D., and McIntyre, R.M. (2002), ‘The Effect of Equal Opportunity Fairness Attitudes on Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Perceived Work Group Efficacy,’ *Military Psychology*, 14, 4, 299-319.

Bannon, K. C. (2000). Principals’ and teachers’ perceptions of the extent to which principals exercise transformational leadership in schools and the relationship of these leadership perceptions to teachers’ perceptions of the extent of shared school goals and teacher commitment in these schools. (Order No. 9968759, St. John’s University (New York), School of

Education and Human Services).

- Bashori, B. (2019). Kepemimpinan Transformasional Kyai Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 73–84. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v3i2.535>.
- Bass, B.M. & Avolio, B.J. (1994). Introduction. In B.M. Bass & B.J. Avolio. (Eds.). *Improving organisational effectiveness: Through transformational leadership*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Bass, B.M. (1995). From transactional to transformational leadership: Learning to share a vision. In R.M. Steers, L.W. Poter & G.A Bigley (Eds.). *Motivation and leadership at work*. (6th Ed.). New York: McGraw-Hill: 628-640.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2014). *Transformational leadership*. New York, NY: Routledge.
- Bass, B. M., & Bass, R. (2009). *The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications*. New York: Simon and Schuster.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational Leadership* (2nd ed.). New York, NY: Taylor & Francis Group, LLC. B. J. Avolio, B. Bass, F. O. Walumbwa, and W. Zhu, *MLQ Multifactor Leadership Questionnaire* (3rd Ed.), Redwood, CA: Mind Garden, 2004.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership*, (2nd ed.) New York, NY: Psychology Press.
- Bazawi H., Syah T.Y.R., Indradewa R., Pusaka S. (2019). The Impact of charismatic leadership on turnover intentions and organizational citizenship behavior towards job satisfaction. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*. Vol. 91, no. 7. pp. 302 – 309.
- Bell, J., Waters, S., & Ebooks Corporation. (2014). *Doing your research project: A guide for first-time researchers* (Sixth ed.). Maidenhead, Berkshire: Open University Press.
- Benardin, H. John & Joyce E. Russle (1995), *Human Resources Management*. New York. United States of America. McGraw-Hill Inc.
- Betsinger, A. M. (1997). Influences of culture, leadership and role stress on expatriate satisfaction and commitment. (Order No. 9803751, Saint

Louis University).

- Bhargavi, S. & Yaseen, A., 2016. Leadership Styles and Organizational Performance. *Strategic Management Quarterly*, 4(1), pp. 87-117.
- Bhargava R. Kotur, B. R. and Anbazhagan, S. Influence of Leadership Styles on Self Performance. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*. Volume 16, Issue 5. Ver. III (May. 2014), PP 111-119.
- Bhatti, N., Maitlo, G. M., Shaikh, N., Hashmi, M. A., & Shaikh., F. M. (2012). The impact of autocratic and democratic leadership style on job satisfaction. *International Business Research*, 5(2), 192-201.
- Boehm, S. A., Dwertmann, D. J., Bruch, H. & Shamir, B. (2015). The Missing Link? Investigating Organizational Identity Strength and Transformational Leadership Climate as Mechanisms That Connect CEO Charisma with Firm Performance. *The Leadership Quarterly*, 26(1): 156–171.
- Bodla, M. A., & Nawaz, M. (2010). Comparative Study of Full Range Leadership Model among Faculty Members in Public and Private Sector Higher Education Institutes and Universities. *International Journal of Business and Management*, 5 (4).
- Bolger, R. (2001). The influence of leadership style on teacher job satisfaction. *Educational Administrative Quarterly*, 37, 662 – 683.
- Boerner, S; Du`tschke, E.; and Wied, S. (2008). Charismatic leadership and organizational citizenship behaviour: examining the role of stressors and strain. *Human Resource Development International*. November 2008,11, 5 pp. 507-521.
- Bono J., Judge T. (2003). Self-concordance at work: Toward understanding the motivational effects of transformational leadership. *Acad. Manage. J.* 46 554–571. 10.2307/30040649.
- Bordage G. Reasons reviewers reject and accept manuscripts: The strengths and weaknesses in medical education reports. *Acad Med* 2001;76:889-96.
- Borkowski, N., Deckard, G., Weber, M., Padron, M. A., & Luongo, S. (2011). Leadership development initiatives underlie individual and system performance in a US public healthcare delivery system.

- Borzaga, C., & Tortia, E. (2006). Worker motivations, job satisfaction, and loyalty in public and nonprofit social services. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 35, 225- 248. <http://dx.doi.org/10.1177/0899764006287207>.
- Brown, B. B. (2003). Employees' organizational commitment and their perception of supervisors' relations-oriented and task-oriented leadership behaviors. (Order No. 3082584, Virginia Polytechnic Institute and State University) .
- Bruinessen, Martin van, (1990): "Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu", *Bijdragen tot de Taal, Land en Volkenkunde* 146.
- B. S. Pawar and K. K Eastman, "The nature and implications of contextual influences on transformational leadership: a conceptual examination," *Academy of Management Review*, vol. 22, pp.80–109, 1997.
- Buluc., B. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlüklerinin liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 15 (57), 5–34.
- Bull, Ronald Alan Lukens, 2004, *A Peaceful Jihad: Javanese Islamic Education and Religious Identity Construction* , ter. Abdurrahman Mas'ud, dkk. Yogyakarta: Gama Media.
- Burke, C. S., Stagl, K. C., Klein, C., Goodwin, G. F., Salas, E. & Halpin, S. M. 2006. What type of leadership behaviors are functional in teams? A meta-analysis. *The Leadership Quarterly*, 17 (3): 288-307.
- Burns, J.M. (1978). *Leadership*. New York: Harper & Row.
- Bushra, F., A. Usman and A. Naveed, 2011. Effect of Transformational Leadership on Employees Job Satisfaction and Organizational Commitment in Banking Sector of Lahore (Pakistan), *International Journal of Business and Social Science*, 2(18): 22-31.
- Busch, T., Fallan, L., & Pettersen, A. (1998). Disciplinary differences in job satisfaction self-efficacy, goal commitment and organizational commitment among faculty employees in Norwegian Colleges: An empirical assessment of indicators of performance. *Quality in Higher Education*, 4(2), 137- 157.
- Bushra, F.; Usman, A.; Naveed, A. (2011). Effect of Transformational Leadership on Employees' Job Satisfaction and Organizational Commitment in Banking Sector of Lahore (Pakistan). *International Journal of Business*

and Social Science, 2 (18), 261-267.

- Busyairi, M. "Education Unit Transformation for Maintain Its Existence in Islamic Boarding School (Multi-Case Study on Tebuireng Islamic Boarding School , Gading Islamic Boarding School Malang , and Sidogiri Islamic Boarding School Pasuruan)." *Journal of Education and Practice* 8, no. 5 (2017).
- Chan S. C., Huang X., Snape E., Lam C. K. (2013). The Janus face of paternalistic leaders: authoritarianism, benevolence, subordinates' organization-based self-esteem, and performance. *J. Organ. Behav.* 34 108–128. 10.1002/job.1797.
- Chen Z., Song M., Jia L., Wang Z. (2017). "How authoritarian leadership and renqing orientation improve tacit knowledge sharing," in *Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences* Hilton Waikolo, HI: 10.24251/HICSS.2017.543.
- Cheng B. S., Chou L. F., Wu T. Y., Huang M. P., Farh J. L. (2004). Paternalistic leadership and subordinate responses: establishing a leadership model in Chinese organizations. *Asian J. Soc. Psychol.* 7 89–117. 10.1111/j.1467- 839X.2004.00137.x [CrossRef].
- Chi, H.K., H.R. Yeh and C.H. Yu, 2009. The Effect of Transformation Leadership, Organizational Culture, Job Satisfaction on the Organizational Performance in the Non-Profit Organizations, *Journal of Organizational Behaviour*, 26: 969-977.
- Chih-Cheng Volvic Chen, Chih-Jou Chen & Ming-Ji James Lin, (2015),"The impact of customer participation: the employee's perspective", *Journal of Business & Industrial Marketing*, Vol. 30 Iss 5 pp. 486 – 497.
- Chintaman, S. A. (2014). Business research method - A review. *International Journal of Management Research and Reviews*, 4, 416-420.
- Chiu-Yueh, T. (2000). A Study on the Relationship among Organizational Commitment, Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behaviour of Nursing Personnel. Master's Thesis, Department of Human Resource Management. Retrieved on 23rd January, 2019 [Online] Available: http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD_db/ETDsearch/view_etd?URN=etd-0725101-002148.

- Choi, J. (2011). A Motivational Theory of Charismatic Leadership: Envisioning, Empathy, and Empowerment. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 13(1), 24–43.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Cohen, A., & Golan, R. (2007). Predicting absenteeism and turnover intentions by past absenteeism and work attitudes: An empirical examination of female employees in long term nursing care facilities. *Career Development International*, 12 (5), 416- 432. <http://dx.doi.org/10.1108/13620430710773745>.
- Cohen, L., Manion, L., Morrison, K., & Ebooks Corporation. (2011; 2013; 1993). *Research methods in education* (7th ed.). Abingdon, Oxon; New York: Routledge. doi:10.4324/9780203720967.
- Cole, G.A. (2005). *Organizational Behavior*. Nottingham: TJ International.
- Collective Leadership Institute, “Collective Leadership”, <http://www.collectiveleadership.de/apex/cli/collective-leadership/>, diakses tanggal 04 Mei 2015.
- Composto, P. A. (2002). Collegial leadership and teacher commitment to the school. (Order No. 3049705, St. John’s University (New York), School of Education and Human Services).
- Conger, J. A. & Kanungo, R. N. (1987). Toward a behavioural theory of charismatic leadership in organizational settings. *The Academy of Management Review*, 12(4), 637-647.
- Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1988). *Charismatic leadership: The exclusive factor in organizational effectiveness*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Conger JA, & Kanungo R.N. (1998). *Charismatic leadership in organizations*: Sage Publications , Thousand Oaks, CA.
- Conger, J. A, (1989a). The charismatic leader: Behind the mystique of exceptional leadership . San Francisco: Jossey-Bass. Conger, J. A, (1989b). *Leadership: The art of empowering others*. *Academy of Management Executive*, 3 (1), 17- 24.
- Conger, J. A, (1990). The dark side of leadership. *Organizational Dynamics*, 19 (2), 44-55. Conger, J. A. (2011). Charismatic leadership. In A. Bryman, D.

- Collinson, K. Grint, B. Jackson, & M. Uhl-Bien (Eds.). *The SAGE Handbook of Leadership* (pp. 86-102). London: Sage.
- Conger, J. A. (2012). Charismatic leadership. In M. G. Rumsey (Ed.). *The Oxford handbook of leadership* [Oxford Handbooks Online]. Do: 10.1093/oxfordhb/9780195398793.013.0022.
- Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1987). Toward a behavioral theory of charismatic leadership in organizational settings. *The Academy of Management Review*, 12 (4) 637-647. Retrieved May 2, 2006, from JSTOR database.
- Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. *The Academy of Management Review*, 13 (3) 471-482. Retrieved May 10, 2006, from JSTOR database.
- Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1994). Charismatic leadership in organizations: Perceived behavioral attributes and their measurement. *Journal of Organizational Behavior*, 15 (5) 439-452. Retrieved November 20, 2006, from JSTOR database.
- Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1998). *Charismatic leadership in organizations*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Conger, J. A., Kanungo, R. N., & Menon, S. T. (2000). Charismatic leadership and followers effects. *Journal of Organizational Behavior*, 21 (7), 745-767. Retrieved July 10, 2007, from JSTOR database.
- Conger, J. A., Kanungo, R. N., Menon, S. T., & Mathur, P. (1997). Measuring charisma: Dimensionality and validity of the Conger-Kanungo scale of charismatic leadership. *Revue Canadienne des Sciences de l'Administration*, 14 (3) 290-302. Retrieved May 6, 2008, from Business Source Complete database.
- Dai, Y., Dai, Y., Chen, K., & Wu, H. (2013). Transformational vs transactional leadership: which is better? *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 25(5), 760-778.
- Damiano Fiorillo Nunzia Nappo, (2014), "Job satisfaction in Italy: individual characteristics and social relations", *International Journal of Social Economics*, Vol. 41 Iss 8 pp. 683 – 704.
- Danim, S. (2003). *Kepemimpinan Transformasional*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Darmawan, A. and Putri, M.A. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Komitmen Organisasi. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* Volume 10

(1), April 2017. 1-8.

Daulay, Haidar Putra, 2001, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*,

Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Dawson C (2002) *Research made easy: Lessons for research students*. Chicago, USA.

Davis, D. 2005. *Business Research for Decision Making*, Australia, Thomson South-

Western.

De Cremer, D., & Van Knippenberg, D. (2002). How do leaders promote cooperation? The effects of charisma and procedural fairness. *Journal of Applied Psychology*, 87, 858-866.

DeMato, D. S., & Curcio, C. C. (2004). Job satisfaction of elementary school counselors: A new look. *Professional School Counseling*, 236-245.

Darshan, G. (2011), 'Effects of transformational leadership on subordinate job satisfaction in leather companies in Ethiopia,' *International Journal of Business Management & Economic Research*, 2 (5), 284-296.

DeGroot,T., Kiker, D.S., Cross,T.C. (2000) ' A Meta-Analysis to Review Organizational Outcomes Related to Charismatic Leadership', *Canadian Journal of Administrative Sciences* 17(4): 356-371.

De Hoogh, H. B., Greer, L. L. and Hartog, D. N. D. (2015). Diabolical dictators or capable commanders? An investigation of the differential effects of autocratic leadership on team performance. *The Leadership Quarterly*. 26 (05).

Dev Raj Adhikari Dhruba & Kumar Gautam, (2010), "Labor legislations for improving quality of work life in Nepal", *International Journal of Law and Management*, Vol. 52 Iss 1 pp. 40 – 53.

Dev Raj Adhikari, Katsuhiko Hirasawa, Yutaka Takakubo, & Dhruba Lal Pandey, (2011), "Decent work and work life quality in Nepal: an observation", *Employee Relations*, Vol. 34 Iss 1 pp. 61 – 79.

Devi, D., & Adnyani, I. (2015). Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan Terhadap

- Komitmen Organisasional Dan Organizational Citizenship Behaviour (Ocb) Pada Pt. Maharani Prema Sakti Denpasar. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 4(12), 4105–4134. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/14799> [Google Scholar].
- Dewi, N. L. P. A., & Suwandana, I. G. M. (2016). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Organizational Citizenship Behavior Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 5643-5670. <https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11749> [Google Scholar].
- Djamas, N. (2008). *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1980. "The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java" Unpublished PhD Thesis, The Australian National University.
- Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren. Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenal Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Dick, G. (2011). The influence of managerial and job variables on organizational commitment in the police. *Public Administration*, 89(2), 557-576.
- Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren. 2005. *Dinamika Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren.
- Dou, D., Devos, G., & Valcke, M. (2017). The relationships between school autonomy gap, principal leadership, teachers' job satisfaction and organizational commitment. *Educational Management Administration and Leadership*, 45(6), 959–977. <https://doi.org/10.1177/1741143216653975>.
- Dubrin, A.J. & Danglish, C.(2003). *Leadership: An Australian Focus*. Australia: John Wiley & Sons Australia.
- Dubrin, A.J. (2004). *Leadership: Research Finding, Practice and Skills*. 4th Edn USA: Houghton Millin Company Dvir, T, Eden, D., Avolio, B. J., & Shamir, B. (2002). Impact of transformational leadership on follower development and performance: A field experiment. *Academy of Management Journal*, 45, 735- 744.
- Dung, V.V. et. all. (2021). The Influence of Transformational Leadership on

- the Job Satisfaction of Civil Servants at the Nha Trang Tax Department. *Journal of Hunan University (Natural Sciences)*. Vol. 48. No. 5. May 2021. 164-172.
- Dvir, T.M., Eden, D., Avolio, B. J. & Shamir, B. (2002). Impact of transformational leadership on follower development and performance: a field experiment. *Academy of Management Journal*, 45(5), 735-744.
- Eden, D.A. (1998). *Introduction to Education Administration In Nigeria*. Ibadan: pectrum Books.
- Effendi, J., (2008). *A Renewal without Breaking Tradition: The Emergence of A New Discourse in Indonesia Nahdhatul Ulama during the Abdurrahman Wahid Era*. Yogyakarta. Interfidei.
- Effendi, Nur. *Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren: Konstruksi Teoritik dan Praktik Pengelolaan Perubahan Sebagai Upaya Pewarisan Tradisi dan Menatap Tantangan Masa Depan*. Yogyakarta: Teras, 2014.
- Effelsberg, D., Solga, M., & Gurt, J. (2014). Getting followers to transcend their self- interest for the benefit of their company: Testing a core assumption of transformational leadership theory. *Journal of Business and Psychology*, 29(1), 131-143. doi: 10.1007/s10869 -013-9305-x.
- Ejimofor, F (2007) *Principal Transformational leadership skills and their teacher job satisfaction in Nigeria: Unpublished Doctoral Thesis*, Cleveland State University, Ohio.
- Eliyana, A., Ma'arif, S., & Muzakki. (2019). Job satisfaction and organizational commitment effect in the transformational leadership towards employee performance. *European Research on Management and Business Economics*, 25(3), 144–150. <https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2019.05.001>.
- Engelbrecht, A.S. (2002). The effect of organisational leadership on value congruence and effectiveness: An integrated model. In S.M. Brink. (Ed.). *South African Journal of Economic and Management Sciences*. Pretoria. University of Pretoria. 5 (3), 589-608.
- Enoch, A.O. (1999). *A handbook of Educational Foundations*. Jos: Challenge Press.
- Eliophotou-Menon, M., & Ioannouz, A. (2016). The link between

transformational leadership and teachers' job satisfaction, commitment, motivation to learn, and trust in the leader. *Academy of Educational Leadership Journal*, 20(3), 1-11.

Explorable Psychology Experiments. Non-Probability Sampling, [17 May, 2009]. Available from: <http://www.explorable.com/non-probability-sampling>. [Last accessed on 2014 Sep 25].

Falah, S. (2021). *Pesantren dan Masa Depan*. Santri Nulis Publishing.

Falaha, Saiful; Alifahb, Abdul Rizal, Syamsul. 2021. Enhancing Organizational Commitment through Islamic Organizational Culture and Islamic Work Ethic in Modern Pesantren: The Role of Kyai's Transformational Leadership. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* Vol.12 No.6 (2021), 4994-5008.

Farh J. L., Cheng B. S. (2000). "A cultural analysis of paternalistic leadership in Chinese organizations," in *Management and Organizations in the Chinese Context* eds Li J. T., Tsui A. S., Weldon E., editors. (London: Macmillan;) 84–127.

Farh J. L., Liang J., Chou L. F., Cheng B. S. (2008). "Paternalistic leadership in Chinese organizations: research progress and future research directions," in *Business Leadership in China: Philosophies, Theories, and Practices* eds Chen C. C., LeeY. T., editors. (Cambridge: Cambridge University Press;) 171–205.

Farkas, A.J., and Tetrick, L.E. (1989), 'A Three Wave Longitudinal Analysis of the Causal Ordering of Satisfaction and Commitment on Turn over Decisions,' *Journal of Applied Psychology*. 74, 855-868.

Feinstein, Andrew-Hale, (2008), *A Study of Relationship Between Job Satisfaction and Organizational Commitment Among Restaurant Employees*, Department of Food and Beverage, Management William F. Harrah College of Hotel Administration.

Feizi, M., Ebrahimi, E., & Beheshti, N. (2014). Investigating the relationship between transformational leadership and organizational commitment of the high school teachers in gergy. *International Journal of Organizational Leadership*, 3(1), 17- 30.

- Felfe, J. & Heinritz, K. (2010). The impact of consensus and agreement of leadership perceptions on commitment, organizational citizenship behaviour, and customer satisfaction. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 19(3), 279–303. doi:10.1080/13594320802708070.
- Fiedler, E (1967), *Style or Circumstance, The Leadership*. Illinois: Moore Publishing Company, Inc.
- Finegan, J.E. (2000). The impact of person and organizational values on organizational commitment. *Journal of Occupational & Organizational Psychology*, 73(2), 149- 69.
- Fitriah. (2019) Kepuasan kerja karyawan Pesantren Terpadu Darul Qur'an Mulia dalam perspektif Al-Qur'an. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana Institu PTIQ Jakarta.
- Freund, A. (2005). Commitment and job satisfaction as predictors turnover intentions among welfare workers. *Administration in Social Work*, 29(2), 5-21.
- Fu, W., & Deshpande, S. P. (2014). The Impact of Caring Climate, Job Satisfaction, and Organizational Commitment on Job Performance of Employees in a China's Insurance Company. *Journal of Business Ethics*, 124(2), 339–349. <https://doi.org/10.1007/s10551013-1876-y>.
- Gakovic, A. (2002). Social exchange, transformational leadership, and employee behavior: The role of organizational identification and career commitment. (Order No. 3064097, University of Houston).
- Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian. (2009). *Educational Research: Competencies for analysis and application*-9th. Ed. New Jersey: Merrill -Pearson Education.
- Ghadi, M. Y., Fernando, M., & Caputi, P. (2013). Transformational leadership and work engagement: The mediating effect of meaning in work. *Leadership & Organization Development Journal*, 34(6), 532-550. doi: 10.1108/LODJ-10-2011- 0110.
- Glaser J. E., *Business Book Review* 23(29) (2012) 2-10.
- Gill, A., A.B. Flaschner, C. Shah and I. Bhutani, 2010. The Relations of Transformational Leadership and Empowerment with Employee Job Satisfaction: A Study among Indian Restaurant Employee, Business and

Economics Journal, 8: 13-18.

Gill, R. (2014). Spirituality at work and the leadership challenge. *Journal for the Study of Spirituality*, 4(2), 136 – 148.

Gregory, A. (2011). Transformational leadership, job satisfaction, organizational commitment, and non-supervisory nurses' intention to leave. (Order No. 3458589, Lynn University).

Griffith-Cooper, B., & King, K. (2007), —The partnership between project management and organizational change: integrating change management with change leadership||, *Performance Improvement* ,46 (1), 14–20.

Gong Y., Wang M., Huang J. C., Cheung S. Y. (2017). Toward a goal orientation-based feedback-seeking typology: implications for employee performance outcomes. *J. Manage.* 4 1234–1260. 10.1177/0149206314551797.

Hadari, Amir dan El-Saha, M. Ishom, 2004, *Peningkatan Mutu Terhadap Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Jakarta: Diva Pustaka.

Haedari, Amin. 2005. *Masa Depan Pesantren*. Jakarta: IRD Press.

Haedari, Amin. 2004. *Panorama Pesantren Dalam Cakrawala Modern* (Jakarta: Diva Pustaka.

Hasbullah, 1995, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta : Rajawali Press.

Heneman RL, Gresham MT (1999) the effects of changes in the nature of work on compensation. Ohio state University, USA.

Hersey. P, Blanchard. K, Johnson. W., 1996. *Management of organizational behavior: utilizing human resources* (7th). USA: Prentice-hall international, inc.

Hetland, H. and Sandal, G.M. (2003). Transformational leadership in Norway: Outcomes and personality correlates. *European Journal of work and Organizational Psychology*. 12(2) 140-170.

Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (1959). *The motivation to work*. New York: Wiley.

Hidayatullah. 2010. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kharismatic dan Non Kharismatik Terhadap Kinerja ditinjau dari Motivasi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Thesis. Progam Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia.

Perpustakaan uns ad.id. Akses 20 March 2022.

- Himam Pathul. (2014). Kinerja Karyawan Berdasarkan Keterbukaan Terhadap Pengalaman, Organizational dan Budaya Organisasi, Jurnal Psikologi, Fakultas Psikologi : Universitas Gadjra Mada.
- Hirschfield, R.R. (2000). Validity studies: Does revising the intrinsic and extrinsic subscales of the Minnesota Satisfaction Questionnaire Short Form make a difference? *Educational Psychological Measurement*, Vol.60, pp.255-270.
- Hiton, B.; Rahmat, S.T.Y, Rhian, I; and Semerdanta, P. The Impact of Cahriasmatic Leadership on Tiurnover Intentions and Oeganizational citizenship Behavirs toqard job satisfaction.. *RJOAS*, 7(91), July 2019, 302-309.
- Holcomb-McCoy, C., & Addison-Bradley, C. (2005). African American counselor educators' job satisfaction and perceptions of departmental racial climate. *Counselor Education and Supervision*, 45(1), 2-15.
- Houghton J. D., Yoho S. K., *Journal of Leadership and Organizational Studies* 11(4) (2012) 65.
- House, R.J. dan Mitchell, T.R. 1974. Path-Goal Theory of Leadership. *Journal of Contemporary Business: Autumn*.
- House, R. J. (1976), —A theory of charismatic leadership||, In J. G. Hunt & L. L. Larson (Eds.), *Leadership: The Cutting Edge* (pp. 189–204). Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.
- Hsieh, W. (2004). Organizational commitment in Taiwan and its relationship to transformational leadership. (Order No. 3158668, Nova Southeastern University).
- Huang, M., Cheng, B., Chou, L. (2005) ' Fitting in Organizational Values: The Mediating role of Person -Organization Fit between CEO Charismatic Leadership and Employee Outcomes', *International Journal of Manpower* 26(1): 35-49.
- Huang, X., Shi, K., Zhang, Z., & Cheung, Y. L. (2006). The impact of participative leadership behavior on psychological empowerment and organizational commitment in Chinese stateowned enterprises: the moderating role of

- organizational tenure. *Asia Pacific Journal of Management*, 23(3), 345–367. doi:10.1007/s10490-006-9006-3.
- Huang, T. M. (2011). The relationship between headmasters' leadership behaviour and teachers commitment in primary schools in the district of Sarikei, Sarawak. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 29, 1725–1732. doi:10.1016/j.sbspro.2011.11.418.
- Huang X., Xu E., Chiu W., Lam C., Farh J. L. (2015). When authoritarian leaders outperform transformational leaders: firm performance in a harsh economic environment. *Acad. Manage. Discov.* 1 180–200. 10.5465/amd.2014.0132.
- Hugnes, R. L., Gonnett, R. C., & Curphy, G. J. (2006). *Leadership, Enhancing the Lessons of Experience* (5th ed.). United States: McGraw Hill.
- Hukapati, C. A. (2009). Transformational leadership and teacher job satisfaction: a comparative study of private and public Tertiari Institution in Ghana. Master Degree in Educational Science and Technology Educational Management, Evaluation and Assessment Faculty of Behavioural Science University of Twente. Master Disertation.
- Idris Jauhari, Muhammad. 2002. Sistem Pendidikan Pesantren Mungkinkah Menjadi Sistem Pendidikan Nasional Alternatif?, Prenduan: Mutiara.
- Igbaekemen, G. O. & Odivwri, J. E., 2015. Impact of leadership style on organization performance: A critical literature review. *Arabian Journal of Business and Management Review*, 5(5), pp. 1-7.
- Imron, Arifin, 1993. *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pesantren tebu Ireng*, Malang: Kalimashada, Press.
- inandi, Y., Uzun, A., Yeşil, H. 2016. The relationship between the principals' leadership styles and their efficacy in change management. *J. Educ. Sci. Res.* 6, 1 (Apr. 2016), 191-209. DOI= 10.12973/jesr.2016.61.10.
- Iqbal, N., Anwar, S. & Haider, N., (2015). Effect of Leadership Style on Employee Performance. *Arabian Journal of Business and Management Review*, 5: 146.
- Israel GD. Determining Sample Size, [April 2009]. Available from: <http://www.edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/PD/PD00600.pdf>. [Last accessed on 2014 Sep 25].
- Ittner C, Larcker (2002) Determinants of performance measure choice in work

- incentive plans. Sunrise printery, Chicago, USA.
- Janse, B. (2018). Authoritarian Leadership. Retrieved from Tools Hero: <https://www.toolshero.com/leadership/authoritarian-leadership/> accessed September 20, 2018).
- Jaskyte, K. (2004). Transformational leadership, organizational culture, and innovativeness in nonprofit organizations. *Nonprofit Management and Leadership*, 15(2), 153–168. <https://doi.org/10.1002/nml.59>.
- Jay A. Conger, R. N. (2000, Nov). Charismatic Leadership and Follower Effects. *Journal of Organizational Behavior*, 21(7), 747-767.
- Jaya, Rico Saktiawan Jang. the influence of transformational leadership on organizational commitment and job satisfaction with procedural justice as mediating variable. *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Volume 3, Nomor 1, Juni 2018: 1-14.
- Jex, S. M., & Britt, T. W. (2014), *Organizational Psychology: A Scientist-Practitioner Approach*, John Wiley & Sons.
- Joo, B., & Lim, T. (2013). Transformational leadership and career satisfaction: The mediating role of psychological empowerment. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 20(3), 316-326. doi: 10.1177/1548051813484359.
- Judge, TA., Woolf, E. F., Hurst, C, & Livingston, B. (2006). Charismatic and transformational leadership. A review and agenda for future research. *Zeitschrift fUr Arbeits- und Organisationspsychologie*, 50(4), 203-214.
- Judge, T. A., & Piccolo, R. F. (2004), —Transformational and transactional leadership: a meta-analytic test of their relative validity||, *Journal of applied psychology*, 89(5), 755.
- Laohavichien, T., Fredendall, L., and Cantrell, R., 2009. “The effects of transformational and transactional leadership on quality improvement”, *The Quality Management Journal*, Vol. 16, No. 2, pp. 7-24.
- Lubis, S. A. (2007). *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Lyons, H. Z., Brenner, B. R., & Fassinger, R. E. (2005). A multicultural test of the theory of work adjustment: Investigating the role of heterosexism and fit perceptions in the job satisfaction of lesbian, gay, and bisexual employees. *Journal of Counseling Psychology*, 52(4), 537.

- Kahtani, A. A. (2013), —Leader Charisma, Employee Organizational Commitment, and Organizational Change: A Proposed Theoretical Framework||, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(5), 377-399.
- Kakavogianni, D. (2009), —Charismatic Leadership and its emergence under crisis conditions: A case study from the airline industry||, *The York Management School Working*, Number: 1743 – 4041, pp. 45- 31.
- Karim, A. Et. all. 2020. A Charismatic Relationship: How a Kyai’s Charismatic Leadership and Society’s Compliance are Constructed? *Journal of Indonesian Economy and Business*. Volume 35, Number 2, 2020, 129 – 143.
- Karaca, D., Özgül, B., & Zehir, C. (2021). The relationships among charismatic leadership, job satisfaction, and entrepreneurial orientation: An empirical study in the R&D department. *Business & Management Studies: An International Journal*, 9(4), 1521–1537.
- Kartini, Kartono. 2008. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Kim, S. (2002). Participative Management and job satisfaction: Lessons for management leadership. *Public Administration Review* 62, no. 5: 231-41.
- Kasim Randeree & Abdul Ghaffar Chaudhry, (2012),”Leadership – style, satisfaction and commitment”, *Engineering, Construction and Architectural Management*, Vol. 19 Iss 1 pp. 61 – 85.
- Kerfoot K., *Medsurg Nursing* 17(2) (2013) 133-135.
- Keskes et al., 2018. Transformational leadership and organizational commitment: Mediating role of leader-member exchange.
- Khasawneh, S., Omari, A., & Abu-Tineh, A. M. (2012). The Relationship between Transformational Leadership and Organizational Commitment: The Case for Vocational Teachers in Jordan. *Educational Management Administration and Leadership*, 40(4), 494–508. <https://doi.org/10.1177/1741143212438217>.
- Kim, W.G., Leong, J.K. and Lee, Y. (2005), “Effect of service orientation on job satisfaction, organizational commitment and intention of leaving in a

- casual dining chain restaurant”,*Hospitality Management*, Vol. 24, pp. 171-93.
- Kinicki, A., & Williams, B. K. (2010). *Management: A practical introduction* (5e ed.). McGraw-Hill Companies, Inc.
- Kinicki, D. & Kreitner, J. (2008). *Organizational Behavior*. (3rd ed). McGraw – Hill,
- Krejcie, R.V and Morgan, D. (1970). *Educational dan Psychological Measurement*. 1970, 30, 607-610.
- Khozin, 2006, *Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia: Rekonstruksi Sejarah untuk Aksi*, Malang: UMM Press.
- Krishnaveni, R. & Ramkumar, N. (2008). Revalidation process for established instruments: A case of Meyer and Allen’s organizational commitment scale. *ICFAI Journal of Organizational Behavior*, 7, 2, 7-17.
- Koh, H. C., & Boo, E. H. Y. (2004). Organisational ethics and Employee Satisfaction and Commitment. *Management Decision*, 42 (5), 677–693. <https://doi.org/10.1108/00251740410538514>.
- Koh, W. L., Steers, R. M. & Terborg, J. R. (1995). The effects of transformational leadership on teacher attitudes and student performance in Singapore. *Journal of Organizational Behavior*, 16, 319 – 333.
- Kouzes J. M., Posner B. Z., *Journal of Management Inquiry* 14(4) (2013) 357-365.
- Kotter, J. & Cohen, D. S. (2010). *The heart of change : Real-life stories of how people change their organizations*. Boston MA: Harvard Business School Publishing
- Kvale, S. (1996). *Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing*. London: Sage Publications, In
- Kyoo, B., & Jeung, J. H. J. Y. C.-W. (2006). The effects of core self-evaluations and transformational leadership on organizational commitment. *Leadership & Organization Development Journal*, 33(6), 564– 582.
- Latif, *Muhaemin*. (2016). The Impact of Charismatic Leadership on The Organization. *Jurnal of Islam and Science*. Volume 03 Number 02,

December 2016, 204-2017

- Lamm, E., & Gordon, J. R. (2010), —Empowerment, predisposition to resist change, and support for organizational change||, *Journal of Leadership & Organizational Studies*.
- Laohavichien, T., Fredendall, L., Cantrell, R. (2009), “The effects of transformational and transactional leadership on quality improvement”, *The Quality Management Journal*, Vol. 16, No. 2, pp. 7-24.
- Leedy, P., & Ormond, J. E. (2010). *Practical research: Planning and design* (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Linda & Michael, 2014
- Lindblom, A., Kajalo, S., & Mitronen, L. (2016). Does a Retailer’s Charisma Matter? A Study of Frontline Employee Perceptions of Charisma in the Retail Setting. *Journal of Services Marketing*, 3(June 2015), 266–276
- Lo, M. C., Ramayah, T., & Min, H. (2009). Leadership styles and organizational commitment: A test on Malaysia manufacturing industry. *African Journal of Marketing Management*, 1(6), 133-139.
- Lo, M. C., Ramayah, T., Min, H. & Songan, P. (2010). Relationship between Leadership Styles and Organizational Commitment in Malaysia: Role of Leader-Member Exchange. *Asia Pacific Business Review*, 16(1-2), 79-104.
- Lo, M.-C., Ramayah, T., & Run, E. C. D. (2010). Does transformational leadership style foster commitment to change? The case of higher education in Malaysia. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 2(2), 5384–5388. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.877.
- Long, C. S., Yusof, W. M., Kowang, T. O. & Heng, L. H. (2014). The Impact of Transformational Leadership Style on Job Satisfaction. *World Applied Science Journal*
- Lubatkin, M. H., Simsek, Z., Ling, Y., & Veiga, J. F. (2006), —Ambidexterity and performance in small-to medium-sized firms: The pivotal role of top management team behavioral integration||, *Journal of management*, 32(5), 646-672.
- Luftman, J. N. (2004). *Managing the Information Technology Resource: Leadership in the Information Age*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

- Lukens-Bull, R, A., (2005). *A Peaceful jihad: negotiating identity and modernity in Muslim Java*. New York: Palgrave Macmillan.
- Lukens-Bull, R, A., (2008). The Tradition of Pluralism, Accomodation, and Anti-Radicalism in the Pesantren Community. *Journal of Indonesian Islam*. 2 (1). 1-15.
- Lukens-Bull, R., A. (2001). Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia. *Anthropology and Education Quarterly*, 32 (3), 350-372.
- Lussier, R.N., Achua, C.F.(2004). *Leadership: Theory, Application, Skill Development*. Eagan, Minnesota: Thompson, South Western
- Luthans, F. (2002). *Organizational Behavior*. Boston: McGraw Hill.
- M. Armstrong, "The Art of HRD. Strategic Human Resource Management A Guide To Action," Kogan Page Limited London, 2003.
- Mahfudz, Sahal, 1994, *Fikih Sosial*, Jakarta: LKiS.
- Mahmud, AAn Hasanah. Transformational Leadership in Pesantren on as Sa'idah, Al Matuq, and Sunanul Huda Boarding School. *Jurnal Pendidikan Islam :: Volume 7, Nomor 2, December 2018/1440*. 303-316
- Mahrum, Mohammad; Hajar, Ismu; and Yusnita, Nancy. (2021). The Effect Transformational Leadership And Compensantion On Performance. (Empirical Study of Teachers at Mafazah Modern Boarding School) *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*. Volume 05, Number 02, July 2021, Page 99 – 103
- Malhotra, Neeru and Mukherjee, Avinandan (2004), The Relative Influence of Organisational Commitment and Job Satisfaction On Service Quality of Customer Contact Employees in Banking Call Centres, *Journal of Services Marketing*, Vol.18, Number 3, 2004, pp.162-174.
- Malik, A. 2008. *Inovasi Kurikulum Berbasis Lokal di Ponpdok Pesantren*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan
- Maloş, R. (2012). Leadership styles. *Annals of EftimieMurgu University Resita, Fascicle II, Economic Studies*. 421-426
- Manheim, B., Baruch, Y., & Tal, J. (1997). Alternative models for antecedents and outcomes of work centrality and job satisfaction of high-tech personnel. *Human Relations*, 50(2), 1537-1562.

- Mangkunegara, A. A. A. P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan Bandung*: Remaja Rosdakarya.
- Mashud, Sulthon dan Khusnurdilo. 2003. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Mardiyah. Keemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi. Malang: Aditya Media, 2015.
- Marmaya, N. H., Hitman, M., Torsiman, N. N. & Balakrishnan, B. (2011). Employee's perception of Malaysian managers' leadership styles and organizational commitment. *African Journal of Business Management*, 5(5), 1584-1588
- Martinez, Lucinda G., "Charismatic Leadership Perceptions from K-12 Administrators: Phenomena of Follower and Leader Interdependency" (2017). University of New Orleans Theses and Dissertations . 2424. <https://scholarworks.uno.edu/td/2424>
- Masmarulan, R.; Nurfatwa Andriani Yasin, N.a; Kurniawaty. (2021). The Influence of Leadership Style on Employee Morale at Cooperative Pt. Pelayaran Tonasa Lines in Pangkep Regency. *Economos :Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 4, Nomor 3, Desember 2021
- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: Seri Inis xx.
- Mastuhu, Gaya dan Suksesi kepemimpinan Pesantren, (Jakarta: Jurnal Ulumul Qur'an, Vol. III, 1994)
- Mastuhu, 1989, *Dinamika Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS. Mastuhu. 2007. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Lentera Hati.
- May-Chiun, L., Ramayah, T., & Hii, W. M. (2009). Leadership Styles and Organizational Commitment: A Test on Malaysia Manufacturing Industry. *African journal of marketing management* . 1(6), 133-139.
- Masyhud, S. (2003). *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Masyhud, M. Shulton dan Khusnurdilo, Moh., 2003, *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka.
- Mathieu, J.E., and Hamel, K. (1989), 'A Causal Model of the Antecedents of Organizational Commitment among Professionals and Nonprofessionals,'

- Journal of Vocational Behavior, 34, 299-317.
- McDermott, Aoife and Kidney, Rachel and Flood, Patrick (2011), Understanding Leader Development : Learning From Leaders, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 32 No. 4, 2011, pp. 358-378.
- McLeod, S. (2008). Simply Psychology. [Online] Available at: <https://www.simplypsychology.org/likert-scale.html> (accessed September 20, 2018).
- Mehar, M., Sarwar, B., Rauf, S., & Asif, M. (2015). Transformational leadership style and organization commitment. *Paradigms*, 9(1), 88-101.
- Methebula, M. (2004). Modelling The Relationship between organizational commitmen, leadership style, human resourch management practices and organizational commitmen . Ph.D. Thesis, University Pretoria
- Metwally, A. H., El-bishbishy, N., & Nawar, Y. S. (2014). The impact of transformational leadership style on employee satisfaction. *The Business & Management Review*
- Michael, A. (2010). Leadership Style and Organizational Impact.<http://www.ala-apa.org>
- Miles M.B., dan Huberman, A.M, 1994, *Qualitatif Data Analisis*, California: Sage Publication Inc,
- Milgron, P; Holmstrom B (1991), Incentive contracts, asset ownership and job design.
Prentice Hall printer, London
- Mine, S. (2008). Leadership behaviors of school principals in relation to teacher job satisfaction in north Cyprus. A Paper presented at the World Conference on Educational Sciences 2009. Retrieved o n June 17, 2009 from <http://www.sciencedirect.com>
- Mochtar, Tradisi Kitab Kuning: Sebuah Observasi Umum. In M. Wahid (Ed.), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren Bandung*: Pustaka Hidayah, 1999.
- Mohammad, M. S. 2012. Transformational Leadership and Employees' Job Satisfaction and Commitment: A Structural Equation Investigation. *Journal of American Science*, 8 (7), 11-19.
- Morton, K. L., Barling, J., Rhodes, R. E., Mâsse, L. C., Zumbo, B. D., &

- Beauchamp, M. (2010). Extending transformational leadership theory to parenting and adolescent health behaviours: An integrative and theoretical review. *Health Psychology Review*, 4(2), 128-157. doi: 10.1080/17437191003717489
- M. Walid. 2010. *Napak Tilas Kepemimpinan KH. Ach. Muzakky Syah*, Yogyakarta: Absolute Media.
- Muayyad, Hendra, 2011, "*Kepemimpinan Kolektif Kolegial di Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang Jawa Timur*", Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Mukhtar et al.; Teacher's Job Satisfaction: An Analysis of School's Principal Leadership and School Culture at the State Islamic Senior High School in Jambi Province. *Saudi J. Humanities Soc. Sci.*; Vol-2, Iss-5(May, 2017), :404-415
- Muhajir, Noeng, 1987, *Kepemimpinan Adopsi untuk Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhaemin. The Mode of Leadership in a Traditional Islamic Boarding School JICSA Volume 03- Number 01, June 2014. 62-104
- Mu'tafi, Ali. "Rekonstruksi Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Tradisional Di Indonesia (Telaah Kurikulum Pondok Pesantren, Menuju Arah Baru Pendidikan Islam Di Era Globalisasi)." *Jurnal Al-Qalam*, no. 13 (n.d.): 152.
- Mulyadi, Mus. "Charismatic Leadership In Bengkulu City Harsallakum Al-Qur'an Islamic Boarding School." *Journal of Education Research in Administration and Management* 1, no. 2 (2017).
- Muthohar, A, (2007), *Ideologi Pendidikan Pesantren: Pesantren di Tengah Arus Ideologi- Ideologi Pendidikan*. Semarang. Pustaka Rizki Putra.
- Nadarasa, T., & Thuarisingam, R. (2014). The influence of job satisfaction ± study of secondary school in Jaffna district. *International Journal of Scientific and Research Publications*. 4(1), 1-7.
- Nanjundeswaraswamy TS (2013), "Quality Of Worklife Of Employees In Private Technical Institutions", *International Journal for Quality Research* 7(3) pp. 3-14.

- Nemanich, L. and Keller, R. (2007). Transformational leadership in acquisition; A field study of employees, *The Leadership Quarterly* 18. 49-68
- Neubert, M. J., & Halbesleben, K. (2014). Called to Commitment: An Examination of Relationships Between Spiritual Calling, Job Satisfaction, and Organizational Commitment. *Journal of Business Ethics*, 132(4), 859–872. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2336-z>
- Newstrom, J. W. (2011). *Organizational behavior : Human behavior : At work*. McGraw-Hall Companies, Inc. [Google Scholar]
- Nguni et al., 2016. S. Nguni, P. Slegers, E. Denessen. Transformational and transactional leadership effects on teachers' job satisfaction, organizational commitment, and organizational citizenship behavior in primary schools: The Tanzanian case. *School Effectiveness and School Improvement*, 17 (2) (2016), pp. 145-177
- Nielsen, K., J. Yarker, R. Randall and F. Munir, 2009. The Mediating Effects of Team and Self-Efficacy on the Relationship between Transformational Leadership and Job Satisfaction and Psychological Well-Being in Healthcare Professionals: A CrossSectional Questionnaire Survey, *International Journal of Nursing Studies*, 4: 1236-1244.
- Nordin, N. (2011). The influence of emotional intelligence, leadership behaviour and organizational commitment on organizational readiness for change in higher learning institution. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 29, 129–138. doi:10.1016/j.sbspro.2011.11.217
- Normianti, H., Aslamiah, & Suhaimi. (2019). Relationship of Transformational Leaders of Principal, Teacher Motivation, Teacher Organization Commitments With Performance of Primary School Teachers in Labuan Amas Selatan, Indonesia. *European Journal of Education Studies*, 2, 123–141. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2583734>
- Noor, Mahpudin. 2006. *Potret Dunia Pesantren*. Bandung: Humaniora
- Northouse, P. G., (2004). *Leadership: theory and practice*. Thousand oaks, ca: sage. Northouse, P.G., 2007, *Leadership theory and practice*, 4th edition, Sage, California

- Northouse, (2001). *Leadership: Theory and practice*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Northouse, P. G. (2009). *Leadership, Theory and Practice* (5th ed.). United States of America: Sage. Powell, G. N., Butterfield, D. A., & Bartol, K. M. (2008). *Leader evaluations: A new female advantage?*
- Northouse, P. G. (2010). *Leadership: Theory and practice* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Northouse, P. G. (2011). *Introduction to leadership: Concept and practice*. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
- Nurhadi Prabowo, 2016. *Model Kepemimpinan di Pondok Pesantren Al-Baqiyatush Shalihah Kuala Tungkal Jambi*. Tesis Program Studi Pendidikan Islam Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga. Tesis, Tidak Diterbitkan
- Nwankwo, J. (2001). *Educational Administration. Theory and Practice*, Nigeria: Vikas.
- Obiwuru, T. C., Okwu, A. T., Akpa, V. O., & Nwankwere, I. A. (2011). Effects of Leadership Style on Organization Performance: A Survey of Selected Small Scale Enterprises in Ikosi-Ketu Council Development Area of Lagos State, Nigeria. *Australian Journal of Business and Management Research*, 1, 100-111.
- Omar, A., 2011. Transformational Leadership and Job Satisfaction: The Moderating Effect of Organizational Trust, *LIBERABIT: Lima, Peru*, 17(2): 129-137.
- Omar, W. A. W., & Hussin, F. (2013). Transformational Leadership Style and Job Satisfaction Relationship: A Study of Structural Equation Modeling (SEM), *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*
- Ojokuku, R. et.al 2012 Patton, 2000, *Qualitative Evaluation Methods*, Beverly Hill : SAGE Publicatio, Inc
- O'Leary, Z. (2014). *The essential guide to doing your research project* (2nd ed.). London: SAGE.
- Osuala, E. C. (2007). *Introduction to research methodology* (3rd ed.). Onitsha: African – First Publishers Ltd.
- Ong, S.J.D. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Otokratis terhadap Kepuasan Kerja

- Karyawan di CV Sumber Teknik Semarang. AGORA Vol 6. No : 2, 2018. 1-4
- Otieno, B.N. and Njoroge J.G. (2019). EFFECTS OF LEADERSHIP STYLES ON EMPLOYEE PERFORMANCE: CASE OF TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA. International Journal of Education and Research. Vol. 7 No. 6 June 2019. Pp. 115-132
- Özgül, B. , Karaca, D. & Zehir, C. (2022). Testing Job Satisfaction as a Mediator Between Managers' Charismatic Leadership and Followers' Affective Organizational Commitment. Ege Academic Review , 2022 (1) , 1-15 . DOI: 10.21121/eab.1059819
- Park, T., & Pierce, B. (2020). Impacts of transformational leadership on turnover intention of child welfare workers. Children and Youth Services Review, 108 (November 2019), 104624. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104624> Management, 17(2), 144–159
- Parry, K., & Proctor-Thompson, S. (2003). Leadership, culture and performance: The case of the New Zealand public sector. Journal of Change Management, 3(4), 376-391.
- Pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Frina Lestari Nusantara. J-POLITRI. Jurnal Manajemen Keuangan dan Perbankan. V3 No.3 Juli 2020. 55-68
- Pillai, R. & Williams, E. A. (2004). Transformational leadership, self-efficacy, group cohesiveness, commitment, and performance. Journal of Organizational Change Pratama, H. R., Sunaryo, W., & Yusnita, N. (2020). Studying the Relationship Between Transformational Leadership and Organizational Culture With Organizational Commitment At Minhaj Shahabah Islamic Boarding School Bogor. Jhss (Journal of Humanities and Social Studies), 4(2), 146–151. <https://doi.org/10.33751/jhss.v4i2.2461>
- Pradhiptya, A. R. (2013). Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap organizational citizenship behavior dengan Variabel Mediasi Komitmen Organisasi. Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 6(1), 50–58. <http://dx.doi.org/10.26740/bisma.v6n1.p50-58> [Google Scholar]
- Prasad, B., & Junni, P. (2016). CEO transformational and transactional leadership and organizational innovation: The moderating role of

- environmental dynamism. *Management Decision*, 54(7), 1542-1568.
doi: 10.1108/MD-11-2014-0651
- Pratama, H. R., Sunaryo, W., & Yusnita, N. (2020). Studying the Relationship Between Transformational Leadership and Organizational Culture With Organizational Commitment At Minhaj Shahabah Islamic Boarding School Bogor. *Jhss (Journal of Humanities and Social Studies)*, 4(2), 146–151. <https://doi.org/10.33751/jhss.v4i2.2461>
- Pratama, C.Y., Pengaruh Gaya Kepemimpinan Otokratis Terhadap Kepuasan Kerja. *Journal of Social and Industrial Psychology* 1 (2) (2012). 22-27.
- Puni, A., Ofei, S. B. & Okoe, A., (2014). The Effect of Leadership Style on Firm Performance Ghana. *International Journal of Marketing Studies*, 6(1): 177-185
- Psychteacher.co.uk,. *Correlational research for a level psychology - Psychteacher*. Retrieved from <http://www.psychteacher.co.uk/research-methods/correlations.html>
- Qodir, Zuli, 2003. *Ada Apa Dengan Pesantren ngruki*, Bantul: Podok Edukasi.
- Qomar, Mujamil. *Menggagas Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014. Qomar, Mujamil, t.t. *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga,.
- Qomar, Mujamil. 1996. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: ERLANGGA
- Rachman, Arief Aulia. (2021). The Impact of Authoritarian Leadership in Pesantren. *Religió: Jurnal Studi Agama-agama*. Volume 4, Nomor 1, Maret 2014.
- Rahayu, Eka Adni and Faraj, Nahiyah Jaidi. (201()) The Transformational Leadership of The Female Leader in Pesantren. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 27, No. 2. 299-332 DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ws.27.2.4735>
- Rahmawati, Zeny, 2009. *Pola Kepemimpinan KH. Maimoen Zubair dalam Mengelola Pengembangan Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang Jateng*. Undergraduate thesis, UIN Sunan

Ampel Surabaya

- Rai, S. S. (2000). Transformational leadership, organizational commitment relations between transformational leadership and work outcomes. *Journal of Occupational Review* , 21, 1-36.
- Rana, S. S., Malik, N. I., & Hussain, R. Y. (2016). Leadership styles as predictors of job involvement in teachers. *Pakistan Journal of Psychological Research*, 31(1), 161- 182
- Rast D. E., III, Hogg M. A., Giessner S. R. (2013). Self-uncertainty and support for autocratic leadership. *Self Identity* 12 635–649. 10.1080/15298868.2012.718864
- Rasyid, H. (2007). *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat*. Jakarta: Pustaka Beta.
- Redfern, S., Hannan, S., and Norman, I. (2002), 'Work Satisfaction, Stress, Quality of Care and Morale of Older People in a Nursing Home,' *Health and Social care in the Community*, 10, 6, 512-517.
- Rehman, S. U.; Shareef, A.; Mahmood, A.; Ishaque, A. (2012). Perceived Leadership Style and Organizational Commitment. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 4 (1), 616-626.
- Riaz, A. and M.H. Haider, 2010. Role of Transformational and Transactional Leadership with Job Satisfaction and Career Satisfaction, *Business and Economics Horizons (BEH)*, 1(1): 56-64.
- Rivai, Veithzal, 2006, *Kepemimpinan dan perilaku organisasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rohmah, Hanifah Siti Nur. (2020). Woman as Charismatic Leader at Pesantren Santri: *Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*. Vol. 1 No. 2 December (2020). 189-203
- Ritz, A., Shantz, A., Alfes, K., & Arshoff, A. S. (2012). Who needs leaders the most? The interactive effect of leadership and core self-evaluations on commitment to change in the public sector. *International Public Management Journal*, 15(2), 160–185. doi:10.1080/10967494.2012.702588.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2012). *Organizational Behavior* 15th ed. New

Jersey: Pearson Education, Inc.

Robbin, S.P. & Judge, T.A. (2014). *The Essentials of Organizational Behavior*. Pearson. New jersey. ISBN: 978-0-13-296850-8.

Robbins, S.P. (2009). *Organizational Behavior*. New Jersey, NJ: Prentice Hall

Rohmaniyah, Inayah, and Mark Woodward. "Wahhabism, Identity, and Secular Ritual: Graduation at an Indonesian High School." *Al- Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 50, no. 1 (2012): 119–45.

Romas, Chumaidi Syarief. *Kekerasan Di Kerajaan Surgawi: Gagasan Kekuasaan Kyai, Dari Mitos Wali Hingga Broker Budaya*. Yogyakarta: KreasiWacana, 2003.

Sari, H.M.K. (2016). Pengaruh gaya kepemimpinan otoriter terhadap loyalitas melalui kepuasan kerja dan stres kerja. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis & Call For Paper FEB UMSIDA 2016*. 179-190

Sarlaksha Ganesh & Mangadu Paramasivam Ganesh, (2014), "Effects of masculinity-femininity on quality of work life", *Gender in Management: An International Journal*, Vol. 29 Iss 4 pp. 229 – 253.

Sarwar, Aisha; Mumtaz, Meiwish; Batool, Zillae; & Ikram, Sundus. (2015). Impact of Leadership Styles on Job Satisfaction and Organizational Commitment. *International Review of Management and Business Research*. Vol. 4 Issue.3. 834-844

Sauer, S.J. (2011). Taking the reins: the effects of new leader status and leadership style on team performance. *Journal of Applied Psychology*, 96(3), 574-587.

Schein, E. H. (n.d.). (2010). *Organizational Culture and Leadership Third Edition*.

Seema Arif & Maryam Ilyas, (2013), "Quality of work-life model for teachers of private universities in Pakistan", *Quality Assurance in Education*, Vol. 21 Iss 3 pp. 282 – 298.

Seprianto, E. and Kurniawan I.S. The effect leadership style toward organizational commitment with job satisfaction as an intervening variable. *EFEKTIF Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Volume 10, No. 2, Desember 2019, 69-80

Seyyed. A, Akbar. A, & Freyedon. A, & Mina. G.(2012). Effect of the leadership styles on the organizational commitment given the staff personality traits

- (the case study: iran's state retirement organization. *Interdisciplinary journal of contemporary research in business*.4(1). 247-263.
- Shafie, B., Baghersalimi, S., & Barghi, V., (2013). The relationship between leadership style and employee performance. *Singaporean Journal of Business Economics, And Management Studies*, 2(5), 21.
- Shah, Samreen; Farooq, Sah Muhammad; Hussain, Nazar; Mahar, Shoukat Ali and Metlo, M. Younis. Impact of charismatic leadership on Job Satisfaction and Organizational Commitment, *International Journal of Management (IJM)*, 12(2), 2021, pp. 984-990
- Shahzad, K., Rehman K. U. & Abbas, M. (2010). HR Practices and leadership styles as predictors of employee attitude and behaviour: Evidence from Pakistan. *European Journal of Social Sciences*, 14(3), 417 – 426.
- Sofi, M. & Devanadhen, K. 2015. Impact of Leadership Styles on Organizational Performance: An Empirical Assessment of Banking Sector in Jammu and Kashmir (India). *IOSR Journal of Business and Management*, 17(8), 31-45. Available at: <http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol17-issue8/Version-3/E017833145.pdf>. Accessed 20 May 2019.
- Salkind, N. (2010). *Encyclopedia of Research Design*. SAGE Publications Ltd.
- Schein, E. H. (n.d.). *Organizational Culture and Leadership Third Edition*.
- Science Buddies. Sample Size: How Many Survey Participants Do I Need? Available from: http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_ideas/Soc_participants.shtml. [Last accessed on 2014 Sep 25].
- Shamir, B., House, R. J., & Arthur, M. B. (1993). The motivational effects of charismatic leadership: A selfconcept based theory. *Organization Science*, 4, 577-594.
- Shamir, B., M. Arthur, and R.J. House. 1994. The rhetoric of charismatic leadership: Atheoretical extension, a case study, and implications for research. *Leadership Quarterly*5, no.1: 25 42.
- Shamir, B., House, R. J., & Arthur, M. B. (1993), —The motivational effects of charismatic leadership: A self-concept based theory||, *Organization science*, 4(4), 577-594.
- Shaw M. E. (1955). A comparison of two types of leadership in various communication nets. *J. Abnorm. Soc. Psychol.* 50 127–134. 10.1037/

h0041129 [PubMed] [CrossRef]

- Shim, H. S., Jo, Y., & Hoover, L. T. (2015). Police transformational leadership and organizational commitment: Mediating role of organizational culture. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 38(4), 754-774. doi: 10.1110
- Shirzad, K. B., & Zanganeh, F. (2011). The relationship between senior managers leadership style of school districts of Tehran and spirit of the administrators in girls state school. *Journal of Management Research and Training*, 1(1), 105-124.
- Shurbagi, A.A.M. and I. Zahari, 2012. The Relationship between Transformational Leadership, Job Satisfaction and the Effect of Organizational Culture in National Oil Corporation of Libya, *International Conference on Management, Applied and Social Science*.
- Siswanto., Setiani., & Syakur, A. (2019). The Influence of Islamic Work Ethic and Job Satisfaction on Organizational Commitment: Islamic Educational Institution Evidence. *Etikonomi: Jurnal Ekonomi*. Vol. 18 (1): 73 – 82. doi: [http// dx.doi.org/10.15408/etk.v18i1.7114](http://dx.doi.org/10.15408/etk.v18i1.7114).
- Sosik, J. (2005). The role of personal values in the charismatic leadership of corporate managers: A model and preliminary field study. *Leadership Quarterly*, 16, 221- 244.
- Spreitzer, G. M., Perttula, K. H., and Xin, K. (2005). Traditionality matters: an examination of the effectiveness of transformational leadership in the United States and Taiwan. *Journal of Organizational Behavior*. 26, 205-227.
- Stacks, D. W. (2010). *Primer of public relations research* (2nd ed), New York: Guildford.
- Stangor, C. (2011). *Research methods for the behavioral sciences*. (Laureate Education, Inc., custom ed.). Boston: Houghton Mifflin Company.
- Stogdill, R.M. 1974. *Handbook of Ledership. A Survey of Theory and Research*. New York Free Press.
- Stempel, C. R., Rigotti, T., & Mohr, G. (2015). Think transformational leadership – Think female? *Leadership*, 11(3), 259-280. doi: 10.1177/1742715015590468
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung:

- Alfabeta, Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta Sukamto, Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren, (Jakarta, LP3ES, 1999)
- Sukamto. (1999). *Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren*. Jakarta: LP3ES. Sutiyo. *Benturan Puritan & Sinkretis*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Suparto, (2000), *The Pesantren and Their Modernization: The Traditional Institutions for Islamic Studies and Their Cultural Preservation*. School of Education: Flinders University Australia
- Supendi, Pepen. "Karakteristik Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi dan Kontribusinya Terhadap Mutu Pendidikan Pesantren." UIN Sunan Gunung Djati, 2015.
- Suradi, Ahmad Andi and Surahman Buyung. (2020) *Kiai's role as ulama and umara: Implications to the pesantren education*, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 33, Issue 2, page 202-211
- Suradi, A (2017) *Islamic education in facing the phenomena of globalization: Epistemological perspective of Islamic education philosophy*. Al-Idarah 7 (II):47-59.
- Syalabi, Ahmad dalam Maksum, 1999, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Swarnalatha and Sureshkrishna, *Relationship between Employee Job Satisfaction and Organizational Commitment: An Empirical Study among Employees of Automotive Industries in India*. RJSSM: Volume: 02, Number: 02, June-2012. 39-44
- Taghipour, A., & Dejban, R. (2013). *Job Performance: Mediate Mechanism of Work Motivation*. Social and behavioral science. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/275542237_Job_Performance_Mediate_Mechanism_of_Work_Motivation
- Taş, A., Çelik, K., Tomul, E. (2007). *Yenilenen ilköğretim programının uygulandığı ilköğretim okullarındaki yöneticilerin liderlik tarzları*. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (22), 85-98.
- Tashakkori, A. dan Teddlie, C., 2010, *Mixed Methodology Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, terj. Budi Puspa Priadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Teymournejad, K., & Elghaei, R. (2017). Effect of transformational leadership on the creativity of employees: An empirical investigation. *Engineering*, 7(1), 1413-1419.
- Tian Q., Sanchez J. I. (2017). Does paternalistic leadership promote innovative behavior? The interaction between authoritarianism and benevolence. *J. Appl. Soc. Psychol.* 47 235–246. 10.1111/jasp.12431
- Thamrin, H.M. The Influence of Transformational Leadership and Organizational Commitment on Job Satisfaction and Employee Performance. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, Vol. 3, No. 5, October 2012. 566-572
- Thanh, I.D.; Thong, B. Q.; Chon, L.V.; Nguyen, N. (2020). Job Satisfaction as a Mediator of the Impact of Meeting Effectiveness on Organizational Commitment. *Journal of Southwest Jiaotong University*. Vol 55, No 3 (2020).
- The Leadership Questionnaire of the Sage Publications. <https://edge.sagepub.com/northouseintro4e/student-resources-0/leadership-questionnaires>,
- Thomas, S., Sammons, P., Mortimore, P., & Smees, R. (1997). Stability and consistency in secondary school effects on students' GCSE outcomes over three years. *School effectiveness and school improvement*, 8 (2), 169-197.
- Tikare, M. (2016). Organizational Commitment of Para-Medical Staff with reference to Marital Status. *IRA-International Journal of Management & Social Sciences* (ISSN 2455-2267), 4(1). doi:<http://dx.doi.org/10.21013/jmss.v4.n1.p1>
- Tim Redaksi Pusat Bahasa, 2008, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Tjiharjadi, Semuil, dkk. (2012). *To Be A great effective leader*. Yogyakarta: ANDI
- Thoyib, Mohamad. (2017). Charismatic Leader on Developing Visionary Pesantren Bidayatul Hidayah in East Java: Profile and Strategy of Dr. KH. Ahmad Musthofa Kamal's Leadership. *Jurnal Pendidikan Islam* :: Volume

7, Number 1, June 2018/1439. DOI : 10.14421/jpi.2018.71.79-99

- Triola MF. Estimates and sample sizes. In: Elementary Statistics. 12th ed., Ch. 7. New York: Prentice Hall Inc.; 2012. Available from: http://www.math.wayne.edu/~menaldi/teach/others/Sta1020/ElemStat_Triola_Chapter7.pdf. [Last accessed on 2014 Sep 25].
- Tse, H. H. M., Huang, X., & Lam, W. (2013). Why does transformational leadership matter for employee turnover? A multi-foci social exchange perspective. *Leadership Quarterly*, 24(5), 763–776. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2013.07.005>
- Thomas, H.W. 1985. *Bailey's Industrial Oil and Fat Product*, Volume 3. Jhon Wiley & Sons, New York. Nugraha, Firman. 2010. *Kepemimpinan Kyai di Pesantren*. Online. <http://firmanugrahablogspotcom/2010/03/kepemimpinan-Kyai-di-pesantren.html>. Diakses Mei 2017.
- Tumbol, C.L., Tewal, B. & Sepang J.L. (2014). Gaya Kepemimpinan Otokratis, Demokratik dan Laissez Faire Terhadap Peningkatan Prestasi Kerja Karyawan Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.2 No.1, Hal. 38-47
- Umar, H. (2010). *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umiarso, U. (2018). Kepemimpinan Transformasional Profetik Dalam Mengembangkan Pesantren Di Kabupaten Jember. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 87. <https://doi.org/10.32332/akademika.v23i1.1205>
- Umiarso, U., & Muhith, A. (2019). Construction Organizational Culture In Gender Pesantren Through Kiai's Transformational Leadership. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 67. <https://doi.org/10.32332/akademika.v24i1.1614>
- Van Dierendonck, D., Stam, D., Boersma, P., de Windt, N., & Alkema, J. (2014). Same difference? Exploring the differential mechanisms linking servant leadership and transformational leadership to follower outcomes.

Leadership Quarterly, 25(3), 544–562. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2013.11.014>

- Vlachos, P. A., Panagopoulos, N. G., & Rapp, A. A. (2013). Feeling Good by Doing Good: Employee CSR-Induced Attributions, Job Satisfaction, and the Role of Charismatic Leadership. *Journal of Business Ethics*, 118, 577–588
- Vugt, M. V., Jepson, S. F., Hart, C. M. and Cremer, D. D. (2004). Autocratic leadership in social dilemmas: A threat to group stability. *Journal of Experimental Social Psychology*, 40(1), 1 – 13.
- Wang, X. H. & Howell, J. M. (2010). Exploring the dual-level effects of transformational leadership on followers. *Journal of Applied Psychology*, 95(6), 1134-1144
- Wang, G., Oh, I-S., Courtright, S. & Colbert, A. 2011. Transformational Leadership and Performance Across Criteria and Levels: A Meta-analytic Review of 25 Years of Research. *Group and Organization Management*, 36(2), 223-270. Available at: https://www.researchgate.net/publication/211395774_Transformational_Leadership_and_Performance_Across_Criteria_and_Levels_A_Meta-Analytic_Review_of_25_Years_of_Research. Accessed 1 May 2019.
- Wang, P. & Walumbwa, F. O. (2007). Family-friendly programs, organizational commitment, and work withdrawal: The moderating role of transformational leadership. *Personnel Psychology*, 60, 397–427
- Wang et al., 2014 X. Wang, L. Ma, M. Zhang. Transformational leadership and agency workers' organizational commitment: The mediating effect of organizational justice and job characteristics *Social Behavior and Personality*, 42 (1) (2014), pp. 25-36
- Yaghoubipoor, A., Tee O.P., and Ahmed E.M., (2013). Impact of the relationship between transformational and traditional leadership styles on Iran's automobile Industry job satisfaction. 9 (1), 14-27.
- Yang, M.-L. (2012a). Transformational leadership and Taiwanese public relations practitioners' job satisfaction and organizational commitment. *Social*

- Behavior and Personality, 40(1), 31–46. doi:10.2224/sbp.2012.40.1.31.
- Yang, Y. F. (2012b). Studies of transformational leadership in the consumer service workgroup: Cooperative conflict resolution and the mediating roles of job satisfaction and change commitment. *Psychological Reports*, 111(2), 545–564. doi:10.2466/01.21.PRO.111.5.545-5
- Yousef, D. (2000). Organizational commitment: a mediator of the relationships of leadership behavior with job satisfaction and performance in a non-western country. *Journal of Managerial Psychology*, 15(1): 6-28.
- Yukl. (2010).
- Zakarias, T. Charismatic Leadership And Work Motivation On Performance Through Job Satisfaction Of Regional Secretariat Employees In Buru Selatan Regency. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. Vol. 7. No. 4 Oktober 2021. 145-152. Uki. "Pembaharuan pendidikan pesantren," Mei 2019. <https://syukririfai.wordpress.com: www.wordpress.com>.
- Umam, Khotibul. (2003). Pola kepemimpinan kiai dalam pengelolaan pesantren mahasiswa (Studi Kasus Pondok Pesangtren Salafiyah Syaifi'yah Huda Mergosono Malang). Malang: Tesis Tidak dipublikasikan.
- Umiarso, U., & Muhith, A. (2019). Construction Organizational Culture In Gender Pesantren Through Kiai's Transformational Leadership. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 67. <https://doi.org/10.32332/akademika.v24i1.1614>
- Us, Kasful Anwar. "The Leadership of Kyai in Islamic Boarding School (A Study of Islamic Boarding School in Jambi)" 22, no. 1 (2001).
- Van Dierendonck, D., Stam, D., Boersma, P., de Windt, N., & Alkema, J. (2014). Same difference? Exploring the differential mechanisms linking servant leadership and transformational leadership to follower outcomes. *Leadership Quarterly*, 25(3), 544–562. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2013.11.014>
- Vigoda-Gadot, E. 2007. Leadership style, organisational politics, and employees' performance: An empirical examination of two competing models. *Personnel Review*, 36 (5): 661-683.
- Voon, M., Lo, M., Ngui, K. & Ayob, N. (2011), 'The influence of leadership styles on employees' job satisfaction in public sector organizations in Malaysia,' *International Journal of Business, Management and Social*

Sciences,2(1), 24-32.

Vroom, Yetton. 1995. *Normative Theory*. Boston:Mc Graw Hill Book Company

Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren Third Edition*.

Yogyakarta: LKIS, 2010.

Wahyudi, Amin. The Influence Organizational Commitment and Islamic Work Ethic toward job performance teaching staff universities in Surakarta With Institution base a moderator variabel. The 35th Anniversary Slamet Riyadi University, UNISRI Solo 2015

Walid, 2010, *Napak Tilas Kepemimpinan KH.Ach. Muzakky Syah*, Yogyakarta: Absolute Media,.

Waldman, D.A., G.G. Ramirez, R.J. House, and P. Puranam. 2001. Does leadership matter? CEO leadership attributes and profitability under conditions of perceived environmental uncertainty. *Academy of Management Journal*44, no. 1: 134-43.

Wang, G., Oh, I. S., Courtright, S. H., & Colbert, A. E. (2011). Transformational leadership and performance across criteria and levels: A meta-analytic review of 25 years of research. *Group and Organization Management*, 36(2), 223–270. <https://doi.org/10.1177/1059601111401017>

Wang A. C., Chiang T. J., Tsai C. Y., Lin T. T., Cheng B. S. (2013). Gender makes the difference: the moderating role of leader gender on the relationship between leadership styles and subordinate performance. *Organ. Behav. Hum. Decis. Process.* 122 101–113. 10.1016/j.obhdp.2013.06.001 [CrossRef]

Wang, F. J., Chich-Jen, S., & Mei-Ling, T. (2010). Effect of leadership style on organizational performance as viewed from human resource management strategy. *African Journal of Business Management*, 4(18), 3924-3936.

Wang, S., Zhou, H., & Wen, P. (2014), —Employment Modes, Charismatic Leadership and Organizational Citizenship Behavior: Explanations From Perceived Job Security||, *Pak. J. Statist*, 30(5), 827-836.

Wardiyanto (2016). Komitmen Organisasi Pengurus Pondok Pesantren Ditinjau dari Karakter Demografi. *Jurnal Psikologi*. September 2016, Vol. 3, No. 2, hal. 94-103

- Warson, Ahmad Munawir, 1997, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif).
- Watt JH, van den Berg S. Sampling. In: *Research Methods for Communication Science*. Ch. 6. 2002. Available from: [http:// www.cios.org/readbook/rmcs/ch06.pdf](http://www.cios.org/readbook/rmcs/ch06.pdf). [Last accessed on 2014 Sep 24].
- Webb, Kerry S.(2009)'Creating Satisfied Employees in Christian Higher Education: Research on Leadership Competencies', *Christian Higher Education*, 8:1, 18 — 31
- Weber, M. (1964). *The theory of social economic organization*. New York: The Free Press. Weber, M. (1968). *Economic and society* (Vol. 1). New York: Bedminster.
- Wijaya, Aksin, 2011, *Menusantarakan Islam: Menelusuri Jejak Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usai di Nusantara*, Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Wimmer, R. D. & Dominick, J. R. (2006). *Mass media research: An introduction* (8th ed.).Wadsworth: Holly J. Allen.
- Weiss, D. J., Dawis, R. V., England, G. W., & Lofquist, L. H. (1967). *Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire*. Minneapolis: University of Minnesota.
- Yiing, Lee Huey and Ahmad, Kamarul Zaman Bin, 2008. The Moderating Effects of Organizational Culture on The Relationship Between Leadership Behaviour and Organizational Commitment and Between Organizational Commitment and Job Satisfaction and Performance. *Leadership and Organization Development Journal*. Vol. 30 No. 1, 2009, pp. 53-86
- Yousef, D. A. (2001). Islamic Work Ethic: A Moderator between Organizational Commitment and Job Satisfaction in a Cross-Cultural Context. *Personnel Review*, 30(2), 152–169. <https://doi.org/10.1108/00483480110380325>
- Yukl, Gary A., 1994, *Leadership in Organizations*. Terj. Yusuf Udaya, Jakarta: Prenhallindo.
- Yuningsih, Heni. "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru." *JURNAL TARBIYA UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, vol. 1, no. 1 (2015): 183– 84.
- Yunus, Mahmud & Qosih Bakar,Muhammad. t.t. *al-Tarbiyah wa al-Ta'lim*, juz al-awwal C, Ponorogo: Dâru al-Salâm.
- Yunus, Mahmud.2008. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyah

- Yusof, A. and M.P. Shah, 2008. Transformational Leadership and Leadership Substitutes in Sports. Implications on Coaches' Job Satisfaction, *International Bulletin of Business Administration*, 3: 112-120.
- Zainuddin, Muhadi dan Abd. Mustaqim. 2008. *Studi Kepemimpinan Islam (Telaah Normatif & Historis)*. Semarang: Putra Mediatama Press.
- Zareen, M., Razzaq, K. & Mujtaba, B., 2015. Impact of Transactional, Transformational and Laissez- Faire Leadership Styles on Motivation: A quantitative study of banking employees in Pakistan. *Public Organization Review*, 15(4): 531-549.
- Zarkasyi, Imam, (2009): Diktat Pekan Perkenalan, Gontor: Darussalam Press.
- Zarkasyi, A. S. (2005). Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zeitchik, S. (2012). 10 Ways to Define Leadership. *Business News Daily*.
- Zdaniuk, A., & Bobocel, D. R. (2015). The role of idealized influence leadership in promoting workplace forgiveness. *The Leadership Quarterly*, 26(5), 863-877. doi: 10.1016/j.leaqua.2015.06.008
- Zhang Y., Xie Y. H. (2017). Authoritarian leadership and extra-role behaviors: a role- perception perspective. *Manage. Organ. Rev.* 13 147–166. 10.1017/mor.2016.36
- Zhang, C. (2018). Relationship Between Leadership Styles and Job Satisfaction in Luxury Retail Project.
Retrieved from http://digitalcommons.harrisburgu.edu/pmgt_dandt/30
- Ziemek, 1986. Pesantren dalam Perubahan Sosial. Jakarta, Indonesia: P3M
- Zubaedi. (2011). Desain Pendidikan karakter Konsep dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, Jakarta: Kencana

Efektivitas *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam Mendukung Akselerasi APBN di Masa Covid-19

Dwi Putri Restuti
dwiputrirestuti12@gmail.com
IAIN Kudus

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam mendukung akselerasi pembiayaan APBN di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan beberapa kajian literatur, diperoleh hasil bahwa Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) mampu mendukung pembiayaan APBN. Hal ini dapat terbukti dari penerbitan SW001, SWR001 dan SWR002. Hasil penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) tersebut digunakan untuk program sosial yang meliputi pendidikan (beasiswa mentari, sang surya, save our school), kesehatan (penyediaan alat kesehatan Rumah Sakit Dhuafa, ambulans, klinik), ibadah (pembangunan masjid Salman Rasidi di Bandung). Akan tetapi, kurangnya literasi bagi masyarakat mengenai Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) menyebabkan program tersebut berjalan dengan hasil yang kurang maksimal. Untuk itu diperlukan adanya peran pemerintah untuk terus mengencangkan sosialisasi terkait Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Sehingga inovasi Islamic Financing yang berupa Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) ini dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung akselerasi pembiayaan APBN untuk menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Cash Waqf Linked Sukuk; APBN

Abstract

This research aims to determine the effectiveness of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) in supporting the acceleration of APBN financing during the Covid-19 pandemic. This type of research is a qualitative research with a descriptive approach. Based on several literature studies, it was found that Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) were able to support APBN financing. This can be proven from the issuance of SW001, SWR001 and SWR002. The results of the issuance of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) are used for social programs which include education (mentari scholarships, the sun, save our school), health (providing medical equipment for Dhuafa Hospital, ambulance, clinic), worship (construction of the Salman Rasidi mosque in Bandung). However, the lack of literacy for the community regarding Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) causes the program to run with less than optimal results. so that there is a need for the government's role to continue to intensify the socialization of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). So that the Islamic Financing innovation in the form of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) can more effectively support the acceleration of APBN financing to face the economic recession due to the Covid-19 pandemic.

Keywords: Cash Waqf Linked Sukuk, APBN

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini investasi dianggap sebagai suatu tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa mendatang. Investasi sebagai solusi terkini dalam menghadapi dunia perekonomian, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam tata kelola keuangan. Investasi juga dinilai sebagai jalan alternatif bagi terciptanya perekonomian yang seimbang dan mampu bersaing dengan dunia global. Selain itu, kondisi yang sedang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini juga menjadi alasan pentingnya berinvestasi untuk mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit *coronavirus* 2019 (Covid-19) di seluruh dunia yang disebabkan oleh *coronavirus* jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Pandemi Covid-19 ini telah meluluhlantakkan hampir semua sektor ekonomi. Bahkan dilansir dari media kompas.com, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III tahun 2020 -3,49% (*year on year*). Dengan demikian, Indonesia resmi berada pada kondisi resesi ekonomi, setelah pada kuartal II tahun 2020 ekonomi Indonesia juga berkontraksi dengan PDB mencapai -5,32% (Mutia, 2020).

Melihat tingkat PDB yang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini, jelas bahwa dunia berada pada bahaya krisis ekonomi baru dan pandemi Covid-19 menjadi penghambat utama ekonomi global. Oleh karena itu, setiap negara harus mengambil kebijakan dan langkah yang tepat untuk mengurangi dampak yang akan terjadi, begitu pula dengan Indonesia. Untuk itu, salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini yaitu dengan meningkatkan potensi pada bidang investasi. Langkah ini diambil dengan melakukan diversifikasi berbagai instrumen investasi.

Diversifikasi investasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia cukup beragam. Akan tetapi, yang menjadi perhatian cukup menarik yaitu pada penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) oleh Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai investasi sosial ini mengacu pada UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Saptono, 2018). *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ini merupakan surat utang syariah atau sukuk yang berbasis wakaf uang. Adapun pengelolaan wakaf uang tersebut didasarkan pada Fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang untuk membantu pembiayaan fiskal dalam konteks proyek sosial (Fajariah et al., 2020).

KAJIAN LITERATUR

Wakaf

Definisi wakaf dalam kamus Bahasa Arab *al-Munhij* berasal dari kata (*waqafa-yaqifu-waqfan*) yang artinya berhenti. Persamaannya yaitu *habasa* atau (*habasa-yahbisu-tahbisan*). Pada zaman Nabi Muhammad SAW. dan para sahabat dikenal dengan istilah *habs*, *tasbil* atau *tahrim* (Dhewayani & Jaharuddin, 2020). Kata *al-waqf* dalam Bahasa Arab memiliki beberapa pengertian sebagai berikut.

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّخْيِيسِ وَاتِّسَابِيلِ

Artinya: “Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan”.

Wakaf adalah menahan harta benda yang tidak mudah rusak untuk diambil manfaatnya atau menahan harta untuk disalurkan kepada jalan yang diperbolehkan Allah SWT. demi kemaslahatan ummat dan sesuai dengan ketentuan *syara'* (Baiti, 2021). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada pasal 1 disebutkan bahwa *wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah*. Landasan hukum yang menganjurkan wakaf yaitu Surat Ali Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran [3]: 92).

Ketika ayat tentang anjuran menyedekahkan harta yang paling dicintai (Q.S. Ali Imran [3]: 92) didengar oleh Abu Thalhan maka ia berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT. berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ

Artinya: “Kamu sekali-kali belum sampai kepada kebaktian yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”. (Q.S. Ali Imran [3]: 92).

Sedangkan harta yang sangat saya cintai adalah Bairaha (kebun yang berada tepat berhadapan dengan masjid Nabi Muhammad SAW.) ia akan kami sedehkankan kepada Allah SWT., kami hanya berharap kebaikan dan pahalanya akan kami simpan di sisi Allah SWT. oleh karena itu, pergunakanlah pada tempat yang kamu inginkan (*Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf*, 2013). Nabi Muhammad SAW. bersabda: “*Bagus, itu adalah harta yang berguna, aku mendengar apa yang engkau katakan. Menurut pendapat saya, berikan saja harta itu kepada sanak kerabatmu. Akan kami kerjakan wahai Rasulullah SAW., jawab Abu Thalhah. Kemudian ia membagi-bagikannya kepada sanak kerabat dan anak pamannya*”. (H.R. Muslim).

Landasan hukum yang menganjurkan wakaf juga pada hadis Nabi Muhammad SAW.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عِزْمُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ .

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara), yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan kedua orang tuanya”. (H.R. Muslim).

Seiring dengan berjalannya waktu, wakaf yang berkembang di Indonesia cukup beragam. Salah satu inovasi baru dalam sektor *voluntary* di samping zakat, infak dan shadaqah yaitu adanya wakaf uang. Wakaf uang berkembang di Indonesia sejak tahun 2001. Pada saat itu, para pakar ekonomi Islam melihat banyaknya aset wakaf di Indonesia yang tidak diberdayakan secara maksimal (Fajariah et al., 2020).

Tahun 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, yang berisi: 1) Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, 3) Wakaf uang termasuk *jawaz* (boleh), 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan syar’i, dan 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Sukuk

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut sebagai sukuk merupakan salah satu instrumen yang diterbitkan oleh institusi atau emiten syariah. Sukuk berasal dari Bahasa Arab yaitu *sakk* yang artinya dokumen atau sertifikat (Anwar, 2007). Definisi sukuk menurut Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 ialah sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah yang berupa bagi hasil margin atau *fee*, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo (Prastiwi, 2017).

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOFI) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat yang memiliki nilai sama sebagai bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu (Prastiwi, 2017). Fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islami* pada 20 Maret 1990 dan Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 mendorong implementasi sukuk untuk investasi jangka panjang dan sebagai alternatif pengganti obligasi konvensional. Sukuk di Indonesia juga diatur pada Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Ali, 2007). Landasan hukum yang mengatur tentang wakaf yaitu Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 275 (Rahayu & Agustianto, 2020).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Sukuk sama dengan Surat Utang Negara (SUN) menjadi salah satu instrumen yang digunakan sebagai pembiayaan negara ketika negara mengalami defisit anggaran serta sebagai penutup kas dalam jangka pendek

satu tahun anggaran. Perbedaannya terletak pada penerapan prinsip syariah, antara lain diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta adanya prinsip bagi hasil margin (*fee*) yang diterapkan berbeda dengan obligasi yang menerapkan bunga. Pendapatan sukuk berupa kupon (imbalan), margin dan bagi hasil yang sesuai dengan akad yang digunakan serta terbebas dari unsur *maysir*, *riba* dan *gharar* (Billah, 2020).

Cash Waqf Linked Sukuk

Sukuk wakaf merupakan instrumen penggabungan antara wakaf uang dan sukuk, atau dikenal dengan istilah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ini merupakan salah satu bentuk *creative financing* baru yang diterapkan di Indonesia dan pertama kali di dunia. Selain itu, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) juga merupakan instrumen yang akan memberikan dampak keberkahan sepanjang waktu. Hal ini sesuai dengan konsep wakaf yang berlaku sepanjang waktu dan pahalanya akan terus mengalir. Pemanfaatan wakaf produktif yang berlaku di Indonesia menjadi indikator perkembangan perwakafan yang progresif. Hal ini dikarenakan apabila asetnya dikelola, maka dapat memberikan kontribusi keuntungan secara ekonomis (Putri et al., 2020).

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan sebuah instrumen investasi yang berprinsip syariah dan bersifat sosial, di mana wakaf uang yang telah dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku *nadzir* melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang kemudian dikelola dan ditempatkan pada instrumen investasi berupa sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (Faiza, 2019). Peluncuran program *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan *Islamic Development Bank* (IDB) pada acara *annual meeting* (IMF-World Bank) yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 12 sampai 14 Oktober 2018 (Hiyanti et al., 2020).

Penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) pertama kali di Indonesia telah dilakukan pada tahun 2020. Kementerian keuangan menerbitkan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) seri SWR0001 dengan menerapkan akad wakalah. Penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) tersebut mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf (Siregar et al., 2021). Pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang ingin berwakaf uang dengan aman dan produktif melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), sekaligus ikut berpartisipasi dalam mendukung

akselerasi kekuatan ekonomi kerakyatan. Adapun kegiatan berwakaf uang melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dapat dilakukan secara *online* dengan tata cara sebagai berikut (DJPPR, 2022).

1. Registrasi

Khusus investor baru: calon wakif individu membuat SID dan Rekening Efek serta melakukan registrasi E-SBN di Internet Banking atau Mobile Banking, kemudian calon wakif mendapatkan notifikasi terdaftar pada E-SBN dari Mitra Distribusi.

2. Pemesanan

Calon wakif yang telah terdaftar di E-SBN melakukan pemesanan SWR002 setelah membaca ketentuan pada memo info dan menyetujui Akta Ikrar Wakaf.

3. Pembayaran

Calon wakif mendapatkan notifikasi *verified order* dan kode pemesanan via email, kemudian calon wakif membayar melalui berbagai saluran pembayaran dengan batas waktu yang telah ditentukan.

4. *Completed order*

Wakif mendapatkan notifikasi *completed order* dan mendapatkan kode NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) serta sertifikat wakaf uang melalui email setelah tanggal setelmen.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sangat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aset wakaf, yaitu adanya integrasi antara sukuk dan wakaf berkontribusi dan memberdayakan banyaknya aset wakaf yang tidak produktif seperti tanah wakaf. Sukuk memiliki peran sebagai instrumen untuk memobilisasi, sedangkan wakaf memiliki peran dalam memperoleh *income* dana aktivitas keuangan yang produktif. Oleh karena itu, adanya kolaborasi antara instrumen sukuk dan wakaf dapat memberikan sumbangan besar bagi APBN. Inovasi ini dapat memberikan kontribusi besar bagi negara bagi pembiayaan pembangunan perekonomian negara (Rahayu & Agustianto, 2020).

APBN

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur, menstabilkan, serta melakukan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya tersebut. Pemerintah harus bisa menggali sumber dana untuk membiayai program yang direncanakan. Sumber dana serta penggunaan dana inilah yang dipelajari dalam keuangan negara yang dituangkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Idris, 2016). APBN ini merupakan rencana kerja pemerintahan negara dalam rangka melakukan peningkatan hasil-hasil pembangunan secara berkesinambungan (Achmad, 2021). Belanja negara menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 14 mendefinisikan belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Penerimaan negara dengan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran disebut sebagai defisit anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa antara penerimaan dan pengeluaran memiliki selisih yang tidak seimbang (Kunarjo, 2001). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Pembatasan defisit anggaran maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan pembatasan jumlah pinjaman maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adanya defisit anggaran bisa dibiayai melalui penerbitan obligasi yang dijual ke berbagai pihak, seperti kepada masyarakat, sektor perusahaan (swasta), bank umum, serta bank sentral (Bank Indonesia) (Suparmoko, 1997). Berikut mekanisme pembiayaan defisit anggaran.

1. Pencetakan uang

Penerimaan pemerintah dapat berasal dari adanya pencetakan uang baru. Hal ini dikarenakan adanya selisih antara nilai nominal

dan nilai riil uang. Pencetakan uang akan menjadi sumber utama inflasi bagi negara-negara berkembang. Oleh karena itu, kebijakan fiskal disarankan untuk mengendalikan defisit anggaran sedangkan kebijakan moneter membiayai defisit dengan kebijakan pasif.

2. Utang ke luar negeri

Utang ke luar negeri dapat digunakan untuk mengatasi defisit anggaran secara tidak permanen karena adanya beberapa keterbatasan, seperti adanya beban pengembalian di masa yang akan datang sehingga pemerintah dituntut untuk mengalokasikan dana pembiayaan melalui proyek yang produktif, adanya unsur spekulatif, serta menyebabkan pengaruh *inflationary*.

3. Utang ke dalam negeri atau penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)

Kebijakan penerbitan ini memberikan persyaratan adanya pasar modal yang baik serta memungkinkan berkembangnya *secondary market* untuk pasar obligasi negara yang diterbitkan (Waluyo, 2006).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka digunakan dalam penelitian ini untuk mencari literatur sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya literatur tersebut dikombinasikan dengan pemikiran konseptual penulis untuk memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya mengenai tema yang dibahas dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Tujuan wakaf secara umum yaitu bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah SWT. menciptakan manusia dengan berbagai karakter dan kemampuan yang berbeda-beda, termasuk adanya perbedaan kondisi sosial. Sehingga timbullah perintah untuk mengeluarkan harta benda secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta dengan suatu tujuan yang jelas, seperti adanya fungsi sosial pada peran wakaf. Sedangkan secara khusus, sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangatlah penting, antara lain pengkaderan, regenerasi dan pengembangan sumber daya

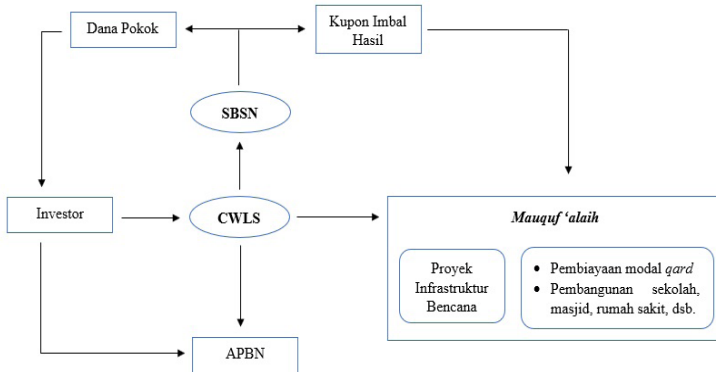
manusia. Hal ini dikarenakan pengeluaran harta wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, seperti semangat keagamaan, motivasi keluarga dan dorongan kondisional (Khoerudin, 2018).

Tingginya potensi pengembangan wakaf di Indonesia menyebabkan adanya inovasi dalam bidang keuangan syariah berupa perpaduan antara wakaf dan sukuk atau yang disebut dengan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan bentuk investasi sosial di Indonesia dimana wakaf tunai diterima oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nadzir melalui Lembaga Keuangan Syariah sebagai penerima wakaf tunai. Dana tersebut akan dikelola dan ditempatkan di sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan hasil pengembangannya digunakan untuk membiayai berbagai perekonomian, kegiatan sosial dan keagamaan (Hafandi & Handayati, 2021). Adanya integrasi antara sukuk dan wakaf memberikan potensi yang cukup besar bagi pengembangan aset-aset wakaf yang bersifat produktif. Sukuk memiliki peran sebagai instrumen untuk memobilisasi, sedangkan wakaf memiliki peran dalam memperoleh *income* dana aktivitas keuangan yang produktif (Siregar et al., 2021).

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan model inovasi terbaru dari wakaf uang. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan salah satu produk investasi sosial dalam bentuk wakaf uang yang dapat ditempatkan sebagai instrumen sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sehingga instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ini dapat memberikan kontribusi bagi pembiayaan fiskal negara, seperti dalam bidang kesehatan, edukasi, maupun pembangunan. SBSN atau sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah (Rahmansyah, 2021). Dalam ekonomi Islam modern, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) berperan sebagai fungsi investasi, mendukung perputaran uang, serta alat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Musari, 2019).

Penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) pertama kali di Indonesia telah dilakukan pada tahun 2020. Pemerintah akan memfasilitasi para pewakaf untuk melakukan investasi pada instrumen investasi yang aman dan produktif melalui penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ini. Wakaf uang yang terkumpul akan diinvestasikan pada instrumen SBSN, sedangkan kupon (imbal hasil) digunakan untuk belanja APBN berupa pembangunan proyek sosial yang produktif (Siregar et al., 2021). Berikut skema *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).

Gambar 1 Skema *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*



Dalam skema *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* ini, misalnya seorang investor menginvestasikan uang sebesar 5 juta pada *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*, maka dana pokok tersebut selama masa tenor (misalnya dua tahun) akan diproyeksikan untuk investasi pada SBSN. Adapun dana investasi pada SBSN tersebut akan masuk pada keuangan pemerintah untuk mendukung akselerasi belanja ABPN dalam pembangunan aset pemerintah, seperti pembangunan berbagai infrastruktur di daerah 3T atau daerah rawan bencana (Billah, 2020). Adapun penggunaan kupon imbal hasil SBSN (misalnya 5,5%) sebesar Rp275.000 akan dialokasikan untuk kepentingan sosial penerima wakaf, seperti beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, maupun sarana ibadah. Sedangkan dana pokok sebesar 5 juta tersebut akan dikembalikan 100% kepada investor apabila masa tenor telah habis.

Melalui pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* tersebut, apabila seluruh aspek kehidupan telah terjaga stabilitasnya dengan baik yang ditunjukkan dengan peningkatan pembangunan, maka akan memberikan kelancaran dalam transaksi ekonomi masyarakat. Transaksi perekonomian yang berjalan dengan lancar dan sistematis juga akan meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga hal ini dapat berdampak pula pada kenaikan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Untuk itu, kegiatan konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi negara, maupun ekspor akan mengalami peningkatan yang signifikan dan mampu meningkatkan tingkat PDB pada level yang lebih baik. Sehingga jelas bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* mampu mendukung akselerasi belanja APBN dalam menghadapi resesi ekonomi.

Adapun kontribusi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam pembiayaan APBN di masa pandemi Covid-19 ini dapat dilihat melalui penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) seri SW001. Pemerintah Indonesia pertama kali menerbitkan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yaitu seri SW001 dengan cara *Private Placement* pada tanggal 10 Maret 2020. Pemerintah pertama kalinya menerbitkan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) seri SW001 dengan nilai sebesar Rp50.849.000.000 (lima puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah). Penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah bersama Bank Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Sehingga pemerintah memfasilitasi wakif uang (baik temporer maupun permanen) untuk menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman serta produktif. Karakteristik *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) seri SW001 sebagai berikut.

Tabel 1
Karakteristik CWLS SW001

Karakteristik	Keterangan
Nilai nominal	Rp50.849.000.000
Bentuk dan jenis SBSN	Tidak dapat diperdagangkan
Jenis akad	Wakalah
Imbal hasil (<i>yield</i>)	6,15%
Tingkat imbalan/kupon	<i>Fixed</i> 5,00% per tahun
Tanggal terbit	10 Maret 2020
Tanggal jatuh tempo	10 Maret 2025

Sumber: IslamicMarkets, data diolah 2021

Berdasarkan data yang diperoleh dari Islamic Markets, pembangunan fasilitas *Retina Center* rumah sakit mata Achmad Wardi menggunakan dana yang bersumber dari imbal hasil penempatan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) berupa diskonto dan kupon *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Jumlah diskonto yang diterima Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebesar Rp2.484.532.989 dan kupon yang diterima setiap bulan sebesar Rp211.870.833. jumlah diskonto yang menjadi hak *mauquf 'alaih* setelah dikurangi dengan biaya operasional dan hak *nazir* Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah Rp2.012.471.721 dan jumlah kupon *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang diberikan setiap bulan yaitu Rp181.308.750 (IslamicMarkets, 2021).

Pembayaran diskonto dilakukan sekali di awal transaksi penerbitan SW001 dan digunakan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) untuk melakukan pengembangan aset wakaf baru, yaitu renovasi dan pembelian alat kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan *retina center* pada rumah sakit wakaf Achmad Wardi yang berlokasi di Serang, Provinsi Banten. Kupon dibayarkan setiap bulan dan dananya digunakan untuk pengobatan operasi katarak gratis di rumah sakit wakaf Achmad Wardi bagi kaum dhuafa. Jumlah kaum dhuafa yang menjadi target selama lima tahun sebanyak 2.513 pasien, serta pengadaan mobil ambulance untuk menjangkau pasien-pasien yang jauh dari rumah sakit wakaf Achmad Wardi (Paul & Faudji, 2020).

Pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) juga telah berjalan dengan efektif sebagaimana penelitian yang menyatakan bahwa salah satu sasaran penggunaan dana beserta imbal hasil SBSN digunakan sebagai dana sosial untuk pembangunan kawasan terkena bencana, seperti di Lombok dan Palu pada tahun 2018 lalu (Faiza, 2019). Penelitian lain juga menjelaskan bahwa pengelolaan dana atas investasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) seri SW001 telah disalurkan untuk pembelian alat dan bangunan kesehatan *Retina Centre* pada Rumah Sakit wakaf Achmad Wardi yang berlokasi di Serang Banten, pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum dhuafa dalam lima tahun sebanyak 2.513 pasien di Rumah Sakit Achmad Wardi, pengadaan mobil ambulance, serta untuk merealisasikan program 1.000 kacamata untuk santri (Paul & Faudji, 2020).

Pemerintah menerbitkan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) kedua yaitu dengan seri SWR001 dengan masa penawaran yang berlangsung mulai 9 Oktober hingga 20 November 2020 dengan tenor 2 tahun yang akan jatuh tempo pada 10 November 2022. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel seri SWR001 memiliki tenor 2 tahun dan menawarkan tingkat imbalan (kupon) sebesar 5,5% per tahun. Melalui penerbitan tersebut, dana pewakaf uang atas pembelian CWLS seri SWR001 akan dikelola untuk pembangunan negara yang mandiri. Total volume pemesanan pembelian SWR001 sebesar Rp14.912.000.000 (empat belas miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah) dengan menjangkau 1.041 wakif di seluruh Indonesia. Berdasarkan laporan dari DJPPR Kemenkeu, investasi atas pembelian CWLS seri SWR001 disalurkan untuk program sosial dan pemberdayaan ekonomi ummat (DJPPR, 2020). Karakteristik *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) seri SWR001 sebagai berikut.

Tabel 2

Karakteristik CWLS SWR001

Karakteristik	Keterangan
Nilai nominal	Rp14.912.000.000
Bentuk dan jenis SBSN	Tidak dapat diperdagangkan
Jenis akad	Wakalah
Tingkat imbalan/kupon	<i>Fixed</i> 5,5% per tahun
Tanggal pembayaran imbalan/kupon	Tanggal 10 setiap bulannya
Tanggal terbit	18 November 2020
Tanggal jatuh tempo	10 November 2022

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, data diolah 2020

Program sosial yang dilakukan meliputi penyaluran dalam bidang pendidikan (beasiswa mentari, sang surya, bakti guru, *Save Our School*; santunan guru honorer; pembangunan *Khadijah Learning Center*), kesehatan (penyediaan alat kesehatan Rumah Sakit Dhuafa, ambulans, 1000 alat bantu dengar, 20 klinik pesantren), kemiskinan (penyediaan rumah murah dhuafa), serta sarana ibadah (pembangunan Masjid Salman Rasidi di Bandung). Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi penyediaan benih padi untuk petani dhuafa di Kabupaten Lampung Tengah, penyediaan bibit sapi untuk peternak dhuafa di Kabupaten Trenggalek, serta pendampingan dan pelatihan 100 UMKM. Dengan demikian, perkembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) seri SWR001 di masa pandemi Covid-19 ini mampu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi serta sebagai upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi resesi ekonomi.

Pemerintah menerbitkan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ketiga yaitu dengan seri SWR002 dengan masa penawaran yang berlangsung mulai 9 April hingga 3 Juni 2021 dengan tenor 2 tahun yang akan jatuh tempo pada 10 Juni 2023. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel seri SWR001 memiliki tenor 2 tahun dan menawarkan tingkat imbalan (kupon) sebesar 5,57% per tahun (BSI, 2021).

Tabel 3**Karakteristik CWLS SWR002**

Karakteristik	Keterangan
Nilai nominal	Rp24.141.000.000
Bentuk dan jenis SBSN	Tidak dapat diperdagangkan
Jenis akad	Wakalah
Tingkat imbalan/kupon	<i>Fixed</i> 5,57% per tahun
Tanggal pembayaran imbalan/kupon	Tanggal 10 setiap bulannya
Tanggal terbit	9 Juni 2021
Tanggal jatuh tempo	10 Juni 2023

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, data diolah 2020

Adapun program sosial yang dibiayai oleh *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel seri SWR002 antara lain: klinik pesantren, beasiswa santri dhuafa, bantuan modal UMKM, bakti guru, beasiswa mentari, beasiswa sang surya, pemberdayaan UMKM, *Indonesia Mobile Clinic* (DJPPR, 2021). Berikut uraian kontribusi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel seri SWR002 dalam mendukung akselerasi belanja APBN.

Tabel 4**Program Sosial CWLS SWR002**

Mitra Distribusi	Nadzir	Program Sosial
PT. Bank Syariah Indonesia	LazisNU	Klinik pesantren, beasiswa santri dhuafa, bantuan modal UMKM
	LazisMU	Bakti guru, beasiswa mentari, beasiswa sang surya, pemberdayaan UMKM, <i>Indonesia Mobile Clinic</i>
PT. Bank Muamalat Indonesia	Baitulmaal Muamalat	Program beasiswa sarjana, program sahabat UMKM

PT. Bank CIMBNIaga Syariah	Dompot Dhuafa Republika	Pembiayaan pengobatan pasien dhuafa, bantuan biaya pendidikan siswa dhuafa
PT. Bank Permata Syariah	Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar	Bantuan pembiayaan peternak sapi desa binaan
PT. Bank Mega Syariah	Badan Wakaf Indonesia Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia	Pengadaan <i>Mobile Screening Retina</i> dan katarak Banten Beasiswa yatim dhuafa
PT. Bank Syariah Bukopin	Wakaf Bangun Nurani Bangsa Yayasan Global Wakaf	Pemberdayaan masyarakat melalui ternak hewan, renovasi gubug ngaji Wakaf modal UMKM, lumbung beras wakaf

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, data diolah 2020

Sebuah penelitian menguraikan bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) adalah salah satu produk canggih yang menggabungkan instrumen keuangan sosial dengan keuangan komersial syariah yang dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersedekah jariyah, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan perekonomian negara (Paul et al., 2021). Penelitian lain menyatakan bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dapat menjadi alternatif instrumen keuangan Islam yang berkelanjutan dan berpotensi menjadi sumber dana pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 (Rahman et al., 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) terbukti berperan dalam pembangunan ekonomi, khususnya infrastruktur. Infrastruktur yang telah dibangun yaitu di bidang kesehatan (Tanjung & Windiarso, 2021). Akan tetapi, dukungan masyarakat terhadap investasi pada *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ini masih cukup rendah.

Rendahnya dukungan masyarakat sejalan dengan perkembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang baru diterbitkan pertama kali oleh Kemenkeu pada tanggal 10 Maret 2020 lalu. Sebuah penelitian memperoleh hasil bahwa ada beberapa aspek yang mampu membentuk model literasi wakaf dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjadi donatur wakaf tunai. Aspek tersebut antara lain pendidikan, lingkungan yang mendukung, figur teladan yang baik, serta hasil dan manfaat yang nyata (Susilo et al., 2021). Penelitian lain menyatakan bahwa tantangan, adaptasi penduduk, kemampuan teknologi informasi dan literasi keuangan mempengaruhi kurangnya pertumbuhan dan perkembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) (Sukmadilaga et al., 2021). Untuk itu, pemerintah diharapkan untuk terus mengencangkan sosialisasi terkait *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ini.

Pemerintah dapat mendukung program sukuk wakaf dengan cara melakukan sosialisasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) kepada generasi muda melalui *platform digital*. Sehingga sasaran perkembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ini dapat didominasi oleh generasi muda yang dianggap mampu memberikan perubahan besar bagi kemajuan bangsa. Selain itu, sosialisasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) juga dapat dilakukan oleh perbankan syariah yang ditunjuk pemerintah sebagai mitra distribusi. Perbankan syariah tersebut dapat memperkenalkan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) kepada nasabah yang selama ini telah melakukan transaksi perbankan.

Dengan begitu, apabila seluruh masyarakat telah memahami mekanisme *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), maka dukungan masyarakat terhadap pembangunan negeri semakin tinggi. Untuk itu, mari kita mendukung upaya pemerintah dalam rangka menghadapi resesi ekonomi melalui kegiatan investasi pada *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) *Ritel*. Dengan demikian, kita dapat memberikan kontribusi dalam pemberdayaan perekonomian umat sekaligus sebagai pahlawan negara dalam mendukung akselerasi pembiayaan APBN untuk menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sudah berjalan selama beberapa tahun. Hal ini dapat diketahui dengan adanya penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) seri SW001, SWR001 dan SWR002. Hasil penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai bidang kehidupan, seperti dalam bidang pendidikan (beasiswa mentari, sang surya, bakti guru, *Save Our School*; santunan guru honorer), kesehatan (penyediaan alat kesehatan Rumah Sakit Dhuafa, ambulans, 1000 alat bantu dengar, 20 klinik pesantren), kemiskinan (penyediaan rumah murah dhuafa), serta sarana ibadah (pembangunan Masjid Salman Rasidi di Bandung). Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi penyediaan benih padi untuk petani dhuafa di Kabupaten Lampung Tengah, penyediaan bibit sapi untuk peternak dhuafa di Kabupaten Trenggalek, serta pendampingan dan pelatihan 100 UMKM. Akan tetapi, kurangnya literasi bagi masyarakat mengenai *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) menyebabkan hasil penerbitan instrumen tersebut kurang maksimal. Sehingga diperlukan adanya upaya bagi berbagai pihak untuk mendukung upaya pemerintah dalam rangka menghadapi resesi ekonomi melalui kegiatan investasi pada *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Dengan demikian, instrumen tersebut akan lebih efektif dalam mendukung akselerasi pembiayaan APBN di masa pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y. A. (2021). *Modul Memahami APBN dan APBD*. Universitas Gunadarma.
- Ali, M. A. bin. (2007). *Mu'jam amustholahaat al Iqtishadiyah wal Islamiah*. Maktabah al-Abikan.
- Anwar, S. (2007). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. RM Books.
- Baiti, E. N. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19. *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 37–70.
- Billah, Z. I. (2020). Membangun Kekuatan Ekonomi Negara melalui Instrumen Keuangan Sosial Publik Islam. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 72–89.
- BSI. (2021). *Sukuk Wakaf Ritel Seri 002 (SWR002)*. Bank Syariah Indonesia. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/info-nasabah/sukuk-wakaf-ritel-seri-002-swr-002>
- Dhewayani, R., & Jaharuddin. (2020). *Potensi dan Konsep Wakaf* (Kasimun (Ed.)). Hikam Pustaka.
- DJPPR. (2020). *CWLS Ritel seri SWR001 Tetap Diminati Investor di Tengah Kondisi Pandemi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2984/cwls-ritel-seri-swr001-tetap-diminati-investor-di-tengah-kondisi-pandemi>
- DJPPR. (2021). *CWLS Ritel Seri SWR002 Mengalirkan Berkah untuk Ekonomi Ummah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/3124/cwls-ritel-seri-swr002-mengalirkan-berkah-untuk-ekonomi-ummah>
- DJPPR. (2022). *Sukuk Wakaf*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/sukuk-wakaf/>
- Faiza, N. A. R. (2019). *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Fajariah, A. P., Sudana, S., & Rusydiana, A. (2020). Wakaf Uang untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Koperasi Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, 13(1), 1–15.

- Hafandi, A., & Handayati, P. (2021). Is Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Less Than Ideal According to Islamic Laws? *Studies of Applied Economics*, 39(12). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i12.6207>
- Hiyanti, H., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2020). Pengaruh Literasi dan Religiusitas terhadap Intensi Berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4(3).
- Idris, A. (2016). *Ekonomi Publik*. Deepublish.
- IslamicMarkets. (2021). *Annual Report Cash Waqf Linked Sukuk: Wakafku Investasiku*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://islamicmarkets.com/publications/indonesia-cash-waqf-linked-sukuk-annual-report-2021>
- Khoerudin, A. N. (2018). Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia. *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemsyarakatan & Kebudayaan*, 19(2), 1–10.
- Kunarjo. (2001). *Defisit Anggaran*. Majalah Perencanaan Pembangunan.
- Musari, K. (2019). The Evolution of Waqf and Sukuk toward Sukuk-Waqf in Modern Islamic Economy. *International Journal of 'Umranic Studies*, 2(1), 45–54.
- Mutia, F. (2020). *Indonesia Resmi Resesi, Ekonomi Kuartal III-2020 Minus 3,49 Persen*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?page=all>
- Paul, W., & Faudji, R. (2020). Cash Waqf Linked Sukuk dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang). *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4(2).
- Paul, W., Faudji, R., & Bisri, H. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk Alternative Development of Sustainable Islamic Economic Development Sustainable Development Goals (SDG's). *International Journal of Nusantara Islam*, 09(01), 134–148. <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.12215>
- Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. (2013). Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Prastiwi, A. I. E. (2017). Perkembangan Instrumen Sukuk dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Surakarta*, 3(3).

- Putri, M. M., Tanjung, H., & Hakiem, H. (2020). Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP). *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 204–225.
- Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. *MAZAWA: Management of Zakah and Waqf Journal*, 1(2), 145–161.
- Rahman, M. I. F., Nurwahidin, & Adnan, N. (2021). Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1).
- Rahmansyah, W. (2021). Pegakuan Aset Wakaf oleh Wakif Perusahaan dalam Produk Cash Wakaf Linked Sukuk (Sinkronisasi Laporan Keuangan Nadzhir dan Wakif dalam PSAK 112). *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 9(1), 94–107.
- Saptono, I. T. (2018). Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial Studi Wakaf Linked Sukuk. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(2).
- Siregar, K. H., Manday, C. C. R., & Efendi, B. (2021). Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Instrumen Ketahanan Pangan Indonesia SDGs. *JEPA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(2).
- Sukmadilaga, C., Puspitasari, E., Yunita, D., Nugroho, L., & Ghani, E. K. (2021). Priority Factor Analysis on Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Utilization in Indonesian Shariah Capital Market. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(5).
- Suparmoko, M. (1997). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. BPFE.
- Susilo, A., Abdullah, N. I., & Embi, N. A. C. (2021). International Islamic Economic System Conference (I-iECONS 2021). *The International Islamic Economics System Conference*.
- Tanjung, H., & Windiarto, A. (2021). Role of Cash Waqf Linked Sukuk in Economic Development and International Trade. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(2), 275–290.
- Waluyo, J. (2006). Pengaruh Pembiayaan Defisit Anggaran terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Simulasi Model Ekonomi Makro 1970-2003. *KINERJA*, 10(1).

Nexus between Intellectual Capital and Profitability: Data Evidence From The Indonesian Consumer Goods Industry

Eko Siswoyo

ekosiswoyokun@gmail.com

Department of Sharia Economics, Faculty of Postgraduate,
State Institute Islamic Studies (IAIN) Kudus Indonesia

Abstract

The company's performance appraisal is important because it can find out its financial condition which can then be used as evaluation material by the company to be used as the basis for making appropriate decisions, policies or strategies. So that the company can still grow and develop in quality and quantity. The purpose of this study was to determine the effect of Value Added Intellectual Capital (VAIC™) on profitability in measuring the performance of companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI). The research method is purposive sampling using multiple regression analysis. The results of this study simultaneously prove that there is a significant positive effect of Intellectual capital on all profitability variables (Return on assets, Return on equity and Net profit margin). In addition, more intensive companies show better financial performance with the disclosure of intellectual capital. The Result of this study underscore the importance of creating and strengthening disclosure of intellectual capital in public companies in Indonesia.

Keywords: *Intellectual Capital, Return On Assets, Return On Equity and Net Profit Margin*

INTRODUCTION

Business competition in today's modern era is getting tougher, making the management of intellectual capital have an important role in achieving the objectives of the company's activities. The company's goals in business competition have begun to shift, previously based on the main production activities only focused on the production of finished goods, but for the current condition the main focus of production activities is in the process of producing finished goods according to knowledge, and then the creation of goods and services (Petrenko et al., 2019). In today's economic conditions, as a result of the transition from a production economy to a knowledge economy, intellectual assets, meaning the knowledge, abilities, values, and methods that are unique to enterprises, have become the main "factor of production of economic wealth" compared to physical assets, such as land, equipment, capital, etc. (Seetharaman et al., 2002). This intellectual asset, which can be converted into profits but is not reflected in the company's financial statements, is called Intellectual capital (IC) (Hunter et al., 2005). This explanation covers a broad area ranging from the knowledge and skills that reside in the employee to the knowledge that remains in the company when the employee leaves the job (Chang and Hsieh, 2011). To be able to offer high-value products and quality services, companies must invest in IC and manage them efficiently (Chang, 2007; Wang, 2006).

Based on several models and approaches (Edvinsson, Malone 1997; Survilaite et al. 2015; Macerinskiene, Aleknavičiute 2015) regarding intellectual capital and intangibles have been identified and managed as an effort to improve the performance and profitability of the company. These intangible resources are included in the company's financial statements or disclosed in complementary reports (Lopes 2010) to increase the relevance of the company's value. Therefore, the management of intellectual capital will have an impact on performance in terms of competitiveness, as well as financial income. According to Kianto et al. (2013: 119) "Intangible management is a key managerial mechanism for companies in the knowledge economy". Generally the ratio used in assessing the company's performance is Return on assets or (ROA). In addition, profitability can be seen from the ratio of Return on equity (ROE) or Net profit margin (NPM). Tudor et al. (2014) stated that the level of intangible assets has a direct relationship with profitability by comparing the ratio of intangibles to total assets and other profitability measures such as Return of Assets (ROA), Return on equity (ROE) and Net profit margin (NPM).

Several related studies that have been carried out by previous researchers include, Research by Ranjit (2020) reveals Value Added Intellectual Capital (VAIC™) positively affects company profitability as measured by return on assets (ROA). Marcelina (2018) explains the positive influence of Intellectual capital on Return on assets (ROA). Hermawan & Mardiyanti (2016) stated that Intellectual Capital (VAIC™) has a significant positive effect on Return on assets (ROA) and Return on equity (ROE). Kevin (2019) shows the results of research that Intellectual capital as measured by (VAIC™) has a significant effect on financial performance, especially on Return on assets (ROA) and Return on equity (ROE). Research Chen et al. (2005) and Tan et al. (2007) Intellectual capital has a significant effect on changes in Return on equity (ROE) but another study by Firer and Williams (2003), that Intellectual capital has no significant effect on changes in Return on equity (ROE). Research by Hermaya (2020) states that there is a significant influence of Intellectual Capital on the Company's Net Profit Margin. Niyash (2017) there is a positive and statistically significant relationship (VAIC™) with profitability (ROE, ROA, NPM). Different research results are stated by Dian (2021) that Intellectual capital does not have a positive impact on Net profit margin.

The manufacturing industry, especially the consumer goods sector, is an important part of companies or organizations that carry out activities to be able to operate smoothly and be able to innovate from the existence of resources. Intellectual capital which is proxied based on intellectual value added coefficient (VAIC™), working value added capital (VACA), value added human capital (VAHU), and value added structural capital (STVA) has a significant positive effect on financial performance, and shows that Companies that are able to maintain a reputation will tend to use intellectual capital efficiently and use it as a tool to predict the value of the company in the future (Chen, 2005). This study specifically aims to determine whether the company's reputation variable can mediate the influence of intellectual capital on company profitability. The analysis in this study uses a sample of 29 companies with categories in the consumer goods industry sector and listed on the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) 2020. After this introduction, the research discussion is structured following a literature review on Intellectual Capital research, Value Added Intellectual Capital (VAIC™) including criticism and suggestions. The research methodology, which includes sample selection, hypothesis development, research methods, and variable measurement, is then presented. Data analysis includes descriptive analysis, correlation analysis, and hypothesis testing. The conclusions and implications of the research as well as the limitations and potential for further research will then be discussed

RESEARCH FRAMEWORK

Profitability is one indicator of a company's performance. To generate profits, companies must carry out operational activities. The relationship between the resources that support these activities can be shown by the profitability ratio. Conditions of liquidity, activity, profitability of the company will affect changes in profit to be achieved by a company. Profitability ratio is used to measure the overall operational effectiveness of the company. A high profitability ratio indicates the company's operational activities are getting better. on the other hand, a low profitability ratio will have an impact on the company's operational activities that have not been effective. The calculation of the profitability ratio is by comparing the ratio of intangibles to total assets and other profitability measures based on Return of Assets (ROA), Return on equity (ROE) and Net profit margin (NPM)

Return on assets can be calculated by dividing net income (net income after tax) by the average total assets or total assets of a company. The higher the results indicate the more productive and efficient management in utilizing the available economic resources (Warrad, 2015). Return on Equity (ROE) is the ratio of net profit after tax measured by own capital. ROE is used to measure the rate of return on the company's equity to benefit from the use of equity owned by the company. This ratio also shows how far the company's ability to obtain profits can be obtained by shareholders. The higher the ROE, the more efficient the company uses its own capital to generate profits for shareholders (Kasmir, 2008). Net Profit Margin (NPM) is a ratio that calculates profit by comparing profit after tax with sales and shows the company's net income on sales. The larger the NPM ratio indicates that the greater the ability to generate net profit before tax. This shows that the company's performance is also increasing. NPM is used as a proxy of aspect management on the grounds that all company management activities will influence and lead to company profits (Kasmir, 2018). Profitability ratios are related to the company's revenue and performance. A high profitability ratio indicates a company that has high profit growth prospects. Based on this understanding, this research framework can be described as follows.

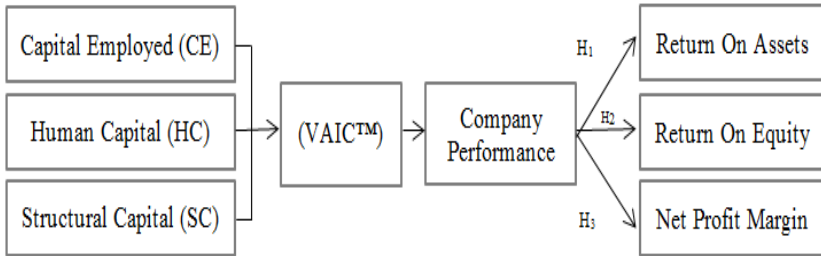


Figure 1. Research Framework

HYPOTHESIS

Based on the research framework model that has been made, the hypotheses in this study are as follows.

H1 : Value Added Intellectual Capital (VAIC™) has a positive effect on Return on assets (ROA)

H2 : Value Added Intellectual Capital (VAIC™) has a positive effect on Return on equity (ROE)

H3 : Value Added Intellectual Capital (VAIC™) has a positive effect on Net profit margins (NPM)

METHOD

This study uses secondary data from annual financial reports obtained from 29 consumer goods industry sub-sector companies listed on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) in 2020 using purposive sampling method. The independent variable in this study is Value Added Intellectual Capital (VAIC™). Intellectual capital consists of intangible assets that can be converted into profit (and) value but are not reflected in the company's financial statements (Bontis, 1998; Hunter, 2005). Researchers can observe from different elements based on intellectual capital depending on the research objectives. Generally, classifying intellectual capital into three components: Human capital (skills, experience, and competence of employees); Structural capital (process, method, and owned brand) by the company); and Relational

capital (relational network). Data analysis techniques using multiple regression analysis, such as: the analysis of requires the researcher to fulfill some underlying assumptions. For this reason, the classical assumption test was first carried out, and it has met the requirements. The test aims to determine whether there is an effect of changes in company profitability by calculating the ratio of Intellectual capital to Return on assets (ROA), Return on equity (ROE) and Net Profit Margin (NPM). The multiple linear regression equation is as follows:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$

Description:

Y : Value Added Intellectual Capital (VAIC™)

A : Constant

B : Independent variable regression coefficient

X1 : Return on assets (ROA)

X2 : Return on equity (ROE)

X3 : Net Profit Margin (NPM)

ϵ : Residual

RESULT AND DISCUSSION

This study measures Intellectual capital represented by Value Added Intellectual Capital (VAIC™), profitability is represented by Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), and Net Profit Margin (NPM) while the dependent variable in this study is company performance.

RESULT

Based on the descriptive statistical analysis in table 1 shows that there are 29 research samples obtained from www.idx.co.id with the sample criteria coming from companies in the consumer goods industry sector and have been listed on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI). Here are the results of the calculation:

Tabel 1. Descriptive Statistics Analysis

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IC	29	1.32	6.25	2.4808	1.01431
ROA	29	.00021	.72	.1133	.14210
ROE	29	.00084	1.47	.2384	.36040
NPM	29	.00007	.68	.1411	.13845
Valid N (listwise)	29				

Source: (processed data, 2021)

The results show that the IC standard deviation is 1.01431 with a minimum value of 1.32, a maximum value of 6.25 and an average of 2.4808. Normal IC sample data, namely the average value is greater than the standard deviation. Return on assets (ROA) obtained a standard deviation of 0.14210 with a minimum value of 0.00021, a maximum value of 0.72 and an average of 0.1133. ROA sample data is not normal because the average value is lower than the standard deviation. Return on equity (ROE) is obtained with a standard deviation of 0.36040 with a minimum value of 0.00084, a maximum value of 1.47 and an average of 0.2384. ROE sample data is not normal due to the average value below the standard deviation. While the results of the calculation of Net Profit Margin (NPM) show a standard deviation of 0.13845 with a minimum value of 0.00007, a maximum value of 0.68 and an average of 0.1411. Normal data because the standard deviation is greater than the average value.

Data Normality Test

This test uses the Probability test with normal plots, histogram graphs and the Kolmogorov Smirnov test, the results of which are shown in the following figure.

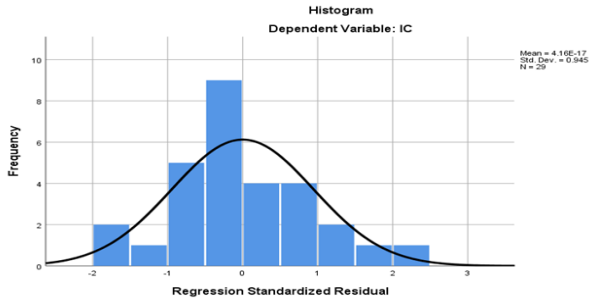


Figure 2. Histogram of Normality

Based on Figure 2 shows that the residuals are normally distributed and symmetrical, do not deviate to the right or left, which means it can be concluded that the research data is normally distributed and can be seen on the normal graph on the probability plot, it can be seen that the points (data) spread around the diagonal line and spread slightly following the direction of the diagonal line and spread slightly following the direction of the diagonal line, so it can be concluded that the regression model in this research equation meets the assumption of data normality. After obtaining normality data from the Kolmogorov-Smirnov test, the next step is to test whether the data is normally distributed or not, Kolmogorov-Smirnov test is carried out. Based on the Kolmogorov-Smirnov test, the value is 0.124 and the asymp.sig (2-tailed) value is 0.200 > Level of Significant = 0.05 which means the residual value is normally distributed or the data has met the classical assumption of normality.

Autocorrelation Test

The autocorrelation test was carried out using the Durbin Watson (DW) method. In the Durbin-Watson test, a model in linear regression has rules that require an intercept (constant) and there is no lag variable on the independent variable. Here are the test results:

Tabel 2. Durbin-Watson Autocorrelation Test Results

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.879	.772	.745	.51219	1.917

Source: (processed data, 2021)

Based on the test results, the Durbin-Watson value is 1.917. If the D-W number is between -2 to +2, it means that there is no autocorrelation and has been separated from autocorrelation. Thus, it can be concluded that in the data of this study there are no symptoms or problems of autocorrelation.

Heteroscedasticity Test

Heteroscedasticity test is used to determine whether in the regression model there is an inequality of variance from the residual of one observation to another observation. If the variance from the residual of one observation to another observation remains constant, it is called homoscedasticity and if it's different it's called heteroscedasticity. A good regression model is a model that does not have heteroscedasticity. The presence of heteroscedasticity symptoms can be detected by looking at the graph plot between the predicted value of the dependent variable (ZPRED) and its residual (SRESID). Detection of the absence of heteroscedasticity can be done by looking at the possibility of the presence or absence of heteroscedasticity can be done by looking at the absence of certain patterns and scatter diagrams between SRESID and ZPRED where the Y axis is Y prediction.

Table 3. Glejser Test Results

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.176	.073		2.432	.023
ROA	1.113	.743	.516	1.499	.146
ROE	-.139	.276	-.164	-.503	.619
NPM	.700	.399	.316	1.753	.092

Source: (processed data, 2021)

The results show that from all research variables, the significance value is still above 0.05 (5%), with each value of 0.146 ROA, 0.619 ROE and 0.092 NPM which indicates that there are no symptoms of heteroscedasticity in the regression model in this study. Thus, it can be concluded that there is no heteroscedasticity of the regression model in this study, so that the regression model is feasible to use to predict the influence of Intellectual capital in the consumer goods industrial sector companies that have been listed on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) based on its effect on Return on assets, Return on equity and Net profit margin.

Regression Analysis

Multiple regression analysis was calculated using the SPSS program. This calculation is performed to determine the relative contribution of each independent variable in explaining its effect on the dependent variable. Multiple linear regression results as following:

$$Y = 0.176 + 1.113(X1) + -.139(X2) + 0.700(X3) + \varepsilon$$

The results of the regression equation obtained are then explained as follows:

1. The Return On Assets coefficient of 1.113 states that if the Return On Assets increases by one unit, the change in the profitability ratio will increase by 1.113 or 113%.
2. The Return On Equity coefficient of (-.139) states that if the Return On Equity decreases by one unit, the change in the profitability ratio will decrease by (-.139) or 13.9%.
3. The coefficient of Net Profit Margin of 0.700 states that if the Net Profit Margin increases by one unit, the change in the profitability ratio will increase by 0.700 or 70%

Hypothesis test

Determinant Coefficient

The coefficient of determination (R²) generally measures whether the ability of the equation model to explain variable profitability ratios. The coefficient of determination is between zero and one. Here are the results of the coefficient of determination (R²),

Table 4. Determinant Coefficient Test Results

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.879 ^a	.772	.745	.51219

a. Predictors: (Constant), NPM, ROE, ROA

b. Independent Variable: IC

Source: (processed data, 2021)

Based on the table above shows the adjusted R Square the result is 0.772. Because the value is positive, then the value is considered 0. This means that the variables Return On Assets, Return On Equity and Net Profit Margin can explain the variation of the profitability ratio that changes.

T Test

The results of the t-test contained in table 11 above explain the test results of the influence of Intellectual capital on several dependent variables.

Table 5. T Test Result

Model	t
(Constant)	2.432
ROA	1.499
ROE	-.503
NPM	1.753

Source: (processed data, 2021)

1. Return on Assets variable with a t value of 1.499 and a significance level of 0.146 greater than 0.005 ($\alpha = 5\%$). So the first hypothesis (H1) can be said that Intellectual capital in the first hypothesis is accepted and has a significant positive effect on return on assets.
2. The Return on Equity variable with a t value of -.503 and a significance level of 0.619 greater than 0.005 ($\alpha = 5\%$). So the second hypothesis (H2) can be said that Intellectual capital in the second hypothesis is accepted and has a significant positive effect on return on equity.
3. Variable Net Profit Margin with a t value of 1.753 and a significance level of 0.092 greater than 0.005 ($\alpha = 5\%$). So the third hypothesis (H3) can be said that Intellectual capital in the third hypothesis is accepted and has a significant positive effect on the net profit margin.

DISCUSSION

Based on research data that has been obtained from the variables Intellectual capital, Return on assets, Return on equity and Net profit margin. There is a significant positive influence of Intellectual capital on consumer goods industrial sector companies listed on the 2020 Indonesian Sharia Stock Index (ISSI).

The Effect of Intellectual Capital (VAIC™) on Return On Assets

Return on Assets indicates how far the company is in using its assets to generate profits. ROA is often referred to as the productivity ratio which is the most important measuring tool for efficiency and productivity in a company. Based on the results of the study, the return on assets ratio with a t value of 1.499 and a significance level of 0.146 is greater than 0.005 ($\alpha = 5\%$). It can be said that Intellectual capital has a significant positive effect on return on assets. These results are in accordance with research by Ranjit (2020) which revealed that Value Added Intellectual Capital (VAIC™) positively affects company profitability as measured by return on assets (ROA) and Sagara's research (2018) shows that there is a significant influence of Intellectual capital on company performance. which is proxied by Return on assets. In addition, research conducted by Zhang (2021) indicates that Value Added Intellectual Capital (VAIC™) has a positive effect on ROA and ROE among firms from the financial industry. Thus, companies that have advantages in intangible assets can simultaneously describe a high average net profit and high return on assets as well.

The Effect of Intellectual Capital (VAIC™) on Return On Equity

Return On Equity includes the company's profitability ratio, where profitability is the company's ability to generate profits. ROE is used to measure the rate of return on the company's equity to benefit from the use of equity owned by the company. Based on the results of the study, it was found that the Return on Equity ratio with a t value of -.503 and a significance level of 0.619 greater than 0.005 ($\alpha = 5\%$) said that Intellectual capital had a significant positive effect on return on equity. The results of this study are in accordance with the research of Chen et al. (2005) and Tan et al. (2007)

stated that Intellectual capital has a significant effect on changes in Return on equity. The same thing is explained by Budi's research (2018) revealing the results of his research related to Intellectual capital having a significant effect on Return on equity. Adesanmi (2021) describes the results of research that human capital efficiency and capital employed efficiency have a significant positive effect on return on equity. Thus, it can be concluded that the ratio of high return on equity will illustrate that the company can manage its capital well to earn a profit so that investors will be more interested in placing their capital in the company. This high investor interest will also increase the share price of the company in the market.

Effect of Intellectual Capital (VAIC™) on Net Profit Margin

Net Profit Margin can measure a company's ability to generate net profit before taxes in terms of income from operating activities. In terms of relation to investment issues, where investors have the right to choose a company that is more attractive. Interestingly a company are those that enjoy high profit margins and generate cash returns for Investors. By choosing a company with a high level of profit, it can make it easier for companies to invest in. Based on the results of the research, the Net Profit Margin with a t value of 1.753 with a significance level of 0.092 is greater than 0.005 ($\alpha = 5\%$) so that Intellectual capital has a significant positive effect on the net profit margin. This study is in accordance with the results obtained by Hermaya (2020) which states that there is a significant influence of Intellectual Capital on the company's Net Profit Margin. Research by Jian (2021) proves that intellectual capital has a significant positive effect on the company's financial performance through net profit margin. Ilker (2018) explains that the company's performance as measured by intellectual capital has a significant positive effect on the net profit margin. The results of this study are in accordance with stakeholder theory which explains that companies must provide benefits to stakeholders. By seeing that NPM can affect the company's profitability, internal parties can implement several policies to continue to maintain the company's continuity. This result is in line with the results of previous studies which found that NPM has a positive effect on profitability, which means that increasing the value of NPM will increase bank profitability. The higher the NPM value means that profitability increases so that investors are interested in investing.

CONCLUSION

Based on the results of research and discussion that have been presented in previous chapters, it can be concluded as follows:

1. Based on the partial test (t test) between Intellectual Capital and Profitability, the results show that the return on assets ratio has a significant effect on changes in the profits of consumer goods industry companies listed on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI).
2. Based on the partial test (t test) between Intellectual capital and profitability, it was found that Return On Equity had a significant effect on changes in the profitability of consumer goods industry companies listed on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI).
3. Based on the partial test (t test) between Intellectual capital and profitability, it was found that Net Profit Margin had a significant effect on changes in the profitability of consumer goods industry companies listed on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI).

SUGGESTION

From the research results that have been obtained, the researchers provide several suggestions for the sustainability of future research, namely as follows:

1. Company management must pay attention to the ratio of return on assets, return on equity and net profit margin so as not to experience inconsistencies so that it does not affect the predict earnings changes in the next few years.
2. For further researchers, it can be considered to conduct research related to the influence of Intellectual capital from various different sectors on all indicators of company performance measurement in the following year.

REFERENCES

- Adesanmi Timothy Adegbayibi. 2021. Intellectual Capital and Firms' Performance Measures of Listed Non-Financial Companies in Nigeria. *The Journal of Accounting and Management* Vol. 11 No. 2.
- Artinah, Budi & Ahmad Muslih. (2011). The Effect of intellectual capital to capital gain. *Jurnal Spread*, Vol. 1 No. 1.
- Budi Yuda Prawira and Rahmat Setiawan. 2018. Intellectual Capital and Firm Performance Evidence from Indonesia. 2nd International Conference Postgraduate School.
- Bontis, N. Intellectual capital: An exploratory study that develops measures and models. *Manag. Decis.* 1998, 36, 63–76.
- Dian Efriyenty. 2021. Analysis of Human Capital and Intellectual Capital Disclosure of The Margin on Net Income. *Enrichment: Journal of Management*. Volume 11, Issue 2, May. e-ISSN 2087-6327. p-ISSN 2721-7787.
- Hunter, L., Webster, E. and Wyatt, A. (2005), "Measuring intangible capital: a review of current practice", *Australian Accounting Review*, Vol. 15 No. 2, pp. 4-21.
- Chang, W.S. and Hsieh, J.J. (2011), "Intellectual capital and value creation is innovation capital a missing link?", *International Journal of Business and Management*, Vol. 6 No. 2, pp. 3-12.
- Chang, S.L. (2007), "Valuing intellectual capital and firms' performance: modifying value added intellectual coefficient (VAIC) in Taiwan IT industry", PhD thesis, Golden Gate University, San Francisco, CA, August.
- Chen, M.C., S.J. Cheng, & Y. Hwang. (2005). An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms' market value and financial performance. *Journal of Intellectual Capital*. Vol. 6 No.2. pp. 159-176.

- Edvinsson, L.; Malone, M. S. 1997. Intellectual capital: realizing your company's true value by finding its hidden brainpower. New York: Harper Collins Publishers, Inc.
- Firer, S. and Williams, S.M. (2003), "Intellectual capital and traditional measures of corporate performance", *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 4 No. 3, pp. 348-360.
- Hermaya Ompusunggua and Dian Efriyenti. 2020. Analysis of Intellectual Capital on Net Profit Margin in Insurance Companies. SNISTEK 3. ISBN 978-602-52829-2-8.
- Hermawan, S., & Mardiyanti, U. I. (2016). Intellectual Capital and Financial Performance in High IC Intensive Manufacturing Companies. *Journal of Management and Business*, 1(1), 70–78.
- Ilker Yilmaz and Goksel Acar. 2018. The Effects of Intellectual Capital on Financial Performance and Market Value: Evidence from Turkey. *Eurasian Journal of Business and Economics* 2018, 11(21), 117-133.
- Jian XU and Feng LIU. 2021. Nexus Between Intellectual Capital And Financial Performance: An Investigation Of Chinese Manufacturing Industry. *Journal of Business Economics and Management* ISSN 1611-1699 / eISSN 2029-4433. Volume 22 Issue 1: 217–235.
- Kasmir.(2008). *Financial Statement Analysis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kianto, A.; Andreeva, T.; Pavlov, Y. 2013. The impact of intellectual capital management on company competitiveness and financial performance, *Knowledge Management Research & Practice* 11: 112–122.
- Kevin Deniswara, Ratu Marwaah FU, Ang Swat L, Willnaldo. 2019. Intellectual Capital Effect, Financial Performance, and Firm Value: An Empirical Evidence from Real Estate Firm, in Indonesia. Vol. 20 No. 1 (2019): The Winners.
- Lopes, I. T. 2010. Towards a complementary intangibles reporting approach, *Measuring Business Excellence* 14(4): 24–34.
- <http://dx.doi.org/10.1108/13683041011093730>

- Marcellina Yovita and Gia Kardina Prima Amrania. 2018. The Influence of Intellectual Capital to Market Value with Return on Assets as Intervening Variable. *Journal of Accounting Auditing and Business – Vol.1, No.2.*
- Niyas Nanath and Kavida Vijayasundaram. 2017. Intellectual Capital Efficiency and Financial Performance of IT Companies in India: A Panel Data Analysis. *Asian Journal of Management* 8(4):937.
- Petrenko, Y., Vechkinzova, E., Antonov, V. (2019). Transition from the industrial clusters to the smart specialization of the regions in Kazakhstan. *Insights into Regional Development*,
- Ranjit Tiwari. 2020. with interaction effects: panel data evidence from the Indian healthcare industry. *Journal of Intellectual Capital*. DOI 10.1108/JIC-05-2020-0137.
- Sagara, Y., & Chairunissa, C. (2018). The Effect of the Intellectual Capital Measurement, the Corporate Social Responsibility Disclosure and the Firm's Capital Structure on the Financial Performance. *KnE SocialSciences*,3(8),167-182. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2507>.
- Seetharaman, A., Helmi Bin Zaini Sooria, H. and Saravanan, A.S. (2002), "Intellectual capital accounting and reporting in the knowledge economy", *Journal of IntellectualCapital*, Vol. 3 No. 2, pp. 128-148.
- Survilaitė, S.; Tamošiūnienė, R.; Shatrevich, V. 2015. Intellectual capital approach to modern management through the perspective of company's value added, *Business: Theory and Practice* 16(1): 31–44.
- Tan, H.P., D. Plowman, & P. Hancock. (2007). Intellectual capital and finance return of companies. *Journal of Intellectual Capital*. Vol. 8 No. 1. pp. 76-95.
- Tudor, A. T.; Dima, S.; Dima, B.; Ratiu, R. V. 2014. The linkage between intangibles and profitability, *Annals Universitatis Apulensis Series Oeconomica* 16 (1): 2 83 –293.
- Wang, J. (2006), "Utilizing Skandia Navigator system and Ohlson model to evaluate the intellectual capital performance for Taiwan electronic corporations", *The Business Review*, Vol. 6 No. 1, pp. 186-192.

Warrad, L. (2015), "Return on asset and return on equity effects of net operating cycle: Jordanian study. Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 6 No. 14, pp. 89-95.

Zhang X-B, Duc TP, Burgos Mutuc E and Tsai F-S (2021) Intellectual Capital and Financial Performance: Comparison With Financial and Pharmaceutical Industries in Vietnam.

www.idx.go.id (Accessed November 2021).

www.sahamok.com (Accessed November 2021).

Permasalahan dan Krisis Pendidikan Islam Hari Ini dan di Masa Depan

Nuris Fakhmi Zakky

fahmizakky@gmail.com

Pascasarjana IAIN Kudus

Abstrak

Strategi dan taktik Islam harus lebih efektif dan efisien, artinya pedagogis, sosiologis, dan budaya. Oleh karena itu, nafas Islam dalam pribadi seorang Muslim sangat penting untuk dapat menggerakkan perilaku yang diperkuat dengan pengetahuan yang luas sehingga dapat memberikan jawaban yang tepat dan bermanfaat atas tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam pendidikan Islam tidak akan lepas dari prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari prinsip-prinsip dasar Alquran. Perencanaan untuk pendidikan masa depan harus mencakup tiga karakteristik utama suatu masyarakat, yaitu: masa depan sosial, masa depan tekno, dan masa depan biodata. Selain itu, strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan ke depan meliputi: (1) Membangun paradigma Pendidikan Islam yang sebenarnya; (2) Melaksanakan Pendidikan Afektif; dan (3) Meningkatkan kualitas tenaga pengajar.

Kata kunci: *Permasalahan Pendidikan, Krisis Pendidikan, Pendidikan Islam*

Abstract

Islamic strategies and tactics must be more effective and efficient, meaning pedagogical, sociological, and cultural. Therefore, the Islamic breath in the person of a Muslim is essential to be able to move the behaviour reinforced with extensive knowledge so that he can provide appropriate and useful answers to the challenges of the development of science and technology, and in Islamic education will not be separated from Islamic principles sourced from the basic principles of the Koran. Planning for future education must include three main characteristics of a society, namely: the future of socio, the future of techno, and the future of bio. Besides, Islamic education strategies in facing future challenges include: (1) Building an actual Islamic Education paradigm; (2) Carry out Affective Education; and (3) Improving the quality of teaching staff.

Keywords: *education problem, education crisis, Islamic education*

Pendahuluan

Istilah Pendidikan Islam digunakan dalam dua cara, yaitu: pertama, semua kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga untuk menanamkan nilai-nilai Keislaman pada beberapa siswa. Kedua, seluruh lembaga pendidikan, yang didasarkan pada semua program dan kegiatan menurut pandangan dan nilai-nilai Islam. (Arifin, 1991)

Sebagai negara mayoritas muslim, pendidikan Islam memiliki peran yang sangat signifikan di Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan karakter, sehingga masyarakat yang diciptakan merupakan cerminan peradaban Islam. Dengan demikian Islam benar-benar menjadi rahmatan lil-alamin, berkah bagi seluruh alam. Dapat dipahami bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi manusia yang dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dan untuk dapat mempersiapkan siswa untuk hidup bahagia di dunia dan surga tidak hanya dengan memberikan pendidikan publik tetapi juga dengan memberikan dan menanamkan nilai-nilai agama Islam pada siswa-siswa tersebut sehingga dengan pendidikan agama dapat mengendalikan semua perilaku mereka di dunia dan dapat menyelamatkan hidupnya di akhirat. Sebagai firman Allah dalam Q.S. Al-Qashash 28: 77:

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُمْسِدِينَ (القصص: ٧٧)

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan

Namun, hingga saat ini pendidikan Islam masih menghadapi masalah yang kompleks, mulai dari masalah konseptual-teoritis hingga masalah operasional-praktis. Persoalan yang belum terselesaikan membuat pendidikan Islam tertinggal dari lembaga pendidikan lain, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pendidikan Islam terkesan sebagai pendidikan “kelas dua”. Tak heran jika kemudian banyak generasi muslim yang justru bersekolah di lembaga pendidikan non-Islam.

Selain itu, orientasi pendidikan Islam yang tumpang tindih melahirkan masalah yang signifikan dalam dunia pendidikan, mulai dari masalah filosofis hingga masalah metodologis. Selain itu, budaya Islam menghadapi tantangan berat terkait perubahan masyarakat yang terus melaju kencang, terutama perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah tidak peduli lagi dengan sistem agama. (Zamroni, 2000)

Pada kondisi saat ini, pendidikan Islam berada dalam posisi determinisme historis dan realisme. Dalam arti bahwa satu sisi umat Islam berada dalam roman sejarah di mana mereka bangga memiliki pemikir atau ilmuwan besar dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan peradaban dan sains dunia serta menjadi transmisi bagi harta karun Yunani. Namun, di sisi lain, mereka menghadapi kenyataan bahwa pendidikan Islam tidak berdaya dihadapkan dengan realitas masyarakat industri dan teknologi modern.

Sistem pendidikan Islam yang ada hanya bekerja pada ilmu-ilmu agama. Di sisi lain, generasi muslim yang menempuh pendidikan di luar sistem pendidikan Islam hanya mendapatkan sebagian kecil dari segi budaya Islam atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan ilmu-ilmu Islam.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan artikel atau karya ilmiah yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, desain pembelajaran, model pembelajaran. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan mengamati fenomena di Indonesia, merumuskan masalah yang terjadi, dan kemudian berhubungan dengan literatur yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara tri-formulating (gabungan) literature review dengan mengumpulkan data, data yang sangat verbal, melalui buku, artikel, catatan, dan berbagai literatur ilmiah lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara induktif untuk menghasilkan grounded theory, sebuah teori yang muncul dari data non-hipotesis (Setyosari, 2013). Menulis langkah-langkah untuk mempersiapkan artikel ini: 1) Memilih masalah; 2) studi pendahuluan; 3) merumuskan masalah; merumuskan tujuan; 4) melakukan penelitian; 5) melakukan diskusi; 6) merumuskan kesimpulan yang diambil dari hasil analisis dan rekomendasi untuk penulis lain.

Permasalahan pendidikan Islam saat ini berkaitan dengan tertinggalnya pembelajaran islami, yang disebabkan oleh penyempitan pemahaman pengetahuan Islam, yang hanya pada aspek kehidupan Sahrawi yang terpisah dari kehidupan duniawi, atau aspek kehidupan spiritual yang terpisah dari kehidupan jasmani. Maka perbedaan dan pemisahan antara apa yang dianggap agama dan bukan agama akan terlihat. Perspektif ini, yang terpisah satu sama lain, disebut metode pandan dikotomi.

Penyebab pendidikan Islam ditinggalkan saat ini karena pendidikan Islam masih memisahkan akal dan wahyu, serta yang membutuhkan dan mengingat. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan paradigmatik, yaitu kurangnya perkembangan konsep humanisme dalam pendidikan Islam pada saat yang sama karena budaya Islam lebih berorientasi pada gagasan 'abduallah (manusia sebagai hamba), bukan sebagai konsep khalifatullah (manusia sebagai khalifatullah (manusia sebagai khalifah Allah). Selain itu, orientasi pendidikan Islam yang tumpang tindih melahirkan masalah yang signifikan dalam dunia pendidikan, mulai dari masalah filosofis hingga masalah metodologis. Selain itu, budaya Islam menghadapi tantangan berat terkait perubahan masyarakat yang terus melaju kencang, terutama perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah tidak peduli lagi dengan sistem agama. (Sanaky, 1997)

Menurut Baharudin, ada beberapa kelemahan sekaligus permasalahan pendidikan Islam yang dihadapi era globalisasi, yaitu: (1) Kualitas lembaga pendidikan Islam pada umumnya masih menyedihkan. Meskipun ada beberapa lembaga pendidikan Islam seperti madrasah yang telah mampu melampaui kualitas sekolah negeri, secara umum kualitas lembaga pendidikan Islam tidak memadai; (2) Citra lembaga pendidikan Islam relatif rendah. Adalah fakta bahwa dalam peringkat kelulusan lembaga pendidikan Islam umumnya berada di bawah peringkat sekolah umum; (3) Kualitas dan kuantitas guru yang tidak memadai. Guru adalah kunci keberhasilan dalam pendidikan. Jika guru berkualitas buruk dan rasio siswa tidak memadai, hasil pendidikan secara alami akan rendah juga; (4) Gaji guru secara umum masih kecil; (5) Latar belakang mahasiswa di lembaga pendidikan Islam pada umumnya dari keluarga kelas menengah ke bawah; (6) Meningkatnya tuntutan persaingan dan kompetensi; (7) Gempuran pengaruh globalisasi asing di bidang ekonomi, politik dan budaya yang cenderung menggeser budaya keagamaan nasional. Hal ini ditandai dengan orientasi global yang semakin menonjol di bidang kesenangan, mode, dan makanan di kalangan remaja kita; (8) Kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan antara lain dalam bentuk penyalahgunaan narkoba yang meluas; dan (9) Harapan umat agar lembaga pendidikan Islam dapat melahirkan mereka yang intelek, tetapi saleh dan mereka yang intelektual.

Dapat dilihat bahwa ada dua permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam, yaitu internal dan eksternal. Pada aspek subjektif, tantangan yang dihadapi terkait dengan (1) Mutu, administrasi dan pengelolaan madrasah umumnya tidak dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas; (2) Pendidik, mayoritas pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah, belum memenuhi syarat mengikuti tuntutan hukum; (3) Kurikulum, sebagian besar madrasah belum mampu menerapkan standar isi dan belum mampu mencapai standar kompetensi lulusan minimal sepenuhnya. Persentase lulusan ujian nasional cukup menggembirakan, sekitar 92%, tetapi skor rata-rata masih 51; (4) Pengelolaan, administrasi, dan pengelolaan madrasah yang 91,4% bersifat swasta, umumnya belum dikelola dengan manajemen yang profesional; (5) Sarana prasarana, sarana dan prasarana yang tidak memadai di sebagian besar madrasah; dan (6) Status, belum sepenuhnya yakin terhadap pengelolaan dan pelaksanaan serta terbatasnya kesempatan untuk penegakan hukum sehingga madrasah publik yang umumnya memenuhi standar minimal, hanya berjumlah 8,6%. Masalah pendidikan Islam pada aspek eksternal adalah persepsi masyarakat dan pemerintah yang cenderung diskriminatif, sehingga madrasah kurang mendapat perhatian, termasuk dalam penyediaan anggaran, bahkan ada yang menganggapnya sebagai lembaga pendidikan kelas dua sepuluh sekolah. (Langgulong, 1980)

Orientasi pendidikan Islam dan era teknologi masa depan juga perlu diubah baik mengenai sistem maupun metode. Nafas Islam dalam pribadi seorang Muslim merupakan alat vital yang mendorong perilaku yang diperkuat dengan ilmu pengetahuan yang luas sehingga ia dapat memberikan jawaban yang tepat dan bermanfaat terhadap tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jika kita melihat kelembagaan pendidikan Islam adalah sub-sistem dari sistem kemasyarakatan atau bangsa. Dalam operasinya, selalu mengacu dan menanggapi kebutuhan dan pengembangan kota. Hal ini untuk menghindari kesenjangan sosial budaya. Untuk mengetahui antara lembaga pendidikan dan masyarakat mengenai peningkatan kebutuhan adalah dengan melakukan penilaian.

Kelemahan fungsi lembaga sub-sistem masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari mekanisme sistem sosial budaya, yang saat ini sejalan dengan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Selain itu, pergeseran rasa kebersamaan menuju pola pikir rasional-teknologi yang cenderung melepaskan diri dari tradisionalisme budaya-edukatif semakin membengkak. Sehingga fungsi lembaga harus lebih laten terhadap kecenderungan sosial. (Azra, 2002)

Di era sekarang dan masa depan, pandangan menghormati nilai-nilai kemanusiaan semakin berkaitan dengan rencana pembaruan, menghindari dominasi luas robot teknologi yang memiliki hasil yang tidak pasti. Jika masalah ini tidak diantisipasi dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi pendidikan Islam di masa depan.

Salah satu alasan keterbelakangan pendidikan Islam adalah penyempitan pemahaman pendidikan Islam yang hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrawi yang terpisah dari kehidupan duniawi, atau aspek kehidupan spiritual yang terpisah dari kehidupan jasmani.

Oleh karena itu, akan tampak bahwa ada perbedaan dan pemisahan antara apa yang dianggap agama dan non-agama, yang sakral dan yang profan, antara dunia dan akhirat. Perspektif yang memisahkan satu sama lain ini disebut sudut pandang dikotomi. Adanya dikotomi ini menjadi salah satu penyebab keterbelakangan pendidikan Islam. Hingga saat ini, pendidikan Islam masih terpisah antara akal dan wahyu, serta pemikiran dan dzikir. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan pola pikir, yaitu kurangnya pengembangan konsep humanisme agama dalam dunia pendidikan Islam, karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada konsep 'abdullah (manusia sebagai hamba), bukan sebagai konsep khalifatullah (manusia sebagai khalifatullah (manusia sebagai khalifah Allah). (Nata, 2003)

Pemilahan antara ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama inilah yang membawa umat Islam pada keterbelakangan dan kemunduran peradaban, karena pengetahuan umum dianggap sebagai sesuatu yang berada di luar Islam dan berasal dari non-Islam atau yang lain, dan sering ditentang antara agama dan sains (dalam hal ini sains).

Agama dianggap tidak ada hubungannya dengan sains, sehingga sains dianggap tidak peduli dengan agama. Itulah gambaran praktik pendidikan dan kegiatan ilmiah di tanah air saat ini dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dan dirasakan oleh masyarakat.

Sistem pendidikan Islam yang ada hanya mengajarkan ilmu agama. Di sisi lain, generasi muslim yang menempuh pendidikan di luar sistem pendidikan Islam hanya menerima sebagian kecil dari segi pendidikan Islam atau bahkan tidak mendapatkan ilmu keislaman sama sekali. (Mastuhu, 1999)

Solusi Permasalahan Pendidikan Islam Masa Kini

Mencermati kenyataan ini, masalah konsep pendidikan dualisme-dikotomik harus segera dihilangkan dan diselesaikan, baik pada tingkat teknis filosofis-paradigmatik maupun departemen. Pemikiran filosofis menjadi signifikan karena pemikiran ini nantinya akan memberikan pandangan dunia yang menjadi dasar ideologis dan moral bagi pendidikan (Ilham, 2020).

Pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama harus segera dihentikan dan menjadi upaya menyatukan keduanya dalam sistem pendidikan yang integralis. Namun persoalan integritas ilmu pengetahuan dan agama dalam sistem pendidikan usia dini bukanlah masalah yang mudah. Namun, harus didasarkan pada pemikiran filosofis yang sehat agar tidak terkesan tambal sulam belaka. Langkah awal yang harus dilakukan dalam melakukan perubahan pendidikan adalah merumuskan “kerangka dasar filosofis pendidikan” sesuai ajaran Islam, kemudian mengembangkan “secara empiris prinsip-prinsip” yang mendasari implementasi dalam konteks lingkungan (sosial budaya)

1. Pendekatan dan Orientasi Sistem

Pendekatan pendidikan Islam memandang bahwa kebenaran tertinggi Islam harus mampu mengalahkan kemarahan yang merajalela di luar kehidupan Islam berdasarkan argumen di atas. Namun, kebenaran absolut dapat berkembang sepenuhnya di masyarakat jika penganutnya berusaha keras dan tepat sasaran melalui metode sistem yang efektif dan efisien.

Efektivitas dan efisiensi Islam, menurut kami untuk menerapkan berbagai teknik berdasarkan pengetahuan teoritis dan praktis mengikuti tujuan yang digarap. Karena pendidikan Islam saat ini dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih besar daripada tantangan yang dihadapi di awal penyebaran Islam. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan (meningkatnya permintaan) dari berbagai jenis waktu luang dan kesenangan yang lebih besar, memasuki ruang dan celah dalam hidup kita sampai redup dan bahkan gelap dapat ditembus. Dalam Q.S. Al-Isra 17: 81, sebagai berikut:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (الاسراء: ١٨)

Dan katakanlah: “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap”. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap

Dampak negatif dari teknologi modern sudah mulai muncul di depan mata kita. Pada prinsipnya, kekuatan untuk melemahkan kekuatan mental-spiritual atau jiwa yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai bentuk penampilan dan gaya hidup. Selain itu, fisik menjadi target, seperti kecerdasan pikiran, ingatan, kemauan, dan perasaan (emosi) melemah. Kemampuan aktualnya difasilitasi oleh perangkat elektronik-teknologi dan teknologi informasi seperti komputer, salinan jarak jauh (faksimili), perekam kaset video (VCR), dan komoditas seluloid (film disk video), dan sebagainya.

Seegera, siswa kami tidak perlu lagi belajar bahasa asing atau keterampilan tangan, dan memiliki tingkat pemikiran ilmiah yang tinggi, karena alat teknologi telah mampu menggantikannya dengan penerjemah komputer dari semua bahasa asing. Robot yang siap melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dengan tangan atau mesin otak (komputer generasi baru) dapat berpikir lebih cepat dari otak manusia itu sendiri. Kemudian, bagaimana dengan proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai iman dan kesalehan menjadi lubuk hati manusia. Sampai sekarang, kita belum pernah mendengar tentang teknologi transformasi nilai-nilai spiritual. Masalah baru yang harus diselesaikan oleh pendidikan Islam, khususnya, adalah dehumanisasi sekolah, netralisasi nilai-nilai agama, atau upaya pengendalian mengarahkan jumlah transisi ke pemukiman ilahi, kokoh dan tangguh, baik dimensi individu maupun sosial-budaya. (Sanaky, 1997)

2. Melembagakan Proses Pendidikan Islam Pendidikan Islam yang berlangsung melalui proses operasional menuju tujuannya diperlukan model dan sistem yang konsisten yang dapat mendukung nilai-nilai moral-spiritual yang mendasarinya. Nilai-nilai tersebut diaktualisasikan berdasarkan orientasi kebutuhan pengembangan sifat mahasiswa yang terintegrasi dengan pengaruh lingkungan budaya yang ada. Oleh karena itu, manajemen kelembagaan Pendidikan Islam memandang bahwa seluruh proses pendidikan dalam suatu institusi merupakan sistem yang berorientasi pada tindakan nyata berdasarkan pendekatan yang sistematis. Pendidikan Islam kelembagaan merupakan sub-sistem dari sistem kemasyarakatan atau bangsa. Dalam operasi, selalu mengacu dan menanggapi kebutuhan pembangunan kota. Tanpa sikap ini, kesenjangan ini menjadi salah satu sumber konflik antara pendidikan dan masyarakat. Dari sana muncul krisis pendidikan yang intensitasnya

bervariasi sesuai dengan tingkat atau tingkat organisasi. Di era teknologi saat ini dan masa depan, pandangan tentang apresiasi nilai-nilai kemanusiaan semakin menjadi perhatian para perencana gerakan pembaruan, menghindari dominasi luas robot teknologi yang tidak berkelanjutan. Pendidikan yang dijadikan dasar harapan manusia harus mampu memproyeksikan kondisi masa depan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Masa Depan Sosio Mereka mengandung fenomena utama, antara lain, lambatnya penyebaran struktur rumah tangga alternatif, pengasuhan orang tua oleh orang tua, pandangan tentang keibuan, hubungan tentang seksualitas dan moralitas sosial baru, dan reinterpretasi peran agama dalam masyarakat. Semakin banyak perempuan menjadi pekerja. Life menekan aspek sosial, penolakan umum terhadap penggunaan senjata pemusnah massal (nuklir dan kimia). Pernikahan antar etnis dan agama terjadi. Radikalisme mahasiswa semakin menurun. Status kurang terkait dengan objek konsumen. Solusi untuk krisis energi jangka panjang tidak pernah tercapai, dan per kapita, penggunaan energi telah menurun; pertumbuhan penduduk nol semakin disukai oleh para ibu; semakin berkembang dengan bentuk transportasi baru; pergaulan bebas dan pornografi akan datang; semakin berkembang dengan cara transportasi baru; pergaulan bebas dan pornografi akan tetap ditoleransi; televisi sering digunakan untuk pengenalan budaya yang lebih aktif dan sebagainya.
- b. Masa Depan Techno Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa masa depan masyarakat akan dipengaruhi oleh pengaruh energi fisik yang tinggi, inovasi, dan penerapannya, yang cenderung lebih tinggi terhadap energi sinar laser. Peningkatan penggunaan komputer dan teknik pemrosesan data, peningkatan komputer rumah tangga, pengenalan superkonduktor dalam transmisi listrik, dan pengenalan non-kabel. Meningkatnya kesadaran bahwa teknologi tidak dapat menemukan pengganti sumber daya seperti bahan bakar, mineral, dan udara segar. Perdagangan dan investasi internasional telah muncul sebagai kekuatan global untuk perdamaian dan stabilitas dunia. Perusahaan teknik akan mengalami lebih banyak kerugian daripada keuntungan dalam berbagai persenjataan.

- c. Masa Depan Bio Prinsipal, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya diskusi tentang penggunaan teknik modifikasi perilaku seperti kimia, elektronika, dan psikologi, serta masalah manipulasi genetik. Penurunan kisaran kehidupan yang disebabkan oleh kekurangan pangan dan pencemaran lingkungan serta menurunnya angka kematian bayi ditandai. Tetapi tampaknya bagi kita bahwa masa depan kehidupan manusia terus bergantung pada lembaga pendidikan formal dan non-formal sebagai pusat perkembangan dan kontrol kecenderungan manusia modern terhadap optimisme. Terutama jika kecenderungan tersebut didasarkan pada nilai-nilai moral dan agama, oleh karena itu, pendidikan masih dapat dipersiapkan dengan potensi perkembangan manusia yang jauh di masa depan dilihat dari berbagai alasan sosiologi, psikologi, budaya, dan teknologi.
3. Prinsip Pendidikan Islam sebagai Disiplin Ilmu Sebagai disiplin ilmu, pendidikan Islam memiliki tugas utama untuk mendapatkan wawasan atau pandangan tentang pendidikan yang terdapat dalam sumber-sumber primer. Dalam sumber-sumber primer tersebut, terdapat materi struktural yang mengandung sumber daya pendidikan atau implikasi pendidikan yang masih tersebar. Agar dapat membentuk pendidikan Islam, isinya perlu disistematisasikan dan diteorikan mengikuti aturan yang terdapat dalam dunia pendidikan (Muslim, 2008). Ilmu budaya Islam, khususnya, terdiri dari konsep dan teori yang disistematisasikan menjadi kebulatan yang terdiri dari satu komponen yang saling terkait. Pendidikan Islam merupakan kumpulan ide dan konsep intelektual yang disusun dan diperkuat melalui pengalaman dan pengetahuan. Dengan kata lain, ilmu budaya Islam harus mengandalkan pandangan ideologis dan pengalaman praktis yang terdiri dari fakta dan informasi untuk diolah menjadi teori yang valid yang menjadi dasar ilmu eksakta. Ada tiga komponen yang diperlukan harus dibahas dalam komponen pendidikan, antara lain:
 - a. Tujuan pendidikan Islam harus dirumuskan dan diartikan secara jelas dan setara bagi seluruh umat Islam agar bersifat universal. Sebagai inti dari tujuan keilmuan Islam yang sejalan dengan Al-Qur'an, tidak lain adalah penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Metode pendidikan Islam yang kita ciptakan harus berfungsi secara efektif dalam proses pencapaian tujuan pendidikan Islam. Kelengkapan tujuan pendidikan harus paralel dengan keragaman metode, mulai dari cara verbalistik-simbolisme hingga interaksi langsung dalam

suasana belajar mengajar.

- c. Ritme gerakan harmonik antara metode dan tujuan pendidikan dalam proses akan mengalami kekosongan jika tanpa kehadiran nilai atau ide. Oleh karena itu pendidikan Islam harus mengarah pada pengembangan kualitas manusia sebagai Khalifah di bumi.

Dalam isi (kurikulum) pendidikan Islam harus mencerminkan jenis-jenis ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia muslim untuk menunjang tugasnya sebagai amanat Tuhan di bumi. Berdasarkan gagasan-gagasan di atas, budaya Islam sebagai disiplin ilmu memiliki basis modal yang potensial untuk dikembangkan sehingga dapat berperan dalam jantung masyarakat yang dinamis saat ini dan masa depan. Dalam studi ilmiah, sains harus bergantung pada teori. Oleh karena itu metode pendidikan Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Teori harus menetapkan adanya hubungan antara fakta dan yang ada.
2. Teori harus mengembangkan sistem dan struktur klasifikasi dari konsep.
3. Teori harus diartikan sebagai fakta.
4. Teori harus memprediksi fakta dan peristiwa

Gaya pendidikan abstrak dimaksudkan untuk diatur secara sistematis dan terorganisir dengan baik, yang dapat menggambarkan fakta-fakta pengalaman operasional dalam bentuk pemahaman sederhana mungkin.

Dari berbagai permasalahan pendidikan Islam di atas, dapat ditarik benang merah dari permasalahan pendidikan Islam, yaitu:

1. Masih ada masalah konseptual-teoritis atau filosofis yang kemudian berdampak pada masalah operasional praktis.
2. Masalah konseptual-teoritis ini ditandai dengan adanya paradigma dikotomi dalam dunia pendidikan Islam antara agama dan non-agama, wahyu dan akal dan dunia dan akhirat.
3. Kurangnya respon pendidikan Islam terhadap realitas sosial sehingga mahasiswa jauh dari lingkungan sosial budayanya. Ketika mereka lulus dari lembaga pendidikan Islam mereka akan mengalami guncangan sosial.
4. Penanganan masalah ini hanya sedikit demi sedikit, tidak integral dan komprehensif
5. Dalam hal ini, ambil saja contoh masalah pendidikan Islam, yaitu masalah konseptualteoretis. Dalam hal ini dijelaskan bahwa pendidikan Islam hanya didasarkan pada pemahaman pendidikan

Islam yang hanya menekankan aspek kehidupan ukhrawi yang terpisah dari kehidupan duniawi, atau aspek kehidupan spiritual yang terpisah dari kehidupan jasmani.

6. Oleh karena itu, akan tampak bahwa akan ada perbedaan dan pemisahan antara apa yang dianggap agama dan non-agama, yang sakral dan yang profan, antara dunia dan akhirat. Perspektif yang memisahkan satu sama lain ini disebut sudut pandang dikotomi.
7. Pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama harus segera dihentikan dan menjadi upaya menyatukan keduanya dalam satu sistem pendidikan integralistik. Namun, masalah pengintegrasian ilmu pengetahuan dan agama dalam satu sistem pendidikan bukanlah masalah yang mudah, tetapi harus didasarkan pada pemikiran filosofis yang kuat, sehingga tidak tampak hanya tambal sulam.
8. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan perubahan pendidikan adalah merumuskan “kerangka dasar filosofis pendidikan” sesuai dengan ajaran Islam, kemudian mengembangkan “secara empiris prinsip-prinsip” yang mendasari pelaksanaannya dalam konteks lingkungan (sosial budaya). Filsafat Integralisme adalah bagian dari filsafat Islam. yang merupakan alternatif dari pandangan holistik yang berkembang di era postmodern di masyarakat barat.

Strategi yang Ditawarkan untuk Mengatasi Masalah Pendidikan Islam masa depan

Agar pendidikan Islam dapat mengatasi permasalahan pengetahuan islami dan menghadapi tantangan globalisasi di masa depan, strategi yang perlu dilakukan adalah:

1. Membangun Paradigma Pendidikan Islam Sejati

Lakukan kajian mendalam untuk membangun kembali paradigma pendidikan Islam mengikuti semangat sejati ‘ruhul Islam.’ Budaya Islam bertumpu pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pendidikan Islam harus didasarkan pada pandangan bahwa Allah SWT menurunkan ‘ayat-ayat dan ‘Pengetahuannya melalui dua saluran: saluran formal melalui prosedur Allah - malaikat - Rasul; yang disebut sebagai ‘ayatul qauliyah (Wahyu, Al-Qur’an), dan ayatul kauniyah (alam semesta). Ayat qauliyah adalah panduan, sedangkan ayat al kauniyah adalah fasilitas, sarana kehidupan (wasailul hayah). Dengan

paradigma tersebut, maka dalam pendidikan Islam tidak akan mengalami disintegrasi atau dikotomi. Semua objek pembahasan (dalam kurikulum) dipandang sebagai 'ilmu Allah yang harus dipelajari untuk mendapatkan bekal Petunjuk Hidup (belajar 'ayatul qauliyah) dan mendapatkan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas hidup (belajar kauniyah). Selain itu, pendidikan Islam harus holistik dan integralis, artinya, itu harus berorientasi pada pembentukan seluruh orang. Oleh karena itu, materi pendidikan Islam memuat kesatuan pendidikan jasmani, mengasah kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, unit instruksional teoritis dan praktis, unit pendidikan individu-sosial, dan satuan materi pendidikan agama (diniyah), filsafat, etika, dan estetika (moral). Evaluasi pendidikan Islam juga dilakukan dalam kerangka kesatuan pengetahuan, sikap, dan perilaku.

2. Melaksanakan Pendidikan Afektif

Pendidikan afektif adalah proses menanamkan nilai kepada peserta didik sehingga peserta didik diharapkan mampu berperilaku mengikuti norma-norma yang berlaku. Pelatihan yang menekankan keterampilan emosional akan menumbuhkan kesadaran beragama yang solid. Dia akan menolak untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan bahkan berusaha mencegahnya dengan sekuat tenaga dan usahanya. Pendidikan atau pembelajaran afektif merupakan kegiatan pembelajaran yang diarahkan untuk membentuk sikap yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama (Islam) melahirkan karakter yang mulia dalam kehidupan peserta didik, tidak hanya pengaruh pendidikan yang terjadi di sekolah, tetapi juga pada keluarga, dan masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar

Guru merupakan tulang punggung pendidikan. Oleh karena itu, kualitas guru harus memperoleh kepastian dan jaminan kompetensi profesionalnya. Membangun pusat pelatihan dan mengembangkan kualitas guru telah secara dramatis membantu menyediakan staf pengajar yang andal. Selain itu, keberadaan pusat pengembangan kualitas guru akan memfasilitasi pertukaran pengalaman dan berbagai ide-ide.

KESIMPULAN

Strategi dan taktik Islam harus lebih efektif dan efisien, yang berarti pedagogis, sosiologis, dan budaya. Oleh karena itu, nafas Islam dalam pribadi seorang Muslim sangat penting untuk dapat menggerakkan perilaku yang diperkuat dengan pengetahuan yang luas sehingga dapat memberikan jawaban yang tepat dan bermanfaat atas tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam pendidikan Islam tidak akan lepas dari prinsip-prinsip islam yang bersumber dari prinsip-prinsip dasar Alquran. Perencanaan untuk pendidikan masa depan harus mencakup tiga karakteristik utama suatu masyarakat, yaitu: masa depan sosial, masa depan tekno, dan masa depan biodata.

Selain itu, strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan ke depan antara lain:

- (1) Membangun paradigma Pendidikan Islam yang sebenarnya;
- (2) Melaksanakan Pendidikan Afektif;
- (3) dan Meningkatkan kualitas tenaga pengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muzayyin. (2003). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azra, A. (2002). *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Baharudin. (2011). *Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Bakry, Sama'un. (2005). *Menggagas Konsep Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy,.
- Daulay, Haidar Putra. (2004). *Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Faisal, J. A. (1995). *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ilham, D. (2020). *Persoalan-Persoalan Pendidikan dalam Kajian Filsafat Pendidikan Islam*. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 9(2), 179–188.
- Langgulang, H. (1980). *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*. Bandung : al-Ma'arif.
- Mahzar, Armahedi. (1998). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mas'ud, Abdurrahman. (1993). *Beberapa Aspek Dasar Kependidikan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mastuhu. (1999). *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Muhaimin. (2013). *Rekonstruksi Pendidikan Islam; Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers,.
- Muhaimin. (2006). *Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia,.
- Muslim, K. d. (2008). *Paradigma Baru Pendidikan: Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta : IISEP.
- Nata, A. (2003). *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, : , . Jakarta: Prenada Media.

- Rembangy, Musthofa,. (2010). Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi. Yogyakarta: Teras.
- Sanaky, H. A. (1997). Pendidikan Islam di Indonesia Suatu Kajian Upaya Membangun Masa Depan” Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial. Yogyakarta : Aditya Media.
- Sanjaya, Wina. (2009). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana.
- Syah, Muhibbin. (1997). Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zamroni. (2000). Paradigma Pendidikan Masa Depan. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.

**PEMANFAATAN MEDIA GOOGLE CLASSROOM
PADA MATA PELAJARAN PAI
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS**

Farida Isroani

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

farida@unugiri.ac.id

Abstract:

This study aims to (1) reveal PAI learning through Google Classroom media in the midst of the Covid-19 pandemic, (2) find out the supporting and inhibiting factors for PAI learning through Google Classroom media in the midst of the Covid-19 pandemic, (3) school solutions and efforts and stakeholders to achieve PAI learning goals through Google Classroom media in the midst of the Covid-19 pandemic. The researcher used descriptive qualitative method. Research data obtained through in-depth interviews, observation, and documentation., the head of the curriculum, PAI educators, homeroom teachers. Researchers used data analysis techniques, including data reduction, data presentation, drawing conclusions and checking the validity of the data. The results showed that, (1) PAI learning management in the evaluation of psychomotor aspects has not been implemented, (2) learning supporting factors, namely the existence workshops of learning Google Classroom, strong signals and internet quotas, students having smartphones, and guardians of students being able to monitor and control students. learn while at home. Meanwhile, the inhibiting factors for learning are bad signals due to natural conditions and the concentration of students is easily disturbed, (3) the application of combined PAI learning, namely 50% face-to-face and 100% online requires good synergy between students, educators, families and communities. in order to achieve PAI learning objectives in the midst of the pandemic.

Keywords: Pendidikan Agama Islam (PAI), Media Google Classroom, Pandemi

A. Pendahuluan

Salah satu komponen dalam hidup yang paling penting yakni pendidikan Pendidikan bersifat dinamis hingga kehidupan ini berakhir. (Benni Setiawan, 2008: 11) Pendidikan membantu manusia agar mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Pentingnya pendidikan juga dijelaskan di dalam firman Allah Q.S. Al- Alaq ayat 1-5 yang berbunyi sebagai berikut

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ ه

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Pendidikan merupakan kegiatan yang dilalui oleh peserta didik yang memiliki tujuan agar mereka mampu menjadi manusia bermartabat berdasarkan tujuan yang telah ditentukan oleh pendidik. (Kompri, 2017: 15) Hal tersebut menandakan bahwa manusia dengan pendidikan memiliki keterkaitan satu sama lain.

Adapun tujuan pendidikan dijelaskan pada Undang- Undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni membantu peserta didik dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu menjadi manusia yang kuat dari segi keagamaan, pandai dalam mengontrol diri, memiliki kepribadian yang baik, cerdas, serta terampil. Berdasarkan landasan teori tersebut, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa pendidikan merupakan upaya pendidik untuk mencetak generasi unggul yang memiliki budi pekerti luhur, taat pada agama serta kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kelak diharapkan dapat berkontribusi positif bagi agama, nusa dan bangsa.

Menurut Sri Minarti, Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai pendidikan islami yang berorientasi terhadap pemberdayaan manusia yang dilandasi oleh al-Qur'an dan hadis. (Sri Minarti, 2016: 25) Selain itu, Pendidikan Agama Islam (PAI) mengajarkan nilai- nilai positif guna membentuk pandangan hidup manusia yang jauh ke depan. (Mahmudi, 2019: 92) Pada proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), diharapkan pendidik dapat

membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, sehingga peserta didik dapat menghayati serta mengamalkan esensi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dibuktikan dengan adanya perubahan perilaku yang baik, sehingga tidak hanya menyentuh aspek kognitif peserta didik, tetapi juga pada aspek afektif dan aspek psikomotorik.

Adanya ketiga aspek tersebut diharapkan membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Swt., serta berbudi luhur. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt., di dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Namun, berdasarkan kenyataan di lapangan, problematika pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) masih hangat untuk diperbincangkan, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Banyak dijumpai peserta didik yang cenderung kesulitan untuk membaca apalagi menulis ayat- ayat al-Qur’an, motivasi belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) tergolong rendah dibandingkan dengan belajar ilmu umum, metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang digunakan oleh pendidik cenderung monoton, minimnya penggunaan media pembelajaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga kurang menarik perhatian peserta didik. (Susiana, 2017: 74)

Padahal, sebagai manusia hendaknya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk belajar dan mengerahkan segala potensi yang dimiliki melalui pembelajaran, khususnya pada Pendidikan Agama Islam (PAI). Hal tersebut senada dengan firman Allah Swt., di dalam Q.S. An- Nahl ayat 78 yang berbunyi sebagai berikut :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.”

Selain itu, materi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diterima oleh peserta didik di sekolah juga cenderung sedikit dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di era serba digital saat ini, usia tingkat SMA mudah sekali terpengaruh ke dalam hal- hal negatif, baik dari faktor lingkungan internal

maupun eksternal. Hal ini sesuai dengan pemaparan Al- Mighwar dalam buku Psikologi Remaja, bahwa usia remaja merupakan masa transisi yakni pada rentang usia sepuluh sampai dua belas tahun dan berakhir pada usia delapan belas tahun sampai dua puluh dua tahun. Masa ini merupakan pencarian identitas diri. Fase usia remaja menjadi lebih mudah terpengaruh dan lebih senang berinteraksi di luar selain dengan keluarga. (Muhammad al Mighwar, 2006: 80) Oleh karena itu, peserta didik perlu dibekali dengan aspek spiritual yang kuat.

Fakta di lapangan secara umum, kenakalan remaja khususnya pelajar, kian hari kian meningkat. Pertama, kasus penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2018, kalangan pelajar ditemukan sebanyak 2,29 juta. Kemudian, pada tahun 2019, kasus meningkat menjadi 2,93 juta. Hal ini menandakan bahwa ada kenaikan 28% dalam kurun satu tahun. Kedua, kasus pergaulan seks bebas. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dikutip dalam Jurnal Ilmiah Kesehatan, pada tahun 2012 terdapat 9,3% atau jika dikalkulasikan yakni 3,7 juta remaja mengaku pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Kemudian, pada tahun 2017, mengalami peningkatan yakni 50% remaja laki- laki dan 30% remaja perempuan pernah melakukan hubungan seksual pranikah. (Rasid Ansari, 2020: 11) Ketiga, kasus minum- minuman keras (miras). Pada November 2020, terdapat 223 remaja yang terkena kasus miras.

Berdasarkan fakta di atas, menunjukkan salah satu indikator bahwa pengamalan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari cenderung masih rendah. Kendati demikian, hal tersebut tidak berlaku bagi semua peserta didik, karena faktor internal (keluarga) yang baik tentu dapat menunjang tumbuh kembang peserta didik yang lebih baik pula.

Pada dasarnya, pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) lebih banyak mengajarkan praktik daripada teori. Hal tersebut karena pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berorientasi pada 3 (tiga) hal, yaitu penguasaan ilmu (*science*), pengetahuan (*knowledge*) serta nilai-nilai (*values*) sebagai sebuah transformasi pendidikan. (Masmuallim, 2013: 189-190) Guna mencapai ketiga aspek tersebut, tentu dibutuhkan proses pembelajaran yang ideal, yakni pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah. Selain itu, kehadiran guru memiliki peran yang strategis sebagai *role model* yang baik bagi peserta didik. Hal tersebut senada dengan pendapat Munandar yang dikutip oleh Ni Nyoman Purwati, bahwa pembelajaran yang dikondisikan dengan baik mampu menimbulkan peserta didik yang kreatif, aktif sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. (Ni Nyoman Parwati, 2018: 108)

Namun, semenjak pandemi *Covid-19* merebak di Indonesia, sistem kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami perubahan. Proses pembelajaran yang awalnya konvensional dengan tatap muka atau disebut dengan *offline* di sekolah, sekarang beralih menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yaitu dengan model daring atau *online*. Hal tersebut merujuk pada Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 yang berisi Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Deseas (*Covid-19*). Selain itu, Bupati Bojonegoro juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 338/ 999/ 412201/ 2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Virus Corona (*Covid-19*).

Pandemi *Covid-19* membawa transformasi baru bagi Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidik dan peserta didik dituntut untuk cakap dalam memanfaatkan teknologi serta mampu bertahan (*survive*) dari virus berbahaya tersebut. Kendati demikian, diberlakukannya sekolah daring justru menjadi salah satu penyumbang problematika baru pada pembelajaran PAI. Hal tersebut dibuktikan adanya kendala- kendala yang timbul akibat pembelajaran secara daring di antaranya, banyak peserta didik yang belum memiliki *smartphone*, tidak ada sinyal (*blank spot*), tugas lebih menumpuk, banyak *distraction* ketika sedang belajar, guru dituntut melek teknologi, menyajikan pembelajaran secara aktif dan menarik.

Menurut Syafitri yang dikutip oleh Muhammad Ilham, bahwa pembelajaran daring hanya sebatas transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*). Hal tersebut mengakibatkan pemahaman peserta didik kurang mendalam, sehingga berdampak pada kurangnya pengamalan Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam kehidupan sehari- hari. (Saefulmilah, 2020: 399)

Pembelajaran dapat diartikan sebagai pola umum yang ditetapkan oleh seorang pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. (Sumantri, 2015: 7) Pendidik diharapkan mampu menjadikan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi lebih bermakna meski di tengah pandemi *Covid-19*. Hal tersebut sebagai upaya menghasilkan perubahan perilaku, pengetahuan, wawasan, dan pengalaman positif pada peserta didik. (Mujammil Qomar, 2018: 29) Guna mencapai keberhasilan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), salah satunya yakni disebabkan oleh kemampuan seorang pendidik dalam menyiapkan pembelajaran yang sesuai. (Nana Syaodih Sukmadinata, 2006: 191)

Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui media *Google Classroom* di tengah pandemi *Covid-19*. Sesuai dengan hasil wawancara pra penelitian dengan Winanto, S.Pd., selaku pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas X, beliau mengatakan, “sekolah kami telah mempersiapkan dan menerapkan media *Google Classroom* dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) saat pandemi seperti ini. Selain media tersebut mudah untuk dikelola, *Google Classroom* juga sebagai produk dari *Google* yang sudah menjadi perusahaan besar yang diakui oleh dunia, karena fasilitas dan layanan yang disediakan sangat mendukung. Selain itu, menggunakan media *Google Classroom* sebagai upaya kami guna mengelola pembelajaran yang efektif. Kendati demikian, kami merasa kurang maksimal dalam menjelaskan materi Pendidikan Agama Islam (PAI) secara rinci. Selanjutnya, kami juga melakukan evaluasi terhadap pembelajaran serta peserta didik sesuai dengan kemampuan pendidik.”

Google Classroom merupakan aplikasi yang dikembangkan *Google* untuk sekolah. Aplikasi canggih ini sebagai ruang kelas tanpa perlu proses pembelajaran tatap muka. Peserta didik yang sudah bergabung di dalam kelas, dapat mengecek langsung tugas yang telah dibagikan oleh pendidik. Selain itu, peserta didik dapat berinteraksi dengan pendidik lewat *chat* yang telah tersedia. (Eko Purnomo Susanto dan Rahmatullah, 2020: 131)

Selain itu, menurut Blundo yang dikutip oleh Sukmawati, *Google Classroom* merupakan pembelajaran daring yang diterapkan guna meningkatkan kualitas pendidikan melalui proses pembelajaran yang tidak bergantung pada ruang kelas. (Sukmawati, 2020: 44) Pendidik juga dapat membuat forum diskusi, serta mengunggah tugas yang dapat dikerjakan oleh peserta didik dengan tenggang waktu yang ditentukan guru. (Siti Qomariah dkk, 2019: 277)

Kendati demikian, perlu adanya manajemen pembelajaran yang matang. Menurut Ajat Rukajat, teori manajemen pembelajaran meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi secara berkala yang harus dilakukan oleh pendidik. (Ajat Rukajat, 2018: 5) Selain itu, perlu adanya solusi dan upaya dari pihak sekolah serta *stakeholder* SMAN 4 Bojonegoro agar pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat menyentuh aspek kognitif, aspek afektif dan psikomotorik, sehingga diharapkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui media *Google Classroom* dapat terlaksana sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui media *Google Classroom* di tengah pandemi *Covid-19* mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui media *Google Classroom* di tengah pandemi *Covid-19* di SMAN 4 Bojonegoro dan mengetahui solusi dan upaya dari pihak sekolah serta *stakeholder* agar tercapainya tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui media *Google Classroom* di tengah pandemi *Covid-19*.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Eko Purnomo Susanto dan Rahmatullah dalam jurnal yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Melalui *Google Classroom* menghasilkan data bahwa, *Google Classroom* memiliki dampak dalam mempersiapkan proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan aspek ilmu pengetahuan.
2. Penelitian Sukmawati dalam jurnal yang berjudul Implementasi Pemanfaatan *Google Classroom* Dalam Proses Pembelajaran *Online* di Era Industri 4.0 menghasilkan data bahwa, *Google Classroom* mempermudah pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran serta membuat peserta didik lebih disiplin dalam mengerjakan serta mengumpulkan tugas.
3. Penelitian Himyatul Muyasaroh dalam skripsi yang berjudul Penerapan *Google Classroom* Pada Pembelajaran PAI Kelas XI Jurusan Bisnis Daring Pemasaran Di SMK Negeri 1 Purwokerto Tahun Ajaran 2019/2020 menghasilkan data bahwa, *Google Classroom* dilakukan melalui tahap pembuatan kelas online, metode penugasan, serta evaluasi melalui penilaian pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.
4. Penelitian Zeda Hammi dalam skripsi yang berjudul Implementasi *Google Classroom* Pada Kelas XI IPA MAN 2 Kudus menghasilkan data bahwa, *Google Classroom* kurang efektif dalam pembelajaran, karena guru butuh tatap muka secara langsung untuk menjelaskan materi.
5. Penelitian Muhammad Alif Burhanudin dalam tesis yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis *Google Classroom* Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik (Studi Kasus di SMA Semesta BBS Semarang) menghasilkan data bahwa, Pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif serta menambah keaktifan peserta didik dalam pembelajaran PAI.

6. Penelitian Anita Ningrum dalam skripsi yang berjudul Analisis Pelaksanaan Pembelajaran *Google Classroom* Era Pandemi *Covid-19* Materi Tata Surya Pada Siswa Kelas VII MTs Negeri Salatiga Tahun Pelajaran 2019/2020 menghasilkan data bahwa, hasil penilaian pembelajaran belum berhasil mencapai KKM, persepsi peserta didik mengenai *Google Classroom* menarik namun kurangnya akses internet dan kurangnya manajemen waktu, persepsi pendidik terkait *Google Classroom* yakni hasil belajar siswa masih rendah, 50% tidak aktif dalam mengikuti tanya jawab, serta peserta didik belum siap dalam pembelajaran digital.
7. Penelitian Wa Linda dalam skripsi yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media *Google Classroom* Sebagai Media Pembelajaran menghasilkan data bahwa, Pembelajaran melalui media *Google Classroom* cukup efektif (dalam pembuatan dan pengiriman tugas), namun tidak efisien karena beberapa mahasiswa tidak memiliki android dan paket data saat diskusi online sedang berlangsung
8. Penelitian Ivah Nur Fitriyani dalam skripsi yang berjudul Model Pembelajaran *Online (Daring)* Menggunakan *Google Classroom* Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 4 Ambarawa Tahun Ajaran 2020/ 2021 menghasilkan data bahwa, Pembelajaran melalui *Google Classroom* berjalan optimal, terdapat kendala pembelian kuota internet, sehingga ada pemberian modul pembelajaran dan peserta didik yang belum mengikuti bisa datang ke sekolah untuk mengambil tugas.
9. Penelitian Siti Haniyah dalam skripsi yang berjudul Pemanfaatan *Google Classroom* Sebagai Sarana Belajar Dalam Pembelajaran IPS di SMPN 7 Bandung menghasilkan data bahwa, *Google Classroom* sebagai sarana penyedia ruang belajar IPS, memberikan materi, tugas serta penilaian. Namun, memiliki kendala pada biaya kuota internet dan terhambatnya proses evaluasi.

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa posisi penelitian ini adalah:

10. Penelitian Rahayu Lestari Putri yang berjudul Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Melalui Media *Google Classroom* Di Tengah Pandemi *Covid-19* di SMAN 4 Bojonegoro menghasilkan data bahwa, (1) manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) belum sepenuhnya terpenuhi, evaluasi aspek psikomotorik belum terlaksana, (2) faktor pendukung pembelajaran yakni adanya *workshop* pembelajaran

Google Classroom, sinyal kuat dan kuota internet, peserta didik memiliki *smartphone*, dan wali murid dapat memantau serta mengontrol peserta didik selama di rumah. Adapun faktor penghambat pembelajaran terletak sinyal yang buruk karena kondisi alam, konsentrasi peserta didik mudah terganggu, (3) perlunya sinergitas yang baik antara peserta didik, pendidik, keluarga dan masyarakat guna tercapainya tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di tengah pandemi *Covid-19*.

Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terletak pada teori yang digunakan, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang pelaksanaan pembelajarannya saja, sedangkan peneliti meneliti manajemen pembelajaran PAI secara keseluruhan. Peneliti juga menemukan gap, yakni solusi dan upaya pihak sekolah dalam pembelajaran melalui *Google Classroom* agar tujuan pembelajaran PAI tercapai belum pernah diteliti. Sedangkan, peneliti telah meneliti hal tersebut.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2017: 6), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berbentuk deskripsi yang bertujuan guna memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian. Penelitian ini memiliki konteks khusus yang alamiah serta menggunakan metode yang alamiah pula. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas. Selain itu, karena pandemi *Covid-19*, maka peneliti juga melakukan kunjungan ke rumah subjek penelitian. Adapun subjek penelitian yaitu, kepala sekolah, waka kurikulum, pendidik PAI, wali kelas, peserta didik kelas X, dan wali murid.

Peneliti hadir di lokasi penelitian selama dua sampai tiga kali dalam satu minggu. Adapun waktu penelitian dilaksanakan di pagi hari, mulai pukul setengah delapan hingga kurang lebih pukul sepuluh. Setiap kehadiran peneliti, rentang waktunya hampir sama. Namun, peneliti juga pernah hadir pada siang hari. Hal tersebut dikarenakan, peneliti menyesuaikan jadwal kegiatan dari subjek penelitian.

Guna memperoleh data yang diharapkan, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk mengumpulkan data sebelum penelitian dilakukan. (Sugiyono, 2012: 224) Teknik pengumpulan

data yang dilakukan oleh peneliti yakni melalui observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi. Adapun aktivitas dalam analisis data yakni, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Menurut Sugiyono, tahapan dalam pengecekan keabsahan data meliputi, uji kredibilitas data, uji dependabilitas data, uji transferabilitas dan uji konfirmabilitas data. (Sugiyono, 2012: 294)

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Melalui Media *Google Classroom* Di Tengah Pandemi

Berdasarkan teori dari Ajat Rukajat dalam buku yang berjudul Manajemen Pembelajaran dijelaskan, bahwa manajemen pembelajaran meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi. Berikut ini peneliti akan melakukan analisis terhadap manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di **Perencanaan**

Adapun definisi perencanaan menurut Ajat Rukajat (2018: 16), yakni kegiatan menentukan target serta strategi guna mencapai tujuan pembelajaran pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Perencanaan yang baik dapat mempersiapkan pendidik dalam mengemas pembelajaran yang efektif dan efisien. Upaya kepala sekolah dalam mempersiapkan pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI) sebaik mungkin agar mampu mengoperasikan *Google Classroom* dengan baik, sehingga diharapkan pendidik dapat aktif dan kreatif dalam mempersiapkan pembelajaran daring.

Adapun perencanaan terkait jadwal pembelajaran mengalami perubahan, yakni waktu pembelajaran menjadi lebih singkat. Hal ini dikarenakan guna menyesuaikan keadaan pembelajaran di tengah pandemi *Covid-19*. Jadwal pembelajaran dibuat oleh waka kurikulum yang ditetapkan bersama melalui rapat dinas.

Pada perencanaan pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) daring, tentu terdapat perbedaan dari RPP pembelajaran normal, yakni terletak pada media yang digunakan menggunakan *Google Classroom*. Adapun metode yang digunakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yakni daring. Hal tersebut sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Deseas (*Covid-19*) yang terdapat pada Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020. (Asrilia Kurniasari, 2020: 1)

Adapun perencanaan yang dilakukan oleh wali murid dalam mempersiapkan peserta didik mengikuti pembelajaran daring dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan upaya wali murid dalam memberikan fasilitas berupa *smartphone* pribadi untuk masing- masing peserta didik. Selain itu, beberapa wali murid memasang *wifi* di rumah dan memfasilitasi paket data, sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui *Google Classroom* dengan aman dan nyaman.

Kendati demikian, perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui *Google Classroom* di tengah pandemi *Covid-19* telah dipersiapkan sedemikian rupa. Perencanaan tersebut melibatkan beberapa pihak, yakni koordinasi yang baik antara kepala sekolah, pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI) serta wali murid.

a. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan kegiatan mengelompokkan untuk pembagian tugas pokok serta tanggung jawab kepada masing- masing individu dalam menyelesaikan pekerjaan. (Ajat Rukajat, 2018: 15) Berikut ini peneliti uraikan tugas pokok serta fungsi masing- masing pihak sekolah maupun *stakeholder* dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui *Google Classroom*:

1) Kepala Sekolah

Kepala sekolah sebagai penentu kebijakan, membimbing, membantu, mengawasi serta menilai terhadap pelaksanaan pendidikan serta pengajaran. Berdasarkan fungsi sebagai penentu kebijakan, kepala sekolah menentukan mekanisme rekrutmen pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI), memberikan bimbingan serta bantuan melalui pelatihan *workshop* pembelajaran *Google Classroom* dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pada fungsi pengawasan dan penilaian, kepala sekolah telah melaksanakan pengawasan melalui aplikasi a-kinerja. Selain itu, kepala sekolah melaksanakan *monitoring* pembelajaran dengan cara pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI) wajib melaporkan aktivitas mengajar melalui *Google Form*. Kepala sekolah telah melaksanakan tupoksi dengan baik.

2) Waka Kurikulum

Waka kurikulum sebagai penyusun kegiatan tahunan, jadwal pembelajaran, serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan sekolah. Berdasarkan fungsinya, waka

kurikulum telah membuat kalender pendidikan, jadwal pembelajaran di masa pandemi *Covid-19*. Jadwal pembelajaran yang dibuat telah menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Waka Kurikulum juga melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan kurikulum 2013 melalui supervisi administrasi, supervisi pembelajaran dan supervisi penilaian yang dilaksanakan dua kali dalam satu semester. Waka Kurikulum telah melaksanakan tupoksi dengan baik.

3) Pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pendidik sebagai pelaksana dan penanggungjawab pembelajaran, baik secara tatap muka maupun daring. Berdasarkan fungsi tersebut, pendidik mengundang peserta didik untuk bergabung ke *Google Classroom* sesuai dengan kelasnya masing-masing. Pengorganisasian yang dilakukan Winanto tergolong baik, karena tidak mencampuradukkan semua peserta didik ke dalam satu grup *Google Classroom*. Pendidik melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal serta memberikan arahan, bimbingan kepada peserta didik selama pembelajaran berlangsung.

Selain itu, pendidik telah bertanggungjawab atas pelaksanaan proses pembelajaran dengan memberikan materi, memberikan nilai serta melaksanakan tugas dengan baik sehingga diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI) telah melaksanakan tupoksi dengan baik.

4) Wali Kelas

Wali kelas sebagai penyelenggara administrasi kelas serta menjadi evaluator pembelajaran. Berdasarkan fungsi tersebut, wali kelas telah melakukan kegiatan administrasi dengan memiliki dokumen tentang biodata peserta didik, jumlah peserta didik, membuat absensi, memberikan penilaian dan mengisi rapor. Selain itu, wali kelas melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pembelajaran daring, yaitu secara umum peserta didik semangat untuk belajar, terbukti lebih dari 90% peserta didik aktif dalam mengikuti pembelajaran daring, mengisi absensi, mempelajari materi yang diunggah pendidik, serta mengerjakan tugas.

Selain itu, wali kelas juga melakukan pemantauan kepada peserta didik. Wali kelas akan melakukan pemanggilan kepada peserta didik yang mengalami masalah. Apabila belum ada perubahan pada

diri peserta didik ke arah yang lebih baik , maka ada pemanggilan untuk wali murid. Peserta didik akan diberikan arahan dan bimbingan secara lebih intensif. Wali kelas telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

5) Peserta Didik

Peserta didik merupakan individu yang menempa diri dengan mengikuti proses pembelajaran yang didampingi oleh pendidik. Berdasarkan fungsi tersebut peserta didik dapat menempa diri dengan baik, namun karena faktor daring, peserta didik seringkali kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran akibat gangguan di sekitar, seperti membuka *Tik Tok*, menonton *anime*, *streaming movie*. Selain itu, dalam proses pengembangan potensi peserta didik, dapat dikatakan kurang maksimal, karena pendidik hanya bisa mendampingi secara daring serta kurang ada pengawasan dari wali murid.

6) Wali Murid

Wali murid sebagai pendukung dan pendamping pendidikan peserta didik dengan menumbuhkan nilai karakter, motivasi belajar, serta memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Berdasarkan fungsi tersebut, wali murid telah memfasilitasi *wifi* atau paket data untuk peserta didik guna mengikuti proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) secara daring. Selain itu, wali murid selalu mengingatkan peserta didik untuk melaksanakan kewajiban salat, memberikan motivasi serta membiasakan peserta didik agar memiliki sikap tanggungjawab. Wali murid telah melaksanakan tupoksi dengan baik.

b. Pelaksanaan

Menurut Ajat Rukajat, pelaksanaan diartikan sebagai implementasi dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. (Ajat Rukajat, 2018: 19) Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) secara daring melalui *Google Classroom* telah dilaksanakan oleh Pendidik. Pada RPP Pendidikan Agama Islam (PAI), kegiatan inti atau pelaksanaan menggunakan *braiding methods*, yakni peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menganalisis nilai- nilai pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan, sehingga setiap kelompok harus melakukan presentasi atas hasil diskusi kelompok masing- masing.

Namun, pada pelaksanaannya, pendidik memberikan tugas untuk merangkum materi tanpa membentuk kelompok secara daring. Penugasan tersebut dibagikan melalui *chat Google Classroom*. Saat pandemi *Covid-19*, pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) belum sesuai dengan RPP. Hal tersebut dikarenakan RPP belum direvisi menjadi RPP daring. Selain itu, adanya keterbatasan tempat maupun waktu pembelajaran yang mengalami pengurangan sebanyak 75 menit per kelas. Sebagai pertimbangan pula, pendidik memperhatikan kondisi fisik maupun psikis peserta didik yang hanya sekolah dari rumah, tentu ada kemungkinan besar peserta didik merasa bosan, sehingga pendidik tidak memberikan tugas terlalu berat guna meminimalisir agar pikiran peserta didik tidak terlalu stres.

Ketika peneliti mendampingi peserta didik melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dari rumah, Nashita Keysha Chaniago kelas X MIPA 4 mengerjakan tugas bisa sambil memutar lagu- lagu korea, *streaming* video serta *scrol Tik Tok*. Hal tersebut membuktikan bahwa, pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) secara daring membuat peserta didik lebih mudah terganggu dengan sesuatu yang ada di sekitar. Hal tersebut mengakibatkan, peserta didik menjadi kurang fokus dengan apa yang sedang dipelajari.

Rista Devi Kurniawati kelas X MIPA 2 mengaku sering kebingungan dalam mengerjakan, baik merangkum atau mengerjakan soal, karena materi belum dijelaskan secara langsung oleh pendidik. Sedangkan, M. Firman Hakam Naja kelas X MIPA 5 lebih senang langsung *browsing* di *Google* ketika mengalami kebingungan terhadap materi. Peserta didik terlihat masih sukar dalam memahami materi selama pembelajaran melalui *Google Classroom*.

Pada kenyataannya, *Google Classroom* memang lebih terorganisasi, efisiensi waktu, tidak terbatas ruang dan waktu. Namun, saat diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), penyaluran aspek kognitif, aspek afektif serta psikomotorik belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Dibutuhkan sinergitas yang baik antara pihak sekolah serta *stakeholder*, karena sejatinya sekolah bukan satu- satunya menjadi tumpuan utama dalam meraih tujuan pembelajaran, melainkan juga dari lingkungan keluarga, sekolah serta masyarakat.

c. Evaluasi

Menurut Ajat Rukajat, evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atas target suatu program yang telah dilaksanakan. Melalui evaluasi, pendidik dapat mengambil keputusan secara tepat. (Ajat Rukajat, 2018: 23)

1) Evaluasi Pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI)

Evaluasi yang dilakukan pendidik pada aspek kognitif yakni penilaian tugas, seperti merangkum dan mengerjakan soal. Selanjutnya, evaluasi yang dilakukan pada aspek afektif yakni dari segi keaktifan peserta didik dalam bertanya maupun menanggapi materi yang ditugaskan melalui *Google Classroom*. Sedangkan, pada aspek psikomotorik saat ini belum terealisasi, seperti membaca surat Al- Qur'an sesuai dengan tajwid, praktik perawatan jenazah, haji dan sebagainya karena pandemi *covid-19*. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui *Google Classroom* belum tercapai.

2) Evaluasi Kepala Sekolah

Kepala sekolah melakukan evaluasi kepada pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui pengisian *Google Form*. Adapun pengisiannya meliputi, tanggal, nama pendidik, mata pelajaran, kelas, jam pelajaran, materi, metode, siswa yang tidak hadir, keterangan. Kepala sekolah selalu melakukan pemantauan terhadap pendidik dan proses pembelajaran melalui laporan dari *Google Form*.

3) Evaluasi Wali Kelas

Nanik Mubiyati, S.Pd. M.Pd., selaku wali kelas X MIPA 5 melakukan pemantauan kepada semua peserta didik. Wali kelas akan melakukan evaluasi, apabila pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI) memberi laporan jika terdapat peserta didik yang bermasalah. Adapun masalahnya seperti, peserta didik yang tidak pernah mengerjakan tugas, maka akan dipanggil wali kelas untuk klarifikasi masalah.

Adapun wali kelas memberikan kesempatan waktu satu minggu kepada peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya dengan pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI). Apabila peserta didik masih melakukan kesalahan yang sama, maka ada panggilan wali murid maksimal tiga kali. Pada panggilan pertama, peserta didik wajib membuat surat pernyataan bermaterai. Jika belum ada perbaikan, maka peserta didik dianggap tidak tuntas dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).”

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan, bahwa wali kelas akan melakukan evaluasi ketika ada permasalahan pada peserta didik. Adapun permasalahan tersebut yang sekiranya tidak dapat diselesaikan oleh pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI) secara mandiri, melainkan perlu melibatkan wali kelas serta wali murid. Peserta didik akan mendapatkan bimbingan yang lebih intensif agar dapat memecahkan masalah yang dialaminya.

4) **Evaluasi Wali Murid**

Selama pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) secara daring, peserta didik menjadi lebih sering berinteraksi dengan wali murid. Adapun hasil analisis dari wawancara dengan tiga wali murid yakni sebagai berikut.

Menurut wali murid, peserta didik menjadi kurang disiplin dan mudah terganggu oleh hal- hal di sekitarnya, seperti mendengarkan lagu- lagu korea, menonton video *Korean Pop (K-Pop)* saat pembelajaran berlangsung. Peserta didik menjadi mudah mengeluh dan semangat belajar berkurang. Selain itu, pembelajaran daring dapat meningkatkan rasa individualisme dan peserta didik sering lupa waktu karena asik bermain *smartphone*.

Adapun evaluasi yang dilakukan oleh wali murid kepada peserta didik yakni selalu mengingatkan untuk melaksanakan salat, rajin belajar dan memberikan motivasi. Selain itu, wali murid mengusulkan agar pendidik mengevaluasi metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui *Google Classroom* agar penyampaian materi lebih mudah dipahami oleh peserta didik.

Berdasarkan analisis di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui *Google Classroom* memang memiliki sisi positif dan negatif. Adapun sisi positifnya yakni menjadi salah satu upaya preventif dari penularan virus *covid-19*, melatih peserta didik untuk mandiri, serta bertanggungjawab. Selanjutnya, sisi negatif dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui *Google Classroom*, yakni menjadikan peserta didik kurang bergairah dalam belajar, kurang bisa memahami materi serta dapat meningkatkan rasa individualisme dalam diri peserta didik.

2. **Faktor Pendukung dan Penghambat Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Melalui Media *Google Classroom* Di Tengah Pandemi**

Adapun faktor pendukung dan penghambat pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui media *Google Classroom* terbagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

a. **Faktor Pendukung Internal**

Faktor pendukung internal merupakan faktor- faktor dari dalam setiap individu. Adapun faktor pendukung internal, yakni sebagai berikut.

1) **Bagi Pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI)**

Pendidik sangat terbantu karena kepala sekolah mengadakan *workshop* pembelajaran melalui *Google Classroom*. Selain itu, pembelajaran berjalan dengan lancar karena didukung sinyal yang kuat. Pada pelaksanaannya, semua peserta didik juga telah memiliki *smartphone* serta pernah mendapatkan bantuan kuota internet dari pihak sekolah. Pendidik juga terbantu oleh peserta didik yang alumni TPQ (Taman Pendidikan al-Qur'an) dan alumni Madrasah Diniyah yang aktif bertanya serta menanggapi materi saat pembelajaran berlangsung.

2) **Bagi Peserta Didik**

Peserta didik memiliki *smartphone* pribadi, sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran serta dapat mengoperasikan *Google Classroom* dengan baik. Pada pelaksanaannya, peserta didik terbantu dengan adanya *wifi* di rumah maupun kuota internet pribadi. Peserta didik saling berdiskusi via *chat* apabila mengalami kebingungan dalam memahami materi. Peserta didik juga pernah mendapatkan bantuan kuota internet gratis dari pihak sekolah.

b. **Faktor Pendukung Eksternal**

Faktor pendukung eksternal memiliki makna faktor- faktor yang berasal dari luar, seperti lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Adapun faktor pendukung eksternal, yakni sebagai berikut.

1) **Wali Murid**

Wali murid memfasilitasi peserta didik dengan menyediakan *wifi* di rumah maupun kuota internet pribadi. Selain itu, wali murid dapat memantau peserta didik serta memberikan motivasi belajar selama pembelajaran daring di rumah. Wali murid sebagai fasilitator dan motivator bagi peserta didik.

2) **Fasilitas Umum Yang Disediakan Oleh Desa**

Bagi peserta didik yang tidak memiliki *wifi* di rumah atau kuota internet pribadi yang kurang memadai, ada fasilitas umum yang disediakan oleh desa. Adapun fasilitas berupa *wifi* seperti di warung, balaidesa, masjid, bahkan tetangga sekitar yang memiliki sifat sosial yang memberikan bantuan *wifi* secara gratis, sehingga peserta didik tetap bisa mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui *Google Classroom* dengan memanfaatkan fasilitas umum di sekitar.

c. **Faktor Penghambat Internal**

1) **Bagi Pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI)**

Bantuan kuota internet gratis dari Pemerintah hanya diperuntukkan bagi PNS, sedangkan GTT tidak mendapat bantuan tersebut. Padahal, pendidik yang berstatus GTT juga membutuhkan akses internet untuk menunjang pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui *Google Classroom* sehari- hari. Hendaknya GTT juga mendapat subsidi paket data agar sifatnya sama rata, baik yang PNS maupun GTT.

Saat ini, materi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang bersifat praktik belum terlaksana. Peserta didik hanya ditugasi untuk merangkum dan mengerjakan soal. Aspek psikomotorik belum bisa terlaksana sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Pada pembelajaran daring, kekuatan sinyal menjadi faktor utama. Kualitas sinyal yang terganggu akibat pemadaman listrik, kondisi alam seperti cuaca yang kurang mendukung, hujan, dan lain- lain juga menjadi penghambat. Akibatnya, pembelajaran dapat tertunda karena sinyal yang lemah.

2) **Bagi Peserta Didik**

Pada pelaksanaannya, konsentrasi peserta didik mudah terganggu oleh hal-hal yang berada di sekitar, seperti menonton *Korean Pop (K-Pop)*, *scrol Tik Tok*, menonton *anime*. Adanya gangguan tersebut mengakibatkan peserta didik menjadi susah untuk fokus saat mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui *Google Classroom*.

Selain itu, susah sinyal yang disebabkan oleh pemadaman listrik juga dapat mengganggu aktifitas pelaksanaan pembelajaran. Hambatan juga terjadi ketika memori penyimpanan pada *smartphone* peserta didik telah penuh, sehingga menyebabkan mereka tidak dapat mengirim tugas. Hal tersebut dapat diatasi dengan menghapus *file* yang tidak perlu atau bahkan memindahkan *file* tersebut ke laptop untuk sementara waktu.

Peserta didik sering mengalami kebingungan dalam memahami materi serta tugas yang diberikan oleh pendidik. Hal ini bisa dianggap wajar, karena memang pendidik belum menjelaskan materi tersebut secara verbal. Peserta didik juga mengaku tugas yang diberikan lumayan banyak. Hal ini dapat disebabkan oleh rasa bosan dalam diri peserta didik yang hanya belajar dari rumah. Apalagi juga dibebani oleh tugas-tugas mata pelajaran yang lain.

d. **Faktor Penghambat Eksternal**

1) **Bagi Wali Murid**

Wali murid mengaku tidak bisa mendampingi dan mengawasi peserta didik selama proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) secara daring berlangsung. Hal tersebut dikarenakan wali murid harus bekerja, sehingga wali murid tidak bisa mengontrol aktifitas peserta didik selama pembelajaran daring di rumah.

3. **Solusi Dan Upaya Dari Pihak Sekolah Serta *Stakeholder* Agar Tercapainya Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Melalui Media *Google Classroom* di Tengah Pandemi *Covid-19***

Guna mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui media *Google Classroom*, tentu membutuhkan sinergitas yang baik antar beberapa pihak. Berikut ini peneliti uraikan tentang peran pendidikan keluarga, pendidikan sekolah serta pendidikan masyarakat.

a. **Peran pendidikan keluarga**

Peran pendidikan keluarga sangat penting dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui *Google Classroom*. Hal ini dikarenakan peserta didik menjadi lebih banyak berinteraksi dengan keluarga dibandingkan teman sebaya. Keluarga hendaknya selalu memberikan motivasi, mengontrol perilaku peserta didik, mengingatkan peserta didik untuk selalu berbuat baik, pantang menyerah serta tidak lupa menjalankan kewajiban, seperti salat lima waktu.

Keluarga bersifat vital. Hal tersebut dikarenakan, di lingkup keluargalah peserta didik tumbuh dan berkembang. Keluarga dituntut menjadi *role model* yang baik bagi peserta didik. Melalui upaya ini, diharapkan antara peserta didik dengan keluarga mampu menjalin dan menjaga komunikasi yang baik.

b. **Peran pendidikan sekolah**

Setelah dievaluasi secara berkala, pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui *Google Classroom* dirasa kurang maksimal. Pihak sekolah akhirnya memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran secara kombinasi, yakni 50% tatap muka dan 100% daring yang dilaksanakan secara bersamaan. Adapun keputusan tersebut melalui kesepakatan wali murid berdasarkan pengisian surat pernyataan persetujuan pembelajaran secara 50% tatap muka atau 100% daring.

Pendidik harus lebih aktif dan kreatif dalam mengelola pembelajaran. Pada pelaksanaannya, pendidik dapat menjelaskan materi secara langsung di dalam kelas dengan jumlah peserta didik sekitar 13 anak. Sedangkan, bagi peserta didik yang 100% daring selalu diberikan pengarahan- pengarahan melalui *chat* agar peserta didik tidak mengalami kesulitan. Pendidik harus bekerja lebih ekstra

dalam mempersiapkan pembelajaran secara kombinasi, karena menggunakan dua metode sekaligus, yakni tatap muka dan daring secara bersamaan. Pendidik selalu mengingatkan peserta didik untuk pandai bersyukur serta selalu memberikan nasihat kebaikan-kebaikan, sehingga menularkan energi positif yang dapat membangun karakter *ahlakul karimah*.

c. **Peran Pendidikan masyarakat**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI), mayoritas peserta didik kelas X mengajinya belum lancar, baik dari pengucapan *makharijul huruf*, panjang pendek bacaan serta dalam hal mengatur napas. Oleh karena ini, pendidik selalu mengingatkan dan menganjurkan peserta didik untuk belajar mengaji di mushala- mushala terdekat dengan Ustaz-Ustazah. Hal ini dikarenakan waktu pembelajaran bagi peserta didik yang mengikuti 50% tatap muka sangat terbatas. Apalagi yang 100% daring, hanya bisa mendapat arahan dari pendidik melalui *chat Google Classroom*.

Pendidikan di masyarakat memiliki peran strategis dalam membantu peserta didik dalam belajar agama, selain belajar di lingkup keluarga dan sekolah. Pendidikan di masyarakat justru akan lebih mudah dicerna dan diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik, karena pendidikan di masyarakat bersifat aplikatif, bukan teoritis. Guna mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di tengah pandemi *Covid-19*, dibutuhkan adanya sinergitas yang baik antara peran keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiganya merupakan elemen yang kompleks dalam membentuk peserta didik menjadi manusia paripurna dan memiliki kepribadian baik.

E. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta analisa secara mendalam, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui media *Google Classroom* di tengah pandemi *covid- 19* sudah sesuai dengan teori Ajat Rukajat. Namun, pada tahap perencanaan, pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak membuat RPP daring. Kendati demikian, pendidik diberikan pelatihan terkait pembelajaran secara daring. Pada tahap pengorganisasian sudah sesuai dengan prosedur. Pada tahap pelaksanaan, pendidik menggunakan metode penugasan. Pada tahap evaluasi, penilaian aspek psikomotorik belum terlaksana.
2. Faktor Pendukung Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui media *Google Classroom* di tengah pandemi *Covid-19*, di antaranya adalah *workshop* pembelajaran *Google Classroom*, sarana yang memadai berupa sinyal yang kuat dan kuota internet, semua peserta didik memiliki *smartphone*, dan wali murid dapat memantau serta mengontrol peserta didik selama di rumah. Adapun faktor penghambat di antaranya, bantuan kuota internet gratis hanya untuk pendidik PNS, peserta didik yang berdomisili di daerah pedalaman mengalami susah sinyal, kualitas sinyal yang dipengaruhi oleh kondisi alam, materi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang bersifat praktik belum terlaksana, konsentrasi peserta didik mudah terganggu, dan wali murid tidak bisa mendampingi peserta didik karena harus bekerja.
3. Solusi dan upaya pihak sekolah serta *stakeholder* agar tercapainya tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui media *Google Classroom* di tengah pandemi *Covid-19* adalah penerapan pembelajaran secara kombinasi, yakni 50% tatap muka dan 100% daring. Adapun sistem pembelajaran tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara peran dari pihak keluarga, sekolah dan masyarakat, sehingga dapat membentuk peserta didik yang cerdas dan berkepribadian baik.

Referensi

- Al- Mighwar, Muhammad. 2006. *Psikologi Remaja*. Bandung: Pustaka Setia.
- Andy Satria, *Pembelajaran Daring Banyak Kendala, Guru dan Siswa Banyak Tak Siap*, (Online), (<https://muda.kompas.id/baca/2020/04/10/hambatan-dan-solusi-saat-belajar-daring-dari-rumah/>), diakses 24 Desember 2020).
- Ansari, Rasid. 2020. *Media Komik Sebagai Alternatif Media Promosi Kesehatan Seksualitas Remaja*. Jurnal Ilmiah Kesehatan, no.1.
- Badan Narkotika Nasional (BNN) Mengatakan Penggunaan Narkoba di Generasi Muda Naik Hingga 28 persen*, (Online), (<https://news.detik.com/berita/d-4600731/bnn-penyalahgunaan-narkoba-di-generasi-muda-naik-28-persen>), diakses 21 Desember 2020).
- Departemen Agama RI. 2006. *Al- Qur'an dan Terjemahnya : Juz 1- Juz 30*, Surabaya: Karya Agung.
- Editorial Kompas Corner. *Hambatan dan Solusi Saat Belajar Daring Dari Rumah*, (Online), (<https://muda.kompas.id/baca/2020/04/10/hambatan-dan-solusi-saat-belajar-daring-dari-rumah/>), diakses pada 24 Desember 2020).
- Imam Nurcahyo, *Pemkab Bojonegoro Perpanjang Masa Belajar di Rumah Hingga Batas Waktu Yang Belum Ditentukan*, (Online), (<https://beritabojonegoro.com/read/20102-pemkab-bojonegoro-perpanjang-masa-belajar-di-rumah-hingga-batas-waktu-yang-belum-ditentukan.html>), diakses 04 November 2020).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Terbitkan Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah*, (Online), (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) (kemdikbud.go.id), diakses 4 Desember 2020).
- Kompri. 2017. *Manajemen Pendidikan : Komponen Elementer Kemajuan Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kurniasari, Asrilia dkk. 2020. *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) Selama Pandemi Covid-19*. Jurnal Kajian Pendidikan, no.3.
- Mahmudi. 2019. *Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Islam Tinjauan Epistemologi, Isi, Dan Materi*. Jurnal Ta'dibuna: Pendidikan Agama Islam, volume no. 1.

- Masmuallim. 2013. *Paradigma Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Integratif*. Jurnal Insania: Jurnal Pendidikan Agama Islam, no. 2.
- Minarti, Sri. 2016. *Ilmu Pendidikan Islam : Fakta Teoritis- Filosofis & Aplikatif-Normatif*. Jakarta: Amzah.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Parwati Ni Nyoman, dkk. 2018. *Belajar dan Pembelajaran*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2020. *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*, (Online), (<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>, diakses 24 Desember 2020).
- Qomar, Mujamil. 2018. *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)*. Jakarta: Erlangga.
- Qomariah, Siti, Nursobah, dkk. 2019. *Implementasi Pemanfaatan Google Classroom untuk pembelajaran di Era Revolusi 4.0* dipresentasikan dalam Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019. Pontianak.
- Rahma Andita, *RUU Larangan Minuman Beralkohol: Polri Catat Ada 223 Kasus Kena Miras*, (Online), (<https://nasional.tempo.co/read/1405505/ruu-larangan-minuman-beralkohol-polri-catat-ada-223-kasus-karena-miras>), diakses 24 Desember 2020).
- Rukajat, Ajat. 2018. *Manajemen Pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saefulmilah, Muhammad Ilham. 2020. *Hambatan- Hambatan Pada Pelaksanaan Pembelajaran Daring Di SMA Riyadhul Jannah Jalancagak Subang*. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, no.3.
- Setiawan, Benni. 2008. *Agenda Pendidikan Nasional: Analisis Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sukamdinata, Nana Saodih. 2006. *Pengembangan Kurikulum teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Sukmawati. 2020. *Implementasi Pemanfaatan Google Classroom Dalam Proses Pembelajaran Online di Era Industri 4.0*. Jurnal Kreatif Online, no.1.
- Sumantri. 2015. *Pembelajaran Teori dan Praktik di Tingkat Pendidikan Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, Eko Purnomo dan Rahmatullah. 2020. *Optimalisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Melalui Google Classroom*. Jurnal Piwulang, no. 2.
- Susiana. 2017. *Problematika Dalam Pembelajaran PAI di SMKN 1 Turen*. Jurnal Al-Thariqah : Jurnal Pendidikan Islam, no. 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Online), (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/20tahun2003uu.htm> diakses 21 November 2020).

Metode Qiro'ati untuk Meningkatkan Membaca Al-Qur'an Anak Usia Dini

Ferry Indrayani

ferryindrayani45@gmail.com

Pascasarjana IAIN Kudus

Abstrak

Pendidikan merupakan segala pengalaman dalam berbagai lingkungan yang berpengaruh dalam kehidupannya. Pendidikan berlangsung dari sejak dalam kandungan hingga akhir hayat individu tersebut. Namun banyak orang tua yang belum memahami bahwa Pendidikan berawal dari sejak dalam kandungan. Pendidikan tidak terbatas pada sekolah formal saja, namun Pendidikan berlangsung sejak anak lahir hingga akhir hayatnya. Pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan, tanpa adanya pendidikan seorang anak tidak bisa berkembang. Masa usia dini merupakan masa peletak dasar atau pondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Diyakini oleh sebagian besar pakar, bahwa masa kanak-kanak yang bahagia adalah merupakan dasar bagi keberhasilan di masa yang akan datang dan sebaliknya. Anak usia dini merupakan anak yang berusia 0-6 tahun, dimana anak mulai sensitif untuk menerima berbagai upaya perkembangan bakat dan potensi anak. Masa usia dini yaitu masa peka terhadap terjadinya fungsi-fungsi fisik dan psikologis yang siap di stimulasi dan diberikan pengarahan. Pada masa usia dini merupakan dasar dalam perkembangan fisik motorik, kognitif, nilai agama dan moral, bahasa, sosial emosional, dan seni. Stimulasi anak harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak masing-masing, anak mempunyai perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda dengan kebutuhan anak tercapai secara maksimal. Masa golden age atau masa keemasan merupakan masa kritis dalam tahapan kehidupan, dimana menjadi landasan perkembangan yang menentukan perkembangan anak selanjutnya. Memori anak akan berkembang sangat pesat, hal ini merupakan banyak pengalaman-pengalaman baru yang diperoleh anak dari lingkungan sekitar. Dalam pengembangan dan menstimulasi perkembangan anak membutuhkan

metode-metode pembelajaran yang kreatif untuk melejitkan perkembangan anak. Metode Qiro'ati ialah membaca Alquran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan qoidah ilmu tajwid sistem pendidikan dan pengajaran metode Qiro'ati ini melalui system pendidikan berpusat pada murid dan kenaikan kelas/jilid tidak ditentukan oleh bulan/tahun dan tidak secara klasikal, tapi secara individual (perseorangan).

Kata Kunci: *Metode Qiro'ati, Anak Usia Dini*

Abstract

Education is all experiences in various environments that influence life. Education takes place from the womb until the end of the individual's life. However, many parents do not understand that education begins in the womb. Education is not limited to formal schools, but education takes place from the time a child is born until the end of his life. Education is very important in life, without education a child cannot develop. Early childhood is a period of laying the foundation or foundation for further growth and development. It is believed by most experts, that a happy childhood is the basis for future success and vice versa. Early childhood is a child aged 0-6 years, where children begin to be sensitive to accept various efforts to develop children's talents and potentials. Early childhood is a period of sensitivity to the occurrence of physical and psychological functions that are ready to be stimulated and given direction. Early childhood is the basis for physical, motoric, cognitive, religious and moral values, language, social-emotional, and artistic development. Stimulation of children must be adjusted to the needs and development of each child, children have different developments and growth with the child's needs achieved optimally. The golden age or critical period is a critical period in the stages of life, which is the basis of development that determines the next child's development. Children's memory will develop very rapidly, this is a lot of new experiences gained from the surrounding environment. In the development and stimulation of child development requires creative learning methods to jump-start children's development. The Qiro'ati method is reading the Qur'an which directly enters and practices tartil reading in accordance with the qoidah of the science of tajwid, the education system and the teaching of the Qiro'ati method is through a student-centered education system and the increase in grade/volume is not determined by/classical year and not legally, but individually (individually).

Keywords: *Qiro'ati Method, early childhood*

Pendahuluan

Anak usia dini merupakan pemilik bangsa di masa yang akan datang, oleh karena itu pemberian stimulasi terhadap kecerdasannya yang terdiri dari beberapa kecerdasan atau sering disebut dengan kecerdasan jamak sangat penting diberikan sejak dini agar potensi yang dimilikinya bisa berkembang dengan optimal. Kecerdasan jamak yang dimiliki oleh anak usia dini terdiri dari sembilan kecerdasan. Gardner (Sujiono, 2009: 183). Pada mulanya memaparkan 7 (tujuh) aspek intelegensi yang menunjukkan kompetensi intelektual yang berbeda, kemudian menambahkannya menjadi delapan aspek kecerdasan, yang terdiri dari kecerdasan linguistik, kecerdasan spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan naturalis, tetapi dalam penerapan di Indonesia ditambahkan menjadi sembilan, yaitu kecerdasan spiritual.

Pendidikan mempunyai pengaruh tidak terbatas karena anak-anak didik di ibaratkan sehelai kertas yang masih putih bersih, yang dapat ditulisi apa saja sesuai kehendak penulis, baik buruknya seorang anak tergantung kepada pendidikan yang diterimanya. Untuk itu kita semua bertanggung jawab mendidik dan memberikan penguatan-penguatan yang baik dan positif untuk kehidupannya. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini merupakan upaya menstimulasi yang tertuju untuk anak sejak lahir hingga berumur enam tahun yang dilakukan melalui rangsangan dalam membantu pertumbuhan dan aspek-aspek perkembangan agar anak mempunyai kesiapan dalam melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih lanjut. Pendidikan usia dini adalah dasar atau landasan yang akan menjadi memori di dalam jenjang kehidupan yang akan mendatang.

Dari penjelasan di atas intinya bahwa kita dalam ajaran islam ada perintah untuk mendidik anak berdasarkan agama. Sedangkan salah satu materi pendidikan agama adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-qur'an. Membaca Al-qur'an itu tidak boleh asal baca dan harus hati-hati karena tidak boleh salah cara pengucapan makhrojnya, tajwidnya karena akan mempengaruhi arti dari Alquran itu. Untuk itu di perlukan metode yang cocok agar peserta didik bisa membaca Al-qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan hukum bacaannya.

Kajian Literatur

Kecerdasan jamak tersebut perlu dikembangkan khususnya pada lembaga-lembaga yang mengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik itu pada jalur formal, non formal ataupun informal. Pemberian stimulasi terhadap kecerdasan jamak anak usia dini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangannya di masa yang akan datang. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya.

Pembelajaran dengan kecerdasan jamak sangatlah penting untuk mengutamakan perbedaan individual pada anak didik". Implikasinya teori dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah bahwa pengajar perlu memperhatikan modalitas kecerdasan dengan cara menggunakan berbagai strategi dan pendekatan sehingga anak akan dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Terdapat berbagai model pembelajaran yang dapat dipilih sehingga sesuai dengan cara dan gaya belajar anak. Hal ini merupakan kekuatan agar anak dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan yang lebih penting adalah rasa senang dan nyaman dalam belajar dan dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya yang berbeda-beda tersebut.

Semua tujuan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama selalu mengidealkan terciptanya sikap anak didik yang dewasa, baik intelektualnya, emosionalnya, maupun spiritualnya. Proses pendidikan yang hanya menekankan kedewasaan intelektual dan mengabaikan kedewasaan emosional dan spiritual akan memunculkan manusia yang cerdas tetapi tidak bermoral, intoleran, miskin solidaritas, dan tidak humanis.

Untuk dapat membina akhlak pembelajaran Al-qur'an terhadap anak sebagai salah satu pembinaan akhlak perlu secara terus menerus mengembangkan diri secara sistematis. Umat islam sekarang hidup pada abad yang disinari oleh pengetahuan yang telah dicapai oleh orang-orang Eropa dan Amerika terutama dalam bidang teknologi. Umat islam lupa bahwa mereka mempunyai Al-qur'an yang merupakan kitab suci yang telah memberikan pengaruh begitu luas dan mendalam terhadap jiwa manusia. Al-qur'an merupakan dasar keyakinan yang keagamaan, keibadahan dan hukum. Membimbing manusia dalam mengarungi hidupnya adalah sangat layak bila Al-qur'an mendapat perhatian istimewa.

Almarhum KH. Dachlan Salim Zarkasyi dalam perjalanan menyusun metode baca tulis Al-Qur'an sering melakukan studi banding ke berbagai pesantren dan madrasah Al-Qur'an hingga beliau sampai ke Pesantren Sedayu Gresik Jawa Timur (tepatnya pada bulan Mei 1986) yang pada saat itu dipimpin oleh Al Mukarram K.H. Muhammad. Almarhum K.H. Dachlan Salim Zarkasyi tertarik untuk melakukan studi banding sekaligus bersilaturahmi ke Pesantren Sedayu Gresik, karena TK Al-Qur'an balitanya (4-6 tahun), yang dirintis oleh K.H. Muhammad sejak tahun 1965 dengan jumlah muridnya 1300 siswa yang datang dari berbagai kepulauan yang ada di Indonesia. Maka dapat disimpulkan TK Al-Qur'an Sedayu adalah TK Al-Qur'an pertama di Indonesia bahkan di dunia.

Sebulan setelah KH. Dachlan Salim Zarkasyi silaturahmi ke Pesantren Sedayu Gresik tepatnya pada tanggal 1 Juli 1986, beliau mencoba membuka TK Al-Qur'an yang sekaligus mempraktikkan dan mengujikan metode yang disusunnya sendiri dengan target rancana 4 tahun seluruh muridnya akan khatam Al-Qur'an. Berkat Inayah Allah SWT di luar dugaan dalam perjalanan 7 bulan ada beberapa siswa yang telah mampu membaca beberapa ayat Al-Qur'an, serta dalam jangka waktu 2 tahun telah mengkhataamkan Al-Qur'an dan mampu membaca dengan baik dan benar (bertajwid). TK Al-Qur'an yang dipimpinnya makin dikenal keberbagai pelosok karena keberhasilan mendidik siswa-siswinya. Dari keberhasilan inilah banyak yang melakukan studi banding dan meminta petunjuk cara mengajarkan metode yang diciptakannya. K.H. Dachlan Salim Zarkasyi secara terus-menerus melakukan evaluasi dan meminta penilaian dari para Kyai Al-Qur'an atas metode yang diciptakannya. Atas usul dari Ustadz A. Djoned dan Ustadz Syukri Taufiq, metode ini diberi istilah dengan nama "QIRAATI" dibaca "QIROATI" yang artinya BACAANKU (pada saat itu ada 10 jilid). (Dachlan Salim Zarkasyi, 1996:10)

Qiro'ati diminati oleh mayoritas para pendidik Al-Qur'an dikarenakan memiliki beberapa perbedaan dengan metode lain di antaranya:

1. Berkesinambungan antara halaman ke halaman berikutnya.
2. Berkesinambungan antara jilid satu dan seterusnya.
3. Disesuaikan dengan usia para pelajar Al-Qur'an.
4. Kata dan kalimatnya tidak keluar kaidah ayat-ayat Al-Qur'an tidak kedaerahan.
5. Setiap pokok bahasan sudah diterapkan ilmu tajwid.
6. Dilengkapi petunjuk mengajar setiap pokok bahasan.
7. Dilengkapi buku gharib, Musykilat dan tajwid praktis.
8. Sangat mudah untuk diucapkan.

Dari tahun ketahun perkembangan Qiro'ati makin meluas keseluruh pelosok negeri bahkan di beberapa negara asing tercatat sampai tahun 2000 telah masuk ke negara Australia, Malaysia, Brunei Darusalam, Singapura. Dari perkembangan tersebut Almarhum K.H. Dachlan Salim Zarkasyi tidak terlalu gembira bahkan merasa khawatir karyanya ini disalah gunakan yang berbau bisnis belaka, untuk itu pada tahun 1990 beliau mengundang seluruh kepala TKA/TPA dan lembaga yang mempergunakan qiroati pada suatu acara Silatnas Nasional untuk mentashih ulang para kepala TKA/TPA dan pengelola qiroati sekaligus menunjuk koordinator tingkat propinsi dan kota besar yang ada di Indonesia.

Tujuan Metode Qiroati

Adapun tujuan dari metode qiroati di antaranya yaitu:

1. Menjaga dan memelihara kehormatan dan kesucian Al-Qur'an dari segi bacaan tartil sesuai dengan kaidah tajwid.
2. Menyebarluaskan ilmu bacaan Al-Qur'an yang benar dengan cara yang benar pula.
3. Mengingatkan para guru Al-Qur'an agar berhati-hati dalam mengajarkan Al-Qur'an.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan atau pengajaran ilmu baca Al Qur'an di tengah-tengah masyarakat.

Target Penggunaan Metode Qiroati

Adapun target penggunaan metode qiro'ati di antaranya yaitu :

1. Untuk anak-anak pra sekolah TK (usia 4-6 tahun) .
2. Untuk remaja.
3. Orang dewasa.

Kelebihan dan Kekurangan Metode Qiroati

Kelebihan metode qiroati antara lain yaitu:

1. Praktis, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh peserta didik.
2. Dalam metode ini terdapat prinsip untuk guru dan murid.
3. Peserta didik aktif dalam belajar membaca, guru hanya menjelaskan pokok pembelajaran dan memberi contoh bacaan.

4. Siswa walaupun belum mengenal tajwid tetapi sudah bisa membaca Al-Qur'an langsung fasih dan tartil dengan ilmu tajwidnya. Karena belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardlu kifayah sedangkan membaca Al-Qur'an dengan tajwidnya itu fardlu'ain.
5. Peserta didik menguasai ilmu tajwid dengan praktis dan mudah.
6. Pada metode ini setelah khatam meneruskan lagi bacaan gharib.
7. Jika santri sudah lulus 6 Jilid beserta ghoribnya, maka ditest bacaannya kemudian setelah itu santri mendapatkan syahadah jika lulus tes.

Sedangkan kekurangan metode qiroati yaitu:

1. Anak tidak bisa membaca dengan mengeja.
2. Anak kurang menguasai huruf hijaiyah secara urut dan lengkap.
3. Bagi anak yang tidak aktif akan semakin tertinggal.
4. Bagi yang tidak lancar lulusnya juga akan lama karena metode ini lulusnya tidak ditentukan.

Prinsip-Prinsip Dasar Qiro'ati

Prinsip-prinsip dasar qiroati terbagi menjadi 2 di antaranya yaitu :

1. Prinsip-prinsip yang di pegang oleh guru/ustadz yaitu:
 - a. DAKTUN (Tidak Boleh Menuntun) Dalam hal ini ustadz – ustadzah hanya menerangkan pokok pelajaran, memberikan contoh yang benar, menyuruh santri membaca sesuai dengan contoh menegur yang salah, menunjukkan kesalahan bacaan dan membetulkan.
 - b. TIWAGAS (Teliti, Waspada dan Tegas) Maksud dari TIWAGAS tersebut adalah Teliti artinya dalam memberikan contoh atau menyimak ketika santri membaca jangan sampai ada yang salah walaupun sepele. Waspada artinya dalam memberikan contoh atau menyimak bacaan santri benar – benar diperhatikan, ada rasa sambung dari hati ke hati. Tegas maksudnya dalam memberikan penilaian ketika menaikkan halaman atau jilid tidak boleh banyak toleransi, ragu–ragu ataupun segan. Penilaian yang diberikan harus benar–benar obyektif.
2. Prinsip-prinsip yang harus dipegang santri/anak didik:
 - a. CBSA+M : Cara Belajar Santri Aktif dan Mandiri. Santri dituntut keaktifan, konsentrasi dan memiliki tanggung jawab terhadap dirinya tentang bacaan Al Qur'annya, sedangkan ustadz – ustadzah sebagai pembimbing, motivator dan evaluator saja.

- b. LCTB : Lancar Cepat Tepat dan Benar. Maksud dari pengertian LCTB yaitu Lancar artinya bacaannya tidak mengulang – ulang. Cepat berarti bacaannya tidak ada yang putus – putus atau mengeja. Tepat bermakna dapat membunyikan sesuai dengan bacaan dan dapat membedakan antara bacaan yang satu dengan lainnya. Benar maksudnya hukum – hukum bacaan tidak ada yang salah.

Dalam mengajarkan qiro'ati ada jilid I sampai jilid VI yaitu:

- a. Jilid I adalah kunci keberhasilan dalam belajar membaca Al-Qur'an. Apabila jilid I lancar pada jilid selanjutnya akan lancar pula, guru harus memperhatikan kecepatan santri.
- b. Jilid II lanjutan jilid I yang disini telah terpenuhi target jilid I.
- c. Jilid III adalah setiap pokok bahasan lebih ditekankan pada bacaan panjang (huruf mad).
- d. Jilid IV merupakan kunci keberhasilan dalam bacaan tartil dan tajwid.
- e. Jilid V ini lanjutan dari jilid IV. Disini diharapkan sudah harus mampu membaca dengan baik dan benar.
- f. Jilid VI adalah jilid yang terakhir yang kemudian dilanjutkan dengan pelajaran juz.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang secara langsung kelapangan untuk memperoleh data dan informasi dari berbagai sumber. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbal.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian Kualitatif Deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengungkapkan fenomena yang tidak dapat dikualifikasikan yaitu bersifat deskriptif seperti proses langkah kerja, pertimbangan-pertimbangan suatu konsep, karakteristik, gambar-gambar, tata cara perilaku dan lain sebagainya.

Penelitian ini adalah jenis Penelitian Lapangan field research, yaitu penelitian yang mengumpulkan datanya di lapangan, seperti lingkungan sekolah. Pola penelitian yang peneliti gunakan adalah pola kualitatif yaitu mengamati objek (orang) dalam lingkungan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil Penelitian yang diperoleh peneliti, bahwa penerapan metode qiroati dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an secara tartil di KB IT Al Ikhsan yaitu guru mempersiapkan alat peraga beserta buku penghubung, media, sedangkan murid menyiapkan alat-alat tulis, buku qiroati, dan berdo'a bersama-sama. Dalam penerapan metode qiroati terdapat Strategi yang digunakan dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an melalui metode qiroati yaitu strategi klasikal-individual, strategi individual, dan strategi klasikal balik. Dalam penerapan ini juga menambahkan materi tambahan berupa hafalan surat-surat pendek, do'a- do'a harian, yang terakhir yaitu evaluasi yang dilakukan oleh ketua lembaga. Untuk faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an secara tartil di KB IT Al Ikhsan, dari faktor pendukung seperti hardware (Sarana dan Prasarana), Software (Dana yang Cukup), Brainware (Guru, anak, Orang Tua).

Jadi kontribusi dari penerapan metode qiroati dapat meningkatkan keberhasilan yang tinggi dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an secara tartil di KB IT Al Ikhsan. Sebagai daya pendukung dan penyemangat anak dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an. Sebagai sarana dakwah kepada masyarakat dalam rangka memberantas buta huruf Al-Qur'an, serta sebagai bahan informasi yang bermanfaat guna menuju jalan yang diridhoi Allah SWT. Dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam pembelajaran Al-Qur'an serta kreatifitas dan inovatif dalam memilih metode pembelajaran Al-Qur'an. Dapat membangun jiwa anak yang qur'ani yaitu generasi yang mencintai Al-Qur'an dan mempunyai komitmen terhadap Al-Qur'an serta memahami isi kandungan Al-Qur'an sehingga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Simpulan

Berdasarkan analisis hasil Penelitian dan pembahasan hasil Penelitian dapat menyimpulkan Kontribusi dari penerapan metode qiroati di KB IT Al Ikhsan dalam melancarkan baca tulis Al-Qur'an yaitu dengan cara mengurangi angka kesulitan bagi anak dalam membaca Al-Qur'an, dimana anak diharuskan membaca langsung tanpa di eja. Guru mewajibkan semua anak agar mampu dalam membaca Al-Qur'an sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari penerapan metode qiroati dapat meningkatkan profesionalisme dalam pembelajaran Al-Qur'an serta kreatifitas dan inovatif dalam memilih metode pembelajarn Al-Qur'an serta dapat membangun jiwa anak yang qur'ani yaitu generasi yang mencintai Al-Qur'an dan mempunyai komitmen terhadap Al-Qur'an serta memahami isi kandungan Al-Qur'an sehingga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Yamin Martinis & Sanan Jamilah Sabri. Panduan PAUD. Gaung Persada Press Group: Ciputat. 2012.
- Masitoh dkk. Strategi Pembelajaran TK. Penerbit Universitas Terbuka: Jakarta. 2009.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung. 2017.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung. 2014.
- Chaer Abdul. Perkenalan awal dengan Al-Qur'an. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta. 2014.
- Murjito Imam. Pedoman Metode Praktis Pengajaran Ilmu Al Qur'an Qiroati. Pendidikan Al Qur'an Metode Qiroati: Semarang. 2003.
- Salim Zarkasyi Dachlan. Qiroati Metode Praktis Belajar Membaca Al-Qur'an jilid 1-VI. Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Raudhatul Mujawwidin: Semarang. 1990.
- Salim Zarkasyi Dachlan. Empat Langkah Pendidikan TK/TPQ Metode Qiroati. Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Raudhatul Mujawwidin: Semarang. 1996.
- Salim Zarkasyi Dachlan. Memahami Qiroati. Semarang: Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Raudhatul Mujawwidin.

Rekonstruksi Pasal Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam: Studi Pemenuhan hak anak di Kudus

Inna Fauziatal Ngazizah
IAIN Kudus
innafauzi@iainkudus.ac.id

Abstrak

Penelitian pemenuhan hak pemeliharaan atas anak di kudus sebagai bentuk implementasi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang perlindungan anak. Metode pengumpulan data menggunakan pendoman wawancara terstruktur. Responden sampel dalam penelitian ini adalah 15 orang yang tersebar dari 9 kecamatan di Kabupaten Kudus. Profil responden dikelompokkan berdasarkan Asal Kecamatan di Kabupaten Kudus, Usia, Jenis kelamin dan Pendidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian field research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemenuhan hak anak untuk dapat hidup nyaman sesuai usianya tidak sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat dari data hasil penelitian di atas bahwa kekerasan verbal dan nonverbal yang diterima anak dari orang tua masih saja terjadi. Penyebab dari hal itu adalah semakin beratnya beban yang dialami oleh orang tua pada masa pandemi sehingga terjadi ketidakstabilan emosi dan perasaan orang tua sedikit banyak tidak terkendali. Keadaan ini berdampak pada anak yang mendapatkan ancaman, bullying, hukuman fisik dan non fisik dari orang tuanya yang cenderung lebih sensitif.

Kata Kunci: Hadhanah, KHI, hak anak, di Kudus

Abstract

Research on the fulfillment of the right to care for children in Kudus as a form of implementation of Article 105 of the Compilation of Islamic Law on child protection. The data collection method used structured interview guidelines. The sample respondents in this study were 15 people spread from 9 sub-districts in Kudus Regency. Respondent profiles were grouped based on the origin of the sub-district in Kudus district, age, gender and education. This type of research is a field research. The results showed that the fulfillment of children's rights to be able to live comfortably according to their age was not fully fulfilled. It can be seen from the research data above that verbal and nonverbal violence received by children from parents still occurs. The cause of this is the increasingly heavy burden experienced by parents during the pandemic, resulting in emotional instability and the feelings of parents are more or less out of control. This situation has an impact on children who get threats, bullying, physical and non-physical punishment from their parents who tend to be more sensitive.

Keyword: *Hadhanah, KHI, children's rights, in Kudus*

PENDAHULUAN

Anak merupakan cikal bakal potensi dan penerus cita-cita bangsa dan agama. Anak adalah modal pembangunan masa depan. Oleh sebab itu anak membutuhkan perlindungan dalam rangka menjami perkembangan fisik, psikis dan sosial secara seimbang, serasi dan utuh (Prist, 1997:2). Anak pada dasarnya tidak dapat melindungi diri sendiri dari hal-hal yang dapat merugikan fisik, psikis sosial dalam bidang kehidupan. Anak harus mendapatkan bantuan dari orang lain dalam perlindungan diri. Anak memiliki kedudukan yang istimewa sebagaimana firman Allah SWT. Al fur'qan (18): 7:

Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa

Qurrata'ayun dimaknai sebagai penenang mata dalam buku ulama islam propinsi di Indonesia (Indonesia, 2006: 905). *Qurrata'ayun* dijelaskan lebih lanjut oleh Imam Qurthubi dalam Rifa'I menjelaskan kata tersebut dimaknai dengan kebahagiaan mata dan ketenangan jiwa yang terwujud pada keturunan yang senantiasa menjaga ketaatan dalam tugas agama (Rifa'I, 2012: 82). Quraish Shihab menerangkan tentang *Qurrata* dengan kegembiraan dengan menghiasai amal-amal terpuji dan juga kesalehan kepada orang tua dan agama (Shihab, 2009: 164). Pemaknaan uraian di atas menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi semua pihak dalam rangka mewujudkan pesan kata *Qurrata'ayun* yang terkandung di dalam al Qur'an untuk membentuk karakter tumbuh kembang anak melalui ketataan kepada agama sejak dini dengan pembiasaan perilaku yang baik dalam sehari-hari. Hal tersebut tentu tidak lepas dari peranan orang tua dan atau lingkungan anak bertempat tinggal (Marya, 2019). Peran orang tua mulanya adalah membimbing sikap dan ketrampilan dasar seperti pendidikan agama dan pembiasaan yang baik (Nurlaeli dan Juniarti, 2017). Orang tua juga berkewajiban menjadi pengawas terhadap pola perilaku anak yang secara tidak langsung merupakan subsistem antara anak dengan ayah ibunya dalam tanggungjawabnya untuk melindungi, menumbuhkan dan mendisiplinkan (Pratiwi, M. R., Mukaromah, M., & Herdiningsih, 2018).

Sejalan hal tersebut, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hadhanah yang membahas tentang hak dan kewajiban anak ataupun orang tua. Tujuannya adalah terlindunginya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Kemunculan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hadhanah didasarkan pada berbagai peraturan seperti amanat 34 ayat (1) UUD 1945 “Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh negara,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja).

kewajiban pemeliharaan anak dan perlindungan anak terbebankan kepada orang tua. Namun, banyak hal yang menunjukkan pemenuhan perlindungan anak sebagaimana yang tersebut di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pemeliharaan atas anak (*hadhanah*) belum terakomodir seperti yang seharusnya tertulis dalam peraturan. Hal tersebut dapat dilihat dari data KPAI yang menunjukkan bahwa kasus perlindungan anak sebagai berikut (Ariyani, n.d.):

No.	Klaster	Presentasi	Jumlah Kasus
1.	Anak Berhadapan Dengan Hukum	34,8%	7.689 kasus
2.	Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif	19,4%	4.294 kasus
3.	Pendidikan	11%	2435 kasus
4.	kesehatan dan Napza	8.5%	1.881 kasus
5.	Pornografi Dan Cyber Crime	7,7%	1.709 kasus
6.	Trafficking Dan Eksploitasi	5,9%	1.306 kasus
7.	DII (Sosial, Hak Sipil, Agama dan Budaya)	12.5%	2786 Kasus

Realitas sosial di atas menunjukkan bahwa masih banyak kasus dimasyarakat yang tidak terakomodir sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam pemenuhan hak pemeliharaan atas anak (*hadhanah*). Selanjutnya peneliti menjadikan hal tersebut sebagai objek penelitian ini melihat pentingnya kajian tentang perlindungan anak dengan pemilihan lokus penelitian di Kabupaten Kudus. Penamaan “Kudus diyakini dengan eksistensi kesejarahan Sunan Kudus yang menyebarkan agama Islam di Kabupaten ini.

Kabupaten ini menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa, sehingga nuansa reliusnya masih sangat bisa dirasakan(Hukum et al., 2020). Hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur bagi peneliti tentang bagaimana pemahaman masyarakatnya akan hak dan kewajibannya terhadap pola hubungan anak dan orang tua dalam keluarga dirasa baik. Kabupaten Kudus sendiri mengalami laju pertumbuhan penduduk hasil proyeksi 2019 tercatat sebesar 871.311 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per Tahun 1.27 %.

Sebelumnya peneliti telah melakukan penelusuran penelitian terdahulu. Penelitian Rini Fitriani dengan judul "*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*", hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan anak yang bersifat melengkapi kebutuhan untuk bertahan hidup dan berkembang kenyataannya masih sangat memprihatikan .undang-undang Perlindungan Anak sambung diakhir pembahasan penelitiannya justru menjadi penghalang yang besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak(Fitriani, 2018: 8). Peneliti Muhammad Fachri Said dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perspektif Hak Asasi Manusia*, hasil penelitiannya menguraikan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak masih kurang terimplementasikan dengan baik. Alasannya adalah pemerintah belum melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum(Said, 2018: 11). Penelitian Fachri memfokuskan pada tidak tercapainya pemenuhan hak asasi manusia terhadap anak berasal dari tidak maksimalnya pemerintah dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum di dalam UU No 35 Tahun 2014(Noviawati, 2018).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian mengingat berbagai problematika perlindungan dan pemenuhan hak atas anak masih sangat perlu untuk terus dikaji secara mendalam dalam mengurangi angka-angka masalah tidak terlindunginya pemenuhan hak atas anak dilapangan sekalipun banyak peraturan yang memuatnya seperti Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hadhanah.

KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian Hadhanah

Kesadaran orang tua mengenai pemahaman bahwa anak adalah amanah Allah yang harus dijaga tumbuh kembangnya hingga dewasa melalui pemeliharaan atas anak. Konsep Hak pemeliharaan atas anak berarti menjada anak yang belum bisa mengurus diri sendiri dari hal-hal yang bisa menyakiti karena belum cukup mampu (Al-Ghazi, 2014: 149). Dasar hukum wajib terdapat dalam surat an-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Allah SWT menyuratkan pesan lain bahwa setiap orang tua wajib mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar. Hal tersebut terdapat dalam surat Luqman ayat 17:

Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Ayat di atas menjelaskan bagaimana Islam memerintahkan umatnya untuk memberikan bimbingan kepada anak dengan cara yang baik. Fakhurrizi Bersama boufa selanjutnya memberikan penjelasan tentang bagaimana melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil dengan menyediakan kebaikan untuk anak, menjaga sesuatu dari hal yang merusak dan menyakiti, mendidik akhlak, jasmani dan rohani agar mampu berdiri memikul tanggung jawab dikemudian hari (Istianah, 2017: 2). Hak pemeliharaan atas anak (*hadhanah*) juga dijelaskan perintahnya dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat-ayat di atas merupakan dasar kuat bagaimana kewajiban orang tua terhadap anaknya untuk menghindarkan calon generasi yang buruk, buruk iman, pengetahuan, fisik, dan ekonomi (Hidayati, 2017). Perintah yang terkandung dalam ayat di atas juga untuk menjaga diri dari perbuatan dosa dan perintah kepada keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak untuk senantiasa taat kepada Allah. Keluarga adalah amanat yang harus menjaga kesejahteraan rohani.

B. Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam

Anak sebagai bagian dari keluarga tentu mengalami hubungan-hubungan pribadi dengan orang tuanya, anak dengan anak yang lainnya atau anak dengan kerabat orang tuanya. Orang tua disini memiliki peran yang penting dalam menjamin keberlangsungan anaknya. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila orang tua bercerai maka hak asuh anak yang belum dewasa berada pada ibunya. Dalam hal ini Ibu dianggap sebagai sosok yang lebih mengerti kebutuhan anak. Berdasarkan hal tersebut anak dianggap sebagai seseorang yang memiliki hak istimewa karena masih rentan proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara luas melindungi, menjamin dan menghargai anak (Lestari, 2017). Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa apabila pemegang hak asuh anak ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh anak kepada kerabat lain.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif (*Field Research*) apabila dilihat dari sudut pandang tempat (Widi, 2010: 45). Penelitian kualitatif (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan (Firdaus, 2021). Keuntungan yang diperoleh dari jenis penelitian ini adalah peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata (Hartono, 2016), sehingga diharapkan pengguna informasi dari hasil penelitian dapat memformulasikan data atau informasi

terkini(Widi, 2010). Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di Kabupaten Kudus. Sumber data penelitian diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari 20 responden di Kabupaten Kudus. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari orang tua dan/atau anak untuk mengetahui tingkat perlindungan anak atas pemenuhan hak pemeliharaan atas anak.

PEMBAHASAN

Diskursus Hak Pemeliharaan Atas Anak dalam Islam

Kesadaran orang tua mengenai pemahaman bahwa anak adalah amanah Allah yang harus dijaga tumbuh kembangnya hingga dewasa melalui pemeliharaan atas anak. Konsep Hak pemeliharaan atas anak berarti menjada anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang bisa menyakiti karena belum cukup mampu. Dasar hukum wajib terdapat dalam surat an-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Allah SWT menyuratkan pesan lain bahwa setiap orang tua wajib mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar. Hal tersebut terdapat dalam surat Luqman ayat 17:

Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Ayat di atas menjelaskan bagaimana Islam memerintahkan umatnya untuk memberikan bimbingan kepada anak dengan cara yang baik. Fakhurrizi Bersama boufa selanjutnya memberikan penjelasan tentang bagaimana melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil dengan menyediakan kebaikan untuk anak, menjaga sesuatu dari hal yang merusak dan menyakiti, mendidik akhlak, jasmani dan rohani agar mampu berdiri memikul tanggung jawab dikemudian hari(Istianah, 2017). Hak pemeliharaan atas anak (*hadhanah*) juga dijelaskan perintahnya dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat- malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat-ayat di atas merupakan dasar kuat bagaimana kewajiban orang tua terhadap anaknya untuk menghidari calon generasi yang buruk, buruk iman, pengetahuan, fisik, dan ekonomi. Perintah yang terkandung dalam ayat diatas juga untuk menjaga diri dari perbuatan dosa dan perintah kepada keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak untuk senantiasa taat kepada Allah. Keluarga adalah amanat yang harus menjaga kesejahteraan rohani.

Pemenuhan Hak Pemeliharaan Atas Anak Di Kudus

Orang tua harus menyesuaikan berbagai perubahan yang terjadi. Dukungan ekonomi orang tua bagi anak masa pandemi menghancurkan orang tua tidak mengalami krisis pemenuhan hak anak dengan dampak panjang terhadap masyarakat Indonesia. Indikator pemenuhan hak pemeliharaan atas anak masa pandemi di Kudus dalam penelitian ini dilihat dari berbagai aspek seperti pemenuhan gizi seimbang, pendampingan belajar, keterlibatan orang tua dalam belajar akademik maupun belajar sosial serta beberapa kemungkinan buruk yang dialami anak selama pandemi dari orang tuanya. Adapun presentase hasil temuan adalah sebagai berikut:

- a. pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi seimbang anak

Pemenuhan hak anak atas makanan sehat dan gizi seimbang harus menjadi prioritas. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan imunitas anak terjaga dengan baik. Pemenuhan kebutuhan makanan sehat dan gizi seimbang tidak harus bernilai mahal dan bergaya mewah. Pemenuhan sehat dan bergizi yang baik justru yang lebih dekat dengan bentuk asli dari alam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat terlihat bahwa terdapat 3 responden atau sebanyak 15 % dari seluruh yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi lebih buruk. Hal ini disebabkan bahwa semakin tingginya tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh keluarga dalam pemenuhan kecukupan gizi pada anak. Tantangan dan kesulitan berasal dari terbatasnya akses penyedia pangan lokal dan pemenuhan kebutuhan harian. Hilangnya pekerjaan

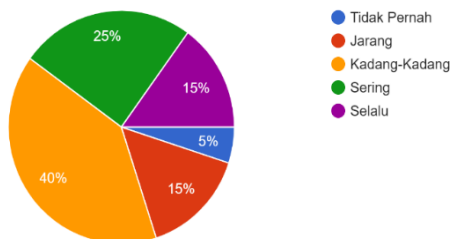
orang tua dan berkurangnya sumber pemasukan memiliki pengaruh pengaruh pada pemenuhan makanan sehat dan gizi seimbang bagi anak. Bagi orang tua yang memiliki pendapatan tetap tidak mengalami dampak berarti, akan tetapi bagi orang tua yang memiliki pendapatan harian memiliki kesulitan tersendiri dalam pemenuhan makanan sehat dan gizi seimbang. Pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi seimbang merupakan bagian dari ketahanan pangan yang harus tetap terjaga ketersediaannya. Fokus ketahanan pangan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan setiap anggota keluarga baik dari kualitas makanan, jenis makanan dan jumlah anggota keluarga.

b. Keterlibatan orang tua dalam pembentukan jiwa sosial

Keterlibatan peran orang tua dalam pengelolaan karakter jiwa sosial atau peduli terhadap sesama untuk mencegah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma susila dan nilai moral. Berdasarkan data penelitian ditemukan bahwa 25% atau sebanyak 5 informan dan 15% atau sebanyak 3 informan sering diajak untuk berbagi kepada sesama. 40% atau sebanyak 8 informan tidak selalu diajak untuk berbagi kepada sesama. 15% atau sebanyak 3 informan jarang diajak untuk berbagi. 5 % atau sebanyak 1 informan tidak pernah diajak untuk berbagi. Berdasarkan data tersebut sebanyak 12 informan tidak terbentuk jiwa sosial secara baik. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya jiwa sosial yang juga dimiliki oleh orang tua dan masalah keuangan yang dimiliki oleh orang tua.

Apakah Orangtua anda mengajak bersedekah atau peduli berbagi terhadap sesama ?

20 responses

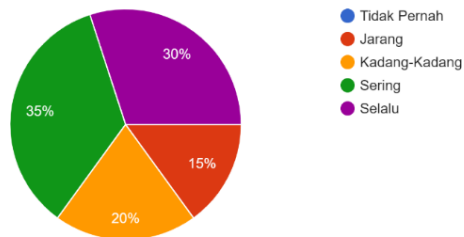


c. Keterlibatan orang tua dalam membentuk rasa tanggung jawab anak

Tugas orangtua untuk membekali anak mereka dengan berbagai skill yang diperlukan saat anak beranjak dewasa (eka Nursalim, 2016). Mulai dari cara mengambil keputusan, komunikasi, hingga sikap bertanggung jawab. Pengambilan keputusan merupakan suatu pemecahan untuk memilih satu alternatif dari beberapa alternatif lain. Komunikasi merupakan bentuk perasaan yang dibagi dari dalam diri untuk diungkapkan kepada orang lain. Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan saat seseorang merasa memiliki kewajiban untuk menanggung segala sesuatu.

Apakah orang tua mengajak ananda untuk membantu mengerjakan urusan rumah seperti membersihkan kamar, mencuci piring?

20 responses



Berdasarkan data penelitian diperoleh 35% atau sebanyak 7 informan terkadang dilibatkan membentuk rasa tanggung jawab. 30% atau sebanyak 6 informan sering dilibatkan membentuk rasa tanggung jawab. 20% atau sebanyak 4 informan terkadang dilibatkan membentuk rasa tanggung jawab. 15% atau sebanyak 5 informan jarang dilibatkan membentuk rasa tanggung jawab. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpercayaan orang tua terhadap anak untuk mengembangkan diri melalui hal-hal kecil seperti pekerjaan rumah. Selain itu harapan orang tua terhadap anak atas pekerjaan yang dilakukan anak tidak sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua.

d. Hal-hal yang pernah dialami anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang dinilai merendahkan, menghina atau menyerang hal lain yang berhubungan tubuh. Penganiayaan emosional merupakan jenis kekerasan yang meliputi serangan verbal maupun ditampakkan secara manipulatif. Pengabaian merupakan sikap acuh atau ketidakpedulian terhadap sesuatu atau seseorang.

Adapun data temuan kekerasan verbal menjadi presentase tertinggi sebanyak 35% atau sebanyak 7 informan mengaku dibentak oleh orang tuanya. 25% atau sebanyak 5 informan mengaku dibandingkan dengan anak lain oleh orang tuanya. 25% atau sebanyak 5 informan mengaku dijewer oleh orang tuanya. 10% atau sebanyak 2 informan mengaku dijambak oleh orang tuanya. 5% atau sebanyak 1 informan mengaku ditampar oleh orang tuanya. Hal tersebut disebabkan oleh situasi yang terjadi secara tiba-tiba, gangguan emosi orang tua yang terkadang tidak stabil.

Implementasi Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam di Kudus

Kota Kudus merupakan kota santri dan salah satu pusat perdagangan di Jawa Tengah. Selain itu, kota Kudus merupakan kota Industri yang cukup memiliki indeks nasional tersendiri. Padatnya aktivitas perdagangan dan perputaran ekonomi di Kudus menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang ke Kudus dengan tujuan berdagang, bekerja, wisata religi dan lainnya. Hal ini memiliki pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi kota Kudus dan menurunnya angka kemiskinan bagi masyarakat Kudus.

Berbagai peraturan yang mengakomodir kepentingan pemerintah dalam rangka menekan peningkatan jumlah penderita. Salah satunya diberlakukakannya pembelajaran jarak jauh, penerapan disiplin kesehatan hingga metode aktifitas dalam jaringan dalam bekerja. Bagi masyarakat dengan status pekerjaan swasta menjadi hal yang tidak mudah dalam kondisi seperti ini. Kondisi dimana para pekerja industri diwajibkan terus melakukan pekerjaan bahkan sebagian mengalami pemutusan hubungan kerja.

Kondisi demikian mengandung dampak yang buruk bagi anak dan hak hak anak(Fitriani, 2018). Bahkan dalam kondisi sulitnya ekonomi saat pandemi anak menjadi tempat yang tidak tepat bagi orang tua dalam menghadapi beratnya tantangan masa pandemi. Hak pendidikan bagi anak turut mengalami perubahan yang keras terlebih bagi Kudus yang pernah dalam zona hitam. Anak-anak tidak dapat melaksanakan sekolah tatap muka. Alternatif pemenuhan hak pendidikan bagi anak dilakukan secara online.

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak secara online sendiri memiliki hambatan dan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Hal tersebut dapat terlihat darperan orang tua yang tidak semuanya dapat memberikan pendampingan bagi anak selama masih diwajibkan untuk berangkat kerja. Selain itu jaringan internet yang tidak baik, ketidak mampuan orang tua dalam penyediaan *gadget* sebagai sarana pembelajaran menjadi keterbatasan pembelajaran jarak jauh sebagai alternatif pemenuhan hak pendidikan bagi anak.

Pemenuhan hak anak untuk dapat hidup nyaman sesuai usianya tidak sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat dari data hasil penelitian di atas bahwa kekerasan verbal dan nonverbal yang diterima anak dari orang tua masih saja terjadi(Fitriani, 2018). Penyebab dari hal itu adalah semakin beratnya beban yang dialami oleh orang tua pada masa pandemi sehingga terjadi ketidakstabilan emosi dan perasaan orang tua sedikit banyak tidak terkendali. Keadaan ini berdampak pada anak yang mendapatkan ancaman, bullying, hukuman fisik dan non fisik dari orang tuanya yang cenderung lebih sensitif.

Permasalahan terkait perlindungan anak yang disebabkan berbagai kondisi yang ada di Kudus belum terlaksana 100% secara baik. Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya data tidak terpenuhinya jaminan sosial maupun kesehatan. Kurangnya pemahaman dan kepedulian baik dari pemerintah, masyarakat dan orang tua tentang pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dalam konvensi hak anak maupun Undang-Undang tentang perlindungan anak. Apabila merujuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 20 menyebutkan bahwa semua pihak dari pemerintah hingga orangtua bertanggung jawab secara penug terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia.

Perlindungan anak adalah semua kehiatan untuk dapat terjaminnya hak – hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkon dan martabat kemanusiaan. Selain itu perlindungan anak dapat menghindarkan anak dari segala bentuk kekerasan

dan diskriminasi. Penyelenggaraan bentuk perlindungan anak didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar KHA yang terdiri dari prinsip non diskriminasi, kelangsungan hidup bagi anak, penghargaan pendapat yang disampaikan oleh anak serta kepentingan yang terbaik bagi anak.

Strategi perlindungan anak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak Pemeliharaan Atas Anak Masa Pandemi Di Kudus dilakukan dengan beberapa program untuk menekan berbagai hal atas ketidakterpenuhinya hak-hak anak. Adapun diantaranya adalah mengintegrasikan hak anak sebagai ukuran penting dalam kebijakan pembangunan Nasional serta program peningkatan kualitas daya hidup anak. Selain itu, program untuk terus menjamin hak-hak anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun dalam kebijakan publik.

Strategi mengenai penekanan angka kekerasan, penelantaran maupun diskriminasi menjadi sasaran yang tidak bisa begitu saja terabaikan dalam upaya perlindungan hak anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Anak menjadi faktor utama untuk merekonstruksi regulasi tersebut. Proses pelaksanaan terdapat kelemahan mendasar dalam pasal hadhanah dalam kompilasi hukum Islam yang saat ini adalah kurang memberikan ruang bagi perlindungan perempuan dan anak-anak di dalam rumah tangga. Subjek anak dalam hubungan keluarga masih sebagai masalah privat, urusan domestik/rumah tangga, yang masih sukar ditegakkan, ruang yang diberikan undang-undang masih sangat sempit sehingga pemulihan martabat, keberanian dan kebenaran masih belum berjalan seimbang, belum berpihak pada korban-korban kekerasan.

SIMPULAN

Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak Pemeliharaan Atas Anak di Kudus tidak sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa orang tua dituntut untuk senantiasa mengikuti berbagai perubahan yang terjadi. Perubahan yang memungkinkan disebabkan karena faktor ekonomi. Dukungan ekonomi orang tua bagi anak mengharuskan orang tua tidak mengurangi pemenuhan hak anak yang memiliki dampak panjang terhadap Indonesia pada masa yang akan datang. Indikator pemenuhan hak pemeliharaan atas anak meliputi berbagai aspek seperti pemenuhan gizi seimbang, pendampingan belajar, keterlibatan orang tua dalam belajar akademik maupun belajar sosial.

Selain itu, beberapa kemungkinan buruk yang dialami anak menjadi hal yang tidak bisa diabaikan oleh tuanya. Sebab masih ditemukannya kekerasan verbal dan non-verbal dari orang tua terhadap anak adalah beban yang dialami oleh orang tua sehingga terjadi ketidakstabilan emosi dan perasaan orang tua sedikit banyak tidak terkendali. Selain itu pendampingan belajar untuk mendekatkan emosi antara orang tua dengan anak tidak sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut disebabkan kesibukan orang tua yang berkerja tidak dapat memberikan pendampingan bagi anak. Sebab lain adalah kurangnya dukungan dan pemahaman anggota keluarga lain dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazi, M. bin Q. (2014). *Fath al-Qarib ak-Mujib*. dar Al Kutub al Islamiyyah. Indonesia, P. I. (2006). *Tiga Puluh Dua Ulama Islam Propinsi di Indonesia Metode Praktis Belajar Mengajar Terjemahan al-Qur'an*.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mujamil Qomar, *Kesadaran Pendidikan Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Prist, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Rifa'i, M. (2012). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Ema Insani.
- Shihab, Q. (2009). *Tafsir Al Misbah*. Lentera Hati.
- Widi, R. K. (2010). *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Graha Ilmu.

Website

- Ariyani, F. (n.d.). *No Titled data kasus per tahun*. KPAI.Go.Ig. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-%0Aperlindungan-anak-2011-2016%0A>

Jurnal

- Al Musanna, "Indigenisasi Pendidikan: Rasionalitas Revitalisasi Praksis Pendidikan Ki Hadjar Dewantara," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 2, nomor 1 (Juni 2017): 121, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v2i1.529>.
- Arif Gosita, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Jakarta Fakultas Hukum Taryma Negara, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* No 4/Th.V/April 1999.
- eka Nursalim. (2016). Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani di Era Globalisasi (suatu ihtiar menghadapi tantangan masyarakat ekonomi asean/MEA). *At-Turats*, 10(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/at-turats.v10i1.482>
- Firdaus. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Statistics Version 26.0*. . <https://books.google.co.id>.

- Fitriani, R. (2018). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, 11(2), 8.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*. BPFE.
- Hidayati, A. N. (2017). Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).
- Hukum, F., Airlangga, U., Surabaya, K., & Timur, J. (2020). *Diversi Jurnal Hukum INDONESIA*. 6(April), 73–91.
- Istianah, F. dan N. (2017). Hak Asuh anak: Suatu Analisa terhadap Putusan Mahkamah Syariah Langsa tentang Pengalihan Hak Asuh. *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 4, 2.
- Lestari, R. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). *JOM FISIP*, 4(2), 2.
- Marya, S. (2019). Konsep Karakter Anak. *ISTISHNA: Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2(2).
- Muhammad Fachri said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 4 No. 1 September 2018.
- Noviawati, E. (2018). LANDASAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. <https://doi.org/10.25157/jigi.v6i1.1246>
- Nurlaeli dan Juniarti, Y. (2017). Peran Orang Tua Dalam Mengembangkan Kemampuan Bahasa Pada Anak Usia 4-6 Tahun. *Jurnal Pelita*, 2(1), 196.
- Pratiwi, M. R., Mukaromah, M., & Herdiningsih, W. (2018). Peran Pengawasan Orangtua Pada Anak Pengguna Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 22(1), 37.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendikia Hukum*, 4(1), 11.

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PENDIDIKAN TINGGI ISLAM INDONESIA DAN TANTANGAN GLOBALISASI

Irham

Universitas Islam 45 Bekasi
Email: irham.muu@gmail.com

Yudril Basith

UNUSIA Jakarta
Email: yudrilbasith23@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bermaksud untuk menjelaskan respons perguruan tinggi Islam (PTI) Indonesia terkait dengan tantangan dan tuntutan globalisasi. Dalam hal ini PTI tidak setagnan, melainkan memiliki upaya yang progresif. Ada dua upaya yang dilakukan untuk perubahan dan peningkatan kualitas. Upaya yang pertama dalam bentuk eksternal yang datangnya dari pemerintah dan upaya yang kedua secara internal yang dilakukan oleh kampus itu sendiri. Adapun tuntutan yang dihadapi adalah, tuntutan pasar, tuntutan pemerintah dan tuntutan masyarakat. Tiga tuntutan ini saling berkait-kelindan yang salah satunya tidak boleh ditinggalkan. Tulisan ini memberikan kesimpulan bahwasanya tuntutan ini mesti menjadi dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi Islam di era ini dan untuk masa depan dalam rangka melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Namun tantangan yang dihadapi adalah komersialisasi pendidikan tinggi dan sistem pendidikan yang mekanistik, dan ini akan menghilangkan ruh pendidikan Islam itu sendiri. Artikel ini merupakan kajian kepast akan dengan mengambil sumber dari artikel ilmiah yang berhubungan dengan PTI dan tantangan global.

Kata kunci : Perguruan Tinggi Islam, Globalisasi, Tuntutan.

Abstract:

This article aims to explain the response of Indonesian Islamic Higher Education related to the challenges and demands of globalization. In this case PTI is not stagnant, but there are efforts to advance. There are two effort for change and quality improvement. The first effort is external from the government and the second was internally from the campus itself. The demands faced are market demands, government demands and community demands. These three demands are related, one of wich cannot be abandoned. This paper concludes that this demand must be the basis for the implementation and development of Islamic higher education in this era and for the future in order to produce high-quality human resources. But the challenge faced is the commercialization of higher education and a mechanistic education system, and this will eliminate the spirit of Islamic education itself. This article a library research sourced from authoritative literature

Keyword: Islamic Higher Education, Globalization, Demands.

PENDAHULUAN

Globalisasi yang terjadi saat ini menghendaki warga bangsa dan negara agar dapat menembus ruang dan waktu yang tak terbatas. Masing-masing warga bisa saling berkomunikasi, berintegrasi dan saling memengaruhi. Globalisasi bisa berdampak positif dan negatif pada ekonomi, kemanusiaan, serta ekologi dan yang sering menjadi pertanyaan adalah bagaimana orang sekarang dan yang akan datang untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik? Setidaknya ketahanan sosial yang akan menjadi faktor penting terkait dengan hal ini (Beumer et al., 2018). Selain itu globalisasi telah meningkatkan aliran orang, gagasan, pengetahuan, teknologi, dan uang dengan berbagai tingkat. Termasuk mempengaruhi dalam hal sistem sosio-ekologis tradisional, termasuk sistem yang didasarkan pada pergerakan ternak musiman yang terus berulang (Aryal et al., 2018).

Tak dapat dipungkiri lagi, globalisasi dengan segala pengaruhnya tersebut telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan sosial budaya untuk masyarakat Indonesia. Menurut Azra globalisasi yang terjadi di Indonesia berasal dari dua sumber yakni Timur Tengah dan Barat. Globalisasi Timur Tengah bersifat religio-intelektual dan religio-politik, globalisasi barat bersifat ekonomi-politik dan sains-teknologi (Azra, 2001, pp. 43–44). Globalisasi yang dilakukan oleh Timur Tengah ini tidak terlalu merubah cara pandang masyarakat Indonesia dan tidak berlangsung secara cepat, akan tetapi globalisasi dari Barat yang sifatnya ekonomi-politik dan sains-teknologi dengan sangat cepat berlangsung di semua sektor.

Menurut Sofian Effendi globalisasi mendorong kepada perkembangan *knowledge society* (masyarakat yang berpengetahuan) dan *knowledge based economy* (pengetahuan yang berbasis ekonomi). Ada dua faktor kekuatan besar dalam globalisasi tersebut yaitu faktor globalisasi ekonomi dan revolusi teknologi informasi. Dalam proses globalisasi tersebut dua faktor yang sangat menentukan yaitu kemajuan atau revolusi teknologi informasi dan beoteknologi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki modal finansial dan intelektual (Effendi, 2003, p. 3). Eko Indrajit dan Djokopranoto memahami globalisasi ekonomi ini lebih mengarah kepada konsep kapitalisme atau neokapitalisme. Menurutnya ada empat aspek globalisasi yakni aspek perdagangan, aspek pergerakan modal, aspek pergerakan orang, dan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek globalisasi ini tidak hanya berdampak pada ekonomi saja, akan tetapi pada hampir seluruh aspek elemen manusia, termasuk pendidikan di dalamnya (Indrajit & Djokopranoto, 2006, pp. 84–85).

Pendidikan selaku tonggak perubahan mempunyai andil yang besar dalam arus globalisasi tersebut terutama di sektor kemajuan pengetahuan dan teknologi informasi. Pendidikan memiliki peran untuk menuju 'globalisasi yang sukses' dan sebagai agenda untuk pembangunan berkelanjutan. 'Globalisasi yang sukses' didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang dikombinasikan dengan persamaan dan kedamaian sosial. Cina, India, Kenya dan Sri Lanka telah berhasil mengembangkan ekonomi global dan membuat kebijakan pendidikan untuk mendukung itu. Globalisasi yang sukses ini berhubungan dengan peran pendidikan untuk program pembangunan yang berkelanjutan (Little & Green, 2009).

Artikel ini tidak membahas secara khusus tentang globalisasi itu sendiri akan tetapi akan memotret peran pendidikan tinggi Islam (PTI) Indonesia dalam menghadapi globalisasi serta tuntutan-tuntutannya. Kajian ini berbeda dengan kajian yang pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya kajiannya (Lukens-Bull, 2013) yang memotret PTI Indonesia dari pendekatan politik, Kraince (2007) yang membahas tentang perguruan tinggi Islam dan kohesi sosial di Indonesia, kemudian Azyumardi Azra (2015b) yang membahas pendidikan kewargaan di perguruan tinggi Islam Indonesia. Kajian berikutnya Florian Polh (2015) yang mengkaji tentang peran dialog antar agama di Universitas Islam Negeri, M. Akhyar Abdi yang mengkaji tentang pendidikan tinggi Islam profetik dan tantangan masa depan (Abdi, 2005). Berikutnya kajian tentang wajah Islam di perguruan tinggi Islam Indonesia yang ditulis oleh Hasbiyallah (Hasbiyallah et al., 2019) dan yang ditulis oleh Wardani tentang agenda kajian Islam di perguruan tinggi Islam (Wardani, 2015). Kajian yang terbaru di tulis oleh Suprpto (2019) yang berupaya mengevaluasi perguruan tinggi Islam pada tingkat pascasarjana.

Kajian-kajian terdahulu tersebut belum ada yang memfokuskan pembahasannya tentang perguruan tinggi Islam dalam menghadapi globalisasi serta bentuk tantangan yang dihadapinya. Dengan demikian kajian ini berupaya melihat PTI Indonesia melakukan perubahan atau peningkatan kualitas di era globalisasi serta menemukan tantangan yang dihadapinya yang tak dibahas oleh kajian sebelumnya. Kajian ini sebagai kajian teoritis yang merupakan studi kepustakaan dengan memanfaatkan literatur-literatur yang terkait dengan perguruan tinggi Islam Indonesia dan tantangan globalisasi. Beberapa literatur yang sesuai dengan tema ini kemudian ditelaah dengan analisis yang kritis kemudian diformulasikan menjadi sebuah kajian sistematis ini. Pertanyaannya yang diajukan dari kajian ini adalah bagaimana upaya perguruan tinggi Islam Indonesia selama ini dalam menanggapi era globalisasi dan apa bentuk tuntutan-tuntutan yang dihadapinya?

Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Sejarah pendidikan/ perguruan tinggi di Indonesia termasuk perguruan tinggi Islam, tampak mengalami kemajuan. Perkembangannya dapat dilihat mulai dari jumlah mahasiswa yang kuliah dari dekade ke dekade hingga perluasan akses pendidikan pada saat ini. Misalnya melalui peningkatan investasi pemerintah pada lembaga pendidikan, serta peningkatan pada fasilitasnya. Perkembangan ini terjadi sejak diberlakukannya Undang-Undang Pendidikan pada tahun 1961. Faktor kunci dari pertumbuhan ini karena adanya pemerataan akses dalam pendidikan tinggi untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Akses dan pemerataan dalam hal ini merupakan prinsip-prinsip yang mendasar (Purnastuti & Izzaty, 2016). Walaupun berdasarkan sejarahnya pendidikan Islam pernah mengalami diskriminasi, seperti tidak adanya kesetaraan dengan sekolah umum dalam sistem pendidikan nasional (Azra, 2008, p. 124).

Upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi terus dilakukan oleh pemerintah. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didirikanlah Badan Akreditasi Nasional untuk Pendidikan Tinggi pada tahun 1994. Tujuannya untuk menjamin kualitas lembaga pendidikan tinggi dan program-programnya, sistem akreditasi nasional dalam pendidikan tinggi diuraikan dalam UU No. 12 tentang Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan pada tahun 2012. Tuntutan akreditasi datang dari berbagai kalangan masyarakat regional maupun internasional karena hal ini yang menjadi standar untuk melihat kualitas (Sunarto, 2017).

Lahirnya pendidikan tinggi Islam di Indonesia bertujuan karena ingin menyelenggarakan pendidikan Islam yang lebih tinggi dan modern. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bermula dari Sekolah Tinggi Islam (STI: 1945) dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bermula dari Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA: 1957) merupakan bukti sejarah sumber perkembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Kampus ini selanjutnya memicu bertumbuhkembangnya perguruan tinggi Islam baru, baik yang negeri maupun swasta. Pada awal abad 21, sebagai upaya untuk kemajuan dan merespons tantangan jaman, pemerintah menyetujui perguruan tinggi tersebut bertransformasi menjadi Universitas, yang diawali oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002 (Azra, 2015a).

Kemunculan dan perkembangan PTI di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, ideologi dan agama masyarakat sekitar. Sejak kemunculannya, PTI selalu mempersiapkan dan memperbaiki semua hal agar

dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Munculnya lembaga pendidikan agama, yang timbul dari berbagai kegiatan keagamaan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan agama merupakan indikator keberhasilan. Kampus Islam sebagai agen Islamisasi, serta agen perubahan sosial, terutama dalam proses transformasi nilai-nilai agama kepada masyarakat sekitarnya (Kafid & Rohman, 2018).

Pada masa reformasi, pendidikan tinggi Islam memiliki peran besar dalam menjaga harmonisasi kelompok masyarakat yang berbeda. Para pemimpin pendidikan Islam yang progresif telah mengembangkan tradisi intelektualisme kritis dalam upaya menuju “pembaharuan” pemikiran Islam. Fakta ini menjadi landasan dan rujukan bagi para pendidik yang berusaha mendorong demokratisasi dan mengatasi masalah-masalah kohesi sosial. Kemudian dalam rangka itu pula para tokoh menginginkan transformasi dari semula institut menjadi universitas walau menghadapi penolakan-penolakan oleh kelompok Islam yang konservatif (Kraince, 2007). Kalau melihat sejarah perkembangannya maka akan tampak jelas orientasi PTI terus mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Kampus Islam di Indonesia yang bermula dari Sekolah Tinggi Islam (STI: 1945) di Yogyakarta lalu berubah menjadi PTAIN hingga menjadi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan ADIA 1957 yang berdiri di Jakarta yang selanjutnya menjadi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam hal ini sebagai cermin. Dua kampus ini sekarang telah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri yang selanjutnya diikuti oleh kampus lain untuk merespons tantangan jaman dan pengembangan ilmu pengetahuan (Minhaji, 2007).

Terkait dengan tuntutan globalisasi tentang penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi Islam dalam merespons ini bukan hanya bertransformasi dari institut ke universitas seperti yang disebut sebelumnya dengan sekedar ganti nama. Akan tetapi bergantinya nama itu disertai dengan perubahan paradigma. Perubahan ini dilakukan agar perguruan tinggi Islam mampu bersaing dan mengatasi masalah yang kompleks di masyarakat. Paradigma yang dikembangkan adalah paradigma integrasi yang ingin memecahkan masalah dikotomi ilmu agama dan ilmu umum yang telah lama menghantui. Integrasi ilmu ini berupaya saling mengaitkan antara ilmu yang berbeda. Masing-masing ilmu dapat disintesiskan yang pada akhirnya akan melahirkan ilmu baru. Tiga universitas Islam negeri yang pertama dengan perubahan paradigma adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan paradigma integrasi-dialogis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paradigma integrasi-interkonektif yang menggunakan konsep

jaring laba-laba, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan paradigma integrasi-universalistik yang menggunakan konsep pohon ilmu. Masing-masing UIN ini menggunakan konsep integrasi yang berbeda, namun pada esensinya sama. Paradigma ini juga berbeda dengan paradigma ilmu yang lain yang digagas oleh para ilmuwan dunia misalnya islamisasi ilmu yang digagas oleh Ismail al Faruqi dan Naquib al Attas, paradigma Ilmuisasi Islam yang digagas oleh Arkoun, Fazlur Rahman, dan paradigma rekonsiliasi tradisi muslim dan sains modern oleh Nidhal Guessoum (Anshori, 2018).

Selain dari tiga UIN di atas ada lagi paradigma integrasi dengan konsep *twin towers* yang digagas oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Integrasi dalam paradigma ini tidak mencampurkan keilmuan agama dan sains. Tetapi keilmuan itu dibiarkan sendiri-sendiri dan pada saatnya nanti disinergikan atau dipertemukan dan dialogkan serta saling berkomunikasi. Posisi keilmuan agama dalam paradigma ini bukan mengintervensi sains yang sifatnya sudah mapan. Ini berbeda dengan islamisasi ilmu yang mana ilmu keislaman posisinya dapat mengintervensi sains (Syarifuddin, 2016). Terlepas dari beberapa kelemahan dari masing-masing konsep di atas, pada dasarnya hubungan sains, agama dan budaya supaya tidak lagi konflik. Tujuan inilah yang terus didengungkan oleh (Amin Abdullah, 2014) sebagai arsitek integrasi-interkoneksi ilmu dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Secara umum pendidikan Islam, bukan hanya perguruan tinggi Islam saja, telah menghadapi tantangan globalisasi yang besar. Namun, menurut Azra tidak perlu dicemaskan sebab masih terbuka lebar peluang yang ditemukan. Argumentasi ini berdasar dari faktor sosiologis umat Islam Indonesia dan menemukan yang namanya *new attachment* kepada Islam yang bisa menjadi modal berharga untuk lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya lembaga pendidikan Islam untuk memberdayakan dirinya mampu menjadi lembaga pendidikan alternatif yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi arus modernisasi dan globalisasi (Azra, 2008).

Lebih lanjut Azra menjelaskan bahwa perguruan tinggi Islam telah berhasil melewati tantangan global terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Dia menolak pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan kebangsaan menjadi tantangan tersendiri di era global ini. Azra menguraikan dengan pemaparan historis tentang bagaimana muslim Indonesia khususnya di UIN Jakarta dalam mengembangkan model *Civic Education* yang tepat, sebagai mata kuliah wajib yang mempertimbangkan elemen keberagaman sebagai penguat demokrasi. Di bagian akhir, ia merekomendasikan pengembangan lebih jauh

dan penekanan akan pentingnya pengaruh pendidikan kewarganegaraan di pesantren, karena pesantren memainkan peran penting untuk menguatkan pengembangan demokrasi di Indonesia dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan (Azra, 2015b).

Di samping keberhasilannya seperti di atas perguruan tinggi Islam juga menaruh perhatian untuk menciptakan mahasiswanya agar memiliki rasa eko-spiritualitas dalam berinteraksi dengan alam. Ini yang termasuk dikembangkan oleh UIN Maliki Malang yang merupakan strategi budaya akademik dan keagamaan yang dibangun untuk membentuk karakter Ulul Albab. Strategi pengembangan akademik dan budaya agama itu dibangun melalui: 1) Mengintegrasikan agama dan sains; 2) Integrasi Perguruan Tinggi dan Ma'had / pesantren; 3) Memperkuat orientasi pembentukan Ulul Albab; 4) Menetapkan standar sukses Sarjana Ulul albab; 5) Menetapkan tujuan dan komitmen; 6) Ditentukan selalu membawa semua orang; 7) Membangun budaya puasa; 8) Buka, dialog dan nasihat bersama; 9) Berorientasi kesamaan dan kebersamaan; 10) kepemimpinan yang tepat dan kuat melalui pendekatan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial; 11) Mengembangkan budaya menulis dan meneliti; dan 12) Menciptakan inovasi baru secara terus menerus (Mulyono & Wekke, 2018).

Bentuk PTI di Indonesia bukan hanya terdiri dari sekolah tinggi agama Islam, Institut agama Islam atau Universitas Islam baik negeri maupun swasta, tetapi ada juga yang namanya ma'had 'aly. Ma'had 'aly ini perguruan tinggi yang dikembangkan oleh pesantren yang berupaya memperluas dan meningkatkan keilmuan khas pesantren. Kementerian Agama melalui Kamarudin Amin sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam menjelaskan bahwa pengembangan ma'had 'aly di Indonesia setidaknya mengemban tiga tugas demi merespons tuntutan global. Pertama, mencerdaskan dan meningkatkan daya saing bangsa. Kedua, merawat, mengawal dan mempertahankan Islam Indonesia dan keindahannya. Ketiga, mengobjektivikasi dan mentransformasi pengetahuan keagamaan ke perilaku keseharian (lihat, ma'had 'aly 2016). Ma'had 'Aly terbukti tidak mengembangkan pemikiran keagamaan yang sempit dan konservatif. Misalnya Ma'had 'Aly Pesantren Sukorejo Situbondo Jawa Timur telah mengembangkan kajian fiqh secara terbuka yang dikombinasikan dengan ilmu sosiologi, antropologi, filsafat, kemudian kajian lintas madhab, dan mampu merespons isu-isu modern, seperti isu ekologi, gender, HAM, nikah beda agama dll. Di lembaga ini ditemukan kebebasan dalam pemikiran (Gazali & Malik, 2009).

Dari penjelasan di atas setidaknya dapat diketahui bahwa PTI tidak setagnan dalam menghadapi globalisasi. Ada dua respons yang dilakukan pada perguruan tinggi Islam di Indonesia. Pertama yang bersumber dari pemerintah. Respons yang pertama ini upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Islam itu dengan kebijakan-kebijakannya, membuka akses dan pemerataan serta adanya badan akreditasi nasional, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini jelas berpengaruh pada mutu PTI, lebih-lebih setelah adanya transformasi dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri. Ini merupakan lompatan kemajuan pada pendidikan Islam. Pemerintah juga memperhatikan perkembangan perguruan tinggi yang lahirnya dari pesantren yaitu mahad aly, untuk eksistensi dan kekhasan Islam Indonesia.

Selanjutnya yang kedua respons yang dilakukan oleh perguruan tinggi Islam itu sendiri. Respons ini seperti menjaga harmonisasi masyarakat, berkontribusi dalam hal demokratisasi, mencetak karakter mahasiswa yang eko-religius, dan kampus sebagai agen perubahan di masyarakat. Terkait pengembangan keilmuan selain dari peningkatan fasilitas yang terpenting yaitu adanya transformasi ke paradigma integrasi yang menjadi kekhasan paradigma sains-Islam Indonesia di tengah-tengah wacana yang berkembang di dunia. Tentu dalam merespons globalisasi ini tidak boleh mudah puas, karena masih banyak yang harus dikejar dan ditingkatkan lagi.

Di samping untuk menyadari dalam penyelenggaraan perguruan tinggi Islam hingga saat ini masih ada kelemahan, di antara cara untuk meningkatkan kualitas, perguruan tinggi Islam perlu mengevaluasi kurikulum yang selama ini sudah dijalankan. Evaluasi ini dapat menggunakan, misalnya model evaluasi kurikulum KIPP (Konteks, Input, Proses, dan Produk). Evaluasi kurikulum ini berdasarkan pada empat dimensi yang difokuskan pada: dosen, mahasiswa, perkuliahan, dan fasilitas belajar. Hasil dari implementasi evaluasi kurikulum dapat direkomendasikan untuk perbaikan kurikulum dan revisi sebagian atau seluruhnya (Qomari, 2016). Di antaranya lagi, untuk meningkatkan proses pembelajaran di era milenial, misalnya pembelajaran dapat menggunakan media sosial (IT) yang ada. Media ini dapat menjadi media perkuliahan yang antara dosen dan mahasiswa bisa berbagi informasi, ilmu, bertanya dengan mudah. Penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa mahasiswa merasakan twitter (salah satu media sosial) salah satu media yang positif untuk pembelajaran dan mereka menghargai penggunaan twitter untuk kegiatan pendidikan (Yudhiantara, 2017).

Tantangan dan Tuntutan Globalisasi

Dalam globalisasi pendidikan, khususnya globalisasi perguruan tinggi Richard Atkinson Presiden University Of California mengatakan bahwa globalisasi perguruan tinggi mengubah dari yang dimonopoli oleh ilmu pengetahuan ke organisasi yang menyediakan informasi yang dibatasi oleh waktu ke lembaga yang tanpa batasan. Teknologi informasi dan komunikasi semakin maju bisa menunjang perkembangan sehingga universitas dapat memenuhi kebutuhan dan meneguk pendapatan dari pasar yang ada dan universitas yang sudah tidak lagi memonopoli produksi ilmu pengetahuan yang bersaing dengan penyedia produk jasa yang lainnya (Indrajit & Djokopranoto, 2006, p. 94—95). Apabila bidang pendidikan akan disamakan dengan bidang perdagangan dan ekonomi, maka prinsip pasar bebas harus juga diberlakukan. Oleh karena itu akan terjadinya sebuah persaingan dalam pendidikan, universitas yang berlomba-lomba untuk menarik minat konsumen untuk menggunakan produk jasanya, sehingga akan berakibat kepada komersialisasi pendidikan.

Komersialisasi pendidikan bisa dilihat dari ciri pendidikan dijadikan sebuah pasar, sehingga memunculkan teori *human capital* yang dipopulerkan oleh Garry Becker dan Theodore Scchutz yang mengatakan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi antara lain diperlihatkan dari meningkatnya pendapatan pekerjanya yang merupakan dampak dari kemajuan pendidikan masyarakat, sehingga untuk memajukan ekonomi perlu dilakukan investasi dalam pendidikan, sebagai investasi dalam sumberdaya manusia. Sejak tahun 1960, *human capital* merupakan strategi kunci dalam meningkatkan *performance* ekonomi yang dibungkus dalam bentuk konsep individual sebagai *human capital* (Titosdarmo, 2007, pp. 292–293).

Jika pendidikan dihadapkan dengan pasar maka pendidikan harus bisa menyediakan manusia sebagai kebutuhan pasar, sehingga pasar sebagai pemilik dan pemegang kendali pendidikan. Dengan demikian yang diutamakan oleh pasar adalah mutu lulusan yang sudah siap kerja, sehingga orientasi pendidikan mengarah kepada kerja. Dalam hal ini jika pendidikan berorientasi kepada kerja, maka akan mengakibatkan pergeseran terhadap tujuan pendidikan. Menurut Wan Daud tujuan pendidikan dibagi menjadi dua macam, pertama berorientasi kepada masyarakat yakni mensejahterakan rakyat. Kedua berorientasi kepada individu yakni mengarahkan kepada kebutuhan, daya tampung dan minat belajar yang berorientasi kepada masyarakat (Wan Mohd Nor Wan, 2003). Lebih-lebih pendidikan agama harus mampu mengembangkan nilai-nilai multikultural untuk menjaga harmonisme masyarakat dan kohesi sosial (Irham, 2017).

Dalam hal ini pendidikan tinggi dihadapkan kepada sebuah tuntutan dalam merespons globalisasi yakni tuntutan pasar, tuntutan masyarakat, dan tuntutan pemerintah. Pendidikan sebagai tuntutan pasar yakni mahasiswa harus mempunyai skill dan keterampilan, menurut teori *human capital skill* ini bisa diukur oleh kualitas sekolah, pelatihan, perilaku pekerja. Pendidikan sebagai tuntutan masyarakat yakni, pendidikan bisa merespons permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Pendidikan sebagai tuntutan pemerintah dalam menjawab tantangan global untuk memajukan negara.

Tuntutan Pasar

Secara sederhana berbicara pasar, adalah berbicara tentang penyedia, konsumen, barang atau produk dan proses transaksi. Di dalam dunia pendidikan, penyedia di sini adalah universitas atau perguruan tinggi, sedangkan konsumen atau pelanggannya adalah mahasiswa dan produknya mahasiswa itu sendiri. Pasar selalu berbicara tentang pelanggan atau konsumen karena kepuasan konsumen menjadi tolak ukur sebuah mutu barang. Jika berbicara pasar di ranah pendidikan maka yang menjadi pelanggan pendidikan adalah mahasiswa, akan tetapi ada perbedaan pelanggan sebuah produk. Di dalam produk ada kategorisasi produk, yakni produk barang dan ada produk jasa, dan pendidikan termasuk dalam kategori produk jasa. Walaupun sama-sama dikategorikan produk jasa, universitas dengan rumah sakit berbeda. Rumah sakit yang di dalamnya ada seorang dokter yang siap untuk memberikan resep untuk seorang pasien untuk menyembuhkan penyakit sesuai dengan penyakit yang diderita. Di dalam universitas dosen dan mahasiswa, sama-sama aktif untuk menyembuhkan penyakitnya yakni penyakit kebodohan.

Ekon Indarjit dan Djokopranoto dalam menjelaskan di atas itu sangatlah sulit karena berbeda dengan produk barang pada umumnya, jika diterjemahkan bahwa produk universitas adalah ilmu pengetahuan, dan pendidikan, maka penggunaannya yaitu mahasiswa. Akan tetapi, kalau yang dikatakan bahwa produknya adalah sarjana lulusannya, maka pengguna produk yaitu masyarakat luas khususnya dunia industri, pemerintahan itu sebagai pelanggannya (Indrajit & Djokopranoto, 2006, p. 139).

Dengan demikian mahasiswa mempunyai dua fungsi dalam universitas tersebut yakni mahasiswa sebagai produk, dan mahasiswa sebagai pelanggan. Inilah yang membedakan dengan penyedia jasa yang lainnya. Dalam proses transaksi konsumen sebelum melakukan pembelian barang dia akan

melakukan beberapa proses, yakni tahap sebelum pembelian, dan sesudah pembelian. Tahapan yang pertama adalah sebelum membeli yakni mencari semua informasi berkaitan dengan produk tersebut. Pembelian yakni transaksi yang dilakukan, dan yang menggunakan produk tersebut, pada akhirnya memiliki penilaian. Penilaian ini akan berimplikasi terhadap pemilihan sebuah universitas sebab ada semacam dalil umum yang menjelaskan bahwa pada dasarnya produk adalah fungsi atau sifat produk, fungsi kesan terhadap produk, serta fungsi hubungan antara pelanggan dan pembuat produk (Indrajit & Djokopranoto, 2006, p. 140).

Perusahaan selaku pengguna produk yang dihasilkan oleh universitas, maka dia akan mempertimbangkan mutu dari produk itu sendiri. Dengan melihat sifat dan fungsi produk maka produk yang bagus akan diberi harga yang mahal. Mahasiswa selaku pelanggan universitas juga akan membayar mahal. Dalam tantangan era pasar, perguruan tinggi harus memastikan lulusan siap untuk memasuki pasar tenaga kerja yang mempunyai keterampilan atau disebut juga dengan *life skill*. Melihat perkembangan zaman seperti ini, tugas yang diemban oleh pendidikan semakin berat, pendidikan dituntut untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan siap pakai untuk kepentingan pasar yang bisa menyesuaikan terhadap perubahan lingkungannya, hal ini disinyalir dari pembagian kerja yang spesifik yang selaras dengan kebutuhan industri yang mana tingkat kompetensinya dituntut sesuai dengan kebutuhan tersebut. Ilmu pengetahuan untuk kebutuhan pasar dan pasar menyebabkan ilmu pengetahuan bebas nilai (Faisal, 1995, pp. 131–132).

Pendidikan sebagai tuntutan pasar ini akan mengubah orientasi pendidikan yakni berorientasi terhadap kerja yang mana lulusannya akan mengisi pos-pos perusahaan yang menyediakan tempat kerja. Sebenarnya dalam tantangan pasar untuk bisa *survive* ada dua katagori yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi yakni apakah seorang lulusan mampu menciptakan peluang pekerjaan sendiri, atau menjadi pekerja untuk perusahaan. Fakta pada tahun 2014 tentang lulusan perguruan tinggi menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi meningkat dua kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir; pada tahun 2000 sekitar 5 juta tenaga kerja pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi; pada tahun 2010 jumlah ini meningkat menjadi lebih dari 10 juta. Hal ini menandakan bahwa pendidikan tinggi menciptakan pekerja, bukan menciptakan peluang kerja itu sendiri (*Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia: Seberapa Responsif Terhadap Pasar Kerja?*, 2014).

Tantangan untuk menciptakan peluang kerja inilah sekarang yang seharusnya menjadi prioritas, supaya pendidikan tinggi tidak hanya menciptakan pekerja tapi menciptakan peluang kerja bagi mahasiswa dan tidak menambah jumlah pengangguran intelektual yang baru. Ada beberapa anggapan bahwa bangsa atau negara yang menguasai IPTEK saja yang akan bisa *survive* dalam kehidupan (Azra, 2006, p. 189). Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih setiap harinya. Perusahaan-perusahaan merekrut lulusan-lulusan terbaik yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan yang bagus untuk menjadi karyawan dalam rangka mengembangkan sains dan teknologi. Hal ini juga sudah terbukti dengan penemuan-penemuan baru di bidang sains, sehingga ini berimplikasi terhadap orang tua yang menginginkan anaknya yang lulus kuliah, langsung bisa mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian fakultas-fakultas yang berbasis teknologi dan sains yang menjadi peringkat pertama yang di buru oleh para orang tua.

Tuntutan Pemerintah

Majunya sebuah negara tergantung seberapa jauh negara memperlakukan pendidikan sebagai ujung tombak perubahan. Seperti perkembangan negara Amerika Serikat (AS). Sejarah mencatat bahwa pengaruh yang paling besar dalam dunia pendidikan perguruan tinggi di AS pertama kali datang dari pemerintah, yakni sebagai respons terhadap perkembangan industri dan ekonomi. Kedua datang dari kebutuhan nasional yakni sebagai bentuk pertahanan negara dalam perkembangan teknologi dan sains (Kerr, 2001, pp. 45–48). Dengan demikian sudah jelas bahwa peranan pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara. Indonesia yang disebut negara berkembang sudah mulai melakukan investasi terhadap dunia pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari keseriusan pemerintah mengenai pendidikan. Keseriusan pemerintah dalam pendidikan ini terbukti dengan anggaran pendanaan yang terus meningkat signifikan dari 2013-2018 (Direktur Penyusunan APBN, 2018). Ini merupakan cara untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain. Walaupun dalam implementasinya persoalan ini masih terjadi banyak masalah.

Persoalan mendasar tentang strategi pembangunan Indonesia terletak pada lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah. Sehingga pemerintah memandang perlu mendapatkan kualitas sumber daya manusia

yang unggul. Sumber daya manusia yang unggul ini setidaknya dibentuk oleh beberapa komponen yaitu komponen pendidikan, komponen kesehatan jasmani dan rohani, komponen perilaku nyata, komponen penyebaran (aspek geografis). Komponen kesehatan, perilaku nyata dan penyebaran dilandasi oleh kualitas pendidikan. Pendidikan ini diartikan sebagai upaya sadar untuk mengubah perilaku manusia seperti yang diharapkan. Produk manusia yang unggul itu di dapatkan melalui universitas atau perguruan tinggi (Ruwiyanto, 1997, p. 243).

Dalam hal ini pemerintah termasuk sebagai penyelenggara pendidikan seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa tugas pemerintah adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka pemerintah wajib ikut aktif dalam menjamin pendidikan seluruh rakyat Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini dilakukan dengan memberikan pendidikan yang layak untuk seluruh warga Indonesia dengan diadakannya pendidikan wajib 9 tahun. Terkait dengan ini pemerintah bertugas mencetak sumber daya manusia yang berkualitas untuk bersaing dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada posisi ini universitas atau perguruan tinggi sebagai tempat untuk mencetak output yang mampu bersaing di era globalisasi, karena faktor sentral majunya sebuah bangsa tergantung pendidikannya (Tan, 2012).

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi landasan pemerintah untuk pembangunan jangka panjang. Potret yang harus dihadapi era ilmu pengetahuan dan teknologi adalah mutlaknya kualitas hasil dari perguruan tinggi (Harsono, 1997, p. 157). Perguruan tinggi bukan hanya memiliki tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas atau unggul sesuai dengan kebutuhan pembangunan sekarang atau masa yang akan datang, akan tetapi harus mampu pula menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang pembangunan nasional dalam era industrialisasi (Harsono, 1997, pp. 157–158).

Tantangan yang sangat mendesak untuk menanggapi isu global, yakni sebagaimana yang diprakarsai oleh UNESCO tentang kesadaran global tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kehendak untuk menempatkan manusia sebagai sentral pembangunan. UNESCO mengangkat tema-tema tentang pendidikan dalam pertemuan internasional dengan tema sentral pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan (*education for All and All for Education*) (Fadjar, dkk., 2009, p. 10).

Kesadaran ini diperkuat dengan fakta, *pertama* suasana ketidakpastian ekonomi dunia yang ditandai dengan resensi yang dunia untuk meningkatkan produktifitas nasional mereka masing-masing. *Kedua*, sebagaimana bangsa yang sedang mengalami proses industrialisasi, masyarakat dari negara-negara berkembang tampak berupaya sekuat-kuatnya untuk berkembang dan bergeser strukturnya dari struktur tradisional ke struktur modern. *Ketiga*, globalisasi yang semakin menggejala telah mengakibatkan batas-batas politik, ekonomi, dan sosial-budaya antar bangsa menjadi begitu transparan, sehingga globalisasi menimbulkan persaingan antar bangsa baik berupa ekonomi serta bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sebab negara yang unggul dalam bidang ekonomi dan iptek yang akan bisa mengambil keuntungan dari globalisasi. *Keempat*, terjadinya kolonialisme dalam penguasaan iptek (*science and technology imperialism*) (Fadjar, dkk., 2009, pp. 11–15).

Tuntutan Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok himpunan individu dan kumpulan keluarga yang bertempat tinggal pada suatu wilayah tertentu, hidup bersama-sama dengan landasan peraturan yang berlaku dalam lingkungan itu (Basri, 2009, p. 47). Peraturan inilah yang membuat seseorang bisa terkontrol dan harmoni, sehingga orang yang melanggar peraturan adalah mereka yang harus diasingkan baik diasingkan secara fisik atau psikis sesuai dengan peraturan yang pada masyarakat itu sendiri. Peraturan itu sebagian orang menyebutkannya sebagai hukum adat. Untuk mempertahankan peraturan tersebut masyarakat membutuhkan seseorang yang mampu menjadi pemersatu masyarakat tersebut. Masuknya era globalisasi pada kehidupan menciptakan masyarakat yang bersifat pragmatis, sehingga segala sesuatunya diukur oleh materi. Oleh karena itu mereka berlomba-lomba supaya mendapat pendidikan yang lebih baik dengan harapan mereka menjawab tantangan zaman.

Setiap ada tuntutan maka itu sesuatu yang dibutuhkan. Kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan sangatlah sulit diidentifikasi, sebab masyarakat itu terdiri dari individu-individu. Kebutuhan individu sangatlah beragam dari satu dengan yang lainnya. Akan tetapi tulisan ini berusaha untuk mengidentifikasinya lewat kebutuhan manusia. Misalnya seperti apa yang dikatakana oleh Murtadha Mutahari, kebutuhan manusia itu terdiri dari dua, yaitu kebutuhan alamiah dan bukan alamiah (adat istiadat). Kebutuhan alamiah ini hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia sebagai manusia, seperti keinginan manusia untuk mengetahui dan menyelidiki untuk menjadi terkenal, ingin terlihat tampan dan cantik, keinginan untuk memiliki keluarga dan keturunan, keinginan-keinginan tersebut merupakan tabiat

manusia. Kebutuhan yang bukan alamiah yaitu kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat untuk dilakukan oleh kebanyakan manusia, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk melepaskan diri daripadanya atau menggantikannya dengan yang lain. Seperti merokok, minum teh dan lain sebagainya (Mutahahhari, 2007, pp. 48–49).

Kebutuhan-kebutuhan tersebut di dalam Islam dikenal dengan *al-Kulliyatul Khams*, yakni lima kebutuhan yang harus dijaga, penjagaan Islam terhadap agama, penjagaan Islam terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap harta, penjagaan terhadap nasb (keturunan), penjagaan terhadap kehormatan. Hal ini dipahami oleh Said Aqil siraj sebagai salah satu misi utama Islam yang *rahmatan lil alamin* (Siraj, 2006, p. 231). Menurut kajian ushul fiqh konsep ini disebut dengan *maqashid al syariah*. Setidaknya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa didapat oleh pendidikan. Ini sudah merupakan kebutuhan masyarakat, karena pendidikan bisa mengubah cara pandang masyarakat dalam memahami era globalisasi. Oleh karena itu pendidikan harus bisa mengarahkan kepada sumberdaya manusia yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan harus juga melakukan peninjauan ulang terhadap tujuan pendidikan, sehingga arah orientasi untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Malik Fadjar tujuan reformasi dan pengembangan SDM berbasis masyarakat adalah;

1. Membantu pemerintah dalam mobilisasi sumberdaya setempat dan di luar serta meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan di semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan.
2. Menstimulasi perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rasa kepemilikan sekolah, tanggung jawab, kemitraan, toleransi, dan kesediaan menerima perbedaan sosial dan budaya.
3. Mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah, khususnya orang tua dan masyarakat melalui otonomi.
4. Mendukung peranan masyarakat untuk meembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan dan mengganti peran sekolah dan untuk meningkatkan mutu dan relevansi, pembukaan kesempatan yang lebih besar, peningkatan efesiensi menejemen pendidikan dasar untuk wajib belajar pendidikan dasar, menengah dan tinggi (Fadjar, dkk., 2009, pp. 45–46).

Di masyarakat terdapat strata sosial yang memberikan perbedaan dalam menentukan pilihan pendidikan. Prinsip strata sosial bisa dilihat dari sosiologi pendidikan. Seperti halnya pernyataan yang dilontarkan oleh John Brennan dan Rajani Naidoo bahwa prinsip sosiologi memiliki dua fungsi dalam pendidikan, dalam menentukan sebuah kebutuhan. Pertama adalah *selection* dan *socialisation*. *Selection* berkaitan dengan tingkat ekonomi, politik dan elit sosial. *Socialisation* berberkaitan dengan pemenuhan dua alasan, yang pertama adalah sesuatu yang dipilih sesuai dengan kebutuhan untuk menunjuang karirnya, kedua mengajak masyarakat awam untuk memilih pilihan yang baik, dan memilih pilihan yang diyakini itu dilengkapi perbedaan sifat kebutuhan itu untuk memainkan peran bagian dalam masyarakat tersebut (Brennan & Naidoo, 2008).

Pada umumnya masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yakni masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat desa biasanya disebut dengan masyarakat yang tradisional, sedangkan masyarakat kota adalah masyarakat modern. Masyarakat desa dan kota memiliki orientasi berbeda dalam pendidikan. Masyarakat desa orientasi pendidikannya adalah lebih mengarah kepada keberlangsungan hidup mereka dan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak sehingga pendidikan pesantren adalah tempat mereka sebagai tempat mendapatkan pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari fungsi dan peranan pesantren yang juga merupakan *community centre*. Dengan demikian pesantren disebut juga dengan pusat pendidikan masyarakat desa. Para kiai sebagai Pembina-pembaru masyarakat desa yang berdomisili di sekitarnya, sedangkan kelompok santri dilatih menjadi kelompok model kelompok penyuluh (Faisal, 1995, pp. 198–199).

Sedangkan masyarakat kota identik dengan kemodernan. Mereka menginginkan pendidikannya memiliki fasilitas teknologi yang serba canggih, sehingga generasi penerusnya agar tidak konservatif yang tidak menerima kemodernan. Kacamata masyarakat desa dan masyarakat kota otomatis berbeda dalam memandang pendidikan. Tugas pendidikan bukan hanya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu bersaing di era globalisasi seperti halnya tuntutan pasar dan tuntutan pemerintah, akan tetapi bagaimana penyatuan pendidikan dengan tuntutan masyarakat yang mengarah kepada penghambaan kepada Allah dan menjadi tugas khalifah dimuka bumi. Sehingga terciptanya tujuan pendidikan yang baik yakni memanusiaikan manusia dengan melihat tugas manusia. Tuntutan ini pada dasarnya untuk menumbuhkembangkan potensi dan dimensi yang ada pada diri manusia yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Pada sisi ini manusia dituntut ada keseimbangan pada akhlak secara spiritualitas dan akhlak/moral secara sosial.

Penutup

Tulisan ini memberikan kesimpulan bahwa perguruan tinggi Islam Indonesia memberikan respons atas fenomena globalisasi. Respons ini menunjukkan PTI tidak stagnan tetapi ada upaya untuk maju, melakukan transformasi dan mengejar ketertinggalan sesuai tuntutan globalisasi. Setidaknya ada dua respons yang dapat ditemukan. Pertama yang datang dari pemerintah, yaitu upaya meningkatkan kualitas perguruan tinggi Islam. Ini dapat disebut dengan upaya dari eksternal kampus. Kedua, upaya dari pihak perguruan tinggi itu sendiri atau dapat dikatakan berasal dari internal kampus. Adapun tuntutan yang dihadapi dalam era globalisasi oleh PTI yang tidak bisa diabaikan ada tiga. Pertama tuntutan dari pasar, yang menginginkan lulusan terbaik, memiliki *life skill* untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua tuntutan dari pemerintah, yaitu pendidikan sebagai sarana menjawab ketertinggalan bangsa dari bangsa yang lain serta memajukan perekonomian bangsa. Ketiga tuntutan masyarakat sebagai sarana jawaban terhadap kelangsungan dan keteraturan kehidupan masyarakat, menjaga dan membangun moral-etika sosial. Tuntutan ini menghendaki untuk tidak menghilangkan nilai pendidikan itu sendiri, yaitu memanusiaikan manusia atau manusia yang berakhlak mulia sehingga terwujudnya manusia yang ideal yang sesuai dengan tugas manusia itu sendiri di dunia yakni menjadi *khalifah* di bumi dan sebagai hamba (makhluk spiritual). Oleh sebab itu dalam hal ini pendidikan tinggi Islam perlu mengevaluasi serta melakukan reorientasi sesuai dengan 3 tuntutan tersebut, walaupun pada saat ini sedikit banyak sudah dilakukan. Ini yang disebut dengan trilogi orientasi untuk pendidikan tinggi. Maksudnya adalah tiga tuntutan perguruan tinggi tersebut secara seimbang harus dilakukan, karena ketiganya saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Apabila perguruan tinggi meninggalkan salah satu peranannya pada tuntutan tersebut, maka perguruan tinggi Islam telah melakukan disorientasi dalam menyelenggarakan perguruan tinggi. Era globalisasi menuntut perguruan tinggi Islam untuk berorientasi secara integral. Tantangannya bagi PTI dalam mengejar tuntutan tersebut adalah komersialisasi pendidikan dan menjadi sistem pendidikan yang mekanistik. Apabila hal ini terjadi, maka ruh dari pendidikan Islam itu tidak ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. A. (2005). PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM PROFETIK DAN TANTANGAN MASA DEPAN. *Khazanah Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 3(2).
- Abdullah, M. A. (2014). Religion, Science, and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 52(1), 175. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.175-203>
- Anshori, A. (2018). *Paradigma Keilmuan Perguruan Tinggi Islam Membaca Integrasi Keilmuan Atas UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UIN Malang* (1st ed.). Al Wasat Publishing House.
- Aryal, S., Cockfield, G., & Maraseni, T. N. (2018). Globalisation and traditional social-ecological systems: Understanding impacts of tourism and labour migration to the transhumance systems in the Himalayas. *Environmental Development*, 25, 73–84. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2017.09.001>
- Azra, A. (2001). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi Menuju Melenium Baru*. Kalimah.
- Azra, A. (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokrasi*. Kompas.
- Azra, A. (2008). Pendidikan Islam Di Era Globalisasi: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 6(4), 123–137.
- Azra, A. (2015a). Genealogy Of Indonesian Islamic Education: Roles In The Modernization Of Muslim Society. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(1), 85–114.
- Azra, A. (2015b). Civic Education at Public Islamic Higher Education (PTKIN) and Pesantren. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 2(2), 167–177. <https://doi.org/10.15408/tjems.v2i2.3186>
- Basri, H. (2009). *Filsafat Pendidikan Islam*. Pustaka Setia.
- Beumer, C., Figge, L., & Elliott, J. (2018). The sustainability of globalisation: Including the 'social robustness criterion.' *Journal of Cleaner Production*, 179, 704–715. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.003>
- Brennan, J., & Naidoo, R. (2008). Higher Education and the Achievement (And/or Prevention) of Equity and Social Justice. *Higher Education*, 56(3), 287–302.

- Direktur Penyusunan APBN (Ed.). (2018). *Informasi APBN 2018 Pemantapan Pengelolaan Fiskal Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6552/informasi-apbn-2018.pdf>
- Effendi, S. (2003). *Pengelolaan Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Global*. 1–12. https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35832102/Effendi-MENGELOLA-PERGURUAN-TINGGI-DALAM-MENGHADAPI-TANTANGAN-GLOBAL.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1539858546&Signature=NZKV5R0zF5J%2BEK3U%2BcWTPgAVuzo%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPENGELOLAAN_PERGURUAN_TINGGI_MENGHADAPI.pdf
- Fadjar, dkk., M. (2009). *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dpartemen Agama RI.
- Faisal, J. A. (1995). *Reorientasi Pendidikan Islam*. Gema Insani.
- Gazali, H., & Malik, Abd. (2009). Pesantren and the Freedom of Thinking: Study of Ma'had Aly Pesantren Sukorejo Situbondo, East Java, Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 47(2), 295. <https://doi.org/10.14421/ajis.2009.472.295-316>
- Harsono. (1997). Kemandirian Pendidikan Tinggi dalam memasuki Era Globalisasi. In D. Rahardjo (Ed.), *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional: Menjawab Tantangan Kualitas Sumber Manusia abad 21*. PT Intermedia.
- Hasbiyallah, H., Sulhan, M., Khoiruddin, H., & Burhanudin, U. (2019). MEMOTRET WAJAH ISLAM MELALUI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI DI INDONESIA. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 17(2), 227. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i2.3216>
- Indrajit, R. E., & Djokopranoto, R. (2006). *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Andi Publisher.
- Irham, I. (2017). Islamic Education at Multicultural Schools. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 141–154. <https://doi.org/10.15575/jpi.v3i2.1448>
- Kafid, N., & Rohman, N. (2018). Islamic Higher Education and Religious Transformation of The Muslim Community's Surrounding. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.15575/jpi.v4i1.2069>

- Kerr, C. (2001). *The Uses of the University* (6th ed.). Harvard University Press.
- Kraince, R. G. (2007). Islamic higher education and social cohesion in Indonesia. *PROSPECTS*, 37(3), 345–356. <https://doi.org/10.1007/s11125-008-9038-1>
- Little, A. W., & Green, A. (2009). Successful globalisation, education and sustainable development. *International Journal of Educational Development*, 29(2), 166–174. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2008.09.011>
- Lukens-Bull, R. A. (2013). The Politicization of the “Apolitical”: Islamic Higher Education in Indonesia. In R. A. Lukens-Bull, *Islamic Higher Education in Indonesia* (pp. 1–20). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9781137313416_1
- Ma`had Aly Sebagai Lembaga Pengembang Islam Indonesia. (2016, June 10). *Berita Pendidikan Islam*. <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=8310#.W8s5wBGyTIU>
- Minhaji, H. Akh. (2007). MASA DEPAN PERGURUAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA (Perspektif Sejarah-Sosial). *Tadris Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 145–175.
- Mulyono, M., & Wekke, I. S. (2018). Academic and Culture Development Strategy Management for Islamic Higher Education In Indonesian. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175, 012163. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012163>
- Mutahahhari, M. (2007). *Membumikan Kitab Suci Mnausia dan Agama*. Mizan.
- Pohl, F. (2015). On the Role of Interreligious Dialogue in Religious Studies Programs at Indonesian State Islamic Universities. *Journal of Ecumenical Studies*, 50(1), 159–166. <https://doi.org/10.1353/ecu.2015.0007>
- Purnastuti, L., & Izzaty, R. E. (2016). Access and Equity in Higher Education in Indonesia. In *Widening Higher Education Participation* (pp. 119–134). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100213-1.00008-1>
- Qomari, R. (2016). The Evaluation of Curriculum Implementation on Islamic Higher Education in Indonesia. *Ijtima'iyya: Journal of Muslim Society Research*, 1(1), 97–112. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v1i1.929>

- Ruwiyanto, W. (1997). Pembangunan Pendidikan Nasional dalam Rangka Menunjang Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia. In D. Rahardjo (Ed.), *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*. PT Intermasa.
- Siraj, S. A. (2006). *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*. Mizan.
- Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia: Seberapa Responsif Terhadap Pasar Kerja?* (2014). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, The World Bank, Australian Aid. <http://documents.worldbank.org/curated/en/987731468266684105/pdf/892220BRI00P120abor0Market0May02014.pdf>
- Sunarto, K. (2017). The Rise of Quality Assurance in Indonesian Higher Education. In *The Rise of Quality Assurance in Asian Higher Education* (pp. 67–86). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100553-8.00008-2>
- Suprpto, S. (2019). EVALUASI SNPT PRODI S2 PAI DI PTKI. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 17(1). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v17i1.552>
- Syaifuddin, S. (2016). INTEGRATED TWIN TOWERS DAN ISLAMISASI ILMU. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.15642/jpai.2013.1.1.1-20>
- Tan, O.-S. (2012). Singapore's holistic approach to teacher development. *The Phi Delta Kappan*, 94(3), 76–77.
- Titosdarmo, R. (2007). *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca Soeharto*. LIPI.
- Wan Mohd Nor Wan, D. (2003). *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*. Mizan.
- Wardani. (2015). AGENDA PENGEMBANGAN STUDI ISLAM DI PERGURUAN TINGGI: MEMPERTIMBANGKAN BERBAGAI TAWARAN MODEL INTEGRASI ILMU. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13(2).
- Yudhiantara, R. A. (2017). Twitter for Educational Activities in Islamic Higher Education, Why Not? *IJET (Indonesian Journal of English Teaching)*, 6(1), 89. <https://doi.org/10.15642/ijet.2017.6.1.89-101>

The South China Sea Maritime Disputes and Execution of Islamic International Relations as a Jihad Strategy in Balancing the World's Authoritative Powers

Mohd Harris Sadi RMN (Maktab Pertahanan Angkatan Tentera (MPAT) PUSPAHANAS Malaysia), **Jamaliah Jamil** (Universiti Teknologi Malaysia), **Zulhasni Abdul Rahim** (Universiti Teknologi Malaysia), and **Adam Leong Kok Wei** (University Pertahanan Malaysia)
email : jjamaliah2@graduate.utm.my

Abstract

Kajian dan perbahasan tentang Hubungan Internasional Barat (WIRs) selama berabad-abad dipuji berkat inovasi idealisme dengan segala macam 'isme' (realisma, liberalisma, strukturalisma, internasionalisma, modernisma, dan imperialisma) oleh berbagai aliran pemikiran dengan volume besar studi politik yang ditujukan dalam menciptakan kembali tatanan global. Namun, sayangnya, WIR ini telah sangat mengabaikan warisan Hubungan Internasional (IR) Al-Andalus dengan 800 tahun pendirian politik di Sepanyol. Al-Andalus adalah sebab benua Amerika dibuka oleh Columbus setelah Al-Andalus jatuh. Selain itu, ia mengilhami Renaisans Eropah, dan membangun imperialisma ideologi politik warisan budaya yang dikenal sebagai Graeco-Romanesque, Judeo-Arab (Shamsie 2016), namun telah hilang dalam sejarah Eropah kecuali tinggalan lokus teologis. Studi ini mencoba menganalisis International Relations atau Hubungan Internasional dari industri weltanschauung berdasarkan studi kasus negara yang tidak berdaya. Area analitis terbagi kepada sub topik: Kritik atas filosofi IR barat: Hubungan Internasional Integratif atau Islami sebagai perbandingan holistik: Hubungan Perdagangan & Bilateral Malaysia-China-AS: Nilai Ekonomi Industri di Laut Cina Selatan: ASEAN sebagai Guardian mutlak di Asia Tenggara (SEA) dan sempadan maritime Laut Cina. Bagian akhir study menyantuni topik filosof bilateral dan multilateral Malaysia secara holistik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang formulasi IR untuk kepentingan: pembuat kebijakan politik, penguatan WIR dan dunia akademik IR, serta bermanfaat kepada mahasiswa pascasarjana. Tinjauan analitis berdasarkan 120 artikel pilihan yang ditulis oleh para ahli lapangan, jurnalis keamanan, tentara, sarjana hubungan internasional (baik dari dunia Muslim dan Barat), perwakilan dinas rahasia, kesaksian surat kabar, dan organisasi internasional.

Kata kunci: Malaysia, Hubungan Integratif Internasional, Kebijakan Luar Negeri, Hubungan Bilateral dan Multilateral, Asia Tenggara, Timur Tengah, Laut Cina Selatan, ASEAN, Jihad, Tata Dunia Baru

Abstract

The Western International Relations (WIRs) studies have been lauded for centuries owing to idealism innovation with all sorts of 'ism' (realism, liberalism, structuralism, internationalism, modernism, and imperialism) by various schools of thought with massive volumes of political studies aimed at re-creating the global order. But, regretfully, these WIRs have severely disregarded the International Relations (IRs) legacy of Al-Andalus with 800 years of political establishment in Spain. Al-Andalus was the reason for the American continent by Columbus right after it fell. Besides, it inspired the European Renaissance, and imperialism dreams revived political ideologies among the mixed heritage known as Graeco-Romanesque, Judeo-Arab (Shamsie 2016), but today, nothing except purely theological locus. This study attempt to analyse the International Relations IRs from industry weltanschauung based on the powerless nation case study. The analytical areal divided into sixth sub-topics: The critique over western IRs philosophy: The Islamic International Relations as holistic match: The Malaysia-China-US trade and bilateral relations: The South China Sea Economy and Biodiversity Worth: ASEAN as a Peacekeeper Guardian for the South China Sea (SCS) and South East Asia (SEA). The last section is about Malaysia's comprehensive bilateral and multilateral IRs. This study expects to provide new insight into IRs formulation for the benefit: political policymakers, strengthening WIRs and IRs academic world, thus equally beneficial to postgraduate students. Analytical review based on 120 selected articles written by field experts, security journalists, army people, international relations scholars (both from the Muslim and Western world), secret service representatives, newspaper testimony, and international organisations.

Keywords: *Malaysia, International Integrative Relations, Foreign Policy, Bilateral and Multilateral Relations, South East Asia, Middle-East, South China Sea, ASEAN, Jihad, New World Order*

INTRODUCTION

The research is crucial to understand how smaller states tend to align or modify their behaviour in response to the acts of superpowers or how superpowers use their influence to determine the actions of smaller nations. The study will look at state behaviour in the context of how countries conduct international relations in the global community and world politics. It will also investigate how a shift in a superpower's foreign policy may impact the approach of small nations. Besides, this study also examines how smaller countries execute their international defence ties considerations employed or influence international relationships. The findings of this study will be helpful to anyone interested in studying International Relations, Foreign Policy formulation, particularly military and intelligence policy. Examination of selected works of literature would serve as the foundation for a more profound knowledge of the research topic and challenges. Likewise, it aims to discover potential gaps in prior literature and factors relevant to the investigated issue. Six themes identify for the assessment and evaluation.

The first subject will focus on the critique of Foreign Relations (FR) and International Relations (IR) Ideology. Next, the general nature of Malaysia-China economy bilateral relations and Malaysia-US ties and security collaboration. The third theme specifically discussed the South China Sea (SCS) economy and biodiversity worth that caused US-China severe-cold relations during and after the Trump administration. The fourth theme is how ASEAN continuously plays an influential role as guardians of Southeast Asia and the South China Sea sovereignty. A recommendation to Malaysia through ASEAN to effectively play a meaningful role as a peacekeeper and guardian of the South East Asia region and the South China Sea Sovereignty. Finally, the last sub-topic discussed Malaysia's holistic bilateral and multilateral foreign relations/approach. Later, the increase and decrease in activities, funding, or agreements could describe the impact on Malaysia's defence relations mechanism.

RESEARCH METHOD/APPROACH TO THE STUDY

This research analyses the topic through a holistic, pragmatic manner of self-study examining Malaysia's international and foreign relations concerning its defence and security. A trustworthiness content and thematic analysis (Elo et al. 2014), (Vaismoradi, Jones, Turunen, & Snelgrove 2016) & (Hecker, Wicke, Haklay, & Bonn 2019) which also known as hermeneutical approaches

(Mayring, 2014) yet qualitative adopted throughout this study. A descriptive and exploratory way is used during articles preparation, organisation, and reporting of the outcomes and findings. Articles compile in an inductive and deductive manner. Only relevant journals, books and publications were collected with a strict selection of unit analysis (review of the dataset) extracted and organised according to the study theme of International Relations IRs with sub-theme Political Relations PRs, Foreign Relations RFs and Defence Relations DRs.

The rigour, validity, reliability and trustworthiness were strictly safeguarded during the information and dataset identification process via thorough in-text referencing. While clarifying objectives and outcomes expectations through conceptualising topics and sub-topics, thematic attributed benefits and challenges. Example: Malaysia's IRs attributed toward the world's authoritative power (the US & China), how the IRs approach benefits Malaysia and the challenges faced by Malaysia concurrently in maintaining its IRs balance between the US and China. Finally, the dataset is examined and organised into primary and secondary topics (categorisation approach). The implicit theme may require only a brief description. In contrast, an abstract theme (to be understood beyond the written narration) requires an interpretation that must include classifying the IRs policy, comparing, defining or describing the theme, and connecting each theme (topic) to establish a new storyline and knowledge for the study.

The study's significant focus is on examining and analysing the current approach to Malaysia's bilateral and multilateral relations/cooperation between the US and China and emphasising relations' effectiveness to safeguard national sovereignty. Both relations have significant sensible yet sensitive evidence, limiting the application of the required data. The data and information gathered regarding the US may be limited to online published documents and written literature. The only possible primary source would be the US Defence Office in Kuala Lumpur and credible sources from International Relations & Security articles published via Google Scholars database. Some literature, especially official documents and statements of government departments discovered, can be biased in favour of official policies on both sides, and the writer needs to tread carefully in using these sources. The research will provide an intensive review based on the year 2000 onwards article—however, an exemption to several reports, particularly journals that provide top-secret data, including Malaysia's Defence White Paper 2020, is worth quoting.

1. THE CRITIQUE OF THE WESTERN INTERNATIONAL RELATIONS THEORIES AND THE NEED FOR ISLAMIC INTERNATIONAL RELATIONS

Humans invented mainstream theories of Security, Foreign Relations as well as International Relations, as discussed in (Kolodziej 2005), (Mgba & Ukpere 2013) and (Kristensen 2018), providing meticulous yet mediocre alternatives to Realism, Neorealism, Liberal Institutionalism or Internationalism. Similarly, Post- structuralism, Neo-Marxism, International Political Economy, The English school & the European Union (Stivachtis 2013), The Copenhagen School, Modernism, Colonialism, Imperialism (Tayyar 2018) and the like has been vastly studied and scrutinised through extensive sociology qualitative or quantitative approach either rely heavily on human behavioural phenomenon based on history or secondary data, otherwise, studied in analytic form through statistic or experimental evidence which frequently involved great power nations.

Unfortunately, despite being the most studied field by international relations experts, the above mainstream hypotheses have failed to promote peace, unity, and equitable access to world resources, resulting in most nations worldwide still experiencing security shortfalls and extreme poverty today. Every day, many ethnic minorities face ongoing genocide and oppression. The significant dilemma of mainstream Security, Foreign Relations, and International Relations fundamentalism, those reductionists and conservatives, was due to the underlying sentiment within the theories domain. It fails to acknowledge the humanity realm nature that uniquely possesses social structures through belief system benchmark. The majority of S, FR, and IR doctrines developed to support and promote the western way of public relations rather than to enhance diversity, honour, or at very least to reach a win-win bilateral or multilateral alliances between world power nations and vulnerable yet powerless countries. Oppression under the term of fighting terrorism as purportedly justified by western S, FRs, and IRs creeds yet openly show hostility toward Muslim individuals, community, and the nation as a means to justify killing has a long history in Islamic civilisation as well. The final messenger and prophet of monotheism teaching, Muhammad PBUH and his followers suffered constant hostility in Mecca. The prophet and his band of followers were compelled to flee Mecca for Medina due to a plan to assassinate him (An-Na'im 1987). However, after relocating to Medina, Muhammad PBUH established a first-ever International Relations (IRs) written treaty and seal between the Muslims and the Medina Jewish community. In order to advocate a global peaceful coexistence and respect for community human rights, a similar IR treaty was signed to regulate the relationship between Muslims and Christians both in Najran and Sinai (Alikhani 2016).

Today, the IRs theory known as hegemonic stability, as advocated by (Goh 2013), (N. M. Yazid, 2015) and (Tow 2016), may appear to provide persuading hedging, balancing, and bandwagoning of small nations into world power nations such as the United States or China for specific agendas. Nevertheless, it is still necessary for those countries to carefully select unilateral, internal balancing approaches or build up their defence mechanism capabilities as a deterrent power. In contrast, this hedging theoretically undermines the ability of so-called great power nations to manage their internal Covid19 problem by balancing their hegemonic creed efficacy. Alternatively, most small countries may choose alliance or close strategic partnership with advanced entities with a greater economy with good governance instead of relying heavily upon the relatively hard-power nations to safeguard their authority.

As emphasised by (Thomas, Tutu, & Tutu 2005), any rebranding, whether in foreign policy or international relations, is cultural or public diplomacy, must take seriously the piety, the faith, and genuineness of people's religious convictions in other countries, including the interpretation of life-holistic definitions for human right protection, governing natural law in connection with individual or family life. Therefore, practical strategy to foster and sustain the international collaboration of nations should be based on trust and peace-building diplomacy and encourage democracy for civil society and economic development, particularly in the poorest countries. Although most of Thomas & Tutu et al.'s friends passed the test of Orthodox Christian Doctrine, many nonetheless backed the Apartheid system. It is difficult to understand yet question why those God-fearing individuals believe in Apartheid and other murdering and genocide doctrines. Consider the Zionist Israel's continuous oppression of Palestinians, as well as the Communist-led ideological prosecution of Uyghur in Xinjiang, China. The Jews accused Hitler of the enormous number of Jews massacred in Germany during Second World War II, yet they outperformed Hitler in terms of barbaric behaviour (President Erdogan).

Currently, there are many IR actualities where both China and America breached other nations' autonomy or denied minorities group sovereignty. For example, the assassination of Qasem Soleimani during Trump's reign (The Guardian 2020), the US ongoing support of Israel Apartheid over Palestinians (Stephens 2003), (Soekarno & Utomo 2019), and (Zanotti 2016), and the PRC's ongoing oppression over Muslims Uyghur in Xinjiang Province (Mukherjee 2010), (Smith Finley 2007) & (Clarke 2015), as well as China business debt trap

with small yet weak nations under the name of Belt Road Initiative or BRI. Furthermore, the continuous Zionist massacres and bombings over unarmed Palestinians and Palestine land, China's PRC's ongoing persecution of Uyghur minorities, and the ethnic cleansing of Myanmar Rohingya by the Burmese Junta Military (Ahluwalia & Toby 2018), (Dussich 2018) and (Anwary 2020) are all examples of how disastrous the consequences of secular S, FR and IR strategy. Fortunately, it has paved and forced a global civilisation to rethink, reconstruct, and redefine the epistemology and ontology of nation Security, Foreign or International Relations discipline focus that critically need to be reformed and transformed.

Likewise, it is no longer acceptable or naively overlooked or simply dismiss the insignificant religious role in the contemporary nation-state and its sovereign apparatus. Supposedly, the belief system should be part of the International Relations domain breadth, but repercussions of disregarding religion mean that Western IRs will soon be irrelevant to the world's 2.3 billion Muslims. It has become unavoidable to move beyond the field's narrowness yet broaden the scope of analysis to incorporate the new dynamics, including the spiritual resurrection of security foreign and international policy, notably to explain complex interaction between nations and communities (Sandal & James 2011). The problem with the western and secular way of international relations as felt and perceived by Muslims across the world today are due to the sense of injustice or western double standards concerning the Palestinians & Palestine (Berger & van Ham 2010). The western and communism IRs strictly uphold resolutions the international law and become more pathetic when it comes to Muslim countries but close their eyes when involving Israel and Uyghur. These double standard relations make Muslims sharply aware, regardless of their nation's origin.

To understand international relations in the Muslim world, it is equally critical to examine the religious soft power (Mandaville & Hamid 2018). Today, liberalism as a normative basis of the international system has long demise due to too many uncertain events of other nations rising in the international arena. For example, IRs experts observe the rise of China, India, Turkey, and Indonesia, totally out of the post-Western world order. China is home to 1.5 billion communists. India is the cradle of Hinduism and Buddhism belief, while Turkey, Indonesia, Malaysia, along with the Nusantara archipelago are emerging Muslim authorities in the global arena. Additionally, other emerging niche IRs concerning religion are worth integrating into the new IRs world order for better and harmonious world relations. In the future, it

is increasingly possible for the polity or countries to put a culturally specific spin on liberal economics and parse their security interests through religion. However, within the failure of US and European alliances in foreign relations across the Middle East and Afghanistan for the past two decades, none of the western or secular IRs has succeeded in resolving the Muslim world affair.

Therefore, it is crucial to revisit and discuss the International and Foreign Relations method through the Muslim worldview. As claimed by (Sheikh 2013), religion is re-emerging as a significant component in international conflict and can no longer be deniable by global civilisation. Conversely, it is critical to address Islamic theology in dealing with foreign relations and Islamic politics. The approach is simple; according to Islam principle, international relations politics works with the national system as long as the Muslim states administration forefront the needs of the wider Muslim community before an individual needs. Islamic International relations consider universal principles by the Islamic Relief Organisation (Rahman 2018). The creed includes consists of six significant values, namely uphold monotheism: To prevail justice & freedom of nations (countries function freely without foreign intervention); human rights (as prescribed by Sharia law); equality (fair access to education, work and resources regardless of gender); social solidarity (minimised poverty & zero caste system), as well as sustainable vicegerent custodianship on earth.

In other words, Islam IRs obligatory to be developed from community solidarity ummah to form Muslims' way of standardised international relations. This methodology is firmly reinforced by (Mubarak & Candra 2020) with an idea of initiation over Islamisation on foreign relations or, in other terms, *integrative international relations*. The authors' ideal worldview was to harness and bridge Western weltanschauung IRs and Islamic discourse into a new scientific discipline to minimise the clashes between the civilisation itself. Similarly, (Mohammad 2006) accentuates any legal foundation of international relations in Islam, benchmarked through the Shari'a approach. The sources of Shari'a are the Quran and the Prophetic traditions (Sunnah). Derived from Shari'a is the Fiqh or Islamic

jurisprudence, which covers the myriad of problems and issues that arise in the course of man's life. A book of good governance known as *Kitab Al-Imara*, book 20 of Sahih Muslim hadith compilations from 4473 up to 4731, deals with human beings' character and international relations methodologies. The hadith book is easily accessible through the IUM portal written in the reference list at the end of this article. Human and International Relations in Islam highly regard peace, love, mercy, and compassion as the core principles of Muslims to enter or correspond to any international law on

foreign relations. Peace (salam), love, mercy, and understanding are natural ranks that should prevail among nations and allow restoring to coercive means, military or non-military, only in self-defence and when international peace and security are threatening.

The *jihad* that western IRs largely misunderstand precisely yet meticulously explained in the book of Jihad & Expedition or *Kitab Al-Jihad Wa'l- Siyar* via Sahih Muslim: Book 19. As endorsed by (Haynes 2021), Western IRs should incorporate religion into realism and liberalism in agreement with Fox & Sandal (2011). The authors now realise a critical need to accommodate the diverse ways of religion impacts international and foreign relations by adapting religion- friendly IRs analysis due to Islam's massive impact on the international arena. One of the superior outcomes is the discovery of different facets of religion, particularly Islam, and its cultural relations paradigm naturally is the central component of a novel theoretical understanding of International Relations. Faith system in most countries across the world, especially in the eastern hemisphere, increasing its significance, tools for political mainstream and nationalism relations despite remains an opaque element in the western hemisphere.

In comparison, Islam IRs may also fit into the neorealist liberal approach. Muslims as ummah are summoned to compete yet strive for self-development in terms of righteousness or promoting good deeds. Such exhibit behavioural relations are non-existence in the western world. Supposedly, those more developed Muslim countries assist the less developed Muslim nations that struggle with extreme poverty or calamities. However, unfortunately, the giant nations holding economic and military power prefer to seek and use their capability to invade or exercise direct intervention over the weak or powerless countries.

2. THE CURRENT DEVELOPMENT OF MALAYSIA INTERNATIONAL RELATIONS WITH CHINA AND THE US GOVERNMENT

2.1 Malaysia – China Economy and Bilateral Relations

Presently, Malaysia maintains an equidistant relationship with China and the United States. Malaysia's relations with the United States have progressed in the same way as its relations with China have. Malaysia's non-aligned movement or NAM strategy since 1971 (Wey 2017) has reaped significant benefits in terms of bilateral cooperation with the United States while also ensuring that the collaboration is in harmony with its diplomatic relations

with China to avoid potential conflicts of interest. Diplomatically, Malaysia is developing its bilateral ties with China, despite continued disagreements over maritime sovereignty over the South China Sea (Parameswaran & Safe 2015), while adhering to regional principles and procedures to preserve its interests. Malaysia's response to incidents in the South China Sea involving China has previously been strictly regulated and frequently communicated to Beijing in secret as rising nationalism among the public limits government options and risks the existing relationship, particularly during Najib's term. In response, Beijing has applauded Malaysia's government for taking a pragmatic approach over Terumbu Layang-Layang, Spratly's islands issue (Ganesan 2010: page 267), both privately and publicly, as well as treating it more favourable compared to Vietnam and the Philippines regarding the South China Sea disputes.

Conversely, Malaysia has sought to defend the unity of the ASEAN over the South China Sea rights by speaking out against unilateral adjustments of the status quo by hegemonic nations. As a result, China has emerged as an attractive FDI contributor, especially since the invention of the Belt Road Initiative (BRI). During Najib Razak's tenure, China was Malaysia's largest investor, with investment closed to USD1.6 billion or 17.5 per cent of the nation's total Foreign Direct Investment (Liu & Lim 2019). The investment is mainly on a large-scale, capital- oriented mega infrastructure project. Currently, Malaysia-China indirect trade is approximately USD66.2 million via Singapore Port. In addition, the authors claim, China has also invested approximately 700 million indirectly through various Malaysian public and private agencies and firms linked to 1MDB, as disclosed by the Wall Street Journal. However, contradicted to (Gerstl 2020), in 2019, Malaysia's FDI investment was USD7.6 billion, contributed mainly by Japan with USD2.5 billion, Hong Kong with USD2.1 billion, the Netherlands with USD927 million, and the US with USD647 million, while China invested only USD112 million. Additionally, Malaysia signed bilateral trade agreements with Australia, Chile, India, Japan, New Zealand, Pakistan, and Turkey and was actively involved in all ASEAN free trade agreements, including CAFTA.

Furthermore, China's capitalist aspiration known as "High-Speed Rail" (HSR under the BRI initiatives or "One Belt, One Road" (OBOR) (Shah 2016) is being observed as a strategy for strengthening its authority over the Southeast Asian nations, not just the South China Seas alone, by implementing bilateral meetings with specific host nations rather than multilateral cooperation with ASEAN collectively. As argued by (Pavličević & Kratz 2018), (Oh 2018) and (Ziegelmeir 2020), such projects are exceedingly expensive yet unsustainable,

yet it seems like *all roads lead to Beijing*. Vietnam, Laos, Myanmar, Indonesia, and even Malaysia are incapable of financing this too-good-to-be-true venture. The HSR budget has exceeded 80 per cent of Laos' GDP and elevated the country's external debt up to 125%. Therefore, it is certainly ill-advised to undertake this China's BRI scheme. Although China will finance the large-scale of the project, it is an unbearable long-lasting cost to any of the Southeast Asian nations for over-reliance on China as Sri Lanka already faces its consequences (Var & Po 2017), (Sautman & Hairong 2019) and (Haderiansyah, Habibah, Setiawan, & Hayat 2020) after fall into China debt trap. The high-speed rail projects allow China to impose its own World New Order, particularly in Southeast Asia. Indonesia discovered that the HSR project is in grave danger after conducting a feasibility study on the Jakarta-Bandung train. As (Russel & Berger 2019) highlighted, China's BRI initiative-related projects were imposed through a series of corrupted bribery bilateral practices. Host countries are openly pressured to endorse the project memorandums of understanding, contracts, and related deal documents, effectively locking in the deals before due diligence occurs. Ignoring critical project design, feasibility, and financial issues exposes the project to significant risks and long-term challenges.

Haste to memorandum settlement deprives vital participants, such as local governments and stakeholders, preventing any opportunity to adequately assess the project's virtues, aims, costs, and ramifications for the host nations. The High-Speed Rail of China's BRI would undoubtedly incur enormous government debts due to its high lending rates (Chang, Deng, & Hwang 2019), posing a political and sovereignty risk to ASEAN countries, leaving Malaysia and Indonesia with no other alternatives except to terminate the HSR. Unfortunately, despite the good bilateral approach with PRC, China continues to encroach into Malaysia's maritime, SCS EEZ, and the Spratly Islands, as reported by the media and thoroughly recorded (Wong 2020). Between 2008 and 2013, 35 patrol ships entered Malaysia's South China Sea naval zone. On another occasion, China's coast guard and militia warships are regular spots at the Sarawak's coast known as Luconia Shoals (Beting Patinggi Ali). The most recent incident involved more than 100 China-registered vessels invading Malaysian seas and a Chinese ship tagging a Malaysian vessel in the disputed areas. As quoted by Wong, *The Malaysian government either acts diplomatically or keeps silent*. Therefore, there is a critical need for Malaysia to bolster its Royal Malaysian Navy, Royal Malaysian Air Force, and Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA) to safeguard its sovereignty in Spratly Island, SCS EEZ, and its maritime frontiers.

In contrast, by expressing dissatisfaction with China's bullies and open aggression, outlandish claims of the Nine-Dash Line over the South China Sea (Sokolsky 2000), Spratly Islands, and Malaysia's EEZ in the SCS, indeed the most anticipated event (MINDEF 2020), as no previous Malaysian leader has been able to speak robustly about Malaysia's sovereignty over its SCS right. Additionally, Malaysia has terminated multiple contracts of 5G services from multiple China Conglomerates, signalling the end of the nation's pro-communist policies (Narang 2020) following the arrested of 600 China citizens in Malaysia over a foreign exchange scam fraud. As a precaution, Malaysia should be wary of China's government's Islamophobic treatment and mistreatment of its Muslim Uyghur minority, which transparently constitutes a violation of human rights (Abuza 2020). What guarantee does the PRC have that it can be trusted in long-term diplomatic ties if it can quickly and efficiently prosecute its citizens?

2.2 MALAYSIA – US BILATERAL RELATIONS AND SECURITY COLLABORATIONS.

Security practices and foreign relations between the United States and South East Asia began as early as 1954, after World War II, through the Southeast Asian Agreement or SEATO declaration. SEATO was signed by the United States, the United Kingdom, France, Australia, New Zealand, the Philippines, Thailand, and Pakistan to prevent South East Asian regions from becoming communist countries. The British colonial was Malaysia's representative for the agreement before its independence in 1957 (M. N. M. Yazid 2014). Today, Malaysia-US defence collaborations statistic value valued USD35 million from 2000 to 2015, as revealed by (Ismail & Abadi 2019). The strategic cooperation aims to promote Malaysia-US interoperability in stem-to-stern domain awareness, including Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR) collection to fusion and data dissemination, amphibious capabilities, disaster response & preparedness, and non-proliferation efforts. As described by (Siangyen 2016), Malaysia has a long history of constructive foreign relations with the US, particularly during Obama's reign. For example, in 2016, Obama visited Malaysia and presented USD2 million in assistance to help Malaysia to strengthen its maritime law enforcement capability. Particularly in combating illegal goods transshipment, ongoing Abu Sayyaf kidnapping and ransom threat along the East Coast of Sabah region, which borders the Philippines.

As reinforced by (Cheng-Chwee 2008) and (C. C. Kuik 2016), Malaysia needs to build strategic bilateral and defence links with both America and China to safeguard its sovereignty, prevent a crisis, and for hedging reasons, although in different capacities. The Malaysia-US military program collaboration aims to reduce risks and provide indirect balance by establishing and strengthening military alliances without directly or explicitly targeting any nation. On the other hand, Malaysia's defence cooperation with China is critical to maximising diplomatic gains through multisector cooperative economic arrangements. According to (Coy 2005), the US National Guard State Partnership Program (SPP), through its National Security Strategy (NSS) and its National Guard (NG), is ready in lending support to the Regional Combatant Commanders' TSCP through the implementation of its security cooperation objectives with Malaysia. It is well verse among the NSS objective to foster global economic growth through free market or capitalism, free trade, and democracy infrastructure building.

The US State Department's website claims Malaysia is a significant regional and global partner for the US. Therefore, Malaysia and US signatories to the Trans- Pacific Partnership Agreement, known as the TPPA trade treaty, became part of bilateral trade liberalisation (Fergusson, McMinimy, & Williams 2015) between Malaysia and the US that took place during Najib Razak and Barack Obama's reign (Mohamad Yusop 2017). The US is Malaysia's fourth-largest trade alliance, as noted by (O. E. Sun & Han, 2016). Signing the TPP enables Malaysia to secure US Foreign Direct Investment (FDI). Undoubtedly, this Trans-Pacific Partnership agreement (TPP) paved good access for Malaysia to enter ample trade opportunities and increased the country's exports of oil palm, rubber, and other electronic products. In addition, the Malaysia-US FTA treaty's quantitative economic benefit certainly provides win-win trade gains for both nations (Jafari & Othman 2013) along with other exchange benefits. Unfortunately, during Trump's presidency, the US has withdrawn from the TPPA (Petri, Plummer, Urata, & Zhai 2017), which Obama initially started to counter China's BRI. Malaysia-US military to multilateral military exercises with Malaysia Armed Forces MAF and Royal Malaysian Police collaborations vary. These included: The US Navy Seventh

Fleet's Cooperation Afloat Readiness and Training or known as CARAT program: A multilateral exercise such as Cobra Gold, Cope Taufan, Keris Strike and Air Warrior exercises, the Bilateral Training and Cooperation or BITACG program (Finkbeiner 2013), the Demining and Related Programs (NADR) and the Second Line of Defense Mega Ports Initiative Sustainment Plan-Port

Klang Malaysia (King 2009). These drills aided in the operational and bilateral development between the Malaysian armed forces and the United States military.

In addition, the challenge for the Malaysia-US defence exercise program lay in its effectiveness in diminishing Beijing's Salami Tactic (Thompson, Pronk, & van Manen 2021). Authors revealed that China is well known for avoiding inciting military objections over its territorial claims across the SCS. Instead, China utilised its commercial fishing ships as proxies to drive ASEAN fishing fleets out of the disputed waters. When the South East Asian fishers try to resist, China's coast guard, the Marine Surveillance Agency, and Fisheries Law Enforcement Agency will suddenly appear on the scene to harass or even detain them.

Other Malaysia-US Military Education & Training collaborations include The Malaysia International Military Education and Training (IMET), the Foreign Military Sales Training, the Counter-Terrorism Fellowship Program (CTFP), and The Asia-Pacific Centre for Security Studies (APCSS) programs as updates from the US Defense Operation Office via US Embassy Kuala Lumpur website. Another non-military collaboration between the American Commission on Educational Exchange (MACEE) and Malaysia's Ministry of Education via the Fulbright English Teaching Assistants (ETA) English enhancement program for secondary schools across the nation. The security and military engagement examples demonstrate both governments' lengthy strategic alliance. These areas of cooperative security might serve as platforms to improve Malaysia-US collaboration on maritime. By increasing security ties with the United States, Malaysia's foreign policy options for dealing with crises such as the South China Sea conflicts might be good to prevent China's aggression across SCS.

Unfortunately, the US foreign policy is greatly motivated by hard power rather than soft power. There have been fewer resources dedicated to US soft power initiatives during G.W. Bush, Clinton, Obama, and even Trump administration reign. Besides, there is still scepticism over the United States' interest and commitment among ASEAN members themselves, particularly in terms of regional security concerns that undoubtedly contribute to US challenges in restoring its diplomatic relations and a favourable image among ASEAN nations. The authors discovered the US foreign policy remained unaltered since World War II up to this present, heavily reliant upon military capability in its S, FRs and IRs policy (Cronin et al. 2012), continuously activity for *surrogate warfare* (Krieg & Rickli 2018) targeting particular countries that against US's aspiration and interest. There is still a significant disparity between

hard and soft power resources allotted to the ASEAN region. The US cannot successfully elevate diplomacy other than demonstrating its complex power ability across SCS or offering standard foreign development funds, followed by small-scale exchange programs. Ideally, collaborations in terms of '*Freedom of Sea*' alluding to the South China Sea certainly needed a tight formation of security determination to be done collectively yet effectively by the ASEAN region with minimum intervention from China, the US, or other external entities.

In contrast, the US is encouraged to exercise soft power rather than hard power. Preferably, the Malaysia-US diplomatic relations enhance more through economic collaborations similar to Malaysia-China trade diplomatic relationship. (Rinehart 2015) reported Malaysia-US economy bilateral engagement has been long-established. In 2014, US FDI to Malaysia was reported at USD14.4 billion, while Malaysia's FDI to the US in the same year was USD809 million. However, the two-nation bilateral relationship slumped during the Trump administration, and the US was already a tortoise (20 years behind) compared to China's speed in international bilateral efforts. Malaysia export to the US mainly on human capital, professional & technical services, medical apparatus & surgical instruments, rubber-based products, optical and cinematographic appliances. Therefore, there is a valid argument to rejuvenate the Malaysia-US bilateral relations in a sincerer or holistic platform for the benefit of both nation citizens rather than a benefit to the president or prime minister alone.

Currently, as suggested by (Mazza 2018), the US and the EU patrol vessels can be effectively well-positioned across SCS maritime trade routes or along with the disputed Spratly Islands and ASEAN Economic Exclusive Zones borders. A maritime patrol aircraft will constantly monitor incidents in contested areas while tracking Chinese submarines hiding in and transiting the SCS. The United States is best positioned to initiate regional maritime domain awareness through multilateral collaboration directly with ASEAN, particularly with nations with unresolved UNCLOS disputes with China. Participating ASEAN members would contribute their Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) capabilities to the network, and critical nations would have access to a unified operational framework. The US may offer assistance to thus currently less capable countries in enhancing their ISR assets. In addition, this network could aid in collecting data and testimony regarding China's bullying and provocative policy in the SCS disputed territory, which would be extraordinary evidence to present to the UNCLOS tribunal.

However, to the best of its abilities, the US may refrain from direct intervention over the disputes instead of striving for goodwill balance between the above policies certainly contribute to Asian regional stability and conflict prevention as affirmed by the United Nations. The current statistic from the Pew Research survey on global sentiments toward soft power post-Trump's election, the United States' favourability rating decreased dramatically to 8.39% in 2020, as recorded by its Foreign Bilateral Influence Capacity (FBIC) index. Even though referred to as a *wounded giant* due to Trump's Islamophobic relations strategy (Wike, Fetterolf, & Mordecai 2020), the US enjoys a slightly higher favorability rating on a global scale than China. 54% of communities worldwide view the USA more positively, while only 40% said China is more constructive, according to the poll. In terms of global perception, 63% of global perception prefer the US as a hegemonic authority rather than China (19%). Henceforth, these hegemonic nations are unfavourable to almost all Muslim countries due to their systematic Islamophobia philanthropic network (Derghal 2019) and continuously oppressing Muslims worldwide.

3. THE SOUTH CHINA SEA (SCS) ECONOMY, BIODIVERSITY WORTH, AND ASEAN AS PEACEKEEPER GUARDIAN OF SOUTH EAST ASIA MARITIME SOVEREIGNTY

3.1 The South China Seas (SCS) Maritime, Economy, And Biodiversity Worth

The SCS maritime, economy, natural resources, and underwater biodiversity value are the primary reasons SCS has emerged as one of China's main interests in its International Relations arena. The US Energy Information Administration testifies it or EIA in (Dossani et al. 2016) economic-value estimations throughout the SCS nearshore zones. They comprise about 11 billion barrels of oil reserves and 190 trillion cubic feet of natural gas in proven and probable reserves. The China Ministry of Land and Resources quote SCS reserved more than ten basins worth of oil reserves, covering approximately 852 240 Square Kilometres'. This God- Made resource is almost half of the entire continental shelf in the SCS. The Chinese National Offshore Oil Company (CNOOC) revealed that the SCS underwater investigation resources report confirmed the SCS holds around 125 billion barrels of oil and 500 trillion cubic feet of natural gas in undiscovered resources.

Among areas identified as oil reserves spots are the North Borneo (Sabah, Malaysia), two other oilfields on the continental shelf in Southern

Vietnam, oilfields in Malampaya gas field of Palawan northwest in the Philippines, oil reserves in Tonkin Gulf in two neighbouring blocks of Vietnam SCS area, and Natuna gas field within the Indonesia SCS locality operated by Exxon, plans to serve Singapore through a pipeline. In addition, China owns the huge Yacheng gas field in South Hainan Island and currently provides gas through undersea pipeline channels to market energy in Hong Kong and Guangzhou (Tønnesson 2002). Within the undisputed area of SCS, several joint venture oil corporations belong to South East Asia nations that had ongoing oil rig activities, such as the Camago & Malampaya, northwest of Palawan. The company gas field started its operation in 2002. While the Natuna gas field of Exxon, Indonesia has formed a joint-venture with Singapore and is in the progress of underwater pipeline development. Additionally, the Central Luconia gas field in Sarawak, Malaysia and the Vietnamese Lan Tay and Lan Do gas field operated by BP are in joint-venture with an Indian oil company is known as ONGC and PetroVietnam thus began in the year 2000, as reported by the Offshore Magazine news (2013) and the South China Sea Expert Working Group (2018) in Asia Maritime Transparency Initiative.

In another discovery by (Zhang 2018) and (Kaharuddin 2020), the SCS served as a critical chokepoint for international shipping lanes transporting trading goods worldwide, amounting to USD5.3 trillion annually. More than 11 maritime routes of SCS used for international shipping lanes transporting goods worth USD5.3 trillion per year. The Spratly Islands alone were a sanctuary of reef fishes and vital pelagic and generated economic value of USD39 to USD60 million per km² annually. The southeast Asia region accounts for 12 per cent of the global landing catch or roughly 10 million tonnes of fish per year. It is a home and living resource to almost 8 million people who live in the coastal area. They produced over 8 million metric tons of marine product or equivalent to 23% contribution to the region annually. Besides, Vietnam and Thailand ranked as the world's top five fishery exporters behind China in 2014. The Fish industry economy in the South China Sea is a source of southeast Asian foreign exchange earnings with a projected net value of 36.9 million tons in 2030, will reach 47.1 million tons in 2050, and ranking fourth among the world's 19 fishing zones for total marine goods production. Unfortunately, this once diverse marine ecosystem had been severely overexploited and overfished due to disputes.

Conversely, according to (Ness 2002) South China Seas was worth disputing due to its 30 per cent sanctuary uniqueness of the world's coral reefs found only in SCS maritime. Its underwater diversity is exceptional due

to being a nursery and breeding habitat for 12 per cent of the world's total fish harvest. The South China Sea contains enormous coral reefs of any tropical sea, with the Spratly islands being significantly distinct in reef richness and coral composition (Arai2015) and (Huang et al. 2015) as well as contributing around 30 per cent of Malaysia's total catch and 25 per cent to the Philippines. The commercial activity and productive ecosystems for coral reefs, mangroves, and estuaries are mainly in the coastal area of SCS. The coast population accounts for nearly 70% of the Southeast Asian population, equivalent to 270 million people, or around 5% of the world population.

Meanwhile, the seagrass is the cornerstone of many complex marine ecosystems and serves as a critical nursery for economically significant crabs, prawns, and other sea resources and holds sediment to the seafloor, preventing erosion. The estuaries and wetlands are frequently associated with river deltas and coastal locations where land meets the sea. Mangrove forests, swamps, and fens are examples of such habitats. Usually, wetlands or estuaries serve as nursing grounds for fish, crabs, and seasonal homes for migrating birds. They also retain nutrients, prevent erosions, and are utilised in aquaculture and agriculture. For example, South-East Asia holds 33 per cent of world coral reefs (Arthington, Dulvy, Gladstone, & Winfield 2016), with an annual worth estimated at USD190.726 million contributed via the South China Sea.

3.2 ASEAN as a Peacekeeper Guardian of South East Asia and SCS Maritime

Sovereignty

ASEAN's founding declaration urged its member countries to follow the rule of law, uphold justice, and observe the United Nations Charter. ASEAN's goal was to accelerate South East Asia's peace and stability through political understanding, encourage positive inter-relations, sustain a multilateral practice over friendship essence, collaborative efforts, and sacrifice for the region's peace, freedom, and prosperity (Roy 2013) & (Mangku 2017). The 1976 Treaty of Amity and Cooperation (TAC) established the following:

1. Respect and appreciation for all nations' independence, sovereignty, equality, territorial integrity, & nationality identity;
2. The right of each regional member to lead its national existence free from foreign influence, perversion, or threat of violent intervention;

3. Non-interference in each other's domestic affairs and preference for peaceful resolution over any disputes or settlements;
4. The abstention of any threat or coercion instead encourages cooperation among ASEAN members.

Having said that, it is a clear breach of agreement among ASEAN nations to allow China to participate in bilateral negotiations to serve China's agenda, whereby the BRI itself transparently represents China's aspiration to boost its political power and geopolitical influence in order to restructure the *New World Order Doctrines* (Dupuy 2019). The ASEAN association is highly focused on regional multilateral relations based on cooperation, a win-win approach, and promoting peace, unity, and reciprocated understanding. Moreover, almost all ASEAN nations are members of the Non-Aligned Movement NAM (Abdullah 2020). Therefore, any conflict occurrence linked to ASEAN's interest will be a channel through a diplomatic medium and, at its best, negotiate without hard- power involvement. Unfortunately, an increase of unknown risks plus so many conflicting national interests and rivalries between ASEAN themselves are the great hindrances to unity against China (Wey 2017).

The ADMM-Plus convention has approved five areas of future practical cooperation and established the ASEAN Defence Senior Officials' Meeting Plus (ADSOM Plus) to implement its decisions. The ADSOM Plus managed to set up five Expert Working Groups, each co-chaired by an ASEAN and non-ASEAN affiliation known as The Humanitarian Assistance and Disaster Relief (Vietnam and China), The Maritime Security (Malaysia and Australia), The Military Medicine (Singapore and Japan), The Counter-Terrorism (Indonesia and the United States), and The Peacekeeping Operations (the Philippines and New Zealand). Unfortunately, as debated (Thayer, 2011), the ASEAN Defense Meeting Plus (ADMM Plus) treaty with a joint declaration to strengthen ASEAN regional defence, security and cooperation through practical conduct among ASEAN entities will soon become just regional rhetoric. The South-East Asia region scenario requires ASEAN to effectively address the Covid19 pandemic severity impact, the regional globalisation aspiration, and the socioeconomic gap within the ASEAN community. In particular, ASEAN needs multilateral collaboration to produce ASEAN's currency while actively engaging a constructive role in discovering opportunities for regional trade, upgrading ICT, eradicating poverty, and minimising internal conflict as IRs cohesiveness priorities.

As revealed by (Fravel 2011), China is well known for its *Diplomatic Delay Strategy* in its foreign and international relations. China keeps emphasises its international policy as open to negotiations as well as ready for more meaningful and peaceful means about the SCS disputes. Unfortunately, China calls for bilateral talks, not multilateral dialogue with South East Asian countries about the UNCLOS SCS settlement. China certainly knows the ASEAN reticence to accept its ridiculous Nine-Dash Line term. Therefore, China can pretend to engage in dialogue by deferring the settlement of the disputes and delaying the time to consolidate its claims. It is about time for ASEAN countries to stand firmly in unity on their SCS UNCLOS sovereignty by taking a practical and pragmatic stance to prevent maritime boundary conflicts that might jeopardise ASEAN socioeconomic interests (Salil 2012). China stubbornly stands for its unlawful claim over 12 nautical miles' territorial Spratly islands within Malaysia's sovereignty.

China has no right to claim the water surrounding Vanguard Bank in Vietnam, Luconia Shoals in Malaysia territory, Waters in Brunei's EEZ surrounding, and Natuna Besar Island in Indonesia. Beijing's harassment of other ASEAN's fishing or hydrocarbon development inside the region compound was unlawful yet must treat as a trespasser by the South East Asian community. Similarly, China has no lawful territorial or maritime claim over James Shoal, a submerged feature barely 50 nautical miles from Malaysian territory but 1,000 nautical miles from China's coast. The Beijing propaganda telling its citizens that James Shoal is China's Southernmost territory indicated greediness, insensitivity, and bullying relations with the powerless nation. The world definitely will not allow China to treat the SCS as its maritime empire (O'Rourke 2020).

Therefore, to balance China's aggression in SCS, the ASEAN nations must establish allies or engage in multilateral talks with any country that utilises the South China Sea as their regular maritime trade route. It is urged to the international community throughout the world to join hands with Asian nations to impose protection of the Freedom of Sea Navigation by United Nations, FONOPs Freedom of Navigation Operation (Brands & Cooper 2018). Besides, China must learn to respect regional sovereignty, including ASEAN rights to offshore resources. Malaysia should consistently refuse China's borderline extremist acts of arbitrary authority in the South China Sea. Instead of selecting the best possible hedging policy, South East Asia would be far more effective in compromising into a collective multilateral soft balancing engagement policy with both the authoritative powers. According to the

ASEAN Integration Report (2019), Industrial Revolution 4.0 has been a strong indicator in establishing a highly integrated and cohesive economy within ASEAN (Menon, Todd, Hashim, & Alias 2019). As a result, ASEAN could fully leverage its competitiveness, innovativeness, and diligent efforts to foster socioeconomic alliances with the European continent, Canada, Latin America, and South Africa as a constructive hedge against potentially aggressive Chinese dominance in the region and the South China Sea.

A standpoint made by (Ozturk 2021), International Relations IRs from the perspective of religious soft power have increasingly become a prime concern on a global scale. Religion soft power merits substantial research and comprehensive coverage due to the influx growth of the Muslim community across the world. Islamic IR's authority is constituted based on a monotheism belief system, universal law principles, human dignity preservation, acknowledgement of religious diversity, and the rejection of racism (Navvab & Aliakabri 2013). These Islamic IRs can be constructive or destructive instruments for any nation depending on its administration as an influence mechanism in foreign relations.

As confirmed by (Ozkan & Chatterjee 2019), cultural and religious elements frequently provide distinct strategic viewpoints to justify the nation's action, incorporated under its framework with unique values based on historical contexts. These factors are definitely inherited from Islam's intellectual and cultural legacy, varies throughout the period, geographical location, yet have profoundly affected the Muslim world countries' global strategy. Without a doubt, Islam theology has a long history of impacting how Muslim governments reflect on and respond to their foreign and international relations to accomplish national and global interests. As a result of Islamic IRs, none of the Muslim nations today have advanced destructive weaponry, although both US and China are fiercely competing to show off their military deterrence.

4. THE US SECURITY & FOREIGN RELATIONS IN MIDDLE-EAST

4.1 The Failed Foreign and International Relations in the Middle East

The solid reason why ASEAN should avoid hedging against the US was its foreign relations in the Middle East. America abused the '*democracy*', '*fighting terrorism*' and '*Islamophobia*' as its only weapon to protect its economic interest and justified its agenda igniting a persistent grievance bolstered by

the notion that the Middle East and the Muslim world generally have been invaded hence violated by the Western ideology. The US unwavering support for Israel, along with Zionist ongoing enormous massacres of Palestinians and authoritarian practices by Arab governments, plainly demonstrate that the US hegemonic mission has crippled its prospects in the Middle East (Dalacoura 2010). By being a persistent role in the US-Israel nexus, the US's hidden agenda has been heavily inspired by Israel's theological beliefs. The advent of the Zionist movement in the late 19th century culminated in the Israel State's illegal proclamation in Palestinian land known as Belfour 1948 treaty. Since then, the Jewish and Christian communities have significantly shaped US foreign policy. The role of Israel's theology in US IRs historically has been classified into three aspects; the impact of domestic policies on American policymakers' calculations; the prominence of the Middle East in US diplomatic and strategic thinking; each policymaker's beliefs and behaviour or religious judgments as well as an assessment over the significant theological benchmark among US citizen. All this is explicitly confirmed by (Aliboni 2011) and (Hummel 2019).

Multiple IRs works by (Stephens 2003), (Yazdani 2019) and (Cole 2020) disclosed United States' decision to maintain sanctions against Iran throughout the coronavirus outbreak has further deepened Iran's bilateral relationship with China. Due to the possibility of US Treasury Department third-party sanctions on European banks and enterprises conducting business with Iran has hampered Iran's trade with Europe. Therefore, Iran has increasingly resorted to China since 2018. In 2019 alone, Iran traded over USD20 billion in business exchange with China, which accounted for 20 per cent of all Iranian exports and 25 per cent of its imports. In return, China had provided approximately 40 tons of medical aid to Iran during the Covid19 pandemic in March 2020, entirely disregarding the US embargo. The UNs tons of appeals to lessen the Trump administration's sanctions campaign against Iran's economy amid the pandemic crisis and to allow Iran access to the resources to mitigate its Covid19, the US, unfortunately, remained defiant. Instead, the US has repeatedly resurrected the cliché issue over Iran's nuclear program. While the United States remains a great power, including in the Middle East, it has reached the end of its hegemonic control and is no longer relevant to 2.3 billion Muslims today. The US has had two costly wars and invasions of two Muslim nations, Afghanistan and Iraq. As quoted by Trump, *'We have spent seven trillion dollars in the Middle East, and we have nothing except death and destruction.* As heightened by (Zannettou et al. 2019), the

cyberwar further intensified via Twitter platforms over anti-US sentiment among Iranian, with the most prominent hashtags such as '*Delete Israel*' and '*Free Palestine*'.

The Pew Research Centre (H. H. Sun 2008) uncovered considerable scepticism regarding the motivations behind the US-led war on terrorism, as much as the Muslims throughout the world doubted US liberty and democracy as synonymous with corruption, sex, and violence propagated through Hollywood products. Soft power will have diverse consequences in nations with varied political and cultural norms. Hollywood films, for example, are greatly loved in Western society, while are undesirable in major Muslim countries due to differing values, behaviours, and belief systems. The Bush administration perceived the Iraq War success narrative as being based on reconstructing Germany and Japan after World War II. The US perceived overthrowing Saddam Hussein's government as a step toward long-term transformation in the Middle East. However, the Bush analogy neglected the reality that Iraq's political conduct and practices differ from Germany or Japan. The cultural diversity is significantly greater between the US, European nations, and the Middle Eastern. Therefore, the economic and social environments are massively diverse. Supposedly, the US strategy and soft power should be different too. The anti-US attitude has become complicated in political discourse (Baxter & Akbarzadeh 2012: Page 15). The Anti-US sentiment is a complex social and political mindset that infuses the global community's political landscape regardless of their nation or nationality. For decades, public perception of the US has been severely negative and worsening during Trump's administration due to his Islamophobia controversial policy.

A warfare proxy is a third party's indirect intervention in war to influence the conflict's strategic outcome (Safak & Çelik 2018). Surrogate warfare by proxy is not a new phenomenon in US international relations. Proxy warfare has resulted in the deaths of hundreds of thousands of people and the displacement of millions of people both domestically and abroad. The Syrian war might be described as anarchic surrogate warfare (Mumford 2013) because of the growing yet widespread broad network engagement, seeking maximalist self-interests and coercive goals. Probably this most ungentlemanly warfare ever committed by the Western world against powerless nations around the world is just a rebranded form of special task force inherited from past nations such as the Greeks (Spartans), Persians (Nizaris), Chinese emperors (Sun Tzu's art of war), and Japan (ninjas) (Kok Wey 2019) – the ugliest form of security and foreign policy practice. A battlefield warfare proxy has

resulted in an enormous cost to the US worldwide, particularly in the Middle East. While it has allowed the US to exert limited regional influence cheaply in terms of political, financial, and human lives, it has severely damaged the US claims to be a democratic authority ready to take any measures to influence global events. Things deteriorated after the Trump administration authorised the strike that killed Soleimani in early January 2020 (Rauta 2020). The US has lost control and oversight, has been unable to recast conflicts, and its inability to develop long-term sustainable and trustworthy policies has weakened its position as the world-leading force.

Table 1: The US Proxy War Involvement in the Muslim Nations

List of Proxy Warfare Adopted by the US (Obama Term)	
1.	Iran as a proxy in the war against ISIS in Iraq (2014 – 2015) - Islamic Revolutionary Guards Corps under General Soleimani provided a necessary ground complement to US-led strikes against ISIS positions in Iraq
2.	US military assistance delivered to Arab allies in Egypt, Jordan and Gulf nations (2011) - During the US invasion in Libya, the US provided key capabilities to allies in the air and granted Qatari & UAE armed forces tacit approval to train and equip Libyan rebel forces on the ground. *
3.	US provided USD5 million of non-lethal weapons & other military equipment, training and financial support to Gulf countries to act as US proxy to Syrian Rebel Forces in their fight against the Assad regime (2012 - 2014). *

4.	The US provided logistic and intelligence support to Middle-East allies under Operation Decisive Storm to fight against Yemen revolutionary troops (2015).
5.	US special forces provided training and support in Northern Iraq to support Kurdish Peshmerga fighters to be surrogates to fight against ISIS militants. *

Extracted from: (Krieg 2016) and (Krieg & Rickli 2018)

* US utilised conventional airpower platforms that can quickly eliminate the enemy from high altitude alongside armed drone technology, with significant effects on US kinetic involvement in the Middle East. For example, UCAVs were utilised in the war against ISIS in Iraq, Syria, Libya, Al-Qaeda in Yemen, and the Al-Shabaab group in Somalia.

4.2 Malaysia's Holistic Bilateral and Multilateral Approach at the Global Scale

Malaysia's FR and IR strategic framework priority elements included security, economic well-being, and friendliness (E. Noor 2019) as a medium to pave economic collaboration with every country (an exception to Israel) regardless of ideologies and trade accessibility to the world marketplaces. Malaysia relies heavily on international business to develop its nation. Its ultimate goals have been economic well-being, identity, and preservation of social harmony and unity for a decade. Malaysia fully utilises its bilateral and multilateral diplomacy to promote and safeguard its sovereignty and national interests by expanding collaboration or access to technology, finance, and other economic resources. This strategic technique seeks to influence other nations' intentions yet restrain potentially harmful organisations (Sullivan 2014). Malaysia's multilateral efforts mainly focused on ASEAN while effectively fulfilling its duty as a United Nations member, expanding its partnerships with the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) and other Non-Aligned Movement countries. As for the security front, Kuala Lumpur emphasises the Five Power Defense Arrangements with Australia, New Zealand, Singapore, and the United Kingdom.

Malaysia's first-ever Defence White Paper strongly emphasises defending the nation's maritime interests. Among concerns in the bilateral relationship with China are the Spratly island, the South China Sea dispute, the Chinese ethnic minority in Malaysia, and China's oppression of its Muslim Uyghurs population in the autonomous region of Xinjiang. Similarly, as asserted by (Gerstl 2020), Malaysia views navigation freedom overflight across the South China Sea as a globally vital sea line of communication, as important as a maritime trading nation, yet highly significant to Malaysia. Furthermore, Malaysia is taking a pragmatic approach to its foreign policy in balancing China. The US alliances for both hedging powers contributed equally to the nation's direct and indirect benefit, particularly in bilateral economic collaboration, security and social relations.

Malaysia's bilateral efforts toward the US and China are practical aims for win-win collaboration to maximise harmonious relations with the hope that China will stop betraying Malaysia's SCS sovereignty. At the same time, the United States will be genuinely honest in providing the ICT security equipment to monitor piracy, smuggling, and kidnapping for ransom along the Borneo coast maritime. It is an aspiration for the world citizen in general and Malaysian to witness these two adversaries be more tolerant, considerate, yet respectful toward smaller nations across the globe. It is unquestionably the ideal time for the United States and China to put their egos aside and build a new world order that has been damaged and tarnished by a series of war crimes, human rights violations, and minority oppression for more than a century. Only by ending greed for the earth's natural resources, which both unwillingly sacrifice, can international relations be restored to harmony.

Consider the contemporaneous South China Sea dispute, where the power imbalance between Malaysia and China is visible. Aside from militarising its artificial islands, the number of China ship intrusions into Malaysia's Exclusive Economic Zones EEZ rose dramatically after 2013. The United Nations CLOS Tribunal verdict over China's large scale land reclamation and construction of artificial islands as seven features in the Spratly islands, which are clearly within Malaysia's EEZ, found China had caused enormous damage to the coral reef environment and had violated its obligation to preserve, and protect fragile or endangered species biodiversity. The UNCLOS Tribunal also ascertained that Chinese authorities were aware that endangered sea turtles, coral, and giant clams were being harvested on a massive scale in the South China Sea (using methods that cause severe damage to the coral reef environment) and had failed to comply with their obligations to cease such activities (O'Rourke 2015). Previous Malaysia's

Prime Minister, Mahiaddin, ended the PRC's monopoly on the nation's economy by signing a trade collaboration with US-Microsoft USD1.7 billion in January 2021 (Mastura, Kalsom, Tangit, & Mohd 2013). Mahiaddin's diversifying bilateral approach was notable for attracting foreign direct investment (FDI) from different countries. The Department of Statistics Malaysia (DOSM) revealed that the US, Singapore, and Ireland are the top three FDI contributors to Malaysia, amounting to a combined value of approximately USD4.1 billion in 2020.

Similarly, the US holistic goal for the Asian region is to ensure the region remains free and open. Therefore, to accomplish the objective, the US may have to prioritise working with the ASEAN bordering maritime chokepoints, including Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, and Vietnam, due to its strategic maritime trade in Malacca Strait and the South China Sea specified the US defence goals for promoting security and stability in Southeast Asia preventing China from establishing dominance in the South China Sea (SCS). However, developing a military partnership and alliances with the ASEAN required US soft power ability instead of hard power, given that the region was home to almost 350 million Muslims. From the Asian perspective, the US was not in favour of hedging due to the US's unfavourable track record in dealing with Muslim countries in the Middle East and South Asia. The US Islamophobia campaign under the name of '*terrorism*' after the September 11 attack on the World Trade Centre claims to be misleading by most Muslim nations. Terrorists, according to the US Foreign Relations lexicon, are a war against Islam. The United States' discriminatory foreign policy toward Muslim countries has sparked outrage among the world's 2.3 billion Muslims. As argued by (Initiative 2009), The US is in a critical position to acknowledge its foreign relations impact on ASEAN Muslim nations, particularly Brunei, Malaysia, and Indonesia. United States' policy toward the Israeli-Palestinian conflict carries a negative perception due to its discriminatory IRs policy when it involves the rights of Muslim Nations. US's continuous support of Israel's aggression and apartheid regime over Palestinian spark anti-US-Israel sentiment across the globe that can hinder future military collaboration between the US and the countries. Additionally, China's ongoing oppression over its Muslim Uyghur in Xinjiang province confirms these two nations are unfavourable for Muslim countries to hedge with.

Malaysia is a nation fiercely opposed to any form of war yet prefers to maintain its status quo as a non-aligned movement country. The Ministry of Defense White Paper is an ideal aspiration of Malaysia and its citizens to stand distinctively united in defending its sovereignty. The Malaysian believe every

human soul does deserve to live in freedom while bonded to the world's Law of the Universe. As a high tolerance society, Malaysia is firmly opposed to evil acts such as massacre, indiscriminate killings, genocide, and any other form of human rights violation under the name of racist, arrogant, greedy doctrines embraced by western counterparts. Thus, neglecting the teaching of hereafter life existence belief, embraced by almost all world theological, agreeing that death is inevitable for humanity.

On the contrary, a recommendation for US military engagement and security cooperation with Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam encourages China's prolonged aggressiveness in South East Asia's SCS maritime zones. The US military engagement and security collaboration with the ASEAN region offers the possibility of countering China's hostility, notably with Indonesia, Malaysia, and Singapore, due to its utmost geopolitical strategic location and maritime nations. Increased naval exercises and oceanographic collaboration between ASEAN and US will aid in reducing China's aggressiveness and monopolistic policies over the South China Sea resources. Closed collaboration with Indonesia regarding the Natuna Sea will undoubtedly help highlight China's aggressive behaviour across SCS. On the other hand, Thailand has no claimants over SCS and certainly refuses to collaborate with the US (Lin et al., 2020).

Moreover, harnessing Malaysia's membership in the Five Power Defense Arrangements (Emmers 2013), which includes Australia, New Zealand, Singapore, and the United Kingdom, by recommending new channels of cooperation with the US will assist in balancing China's presence in the ASEAN region. As accentuated by (Mauzy & Job 2007), the US is well known for bullying foreign policy, particularly in the Middle East. The US invasion in Iraq, supporting Israel's Zionist Apartheid plus conducting surrogate warfare, has seriously damaged its foreign relations by undermining the norms of sovereignty, territoriality, and non-interference without UN approval, as witnessed by southeast Asian nations. Consequently, it will be difficult for the US to pave and re-established a long-term diplomatic engagement with the Southeast Asia community, notably Malaysia, Indonesia, Brunei, and Southern Thailand. Instead of requesting a military presence in ASEAN, the US may focus on future economic collaboration or security equipment supplies. It has a significant opportunity to enhance its foreign policy toward South East Asia, given the fact the region had received USD 329 billion of US investment in 2018, surpassing FDI contributions from China, Japan, India, and South Korea combined, as well as supporting half a million jobs for US employment (Singh 2020).

Malaysia may diversify its S, FRs, and IRs benchmarks, by expanding through agricultural commodities to boost its diplomatic relations with India, the European Union, Pakistan, and Turkey (Kushairi et al., 2019). Malaysia Crude Oil Palm can be an instrument source for the development of diplomatic relationships with the Middle East, Canada, Latin America, and even with the African continent, given the term and conditions of relevant environmental sustainability concerns (F. M. M. Noor, Gassner, Terheggen, & Dobie 2017) pertaining the commodity raised by the respective councils have carefully addressed. From the researcher's perspective, Malaysia exercises unclear direction in its international and foreign relations when the US and China are engaged. Malaysia's IRs, FRs, and Defence and Security approach appear heavily impacted by the country's leadership and the Ministry of Defence minister in charge of political will. Despite Malaysia's alignment with the non-aligned movement (NAM), its foreign relations favour capitalism and socioeconomic gain in certain circumstances. However, Malaysia's multilateral relationship with its ASEAN counterpart is remarkable; its goodwill strategy as an ASEAN buddy works efficiently in numerous dynamic contexts due to ASEAN members' shared vision of harmony, equality, and cohesiveness. As agreed by (Hu 2021), with the ASEAN-driven approach, Malaysia has become more effective in managing disputes over SCS.

Finally, Malaysia International Relations appears to match the Islamic International Relations concept of jihad position for striving and remaining steadfast in balancing the hedging effort toward both authoritarian powers – the US and China. Malaysia needs to begin promoting the holistic understanding of jihad that Western society has severely misinterpreted for decades. According to western secular relations scholars, jihad refers solely to 'combat-mode', a purely military or militant activity linked to the Arabs world (Hoskins & O'Loughlin 2011), (Bousquet 2012). Jihadists, as defined by (Hegghammer 2013) and (D'Angelo 2016), are Muslim fighters referred to as domestic or international terrorists who against western on a large scale was purportedly by western weltanschauung as a means for them to justify genocide and to kill over Muslims or to invade the Muslim nations across the world, particularly in Middle-East and across the globe. However, the western conception of jihad is erroneous, built based on faulty assumptions without referring to authentic Islamic teaching.

Whereby according to International Integrative Relations, Jihad is striving to protect national sovereignty from foreign invasion, struggling to avoid war, knowing that war will cause extreme damage to the nation, and remaining

steadfast in conducting multilateral, bilateral, or international relations with foreign countries, whether they are Muslim or non-Muslim nations, with peace and compassion (AbuSulayman, 1993). To a certain extent, Muslim political and international relations scholars have a fundamental responsibility to remain persistent in establishing Islamic Integrative Relations strategies to reduce the continual western polemic of misinterpreted and misguided the Jihad meaning in a holistic manner. Therefore, Malaysia holds a great responsibility to revolutionise and reverse this misunderstanding perception that has severely festered Western nations, communities, and generations for centuries. Furthermore, Malaysia bears a significant obligation to uphold its Jihad endurance and steadfastness in balancing its hedging effort and strategy between the US and China and preventing the nation from becoming Middle-East of Asia.

Conclusion

To conclude, the Muslim world considers the western Security, Foreign and International Relations paradigm troublesome. Moreover, there are issues with international law and human rights within this sphere created by western tradition. Similarly, after thoroughly assessing the literature, the present significant world power has concluded that Western international relations are transparently biased in favour of its national interests rather than global benefits. As posited by (C.-C. Kuik 2021), developing countries in Southeast Asia or Malaysia can remain neutral to safeguard their national security, prosperity, and autonomy even though the result may vary depending on which policy might best preserve the policy and prioritised. Choose to hedge with the US might risk becoming the second Middle East, yet reliance on China will cost the nation's security pawned. The slightest challenge in autonomy is expanding the strategic alliances within ASEAN nations, except Myanmar, due to its internal anarchy.

Nonetheless, the continuous period of the Covid19 pandemic across the world in 2021 has opened up new avenues for research. The once-ignored existential threat of infectious illnesses has awakened many of our eyes and changed our perspectives on how it might impact globalisation and establish new standards in human interaction. Furthermore, it would be fascinating to see how contagious illnesses such as Covid19 might change the way countries undertake security cooperation. Lastly, the post-pandemic uncertainty and prolonged consequences of war or an invasion of particular countries may be a possible recommendation for future research.

Acknowledgements

This study has been presented at IFERP-ICMDRSE 2022 Conference in Kuala Lumpur. However, has not been published as a full article. The authors declared have no conflict of interest that would prejudice the impartiality of this scientific work. Authors recognised the Google Scholars articles alert, multiple feedback from the Malaysia Armed Forces Defence College (MAFDC) students, lecturers @cohort 2021 and LSA Academic House Kota Kinabalu, Borneo via email & Short Messaging System. Feedback for this article kindly emailed to Cdr Mohd Harris Sadi [RMN sirloinmcgrill75@gmail.com](mailto:RMN_sirloinmcgrill75@gmail.com) or Jamaliah Jamil at jjamaliah2@graduate.utm.my

REFERENCES & BIBLIOGRAPHY

- Abdullah, K. (2020). Malaysia's role in invigorating NAM's Bandung spirit. *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies*, 40(1).
- AbuSulayman, A. (1993). *Towards an Islamic theory of international relations: new directions for Islamic methodology and thought* (Vol. 1): International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Abuza, Z. (2020). Malaysia: Navigating between the United States and China. *Asia Policy*, 27(2), 115-134.
- Ahluwalia, P., & Toby, M. (2018). The Rohingya crisis: another failure of the international system. In: Taylor & Francis.
- Aliboni, R. (2011). The international dimension of the Arab Spring. *The International Spectator*, 46(4), 5-9.
- Alikhani, A. A. (2016). Fundamentals of Islam in International Relations. In *Islam and International Relations* (pp. 7-31): Springer.
- An-Na'im, A. A. (1987). Islamic Law, International Relations, and Human Rights: Challenge and Response. *Cornell Int'l LJ*, 20, 317.
- Anwary, A. (2020). Interethnic conflict and genocide in Myanmar. *Homicide Studies*, 24(1), 85-102. Arai, T. (2015). Diversity and conservation of coral reef fishes in the Malaysian South China Sea. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 25(1), 85-101.
- Arthington, A. H., Dulvy, N. K., Gladstone, W., & Winfield, I. J. (2016). Fish conservation in freshwater and marine realms: status, threats and management. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 26(5), 838-857.

- Baxter, K., & Akbarzadeh, S. (2012). *US foreign policy in the Middle East: The roots of anti-Americanism*:
Routledge.
- Berger, M., & van Ham, P. (2010). *Religion and Islam in contemporary international relations*:
Netherlands Institute of International Relations' Clingendael'.
- bin Mohamad Yusop, M. A. (2017). *The Najib administrations US policy: objectives, strategies and actions (2009-2016)*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2017,
- Bousquet, A. (2012). Complexity theory and the war on terror: understanding the self-organising dynamics of leaderless jihad. *Journal of International Relations and Development*, 15(3), 345-369. Brands, H., & Cooper, Z. (2018). Getting serious about strategy in the South China Sea. *Naval War College Review*, 71(1), 12-32.
- Chang, T., Deng, X., & Hwang, B.-G. (2019). Investigating political risk paths in international high- speed railway projects: The case of Chinese international contractors. *Sustainability*, 11(15), 4157. Cheng-Chwee, K. (2008). The essence of hedging: Malaysia and Singapore's response to a rising China. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 30(2), 159-185. Clarke, M. (2015). China and the Uyghurs: the "Palestinization" of Xinjiang. *Middle East Policy*, 22(3), 127-146.
- Cole, J. (2020). Missed Opportunities: The Trump Administration, Iran, and the Coronavirus
Pandemic.
- Coy, R. J. (2005). *The National Guard Southeast Asian State Partnership Program Providing Support to the National Security Strategy and the Global War on Terrorism*. Retrieved from
- Cronin, P. M., Dutton, P. A., Fravel, M. T., Holmes, J. R., Kaplan, R. D., Rogers, W., & Storey, I.

- (2012). *Cooperation from Strength: The United States, China and the South China Sea*. Retrieved from D'Angelo, C. (2016). The Jihadist Imaginary: the contribution of sociology of the imaginary for the analysis of the spread of Islamic fundamentalist movements. *International Journal of Public and Private Management*, 3, 2.
- Dalacoura, K. (2010). US foreign policy and democracy promotion in the Middle East: Theoretical perspectives and policy recommendations. *Ortadoğu Etütleri*, 2(1), 57-76.
- Derghal, M. (2019). The Impact of US Media Brainwashing on Promoting Islamophobia and Dogmatism against Muslims after 9/11 Attacks.
- Dossani, R., Harold, S., Chase, M., Chen, C.-i., Kotani, T., Lyn, C.-y., Taylor, J. Y. (2016). Maritime issues in the East and South China Seas. *RAND, Santa Monica*, 2.
- Dupuy, A. (2019). *Haiti in the new world order: The limits of the democratic revolution*: Routledge.
- Dussich, J. P. (2018). The ongoing genocidal crisis of the Rohingya minority in Myanmar. *Journal of Victimology and Victim Justice*, 1(1), 4-24.
- Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. *SAGE open*, 4(1), 2158244014522633.
- Emmers, R. (2013). *The role of the Five Power Defence Arrangements in Southeast Asian security architecture*: Routledge.
- Fergusson, I. F., McMinimy, M. A., & Williams, B. R. (2015). The Trans-Pacific Partnership (TPP) negotiations and issues for congress.
- Finkbeiner, J. M. (2013). *Malaysia's great power balance and the South China Sea disputes*. Retrieved from
- Fravel, M. T. (2011). China's strategy in the South China Sea. *Contemporary Southeast Asia*, 292-319.

- Ganesan, N. (2010). Malaysia-China Relations: Domestic and structural imperatives. *P. Lam*.
- Gerstl, A. (2020). Malaysia's Hedging Strategy Towards China Under Mahathir Mohamad (2018–2020): Direct Engagement, Limited Balancing, and Limited Bandwagoning. *Journal of Current Chinese Affairs*, 1868102620964219.
- Goh, E. (2013). *Conceptualising the relationship between bilateral and multilateral security approaches in East Asia: A great power regional order framework*: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Haderiansyah, H., Habibah, M., Setiawan, A., & Hayat, M. A. (2020). A policy of China's Debt-Trap Diplomacy: The Influence Of Media In Forming Community Political Opinions. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 170-178.
- Haynes, J. (2021). Religion and international relations: what do we know and how do we know it? *Religions*, 12(5), 328.
- Hecker, S., Wicke, N., Haklay, M., & Bonn, A. (2019). How does policy conceptualise citizen science? A qualitative content analysis of international policy documents. *Citizen Science: Theory and Practice*, 4(1).
- Hegghammer, T. (2013). Should I stay or should I go? Explaining variation in Western jihadists' choice between domestic and foreign fighting. *American Political Science Review*, 107(1), 1-15.
- Hoskins, A., & O'Loughlin, B. (2011). Remediating jihad for western news audiences: The renewal of gatekeeping? *Journalism*, 12(2), 199-216.
- Hu, L. (2021). Examining ASEAN's effectiveness in managing South China Sea disputes. *The Pacific Review*, 1-29.

- Huang, D., Licuanan, W. Y., Hoeksema, B. W., Chen, C. A., Ang, P. O., Huang, H., Affendi, Y. A. (2015). Extraordinary diversity of reef corals in the South China Sea. *Marine Biodiversity*, 45(2), 157-168.
- Hummel, D. G. (2019). Foreign Policy and Religion: US Foreign Policy Toward Israel. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*.
- Initiative, C. S. A. (2009). US Alliances and Emerging Partnerships in Southeast Asia: Out of the shadows. In: Washington: Center for Strategic and International Studies.
- Ismail, M. T., & Abadi, A. M. (2019). United States democracy assistance in Malaysia: the nature and impact of concurrent strategy. *The Pacific Review*, 32(4), 572-602.
- Jafari, Y., & Othman, J. (2013). Potential Economic Impacts of the Malaysia-US Free Trade Agreement. *J. Int. Glob. Econ. Stud*, 6, 33-47.
- Kaharuddin, A. F. (Undated). The Vulnerable Coral Reef Ecosystems in the South China Sea.
- King, C. A. (2009). *Second Line of Defense Megaports Initiative Sustainment Plan-Port Klang Malaysia*. Retrieved from: <https://www.osti.gov/biblio/1012528>
- Kok Wey, A. L. (2019). Western and Eastern Ways of Special Warfare. *Special Operations Journal*, 5(2), 143-150.
- Kolodziej, E. A. (2005). *Security and international relations*: Cambridge University Press.
- Krieg, A. (2016). Externalising the burden of war: the Obama Doctrine and US foreign policy in the Middle East. *International Affairs*, 92(1), 97-113.
- Krieg, A., & Rickli, J.-M. (2018). Surrogate warfare: the art of war in the 21st century? *Defence studies*, 18(2), 113-130.

- Kristensen, P. M. (2018). International relations at the end: a sociological autopsy. *International Studies Quarterly*, 62(2), 245-259.
- Kuik, C.-C. (2021). The Twin Chessboards of US-China Rivalry: Impact on the Geostrategic Supply and Demand in Post-Pandemic Asia. *Asian Perspective*.
- Kuik, C. C. (2016). Malaysia between the United States and China: what do weaker states hedge against? *Asian Politics & Policy*, 8(1), 155-177.
- Kushairi, A., Ong-Abdullah, M., Nambiappan, B., Hishamuddin, E., Bidin, M., Ghazali, R., Parveez, G. K. A. (2019). Oil palm economic performance in Malaysia and R&D progress in 2018. *Journal of Oil Palm Research*, 31(2), 165-194.
- Lin, B., Chase, M. S., Blank, J., Cooper, C. I., Grossman, D., Harold, S. W., Orner, P. (2020). *Regional Responses to US-China Competition in the Indo-Pacific*. Retrieved from
- Liu, H., & Lim, G. (2019). The political economy of a rising China in Southeast Asia: Malaysia's response to the Belt and Road Initiative. *Journal of Contemporary China*, 28(116), 216-231.
- Mandaville, P., & Hamid, S. (2018). Islam as statecraft: How governments use religion in foreign policy. November, posted by Brookings. Available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/11/FP_20181116_islam_as_statecraft.pdf (accessed November 15 2018).
- Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 18-24.
- Mastura, J., Kalsom, K., Tangit, T., & Mohd, F. Y. (2013). Nature-based rural tourism and its

- economic benefits: a case study of Kinabalu National Park. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 5(4), 342-352.
- Mauzy, D. K., & Job, B. L. (2007). US policy in Southeast Asia: Limited re-engagement after years of benign neglect. *Asian Survey*, 47(4), 622-641.
- Mayring, P. (2014). Qualitative content analysis: theoretical foundation, basic procedures and software solution.
- Mazza, M. (2018). *An American Strategy for Southeast Asia*: American Enterprise Institute.
- Menon, J., Todd, L., Hashim, A. W., & Alias, A. W. (2019). *ASEAN Integration Report 2019*: Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS).
- Mgba, C., & Ukpere, W. I. (2013). Religious Resurgence and International Relations Mainstream Theories: The Imperative for Theoretical Rethink and expansion. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 4(14), 535.
- Mohammad, A.-K. (2006). Rethinking international relations theory in Islam: Toward a more adequate approach. *Alternatives: Turkish Journal of International Relations*, 5(4), 41-56.
- Mubarok, S., & Candra, R. (2020). *Islamic International Relations as a Potential Tool to Indonesia's Soft Power Diplomacy*. Paper presented at the 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)(ss. 954-959). Atlantis Press.
- Mukherjee, K. (2010). The Uyghur question in contemporary China. *Strategic Analysis*, 34(3), 420-435.
- Mumford, A. (2013). Proxy warfare and the future of conflict. *The RUSI Journal*, 158(2), 40-46.
- Navvab, S. A., & Aliakabri, R. (2013). Survey of Islamic International Relations in Prophetic Tradition. *Religious Inquiries*, 2(3), 63-78.

- Ness, T. (2002). Dangers to the Environment. *War or peace in the South China Sea*, 43-53.
- Noor, E. (2019). Foreign and security policy in the New Malaysia.
- Noor, F. M. M., Gassner, A., Terheggen, A., & Dobie, P. (2017). Beyond sustainability criteria and principles in palm oil production: Addressing consumer concerns through insetting. *Ecology and Society*, 22(2).
- O'Rourke, R. (2015). *Maritime territorial and exclusive economic zone (EEZ) disputes involving China: Issues for congress*.
- O'Rourke, R. (2020). US-China Strategic Competition in South and East China Seas: Background and Issues for Congress. *Washington, DC: Congressional Research Service, March, 13*.
- Oh, Y. A. (2018). Power asymmetry and threat points: negotiating China's infrastructure development in Southeast Asia. *Review of International Political Economy*, 25(4), 530-552.
- Ozkan, M., & Chatterjee, K. (2019). Islamic Values in Foreign Policy. *Values in Foreign Policy: Investigating Ideals and Interests*, 115.
- Ozturk, A. E. (2021). Islam and Foreign Policy: Turkey's Ambivalent Religious Soft Power in the Authoritarian Turn. *Religions*, 12(1), 38.
- Parameswaran, P., & Safe, P. I. (2015). Malaysia's approach to the South China Sea and implications for the United States. *Maritime Strategy Series, Maritime Strategy Series (Washington, DC, 2015)*. Pavličević, D., & Kratz, A. (2018). Testing the China Threat paradigm: China's high-speed railway diplomacy in Southeast Asia. *The Pacific Review*, 31(2), 151-168.
- Petri, P. A., Plummer, M. G., Urata, S., & Zhai, F. (2017). Going it alone in the Asia-Pacific: Regional trade agreements without the United States. *Peterson Institute for International Economics Working Paper(17-10)*.

- Rahman, R. B. (2018). *Global Muslims Doing Good: Islamic Humanitarianism in Practice*. The New School,
- Rauta, V. (2020). Proxy warfare and the future of conflict: take two. *The RUSI Journal*, 165(2), 1-10. Rinehart, I. E. (2015). *Malaysia: background and us relations*.
- Roy, N. (2013). *Managing conflict in troubled waters: the case of the South China Sea*. Rutgers University- Graduate School-Newark,
- Russel, D. R., & Berger, B. (2019). Navigating the belt and road initiative. *Policy File*.
- Şafak, O., & Çelik, K. E. (2018). Conflict in Syria: Is It a Proxy Warfare? *Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 44-69.
- Salil, S. (2012). China's Strategy in the South China Sea. Google Scholar Database.
- Sandal, N. A., & James, P. (2011). Religion and international relations theory: Towards a mutual understanding. *European Journal of International Relations*, 17(1), 3-25.
- Sautman, B., & Hairong, Y. (2019). The "Chinese Debt Trap" and its Sri Lanka Example. *HKUST Institute for Emerging Market Studies*.
- Shah, A. (2016). Building a sustainable 'Belt and Road'. *Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development*(7), 212-223.
- Sheikh, F. A. (2013). *Pursuing the International Relations of Islam: A critique of IR theory*: University of Leeds.
- Sangyen, M. C. (2016). *US Smart Power in Southeast Asia: More Hard or Soft Power?* Thammasat University.
- Singh, D. (2020). American Foreign Policy and Southeast Asia. *Southeast Asian Affairs*, 57-76.

- Smith Finley, J. (2007). Chinese oppression in Xinjiang, Middle Eastern conflicts and global Islamic solidarities among the Uyghurs. *Journal of Contemporary China*, 16(53), 627-654.
- Soekarno, A. A., & Utomo, T. C. (2019). United States Unwavering Support to Israel: Biased Foreign Policy in Israel-Palestine Conflict Under President Donald Trump's Administration (2016-2019). *Journal of International Relations*, 5(3), 492-500.
- Sokolsky, R. (2000). *The role of Southeast Asia in US strategy toward China*. Retrieved from <https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA383669>
- Stephens, E. (2003). *United States policy towards Israel: The politics, sociology, economics & strategy of commitment*. London School of Economics and Political Science (United Kingdom),
- Stivachtis, Y. A. (2013). The English School and the concept of 'empire': theoretical and practical/political implications. *Global Discourse*, 3(1), 129-135.
- Sullivan, A. (2014). *Advancing US-Malaysia Security Cooperation in a Changing Environment*: JSTOR.
- Sun, H. H. (2008). International political marketing: a case study of United States soft power and public diplomacy. *Journal of Public affairs*, 8(3), 165-183.
- Sun, O. E., & Han, D. (2016). Malaysia's Relations with the Major Powers: China and the United States.
- Tayyar, A. (2018). Theories of International Relations I. *international relations*, 3, 4.
- Thayer, C. A. (2011). The United States, China and Southeast Asia. *Southeast Asian Affairs*, 2011(1), 16-25.

- Thomas, S., Tutu, D., & Tutu, D. M. (2005). *The global resurgence of religion and the transformation of international relations: The struggle for the soul of the twenty-first century*: Springer.
- Thompson, J., Pronk, D., & van Manen, H. (2021). Geopolitical Genesis.
- Tønnesson, S. (2002). The economic dimension: Natural resources and sea lanes. *op. cit*, 54-61.
- Tow, W. T. (2016). *Bipolarity and the future of the security order in East Asia*: ISEAS Publishing. Vaismoradi, M., Jones, J., Turunen, H., & Snelgrove, S. (2016). Theme development in qualitative content analysis and thematic analysis.
- Var, V., & Po, S. (2017). *Cambodia, Sri Lanka and the China debt trap*. Paper presented at the East Asia Forum.
- Wey, A. L. K. (2017). A small state's foreign affairs strategy: Making sense of Malaysia's strategic response to the South China Sea debacle. *Comparative Strategy*, 36(5), 392-399.
- Wike, R., Fetterolf, J., & Mordecai, M. (2020). US image plummets internationally as most say country has handled coronavirus badly. *Pew Research Center*, 15.
- Yazdani, E. (2019). Confrontation Between America and the Islamic Republic of Iran. *Sociology Study*, 9(4), 177-187.
- Yazid, M. N. M. (2014). The Cold War, Bipolarity Structure and the Power Vacuum in the East and South East Asia after 1945. *Journal of Global Peace and Conflict*, 2(1), 121-128.
- Yazid, N. M. (2015). The theory of hegemonic stability, hegemonic power and international political economic stability. *Global Journal of Political Science and Administration*, 3(6), 67-79.
- Zannettou, S., Caulfield, T., Setzer, W., Sirivianos, M., Stringhini, G., & Blackburn, J. (2019). *Who let*

the trolls out? towards understanding state-sponsored trolls. Paper presented at the Proceedings of the 10th ACM conference on web science.

Zanotti, J. (2016). *Israel: Background and US relations.* Retrieved from <https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD1020903>

Zhang, H. (2018). Fisheries cooperation in the South China Sea: Evaluating the options. *Marine Policy, 89*, 67-76.

Ziegelmeir, M. (2020). *The Politics of High-Speed Rail.* The Technical University of Munich.

MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSI DI SD IT NURUL FIKRI JUWANA

JAMARI

Mahasiswa pasca sarjana Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Negeri Kudus
aajimnurulfikri@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan inklusif merupakan filosofi dan strategi inovatif dalam memperluas akses dan peningkatan mutu pendidikan bagi semua tanpa deskriminasi, sehingga banyak mendapat sambutan dan apresiasi dari masyarakat luas. dalam tataran operasional, sekalipun implementasinya semakin meluas, namun masih banyak dihadapkan kepada berbagai isu dan kendala, bahkan kesalahan praktek konsekwensinya, dalam perjalanan menuju pendidikan inklusif (toward inclusive education), pendidikan inklusi harus dikelola dengan baik, sehingga kebijakan dan implementasinya sesuai dengan konsep-konsep yang mendasarinya.

Kata kunci : Inklusif, konsep, kebijakan, implementasi, isu, kendala

ABSTRACT

Inclusive education is an innovative philosophy and strategy in expanding access and improving the quality of education for all without discrimination, so that it gets a lot of welcome and appreciation from the wider community. at the operational level, even though its implementation is increasingly widespread, many are still faced with various issues and obstacles, even practice errors as a consequence, on the way to inclusive education (toward inclusive education), inclusive education must be managed properly, so that policies and implementations are in accordance with the concepts the underlying concept.

Keywords: Inclusive, concept, policy, implementation, issue, constraint

PENDAHULUAN

Berebekal dari sebuah keprihatinan terhadap kondisi pendidikan yang dialami oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus di wilayah sekitar Juwana. Dan juga peluang ingin meraih sebuah keberkahan dalam mengelola pendidikan yang jarang tersentuh oleh pengelola pendidikan. Bahkan mungkin belum atau tidak terfikirkan oleh pengelola lembaga pendidikan yang lain. Menjadikan manajemen Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Nurul Fikri Juwana yang menaungi SD IT Nurul Fikri Juwana untuk mengambil peran tersebut.

Sudah menjadi suatu kelaziman yang ada di masyarakat pada umumnya bagi anak berkebutuhan khusus untuk menambah pengetahuan mereka di sekolah luar biasa (SLB). Namun demikian, menjadi permasalahan jika anak berkebutuhan khusus tersebut bertempat tinggal jauh dari sekolah luar biasa yang ada. Selain itu sebagian besar orang tua masih, memiliki pemahaman yang kurang terhadap bagaimana seharusnya perlakuan yang benar bagi anak berkebutuhan khusus. Sebagian lagi kondisi orang tua anak berkebutuhan khusus berada dalam kondisi ekonomi lemah.

Dalam rangka menanggulangi hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu terobosan berupa pemberian kesempatan dan peluang kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendalami ilmu pengetahuan di sekolah umum bersama dengan teman-teman mereka yang normal. Pola pendidikan seperti ini biasa disebut dengan pendidikan Inklusi. Sebagaimana yang tertuang dalam Permen Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 pasal 1, "Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya".

Dari Permen diatas menunjukkan bahwasannya anak berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan sekolah dasar regular/umum bersama-sama dengan anak yang tak berkebutuhan khusus yang tinggal di sekitar sekolah tersebut.

Meskipun ada beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi, tetapi dalam penerapannya masih belum sesuai dengan konsep-konsep dasar penanganan anak berkebutuhan khusus secara mendasar. Bahkan sering kali ditemukan adanya kesalahan-kesalahan praktek terutama terkait pada aspek pemahaman, kebijakan internal sekolah, kurikulum, serta tenaga kependidikan dan pembelajarannya.

Dari uraian diatas tentu sangat menarik untuk diteliti secara lebih lanjut, oleh sebab itu pada artikel berikut akan menguak beberapa aspek penting terkait pelaksanaan pendidikan inklusi di SD IT Nurul Fikri Juwana.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Manajemen Pendidikan

Pada prinsipnya majemen pendidikan adalah suatu bentuk penerapan manajemen atau administrasi dalam mengelola, mengatur dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat pada dunia pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan merupakan alat untuk mengintegrasikan peranan seluruh sumber daya, guna tercapainya tujuan pendidikan dalam sebuah konteks social tertentu. Manajemen meruapakan proses, terdiri atas kegiatan-kegiatan dalam upaya untuk mencapai tujuan manajemen secara efektifdan efisien(Badal, 2012 :9).

Sebagaimana yang disampaikan Usman tentang pengertian manajemen pendidikan sebagai seni dan ilmu pengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Ustman, 2008 :12). Karena itu manajemen merupakan tugas pimpinan dalam menggerakkan berbagai sumber yang ada kearah sasaran yang ingin dicapai.

Pendidikan inklusi

Pada dasarnya pengertian pendidikan inklusi adalah adanya kesempatan yang sama dalam belajar dan terakomodirnya kebutuhan-kebutuhan semua anak tanpa ada diskriminasi apapun yang mendasarinya. Hal ini berarti bahwasannya untuk sekolah umum /regular harus dilengkapi untuk dapat melihat dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang terdiri dari berbagai kondisi. Termasuk bagi mereka yang secara trdisional tersingkirkan dari pergaulan. Baik dari akses pendidikan di sekolah atau peran serta yang ada di sekolah. Menurut Smith, tujuan pendidikan bagi siswa yang mempunyai hambatan adalah keterlibatan yang sesungguhnya dari tiap anak dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Inklusi dapat diartikan penerimaan anak-anak yang memilki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan interaksi social dan konsep diri / Visi dan misi sekolah (Smiith, 2009 : 45). Ini dapat diartikan bahwa pendidikan inklusi adalah sekolah dan pendidikan harus mengakomodasi dan bersikap tanggap terhadap peserta didik secara individual inklusivitas, ini tergantung pada bagaimana sekolah, kepala sekolah, guru dan seluruh peserta didik memberi perlakuan terhadap anak yang berkebutuhan khusus.

Manajemen sekolah inklusi memberikan kewenangan penuh kepala sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah yang meliputi peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan dan hubungan antara sekolah dengan masyarakat.

Sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang tapi sesuai kemampuan dan kebutuhan setiap siswa maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para pendidik agar peserta didik dapat berhasil. Lebih dari itu sekolah inklusi adalah tempat setiap anak diterima., menjadi bagian dari kelas maupun dengan anggota masyarakat lainnya agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi (Depdiknas, 2007: 4).

Berdasar pengertian sekolah inklusi di atas maka kepala sekolah dituntut untuk dapat bekerja sama dengan pihak manajemen maupun para guru untuk membuat sebuah perencanaan yang matang agar tercapai tujuan bersama yang ingin dicapai.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode destruktif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi social tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Fikri Juwana selama 1,5 bulan terhitung 1 November sampai 15 Desember 2021. Subyek penelitian dipilih berdasarkan tujuan tertentu dari peneliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Setyosari, "sampel Purposif (Purposive Sampling) diambil oleh peneliti apabila memiliki alasan khusus berkenaan dengan sampel yang akan diambil" (Setyosari, Punaji, 2012 : 192.). Subyek penelitian ini meliputi : 1 orang kepala sekolah, 1 orang bagian kesiswaan, 2 orang guru kelas , 1 orang guru pendamping khusus, 2 orang tua peserta didik.

PEMBAHASAN

Program Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Fikri Juwana

Dalam melaksanakan program pendidikan inklusi kepala sekolah bersama para guru menyusun program pendidikan inklusi, dimana semua perencanaan telah tersusun dalam program. Perencanaan merupakan penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijaksanaan, program, proyek, metode, cara, anggaran dan sebagainya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan (Usman Husaini, 2007: 20).

Langkah awal yang dilakukan oleh kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Fikri Juwana adalah berkoordinasi dengan pengelola atau yayasan untuk memberikan pembinaan kepada seluruh guru berkaitan dengan pemahaman tentang pendidikan inklusi di sekolah. Koordinasi ini juga bertujuan untuk menagendakan kegiatan yang akan mengundang tokoh yang berkompeten di bidangnya. Pembinaan atau sosialisasi juga diadakan kepada semua warga sekolah ,termasuk orang tua peserta didik melalui acara parenting yang diadakan oleh sekolah.

Penyenggaraan pendidikan inklusi akan mengarah kepada usaha meningkatkan mutu pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh guru dalam melaksanakan tugasnya secara professional. Untuk itu kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Fikri Juwana mengadakan supervise baik secara berkala/ sebulan sekali maupun supervise yang dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu. Supervisi yang dilakukan kepala sekolah memungkinkan kegiatan operasional tersebut berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Makawimbang, "Supervisi adalah suatu usaha menstimulir, mengkoordinir dan membimbing secara kontinyu pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individual, maupun secara kolektif agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Dengan demikian mereka dapat menstimulir dan membimbing pertumbuhan tiap-tiap murid secara kontinyu, serta mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern"(Makawimbang, Jerry 2011; 72).

Supervisi yang dilakukan untuk mengevaluasi kembali terhadap apa yang telah direncanakan dan dari hasil evaluasi maka akan didapatkan kelemahan atau kekuatan dari program pendidikan inklusi yang telah terlaksana di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Fikri Juwana.

Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Fikri Juwana

Hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung menunjukkan pelaksanaan manajemen pendidikan di SD IT Nurul Fikri Juwana dalam beberapa bidang adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

A. Pihak Yayasan (Bpk. M. Abbas Fauzan)

Beliau menyatakan bahwa pertama kali ide untuk mengadakan sekolah inklusi adalah bentuk keprihatinan terhadap kondisi yang ada, terutama adanya pertanyaan dari masyarakat tentang sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Dan kebetulan yayasan ini juga membawahi Paud yang di dalamnya ada satu kelas yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus. Maka pendidikan inklusi di SD IT Nurul Fikri Juwana ini adalah sebagai lanjutan bagi anak di kelas Paud yang berkebutuhan khusus.

B. Kepala SD IT Nurul Fikri Juwana (ibu Triastiningsih WismaWanti)

Dalam wawancara dengan beliau, beliau menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SD IT Nurul Fikri Juwana masih ada beberapa kendala, tapi bagaimanapun kendala tersebut beliau selaku kepala akan berusaha untuk mengatasinya agar kegiatan sekolah tetap dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Berbagai kendala tersebut misalnya dari pemahaman dari para guru, sarana dan prasarana dan dari para peserta didik. Alhamdulillah dengan usaha yang dilakukan melalui pembinaan yang dilakukan kepada para guru dapat memahami mereka tentang pendidikan inklusi dan juga motivasi-motivasi yang diberikan kepada para semua peserta didik dapat mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan.

C. Peserta didik (M. Fatah Athiro, peserta didik kelas 5)

Athiro menyatakan bahwa dirinya sangat senang berteman dengan semua teman, bahkan dirinya tidak memperlakukan jika satu kelompok untuk mengerjakan tugas dengan temannya yang berkebutuhan khusus. Namun demikian kadang ada dari teman-temannya yang memberikan penilaian kurang baik terhadap temannya yang berkebutuhan khusus, setelah mendapat motivasi dari guru semua akan memahaminya.

D. Anis Maqfiroh (Guru kelas 5)

Sebagai guru yang menangani anak berkebutuhan khusus secara langsung di kelasnya, dirinya merasa sangat bersyukur. Harapannya semoga apa yang ia lakukan untuk anak berkebutuhan khusus dapat memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani masa depan mereka. Dirinya juga sangat nyaman dengan pola pendampingan yang dikukan kepala sekolah dalam mengawal program pendidikan inklusindi SD IT Nurul Fikri Juwana, Terutama dalam memberikan pembinaan kepada para guru dan memberikan motivasi kepada para siswa. Harapannya lagi semoga ke depannya ada sekolah-sekolah yang memberikan pendidikan ke anak berkebutuhan khusus secara setara seperti apa yang dilakukan di SD IT Nurul Fikri Juwana.

E. Orang Tua Peserta Didik (Bapak Ahmad)

Dirinya sangat bersyukur sekali ada sekoalh yang dapat memberikan pendidikan untuk anaknya yang berkebutuhan khusus. Pak Ahmad melihat banyak perubahan yang didapat anaknya dari sebelum sekolah di SD IT Nurul Fikri Juwana ini. Secara adab anaknya juga sudah mulai mengenal tata cara makan dan minum, cara mengontrol emosi juga sudah mulai terkontrol. Ada banyak perubahan yang di dapat anaknya selama sekolah di Sd IT Nurul Fikri Juwana

2. Beberapa komponen yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SD IT Nurul Fikri Juwana

a. Kurikulum

Guru mata pelajaran telah memadukan kurikrikulum sesuai dengan tingkat kemampuan, karakteristik dan kondisi dari peserta didik. "Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi pada dasarnya menggunakan kurikulum regular yang berlaku di sekolah umum. Namun demikian karena keragaman hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai berat, maka dalam implementasinya, kurikulum regular perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Depdiknas, 18).

Jadi kurikulum yang digunakan pada kelas inklusi sama dengan kurikulum yang digunakan pada kelas regular lainnya.

b. Peserta didik

Peserta didik berkebutuhan khusus pada Tahun ajaran 2021/2022 di SD IT Nurul Fikri Juwana berjumlah 10 anak . Adapun penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan dengan cara observasi dan promosi. Observasi digunakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memang membutuhkan pendampingan secara khusus. Jika setelah dilakukan observasi ternyata anak membutuhkan pendampingan yang lebih intensif atau anak tersebut belum bisa dimasukkan dalam kelas reguler bersama peserta didik yang lain. Maka pihak sekolah akan mengarahkan orang tua untuk memasukkan anak ke Kelas Sekolah Luar Biasa Islam Terpadu Nurul Fikri Juwana. Sistem penerimaan secara promosi/penyuluhan dilakukan kepada anak yang berkebutuhan khusus yang masih dalam tahap ringan. Sebagaimana yang disampaikannya Imron , “ Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik , yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi”(Imron, Ali, 2012: 44). Karena itu mereka yang mendaftar menjadi peserta didik, tidak ada yang ditolak.

c. Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Menurut pengamatan selama 1 bulan di SD IT Nurul Fikri Juwana hubungan social antar orang tua sangat kuat. Hal ini terlihat pada saat jam pulang sekolah dimana anak yang berkebutuhan khusus menunggu untuk dijemput orang tuanya, tak jarang orang tua yang lain menyapanya dan mengajaknya berkomunikasi . Kadang ada juga yang menawarkan untuk diantar pulang. Ketika kegiatan acara sharing sekolah dengan orang tua, orang tua pun tidak ada yang mengeluhkan tentang keberadaan anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak tak berkebutuhan khusus.

Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi

a. **Pembiayaan Pendidikan**

Hasil observasi didapatkan bahwa sarana dan prasarana di SD IT Nurul Fikri Juwana masih dalam tahap pemenuhan atau masih kurang lengkap. Terkait hal ini pihak sekolah memberikan alasan karena masih dalam tahap pembangunan dan baru sebagian saja dari sarana dan pra saran yang dapat teralokasikan dari anggaran dana yang ada.

Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produktif yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama komponen lain. Menurut Hasbullah, pembiayaan pendidikan adalah “Kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja Pendidikan” (Hasbullah, 2007: 122).

Dalam Rangka Penyelenggaraan pendidikan Inklusi, perlu dialokasikan pembiayaan khusus, yang antara lain digunakan untuk keperluan : Pelaksanaan belajar-mengajar, pemberdayaan peran serta masyarakat, Kegiatan Assesment Input peserta didik, Modifikasi Kurikulum, Insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, pengadaan sarana pra sarana.

b. Tenaga Guru Pendamping Khusus

Tenaga guru pendamping khusus hanya terdapat 1 orang sementara anak kebutuhan khusus yang memerlukan pendampingan berjumlah 2 orang dengan kelas yang berbeda, dan selain itu kondisi anak berkebutuhan khusus dalam kondisi yang butuh pelayanan ringan.

Adapun tugas Guru Pendamping khusus adalah sebagai berikut :

1. Memberoikan bantuan berupa layanan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedial maupun pengayaan.
2. Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus jika terjadi pergantian guru.
3. Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan / atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus.
4. Melaksanakan Asesment bersama team untuk mendiagnosa permasalahan ABK
5. Membuat silabus, kurikulum, dan evaluasi yang disesuaikan dengan kemampuan anak (Depdiknas : 21).

Di samping tugas-tugas tersebut, tujuan diadakannya guru pendamping adalah membantu mengatasi segala kesulitan yang dihadapi siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar yang efektif dan efisien (Soejipto dan Rafli Kosasi, 2009: 66)

c. Sarana dan Prasarana

Dari hasil observasi peneliti di SD IT Nurul Fikri Juwana masih ditemukan adanya kekurangan sarana dan pra sarana yang mendukung program pendidikan inklusi. Sarana dan prasarana pendidikan dalam pembelajaran mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk menjelaskan pesan yang disampaikan guru. Sarana dan pra sarana pendidikan juga berfungsi sebaagai alat pembelajaran individual dimana kedudukan sarana dan prasarana pendidikan sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa.

SIMPULAN

Berdasar temuan peneliti dan pembahasan yang dikemukakan diatas , selanjutnya peneliti akan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Program kepala sekolah dalam mensukseskan pendidikan inklusi di SD IT Nurul Fikri Juwana, merupakan program yang sangat penting dan program tersebut didukung oleh semua guru dan yayasan yang menaungi SD IT Nurul Fikri Juwana. Program Pendidikan Inklusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar kepada anak berkebutuhan khusus dalam bidang pendidikan, jadi dapat mengurangi peluang anak berkebutuhan khusus tidak sekolah karena alasan tempat tinggal yang dari sekolah.
2. Terkait dengan implementasi program pendidikan inklusi di SD IT Nurul Fikri Juwana, Kepala sekolah telah mengupayakan pelaksanaan program yang telah disusun . Hal ini dapat diketahui melalui kegiatan perencanaan pembuatan program , pelaksanaan program, serta pengawasan program yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui kegiatan supervise dan yayasan bidang pendidikan melalui evaluasi pekanan. Pengawasan ini untuk memastikan sejauh mana program yang telah disusun ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan juga untuk mengetahui sejauh mana kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SD IT nurul Fikri Juwana.

Hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SD IT Nurul Fikri Juwana meleiputi beberapa hal diantaranya : Pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana, serta kurangnya tenaga guru pendamping Khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, Z., Memahami Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus, Makalah diterbitkan, Bandung: Jurusan PLB FIP UPI, 2005.
- Bafadal, Ibrahim, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Depdiknas, PLB, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007.
- Hasbullah, Otonomi Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Imron, Ali, Manajemen Peserta Didik Barbais Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Makawimbang, Jerry H., Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan, Bandung: Alfa Beta, 2011.
- Minarti, Sri, Manajemen Sekolah, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 70, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, 2009.
- Rusman, Manajemen Kurikulum, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Setyosari, Punaji, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Smith, J. D, Inklusi: Sekolah Ramah Untuk Semua, Bandung: Nuasa, 2009.
- Soejipto dan Rafli Kosasi, Profesi Keguruan, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Undang-Undang Nomor 20, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, www.hukumonline.com, 2003.
- Usman Husaini, Manajemen Teori Praktik dan Rccet Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Solidaritas Sosial Masyarakat Beriman di Desa Penambuhan Margorejo Pati Pada Masa Pandemi COVID-19

Jasmiatun Lynnda Prastika

Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Institut Agama Islam Negeri Kudus

jasmiatunlynndaprastika@gmail.com

Abstract

The phenomenon during the COVID-19 pandemic experienced by the community is influential in life, especially social conditions facing change. This phenomenon is found in the faithful community of Penambuhan Margorejo Pati Village during the COVID-19 pandemic which experienced a reduction in social solidarity. The purpose of this article is to describe and find out the social solidarity that occurred in Penambuhan Village during the COVID-19 period. This study uses a qualitative method, where the researcher conducts interviews with the people concerned, such as people who are exposed to COVID-19, people who are not exposed, families of patients with COVID-19, and community leaders in Penambuhan Village. The results of the study focus on two important points. First, the views of the faithful regarding social solidarity in Penambuhan Village during the COVID-19 pandemic. There has been a lack of social solidarity in the community of faith, where people who have been exposed to COVID-19 are shunned and even ostracized by their neighbors. As a community of faith, we should help each other to our fellow human beings as a form of acts of faith. Second, the main cause of the problem of social solidarity of the faithful in Penambuhan Village during the COVID-19 pandemic, namely the negative stigma from the community regarding COVID-19, a very dangerous type of virus that can cause death. In addition, people who are not exposed to COVID-19 stay away from people who are exposed because they have excessive anxiety and are very afraid of contracting it.

Keywords: Social solidarity; community; faith; COVID-19; help.

Abstrak

Fenomena di masa pandemi COVID-19 yang dialami oleh kalangan masyarakat berpengaruh dalam kehidupan terutama kondisi sosial menghadapi perubahan. Fenomena tersebut terdapat di masyarakat beriman Desa Penambuhan Margorejo Pati pada masa pandemi COVID-19 yang mengalami berkurangnya solidaritas sosial. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui solidaritas sosial yang terjadi di Desa Penambuhan pada masa COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti melakukan wawancara dengan orang-orang yang bersangkutan, seperti masyarakat yang terpapar COVID-19, masyarakat yang tidak terpapar, keluarga pasien dari penderita COVID-19, dan tokoh masyarakat Desa Penambuhan. Hasil penelitian memfokuskan dua poin penting. Pertama, pandangan masyarakat beriman mengenai solidaritas sosial di Desa Penambuhan pada masa pandemi COVID-19. Telah terjadi kurangnya solidaritas sosial pada masyarakat beriman, dimana orang yang terpapar COVID-19 dijauhi bahkan dikucilkan oleh para tetangga. Sebagai masyarakat beriman sudah seharusnya saling tolong-menolong kepada sesama manusia sebagai bentuk dari perbuatan keimanan. Kedua, penyebab utama dari problematika solidaritas sosial masyarakat beriman di Desa Penambuhan pada masa pandemi COVID-19 yakni adanya stigma negatif dari masyarakat mengenai COVID-19 jenis virus yang sangat berbahaya dapat menyebabkan kematian. Selain itu, masyarakat yang tidak terpapar COVID-19 menjauhi orang-orang yang terpapar karena mereka memiliki kecemasan berlebihan dan sangat takut tertular.

Kata Kunci: *Solidaritas sosial; masyarakat; keimanan; COVID-19; tolong-menolong.*

PENDAHULUAN

Hakikat setiap manusia mempunyai dua kepentingan, yakni kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kepentingan individu didasarkan sebagai makhluk individu, karena manusia yang ingin dapat memenuhi kebutuhan pribadinya. Sedangkan pada kepentingan bersama didasarkan sebagai makhluk sosial yang ingin memenuhi kebutuhan bersama. Kehidupan masyarakat pedesaan yang lugu, sederhana, dan terus beradaptasi kemudian melahirkan sikap kekerabatan sebagai bentuk solidaritas sosial. (Rusdi et al, 2020). Akan tetapi, solidaritas sosial dalam kalangan masyarakat terindikasi berkurang akibat masa pandemi COVID-19 berkepanjangan dan jumlah kasus terus bertambah. Dampak dari hal tersebut akan menyebabkan perubahan sosial yang berakibat pada konflik lingkungan sekitar. Konflik yang terjadi di masa pandemi dengan proses sosial sangat berkaitan terhadap interaksi sosial, karena terdapat kecemasan pada masyarakat yang mengakibatkan tidak ada kepedulian satu sama lain. Padahal, adanya peningkatan kasus pasien positif COVID-19 sangat memerlukan kerjasama baik antar keluarga, rekan kerja, dan pihak lainnya yang terkait (Harahap, 2020).

Fenomena terhadap problematika solidaritas sosial masyarakat bisa diamati dan dirasakan, seperti di Desa Penambuhan, Margorejo, Pati. Fakta sosial yang ada di masyarakat pada masa pandemi ini mereka tidak mau saling membantu antar tetangga, karena yang terpapar COVID-19 diharuskan isolasi mandiri di rumah. Selain itu, orang yang terpapar positif COVID-19 juga perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat. Akan tetapi, pasien COVID-19 seringkali mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitar, karena mereka dihantui rasa takut terpapar wabah pandemi ini. Kondisi permasalahan solidaritas sosial masa pandemi yang terjadi kurangnya pemahaman informasi mengenai COVID-19. Akibatnya orang yang terpapar COVID-19 selama isolasi mandiri dijauhi oleh para tetangga dan tidak ada yang berani menjenguk karena sangat takut tertular. Selama isolasi mandiri tersebut dapat membuat orang yang terpapar COVID-19 sedih (ESW, masyarakat yang terpapar COVID-19, 28/11/2021).

Adanya varian Delta (varian virus yang memiliki kemampuan lebih mudah cepat menular) membuat warga masyarakat kembali panik dan ketakutan. Rasa panik dan ketakutan yang dialami oleh sebagian besar dari masyarakat harus disikapi dengan rasional agar dapat bertahan hidup dan saling membantu. Untuk membangkitkan rasa semangat solidaritas sosial masyarakat di masa pandemi diperlukan usaha dan kerjasama. Sikap waspada

dibutuhkan pada masa pandemi COVID-19, tetapi sikap yang berlebihan menjadikan berkurangnya solidaritas sosial dan tali persaudaraan juga menjadi masalah yang perlu diselesaikan agar terciptanya hidup bersama antar sesama manusia (Nuryanto, 2014).

Masa pandemi COVID-19 sebagai ujian yang diberikan Allah SWT untuk meningkatkan keimanan, seperti lebih mendekatkan diri kepada-Nya. Agama Islam memiliki peran penting pada masyarakat beriman di tengah pandemi. Dalam merealisasikan keimanan terhadap masyarakat beriman pada masa pandemi, yakni sikap saling tolong-menolong kepada sesama manusia. Sikap saling tolong-menolong sebagai wujud perbuatan dari keimanan. Bentuk dari tolong-menolong pada masyarakat beriman sesungguhnya akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT baik di dunia maupun akhirat (Shofaussamawati, 2016).

Agama Islam mengajarkan agar menjaga solidaritas sosial antar umat dan membantu sesama yang sedang membutuhkan, dengan cara bahu membahu dalam memikul beban dan saling menopang menghadapi krisis dan problematika. Oleh karena itu, solidaritas sosial masyarakat beriman pada masa pandemi ini sangatlah penting. Islam memerintahkan agar selalu bertawakal disamping berusaha dengan jalan jasmaniah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa tawakal berarti berserah diri kepada Allah SWT dan dapat memberikan hikmah dari ujian yang diberikan oleh-Nya (Hakim, 2020).

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang paling relevan dengan kajian ini mengenai solidaritas sosial masyarakat yang dikaitkan di era pandemi COVID-19. Kajian yang dilakukan oleh Abdul Apip dan Rahmawati tentang penguatan solidaritas sosial kemasyarakatan pada masa pandemi COVID-19 di Desa Pamong Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Temuan penting dari kajian tersebut yakni menunjukkan bahwa adanya penguatan solidaritas sosial, seperti memiliki semangat gotong-royong dan saling mengingatkan. Bentuk solidaritas sosial di Desa Pamong dengan melaksanakan pengajian dan mempertahankan budaya "*plerek*", yaitu mengumpulkan bantuan dari masyarakat berupa beras, uang tunai, maupun bahan makanan lainnya (Apip and Rahmawati, 2021). Selanjutnya, kajian penelitian yang dilakukan oleh Udin Rosidin, Laili Rahayuwati, dan Erna Herawati tentang perilaku dan peran tokoh masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Desa Jayaraga Kabupaten Garut. Temuan kajian tersebut menunjukkan bahwa tokoh masyarakat mempunyai peran penting, seperti memberikan dukungan,

bimbingan, motivasi, dan pengarahan kepada para anggota masyarakat. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, tokoh masyarakat mengajak untuk berperilaku hidup bersih dan mengajarkan untuk selalu berdo'a, saling peduli satu sama lain, serta tetap tenang dalam menghadapi masa pandemi (Rosidin, Rahayuwati, and Herawati, 2020). Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh Setyowati dan Anggi Cahya tentang peran dakwah daring untuk menjaga solidaritas sosial di masa pandemi COVID-19. Temuan kajian tersebut menunjukkan bahwa dakwah secara daring di masa pandemi COVID-19 bentuk dari penyampaian pesan dakwah melalui WAG, Youtube, maupun postingan feed Instagram. Dengan demikian, solidaritas sosial di masa pandemi tetap terjaga yang memiliki rasa kebersamaan di dalam masyarakat masih berhubungan dengan baik (Setyowati and Cahya, 2020).

Banyak kajian yang membahas fenomena COVID-19 di Indonesia terkait isu pandemi dengan agama. Kajian ini berupaya melengkapi kajian yang sudah ada dengan menyajikan studi kasus di lokasi pedesaan yang kiranya dapat menjadikan potret daerah lain untuk mencari solusi problematika solidaritas sosial masyarakat beriman yang renggang akibat COVID-19. Lokasi desa Penambunan dipilih sebagai fokus kajian, selain sebagai daerah asal penulis sehingga memudahkan pengumpulan data juga karena dalam masyarakat beriman di masa pandemi COVID-19 sudah seharusnya lebih memperkuat solidaritas sosial demi terciptanya hidup yang rukun dan dapat meningkatkan hubungan rasa persaudaraan.

Dengan demikian, peneliti akan mengambil kajian ini karena pada saat masa pandemi COVID-19 yang sedang maraknya, sering terjadi suatu problem terkait solidaritas sosial masyarakat beriman. Problematika tersebut dimana orang terpapar COVID-19 saat isolasi mandiri dikucilkan oleh para tetangga. Hal tersebut membuat sedih bagi masyarakat yang terpapar COVID-19 dan keluarga dari pasien. Sedangkan sebagai umat Islam dalam masyarakat beriman memiliki kewajiban untuk saling tolong-menolong kepada sesama manusia karena COVID-19 merupakan cobaan yang diberikan Allah SWT. Seperti saat masa pandemi ini, orang-orang yang terkena COVID-19 sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat (S, keluarga pasien COVID-19, 29/11/2021).

KAJIAN LITERATUR

Teori solidaritas sosial merupakan sebuah konsep Emile Durkheim yang dikembangkan dari teori sosiologi. Menurut Emile Durkheim bahwa solidaritas sosial merupakan rasa kesetiakawanan dalam hubungan antara individu maupun kelompok berdasarkan pada perasaan moral yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (Syukur, 2018). Solidaritas sosial lebih mengarah pada keakraban atau kekompakan dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam teori sosiologi, keakraban tidak hanya sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita, tetapi juga salah satu tujuan utama dari kehidupan kelompok masyarakat yang ada. Emile Durkheim menjelaskan bahwa konsep *social solidarity* (solidaritas sosial) disebabkan oleh sistem pembagian kerja, strata, dan cara hidup bermasyarakat (Durkheim, 1893).

Bentuk solidaritas sosial dalam teori Emile Durkheim terdiri dari dua bentuk, yakni solidaritas sosial mekanik dan solidaritas sosial organik. Solidaritas sosial mekanik adalah solidaritas sosial berdasarkan pada kesadaran kolektif yang menunjukkan totalitas kepercayaan yang sama, pengalaman yang sama, dan norma-norma yang dianut bersama. Kekuatan solidaritas sosial mekanik diikat oleh kesamaan dalam bentuk kesadaran kolektif yang dapat menyatukan mereka (Durkheim, 1893). Sedangkan solidaritas sosial organik adalah solidaritas sosial yang mengikat pada masyarakat kompleks, yaitu masyarakat yang telah mengenal adanya pembagian kerja dan disatukan oleh sifat saling ketergantungan. Munculnya adanya perbedaan dalam individu dengan saling ketergantungan sebagai dasar untuk keteraturan sosial (Putri and Hasanah, 2018).

Adapun indikator-indikator terhadap solidaritas sosial Emile Durkheim sebagai berikut. *Pertama*, Gotong-royong yakni rasa pertalian kesosialan yang teguh dan terpelihara. Gotong-royong sebagai bentuk keakraban antara individu maupun kelompok yang membentuk suatu norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama (Sumual, Sularso, and Budiyo, 2019). *Kedua*, saling tolong-menolong yakni membantu untuk meringankan beban terhadap penderitaan dan kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. *Ketiga*, kerjasama yakni usaha bersama antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama terbentuk bahwa mereka mempunyai kepentingan bersama (Sumual, Sularso, and Budiyo, 2019). *Keempat*, persaudaraan yakni sikap yang terbentuk karena rasa kekeluargaan lebih berupa menjaga, membela, membantu, maupun melindungi terhadap kehidupan bersama (Purba, 2020).

Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *syirik* berarti bergaul. Adanya saling bergaul karena ada bentuk-bentuk aturan hidup sebagai kekuatan dalam lingkungan sosial atau dapat disebut kesatuan. Jadi, masyarakat merupakan sekumpulan orang banyak yang saling bergotongroyong, bekerja sama, dan bergaul dalam kesatuan sosial yang hidup bersama disuatu tempat dengan memiliki ikatan aturan tertentu (Munawaroh, 2020). Islam menempatkan kepada manusia tidak hanya kepentingan individu saja, tetapi juga kepentingan sosial sebagai anggota masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat sebagai umat Islam sudah seharusnya selalu aman dan rukun karena didalam hati mereka masing-masing memiliki keyakinan kuat terhadap pencipta-Nya (Munawaroh, 2020).

Menurut Imam Syafi'i (Ulama ahli Fiqih) bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan yang dibenarkan dan diyakini oleh hati. Seorang yang mengikat hatinya dengan mengakui, mempercayai, meyakini dan menyerahkan diri disebut seorang mukmin. Iman adalah ucapan dan perbuatan yang dapat bertambah dan berkurang. Artinya, iman dapat bertambah disebabkan oleh ketaatan kepada Allah SWT dan iman dapat berkurang disebabkan oleh kemaksiatan (Munawaroh, 2020: 44).

Beriman berarti percaya kepada Allah SWT dan membenarkan dengan hati. Oleh karena itu, masyarakat beriman adalah sekumpulan orang yang meyakini Allah SWT dan membenarkan dengan hati. Iman tidak hanya dengan lisan saja, tetapi harus merealisasikan kehidupan nyata berwujud dalam suatu perilaku sesuai dengan yang diyakini. Realisasi iman terhadap hidup sosial bermasyarakat yakni cinta kepada sesama manusia (Khadijah, 2020). Mereka akan memandang bahwa dirinya anggota masyarakat yang bisa membangun persaudaraan untuk menumbuhkan kebahagiaan dan harmoni bersama. Untuk terciptanya suatu masyarakat beriman didasarkan dengan memiliki rasa kasih sayang, aman dan damai (Rahman, 2007).

Wabah dan penyakit dalam Islam merupakan cobaan atau ujian yang diberikan oleh Sang Pencipta yaitu Allah SWT kepada hamba-Nya untuk menguji keimanannya. Orang sakit merupakan orang yang mendapatkan keringanan dalam mendapatkan pahala. Apabila seseorang mengalami sakit kemudian sabar, pasrah, semangat, dan optimis, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana firman Allah SWT:

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta

diguncangkan (dengan macam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. (QS. Al-Baqarah: 214)

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menguji hamba-Nya dengan kesulitan, misalnya sakit dan miskin, karena diharapkan seseorang bisa bersabar dan memohon perlindungan kepada-Nya. Kondisi sakit akibat adanya penyakit merupakan pemberian dari Allah SWT, agar setiap orang menyadari bahwa sakit itu harta yang tidak ternilai (Rahmawati and Muljohardjono, 2016).

Wabah penyakit COVID-19 dalam Islam merupakan ujian atau cobaan yang akan menambah kekuatan apabila seseorang dapat mengambil hikmahnya. Seorang hamba dalam kondisi seperti ini sangat perlu untuk selalu memperbaiki keimanannya dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Adanya masa pandemi COVID-19 tidak untuk melemahkan, tetapi sebaliknya sebagai alat untuk menambah kekuatan bagi iman seseorang yang mungkin sudah melemah. Sebagai orang yang beriman, sudah semestinya meyakini bahwa wabah penyakit COVID-19 merupakan bentuk ujian yang harus dihadapi dalam kehidupannya (Rahmah, 2020).

Kasus COVID-19 seharusnya menjadi suatu pelajaran untuk tidak menghakimi orang lain. Seperti kata Al-Dawami (Filosof di Dawam) bahwa Allah SWT ialah Maha Pemilik yang bersifat absolut dapat berbuat apa saja sesuai yang dikehendaki-Nya, dan tidak seorang pun bisa mencela perbuatan-Nya (Rosanti, 2021). Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, semua wabah ini adalah sebuat kehendak-Nya dan peringatan bagi yang berpikir, untuk dijadikan wasilah atau jalan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka dalam tingkat kepasrahan tinggi akan dirasakan ketenangan.

Masa pandemi COVID-19 sebagai umat Islam seharusnya untuk lebih memperkuat keimanan setiap individu masing-masing. Dalam menjadi orang yang beriman sangat penting bagi hidup bermasyarakat, karena sebuah kemuliaan yang telah dipesankan oleh Nabi Muhammad Saw bahwa sebagai manusia yang beriman harus mempunyai manfaat bagi orang lain. Orang-orang yang beriman juga harus memiliki jiwa sosial meski dalam keadaan yang sangat sulit ketika membantu sesamanya (Ilman, 2020).

Menghadapi masa pandemi COVID-19 sudah seharusnya sebagai umat Islam hatinya dapat tergugah agar saling tolong-menolong kepada

sesama manusia. Adanya sikap saling tolong-menolong dan memiliki rasa kepedulian dapat melahirkan sebuah kekuatan pada solidaritas sosial di dalam lingkungannya (Suhartawan, 2021). Dengan membantu orang yang mengalami kesulitan dan memerlukan bantuan, sebagai umat Islam telah menerapkan keimanan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, mencegah munkar, melaksanakan shalat, menunaikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah SWT. Sungguh Allah SWT Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 71)

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang mukmin agar saling tolong-menolong dengan penuh rasa kasih sayang yang tulus. Allah SWT juga memerintahkan untuk melakukan perbuatan makruf, yakni mengenai segala kebaikan dan menjauhi perbuatan munkar mengenai perbuatan yang buruk. Sebagai masyarakat beriman yang diperintahkan untuk saling tolong-menolong dan memiliki rasa kasih sayang agar memperkuat solidaritas sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagai kegiatan sistematis direncanakan oleh peneliti agar dapat memecahkan permasalahan yang ada dan berguna bagi masyarakat, maupun bagi peneliti sendiri. Artikel ini berdasarkan pada hasil penelitian secara langsung di lapangan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti lebih memilih metode kualitatif, karena metode yang digunakan sesuai dengan obyek penelitian dan melakukan observasi secara langsung serta wawancara dengan orang-orang yang bersangkutan. Peneliti memilih lokasi penelitian ini lebih tepatnya di Desa Penambuhan. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan temuan.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Penambuhan khususnya masyarakat yang terpapar COVID-19, masyarakat yang tidak terpapar COVID-19, keluarga pasien COVID-19, dan tokoh masyarakat. Uji keabsahan data terdiri dari perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik, dan triangulasi teori. Selain itu, dalam menggunakan bahan

referensi sebagai pendukung untuk membuktikan kebenaran data yang telah ditemukan oleh peneliti. Teknik analisis data menggunakan teori dari Huberman, bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Langkah-langkah dalam menganalisis data, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan menarik kesimpulan (*verifikasi*) (Umrati and Wijaya, 2020).

PEMBAHASAN

Pandangan Masyarakat Beriman Mengenai Solidaritas Sosial di Desa Penambuhan Pada Masa Pandemi COVID-19

Sebagai makhluk sosial dalam hidup bermasyarakat sangat penting meningkatkan dan mengembangkan solidaritas sosial, apalagi di masa pandemi COVID-19. Akan tetapi, masyarakat beriman Desa Penambuhan terjadi suatu problem dalam perilaku sosial. Kondisi tersebut bermula pada masa pandemi yang berkepanjangan dan adanya peningkatan pasien yang terpapar. Kepala Desa selalu menghimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan protokol kesehatan dari Pemerintah yang masih sampai saat ini Desa Penambuhan masih dalam tahap PPKM level tiga. Memang terdapat perbedaan pada aktivitas masyarakat dari sebelum COVID-19 dibandingkan dengan saat ini adanya COVID-19 yakni keterbatasan dalam melakukan aktivitas di luar rumah (SM, selaku tokoh masyarakat, 12/12/2021).

Masyarakat Desa Penambuhan yang terpapar COVID-19 cukup signifikan. Kebanyakan pasien bekerja sebagai buruh pabrik di Pati, karena mereka sering berbaur dengan masyarakat daerah-daerah lain (SM, selaku tokoh masyarakat, 12/12/2021). Seluruh pekerja pabrik diharuskan untuk melakukan swab nasal yang diadakan di pabriknya supaya dapat mengetahui ada dan tidaknya buruh yang terpapar COVID-19. Masyarakat yang terpapar COVID-19 diharuskan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah selama dua minggu. Gejala yang dialami oleh orang terpapar yakni flu, demam, kemudian indra penciuman mulai hilang. Jika lebih dari dua minggu masih terpapar, maka ia dihimbau untuk tetap menjalani isolasi mandiri sampai benar-benar sembuh. Selama melakukan isolasi mandiri, tokoh masyarakat memberikan bantuan berupa sembako, seperti beras, minyak, dan telur. Selain itu, masyarakat yang terpapar COVID-19 sebagian buruh pabrik mendapat bantuan tersendiri dari pabrik berupa sembako melalui tokoh masyarakat (IR, masyarakat yang terpapar COVID-19, 29/11/2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan orang yang terpapar COVID-19 dan keluarga dari pasien bahwa terjadi kurangnya solidaritas sosial masyarakat beriman di Desa Penambunan pada masa pandemi COVID-19. Ditengah wabah pandemi ini membuat masyarakat hanya memikirkan diri sendiri atau lebih individualistis. Hal ini dapat ditandai di mana orang yang terpapar COVID-19 selama isolasi mandiri di rumah dijauhi bahkan dikucilkan. Pengucilan tersebut berupa dicibir, tidak ada yang berani menjenguk dan tidak ada yang memberikan bantuan dari tetangga maupun lingkungan sekitar. Mereka lebih memilih menjauh karena sangat takut tertular dan membuat sedih bagi orang yang terpapar COVID-19 (ESW, masyarakat yang terpapar COVID-19, 28/11/2021). Kondisi sosial itulah yang mengakibatkan adanya suatu problem solidaritas sosial masyarakat di masa pandemi. Rasa cemas dan tidak percaya selalu ada ketika sembuh dari COVID-19 masih dijauhi oleh tetangganya (IR, masyarakat yang terpapar COVID-19, 29/11/2021).

Pada masa pandemi yang sedang maraknya dapat berdampak bagi kehidupan sosial di lingkungan masyarakat Desa Penambunan sangat acuh terhadap orang yang terpapar COVID-19. Prasangka buruk masyarakat kepada orang-orang yang terpapar COVID-19 justru akan mempengaruhi psikis atau mental. Masyarakat yang memiliki pandangan negatif terhadap orang terpapar, mereka tidak ingin berinteraksi dengan penderita COVID-19 karena takut tertular. Akan tetapi, semakin lama membuat mereka yang terpapar untuk dapat membiasakan keadaan seperti itu, karena jika terlalu dipikirkan akan semakin tertekan (B, masyarakat yang terpapar COVID-19, 01/12/2021). Hanya tokoh masyarakat dan keluarga pasien COVID-19 saja yang memberikan bantuan kepada orang terpapar. Dengan adanya dijauhi dan diacuhkan oleh tetangga memang membuat mereka cemas, tetapi harus tetap berserah diri agar tidak menambah tekanan (MY, masyarakat yang terpapar COVID-19, 10/01/2022).

Dalam teori Emile Durkheim tentang solidaritas sosial merupakan rasa kesetiakawanan terhadap hubungan antara individu maupun kelompok didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama (Syukur, 2018). Solidaritas sosial memiliki rasa saling percaya di setiap anggota masyarakat, karena apabila setiap individu percaya satu sama lain mereka akan membuat suatu ikatan persaudaraan. Ikatan tersebut dimana akan saling saling menghormati, tanggungjawab bersama, dan mementingkan kebersamaan. Solidaritas sosial bisa berwujud oleh kesatuan sosial, persaudaraan, dan saling percaya antar anggota masyarakat (Faedlulloh et al. 2021).

Solidaritas sosial adalah hubungan moral diantara orang-orang yang menggambarkan hubungan para anggota masyarakat, baik individu maupun komunitas yang memerlukan kewajiban moral positif (Scholz, 2020). Solidaritas sosial terdiri dari dua bentuk, yakni solidaritas sosial mekanik dan solidaritas sosial organik. Solidaritas sosial merupakan didasarkan pada kesadaran kolektif menunjuk totalitas kepercayaan bersama di dalam anggota masyarakat. Solidaritas sosial ini dijumpai pada masyarakat pedesaan, karena keutuhan masyarakat dijamin oleh hubungan antar anggotanya yang erat, adanya aturan dan tujuan bersama. Sedangkan solidaritas sosial organik adalah bentuk didasarkan pada saling ketergantungan. Solidaritas sosial ini biasanya di masyarakat perkotaan, karena para anggotanya disatukan rasa saling membutuhkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan dari setiap individu masing-masing (Faedlulloh et al. 2021).

Masyarakat di Desa Penambuhan seharusnya memperkuat rasa solidaritas sosial mekanik, karena dalam masa pandemi COVID-19 ini rasa kebersamaan antar tetangga lebih diperkuat terhadap pola hidup bersama. Akan tetapi, justru berbanding terbalik yang mulanya solidaritas sosial mekanik menjadi solidaritas sosial organik. Hal tersebut disebabkan disebabkan karena diantara anggota masyarakatnya saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, tetapi bukan karena adanya kesadaran kolektif dan rasa kebersamaan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama pada masyarakat pedesaan.

Fenomena di masa pandemi COVID-19 pada masyarakat beriman Desa Penambuhan dapat dipahami dengan teori dari Emile Durkheim mengenai solidaritas sosial organik merupakan solidaritas sosial yang didasarkan sikap saling ketergantungan. Solidaritas ini lebih terbentuk di mana terdapat perbedaan antar anggota masyarakat disebabkan mereka lebih memilih menjauhi orang-orang yang terpapar COVID-19, karena takut akan tertular. Dengan adanya perbedaan tersebut, masyarakat Desa Penambuhan pada masa pandemi COVID-19 lebih mengarah kepada individualis.

Menghadapi masa COVID-19 sebagai umat Islam hanya bisa berserah diri kepada Allah SWT, karena yang menciptakan sehat dan sakit, hidup dan mati hanya Allah SWT (MG, masyarakat yang terpapar COVID-19, 11/01/2022). Masa pandemi COVID-19 merupakan ujian atau cobaan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya. Akan tetapi, di kalangan masyarakat beriman Desa Penambuhan merasa khawatir pada masa pandemi, karena mereka sangat takut tertular sehingga menjauhi orang yang terpapar COVID-19. Sebagai keluarga pasien COVID-19 juga memiliki rasa cemas, karena keluarga di jauhi dan dicibir oleh para tetangganya bahkan tidak ada yang memberi bantuan (S, keluarga pasien COVID-19, 29/11/2021).

Sebenarnya masyarakat terpapar COVID-19 sangat memerlukan bantuan dari lingkungan sekitarnya. Bantuan tidak hanya secara materi, tetapi mereka juga sangat membutuhkan bantuan secara mental, yakni berupa perhatian, dorongan, dan motivasi semangat. Masyarakat terpapar COVID-19 sangat memerlukan pertolongan, karena selama isolasi mandiri mereka tidak bisa keluar rumah, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan terpaksa tidak bekerja. Pada saat itulah sebagai sesama manusia seharusnya untuk saling membantu dengan memberikan kebutuhan yang mereka perlukan (IR, masyarakat yang terpapar COVID-19, 29/11/2021). Ditengah wabah penyakit COVID-19 sebagai umat Islam yang seharusnya lebih memperkuat solidaritas sosial agar tercipta masyarakat beriman yang rukun, aman, dan damai. Bagi masyarakat yang terpapar COVID-19 hanya bisa berserah diri kepada Allah SWT sehingga sebagai seorang mukmin di masa pandemi ini dengan lebih mendekatkan diri kepada-Nya (B, masyarakat yang terpapar COVID-19, 01/12/2021).

Nabi Muhammad Saw memerintahkan kepada umat Islam agar saling tolong-menolong dan menguatkan satu sama lain. Sikap saling tolong-menolong akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Ada banyak manfaat yang dirasakan dampak dari saling tolong-menolong dalam hidup masyarakat beriman. *Pertama*, memupuk sikap yang bersifat positif. *Kedua*, lebih memperhatikan kondisi yang ada di lingkungan sekitar dan menjauhkan dari sifat egois atau sifat mementingkan diri sendiri. *Ketiga*, mengurangi beban dari orang yang mengalami kesulitan. *Keempat*, dapat membuat orang yang terpapar COVID-19 menjadi bahagia. *Kelima*, menumbuhkan rasa keakraban dan kerukunan. *Keenam*, dapat menumbuhkan rasa harmonis di lingkungan sekitar (Suhartawan, 2021).

Penyebab Utama dari Problematika Solidaritas Sosial Masyarakat Beriman di Desa Penambuhan Pada Masa Pandemi COVID-19

Masa pandemi COVID-19 merupakan masa yang tidak dapat dihindari oleh semua manusia. Ancaman pandemi yang semakin marak ketika berbagai kasus menunjukkan penularan antar manusia. Penyebaran yang begitu lebih cepat menular dengan melalui saluran pernafasan. Problematika dalam penyebaran wabah COVID-19 berkaitan fenomena masalah sosial yang sedang terjadi di masyarakat bahkan antar lingkungan sekitar. Akibat masa COVID-19 yang terus berkepanjangan berdampak pada interaksi antar manusia dan mengalami kesulitan beraktivitas dalam menjalani kehidupan setiap harinya (Setyowati and Cahya, 2020).

Munculnya suatu problem dalam kehidupan sosial sebenarnya akibat dari ulah masyarakatnya sendiri. Masyarakat Desa Penambuhan telah terjadi kurangnya solidaritas sosial pada masa COVID-19, di mana orang yang terpapar COVID-19 dijauhi bahkan dikucilkan oleh tetangga maupun lingkungan sekitar. Adapun penyebab utama terhadap problematika solidaritas sosial di Desa Penambuhan yakni adanya stigma negatif dari masyarakat. Stigma negatif adalah sesuatu yang dianggap negatif terhadap suatu kondisi atau situasi. Biasanya stigma negatif dari masyarakat ditunjukkan dengan anggapan atau pandangan negatif terhadap seseorang untuk menilai orang lain (Abudi, Mokodompis, and Magulili, 2020).

Stigma negatif masyarakat Desa Penambuhan terdapat tiga macam, ialah *pertama*, stigma negatif karena masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap COVID-19. *Kedua*, stigma negatif karena rasa cemas yang dirasakan oleh masyarakat di masa pandemi COVID-19. *Ketiga*, stigma negatif karena masyarakat menganggap adanya bantuan sosial yang kurang adil. Dengan adanya stigma negatif itulah memunculkan problematika solidaritas sosial di masa pandemi COVID-19.

Stigma negatif dari masyarakat yang memiliki pandangan terhadap COVID-19 bahwa masa COVID-19 merupakan penyakit yang sangat berbahaya dengan lebih cepat mudah menular dan dapat berakibat pada kematian. Dalam menyikapi di masa pandemi dengan lebih berhati-hati, menjaga kebersihan, dan mematuhi peraturan Negara (K, masyarakat yang tidak terpapar COVID-19, 17/12/2021). Stigma negatif ini berhubungan dengan kurangnya potensi masyarakat dalam mengelola dan memahami informasi terhadap masa COVID-19 sehingga membuat mereka menjauhi orang yang terpapar. Ada yang beranggapan bahwa COVID-19 adalah virus yang tidak dapat diketahui munculnya darimana tidak jelas dan gejalanya seperti flu dan batuk biasa (KH, masyarakat yang tidak terpapar COVID-19, 18/12/2021).

Perasaan cemas dan panik yang dimiliki oleh masyarakat beriman di Desa Penambuhan dapat mempengaruhi stigma negatif seperti sikap terhadap orang yang terpapar COVID-19. Masyarakat cemas karena penularan penyakit COVID-19 yang begitu lebih mudah menular dan akan menyebabkan kematian. Dengan pandangan tersebut membuat mereka menjauh dan tidak berani untuk menjenguk karena takut kalau tertular (EK, masyarakat yang tidak terpapar COVID-19, 08/01/2022). Adanya kasus pasien positif COVID-19 di Desa Penambuhan per harinya sangat melonjak sehingga merasa cemas karena takut tertular. Banyaknya pasien COVID-19, masyarakat tidak ada yang berani menjenguk dan memberikan bantuan kepada orang yang terpapar (M, masyarakat yang tidak terpapar COVID-19, 10/01/2022).

Rasa cemas di masa pandemi COVID-19 yang semakin marak disebabkan oleh faktor ekonomi menurun, karena aktivitas apapun sangat terbatas sehingga berdampak perekonomian melemah. Ekonomi di masa pandemi yang semakin memburuk atau melemah menyebabkan orang takut dan tidak percaya diri dengan kondisi COVID-19. Banyak dari para pekerja sebagai buruh pabrik terpaksa untuk diberhentikan dari tempat kerjanya, karena ada kendala yang tidak bisa berjalan dengan lancar. Apalagi dalam mencari pekerjaan juga susah, sedangkan pada pengeluaran kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari yang semakin terus berjalan dan pendapat semakin menurun (KH, masyarakat yang tidak terpapar COVID-19, 18/12/2021).

Ada yang beranggapan bahwa masa COVID-19 merupakan masa yang paling berantakan membuat masyarakat tidak bisa pergi kemana-mana dalam melakukan aktivitas di luar rumah dan tidak bisa bekerja (M, masyarakat yang tidak terpapar COVID-19, 10/01/2022). Pada saat COVID-19 sedang maraknya, masyarakat di Desa Penambuhan dihimbau untuk tetap dirumah saja dan menaati protokol kesehatan. Akan tetapi, sebagian dari mereka tetap melakukan aktivitas bekerja seperti biasanya agar bisa memenuhi kebutuhan hidup, karena kalau hanya di rumah menurutnya tidak bisa makan (SJ, masyarakat yang tidak terpapar COVID-19, 10/01/2022).

Dalam masa pandemi COVID-19, bantuan sosial berupa sembako dari Desa Penambuhan dianggap masyarakat kurang adil. Adanya bantuan sosial yang kaya semakin kaya, begitu sebaliknya miskin semakin miskin (SJ, masyarakat yang tidak terpapar COVID-19, 10/01/2022). Bantuan sosial kebanyakan bekerja sebagai petani dan orang yang terpapar COVID-19, tetapi pekerja pengusaha tidak mendapat bantuan. Padahal, orang yang bekerja sebagai petani tidak merasakan kerugian yang berlebihan, tetapi masyarakat yang bekerja sebagai pengusaha sangat merasakan kerugian di masa pandemi COVID-19 dan tidak ada pemasukan untuk kebutuhan sehari-harinya (M, masyarakat yang tidak terpapar COVID-19, 10/01/2022).

Fenomena diatas dapat dipahami bahwa rasa cemas dan takut dalam masyarakat beriman di masa pandemi COVID-19 akan berdampak pada perilaku terhadap kehidupan sosial. Oleh karena itu, cara mengatasi perasaan cemas dan takut yakni dengan berpikir positif bahwa Allah SWT akan melindungi dari bahaya pandemi. Dengan adanya pemikiran positif tersebut memiliki pengaruh di mana membuat hati seseorang tenang di masa pandemi. Selain berpikir positif, seseorang yang bertawakal, dimana menyerahkan

diri semuanya kepada Allah SWT yang akan memunculkan ketenangan hati. Berserah diri kepada Allah SWT akan mampu menerima dengan sabar atas segala ujian atau cobaan yang diberikan-Nya. Keberadaan berpikir positif dan bertawakal inilah akan memperkuat iman dan imun masyarakat beriman (Budi, 2021).

Terkait adanya problematika solidaritas sosial di masyarakat beriman Desa Penambuhan pada masa pandemi COVID-19 pentingnya untuk memperbarui iman dengan menerapkan keimanan dalam kehidupan sosial. Iman bukan hanya sekedar lisan, tetapi juga merealisasikan adanya perbuatan sesuai dengan apa yang diyakini (Khadijah, 2020). Dalam agama Islam menghargai segala usaha kebaikan akan mendatangkan kekuatan ikatan antar individu maupun kelompok dan memperkokoh suatu hubungan solidaritas sosial ditengah masyarakat. Untuk memperkuat hubungan ketetanggan dengan cara memberikan perhatian, maka akan melahirkan ikatan persaudaraan antar anggota masyarakat. Selain itu, solidaritas sosial masyarakat tersebut dapat menghilangkan kecenderungan untuk bersikap individualistis. Solidaritas sosial di masyarakat beriman sangat penting, terutama pada masa pandemi agar mengokohkan hubungan sesama mukmin. Hal tersebut menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan terjadinya hubungan bertetangga yang solid dan kuat. Akan tetapi, ketika mengusahakan untuk terwujudnya solidaritas sosial tidak mengabaikan nilai-nilai kekeluargaan (Syarkawi, 2014).

Dalam agama Islam, sikap saling tolong-menolong akan mendapat pahala kelak di akhirat dan Allah SWT juga akan mencukupkan rezekinya di dunia. Pada masyarakat beriman, Islam memerintahkan untuk saling bahu membahu, terutama di masa pandemi. Memiliki rasa kepedulian sosial dan sikap saling tolong-menolong merupakan sikap membantu menyelesaikan permasalahan dengan tujuan kebaikan sehingga tercipta masyarakat yang damai. Rasa peduli dan saling tolong-menolong akan menimbulkan sikap sosial, di mana kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan mementingkan kebersamaan (Suhartawan, 2021). Oleh karena itu, sangat penting dalam kehidupan masyarakat beriman yang seharusnya untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Adanya sikap saling tolong-menolong akan memperkuat solidaritas sosial.

SIMPULAN

Masyarakat beriman di Desa Penambuhan pada masa pandemi telah terjadi kurangnya solidaritas sosial, di mana orang yang terpapar COVID-19 dijauhi oleh tetangga bahkan dikucilkan dari lingkungan sekitarnya. Selama orang-orang yang terpapar COVID-19 melakukan isolasi mandiri di rumah, para tetangga tidak ada yang berani menjenguk sampai tidak ada yang memberi bantuan. Padahal, dalam ajaran agama Islam, solidaritas sosial sangat penting dalam hidup masyarakat beriman agar menciptakan sebuah kerukunan dan kedamaian. Masyarakat beriman harus memiliki manfaat bagi orang lain, seperti saling tolong tolong-menolong di masa pandemi COVID-19.

Penyebab utama dari problematika solidaritas sosial di Desa Penambuhan pada masa pandemi COVID-19 yakni adanya stigma negatif dari masyarakat. Stigma negatif masyarakat beriman Desa Penambuhan memiliki tiga faktor, ialah stigma negatif terhadap COVID-19, stigma negatif disebabkan rasa cemas berlebihan, dan stigma negatif adanya bantuan sosial yang dianggap masyarakat kurang adil. Rasa cemas di masa pandemi COVID-19 dapat teratasi dengan cara berpikir positif dan berserah diri kepada Allah SWT. Pemikiran positif dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT akan mewujudkan ketenangan hati di masyarakat beriman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudi, Ramli, Yasir Mokodompis, and Allika Nurfadiah Magulili. (2020). "Stigma Terhadap Orang Positif COVID-19." *Jambura: Journal of Health Sciences and Research*, 2(2), 77-84.
- Apip, Abdul, and Rahmawati. (2021). "Penguatan Solidaritas Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pembentukan Satuan Tugas Bencana Di Desa Pamong Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang." *Jurnal Abdi Karya*, 3(1), 86-94.
- Budi, Mayrina Eko Prasetyo. (2021). "Pendekatan Spiritual Sebagai Strategi Seorang Coping Ibu Menghadapi Kecemasan Di Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Ficosis*, 5(2), 545-563.
- Durkheim, Emile. (1893). *The Division of Labor in Society*. New York: The Free Press.
- Faedlulloh, Dodi, Intan Fitri Meutia, Devi Yulianti, and Vina Karmilasari. (2021). "Gotong-Royong Digital: Praktik Baru Solidaritas Warga Di Era Pandemi." *Jurnal Jantra*, 16(1), 1-14.
- Hakim, Luqman Al. (2020). "Wacana Solidaritas Dan Kemajemukan Islam Indonesia Di Tengah Pandemi COVID-19." *Jurnal Al-'Adalah*, 23(2), 179-192.
- Harahap, Siti Rahma. 2020. "Proses Interaksi Sosial Di Tengah Pandemi Virus COVID-19." *Jurnal Al-Hikmah: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Budaya*, 11(1), 45-53.
- Hasil wawancara dengan B, selaku masyarakat yang terpapar COVID-19. (2021), di Desa Penambuhan, Margorejo, Pati.
- Hasil wawancara dengan EK, selaku masyarakat yang tidak terpapar COVID-19. (2022), di Desa Penambuhan, Margorejo, Pati.
- Hasil wawancara dengan ESW, selaku masyarakat yang terpapar COVID-19. (2021), di Desa Penambuhan, Margorejo, Pati.
- Hasil wawancara dengan IR, selaku masyarakat yang terpapar COVID-19. (2021), di Desa Penambuhan, Margorejo, Pati.
- Hasil wawancara dengan K, selaku masyarakat yang tidak terpapar COVID-19. (2021), di Desa Penambuhan, Margorejo, Pati.

- Hasil wawancara dengan KH, selaku masyarakat yang tidak terpapar COVID-19. (2021), di Desa Penambuhan, Margorejo, Pati.
- Hasil wawancara dengan M, selaku masyarakat yang tidak terpapar COVID-19. (2022), di Desa Penambuhan, Margorejo, Pati.
- Hasil wawancara dengan MG, selaku masyarakat yang terpapar COVID-19. (2022), di Desa Penambuhan, Margorejo, Pati.
- Hasil wawancara dengan MY, selaku masyarakat yang terpapar COVID-19. (2022), di Desa Penambuhan, Margorejo, Pati.
- Hasil wawancara dengan S, selaku keluarga pasien COVID-19. (2021), di Desa Penambuhan, Margorejo, Pati.
- Hasil wawancara dengan SJ, selaku masyarakat yang tidak terpapar COVID-19. (2022), di Desa Penambuhan, Margorejo, Pati.
- Hasil wawancara dengan SM, selaku tokoh masyarakat. (2021), di Desa Penambuhan, Margorejo, Pati.
- Ilman. (2020). *Karakter Manusia Beriman Dalam Al-Qur'an*. Depok: Guepedia.
- Khadijah. 2020. "Realisasi Iman Dalam Kehidupan Sosial." *Jurnal Hikmah*, 9(1), 12-22.
- Munawaroh. (2020). *Masyarakat Qur'ani*. Jakarta: Guepedia.
- Nuryanto, M. Rahmat Budi. 2014. "Studi Tentang Solidaritas Sosial Di Desa Modang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser (Kasus Kelompok Buruh Bongkar Muatan)." *Jurnal Sosiatri*, 2(3), 1-13.
- Purba, Hasan Manganju Ashari. (2020). "Pengaruh Religiusitas Islam Terhadap Solidaritas Sosial (Studi Korelasi Di Lingkungan II Dan III Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan)." Disertasi, Universitas Sumatera Utara.
- Putri, Syahrani Karina dan Noviy Hasanah. (2018). "Solidaritas Sosial Anggota Organisasi Bsa Owner Motorcycle Siantar (BOM'S) Di Kota Pematangsiantar." *Jurnal Socius: Journal of Sociology*, 5(1), 32-41.
- Rahmah, Siti. (2020). "Urgensi Tasawuf Di Tengah Pandemi COVID-19." *Jurnal Ilmu Dakwah*, 19(2), 74-90.
- Rahman, Afzalur. (2007). *Ensiklopedia Ilmu Dalam Al-Qur'an: Rujukan Terlengkap Isyarat-Isyarat Ilmiah Dalam Al-Qur'an*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

- Rahmawati, Pudji, dan Hanafi Muljohardjono. 2016. "Meaning of Illness Dalam Perspektif Komunikasi Kesehatan Dan Islam." *Jurnal Komunikasi Islam*, 6(2), 320-331.
- Rosanti, Cholisa. (2021). "Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah COVID-19 Setelah Pemberlakuan New Normal." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 393-402.
- Rosidin, Udin, Laili Rahayuwati, and Erna Herawati. (2020). "Perilaku dan Peran Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi COVID-19 Di Desa Jayaraga, Kabupaten Garut." *Jurnal Umbara*, 5(1), 42-50.
- Rusdi, M, A L Wabula, I Goa, dkk. (2020). "Solidaritas Sosial Masyarakat Petani Di Desa Wanareja Kabupaten Buru." *Jurnal Ilmiah*, 6(2).
- Scholz, Sally J. (2020). "Solidarity, Social Risk, and Community Engagement." *The American Journal of Bioethics*, 20(5), 75-77.
- Setyowati, dan Anggi Cahya. (2020). "Peran Dakwah Daring Untuk Menjaga Solidaritas Sosial Di Masa Pandemi COVID 19." *Academia: Journal of Multidisciplinary Studies*, 4(2), 295-310.
- Shofaussamawati. (2016). "Iman Dan Kehidupan Sosial." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2(2), 211-224.
- Suhartawan, Budi. (2021). "Kepedulian Sosial Di Tengah Wabah COVID-19 Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Dirayah*, 2(1), 1-18.
- Sumual, Ike Fadila, Pryo Sularso, and Budiyono. (2019). "Upaya Menumbuhkan Rasa Solidaritas Kebangsaan Anak Usia Dini Melalui Permainan Bakiak." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 118-124.
- Syarkawi. (2014). "Existensi Solidaritas Dalam Islam' Suatu Keniscayaan.'" *Jurnal Lentera*, 14(10), 63-69.
- Syukur, Muhammad. (2018). *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Umriati, dan Hengki Wijaya. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

DIGITAL MARKETING STRATEGY BASED ISLAMIC VALUE: HOW TO ACHIEVE COMPETITIVE ADVANTAGE?

Muhammad Husni Mubarak
State Islamic Institute of Kudus
mhusni@iainkudus.ac.id

Abstract

Technological developments produce increasingly sophisticated facilities, which can be used as media in the development of competitive advantage-oriented business ventures. The use of an effective SWOT analysis can provide a good strategy formulation to win the market competition. One form of technology integration is in marketing practices using digital marketing strategy. The purpose of this study is to conceptually examine digital marketing strategy based Islamic value in achieving competitive advantage. This research will take a close look at digital marketing in the perspective of Islamic economics. In digital marketing with an Islamic perspective, all activities related to the technology must be based on Islamic value. This type of research is descriptive with a qualitative approach. Research data is primary data in the form of empirical findings of PT. Bunda Solusi Indonesia. The conclusion that can be drawn from the results of the discussion is that the integration of examine digital marketing strategy based Islamic value in a business requires an analysis of internal and external factors to determine the most appropriate digital marketing strategy. This strategy is essentially a form of marketing that emphasizes digital marketing to increase competitive advantage.

Keywords: *SWOT Analysis, Digital Marketing Strategy, Islamic Value, Competitive Advantage.*

INTRODUCTION

In the current era, modern business competition has an impact on changing the focus of competition from competition between independent companies towards competitive advantage. PT. Bunda Solusi Indonesia, one of them, is a company engaged in the distribution of children's drugs with the Paramorina brand on each of its products, applying the importance of achieving competitive advantage requires strategic policies to achieve competitive objectives. PT. Bunda Solusi Indonesia is a company that cannot be separated from the problem of market competition. Therefore, an appropriate strategy is needed to overcome the competitive problem so that it can attract the attention of consumers, where the company must carry out a strategy that can strengthen its position in the market, and survive against competitive pressures.

The conceptual model of a company's competitive advantage is a set of external factors, including market diversity, technological sophistication, market attractiveness, product/industry life cycle, demand, and concentration of competition. The company's internal capabilities include innovation, quality, cost and creation of flexible organizational structures and systems. A company can develop a competitive strategy, one of which is an effort to retain customers, which is a very important thing to do in an increasingly competitive business world. All business people always try to improve customer satisfaction through the fulfillment of expectations and needs, the development of this competitive strategy aims to make companies maintain their existence (Nayebzadeh et al., 2013). Companies with product innovation and fast delivery times can increase market share and sales which means that the company has a high level of responsiveness, flexibility, and reliability so that the ability to increase company assets is higher (Mentzer et al., 2001). The development of technology, the increasing diversity and number of products and services in the market causes major changes to producers or sellers experiencing increasingly fierce competition, which demands increasingly hard efforts through various business strategies, therefore marketing activities play an important role in order to expand the market and win the competition (Runtuuwu et al., 2014).

The best way to maintain and or expand the market is to follow the latest printing technology development trends. However, this step must be followed by conducting market education through offering comprehensive solutions. Companies need to recognize the company's strengths and weaknesses in competing. This will greatly assist the company in recognizing itself, as well as

taking advantage of every opportunity that exists and avoiding or minimizing threats. This statement was expressed by Guiltinan (1994). So, the function of the SWOT analysis and competitive strategy is to analyze the strengths, weaknesses and competitive advantages of the company/business which is carried out through an analysis of the company's internal conditions, and analysis of the opportunities and threats faced by the company through analysis of the company's external conditions. The development of this competitive strategy is intended so that the company can see objectively internal and external conditions so that it can anticipate changes in the external environment, which is very important to gain competitive advantage and have products that are in accordance with consumer desires with optimal support from existing resources (Rangkuti, 2005). Strengths, weaknesses, opportunities and threats are dynamic factors in SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) which can describe the company's ability to optimize and allocate using its resources and the situation it faces in an effort to achieve a goal.

One of the factors that underlie marketing success is finding the most appropriate strategy according to current market conditions. The most relevant business strategy and able to answer the challenges of increasing market competition is a business strategy that is able to accommodate market criteria through the use of various types of facilities and infrastructure which are also increasingly advanced and developing (Lucyantoro & Rachmansyah, 2017). One of these strategies is a digital marketing strategy that is useful for strengthening communication in marketing a product that is carried out by the company through digital media. The strategy in the marketing aspect using digital tools or known as digital marketing is a marketing method carried out using the help of digital instruments, especially the internet and the various applications contained in it and the equipment that supports the use of these media, which allows the creation of a network or connection with many parties, in this case between the producer/seller and the customer, without being limited by distance, time and place (Ryan, 2014). The use of digital marketing is the right choice for companies to develop the business they run. The magnitude of the benefits obtained, the easy access at this time makes the digital marketing strategy the right solution to expand the reach of its business.

In the context of sharia, marketing is the most important thing, especially since the target market is Muslims who are the majority. So Islamic marketing principles are important to apply (Panggabean, 2022). Important

things that have been exemplified in terms of serving the Prophet applying a polite, gentle and sympathetic nature to customers. These characteristics are then used as basic principles in Islamic marketing. The key to the success of Prophet trade is to maintain consumer trust, a good name is a brand that becomes the most important identity of a company and the person who markets it. In the historical records of the Prophet Muhammad has succeeded in building sharia marketing with people who know themselves as al-amin (honest people). So that the Prophet's merchandise is always in demand in the market, the Prophet's sales are known to be very honest and offer guaranteed product quality and never disappoint customers (Kartajaya & Sula, 2006). Like the Messenger of Allah, he is a businessman who also does marketing. He is a marketer who is honest, fair, and wise and likes to build a good relationship with his consumers and his fellow human beings. By adhering to the values contained in the Al-Quran and Al-Hadith, Rasulullah SAW did business professionally (Sula & Kartajaya, 2006). The impact is felt on the increase in business actors. The application of digital marketing that is in accordance with Islamic law and runs smoothly thanks to the support of advanced technology can help companies seize broad market opportunities and achieve competitive advantages (Hartini & Fasa, 2022).

LITERATURE REVIEW

SWOT Analysis

Definition of SWOT Analysis according to Wicaksono & Hariadi (2015) SWOT analysis is a strategic planning method used to evaluate the factors that become strengths, weaknesses, opportunities, and threats that may occur in achieving the objectives of project activities/business activities or institutions on a wider scale. According to Freddy Rangkuti (2009: 18) SWOT analysis is the process of systematically identifying various factors in order to determine the right formulation and carry out the best company strategy. Rangkuti (2014) explained that SWOT analysis is a systematic identification of various factors to formulate corporate strategy. This analysis is based on logic that can maximize strengths and opportunities, but at the same time minimize weaknesses and threats. The strategic decision-making process is always related to the development of the company's mission, goals, strategies and policies. Thus, strategic planning must analyze the company's strategic factors (strengths, weaknesses, opportunities and threats) in the current conditions.

This SWOT analysis is based on logic that can maximize strengths and opportunities, but at the same time minimize weaknesses and threats. The company's strategic decision-making process is always closely related to the development of the company's mission, vision, goals, strategies and policies. Therefore, strategic planning really requires analysis of each of these SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) in the current corporate environment (Rangkuti, 1998). SWOT analysis which includes efforts to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats that determine the company's performance. External information about opportunities and threats can be obtained from many sources, including customers, government documents, suppliers, banking circles, partners in other companies. Many companies use the services of scanning agencies to obtain newspaper clippings, internet research, and analysis of relevant domestic and global trends (Richard, 2010).

SWOT analysis compares external opportunities and threats with internal strengths and weaknesses. Elements of SWOT Strength, Weakness, Opportunity, Threats (Meilani, 2015). The SWOT analysis method is considered the most basic method of analysis, useful for viewing a topic or problem from four different sides. The results of the analysis are usually directions or recommendations to maintain strengths and take advantage of existing opportunities, while reducing weaknesses and avoiding threats. The main thing to emphasize is that in the planning process, an institution requires an assessment of the current conditions and the future that will affect the process of achieving company goals (Wulandari et al., 2017).

SWOT Elements of External and Internal Factors

According to (Irham Fahmi, 2013:260) SWOT analysis more deeply necessary to look at external and internal factors as an important part of strategic formulation, namely:

1. External factors

These external factors affect the formation of opportunities and threats (O and T). Where this factor is related to the conditions that occur outside the company that affect the company's decision making. These factors include the industrial environment and the macro business environment, economy, politics, law, technology, population, and socio-culture.

2. Internal factors

These internal factors affect the formation of strengths and weaknesses (S and W). Where this factor is related to the conditions that occur in the company, which also influences the formation of company decision making. These internal factors include all kinds of functional management: marketing, finance, operations, human resources, research and development, management information systems and corporate culture.

With the SWOT analysis, the characteristics of the main strengths, additional strengths, neutral factors, main weaknesses and additional weaknesses will be obtained based on the internal and external environmental analysis carried out. From this analysis, the potential of an institution to be able to progress and develop is influenced by: how the institution utilizes external influences as additional strength and local influences from within which can be maximized (Wulandari et al., 2017).

Digital Marketing Strategy

Digital marketing strategy is a marketing strategy that utilizes growing information technology. Digital marketing is not a concept that focuses on technology, but on humans (marketers), namely how to understand understanding humans (marketers), how to use technology in building relationships with other humans (customers) to build and significantly increase sales (Ryan, 2014).

The use of technology in the form of the internet and digital media has supported the modern marketing process, which often brings up labels or terms created by academics and professionals. Digital marketing, web marketing, and internet marketing are examples of labels or terms that have been created. The use of digital marketing is currently being implemented by business people as a means to promote products or services to prospective buyers through media that is convenient and easily accessible to buyers (Sari & Dwiya, 2018).

In doing marketing, a precise strategy is needed so that what is hoped for can be realized in reality. Several steps that need to be taken in carrying out a marketing strategy are making decisions about marketing costs from the company, marketing mix and marketing allocation. The ultimate goal of marketing is customer satisfaction (Ryan, 2014).

Digital Marketing is the promotion of a product or brand through one or more forms of electronic media. Digital Marketing is often referred to as online marketing, internet marketing, or web marketing, although it is made on a computer and in electronic form, promotion via radio television and digital print in the form of billboard banners is not including digital marketing because it does not offer instant feedback and reports. technology is only a tool, which, when viewed from a marketing perspective, is a means of connecting that can increase the effectiveness of relationships between people, or in this case, between marketers and the target market (Ryan, 2014).

The decision to implement digital marketing as a business strategy must be adjusted to the characteristics of the business being run as a basis for confirming the level of need for implementing the strategy. Digital marketing, also known as digital marketing, is currently known as marketing 4.0. Marketing 4.0 is a marketing approach that combines online and offline interactions between companies and customers. Digital marketing is also very influential in the level of customer satisfaction because it can provide customers with the same basic benefits as other forms of marketing. Able to engage or reach consumers because communication occurs directly and in two directions so that business actors build relationships and foster consumer trust.

Islamic Value

Marketing in Islam is a form of muamalah that is justified in Islam, as long as all transactions are protected from prohibited things by sharia provisions. The term marketing, is very well known among businessmen. Marketing has an important role in the business map of a company and contributes to product strategy. Sharia marketing has several foundations described by Hermawan and syakir sula. The methods that are carried out in sharia, namely, sharia marketing strategies, aim to get information victory, by dividing the area so that they are superior in competition, and sharia marketing tactics, aiming to get victory information.

This means that in sharia marketing, the entire process, both the creation process, the bidding process, and the value change process, there should be no things that contradict the contract and Islamic muamalah principles. As long as this can be guaranteed, and deviations from the principles of Islamic muamalah do not occur in any transaction in marketing, it is permissible. Islam

views marketing as a sale and purchase that must be displayed and shown its features and weaknesses so that other parties are interested in buying it. The word of Allah SWT in the Qur'an which reads as follows:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ
وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ
الَّذِي بَاتِعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Allah has indeed purchased from the believers their lives and wealth in exchange for Paradise. They fight in the cause of Allah and kill or are killed. This is a true promise binding on Him in the Torah, the Gospel, and the Quran. And whose promise is truer than Allah’s? So rejoice in the exchange you have made with Him. That is ‘truly’ the ultimate triumph.” (Surah At-Taubah [9]:111)

In this verse, Allah SWT confirms his promise to the believers who have been willing to sacrifice their lives and property in His cause by exchanging them for heaven as a commensurate recompense for what they have sacrificed. Know that no one has sincerity and accuracy in his promises more than Allah SWT.

Businesses run through digital marketing have characteristics based on Islamic value, namely marketing in cyberspace does not contain mairis (gambling), activities involving the manufacture and/or sale of illicit products are prohibited, marketing that contains elements of gharar (uncertainty), and digital marketing does not contain usury (interest), as Allah SWT. said:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Meaning: *“Those who consume interest will stand ‘on Judgment Day’ like those driven to madness by Satan’s touch. That is because they say, “Trade is no different than interest.” But Allah has permitted trading and forbidden interest. Whoever refrains—after having received warning from their Lord—may keep their previous gains, and their case is left to Allah. As for those who persist, it is they who will be the residents of the Fire. They will be there forever.” (Surah al-Baqarah [2]: 275)*

There are four Islamic value as guidelines, namely:

1. Rabbaniyah

Every activity carried out is recommended to follow steps in accordance with Islamic value. Because at every step of action, Allah SWT always supervises what we do. Therefore, we should stay away from actions that are prohibited In the Qur'an AZ-Zalzalah verse 7, namely:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Meaning: "So whoever does an atom's weight of good will see it."

2. Akhlaqiyyah

The next provision is prioritizing morals in various aspects. One of them is in sales, which prioritizes the ethical code of all religions and is comprehensive in nature.

3. Al-Waqi"yyah

Sales according to sharia is a comprehensive provision by prioritizing norms, especially Islamic value.

4. Insaniyyah

The next virtue of selling sharia is a comprehensive activity, such as an understanding of one's ability to understand others regardless of any status.

Digital marketing has a place in the Islamic perspective, but sharia requirements must be adhered to. This is to ensure that the goals regarding online business, falah and maximum profit can be achieved. By achieving these goals Muslims can be successful in business as well as in the hereafter. The maximization of falah can be achieved by complying with Sharia and the four main prohibitions outlined are the prohibition of riba, maisir, and gharar and the sale of prohibited products. On the other hand, maximizing profits from digital marketing can be achieved by differentiating products, quality and services offered to customers through online marketing mixes and networks (Junusi, 2020).

Competitive advantage

Companies that will compete in global competition must have a competitive advantage over their competitors. Competitive advantage is the company's ability to create a superior position compared to its competitors

and is highly dependent on the match between the organization's internal capabilities and changing external conditions of the organization (Andrews, 1971; Chandler, 1962; Hofer and Scheler, 1978; Penrose, 1959 cited in Hart, 1995). In subsequent developments, time is considered as a source of competitive advantage (Kessler and Chakrabarti, 1996; Zhang, 2001 in Li et al, 2006). In this study, the dimensions of competitive advantage used include price, quality, delivery, product innovation, and time to market.

Competitive advantage is a relationship or series of various company resources. The importance of competitive advantage in organizations is not limited to external factors. Internal sources of competitive advantage of a company are considered as important factors that are no less important to achieve success (Wang, Lin, & Chu, 2011). Competitive advantage is a company formulation strategy designed to achieve opportunities that cannot be imitated by competitors to maximize profits and be profitable (Pakaya, 2011). Competitive forces that exist in the company's environment and show the influence of internet technology on each strength. These forces help determine the company's position versus its competitors in the industry.

Competitive advantage is the key to success for organizations or companies that are in an environment that is constantly undergoing rapid changes in a fiercely competitive environment and in an increasingly short period of time (Utama, 2010). Competitive advantage stems from many activities that are possible from outside the company to design, carry out production and marketing, supply, and other support to produce its products. Each of these activities can contribute to the relative cost of the firm's position and as a means of differentiation (Tilley, 2003). So this competitive advantage can be achieved by utilizing existing resources in the company. These advantages include the company's ability to differentiate itself from competitors through various important management decisions. These competitive capabilities include: cost, quality, delivery, and flexibility (Tracey et al., 1999; Roth and Miller, 1990).

According to the traditional view, resources owned by firms in the same industry are bought or adopted easily by other firms. Meanwhile, sustainable competitive advantage according to the resource-based view can be achieved if the resources and capabilities of the company are homogeneous, different from other companies or competitors, and other companies or competitors do not have the ability to obtain similar resources. Organizational resources are the basis for achieving and maintaining competitive advantage (Ismail et

al., 2012). So to increase the company's competitive advantage, the company must be able to manage existing resources in the company. Resources that are unique and have differentiating values greatly support the company's competitive advantage. For this reason, companies must be able to manage all their resources in order to create a competitive advantage, and can achieve superior company performance. Organizational resources that can be optimized in increasing competitive advantage and organizational performance are all competencies that exist within the organization.

In general, competence emphasizes more on productive behavior that must be possessed and demonstrated by someone in carrying out a job in order to achieve extraordinary results (Hutapea & Nurianna Thoha, 2008). The company will focus on a series of innovations based on ideas from customers, competitors, and suppliers of products or raw materials, as well as processes to improve its advantages. This effort is a more effective way to compete overall (Tilley, 2003). In addition to the competence of the company, it can also improve the company's ability to manage resources to increase its competitive advantage and improve company performance. The company's innovation will be a competitive advantage because the company is always innovating, for example product, process and market innovation.

Meanwhile, according to Gluck and Frederick (1980) a company is said to have a competitive advantage if it fulfills the following characteristics: 1) Special competence, for example having a product with better quality, having a smoother distribution channel, faster product delivery, having a more well-known product brand. 2) create imperfect competition. Competence describes the characteristics of knowledge, skills, behavior, and experience to perform a particular job or role effectively. In today's era of globalization, competence is not just knowledge and skills. Competence is a very complex special ability. Like jobs compiled by the Ministry of Manpower in various countries, there are competencies ranging from the competence of doctors, teachers, soldiers (Adiputra & Mandala, 2017). Meanwhile, sustainable competitive advantage according to the resource-based view can be achieved if the resources and capabilities of the company are homogeneous, different from other companies or competitors, and other companies or competitors do not have the ability to obtain similar resources.

RESEARCH METHODS

The location of this research is PT Bunda Solusi Indonesia Kudus. The research sample is directors, brand managers, leaders and also some employees at PT Bunda Solusi Indonesia to provide accurate data or information. To obtain accurate data that can be trusted and relevant to the problem under study, the data collection was carried out by several methods: Interview and Observation.

In this study, the author uses a type of qualitative research with the research method used is descriptive research, namely research methods aimed at describing existing phenomena, which are currently taking place. Descriptive research aims to make a systematic, factual and accurate description of the facts and characteristics of a particular research object. The discussion presented is based on references examined through verses of the Qur'an, hadith and books of fiqh. From these references, the opinions and arguments of the scholars are quoted along with the arguments they make as the basis of the arguments, and the opinions of the experts after which conclusions are drawn.

Data analysis technique: SWOT analysis, SAP analysis (Strategic Advantage Profile) The steps in performing SAP analysis (internal factor analysis): Identify the elements that constitute the company's strengths and weaknesses. ETOP analysis (Environmental Threat & Opportunity Profile) The steps in conducting an ETOP analysis (external factor analysis): Finding a formulation (identifying elements that are opportunities and threats to the company).

The process of determining a digital marketing strategy requires an in-depth analysis of the business how to use digital technology by companies, methods of using digital technology to reach customers with the main objective of requiring critical points owned by the business and can be unique and have high competitiveness in the market, and about the most appropriate method of integrating digital marketing strategies for maximum results according to the set targets. Islamic value of digital marketing strategy analysis aims to describe digital marketing from an Islamic economic perspective. The steps taken in this research are to read and then understand and examine sources related to the research theme and describe them in the format of research results. Competitive advantage analysis examine the process of adjusting digital marketing strategies in an Islamic perspective to find competitive advantages.

DISCUSSION

In this analysis, there will be a discussion about the formulation of the problem that is being experienced by PT. Bunda Solusi Indonesia Kudus. The analytical method used is SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat). The SWOT analysis itself consists of 2 methods:

- Strategic Advantage Profile Analysis

Is a means to make a systematic evaluation of the strategic advantages of the company that is important to the company in the internal environment. SAP Analysis PT. Bunda Solusi Indonesia Kudus covers strengths and weaknesses.

Strength of PT. Bunda Solusi Indonesia Kudus used as a data collection technique/indicator used were:

1. The only honey product with the most variants
2. be a solution to all kinds of children's problems
3. Not many competitors have products with complete variants
4. Very affordable price. If we look online, no one is brave with the price of 50 thousand because the advertising cost is very high. For reseller agents, there is a wholesale price unlike the enduser price. And there are also restrictions on purchases to sub distributors because they buy high even thousands, so there is a limit on the amount to keep the market price stable, 500/1 transaction for 1 average one month

Weaknesses of PT. Bunda Solusi Indonesia Kudus used as a data collection technique/indicator used were:

1. New branding process

Like developing paramorinac.co.id, it has not been fully opened because no one has dared to advertise there because it is one that is registered with the BPOM which is officially registered while PT. Bunda Solusi Indonesia Kudus is a seller, so they use other websites.

2. Haven't been able to cooperate with national distributors to enter the offline market

To enter the offline market, such as pharmacies, agents still enter. So, in order to get to the pharmacy, PT. Bunda Solusi Indonesia Kudus must cooperate with national distributors. First, the demand is high, secondly, PT. Bunda Solusi Indonesia Kudus must have a taxable company, the company has been taxed. The company is already in

the process of going there, continuing to make improvements in the financial department because a large national scale company that can enter all pharmacies throughout Indonesia requires a tax invoice to run, when this company can't present a tax invoice then it can't work with pharmacies. PT. Bunda Solusi Indonesia is preparing itself to be able to taxable company to be able to issue tax invoices, to be able to enter on a national scale and be able to increase focus on offline. So for this reason, the financial team is continuously strengthened to be able to bring the company to taxable company.

- Environmental Threat & Opportunity Profile Analysis

Is a means to make a systematic evaluation of the strategic advantages of the company that are important to the company in the external environment. ETOP Analysis PT. Bunda Solusi Indonesia Kudus covers opportunities and threats.

Opportunity PT. Bunda Solusi Indonesia Kudus used as a data collection technique/indicator used were:

1. The BPOM and Halal certifications for Paramorina products have more value than other herbal products.
2. It has a wide capacity and reach because of the many variants that paramorina products have.
3. People's need for safe products is increasing because medicine is a primary need just like humans need to eat and drink
4. The occurrence of the development of the internet which aims to improve communication with consumers which will help increase sales.

Threat of PT. Bunda Solusi Indonesia Kudus used as a data collection technique/indicator used were:

1. Expensive advertising costs
2. There are competitors who are already known to the market
3. Slow market growth

In carrying out a business activity, such as PT Bunda Solusi Indonesia, it has had and implemented a marketing strategy by adjusting the potential in the regional market. The marketing strategy in a company cannot be done only once, but it takes a long process to create a marketing strategy that suits the company. The most basic and necessary thing in a marketing strategy is how and how to attract the interest of the public/prospective consumers to want to shop in order to survive or increase the number of buyers/consumers in the place.

Analysis of internal aspects in determining digital marketing strategies plays a major role in the successful implementation of these strategies. However, another thing that should not be forgotten is related to external conditions that also need to be analyzed, especially regarding customers from the digital market which are the main targets of the business.

- a. Media from digital marketing implemented by PT Bunda Solusi Indonesia provides convenience for customers to use. When a customer feels that the media used is comfortable, the customer will be able to use it more effectively and efficiently. This will make customers feel the speed of access in finding the desired need and tend to find it faster.
- b. The features of digital marketing media such as Tiktok, Facebook, Instagram, or marketplace applications such as Shopee, Tokopedia, are all user centric. Digital technology allows the customer to be one of the parties that contribute to the formation of the product. PT Bunda Solusi Indonesia by providing media that can accommodate customer desires in terms of these contributions will increasingly make customers feel they have control over the product through the feedback provided, so that it will provide positive value to customers.
- c. Service speed. One of the main benefits of digital technology is the provision of time efficiency for customers in finding and obtaining the desired product or service. Therefore, the sooner a product or service is presented, the more customers will feel the fulfillment of their expectations because customers really value their time.
- d. Product quality. Digital technology makes competition between products and services increasingly fierce, where customers can easily get many choices for the desired product or service to be compared and choose the one that feels the best quality. This shows the increasing importance of product quality in digital marketing strategies to be able to build customer satisfaction, trust and loyalty.

The digital marketing strategy is implemented by PT Bunda Solusi Indonesia in launching new products on the market through advertising. The first process of advertising on social media is through Facebook, because Facebook is merged with Instagram when advertising on Facebook automatically advertises on Instagram.

- Facebook has a fan page feature, that's where it's made to advertise
- Instagram: when advertising via Instagram, consumers can access the web and then are directed to enter chat with the admin via the whastApp application. That's when the task of customer service is to

serve prospective buyers via chat, either in the form of consultations or questions about the order system

- Marketplace application: marketplace provides sales, payment and transaction facilities only. Every seller in a pure marketplace generally has freedom in store customization, such as product categories, store display decorations to the choice of delivery services. This type of marketplace is the most common in Indonesia, including those that have been used by PT Bunda Solusi Indonesia are Shopee, Tokopedia, and Lazada.
- Google: When consumers search for information about products on Google, they will be directed to enter Paramorina's official YouTube channel.
- Tiktok: Tiktok is a form of digital marketing application that has the potential to sell a lot, because besides being able to be used for advertising, Tiktok also has features that help users sell and buy products called tiktok-shop, so consumers don't have to bother opening a marketplace application or online store for transactions, and given a place to create content to be able to build product branding.

They all provide a database for users, the user data when creating a social media account, when filling in the data on hobbies, age, domicile, it is read by the database, and the user data is used for advertisements sold from this social media company to advertisers or advertisers. When advertising using a large budget, PT Bunda Solusi Indonesia will get more and more data and this data will not move PT Bunda Solusi Indonesia to other categories because the data is mature.

If according to the teachings of Islam, PT Bunda Solusi Indonesia Kudus is in accordance with Islamic law because PT Bunda Solusi Indonesia Kudus still prioritizes customer satisfaction in any way, such as the authenticity of the advertised product is no different from the original, making something interesting such as choosing the best image but using goods the original that is sold / the same between the advertised goods and what the buyer will receive if they buy the goods. As stated in the Qur'an Surah An-Nahl verse 125 which reads:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Meaning: *Invite "all" to the Way of your Lord with wisdom and kind advice, and only debate with them in the best manner. Surely your Lord "alone" knows best who has strayed from His Way and who is "rightly" guided.*

In practice, digital marketing strategies according to Islam follow traditional marketing concepts. Marketing in Islam refers to the identification and implementation of value maximization strategies for the benefit of marketers and society as a whole based on the guidelines of the Qur'an and Sunnah (Ahamedullah, 2015). Islam is a religion that motivates its people to become entrepreneurs through trade. The Qur'an explains that when one has finished praying as an obligation to God, humans are commanded to seek His bounty in any form, including trade or other business. Prophet Muhammad SAW is also a successful trader and has inspired today's business people by making his character in trading a guide for today's contemporary era.

Another goal of marketing strategy is to achieve prosperity (falah), business should not be solely directed at profit but also efforts to be upheld and improve human welfare. There are four characteristics of Islamic marketing, including spiritualistic, ethical, realistic, and humanistic. Spiritualism is the umbrella of all teachings in Islamic marketing (Arham, 2011). All business behavior must be in line with the teachings of the Qur'an and As-Sunnah.

As we have seen, strategy is a reference that can be used as a starting point for action. While competitive advantage is a real thing that companies must have in competing. Porter (1980:3) says that: My aim is to build a bridge between strategy and execution, and not treat these two subjects separately or consider implementation which is hardly characteristic of much of the previous research in this area. From the opinion above, it can be seen that the digital marketing strategy as an initial strategy with various analyzes has a close relationship with competitive advantage as a real action because a strategy without action will be in vain as well as action without a strategy.

Companies that will compete in global competition must have a competitive advantage over their competitors. Swierz and Spencer (1994) provide an understanding of competitive advantage, which is a unique position developed by an organization in an effort to beat competitors. While Wright and McMahan (1992) distinguish competitive advantage according to the traditional view with a sustainable competitive advantage according to a resource-based view. According to the traditional view, resources owned by firms in the same industry are bought or adopted easily by other firms.

The competitive advantage itself actually already exists in PT. Bunda Solusi Indonesia Kudus. Being a company that has been around for a long time and has experienced ups and downs, should make PT. Bunda Solusi Indonesia Kudus is getting stronger and united for mutual progress and

prosperity. Based on the theories of the experts, it is also finally known the actual condition of the company in the world of competition. Then find the right digital marketing strategy. In the digital marketing strategy, it would be better to review the strategy to increase promotions, both products and PT. Bunda Solusi Indonesia Kudus. According to Gluck and Frederick (1980) a company is said to have a competitive advantage if it meets the following characteristics: 1) Special competence, for example having a product with better quality, have a smoother distribution channel, faster product delivery, have a more well-known product brand. 2) create imperfect competition. In a perfectly competitive market, every company can enter and leave the market easily, so companies that want to find a competitive advantage must get out of the perfectly competitive market. 3) Sustainability, meaning that competitive advantage must be continuous and uninterrupted. 4) Match the external environment. The external environment provides opportunities and threats to competing companies. Therefore, a competitive advantage does not only look at the weaknesses of competitors but also must pay attention to market conditions.

CONCLUSION

PT. Bunda Solusi Indonesia Kudus is quite dynamic, where the opportunities and threats faced are often changing which affects the company in making strategic policies. However, PT. Bunda Solusi Indonesia Kudus is still able to deal with it flexibly for everything that is faced. SWOT is the initial analysis to analyze about internal and external factors. External and internal analysis, about strengths, weaknesses, opportunities and threats as well as the competitive advantages that the company will have in the future and provide a good strategy formulation.

The digital marketing strategy as the main strategy of PT Bunda Solusi Indonesia Kudus is a marketing strategy that utilizes increasingly developing information technology. The implementation of these strategies in a business must take into account various internal and external factors to determine suitability and to determine the most appropriate digital marketing strategy. The main purpose of implementing the digital marketing strategy is to build communication between producers and customers, more precisely to communicate brands in building trust and brand loyalty to customers in order to achieve competitive advantage. Competitive advantage is the result of the satisfaction of implementing the right strategy.

Judging from the analysis of digital marketing in an Islamic perspective, PT Bunda Solusi Indonesia Kudus has been in accordance with applying the theories and concepts of Islamic digital marketing strategy and has implemented Islamic content which consists of the first three main things, the application of Islamic marketing characteristics; second, the application of Islamic business ethics; third, following the marketing practices of the Prophet Muhammad SAW. Based on the nature of the Prophet Muhammad, namely: Siddiq, Amanah, Fathanah, and Tabligh.

The managerial implication of this study is that to create a company's competitive advantage, it can be done by building a growth strategy that has not been developed by competitors. Efforts to improve business performance can be achieved through increasing the excellence of products such as creating many variants by offering many benefits. The results of this study are expected to have positive implications for theoretical development in enriching marketing strategy.

REFERENCES

- Adiputra, I. P. P., & Mandala, K. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Kapabilitas Terhadap Keunggulan Kompetitif Dan Kinerja Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(11), 6090–6119.
- Anatan, L. (2010). Pengaruh Implementasi Praktik-Praktik Manajemen Rantai Pasokan terhadap Kinerja Rantai Pasok dan Keunggulan Kompetitif [English: Effect of Supply Chain Management Practices on Supply Chain Performance and Competitive Advantage]. *Jurnal Karisma*, 4(2), 106–117.
- Chu, I.-H., Radulaski, M., Vukmirovic, N., Cheng, H.-P., & Wang, L.-W. (2011). Charge transport in a quantum dot supercrystal. *The Journal of Physical Chemistry C*, 115(43), 21409–21415.
- El Junusi, R. (2020). Digital marketing during the pandemic period; A study of islamic perspective. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(1), 15–28.
- Gluck, F. W., Kaufman, S. P., & Walleck, A. S. (1980). *Strategic management for competitive advantage*. Harvard Business School Publishing.
- Hart, O. (1995). Corporate governance: Some theory and implications. *The Economic Journal*, 105(430), 678–689.
- Hartini, S., & Fasa, M. I. (2022). Digital Marketing dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 197–206.
- Herlina, E., & Hakiki, N. (2018). Etika Pemasaran Batik Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 1(2).
- Hutapea, P., & Nurianna Thoha, M. B. A. (2008). *Kompetensi plus*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail, A. I., Rose, R. C., Uli, J., & Abdullah, H. (2012). The Relationship Between Organisational Resources, Capabilities, Systems And Competitive Advantage. *Asian Academy of Management Journal*, 17(1).
- Jones, O., & Tilley, F. (2003). Competitive advantage in SMEs: Towards a conceptual framework. *Competitive Advantage in SMEs: Organising for Innovation and Change*, 15–33.
- Kartajaya, H., & Sula, M. S. (2006). *Syariah marketing*.

- Kessler, E. H., & Chakrabarti, A. K. (1996). Innovation speed: A conceptual model of context, antecedents, and outcomes. *Academy of Management Review*, 21(4), 1143–1191.
- Lucyantoro, B. I., & Rachmansyah, M. R. (2017). Penerapan Strategi Digital Marketing, Teori Antrian Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan: (Studi Kasus di MyBCA Ciputra World Surabaya). *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 5(1), 38–57.
- Meilani, C. (2015). Analisis swot untuk menentukan strategi kompetitif. *Jurnal Academia*, 1(1).
- Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. (2001). Defining supply chain management. *Journal of Business Logistics*, 22(2), 1–25.
- Nayebzadeh, S., Jalaly, M., & Shamsi, H. M. (2013). The relationship between customer satisfaction and loyalty with the bank performance in Iran. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(6), 114.
- Pakaya, A. R. (2011). Pengaruh Manajemen Sumberdaya Manusia Strategi Dan Manajemen Transformasi Terhadap Keunggulan Bersaing. *Jurnal Inovasi*, 8(03).
- Panggabean, S. A. (2022a). Digital Marketing Perspektif Ekonomi Islam. *Koloni*, 1(2), 526–535.
- Panggabean, S. A. (2022b). Digital Marketing Perspektif Ekonomi Islam. *Koloni*, 1(2), 526–535.
- Pradiani, T. (2017). Pengaruh sistem pemasaran digital marketing terhadap peningkatan volume penjualan hasil industri rumahan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 46–53.
- Rangkuti, F. (1998). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, F. (2005). *Marketing analysis made easy*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, F. (2014). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis cara perhitungan bobot rating dan OCAI*.
- Richard, L. (2010). Era baru manajemen. *Edward Tanujaya, Edisi*, 9.

- Roth, A. V., & Miller, J. G. (1990). Manufacturing strategy, manufacturing strength, managerial success, and economic outcomes. In *Manufacturing strategy* (pp. 97–108). Springer.
- Runtuuwu, J. G., Oroh, S., & Taroreh, R. (2014). Pengaruh kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengguna café dan resto Cabana Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3).
- Ryan, D. (2014). *The best digital marketing campaigns in the World II*. Kogan Page Publishers.
- Sari, D. M. F. P., & Dwiya, K. G. S. (2018). Strategi Digital Marketing, Word of Mouth (Wom), Service Quality Terhadap Keputusan Pemakaian Jasa Go-Jek. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 188–198.
- Sula, M. S., & Kartajaya, H. (2006). *Syariah marketing*. Mizan Pustaka.
- Tarigan, A. A. (2016). Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam. *FEBI Pers Uinsu*.
- Utama, A. (2010). Peran Strategi Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Mencapai Keunggulan Bersaing Pada Era Kompetisi Global. *Jurnal Efisiensi*, 10(1), 142.
- Wicaksono, M. E., & Hariadi, B. (2015). *Audit Kepatuhan Atas Pemasaran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Dan Peraturan Menteri Pertanian (Studi Kasus Pada Pt Pupuk Kalimantan Timur)* [PhD Thesis]. Universitas Brawijaya.
- Wulandari, H. P., Khikmawati, E., & Taminto, T. (2017). Penentuan Strategi Bersaing Menggunakan Analisis SWOT (Studi Kasus Pada PT. Keong Nusantara Abadi Natar Lampung Selatan). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen Malahayati*, 6(1), 11–17.
- Yao, S., & Zhang, Z. (2001). On regional inequality and diverging clubs: A case study of contemporary China. *Journal of Comparative Economics*, 29(3), 466–484.

PENANAMAN NILAI-NILAI KARAKTER REMAJA MELALUI FESTIVAL PAGER MANGKOK DI KAMPUNG BUDAYA PIJI

M. Choirul Umam

IAIN Kudus

14muhchoirulumam12tkr@gmail.com

Abstrak

Inti Permasalahan dari Penanaman Nilai-Nilai Karakter Remaja Melalui Festival Pager Mangkok Di Kampung Budaya Piji ialah Pergeseran paradigma yang tidak diimbangi antara pendidikan dan punishment membuat pendidikan karakter menjadi pincang. penulis ingin mengeksplorasi nilai-nilai karakter peserta didik melalui pembelajaran luar sekolah dalam Festival Pager Mangkok. Nilai-nilai karakter tidak hanya didapat di dalam bangku sekolah saja, melainkan kegiatan di luar sekolah juga dapat menanamkan nilai-nilai karakter terhadap peserta didik atas pengawasan dari guru atau orang tua. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data kualitatif penelitian ini diambil dari 5 orang sebagai informan untuk pengambilan data wawancara mendalam (in- depth interview). Data ini bertujuan untuk mencari informasi terkait dengan kandungan nilai-nilai karakter yang terdapat dalam Festival Pager Mangkok. Pengambilan informan penulis tentukan melalui teknik purposive sampling. Hasil temuan peneliti Festival Pager Mangkok mampu menerapkan nilai-nilai karakter peserta didik. Adapun nilai-nilai karakter tersebut adalah religius, jujur, toleransi, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, disiplin dan tanggung jawab.

Kata Kunci: *Nilai-nilai Karakter ; Festival Pager mangkok*

Abstract

The essence of the problem with instilling Youth Character Values through the Bowl Paging Festival in the Piji Cultural Village is a paradigm shift that is not balanced between education and punishment which makes character education limp. The author wants to explore the character values of students through out- of-school learning in the Bowl Paging Festival. Character values are not only obtained in school, but activities outside of school can also instill character values in students under the supervision of teachers or parents. Research Methods This research uses qualitative methods. The qualitative data of this study were taken from 5 people as informants for in-depth interview data collection. This data aims to find information related to the content of character values contained in the Paging Bowl Festival. Intake of the author's informants determined through purposive sampling technique. The findings of the Paging Bowl Festival researchers were able to apply the character values of students. The character values are religious, honest, tolerance, hard work, creative, democratic, curiosity, national spirit, love for the homeland, respect for achievement, communicative, love peace, care for the environment, social care, discipline and responsibility.

Keywords: *Character Values ; Bowl Paging Festival.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan karakter yang ada saat ini selalu dibenturkan pada HAM, ketika seorang guru memarahi muridnya, menghukum atau sejenisnya selalu dibenturkan dengan kasus HAM. Sedangkan ketika siswa berbuat sesuka mereka selalu dimaklumi karena mereka dalam proses belajar. Dahulu guru menjewer muridnya karena memberikan hukuman biasa-biasa saja. Melainkan ketika mereka dewasa mereka bersyukur pada gurunya itu karena telah membimbingnya.

Pergeseran paradigma yang tidak diimbangi antara pendidikan dan punishment membuat pendidikan karakter menjadi pincang. Karena ketika siswa salah mereka dianggap wajar sedangkan jika guru memberi hukuman mereka dianggap melanggar HAM. Kepincangan berikutnya adalah kecuekan orangtua dalam menghadapi perkembangan anak. Seolah orangtua membiarkan anaknya ketika ia salah. Orangtua kurang berperan dalam pembentukan karakter anak. Ketika anaknya yang salah maka sekolah yang harus memperbaiki anak. Seolah orangtua tidak peduli dan sekolah lah yang bertanggungjawab.

Kepincangan-kepincangan itu membuat pendidikan karakter tidak bisa berjalan dengan sepenuhnya. Hal ini memerlukan kesadaran antara orangtua, guru dan sekolah untuk bersama-sama untuk saling bekerjasama dalam membangun karakter generasi muda (Dony purnomo).

Berdasarkan latar belakang inilah, penulis ingin mengeksplorasi nilai-nilai karakter peserta didik melalui pembelajaran luar sekolah dalam Festival Pager Mangkok. Nilai-nilai karakter tidak hanya didapat di dalam bangku sekolah saja, melainkan kegiatan di luar sekolah juga dapat menanamkan nilai-nilai karakter terhadap peserta didik atas pengawasan dari guru atau orang tua. Diangkatnya tema ini sekaligus merupakan cara melestarikan kebudayaan lokal sebagai festival positif yang dapat terus dilestarikan.

B. KAJIAN LITERATUR

1. Nilai-Nilai Karakter

Istilah 'karakter' adalah istilah yang baru digunakan dalam wacana Indonesia dalam lima tahun terakhir ini. Istilah ini sering dihubungkan dengan istilah akhlak, moral, atau nilai. Karakter juga sering dikaitkan dengan masalah kepribadian, atau paling tidak ada hubungan yang cukup erat antara akarakter dengan kepribadian seseorang. Secara etimologis, kata karakter berasal dari bahasa Yunani yaitu *charassein* yang berarti "to engrave". Kata "to engrave" bisa diterjemahkan mengukir, melukis, memaatkan, atau emnggoreskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "karakter" diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik. Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak. Dengan demikian, karakter merupakan watak dan sifat-sifat seseorang yang menjadi dasar untuk membedakan seseorang dari yang lainnya.

Secara terminologis, makna karakter dikemukakan oleh Thomas Lickona yang mendefinisikan karakter sebagai "a reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way". Selanjutnya Lickona menambahkan, "character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior". Karakter mulia dalam pandangan Lickona, meliputi pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa karakter identik dengan akhlak, sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, sesama manusia, maupun dengan lingkungan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat (Rianawati, 2014 : 19-20).

Karakter yang terlantarkan akan memunculkan karakter yangburuk. Sedangkan karakter yang dikembangkan mutunya akan memunculkan karakter yang baik. Karakter baik mengarah pada nilai-nilai kebaikan, seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawa. Nilai- nilai kebaikan dapat digunakan manusia untuk mendukung kehidupannya ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, karakter baik sebagai bagian dari kehidupan manusia diwujudkan dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar untuk diri sendiri maupun orang lain. Karakter yang baik adalah karakter yang nilai-nilainya tidak bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku.

Karakter baik inilah yang harus dikembangkan demi terwujudnya kehidupan yang damai (Atikah, 2018 : 3).

Di Indonesia, sebagai negara yang merdeka, tentu memiliki dasar tersendiri dalam merumuskan nilai-nilai karakter. Rumusan nilai karakter yang dimaksud adalah religius, jujur, toleransi, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, gemar membaca, mandiri, peduli sosial, disiplin dan tanggung jawab. 18 nilai karakter tersebut merupakan karakter paling mendasar yang semestinya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan harus dikembangkan karena juga menyangkut daya cipta (kognitif), daya rasa (afektif), dan daya karsa (konatif). Singkatnya, "educate the head, the heart, and the hand !" Maka hak setiap individu hendaknya dihormati; pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental dan spiritual; pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual sebab akan memisahkan dari orang kebanyakan; pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap dipertimbangkan; pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri, mengembangkan hara diri; setiap orang harus hidup sederhana dan guru hendaknya rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kebahagiaan para peserta didiknya. Peserta didik yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggungjawab atas kebahagiaan dirinya dan

kesejahteraan orang lain. Metode yang yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem among yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah dan asuh (care and dedication based on

love). Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Oleh karena itu bagi Ki Hajar Dewantara pepatah ini sangat tepat yaitu “educate the head, the heart, and the hand”(Jurnal Filsafat Indonesia).

Mulai tahun ajaran 2011, seluruh tingkat pendidikan di Indonesia harus menyisipkan pendidikan berkarakter tersebut dalam proses pendidikannya. Ada 18 (delapan belas) nilai-nilai dalam pendidikan karakter menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2013), adalah :

1. Religius. Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja Keras. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Jadi dengan perilaku tertib ini dapat membangun karakter siswa dalam kehidupan nyata.
6. Kreatif. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis. Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa Ingin Tahu. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan di dengar.
10. Semangat Kebangsaan. Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

11. Cinta Tanah Air. Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
12. Menghargai Prestasi. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/Komunikatif. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
14. Cinta Damai. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
15. Gemar Membaca. Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli Lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki. Hal ini sangat penting mengingat bahwa siswa seringkali berinteraksi dengan masyarakat sekitar.
17. Peduli Sosial. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung Jawab. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Delapan belas nilai-nilai karakter di atas dapat menjadi fokus bagi guru untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada setiap mata pelajaran yang ada di sekolah. Setiap nilai-nilai karakter yang akan ditanamkan kepada siswa, ada indikasi-indikasi yang harus diperhatikan, seperti contoh sikap peduli social, iniaksinya siswa dengan kesadaran sendiri membantuk temannya ketika mengalami permasalahan (Sri Narwanti, 2011 : 45).

2. FESTIVAL PAGER MANGKOK

Festival Pager Mangkok merupakan festival yang digelar oleh pemuda warga Dukuh Piji Wetan, Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Menurut pemantik kegiatan Festival Pager Mangkok yaitu Muhammad Zaini Menuturkan, Kata "Pager Mangkok" sendiri digunakan sejak ajaran Sunan

Muria yaitu *pager mangkok luwih becik timbang pager tembok, ibarate yen kue masak elingo karo tonggomu* (pager mangkok lebih baik daripada pager tembok, ibaratnya ketika kamu sedang memasak ingatlah tetanggamu). Festival ini digelar dengan berbagai macam kegiatan, diantaranya pameran UMKM, seni rupa, kelas budaya, hingga pagelaran seni budaya mewarnai festival tahunan yang digerakkan Komunitas Kampung Budaya Piji Wetan. Serangkaian kegiatan itu tak semata untuk keramaian kekayaan budaya desa semata. Pemilihan tema Pager Mangkok tak lepas dari ajaran salah satu penyebar agama Islam Wali Songo yang dimakamkan di Lereng Muria itu. Pager Mangkok adalah ajaran bersedekah untuk mempererat kerukunan antarsesama manusia. Festival Pager Mangkok ini sebagai bentuk penghormatan dan uri-uri laku ajaran Sunan Muria. Secara filosofis mengajarkan untuk bersedekah dan peduli dengan tetangga. Melalui festival ini akan memunculkan keharmonisan sekaligus menjaga kerukunan antar-masyarakat desa (wawancara dengan Muhammad Zaini).

C. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dilaporkan secara keseluruhan melalui wawancara secara langsung dengan seluruh informan. Berdasarkan wawancara seluruh informan, terdapat 16 tema penting terkait dengan nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan kepada peserta didik melalui Festival Pager Mangkok. Enam belas karakter tersebut adalah religius, jujur, toleransi, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, disiplin dan tanggung jawab. Lebih jelasnya, deskripsi tentang nilai-nilai karakter dalam Festival Pager Mangkok tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Deskripsi Nilai-nilai Karakter dalam Festival Pager Mangkok

Enam belas karakter yang terdapat dalam Festival Pager Mangkok seperti terlihat di gambar 1 di atas disampaikan oleh informan. Walaupun enam belas karakter tersebut disampaikan dengan cara dan gaya bahasa yang berbeda, tetapi mempunyai maksud yang sama. Adapun petikan wawancara informan tersebut akan digambarkan pada tabel 1, 2 dan 3.

Tabel 1. Petikan Wawancara tentang Toleransi, Cinta Damai, Rasa Ingin Tahu, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, Cinta Tanah Air, dan Semangat Kebangsaan.

No	Informan	Petikan Wawancara
1.	Informan 1	,...kalau menurut saya Festival Pager Mangkok ini membuat kita itu menghargai sesama (<i>toleransi</i>) sih, karena kan dari berbagai kalangan nggak hanya orang muslim saja atau non-muslim saja tapi keseluruhan gitu. Terus juga warganya semua ngerasa tenang, nyaman, damai (<i>cinta damai</i>) jadi bagus banget festival ini.
2.	Informan 4	Festival ini membuat saya pribadi tuh ngerasa jadi ingin tahu (<i>rasa ingin tahu</i>) lebih banyak tentang kehidupan di lingkungan sekitar (peduli lingkungan) kita. Karena kan kita hidup bertetangga gitu kan jadi bisa buat bekal pengetahuan di saat terjun ke masyarakat (peduli sosial).
3.	Informan 5	,...yang saya nikmati itu lebih ke ngerasa menumbuhkan semangat cinta tanah air (cinta tanah air) dan bangsa (semangat kebangsaan). Jujur saya pribadi suka yang berbau-bau nasionalisme gitu kan. Dan ini termasuk menjaga kelestarian budaya bangsa.

Tabel 2. Petikan Wawancara tentang Religius, Jujur, Disiplin, Kerja Keras, dan Tanggung Jawab

No	Informan	Petikan Wawancara
1.	Informan 2	Saya dengar-dengar sejarahnya atau filosofinya kan ini ajaran dari Sunan Muria yang mengajarkan kepada masyarakat untuk bersedekah (<i>religius</i>) kepada tetangga sekitar bahwa ini loh yang dekat harus kita pererat dengan persaudaraan kita.
2.	Informan 3	,...yang penting itu mengajarkan kita tentang kejujuran (<i>jujur</i>) sih, kita lihat bahwa festival ini yang jualan-jualan juga standar loh harganya, nggak dinaikkan. Harga standar dengan biasanya jadi enak. Kadang kan kalo ada keramaian gini dinaikkan harganya
3.	Informan 5	Aku lihat di waktu penutupan kemarin itu kan ada pentas seni ya, semuanya tuh bisa tepat waktu (disiplin) dalam runtutan acaranya alhamdulillah. Terus juga aku lihat panitia-panitia semuanya kelihatan kerja bareng semua (kerja keras) dan tahu gitu apa yang harus dilakukan (tanggung jawab).

Tabel 3. Petikan Wawancara tentang Kreatif, Demokratis, Menghargai Prestasi, dan Komunikatif

No	Informan	Petikan Wawancara
1.	Informan 1	,...bagus banget unik (<i>kreatif</i>) dihias-hias dari rambu gitu. Suasananya jadi asri banget.
2.	Informan 2	Di situ kita semua membaaur dari siswa sekolah sana-sini semua jadi satu, banyak banget yang datang di festival kemarin. Jadi kita bisa kenalan tuh hehe (komunikatif). Terus juga saya sempat lihat pameran seninya, itu kita bisa mengapresiasi karya (menghargai prestasi) orang lain. Saya sempat mengikuti kelas seninya juga, gurunya tuh kayak yang ini 'siapa yang tahu angkat tangan' gitu (demokratis). Jadi gaada yang diistimewakan di situ, semua diberi kesempatan untuk tanya juga

2. Analisis

Peserta didik di lingkungan sekolah dituntut untuk memahami secara keseluruhan pembelajaran yang disampaikan oleh pengajar. Peserta didik di lingkungan sekolah harus dapat menguasai seluruh materi-materi yang telah direncanakan oleh pengajar. Hal ini peserta didik pula menghabiskan 6-8 jam berada di sekolah untuk menuntut ilmu di berbagai mata pelajaran yang ada.

Gibson K, menuturkan bahwa psikolog dan ahli perkembangan anak mulai sependapat bahwa anak-anak pada saat ini telah kelebihan kegiatan. Stress akibat aktivitas di sekolah dapat dirasakan oleh siswa terutama pada anak yang mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran di sekolah (Pujianingsih : 72).

Tatkala mereka mengalami stress yang terlalu berlebihan akan mengganggu psikologi anak tersebut. Perlulah kiranya peserta didik diberikan stimulus untuk *me-refresh* otak agar tidak terlalu berat dalam menerima pembelajaran di sekolah. Guru menjadi penentu dari kondisi stress yang rentan dialami oleh peserta didik. Kepekaan guru dalam mengenali tanda-tanda stress pada peserta didik serta penentuan langkah penanganan yang sesuai dapat meminimalisir pada peserta didik berkembang ke arah yang negatif. Kedua hal tersebut perlu dikuasai oleh guru di berbagai jenjang pendidikan(Pujianingsih : 74).

Pendidikan luar sekolah berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang saling melengkapi ataupun tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. Isi pogram didasarkan atas kebutuhan peserta didik. Program dilakukan oleh para penyelenggara pendidikan dan bekerja sama dengan masyarakat. Programnya bermacam-macam, seperti pendidikan keterampilan produktif, olah raga, kesenian, kelompok belajar, kelompok rekreasi dan kelompok pencinta alam. Pendidikan luar sekolah sebagai pelengkap ini dirasakan perlu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dan mendekatkan fungsi pendidikan sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Hasil penelitian ini secara nyata telah membuktikan bahwa Festival Pager Mangkok dapat menanamkan nilai-nilai karakter terhadap peserta didik. Nilai-nilai karakter ini tidak hanya didapat peserta didik di bangku sekolah saja, melainkan dapat diperoleh dari pengalaman di luar sekolah. Berdasarkan data kualitatif terdapat enam belas nilai-nilai karakter yang terdapat diterapkan peserta didik dalam Festival Pager Mangkok. Enam belas nilai tersebut adalah religius, jujur, toleransi, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai

prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, disiplin dan tanggung jawab. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa Pendidikan harus menciptakan yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggungjawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Dari festival pager mangkok peserta didik mendapatkan manfaat yang lebih.

Dalam jurnal pendidikan jasmani dan olahraga, yang berjudul "Implementasi Pendidikan Luar Sekolah terhadap Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar" disampaikan bahwa penelitian dan aplikasi mengenai outdoor education sudah banyak dilakukan di negara-negara lain. Sama seperti di Indonesia, outdoor education yang diterapkan di negara-negara lain pun diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai yang dapat bermanfaat bagi kehidupan murid dimasa yang akan datang. Sebagai contoh, Singapura adalah salah satu negara yang memasukkan outdoor education di dalam sistem pendidikan mereka sejak bertahun-tahun yang lalu. Walaupun outdoor education tersebut tidak masuk ke dalam kurikulum formal dan jenisnya disesuaikan dengan karakter masing-masing sekolah, akan tetapi setiap siswa diharapkan untuk ikut kegiatan kemping setidaknya 2 kali dalam setiap empat tahun masa sekolah (Kurnia Eka Wijayanti, 2017 : 54-55).

Merujuk kepada hasil penelitian yang penulis lakukan iniserta didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, maka telah nampak secara jelas bahwa penanaman nilai-nilai pendidikan karakter terhadap peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai cara, berdasarkan hasil penelitian ini salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui penanaman nilai-nilai karakter peserta didik melalui Festival Pager Mangkok.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa kegiatan Festival Pager Mangkok yang diadakan oleh masyarakat di Dusun Piji Wetan, Desa Lau, Dawe, Kudus mampu menerapkan nilai-nilai karakter peserta didik. Adapun nilai-nilai karakter tersebut adalah religius, jujur, toleransi, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, disiplin dan tanggung jawab.

Oleh karena itu, Festival Pager Mangkok ini patut untuk dilestarikan dan dibudayakan karena dapat memberikan nilai-nilai karakter pengalaman di luar sekolah yang tidak bisa didapat di lingkungan sekolah.

E. REFERENSI

- Rianawati. 2014. *Implementasi Nilai-Nilai Karakter pada Mata Pelajaran PAI*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Mumpuni, Atikah. 2018. *Integrasi Nilai Karakter dalam Buku Pelajaran Analisis Konten Buku Teks Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Deepublish.
- Narwanti, Sri. 2011. *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Familia.
- Raco, J. R. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Pujianingsih. *Pengelolaan Stress Pada Anak Dengan Kesulitan Belajar Spesifik (ABBS)*, Jurnal Pendidikan Khusus Vol.7 No. 2.
- Wijayanti, Kurnia Eka. 2017. *Implementasi Pendidikan Luar Sekolah terhadap Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar*, Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga Vol. 9, No. 1.
- Dony Purnomo, Kompasiana.com dengan judul “Murid Menantang Guru, Bukti Gagalnya Pendidikan Karakter” diakses melalui <https://www.kompasiana.com/donypurnomo/5c610caebde575270b7c8535/murid-menantang-guru-bukti-gagalnya-pendidikan-karakter>
- Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 2 No 3 Tahun 2019 ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990 Jurnal Filsafat Indonesia | 124 FILSAFAT
- PENDIDIKAN KI HAJAR DEWANTARA (TOKOH TIMUR)

KONSTRUKSI KEKELUARGAAN (STUDI DI PONDOK PESANTREN MTs MA ASSALAM KUDUS)

Maftuh Ahmad

IAIN Kudus

ahmedatuh0@gmail.com

Abstrak

Sistem Pendidikan yang paling tertua di Indonesia adalah pondok pesantren. Banyak di era tatanan kehidupan baru (pasca pandemi), orang tua atau wali telah mempercayakan putra-putrinya ke pondok pesantren. Sebab dapat membantu dalam proses mendapatkan ilmu khususnya ilmu agama, pendidikan karakter, dan adat atau kebiasaan yang berbeda dengan sekolah umum khususnya pada sistem keluarganya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan memusatkan perhatian pada konstruksi sosial keluarga di Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam Kudus. Sehingga menggunakan pendekatan fenomenologi dengan mengikuti model pemikiran Peter L. Berger. Dengan hasil dari subyektifitas yang dibentuk oleh komunitas pesantren dengan berbagai tradisi pendidikan yang memang khas Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam. *Pertama*; Adaptasi dengan tradisi *Ikroman wa ta'dziman*. *Kedua*: Tradisi acara bersama masyarakat Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam. *Ketiga*: Tradisi tolong menolong antara masyarakat Assalam (Guru dan Santri pondok pesantren MTs MA). Sehingga terciptalah konstruksi keluarga di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam, yang erat memiliki rasa kebersamaan, kenyamanan dan persatuan.

Kata kunci : Pendidikan, Pondok Pesantren, Konstruksi, Keluarga

Abstract

The oldest education system in Indonesia is pondok pesantren. Many in the era of the New Order of life (post-pandemic), parents or guardians have entrusted their children to boarding schools. Because it can help in the process of getting knowledge, especially religious knowledge, character education, and customs or habits that are different from public schools, especially in the family system. The method used is a qualitative method with a case study approach, focusing on the social construction of kinship in Pondok Pesantren MTs MA NU

Assalam Kudus. So it uses a phenomenological approach by following the model of Peter L. Berger. With the result of subjectivity formed by the pesantren community with various educational traditions that are typical of Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam. First; adaptation to the tradition of Ikroman wa Ta'dziman. Second: the tradition of the event with the community of Educational Institutions boarding school MTs MA NU Assalam. Third: the tradition of helping each other between the people of Assalam (teachers and students of MTs Ma Islamic boarding school). So that the construction of kinship in educational institutions boarding school MTs ma NU Assalam, which closely has a sense of togetherness, comfort and unity.

Keywords : Education, Boarding School, Construction, family

PENDAHULUAN

Lembaga Pondok Pesantren dan lembaga Pendidikan Agama merupakan wadah komunitas santri untuk menuntut ilmu Agama Islam (*Ngaji*), juga tidak hanya menjadi lembaga yang terkhusus dengan keislaman tetapi juga mengandung makna keaslian (*indigenous*) (Madjid, 1997 : 3).

Menurut Azyumardi, setidaknya terdapat 3 unsur metamorfosis besar yang terjadi dan memakai dialektika lonjakan metamorfosis pesantren menjadi pengaruh yang logis, bagaimana pesantren menjawab tantangan zaman dan menguatkan eksistensi, metamorfosis pertama terjadi pada saat budaya pendidikan pesantren berdekatan dengan menggunakan bentuk pendidikan modern yang diperkenalkan Belanda melewati politik bermartabat, secara ketat serta responsif pesantren dapat menyesuaikan model modernisasi pendidikan tersebut, tanpa harus keluar berasal konvensionalitasnya.

Pada hakikatnya pengkajian ini memusatkan atensi pada dua bidang. Pertama, bidang intern pesantren, yaitu analisis yang menempatkan kiai menjadi pemangku kiprah sentral dalam proses metamorfosis serta modernisasi. Kedua, bidang peningkatan konstruksi sosial kekeluargaan antara masyarakat Assalam (guru pondok pesantren, guru MTs maupun MA dan santriwan-santriwatinya). Mempunyai rasa kekeluargaan, sebab adanya ikatan keluarga dari *Muassis* (pendiri) sehingga melalui kekeluargaan itu dapat berpengaruh ke lingkungan yang ada, diantara masyarakat Assalam dan menimbulkan kenyamanan, dan bergandengan seperti keluarga. Analisis- analisisnya mencoba untuk menanggapi pertanyaan berkenaan bagaimana Lembaga pendidikan memaknai, menkonstruksi dan menunjukkan kekeluargaan antara tenaga pendidikan dan santriwan-santriwati di bawah Lembaga tersebut? Dari uraian tersebut penulis hendak meneliti Konstruksi Kekeluargaan di Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam Kudus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis memusatkan perhatian pada konstruksi sosial kekeluargaan di Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam Kudus. Sehingga memakai pendekatan fenomenologi dengan mengikuti contoh pemikiran P.L. Berger. Berasal dari pengaggas ini peneliti berusaha mengamaati konstruksi kekeluargaan. Dengan memakai pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif yakni penelitian yg bertujuan untuk menguasai kejadian wacana apa yang dialami sang topik penelitian. Setidaknya ada 2 dasar

berasal preferensi; Pertama, penelitian ini menelaah wacana pengertian asal suatu aktivitas, tak terdapat hubungannya dengan nomor, tepatnya makna kembali pada aktivitas yang diidentifikasi menjadi konstruksi kekeluargaan. Kedua, penelitian ini berkaitan menggunakan sosial serta budaya. Karena kenyataannya tidak kebergantungan melainkan ditentukan keadaan yang mengelilinginya. Hubungannya dengan penelitian ini kegiatan yang dilaksanakan masyarakat Assalam (guru pondok pesantren, guru MTs maupun MA dan santriwan- santriwatinya) dengan kekhasannya tumbuh berawal dari dampak sosial dan budayanya.

HASIL PEMBAHASAN

Konsep “Konstruksi Sosial” telah disebutkan dalam goresan pena ini menunjukkan pada buku *“The Sosial Construction of Reality: a Treatise it’s the Sociology of Knowledge”* yang menjaadi karangan P.L Berger beserta Thomas Luckman. Berger ialah ahli sosiologi datang dari *New School for Sosial Reserach, New York*, sementara T. Luckman datang dari *University of Frankfurt*. Berger beranggapan bahwa masyarakat merupakan alokasi asal bangunan global, selama agama menguasai tempat spesifik pada alokasi itu. Rencana Berger berikutnya menyebutkan korelasi jarak antara kepercayaan serta konstruksi dunia (P.L Berger, 1973 : 13).

Berdasarkan Bergeer, kepercayaan merupakan komposisi kebudayaan yang dapat dimaknai sebagai bagian perjuangan insan untuk menghasilkan kosmos keramat, begitu pula memuat komponen konstruksi manusia. Dikarenakan, kepercayaan tidak sekedar perbuatan serta produk perbuatan. Empiris keanekaan senantiasa dibermacam- macami keadaan sosial dimana pengetahuan itu didapat, ditransfer maupun dianalisa. Maksudnya, manusia tidaka akan bisa mendapati empiris, melainkan dalam rangka prosedur sosial yang terlibat.

Pada *“The Sosial Construction of Reality: A Treatise it’s the Sociology of Knowledge”*, Berger dan Luckmann menyebutkan skema konstruksi sosial. Awalnya digamblangkan sebenarnya aktivitas kesehariaan sudah menunjukkan kejadian, bersamaan pemahaman yang membentuk sikap dalam kehidupan kesehariaan. Lalu akan menunjukkan kebenaran faktual yang mempunyai pemahaman subyektif saat diinterpretasikan sama individu-individu. Di bagian lainnya, aktivitas kesehariaanya merupaakan bagian global yang bermula dari anggapan dan kejadian-kejaidan individu (P.L. Berger, 1973 : 14). Dalam

pandangan menyinggung “Masyarakat menjadi kenyataan Objektif”, Berger menyebutkan sesungguhnya manusia secara bersamaan menghasilkan bagian lingkungan manusiawi.

Tiada kemungkinan, berkembang menjadi manusia pada kondisi pengasingan buat membuat suatu lingkungan manusiawi. Eksistensi manusia yang seorang diri sama halnya eksistensi pada kategori binatang. Makhluk hidup dengan terjalinya antara sesama dan fenomena ini tidak mungkin terlepas. Homo sapiens senantiasa, dan sekaligus pula, ialah homo socius (P.L. Berger, 1990 : 69).

Masyarakat seakan-akan empiris faktual menyebutkan pelembagaan pada dalamnya. Metode pelembagaan (*institutionalisasi*) dimulai oleh eksternalisasi yang digunakan berulang-ulang lalu tampak idealnya dan dipelajari beserta sehingga menghasilkan pembiasaan (*habitualisasi*). Peembiasaan yang telah berlanjur menampakkan pengendapan serta tradisi. Pengendapan dan tradisi selepas diwariskan ke keturunan sesudahnya dengan bahasa eksklusif. Hal ini ada peranan eksklusif pada pada tatanan kelembagaan, termasuk pada kaitannya dengan pembudayaan keahlian serta pewarisan keahlian tadi. Masyarakat merupakan realitas faktual juga menyiratkan keterlibatan legitimasi. Termasuk Legitimasi “objektifikasi makna taraf kedua”. Legitimasi memberikan yang akan terjadi definisi-definisi mutakhir yang berguna buat menggabungkan definisi-definisi yang telah dibagikan kepada prosedur kelembagaan yang berbeda. Fungsi legitimasi yakni buat menghasilkan objektifikasi pada “tingkat pertama” yg telah dilembagakan kemudian sebagai tersedia secara objektif serta lumrah secara subjektif (P.L. Berger, 1990 : 110).

Dalam hal ini, mengamati masyarakat dengan kejadian subjektif yang merinci bahwa empiris faktual diinteretasi secara subjektif personal. Prosedur dalam menafsiri itulah berlanjur internalisasi. Internalisasi yakni pengisapan balik empiris oleh manusia serta mengkonversikannya lagi bermula dari bentuk dunia faktual kepada bentuk kesadaran subjektif (P.L. Berger, 1990 : 14). Internalisasi berlanjur sepanjang hidup menyertakan sosialisasi, baik esensial maupun inferior. Pengenalan esensial yakni hal pertama yang dikerjakan individu dalam masa anak-anak. Menggunakan pengenalan itu menjadi komponen rakyat. Sedangkan sosialisasi inferior yakni proses berlanjutnya yang berpengaruh individu yang telah disosialisasikan ke bidang baru dunia objektif masyarakatnya (P.L. Berger, 1990 : 150).

Jika pelebagaan serta legitimasi artinya format faktual berasal kenyataan, lalu internalisasi ialah format subjektifnya. Pengkajian Berger berbicara, sesungguhnya perseorangan dilahirkan menggunakan pradisposissi ke sisi sosiaalitas serta sebagai komponen rakyat. Poin awal asal metode tersebut ialah internalisasi, merupakan bagian pengetahuan atau resepsi yang terus dari kejadian faktual sebagai pernyataan makna. Pencerahan perseorangan selagi internalisaasi menunjukkan berlanjurnyaa prosedur pengenalan.

Berger pada konsep konstruksi sosialnya mengambil dialektika Hegel dalam kumpulan teori, diantaranya ekssternalisasi, objektifasi dan internaalisasi. Berger berpendapat bahwa kontruksi sosial berlanjut dengan dialektik tersebut tadi. Pertama, sesungguhnya manusia membuat bentuk masyarakat. Kedua, sebaliknya sesungguhnya masyarakat yang merupakan manusia. Penyempurnaan berasal dari 2 usulan, sesungguhnya manusia menjadikan warga bersamaan warga merupakan manusia. sesungguhnya manusia mengambil fakta yang objektif pada masyarakat, menjadikan kejadian yg subjektif pada dalam dirinya. Dua pendapat awal masih digunakan dalam proposiisi ketiga, sehingga sebagai sebuah proposiisi ketiga yang paling lengkap (buatan).

Selanjutnya ini merupakan pemahaman Berger berkaitan arti dari 3 asas dialektik tersebut. "Externalization is the ongoing outpouring of human being into the world, both in the physical and the mental activity of men.... Objectivation is the attainment by the products of this activity (again both physical and mental) of a reality that confronts its original producers as a facticity external to and other than themselves.... Internalization is the reappropriation by men of this same reality, transforming it once again from structures of the objective world into structures of the subjective consciousness..."(P.L. Berger, 1990 : 14).

Eksternalisasi merupakan perbuatan mencurahkan kepribadian manusia secara berkesinambungan ke dalam dunia, baik dalam kegiatan jasmani ataupun kerohanian. Objektifasi berlangsung jika buatan dari kegiatan-kegiatan tersebut sudah menata suatu berita (maklumat) yang berkarakter eksternal. Internalisasi ialah pengisapan balik kenyataan terkandung sama manusia beserta memodifikasikannya sekaligus lagi berawal dari struktur global objektif ke pada bentuk pencerahan subjektif.

Konsep konstruksi sosial adalah perkembangan bermula dari pemasukan atau skema fenomenologi, yang berawal sebagaii bandingan atas konsep yang ada dalam ideal realitas sosial, yang dipelopori oleh Emile Durckheim. Konsep

konstruksi sosial, seperti yang berisi paradigma ideal realitas sosial berlebihan melebihi peran konstruksi yang dapat mengakibatkan kepribadian manusia ataupun "*external to and coversine fo the action*". Di segi lain, terdapat ideal pengertian sosial yang beramatan sebaliknya. Konsep aktivitas berada dalam ideal ini, sebagaimana berlebihan melebihi individu menjadi pelaku yang mempunyai kapabilitas guna memastikan aktivitas tersungkap dari konstruksi terluarnya. Manusia mempunyai kemandirian guna menampakkan pribadinya tanpa terbelenggu besertaan konstruksi dimana dia berada (Nurr Syam, 2005 : 35). Dengan melewati jamahan Hegel, yakni tesis, sintesis dan antitesis, Berger dapat mempertautkan kedua ideal itu (Nurr Syam, 2005 : 37).

Walaupun telah mengambil dialektika Hegel, Berger membagikan pemahaman yang sedikit berlainan dari pemahaman dialektika konvensional, terkhusus jika menerangkan saat kedua, objektifikasi telah ditafsirinya seolah-olah menjadi masa peralihan mengarah tahap berikutnya. Selanjutnya momen ketiga ini, internalisasi ditafsirkan sebagai halnya hanya antitesis. Dengan eksternalisasi, menurut Berger masyarakat merupakan komoditas manusia. Melewati objektifikasi, masyarakat dapat sebagai empiris suigeneriis, unik, kemudian dengan internalisasi, menjadikan manusia membentuk komoditas masyarakat (P.L Berger, 1990 : 14). Akan tetapi ketiga ini dapat dimengerti sebagaimana metode dialektika. Dialektika tersebut membagikan ikatan berbalasan (*interplay*). Serta bergerak secara berbarengan, adalah reaksi merentangkan keluar (eksternalisasi) seolah-olah seperti itu ada di luar (objektif) lalu bersamaan terdapat reaksi pengambilan ulang ke dalam (internalisasi) lalu objek yang ada pada luar terkandung seolah-olah terjadi pada diri ataupun realitas subyektif.

Analisa Konstruksi Kekeluargaan dalam Dialektika Barger

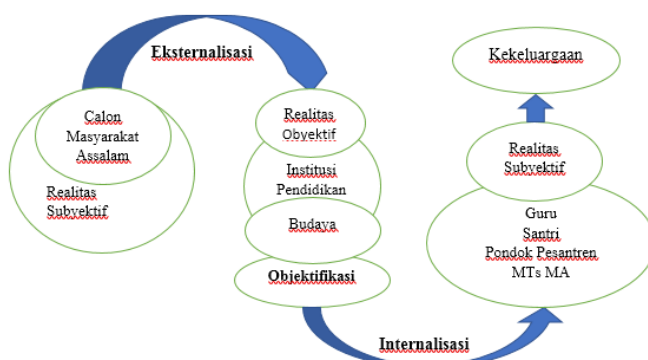
Metode Dialektika Konstruksi Sosial melewati jamahan Hegel, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis, Berger mendapatkan rancangan untuk mengkaitkalkan rancangan diantara subjektif dan objektif dengan memanfaatkan rancangan dialektika, yang disebut sebagaimana eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Eksternalisasi merupakan pembiasaan diri dengan dunia sosial budaya seperti halnya komoditas manusia, objektifikasi menjadikan hubungan sosial dalam dunia intersubjektif yang diinstitusikan ataupun merasakan reaksi institusionalisasi dan internalisasi menjadikan perseorangan mengrekognisi diri di pusat institusi-institusi sosial ataupun institusi sosial di mana perseorangan tersebut membentuk anggotanya.

Ketiga dialektika hal ini berjalan secara bersamaan, yakni suatu metode menarik keluar (eksternalisasi) sampai seolah-olah perkara itu ada di luar (objektif) dan akhirnya ada metode penarikan ulang ke dalam (internalisasi) sampai perkara yang ada di luar itu seolah-olah juga menjadikan perkara yang ada di dalam diri sendiri. Masyarakat ialah komoditas individu lalu berubah menjadi fakta objektif melewati metode eksternalisasi dan individu, dan pula komoditas masyarakat melewati metode internalisasi.

Serta memperhatikan masyarakat sebagai halnya metode yang berlanjur dalam tiga tidakan dialektis yang berbarengan (eskternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi) beserta kejadian yang berformat kognitif dan normatif, sampai yang katakan kefaktaan sosial itu, membentuk perkara konstruksi sosial komoditas masyarakat sendiri (*sosial constructions of reality*) dalam penjelajahan historinya pada masa silam, ke masa kini, dan menuju masa yang akan datang (P.L Berger, 1990 : 41).

Dari dua penjelasan termaktub, dialektika acuan konstruksi sosial Barger bisa diperoleh dengan struktur kekeluargaan masyarakat Assalam dalam dialektika. Pada analisa tersebut, penulis mencoba akan mewarnai pola pembentukan karakter masyarakat Assalam yang menghasilkan kekeluargaan, jika masyarakat berada dalam institusi Pendidikan Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam.

Analisnya: Konstruksi Kekeluargaan Masyarakat Assalam, Pola Analisa pembangunan kekeluargaan untuk fase ini menggunakan dialektika Barger, yakni : eksternalisaasi, objektifikasi, dan intrernalisasi pada bagian lembaga pendidikan pondok pesantren MTs MA NU Assalam.



Gambar 1, Peta konsep konstruksi kekeluargaan masyarakat Assalam.

a. Eksternalisasi

Komoditas aktivitas manusia nan memaknai komoditas sosial berawal dari eksternalisasi manusia. Eksternalisasi merupakan pencurahan kepribadian manusia yang berkelanjutan ke dalam dunia, maupun dalam kegiatan jasmani ataupun rohaninya. Eksternalisasi membentuk kelayakan antropologis: kehadiran manusia tidak akan mungkin berlanjut dalam dunia interioritas yang terselubung dan tanpa aksi. Sampai kehadirannya harus berkelanjutan melimpahkan kepribadiannya dalam kegiatan. Kewajiban antropologis itu berisi dalam kepenuhan biologis manusia yang tidak konstan guna berdekatan dengan dunia sekitar (P.L Berger, 1990 : 75).

Pembiasaan diri (bakal masyarakat akan sebagai masyarakat baru) ke dalam lingkungan sosial budaya pesantren selaku komoditas manusia, sebagai halnya banyak ahli pemberadaban telah berpandangan sesungguhnya pesantren merupakan subkultur pendidikan berasal asli dari Indonesia, kedatangan pesantren bersama budaya pendidikan yang dibangun di dalamnya sudah mewujudkan pesantren memiliki kekhasan beserta spesialisasinya, sampai pada sebuah pesantren pendirian karakter yang digunakan justru tidak hanya dalam bagian pengkajian formal yang berupa pengajian diniyah, tetapi semenjak penduduknya bangun tidur sampai tidur lagi.

Aktivitas manusia di bentuk oleh peradaban dengan tujuan membagikan konstruksi yang kuat, dengan sebelumnya tidak dimiliki secara biologis. Maka dari itu, menjadikan bentukan manusia, konstruksi-konstruksi tersebut bersifat tidak tetap dan selalu mempunyai peluang yang berubah. Oleh karenanya, peradaban senantiasa didapatkan dan diperoleh kembali oleh manusia. Berasas atas totalitas komoditas manusia, meskipun berbentuk material ataupun nonmaterial (P.L Berger, 1994 : 8).

Sedemikian itu, hal-hal yang ada didalam Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam, pesantren yang telah berumur 18 tahun ini, dipandang mulai asal teori dialektika penyusunan sosial, sampai-sampai masyarakat Assalam yang terakhir memasuki bagian sosial budaya pesantren, akan merasakan sesuai yang dikatakan Barger menjadi tahap eksternalisasi, dimana seseorang masyarakat baru yang mempunyai kefaktan subjektif, di bentuk dalam bagian sosial keluarga ataupun masyarakatnya sebelum menjadi sebagai masyarakat Assalam, harus berhadapan dan mengikuti keadaan menggunakan empiris diluar dirinya yaitu sosiokultural Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam.

Metode terluar yang sangat fundamental artinya dengan cara apa individu masyarakat baru ataupun poin masyarakat baru dengan kapabilitas bironya melaksanakan pembiasaan pada bacaan-bacaan aktivitas pesantren. Pada realitasnya masih memerlukan pembiasaan dan interpretasi sampai pada bagian ini, masyarakat baru masih membutuhkan banyak interpretasi atas empiris baru yang dihadapkan pada sebuah lingkungan besar budaya Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam.

Sebagai akibatnya di dalam lingkungan budaya peradaban di Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam. Hal ini masyarakat baru membiasakan, benang merahnya dari subjektivitas kepribadiannya mengetahui budaya-budaya sosial yang dimulai oleh masyarakat pesantren serta banyak sekali budaya peradaban yang special di Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam.

Pertama; Adaptasi menggunakan budaya *Ikroman wa ta'dziman*, merupakan deviriasi nilai dari penerapan dogmatis pada budaya pesantren dalam mengartikan cara atau metode mendapatkan ilmu manfaat dan berkah merupakan arahan etika yang mengkategorikan pada hasil memulyakan dan menghormati kepada pendidik yang lebih sepuh (tua), keluarga guru dan santri senior. perilaku ini berasal dari kata *Ikroman wa ta'dziman* sendiri yang memang berasal dari kata-kata bahasa Arab *ikroman* yang berarti memulyakan dan *ta'dziman* berarti menghormati.

Kedua: Budaya acara bersama masyarakat Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam. Hal ini merupakan upaya untuk selalu membiasakan, mempersatukan (*Ittihad*) satu visi misi yang tidak dimiliki oleh Lembaga Pendidikan lain, seperti upacara atau apel, rapat, PHBI, sholat berjamaah dan sebagainya.

Ketiga: Tradisi tolong menolong antara masyarakat Assalam (Guru dan Santri pondok pesantren MTs MA), karena merupakan salah satu kunci ikatan kekeluargaan, kegiatan santri yang mengamalkan pelayanan untuk para kiai, guru dan kesiapannya untuk mengosongkan zaman serta energi untuk keperluan lembaga pendidikan jika diharuskan sumbangsihnya serta dapat dikategorikan dalam kegiatan. Sebaliknya ketika santri membutuhkan pertolongan dengan ketidakfahaman dalam memahami suatu pelajaran, guru dengan siap siaga untuk memberikan pemahaman.

Sehingga para masyarakat baru berusaha menemukan tujuan dan cara pandangnya tentang kekeluargaan di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam yang subyektif, ke ranah budaya pesantren dengan tradisi kekeluargaan sebagai hasil dari pembangunan masa ke masa, menjadi seluruh eksternalisasi.

b. Objektifasi

Objektifasi ialah ikatan kemasyarakatan secara menyeluruh intersubjektif yang di institusikan ataupun merasakan reaksi institusionalisasi, maka saat objektifasi pada dialektika penyusunan ini merupakan saat tersusunnya kekeluargaan masyarakat Assalam. Objektifasi menjadikan kesinambungan dengan eksternalisasi, yang mana cara menempatkan suata hal kefaktaan berada disisi luar diri masyarakat Assalam sampai seolah-olah menjadi hal yang objektif. Reaksi tersebut berlaku jika telah terjadi penarikan kefaktaan keluar berawal dari perseorangan. Menjadi reaksi hubungan diri terhadap sosial budaya sehingga objektifasi menjadikan reaksi penyadaran akan letak diri di pusat hubungannya menggunakan lingkungan kemasyarakatannya.

Selaras dengan pendapat Berger, masyarakat merupakan komoditas manusia, berawal dari pada tanda eksternalisasi. Komoditas manusia, selepas berpengaruh di luar kepribadiannya, mengarahkan komoditas sebagai tindakan yang ada di luar kepribadiannya. Meskipun seluruh komoditas peradaban berawal dari kesadaran manusia, akan tetapi komoditas tidak hanya dapat disusup kembali begitu saja kepada pencerahan. Peradaban terletak di luar subjektivitas manusia, membuat lingkungannya sendiri. Lingkungan yang dibuat manusia mendapatkan tabiat empiris objektif (P.L Berger, 1994 : 11-12).

Maksud objektifasi tersebut, terkandung 2 kefaktaan, yakni empiris pribadi yang subjektif sebagai masyarakat Assalam, dan fakta lainya yang terletak di luar pribadi yang objektif sebagai konstruksi peradabana yang mengorganisasi memakai sekelompok pengadatan yang diperhatikan sebagai pintu gerbang, reaksi ini harus dilewati seluruh masyarakat sehingga menjadikan memiliki rasa kekeluargaan semuanya.

Objektifasi tindakan para masyarakat Assalam untuk memiliki rasa kekeluargaan, dilakukan pengadatan dengan sebanyak budaya yang telah difahami masyarakat Assalam melalui eksternaliasi, setidaknya ada 3 pengadatan yang menempel dalam bagian objektif ini, yang ketiganya diinstitusikan dengan budaya melewati setumpuk legalitas yang baik.

c. Internalisasi

Masyarakat dikenal sebagaimana kejadian subjektif dengan dibentuk secara internalisasi. Internalisasi merupakan interpretasi ataupun penafsiran pribadi secara khas atas kejadian objektif sebagaimana pengungkapan makna. Pendapat Berger dan Luckmann menyatakan bahwa internalisasi merupakan individu merekognisi pribadi dengan beberapa diskusi kemasyarakatan atau

lembaga kemasyarakatan dimana individu sebagai anggotanya. Internalisasi mengakibatkan penyesapan ulang kefaktaan terhadap manusia dan merubahnya kembali menjadi bentuk-bentuk lingkungan yang objektif masuk pada bentuk-bentuk kesadaran subjektif(P.L Berger, 1994 : 5).

Internalisasi menjadikan identifikasi pribadi sebagai masyarakat Assalam. Penarikan pribadi kembali ke lingkungan kemasyarakatan yang terletak diluar diri manusia ke diri manusia. Individualitas masyarakat bisa membuat asal bangunan melewati 2 fase sebelumnya dengan menggunakan eksternalisasi dan objektifikasi, internalisasi merupakan bagian terjadinya individualitas kultur yang telah di institusikan secara legalitas, dengan menggunakan tindakan pengadatan sebagaimana terjadinya hal yang diadatkan menjadi sedemikian objektif dan diterapkan sebagai fase indentitas yang di katakan menjadi masyarakat.

Berger serta Luckmann, sosialisasi esensial akan berhenti bilaman analisa tentang orang lain dan segala sesuatu yang menyertainya telah terbuat dan terpatri pada kesadaran perorangan. Sudah membentuk anggota masyarakat dan secara subjektif dapat mempunyai kepribadian dan lingkungan. Akan tetapi, internalisasi masyarakat, individualitas dan kefaktaan, tidak berlangsung sekali selesai serta cepat tuntas. Sosialisasi tidak pernah lengkap dan tidak pernah selesai. Suatu tersebut mengarahkan pada dua kejadian lain: pertama, dengan cara apa realitas yang telah diinternalisasi pada sosialisasi esensial diproteksi dalam keterjagaan. Kedua, bagaimana cara kemasyarakatan tersebut berlanjut. Ini terjadi kecondongan di masyarakat yang bagus peradabannya sederhana tidak akan terjadi sosialisasi susulan. Tapi, harus diketahui sesungguhnya elemen masyarakat mendapati klasifikasi kerja sampai berlangsung tingkat pembagian peradaban dan sosialisasi inferior(P.L Berger, 1990 : 198).

Berger serta Luckmann mengatakan dengan tegas sesungguhnya sosialisasi inferior merupakan sosialisasi sekelompok bagian dari lingkungan keinstitutional ataupun berlandaskan institusi. Cakupan capaian dan corak sosialisasi tersebut dipastikan sama kompleksitas distribusi kerja dan pembagian pengetahuan di masyarakat yang mempersamainya. Sosialisasi inferior menjadikan reaksi mendapatkan peradaban khusus selaras dengan peranannya dan sikap ditentukan berdasarkan distribusi kerja. Dari perpektif inilah ciri-ciri "masyarakat Assalam" atau menjadikan individualitas inferior yang dipakai pada dialektika awal ini, selaras pada penyusunan aksinya di sebuah kefaktaan objektif pesantren yang terinstitutional dan didekati dalam kenyataan internal subjektif pribadi masyarakat beserta hasil mempunyai rasa kekeluargaan yang kuat.

SIMPULAN

Konsep “Konstruksi Sosial” telah disebutkan dalam goresan pena ini menunjukkan pada buku *“The Sosial Construction of Reality: a Treatise it’s the Sociology of Knowledge”* yang telah prakasai Berger beserta Luckmaan. P.L Berger merupakan ahli sosial begitu juga dengan Thomas Luckman. Berger beranggapan bahwa masyarakat merupakan alokasi asal bangunan global, selama agama menguasai tempat spesifik pada alokasi itu.

Reaksi struktur-struktur didapat dari eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Eksternalisasi merupakan percurahan kepribadian manusia yang berkelanjutan ke dalam dunia, maupun dalam kegiatan jasmani ataupun rohaninya. Objektifikasi merupakan ikatan kemasyarakatan secara menyeluruh intersubjektif yang di institusikan ataupun merasakan reaksi institusionalisasi. Internalisasi merupakan interpretasi ataupun penafsiran pribadi secara khas atas kejadian objektif sebagaimana pengungkapan makna.

Sebagai akibatnya di dalam lingkungan budaya peradaban di Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam. Hal ini masyarakat baru membiasakan, benang merahnya dari subjektifitas kepribadiannya mengetahui budaya-budaya sosial yang dimulai oleh masyarakat pesantren serta banyak sekali budaya peradaban yang special di Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam. *Pertama:* Adaptasi menggunakan budaya *Ikroman wa ta’dziman*. *Kedua:* Budaya acara bersama masyarakat Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam. *Ketiga:* Budaya tolong menolong antara masyarakat Assalam (Guru dan Santri pondok pesantren MTs MA). Sehingga terciptalah konstruksi kekeluargaan di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren MTs MA NU Assalam, yang erat memiliki rasa kebersamaan, kenyamanan dan persatuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi, Azra. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. terj. Hasan
- Basari dari *The Sosial Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Jakarta: LP3S. 1990.
- _____. dan Thomas Luckmann. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (diterjemahkan dari buku asli *Sacred Canopy* oleh Hartono). Jakarta: Pustaka LP3ES. 1994.
- _____. *The Social Reality of Religion*. England: Penguin Books Ltd. Harmondsworth. Middlesex. 1973.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina. 1995.
- _____. *Bilik-bilik Pesantren: sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina. 1997.
- Marselina, dkk. "Konstruksi Kekeluargaan, Idealisme Pekerja Pers dan Rasa memiliki pada Jurnalis Femina Group". *Jurnal Audience*. Vol. 2, No.1. 2019.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syam Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS. 2005.

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dengan Metode Inseri

Maulana Achmad Hasan - Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus
maulanaachmadhasan35@gmail.com

Mualimul Huda - Institut Agama Islam Negeri Kudus
mualimulhuda@iainkudus.ac.id

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama dengan metode inseri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama dengan metode inseri. (2) faktor pendukung dan penghambat pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama dengan metode inseri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan penelitian lapangan (field research). Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, waka kurikulum, guru pendidikan agama Islam, dan peserta didik. Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama dengan metode inseri yaitu: a) tahap perencanaan, guru harus menyiapkan materi yang ingin diajarkan kepada peserta didik. b) tahap pelaksanaan, guru PAI mengajar di kelas dengan materi sesuai KD (Kompetensi Dasar) dan buku ajar lalu menyisipkan nilai karakter moderasi beragama sesuai di RPP Abad 21 berbasis nilai karakter profil pelajar pancasila (PPP) dan nilai moderasi beragama sesuai Permendikbud NO. 37 Tahun 2018 serta guru menyisipkan nilai-nilai moderasi beragama yang lainnya di materi yang sedang diajarkan tersebut dengan cara prolog serta mengkolaborasi dengan metode-metode pembelajaran. c) tahap evaluasi pembelajaran. (2) Faktor pendukung pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama dengan metode inseri sebagai berikut: a) Organisasi sekolah merupakan sistem 1 komando. b) Guru Pendidikan Agama Islam kompeten dan paham mengenai materi moderasi beragama. c) Fasilitas yang memadai, adapun faktor penghambatnya sebagai berikut: a) guru harus melakukan persiapan yang matang sebelum pembelajaran dimulai. b) sosialisasi moderasi beragama belum maksimal di sekolah dari Kemenag. c) pengaruh media sosial. d) pengaruh pergaulan di luar sekolah. e) keberagaman asal usul sekolah peserta didik.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Metode Inseri, Pendidikan Agama Islam.

Abstract

The focus of this research is learning Islamic religious education based on religious moderation with the insertion method. The purpose of this study was to determine: (1) Islamic religious education learning based on religious moderation with the insertion method. (2) the supporting and inhibiting factors for learning Islamic religious education based on religious moderation with the insertion method. This research is qualitative research, using field research. The subjects of this study were school principals, waka curriculum, Islamic religious education teachers, and students. The results of this study are: (1) the implementation of Islamic religious education learning based on religious moderation with the insertion method, namely: a) the planning stage, the teacher must prepare the material to be taught to students. b) the implementation stage, PAI teachers teach in class with material according to KD (Basic Competence) and textbooks and then insert the character values of religious moderation according to the 21st Century RPP based on the character values of the Pancasila student profile (PPP) and the value of religious moderation according to Permendikbud NO. 37 of 2018 and the teacher inserts other values of religious moderation in the material being taught by means of a prologue and collaborating with learning methods. c) the learning evaluation stage. (2) The supporting factors for learning Islamic religious education based on religious moderation with the insertion method are as follows: a) The school organization is a 1 command system. b) Islamic Religious Education teachers are competent and understand the material of religious moderation. c) Adequate facilities, while the inhibiting factors are as follows: a) teachers must make thorough preparations before learning begins. b) socialization of religious moderation has not been maximized in schools from the Ministry of Religion. c) the influence of social media. d) the influence of relationships outside of school. e) diversity of school origins of students.

Keywords: *Religious Moderation, Insertion Method, Islamic Religious Education.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beraneka ragam suku, budaya dan bahasa yang merupakan suatu kekayaan bangsa dibanding dengan bangsa yang lain di belahan dunia. Keragaman tersebut dapat meneguhkan negara Indonesia sebagai suatu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Indonesia yang multikultural merupakan *blessing in disguise* dan tidak banyak dimiliki oleh negara lain. Ragam etnis, suku, agama dan bahasa terdistribusi di berbagai wilayah dan kekhasan budaya terlihat di berbagai daerah pelosok Indonesia, bahkan dalam berbagai etnis suku mempunyai logat bahasa tersendiri. (Kemenag RI, 2019, 2).

Jika bisa dikelola secara maksimal keanekaragaman bangsa Indonesia akan menjadi kebanggaan tersendiri dan menjadi keunikan dan kekuatan bangsa Indonesia tersendiri. Selain itu pada saat bersamaan akan dapat menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia jika keanekaragaman tidak dikelola dengan baik seperti perpecahan dan persatuan yang dapat mengganggu tatanan sosial di masyarakat karena gesekan antar etnis, suku, dan agama. (Darlis, 2017, 2).

Beberapa dekade terakhir ideologi transnasional juga turut mewarnai antar umat beragama yang dapat menimbulkan efek luar biasa bagi masyarakat, disinilah peran pendidikan moderasi beragama (wasathiyah) menjadi penting agar dapat meredam isu-isu yang dapat menimbulkan keretakan tatanan masyarakat. Pendidikan di Indonesia khususnya Pendidikan Agama Islam menjadi aspek strategis dalam persoalan tersebut. Pendidikan Agama Islam bukan hanya untuk transfer ilmu pengetahuan dan pemahaman nilai agama, sosial, budaya saja tetapi juga proses cara implementasi nilai-nilai keberagamaan kepada masyarakat lewat dengan cara Pendidikan Agama Islam yang mengajarkan moderasi beragama untuk masyarakat Indonesia yang multikultural. (Azyumardi, 2007, 5).

Pada UU Sisdiknas 20 tahun 2003 dijelaskan mengenai pendidikan yang mengajarkan moderasi beragama, yaitu pada pasal 4, bahwa : 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. (SISDIKNAS, 2003)

Ada dua pendekatan besar dalam pemecahan masalah moderasi beragama di Indonesia dari segi pendidikan multikultural yaitu dengan *Curricular approach* dan *Whole school approach*. (Raihani, 2016, 143). *Curricular approach* merupakan sebuah pendekatan yang memberi penekanan penting pada pemuatan *knowledge* dan *values* dari keberagaman dan bagaimana membentuk perspektif terhadap keberagaman.

Biasanya dalam pendekatan ini, konsep dan kenyataan perbedaan masyarakat dalam multikulturalisme dimasukkan ke dalam disiplin-disiplin ilmu sosial dan humaniora. Cara memasukkan konsep dan kenyataan multikulturalisme ini disebut *infusion*. Salah satu kelemahan *infusion* ialah mudah terperangkap dalam penyelipan yaitu menyelipkan nilai-nilai multikultural tanpa melakukan perubahan substansial terhadap kurikulum. Hal ini dapat menimbulkan kontradiksi dan kebingungan dalam kurikulum yang berakibat pesan dari nilai-nilai multikultural dapat terganggu. (Faozan, 2020, 224).

Sedangkan pendekatan *whole approach* adalah pandangan pendidikan multikultural cara melaksanakan yang melibatkan semua elemen sekolah sebagai sebuah organisasi. Asumsi pendekatan ini bahwa pendekatan multikultural sebagai pendidikan nilai tidak dapat dilakukan secara parsial. Halstead menyatakan tidak bisa menganggap remeh pengalaman-pengalaman *non-classroom* yang tidak menjadi bagian dari kurikulum formal dalam pembentukan watak dan perilaku anak. (Halstead, 1996, 14) Selanjutnya Banks menyatakan bahwa "*multicultural education views the school as a social system that consist of highly interrelated part and variables*. (Banks, 2010, 30) Artinya pendidikan multikultural memandang sekolah sebagai sistem sosial yang terdiri dari bagian dan variabel yang sangat saling terkait.

Pendidikan Agama Islam tidak dapat berdiri sendiri untuk mengajarkan cara beragama yang moderat, namun menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang multikultural. Beberapa strategi Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan moderasi beragama kepada masyarakat Indonesia dilihat berbagai aspek yakni: a) aspek guru, dalam penelitian PPIM UIN Jakarta tahun 2016, ditemukan bahwa guru-guru yang memiliki wawasan yang luas tentang keislaman dan kebangsaan adalah guru-guru yang memiliki *basic* pendidikan pesantren atau yang memiliki modal studi keislaman yang kuat agar dapat

mengawal dan mengaplikasikan moderasi beragama kepada murid-muridnya. (Syarifudin, 2018, 374): b) aspek buku ajar, untuk mendukung penanaman moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Islam buku ajar perlu dikembangkan untuk memperkuat wawasan keislaman dan keindonesiaan. c) aspek kegiatan ekstrakurikuler, dalam riset ditemukan beberapa praktik terbaik seperti di Cirebon, dengan menggandeng komunitas yang *concern* pada isu-isu keislaman dan kebangsaan. (Faozan, 2020, 228)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, waka kurikulum, guru pendidikan agama Islam, dan peserta didik. Adapun sumber primer didapat dari observasi non partisipan di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dan wawancara terstruktur kepada kepala sekolah, kepala bidang kurikulum, guru pendidikan agama Islam, dan peserta didik. Sedangkan sumber sekunder didapat dari dokumen-dokumen kurikulum PAI, buku ajar PAI, dokumen pelaksanaan kurikulum pendidikan agama Islam dalam hal ini sebuah observasi, silabus, RPP, hasil belajar peserta didik dan sejarah sekolah.

HASIL DAN ANALISIS

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama dengan Metode Inseri

Beberapa cara SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dalam penerapan nilai-nilai moderasi beragama kepada peserta didik seperti berikut: a) menyisipkan nilai-nilai moderasi beragama di setiap mata pelajaran di sekolah terutama Pendidikan Agama Islam (PAI). b) sholat dhuhur berjamaah dan sholat dhuha dilanjut dengan dzikir bersama. c) upacara bendera setiap hari senin untuk memupuk rasa kebangsaan bagi peserta didik. d) doa bersama atau istighosah sebelum tes dan ujian sekolah. e) kegiatan ekstrakurikuler. f) bakti lingkungan ketika hari besar Islam, membantu bencana alam di sekitar, zakat fitrah, santunan anak yatim-piatu dan dhuafa di warga sekitar, mengadakan qurban di hari raya idul adha masih. Sehingga tanpa terasa kita telah penerapan nilai-nilai moderasi beragama kepada peserta didik, guru, dan warga sekitar sekolah. (Ma'ruf, 2022)

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sekarang menggunakan RPP abad 21 berbasis nilai karakter profil pelajar pancasila (PPP) dan nilai moderasi beragama sesuai dengan Permendikbud NO. 37 Tahun 2018. Pada RPP tersebut terdapat nilai karakter profil pelajar pancasila dan karakter moderasi beragama. Adapun yang dimaksud profil pelajar pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai belajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila yaitu a) Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. b) berkebhinekaan global. c) Gotong royong. d) Mandiri. e) Bernalar kritis. f) Mandiri. Selain itu adapun nilai karakter moderasi beragama di RPP sesuai dengan Permendikbud NO. 37 Tahun 2018 adalah komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, penerimaan terhadap tradisi. (Ridho Ardhi, 2022).

Adapun ujung tombak dalam penerapan nilai-nilai moderasi beragama di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus adalah seorang guru Pendidikan Agama Islam karena ia memiliki kualitas penyampaian pendidikan agama kepada peserta didik secara menyeluruh dan dapat mempengaruhi pola pikir peserta didik dalam beragama di lingkungan sekitar. Salah satu cara penerapan nilai-nilai moderasi beragama adalah menggunakan metode insersi kepada peserta didik yaitu dengan menyisipkan intisari materi nilai-nilai moderasi beragama dalam penyampaian setiap materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Beberapa tahap dalam pelaksanaan metode insersi penerapan nilai-nilai moderasi beragama yaitu: (Ulin Nuha, 2022). *Pertama*, tahap perencanaan. Dimana guru harus menyiapkan materi yang ingin diajarkan kepada peserta didik seperti melihat KD (Kompetensi Dasar) di RPP dan buku ajar yang mau diajarkan. *Kedua*, tahap pelaksanaan. Guru PAI mengajar di kelas dengan materi misalnya KD 1.5 kelas X dengan tema terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam dan pada buku ajar LKS kelas X Bab 2 menutup aurat, lalu guru menyisipkan nilai karakter moderasi beragama yang sudah ada sesuai di RPP Abad 21 berbasis nilai karakter profil pelajar pancasila (PPP) dan nilai moderasi beragama sesuai dengan Permendikbud NO. 37 Tahun 2018 yaitu: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi. Selain itu guru juga bisa menyisipkan nilai-nilai moderasi beragama yang lainnya di materi yang sedang diajarkan. tersebut seperti menyisipkan sikap *Tasamuh* (toleransi), *Tahadhdhur* (berkeadaban) dan *Musawah* (persamaan) dengan cara prolog (pengantar cerita) pada materi tersebut, serta mengkolaborasikan dengan metode-metode pembelajaran seperti metode diskusi, demonstrasi dan *problem solving*. *Ketiga*, tahap evaluasi pembelajaran. Guru PAI mengevaluasi sejauh mana keberhasilan materi

yang telah diajarkan kepada peserta didik dengan cara *post test* atau dengan bertanya kepada peserta didik tentang materi yang telah diajarkan di akhir pembelajaran. (Ulin Nuha, 2022).

Berdasarkan pengamatan observasi pembelajaran PAI di kelas X dan kelas XI dijelaskan proses implementasi nilai-nilai moderasi beragama dengan metode insersi sebagai berikut:

- a. Pengamatan observasi di kelas X IPS 5 saat pembelajaran PAI KD 1.5 dengan tema terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam dan pada buku ajar LKS kelas X Bab 2 menutup aurat.

Guru terlebih dahulu menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang muslim/muslimah dalam berpakaian seperti: 1) menutup aurat, aurat lelaki menurut ahli hukum ialah daripada pusat hingga ke lutut. Aurat wanita pula ialah seluruh anggota badannya, kecuali wajah, telapak tangan dan tapak kakinya. 2) *Tidak menampakkan tubuh*. 3) pakaian tidak ketat. 4) tidak riya'. 5) memilih warna yang sesuai. 6) tidak memakai sutera. Di samping menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan seorang muslim/muslimah dalam berpakaian.

Selanjutnya guru menyisipkan nilai moderasi beragama sesuai dengan Permendikbud NO. 37 Tahun 2018 seperti: Penerimaan tradisi, bahwa orang muslim/muslimah harus menunjukkan tradisi perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam serta menjauhi larangan-larangan dalam berpakaian seperti memakai pakaian berbahan sutera seperti hadis Rasulullah SAW bersabda "*Janganlah kamu memakai sutera, sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat*". Toleransi, seorang muslim/muslimah harus bersikap saling menghargai dan menghormati terhadap sesama manusia terutama dalam hal berpakaian. Misalnya tidak boleh riya' berpakaian terhadap orang lain yang pakaiannya tidak bagus serta tidak boleh riya' memakai aksesoris pakaian seperti memakai perhiasan gelang, cincin dan kalung yang berlebihan.

Selain itu guru juga bisa menyisipkan nilai-nilai moderasi beragama yang lainnya seperti: *Tasamuh* (Toleransi), saling menghargai terhadap sesama dan tidak membeda-bedakan teman dalam hal berpakaian semisal teman yang berpakaian bagus atau pakaian yang jelek serta memakai aksesoris perhiasan sewajarnya saja. *Tahadhdhur* (berkeadaban), apabila memakai baju, celana atau seumpamanya, mulailah sebelah kanan

seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan *Musawah* (persamaan), bahwa setiap manusia itu hakikatnya sama tidak boleh memandang rendah seseorang berdasarkan pakaian apa yang ia kenakan.

Setelah penyampaian materi selesai kemudian guru melakukan tahap evaluasi dengan cara *post test* atau dengan bertanya kepada peserta didik tentang materi yang telah diajarkan di akhir pembelajaran tersebut.

- b. Pengamatan observasi di kelas XI Bahasa saat pembelajaran PAI KD 1.5 dengan tema meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat *syaja'ah* (berani membela kebenaran) dalam mewujudkan kejujuran dan pada buku ajar LKS kelas bab 2 kepribadian seorang muslim.

Guru menyampaikan bahwa *syaja'ah* adalah keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan hal yang benar secara bijaksana dan terpuji. Sikap *syaja'ah* menjadi salah satu ciri yang perlu dimiliki oleh orang yang istiqomah di jalan Allah. Mereka akan berani menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Hal ini karena mereka yakin dengan pertolongan Allah. Ada dua macam *syaja'ah* yaitu: 1) *Syaja'ah* Harbiyyah, bentuk keberanian yang tampak secara langsung. misalnya keberanian kaum muslimin zaman dahulu untuk berjihad (perang) demi membela agama. 2) *Syaja'ah* Nafsiyyah, keberanian secara mental seseorang berani dalam menghadapi bahaya dan penderitaan jika hal tersebut demi menegakkan keadilan.

Adapun implementasi sikap *syaja'ah* sebagai berikut: 1) *Quwwatul Ihtimal* (daya tahan yang besar), ketika ia mampu bersabar dan siap untuk menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya, ataupun yang lainnya ketika berjuang di jalan Allah SWT. 2) *Ash-Sarahah Fil Haq* (terus terang dalam kebenaran), berani untuk berterus terang dalam kebenaran menjadi salah satu implementasi lainnya dari sifat *syaja'ah* (berani). 3) *Kitmanu As-Sirri* (memegang Rahasia), dalam memegang rahasia, tentunya butuh keberanian pada diri kita. 4) *Al-I'tiraf Bil Khatha* (mengakui kesalahan). 5) *Milku An-Nafsi 'Inda Al-Ghadhabi* (menguasai diri saat marah), ketanggahan dalam melawan hawa nafsu dan amarah, meskipun dalam kondisi yang emosional.

Selanjutnya guru menyisipkan nilai karakter moderasi beragama yang sudah ada sesuai di RPP Abad 21 berbasis nilai karakter profil

pelajar pancasila (PPP) dan nilai moderasi beragama sesuai dengan Permendikbud NO. 37 Tahun 2018 seperti: Anti kekerasan, sebagai umat Islam kita harus bisa menjaga hawa nafsu dan amarah ketika dalam kondisi emosi serta tidak boleh melakukan kekerasan terhadap siapapun walaupun orang tersebut salah. Penerimaan terhadap tradisi, Allah SWT mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi berbagai tantangan dalam hidup seperti memperjuangkan kebenaran, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan.

Selain itu guru juga bisa menyisipkan nilai-nilai moderasi beragama yang lainnya seperti: *i'tidal* (konsisten, tegas dan berlaku adil), bahwa umat Islam harus bersikap tegas dalam membela kebenaran serta mempunyai rasa takut kepada Allah SWT selama seseorang yakin bahwa yang dilakukannya dalam rangka menjalankan perintah Allah, maka orang tersebut tidak takut kepada siapapun kecuali Allah SWT dan *Tahadhdhur* (berkeadaban), dalam menyampaikan kebenaran kita harus menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter yang tidak ragu-ragu dalam menyampaikan kebenaran dan integritas sebagai umat Islam.

Setelah penyampaian materi selesai kemudian guru melakukan tahap evaluasi dengan cara *post test* atau dengan bertanya kepada peserta didik tentang materi yang telah diajarkan di akhir pembelajaran tersebut.

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki beberapa peran yang penting dalam lingkup pendidikan nasional terutama dalam penerapan nilai-nilai moderasi beragama kepada peserta didik meliputi: (Ulin Nuha, 2022).

- a. *Konservator* (pemelihara) sistem nilai yang merupakan sumber dari norma kedewasaan. Dalam upaya membangun moderasi beragama berdasarkan peran *konservator*, guru adalah pihak yang memelihara nilai moderasi beragama sesuai dengan nilai-nilainya yang ada. Toleransi beragama, nilai-nilai keadilan, seimbang, kesederhanaan, kesatuan dan persaudaraan serta nilai moderasi agama lainnya patut untuk dipelihara di lingkungan sekolah. Hal tersebut dapat ditanamkan kepada peserta didik dengan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin, seperti kumpul bersama, mengingatkan pentingnya moderasi agama secara langsung sebelum memulai kelas, serta menyisipkan nilai-nilai moderasi beragama di setiap materi pelajaran di sekolah.

- b. *Inovator* (pengembang), sistem nilai ilmu pengetahuan. inovasi-inovasi dapat dilakukan untuk membangun moderasi beragama. Satu model pembelajaran tidak dapat diterapkan di semua situasi, kondisi, dan lingkungan. Perlu adanya penyesuaian sehingga dapat diterima oleh lingkungan yang ada. Seperti halnya penerapan sikap toleransi beragama kepada peserta didik, sehingga toleransi dapat ditingkatkan dan diskriminasi dapat dihilangkan. Inovasi juga dapat ditujukan untuk penguatan karakter religius dan nasionalisme siswa. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti halnya perayaan hari-hari besar dengan melibatkan seluruh pihak. Secara ringkas bahwa inovasi-inovasi tersebut dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan, perubahan tingkah laku, ataupun yang lainnya.
- c. *Transmitter* (penerus) sistem nilai yang ada kepada peserta didik. Dalam peran ini, seorang guru dapat bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-harinya. Hal tersebut kemudian dapat dicontoh oleh seluruh siswa yang ada di lingkungan sekolah. Selain itu, seorang guru juga dapat menjadi seorang motivator dan pembimbing. Memotivasi dan membimbing siswa agar dapat menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dapat dilakukan baik ketika pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Faktor komunikasi dengan semua pihak menjadi hal penting yang harus dijaga dan ditingkatkan.
- d. *Transformator* (penerjemah) sistem nilai yang ada melalui penerapan dalam diri dan perilakunya, yang kemudian diaktualisasikan dalam proses interaksi dengan siswa. Guru sebagai Transformator berperan untuk menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama kepada siswa. Proses penyampaiannya dapat dilakukan secara verbal (penjelasan secara langsung) ataupun non-verbal (melalui serangkaian tingkah lakunya). Seorang guru menjadi figur ataupun *role model* dalam segala hal. Seperti halnya dalam berinteraksi dengan orang lain, menyikapi kejadian-kejadian tertentu, serta memahami ataupun menafsirkan informasi yang masih dipertanyakan kebenarannya. Guru dalam menjadi seorang figur sangat mencontohkan apa yang seharusnya dilakukan peserta didik untuk menjadi siswa yang paham akan sikap moderat dan memberi contoh akan nilai-nilai moderasi beragama. Peran transformator mampu memberikan pemahaman dan gambaran kepada siswa berkaitan dengan urusan agama dan sosial.

- e. *Organizer* (penyelenggara) terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggung jawabkan. Seluruh kegiatan di lingkungan sekolah menjadi tanggungjawab seorang guru. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dieksekusi perlu untuk tetapi memperhatikan nilai-nilai moderasi beragama. Seperti halnya perayaan hari besar, kerja bakti, pembinaan, ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam kelas, kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dengan diskusi, mengacak tempat duduk siswa agar tidak terlalu memilih teman sebangku, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Partisipasi dari seluruh pihak sangat diperlukan untuk dapat menyukseskan setiap kegiatan yang diselenggarakan. Pengorganisasian yang beragam yang dilaksanakan pada dasarnya dalam rangka untuk menjalankan perannya dalam membangun moderasi beragama. Inovasi-inovasi yang ada juga memberikan pengaruh terhadap pengorganisasian tersebut. (Ulin Nuha, 2022).

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi beragama dengan metode insersi

Faktor pendukung pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama dengan metode insersi: a) Organisasi sekolah merupakan sistem 1 komando. b) Guru Pendidikan Agama Islam kompeten dan paham mengenai materi moderasi beragama. c) Fasilitas yang memadai, di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus berbagai fasilitas pembelajaran sangatlah memadai baik dari ruang kelas, wifi di setiap kelas, dan laboratorium agama digital. Sehingga guru Pendidikan Agama Islam dapat leluasa memadukan kegiatan pembelajaran baik secara *offline* maupun *online dalam* rangka penerapan nilai-nilai moderasi beragama kepada peserta didik. (Ma'ruf, 2022)

Selanjutnya ada beberapa faktor penghambat pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama dengan metode insersi seperti: a) guru harus melakukan persiapan yang matang sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dalam menerapkan metode insersi. b) pengaruh media sosial, ketika peserta didik sudah diajarkan tentang nilai-nilai moderasi beragama di sekolah malah sering membuka konten-konten dari ustadz radikal sehingga dapat mempengaruhi pola pikir peserta didik tentang cara beragama yang sopan, santun, dan beradab baik di sekolah maupun di masyarakat. c) pengaruh pergaulan di luar sekolah. d) keberagaman asal usul sekolah peserta didik. (Ulin Nuha, 2022).

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan faktor penghambat pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama dengan metode insersi adalah:

- a. Faktor pendukung pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama dengan metode insersi implementasi nilai-nilai moderasi beragama dengan metode insersi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus adalah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah.
- b. Faktor penghambat pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama dengan metode insersi adalah guru harus memiliki persiapan yang matang dalam menerapkan metode insersi sebelum kegiatan pembelajaran di kelas dimulai, pengaruh media sosial, pengaruh pergaulan di luar sekolah, dan keberagaman asal usul sekolah peserta didik.

KESIMPULAN

1. Implementasi nilai-nilai moderasi beragama dengan metode insersi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Pada umumnya kalau kita teliti lebih lanjut di kurikulum dan buku ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) ada beberapa nilai-nilai moderasi beragama yang sudah ditulis di RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan buku ajar LKS tersebut.
 - a. Beberapa cara yang dilakukan SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dalam penerapan nilai-nilai moderasi beragama kepada peserta didik seperti berikut: 1) menyisipkan nilai-nilai moderasi beragama di setiap mata pelajaran di sekolah terutama Pendidikan Agama Islam (PAI). 2) sholat dhuhur berjamaah dan sholat dhuha dilanjut dengan dzikir bersama. 3) upacara bendera setiap hari senin untuk memupuk rasa kebangsaan bagi peserta didik. 4) doa bersama atau istighosah sebelum tes dan ujian sekolah. 5) kegiatan ekstrakurikuler. 6) kegiatan hari besar Islam seperti membantu bencana alam di sekitar, zakat fitrah, santunan anak yatim-piatu dan dhuafa di warga sekitar, mengadakan qurban di hari raya idul adha masih. Sehingga tanpa terasa kita telah penerapan nilai-nilai moderasi beragama kepada peserta didik, guru, dan warga sekitar sekolah.

- b. Beberapa tahap dalam pelaksanaan metode insersi nilai-nilai moderasi beragama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yaitu: 1) tahap perencanaan. Dimana guru harus menyiapkan materi yang ingin diajarkan kepada peserta didik seperti melihat KD (Kompetensi Dasar) di RPP dan buku ajar yang mau diajarkan. 2) tahap pelaksanaan, guru PAI mengajar di kelas dengan materi sesuai KD (Kompetensi Dasar) dan buku ajar LKS lalu menyisipkan nilai karakter moderasi beragama yang sudah ada sesuai di RPP Abad 21 berbasis nilai karakter profil pelajar pancasila (PPP) dan nilai moderasi beragama sesuai dengan Permendikbud NO. 37 Tahun 2018 yaitu: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi. Selain itu guru juga bisa menyisipkan nilai-nilai moderasi beragama yang lainnya di materi yang sedang diajarkan tersebut dengan cara prolog serta mengkolaborasikan dengan metode-metode pembelajaran seperti metode diskusi, demonstrasi dan *problem solving* di kelas. 3) tahap evaluasi pembelajaran, guru PAI mengevaluasi sejauh mana keberhasilan materi yang telah diajarkan kepada peserta didik dengan cara *post test* atau dengan bertanya kepada peserta didik tentang materi yang telah diajarkan di akhir pembelajaran.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi nilai-nilai moderasi beragama dengan metode insersi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus:
 - a. Faktor pendukungnya sebagai berikut: 1) Organisasi sekolah merupakan sistem 1 komando. 2) Guru Pendidikan Agama Islam kompeten dan paham mengenai materi moderasi beragama. 3) Fasilitas yang memadai, di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus berbagai fasilitas pembelajaran sangatlah memadai baik dari ruang kelas, wifi di setiap kelas, dan laboratorium agama digital. Sehingga guru Pendidikan Agama Islam dapat leluasa memadukan kegiatan pembelajaran baik secara *offline* maupun *online* dalam rangka penerapan nilai-nilai moderasi beragama kepada peserta didik.
 - b. Faktor penghambatnya sebagai berikut: 1) guru harus melakukan persiapan yang matang sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dalam menerapkan metode insersi. 2) pengaruh media sosial, ketika peserta didik sudah diajarkan tentang nilai-nilai moderasi beragama di sekolah malah sering membuka konten-konten dari ustadz radikal sehingga dapat mempengaruhi pola pikir peserta didik tentang cara beragama yang sopan, santun, dan beradab baik di sekolah maupun di masyarakat. 3) pengaruh pergaulan di luar sekolah. 4) keberagaman asal usul sekolah peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Ma'ruf. (2022) *Wawancara*.
- Azra Azyumardi. (2007). *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia, Seri Orasi Budaya*. Yogyakarta: Impulse.
- Banks James A. (2010). *Multicultural Education*. New Jersey: Wiley.
- Darlis. (2017). Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural, *Jurnal: Rausyanfikir* 13, No. 2.
- Didin Syarifudin. (2018). *Potret Guru Agama*. Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media,
- Erwin Ridho Ardhi. (2022.). *Wawancara*.
- Faozan Ahmad. (2020). Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam Untuk Masyarakat Multikultural. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 16, No. 2.
- Halstead J. Mark. (1996). *Values and Values Education in School*. London: The Falmer Press.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan diklat Badan Kementrian Agama RI.
- Raihani. (2016). *Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ulin Nuha, (2022). *Wawancara*.
- UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Lembaran Negara, 2003.

URGENSI FATWA MUI TENTANG HUKUMAN KEBIRI DI TENGAH POLEMIK

Moh Rosyid

IAIN Kudus

mrosyid72@yahoo.co.id

085866481972

ABSTRAK

Pro-kontra hukuman kebiri memerlukan peran fatwa MUI sebagai dalih dituliskannya naskah ini. Data riset ini bersumber dari literatur dan pemberitaan media. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan kritis. Anak memerlukan perlindungan yang dewasa tapi terkadang menghadapi fase krusial. Pemerintah berpandangan hukum menjerat pelaku kurang menimbulkan jera muncul inisiatif Presiden Jokowi menerbitkan Perppu No.1/2016 menjadi UU No 17/2016 orang dewasa pelaku pemerkosa anak dapat diberi hukuman kebiri. Proses awal Perppu ditolak pegiat hak anak dan ahli medis. Perlunya pemerintah mengajukan permohonan diterbitkannya fatwa pada MUI agar menguatkan dasar hukum (bagi muslim) bila ada fatwa. Apa pun wujudnya, hal yang paling penting untuk disikapi agar anak tidak menjadi korban dan yang dewasa tidak menjadi pelaku kriminal adalah realisasi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual, selain merealisasikan keadilan restoratif pada anak.

Kata Kunci: kebiri, konsistensi, dan hukuman.

ABSTRACT

This paper is based on writings are urgently MUI fatwa between pro-contra sanction castration. Data were literature and ews paper analyzed with a qualitative descriptive approach by critis analysis.Children need protection and guidance from adult people to become a quality generation. Relationship between children and adult people in their community plays significant role in children development. However, in some case, adult people cause suffering for children such as in the case of child violence. Meanwhile, the regulation concerning child fails to provide protection for children. Due to the rise of crime against children, President Joko Widodo signed Perppu No 1/2016 on the Law no 17/2016, which threatened the actor of child abused to be emasculated. Despite the debate between the proponents and the castration, including among Moslems, the Council of Indonesian Ulama did not published fatwa concerning this matter. The most important thing is protecting children from being abused by empowering education and restorative justice.

Keywords: castration, consistency, punishment

PENDAHULUAN

Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI Minggu, 9 Oktober 2016 mendeportasi warga Amerika berinisial JED Jr (44 tahun) tatkala tiba di Bandara Soekarno-Hatta. JED termasuk dalam daftar tangkal imigrasi dan *Convicted Child Sex Offender* (CCSO) sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Amerika. Data diterima Imigrasi melalui intelijen keimigrasian dan kerja sama antarnegara. JED dipulangkan ke negaranya pukul 06.45 Wib setelah mendarat di Bandara Soetta. Tindakan antisipasi dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa JED akan berbuat tidak benar dengan perilakunya terhadap anak Indonesia karena anak korban kekerasan dapat berlanjut menjadi pelaku jika traumanya tidak tertangani dengan baik. Pelaku kekerasan muncul karena multifaktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal seperti kelainan genetik dan hormonal. Orang dengan hormon testosteron tinggi cenderung lebih agresif, faktor eksternal seperti paparan kekerasan di media massa dan budaya kekerasan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi anak di Indonesia. Penanganan atas kekerasan pada anak masih bersifat reaktif dan belum menyasar pokok permasalahan padahal sudah mencapai tahap memprihatinkan, baik dalam jumlah kasus maupun kekejamannya. Dalam kondisi ini, mewacana merevisi UU Perlindungan Anak awalnya diwacanakan oleh Linda Amalia Sari selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hukuman untuk pelaku kejahatan pada anak harus diperberat agar memberi efek jera kepada pelaku. Sanksi hukuman paling lama 15 tahun, realitanya tidak pernah ada pelaku dihukum 15 tahun. Untuk itu, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perlu direvisi. Hal ini dinyatakan menteri pada pembukaan Konferensi Polisi Wanita se-Asia di Semarang Senin, 21 April 2014. Usulan ini beralasan karena merugikan anak, ada pelaku secara fisik dan psikis dekat dengan anak.

Di sisi lain, perlu dirumuskan agar anak tetap jera tidak menjadi pelaku kriminal, sebagaimana dilaporkannya anak lelaki 12 tahun oleh sang ibu kandungnya, Kartinah 48 tahun ke Polres Kudus pada Rabu 19 November 2014 karena sang ibu tidak mau menuruti keinginannya melayani sarapan, sang anak memukul ibu dengan *hanger* (gantungan baju) hingga berdarah pada bagian bibirnya. Pelaku tidak ditahan karena di bawah umur (*restorative justice*) dan masih tinggal bersama ibunya di Desa Loram Wetan Kecamatan Jati, Kudus. Si anak pun minta jajan hingga Rp 20.000 per hari, pagi Rp 10.000, siang Rp 5.000, dan malam Rp 5.000.

Berdasarkan pengaduan yang masuk dan pantauan di berbagai media massa oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) sepanjang tahun 2014, jumlah kejahatan terhadap anak menurun dari 3.339 kasus pada 2013 menjadi 2.737 kasus pada 2014. Akan tetapi, menurut Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, jumlah anak yang bertindak sebagai pelaku kejahatan naik 10 persen. Sebanyak 52 persen dari kasus kejahatan terhadap anak pada 2014 merupakan kejahatan seksual, 24 persen dari pelaku kejahatan merupakan anak yang berumur di bawah 14 tahun. Bentuk kejahatan yang dilakukan berupa perundungan, pencurian, pencabulan, dan pemerkosaan. Hal itu memperumit penanganan kasus karena anak di bawah umur tidak dapat dipidanakan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Januari 2011 hingga November 2015 ada 18.365 pengaduan terkait pelanggaran hak pada anak. Rinciannya, tahun 2014 ada 5.066 kasus, tahun 2015 ada 3.298 pengaduan dengan 941 kasus anak berhadapan dengan hukum (sebagai korban dan pelaku). Bentuknya pembunuhan, perampokan, pencurian, dan aborsi. Kekerasan seksual pada anak (pedofilia) lazimnya berantai, maksudnya sebagian pelaku semula adalah korban kekerasan seksual. Data KPAI, selama tahun 2010-2014 tercatat 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58 persen dari total pelanggaran itu merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya merupakan kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak (Suyanto, 2015).

Sebagai upaya melindungi anak, pemerintah menyusun Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) terkait sanksi tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di tengah kekosongan hukum atas pemberian sanksi ekstra. Keberadaan kebiri sebagai sanksi tambahan agar timbul efek jera dan takut bagi yang akan bertindak negatif terhadap anak. Alternatif hukuman tambahan tersebut antara lain suntikan cairan kimia yang bisa menekan produksi hormon libido (pengebirian saraf libido), bukan memutus organ seksual pelaku. Teknik pengebirian dapat dilakukan dengan suntik, mengoles, atau meminum obat. Bila diukur dari aspek efektifitas hukuman kebiri, belum mendapatkan jawaban karena belum dilakukan di Indonesia.

Hukuman kebiri awalnya usulan dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2013 ketika mengkaji darurat kejahatan seksual pada/oleh anak dan parameter hukumnya tidak ada. Wacana yang digagas KPAI adalah (1) maksimal hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun dengan tambahan pemberatan hukum yang pertama berupa kastrasi atau kebiri melalui suntik kimia. Hukuman yang kedua berupa sanksi sosial (*social punishment*) yang sesuai dengan penetapan presiden, (2) penetapan bahwa semua kejahatan

pada anak dikategorikan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Efek jera bagi pelaku dan takut bagi calon pelaku merupakan tujuan utama hukuman. Akan tetapi, hal yang harus dipertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis bagi anak terhukum. Sidang Kabinet Terbatas (Ratas) di Istana Negara Jakarta 20 Oktober 2015 Presiden Jokowi memutuskan akan membuat Perppu. Dalam ratas, Presiden Jokowi menggarisbawahi tiga hal (1) perlu ada pendidikan pranikah yang memuat ajaran bagaimana orangtua memahami cara melindungi anak-anak mereka, (2) tingginya perceraian memungkinkan penelantaran anak, (3) munculnya kekerasan seksual terhadap anak dilakukan pemberatan hukuman pada pelaku, termasuk di dalamnya pengebirian saraf libido. Menurut Kejagung H.M Prasetyo (saat itu), kekerasan seksual pada anak dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Hal yang disepakati dalam ratas, lanjut Prasetyo, hukuman berupa pengebirian sebagai langkah prevensi/pencegahan. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni'am Sholeh (saat itu) yang hadir dalam ratas mendukung hasil ratas. Perppu sedang dikoordinasikan antara Kejagung, Kemenkes, Kemenkumham, dan Polri. Kemensos dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyiapkan rancangan instruksi presiden (Inpres) tentang pengarusutamaan perlindungan anak dalam pembangunan. Pemberlakukan hukuman tambahan berupa kebiri tentu berdasarkan putusan pengadilan dan rekomendasi dokter. Dasar hukum penerbitan Perppu adalah Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 disebutkan "dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU" (Perppu). Begitu pula Pasal 1 (4) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: "Peraturan pemerintah Pengganti UU (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa.

Kajian tentang kebiri dilakukan Refrizal (2019) sanksi kebiri kedudukannya sama dengan jarimah takzir dalam hukum Islam. Oleh negara digunakan sebagai premium remedium padahal kekerasan seksual pada anak belum tentu pedofilia. Adi (2020) bahwa hukuman kebiri masih menghadapi pro-kontra. Hanya saja, hukuman ini sebagai pilihan bagi hakim, bukan kewajiban. Naskah tersebut berbeda dengan telaah naskah ini sehingga memiliki aspek pembeda yang dikaji.

Berdasarkan penjelasan di atas , maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : (1) bagaimana pemicu munculnya Perppu tentang Kebiri ?, (2) mengapa hukuman kebiri direspon pro-kontra oleh publik?, (3) bagaimana dinamika politik penerbitan Perppu, dan (4) apa pentingnya Fatwa MUI tentang Kebiri ?

METODE PENELITIAN

Data dalam naskah ini penulis dapatkan dari dengan menggali pemberitaan media massa dan tulisan pegiat anak dan hukum tentang kastrasi. Hanya saja, belum banyak tulisan yang diperoleh penulis karena kajian tentang kastrasi (kebiri) merupakan wacana baru dan hukumnya pun belum dilaksanakan di Indonesia. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Pemicu Munculnya Perppu

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Bengkulu Heny Farida, hakim anggota Hendry Sumardi dan Fakhruddin Kamis 29 September 2016 menghukum mati Zainal. Hukuman 20 tahun dan denda Rp 2 miliar subsidi 3 bulan penjara dijatuhkan pada empat teman Zainal yakni Tomi Wijaya, Masbobi, Muhammad Suket, dan Faisal Eldo Syaishah sedangkan pelaku lainnya bernama MJF (13 tahun) dihukum rehabilitasi dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi Putra Jakarta Timur selama setahun. Saat membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Heny Farida sempat meneteskan air mata, sehingga sidang pun terhenti beberapa menit dan ruang sidang seketika hening. Setelah menghapuskan air mata, Heny melanjutkan sidang dan memvonis mati terdakwa. Sebanyak 12 terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut divonis hukuman penjara selama 10 tahun dengan pelatihan kerja selama enam bulan. Tindak pemerkosaan adalah hubungan seksual secara paksa dan merugikan pihak korban. Adapun pemerkosaan merupakan suatu usaha melampaui nafsu seksual oleh seseorang terhadap korban dengan cara yang tidak etis menurut moral dan/atau hukum yang berlaku. Pemerkosaan terhadap anak adalah salah satu bentuk dari tindak kekerasan kejahatan meresahkan. Dampaknya fisik dan psikis yang dibawa dalam pikiran korban hingga mati. Tindak pemerkosaan adalah puncak dari tindak pelecehan seksual yang mengerikan. Dampak secara fisik (1) vaginismus, yakni otot dinding vagina berkontraksi atau menguncup saat berhubungan kelamin, (2) *dispareunia* yaitu rasa nyeri/sakit. Dampak psikisnya merasa tak nyaman/tak aman, menurunnya harga diri dan martabat. Menurut Wahid dan Irfan, pemerkosaan menjadi salah satu tolak ukur pelanggaran HAM yang cukup parah terhadap perempuan. Aksi yang diperbuat pelaku merupakan bukti kesewenangan dan kekejian yang bertentangan dengan watak manusia yang seharusnya menghormati hak sesamanya (Wahid dan Irfan, 2001).

Putusan ini dibacakan Selasa 10 Mei 2016 oleh Majelis Hakim dengan Ketua Heni Farida dalam persidangan di Pengadilan Negeri Curup, Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu,. Hukuman tersebut sesuai tuntutan jaksa. Pada 2 April 2016 Zainal dkk memerkosa dan membunuh Yuyun berusia 14 tahun di kebun karet kawasan Lembak, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Jenazah korban ditemukan oleh warga di semak-semak pada 4 April 2014 dalam kondisi jasad terikat. Hakim menyatakan, Zainal dkk secara sah dan meyakinkan kelima terdakwa terbukti secara hukum melakukan tindak kekerasan dan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya dan orang lain serta tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Pelaku pada persidangan tertutup dijerat Pasal 340 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76 huruf D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jaksa menuntut ragam kelima terdakwa. Zainal dituntut hukuman mati karena sebagai otak pelaku, pelaku utama, dan eksekutor, adapun empat pelaku lainnya dituntut hukuman 20 tahun penjara. Kelima terdakwa merupakan pelaku usia dewasa dengan membunuh dan memerkosa siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu, 7 pelaku masih di bawah umur telah terlebih dahulu divonis dengan hukuman penjara 10 tahun. Kronologi pemerkosaan dan pembunuhan tersebut bermula saat 14 tersangka pada Sabtu, 2 April 2016 sekitar pukul 11.31 Wib berkumpul di rumah tersangka berinisial DE meminum tuak. Pada pukul 12.31 Wib dalam keadaan mabuk, ke-14 tersangka keluar dari rumah dan duduk di tepi jalan perkebunan karet di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT). Sekitar pukul 13.31 Wib, pelaku melihat korban pulang sendirian dengan membawa alas meja dan bendera merah putih akan dicuci untuk persiapan upacara bendera hari Senin. Jarak antara rumah orangtua korban dengan sekolah korban kurang lebih 1 km dan melintasi jalan kebun karet. Para pelaku langsung mencegat dan menyekap Yuyun. Kepala Yuyun dipukul menggunakan kayu, kaki dan tangannya diikat, dan lehernya dicekik, kemudian para pelaku secara bergiliran memerkosa korban. Akhirnya korban dibuang di semak-semak. Sebelum vonis dijatuhkan, polisi menggelar rekonstruksi dengan 63 adegan di halaman Mapolres Rejang Lebong Kamis, 2 Juni 2016. Ada 12 pelaku, 7 berusia di bawah umur dan lima berstatus pelajar dan sisanya anak putus sekolah berusia 16 tahun dan maksimal usia pelaku adalah 23 tahun. Dalam hal lain, korban memiliki saudara kandung/kembar, oleh Mensos Khofifah Indar Parawansa (saat itu) akan difasilitasi pendidikan di Malang Jawa Timur.

Setelah terbongkarnya pemerkosaan dan pembunuhan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise (saat itu) berencana akan meninjau UU Perlindungan Anak. Hal yang perlu dipahami, sebelum pemerkosaan, pelaku menonton film porno dan mabuk. Dengan kasus tersebut upaya mewujudkan terbitnya Perppu kian masif. Hal yang perlu diwaspadai, trauma penderitaan pasca-perkosaan pada perempuan bila usia di atas 6 tahun berupa gelisah, mimpi buruk, dan perilaku seks menyimpang. Bila berusia 7-12 tahun berupa ketakutan, agresif, neurotik ('bermain' dengan boneka), masturbasi berlebihan, meminta pertolongan orang lain untuk rangsangan seksual, memasukkan benda ke genital atau anal. Dampak lainnya, gangguan mental atau mengeluh kondisi fisiknya. Beragam akibat tergantung usia korban dan penderitaan yang dialami (Sa'abah, 2001). Pemerkosa dalam perspektif psikologi sosial berperilaku agresif. Agresif menurut Faturochman adalah perilaku emosional, kesengajaan, akibat multifaktor, dan adanya kecenderungan internal berupa insting yang muncul tak setiap saat (Faturochman, 2006).

Untuk mencegah agar tindak kekerasan seksual pada anak tidak kian marak, wacana publik memberi hukuman disuntik hormon yang dapat menghilangkan libido nafsu seksualnya dengan kebiri. Meski ancaman tambahan hukuman kebiri sulit berjalan efektif. Bila ditimbang penderitaan yang ditanggung korban seumur hidupnya, hukuman kebiri jauh lebih ringan atau setimpal dengan penderitaan korban. Hal yang lebih penting adalah menjamin proses persidangan untuk membuktikan terjadi atau tidaknya kasus perkosaan tidak menjadi bentuk pemerkosaan baru yang justru merugikan korban. Sebagaimana pemerkosaan yang dicoba diselesaikan secara hukum, kadang-kadang menarik di tengah-tengah, karena pihak keluarga mencabut pengaduannya dan lebih memilih memendam penderitannya karena tidak menginginkan anaknya trauma akibat proses pengadilan yang memaksa mereka mengingat kembali aib yang telah dialami. Mengesahkan hukuman kebiri bagi pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak, sebagai suntikan dukungan moral bagi anak yang jadi korban tindak pemerkosaan memang dibutuhkan. Tetapi, membuktikan kesalahan pelaku dalam persidangan menambah beban penderitaan baru bagi korban (Suyanto, 2016).

1. Pro – Kontra Hukuman Kebiri

Dari asal-usulnya, hukuman kebiri sejak era 8.000-9000 tahun lalu di timur Mediterania. Budak di Mesir dikebiri sejak tahun 2.600 SM agar lebih rajin dan patuh pada majikan. Masa berikutnya, kebiri ditemukan pada budaya Yunani, Persia, hingga Tiongkok. Dalam perkembangannya, kebiri dilakukan untuk mendapat suara soprano pada anak lelaki, mencegah perbuatan tak bermoral dalam sejumlah agama dan keyakinan, dan mengurangi jumlah penduduk yang mengalami gangguan fisik dan mental. Pada abad ke-20 kebiri dijadikan sebagai hukuman bagi penjahat seksual anak di sejumlah negara. Pelaksanaan kebiri dilakukan pada hewan ternak agar jumlah hewan betina lebih banyak dibanding pejantan. Menyikapi terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak, orangtua memberikan perhatian ekstra agar tidak menjadi korban atau pelaku. Pemberian hukuman tidak hanya menjerakan pelaku, tapi menghargai etika, hak asasi manusia, dan tidak bersifat balas dendam (Wahyudi, 2015).

Kebiri adalah tindakan medis berupa bedah dengan bahan kimia bertujuan menghilangkan fungsi testis pada lelaki atau fungsi ovarium pada perempuan. Pro-kontra wacana pemberlakuan sanksi kebiri pada pelaku kejahatan seksual pada anak direspon pemerintah. Awalnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuka diri untuk menerima masukan dari berbagai kalangan sambil terus mengkaji beberapa alternatif hukuman lain yang lebih efektif. Bagi yang kontra berpendapat bahwa kebiri tidak menyelesaikan masalah, hukuman itu belum menjadi solusi ampuh dan belum terbukti secara ilmiah efektif menurunkan kekerasan pada anak. Ada yang berpendapat, hukuman tambahan berupa hukuman mati, seumur hidup, sanksi sosial, meski dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hukuman maksimal hingga 20 tahun. Namun penegak hukum belum pernah menghukum maksimal. Negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni Jerman sejak tahun 1902, Korsel sejak 2012, Rusia, Inggris, dan beberapa negara bagian di Amerika. Bentuknya ragam, ada yang bedah saraf libido dan kebiri kimiawi lewat penyuntikan.

Kekejaman yang diderita anak dalam bentuk pemerkosaan dan pembunuhan terus terjadi. Hal ini diderita Yuyun (14 tahun) warga Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu yang memantik pemberitaan. Yuyun diperkosa oleh 14 pria pemabuk, dua pemerkosa masih tergolong anak, hingga tewas. Pemerkosa dapat dijerat Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Masing-masing ancaman pidanya 15 tahun penjara dengan pidana denda Rp 3 miliar untuk Pasal 76 C dan denda Rp 5 miliar untuk Pasal 76 D. Dengan fakta tersebut yang didahului fakta lainnya, Presiden Jokowi Selasa 10 Mei 2016 seusai memimpin sidang kabinet memandang kekerasan terhadap anak yang terus terjadi sebagai kejahatan luar biasa sehingga harus segera diakhiri dengan cara luar biasa pula tanpa semata-mata mengacu pada UU. Pelaku akan diberi hukuman secara akumulatif. Pemerintah (saat itu) masih memproses rancangan peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) mengenai hukuman tambahan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak agar ada sebuah keputusan yang betul-betul memberikan efek jera kepada pelaku serta bisa menghilangkan keinginan calon pelaku lainnya. Presiden memerintahkan pada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (saat itu) berkoordinasi lintas kementerian dengan Polri untuk menangani kasus-kasus kejahatan terhadap anak secara komprehensif. Jaksa Agung M. Prasetyo (saat itu) menyatakan, pihaknya menganggap pernyataan presiden sebagai instruksi dalam penegakan hukum secara luar biasa kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jajarannya harus segera memelajari semua aturan hukum yang ada untuk menyiapkan tuntutan seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan tuntutan berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab UU Hukum Pidana. Rapat yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Selasa 10 Mei 2016 intinya, hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak akan diperberat menjadi seumur hidup dan menjadi hukuman mati apabila korban meninggal. Pemerintah akan menyiapkan peraturan perundangan untuk merevisi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk menambahkan hukuman tersebut. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, penambahan hukuman akan dilakukan dengan merevisi UU Perlindungan Anak Pasal 81 tentang ketentuan pidana maksimal 15 tahun bagi pelaku kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dengan dikategorikannya kekerasan seksual sebagai kejahatan luar biasa, Presiden Jokowi memutuskan akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk memperberat hukuman bagi pelaku (maksimal 20 tahun), hukuman tambahan berupa kebiri, pemasangan gelang elektronik (cip) agar terdeteksi pergerakannya, dan sanksi sosial berupa publikasi identitas pelaku pada publik. Alternatif hukuman tersebut, hanya kebiri yang wacananya menggeliat. Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 25 Mei 2016 menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hal ini sebagai upaya mengatasi kegentingan akibat maraknya kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Presiden, kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan pertumbuhan anak dan masyarakat. Perppu diharapkan memberikan efek jera terhadap para pelaku. Penambahan hukuman pada pasal diharapkan memberikan ruang pada hakim memutuskan hukuman kepada pelaku seberat-beratnya. Dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 Perppu Nomor 1 Tahun 2016, mereka yang dengan tipu muslihat, membohongi, membujuk, dan mengancam dengan kekerasan, memaksa anak bersetubuh atau sesuai Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014, pelaku dipidana penjara 5 tahun dan 15 tahun dan denda Rp 5 miliar. Ayat 3 menyebutkan, jika hal itu dilakukan oleh orangtua, wali, orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang atau bersama-sama, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana, seperti dituangkan dalam ayat 1.

Susanto, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kejahatan seksual terhadap anak merupakan kasus serius. Kasusnya terus meningkat, baik kuantitatif maupun kualitatif, modusnya pun kian tidak berperikemanusiaan, yakni mulai dari bujuk rayu, paksaan, perkosaan, pembunuhan bahkan mutilasi. Anak merupakan kelompok rentan, sekitar 75 persen korban kekerasan seksual adalah usia anak (di bawah usia 18 tahun). Komitmen Presiden Jokowi yang memasukkan kejahatan seksual sebagai kejahatan luar biasa layak diapresiasi. Merebaknya kejahatan seksual terhadap anak bukan semata-mata dipengaruhi minimnya pidana terhadap kejahatan seksual, juga rentannya ketahanan keluarga berujung pada kerentanan anak menjadi korban dan pelaku, mudahnya akses terhadap pornografi menginspirasi seseorang melakukan kejahatan seksual. Penerbitan Perppu merupakan subsistem reformasi perlindungan anak yang fundamental dan menandai telah terjadi perubahan paradigma besar dalam

penyelenggaraan perlindungan anak. Pertama, perlindungan anak menjadi prioritas isu yang mendesak ditangani, kompleksitas masalah yang ada dikategorikan stadium 'genting' maka perlu langkah segera. Kedua, norma hukum yang ada belum memberikan efek jera. Untuk menekan tingginya kasus kejahatan seksual anak perlu pemberatan hukuman bagi pelaku. Ketiga, ketertarikan kepada lawan jenis melakukan hal natural, karena setiap manusia memiliki 'insting seksual' sebagaimana insting mencari makan dan juga rasa lapar. Insting ini dalam dunia sains disebut 'libido'. Namun hasrat seksual yang liar dan tak terkendali dan dilampiaskan kepada anak merupakan bentuk kejahatan dan tak bisa dibiarkan. Keempat, hasrat seksual tak boleh dihilangkan karena bersifat *given* dan bagian dari HAM. Sikap sebagian pegiat HAM yang kurang sependapat dengan Perppu perlu dihormati, tapi semangat Presiden perlu diapresiasi (Susanto, 2016).

Pihak-pihak yang menolak Perppu antara lain, Sahabat Anak dan Perempuan Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, *Institute for Criminal Justice Reform* Erasmus mereka mewakili 99 organisasi menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Minggu, 29 Mei 2016 di Jakarta. Menurut Konsultan Psikiater Unair Surabaya, Nalini Muhdi, ada dua jenis kebiri (1) kebiri fisik, pembedahan untuk mengangkat dua testis atau buah zakar (tempat lelaki memproduksi sperma dan hormon testosteron). Bila testis tak lagi memproduksi hormon testosteron maka lelaki tak akan bergairah seks dan (2) kebiri kimiawi, menyuntikkan zat kimia tertentu yang umumnya obat antiandrogen atau hormon 'antitestosteron'. Keduanya berfungsi menekan produksi hormon testosteron untuk mengurangi dorongan seksual. Testosteron dihasilkan kelenjar anak ginjal, tapi jumlahnya amat sedikit. Kebiri kimiawi dianggap lebih beradab dan sesuai perkembangan sains dan teknologi dibanding kebiri fisik karena memberi efek sama tanpa membuang testis. Ada 10 s.d 20 persen orang yang dikebiri masih bisa beraktivitas seksual, tak berbentuk penetrasi tapi seks oral dan manipulasi manual dengan tangan. Motivasi pelaku kejahatan seksual pada anak tidak hanya soal seks. Tiap kejahatan seks ada faktor agresivitas pelaku. Kebiri hanya menekan dorongan seksual pelaku, tapi tidak bisa mengatasi agresivitasnya. Bahkan, tertekannya dorongan seksual bisa meningkatkan agresivitas pelaku sehingga bisa melakukan berbagai tindakan kekerasan lain. Jenis kekerasan yang muncul sangat beragam, yakni kekerasan fisik, verbal, dan seksual. Menurut Mohamad, kebiri dengan zat nekrotikans efeknya permanen seperti operasi membuang testis, seumur hidup lelaki tidak lagi mempunyai libido seks. Akan tetapi, bila dengan obat

penekan produksi testosteron akan bersifat semipermanen selama beberapa bulan saja, sesudah itu harus disuntik ulang. Pola ini juga digunakan bagi lelaki yang seksnya terlalu berlebihan dan untuk mengobati kanker prostat. Wacana kebiri kimiawi bagi pelaku pemerkosaan kambuhan menimbulkan kontroversi (1) pelanggaran HAM karena kehilangan kebebasan, (2) sampai kapan pemberian obat. Kebiri harus dilakukan dokter tapi dokter akan melanggar kode etik kedokteran. Dokter harus menolak bila bagian dari penyiksaan (*torture*), tapi tak menolak bila bagian dari terapi libido berlebihan (Kartono, 2016). Menurut info yang penulis peroleh dari dokter ahli bedah bahwa tidak diperbolehkan kebiri fisik, tapi bila kebiri kimia perlu biaya 46 juta per bulan per orang. Ahli bedah lebih setuju bila hukuman kurungan 30 tahun.

Menurut Zaidan, hukuman dalam bentuk pengebirian dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dapat dinilai telah mengembalikan semangat balas dendam pada pelaku pidana. Hukum maupun hukuman bukan semata-mata pembalasan atau perbaikan (resosialisasi) tapi untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana dengan mewajibkan kepada pelanggar untuk mengganti kerugian terhadap korban dalam hal tindak pidana itu menimbulkan kerugian material. Dalam konteks Perppu di atas, sepanjang berkaitan dengan hukuman kastrasi telah menghidupkan kembali teori pidana klasik sebagai sarana pembalasan. Meskipun hukuman kastrasi dipandang sebagai upaya terakhir di mana penerapannya harus selektif, disebabkan karena pengulangan atau menimbulkan korban yang meluas. Hal itu tetap menimbulkan akibat yang tidak humanis. PBB sejak 1984 mengesahkan konvensi yang menentang penyiksaan, tindakan lain yang kejam, tidak manusiawi atau tindakan/hukuman yang merendahkan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Indonesia meratifikasi dengan UU Nomor 5 Tahun 1998. Konsekuensinya, cara-cara yang tidak manusiawi dalam penegakan hukum, baik yang menyangkut proses penyidikan sampai peradilan harus dihindarkan (Zaidan, 2016).

Belum ada data yang dapat dijadikan dasar jenis hukuman yang lebih berefek jera dan meniadakan kejahatan seksual, termasuk bila dengan kebiri. Tidak mungkin hanya dengan sekali pemberian obat (dikebiri) dorongan seksual langsung hilang dan tidak mampu berhubungan seks. Ditekannya hormon testosteron sehingga rendah berakibat terjadi penurunan dorongan seksual. Tapi dorongan seksual tak hanya dipengaruhi oleh hormon testosteron tapi juga oleh pengalaman seksual sebelumnya; kondisi kesehatan secara umum, dan faktor psikologis terkait fungsi seksual. Pengalaman seks melekat di pusat

seks yang ada di otak. Jadi meskipun mendapat obat anti testosteron, belum tentu keinginan melakukan hubungan seksual lenyap sama sekali. Penurunan hormon testosteron juga akan mengganggu fungsi organ tubuh yang lain, seperti otot yang mengecil, tulang mengeropos, sel darah merah berkurang, dan fungsi kognitif (berpikir) terganggu. Beberapa kemungkinan tersebut perlu dipikirkan sebelum menghukum kebiri (Pangkahila, 2016).

Ketua Komnas HAM (saat itu) Imdadun Rahmat menyayangkan pasal tentang kebiri kimiawi ada di Perppu yang dianggapnya menyalahi koridor HAM karena potensinya berdampak jangka panjang bagi fisik atau psikis seseorang dan berpotensi merusak tubuh. Menurut Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan Mariana Amiruddin, Perppu dinilai tidak memberikan solusi karena kekerasan seksual berdasarkan riset bukan semata-mata reaksi libido, melainkan mengandung unsur kemarahan terhadap situasi sosial, ekonomi, atau politik pelaku. Menurut psikolog anak Seto Mulyadi, kekerasan seksual merupakan masalah kejiwaan, bukan soal libido. Menurut Rocky Gerung bahwa upaya menghapus kekerasan seksual tidak tepat jika hanya menonjolkan pendekatan hukum. Hal itu lebih arif jika didekati dari berbagai sisi, termasuk budaya. Kentalnya pendekatan hukum mencerminkan kebijakan dari rezim yang panik, reaktif, tanpa refleksi, dan hukum sebagai instrumen reaktif. Hal yang perlu diubah adalah kultur patriarki. Kultur itu bermukim di agama, tradisi lokal, bahkan struktur politik. Kebiri merupakan praktik kebengisan yang lahir dari tradisi patriarki. Rezim yang panik selalu bereaksi tanpa refleksi. Akibatnya, kekerasan tak berkurang dan bertambah tingkat kekejiannya. Menurut guru besar sosiologi UI, Thamrin Amal Tomagola menilai, pemerkosaan terjadi karena relasi kekuasaan yang timpang antara pria dan perempuan. Cara pandang ini sejak lama mengakar di masyarakat. Saatnya membenahi relasi antarpihak di masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan di tingkat keluarga dan komunitas harus mendorong penyadaran kesetaraan jender di mana kaum pria dan perempuan tidak saling mendominasi. Penambahan hukuman kebiri atau mati tak akan efektif mengatasi persoalan. Itu tindakan refresif yang mengedepankan kekuasaan. Satu di antara tiga rekomendasi rapat terbatas Presiden tanggal 20 Oktober 2015 sehingga mewacanakan hukuman kebiri. Kebiri bertujuan mengebiri saraf libido. Menurut Dokter spesialis saraf RS Siloam, Lippo, Karawaci, Tangerang, Rocksy Fransisca Vidiaty Situmeang, istilah bedah saraf libido tak dikenal dalam dunia medis. Libido (nafsu birahi) pendorong hasrat seksual berpusat di bagian otak disebut *amigdala*. Artinya, jika ingin menekan libido, otak harus dibedah yang prosesnya rumit karena posisi *amigdala* tersembunyi

di atas batang otak. *Amigdala* menjadi pusat sejumlah fungsi lain, termasuk emosi. Pembedahan otak sangat beresiko sebaiknya tidak dilakukan. Kebiri juga mengubah wujud pria, mulai dari membesarnya payudara, suara menjadi mirip perempuan, dan hilangnya bulu-bulu tanda kelamin sekunder pria.

Hukuman kebiri dari aspek etika dianggap tidak tepat. Dalihnya, hak reproduksi dan regenerasi individu harus dihormati. Dampak kebiri secara medis antara lain meningkatkan kecemasan, stres, depresi, dan frustrasi; mudah lelah; bulu badan berkurang; memperbesar kelenjar payudara pada pria; mengurangi massa otot; meningkatkan berat badan, menaikkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah; mengurangi kepadatan tulang dan meningkatkan resiko osteoporosis; hipertensi; migrain; meningkatkan kadar gula darah; memperkecil ukuran testis; tidak mampu ereksi; dan mengurangi jumlah sel sperma. Aspek etika kebiri tidak tepat karena hak reproduksi dan regenerasi individu harus dihormati. Aspek medis adalah aspek etika, sedangkan dokter era modern melarang/dilarang mengebiri. Teknik kebiri secara medis yakni diambil biji dzakarnya, dipotong syarafnya, dan disuntik untuk mematikan sel pembuat hormon. Menurut Irawaty, upaya yang lebih berorientasi pada penghukuman seharusnya bukan menjadi pilihan utama upaya melawan kekerasan seksual. Apalagi jika pilihannya hukuman kebiri yang melulu berorientasi 'biologis', padahal persoalan kekerasan seksual memiliki akar yang kompleks, mulai dari cara berpikir, akses informasi tentang seksualitas yang minim, hingga lemahnya sistem dan kelembagaan yang terintegratif penghapusan kekerasan seksual, termasuk lemahnya partisipasi masyarakat dalam perang melawan kekerasan seksual. Semua upaya ini sangat penting, tetapi butuh waktu panjang untuk bisa menjadi 'solusi' bagi persoalan kekerasan seksual ini. Yang diperlukan upaya lebih praktis dan cepat penanganan situasi darurat kekerasan seksual dengan upaya jangka panjang yang berkesinambungan dan memiliki efek terbangunnya perubahan cara berpikir dan cara pandang. Upaya yang memungkinkan diwujudkan adalah membangun sistem pengawasan terpadu dan menyeluruh di berbagai unit sosial yang dimiliki, seperti RT, RW, tempat ibadah, sekolah, dan tempat publik seperti terminal, stasiun dan bandara. Para predator terus diawasi publik mereka membuat berpikir ulang sebelum bertindak (Irawaty, 2016). Menurut Irwanto (Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya Jakarta) bila membuat Perppu atau UU yang memberikan hukuman terberat, tetapi tak dapat dilaksanakan dengan baik karena kultur, kurang siapnya sumber daya manusia atau tidak adanya mekanisme yang memadai karena kurangnya investasi, lemahnya partisipasi masyarakat, dll. maka bisa menjadi bumerang.

Ilustrasinya, seperti binatang yang lemah, ia dapat mengubah penampilannya sedemikian rupa berharap agar predatornya takut. Ketika tujuan menakut-nakuti tidak tercapai, yang terjadi adalah masyarakat telah terlanjur merasa aman karena anggapan hukum yang menakutkan tentu berhasil. Ketika kejahatan serius masih terjadi, hukum di Indonesia kehilangan kredibilitas. Persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak bukan semata persoalan lemahnya produk hukum. Perlindungan anak memerlukan landasan hukum yang tepat, kuat, dan implementatif. Keberhasilan melindungi anak membutuhkan juga masyarakat yang peduli, berani melapor, berani mengambil tindakan menolong, mau bekerja sama dan mempunyai informasi yang baik untuk melindungi anak. Ketika hanya hukum yang menjadi perhatian publik, investasi dan upaya untuk memperbaiki *community vigilance* (kesadaran dan kewaspadaan komunitas), membangun keterampilan melapor dan menolong, melakukan berbagai pencegahan (termasuk melatih anak untuk waspada dan menolong dirinya) tidak akan terjadi. Dengan demikian, upaya perlindungan menjadi timpang lagi. Upaya yang serius untuk melindungi anak harus memastikan bahwa setiap lini dalam kebijakan publik dan setiap sistem yang ada di negara ini siap dan mampu melindungi anak. Upaya parsial dan emosional tak dapat dibenarkan sebab sumber daya yang terbatas harus digunakan secara optimal. Absennya perawatan psikososial pascatrauma merupakan kejahatan tersendiri dalam sistem terhadap korban. Dalam kerangka preventif, perlu mempertimbangkan rehabilitasi pada pelaku. UU Perlindungan Anak dirancang dengan semangat menjunjung perspektif anak sebagai korban. Artinya, ketika anak melakukan tindakan pidana, tindakannya juga dilakukan dalam posisi sebagai korban. Persoalannya adalah ketika anak juga dikenai pasal-pasal yang lebih berat dari UU Perlindungan Anak. Jika ini yang terjadi, UU ini menjadi pisau lipat yang melukai pihak-pihak yang seharusnya dilindungi. Terbitnya Perppu tak memberi jawaban persoalan ini. Batalkan Perppu dan tugaskan pihak terkait membuat kajian yang komprehensif (Irwanto, 2016). Perppu menurut Hargens ada baiknya bila bicara soal keberpihakan secara emosional pada korban. Sayangnya, yang dibutuhkan adalah keberpihakan moral yang mengharuskan adanya solusi adil untuk semua, yakni adil untuk korban dan pelaku. Perspektif humanis tidak mutlak memandang pelaku sebagai penjahat, tetapi sekaligus manusia yang mempunyai hak untuk dilindungi oleh negara. Setiap pelaku harus diadili, tetapi tidak dengan cara yang tidak adil (Hargens, 2016).

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marisi meminta pada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali Perppu mengatur hukuman tambahan kebiri kimiawi. Dokter agar tidak dijadikan sebagai eksekutor. IDI mendukung penerapan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan seksual tetapi bukan kebiri kimiawi karena bertentangan dengan sumpah dan kode etik kedokteran. PB IDI menolak bila dokter ditugaskan mengeksekusi suntik kebiri kimiawi karena efek sampingnya sangat negatif. Berdasarkan Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016 menegaskan bahwa profesi dokter bertujuan untuk memberikan kebaikan dengan cara menyembuhkan orang lain. Dalam prosesnya, dokter wajib menghormati otonomi pasien. Sesuai dengan sumpahnya, dokter tidak boleh berbuat semena-mena, apalagi menyakiti diri sendiri dan orang lain, meski keselamatan dokter tersebut sedang berada di bawah ancaman. Tindakan kebiri kimiawi dinilai bertentangan dengan semangat yang diemban oleh PB IDI karena bersifat menganiaya. Sumpah kedokteran bersifat universal, baik untuk dokter sipil, kepolisian, dan militer. Bila melanggar akan dikeluarkan dari profesi dokter dan organisasi profesinya. Solusi terbaik untuk menangani pelaku kekerasan seksual adalah terapi. Kebiri kimiawi hanya menurunkan hormon libido, tetapi sama sekali tidak berpengaruh pada pemikiran agresif, penguasaan impuls, ataupun keinginan untuk menyakiti orang lain. Dampak samping negatif dari kebiri kimiawi antara lain mengurangi kadar otot, meningkatkan lemak tubuh, dan mengurangi kemampuan kognitif. Menurut Wapres Jusuf Kalla (saat itu) Jumat 10 Juni 2016, eksekusi kebiri dilakukan oleh dokter yang tidak tergantung dalam IDI, yakni dokter kepolisian. Anggota Komisi III DPR RI FPPP Arsul Sani Minggu 12 Juni 2016 meminta IDI tidak langsung menolak untuk menjalankan hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. IDI perlu melihat dokter negara lain yang menerapkan hukuman kebiri juga memiliki kode etik dan tak menolak mengebiri. Persoalannya, tinggi mana antara melaksanakan perintah UU dengan kode etik kedokteran. Bila menolak, IDI dianggap sebagai bentuk *obstruction of justice*, yakni menghalangi penegakan hukum dan keadilan. Dalih IDI, dokter tidak akan menggunakan pengetahuannya pada hal yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diajak. Hal itu disebutkan dalam sumpah dokter. Dokter bertugas hanya untuk kepentingan kemanusiaan. Dalam peperangan pun, dokter harus menyelamatkan manusia, sekalipun itu musuh. Menurut Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi Hukum Nasional Komnas Perempuan, Khariroh Ali, ia menyangsikan kebiri memberi efek jera bagi pelaku sehingga ia lebih mendorong pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Hingga pertengahan Oktober 2016, RUU PKS masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2016. Muatan RUU PKS di antaranya perlindungan hukum yang komprehensif bagi para korban kekerasan seksual dan tata cara pencegahan atau pun penanganannya. RUU PKS memiliki 184 pasal yang berisi antara lain menjelaskan bentuk kekerasan seksual, cara pencegahan berupa pendidikan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, penanganan, pemulihan korban, pemidanaan, dan rehabilitasi pelaku. Wacana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi UU. Dalam RUU tersebut, ada 9 jenis kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbuatan seksual, dan penyiksaan seksual. Ada delapan jenis kekerasan seksual, yakni pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual. Di samping itu, kekerasan seksual, di dalam hukum pidana masih dipandang dari sudut kesusilaan. Artinya, bila terjadi pelecehan, korban justru merupakan pihak yang pertama kali disalahkan dengan tuduhan telah bersikap tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Menurut Ketua Komnas Perempuan Azriana Rambe Manalu, bentuk kekerasan seksual yang baru dikenal di dalam sistem hukum Indonesia adalah pemerkosaan dan pencabulan.

Di sisi lain, diwacanakan pula RUU Pengasuhan Anak karena UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dipandang perlu UU lain, UU serupa sedang diwacanakan, yakni UU Pengasuhan Anak. Dalihnya, UU Nomor 35 Tahun 2014 hanya ada beberapa pasal yang terkait dengan pengasuhan dan belum adanya pengasuhan anak dalam keluarga. Data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) hampir setiap hari ada pengaduan yang berkaitan dengan pengasuhan anak ke LPA pusat dan daerah. Anak menghadapi posisi sulit tatkala orangtuanya bercerai, kondisi anak yatim/piatu, perlu aturan pihak yang wajib mengasuh. Belum lama berselang sejak Perppu dijadikan UU, pemerkosaan terhadap anak (usia 5 tahun) oleh 7 anak (usia 9-11 tahun) terjadi di rumah kosong di kampung padat hunian, yakni Prumpung, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Peristiwa terjadi dua kali Kamis 20 Oktober 2016 dilaporkan oleh orangtua si korban pada polisi.

Upaya di atas, terdapat upaya riil yang perlu dioptimalkan, yakni pusat pembelajaran keluarga (puspaga) yakni pola pengasuhan pada anak oleh keluarganya, sekolah, dan lingkungan sekitar, seperti penegak hukum, sebagaimana konvensi hak anak. Puspaga merupakan bagian dari program kabupaten/kota layak anak (KLA) yang memiliki 31 syarat. Puspaga dikelola oleh profesional di bidang psikologi dan tumbuh kembang anak, bukan oleh

kader. Hingga akhir 2016 terdapat 18 kabupaten/kota penyelenggara KLA. Penulis 'menyadap' wacana pro-kontra ukuman kebiri dari para pemangku kuasa dan ahli yang ekspert di bidangnya, di antaranya diakses dari *Rappler.com* 22 Oktober 2015. Pendapat kontra muncul dari para ahli. Pertama, pada 21 Oktober 2016, Masruchah, anggota Komnas Perempuan, ia tidak setuju kebiri karena sebagian dari pelanggaran HAM. Bila efek jera yang dicari maka dapat dilakukan dengan memaksimalkan hukuman yang sudah berlaku saat ini. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hukuman maksimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur adalah 15 tahun penjara selama 3-15 tahun dan denda sekitar Rp 60 juta s.d 300 juta. Kedua, dr. Boyke Dian Nugraha, pakar seksologi. Hukuman kebiri tidak efektif karena pelaku masih berpotensi melakukan kejahatan selama kondisi mentalnya tidak diobati, yang sakit jiwanya dan kebiri tidak akan menyelesaikan jiwanya. Cara yang tepat dengan memberikan pengobatan dan rehabilitasi bagi pelaku dan anak diberi pendidikan seks sehingga mampu melindungi diri. Ketiga, Seto Mulyadi, agar pemerintah mengkaji ulang berdasarkan aspek kesehatan dan psikologis. Secara psikologis, pelaku yang dikebiri akan bertindak lebih agresif dan menasar ke kekerasan lainnya. Keempat, Imdadun Rakhmat komisioner Komnas HAM, hendaknya hukuman kepada pelaku bukan berupa balas dendam. Hukuman pada pelaku kriminal bertujuan memberi ganjaran setimpal dan pembinaan agar pelaku kembali menjadi manusia yang baik. Hukuman yang bersifat merendahkan martabat manusia tak memberi jaminan penyelesaian masalah, tetapi memuaskan dendam semata. Hukuman itu rawan menimbulkan dendam berkelanjutan bagi pelaku atau orang yang merasa dipermalukan. Solusinya adalah memaksimalkan hukuman kurungan di lembaga pemasyarakatan (LP). Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia yang menangani pendampingan korban kekerasan seksual menyatakan, 68 LSM mengajukan surat permohonan audiensi kepada Presiden Jokowi bahwa mereka bersedia menyumbangkan pemikiran untuk solusi atas masalah kekerasan seksual pada anak.

Naskah peraturan pengganti UU (Perppu) terkait kebiri (awalnya) berjudul Peraturan Pengganti Perundang-Undangan Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2003. Dalam drafnya menyatakan, hukuman kebiri berupa suntikan zat kimia guna menekan hasrat seksual pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman baru bisa diberikan jika terpidana secara sukarela mengajukan kesediaan disuntik sebagai bagian dari terapi bagi pelaku kejahatan seksual berulang. Pengajuan kesediaan disuntik kimia tersebut ketika pelaku dihukum kurungan di lembaga pemasyarakatan dan menjalani rehabilitasi mental dan sosial, terpidana yang merasa sukar

mengurangi hasrat seksualnya boleh mengajukan permintaan suntik kimia dalam jangka waktu tertentu. Tatkala direhabilitasi, pelaku kejahatan tetap diadvokasi dan hukuman kebiri merupakan hukuman terakhir. Suntik kimia ini bagian dari upaya merehabilitasi pelaku yang sedang menjalani hukuman pidana kurungan.

Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiartha Nur se usai pertemuan koordinasi Rencana Penyusunan Peraturan Perundangan Hukum Tambahan bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Jakarta, Selasa 10 November 2015 menyatakan, penambahan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak hendaknya bersifat komprehensif, yaitu tidak hanya menghukum juga merehabilitasi. Bila hanya hukuman tidak menyelesaikan masalah, pembinaan yang berkesinambungan dibutuhkan. Menteri Kesehatan Nila Moeloek (saat itu) bahwa penerapan hukuman kebiri, baik melalui suntik hormon untuk menekan libido maupun kastrasi testis, berisiko menimbulkan masalah kejiwaan lebih lanjut pada pelaku. Hal ini juga tidak menjamin pelaku tak memiliki amarah dan agresi yang dilampiaskan dalam bentuk kekerasan lain, seperti fisik, psikis, dan verbal. Lebih baik mengutamakan pencegahan kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada 19 Januari 2016 mengadakan rapat dengan Menkumham dan Jaksa Agung membahas final naskah Perppu. Pemerintah beralasan, penghukuman menambah efek jera bagi pelaku. Mengacu pada negara yang memberlakukan kebiri, seperti Australia, sembilan negara bagian Amerika Serikat, Perancis, dan Swedia merupakan hukuman tambahan pada pelaku yang divonis hukuman kurungan.

2. Dinamika Politik Penerbitan Perppu

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009 bahwa menerbitkan Perppu membutuhkan tiga persyaratan, yakni adanya keadaan berupa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU; UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada UU tetapi tidak memadai; dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak perlu kepastian untuk diselesaikan. Mahkamah berpendapat, tiga syarat tersebut merupakan syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (1) UUD 1945. Perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan menimbulkan status hukum baru, dan hubungan hukum baru.

Rapat internal Komisi VIII DPR RI yang membidangi isu sosial pada Selasa, 19 Juli 2016 terbelah dalam menyikapi Perppu. Ada yang menginginkan substansi Perppu dimasukkan dalam materi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diusulkan DPR dan masuk dalam perubahan prolegnas prioritas 2016. Ada pula yang mengusulkan untuk segera disahkan menjadi UU agar tidak ada kekosongan hukum dan materi Perppu tidak perlu digabungkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Perppu oleh presiden untuk mengatasi kegentingan akibat maraknya kasus kekerasan terhadap anak. DPR akan meminta penjelasan sejumlah menteri, yakni Mensos, Menkumham, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rapat Paripurna DPR dengan agenda pembicaraan tingkat II atas pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Jakarta 23 Agustus 2016 diputuskan menunda pengesahan Perppu menjadi UU. Tiga fraksi belum memberikan sikap atas persetujuan Perppu menjadi UU, yakni Gerindra, Demokrat, dan PKS. Alasan penundaan, pertama, prosedur pembahasan Perppu dinilai tak sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 52 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua pasal menyebutkan, pemerintah mengajukan Perppu pada masa persidangan DPR berikutnya. Perppu baru dikeluarkan pada 25 Mei 2016, saat itu DPR melangsungkan masa sidang V 2015 tahun 2016, seharusnya Perppu baru diajukan dan dibahas pada masa sidang DPR I tahun 2016/2017 yang dimulai 16 Agustus. Kedua, masih ada enam isu dalam Perppu yang diperdebatkan, yakni (1) data kekerasan seksual terhadap anak, (2) peta terjadinya kekerasan dan upaya pemerintah mengurangnya sebagai dasar keluarnya Perppu tak jelas, (3) klausul penyakit menular di Perppu dibutuhkan pembuktian aspek medis sehingga ada bukti yang cukup, (4) mengacu penjelasan IDI, yaitu orang melakukan kejahatan seksual tidak semata-mata memiliki hasrat libido yang tinggi, tetapi juga faktor mental, sehingga kebiri bukan solusi efektif, (5) IDI juga menolak sebagai eksekutor hukuman kebiri karena kode etik kedokteran tidak memungkinkan dokter menjadi eksekutor, dan (6) Perppu juga belum mengatur teknis pidana tambahan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik. Menurut Maman Imanulhaq, anggota Komisi VIII DPR F-PKB, sebaiknya menunda pengesahan Perppu menjadi UU karena pemerintah belum menjelaskan soal dana dan cara mengeksekusinya dan tidak menysar akar persoalan. DPR akhirnya mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menjadi

UU pada Rabu 12 Oktober 2016, meskipun Fraksi PKS DPR menyetujui disertai catatan dan Fraksi Gerindra menolak. Pada 25 Mei 2016 Presiden Jokowi menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. UU ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 9 November 2016.

Hal yang tajam dalam muatan UU tersebut bahwa pelaku kekerasan seksual dapat diganjar hukuman kebiri, hukuman mati, dan dipasang *chip elektronik*. Di sisi lain, tidak mengatur hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Penolakan aspek lain dengan dalih bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang kejam, tak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Komisi Perlindungan Anak mendukung Perppu menjadi UU karena membutuhkan hukuman yang mengerikan agar pelaku kekerasan seksual terhadap anak jera. Hal mendasar yang perlu dipahami sebagai masalah utama adalah belum terbentuknya sinergi dalam menjamin kehidupan yang aman dan nyaman bagi anak di tengah masyarakat. Perlu pula upaya rehabilitasi korban kekerasan. Jangan ada anggapan bahwa urusan dengan korban selesai setelah penangkapan dan diadilinya pelaku. Padahal, korban trauma bahkan seumur hidupnya.

3. Anak Korban Pemerkosaan Pasca-pengesahan Perppu menjadi UU

Deretan kasus pelanggaran terhadap anak tahun 2016 berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan 3.581 pengaduan. Kasus tersebut yang berhadapan dengan hukum ada 1.002 kasus, terkait keluarga dan pengasuhan alternatif 702 kasus, kejahatan anak berbasis siber 414 kasus seperti *bullying*, *prostitusi online*, penculikan, penipuan, *hate speech*, dan terorisme, serta pelanggaran dalam pendidikan 328 kasus. Kasus tersebut tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Dari sisi penegakan hukum, vonis bagi pelaku dewasa yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak masih jauh dari rasa keadilan bagi korban. Di 34 Pengadilan Negeri provinsi dengan sampel 112 kasus, pelaku dewasa rata-rata divonis 5-10 tahun (35 persen) dan 44 persen divonis 10-15 tahun. Upaya KPAI, pertama, advokasi kepada penyelenggara negara akan pentingnya kebijakan yang berperspektif anak di berbagai bidang dan sektor pembangunan, baik pusat maupun daerah. Kedua, melakukan advokasi agar paradigma perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan berbasis pada

perspektif perlindungan anak. Ketiga, mengadvokasi penguatan kelembagaan perlindungan anak yang didukung oleh SDM, anggaran, dan struktur birokrasi yang responsif terhadap perlindungan anak (Sholeh, 2017). Penulis mengakses informasi pemerkosaan terhadap anak pascapengesahan Perppu menjadi UU, di antaranya, Pertama, yang dialami SR (15 tahun) siswi kelas X SMA. Ia menjadi korban pemerkosaan dan dianiaya dengan disundut rokok oleh delapan pelaku di ruang kelas SMPN di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Minggu 25 Desember 2016 dini hari hingga trauma. Para pelaku yakni RIS (20 tahun), JRS (18 tahun), dan AJP sudah ditangkap Polres Pematang Siantar, RIS dan AJP ditahan, sedangkan JRS dijadikan tahanan rumah karena usia anak. Awalnya, pelaku mengajak SR berkeliling dengan sepeda motor hingga dibawa ke lokasi pemerkosaan dan korban diancam bila memberitahukan pada pihak lain. Pelaku mengantarkan korban pukul 06.00 ke rumah orangtuanya. Setiba di rumah, korban menceritakan pada keluarganya atas kejadian semalam. Keluarga melaporkan kejadian tersebut pada Polres Pematang Siantar. Kedua, sodomi diderita A (6 tahun) siswi MIN 2 Kota Padangsidempuan, Sumut oleh dua kakak kelasnya, RC (12 tahun) warga Kelurahan Palopat dan RY (12 tahun) warga Desa Limbong, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Korban dipaksa masuk kamar mandi madrasah dan dipaksa pelaku. Hal ini terungkap tatkala korban dimandikan orangtuanya di rumah meminta agar tidak mengoleskan sabun ke duburnya karena anusnya sakit akibat dimasuki kayu oleh pelaku. Sang ibu membawanya ke rumah sakit dan melaporkan pada Polres Padangsidempuan Rabu 11 Januari 2017. Ketiga, anak perempuan berinisial KM (6 tahun) tewas dibunuh setelah diperkosa oleh tiga tersangka berinisial DO, NA, dan LE di sebuah kali di ujung landasan Bandara Domine Eduard Osok, Kelurahan Klasabi, Kota Sorong, Papua Barat, Selasa 10 Januari 2017. Ketiga tersangka ditahan di Mapolres Sorong. Keempat, dua petani, Has (40 tahun) dan Uj (44 tahun) warga Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir memerkosa Tu (16 tahun) dan Te (17 tahun) pada Selasa 17 Januari 2017. Sabtu 21 Januari 2017 orangtua korban melaporkan pada Polsek Kateman. Awalnya, ketika dua korban Selasa 17 Januari 2017 pukul 21.00 perjalanan pulang mengendarai sepeda motor. Saat itu hujan sehingga jalan licin. Lalu muncullah kedua pelaku. Kelima, kejadian serupa dialami gadis pelayan kafe berinisial R (18 tahun) warga Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat menjadi korban pemerkosaan oleh 7 orang (diduga anggota TNI). Kejadian terjadi pada Jumat 20 Januari 2017 malam di kafe CF di Kelurahan Talang, Kelurahan Payakumbuh Barat, Payakumbuh. Korban dicekoki minuman

keras hingga pingsan hingga dirawat di rumah sakit. Warga mendatangi kafe CF sekitar pukul 22.15 dan membakarnya. Keenam, kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan ayah kandung dan ayah tiri terjadi di Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Polres Tangsel mengungkap pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh JS (31 tahun) ayah tiri PA (10 tahun) dan ROR (7 tahun). PA diperkosa dan ROR dicabuli sejak Februari 2017 tatkala sang ibu kedua gadis itu berdagang sayuran. Begitu pula Nisin (44 tahun) duda warga Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangsel menghamili anak kandungnya IN (17 tahun) sejak dua tahun lalu dan melahirkan 2 anak hasil perkosaan sang ayah kandung. Para pelaku mengancam korban agar tidak melaporkan pada pihak mana pun. Terbongkarnya kasus karena korban melahirkan meski status gadis sehingga diketahui para tetangganya. Anak yang dilahirkan diadopsi pihak lain. Ketujuh, AL 8 tahun siswi kelas 4 SDN Gondosari, Kecamatan Gebog, Kudus, Jawa Tengah warga Nalumsari Kabupaten Jepara (tetangga Kudus) dibuli atau korban perundungan di kelas pada jam sekolah (pukul 08 - 09 Wib) oleh teman sekelasnya Rabu 19 Juli 2017. Kekerasan itu dalam bentuk dipukul, ditindih dengan kursi, kemaluannya ditusuk penggaris besi hingga lecet. Pemicunya, korban tidak mau menuruti keinginan pelaku sebagai ketua geng bernama Geng Fisa berinisial F. Kelompok geng terdiri sembilan anak. Saat kejadian di kelas, guru sedang rapat di kantor sekolahnya. Kasus ini masuk meja Polres Kudus Sabtu 29 Juli 2017 dan telah divisum di puskesmas dan Rumah Sakit Lukmonohadi Kudus. Selanjutnya, kasus ditangani Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kudus. Sejak kejadian itu, korban dipindah ke sekolah lain. Korban mendapat pendampingan dari Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus dengan memvisum korban, assesment pada korban dan pelaku, mengedukasi pada keluarga dan pelaku. Hingga ditulisnya naskah ini, kasus tersebut belum diperoleh penulis hasil akhir penegakan hukumnya.

Selain itu, Budiansyah bin Anda (29 tahun) terdakwa perkara pemerkosaan dan pembunuhan terhadap LN (2 tahun) divonis mati oleh Ketua Majelis Hakim PN Cibinong, Jawa Barat, Indah Watukumala Wulan, didampingi hakim anggota RA Rizkiyati dan Eko Julianto, Kamis 19 Januari 2017. Putusan itu lebih berat daripada tuntutan jaksa yang menuntut hukuman seumur hidup. Terdakwa membunuh berencana dan secara sadis di luar perikemanusiaan, terdakwa dinilai tak menyesali membunuh anak satu-satunya di rumahnya Kampung Pabuaran Bogor 8 Mei 2016. Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP dan Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, Kalimantan Timur menerapkan pemberatan hukuman kejahatan seksual pada anak pada pelaku Jurjani alias Ijur. Jurjani melakukan tindak pidana pada Agustus 2016. Jaksa mengenakan Pasal 81 ayat 1 dan 5 jo Pasal 76 huruf D Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Dakwaan alternatif menggunakan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP dengan tuntutan seumur hidup. Hakim memutuskan pembunuhan berencana dengan putusan hukuman mati.

Pentingnya Fatwa MUI tentang Kebiri

Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF Selasa 17 Mei 2016 menilai, hukuman berat layak diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. MUI pun mendukung pemerintah untuk mengeluarkan hukuman kebiri karena sudah meresahkan. Dalih lain, dalam pandangan Islam, hukuman kebiri masuk dalam hukuman *ta'zir* atau tambahan yang boleh dikeluarkan dan diserahkan kepada kebijakan pemerintah, terlebih belum adanya UU yang mengatur mengenai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Hasanuddin menambahkan, pemerintah perlu mengkaji agar hukuman kebiri dapat dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Lebak, Banten tidak setuju adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 karena suntik kebiri dengan obat antiandrogen bagi pelaku kejahatan seksual tidak tepat karena tidak bisa memutus mata rantai pelaku kejahatan seksual pada anak. Kebutuhan biologis merupakan kepentingan dasar manusia dan kebiri merusak salah satu organ tubuh yang berakibat tak berfungsinya organ. MUI Lebak lebih setuju penerapan hukuman berat di atas 20 tahun atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Hingga ditulisnya naskah ini, MUI belum menerbitkan fatwa tentang hukuman kebiri. Padahal jauh sebelum ada Perppu kebiri, Ketum MUI K.H Ma'ruf Amin (saat itu, kini menjadi Wapres) Kamis 22 Oktober 2015 menyarankan agar pemerintah meminta fatwa MUI sebelum memberlakukan hukuman kebiri untuk menghindari permasalahan regulasi antara hukum Islam dengan ketentuan hukum pidana. Harapan Amin, seharusnya minta fatwa dulu dari MUI, bila MUI mengeluarkan keputusan yang berbeda dengan pemerintah tidak menjadi kontroversi. Belum adanya aturan yang membolehkan hukuman kebiri, perlu pembahasan lebih detail, apakah kebiri dibenarkan dari sudut pandang Islam. MUI siap melakukan kajian bila pemerintah meminta pendapat perihal hukuman kebiri.

Tidak memintanya fatwa pada MUI oleh pemerintah dapat dimaknai tidak mempertimbangkannya kajian aspek hukum Islam di negara yang mayoritas warganya muslim. Hal ini berdampak tidak optimalnya kinerja UU yang semula Perppu. Dengan kasus ini, meski meminta fatwa MUI bagi pemerintah bukanlah keharusan, tetapi setidaknya-tidaknya dengan fatwa MUI tentang kebiri menjadi pengokoh bahwa kebiri memiliki dasar hukum (Islam) atau tidak memiliki dasar hukum dalam Islam. Hal yang perlu dipahami adanya kata bijak: *ad-dharuratu tubihu al-mahdhurat* (keadaan yang mendesak dapat memperbolehkan hukuman yang sebenarnya terlarang). Akan tetapi kata bijak ini belum bisa diterapkan dengan pemberlakuan kebiri perspektif hukum Islam karena MUI belum dimintai fatwa. Hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk diutamakan pemerintah selain diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri adalah mengevaluasi pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi.

SIMPULAN

Pemicu munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Kebiri menjadi dinamika kajian hukum dan hukum Islam. DPR RI dan pemerintah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016. Pemicu terbitnya Perppu kebiri diawali keprihatinan pemerintah dan organisasi pegiat sosial di bidang perlindungan anak atas meningkatnya jumlah/kuantitas dan kualitas tindak kriminal dan pemerkosaan yang diderita anak. Akan tetapi, dinamika politik penerbitan Perppu di DPR dan publik muncul pro-kontra karena model hukuman kebiri bagi pelaku mendapat respon negatif dari pegiat hak asasi manusia dan ahli medis karena ragam persoalan. Hal yang menjadi pertanyaan, terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2016 melalui fase yang melelahkan, tapi hingga kini belum dimanfaatkan oleh hakim dalam memvonis pelaku. Dalam aspek lain, sebagai bahan perhatian pada penegak hukum harus melaksanakan UU kebiri agar tujuan utama tegaknya hukum terwujud. Perlu pula bagi pemerintah meminta fatwa MUI agar publik muslim mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh dalam melaksanakan UU Nomor 17 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Nurul. "Pendidikan Seksualitas." *Kompas*, 2016.
- Adi, Prassetiyo Widodo. *Penerapan Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Jawa Tengah. 2020.
- Faturochman. *Pengantar Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hargens, Boni. "Apologi Negara." *Kompas*, 2016.
- Irawaty, Diah. "Sistem Pengawasan Terpadu Kekerasan Seksual." *Kompas*, 2016.
- Irwanto. "Konsekuensi Perppu Nomor 1 Tahun 2016." *Kompas*, 2016.
- Kartono, Mohamad. "Pemerkosanya Dikebiri." *Kompas*, 2016.
- Pangkahila, Wimpie. "Kebiri Kimia Bagi Penjahat Seksual." *Kompas*, 2016.
- Refrizal, Fahmi. *Analisis Yuridis Penerapan Hukuman Kebiri sebagai Ultimatum Remedium Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. 2019.
- Sa'abah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Sholeh, Asroru Niam. "Wajah Perlindungan Anak 2016." *Kompas*, 2017.
- Susanto. "Presiden Ramah Anak." *Kompas*, 2016.
- Suyanto, Bagong. "Ancaman Kebiri Bagi Pemerkosanya Anak." *Kompas*, 2015.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Wahyudi, M Zaid. "Efektivitas Kebiri Masih Dipersoalkan." *Kompas*, 2015.
- Zaidan, M Ali. "Hukuman Yang Merendahkan." *Kompas*, 2016.

Agama Sebagai Hiperrealitas (Pendekatan Kritis Jean Baudrillard)

Mohamad Za'in Fiqron

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

zfiqron@gmail.com

Abstrak

Hiperrealitas dalam pandangan Jean Baudrillard merupakan duplikasi realitas asli yang menimbulkan efek fantasmagoria, yakni imaji dan narasi yang berefek magis, padahal itu adalah ilusi. Salah satu teknologi Hiperrealitas yang akrab kita temui adalah dunia maya. Artikel ini menjabarkan kontestasi agama di tengah kecanggihan mutakhir teknologi komunikasi. Metode penelitian ini adalah kualitatif yang berbasis kepustakaan. Sumber data ditunjang dari literatur kekinian, kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan kritis Jean Baudrillard. Jean Baudrillard secara khusus tidak membahas agama, akan tetapi basis teorinya dapat dijadikan paradigma dalam memahami fenomena-fenomena keberagamaan di ruang digital. Hasil tulisan ini memperlihatkan agama yang bersifat profetik bisa menjadi profan bila tidak dihayati dengan kesungguhan. Sehingga masyarakat yang ingin menjadi agamis dengan kecanggihan teknologi, perlu memperhatikan antara yang punya otoritas dengan yang tidak, yang fakta dan yang opini. Dengan cara seperti itu, diharapkan banyak dari kita tidak terjebak dari komodifikasi agama. Lebih lanjut, pembacaan ini menjadi penting sekaligus otokritik terhadap cara beragama kita.

Kata Kunci: Teori Agama; Postmodern; Hiperrealitas; Jean Baudrillard.

Abstract

Hyperreality in Jean Baudrillard's view is a duplication of the original reality that creates a phantasmagoric effect, namely imagination and narrative that have a magical effect, while it is an illusion. One of the familiar hyperreality technologies we encounter is the virtual world. This article describes the religious contestation in the midst of the latest sophistication of communication technology. This research method is literature-based qualitative. The data sources are supported from the current critical literature, then processed and analyzed using the Jean Baudrillard approach. Jean Baudrillard does not specifically discuss religion, but the theoretical basis can be used as a paradigm in understanding religious phenomena in the digital space. The result of this paper is that a prophetic religion can become profane if it is not lived seriously. So that people who want to be religious with technological sophistication, need to pay attention to those who have authority and those who don't, facts and opinions. In this way, it is hoped that many of us will not be trapped in the commodification of religion. Furthermore, reading this becomes important as well as self-criticizing our way of religion.

Keywords: *Theory of Religion; Postmodern; Hyperreality; Jean Baudrillard.*

PENDAHULUAN

Abad ke-21 ini perkembangan teknologi komunikasi melaju dengan pesat. Secara umum, teknologi komunikasi bisa kita temui pada sosial media dan video *streaming* dengan pelbagai derivasinya. Teknologi yang ditopang koneksi internet ini, memang terbukti mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Misalnya berkirim pesan dapat dilakukan dalam hitungan detik dengan *klik* pada gawai. Perkembangan mutakhirnya, dapat melakukan interaksi tatap muka (*video call*) yang dilakukan dalam kapasitas banyak pengguna. Seperti yang kita jumpai pada aplikasi *zoom*, *g-meet*, dan seterusnya.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks Baudrillard memicu hiperrealitas, yakni realitas semu yang dibuat seakan-akan asli. Efeknya adalah melahirkan beraneka ragam *fantasmagoria*, yaitu pesona benda, citra, dan berita yang mengagumkan, akan tetapi sebetulnya adalah ilusi. Pesona itu disebarkan melalui teknologi simulasi, yang di era kekinian bisa kita temukan pada TV, internet, sosial media, dan seterusnya (Sugiharto, 2019, p. 91).

Melalui teknologi simulasi, agama bisa dinarasikan oleh siapa saja. Bila dicermati dengan teliti, hal itu menimbulkan kekaburan religiusitas. Tidak mudah membedakan antara yang profan dengan yang profetik, yang mempunyai otoritas dengan yang tidak, mana yang fakta dan yang opini, dan yang berkepentingan pribadi. Kondisi semacam inilah yang pada gilirannya mengkonstruksi sisi religiusitas publik pada umumnya, dan yang ingin menjadi agamis pada khususnya (Ulya, 2018, p. 293).

Pembacaan ini menjadi penting, sebab semakin banyak kita temukan narasi-narasi berbau agama di ruang simulasi. Secara teoritis kajian ini bermanfaat untuk menganalisis gejala-gejala sosial keagamaan di tengah kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Sedang secara praktis, pendekatan seperti ini diharapkan mampu menjadi otokritik terhadap cara beragama kita di ruang simulasi.

Penelitian yang berkaitan tentang hiperrealitas agama sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Di antaranya oleh Muslih Aris Handayani bersama Mukti Ali yang berjudul "Antara Agama dan Imajinasi: Identitas Simbol Ibadah dalam Perspektif Post Komunikasi, Post Spiritualitas, dan Hiper Spiritualitas", yang mengkaji pengalaman keagamaan dalam bingkai hiperrealitas (Handayani & Ali, 2020). Kemudian tulisan Dedi Apriadi yang berjudul "Pandangan Alkitab

Terhadap Fenomena Hiperrealitas di Era Revolusi Industri 4.0”, di dalam tulisan tersebut Dedi Apriadi mengupas penggunaan teknologi berbasis teologi yang berfokus pada fenomena hiperrealitas (Apriadi, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu, sikap penulis adalah untuk mengembangkan sekaligus menyegarkan tulisan sebelumnya. Adapun tulisan sebelumnya cenderung berfokus pada permasalahan yang khusus. Sedangkan dalam tulisan ini, penulis berupaya memfokuskan teori Baudrillard pada kajian sosial keagamaan dengan cara mengabstraksinya ke dalam fenomena umum. Dengan seperti itu, tulisan ini diharapkan mampu mengelaborasi berbagai tulisan sebelumnya. Lebih lanjut, penulis ingin menunjukkan bahwa teori Baudrillard dapat membantu menjadi pisau analisis studi keagamaan, terutama di ruang digital.

KAJIAN LITERATUR

Sekilas tentang Jean Baudrillard

Jean Baudrillard (1929-2007) adalah salah satu teoritikus paling kontroversial yang berpengaruh di zaman dan generasi sesudahnya. Namanya sering dipandang sebagai pemikir Postmodernisme, kendati ia menolak penyebutan itu. Baudrillard lahir pada tahun 1929 di Reims, Prancis. Ia adalah cucu petani dan orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Ia orang pertama dalam keluarganya yang masuk ke dunia intelektual (Proto, 2020, p. 1).

Baudrillard mulianya seorang *Marxis*, hal ini dapat ditelisik dari karya-karya awalnya. Namun, dalam perkembangannya, ia mengkritisi *Marxisme*, termasuk Lefebvre dan Sartre. Menurutnya, *Marxisme* kurang menyoroti dunia konsumerisme, dan hanya berfokus dengan dunia produksi dan kelas sosial. Ia menggeluti teori Post Strukturalisme, untuk kemudian dijadikan cara baru dalam membaca situasi zamannya (Deal & Beal, 2004, p. 40).

Tahun 1966, Baudrillard berhasil menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Nanterre, Paris, Prancis, dengan Henri Lefebvre, Roland Barthes, dan Pierre Bourdieu sebagai pembimbingnya. Sebelum lulus, ia sempat mengajar bahasa Jerman di beberapa sekolah menengah di Paris. Setelah lulus, ia bekerja sebagai dosen di Universitas Paris X, Nanterre. Menjadi asisten profesor sejak tahun 1966-1968, berlanjut Asosiasi Profesor, barulah pada 1972 ia menjadi Profesor dengan karya ilmiah yang berjudul *The Other by Himself* (Lechte, 1994, p. 233).

Pada tahun 1969, Baudrillard bergabung dengan Roland Barthes di *Ecole des Hautes Etudes*, Prancis. Dari sini ia mulai terpengaruh strukturalisme Roland Barthes, di samping pemikiran Karl Marx. Selama berada di sana, Baudrillard rajin menulis dan aktif dalam gerakan sosialisme Prancis. Pada 1970, Baudrillard melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, dan tahun 1973 berkunjung ke Kyoto, Jepang. Kedua kunjungan ini ditujukan untuk mengupas pemikiran-pemikirannya. Kemudian pada 1986, Baudrillard pindah mengajar ke Institut *Recherche et d'Information Socio-Économique* (Hidayat, 2021, p. 73).

Kurun waktu 1980-an dan 1990-an, karya-karya Baudrillard mulai mendapat perhatian banyak khalayak. Selanjutnya, ia ikut berperan aktif dalam penerbitan jurnal *International Journal of Baudrillard Studies* sejak berdiri tahun 2004 hingga akhir hidupnya. Selain sebagai intelektual, Baudrillard juga seorang fotografer pada tahun 1999-2000. Kemudian di tahun 2004, Baudrillard menghadiri konferensi besar tentang karyanya, "*Baudrillard and the Arts*", yang diselenggarakan di Pusat Seni dan Media, Karlsruhe, Jerman (Hidayat, 2021, p. 74).

Tercatat, Baudrillard merupakan intelektual yang produktif dan kreatif dalam menulis. Karya awalnya berfokus pada pembacaannya tentang Marxis, yakni: *The System of Object* (1968), *The Consumer Society: Myths and Structures* (1970), dan *For a Critique of the Political Economy of the sign* (1972). Fase berikutnya, ia menulis karya yang mengkritik Marxis, di antaranya: *The Mirror of Production* (1975) dan *Symbolic Exchange and Death* (1976). Dan pada fase lanjut, yakni berpisah dengan Marxisme, hal ini terdapat pada karyanya: *Seduction* (1979), *Simulations* (1983), *Fatal Strategies* (1983), dan *The Transparency of Evil* (1993). Selain itu, masih banyak karya Baudrillard yang merefleksikan kondisi masyarakat Barat pada umumnya, di samping juga menulis banyak jurnal (Hidayat, 2021, p. 75).

Pemikiran Jean Baudrillard banyak menyoroti kondisi masyarakat *pasca* Modern yang berfokus dalam bidang kebudayaan, sosiologi, ideologi, filsafat, dan komunikasi massa. Dalam perjalanan intelektualnya, ia banyak dipengaruhi oleh Karl Marx, F. Nietzsche, Claude Levi-Strauss, Louis Althusser, Georges Bataille, Marcel Mauss, Lefebvre, Jacques Lacan, Roger Caillois, Gilles Deleuze, filsuf Mazhab Frankfurt, dan Marshall McLuhan (Salamah, 2015, p. 119).

Baudrillard dalam *Consumer Society: Myths and Structures* menerangkan bahwa konsumsi menjadi basis utama tatanan masyarakat. Pemikiran Baudrillard menjungkirbalikkan asumsi yang selama ini diyakini dalam ekonomi bahwa kebutuhan merupakan hasil produksi. Menurutnya, orang membeli barang sebenarnya bukan untuk memenuhi kebutuhan, melainkan lebih sebagai kebutuhan untuk memperoleh tanda (*sign*) yang berwujud pengakuan sosial sebagai manusia modern (Haryatmoko, 2016, p. 119).

Baudrillard meminjam analisis struktural untuk membongkar eksistensi masyarakat konsumerisme. Konsumsi baginya merupakan efek saling ketergantungan tanda-tanda. Akan tetapi, dalam arti lain tidak ada keterkaitan langsung antara penanda dan petanda. Objek konsumsi menjadi sistem klasifikasi dan objek pun ikut mempengaruhi perilaku. Objek konsumsi membentuk sistem tanda yang membedakan kelas masyarakat. Objek konsumsi dipandang sebagai sesuatu yang “diorganisir” oleh tatanan produksi (Haryatmoko, 2016, p. 73).

Masyarakat konsumeris ditandai oleh pertukaran simbolis yang menggantikan pertukaran ekonomi. Dalam pertukaran simbolis, kedua pihak mempunyai peran dan posisi yang sama kuat. Setiap orang melakukan dua proses timbal balik sekaligus. Gagasan pertukaran simbolis ini berbeda sekali dengan pertukaran dalam kapitalisme. Masyarakat tidak lagi hanya didominasi oleh produksi, tetapi juga oleh berbagai dominasi lain, yakni media, informasi, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

Alhasil, orang mengkonsumsi sesuatu bukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan mengonsumsi simbol. Simbol ini dapat ditemukan sebagaimana terdapat pada *merek* objek konsumsi. Dalam *term* Baudrillard, seseorang dalam membeli sesuatu berdasarkan *merk* tertentu, semakin mahal *merk* tersebut, maka semakin tinggi kelas sosialnya. Selanjutnya, budaya konsumerisme ini ditopang oleh kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi.

Simulakra dan Simulasi

Simulakra berakar dari kata *Simulacrum*. Dalam kamus *Oxford*, istilah *Simulacrum* berarti “sesuatu yang terlihat seperti seseorang/sesuatu yang lain atau yang dibuat agar terlihat seperti seseorang/sesuatu yang lain”. Kata “simulacra” pertama kali digunakan pada abad ke-16, untuk menjelaskan representasi melalui seni patung dan lukisan. Istilah ini kemudian diambil oleh Baudrillard untuk menjelaskan kondisi masyarakat *pasca* Modern (Hidayat, 2021, p. 115).

Baudrillard dalam bukunya *Simulacra and Simulations* menyebut kondisi masyarakat Barat *pasca* Modern ditandai sebagai masyarakat simulasi. Model hidup masyarakat simulasi berdasarkan kekacauan tanda, kode, dan simbol yang ditentukan sebagai produksi dan reproduksi. Selanjutnya Baudrillard menjelaskan bahwa simulasi adalah proses/strategi intelektual untuk menciptakan simulacra. Dengan kata lain simulacra adalah tempat berlangsungnya mekanisme simulasi (Murtiningsih, 2020, p. 3).

Dalam simulakra, prinsip era modern menjadi tidak relevan. Jarak antara objek dan subjek, nyata dan semu, penanda dan petanda, dalam pengertian modernitas sudah tidak bisa lagi diterapkan. Simulakra bekerja dalam proses diseminasi sosial (*social dissemination*). Proses diseminasi sosial merupakan proses pelipatgandaan dan penyebaran secara sosial, tanda, citra, informasi dan tanda-tanda komoditas yang berkembang secara seketika (*instant neousness*), mengikuti model pertumbuhan kode genetika. Simulasi mengandaikan diri pada prinsip ketiadaan dan negasi, dengan cara mengaburkan atau bahkan menghilangkan referensi, realitas, dan kebenaran. Lebih lanjut, simulasi mengedepankan penampilan (citra) sebagai kebenaran ontologis (Haryatmoko, 2016, p. 79).

Baudrillard menyebut bahwa hilangnya perbedaan antara realitas asli dengan semu, ditopang oleh sejumlah fenomena, di antaranya: (Hidayat, 2021, p. 121)

1. Kemajuan teknologi media, dalam hal ini meliputi TV, iklan, *screen* teknologi, dan internet. Media ini berperan dalam mengaburkan antara produk yang benar-benar dibutuhkan dengan produk yang sengaja diciptakan oleh iklan-iklan.
2. Konsep nilai-tukar, yang di dalamnya nilai objek didasarkan pada harganya daripada kegunaannya.

3. Perkembangan kapitalisme lanjut, yang memisahkan barang-barang produksi dari tumbuh-tumbuhan, alam, masyarakat dengan kebudayaannya, yang digunakan untuk membuatnya.
4. Fenomena urbanisasi, yang memisahkan manusia dari dunia bukan manusia, dan memusatkan kembali kebudayaan manusia di sekitar sistem produksi yang begitu besar. Sehingga menyebabkan keterasingan (alienasi).
5. Perkembangan bahasa dan ideologi, yang di dalamnya bahasa kini semakin terperangkap dalam produksi relasi kekuasaan antarkelompok sosial, khususnya ketika kelompok-kelompok yang berkuasa melembagakan diri mereka.

Dunia Hiperrealitas

Baudrillard dalam bukunya *Simulations* menjelaskan bahwa hiperrealitas ialah simulasi berlebih atas sesuatu yang tidak pernah benar-benar ada. Gagasan Baudrillard tentang hiperrealitas bertolak dari beberapa asumsi terkait hubungan manusia dengan media (*mediascape*). Media massa menjadi produk budaya yang menyebar ke segala khalayak dan tersebar di mana-mana. Media massa menjadi ruang manusia untuk membentuk identitasnya (Hidayat, 2021, p. 134).

Dalam hiperrealitas, realitas buatan tidak lagi memiliki referensi dan kebermaknaan. Baudrillard hendak menunjukkan bahwa hiperrealitas adalah konsekuensi logis dari perkembangan dunia simulasi dan simulakra. Jika di dalam ruang simulakra itu tidak dapat dibedakan antara yang nyata dengan yang semu, yang otentik dengan yang tiruan. Maka di dalam hiperrealitas, realitas buatan, realitas imajiner, justru tampak lebih nyata dan meyakinkan daripada realitas yang asli. Dengan bantuan media massa, atau dalam konteks ini dengan *screen* teknologi, realitas-realitas ditampilkan secara lebih meyakinkan seakan-akan itu adalah realitas yang sebenarnya (Hidayat, 2021, p. 134).

Dengan demikian hiperrealitas dapat dipahami sebagai efek, keadaan, atau pengalaman kebendaan atau ruang yang dihasilkan dari proses simulasi. Awal dari era hiperrealitas, menurut Baudrillard, ditandai dengan lenyapnya petanda, dan metafisika representasi; runtuhnya ideologi, kebangkrutan realitas yang kemudian diambil alih oleh duplikasi dari dunia nostalgia dan fantasi (Salamah, 2015, p. 123).

Tanda kemudian tidak lagi merepresentasikan sesuatu. Oleh karena pertanda sudah mati, maka satu-satunya referensi dari tanda yang ada adalah massa. Massa menurut Baudrillard adalah mayoritas konsumen yang diam. Massa ini menyerap informasi, tanda, pesan-pesan maupun norma akan tetapi tidak pernah merefleksikan tanda, pesan, makna atau gaya-gaya yang diambil dari berbagai sumber mitologi, ideologi, kebudayaan masa lalu atau masa kini. Massa bercampur aduk, berinteraksi, saling silang, saling tumpang tindih membentuk jaringan skizofrenik (dunianya sendiri) (Salamah, 2015, p. 124).

Tinjauan Hipersemiotika

Diskursus hipersemiotika merupakan perkembangan sekaligus kritik dari semiotika strukturalisme. Istilah semiotika berasal dari bahasa Yunani, *semion*, yang berarti tanda. Semiotika atau semiologi menurut Barthes, pada prinsipnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity), memaknai segala sesuatu. Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam arti dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, melainkan juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna adalah hubungan antara suatu objek atau ide dan suatu tanda (Thalib, 2018, p. 23).

Hipersemiotika merupakan sistem penandaan yang melampaui struktur penandaan sebelumnya. Jika dalam kerangka pikir semiotika strukturalis terdapat konsep petanda, maka dalam hipersemiotika konsep petanda sama sekali kosong, sebab isi dari petanda sebetulnya adalah penanda. Dengan demikian, yang ada hanyalah rantai penanda. Kekosongan petanda ditunjukkan dalam konsep simulasi, simulakra, dan hiperrealitas Jean Baudrillard.

Hipersemiotika hadir dalam rangka menghancurkan ketunggalan makna yang berpihak pada objektivitas, universalitas, dan totalitas. Di samping itu, hipersemiotika menolak tradisi struktural. Dalam hal ini, hipersemiotika bukan berarti anti struktur, melainkan memiliki struktur namun dengan struktur yang fleksibel dan dinamis. Hal ini dapat dipahami melalui karakteristiknya yang mengedepankan subjektivitas dan parsialitas. Dalam konteks ini, ketakterbatasan makna sangat dimungkinkan.

Baudrillard menyatakan bahwa media massa mempunyai fungsi untuk menetralsir sifat yang dihayati unik, dunia yang merupakan peristiwa, untuk mengganti dunia plural dengan dunia yang homogen. Homogenitas

ini lahir dari penyamaan penanda dengan petanda. Tanda dianggap sebagai penghubung antara penanda dan petanda. Semisal pada anak-anak dan orang primitif, penanda bisa hilang demi petanda. Dalam arti gambar sering dianggap makhluk hidup yang mau direpresentasikan. Orang primitif akan bertanya di mana orang yang tadi muncul di TV. Sebaliknya, pada gambar yang memusatkan pada diri sendiri penanda menjadi petanda itu sendiri (Darsono & Aprilia, 2020, p. 73).

Konsumsi membawa model pemahaman yang bias. Maksudnya yang dikonsumsi sebenarnya adalah penanda yang hanya akan menunjuk ke penanda-penanda lain. Dampaknya ialah sangat sistematis, karena media berperan sebagai aparat sosialisasi dan meyakinkan untuk bertindak seperti diharapkan pasar. Dengan arti lain, orang akan patuh mengikuti pesan yang disampaikan media. Bukannya pergi ke dunia melalui mediasi gambar, tetapi gambar yang kembali pada dirinya dengan berputar melalui dunia. Sehingga penanda akhirnya menunjuk kepada dirinya sendiri di balik bias petanda (Haryatmoko, 2016, p. 75).

PEMBAHASAN

Media Massa dan Komodifikasi Agama

Media massa dengan segala variannya memiliki peranan penting di kehidupan masyarakat. Media massa secara umum dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, sebagai piranti teknologi memainkan peran diseminasi informasi kepada audien yang lebih luas dan heterogen. Kedua, sebagai institusi sosial, yang sangat terorganisasi atau memiliki hubungan jelas dalam mengumpulkan, memproses, mengemas, dan mendiseminasikan informasi bagi konsumsi publik. Dengan demikian, media massa merupakan institusi sosial atau sistem yang memiliki fungsi sebagaimana institusi sosial lain, termasuk institusi agama (Haryanto, 2015, pp. 214–215).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada gilirannya mendorong perkembangan agama. Misalnya penyebaran agama melalui dakwah bisa dilakukan dengan siaran televisi maupun internet. Selanjutnya, media massa memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan agama yang memungkinkan orang untuk memiliki semangat hidup, ketaatan mematuhi aturan Tuhan, dan prinsip-prinsip hidup bersama sehingga berdampak positif bagi perkembangan masyarakat (Haryanto, 2015, p. 215).

Sementara itu, perkembangan media massa ini membuat para pengusaha dapat memanfaatkan dan menjual sesuatu yang berbau agama. Sebagaimana yang dilakukan para pelaku bisnis di industri televisi. Berbekal kreativitas, mereka mengemas *syariah*, *fiqih*, aqidah dan ilmu-ilmu lain dalam Islam untuk ditayangkan di dalam sebuah program tayangan demi menyesuaikan dengan selera pasar. Hal inilah yang disinggung oleh Baudrillard, kapitalisme lanjut berfokus pada logika konsumsi (Amirudin, 2018, pp. 61–62).

Berbagai cara dilakukan oleh stasiun televisi untuk memasukkan konten religi ke dalam program tayangan televisi, mulai dari tayangan sholat pada hari raya Islam, pengajian besar atau *tabligh akbar*, hingga membuat sinetron yang berbasis ajaran Islam. Program tayangan berbasis religi Islam dapat berbentuk sinetron, talkshow (ceramah dengan kehadiran jemaah), kuliah tujuh menit (Kultum), program ramadhan, reality show, dan sebagainya (Amirudin, 2018, p. 63).

Setiap program tayangan tentunya memiliki cara sendiri untuk menyampaikan atau mengkomodifikasi ajaran Islam. Sebagaimana pada sinetron religi, yang menjual sisi keislaman dengan menampilkan kehidupan sehari-hari beberapa tokohnya dengan menyisipkan permasalahan hidup hingga solusi memecahkan masalah dengan cara-cara yang Islami. Program tayangan religi lain yang ada di Indonesia adalah program religi dengan genre reality show. Jenis program ini menayangkan sebuah kejadian nyata dari kehidupan sehari-hari manusia. Adapun kehidupan sehari-hari yang diangkat pada program tayangan ini menunjukkan tindakan-tindakan berdosa manusia dan konsekuensi dari perbuatan dosa tersebut.

Agar komoditas itu bisa terus-menerus diproduksi dan dikonsumsi, maka komoditi haruslah bersifat temporer. Selera masyarakat dibentuk, diubah-ubah dan dibolak-balik oleh produsen yang menggunakan sistem kode dalam produksinya. Untuk mempercepat konsumsi, sejumlah selebritis digunakan. Dalam industri budaya massa, selebritis menjadi sangat penting sebagai alat pemicu budaya konsumsi. Selebritis merupakan representasi ideal dari keunggulan budaya massa (Syahputra, 2016, p. 133).

Produksi komoditas yang berlangsung secara kontinyu melalui berbagai penggunaan media inilah yang menjadi akar terbentuknya budaya populer yang menyertai budaya konsumen. Karena diproduksi dan dikonsumsi secara terus menerus melalui berbagai jasa media massa, terbentuk struktur perasaan yang sama di antara masyarakat. Kebudayaan menjadi semacam respon atau akibat yang sangat spesifik terinternalisasi selanjutnya mengalami objektifikasi dari sesuatu yang bersifat temporer dan lokal.

Melalui perubahan pemaknaan sesuatu yang dikonsumsi sebagai objek menjadi suatu “tanda” dari identitas dan status sosial, masyarakat mengubah orientasi konsumsinya dari memenuhi kebutuhan biologis menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan sosiologis. Aktivitas konsumsi bertransformasi menjadi konsumerisme, bahkan ajaran agama sekalipun melalui ideologi konsumerisme tidak luput menjadi instrumen permainan tanda status sosial.

Melalui proses komodifikasi praktik dan ritual agama diletakkan sebagai landasan tatanan budaya konsumsi. Hal ini sejatinya terjadi melalui mekanisme permainan komoditas sebagai tanda. Di mana menurut Baudrillard tidak lain adalah bentuk penindasan secara halus bahkan lebih berbahaya daripada penindasan kelas yang selama ini menjadi kekhawatiran Karl Marx.

Akibatnya, konsumen tenggelam dalam ranah tanda-tanda yang tergabung dalam komoditas yang sepenuhnya tidak berhubungan dengan kebutuhan aktual. Apa yang dinilai penting pada akhirnya adalah nilai simbolik dari komoditas, dimana kombinasi pencitraan lebih utama daripada kenyataan itu sendiri. Perayaan menjadi lebih penting daripada kebutuhan, sehingga logika manusia sebagai homo economicus perlu dipertanyakan ulang.

Hiperrealitas Agama di Ruang Digital

Kehadiran media massa dan agama simbolik ciptaan simulakra dapat berimplikasi pada semakin menjauhkan khalayak dari spiritualitas terdalam sebagai inti agama. Ruang simulakra telah menciptakan praktek-praktek agama yang dibangun berdasarkan simulasi praktik keagamaan yang kelihatan asli padahal ia merupakan praktik bentukan. Dalam kajian hipersemiotika, praktik keagamaan bentukan atau simulasi itu merupakan tanda-tanda palsu yang jauh dari tanda-tanda objektif yang mengacu pada objek praktik keagamaan itu sendiri. Pada tataran ini, tanda-tanda praktek keagamaan yang didasarkan pada simulasi telah mematikan makna sesungguhnya dari tanda tersebut.

Karena tanda-tanda praktik keagamaan berdasarkan simulasi, maka yang muncul adalah kepalsuan, serta kesemutan atas tanda-tanda praktik keagamaan. Praktik keagamaan hanya sebatas tanda-tanda untuk menutupi tanda-tanda lain yang bertolak belakang dengan makna sesungguhnya dari praktik-praktik ibadah yang real. Praktik keagamaan pada gilirannya telah berbaur dengan simulasi yang sarat kepalsuan, pencitraan, dan personalitas gaya keberagamaan.

Simbol-simbol keagamaan yang sakral dan yang awalnya hanya bisa ditemui dalam upacara dan praktik keagamaan, kini bisa dijumpai masyarakat dalam realitas profan mereka melalui tayangan media massa. Pergeseran dalam masyarakat *pasca* Modern ini semakin tampak dengan hadirnya beragam teknologi media yang memediasi simbol-simbol agama melalui tayangan media massa.

Kemajuan, Kemunduran, dan Kebaruan Agama

Di era Kontemporer saat ini, di mana terdapat gempuran simulasi-simulasi media, agama memiliki peluang untuk berkembang secara global. Caranya adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan positif. Dengan seperti itu, agama-agama bisa saling bekerja sama, untuk mewujudkan nilai-nilai luhur mereka di dalam dunia. Kerja sama ini bisa membuka wawasan masing-masing agama, sehingga semakin terbuka dan bijak (Wattimena, 2020, p. 169).

Sikap positif bermedia ini harus disadari oleh masyarakat. Kemudian para pemuka agama pada khususnya perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Para tokoh agama yang berselancar di media sosial pun harus bijak dan arif dalam menggunakan media sosial. Dengan seperti itu, teknologi tak selamanya menjadi hiperrealitas, namun bisa menjadi media dakwah untuk menyebarkan ajaran agama yang penuh rahmat (Baihaki, 2020, pp. 195–196).

Selanjutnya, simulacra dapat menyebabkan *post-truth* dan hoax yang mengatasnamakan agama. *Post-truth* adalah sebuah rentang masa yang cenderung mengabaikan fakta dan kebenaran. Pada gilirannya, *post-truth* melahirkan hoax (informasi palsu). Hoax biasanya digunakan pihak-pihak tertentu untuk menyulut kebencian, ketegangan, bahkan konflik. Hoax disampaikan melalui narasi yang hiperbolis, dibesar-besarkan dan dilebih-lebihkan, tetapi miskin data. Narasi semacam ini disusun untuk mempermainkan emosi sosial publik sehingga mereka dengan cepat tergerak untuk menanggapi dengan cara menyukai, mengikuti, membenci, menolak, membagikan, dan lain-lain.

Melalui simulakra, berbagai informasi termasuk hoax bisa diakses dengan cepat oleh dan dari siapapun, dimanapun, dan kapanpun, hampir tanpa ada hambatan. Tentang hoax seakan-akan telah menjadi wabah yang menyebar dan ada di mana-mana. Hal ini diperparah lagi dengan budaya publik bernalar *post-truth* yang cenderung menghendaki segala kemudahan

dalam berinteraksi lewat media sosial. daring, mereka seringkali menerima informasi apa adanya, no-filter dan no-koreksi. Informasi yang didapatkan melalui media sosial dijadikan sebagai dasar kebenaran, sekaligus dijadikan dasar untuk mengambil sikap dan menentukan perilaku sendiri maupun orang lain. Saat ini hoax bermetamorfosis menjadi fakta yang dijadikan dasar untuk menghadapi realitas di sekitarnya.

Pada dasarnya, hoax mengabaikan fakta dan logika, demikian pula era post truth. Kedua-duanya sama-sama menampilkan diri dengan cara menggugah emosi, memekarkan sensasi dan bersifat provokasi dalam menarik perhatian publik. Persoalan persoalan keberagamaan berbasis hoax, apalagi hoax yang dibungkus dengan sentimen agama di era post-truth sangat membahayakan kehidupan sosial-keberagamaan dan dalam kenyataannya yang seperti itu sudah banyak menelan korban (Ulya, 2018, pp. 290–291).

Beberapa bukti adalah peristiwa ditetapkannya Ahok sebagai penista agama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Mei 2017 adalah salah satu korban hoax yang disebar oleh Buni Yani (Witjaksono, 2018). Kasus ini terbukti telah mengotak ngotak warga Muslim Jakarta, khususnya, dalam sebuah perdebatan pemilihan kepala daerah, harus Muslim kah atau tidak. Terjadi saling berebut tafsir atas QS. al-Maidah 51.

Kemudian contoh lain bahwa saat ini pelaku teroris tampaknya juga menyadari sifat media sosial daring yang cepat dan efektifitasnya dalam menaklukkan sikap dan perilaku publik, khususnya generasi muda milenial, maka mereka seringkali menyebarluaskan pesan-pesan, menyusupkan ideologi, dan ajakan berpartisipasi dalam aktivitas yang berhubungan dengan aksi kelompok teroris. Dian Yulia Novi, tersangka teroris yang membawa bom panci siap ledak saat upacara pergantian Paspampres di Istana Presiden, Minggu 11 Desember 2016, yang berhasil ditangkap Densus 88, mengaku mengenal ajaran radikal lewat media sosial facebook hanya selama satu tahun (Ulya, 2018, pp. 294–295).

Alhasil, di ruang-ruang simulakra agama bisa dijadikan instrumen untuk kepentingan tertentu. Hal itulah yang kemudian memunculkan hoax dan *post-truth*, sehingga masyarakat perlu bersikap kritis terhadap ajakan-ajakan di media massa pada umumnya. Caranya adalah dengan melakukan konfirmasi dengan teliti.

Sementara itu, bila direfleksi lagi, agama dalam ranah simulakra justru menggagalkan tesis sekularisme. Pada abad 19, para intelektual Barat

berpendangan bahwa melalui modernisasi dan rasionalisasi, agama akan punah dan masyarakat akan sepenuhnya sekular. Tesis ini bisa dilacak lewat pemikiran semisal Auguste Comte, Feuerbach, Marx, Freud, yang berpendapat agama sebagai ilusi kolektif. Agama akan ditinggalkan ketika sains, teknologi, dan rasionalitas sekuler mendominasi masyarakat (Hardiman, 2018, p. 187).

Terlepas dari apakah agama bersifat simulasi di ruang simulakra, menjadi jawaban atas sekularisasi. Agama di abad ke-21 ini mengalami kebangkitan dan bahkan menjadi faktor yang ikut menentukan dalam kehidupan *pasca* Modern. Bahkan kemunculan agama ini tidak hanya di belahan Barat, akan tetapi mengalami globalisasi dengan ditopang kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, tak jarang isu yang muncul di ruang simulakra kini adalah agama.

Refleksi Pemikiran Jean Baudrillard

Pemikiran Baudrillard tampaknya memang menggambarkan kondisi masyarakat Barat *pasca* Modern. Pada gilirannya, pemikiran Baudrillard ini tetap mengelaborasi kondisi kebudayaan seluruh dunia. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi meluas dan mengglobal bersamaan dengan kebaruan-kebaruan fitur yang ditawarkan. Kata kunci pemikiran Baudrillard sebagaimana konsepnya tentang logika konsumsi, simulasi, simulakra, dan hiperrealitas, membantu banyak dari kita untuk menganalisis fenomena baru yang semakin hari banyak variannya.

Pemikiran Baudrillard ini juga tepat untuk menjadikan otokritik bagi keberagaman kita. Bagaimana kemudian kita beragama secara sungguh-sungguh ataukah beragama secara simbolik atau bahkan beragama berdasarkan logika konsumsi. Oleh karena itu, pembacaan mengenai Baudrillard perlu dikaji secara teliti. Sehingga kemudian kita tak mudah juga terbawa arus provokasi-provokasi di dunia digital. Terlebih, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa era digital sekarang ini banyak simbol-simbol keagamaan yang memicu fanatisme, intoleransi, dan bahkan hoax yang mengatasnamakan agama.

Lebih lanjut, dalam menghadapi era kontemporer saat ini, diperlukan sikap yang lebih kritis, reflektif, dan objektif. Sikap seperti ini diperlukan sebagai filter agar tidak berkembang cara pandang *a priori*, *fatalis*, dan *nihilis* terhadap kebudayaan kontemporer sekarang ini, bagaimana pun sedang kita hidupi. Era Kontemporer, atau apapun namanya, adalah fakta sosial yang masih terus membentuk dirinya.

Keterbukaan, kelenturan, dan keberanian menghadapi berbagai konsekuensi yang mungkin hadir di masa depan adalah sikap-sikap penting yang harus kita miliki. Alhasil, diperlukan landasan filosofis, etis, dan agama diharapkan mampu menjadi pemandu jalan dan sekaligus penjaga akal sehat menuju peradaban baru. Tanpa landasan moral dan agama yang kokoh, maka pembacaan dan penyikapan realitas sosial dan kebudayaan saat ini, bisa jadi hanya akan kembali kepada sikap nihilisme, fatalisme, yang justru akan melahirkan berbagai persoalan kemanusiaan dan keagamaan yang baru.

SIMPULAN

Secara eksplisit, pemikiran Baudrillard tidak membicarakan agama. Akan tetapi, teori Baudrillard sedikit banyak membantu untuk menganalisis agama di ruang digital. Baudrillard menggambarkan kondisi masyarakat *pasca* Modern atau kontemporer sekarang ini sebagai masyarakat konsumsi. Konsumsi dalam artian bukan sekedar pemenuhan biologis, seperti makan dan minum, aka tetapi terkait konsumsi tanda dan citra.

Selanjutnya Baudrillard menyebut bahwa masyarakat saat ini hidup dalam ruang simulakra yang dipenuhi simulasi-simulasi. Dengan itu, menghadirkan hiperrealitas sebagai konsekuensi dunia simulacra. Efeknya bisa hilangnya kesadaran akibat fantasi dan imaji yang ditawarkan media massa pada khususnya. Tampanya, teori Baudrillard cenderung bersikap negatif terhadap teknologi.

Dalam konteks keagamaan, tidak jarang kita temui keberagaman yang sifatnya simbolik di dunia maya. Dengan artian, keberagaman dalam *term* Baudrillard sekedar imaji-imaji dan citra-citra. Oleh karena itu, sudah seharusnya teknologi informasi dan komunikasi perlu diperhatikan dalam penggunaannya, khususnya menjadi otokritik apakah keberagaman kebanyakan dari kita bersifat simbolik atau benar-benar dengan kedalaman makna.

Penulis sendiri menyadari banyak kekurangan dalam penelitian ini. Salah satunya, penulis kekurangan acuan primer dan kekurangan lainnya, baik dari segi isi maupun kepenulisan. Oleh karena, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Penulis sendiri berharap ada yang mau meneliti Jean Baudrillard dan filosof-filosof kontemporer lainnya, dikarenakan analisis mereka sangat canggih dalam mengkaji kondisi zaman. Dengan adanya kajian semacam ini, diharapkan membantu banyak dari kita untuk tidak terjebak dalam simulakra. Alhasil, semoga tulisan ini berkah dan bermanfaat bagi segenap pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin. (2018). *Antropologi Media: Agama dan Produksi Budaya di Layar Kaca* (Pertama). Undip Press Semarang.
- Apriadi, D. (2020). Pandangan Alkitab Terhadap “Fenomena Hiperrealitas Di Era Revolusi Industri 4.0.” *GENEVA: Jurnal Teologi Dan Misi*, 2(2). <https://sttiaa.ac.id/e-journal/index.php/geneva/article/view/36%0Ahttps://sttiaa.ac.id/e-journal/index.php/geneva/article/viewFile/36/24>
- Baihaki, E. S. (2020). Islam dalam Merespons Era Digital. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(2), 185–208. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.1926>
- Darsono, & Aprilia, C. (2020). Pasca Reformasi Dalam Perspektif Post Strukturalis-Hipersemiotik. *Urban Sociology*, 3(1), 16.
- Deal, W. E., & Beal, T. K. (2004). *Theory for Religious Studies*. Routledge.
- Handayani, M. A., & Ali, M. (2020). Antara Agama dan Imajinasi: Identitas Simbol Ibadah dalam Perspektif Post Komunikasi, Post Spiritualitas, dan Hiper Spiritualitas. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 4(2), 125–134. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i2.8592>
- Hardiman, F. B. (2018). *Demokrasi dan Sentimentalitas* (Widiantoro (ed.)). Kanisius.
- Haryanto, S. (2015). *Sosiologi Agama* (Andien (ed.); I). Ar-Ruzz Media.
- Haryatmoko. (2016). *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis* (Widiantoro (ed.)). Kanisius.
- Hidayat, M. A. (2021). *Jean Baudrillard dan Realitas Budaya Pasca Modern* (Taufiqurrahman (ed.)). Cantrik Pustaka.
- Lechte, J. (1994). *Fifty Key Contemporary Thinker: From structuralism to postmodernity*. Routledge.
- Murtiningsih, S. (2020). *Filsafat Pendidikan Video Games: Kajian tentang Struktur Realitas dan Hiperealitas Permainan Digital* (Nurhayati (ed.)). Gajah Mada University Press.
- Proto, F. (2020). *Baudrillard for Architects*. Routledge.

- Salamah, U. (2015). *Perspektif Teori Postmodern Terhadap Problema Sosial Politik Kontemporer*. Penerbit Kafnun.
- Sugiharto, B. (2019). *Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi* (R. Wahyudi (ed.)). Kanisius.
- Syahputra, I. (2016). AGAMA DI ERA MEDIA: Kode Religius dalam Industri Televisi Indonesia. *ESENCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(1), 125. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i1.1283>
- Thalib, A. A. (2018). *Filsafat Hermeneutika dan Semiotika* (D. H (ed.); I). LPP-Mitra Edukasi.
- Ulya, U. (2018). Post-Truth, Hoax, dan Religiusitas di Media Sosial. *FIKRAH*, 6(2), 283. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v6i2.4070>
- Wattimena, R. A. A. (2020). *Untuk Semua Yang Beragama* (Victi (ed.)). Kanisius.

Implementasi Moderasi Beragama M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam

Mohammad Agustian Andi Nugroho

ristiananisa@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Kudus

Abstrak

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku, golongan, ras dan agama, tentu sangat mudah terciptanya perpecahan di dalamnya. Perpecahan bangsa Indonesia banyak bersumber dari ideologi-ideologi liberal dan ekstrimis yang masuk dalam ajaran Islam. Untuk melawan dua arus besar tersebut, saat ini pemerintah Indonesia tengah gencar-gencarnya untuk mewujudkan moderasi Islam. Pendidikan merupakan bagian penting dalam mewujudkan cita-cita moderat yang diusung pemerintah Indonesia. Pada konteks Indonesia saat ini, ada salah satu tokoh yang disebut-sebut sebagai mufasir moderat, yakni M. Quraish Shihab. Melalui banyak karyanya, tokoh mufasir Indonesia ini cukup terkenal sebagai ulama yang mengedepankan persatuan bangsa di tengah kemajemukan di Indonesia. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi moderasi beragama perspektif Muhammad Quraish Shihab dan relevansinya terhadap pendidikan agama islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau penelitian kepustakaan. Sumber data berdasarkan sumber data primer (pokok) dan sekunder (penunjang atau pendukung). Sifat penelitian berupa deskriptif kualitatif dimana metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis).

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa implementasi moderasi beragama pada pembelajaran PAI dapat mengacu pada prinsip pengembangan kurikulum integratif dengan memaksimalkan pengembangan materi pembelajaran.

Kata Kunci: Moderasi Beragama; M. Quraish Shihab; Pendidikan Agama Islam

Abstract

Indonesia is a country consisting of many tribes, groups, races and religions, of course it is very easy to create divisions in it. The division of the Indonesian nation stems a lot from liberal and extremist ideologies that are included in Islamic teachings. To fight these two major currents, the Indonesian government is currently incessantly pursuing Islamic moderation. Education is an important part in realizing the moderate ideals promoted by the Indonesian government. In the current context of Indonesia, there is one figure who is touted as a moderate commentator, namely M. Quraish Shihab. Through his many works, this Indonesian exegete figure is quite well known as a scholar who puts forward the unity of the nation in the midst of pluralism in Indonesia. The purpose of this study is to determine the implementation of religious moderation in the perspective of Muhammad Quraish Shihab and its relevance to Islamic religious education.

The type of research used in this research is library research or library research. Data sources are based on primary (main) and secondary (supporting or supporting) data sources. The nature of the research is descriptive qualitative where the method seeks to describe and interpret objects as they are, the data obtained are then analyzed using content analysis techniques.

Based on the results of this study, the implementation of religious moderation in PAI learning can refer to the principle of developing an integrative curriculum by maximizing the development of learning materials.

Keywords: *Religious Moderation; M. Quraish Shihab; Islamic Religious Education*

PENDAHULUAN

Keberagaman merupakan sunnatullah (ketetapan Allah) dalam kehidupan didunia. Perbedaan ras manusia, letak geografis, merupakan perbedaan mendasar yang dapat mempengaruhi perbedaan pandangan. Dari hal ini, keragaman adalah sebuah kehendak Allah yang tidak bisa dihindari, sehingga manusia dituntut untuk bersikap penuh tasamuh atau toleran terhadap orang lain yang berbeda keyakinan atau agama, karena menolak keragaman sama halnya menolak kehendak Allah. (Ertanti, 2016, hal. 1)

Kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang plural tidak bisa dibantah lagi. Keragaman adalah bagian dari ciri khas Indonesia yang harus disikapi oleh setiap warga negara dengan cara yang tepat sehingga bisa menjadi warna yang mampu memperkaya khazanah peradaban bangsa. Meskipun keragaman telah menjadi realitas yang disadari oleh segenap warga bangsa, namun penyikapan yang tepat tersebut masih menjadi persoalan, apalagi ketika keragaman dan perbedaan tersebut terkait dengan keyakinan agama. Keyakinan terhadap agama yang dipeluk oleh seseorang acap kali menutup peluang terhadap adanya kebenaran pada keyakinan lainnya.

Pada tahap ini, klaim terhadap kebenaran agamanya (*truth claim*) akan menjadi alat penghakiman (*judgement*) terhadap “kesesatan” pada keyakinan yang lain. Basis kesadaran teologis seperti ini hanya membutuhkan sedikit pemicu saja untuk merembet dan berkembang pada aspek sosial yang memunculkan intoleransi dan gerakan radikal. Pada akhir-akhir ini, pemahaman terhadap Islam radikal terasa semakin menguat yang ditandai dengan banyaknya kasus intoleransi baik pada lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Hal ini tentu saja menjadi persoalan yang harus segera diatasi karena dapat merusak konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sangat multikultur. Persoalan akan semakin rumit dan mengkhawatirkan ketika paham radikal dan intoleransi agama juga telah menjangkiti siswa di sekolah, karena merekalah yang nantinya menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. (Hermawan, 2020, hal. 32)

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku, golongan, ras dan agama, tentu sangat mudah terciptanya perpecahan didalamnya. Perpecahan bangsa Indonesia banyak bersumber dari ideologi-ideologi liberal dan ekstrimis yang masuk dalam ajaran Islam. Ideologi liberal dari barat yang menghendaki adanya kebebasan, yang mengancam moral dan budaya ke-timuran. Akhirnya terencana Islam yang liberal, bebas dan tidak terkontrol.

Sisi lain ekstrimisme merebak di masyarakat Indonesia akibat ajaran Islam transnasional (lintas nasional atau lintas kebangsaan). Dua persoalan tersebut mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Selama rentan 10 tahun terakhir, masyarakat Indonesia di perlihatkan wajah-wajah penuh aksi kekerasan yang dilatar belakangi motif-motif agama (terutama Islam). Mulai dari kasus kriminal kecil sampai pada aksi teror yang mengancam nyawa banyak pihak.(Arifin, 2019, hal. 560)

Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar masyarakat tidak terjerumus pada pemahaman agama yang cenderung ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ia mengatakan dalam pemahaman keagamaan kita menghadapi tantangan besar, yaitu paham ekstrim kanan. Paham Islam yang sangat kaku yang dengan mudah mengkafir-kafirkan orang lain yang berbeda dengan kita. "Misalnya, mudah menyalahkan orang Islam yang lain hanya karena cara salat dan cara wudhu mereka berbeda. Jadi hitam putih dalam melihat perbedaan dalam Islam," Selain itu, lanjut Lukman, munculnya paham ekstrim kiri. Ekstrim kiri ini adalah kelompok liberal, misalnya, mereka yang mengurang-ngurangi batasan Allah SWT," contohnya adalah mulai mengikuti cara berpakaian orang barat, mengikuti perayaan besar agama lain dan bisa dibilang bertoleransi secara berlebihan.(Hakim, 2019)

Untuk melawan dua arus besar tersebut, saat ini pemerintah Indonesia tengah gencar-gencarnya untuk mewujudkan Islam moderat. Pendidikan merupakan bagian penting dalam mewujudkan cita-cita moderat yang diusung pemerintah Indonesia. Beragam kajian moderasi itu sesungguhnya bukan hal baru. Karya pertama yang mengkaji moderasi secara serius adalah Tafsir Tematik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2012 di mana salah satu temanya adalah Moderasi Islam. Karya ini ditulis oleh tim khusus di mana M. Quraish Shihab merupakan salah satu narasumber. Adapun tafsir tematik lain yang terbit pada waktu bersamaan adalah tafsir tematik tentang Jihad, Makna dan Implementasinya, Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer I dan II, dan Kenabian (*Nubuwwah*) dalam Al-Qur'an.(Tim Penyusun, 2012, hal.28) Pengaruh utamaan moderasi semakin menemukan momentumnya sejak Kementerian Agama menerbitkan buku moderasi beragama pada tahun 2019. Dalam buku itu dijelaskan bahwa moderasi dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyyah* yang mempunyai padanan kata dengan *tawazun* (berimbang), *i'tidal* (adil), dan *tawasuth* (tengah-tengah). Kemudian secara konseptual, moderasi beragama berarti cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Pada tahun yang sama Menteri Agama

mendeklarasikan tahun 2019 sebagai tahun Moderasi Beragama, berbarengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menetapkan tahun 2019 sebagai “*the International Year of Moderation*”.(Kementerian Agama RI, 2019, hal. 16–17)

Penegasan tentang pentingnya memasukan materi moderasi pun ada dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa penyelenggara sistem pembukuan berasaskan pada kebhinekaan, kebangsaan, kebersamaan, kenusantaraan, keadilan, gotong-royong dan kebebasan. (Hani & Ashif, 2020, hal. 28) Pemerintah terus menggalakkan program moderasi beragama yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024. Kemenag telah menjabarkan moderasi beragama dalam Rencana Strategis (renstra) pembangunan di bidang keagamaan lima tahun mendatang. Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan, sebagai institusi yang diberi amanah untuk menjadi *leading sector*, Kementerian Agama terus memperkuat implementasi moderasi beragama. Hal ini ditegaskan Menteri Agama Fachrul Razi dalam diskusi daring dengan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental.(Khoiron, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Ihwanuddin, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017. Dengan judul tesis “*Pendidikan Akhlak Dalam Al-Quran Surat An Naba Ayat 31-38 : Telaah Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Pendidikan Akhlak Dalam Al-Quran Surat An Naba Ayat 31-38 : Telaah Tafsir Al Misbah.(Ihwanuddin, 2017) Terdapat perbedaan yang spesifik antara tema penulis dengan tesis tersebut , pada penelitian yang ditulis oleh Ihwanuddin lebih menjurus kepada Pendidikan Akhlak Dalam Al-Quran Surat An Naba Ayat 31-38 : Telaah Tafsir Al Misbah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Ahmadar, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018. Dengan judul tesis “*Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Berbusana*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Berbusana. (Ahmadar, 2018) Terdapat perbedaan yang spesifik antara tema penulis dengan tesis tersebut, pada penelitian yang ditulis oleh Ridho Ahmadar ia lebih menjurus kepada berbusana.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Hermawan, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019. Dengan judul tesis “*Pemikiran*

M. Quraish Shihab tentang revolusi mental dalam tafsir al-misbah dan kaitannya terhadap guru pendidikan agama islam". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pandangan M. Quraish Shihab Tentang revolusi mental.(Hermawan, 2019) Terdapat perbedaan yang spesifik antara tema penulis dengan tesis diatas, pada penelitian yang ditulis oleh Dian Hermawan, ia lebih menjurus kepada revolusi mental.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ulinnuha dan Mamluatun Nafisah, mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, *Suhuf*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020. Dengan judul "*Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab: Kajian Atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, dan Al-Mishbah*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab mengenai konsepsi moderasi beragama dalam karya tafsirnya.(Ulinnuha & Nafisah, 2020) Terdapat perbedaan yang spesifik antara tema penulis dengan jurnal tersebut , pada penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ulinnuha dan Mamluatun Nafisah lebih pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab mengenai konsepsi moderasi beragama dalam karya tafsirnya.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Imran Yunus dan Edi Susilo, Guru Kelas MI Al Syaf Takhir Kementerian Agama Kab. Dompu, Widyadewata: Jurnal Balai Diklat Keagamaan Denpasar Vol. 4, No. 2, Desember 2021. Dengan judul "*Implikasi Konsep Ummatan Wasathan Menurut M. Quraish Shihab Pada Pendidikan Agama Islam*". Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui konsep ummatan wasathan menurut M. Quraish Shihab dan implikasinya pada Pendidikan Agama Islam.(Yunus & Susilo, 2021) Terdapat perbedaan yang spesifik antara tema penulis dengan jurnal tersebut, pada penelitian yang ditulis oleh Imran Yunus dan Edi Susilo lebih menjurus kepada konsep ummatan wasathan menurut M. Quraish Shihab dan implikasinya pada Pendidikan Agama Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mustafidin, Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan (SETIA WS) Semarang, Mahasiswa S3 Unwahas Semarang, Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, Volume 9, No. 2, Desember 2021. Dengan judul "*Moderasi Beragama Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Konteks Keindonesiaan*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komitmen utama moderasi beragama terhadap toleransi menjadikannya sebagai cara terbaik untuk menghadapi radikalisme agama yang mengancam kehidupan beragama itu sendiri dan, pada gilirannya, mengimbasi kehidupan persatuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(Mustafidin, 2021) Terdapat perbedaan yang spesifik antara tema penulis dengan jurnal tersebut, pada penelitian yang ditulis oleh Ahmad Mustafidin lebih menjurus kepada komitmen utama moderasi beragama terhadap toleransi menjadikannya sebagai cara terbaik untuk menghadapi radikalisme agama yang mengancam kehidupan beragama itu sendiri dan, pada gilirannya, mengimbasi kehidupan persatuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini akan memfokuskan pada pemikiran moderasi beragama M. Quraish Shihab, mufassir moderat kontemporer, yang mencakup pemaknaan *wasathiyyah* beserta argumennya dan bagaimana menerapkannya dalam Pendidikan Agama Islam. Kajian ini menjadi penting di tengah menguatnya wacana moderasi beragama sebagai salah counter wacana dan gerakan atas pemikiran dan gerakan Islam garis keras, ekstrimis, dan radikal yang tidak jarang mengarah pada tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Di samping tengah menguatnya wacana moderasi beragama dalam bentuk gerakan pada perguruan tinggi Islam melalui hadirnya kebijakan tentang keberadaan rumah moderasi yang diinisiasi Kementerian Agama.

KAJIAN LITERATUR

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan. (Suyanto, 2010, hal. 182)

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup: (S. Grindle, 2002, hal. 21)

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn, menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik

yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

- a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.
- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan regenerasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada. (S. Grindle, 2002 hal. 25)

B. Moderasi Beragama

1. Pengertian Moderasi

Moderasi dalam KBBI disebutkan bahwa memiliki arti penjauhan dari keekstreman atau pengurangan kekerasan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi web, "Moderasi", Online; <https://kbbi.web.id/prinsip>) Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan *al-wasathiyah*. Secara bahasa *al-wasathiyah* berasal dari kata *wasath*. *Al-Asfahaniy* mendefinisikan *wasath* dengan *sawa'un* yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah dengan atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. *Wasathan* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama. (Al-Asfahaniy, 2009, hal. 869)

Kementerian agama mendefinisikan Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapa pun atau pendapat mana pun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti “sesuatu yang terbaik.” Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Sedangkan moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. (Kementerian Agama RI, 2019, hal. 1–2)

Menurut Ketua PBNU, Marsudi Syuhud, menjaga moderasi Islam di Indonesia tersebut adalah keharusan karena merupakan perintah Alquran. Dia mengutip ayat Al-quran “*jadilah kamu umat Islam yang tengah-tengah atau yang moderat*”. Menurutnya moderasi itu tidak terlalu ke kanan (ekstrem) dan tidak terlalu ke kiri (liberal). (Amrullah, 2020) Moderasi beragama dalam perspektif Muhammadiyah menurut Haedar tentu sama dengan perspektif Islam yakni perpektif wasathiyah atau juga tawasuth atau moderat. Moderasi atau tengahan merupakan bagian dari pandangan dan sikap keislaman. Haedar mengatakan, kita sering mengutip Qur’an Al-Baqarah ayat 143 yang dibanyak tafsir menyimpulkan bahwa kata *wasatta’* disitu sikap adil atau konsep tentang adil dan keseimbangan. Jadi inti dari sikap moderat pandangan moderat dalam perspektif Islam itu yang adil yang tawazun, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tawazun membangun keseimbangan. (Muhammadiyah, 2020)

Menurut Kamali moderasi adalah kebajikan yang membantu terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan dan masalah personal, dalam keluarga dan masyarakat serta hubungan antar manusia lebih luas. (Azra, 2020, hal. 23) Dalam *Merriam Webster Dictionary* (kamus digital) yang dikutip Tholhatul Choir, moderasi diartikan menjauhi perilaku dan ungkapan yang ekstrem. Dalam hal ini, seorang yang moderat adalah seorang yang menjauhi perilaku-perilaku dan ungkapan-ungkapan yang ekstrem. (Kurniawan et al., 2019, hal. 73)

Sifat *wasathiyah* umat Islam adalah anugerah yang diberikan Allah Swt secara khusus. Saat mereka konsisten menjalankan ajaran-ajaran Allah Swt, maka saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan terpilih. Sifat ini telah menjadikan umat Islam sebagai umat moderat, moderat dalam segala urusan, baik urusan agama atau urusan sosial di dunia. Adapun makna *ummatan wasathan* pada surat al-Baqarah ayat 143 adalah umat yang adil dan terpilih. Maksudnya, umat Islam ini adalah umat yang paling sempurna agamanya, paling baik akhlaknya, paling utama amalnya. Allah Swt telah menganugerahi ilmu, kelembutan budi pekerti, keadilan, dan kebaikan yang tidak diberikan kepada umat lain. Oleh sebab itu, mereka menjadi *ummatan wasathan*, umat yang sempurna dan adil yang menjadi saksi bagi seluruh manusia di hari kiamat nanti. (Afrizal & Mukhlis, 2015, hal. 29)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *wasathiyah* adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem; sikap berlebih-lebihan (*ifrâth*) dan sikap *muqashshir* yang mengurang-ngurangi sesuatu yang dibatasi Allah Swt, mengedepankan musyawarah dalam mengambil jalan tengah dalam memutuskan suatu persoalan dan mengutamakan sikap toleransi dalam perbedaan. Sifat *wasathiyah* umat Islam adalah anugerah yang diberikan Allah Swt. Saat mereka konsisten menjalankan ajaran-ajaran Allah Swt, maka saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan terpilih. Sifat ini telah menjadikan umat Islam sebagai umat moderat, moderat dalam segala urusan, baik urusan agama atau urusan sosial di dunia.

2. Dasar-Dasar Moderasi Beragama

Dalam ensiklopedia Indonesia, Kata dasar memiliki arti asal yang pertama. Istilah ini juga sering diartikan pengertian yang menjadi pokok (induk) dari pikiran-pikiran lain. (Ronto, 2012, hal. 43) Dari teori tersebut dasar dapat dimaknai pangkal atau tolak ukur suatu aktifitas. Berdasarkan pengertian tersebut, yang menjadi tolak ukur atau dasar moderasi agama yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam. Kitab tersebut diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Qur'an memuat banyak sekali kandungan. Kandungan-kandungan tersebut berisi perintah, larangan, anjuran, ketentuan, dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang madani. Oleh karena itulah, Al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu hukum. (Samsudin, 2021, hal. 23)

Al-Qur'an bukan saja menjadi landasan pada zaman Rasulullah dan pada shabat saja, namun di zaman moderen hingga akhir zaman nanti akan selalu menjadi *hujjah* (bukti yang kuat). Sebagaimana menurut Muhammad Abduh yang direkam oleh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa "Al-Qur'an akan menjadi bukti yang kuat terhadap setiap manusia sampai datangnya hari kebangkitan". (Ridha, n.d., hal. 20) Sumber ajaran Islam ialah Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Rujukan paling utama dalam ajaran Islam yaitu kalam Allah Swt yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, untuk disampaikan kepada umat manusia. Hakikat diturunkannya Al-Qur'an adalah menjadi acuan moral secara universal bagi umat manusia dalam memecahkan problematik sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat. (U. Shihab, 2005, hal. 22) Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar moderasi agama (*ummatan wasatan*) yaitu:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ٣٤١

Artinya: "Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyikan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia". (Q.S. Al-Baqarah: 143)

وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنْتَ مِنَ اللَّهِ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: "Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Q.S. Al-Qashas: 77)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٧٦

Artinya: "Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya". (Q.S. Al-Furqan: 67)

Berdasarkan dari ketiga surat diatas tadi secara garis besar dapat dipahami bahwa, tersampaikan perintah untuk berbuat yang tengah-tengah (bijaksana) dan mengingatkan kita agar tidak terlalu cenderung pada salah satunya, baik kehidupan dunia ataupun akhirat(umatan wasathan).(Samsudin, 2021, hal. 26)

Keseimbangan atau *tawazun* ini bukan hanya berlaku dalam sikap keberagaman, tetapi di alam raya ini juga berlaku prinsip keseimbangan. Malam dan siang, terang dan gelap, panas dan dingin, daratan dan lautan, diatur sedemikian rupa secara seimbang dan penuh perhitungan agar yang satu tidak mendominasi dan mengalahkan yang lain. Beberapa gambaran keseimbangan inilah yang biasa dikenal dengan istilah moderasi.(Setiyadi, 2012, hal. 252)

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama itu sendiri dan penghormatan kepada agama orang lain yang berbeda keyakinan. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan dalam beragama. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama yaitu ekstrem kanan, dan liberal atau ekstrem kiri.

Sebagaimana kata moderasi sendiri berasal dari bahasa inggris, *moderation* yang artinya adalah sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat berarti ia wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Sikap moderat Islam ditunjukkan melalui keterbukaan dengan pihak-pihak lain yang berbeda pandangan. Sikap ini didasari pada kenyataan bahwa perbedaan di kalangan umat manusia adalah sebuah keniscayaan. Keterbukaan dengan sesama mendorong seorang Muslim moderat melakukan kerjasama dalam kehidupan. Prinsipnya adalah, bekerjasama dalam hal-hal yang menjadi kesepakatan untuk diselesaikan secara bersama, dan bersikap toleran terhadap perbedaan yang ada dengan kata lain menghargai kemajemukan dan kemauan berinteraksi.

Allah Swt menciptakan makhluk bernasab dan bermushaaharah, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa, dengan tujuan supaya saling mengenali, menjalin hubungan dan bekerja sama. Adapun ketakwaan itu adalah tolak ukur keutamaan yang membedakan di antara manusia. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling luhur

kedudukannya di sisi-Nya baik dunia maupun di akhirat, yaitu orang yang paling bertakwa dan shaleh baik bagi diri sendiri maupun masyarakat umum. (Az-Zuhaili, 2012, hal. 493–494) Syariat Islam dapat dipahami dengan baik manakala sumber-sumbernya, yakni Al-Qur'an dipahami secara komperhensif. Tidak sepotong-potong. Ayat-ayat Al-Qur'an harus dipahami secara utuh karena antara satu dengan lainnya saling menafsirkan. Seperti dengan jihad dalam Al-Qur'an tidak selalu berkonotasi perang bersenjata melawan musuh, akan tetapi dapat bermakna jihad melawan hawa nafsu dan berjihad dalam menuntut ilmu. Sebagaimana menurut Departemen Agama dengan memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif maka akan menghasilkan pengertian yang lengkap dan utuh yang pada gilirannya dapat memperlihatkan ajaran Islam yang moderat. (Tim Penyusun, 2012, hal. 64)

3. Pilar-pilar Penting Moderasi Beragama

Terdapat pilar-pilar penting dalam moderasi islam, yaitu *Tawazun* (Berkeseimbangan), *Adalah* (Keadilan), *Tasāmuḥ* (Toleransi), *Tawassuth* (Mengambil Jalan Tengah). Penjelasan sebagai berikut:

a. *Tawazun* (Berkeseimbangan)

Sikap seimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah, misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajaran-Nya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. (Kementerian Agama RI, 2019, hal. 7) Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan, *wasathiyah* yang dapat disebut juga dengan *at-tawāzun*, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak-belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegaskan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme, dan sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lain sebagainya. Bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit. (Al-Qardhawi, n.d., hal. 131–134) Menurut Abu Anwar keseimbangan dalam hidup diperlukan agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik serta mengurangi masalah lainnya yang muncul. Contohnya

hidup di dunia harus seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Tidak baik selalu mengejar kebutuhan di dunia dan tidak bijak pula terus mengejar kepentingan akhirat, keduanya harus seimbang. (Faizin, 2020) *Tawazun* atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan *dalil 'aqli* (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan *dalil naqli* (bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis). Menyeraskan sikap khidmat kepada Allah Swt dan khidmat kepada sesama manusia. (Fadeli, 2007, hal. 53) Prinsip moderasi di sini diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Islam menyeimbangkan peranan wahyu Ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong terciptanya keseimbangan antara ruh dengan akal, antara akal dengan hati, antara hak dengan kewajiban, dan lain sebagainya. (Setiyadi, 2012, hal. 252) Keseimbangan atau *tawazun* menyiratkan sikap dan gerakan moderasi. Sikap tengah ini mempunyai komitmen kepada masalah keadilan, kemanusiaan dan persamaan dan bukan berarti tidak mempunyai pendapat. Keseimbangan merupakan suatu bentuk pandangan yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak ekstrim dan tidak liberal. Keseimbangan juga merupakan sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah.

Pada tataran yang lebih rinci bentuk-bentuk keseimbangan dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai ragam pranata kehidupan beragama sebagai berikut:

- 1) Keseimbangan teologi.
- 2) Keseimbangan ritual keagamaan.
- 3) Keseimbangan moralitas dan budi pekerti.
- 4) Keseimbangan proses *tasyri'* (pembentukan hukum).

Keseimbangan hendaknya dapat ditegakkan dan dilaksanakan oleh semua orang, karena apabila seseorang tidak bisa menegakkan sikap seimbang akan melahirkan berbagai masalah. Agama senantiasa menuntut segala aspek kehidupan kita untuk seimbang, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kekurangan.

Salah satu yang menjadikan Islam agama yang sempurna adalah karena keseimbangannya. Keseimbangan merupakan keharusan sosial, dengan demikian seseorang yang tidak seimbang dalam kehidupan individu dan sosialnya, bahkan interaksi sosialnya akan rusak.(Samsudin, 2021, hal. 52)

b. *Adalah* (Keadilan)

Kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti “sama”. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “adil” diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Persamaan yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar ataupun yang salah samasama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut lagi tidak sewenang-wenang. Adil berarti sikap menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin.(M. Q. Shihab, 1996, hal. 110)

Setidaknya ada tiga ragam kata adil dalam Al-Qur’an. Ketiga kata *qist*, *’adl*, dan *mizan* pada berbagai bentuknya digunakan oleh al-Qur’an dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil. Ketika al-Qur’an menunjukkan Zat Allah yang memiliki sifat adil, kata yang digunakan-Nya hanya *al-qist*. Kata *’adl* yang dalam berbagai bentuk terulang dua puluh delapan kali dalam Al-Qur’an. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna keadilan. Sekurang-kurangnya ada empat makna keadilan yang ditemukan oleh para pakar agama. Pertama, adil dalam arti “sama”. Tetapi harus digaris bawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak.(M. Q. Shihab, 2019c, hal. 13)

Dengan demikian, keadilan haruslah berdasarkan kebenaran, keseimbangan, perlakuan sama, serta sikap tengah dan tidak memihak. Keadilan tidak bisa ditegakkan apabila mengabaikan kebenaran. Demikian juga sebaliknya, mengabaikan kebenaran sama dengan mengorbankan keadilan. Hampir semua agama memiliki konsep dasar tentang keadilan dan dijadikan sebagai standar kebajikan yang diajarkan kepada pemeluknya.

c. *Tasāmuḥ* (Toleransi)

Secara etimologi, kata “*tasāmuḥ*” berasal dari bahasa Arab yang artinya berlapang dada, toleransi. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai kata toleran sebagai berikut: bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya), yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi toleransi secara bahasa adalah sikap menghargai pendirian orang lain. Dan menghargai bukan berarti membenarkan apalagi mengikuti. Tillman mendefinisikan *Tasāmuḥ* (Toleransi) adalah sebuah sikap saling menghargai dengan tujuan untuk kedamaian. (Syams, 2019, hal. 23)

Toleransi beragama menurut Islam adalah menghormati atau menolelir dengan tanpa melewati batas aturan agama itu sendiri. Islam menjelaskan bahwa *Tasāmuḥ* mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Ini semua merupakan fitrah dan sunnatullah yang sudah menjadi ketetapan Tuhan.

Toleransi bukan hanya sikap tunduk secara *dhaif* tanpa prinsip yang meniangi. Seorang Muslim haruslah kuat dalam imannya dan mulia dengan syariatnya. Dalam Islam, toleransi tidak dibenarkan jika diterapkan pada ranah teologis. Peribadatan harus dilakukan dengan tata ritual dan di tempat ibadah masing-masing. Agama adalah keyakinan, sehingga beribadah dengan cara agama lain akan merusak esensi keyakinan tersebut. Toleransi hanya bisa diterapkan pada ranah sosialis, upaya-upaya membangun toleransi melalui aspek teologis, seperti doa dan ibadah bersama, adalah gagasan yang sudah muncul sejak era jahiliah dan sejak itu pula telah ditolak oleh Al-Qur’an melalui surat al-Kafirun. Tegas, surat al-Kafirun ini menolak *sinkretisme*. Sebagai agama yang suci akidah dan syariah. Islam tidak akan mengotorinya dengan mencampur dengan akidah dan syariah lain. Dan ini bukan bentuk intoleransi, sebab ranah toleransi adalah menghargai bukan membenarkan dan mengikuti. Justru *sinkretisme* adalah bagian dari sikap intoleransi pemeluk agama pada agamanya sendiri. Sebab pelaku *sinkretisme*, seolah tidak lagi meyakini kebenaran agamanya sendiri. Sedangkan agama adalah keyakinan. (Jamarudin, 2016, hal. 175)

Toleransi pun merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat yang majemuk, baik dari segi agama, suku, maupun bahasa. Toleransi baik paham maupun sikap hidup, harus memberikan nilai positif untuk kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai perbedaan dan keragaman tersebut. Sebagai zat yang memiliki hak prerogatif tertinggi di jagat raya ini, Allah Swt, sesungguhnya sangat bisa dan sangat mudah memaksa hamba-hamba-Nya untuk beriman tanpa kecuali. Allah Swt tidak menyatukan seluruh umat ini dalam satu model atau golongan karena masing golongan memiliki *syir'atan wa minhaja* (aturan dan jalan yang terang) sendiri-sendiri. Mereka akan terus berlombalomba melakukan kebajikan dengan cara dan aturannya, hingga mereka kembali kepada-Nya. Allah Swt, lalu akan memberitahukan hal-hal yang mereka persilihkan di dunia. Tidak elok kiranya, jika perebedaan itu diributkan di dunia dengan saling mencaci, mengintimidasi atau bahkan membunuh, karena kelak Allah Swt sendiri yang akan menerangkannya. Allah ingin merawat keberagaman sebagai kekayaan ciptaan-Nya. Dengan kondisi masyarakat dimana berbagai macam etnis, agama dan budaya hidup damai berdampingan dalam satu bangsa.(Misrawi, 2010b, hal. 253)

Oleh karena itu antara satu manusia dengan manusia yang lainnya harus saling memperhatikan dan saling tolong menolong dalam kebajikan dan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, budaya, kemasyarakatan dan aspek kehidupan kemanusiaan lainnya. Jalinan persaudaraan dan toleransi antara umat beragama sama sekali tidak dilarang oleh Islam, selama masih dalam tataran kemanusiaan dan kedua belah pihak saling menghormati hak-haknya masingmasing. Toleransi meniscayakan sebuah cakrawala yang luas untuk memahami orang lain, karena dengan pemahaman tersebut akan memudahkan jalan untuk mengenali dan menjalin kerjasama. Salah satu jalan untuk mencapai peradaban toleransi ini adalah melalui inklusifisme. (Misrawi, 2010a, hal. 178) Sikap inklusif akan mengajarkan kepada kita tentang kebenaran yang bersifat universal sehingga dengan sendirinya juga akan mengikis sikap eksklusif yang melihat kebenaran dan kemuliaan hanya ada pada diri dan pihak kita sendiri. Kebenaran sangat mungkin sekali ada dan dimiliki oleh orang lain.

d. *Tawassuth* (Sikap tengah-tengah)

Islam adalah jalan tengah dalam segala hal, baik dalam segala hal, baik dalam konsep, akidah, perilaku, dan hubungan dengan sesama manusia. *Tawasuth* merupakan sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. *Tawassuth* adalah sikap netral yang berintikan pada prinsip hidup menjunjung tinggi nilai keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Sikap ini dikenal juga dengan sebutan moderat (*al-wasathiyah*). (Samsudin, 2021, hal. 42)

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa *tawassuth*/moderat berasal dari kata *wasath* yang berarti adil, baik, tengah-tengah, dan seimbang. Artinya, seorang Muslim yang bersikap *tawassuth* akan menempatkan dirinya di tengah-tengah dalam suatu perkara, tidak ekstrim kanan ataupun kiri. Mengutip buku *Moderasi Islam Nusantara* oleh H. Mohamad Hasan, M.Ag., ada lima alasan mengapa sikap *tawassuth* dianjurkan ada pada diri seorang Muslim, yaitu:

- 1) Sikap *tawassuth* dianggap sebagai jalan tengah dalam memecahkan masalah, maka seorang Muslim senantiasa memandang *tawassuth* sebagai sikap yang paling adil dalam memahami agama.
- 2) Hakikat ajaran Islam adalah kasih sayang, maka seorang Muslim yang bersikap *tawassuth* senantiasa mendahulukan perdamaian dan menghindari pertikaian.
- 3) Pemeluk agama lain juga mahluk ciptaan Allah yang harus dihargai dan dihormati, maka seorang Muslim yang bersikap *tawassuth* senantiasa memandang dan memperlakukan mereka secara adil dan setara.
- 4) Ajaran Islam mendorong agar demokrasi dijadikan alternatif dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, maka Muslim yang bersikap *tawassuth* senantiasa mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.
- 5) Islam melarang tindakan diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Maka sudah sepatutnya seorang Muslim yang bersikap *tawassuth* senantiasa menjunjung tinggi kesetaraan. (Qardhawi, 2017, hal. 22–23)

Dari kelima alasan tersebut, seorang Muslim seharusnya sudah memahami arti pentingnya sikap *tawassuth* dalam kehidupannya. *Tawassuth* cocok diterapkan dalam kehidupan sosial antar sesama manusia. Terlebih di masa sekarang yang penuh dengan problematika intoleransi dan diskriminasi antar umat beragama. Karena sifat Allah yang paling dominan adalah rahmat maka seorang muslim hendaknya selalu menyebarkan rahmat dan kasih sayang kepada semua makhluk hidup. (M. Q. Shihab, 2019a, hal. 25)

C. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dengan memerhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain. (Hawi, 2013, hal. 19) Pendidikan agama Islam merupakan agama penyeimbang antara dunia dan akhirat, Islam tidak mempertentangkan antara iman dengan ilmu, bahkan menurut Rasulullah SAW Islam mewajibkan umatnya untuk belajar dan mendalami ilmu pengetahuan. (Hasanah, 2017, hal. 2)

Menurut Zakiyah Darajat, pendidikan agama Islam yaitu usaha terhadap peserta didik agar nantinya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dan menjadikan sebagai pandangan hidup. Menurut Zuhairini berpendapat bahwasanya pendidikan Islam merupakan usaha pengajaran pada pembentukan kepribadian anak sesuai ajaran Islam. Sedangkan menurut Ramayulis mengartikan pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar memahami, terampil melakukan, dan melakukan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. (Ramayulis, 2007, hal. 63)

Dari beberapa pendapat yang dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha bimbingan yang dilakukan untuk diarahkan kepada peserta didik disekolah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam

Mempelajari ilmu pengetahuan diperintahkan oleh Allah Swt yang termasuk memperdalam ilmu agama Islam. jelaslah bahwa kita selaku umat Islam diperintahkan untuk memperdalam ilmu agama, maka orang yang menuntut ilmu agama pahalanya sama dengan berperang dijalan Allah Swt. Dilarang semua umat Islam terjun kedalam peperangan melainkan diusahakan sebagiannya menuntut ilmu. Mengajarkan ilmu pendidikan agama Islam merupakan pekerjaan yang mulia yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Saw. Bahwa semua umat Islam wajib menyampaikan pengajaran tentang agama Islam yang diketahuinya dengan jelas, kepada umat Islam lainnya walaupun satu ayat.

Menurut Imam Syafe'i tujuan umum pendidikan islam dalam pakar-pakar pendidikan Islam, seperti Al-Abrasy mengelompokkan tujuan umum pendidikan Islam menjadi lima bagian, yaitu:

- a. Membentuk akhlak yang mulia. Tujuan ini telah disepakati oleh orang-orang Islam bahwa inti dari pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang mulia, sebagaimana misi kerasulan Muhammad Saw.
- b. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat.
- c. Mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha (mencari rizki) yang professional.
- d. Menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu.
- e. Mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan pertukangan (*al-Abrasy*). (Syafe'i, 2015, hal. 156)

Secara umum pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk pribadi manusia menjadi pribadi yang mencerminkan ajaran-ajaran Islam dan bertakwa kepada Allah dengan beribadah dan *bertaqarrub* kepada Allah Swt. Atau hakikat tujuan pendidikan agama islam ialah terbentuknya insan kamil. (Hawi, 2013, hal. 20) Dari penjelasan yang telah penulis jelaskan, penulis menyimpulkan Pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

3. Fungsi Pendidikan Agama Islam

Fungsi pendidikan agama Islam di sekolah yaitu sebagai berikut:

- a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah Swt yang telah di tanamkan dalam lingkungan keluarga.
- b. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
- c. Penyesuaian mental yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik dengan lingkungan fisik maupun sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Perbaikan yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Pencegahan yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia sepenuhnya. (DepDikNas, 2013, hal. 5)

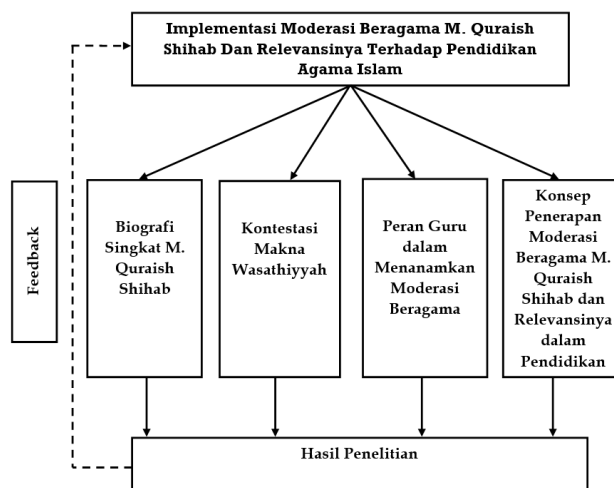
4. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam disekolah/dimadrasah terdiri atas beberapa aspek, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan hadis, menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar.
- b. Akidah, menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan/keimanan yang benar serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai al-asmaul husna.
- c. Akhlak, menekankan pada pembiasaan untuk melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Fiqih, menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamallah yang benar dan baik.
- e. Tarikh dan kebudayaan islam, menekankan pada kemampuan mengambil ibrah (contoh/pelajaran) dari peristiwa-peristiwa bersejarah (islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan kebudayaan peradaban. (Muhaimin, 2013, hal. 187–188)

Wasathiyah adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem; sikap berlebih-lebihan (*ifrâth*) dan sikap *muqashshir* yang mengurang-ngurangi sesuatu yang dibatasi Allah Swt, mengedepankan musyawarah dalam mengambil jalan tengah dalam memutuskan suatu persoalan dan mengutamakan sikap toleransi dalam perbedaan. Sifat *wasathiyah* umat Islam adalah anugerah yang diberikan Allah Swt. Saat mereka konsisten menjalankan ajaran-ajaran Allah swt, maka saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan terpilih. Sifat ini telah menjadikan umat Islam sebagai umat moderat, moderat dalam segala urusan, baik urusan agama atau urusan sosial di dunia.

Konsep moderasi beragama (Islam) M. Quraish Shihab dapat diterapkan pada konteks keindonesiaan dengan beragam dimensinya. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa moderasi beragama dapat merembes pada berbagai aspek, termasuk aspek spesifik dalam pendidikan seperti paradigma, pendekatan, kurikulum, model, strategi, pengembangan materi-media pembelajaran, dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran secara utuh yakni mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi. Di mana pola penerapannya bisa sangat beragam sesuai dengan fokus dan faktor penentu lainnya. Meski demikian, aspek mendasar yang memerlukan perhatian lebih adalah tentang bagaimana menerapkan konsep moderasi beragama secara efektif dalam proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran PAI.



PEMBAHASAN

Biografi Singkat M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab adalah salah satu nama yang tersohor dalam deretan tokoh-tokoh cendekiawan dan pemikir Islam Indonesia. Nama yang diberikan oleh orang tua penulis Tafsir al-Mishbah ini, mulai dipakai setelah kelahirannya pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. (M. Q. Shihab, 2007a, hal. 6) Selain namanya yang terpendang karena produktifitas dalam berkarya, berdakwah dan menjawab problem masyarakat lewat buku-bukunya, ia juga pernah menjabat sebagai menteri Agama pada kabinet pembangunan VII (1998).

Tumbuh kembang di dalam sebuah keluarga yang taat agama dan mengutamakan pendidikan, M. Quraish Shihab besar membawa semangat ayahnya untuk terus belajar, berdakwah dan berkarya. Dorongan M. Quraish Shihab untuk terus belajar ia dapatkan dari ayahandanya, nasehat- nasehat dari ayahanda menjadi motivasi utama yang ia pegang hingga dewasa. (M. Q. Shihab, 2007a, hal. 15)

Ayah M. Quraish Shihab bernama Abdurrahman Shihab (1905- 1986), ia adalah seorang tokoh agama yang terpendang dan terkemuka di daerah Sulawesi Selatan. Selain itu Abdurrahman Shihab juga menjadi guru besar dalam bidang Tafsir di IAIN Alaudin, Ujung Pandang. Ia merupakan salah satu pendiri dari sebuah lembaga Pendidikan yakni Universitas Muslim Indonesia (UMI). (Junaidi, 2001, hal. 24) Dalam cerita M. Quraish Shihab, ayahandanya adalah seorang intelektual yang juga memiliki hobi berwiraswasta sejak umurnya masih muda. (M. Q. Shihab, 2007a, hal. 14)

Pertumbuhan M. Quraish Shihab memanglah dalam cover keluarga yang kental dengan ajaran agama. Akan tetapi lingkungan dimana ia tinggal merupakan sebuah masyarakat yang heterogen dalam hal agama dan kepercayaan. Hal ini tidak membuat ia dan keluarga untuk canggung melakukan interaksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang akidah yang berbeda dari mereka. Hal ini pula yang dicontohkan oleh Ayah M. Quraish Shihab bahwa pluralitas adalah sebuah keniscayaan, bahwa toleransi adalah salah satu ciri orang memiliki pengetahuan yang tinggi. (M. Q. Shihab, 2007b, hal. 2)

Faktor keluarga menjadi hal urgent dalam tumbuh kembang M. Quraish Shihab. Lahir dari keluarga yang sadar pendidikan, ia mendapatkan pendidikan formal maupun non-formal yang terarah semenjak usia dini. Untuk

pendidikan formal pertama yang ia tekuni adalah Sekolah Rakyat di tanah kelahirannya Ujung Pandang. perjalanan intelektual yang bersifat non-formal sudah ia dapatkan dalam pantauan ayahnya sendiri Abdurrahman Shihab.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar yang ia dapatkan di Ujung Pandang, M. Quraish Shihab menuntaskan pendidikan menengahnya di kota Malang-Jawa Timur. Hal ini atas titah ayahnya untuk mengirim M. Quraish Shihab ke Pondok Pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyyah. Sebuah pondok yang memiliki kurikulum menghafal hadits-hadits Nabi.(M. Q. Shihab, 2007a, hal. 231)

Karakter haus belajar dan cinta pengetahuan yang telah mengalir dalam urat nadi M. Quraish Shihab, menghantarkannya melakukan hijrah ilmiah ke negeri piramida Mesir. Di Mesir ia masuk di sekolah l'dadiyyah Madrasah Aliyah Al-Azhar. Ia berhasil masuk l'dadiyyah setingkat dengan kelas dua tsanawiyah melalui beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Sulawesi. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atasnya, ia mendaftarkan dirinya menjadi mahasiswa program studi Tafsir di Universitas al-Azhar. bersama bekal dan nasihat dari orang-orang penting dalam hidupnya, ia menjalani hari-harinya dengan penuh keseriusan dan optimistis. Bahkan ia sempat merelakkan waktunya untuk mengulang satu tahun demi mewujudkan cita-citanya belajar di Fakultas Ushuluddin.(M. Q. Shihab, 2007a, hal. 15)

Pada tahun 1967, M. Quraish Shihab resmi menyandang gelar Licence (Lc) yang diberikan oleh pihak Universitas alAzhar. Gelar ini tidak lantas membuat M. Quraish Shihab puas dan memilih pulang ke Indonesia. Ia memilih untuk melanjutkan studinya ke jenjang strata dua (S2) dengan konsentrasi dan Universitas yang sama pula. Program pasca sarjana ia selesaikan pada tahun 1969 dengan ditempelkannya gelar MA untuk spesialis tafsir al-Qur'an. Saat itu M. Quraish Shihab membawa karangan tesis yang berjudul *al-I'jaz alTasyri' Li al-Qur'an al-Karim* (kemukjizatan al-Quran al-Karim dari segi Hukum).(Junaidi, 2001, hal. 36) Setelah lulus program pasca sarjana (S-2), M. Quraish Shihab juga melanjutkan studinya untuk mendapatkan gelar doktor dibidang ilmuilmu al-Qur'an dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (*Mumtat ma'a Martabat al-Syaraf al-'Ula*) di Universitas al-Azhar. Program untuk menempuh doktor ini tidak langsung ia ikuti setelah meraih gelar MA, akan tetapi program ini ia tempuh setelah pulang ke kapung halaman selama sebels tahun. Jangka waktu sbelas tahun itu, M. Quraish Shihab mengisinya dengan ikut berpartisipasi dalam dunia intelektual di Ujung Pandang.

M. Quraish Shihab merupakan salah satu cendekiawan muslim Indonesia yang produktif. Ia menulis buku dalam berbagai disiplin keilmuan Islam, dari syari'ah hingga tafsir. Jauh sebelum menulis karya-karyanya dalam bentuk buku ia sudah banyak menulis berbagai majalah dan jurnal ilmiah. (Junaidi, 2001, hal. 42) Semangat M. Quraish Shihab untuk memperkaya khazanah keilmuan di Nusantara direfleksikannya dengan buku-buku yang telah terbit dari pemikirannya. Ada lebih dari 40 buku yang ia tulis. Beberapa karya M. Quraish Shihab dapat dikategorikan kedalam empat rumpun. Pertama: Karya-karya tafsir (*Tahlili*, *Maudlu'i*, maupun *Ijmali*). Kedua: Terjemah al-Qur'an. Ketiga: Artikel-artikel Tafsir. Keempat: Wawasan keislaman. (M. Q. Shihab, 2009, hal. 504)

Kontestasi Makna *Wasathiyah*

Diskursus *wasathiyah* telah melahirkan beragam pemahaman yang berangkat dari tafsir masing-masing. Tidak jarang pemaknaan *wasathiyah* mengalami reduksi dan simplifikasi makna. Dalam hal ini, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa semua pihak mengakui pentingnya moderasi, akan tetapi seringkali terjadi kekaburan mengenai makna, tujuan, penerapan, dan pengejawantahannya sehingga tidak mengherankan jika terdapat dua pihak yang berlawanan dalam bersikap tetapi sama-sama mengaku sebagai kelompok moderat sambil menuduh pihak lain yang berlawanan dengannya sebagai kelompok yang tidak moderat. (M. Q. Shihab, 2019b, hal. 12) Kenyataan ini adalah salah satu manifestasi dari kekaburan makna *wasathiyah*. Di mana baik yang 'ekstrem' dan yang 'menggampangkan' sama-sama mengklaim telah menerapkan moderasi, padahal keduanya justru jauh dari sikap 'pertengahan' yang menjadi indikator moderasi karena sesungguhnya moderasi mempunyai makna sangat luas yang mensyaratkan beberapa hal mendasar yang mencakup pengetahuan dan pemahaman mengenai syariat Islam, kondisi objektif, cara dan kadar mengimplementasikannya. (M. Q. Shihab, 2019b, hal. 25)

Secara etimologis, moderasi tergolong sebagai kata benda yang mempunyai dua arti yaitu penghindaran keekstreman dan pengurangan kekerasan. (Tim Penyusun, 2016, hal. 2) Adapun dalam bahasa Arab, kata moderasi berasal dari kata *wasatha* yang mempunyai banyak arti. Dari banyaknya arti yang lahir dari para pakar bahasa itu, Shihab menyimpulkan bahwa sesuatu yang bersifat *wasath* mengharuskan tidak terlepas dari kedua sisinya. Karena itu, kata *wasath* dinisbatkan pada sesuatu, yakni adanya hubungan tarik-menarik antara yang di tengah dengan kedua

ujungnya. Dengan cara demikian, kedua ujung itu menjadi sumber penarikan kebutuhan untuk mencapai kebaikan dan keadilan sebagai syarat mutlak untuk melahirkan hakikat *wasathiyyah*. (M. Q. Shihab, 2019b, hal. 2–3) Shihab menjelaskan bahwa hakikat *wasathiyyah* adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup dunia dan akhirat, yang harus selalu diikuti oleh upaya adaptif dengan situasi dan kondisi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. Artinya, moderasi tidak semata-mata menyajikan dua kutub lalu memilih apa yang di tengahnya karena *wasathiyyah* adalah keseimbangan yang disertai prinsip ‘tidak berkekurangan dan tidak berlebihan, tetapi pada saat yang sama ia bukanlah sikap menghindar dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab. Sebab, Islam mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif tapi dengan penuh hikmah. (M. Q. Shihab, 2019b, hal. 43)

Sulitnya mendefinisikan *wasathiyyah* secara baik dan tepat sehingga banyak para ulama yang berusaha menghadirkan ciri-cirinya pada aneka aspek ajaran Islam, sehingga ketika ciri tersebut tidak mewujud dalam aktifitas bidang dimaksud, maka nilai *wasathiyyah* yang diterapkan berkurang sebanyak kekurangan ciri-ciri itu dalam aktivitasnya. Kalau menyetujui bahwa Islam adalah moderasi yakni seluruh ajarannya bersifat moderat, maka gambaran umum hakikat moderasi dapat ditemukan dengan cara mempelajari ajaran Islam secara seksama yang mencakup tiga hal pokok (akidah, syariah, dan budi pekerti) yang dalam pengamalannya harus saling menyatu. Pengamalan tidak boleh lepas dari iman, amal tidak sah tanpa iman, dan iman menuntut pengamalan. Demikian juga dengan akhlak, karena akhlak bukan hanya hubungan dengan sesama manusia melainkan dengan seluruh wujud. (M. Q. Shihab, 2019b, hal. 44–45)

Selanjutnya M. Quraish Shihab menegaskan bahwa berbagai bentuk kata *wasath* dalam Al-Qur’an ada lima, kelimanya mengandung makna berada di antara dua ujung. Pertama, QS. Al-Baqarah (2): 143 yaitu, “*demikianlah Kami jadikan kamu ummatan wasathan*”. Kedua, QS. Al-Baqarah (2): 238 yaitu, “*peliharalah salat-salat (semuanya) dan salat pertengahan. Yakni salat Ashar, atas dasar ia adalah salat pertengahan dengan menjadikan salat pertama dalam sehari adalah Shubuh*”. Ketiga, QS. Al-Maidah (5): 89 yaitu, “*maka kafarat sumpah-sumpah kamu (yang kamu sengaja ucapkan sebagai sumpah lalu kamu batalkan adalah), memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari pertengahan yang kamu berikan pada keluarga kamu*”. Keempat, QS.

Al-Qalam (68): 28 yaitu, “*Berkata ausathuhum. Bukankah aku telah berkata sebaiknya kalian bertasbih*”. Kata *ausathuhum* di sini dipahami sebagai yang terbaik dan paling lurus pemikirannya atau yang paling pertengahan dalam usianya dibanding dengan siapa yang bersamanya ketika itu. Kelima, QS. Al-‘Adiyat (100): 4-5 yaitu, “*Maka ia (yang berlari kencang itu) menerbangkan debu, dan menyerbu ke tengah-tengah kelompok*”. Dalam uraian tentang moderasi beragama, para pakar sering sekali merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 143.(M. Q. Shihab, 2019b, hal. 4–5)

Kalimat yang menjadi acuan uraian moderasi beragama dalam surat Al-Baqarah ayat 143 adalah kalimat dari kalimat inilah kemudian moderasi dinamakan sebagai *wasathiyyah*.(M. Q. Shihab, 2019b, hal. 6) Meski begitu, terdapat istilah lain yang serupa dengan *wasathiyyah* yaitu *as-sadad*, *al-qashd*, dan *al-istiqamah*. Ketiga istilah yang digunakan Nabi ini sering kali bertukar tempat dengan *wasathiyyah*. Pertama, kata *assadad*, Kata ini terambil dari kata *sadada* yang terdiri dari huruf *sin* dan *dal*. Menurut pakar bahasa, Ibnu Faris, rangkaian dua huruf itu menunjuk pada makna meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Ia juga bermakna konsistensi dan digunakan untuk menunjukkan ketepatan sasaran. Seseorang yang menyampaikan sesuatu yang benar dan mengena tepat pada sasarannya dilukiskan dengan kata ini. Dengan demikian kata itu tidak sekedar berarti benar, tapi juga harus tepat sasaran. *As-sadad* menurut sementara pakar adalah pencapaian hakikat keagamaan, kebenaran, serta ketepatan dan setiap ucapan, perbuatan, serta niat dan tujuan, karena itu ia menuntut keikhlasan serta peneladanan terhadap Nabi. Memang tidak mudah, karena itu Nabi menyebut opsi yang disebut *muqarabah* (kedekatan) yakni peringkat yang mendekati *as-sadad*. Artinya, jika tidak bisa mencapai *as-sadad* yang sempurna maka lakukanlah *muqarabah* karena Allah menghendaki kemudahan buat manusia, bukan kesulitan. Kedua, *al-qashd*. Kata *al-qashd* mengandung makna moderasi, konsistensi, tekad dan arah, baik tekad itu menyangkut sesuatu yang baik atau buruk. Kata *al-qashd* juga dipahami dalam arti lurus dan dapat juga berarti penjelasan tentang jalan yang mengantarkan menuju kebenaran atau penjelasan tentang jalan yang lurus. Ketiga, istilah lain yang juga digunakan untuk melukiskan hakikat moderasi adalah kata *al-istiqamah* yang terambil dari kata *qama* (berdiri, berkonsentrasi, konsisten, mantap, terlaksana) yang digunakan untuk mendeskripsikan keadaan terbaik dan sempurna bagi segala sesuatu sesuai dengan sifat dan cirinya.(M. Q. Shihab, 2019b, hal. 17–22)

Peran Guru dalam Menanamkan Moderasi Beragama

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh warga Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengenyam pendidikan sembilan tahun. Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 1989 yang menyebutkan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7- 12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata. (Undang-undang Pemerintah nomor 2 tahun 1989)

Begitu juga dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan secara jelas juga telah diuraikan dalam Undang-Undang Sisdiknas 20 tahun 2003, yaitu tercantum pada pasal 4, bahwa : 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna, 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. (UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan berarti membuat peserta didik mengenali diri sendiri, mengenali potensi diri, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Guru harus mampu memberikan pencerahan tentang moderasi beragama agar peserta didik menjadi manusia yang mendamaikan baik di lingkungan maupun alam sekitar. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan tercipta kerukunan hidup antar sesama (*live together*) dan bisa hidup berdampingan (*live with other*) dengan orang lain yang berbeda agama, keyakinan, ras etnis, dan lain sebagainya. (Baidhaw, 2005, hal. 79)

Tentunya peran guru mutlak diperlukan. Dalam hal ini guru harus memiliki prinsip keguruan yang dapat memperlakukan peserta didik dengan baik sehingga tercapai tujuan pendidikan. Adapun prinsip-prinsip keguruan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Seorang guru harus dapat membangkitkan peserta didik pada materi pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan media dan sumber belajar yang bervariasi.
- b. Guru harus mampu membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berfikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya.
- c. Guru mampu membuat urutan (*sequence*) dalam pemberian mata pelajaran dan penyesuaian dengan usia dan tahapan perkembangan peserta didik.
- d. Guru mampu mengembangkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang dimiliki peserta didik agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan
- e. Guru mampu menjelaskan materi secara berulang-ulang dengan harapan peserta didik lebih memahami materi yang telah diberikan.
- f. Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antar mata pelajaran atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Guru harus tetap menjaga konsentrasi peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati, meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya.
- h. Guru harus mengembangkan peserta didik dalam membina hubungan sosial, baik dalam kelas maupun luar kelas.
- i. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta didik secara individu agar dapat melayani peserta didik sesuai perbedaan. (B. Uno, 2007, hal. 16)

Sebagai seorang guru tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan kepada peserta didik tetapi juga dapat membentuk karakter menjadi pribadi yang unggul mandiri dan dapat mengamalkan ilmu pengetahuannya. Jika *flashback* pada sejarah peradaban islam, sebagaimana digambarkan oleh Mujamil Qomar, bahwa islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan prestasi akademik yang gemilang (*science for science*), tetapi untuk mewujudkan kedamaian dan perdamaian umat manusia (*science for peace of society*). Dengan kata lain bahwa adanya ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan umat manusia (*science for human welfare*) sehingga arah kemajuan sains maupun teknologi (peradaban) bisa dikendalikan dengan tetap berada dalam jalan yang lurus *al-sirath al-mustaqim*. (Fauzi, 2018, hal. 235)

Sebuah peradaban umat manusia yang sejahtera, hidup damai dalam perbedaan dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat yaitu *learning to know* (belajar untuk mengetahui) , *learning to do* (belajar untuk mengerjakan

atau implementasikan dalam kehidupan), *learning to live together*(belajar hidup berdampingan dengan orang lain seagama, sebangsa, dan setanah air), dan *unity in diversity* (bersatu dalam perbedaan budaya, keyanikanan, dan agama) atau dengan meminjam bahasa Mukti Ali (*agree indisagreement*) setuju dalam ketidaksetujuan karena sesungguhnya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bersatu. Guru sebagai manusia paripurna dimana segala tindakan, perbuatan, sikap, dan perkataan terakam dalam kehidupan peserta didik harus mampu menjadi suri tauladan yang baik bagi peserta didik terlebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guru memiliki peran sentral dalam mengolah perbedaan dalam beragama karena guru merupakan role model bagi peserta didik. Hal ini sebagaimana pendapatnya Luc Reyhler, dalam teorinya Arsitektur perdamaian menyebutkan, dalam pengelolaan perbedaan agama dibutuhkan sejumlah syarat Pertama, adanya saluran komunikasi yang efektif dan harmoni sehingga memungkinkan terjadi proses diskusi, klarifikasi, dan koreksi terhadap penyebaran informasi atau rumor yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar kelompok sosial; Kedua, bekerjanya lembaga penyelesaian masalah, baik yang bersifat formal seperti pengadilan atau informal seperti lembaga adat dan agama; Ketiga, adanya tokoh-tokoh pro perdamaian yang memiliki pengaruh, sumberdaya dan strategi efektif dalam mencegah mobilisasi masa oleh tokoh pro-konflik; Keempat, struktur sosialpolitik yang mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakat; dan Kelima, struktur sosial-politik yang adil bagi bertahannya integrasi sosial.(Kementerian Agama RI, 2019, hal. 58)

Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, guru harus mampu mengurai perbedaan ras, bahasa, warna kulit dalam mengimplentasikan moderasi beragama di sekolah. Sehingga peserta didik dapat mengambil contoh atas tindakan yang dilakukan oleh guru itu sendiri dalam implementasi nya dalam kehidupan nyata.

Konsep Penerapan Moderasi Beragama M. Quraish Shihab dan Relevansinya dalam Pendidikan Agama Islam

Konsep moderasi beragama (Islam) M. Quraish Shihab dapat diterapkan pada konteks keindonesiaan dengan beragam dimensinya.(Zamimah, 2018, hal. 75) Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa moderasi beragama dapat merembes pada berbagai aspek, termasuk aspek spesifik dalam pendidikan seperti paradigma, pendekatan, kurikulum, model, strategi, pengembangan materi-media pembelajaran, dan metode yang digunakan

dalam proses pembelajaran secara utuh yakni mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi. Di mana pola penerapannya bisa sangat beragam sesuai dengan fokus dan faktor penentu lainnya. Meski demikian, aspek mendasar yang memerlukan perhatian lebih adalah tentang bagaimana menerapkan konsep moderasi beragama secara efektif dalam proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran PAI.

Dalam hal ini, agaknya menjadi penting untuk mengungkap kembali perkembangan mutakhir dari konsep integrasi sebagai paradigma/pendekatan pengembangan keilmuan yang diarahkan pada tataran proses dan praktik pembelajaran PAI. Hal ini sejalan dengan penegasan Amin Abdullah bahwa kajian keislaman kontemporer memerlukan pendekatan integratif (multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin) agar pemahaman dan penafsiran agama tidak terlepas kontak dengan realitas. Di mana keseluruhan usaha ini adalah upaya untuk merekonstruksi metodologi studi keilmuan dan studi agama sejak dari hulu yakni filsafat ilmu-ilmu keislaman sampai ke hilir, yakni proses dan implementasinya dalam praksis pendidikan dan dakwah keagamaan. Pada ranah implementasi, Abdullah menawarkan tiga model yaitu model integrasi kurikulum, model penamaan mata kuliah (mata pelajaran), dan model integrasi ke dalam tema-tema mata kuliah (mata pelajaran). (Abdullah, 2020, hal. 97–98)

Ketiga pendekatan integratif ini sejalan dengan konsep integrasi kurikulum yang dirumuskan Drake dan Burns. Menurutnya integrasi kurikulum dalam konsepsi yang paling sederhana adalah tentang membuat hubungan. Selanjutnya mereka menawarkan tiga kategori utama sebagai titik pangkal untuk memahami perbedaan pendekatan menuju integrasi yakni multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. (Drake & Burns, 2004, hal. 7) Ketiga kategori ini merupakan bagian dari suatu *kontinum* (fusi, multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin) untuk memahami berbagai cara mengonstruksi kurikulum terintegrasi yang mampu mengarahkan pada pembelajaran yang lebih mendalam. Pembelajaran mendalam berarti suatu pergeseran dari pembelajaran yang bersifat permukaan menuju pemahaman atas suatu topik secara mendalam dengan memosisikan siswa sebagai pemimpin dalam pembelajarannya. (Drake & Reid, 2018, hal. 30) Dengan demikian, konsep integrasi kurikulum memainkan peran kunci untuk mengombinasikan berbagai disiplin ilmu yang terwujud dalam suatu proses pembelajaran sesuai dengan topik, konteks, dan tingkat integrasinya.

Dalam konteks ini, pengembangan pembelajaran PAI berwawasan moderasi beragama mengacu pada prinsip integrasi. Prinsip integrasi ini dimaksudkan sebagai salah satu alternatif dalam mengembangkan strategi pembelajaran PAI ke arah kontinum integrasi kurikulum. Di mana proses pembelajarannya mengarah pada upaya untuk mengombinasikan beragam wawasan dari disiplin ilmu lain. Misalnya, ketika seorang guru menyampaikan materi pelajaran tentang puasa, penjelasannya tidak semata-mata bersifat normatif keagamaan tapi memberikan pengayaan penjelasan dari disiplin ilmu lain seperti tentang manfaat puasa bagi kesehatan berdasarkan penjelasan atau hasil temuan ilmiah. Dengan cara itu, pembelajaran PAI telah beranjak dari pendekatan doktriner menuju pendekatan saintifik-doktriner.(Harto, 2021, hal. 118) Dengan kata lain, cara ini merupakan bentuk sederhana dari upaya mengintegrasikan pengetahuan agama dengan pengetahuan ilmiah. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahyudi bahwa desain materi kajian Islam harus mengarah pada pemahaman yang bersifat multi perspektif agar untuk memperkaya pemahaman dan pandangan tentang Islam.(Wahyudi, 2020, hal. 25)

Cara ini juga dapat dilihat sebagai bentuk keteladanan guru dalam menyontohkan pemikiran dan sikap moderat bagi para siswa dengan mengembangkan materi/bahan pembelajaran, karena guru merupakan *role model* bagi para siswanya.(Rasmuin & Ilmi, 2021, hal. 36) Moderasinya tampak dari keseimbangan dalam menggabungkan potensi akal dan indera manusia dengan ajaran Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah, karena penerapan *wasathiyah* yang baik dan benar mensyaratkan pengetahuan dan pemahaman yang benar.(M. Q. Shihab, 2019b, hal. 182) Adapun pengembangan materi pembelajarannya terlihat dari cara guru mengemas materi yang menggabungkan aspek normatif dan ilmiah sebagai bentuk pengayaan sekaligus penyegaran materi pelajaran yang menghadirkan kebaruan (*novelty*) sehingga pesan dari materi itu menjadi lebih bermakna karena pengemasan materi pelajaran mensyaratkan empat aspek yakni *novelty* (untuk memengaruhi motivasi dan atensi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran), *proximity* (kesesuaian dengan pengalaman siswa), konflik (menggugah emosi siswa), dan humor (kesan lucu untuk menarik perhatian).(Sanjaya, 2015, hal. 150)

SIMPULAN

Penerapan (Implementasi) moderasi beragama membutuhkan upaya serius yang ditopang oleh tiga hal pokok, antara lain: pengetahuan atau pemahaman yang benar, keseimbangan dan pengendalian emosi, kewaspadaan dan kehati-hatian yang bersinambung. Dalam pembelajaran PAI, penerapan moderasi beragama dapat dilakukan pada seluruh dua komponen yakni kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum terintegrasi menjadi alternatif terbaik untuk mengombinasikan isi materi pelajaran karena prinsip integrasi dapat merembes pada berbagai kondisi termasuk perubahan kebijakan kurikulum. Perwujudannya akan tampak pada seluruh komponen proses pembelajaran terutama tentang pengembangan materi pembelajaran yang mempunyai empat prinsip pengemasan yakni *novelty, proximity, konflik, dan humor*.

Sebagai seorang guru tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan kepada peserta didik tetapi juga dapat membentuk karakter menjadi pribadi yang unggul mandiri dan dapat mengamalkan ilmu pengetahuannya. Jika *flashback* pada sejarah peradaban islam, islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan prestasi akademik yang gemilang (*science for science*), tetapi untuk mewujudkan kedamaian dan perdamaian umat manusia (*science for peace of society*). Dengan kata lain, bahwa adanya ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan umat manusia (*science for human welfare*) sehingga arah kemajuan sains maupun teknologi (peradaban) bisa dikendalikan dengan tetap berada dalam jalan yang lurus *al-sirath al-mustaqim*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*. IB Pustaka.
- Afrizal, & Mukhlis. (2015). Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an "Studi Komparatif Antara Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafsir." *An-Nur*, 4(2).
- Ahmadar, R. (2018). *Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Berbusana*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Al-Asfahaniy, A.-A. al-R. (2009). *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*. Darel Qalam.
- Al-Qardhawi. (n.d.). *Al-Khashâish al-Âmmah li al-Islâm*.
- Amrullah, A. (2020). *Begini Konsepsi Moderasi Islam Menurut PBNU*.
- Arifin, Z. (2019). Nilai Moderasi Islam Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Azhar Kota Kediri. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1).
- Az-Zuhaili, W. (2012). *At-Tafsir Al-Wasith, Terj. Muhtadi*. Gema Insani.
- Azra, A. (2020). *Moderasi Islam Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- B. Uno, H. (2007). *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Baidhawiy, Z. (2005). *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Erlangga.
- DepDikNas. (2013). *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Umum*.
- Drake, M. S., & Burns, R. C. (2004). *Meeting Standards Through Integrated Curriculum*. VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Drake, M. S., & Reid, J. (2018). Integrated Curriculum as an Effective Way to Teach 21st Century Capabilities. *Asia Pacific Journal of Educational Research*, 1(1).
- Ertanti, S. (2016). *Representasi Toleransi Beragama Dalam Film Cahaya Dari Timur: Beta Maluku*. UIN Walisongo.

- Fadeli, S. (2007). *Antologi NU "Sejarah, istilah, Amaliyah dan Uswah."* Khalista.
- Faizin, M. (2020). *Pentingnya Keseimbangan Pikiran Dan Hati Dalam Menghadapi Masalah*. <https://www.nu.or.id/post/read/80378/pentingnya%02keseimbangan-pikiran-dan-hati-dalam-menghadapi-masalah>
- Fauzi, A. (2018). Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(2).
- Hakim, L. (2019). *Menag: Awas Esktrim Kanan dan Ekstrim Kiri*. <https://www.google.com/search?client=opera&q=contoh+ekstrim+kiri+dalam+moderasi&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8>
- Hani, & Ashif. (2020). Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih Di Ptkin Menggunakan Konsep Problem-Based Learning. *Jipis*, 29(1).
- Harto, K. (2021). *Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasathiyah: Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik*. Semesta Aksara.
- Hasanah, U. (2017). Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih Melalui Penerapan Metode PQRS. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8.
- Hawi, A. (2013). *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*. Rajawali Pers.
- Hermawan. (2020). Nilai Moderasi Islam Dan Internalisasinya Di Sekolah. *Insania*, 25(1).
- Hermawan, D. (2019). *Pemikiran M. Quraish Shihab tentang revolusi mental dalam tafisr al-misbah dan kaitannya terhadap guru pendidilan agama islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Ihwanuddin. (2017). *Pendidikan Akhlak Dalam Al-Quran Surat An Naba Ayat 31-38 : Telaah Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Jamarudin, A. (2016). Membangun Tasamuh Keberagamaan Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Toleransi*, 8(2).
- Junaidi, M. M. (2001). *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*. CV. Angkasa Solo.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama (Pertama)*. Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.

- Khoiron. (2020). *Sebagai Leading Sector, Kemenag Perkuat Program Moderasi Beragama*. <https://kemenag.go.id/Berita/Read/513620/Sebagai-LeadingSector--Kemenag-Perkuat-Program-Moderasi-Beragama>
- Kurniawan, I., Halim, M., & Dkk. (2019). *Literasi Multikultural Berbasis Agama Islam Sejarah Dan Edukasi*. Zigie Utama.
- Misrawi, Z. (2010a). *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan lil Alamin*. Pustaka Oasis.
- Misrawi, Z. (2010b). *Hadratussyaiikh Hasyim Asy'ari "Moderasi, Keutamaan Dan Kebangsaan."* Buku Kompas.
- Muhaimin. (2013). *Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam* (2nd ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammadiyah. (2020). *Moderasi Beragama dalam Perspektif Muhammadiyah*. <http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-19754-detail-moderasi%02beragama-dalam-perspektif-muhammadiyah.html>
- Mustafidin, A. (2021). Moderasi Beragama Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Konteks Keindonesiaan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim*, 9(2), 107–115.
- Qardhawi, Y. (2017). *Islam Jalan Tengah*. PT Mizan Pustaka.
- Ramayulis. (2007). *Ilmu Pendidikan islam*. Kalam Mulia.
- Rasmuin, & Ilmi, S. (2021). Strategi Implementasi Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di MAN 2 Banyuwangi). *Indonesian Journal Of Islamic Education Studies (IJIES)*, 4(1). <https://doi.org/10.33367/ijjws.v4i1.1629>
- Ridha, M. R. (n.d.). *Tafsir Al-Manar*. al-manar.
- Ronto. (2012). *Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. PT Balai Pustaka.
- S. Grindle, M. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta.
- Samsudin, S. (2021). *Konsep Moderasi Islam Perspektif M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam Kontemporer*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sanjaya, W. (2015). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Kencana Prenada Media Group.

- Setiyadi, A. C. (2012). Pendidikan Islam Dalam Lingkaran Globalisasi. *Jurnal*, 7(2).
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2007a). *Membumikan al-Qur'an*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2007b). *Sunni Syi'ah Begandengan Tangan, mungkinkah?Kajian atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2009). *Kaidah Tafsir*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2019a). *Islam yang Saya Anut: Dasar-dasar Ajaran Islam*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2019b). *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2019c). *Wasathuyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati.
- Shihab, U. (2005). *Kontekstualitas Al-Qur'an (III)*. Penamadani.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Kencana Prenada Media Group.
- Syafe'i, I. (2015). Tujuan Pendidikan Agama Islam. *Al- Tadzkhiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6.
- Syams, N. (2019). *Tantangan Multikulturalisme Indonesia*. Kanisius.
- Tim Penyusun. (2012). *Moderasi Islam (Tafsir al-Qur'an Tematik)* (M. M. Hanafi (ed.); Pertama). Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.
- Tim Penyusun. (2016). *KBBI Daring*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.
- Ulinuha, M., & Nafisah, M. (2020). Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab. *Suhuf*, 13(1). <https://doi.org/10.22548/shf.v13i1.519>
- Wahyudi, W. E. (2020). Indonesia Sebagai Trendsetter Moderatisme di ASEAN (Membangun Relasi Akademik antara Islam dan Multikulturalisme). *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(1). <http://doi.org/10.30736/ktb.v3i1.98>

- Yunus, I., & Susilo, E. (2021). Implikasi Konsep Ummatan Wasathan menurut M. Quraish Shihab pada pendidikan Agama Islam. *Widyadewata: Jurnal Balai Diklat Keagamaan Denpasar*, 4(2). <https://widyadewata.kemenag.go.id/index.php/widyadewata/article/view/53/41>
- Zamimah, I. (2018). Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab). *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 1(1). <https://doi.org/10.33511/alfanar.v1n1.75-90%3E>

Internalization of Religious Moderation Values in Islamic Education Learning

Mualimul Huda - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Indonesia
mualimulhuda@iainkudus.ac.id

Muhammad Danial Hidayat - Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kudus, Indonesia
m.danialhidayat96@gmail.com

Fitria Noor Lailatur Rizqi - Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kudus, Indonesia
fitriarizqi24@gmail.com

Abstract

Through Islamic education learning, students are directed to be able to actualize religious understanding in everyday life with a religious, multicultural, tolerant, and moderate attitude within the framework of the Indonesian nation and state. One of the efforts is to internalize the values of religious moderation in Islamic religious education learning. The purpose of internalizing the values of religious moderation is to increase students' understanding, practice tolerance, and mutual respect, have a national commitment, and be anti-violence. This study aims to describe the management of Islamic education learning by internalizing the values of character education based on religious moderation. This study uses a library research approach, descriptive data analysis method, collecting data, compiling, clarifying, and interpreting. The study results revealed that internalizing religious moderation values in Islamic religious education learning includes planning, implementation, control, and evaluation activities. Learning planning activities are guided by the content of the Islamic religious education curriculum at KMA 183 in 2019. Implementation activities include the application of approaches, methods, media and strategies, adaptive learning to religious moderation values, including student-centered learning approaches, problem-based learning, and contextual and cooperative learning. Learning evaluation activities are

carried out by assessing cognitive, affective, and psychomotor aspects. The implication is that Islamic education teachers should continue to create and innovate learning by internalizing the values of character education in the learning process. Internalizing religious moderation values in the learning process includes aligning materials, strategies, and learning methods with the values of religious moderation. The teacher's role in the internalization process includes exemplary national commitment, mutual respect, acting wisely, and objectively, providing feedback, learning reflection, and using polite language. Consistent and programmed habituation is required in moral development, religious and social activities.

Keywords: *Learning Management, Internalization, Religious Moderation Values, Islamic Education.*

Abstrak

Melalui pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) peserta didik diarahkan agar mampu mengaktualisasikan pemahaman agama dalam kehidupan bersama dengan sikap religius, multikulturalis, toleran dan moderat dalam kerangka berbangsa dan bernegara Indonesia. Salah satu upayanya adalah internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama tersebut agar menambah pemahaman peserta didik, melatih sikap toleransi, saling menghormati, memiliki komitmen kebangsaan dan anti kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan pembelajaran PAI dengan menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan karakter berbasis moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan library research, metode analisis data secara deskriptif, dengan tahap pengumpulan data, menyusun, mengklarifikasi, dan interpretasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada pembelajaran PAI meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Kegiatan perencanaan pembelajaran berpedoman pada muatan kurikulum PAI pada KMA 183 Tahun 2019. Kegiatan pelaksanaan meliputi penerapan pendekatan, metode, media dan strategi, pembelajaran yang adaptif terhadap nilai-nilai moderasi beragama, diantaranya pendekatan student centered learning,

problem based learning, contextual learning dan cooperative learning. kegiatan evaluasi pembelajaran dilaksanakan melalui penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotorik Implikasinya bahwa, guru PAI hendaknya terus melakukan kreasi dan inovasi pembelajaran dengan menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan karakter pada proses pembelajaran. Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran diantaranya yakni dengan menyelaraskan materi, strategi dan metode pembelajaran dengan nilai-nilai moderasi beragama. Peran guru dalam proses internalisasi diantaranya adalah dengan keteladanan dalam komitmen kebangsaan, saling menghargai, bertindak bijak, objektif, memberikan umpan balik, refleksi pembelajaran serta penggunaan bahasa yang santun. Diperlukan Pembiasaan yang konsisten dan terprogram dalam pembinaan akhlak, serta kegiatan keagamaan dan sosial.

Kata Kunci: *Manajemen Pembelajaran, Internalisasi, Nilai-Nilai Moderasi Beragama, Pendidikan Islam.*

A. Introduction

The process and significance of learning to be a core business are very important in the services of educational institutions. The quality of learning and meaningful learning innovation for students is the main task of educational institutions (Bourke & Roper, 2017) organisational and technical challenges, and may also involve significant lags before benefits are realised. Here, using data on a large group of Irish manufacturing plants and econometric analysis, we establish the short- and longer-term influence of plants' adoption of quality improvement methods (QIMs. Therefore, the teacher as the main element is not only required to be professional in mastering learning materials but also understand and master learning management, both inside and outside the classroom (Amaroh & Ali, 2021; M. E. Sari, 2017). Teacher competencies As explained in Chapter IV of the Law on Teachers and Lecturers concerning Standards for Educators and Education at chapter 10; teachers must have four competencies, namely pedagogic competence, professional competence, personality competence, and social competence, is the ability to manage student learning. Personal competence is the ability of a strong personality, noble, wise, and authoritative, as well as being a role model for

students. Professional competence is the ability to master learning materials broadly and deeply to guide students according to competency standards in the National Education Standards (A. Hakim, 2015; Huda, 2022a; Poro et al., 2019). Social competence is the ability of teachers to communicate and interact effectively and efficiently with students, fellow teachers, parents/guardians of students, and the surrounding community (Law on Teachers and Lecturers, No. 14 of 2005).

Pedagogic and professional competencies include the ability to choose and apply learning methods that are appropriate to the complexity of the material and the character of each student. So that the methods and approaches applied are truly following the self-development of students (Liakopoulou, 2011). Teachers should provide the widest possible space for students to be actively involved throughout the learning process. So that the achievement of the cognitive, affective, and psychomotor domains of students can grow and develop optimally (Hamzah, 2012; Hoque, 2016). The learning process is strongly influenced by several components, including students, teachers, school principals, curriculum, learning infrastructure, as well as physical and social environmental conditions in learning. all of that must be arranged in such a way as to make the best contribution to learning, change attitudes and knowledge of students and be able to adapt to their environment (Habibi et al., 2019; Huda, 2018b). Learning management is needed to improve the effectiveness and efficiency of the teaching and learning process and the achievement of learning objectives. Therefore, the teacher's role is needed in managing or managing to learn starting from planning, organizing, actuating, e-evaluating to increase the effectiveness of the teaching and learning process (Turnbull et al., 2020) .

Globalization and advances in information technology make all information from wherever it comes easily accessible anytime and anywhere. One of the effects or even part of globalization is the ideology of religious radicalism. Religious radicalism in society is a threat to the unity of the Indonesian nation. One of the government's efforts to counter radical ideology through the ministry of religion is to mainstream religious moderation. Religious moderation has four leading indicators, namely national commitment, tolerance, anti-violence, and accommodating to local culture (Arofah et al., 2020; Harto & Tastin, 2019). In the last few decades, the inclusion of transnational ideologies has also colored inter-religious groups which can affect society. The role of religious moderation education is important to reduce issues that can create barriers in society. Education in

Indonesia, especially Islamic Religious Education, is a strategic aspect of this issue. Islamic Religious Education is not only for the transfer of knowledge and understanding of religious, social, and cultural values but also the process of implementing religious values in the community through Islamic Religious Education which teaches religious moderation to the multicultural Indonesian society (Azra, 2007). The religious life of the Indonesian people today is getting the spotlight from various parties because of the rampant behavior of people who commit violence in the name of religion, such as intolerance, both internal and inter-religious, insults to religious leaders, and even the emergence of various cases of harassment or blasphemy of religion by groups and individuals in the community. Such a situation, of course, cannot be left alone; it is necessary to find a way out. Because if it continues to be left without a definite solution, it is feared that in the future, it is not impossible; it will cloud the atmosphere of harmony, unity, and even national unity. In the end, this situation will lead to the disintegration of the nation (Arifinsyah et al., 2020; U. Husna & Thohir, 2020).

Several previous research results that are relevant to this research regarding PAI learning by actualizing the character of moderation values include religious moderation that can be actualized in every educational institution to live a life full of peace and benefit (Sya'bani, 2021), internalization of moderation can be applied through Islamic education at Public Universities (Anwar & Muhayati, 2021; Syatar, 2020), religious moderation in Indonesia's diversity strengthens national unity, religious moderation in Indonesia has a vital role for stability and the good of the nation (Abror, 2020; Ninoersy, 2021), implementation of the values of religious moderation in Islamic education learning: a review of analysis in elementary, middle and higher education (Chadidjah et al., 2021), The Effectiveness of Multimedia-Based Religious Moderation Learning Models for Students of *Madrasah Ibtidaiyah* (Santa Chrisantina, 2021) and Revitalization of Character Education through Internalization of Islamic Religious Education (PAI) and Religious Culture (Anshori, 2017; Febriliyanti, 2016; Sunarso, 2020). The novelty of this research is managing character values based on religious moderation in PAI learning. Religious moderation is one of the efforts to find a way to goodness, brotherhood, and benefit especially can be applied through the educational process. The education process, inculcating the values of religious moderation, whether included in the formal curriculum or non-formal in nature, is believed to be able to alleviate or even prevent radical behavior, intolerant behavior, and behaviors that can stretch religious harmony in Indonesia.

The focus of this research study is PAI learning management based on the values of religious moderation. This is because subjects that directly relate to aspects of faith, sharia, worship, knowledge, and attitudes are very close and related to the mission of religious moderation values. Likewise, in terms of the curriculum and PAI learning materials developed to sow the values of tolerance, love for the homeland, and accommodating to local culture. Therefore, a PAI learning design is needed to internalize religious moderation values in the learning process, starting from planning, organizing, implementing, and supervising.

B. Literature Review

1. Learning Management

In understanding the term management, the approach applied is based on the experience of a leader. Management as a system is a process to achieve organizational targets optimally and comprehensively. Achieving organizational targets is carried out by managing the functions of planning, organizing, preparing personnel or staffing, directing and leadership, and controlling. Management is a special process with targets to achieve three a goal maximally by maximizing all available facilities (Gazi, 2020; Hussey, 1998). Terry explained that management is a performance of conceiving the desired result by means of group efforts consisting of utilizing human talent and resources. This provides an understanding that management is the ability to set and achieve planned targets by empowering members and available facilities (Silitonga & Amirah, 2021).

Learning management is a process of planning, implementing, and assessing/evaluating learning, in the context of implementing teaching and learning tasks, in the interaction between teachers and students, both directly in the classroom and outside the classroom. Stoner, quoted by Sufyarma, explained that management is the activity of planning, organizing, leading, and controlling the activities and actions of organizational members and the use of organizational components to achieve the targets that have been set (Susilo et al., 2021). Griffin defines *management* as an action or planning activities, and decision-making, organizing, leadership, and control targeting organizational components (human, financial, physical, and information) to achieve organizational targets (Griffin, 2021). The various meanings of management are influenced by subjectivity, educational background/

experience, and a manager's learning environment, including competence and ideals of running a company and being responsible for achievements and failures. On the other hand, there is an assumption that management is an act of planning and achieving the targets that have been proclaimed through activities to maximize human potential and infrastructure. Thus, it can be concluded that management is a process of planning, organizing, actuating, and evaluating to achieve goals (objects) effectively and efficiently (Batubara et al., 2021). Effective means that the target is met according to planning, and efficient means that the task is completed orderly, organized, and timely.

Learning is an activity that the teacher facilitates to develop cognitive aspects that can improve students' thinking power and can increase the power to manage new knowledge. Learning becomes an action in increasing significant understanding of the lesson content. Learning emerges from the concept of learning. Learning is interpreted as a process in which an organization changes its character as a causality of the occurrence of patterns of interaction and communication (Low & Jin, 2012). Learning is essentially an action that expects the perfection of the behavior of the individual who is learning. Learning implies the meaning of each process planned to facilitate individuals learning competency and a new value. The learning process requires the teacher to recognize and take an inventory of the intakes of students, including talent, motivation, academic and socio-economic background, and others. Information held by educators about student intake is the principal capital for delivering learning materials and is the key to successful learning applications (R. L. Husna & Setiawan, 2021; Mezirow, 2018) .

The term learning includes two interrelated concepts, namely learning and teaching. According to cognitive learning theory, learning is a change in perception and understanding. Kleden argues that learning means practicing something while learning something means knowing something. Cronbach gives the meaning of learning: "a change in behavior shows learning as a result of experience" Harold Spears gives limitations on learning, namely: "Learning is to observe, to read, to imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction" while Gooch, said: "Learning is a change in performance as a result of practice" (Sadirman, 2011). Learning in Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System states that learning is a process of interaction between students and educators and learning resources in a learning environment. The law on the national education system explains that education is held democratically and fairly and is not discriminatory by upholding human rights, religious values, cultural values, and national

pluralism; Education is organized as a systemic unit with an open and multi-meaning system; Education is held as a process of civilizing and empowering students that lasts a lifetime; Education is held by setting an example, building the will, and developing the creativity of students in the learning process; Education is held by developing a culture of reading, writing, and arithmetic for all citizens (Sisdiknas, 2003). There are two major approaches to solving the problem of religious moderation in Indonesia in terms of multicultural education, namely the Curricular approach and the Whole school approach (Raihani, 2016). The curricular approach is an approach that places an important emphasis on loading knowledge and values from diversity and how to form a perspective on diversity.

Dimiyati and Mujiono define learning as a teacher's activity in a programmed and planned manner to create an energetic atmosphere for students, emphasizing learning facilities. In Nana Sudjana's opinion, learning is defined as a systematic and deliberate effort so that there is a process of educative interaction between educators and students (Jannah & Sontani, 2018). There are three urgent focuses on learning, namely: *first*; Learning is in the form of an effort to engineer learning situations and conditions for students. *Second*; Learning is an effort to prepare students to become good citizens and become the hope of the nation. *Third*; Learning is a process of maturation of students so that they can enter and adapt to the community.

Thus, from all the opinions above, it can be concluded that learning is applied to construct thinking power and the ability to understand and master materials, in which knowledge comes from outside and is then constructed within students so that students can develop intellectually. The concept of management as a process of learning is interpreted as an effort and the attitude of the leadership (principal) as the person who gives instructions in schools and businesses as well as the actions of teachers as managers of learning in the classroom in order to achieve school and learning program targets (Dunham, n.d.; Slintak, 2019). In managing learning, the teacher as the manager carries out various activities ranging from planning, organizing, applying, and evaluating the learning carried out (Montiel et al., 2018). Based on the concept of management and learning, learning management can be understood as a process of managing, which includes planning, organizing, actuating, and evaluating the learning process related to all components in it to achieve goals. According to Ibrahim Bafadal, learning management is all actions in order to achieve an educative, effective, and efficient teaching and learning process (D. N. A. Sari et al., 2018). Learning management is

the arrangement of all learning activities starting from planning, organizing, actuating, and evaluating, which includes the core curriculum and supporting curriculum based on the curriculum set by the Ministry of Religion and the Ministry of Education and Culture.

2. PAI Learning Management Objectives

PAI learning objectives focus on strengthening the understanding and character of students. The Ministry of Religion has issued KMA No. 183 of 2019 concerning the Islamic Religious Education Curriculum. As explained by KMA 183 of 2019, PAI learning aims to prepare Indonesian people to have a moderate, inclusive, cultured, religious mindset and attitude and have the ability to live as individuals and citizens who are faithful, pious, noble, productive, creative. Innovative and collaborative and able to be part of the solution to various problems in society, nation, state, and world civilization. In addition, students are expected to be able to express their religious understanding in living together, which is multicultural, multiethnic, multi-religious, and the complex of life in a responsible, tolerant and moderate manner within the framework of the Indonesian nation and state based on Pancasila and the 1945 Constitution (Huda, 2022b; Komarudin et al., 2021; Marjuni & Ulwani, 2022).

The purpose of learning management is a derivation of the National Education Goals of Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System chapter 3, which reads, "National education functions to develop capabilities and shape the character and civilization of a dignified nation in the context of educating the nation's life, aiming to develop the potential of students to become human beings who believe and fear God Almighty, have a noble character, are healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and become democratic and responsible citizens. Learning management is managing various student activities so that these activities positively impact the institution (school/madrasah) (Khunaifi & Matlani, 2019). Learning is expected to run smoothly, orderly, and reasonably to provide support for the achievement of school targets and educational targets in general.

In particular, the objectives of learning management include two things, namely goals for students and goals for educators. The goals for students include educating students to become more responsible for themselves for their behavior and actions; making students aware that every direction

and instruction of educators to students to behave following class rules is love and not anger and arrogance of educators and inspires the attitude of responsibility and discipline of students to their duties and obligations (Shodiq, 2019). The goal for educators is to understand the implementation of lessons appropriately and adequately. Understand the steps that must be applied to guide students with learning difficulties. Identify and provide remedial services for students who have not achieved complete learning. These goals provide an understanding that every educator must carry out learning management by applying various strategies and methods by adjusting the characteristics of the material and students so that active, innovative, creative, effective, and fun learning activities can be realized (Hidayat & Syafe'i, 2018).

Thus, the conclusion from the main objective of learning management is to print students' personalities following national education goals. In detail, the objectives of learning management include the following, namely the realization of an active, innovative, creative, effective, and meaningful learning process. The creation of active students in developing their interests and talents to achieve religious-spiritual depth, professional competence, having skills and intelligence, having noble character, and being skilled at positioning themselves in society, nation, and state. The implementation of teaching and learning activities that are effective, efficient, quality, and meaningful.

C. Discussion

1. Implementation in learning management

Learning management activities include planning, organizing, actuating, and controlling activities. POAC is an organizational management principle introduced by George R. Kelly, which consists of planning, organizing, actuating, and controlling. Learning planning is the process of preparing subject matter, using methods, media, and learning approaches, assessing, and allocating available time to achieve learning objectives. Planning is an essential activity in various activities in the form of accommodating everything related to the work to achieve optimal targets/goals. Planning is the first step to any course of action, which decides the strategy as to how to attain maximum outcome from such action (Kelly, 2018). Planning determines all actions and resources to achieve targets/goals. Learning planning includes, selecting and determining the actions of educators, when and how to implement them; discussing and determining the implementation of work according to learning targets; learning strategy innovation; analyzing the situation and conditions to achieve the implementation of learning, and communicating plans related

to learning to the authorities. According to Hamalik (2008), (Yumnah, 2020) there are three characteristics in the learning system: the plan, which includes the arrangement of the material, and the design, which is the learning elements in a particular plan. Interdependence between elements of a unified learning system as a whole. Each element is essential, and each contributes to the learning system. Objectives, the learning system has specific goals to be achieved (Turnbull et al., 2020). These characteristics form the basis of the difference between artificial systems and natural systems.

Some things that the teacher must consider in planning the lesson are the characteristics of the students, the availability of time, and the learning materials. These considerations should accommodate several learning principles, namely raising students' attention to learn; The learning process should not ignore the problem of student attendance. Educators are required to attract and win the hearts of students so that they can concentrate and be interested in the subject matter being taught, and the teacher must also look good and be pleasant as an example. Next is to provide motivation, learners need intrinsic and extrinsic motivation (Low & Jin, 2012). Students need intrinsic motivation because teaching and learning activities are less effective without the readiness of physiological and biological aspects. Extrinsic motivation comes from outside/educators. If the attention of students is focused, the teacher can motivate students. Educators must be able to grow and strengthen students' motivation throughout the teaching and learning activities that take place.

The next concern is students' activeness; Learning activities are meaningful if students are proactive in teaching and learning activities. As subjects, students receive learning materials, but students are proactive in their activities. In this case, educators, as far as possible, engineer situations and conditions that provide a stimulus for creative student activity. Direct Engagement; educators need to understand that students must be involved and directly involved in learning activities. Therefore, educators need to engineer situations and conditions in line with learning targets—submitting Lesson Materials. The delivery of learning materials can be designed to provoke student activity avoid student fatigue and boredom during teaching and learning activities; educators, as much as possible, use various methods and strategies that follow the character of the material (Aisyah et al., 2019). The material is prepared and reorganized by the teacher. This is expected to provide a stimulus and challenge for students to understand and re-learn the material that has been taught.

Of the various functions in management, implementation (actuating) is an essential function. The planning and organizing function is only at the level of the abstract concept of the management process, and the actuating function is directly related to the implementers in the organization. *Actuating* is the implementation of planning with an *organizing footing*. *Actuating* is the embodiment of planning that has gone through various selections and analyses to realize and implement maximum and conducive learning. The implementation of the PAI teaching and learning process based on the values of religious moderation must adhere to the principles contained in the guidelines for implementing religious moderation in Islamic educational institutions (Muallip, 2014). Factors in PAI learning management, in particular, can be classified into several categories, namely: 1). teacher factor; The teacher competency factor in managing learning is very urgent in increasing the effectiveness of the teaching and learning process, especially in the current era of the COVID-19 pandemic. Teacher competencies in teaching and learning activities include professional competence, personality competence, pedagogic competence, and social competence. Learning is not optimal when learning is only ceremonial. It takes exemplary and integrity from the teacher to make learning more meaningful 2). The student factor is essential in the teacher's consideration of choosing methods, strategies, and learning media. During the COVID-19 pandemic, sometimes students lack responsibility in carrying out and completing their duties as students who are still required to study while studying from home. Students feel bored with new study habits. While at home, students are still required to study both online and offline, guided by the teacher and accompanied by their parents. 3). Family factor. In the family environment, the role of parents and other family members at home dramatically influences the formation of discipline in children (Habibi et al., 2019; Hoque, 2016; Shuell, 2021).

Next is the factor of learning facilities. Learning facilities that support student learning activities will make the teaching and learning process fun and obtain the expected learning outcomes. Therefore, adequate learning facilities are essential for achieving satisfactory student learning outcomes. Facilities in the form of tools or technology-based facilities are very much needed, and the price for most parents of students is difficult to reach in preparing learning facilities. Learning facilities include two fundamental aspects, namely Facilities and Infrastructure (Azhari & Kurniady, 2016; Eze et al., 2018).. Educational facilities are everything used for learning equipment by students and teaching and learning equipment by educators. Educational

infrastructure is everything used as a way and a place to carry out educational activities. Facilities are the needs of students who play an essential role in the teaching and learning process to advance the quality of education in a country so that education can be of quality. Supporting learning facilities are comfortable and clean classrooms, PAI laboratories, PAI teaching aids, PAI learning resources, PAI literacy, virtual libraries such as Al-Quran and Hadith search applications, internet facilities, and other learning equipment.

PAI learning at madrasah refers to the Graduate Competency Standards and Content Standards regulated in PMA 183. The Graduate Competency Standards provide a conceptual framework for learning objectives that must be achieved. Content Standards provide a conceptual framework for learning and learning activities derived from the level of competence and the scope of the material (Jannah & Sontani, 2018, p. 183). The learning objectives of Akidah, Qur'an Hadith, and SKI, following Graduate Competency Standards, include developing the domains of attitudes, knowledge, and skills that are elaborated for each madrasa. The learning process is directed at developing the three domains holistically, meaning that one domain cannot be separated from other domains. Thus, the learning process gives birth to personal qualities that include attitudes, knowledge, and skills.

The three domains of competence have different acquisition trajectories (psychological processes). Attitudes are obtained through "accepting, carrying out, appreciating, living, and practicing" activities. Knowledge is acquired through "remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating" activities. Skills are acquired through the activity of "observing, asking, trying, reasoning, presenting and creating" held interactively, inspiring, fun, challenging, motivating students to participate actively, and providing sufficient space for the initiative, creativity, and independence according to their talents, interests, and abilities (Bourke & Roper, 2017; Nadlir, 2013) organisational and technical challenges, and may also involve significant lags before benefits are realised. Here, using data on a large group of Irish manufacturing plants and econometric analysis, we establish the short- and longer-term influence of plants' adoption of quality improvement methods (QIMs. For this reason, each education unit carries out learning planning, implementation of the learning process, and assessment of the learning process to improve the efficiency and effectiveness of achieving graduate competencies.

To strengthen student competence with a scientific, integrated thematic and thematic in one subject, it is necessary to apply discovery/inquiry learning. In addition, to encourage the ability of students to produce contextual works, both individually and in groups, it is highly recommended to use project-based learning and problem-based learning. The implementation of learning is the implementation of three learning activities: preliminary, core, and closing activities. In preliminary activities, the teacher must prepare students psychologically and physically to participate in the learning process; invites to pray for the benefits and blessings of the knowledge learned and to pray for teachers, and teachers until the Prophet Muhammad SAW (L. Hakim, 2015) as a source of learned Islamic teachings; provide contextual motivation for students to learn according to the benefits and application of teaching materials in everyday life, by providing local, national and international examples and comparisons, as well as adapted to the characteristics and levels of students; ask questions that relate previous knowledge to the material to be studied; explain the learning objectives or essential competencies to be achieved, and convey the scope of material and references related to what activities students will do to achieve learning objectives.

The core activities use learning models, learning methods, learning media, and learning resources tailored to students and subjects' characteristics. The selection of thematic and/or integrated and/or scientific and/or discovery and/or project-based learning approaches, problem-based learning is adjusted to the characteristics of the competencies to be achieved. Core activities must inspire, arouse curiosity, and motivate students to excel to create seriousness in learning and develop aspects of students' attitudes, knowledge, and skills. One alternative learning method for the entry of Islam into the archipelago is the role-playing method. Role-playing is very suitable for increasing students' activeness in exploring learning material. This method familiarizes students with being critical of what they learn with role demonstrations following the description of the material. Role-playing can provide alternative learning methods that are more effective so that this can be done to stimulate student learning motivation (Nurjannah, 2019; Yustian et al., 2017).

The concept of applying role-playing in this learning is as follows:

- a. Teachers and students work together to compile and prepare a scenario that will be displayed, namely the material for the entry of Islam into the archipelago. Scenarios designed by teachers and students should contain a series and what students must display. So that students can develop their storylines and solutions regarding the cases raised.

- b. The teacher divides the students into several role groups and studies the scenario before the performance (a few days before the lesson). (Kumalasari, 2021; Nurjannah, 2019).
- c. The teacher tells students what learning activities will be carried out.
- d. The division of groups, in this case, is also adjusted to the number of students in the class. The group played a role in the entry of Islam into the archipelago through trade, marriage, da'wah, education, and the arts.

Following the characteristics of the attitude, then one of the alternatives chosen in the delivery of this material is the affection process. Conditioning students carry out the affection process to accept, carry out, appreciate, appreciate, and practice the values/morals that will be instilled. All learning activities to achieve the objectives of the knowledge aspect become media and means for forming attitudes and internalizing moral values. Teachers need to seriously and consistently carry out the affective process to form habits, culture, and character in students (KMA Number 183 of 2019) In the Knowledge aspect, students are invited to go through knowing, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating activities. The characteristics of learning activities in the knowledge domain have differences and similarities with learning activities in the skills domain (Hoque, 2016; Jauhari et al., 2020).

Islamic Religious Education cannot stand alone to teach a moderate way of religion but becomes part of a multicultural national education system. Several strategies of Islamic Religious Education in instilling religious moderation in Indonesian society are seen from various aspects, namely the teacher aspect. The teacher as the spearhead in the application of the values of religious moderation must have the quality of delivering religious education to students as a whole and can influence the mindset of students in religion in the surrounding environment. One way to apply the values of religious moderation is to use the internalization method to students, namely by inserting the essence of the material on the values of religious moderation in the delivery of each subject matter of Islamic Religious Education. Some ways include inserting the values of religious moderation in every subject at school, especially in the material and curriculum of Islamic Religious Education. Supporting activities include congregational prayers, flag ceremonies to foster national commitment for students, extracurricular activities, the commemoration of Islamic holidays, and social activities such as helping the poor, the poor, caring for the environment, and others. So that the internalization of religious moderation values can be jointly carried out in broad educational activities.

Several stages in the implementation of the method of inserting the values of religious moderation in Islamic Religious Education subjects, namely the planning, implementation, and evaluation stages. At the planning stage, the teacher must prepare the material to be taught to students, such as seeing the basic competencies in the lesson plan and the textbook to be taught. At the implementation stage, the teacher teaches in the classroom with material according to basic competencies and textbooks, then internalizes the values of the character of religious moderation that already exist according to the value-based learning plan of religious moderation values in accordance with KMA 183, namely national commitment, tolerance, anti-violence and accommodating to local culture. In addition, teachers can also insert other religious moderation values in the material being taught by collaborating with learning methods such as discussion methods, demonstrations, and *problem-solving* in class. at the learning evaluation stage, the teacher evaluates the success of the material that has been taught to students, by conducting an assessment or by assigning or asking students about the material that has been taught at the end of the lesson.

We can take context and reflection from PAI learning based on character and moderating values, including being actualized in an attitude of loving the homeland and diversity. Indonesia is rich in culture and local wisdom, even before the arrival of Islam in the archipelago. Islamic values have been acculturated with various traditions and cultures in society as a form of da'wah and teaching Islam to the community. Some of these traditions are still found in the community today. There are values of Islamic education in symbols of local wisdom that exist in the community, including messages of faith education, sincerity, worship, and education for socializing (Huda, 2018; Irawati, 2017; Nurdianzah, 2020) but its existence has been developing in the form of transnational institution. Even pesantren as part of Islamic tradition of archipelago is often associated as' base or central understanding of Islam fundamental become root for growth radical movement that in the name of Islam. The radicalization of understanding at certain pesantren huts that impact on acts of radicalism in Indonesia should be laid in the context of the development of transnational Islamic movements due to the various developments of the existing world. The results of this study concluded that Islam as a universal religion of love (rahmatan lil 'alamin. Therefore, many religious traditions were left by *walisanga* as a form of teaching Islam in the past to the Javanese community, which until now are still preserved by the community.

D. Conclusion

With a series of PAI learning activities, it is hoped that it will be able to direct students to the formation of noble character through the internalization of positive values, wisdom, and *ibrah* in the journey of history through habituation cultivation and empowerment. Through PAI learning, teachers and students increase their understanding and application of the concept of religious tolerance and moderation as a manifestation of the form of Islam *rahmatan lil 'alamin* . In this case, the three educational centers must be interconnected and strengthened between activities in the madrasa environment, families, and students' associations in the community. PAI learning management includes planning, actuating, teaching, and evaluating the learning process. The purpose of PAI management based on character and the value of religious moderation in learning is to foster students to have a deep understanding and practice *akhlakul al-karimah*, including patriotism, tolerance, respect, and respect for differences maintaining harmony.

REFERENCES

- Abror, M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2).
- Ahmad Faozan, (2020). Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam Untuk Masyarakat Multikultur, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 16, No. 2
- Aisyah, S., Ananda, A., Fatimah, S., & Effendi, H. (2019). Analysis of History Learning Model Based on Multimedia as the Strengthening of National Identity of Students. *International Conference on Islamic Education (ICoIE 2018)*.
- Amaroh, S., & Ali, M. (2021). Effective and Fun Learning Management of Islamic Education. *Ilkogretim Online*, 20(5).
- Anshori, I. (2017). Penguatan Pendidikan Karakter di Madrasah. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 1(2), 63-74–74. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1243>
- Anwar, R. N., & Muhayati, S. (2021). Upaya Membangun sikap Moderasi beragama melalui Pendidikan Agama Islam pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1).
- Arifinsyah, A., Andy, S., & Damanik, A. (2020). The urgency of religious moderation in preventing radicalism in Indonesia. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(1).
- Arofah, A., Nasrawi, B. M., Prihatin, B., & Muddin, I. (2020). *Membangun Moderasi Beragama*. Rumah Media Grup.
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). Manajemen pembiayaan pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 23(2).
- Azyumardi Azra, (2016) *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia, Seri Orasi Budaya* (Yogyakarta: Impulse, 2007).
- Batubara, I. H., Nur, K., Lubis, A. T., & Arianto, N. (2021). The Effectiveness of Learning Using Social Media during the Covid 19 Pandemic in Higher Education. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol*, 4(2).

- Bourke, J., & Roper, S. (2017). Innovation, quality management and learning: Short-term and longer-term effects. *Research Policy*, 46(8), 1505–1518. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.07.005>
- Chadidjah, S., Kusnayat, A., Ruswandi, U., & Arifin, B. S. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran PAI: Tinjauan Analisis Pada Pendidikan Dasar Menengah dan Tinggi. *Al-Hasanah: Islamic Religious Education Journal*, 6(1).
- Eze, S. C., Chinedu-Eze, V. C., & Bello, A. O. (2018). The utilisation of e-learning facilities in the educational delivery system of Nigeria: A study of M-University. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 15(1).
- Febriliyanti, Y. D. (2016). *Manajemen kurikulum berbasis Pendidikan Karakter dalam meningkatkan mutu Pendidikan: Studi Multikasus di SMAN 8 Malang dan MAN 1 Malang* [Doctoral, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10054/>
- Gazi, M. A. I. (2020). Islamic perspective of leadership in management; foundation, traits and principles. *Int. J. Manag. Account*, 2(1).
- Griffin, R. W. (2021). *Management*. Cengage Learning.
- Habibi, B., Hartinah, S., Umam, R., Syazali, M., Lestari, F., Abdurrahman, A., & Jauhariyah, D. (2019). Factor determinants of teacher professionalism as development of student learning education at school of SMK PGRI in Tegal City, Indonesia. *Journal of Gifted Education and Creativity*, 6(2).
- Hakim, A. (2015). Contribution of competence teacher (pedagogical, personality, professional competence and social) on the performance of learning. *The International Journal of Engineering and Science*, 4(2).
- Hakim, L. (2015). Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) pada Lembaga Pendidikan Islam Madrasah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 13(1).
- Hamzah, S. H. (2012). Aspek pengembangan peserta didik: Kognitif, afektif, psikomotorik. *Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan*.
- Harto, K., & Tastin, T. (2019). Pengembangan Pembelajaran PAI berwawasan Islam Wasatiyah: Upaya membangun sikap moderasi beragama peserta didik. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 18(1).

- Hidayat, T., & Syafe'i, M. (2018). Peran Guru dalam Mewujudkan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Rayah Al-Islam*, 2(01).
- Hoque, M. E. (2016). Three domains of learning: Cognitive, affective and psychomotor. *The Journal of EFL Education and Research*, 2(2).
- Huda, M. (2018). Eksistensi Pesantren dan Deradikalisasi Pendidikan Islam di Indonesia (Menyemai Spirit Toleransi dan Pendidikan Islam Multikultural). *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3(1), 87–102. <https://doi.org/10.29240/jf.v3i1.458>
- Huda, M. (2018). Kompetensi Kepribadian Guru dan Motivasi Belajar Siswa (Studi Korelasi Pada Mata Pelajaran PAI). *Jurnal Penelitian*, 11(2). <https://doi.org/10.21043/jupe.v11i2.3170>
- Huda, M. (2022). Analisis Faktor Kinerja Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(01).
- Huda, M. (2022). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam mengembangkan Pendidikan Multikultural. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*.
- Husna, R. L., & Setiawan, H. R. (2021). The Effect of Interactive Multimedia Use on Students' Learning Motivation in Subjects History of Islamic Culture at MTs PAB-1 Helvetia. *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1).
- Husna, U., & Thohir, M. (2020). Religious moderation as a new approach to learning Islamic religious education in schools. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1).
- Hussey, D. E. (1998). *Strategic management: From theory to implementation* (4th ed). Butterworth-Heinemann.
- Irawati, I. (2017). *Nilai-nilai religius dalam Tradisi Grebek Suro yang dilaksanakan masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi / Ida Irawati* [Diploma, Universitas Negeri Malang]. <http://repository.um.ac.id/52169/>
- Jannah, S. N., & Sontani, U. T. (2018). Sarana dan prasarana pembelajaran sebagai faktor determinan terhadap motivasi belajar siswa. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran (JPManper)*, 3(1).

- Jauhari, M. I., Husniah, L. S., Wajdi, M. B. N., Nizzam, M., Sukitman, T., Lailiyah, N., Lestarinigrum, A., & Wijaya, I. P. (2020). Civilizing Moderate Character Based on Islamic Education (PAI) Learning. *Journal of Talent Development and Excellence*, 12(1).
- Kelly, R. (2018). *Constructing leadership 4.0: Swarm leadership and the fourth industrial revolution*. Springer.
- KMA Nomor 183 Tahun 2019, Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah.
- Khunaifi, A. Y., & Matlani, M. (2019). Analisis Kritis Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 13(2).
- Komarudin, O., Zakiyah, Q. Y., & Supiana, S. (2021). Policy Formulation and Adoption of Revised Islamic Education Curriculum as stated in the Decree of Religion's Ministry (KMA) Number 183 of 2019. *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(2).
- Kumalasari, N. (2021). Implementasi Desain Pembelajaran Bermain Peran dalam meningkatkan Hasil Belajar Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Badrussalam Surabaya. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 17(1).
- Liakopoulou, M. (2011). The Professional Competence of Teachers: Which qualities, attitudes, skills and knowledge contribute to a teacher's effectiveness. *International Journal of Humanities and Social Science*, 1(21).
- Low, R., & Jin, P. (2012). Achievement Motivation and Learning. *Encyclopedia of the Sciences of Learning*, 47–51. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_199
- Marjuni, M. M., & Ulwani, A. R. F. (2022). Model Pengambilan Keputusan Perumusan Kurikulum Integratif Madrasah di Lingkungan Pesantren dalam Merespon KMA 183 dan KMA 184 Tahun 2019. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2).
- Mezirow, J. (2018). Transformative learning theory. In *Contemporary theories of learning* (pp. 114–128). Routledge.
- Montiel, I., Antolin-Lopez, R., & Gallo, P. J. (2018). Emotions and sustainability: A literary genre-based framework for environmental sustainability management education. *Academy of Management Learning & Education*, 17(2).

- Muallip, M. (2014). *Manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam mewujudkan budaya Religius: Studi Multi Kasus di SMAN 1 Gangga dan SMKN 1 Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat* [Doctoral, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10082/>
- Nadlir, M. (2013). Perencanaan Pembelajaran Berbasis Karakter. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 1(2). <https://doi.org/10.15642/jpai.2013.1.2.338-352>
- Ninoersy, T. (2021). Nilai-Nilai Ukhuwwah dan Islam Wasathiyah Jalan Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Nurdianzah, E. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Jawa (Kajian Historis Pendidikan Islam dalam Dakwah Walisanga). *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas*, 8(1), 01–22. <https://doi.org/10.31942/pgrs.v8i1.3440>
- Nurjannah, N. (2019). Pengaruh Role Playing Terhadap Minat Belajar Peserta Didik. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 2(2).
- Poro, S. G., Yiga, A. P., Enon, J. C., Fabian, M., & Marus, E. (2019). *Teacher competence and performance in primary schools in Nwoya District, Northern Uganda*.
- Santa Chrisantina, V. (2021). Efektivitas Model Pembelajaran Moderasi Beragama dengan Berbasis Multimedia pada Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Edutrainee: Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan*, 5(2).
- Sari, D. N. A., Bafadal, I., & Wiyono, B. B. (2018). Pelaksanaan supervisi manajerial dalam rangka implementasi manajemen berbasis sekolah. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(2).
- Sari, M. E. (2017). The role of learning management of Islamic boarding school (Pesantren) in improvement of their students religious tolerance in West Java-Indonesia. *International Journal of Innovation and Applied Studies*, 19(1).
- Shodiq, S. F. (2019). Revival Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Pai) Di Era Revolusi Industri 4.0. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2(02).
- Shuell, T. J. (2021). Learning theory, instructional theory, and adaptation. In *Aptitude, learning, and instruction* (pp. 277–302). Routledge.

- Silitonga, N., & Amirah, R. (2021). Aplikasi Manajemen dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN Kutabuluh. *PEMA (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2).
- Slintak, K. (2019). A new concept of management. *Montenegrin Journal of Economics*.
- Sunarso, A. (2020). Revitalisasi Pendidikan Karakter melalui Internalisasi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budaya Religius. *Jurnal Kreatif: Jurnal Kependidikan Dasar*, 10(2).
- Susilo, H., Kholid, I., Pahrudin, A., Subandi, S., & Koderi, K. (2021). Madrasah Quality Improvement Management. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(01).
- Sya'bani, M. A. Y. (2021). *Culture of Religious Moderation Through the Actualization of Islamic Education Wasatiyyah to Improve Religious Reconnection and Tolerance in Indonesia*.
- Syatar, A. (2020). Strengthening Religious Moderation In University: Initiation To Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(2).
- Turnbull, D., Chugh, R., & Luck, J. (2020). Learning Management Systems, an Overview. *Encyclopedia of Education and Information Technologies*.
- Yumnah, S. (2020). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Multikultural Untuk Membentuk Karakter Toleransi. *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(1).
- Yustian, Y., Asyafah, A., & Firmansyah, M. I. (2017). Efektivitas Model Pembelajaran Role Playing dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Materi Kisah Hijrah Pada Mata Pelajaran PAI di SMPN 7 Bandung. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 4(2).

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM TRADISI MAKAN NAMPANAN DI PONDOK PESANTREN

Muchlis Fuadi

fuady.alkayyis5@gmail.com

IAIN Kudus

Abstrak

Banyak hal yang mulai dan telah memudar seiring dengan modernisasi zaman. Salah satu hal tersebut adalah tradisi makan bersama yang dalam konteks bahasa di Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Remaja Kudus adalah Makan Nampanan. Hal semacam ini oleh sebagian orang sudah dianggap hal yang tabu dan aneh dalam kehidupan sekarang, sehingga mereka merasa tradisi tersebut tidak membawa dampak apapun. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam tradisi makan nampanan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian (case study) studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter dalam tradisi makan nampanan. Hasil peneliti menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter dalam tradisi makan nampanan antarlain; (1) Kebersamaan (2) Kesederhanaan (3) Persamaan (4) Sikap sosial yang baik. (5) Keberkahan tercurah pada makanan yang dimakan secara bersama-sama. (6) Makan berjama'ah merupakan sikap untuk melatih diri dalam menghindari keserakahan, ketamakan, loba, dan rakus.

Kata kunci: nilai; makan; nampanan; santri

Abstract

Many things have begun and have faded with the modernization of the times. One of these things is the tradition of eating together which in the context of the language at Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus Youth is Eating Trays. This kind of thing by some people is considered a taboo and strange thing in today's life, so they feel that the tradition does not bring any impact. Therefore, it is necessary to discuss the values of character education in the tradition of eating trays. In this study using a qualitative approach using descriptive methods. This type of research is a case study. The data collection techniques used were observation, interview, and documentation techniques. The purpose of this study was to determine the values of character education in the tradition of eating trays. The results of the study indicate that the values of character education in the tradition of eating trays include; (1) Togetherness (2) Simplicity (3) Equality (4) Good social attitude. (5) Blessings are poured out on the food eaten together. (6) Eating in congregation is an attitude to train oneself in avoiding greed, covetousness, greed, and greed.

Keywords: value; eat; tray; Students

A. Pendahuluan

Makan *nampanan* adalah istilah yang digunakan oleh para santri untuk kegiatan makan bersama-sama dalam satu *nampan*. Nampan atau baki merupakan merupakan salah satu wadah yang biasa digunakan untuk menyajikan makanan atau minuman, biasanya terbuat dari kayu, plastik, logam atau bahan lainnya. Adapun bentuknya bisa bulat, atau persegi. Jika persegi kadang ada yang bertelinga di sisi kanan dan kiri sebagai pegangan tangan. Sebagian masyarakat menyebut nampan sebagai *talam*, *dulang* atau *tapsin*. Karena itulah nampanan di sebagian pesantren disebut dengan istilah talaman atau tapsinan. (Ulil hadrowi, 2021)

Makan *nampanan* seakan menjadi ciri khas pesantren yang ditradisikan oleh para santri dalam menunjukkan wajah kesederhanaan. Hal demikian ditunjukkan karena makan *nampanan* dilakukan di lantai dengan hanya beralaskan *nampan* dan dimakan menggunakan tangan kosong. Bahkan ketika sayurnya berkuahpun, hal ini tetap dilakukan. Makan *nampanan* juga mengajarkan para santri untuk selalu hidup sederhana, *legowo* dan syukur atas nikmat duniawi dan rohani. (Nur rohman, 2021) Kesederhanaan adalah kekuatan dasar dalam karakter dan membantu untuk menemukan eksistensi diri para santri. (Nur rohman, 2021)

Di samping kesederhanaan yang dapat diambil sebagai nilai pendidikan karakter pada tradisi makan *nampanan*, kebersamaan juga menjadikan bagian yang tak terpisahkan dalam tradisi ini. Dalam satu *nampan*, biasanya dibuat makan sebanyak 4-6 orang. Kebersamaan dalam ranah yang lebih sempit dalam kajian psikologi disebut juga dengan istilah prososial. Perilaku prososial didefinisikan sebagai tindakan sukarela yang dimaksudkan untuk membantu atau memberi keuntungan pada individu atau sekelompok individu.

Tradisi makan secara bersama ini mengadopsi dari ajaran Rasulullah SAW. yang termaktub dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud r.a. yaitu:

عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع ؟ قال: فلعلكم تفترون قالوا: نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله ببارك لكم فيه رواه أبو داود

Artinya : diriwayatkan dari Wahsyi bin Harb radliyallau ‘anhu; ketika beberapa sahabat nabi Muhammad saw. Bertanya “ya Rasulullah sewaktu kita makan dan kita tidak mersa kenyang, mungkinlah kalian berpisah-pisah” tanya Rasulullah “betul” jawab mereka, Berkumpulah kalian semua ketika waktu makan dan sebutlah nama Allah senantiasa kalian akan mendapatkan berkah didalamnya”. (Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’as as-Sijistani, 1997)

Salah satu pondok yang masih membudayakan tradisi makan *nampanan* adalah Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Remaja Kudus. Pondok Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Remaja Kudus merupakan pondok cabang dari Pondok Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Pusat yang berada di Kelurahan Kajeksan Jawa Tengah yang didirikan pada tahun 1970 oleh K.H.M. Arwani Amin Said pada tahun 1905 M. Beliau merupakan ulama besar yang sangat terkenal keilmuannya, dan dalam bidang Al-Qur'an beliau menyusun Kitab Qira'at Sab'ah yang diberi nama *Faidh al-barakat*. (Gus Arifin dan Suhendri Abu Faqih)

Dalam kesehariannya santri-santri di Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Remaja masih membiasakan makan *nampanan*. Satu nampan digunakan makan oleh 5 sampai 7 santri dengan diletakkan di atas lantai dan dimakan dengan tangan kosong. Dengan posisi badan miring dan tangan sedikit ke depan. Disela-sela makan tak jarang juga diselingi dengan candaan dan tawa.

Tradisi ini bertolak belakang dengan gaya makan modern di era saat ini, Terlihat dalam acara-acara pesta, makan sambil berdiri, kadang juga menyisakan banyak sisa makanan. Dengan mentradisikan budaya makan nampanan ini, dapat menjalankan ajaran nabi Muhammad. Ada nilai-nilai pendidikan karakter didalam tradisi makan nampanan ini.

B. Kajian Pustaka

1. Nilai

Nilai adalah sesuatu yang ada pada diri manusia yang pantas dipertahankan dan diikuti demi menaikkan kualitas hidup manusia. Oleh sebab itu nilai harus dikagumi, diminati, dihormati dan dicintai.

Secara umum nilai memiliki sebuah konsep yang kompleks.dapat dilihat melalui lisan maupun perbuatan. Seperti seseorang yang menghayati nilai daripada tanggungjawab, maka dia akan mempraktekannya dalam perbuatanserta berusaha untuk mempertahankannya bentuk dari justifikasi perihal pengalaman dari nilai tanggung jawab yang dipegang. Kemudian akan menolak serta mengkritik orang lain yang tidak bertanggung jawab. (Muhammad Abdurrohman, 2018)

Seperti halnya dengan perilaku, adab dan etika dimana hal tersebut termasuk ke dalam moral. (Saepuddin, 2019) Moral sering dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat atau tradisi yang ada di masyarakat. Jika ingin mengukur apakah tingkah laku yang dilakukan baik atau buruk bisa dilihat dar bagaimana tanggapan dari masyarakat, dapat menerimanya atau tidak.

2. Pendidikan Karakter

Pendidikan adalah suatu usaha terencana memanusiakan manusia dalam proses sosialisasi untuk memperbaiki karakter serta melatih kemampuan intelektual peserta didik dalam rangka mencapai kedewasaannya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kadir bahwa, "Pendidikan merupakan usaha terencana untuk memanusiakan manusia melalui sosialisasi untuk memperbaiki karakter dan melatih kemampuan intelektual peserta didik.(Sofyan Mustoip, 2018)

Dalam Undang-Undang Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan adalah sebuah usaha yang di lakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, membangun kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. (Sofyan Mustoip, 2018)

Presiden Joko Widodo menempatkan penguatan karakter bangsa dalam Nawacita 8 butir. Dikatakan bahwa pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa agar mampu bersaing di kanca global abad 21 serta dalam mempersiapkan generasi emas pada 2024. (Ni Putu Suwardani, 2020)

Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 telah menuangkan tentang PPK (Penguatan Pendidikan Karakter). Pada pasal 3 disebutkan bahwa PPK direalisasikan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dengan harapan generasi bangsa mampu menempatkan nilai-nilai karakter Pancasila dalam pandangan, pola pikir, cara bertindak dan cara bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.(Sofyan Mustoip, 2018)

PPK adalah gerakan untuk menguatkan karakter di dalam dunia pendidikan melalui harmonisasi Olah Hati, Olah Rasa Olah Pikir dan Olah Raga dengan melibatkan seluruh elemen yang terkait baik sekolah, keluarga dan masyarakat yang merupakan bagian dari GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental). (Sofyan Mustoip, 2018)

Menurut Kemendikbud terdapat beberapa dimensi dalam pengolahan karakter, meliputi Olah Hati, yaitu individu yang beriman dan bertakwa. Olah Rasa, yaitu memiliki integritas moral. Olah Pikir, yaitu unggul dalam akademis. Olah Raga, yaitu sehat jasmani dan aktif sebagai warga negara.

Dalam PPK paling tidak telah ditetapkan 5 nilai utama yang harus ditanamkan kepada peserta didik, terutama pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah.

Pertama, Religius, yaitu mampu mencerminkan rasa iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk berhubungan baik dengan sesama manusia dan alam semesta.

Kedua, Nasionalis, yaitu menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan kelompok.

Ketiga, Mandiri, sikap yang tidak mudah bergantung dengan orang lain. Yang artinya berusaha dengan seluruh kemampuan diri sendiri untuk mencapai sesuatu sangat diprioritaskan.

Keempat, Integritas, yaitu usaha untuk menjadi seseorang yang dipercaya dalam segala hal, memiliki kesetiaan dan komitmen pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Karakter ini meliputi sikap warga negara yang bertanggung jawab, aktif dalam kehidupan sosial dan konsistensi pikiran.

Bukan hanya itu, di dalam poin Integritas Karakter juga meliputi sebuah tindakan serta perkataan berdasarkan kebenaran. Apa yang menjadi dasar kebenaran ditinjau dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti halnya sikap atau etika yang dimiliki seseorang dapat mencerminkan kualitas moral yang dimiliki.

Kelima, Gotong Royong, yaitu mampu bekerja sama dengan orang lain. (Ni Putu Suwardani, 2018)

3. Makan Nampanan

Makan *nampanan* adalah istilah yang digunakan oleh para santri untuk kegiatan makan bersama-sama dalam satu *nampan*. Nampan atau baki merupakan merupakan salah satu wadah yang biasa digunakan untuk menyajikan makanan atau minuman, biasanya terbuat dari kayu, plastik, logam atau bahan lainnya. Adapun bentuknya bisa bulat, atau persegi. Jika persegi kadang ada yang bertelinga di sisi kanan dan kiri sebagai pegangan tangan. Sebagian masyarakat menyebut nampan sebagai *talam*, *dulang* atau *tapsin*. Karena itulah nampanan di sebagian pesantren disebut dengan istilah talaman atau tapsinan. (Ulil hadrowi, 2021)

Makan *nampanan* seakan menjadi ciri khas pesantren yang ditradisikan oleh para santri dalam menunjukkan wajah kesederhanaan. Hal demikian ditunjukkan karena makan *nampanan* dilakukan di lantai dengan hanya beralaskan *nampan* dan dimakan menggunakan tangan kosong. Bahkan ketika sayurnya berkuahpun, hal ini tetap dilakukan. Makan *nampanan* juga mengajarkan para santri untuk selalu hidup sederhana, *legowo* dan syukur atas nikmat duniawi dan rohani. Kesederhanaan adalah kekuatan dasar dalam karakter dan membantu untuk menemukan eksistensi diri para santri. (Mamarodi, 2015)

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian (case study) studi kasus. Dimana studi kasus adalah penelitian yang mendalam tentang masalah penelitian tertentu. Desain ini bertujuan untuk memperkecil bidang yang sangat luas ke dalam satu atau beberapa hal yang lebih spesifik. (Ismail Nurdin, 2019)

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk berusaha memahami sebuah fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek yang alamiah serta menyeluruh dengan cara mendeskripsikannya dalam suatu konteks yang alamiah serta dengan menggunakan berbagai metode alamiah. Penelitian dengan metode deskripsi digunakan untuk pengkajian fenomena secara lebih rinci dan membedakannya dengan fenomena yang lain. (Rasimin, 2019)

Penelitian kualitatif yang sering digunakan di Indonesia adalah penelitian naturalistik atau “kualitatif naturalistik”. Naturalistik menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan terhadap pendeskripsian secara alami. Yang berarti pengambilan data fenomena yang dilakukan secara alami dengan keterlibatan langsung peneliti di lapangan.

D. Temuan

1. Pengertian Praktek Makan Nampanan di Pondok Tahfidh Yanbu’ul Qur’an Remaja Kudus

Pengertian makan nampanan atau makan berjama’ah adalah cara makan yang disunahkan dan lebih mengikuti Rasulullah. Makan secara bersama-sama ini dapat mendatangkan keberkahan. Selain itu dapat menjalin kekerabatan dan kekompakkan antarsesama.

Nampanan atau makan berjama’ah adalah istilah yang digunakan oleh para santri untuk menunjukkan satu kegiatan makan bersama-sama dalam satu wadah besar. Wadah itu bisa berupa pelepah daun pisang dan bisa juga dengan nampan atau baki. Nampan atau baki merupakan salah satu wadah yang biasa digunakan untuk menyajikan makanan atau minuman, biasanya terbuat dari kayu, plastik, logam, atau bahan lainnya. Adapun bentuknya

bisa bulat, atau persegi. Jika persegi kadang ada yang bertelinga di sisi kanan dan kiri sebagai pegangan tangan. Sebagian masyarakat menyebut nampan sebagai talam, dulang atau tapsi. Karena itulah talaman atau mayoran di sebagian pesantren disebut dengan istilah nampanan atau tapsinan. Yakni makan bersama-sama dengan satu nampan atau tapsi sebagai piring besar. (Ulil hadrowi, 2021)

Pada dasarnya makan talaman atau mayoran merupakan ekspresi rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmatnya yang tidak pernah putus. Mayoran oleh para santri adalah momen spesial yang sengaja diadakan untuk merayakan sebuah keberhasilan. Seperti ketika khatam dari satu pengajian kitab tertentu, atau khatam alQuran, atau lulus ujian kitab, atau sekedar bersyukur atas nikmat sehat dan berkumpul bersama sahabat dan teman-teman. Tentang menu masakan sangatlah fariatif, tergantung kesepakatan bersama. Tidak harus mewah, tetapi tidak boleh meninggalkan sambel yang pedas dan harus disajikan dalam keadaan panas.

2. Praktek Makan Nampanan di Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Remaja Kudus

Dalam praktik makan nampanan yang dilakukan oleh santri Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Remaja adalah para santri membaca "*Bismillahirrahmanirrahim*", kemudian dilanjutkan dengan doa khusus ketika akan memulai makan yaitu:

Makan bersama di ponpes dalam satu nampan yang terdiri dari empat orang, enam orang, dan ada yang tujuh orang sampai delapan orang duduk bersila saling berhadapan mengitari tempat yang berisikan makanan. Secara harfiah, makan nampanan adalah makan menggunakan nampan yaitu talam atau nampan besar yang berbentuk bulat dan persegi panjang. Dalam tradisi turun menurun ini disajikan berbagai cara makan khas Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Remaja yang mencerminkan keterkaitan yang erat antara sistem sosial sesama para santri. Makna makan nampanan adalah dengan duduk bersila, juga berarti sama rata (saling menghargai antar santri) dan juga sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya: "*Sahabat Anas radliyallahu 'anh berkata bahwasanya Rasulullah saw tidak pernah makan sendirian. Rasulullah saw juga pernah bersabda bahwa sebaik-baik makanan adalah yang dimakan banyak tangan.*"

Keterangan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari ketua Pelaksana, KH. Syaean Adhim. Artinya keberkahan sebuah makanan juga berhubungan dengan seberapa banyak orang yang ikut menikmatinya, semakin banyak tangan semakin berkah. Inilah kemudian yang oleh para santri dijadikan sebagai pedoman selalu makan dengan konsep talaman. Etika makan bersama yang di terapkan para santri awal makan ngambilnya dari sekelilingnya dan biarkan tengah-tengahnya, memulai makan makanan dari tepinya dan anjuran untuk membiarkan sesuatu yang di dalamnya terdapat berkah dan kebaikan serta tidak membuangnya.

Praktik kegiatan makam talaman biasanya dilakukan pada pagi sebelum berangkat sekolah, siang sepulang sekolah dan malam setelah sholat Isya' berjama'ah, para santri akan berkumpul di tempat makan dan bergabung dengan kelompok nya masing-masing terdiri dari 4-7 orang santri dalam 1 nampan.

Santri Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Remaja Kudus juga mengajarkan sifat kemandirian, kesederhanaan, dan kebersihan dalam lingkungan sekitarnya. Di sini semua santri senior maupun junior dapat jadwal piket nyapu tempat makan yang sudah dijadwalkan oleh Pengurus.

3. Tujuan dan Motif Makan Nampanan di Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Remaja Kudus

Tujuan makan talaman di Pondok Pesantren Nurul Furqon sebagai berikut:

- a. Rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmatnya yang tidak pernah putus.
- b. Membangun karakter kebersamaan.
- c. Untuk menghindari para santri dari sifat kikir dan bakhil.
- d. Makan bersama tersebut di dalamnya memiliki penuh barakah.
- e. Menjaga kerukunan sesama para santri.
- f. Untuk belajar dari rendah hati serta tidak rakus.

Motif makan talaman di Pondok Pesantren Nurul Furqon sebagai berikut:

- a. Dalam makan berjama'ah di dalamnya penuh barakah oleh karenaitu santri dapat mudah belajar.
- b. Tidak adanya perbedaan kasta.
- c. Persamaan dalam makan berjama'ah.

- d. Menambah rasa semangat nafsu makan.
- e. Kerukunan dan kedamaian para santri.
- f. Menunjukkan sebuah sifat kebersamaan, kesederhanaan, dan qanaahnya seorang santri untuk mengimplementasikan khas-khasnya santri

E. Pembahasan

Makan bersama di Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Remaja Kudus dalam satu nampan yang terdiri dari empat orang, enam orang, dan ada yang tujuh orang sampai delapan orang duduk bersila saling berhadapan mengitari tempat yang berisikan makanan. Secara harfiah, makan nampanan adalah makan menggunakan nampan yaitu talam atau nampan besar yang berbentuk bulat dan persegi panjang. Dalam tradisi turun menurun ini disajikan berbagai cara makan khas Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Remaja yang mencerminkan keterkaitan yang erat antara sistem sosial sesama para santri. Makna makan nampanan adalah dengan duduk bersila, juga berarti sama rata (saling menghargai antar santri).

Adapun nilai-nilai pendidikan karakter dalam tradisi makan nampanan di Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Remaja Kudus, sebagai berikut:

a. Kebersamaan

Dalam tradisi makan nampanan ada nilai-nilai kebersamaan antar sesama santri. Hal itu ditunjukkan dari saling membantu ketika akan makan. Ada yang mengambil nampan, ada yang mengambil nasi, lauk ataupun minum. Dan ketika makanpun tampak kebersamaan, dengan melingkari nampan sambil memiringkan badan. Seusai makan pun ada yang bertugas menyapu bekas tempat makan, ada pula yang bertugas mencuci nampan. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Muhammad Ardi Ulumi, salah satu santri di Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Remaja bahwa dengan makan nampanan akan ada rasa kebersamaan, baik sebelum dan sesudah makan bahkan saat makan.

b. Kesederhanaan

Makan *nampanan* seakan menjadi ciri khas pesantren yang ditradisikan oleh para santri dalam menunjukkan wajah kesederhanaan. Hal demikian ditunjukkan karena makan *nampanan* dilakukan di lantai dengan hanya beralaskan *nampan* dan dimakan menggunakan tangan kosong. Bahkan ketika sayurnya berkuahpun, hal ini tetap dilakukan.

Makan *nampanan* juga mengajarkan para santri untuk selalu hidup sederhana, *legowo* dan syukur atas nikmat duniawi dan rohani. Kesederhanaan adalah kekuatan dasar dalam karakter dan membantu untuk menemukan eksistensi diri para santri

c. Persamaan

Dengan melihat praktik makan *nampanan*, akan nampak rasa persamaan tanpa perbedaan. Meskipun sebenarnya semua berbeda, baik asal, kalangan, derajat dll. Tapi dengan makan *nampanan* semua sama. Yang dimakan sama tanpa ada bagian-bagian kepemilikan.

d. Sikap sosial yang baik.

Dengan makan *nampanan*, akan terjadi saling tolong-menolong antar santri. Dari satu group kelompok makan, akan saling berbagi tugas, ada yang mengambil *nampan*, ada yang mengambil nasi dan lauknya. Ada yang mencuci *nampan* setelah makan dan lain-lain. Hal ini akan mendidik santri untuk selalu saling tolong-menolong sesama. Sebagai makhluk sosial maka santri akan mengerti bahwa hidup perlu memiliki sosial yang baik dan tinggi.

Para santri Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Remaja Kudus mengungkapkan bahwa tradisi makan *nampanan* adalah suatu bentuk tradisi yang di lakukan setiap hari pada saat jam makan. Sebenarnya makan bersama ini mengandung anjuran untuk bermurah hati, anjuran bermurah hati disini saling berbagi makanan antar sesama teman kelompok pada saat makan bersama di pondok.. Menambah rasa semangat belajar.

e. Keberkahan tercurah pada makanan yang dimakan secara bersama-sama.

Di dalam hadis mengatakan makan berjama'ah akan mendatangkan berkah dan makan *nampanan* adalah makan makanan yang di mana secara bersama, memperoleh keberkahan dalam makna makan berjamaah ala santri dengan menu seadainya kalau dinikmati dan disyukuri dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan di bawah bimbingan, naungan, dan ridha Allah SWT, agar para santri di permudah oleh Allah SWT dalam belajar dan menuntut ilmunya.

f. Makan berjama'ah merupakan sikap untuk melatih diri dalam menghindari keserakahan, ketamakan, loba, dan rakus.

Kesimpulan

Nilai-nilai pendidikan karakter dalam tradisi makan nampanan di Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Remaja Kudus, sebagai berikut:

- a. Kebersamaan
- b. Kesederhanaan
- c. Persamaan
- d. Sikap sosial yang baik
- e. Keberkahan tercurah pada makanan yang dimakan secara keserakahan, ketamakan, loba, dan rakus.

Refrensi:

Ulil hadrowi, "Mayoran: Ajaran Rasulullah Satu Nampan Banyak Tangan"
<https://islam.nu.or.id/ubudiyah/mayoran-ajaran-rasulullah-satu-nampan-banyak-tangan-bgYf4>

Mamarodi, r.s. (2015) dalam cucu arumsari. *Konseling Individu Dengan Teknik Modeling Untuk Meningkatkan Kekuatan Karakter Kesederhanaan. Jurnal Konseling Indonesia*. Vol. 4 no. 1, oktober 2018.

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as as-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Kitab Al-Ath'amah, Bab Fi Al Ijtima' 'ala Ath-tho'am, Juz 2, No. 3764 (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyyah, 1997)

Gus Arifin dan Suhendri Abu Faqih. *Al-Qur'an Sang Mahkota Cahaya* (Kota: Quanta, tth)

Muhammad Abdurrohman, *Pendidikan Karakater Bangsa*, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2018)

Saepuddin, *Konsep Pendidikan Karakter dan Urgensinya dalam Pribadi Muslim menurut Imam Al-Ghozali*, (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019)

Saepuddin, *Konsep Pendidikan Karakter dan Urgensinya dalam Pribadi Muslim menurut Imam Al-Ghozali*, (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019)

Sofyan Mustoip, et. al., *Impelentasi Pendidikan Karakter* (Surabaya: CV. Jakad Publiching, 2018)

Saepuddin, *Konsep Pendidikan Karakter dan Urgensinya Dalam Pribadi Muslim Menurut Imam Al-Ghazali*, (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman PRESS, 2019)

Rasimin, *Metodologi Penelitian Praktis Kualitatif*, Yogyakarta: Mitra Cendekia, 2018

Praktik Keagamaan di Masyarakat Pesisir Desa Sedan Kabupaten Rembang Pada Masa Pandemi COVID-19

Mufawazah - Fakultas Ushuluddin, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Institut Agama Islam Negeri Kudus

Mufawazah93@gmail.com

Irzum Farihah - Institut Agama Islam Negeri Kudus

Irzumfarihah@gmail.com

Moch. Lukluil Maknun - Peneliti Balai Litbang Agama Semarang

Lukluilmaknun84@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study was to determine religious practices in the community during the COVID-19 pandemic in Sedan Village, Rembang Regency and to find out the supporting and inhibiting factors of religious practice in the community during the COVID-19 pandemic in Sedan Village, Rembang Regency. Thus type of research uses field qualitative research. (field research), namely research whose sources are interviews with the community and religious leaders in Sedan Village. While the data collection technique used by the author is the method of observation, interviews and documentation. The author tries to analyze the data obtained from the informants, which are then correlated with the theory of social action in Islamic society. The results of this study have two important point, first, the religious practice of the Sedan Village community during the COVID-19 pandemic experienced significant changes starting from the implementation of Friday prayer, routine activities al-Barzanji to practice at the TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) which requires in every implementation to be disciplined in using health protocols in accordance with applicable rules, as well as the government which strictly urges all elements of society to obey the health protocols, which are hoped to break the chain of COVID-19. Second, the supporting factors for religious activities during the pandemic, especially the awareness for every individual who cares about health protocols, is the most important component in order to achieve the applicable regulations. But in fact there are still many people who do not care about health protocols so that it hinders the running of the rules that should be implemented. As a result, policies on health protocols are less than optimal. Likewise, the emergence of a negative stigma that makes people think logically that COVID-19 does exist and its spread is easy to get infected even though this virus cannot be detected by the five human senses.

Keywords: COVID-19, Health Protocol, Religious Practice, Society.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik keagamaan di masyarakat pada masa pandemi COVID-19 di Desa Sedan Kabupaten Rembang dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat adanya praktik keagamaan di masyarakat pada masa pandemi COVID-19 di Desa Sedan Kabupaten Rembang. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan (field research), yaitu penelitian yang sumbernya wawancara dengan masyarakat dan tokoh agama di Desa Sedan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis berusaha menganalisis data-data yang diperoleh dari informan, yang kemudian dikorelasikan dengan teori tindakan sosial dalam masyarakat Islam. Hasil dari penelitian ini memiliki dua poin penting, pertama, praktik keagamaan masyarakat Desa Sedan saat masa pandemi COVID-19 mengalami perubahan yang cukup signifikan mulai dari penyelenggaraan ibadah shalat Jum'at, kegiatan rutin al-Barzanji sampai praktik di TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) yang mengharuskan dalam setiap pelaksanaannya untuk disiplin dalam menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku, begitu juga dengan pemerintah yang ketat menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan, yang harapannya dapat memutus mata rantai COVID-19. Kedua, faktor pendukung aktivitas keagamaan selama masa pandemi terutama adanya kesadaran bagi setiap individu yang peduli terhadap protokol kesehatan menjadi suatu komponen yang paling utama demi tercapainya aturan yang berlaku. Namun pada hakikatnya masih banyak masyarakat yang kurang peduli adanya protokol kesehatan sehingga menghambat faktor berjalannya aturan-aturan yang seharusnya dijalankan. Akibatnya kebijakan terhadap protokol kesehatan menjadi kurang maksimal. Begitu juga dengan munculnya stigma-stigma negatif yang menjadikan masyarakat kurang berfikir secara logis bahwa COVID-19 memang ada dan penyebarannya pun mudah tertular bahkan virus ini tidak bisa terdeteksi oleh panca indra manusia.

Kata Kunci: COVID-19, Masyarakat, Praktik Keagamaan, Protokol Kesehatan

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2020 kecemasan masyarakat semakin tidak terkendali lantaran munculnya wabah virus COVID-19 dan berbagai permasalahan pun muncul di masyarakat dimana COVID-19 merupakan suatu penyakit yang menular. Virus ini dimulai dari negara Wuhan China pada Desember 2019. Penyakit ini telah menyebar lebih dari 190 negara di wilayah seluruh dunia. Dari banyaknya kasus positif COVID-19, lebih banyak yang menunjukkan gejala ringan bahkan banyak pula yang tidak menunjukkan gejala sama sekali. COVID-19 berawal dari sebuah virus yang ditularkan melalui antar kontak manusia yang kemudian menyebar. COVID-19 rentan pada seseorang yang tidak mau mengikuti protokol kesehatan. Gejala dari virus ini yaitu demam, batuk, flu dan tanda-tanda gejala lainnya.

Awal tahun 2020 dunia telah digemparkan dengan adanya virus baru yaitu Coronavirus jenis baru (SARS-Co-V-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Seiring dengan berjalannya waktu kasus tersebut selalu bertambah. Sampai pada saat ini virus COVID-19 dengan cepat menyebar, masih misterius, dan penelitian pun juga masih berlanjut. Sudah terbukti pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia berawal dari satu acara di Jakarta dimana penderita melakukan kontak dengan warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluhkan, demam, batuk, dan sesak nafas. Coronavirus bukanlah kejadian yang pertama kali, tahun 2002 *serve acute respiratory syndrome* (SARS) disebabkan oleh SARS-coronavirus (SARS-Cov) dan penyakit *Middle east respiratory syndrome* (MERS) pada tahun 2012 (Yuliana, 2020: 2).

Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar pada tatanan kehidupan umat manusia termasuk dari sisi keagamaan, salah satunya dalam hal praktik keagamaan. Berdasarkan pada realitas yang ada praktik keagamaan yang sebelumnya dipraktikkan sesuai dengan anjuran agama, namun semenjak adanya virus COVID-19 praktik keagamaan beralih sesuai dengan anjuran pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga praktik keagamaan pun berbeda dengan sebelumnya. Pelaksanaan ibadah yang mulanya dilaksanakan secara berjamaah semenjak datangnya COVID-19 beralih fungsi menjadi di rumah masing-masing, hal tersebut juga memicu terhadap penutupan masjid selama pandemi berlangsung. Di Indonesia sendiri juga telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mana hal ini mempunyai dampak yang sangat signifikan baik itu umat muslim maupun non muslim (Zifan, 2021: 51).

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa terkait adanya kebijakan dalam penyebaran wabah COVID-19, salah satunya yaitu fatwa MUI no 14 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 (Majelis Ulama Indonesia, Issued 2020). Dan juga telah mengeluarkan aturan berupa fatwa no 31 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan shalat Jum'at dan jamaah untuk mencegah penularan wabah COVID-19. Adanya kebijakan dari fatwa MUI pastinya terdapat pro dan kontra dari masyarakat, terkait adanya kebijakan tersebut menjadikan perubahan praktik keagamaan terutama dalam hal penyelenggaraan shalat Jum'at di tengah pandemi COVID-19. Namun dengan adanya aturan serta dalil yang tertera terkait wabah COVID-19 maka hal tersebut dapat memperkuat kebijakan yang sudah ada untuk diterapkan (Majelis Ulama Indonesia, Issued 2020).

Terkait adanya kebijakan dari pemerintah yang membatasi aktifitas diluar rumah berbagai permasalahan pun muncul di masyarakat. Peribadatan umat menjadi sebuah kebutuhan yang krusial untuk dipenuhi, tetapi di satu sisi pemerintah memberlakukan pembatasan akibat dampak pandemi yang semakin meninggi. Namun ada juga sebagian umat yang tidak memandang bahaya adanya wabah ini, dan berbagai aktivitas pun masih dilakukan seperti biasa seakan-akan tidak terjadi apa-apa, kemudian muncullah varian delta yang pertama kali teridentifikasi dari India yang merupakan varian baru dari COVID-19 ditengarai sebagai penyebab utama lonjakan pasien positif di wilayah pantura Jawa Tengah, persentase varian delta di Jawa Tengah cukup tinggi hal itu dapat diduga menjadi penyebab tingginya angka penularan kasus di Jawa Tengah pada akhir-akhir ini, penyebab lonjakan tersebut diantaranya adanya libur panjang pada bulan Oktober lalu serta adanya faktor ketidaksiplinan terhadap protokol kesehatan yang menjadi naiknya kasus COVID-19 di Jawa Tengah (Dinas Kominfo Jateng, 2021).

Di sini terjadi dilema peribadatan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan juga harus dilakukan secara terbatas, pasalnya berdasarkan data penelitian virus COVID-19 terhadap kehidupan umat beragama di dunia sangat berdampak besar dan sangat berpengaruh untuk kehidupan manusia di dunia, tidak hanya satu negara melainkan seluruh negara di berbagai penjuru dunia pada saat ini memang mengalami hal yang sama, adanya penyebaran COVID-19 yang melonjak pemerintah juga menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai bentuk adanya pembatasan kegiatan keagamaan. Umat beragama di Indonesia diminta untuk melakukan adanya perubahan praktik keagamaan dengan cara pembatasan kegiatan

keagamaan selama masa pandemi ini. Bagi umat Islam, pada rangkaian perayaan hari besar juga terdapat himbauan dari lembaga keagamaan terkait, agar dilakukan secara terbatas. Pembatasan utama dalam pelaksanaan ibadah umat Islam sebagaimana ibadah umat agama lainnya adalah ibadah sendiri-sendiri di rumah. Pembatasan kegiatan keagamaan dalam penanganan COVID-19 mempunyai legalitasnya dengan tujuan melindungi kesehatan dan keselamatan publik (Tobroni, 2020: 371).

Sebagai salah satu alternatif peningkatan imun dari sisi kesehatan terutama dalam menghadapi COVID-19 saat ini tergolong sangat penting dan sangat diperlukan, terutama dalam menjalankan pola hidup sehat yang harus dikembangkan pada masa gelombang COVID-19 kedua saat ini, tidak hanya sekedar perilaku sehat, namun demikian yang dihadapi masyarakat adalah virus COVID-19 yang hingga saat ini masih menyebar, maka dari itu imunitas tubuh menjadi hal yang penting, cara menjaga imunitas bisa dimulai dari menjaga pola makan yang baik dan hidup sehat. Salah satu hal yang utama untuk meningkatkan imunitas tubuh yaitu melalui pangan, sistem pangan tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhan akan nutrisi saja namun juga dapat memberikan efek terhadap kesehatan tubuh (Mustofa, 2020: 327). Bahwa dalam beribadah di masa pandemi tetap harus menjaga kesehatan dan meningkatkan imun tubuh.

Pada kurun waktu terakhir di tahun 2021 pandemi ini kembali dibatasi. Disisi lain, pemerintah tentu tidak gegabah dalam mengambil keputusan pembatasan karena jumlah masyarakat yang terinfeksi COVID-19 semakin meninggi, muncul beberapa varian baru COVID-19 di Indonesia juga menjadi maraknya wabah ini, sehingga tidak dapat diprediksi kapan akan selesainya pandemi yang selama ini tak terhenti. Upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan efektif jika masyarakat masih abai, harapannya masyarakat bisa membangun kepercayaan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan demi menurunkan lonjakan COVID-19 saat-saat ini. Tidak terlepas dari hal tersebut lonjakan COVID-19 pada periode kedua sudah sepatutnya tidak terjadi lagi lantaran banyaknya kasus kematian yang terjadi pada akhir-akhir tahun ini.

Terlebih adanya aturan pemerintah yang mengharuskan untuk membatasi pelaksanaan praktik keagamaan baik itu mengenai pembatasan ibadah maupun praktik keagamaan yang lain. Namun hal tersebut juga masih menjadi perdebatan dengan masyarakat yang menginginkan untuk tetap melaksanakan praktik keagamaan berjalan normal seperti melaksanakan

ibadah di tempat ibadahnya masing-masing dan lainnya, permasalahan yang timbul kemudian adalah ketidak seragaman masyarakat dalam menyikapi hal ini, ada masyarakat yang berpandangan untuk taat pemerintah ada pula yang melanggarnya dengan berbagai alasan. Hal ini secara kasuistik dapat diamati di suatu daerah salah satunya daerah Sedan kabupaten Rembang yang juga masuk dalam wilayah pantura Jawa Tengah yang sempat menjadi wilayah zona merah pada periode kedua pandemi ini (Zifan, 2021: 49).

Kajian riset terdahulu seperti ini penting dilakukan mengingat perkembangan kasus keagamaan di masa pandemi yang sangat dinamis. Sejauh ini kajian keagamaan yang dikaitkan dengan pandemi COVID-19 dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yang pertama, pandangan agama terhadap wabah COVID-19, dalam hal ini sesuai dengan edaran dari pemerintah bahwa agama Islam khususnya menyikapi adanya COVID-19 berlandaskan pada fatwa MUI no 14 tahun 2020 dan fatwa MUI no 31 tahun 2020. Kedua, pendidikan agama di masa COVID-19 memberikan dampak besar terhadap beberapa sektor dalam kehidupan ini termasuk sektor pendidikan. Berbagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19 sudah dilakukan dan bahkan hampir seluruh negara menerapkan kebijakan protokol kesehatan namun penyebaran COVID-19 masih tetap menyebar. Berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pembelajaran harus tetap berjalan meskipun tanpa tatap muka secara langsung, Pandemi ini mengajak semua elemen khususnya dibidang pendidikan bahwa teknologi sekarang ini telah menuntut adanya inovasi dalam pembelajaran, kemajuan teknologi juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pendidikan khususnya pendidik agama Islam (Talkah, 2021: 25).

Ketiga, Studi kasus yang menghasilkan strategi dalam menghadapi COVID-19. Kajian ini berupaya melengkapi kajian yang sudah ada dengan menyajikan studi kasus di satu lokasi yang kiranya dapat menjadi potret daerah lain untuk mencari solusi peningkatan pemahaman, kesadaran masyarakat, dan sinergitas dengan pemerintah untuk melaksanakan praktik keagamaan di masa pandemi. Salah satunya kabupaten Rembang yang menjadi salah satu daerah pantura di Jawa Tengah. Berdasarkan monitoring COVID-19 kabupaten Rembang per tanggal 23 juli 2021 sudah tercatat 7154 yang terkonfirmasi virus COVID-19. Adanya upaya PPKM selama 10 hari terjadi penurunan kasus aktif COVID-19 (Redaksi, 2021).

Berdasarkan penelitian tentang praktik keagamaan pada masa COVID-19 hal ini juga telah dilakukan, yang membahas mengenai pelaksanaan ibadah shalat berjamaah pada masa pandemi COVID-19 serta persepsi dari para

jamaah terkait pelaksanaan ibadah shalat berjamaah pada masa pandemi (Adi, 2020). Begitu juga dengan penelitian yang membahas mengenai virus COVID-19 telah melahirkan perubahan pada penyelenggaraan praktik ibadah umat muslim mulai dari pemberhentian aktivitas shalat di masjid sampai pada lahirnya new normal dalam praktik ibadah (Bunga, 2020).

Sementara itu, penelitian lain juga membahas mengenai aktivitas keberagamaan serta perilaku sehari-hari saat pandemi COVID-19 dalam potret perilaku keberagamaan masyarakat mulai dari nelayan, musisi, atlet, buruh, pedagang, sopir, petani, dan juga tokoh masyarakat di tengah pandemi COVID-19, juga telah menjadi sumber rujukan pada kajian terdahulu yang terkait dengan judul (Farihah, 2020).

Sudah cukup banyak kajian yang mengkaji terkait fenomena yang terjadi selama pandemi COVID-19, namun dalam penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut dengan melengkapi kajian yang sudah ada terkait praktik keagamaan di masa pandemi COVID-19 dan berbagai respon masyarakat terhadap adanya praktik keagamaan di tengah pandemi COVID-19 yang cukup beragam, oleh sebab itu penelitian ini kami buat untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai praktik keagamaan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 dan hal tersebut menjadi latar belakang dari pembuatan penelitian ini, dengan harapan dapat mengembangkan wawasan kita mengenai pandemi COVID-19 di tengah masyarakat. Sehingga kita mampu meminimalisir pandemi COVID-19 dalam rangka menjawab berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Melihat kenyataan yang ada bahwa di masyarakat banyak yang tidak mematuhi aturan beribadah di masa pandemi sesuai edaran pemerintah, salah satunya di Desa Sedan, maka dari itu penulis tertarik meneliti dan mengkaji mengenai praktik keagamaan di masyarakat pesisir Desa Sedan Kabupaten Rembang pada masa pandemi COVID-19.

KAJIAN LITERATUR

Pemikiran Max Weber yang menjelaskan mengenai proses perubahan sosial dalam masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan rasionalitas manusia. Menurut Max Weber bentuk rasionalitas manusia meliputi *mean* (alat) yang menjadi sasaran utama serta *ends* (tujuan) yang meliputi aspek kultural, sehingga dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya orang besar dapat hidup dengan pola pikir yang rasional yang ada pada seperangkat alat yang dimiliki

dan kebudayaan yang mendukung kehidupan. Max Weber menyebutkan ada empat tipe tindakan rasionalitas yang mewarnai perkembangan manusia diantaranya Rasionalitas Tradisional (*Traditional Rationality*), Rasionalitas Afektif (*Affective Rationality*), Rasionalitas yang Berorientasi pada Nilai (*Value Oriented Rationality*) dan Rasionalitas Instrumental (*Instrumental Rationality*) (Nanang, 2014: 54-55). Adapun empat tipe tindakan yang telah dikemukakan Max Weber antara lain:

Adapun empat tipe tindakan sosial yang telah dikemukakan oleh Max Weber diantaranya:

a. Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Instrumental Rationality*)

Tindakan ini manusia tidak hanya menentukan tujuan yang ingin dicapai, namun secara rasional telah mampu menentukan alat (instrumen) yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut (Nanang, 2014: 55). Seperti halnya penelitian ini mengenai tindakan supaya masyarakat terhindar dari COVID-19 dengan menghimbau untuk menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan agar memutus mata rantai COVID-19.

b. Tindakan Rasionalitas Nilai (*value oriented rationality*)

Tindakan ini didasari sifat rasionalitas yang berorientasi nilai yang penting adalah bahwa alat-alat hanya merupakan objek pertimbangan dan perhitungan yang sadar sedangkan tujuannya sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya (Johnson Modern, 1994: 221). Seperti halnya dalam penelitian ini tindakan yang dilakukan oleh masyarakat memakai masker terutama saat keluar rumah dan juga berada ditempat kerumunan dalam hal ini masyarakat telah bertindak mengutamakan apa yang dianggap baik atas tujuan individu.

c. Tindakan Rasionalitas Tradisional (*Traditional Rationality*)

Tindakan rasionalitas ini bertujuan untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat (Nanang, 2014: 55). Dalam hal ini seperti halnya kebiasaan masyarakat memakai masker saat berada diluar ruangan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Tindakan Rasionalitas Afektif (*Affective Rationality*)

Tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, 221. Dalam penelitian ini kurangnya kesadaran masyarakat terhadap anjuran pemerintah tentang pentingnya protokol kesehatan terutama di tempat-tempat yang mengundang keramaian seperti halnya di tempat ibadah.

Dari keempat tipe tindakan tersebut yang lebih dominan pada implementasi di Desa Sedan pada masa pandemi COVID-19 yaitu tindakan rasionalitas instrumental, yang mana pada tindakan ini mulai dari pemerintah, perangkat desa maupun imam masjid telah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menaati protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun berada selama pandemi COVID-19 belum usai. Selain tindakan instrumental, tindakan rasionalitas afektif juga memiliki pengaruh di era pandemi COVID-19 terutama pada protokol kesehatan dimana kebanyakan masyarakat kurang peduli terhadap protokol kesehatan terutama dalam penggunaan masker. Meskipun pemerintah, perangkat desa, dan imam masjid telah menghimbau untuk selalu menaati protokol kesehatan terutama di tempat-tempat yang mengundang keramaian. Berdasarkan pernyataan yang telah dikemukakan oleh Max Weber, hal ini dapat disimpulkan bahwa tindakan sosial sebetulnya memiliki tujuan yang baik terutama di tengah masyarakat, walaupun demikian kembali lagi kepada setiap individu yang melaksanakan tindakan sosial tersebut, tindakan ini dilakukan bisa bersifat positif bagi dirinya atau juga bisa merugikan banyak orang lain. Seperti halnya pentingnya protokol kesehatan di era pandemi yang sebetulnya tidak lain untuk menjaga keselamatan diri bagi setiap individu yang menerapkannya (Putra, 2020: 8).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian lapangan (*field research*). Artikel jurnal ini berdasarkan penelitian yang ada di lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif dimulai dari fakta empiris penelitian terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan serta menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fenomenologi yang terjadi pada peristiwa ini yaitu fenomena COVID-19 yang telah mengubah tatanan kehidupan serta memberikan dampak pada praktik keagamaan salah satunya di Desa Sedan Kabupaten Rembang. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Desa Sedan Kabupaten Rembang.

Adapun penelitian ini menjelaskan bagaimana praktik keagamaan yang terjadi di masyarakat terutama dalam hal penyelenggaraan ibadah pada masa pandemi COVID-19. Adapun alasan melakukan penelitian ini dikarenakan beberapa faktor yaitu, di Desa Sedan Kabupaten Rembang masih banyak yang melakukan aktifitas di luar rumah dan masih aktif melakukan praktik keagamaan seperti melakukan shalat jamaah di masjid di tengah pandemi COVID-19 begitu juga dengan praktik keagamaan yang lain. Teknik pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

Subyek dari penelitian ini yaitu masyarakat Desa Sedan, diantaranya imam masjid, pengurus masjid, remaja masjid, jamaah, pengasuh TPA, ustadz-ustadzah dan wali murid. Sementara itu pengujian keabsahan data terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Adapun langkah-langkah menganalisis data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion*).

PEMBAHASAN

Praktik Keagamaan di Masyarakat Desa Sedan Kabupaten Rembang di Masa Pandemi COVID-19

Agama merupakan salah satu komponen utama dalam kehidupan, di dalam agama pastinya dibutuhkan adanya keimanan supranatural dan hal-hal yang bersifat esoteris berupa metafisik ataupun jangkauan materi. Selain hal tersebut di dalam agama juga terdapat praktik yang biasa dilakukan seperti halnya ibadah shalat Jum'at ataupun praktik keagamaan lainnya yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, namun adanya virus COVID-19 telah merubah praktik yang biasa terstruktur secara sistematis, kemudian beralih menyesuaikan keadaan dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga praktik pun berbeda dengan sebelumnya, terlebih pemerintah juga membuat aturan-aturan baru terkait pelaksanaan ibadah di masa pandemi COVID-19.

Aturan yang sebelumnya tidak ada terkait himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan namun saat angka positif COVID-19 menaik level teratas terbentuklah kebijakan baru yang mana tidak lain demi menjaga keselamatan dan juga kesehatan pada setiap individu, hal tersebut memicu perubahan-perubahan yang signifikan baik dari segi sosial maupun keagamaan sehingga

dalam religiusitas umat muslim mengalami pergeseran yang cukup besar terutama pada praktik pelaksanaan ibadah. Dampak virus COVID-19 bagi umat muslim tentunya tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, namun juga menciptakan narasi baru di antara umat muslim dengan persepsi yang berbeda-beda terkait virus COVID-19. Berbagai kebijakan terhadap pemutusan mata rantai COVID-19 juga dialami oleh umat muslim, mulai dari pelaksanaan ibadah berjamaah kemudian dialihkan ke rumah masing-masing bahkan beberapa rumah ibadah ditutup saat COVID-19 memuncak. Hal ini semakin diperkuat dengan keluarnya fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19, hal ini terdapat praktik yang mengatur mengenai ibadah di masa pandemi seperti halnya praktik keagamaan di Desa Sedan dalam hal shalat Jum'at, kegiatan al-Barzanji maupun sistem pengajaran yang ada di TPA (Firman, 2020: 146).

Praktik keagamaan pun telah mengalami sikap yang berbeda terutama dalam segi ibadah baik dari sisi pelaksanaannya maupun aturan-aturannya seperti halnya penerapan protokol kesehatan yang sudah menjadi persoalan utama di era pandemi. Terkait protokol kesehatan pada pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di masjid Syatho Sedan saat masa pandemi COVID-19 telah terjadi perubahan mulai dari memakai masker, jaga jarak dan juga disarankan untuk membawa sajadah sendiri hal tersebut dilakukan untuk menjaga diri dari virus yang telah menyebar (DF, Selaku Wakil Kepala Desa Sedan, 9/12/2021). Kemudian langkah yang dibuat dari pihak masjid untuk menyikapi anjuran pemerintah mengenai adanya COVID-19 yaitu dengan melakukan penyemprotan desinfektan dan juga menerapkan protokol kesehatan yang sudah tersedia, hal serupa juga disampaikan kepada Khatib saat melakukan khutbah shalat Jumat yang menghimbau kepada seluruh warganya untuk menaati anjuran dari pemerintah (N, Selaku Pengurus Masjid Desa Sedan, 9/12 2021).

Hal tersebut juga telah terjadi pada kegiatan PHBI maupun kegiatan lain yang mendatangkan kerumunan untuk ditiadakan. Begitu juga dengan perubahan yang terjadi pada kegiatan non formal yang ada di TPA mulai dari pemberhentian pembelajaran berbulan-bulan sampai ketidak efektifan dalam kegiatan belajar mengajar juga telah dirasakan oleh anak-anak yang sedang menimba ilmu, COVID-19 telah merubah segalanya tak terkecuali pada anak usia dini yang terkena dampaknya (N, Selaku Guru TPA Al-Ittihad Sedan, 29/12/2021). Namun dari pada itu, berdasarkan riset secara keseluruhan anak-anak yang ada di TPA sudah mematuhi protokol kesehatan salah satunya dengan menggunakan masker, dari lembaga TPA juga telah menegaskan

kepada seluruh santri-santrinya untuk mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah (U, Selaku Guru dan Wali Murid TPA Al-Ittihad Sedan, 29/12/2021).

Adanya protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan juga cuci tangan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak saat masa pandemi sehingga sudah tidak asing lagi bagi anak-anak terhadap adanya perubahan yang terjadi selama masa pandemi baik pada pendidikan formal maupun nonformal. Selain hal tersebut, adanya sistem blended yang diterapkan oleh pihak TPA juga telah merubah perkembangan pola pemahaman anak dan pola pikir anak, sehingga anak-anak cenderung kurang menyerap apa yang telah diajarkan. Lain halnya dengan pembelajaran yang diterapkan saat hari-hari normal, anak-anak lebih mampu menguasai materi apa yang telah diajarkan oleh ustadz-ustadzahnya (N, Selaku Pengurus TPA Al-Ittihad Sedan, 29/12/2021).

Namun disisi lain dengan datangnya COVID-19 di berbagai daerah juga telah mengalami perubahan baik dari segi pelaksanaannya maupun aturannya, akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya berlaku pada Desa Sedan yang mana dalam pelaksanaan kegiatan al-Barzanji tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap protokol kesehatan telah menjadi problem utama di era pandemi hal ini juga didasari kurangnya disiplin dalam menjalankan aturan yang ada, disamping itu masyarakat setempat lebih cenderung untuk mendekati diri kepada Tuhan dengan mengamalkan praktik-praktik keagamaan seperti biasa dengan harapan dapat mengambil manfaat apa yang telah dilaksanakan. Walaupun demikian orang-orang yang hadir dalam kegiatan tersebut tentunya dalam kondisi sehat dan tidak sedang mengalami gejala-gejala yang mengarah pada COVID-19 (Supian, 2020: 45-46).

Berdasarkan pada konteks tersebut hal ini dapat dikaji dengan teori Max Weber tentang tindakan sosial merupakan perilaku, perbuatan individu maupun kelompok dalam upaya untuk mencapai tujuannya, tindakan sosial juga bisa dilakukan secara berkelompok sehingga akan memberikan pengaruh terhadap lingkungannya. Max Weber menyatakan bahwa tindakan sosial merupakan sebuah tindakan manusia yang bisa mempengaruhi individu-individu lain yang ada di dalam masyarakat. Adapun ciri dari tindakan sosial yaitu: tindakan yang dilaksanakan mempunyai sebuah makna, tindakan tersebut bersifat nyata, tindakan yang dilakukan dapat memberi pengaruh baik, tindakan yang dilakukan dapat orang tertarik untuk ikut, serta tindakan

tersebut dilakukan karena muncul sebuah tanggapan kepada orang lain. Weber menyatakan bahwa dalam tindakan sosial manusia melakukan sesuatu dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai, barulah setelah itu dapat dilakukan tindakan (Sartika, 2020: 7).

Weber juga berpendapat perbandingan struktur masyarakat yaitu dengan memahami alasan bagaimana cara masyarakat bertindak, kemudian kejadian-kejadian sejarah yang mempengaruhi karakternya, dan memahami perilaku saat ini, tetapi tidak mungkin untuk menggeneralisasi ke semua masyarakat atau semua struktur sosial. Dalam hal ini untuk membantu membandingkan, Weber mengatakan bahwa sosiologi harus menggunakan konsep seluas mungkin. Weber menggunakan klasifikasi dari empat tipe tindakan yang telah dibedakan berdasarkan konteks motif para pelakunya (Jones, 2016: 118). Adapun empat tipe tindakan sosial yang telah dikemukakan oleh Max Weber diantaranya: tindakan rasionalitas instrumental, nilai, tradisional dan afektif. Dari keempat tipe tindakan tersebut yang lebih dominan pada implementasi di Desa Sedan pada masa pandemi COVID-19 yaitu tindakan rasionalitas instrumental, yang mana pada tindakan ini mulai dari pemerintah, perangkat desa maupun imam masjid telah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menaati protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun berada selama pandemi COVID-19 belum usai. Selain tindakan instrumental, tindakan rasionalitas afektif juga memiliki pengaruh di era pandemi COVID-19 terutama pada protokol kesehatan dimana kebanyakan masyarakat kurang peduli terhadap protokol kesehatan terutama dalam penggunaan masker meskipun pemerintah, perangkat desa, dan imam masjid telah menghimbau untuk selalu menaati protokol kesehatan terutama di tempat-tempat yang mengundang keramaian. Berdasarkan pernyataan yang telah dikemukakan oleh Max Weber, hal ini dapat disimpulkan bahwa tindakan sosial sebetulnya memiliki tujuan yang baik terutama di tengah masyarakat, walaupun demikian kembali lagi kepada setiap individu yang melaksanakan tindakan sosial tersebut, tindakan ini dilakukan bisa bersifat positif bagi dirinya atau juga bisa merugikan banyak orang lain. Seperti halnya pentingnya protokol kesehatan di era pandemi yang sebetulnya tidak lain untuk menjaga keselamatan diri bagi setiap individu yang menerapkannya (Putra, 2020: 8).

Berdasarkan perspektif yang ada hal ini tidak terlepas oleh aturan pemerintah terhadap himbuan untuk mematuhi protokol kesehatan, baik pemerintah maupun pihak-pihak lembaga terkait dengan adanya himbuan terhadap pentingnya protokol kesehatan harapannya agar masyarakat lebih menjaga keselamatan dan kesehatan terutama dapat memutus mata rantai

COVID-19. Adanya perubahan yang ada bukan menjadi halangan dalam menjalankan praktik agama justru dapat menambah ketaqwaan kita kepada sang maha pencipta untuk lebih bermuhasabah diri terhadap adanya wabah yang menimpa di segala penjuru dunia.

Faktor Pendukung dan Penghambat Aktivitas Keagamaan di Desa Sedan Kabupaten Rembang Masa COVID-19

Perubahan COVID-19 yang cukup signifikan telah membawa pengaruh terhadap kehidupan umat manusia, disamping itu adanya hambatan dalam aktivitas keagamaan juga telah dirasakan dampaknya, agama menjadi hal yang mendasar dalam hal spiritualitas. Hubungan antara makhluk dengan sang pencipta bisa dirasakan dalam hal ibadah, sehingga mediator ibadah diperlukan bagi setiap makhluknya. Namun disisi lain hal tersebut menjadi kurang kondusif lantaran datangnya pandemi telah memunculkan persoalan-persoalan baru dalam segi beribadah. Aturan-aturan baru yang muncul mendatangkan berbagai respon diantaranya ada respon positif dan juga negatif dari berbagai pihak. Seperti halnya di Desa Sedan dengan adanya aturan baru dari pemerintah maupun pihak masjid terkait pelaksanaan ibadah saat pandemi membuat masyarakat semakin resah terhadap aturan tersebut (Ikhsan, 2020: 131).

Adanya anjuran dari pemerintah baik dari pihak masjid maupun TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) telah berkontribusi menjalankan aturan yang ada untuk diterapkan seperti halnya di masjid dan TPA yang telah menyediakan tempat cuci tangan dan juga masker, begitu juga aparat desa maupun satgas yang menghimbau kepada masyarakat untuk selalu jaga jarak, menjauhi kerumunan dan terlebih selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun berada. Sebagai bentuk dukungan dari masyarakat agar terlaksananya aturan pemerintah hal ini dapat diimplementasikan dengan menerapkan protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan terutama di tempat yang mengundang keramaian (Michelle, 2020: 93).

Hal serupa juga telah terjadi pada pendidikan agama yakni pada lembaga TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dalam pelaksanaan praktiknya pun saat pandemi juga mengalami perubahan hal ini juga didukung oleh aturan dari pemerintah yang mengharuskan untuk meliburkan pendidikan saat pandemi COVID-19 (Loeis, 2015: 56). Adanya dukungan untuk meningkatkan disiplin

dalam aktivitas beribadah maupun dalam menjalankan protokol kesehatan memang diperlukan, Pentingnya dukungan dari berbagai pihak saat era pandemi menjadi hal yang utama baik dari pelaksanaan ibadah shalat di masjid maupun praktik agama yang ada di TPA, penting bagi semua pihak untuk menerapkan protokol kesehatan terutama dalam menjalankan ibadah di tempat keramaian, adanya dukungan dari berbagai pihak tidak lain bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan bagi diri sendiri dan orang banyak.

Selain dukungan dari pemerintah maupun dari pihak lain yang mendukung atas terlaksananya aturan-aturan selama COVID-19, sementara itu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan telah menjadi problem di era pandemi sehingga dalam menjalankan aturan yang ada masih kurang maksimal. Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktor penghambat di era pandemi hal ini didasari dengan kurangnya kesadaran akan protokol kesehatan sekaligus juga kurang maksimal dalam menjalankan aturan yang berlaku, terlebih setiap orang mempunyai persepsi sendiri terhadap adanya aturan pemerintah sehingga apa yang mereka anggap baik belum tentu baik menurut kesehatan (Firman, 2020: 152).

Hal ini juga terjadi di Desa Sedan yang kurang stabil terhadap penerapan protokol kesehatan namun secara keseluruhan hampir semuanya sudah menerapkan, hal ini disebabkan berbagai macam permasalahan mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memakai masker terutama di tempat keramaian, kemudian masalah kesehatan terganggu seperti sesak nafas yang menimbulkan ketidak nyamanan terhadap penggunaan masker dalam aktivitas keseharian. Dan terlebih setiap orang mempunyai daya ingatan yang berbeda terutama pada usia lansia dengan demikian penting untuk saling mengingatkan antar satu sama lain, selain dapat menambah rasa *ukhuwah islamiyyah* sekaligus dapat mencegah penularan virus di era pandemi (Utami, 2021: 235).

Meskipun demikian, hal serupa juga terjadi pada lembaga TPA yang masih kurang efektif dalam menerapkan protokol kesehatan disebabkan karena sebagian anak belum begitu memahami pentingnya protokol kesehatan, Selain hal tersebut, adanya faktor dorongan orang tua yang mengharuskan anaknya untuk tetap mendapatkan pendidikan selama pandemi juga telah terjadi, hal demikian dilaksanakan tidak lain agar anak-anak tetap produktif selama masa COVID-19, dengan menerapkan sistem blended menjadi solusi bagi tenaga kependidikan.

Hal ini juga telah terlaksana pada TPA al-Ittihad Sedan yang menerapkan sistem blended dengan jadwal masuk secara bergantian selama pandemi. Sehingga kegiatan belajar-mengajar tetap terlaksana begitu juga pendidikan agama tetap didapatkan yang nantinya sebagai bekal untuk anak di masa mendatang (N, Selaku Pengurus TPA Al-Ittihad Sedan, 30/12/2021). Namun hal demikian juga tidak dibenarkan oleh hukum serta aturan yang berlaku terkait adanya ketentuan yang mengharuskan untuk libur secara total, hal ini juga perlu diimbangi adanya fasilitas dari pemerintah yang memberi tunjangan selama masa COVID-19 sehingga aturan-aturan yang ada selama COVID-19 dapat terlaksana dengan baik dan efisien.

Adanya sanksi sosial terhadap penegakan protokol kesehatan memang diperlukan sebab untuk mengubah kebiasaan masyarakat tidaklah mudah mereka lebih cenderung mengikuti apa yang sesuai dengan persepsi yang mereka yakini, pada hakikatnya edukasi sangat penting dan sangat diperlukan untuk mengubah pola pikir masyarakat sehingga mereka bisa untuk mematuhi protokol kesehatan. Adanya dorongan untuk memakai masker dan cuci tangan sangatlah penting, selain memutus mata rantai COVID-19 juga sekaligus untuk melindungi dari resiko tertularnya COVID-19. Banyaknya masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan saat beraktivitas diluar rumah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap bertambahnya angka COVID-19 hal ini juga disebabkan kurangnya kebijakan yang bijaksana untuk memenuhi segala aspek kehidupan masyarakat selama masa pandemi berlangsung (Gusti, 2020).

SIMPULAN

COVID-19 telah membawa Perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan. Dalam hal ini praktik keagamaan juga telah mengalami perubahan mulai dari memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak sudah menjadi kewajiban bagi setiap individu di era pandemi. Protokol kesehatan diterapkan secara ketat guna meminimalisir wabah COVID-19 yang masih meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut di Desa Sedan juga telah mengalami perubahan pada praktik keagamaan mulai dari ibadah shalat Jum'at, kegiatan al-Barzanji di masjid Syatho Sedan yang mengharuskan untuk menerapkan protokol kesehatan saat penyelenggaraan ibadah pada saat situasi terjadi COVID-19 serta di TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) Al-Ittihad Sedan yang menerapkan sistem blended pada pengajaran di era pandemi. Adanya perubahan yang terjadi bukanlah menjadi suatu hambatan dalam menjalankan ibadah, namun seharusnya dapat menambah keimanan kita kepada sang pencipta untuk lebih bermuhasabah diri terhadap adanya wabah yang menimpa di segala penjuru dunia.

Dukungan dari berbagai pihak saat pandemi menjadi suatu hal yang utama atas tercapainya aturan yang berlaku, hal ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang peduli akan pentingnya protokol kesehatan di era pandemi. Di samping itu adanya himbauan baik dari pemerintah, maupun pihak-pihak lain yang mendukung juga telah menjadi motivasi tersendiri bagi setiap individu untuk lebih menjaga keselamatan dari virus yang menyebar. Disisi lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan telah menjadi faktor penghambat di era pandemi. Hal ini juga didasari atas rasa ketidaknyamanan dalam menggunakan masker saat melaksanakan praktik agama lantaran sesak nafas, kurang terbiasa menggunakan masker dan lain sebagainya dengan alasan yang berbeda sesuai dengan persepsi pada setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. A. B. (2020). *Pelaksanaan Ibadah Shalat Berjamaah Dalam Masa Pandemic Covid-19 Di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2020*. IAIN Salatiga.
- Akhmad, M. (2020). Meningkatkan Imunitas Tubuh dalam Menghadapi Pandemic Covid-19 Di Karang Taruna Kedunggupit Sidoharjo Wonogiri Jawa Tengah. *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1), 324–332.
- Bunga, F. T. (2020). Normal Baru Dalam Praktek Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Di Kota Padang. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(2), 145–162.
- Michelle elizabeth, Dkk. (2020). ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan PSBB masa transisi berdasarkan pergub no.88 tahun 2020 di wilayah jakarta barat. *Adil: Jurnal Hukum*, 11(2), 93.
- Utami sri nofi, Dkk. (2021). mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, 2(3), 235.
- Grehenson, G. (2020). *pakar UGM jelaskan penyebab masyarakat melanggar protokol kesehatan*. pp. 1–2.
- Hasanuddin, Af. (2020). *Patent No. no 31 tahun 2020*. indonesia.
- Hasanuddin, AF. (2020). *Patent No. no 14 tahun 2020*. indonesia.
- Hasil Wawancara dengan DF, Selaku Wakil Kepala Desa Sedan*. (2021). Rembang.
- Hasil Wawancara dengan N, Selaku guru TPA Al-Ittihad Sedan*. (2021). Rembang.
- Hasil Wawancara dengan N, Selaku Pengurus Masjid Desa Sedan*. (2021). Rembang.
- Hasil Wawancara dengan N selaku Pengurus TPA Al-Ittihad Sedan*. (2021). Rembang.
- Hasil Wawancara dengan U selaku guru dan wali murid TPA Al-Ittihad Sedan*. (2021). Rembang.
- Ikhsan, M. A., & Diyana, T. N. (2020). *pandemi COVID-19: respon muslim dalam kehidupan sosial-keagamaan dan pendidikan* (1st ed.). malang: delta pijar khatulistiwa.

- Irzum, F., & Dkk. (2020). *perilaku beragama masyarakat di tengah pandemi* (1st ed.). kudus: IAIN Kudus Press.
- Jateng, D. K. (2021). Waspada Virus Covid-19 Varian Delta Ditemukan di Beberapa Wilayah Jateng.
- Jones, pip, D. (2016). *pengantar teori-teori sosial* (2nd ed.). jakarta: yayasan pustaka obor indonesia.
- Nanang, M. (2014). *sosiologi perubahan sosial* (3rd ed.). jakarta: PT raja grafindo persada.
- Paul, johnson doyle. (1994). *teori sosiologi klasik dan modern* (3rd ed.). jakarta: PT Gramedia pustaka utama.
- Putra, ahmad, suryadinata, S. (2020). menelaah fenomena klitih yogyakarta dalam perspektif tindakan sosial dan perubahan sosial max weber. *Asketik: Agama Dan Perubahan Sosial*, 4, 7.
- Redaksi. (2021). Rembang Siap Laksanakan Ppkm Darurat. Retrieved from Rembangkab.go.id Pemerintah Kabupaten Rembang website: <https://rembangkab.go.id/berita/rembang-siap-laksanakan-kebijakan-ppkm-darurat/>
- Supian, D. (2020). *youth, pandemic, media, and religious contemporary issues*. Yogyakarta: suka press.
- Talkah. (2021). Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Masa Pandemic Covid-19. *MUDIR: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(1), 17–26.
- Tobroni Faiq. (2020). Pembatasan Kegiatan dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(2), 369–395.
- Widiyanto, loeis wisnawati. (2015). peran guru PAI dalam meningkatkan disiplin ibadah shalat siswa SMAN 2 kota bekasi. *Turats*, 11, 56.
- Yuliana. (2020). coronavirus disease (covid-19) sebuah tinjauan literature wellness and healthy magazine. *Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), 2.
- Zifan, F. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Shalat Berjama'ah Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 51.

Efektivitas Komunikasi Kepala Madrasah dalam Membangun Budaya Organisasi di MI Nu Raudlatut Tholibin Jepangakis

Muhammad Amin

muhammad.amin.rais237@gmail.com

IAIN Kudus

Abstrak

Setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda, budaya tersebut dapat dibentuk karena pengaruh besar dari manajer. Salah satu upaya dalam membentuk budaya organisasi yang kuat dan positif adalah dengan komunikasi efektif yang dilakukan oleh manajer. Namun, seringkali antara manajer dan bawahan melakukan kesalahan dalam proses komunikasi sehingga menyebabkan mis-communication hingga berujung pada konflik antar individu dalam organisasi. Penelitian ini berupaya menggali efektivitas komunikasi kepala madrasah selaku manajer dalam membentuk budaya organisasi di MI NU Raudlatut Tholibin Jepangakis. Penelitian ini menggunakan metode jenis survei untuk mengetahui efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah serta budaya organisasi yang sudah terbentuk. Responden dalam penelitian ini sebanyak 15 orang yang terdiri dari tenaga pendidik dan kependidikan. Setelah melakukan analisis menggunakan pendekatan deskriptif ditemukan bahwa komunikasi kepala madrasah sudah efektif dengan skor sebesar 83% sedangkan budaya yang terbentuk juga sudah sangat baik yaitu dengan skor sebesar 82%, sehingga komunikasi yang efektif dapat membangun budaya organisasi yang kuat dan positif.

Kata Kunci: Komunikasi; Kepala Madrasah; Budaya Organisasi.

Abstract

Each organization has a different culture, it can be formed because of the great influence of the manager. One of the efforts in forming a strong and positive organizational culture is by effective communication carried out by managers. However, often between managers and subordinates make mistakes in the communication process that cause miscommunication to lead to conflict between individuals in the organization. This research will explore the effectiveness of communication of madrasah heads as managers in shaping organizational culture in MI NU Raudlatut Tholibin Japangpakis. Then, this research uses survey-type methods to find out the effectiveness of communication carried out by madrasah heads as well as the organizational culture that has been formed. Respondents in this study are 15 people consisting of educators and education personnel. After conducting an analysis using descriptive approach methods it was found that the communication of the head of the madrasah heads was effective with a score of 83% while the culture formed was also very good, namely with a score of 82%, so that effective communication can build a strong and positive organizational culture.

Keywords: *Communication; Head of Madrasah; Organizational Culture.*

PENDAHULUAN

Budaya organisasi yang kuat serta positif sangat mempengaruhi perilaku dan efektivitas kinerja dalam lembaga pendidikan. Karena budaya organisasi yang kuat dan positif dapat mendukung tujuan-tujuan dari sebuah lembaga pendidikan, dan sebaliknya budaya yang negatif akan menghambat dan cenderung bertentangan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Sutrisno 2010, 2). Hal tersebut telah terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ras Muis, dkk., bahwa terdapat pengaruh positif antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan sebesar 2,815 (sig 0,007) yang berarti bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan (Ras Muis, Jufrizen, dan Fahmi 2018, 23). Oleh karenanya, membentuk budaya organisasi yang kuat dan positif merupakan suatu yang urgen sebagai bentuk implementasi sistem manajemen dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja karyawan dalam organisasi pendidikan.

Budaya organisasi sendiri dibangun oleh anggota organisasi yang mengacu pada etika dan sistem nilai yang berkembang dalam sebuah organisasi, pemberian hak kepada pimpinan dan anggota, serta dipengaruhi oleh struktur yang berlaku didalamnya (Sagala 2016, 130). Adapun fungsi terpenting dari struktur organisasi yaitu untuk membatasi aliran komunikasi agar dapat mengurangi kesalahan dan kelebihan informasi pada anggota (Gede dan Suparta 2017, 85). Oleh karena itu dalam membangun budaya organisasi diperlukan komunikasi yang baik dan efektif agar budaya yang dibentuk selaras dengan tujuan organisasi dalam pendidikan Islam.

Peran terpenting sebuah organisasi terletak pada pemimpinnya, karena kepemimpinan dan manajerial yang baik merupakan syarat utama sebuah organisasi berjalan secara efektif (Fadhli 2019, 62). Selain itu, untuk membangun budaya organisasi yang kuat dan positif diperlukan komunikasi yang efektif dari pimpinan, sebab fungsi dari manajer antara lain yaitu fungsi penciptaan, perencanaan, pengorganisasian, motivasi, komunikasi dan pengendalian (Gede dan Suparta 2017, 74). Maka dari itu, untuk membangun budaya organisasi yang kuat dan positif diperlukan komunikasi yang efektif pula dari pimpinan (kepala madrasah) agar lembaga pendidikan dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat meningkatkan kinerja karyawan.

Namun, seringkali komunikasi antar kepala madrasah dan bawahannya terjadi beberapa permasalahan seperti tidak sampainya informasi, kurang lengkapnya informasi yang disampaikan dan kesalah-pahaman antar kepala

madrasah dan bawahannya. Seperti yang terjadi di MI NU Raudlatut Tholibin Jepangakis bahwasannya sering terjadi *mis-communication* antara pimpinan dan bawahannya, selain itu informasi penting yang disampaikan juga terkadang tidak lengkap dan terlambat, serta informasi yang disampaikan sering berubah-ubah karena didasarkan pada keputusan sepihak dari manajer. Sehingga menyebabkan budaya organisasi yang sudah terbentuk menjadi pudar dan timbul ketidakpercayaan bawahan terhadap pimpinannya. Permasalahan tersebut tentu saja sangat mempengaruhi kinerja dari dewan guru beserta staf kependidikannya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji secara mendalam mengenai tema besar perilaku organisasi dalam kelompok lembaga pendidikan tersebut pada bidang kajian komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam membangun budaya organisasi yang efektif. Adapun fokus penelitian ini yaitu untuk mengkaji efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah dan budaya organisasi yang sudah terbentuk.

KAJIAN LITERATUR

KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM ORGANIASASI

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam berjalannya sebuah organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi yang dimaksudkan yaitu proses penyampaian dan pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima secara lisan, tertulis maupun menggunakan alat komunikasi lainnya. (Gede dan Suparta 2017, 79). Tujuan dari dilakukannya komunikasi dalam sebuah organisasi yaitu untuk menyatakan pikiran, pandangan atau pendapat, membagikan informasi, menyatakan perasaan dan emosi serta melakukan koordinasi (Asriadi 2020, 45). Jadi komunikasi adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi secara lisan maupun tulisan yang berguna untuk menyatakan pikiran, membagi informasi, menyatakan perasaan dan melakukan koordinasi untuk menjalankan organisasi dalam rangka pencaapaian tujuan.

Pada sebuah organisasi komunikasi merupakan hal yang krusial karena dengan adanya komunikasi proses pencapaian tujuan organisasi menjadi lebih terarah. Menurut Irene organisasi yang memiliki visi, misi dan tujuan diharapkan mampu dicapai melalui proses interaksi (komunikasi) dan Kerjasama antar anggota organisasi, dengan adanya interaksi antar karakter individu dan karakter organisasi nantinya akan mewujudkan perilaku organisasi (Silviani 2020, 66-67). Oleh karena itu, komunikasi dianggap penting untuk membentuk perilaku organisasi yang bertujuan untuk tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Komunikasi yang efektif memenuhi beberapa unsur atau komponen, karena komunikasi adalah proses dua arah atau timbal balik. Maka dari itu, komponen perlu ada dalam sebuah komunikasi, berikut komponen dalam komunikasi:

1) Pengirim Pesan

Pengirim pesan yaitu individu yang mengirim pesan. Pesan tersebut berisi tentang informasi penting yang hendak disampaikan. Karenanya, sebelum menyampaikan pesan si pengirim pesan harus menentukan/menciptakan terlebih dahulu pesan yang akan dikirimkan. Menciptakan pesan berarti menentukan apa yang akan dikirimkan kepada penerima kemudian menyandikan/*encode* arti ke dalam sebuah pesan.

2) Pesan

Pesan merupakan informasi yang hendak dikirimkan kepada penerima pesan. Pesan ada dua macam yaitu verbal dan non-verbal. Pesan verbal dapat dilakukan secara tertulis dan langsung, secara tertulis dapat melalui surat, buku, majalah, memo. Pesan verbal secara langsung berupa percakapan langsung, melalui video, telepon dan sebagainya. Adapun pesan non-verbal misalnya berupa isyarat, gerakan, ekspresi, dan nada suara.

3) Saluran

Saluran diartikan sebagai jalan atau perantara yang dilalui pesan dari pengirim kepada penerima. Saluran ini dapat juga berupa alat seperti buku, radio, film, televisi, surat kabar, tetapi saluran pokoknya berupa gelombang cahaya dan suara.

4) Penerima pesan

Penerima pesan yaitu yang menganalisis dan menginterpretasikan isi pesan yang diterima.

5) Balikan

Balikan diartikan sebagai respon terhadap pesan yang diterima dan kemudian dikirim kembali kepada pengirim pesan. Respon tersebut dapat menjadi indikator bahwa komunikasi berjalan efektif atau tidak. Karena apabila respon yang diperoleh sama dengan yang diharapkan oleh pengirim pesan maka komunikasi tersebut dinilai efektif (Silviani 2020, 40-41).

Selanjutnya agar komunikasi dapat berjalan secara efektif dapat dilakukan dengan cara memenuhi beberapa prinsip yang telah dijelaskan oleh Muwafik Saleh, prinsip inilah yang nantinya dapat menjadi indikator efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh pengirim pesan, berikut penjelasannya:

1) Komunikasi adalah proses simbolik

Saat berkomunikasi dengan orang lain tentunya menggunakan beragam simbol yang berguna untuk menjelaskan pesan yang ingin disampaikan. Simbol yang dimaksudkan adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lain sesuai kesepakatan bersama, seperti halnya bahasa. Simbol dapat berupa kata-kata verbal maupun non-verbal atau objek yang disepakati bersama. Penggunaan simbol dalam komunikasi baik secara pribadi maupun kelompok atau organisasi menjadi penting bagi efektivitas komunikasi yang dilakukan (Saleh 2016, 17). Jadi komunikasi yang efektif menggunakan simbol yang mudah dipahami dan disepakati oleh penerima pesan.

2) Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi

Setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia memiliki potensi untuk dimaknai oleh orang lain sebagai komunikasi. Misalnya, pada suatu rapat terdapat seseorang yang hanya diam saja, perilakunya tersebut dapat ditafsiri oleh orang lain bahwa dia bisa saja tidak setuju, ada masalah atau sedang sakit (Saleh 2016, 17-18). Oleh karena itu, perilaku seseorang dapat berarti sebuah simbol atau komunikasi bagi orang lain.

3) Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu

Komunikasi yang dilakukan ditempat berbeda dan waktu yang berbeda akan dinilai berbeda pula saat proses komunikasi berlangsung. Misalnya, pembicaraan dirumah, lelucon, tertawa terbahak-bahak akan terasa kurang tepat apabila dilakukan dalam keadaan rapat penting. Selain itu, bunyi telepon disiang hari pun akan dimaknai berbeda dengan bunyi telepon pada malam hari (Saleh 2016, 18). Oleh karenanya, memahami keadaan tempat dan waktu menjadi sangat penting untuk efektivitas komunikasi yang sedang dilakukan.

4) Penyesuaian dengan latar belakang sosial dan budaya komunikasi

Seseorang akan lebih mudah mempengaruhi orang lain apabila menggunakan simbol atau bahasa komunikasi yang mampu mendekatkan dirinya dengan penerima pesan. Simbol tersebut dapat berupa latar belakang suku, agama, ras, golongan, bahasa dan sebagainya (Saleh 2016, 18). Maka dari itu, sangat penting untuk mengetahui karakteristik orang yang sedang diajak untuk bicara agar komunikasi dapat berjalan secara efektif.

5) Komunikasi bersifat *irreversible*

Komunikasi yang telah diproduksi dan telah disampaikan kepada orang lain baik berupa kata-kata verbal maupun non-verbal tidak akan pernah kembali kepada pengirim pesan, karena apabila pesan sudah disampaikan kepada penerima pesan, sudah menjadi haknya untuk menginterpretasikannya sesuai dengan kemampuan masing-masing penerima pesan tersebut. Sebuah pesan apabila sudah disampaikan akan menjadi sulit untuk direvisi, apalagi pesan tersebut mengandung unsur kebohongan (Saleh 2016, 19). Oleh karena itu, sebagai pengirim pesan perlu adanya persiapan matang dalam menyampaikan sebuah pesan agar dapat menjadi sebuah kesan pertama yang baik untuk penerima pesan.

BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi memiliki peran yang krusial dalam kesuksesan sebuah organisasi. Karena budaya organisasi menghadirkan rasa emosional dan ikatan bagi kelompok dalam organisasi. Peran manajer dalam membentuk budaya organisasi sangatlah besar, sebab manajer adalah penjaga dan juru bicara dari budaya sebuah organisasi (Amir 2017, 188). Menurut Syaiful Sagala budaya menampakkan diri pada pola komunikasi, kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model dalam sistem organisasi tertentu (Sagala 2017, 129). Oleh karena itu, manajer dalam hal ini kepala madrasah memiliki peran penting dalam membentuk budaya organisasi yang kuat dan positif, salah satu cara agar budaya organisasi tersebut terbentuk dengan baik yaitu melalui komunikasi yang efektif dalam organisasi.

Budaya organisasi didefinisikan sebaagai kebiasaan dan tradisi cara berfikir serta melakukan sesuatu yang dilakukan sebagian besar para anggota organisasi (Sagala 2017, 129). Menurut Jones G.R organisasi adalah

seperangkat nilai yang dapat mengontrol interaksi antar anggota dalam organisasi serta berbagai kalangan lain yang berada di luar organisasi (Jones G.R 1995, 130). Lalu menurut Robbins menyatakan bahwa budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota organisasi, sebuah sistem dari makna bersama, dan sistem bersama tersebut adalah seperangkat karakteristik utama yang dihargai dalam suatu organisasi (Robbins S. P. 1993, 572). Karakteristik budaya organisasi tersebut dapat terdiri berupa nilai-nilai, simbol-simbol, cerita-cerita, kepahlawanan dan sumber daya yang memiliki arti khusus bagi anggota organisasi (Amir 2017, 188). Jadi budaya organisasi adalah suatu kebiasaan dan tradisi berfikir yang dilakukan oleh anggota organisasi yang membentuk sebuah persepsi bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Budaya organisasi tersebut dapat berupa nilai-nilai, simbol-simbol, cerita-cerita, kepahlawanan dan sumber daya yang memiliki arti penting bagi organisasi. Budaya organisasi tersebutlah yang nantinya akan menjadi ciri suatu organisasi.

Budaya organisasi tidak dapat dilepaskan dari kajian komunikasi, sebab budaya dihasilkan melalui proses interaksi-interaksi dari anggota kelompok, dan dalam interaksi inilah komunikasi berlangsung (Saleh 2016, 100). Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iflya dan Nur Hidayah bahwa budaya organisasi madrasah dibangun oleh kepemimpinan kepala madrasah yang menekankan dalam koordinasi, komunikasi, dan pembinaannya (Iflya dan Hidayah 2018, 39). Kemudian untuk dapat mengetahui baik atau buruknya ciri budaya dalam sebuah organisasi dapat merujuk pada delapan faktor yang dikemukakan oleh Judge & Cable sebagaimana dikutip oleh Saleh, yaitu:

- 1) Inovasi, yakni tingkat sejauh mana organisasi mendukung pengambilan risiko, mengabaikan kehati-hatian, eksperimentasi, keamanan dan kemantapan sebuah organisasi.
- 2) Perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana organisasi memberikan peluang pada para anggota untuk melakukan analisis, perhatian, detail dan kecermatan suatu keadaan dalam organisasi.
- 3) Orientasi hasil, yaitu sejauh mana sebuah organisasi berorientasi pada kinerja, menuntut hasil dan mendukung harapan tinggi pada kinerja karyawan.
- 4) Keagresifan, yaitu sejauh mana organisasi menekankan pada kompetisi, keagresifan dan memanfaatkan peluang yang ada.
- 5) Dukungan, yakni organisasi memberikan dorongan, mendukung penyebaran informasi dan menghargai kinerja baik para anggota organisasi.

- 6) Perhatian pada ganjaran, yaitu sejauh mana organisasi memberi gaji/ganjaran yang tinggi terhadap kinerja dan pengembangan profesionalitas.
- 7) Orientasi tim, yaitu sejauh mana organisasi mendukung kolaborasi tim dan berorientasi pada kinerja tim atau kelompok.
- 8) Ketegasan, yaitu sejauh mana organisasi memiliki ketegasan, dapat diperkirakan dan memiliki konflik yang rendah (Saleh 2016, 106-107).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dilakukan pada kondisi alamiah objek penelitian, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif dan tidak menekankan pada angka, namun tidak lepas dari data berupa angka, penelitian kualitatif menekankan pada proses penelitian dari pada produk, penelitian kualitatif juga menekankan pada makna serta model analisis yang digunakan cenderung secara induktif (Sugiyono 2015, 13-14). Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan keadaan objek dan subjek penelitian secara alamiah yang terkait dengan komunikasi yang dilakukan oleh para anggota organisasi dan budaya organisasi di MI NU Raudlatut Tholibin Jampangpakis. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis survei deskriptif (*descriptive survey*). Survei deskriptif berusaha mengungkapkan dan menjelaskan serta mencatat sebuah kondisi atau sikap yang terjadi pada objek penelitian. Singkatnya penelitian jenis survei deskriptif berupaya mengungkap keadaan terkini terkait dengan topik pada studi tertentu (Morissan 2015, 166). Jenis penelitian survei dipilih untuk mengetahui seberapa efektif komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah melalui persepsi para anggota organisasi. Untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi tersebut akan dilakukan penilaian berdasarkan indikator-indikator tertentu.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah semua dewan guru dan staf yang ada di MI NU Raudlatut Tholibin Jampangpakis, jumlah keseluruhan adalah 15 orang. Kemudian instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah angket yang berisi tentang komunikasi efektif yang dilakukan oleh kepala madrasah dan terkait dengan budaya organisasi yang positif. Untuk menghitung seberapa efektif komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam membangun budaya organisasi yang positif menggunakan pengukuran berupa skala linkert dengan rentang skor 1 – 4, yaitu: skor 1 menunjukkan sangat tidak setuju, skor 2 menunjukkan tidak setuju, skor 3 menunjukkan setuju dan skor 4 menunjukkan sangat setuju. Kemudian nilai tersebut

dihitung dalam bentuk prosentase pada setiap pertanyaan dan prosentase tersebut menunjukkan seberapa efektif komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah dan seberapa positif budaya organisasi di MI NU Raudlatut Tholibin Jampangpakis. Sebelum di deskripsikan, peneliti melakukan interpretasi dengan menggunakan kriteria interpretasi skor yaitu:

- Angka 0 - 24,99% : Sangat Tidak Setuju (Sangat buruk)
- Angka 25% - 49,99% : Tidak Setuju (Buruk)
- Angka 50% - 74,99% : Setuju (Baik)
- Angka 75% - 100% : Sangat Setuju (Sangat baik)

Jadi pada instrumen penelitian tersebut dalam analisis data akan menunjukkan makna bahwa setiap angka persetujuan diatas 50% menunjukkan sikap setuju, dan angka dibawah 50% menunjukkan sikap tidak setuju. Apabila responden setuju berarti dianggap kepala madrasah telah melakukan komunikasi secara efektif dan budaya organisasi yang positif, sebaliknya apabila tidak setuju berarti komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah belum efektif dan budaya organisasi yang terbentuk kurang positif. Maka dari itu, analisis data yang dilakukan berdasarkan jawaban setuju/tidaknya responden dalam menyikapi pernyataan yang diberikan melalui *google form* yang berisi tentang komunikasi efektif kepala madrasah dan budaya organisasi.

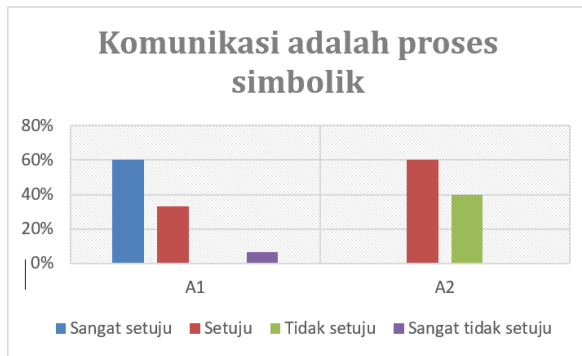
PEMBAHASAN

HASIL SURVEI EFEKTIVITAS KOMUNKASI KEPALA MADRASAH

Survei yang dilakukan berisi tentang seberapa efektif komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah, indikator yang dikembangkan berdasarkan 5 kriteria yaitu: 1) Komunikasi adalah proses simbolik, 2) setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi, 3) Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, 4) Penyesuaian dengan latar belakang komunikan, 5) Komunikasi bersifat *irreversible*. Setiap indikator dikembangkan menjadi 2 item soal, berikut pejelasananya.

1) Komunikasi adalah proses simbolik

Grafik 3.1 Komunikasi Proses Simbolik



A1. Kepala madrasah menggunakan bahasa yang mudah dipahami ketika menyampaikan informasi untuk proses pencapaian tujuan pendidikan

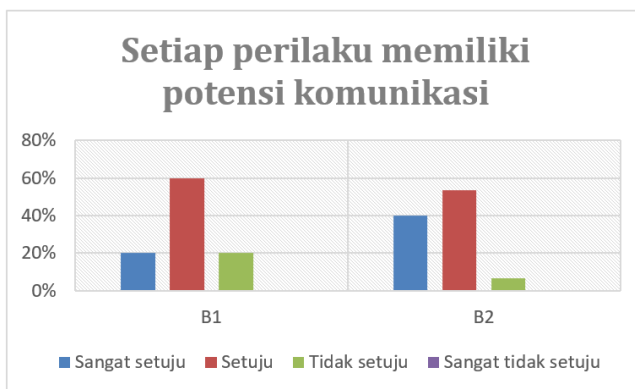
A2. Terkadang saya tidak paham terhadap informasi yang disampaikan oleh kepala madrasah

Tabel diatas memiliki makna bahwa komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah sudah sesuai dengan bahasa yang mudah dipahami oleh karyawan. Hal tersebut ditunjukkan pada item soal A1 bahwa “Kepala madrasah menggunakan bahasa yang mudah dipahami ketika menyampaikan informasi untuk proses pencapaian tujuan pendidikan” sebanyak 60% menyatakan sangat setuju dan 33% setuju, serta hanya 7% menyatakan sangat tidak setuju. Jadi 93% komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah sudah sesuai dengan simbol atau bahasa serta mudah dipahami oleh karyawan.

Meskipun komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah mudah dipahami oleh karyawan, masih terdapat informasi yang tidak dipahami oleh karyawan. Sebagaimana ditunjukkan pada item soal A2 “Terkadang saya tidak paham terhadap informasi yang disampaikan oleh kepala madrasah”, sebanyak 60% menyatakan setuju dan 40% menyatakan tidak setuju. Hal tersebut berarti bahwa komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah terkadang sukar untuk dipahami oleh karyawan. Jadi meskipun bahasa yang digunakan oleh kepala madrasah mudah dipahami, namun informasi yang terkandung didalamnya menjadi sukar dipahami. Berarti komunikasi yang dilakukan masih kurang efektif karena informasi yang disampaikan masih sukar dipahami oleh karyawan.

2) Setiap perilaku memiliki potensi komunikasi

Grafik 3.2 Setiap perilaku merupakan potensi komunikasi



B1. Kepala madrasah menggunakan perilaku untuk menggambarkan suasana pikiran dan hati saat berkomunikasi dengan bawahan

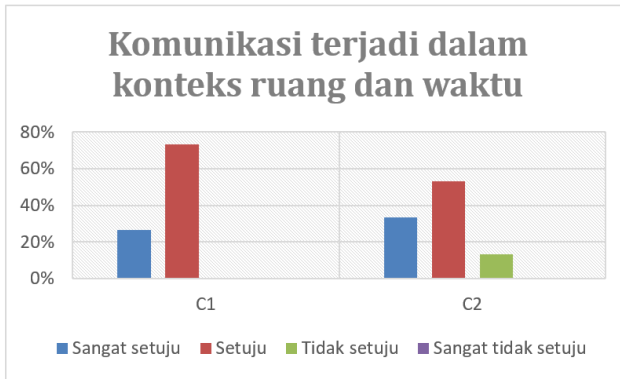
B2. Perilaku kepala madrasah adalah simbol dari komunikasi yang dilakukan

Dari grafik tersebut dapat dimaknai bahwa kepala madrasah memiliki potensi komunikasi yang sangat besar dalam menampakkan perilakunya. Sebagaimana dijelaskan dalam item soal B1 “Kepala madrasah menggunakan perilaku untuk menggambarkan suasana pikiran dan hati saat berkomunikasi dengan bawahan” sebanyak 20% menyatakan sangat setuju dan 60% setuju, serta hanya 20% tidak setuju, hal ini menunjukkan bahwa 80% perilaku kepala madrasah adalah simbol komunikasi bagi bawahannya.

Selain itu, diperkuat pada item soal B2 “Perilaku kepala madrasah adalah simbol dari komunikasi yang dilakukan” sebanyak 40% sangat setuju dan 53% setuju, serta 7% tidak setuju. Berarti 93% perilaku kepala madrasah menggambarkan potensi komunikasi yang dilakukan. Jadi komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah sudah efektif karena dengan perilakunya dapat mengkomunikasikan kepada bawahannya sesuatu yang akan atau sedang disampaikan.

3) Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu

Grafik 3.3 Komunikasi dalam konteks ruang dan waktu



C1. Kepala madrasah menyampaikan informasi penting kapan saja dan dimana saja (meskipun diluar jam kerja)

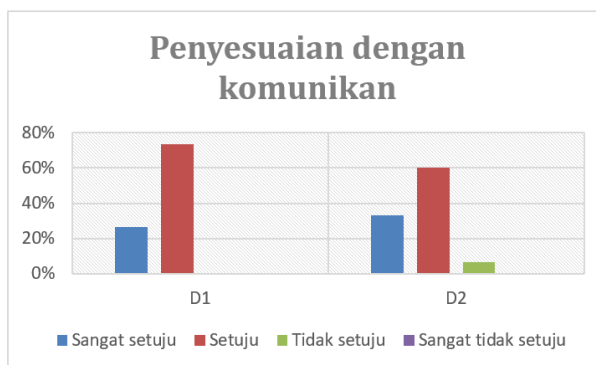
C2. Kepala madrasah memahami keadaan tempat dan waktu ketika menyampaikan informasi penting

Grafik diatas memiliki makna bahwa kepala madrasah menyampaikan informasi penting kapan saja dan dimana saja, sebagaimana ditunjukkan pada item soal C1 “Kepala madrasah menyampaikan informasi penting kapan saja dan dimana saja (meskipun diluar jam kerja)” sebanyak 27% sangat setuju dan 73% setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam menyampaikan informasi penting kepala madrasah tidak memikirkan tempat dan waktu, karena informasi penting harus segera disampaikan untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan untuk pemahaman kondisi tempat dan waktu dalam menyampaikan informasi penting, sebagaimana ditunjukkan pada item soal C2 “Kepala madrasah memahami keadaan tempat dan waktu ketika menyampaikan informasi penting” sebanyak 33% sangat setuju dan 53% setuju, serta 13% tidak setuju. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kepala madrasah sudah memahami keadaan tempat dan waktu ketika berkomunikasi khususnya dalam menyampaikan informasi penting. Jadi komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah sudah efektif karena komunikasi dilakukan dalam konteks ruang dan waktu serta kepala madrasah mampu memahami keadaan tempat dan waktu ketika berkomunikasi dengan bawahannya.

4) Penyesuaian dengan latar belakang kommunikan

Grafik 3.4 Penyesuaian dengan komunikan



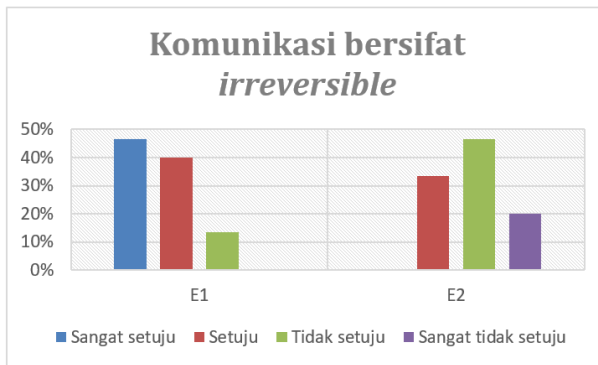
D1. Kepala madrasah memahami karakter saya saat berkomunikasi secara personal

D2. Kepala madrasah memahami karakter orang-orang disekitar saat menyampaikan informasi penting ketika rapat

Berdasarkan grafik diatas kepala madrasah mampu memahami karakter bawahannya ketika melakukan komunikasi secara personal, hal tersebut dibuktikan dengan item soal D1 “Kepala madrasah memahami karakter saya saat berkomunikasi secara personal” sebanyak 27% sangat setuju dan 73% setuju. Kemudian pada item soal D2 “Kepala madrasah memahami karakter orang-orang disekitar saat menyampaikan informasi penting ketika rapat” sebanyak 33% sangat setuju dan 60% setuju, serta 7% tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kepala madrasah baik secara personal maupun kelompok dapat melakukan komunikasi secara efektif dengan memahami karakter bawahannya.

5) Komunikasi bersifat *irreversible*

Grafik 3.5 Komunikasi bersifat *irreversible*



E1. Kepala madrasah mempersiapkan segala sesuatu apabila hendak menyampaikan informasi penting

E2. Kepala madrasah terburu-buru menyampaikan informasi, sehingga sering terjadi ralat informasi

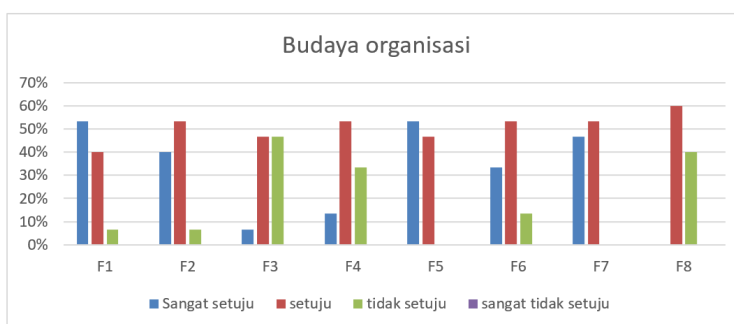
Grafik diatas menunjukkan bahwa kepala madrasah sebelum menyampaikan informasi penting terlebih dahulu mempersiapkannya. Sebagaimana ditunjukkan pada item soal E1 “Kepala madrasah mempersiapkan segala sesuatu apabila hendak menyampaikan informasi penting” sebanyak 47% sangat setuju dan 40% setuju, serta hanya 13% tidak setuju. Lalu didukung oleh data paada item soal E2 “Kepala madrasah terburu-buru menyampaikan informasi, sehingga sering terjadi ralat informasi” sebanyak 33% setuju serta 47% tidak setuju dan 20% sangat tidak setuju. Hal tersebut berarti bahwa kepala madrasah tidak terburu-buru dalam menyakpaikan terkait dengan informasi penting sehingga jarang terjadi ralat informasi. Jadi komunikasi pada indikator kelima sudah efektif karena kepala madrasah mempersiapkan terlebih dahulu ketika hendak berkomunikasi kepada bawahannya serta tidak terburu-buru dalam menyampaiakn informasi penting sehingga komunikasi berjalan secara efektif.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kominikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah MI NU Raudlatut Tholibin Jepangakis sudah efektif karena memenuhi 4 dari 5 indikator, yaitu hanya pada indikator pertama saja yang masih kurang efektif karena bawahan masih belum mampu menangkap informasi secara lengkap padahal kepala madrasah sudah menggunakan simbol/bahasa yang mudah diahami.

HASIL SURVEI BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi yang hendak digali melalui persepsi dewan guru di MI NU Raudlatut Tholibin Jepangkakis mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Judge & Cable bahwa untuk dapat mengetahui baik atau buruknya ciri budaya dalam sebuah organisasi dapat merujuk pada delapan faktor yaitu: inovasi, perhatian terhadap detail, orientasi hasil, keagresifan, dukungan, perhatian pada ganjaran, orientasi tim dan ketegasan, berikut ini penjelasan secara keseluruhannya.

Grafik 3.6 Budaya organisasi



- F1. Kepala madrasah memberikan ruang kreasi seluas-luasnya dalam melakukan inovasi dan kreativitas dalam proses pencapaian tujuan
- F2. Kepala madrasah memberi peluang kepada guru dan staf untuk menganalisis dan mengkritik secara detail untuk suatu keadaan dalam organisasi
- F3. Kepala madrasah menekankan hasil dari pada proses terhadap kinerja karyawan
- F4. Kepala madrasah menekankan pada kompetisi dan agresif dalam memanfaatkan peluang yang ada
- F5. Kepala madrasah memberi dukungan penuh kepada karyawan dan menghargai kinerja yang maksimal
- F6. Ganjaran yang diberikan sesuai dengan kinerja karyawan
- F7. Kepala madrasah mendukung adanya kolaborasi tim pada setiap proses pencapaian tujuan
- F8. Kepala madrasah memiliki ketegasan dalam menindak dan memutuskan sebuah perkara

Dari data tabel diatas secara keseluruhan mengungkapkan bahwa budaya organisasi yang terbentuk pada kategori sangat baik, karena responden menyatakan bahwa secara keseluruhan sebanyak 82% sangat setuju dan setuju, sedangkan hanya 18% menyatakan tidak setuju. Maka dari itu, budaya organisasi yang sudah terbentuk menunjukkan budaya yang kuat dan positif. Agar dapat dipahami secara mudah dan komprehensif berikut ini penjelasan untuk tiap item soal, yaitu:

1) **Inovasi**

Dari data yang telah didapatkan menurut persepsi dari karyawan, kepala madrasah memberikan ruang kreasi dan inovasi kepada karyawan untuk melakukan kreatifitasnya dalam menjalankan pekerjaan yang dilakukannya. Sebagaimana data mengatakan bahwa pada item soal FI “Kepala madrasah memberikan ruang kreasi seluas-luasnya dalam melakukan inovasi dan kreativitas dalam proses pencapaian tujuan” sebanyak 93% menyatakan sangat setuju dan setuju, sedangkan 7% menyatakan tidak setuju. Jadi kepala madrasah mendorong budaya yang positif untuk senantiasa mendukung dan membuka seluas-luasnya kreatifitas para karyawan.

2) **Perhatian terhadap detail**

Suatu organisasi agar dapat berkembang dan maju diperlukan analisis dan kritikan sebagai upaya untuk memperbaiki sistem yang kurang baik. Oleh karena itu diperlukan budaya organisasi yang memberi peluang kepada anggotanya untuk melakukan analisis dan kritikan untuk memperbaiki diri. Sementara di MI NU Raudlatut Tholibin Jepangakis, manajer memberikan kesempatan untuk para anggotanya untuk melakukan analisis dan kritikan terhadap sesuatu yang terjadi dalam organisasi. Sebagaimana ditunjukkan oleh item soal F2 “Kepala madrasah memberi peluang kepada guru dan staf untuk menganalisis dan mengkritik secara detail untuk suatu keadaan dalam organisasi” yang menyatakan 93% sangat setuju dan setuju, serta 7% menyatakan tidak setuju. Hal tersebut mengindikasikan bahwa budaya untuk mengkritik dan menganalisis sebagai upaya perbaikan dalam organisasi telah berjalan dengan baik, sehingga perlu untuk terus dipertahankan.

3) **Orientasi hasil**

Orientasi pada hasil kinerja memang sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi, namun untuk dapat mencapai hasil yang maksimal diperlukan proses. Akan tetapi, pada indikator ini orientasi hasil sangat

penting karena penilaian yang dilakukan berdasarkan hasil. Budaya organisasi di MI NU Raudlatut Tholibin Jepangakis masih dalam kategori baik untuk berorientasi pada hasil, sebagaimana terungkap dalam item soal F3 “Kepala madrasah menekankan hasil dari pada proses terhadap kinerja karyawan” sebanyak 53% menyatakan sangat setuju dan setuju, sedangkan sebanyak 47% menyatakan tidak setuju. Dari data tersebut dapat dipahami bahwa budaya organisasi di lembaga tersebut masih perlu untuk ditingkatkan lagi dalam hal untuk orientasi hasil. Karena dengan berorientasi pada hasil yang maksimal, maka proses yang dilakukan pun akan berjalan secara maksimal pula.

4) **Keagresifan**

Yaitu sejauh mana organisasi memiliki daya kompetitif, keagresifan dan dapat memanfaatkan peluang yang ada. Menurut data yang telah disajikan diatas budaya keagresifan di MI NU Raudlatut Tholibin yang dibuktikan pada item soal F4 “Kepala madrasah menekankan pada kompetisi dan agresif dalam memanfaatkan peluang yang ada” menyatakan bahwa sebanyak 67% sangat setuju dan setuju, lalu 33% menyatakan tidak setuju. Hal ini berarti bahwa upaya keagresifan dalam memanfaatkan peluang yang ada dalam kategori baik. Meskipun demikian lembaga pendidikan tersebut masih perlu melakukan upaya agar dapat lebih agresif dalam berkompetisi dan memanfaatkan peluang yang ada, dengan cara itu organisasi akan memiliki budaya yang kuat untuk berkompetisi dengan memanfaatkan semua peluang yang ada dan bersifat agresif.

5) **Dukungan**

Dukungan sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, apalagi dukungan dari pihak manajer selaku pengelola organisasi. Dukungan dapat berupa dorongan atau motivasi, dukungan atas penyebaran informasi dan menghargai kinerja baik para anggota organisasi. Pada grafik diatas, hasilnya sungguh mengejutkan karena kepala madrasah selaku manajer memberi dukungan secara maksimal kepada bawahannya, sebagaimana dibuktikan pada item soal F5 “Kepala madrasah memberi dukungan penuh kepada karyawan dan menghargai kinerja yang maksimal” sebanyak 53% menjawab sangat setuju dan 47% menjawab setuju. Hal ini berarti bahwa kepala madrasah senantiasa memberi dukungan dan menghargai setiap kinerja karyawan secara maksimal.

6) **Perhatian pada ganjaran**

Pada lingkungan organisasi yang positif ganjaran diberikan kepada mereka yang memiliki kinerja yang baik, oleh karena itu memberi gaji/ganjaran yang tinggi terhadap kinerja dan pengembangan profesionalitas menjadi penting untuk berlangsungnya sebuah organisasi. Meskipun MI NU Raudlatut Tholibin Jepangkakis merupakan lembaga swasta namun dalam memberi ganjaran atau uoah kepada karyawan sudah dalam kategori sangat baik. Sebagaimana dibuktikan pada item soal F6 “Ganjaran yang diberikansesuai dengan kinerja karyawan” sebanyak 87% menjawab sangat setuju dan setuju, serta 33% menjawab tidak setuju. Jadi budaya organisasi dalam memberi ganjaran kepada karyawan sudah sangat baik.

7) **Orientasi tim**

Tim merupakan kunci sukses dalam berorganisasi, tanpa adanya tim atau kelompok organisasi seperti kehilangan jiwanya. Organisasi yang mendukung kolaborasi tim dan berorientasi pada kinerja tim atau kelompok memiliki budaya organisasi yang kuat dan positif. Seperti halnya di MI NU Raudlatut Tholibin Jepangkakis, sebagaimana data yang didapatkan dari item soal F7 “Kepala madrasah mendukung adanya kolaborasi tim pada setiap proses pencapaian tujuan” sebanyak 47% menyatakan sangat setuju dan 53% menyatakan setuju. Berarti dapat disimpulkan bahwa manajer mendukung sepenuhnya kinerja tim dan kolaborasi kelompok untuk menapai tujuan organisasi.

8) **Ketegasan**

Manajer harus memiliki ketegasan dalam memutuskan suatu persoalan, dapat memperkirakan akibat dari keputusan tersebut dan memiliki konflik yang rendah agar terjalin suasana yang kondusif dalam organisasi. Sementara di MI NU Raudlatut Tholibin Jepangkakis manajer atau kepala madrasah dalam memutuskan suatu persoalan dan bertindak tegas berada dalam kategori baik. Sebagaimana data pada item soal F8 “Kepala madrasah memiliki ketegasan dalam menindak dan memutuskan sebuah perkara” sebanyak 60% menyatakan setuju dan 40% menyaatakan setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa kepala madrasah perlu memberanikan diri lagi dalam menindak tegas suatu persoalan yang ada agar kepercayaan karyawan tidak pudar dan tidak menyebabkan konflik di lingkungan internal organisasi.

EFEKTIVITAS KOMUNIKASI KEPALA MADRASAH DALAM MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI

Budaya setiap orang berbeda dengan orang lain, budaya tidak dapat disebut sebagai baik atau buruk, karena setiap orang memiliki perspektif dan budayanya masing-masing. Oleh karena itu setiap organisasi memiliki budaya sebagai sebuah ciri khas dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaiful Sagala bahwa pada setiap organisasi memiliki sistem nilai sebagai gambaran dari budaya organisasi, hal tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi dibentuk oleh sistem nilainya, dan sistem nilai dalam organisasi dipengaruhi oleh budaya individu yang terdapat dalam organisasi (Sagala 2017, 133). Sedangkan budaya organisasi yang optimal adalah budaya yang mampu mendukung dengan baik misi dan strategi organisasi yang merupakan bagian satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan didalamnya (Sudiro 2011, 44). Maka dari itu, penting untuk membentuk budaya organisasi yang optimal dan efektif dalam rangka menunjang tujuan dari sebuah organisasi.

Dalam rangka membentuk sekolah atau madrasah yang efektif kepala madrasah perlu memahami faktor-faktor yang menjadikannya mampu berhasil dalam memimpin sebuah organisasi pendidikan, sehingga memudahkan manajer untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi (Andang 2014, 146). Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk budaya organisasi yang efektif melalui komunikasi yang efektif pula.

Berdasarkan data yang telah di dapat melalui survei yang dilakukan kepada karyawan tentang persepsi mereka mengenai komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah dan budaya organisasi di MI NU Raudlatut Tholibin Jepangakis bahwa komunikasi yang telah dilakukan oleh kepala madrasah sudah efektif yaitu data menunjukkan angka sebanyak 83% yang memiliki arti bahwa komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam kategori sangat baik. Sedangkan dalam membentuk budaya organisasi melalui komunikasi efektif tersebut berbanding lurus, yaitu budaya organisasi yang ditunjukkan melalui data tersebut memiliki skor sebanyak 82% yang berarti bahwa budaya organisasi di MI NU Raudlatut Tholibin Jepangakis dalam kategori sangat baik. Jadi kesimpulannya komunikasi yang dilakukan kepala madrasah secara efektif dapat membentuk budaya organisasi yang kuat dan positif.

SIMPULAN

Kepala Madrasah MI NU Raudlatut THolibin Jepangakis dalam melakukan komunikasi dengan bawahannya sudah dilakukan secara efektif. Hal tersebut ditunjukkan pada skor sebanyak 83% pada efektifitas komunikasi. Sedangkan pada pembentukan budaya organisasi yang dilakukan juga berada pada kategori sangat baik. Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil survei bahwa budaya organisasi di lembaga pendidikan tersebut memiliki skor sebanyak 82% berdasarkan indikator yang telah dikembangkan dari Judge & Cable. Jadi efektifitas komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah sudah sangat baik sehingga mampu membentuk budaya organisasi yang sangat baik pula di lingkungan madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. T. (2017). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Andang. (2014). *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah: Konsep, Strategi dan Inovasi Menuju Sekolah efektif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Asriadi, A. (2020). Komunikasi Efektif Dalam Organisasi. *RETORIKA : Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.47435/retorika.v2i1.358>
- Fadhli, M. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Komitmen Guru Terhadap Efektifitas Madrasah di Lhokseumawe. *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.25217/ji.v4i1.447>
- G.R., J. (1995). *Organizational Theory*. Amsterdam: Addison Wesley Publishing Company.
- Iflya, M. G., & Hidayah, S. N. (2018). Upaya Kepala Madrasah dalam Membina Budaya Organisasi dan Kinerja Guru dalam Pembelajaran di MIN 5 Majalengka. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.14421/manageria.2018.31-02>
- Morissan. (2015). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Muis, M. R., Jufrizen, J., & Fahmi, M. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 1(1). <https://doi.org/10.36778/jesya.v1i1.7>
- S. P., R. (1993). *Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and Applications*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Sagala, S. (2016). *Memahami Organisasi Pendidikan; Budaya dan Reinventing, Organisasi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Saleh, M. (2016). *Komunikasi Dalam Kepemimpinan Organisasi*. Malang: UB Press.
- Silviani, I. (2020). *Komunikasi Organisasi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sudiro, A. (2011). *Perencanaan Sumber Daya Manusia*. Malang: UB Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparta, W. G. dan D. K. S. (2017). *Pengantar Perilaku Organisasi; Teori, Kasus dan Aplikasi Penelitian*. Denpasar: CV. Setia Bakti.
- Sutrisno, E. (2010). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.

PEMBENTUKAN AHLAK KARIMAH ANAK MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI LINGKUNGAN KELUARGA

Muhammad Sihabbuddin

IAIN Kudus, Kudus, Indonesia

Syihabbuddin56@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penulisan ini adalah 1) Untuk mengenal pendidikan agama islam di lingkungan keluarga, 2) Untuk mengenal penanaman pendidikan agama islam di lingkungan keluarga. 3) Untuk mengenal pembentukan ahlak karimah anak melalui pendidikan agama islam di lingkungan keluarga. Penulisan dalam jurnal ini adalah termasuk jenis penelitian studi pustaka (Library Research) sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data diperoleh melalui jurnal, buku, skripsi dan lain-lain. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ada tiga macam pendidikan agama Islam yang ada di lingkungan keluarga, khususnya: pendidikan akidah, pendidikan ibadah dan pendidikan ahlakul karimah. Penanaman Islam dalam lingkungan keluarga dapat dilakukan melalui beberapa strategi antara lain: akomodasi, demonstrasi atau praktik, teladan, perintah dan larangan, penghargaan dan hukuman. Pendidikan agama islam di lingkungan keluarga itu mempunyai urgensi dalam pembentukan ahlak karimah anak hal itu disebabkan lingkungan keluarga adalah tempat awal anak mendapatkan pendidikan yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan berikutnya. Keluarga adalah lingkungan pertama untuk membentuk karakter dan ahlak individu. Proses pembentukan ahlak karimah di lingkungan keluarga dengan pembinaan nilai-nilai agama diawali sejak lahir hingga mencapai dewasa. Pada hakikatnya pendidikan agama islam dalam keluarga itu memuat tiga hal yaitu: pendidikan aqidah, pendidikan ibadah dan pendidikan ahlakul karimah. Melalui pendidikan tersebut pada anak di lingkungan keluarga akan membentuk ahlak karimah anak agar menjadi insan kamil yaitu manusia yang berhubungan baik dengan Allah (hablumminallah) dan manusia yang berhubungan baik dengan manusia dan alam (hablumminannas wal alam).

Kata kunci : Pendidikan Agama Islam, Lingkungan Keluarga, Ahlak Karimah

Abstract

The purposes of this paper are 1) To know about Islamic religious education in the family environment, 2) To know the cultivation of Islamic education in the family environment. 3) To recognize the formation of children's character through education..religion..islam in the environment..family. Writing in this journal is a type of library research. The nature of this research is descriptive analytical. Data obtained through journals, books, theses and others. The results of the discussion show that there are three kinds of Islamic religious education in the family environment, in particular: faith education, worship education and ahlakul karimah education. Instilling Islam in the family environment can be done through several strategies, including: accommodation, demonstration or practice, exemplary, commands and prohibitions, rewards and punishments. Education..religion..islam in the family environment has urgency in the formation of children's character, this is because the environment..the family is the initial place for children to get education..which can have an influence on subsequent developments. Family is the first environment to form individual character and morality. The process of forming good character in the family environment by fostering religious values begins from birth to adulthood. In essence, Islamic education in the family contains three things, namely: aqidah education, worship education and ahlakul karimah education. Through this education, children in the family environment will form the moral character of children to become human beings, namely humans who are related to both God (hablumminallah) and humans who are in good relationship with, humans and nature (hablumminannas wal alam).

Keywords: Islamic Education, Environment, Family, Karimah

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam perspektif UU. NO. 20 Tahun 2003 pasal 3 yaitu usaha sadar dan terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berahlak (karakter mulia). Sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa "pendidikan nasional mempunyai fungsi agar mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, juga memiliki tujuan agar mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Negara yang demokratis dan bertanggung jawab".

Pendidikan dibutuhkan manusia karena pendidikan adalah kegiatan yang wajib ada dalam kehidupan, kegiatan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manusia. John Dewey memiliki pendapat seperti yang dikutip oleh A. Fatah Yasin bahwa "Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia guna membentuk dan mempersiapkan pribadinya agar hidup dengan disiplin".

Kualitas sumber daya manusia dalam menjamin keberlangsungan pembangunan suatu bangsa dapat ditingkatkan melalui sarana Pendidikan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa bangsa yang maju dapat diketahui melalui kualitas manusianya, sedangkan manusia dapat meningkatkan kualitasnya dengan perantara pendidikan dalam segala hal kehidupan yang mencakup kehidupan bergama.

Pendidikan mempunyai tiga institusi utama yang mempunyai dampak dalam perkembangan ahlak seorang anak yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, yang kemudian terkenal dengan istilah tri pusat pendidikan. Menurut GBHN (Tap. MPR NO. 1V/MPR/1978) dijelaskan bahwa "Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat". Lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat dan pemerintah mempunyai tanggung jawab bersama dan peran besar dalam proses terjadinya pendidikan.

Sedangkan pendidikan agama secara mudah dapat diartikan pendidikan yang memiliki tujuan agar seseorang mempunyai kemampuan dapat memimpin kehidupannya sesuai dengan norma dan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah masuk dalam jiwa dan memberikan warna terhadap kepribadiannya. Dari

hal tersebut dapat difahami bahwa, seorang yang beragama islam dan telah melaksanakan pendidikan islam harus dapat hidup dengan norma dan cita-cita islam yang telah ditentukan.

Realitas memperlihatkan adanya penyimpangan-penyimpangan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa anak-anak usia MI/SD belum dapat mampu menyadari tentang kewajiban-kewajiban yang harus di laksanakan, misalnya melaksanakan sholat lima waktu yang hukumnya adalah wajib di laksanakan bagi seorang muslim, sopan santun yang tidak di laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam usia remaja banyak pelanggaran-pelanggaran yang di laksanakan contoh mabuk-mabukan, tawuran, seks bebas, narkoba dan sebagainya. Kasus-kasus seperti diatas menyebabkan adanya pertanyaan terhadap peran pendidikan dalam membentuk mindset dan ahlak peserta didik, masyarakat umum dan bangsa.

Masalah di atas itu terjadi karena adanya anggapan bahwa orang tua itu tidak memperhatikan pada pendidikan anaknya, orang tua mempunyai pendapat bahwa sekolah dapat membentuk anak didik untuk menjadi manusia yang baik, orang tua juga mempunyai asumsi bahwa keberhasilan anak itu cukup dapat diraih dengan cukup memenuhi kebutuhan jasmani anak, sedangkan tanggung jawab anak diserahkan pada pihak sekolah di pasrahkan jangjung jawab anak, sementara para orang tua menjalani kesibukan dan aktivitasnya, akhirnya pendidikan anak tidak diperhatikan.

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memahami urgensi pendidikan agama islam di keluarga hal itu di sebabkan karena keluarga adalah kelompok tempat awal untuk anak dalam interaksi sosial, kemudian anak melanjutkan dengan dunia sekitarnya. Keluarga merupakan tempat awal bagi anak dalam memperoleh pendidikan dan pembinaan. Kemudian lingkungan sekolah menerima anak setelah memperoleh dari berbagai pengalaman, sikap serta memperoleh banyak tingkah laku dan keterampilan yang diperolehnya dari keluarga.

perkembangan anak pada masa yang akan datang di pengaruhi oleh pengalaman anak yang di alami di lingkungan keluarga. Kehidupan seorang anak, mulai dari ahlak, budi pekerti, dan adat kebiasaan sehari-hari di pengaruhi juga oleh lingkungan keluarga. Keluarga adalah bagian penting dalam menentukan baik buruknya suatu masyarakat. Keluarga adalah salah satu bagian dasar dan institusi yang paling dicintai dalam islam. pendidikan agama mempunyai urgensi dalam membentuk keluarga yang baik. Pembentukan ahlak

karimah bagi anak di pengaruhi oleh Pendidikan agama islam di lingkungan keluarga, hal itu disebabkan lingkungan keluarga adalah tempat pertama seorang anak mendapatkan pendidikan yang dapat mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu jurnal ini akan membahas tentang “Pembentukan ahlak karimah anak melalui pendidikan agama islam di lingkungan keluarga”.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Darajat berpendapat bahwa “pendidikan agama islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran islam secara menyeluruh”. Sedangkan Ahmad Tafsir memberikan mendefinisikan “pendidikan agama islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang pada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran islam”. Muhammad Fadhil Al-Jamaly memberikan pengertian “pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia.”

Berdasarkan dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan agama islam yaitu suatu ikhtiar dilakukan dengan sadar yang dilaksanakan guru dalam mempersiapkan siswa, agar mereka, memahami dan mempraktikkan ajaran islam dengan berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengertian Lingkungan Keluarga

Keluarga dalam perspektif referensi kamus besar bahasa Indonesia terdiri dari ibu, ayah dengan seluruh rumah, individu-individu yang merupakan lingkungan keluarga di mata publik, kekompakan anggota keluarga, yang sangat esensial di mata publik.

Mengenai definisi keluarga dalam bahasa Inggris, wali atau orang tua dikenal dengan istilah “*parent*” yang artinya wali atau orang tua adalah laki-laki atau ayah, wali perempuan atau ibu. Dari pengertian di atas, sekilas melihat keluarga, yang dapat diuraikan bahwa, unit keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan pengertian keluarga yang luas adalah kesatuan keluarga dengan perluasan berbagai orang lain, baik kerabat, yang masing-masing hidup dalam satu keluarga yang sama dengan kesatuan keluarga itu.

Dilihat dari pengertian keluarga yang tipis dan luas, maka cenderung dianggap bahwa keluarga adalah kumpulan lokal terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang didalamnya terdapat tambahan anggota keluarga dari pasangan suami istri dan orang lain yang dapat tinggal masing-masing dalam satu rumah. sebuah keluarga.

3. Pengertian Ahlak

Akhlahk dalam bahasa Arab secara etimologi adalah struktur masdar (infinitive) dari kata *akhlaqa*, *yukhliq*, *ikhlaqan* yang mengandung makna kepribadian (*as-sjyah*), tingkah laku, tabiat, atau pribadi yang mendasar (*ath-thabi'ah*), kecenderungan atau kebiasaan (*al-thab*). adat), kemajuan besar (al-muru'ah), dan agama (promosi). Kata *khuluqu* juga disamakan dengan toleransi, kesopanan, dan penggambaran sifat internal dan eksternal orang. Sementara itu, sejauh ungkapan, para peneliti sepakat bahwa kualitas ahlak adalah hal yang berhubungan dengan perilaku manusia.

Menurut Gawronky yang dirujuk oleh Shelley et al., kualitas ahlak adalah semua data yang diperhatikan seperti penampilan, perilaku, dan bahkan tanda. Seperti yang ditunjukkan oleh Morisson, kualitas mendalam adalah keseluruhan dari apa yang dicapai seseorang dengan menunjukkan konsekuensi sosial dari perkembangan sosial. Sementara itu, seperti yang ditunjukkan oleh C.H Juld, kualitas ahlak adalah hasil akhir dan merupakan keseluruhan dari siklus formatif yang telah dilalui oleh orang tersebut.

Dari definisi para ahli tersebut dapat di simpulkan bahwa ahlak adalah kesatuan yang kompleks yang terdiri dari aspek psikis dan aspek fisik, kestuan dari kedua aspek tersebut berinteraksi dengan lingkungannya yang mengalami perubahan secara terus menerus dan setelah itu terjadi pola tingkah laku yang khas dan unik.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian.

Ada dua faktor yang mempengaruhi pengaturan kualitas akhlak, khususnya:

1. Faktor dalam adalah faktor yang ada dari dalam diri anak itu sendiri. faktor dalam itu merupakan elemen yang diturunkan atau diwariskan. faktor hereditas adalah faktor yang bersifat alami sejak dilahirkan dan merupakan dampak bawaan dari salah satu sifat yang digerakkan oleh orang tuanya. Misalnya, dengan asumsi seorang ayah memiliki sifat pemarah, maka pada saat itu dapat dibayangkan bahwa ini juga akan diberikan kepada anaknya.

2. Faktor luar adalah faktor-faktor yang terdapat dari luar individu manusia. Faktor luar biasanya merupakan dampak yang berasal dari iklim. Contoh iklim keluarga, iklim sekolah dan iklim daerah setempat. Iklim merupakan komponen yang dapat mempengaruhi atau mengubah karakter seseorang, seseorang yang berada dalam iklim yang baik, ia akan sering melakukan sesuatu yang bermanfaat, jika dibandingkan dengan seseorang yang bertempat dalam lingkungan yang buruk. Misalnya, seseorang yang bertempat dalam lingkungan di mana banyak orang dihancurkan, mungkin juga mabuk.

Ilustrasi salah satu unsur yang mempengaruhi karakter individu dalam pembelajaran adalah iklim sekolah. Misalnya, kelas yang memiliki lingkungan gairah yang kuat (pendidik ramah dan sering berpikir tentang siswa mereka dan selanjutnya berlaku untuk siswa) secara tegas mempengaruhi perubahan mental anak-anak, misalnya, perasaan senang, senang, siap untuk bekerja sama, dibujuk untuk belajar, dan siap untuk mematuhi prinsip-prinsip. Sementara itu, kelas dengan lingkungan penuh gairah yang tidak diinginkan berdampak buruk pada anak-anak, seperti kecenderungan tegang, kesal, lesu untuk meninjau dan bertindak untuk permintaan yang mengecewakan.

Seperti yang ditunjukkan oleh Watson dan Skinner, perilaku manusia adalah konsekuensi dari warisan turun-temurun dan dampak alam atau situasional. Sementara itu, seperti yang ditunjukkan oleh para ahli behavioristik, manusia adalah hewan yang reseptif, yang perilakunya dibatasi oleh faktor-faktor luar.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tinjauan ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu tinjauan dokumenter yang mengacu pada data yang ditulis dari buku, jurnal, tesis, dan dokumen yang terdapat di perpustakaan. Metode pengumpulan data menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Intisari dari kajian jurnal ini adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensistematisasikan data dan fakta untuk menarik kesimpulan yang tegas mengenai masalah peran pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga untuk pembentukan ahlak karimah. Sumber data penelitian ini adalah jurnal, makalah penelitian, tesis, buku, kamus dan sebagainya.

HASIL PEMBAHASAN

1) Pendidikan Agama Islam di lingkungan Keluarga

Darajat memberikan definisi pendidikan agama Islam yaitu merupakan upaya untuk mendorong dan mengarahkan siswa agar secara umum dapat memahami pelajaran Islam secara luas. Sedangkan menurut Ahmat Tafsir mendefinisikan pendidikan agama Islam sebagai arahan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia dapat membina secara ideal sesuai dengan ajaran Islam.

Jadi pendidikan agama Islam dapat diartikan ikhtiar yang dilaksanakan oleh pengajar kepada siswanya, agar mereka dapat menerima, memahami dan mempraktikkan pelajaran agama Islam melalui pengajaran yang tersusun, mendidik atau mempersiapkan latihan-latihan.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Ibn Mustafa, pendidikan agama Islam dalam keluarga yang diberikan kepada anak-anak harus memenuhi pokok-pokok pemikiran pendidikan Islam, khususnya: pertama, akidah, yaitu memperjelas sifat-sifat Allah dan petunjuk-petunjuk kekuasaan-Nya yang harus dimiliki. diberikan di usia keluarga Muslim sesuai tingkat kekuatan mereka. Kedua, pendidikan akhlak, khususnya perintah dan larangan Allah SWT dalam mengawasi hubungan sosial. Orang disebut terhormat dengan asumsi setiap aktivitas mereka sesuai dengan setiap perintah dan larangan Allah.

Dalam kitab *Ilanatuth Tholibin* dijelaskan bahwa wali wajib menunjukkan kepada anak-anaknya sesuatu yang dibutuhkan mukallaf untuk mengetahuinya, sehingga dapat menanamkan rasa percaya diri dalam hati anak-anaknya, seperti menunjukkan tauhid kepada anak-anaknya, misalnya, sifat-sifat yang disyaratkan. Allah, gagasan aneh tentang Allah, gagasan tentang jaiz Allah Allah. Wali juga wajib menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan pesannya kepada semua binatang.

Seperti yang diungkapkan Zakiah Drajat, pembinaan Islami dalam keluarga selama proses perkembangan dan kemajuan anak agar menjadi pribadi yang beriman, bertaqwa dan bermartabat. Maka dari hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melihat dari ayat-ayat yang termuat di dalam surat Luqman Ayat 12-19

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ (٢١) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (٣١)

Terjemah Surat Luqman Ayat 12-13

12. “Dan sungguh, tlah Kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, “Bersyukurlah kepada Allah”. Dan barang siapa bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

13. “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي غَامِثٍ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ (٤١) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَغْرُوبًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٥١)

Terjemah Surat Luqman Ayat 14-15

14. “Dan Kami perntahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu”.

15. “jika keduanya memksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

يَا بُيَّيْنَاهَا إِنَّ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ
بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (٦١) يَا بُيَّيْنَاهَا أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى
مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٧١) وَلَا تَصْعَقْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (٨١) وَأَقِصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْصُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ
الْحَمِيرِ (٩١)

Terjemah Surat Luqman Ayat 16-19

16. “(Luqman berkata), “Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan”. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha teliti”.

17. “Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan sruhlah (manusia) berbuat yang ma’ruf dan cegahlah (mereka) dari yng mungkar dan bersabarlah trhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu trmasuk perkara yang pnting”.

18. “Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karenasombong) dan janganlah brjalan di bumi dngan angkuh. Sungguh, Allah tdak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”.

19. “Dan sederhanakanlah dlam berjalandan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adlah suara keledai.” Dari bagian-bagian tersebut ada beberapa petunjuk yang dilakukan oleh Lukman kepada anaknya yang dapat menjadi teladan bagi wali, khususnya:

- a.) Pendidikan aakidah dan keyakinan (ayat..13). Di bagian 13, Luqman memasukkan kta menghindari dlam mnasihati anknya agar dia tidak menghubungkan kaki tangannya dengan Allah.
- b.) Pendidikan ahlak dan moral (ayat 14, 15, 18, 19). Dalam hsl ini Luqman menunjukkan etika anak-anaknya, khususnya etika anak kepada wali, kepada orang lain, dan budi pekerti untuk segala maksud dan tujuan.
- c.) Pendidikan agama dan ibadh (ayt 17). Pda ayat 17, Luqman mnasihati anaknya untuk memohon. Hal itu berdasarkn asumsi bahwa anak-anak dibiasakan untuk memohon dlam keluarga sejak dini, maka pada saat itu, anak akan terbiasa melakukan hal ini sampai dewasa.
- d.) Pendidkan individu dan sosial (bagian 17 sampai 19). Dengan asumsi banyak kualitas ketat masuk ke dalam pengaturan karakter individu, perilaku individu itu pada umumnya akan dikoordinasikan dan dibatasi oleh kualitas yang ketat. Kemudian, pada saat itu, ditambah dengan kualitas mendalam yang menyambut individu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat dan menghindari kejahatan, seperti toleransi dalam mengelola berbagai masalah dan kondisi. Kemudian, pada saat itu, karakter ini juga harus ditingkatkan dengan karakteristik yang indah, seperti suara yang ramah, sederhana, lembut dan mempesona.

Adapun pndidikan yang terakhir adalah *amr maruf nahi munkar* (*amr ma’ruf nahi munkar*). Terlebih lagi, istilah tulang punggung dan pelatihan toleransi menyiratkan bahwa anak-anak wajib gigih dan sabar, keduanya merupakan karakteristik yang tdak dpat dibedakan untuk mencapai segalanya, termasuk keyakinan.

Jadi ada tiga macam pendidikan agama Islam yang ada lingkungn keluarga, khususnya: pndidikan akidah, pendidikan ibadah dan pndidikan ahlakul karimah.

2) Penanaman Agama Islam di Lingkungan Keluarga

Penanaman Islam dalam keluarga dapat dilakukan melalui teknik/strategi antara lain:

1. akomodasi. Misalnya membiasakan anak-anak untuk melaksanakan shalat maktubah (lma waktu stiap hari, brpuasa pada buln Ramadhan.
2. demonstrasi atau praktik. Contoh anak muda melakukan olahraga, misalnya mengadakan latihan mandi, memohon, tayamum, adzan iqomat dan lain-lain.
3. teladan. Misalnya, para wali memberikan teladan bagi anak-anaknya untuk berdoa dalam berkumpul di masjid, bersikap bijaksana, dll
4. Perintah dan larangan. Contoh dari ketertiban ini bisa melalui menasihati anak muda untuk melakukan kesalehan dan memiliki etika yang besar. Pembatasan tersebut dpat berupa mencegah anak mlakukan perbuatan trcela.
5. Penghargaan dan hkuman. Ilustrasi penghargaan adalah orang tua memberikan hadiah kepada anak dengan asumsi anak tersebut dapat melaksanakan puasa slama satu blan penuh di bulan Ramadhan. Sebuah ilustrasi dari disiplin adalah bahwa wali memberikan disiplin sebagai malapetaka yang tidak berbahaya bagi seorang anak berusia 10 tahun yang tidak berdoa lima kali setiap hari.

Penanaman Islam dlam lingknngan keluarga dpat dilakukan melalui beberapa strategi antara lain: akomodasi, demostrasi atau praktik, teldan, perintah dan larangan, penghargaan dan hukuman.

3) Pembentukan Ahlak Karimah Melalui Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Keluarga

Sebagaimana ditunjukkan oleh rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia, keluarga terdiri dari ibu, ayah dan seluruh keluarga, individu-individu keluarga yang menjadi lingkungan di mata masyarakat, dan kekompakan anggota keluarga, yang sangat mendasar di mata masyarakat.

Keluarga dapat dicirikan sebagai wilayah lokal terkecil yag trdiri dari ayah, ibu dan anak-anak sbagai anggota keluarga dari pasangan dan orang lain yang dapat hidup masing-masing dalam sebuah keluarga.

Pendidikan Islam yang ketat dalam iklim keluarga berperan penting dalam pembentukan pribadi yang baik karena keluarga merupakan tempat utama bagi anak-anak untuk membentuk karakter mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh M.I Soelaeman, salah satu unsur keluarga adalah kapasitas yang ketat, mengandung arti bahwa keluarga berkewajiban untuk menghadirkan dan menyambut anak-anak dan kerabat lainnya ke kehidupan yang ketat. Untuk melakukan ini, wali harus membangun lingkungan yang ketat dalam keluarga.

Pendidikan yang ketat adalah pelatihan yang harus diberikan oleh keluarga kepada anak-anak sejak kecil. Hal ini dikarenakan karakter anak masih sederhana dibentuk dan anak masih banyak dipengaruhi oleh iklim keluarga. Mengingat pentingnya iklim keluarga, pelatihan ketat yang merupakan pengajaran mendasar harus dimulai dari keluarga oleh wali. Pelatihan yang ketat dalam iklim keluarga penting karena merupakan penanaman kualitas perasaan perspektif hidup yang nantinya akan menaungi pergantian peristiwa fisik dan ilmiah mereka, seperti halnya pengembangan mentalitas yang nantinya akan berubah. menjadi alasan mengenai instruktur dan informasi di sekolah.

Pendidikan agama memiliki urgensi penting dalam membentuk generasi di waktu yang akan datang. Pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam pembentukan ahlak anak hal itu disebabkan lingkungan keluarga adalah tempat awal anak menerima pendidikan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak nantinya. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana individu berinteraksi satu sama lain. Dari interaksi dengan lingkungan tersebut individu pertama kali memperoleh ciri-ciri dasar dan unsur-unsur tingkah lakunya. Agar anak memiliki akhlak yang baik dan terhindar dari pelanggaran ahlak, maka diperlukan adanya pembinaan agama sejak kecil bagi anak dalam keluarga. Pendidikan agama Islam dalam keluarga juga dapat membekali anak dengan ilmu agama dan keberagaman budaya Islam yang sesuai dengan usianya sehingga dapat membantu mereka mengembangkan sikap religius yang terhormat. Pengasuhan anak di lingkungan rumah akan memberinya kemampuan untuk membuat keputusan dalam konteks yang berkembang pesat ini. Keluarga yang beragama Islam merupakan keluarga yang memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik penerusnya agar terhindar dari bentuk-bentuk perbuatan yang menyimpang. Oleh karena itu, peningkatan model pengasuhan anak dalam keluarga merupakan suatu kewajiban dan harus mendapat perhatian yang serius.

Proses pendidikan nilai-nilai agama untuk membentuk kepribadian anak bisa dimulai sejak kecil hingga dewasa. Pada dasarnya pendidikan agama Islam

dalam keluarga itu memuat tiga hal, yaitu: pendidikan tauhid/akidah agar anak beriman akan adanya Tuhan dan dapat mengenal Tuhan dengan benar dan menjauhi yang tersesat. Pendidikan tentang ibadah, misalnya anak usia tujuh tahun disuruh shalat, puasa, dll. berpedoman pada nilai-nilai moral seperti bertutur kata, berpakaian rapi, dan mudah bergaul dan sebagainya.

Pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga mempunyai urgensi dalam pembentukan ahlak anak karena lingkungan keluarga merupakan tempat awal anak memperoleh pendidikan yang dapat memberikan dampak pada perkembangan selanjutnya. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk ahlak dan moralitas individu. Proses pembentukan ahlak yang baik di lingkungan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dimulai sejak kecil hingga dewasa. Pada dasarnya pendidikan agama Islam dalam keluarga terdiri dari tiga hal, yaitu: pendidikan akidah, pendidikan ibadah, dan pendidikan ahlakul karimah. Dengan pendidikan tersebut, anak-anak di lingkungan keluarga akan membentuk ahlak anak menjadi manusia, yaitu manusia yang berhubungan baik dengan Allah (*hablumminallah*) dan manusia yang berhubungan baik dengan manusia dan alam (*hablumminannas wal alam*). Proses pendidikan nilai-nilai agama dalam membentuk ahlak anak dapat dimulai sejak dilahirkan sampai dewasa. Pada dasarnya pendidikan agama Islam dalam keluarga itu memuat tiga masalah yaitu: pendidikan tauhid/akidah sehingga anak memercayai dan yakin adanya Allah dan dapat mengenal Allah dengan benar dan jauh dari kesesatan. Pendidikan ibadah misalnya yaitu anak usianya tujuh tahun di perintah melaksanakan shalat, puasa dan sebagainya dan pendidikan ahlakul karimah misalnya seorang anak ditamkan sifat-sifat yang terpuji contoh kejujuran, keadilan, sabar dan sebagainya, kemudian anak dibimbing agar mengetahui dan mempraktikkan nilai-nilai moral seperti cara bertutur yang baik, berpakaian yang baik, bergaul dengan baik dan sebagainya.

Pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga itu mempunyai urgensi dalam pembentukan ahlak karimah anak hal itu disebabkan lingkungan keluarga adalah tempat awal untuk anak menerima pendidikan yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Keluarga adalah lingkungan pertama untuk membentuk karakter dan ahlak individu. Proses pembentukan ahlak karimah di lingkungan keluarga dengan pembinaan nilai-nilai agama dimulai ketika anak dilahirkan sampai dewasa. Pada dasarnya pendidikan agama Islam dalam keluarga terdiri dari tiga hal, yaitu: pendidikan akidah, pendidikan ibadah, dan pendidikan ahlakul karimah. Dengan pendidikan tersebut, anak-anak di lingkungan keluarga akan membentuk ahlak anak menjadi manusia, yaitu manusia yang berhubungan baik dengan Allah (*hablumminallah*) dan manusia yang berhubungan baik dengan manusia dan alam (*hablumminannas wal alam*).

SIMPULAN

Ada tiga macam pendidikan agama Islam yang ada lingkungan keluarga, yaitu pendidikan akidah, pendidikan ibadah dan pendidikan ahlakul karimah

Penanaman Islam dalam lingkungan keluarga dapat dilakukan melalui beberapa strategi antara lain: akomodasi, demonstrasi atau praktik, teladan, perintah dan larangan, penghargaan dan hukuman

Pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga itu mempunyai urgensi dalam pembentukan ahlak karimah anak hal itu disebabkan lingkungan keluarga adalah tempat awal anak mendapatkan pendidikan yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan berikutnya. Keluarga adalah lingkungan pertama untuk membentuk karakter dan ahlak individu. Proses pembentukan ahlak karimah di lingkungan keluarga dengan pembinaan nilai-nilai agama diawali sejak lahir hingga mencapai dewasa. Pada dasarnya pendidikan agama Islam dalam keluarga terdiri dari tiga hal, yaitu: pendidikan akidah, pendidikan ibadah, dan pendidikan ahlakul karimah. Dengan pendidikan tersebut, anak-anak di lingkungan keluarga akan membentuk ahlak anak menjadi manusia, yaitu manusia yang berhubungan baik dengan Allah (*hablumminallah*) dan manusia yang berhubungan baik dengan manusia dan alam (*hablumminannas wal alam*).

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd. Pembaharuan Pesantren. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2006.
- Abdullah. Safarina Hd. Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Alfiani Dwi Anita, Rusman Maman, *Implementasi Pendidikan Agama Islam Pada Keluarga (Studi Kasus Pengembangan Karakter Kepribadian Anak di MI Al-Wasliyah Sumber Kabupaten Cirebon)*. Jurnal Pendidikan Guru MI, Vol. 4 No.2, Oktober 2017.
- Aunillah, Nur Isna. Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter Di Sekolah. Yogyakarta: Laksana. 2011.
- Daryanto. Aris Dwicahyono. Pengembangan Perangkat Pembelajaran. Yogyakarta: Gava Media. 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Desmita. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012 Fitri, Agus Zaenul. Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Djaelani Solikudin, *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah WIDYA, Vol. 1 No. 2 Juli-Agustus 2013.
- Fachruddin, *Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-anak*, Jurnal AL-AFKAR Vol. 11, no. 11, Oktober 2013.
- Fitri Yeni Evi, Skripsi, *Peranan Orang Tua Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak di Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017).
- Hamid, Hamdani. Beni Ahmad Saebani. Pendidikan Karakter Perspektif Islam. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2013
- Hj. Tahang Basire Jumri, *Urgensi Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak*, Jurnal Hunafa, Vol. 7, No. 2, Desember 2010.

- Ilahi, Mohammad Takdir. *Gagalnya Pendidikan Karakter: Analisis & Solusi Pengendalian Karakter Emas Anak Didik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014
- Kartono, Kartini. *Psikologi Umum*. Bandung: Mandar Maju. 1996
- Kuntojoyo, *Psikologi Kepribadian*, Kediri : Penerbit Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Mahmudah, Skripsi, *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Terhadap Membentuk Kepribadian Remaja*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014)
- Syahdah Ummu, Skripsi. *Hubungan Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dengan Ahlak Siswa di MTS As-Sa'adah Cakung Jakarta Timur*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010).
- Ulil Amri Syafri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

The Role of Pesantren in Defending Indonesia Republic a Philosophy of Islamic Law Perspective; Case Study of Jihad Resolution

Muhammad Taufiq
mh.taufiq.phd@iainmadura.ac.id
IAIN Madura

Abstrak

Artikel ini fokus membahas peran pesantren dalam mempertahankan Negara Kesantuan Republik Indonesia dalam perspektif filsafat hukum Islam dengan pendekatan studi kasus pada Resolusi Jihad. Artikel ini menggunakan teori filsafat hukum Islam dan metodologi normatif dengan pendekatan studi kasus. Artikel ini berbicara tentang memotret peran dan strategi pesantren sebelum Indonesia merdeka dan setelah Indonesia Merdeka. Dalam mempertahankan Indonesia, pesantren memiliki peran yang signifikan baik sebelum kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Untuk mempertahankan kemerdekaan Pesantren mengeluarkan Fatwa Resolusi Jihad, bahwa Jihad Membela tanah air merupakan kewajiban dengan syarat dan ketentuan sesuai fikih dan termasuk jihad fi sabilillah. Dalam perspektif filsafat hukum Islam ini sesuai dengan lima prinsip maqashid syariah.

Kata Kunci: *pesantren; resolusi Jihad; fikih, jihad fi sabilillah; maqashid syariah*

Abstract

This article focuses on discussing the role of Pesantren in defending the Unitary State of the Republic of Indonesia in the perspective of Islamic Philosophy Law with a case study approach on Jihad Resolution. This article uses the theory of Islamic legal philosophy and normative methodology with a case study approach. This article talks about photographing the role and strategy of pesantren before Indonesia's independence and after Indonesia's independence. In defending Indonesia, pesantren had a significant role both before and after independence. To defend the independence of the Islamic Boarding School, the Islamic Boarding School issued a Fatwa Resolution of Jihad, that Jihad Defending the homeland is an obligation with terms and conditions according to fiqh and includes jihad fi sabilillah. In the perspective of Islamic legal philosophy, this is in accordance with the five principles of Maqashid sharia.

Keywords: *pesantren; resolusi Jihad; fikih; jihad fi sabilillah; maqashid syariah*

Introduction

The *Pesantren* that has existed since the Kapitayan era is a treasure of civilization of the Nusantara. The time before the arrival of major religions such as Hinduism, Buddhism, and Islam. Because of the arrival of these religions, The *Pesantren* changed its form and content depends on characteristics of each religion, but its mission never changed, which is to proliferate moral and spiritual values to the society (Said Aqil Siroj 2015, 3).

The word '*Pesantren*' was derived from the word *pe-santri-an*. The word "*santri*" means pupil in Javanese. The word *santri*, people who always obey the teacher, was derived from the word '*Cantrik*' word (Sanskrit language). *Santri* also considered as a combination of the word *saint* (good man) with the syllable '*tra*' (like to help). Hence, it can also mean 'a place of good human education' (Fatah et. al. 2005, 11).

A *Pesantren* is led by a central figure called 'Kyai'. In Islamic history in Southeast Asia, *Pesantren* in Java, *Surau* in Padang, *Dayah* in Aceh, *Pondok* in Malay Peninsula, and *Phono* in Southern Thailand are the heritage of traditional Islamic education model that still survive to this day (Imtiyaz Yusuf 2000, 2). *Pesantren* has played three crucial roles as an Islamic educational institution. These roles according to Azra and Jamhari transmission of Islamic knowledge, the maintenance of Islamic tradition, and the reproduction of '*ulama*' (Azyumardi Azra 2006, 13).

In Indonesia, the existence of *Pesantren* is in great demand and is even the central product of Islamic thought (Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad 2004, 111-26). In Malaysia, the clerical network that dominates the early history of the Islamic movement is mostly played by the alumni of '*Phono*' and some alumni from the Middle East who have also studied in *Pesantren* (Shukri Ahmad 2001, 97-122). The similar thing also occurred in Southern Thailand where Ponoh has made an important contribution to the development of Islamic studies in Southeast Asia (Ibrahem Narongsaksakhet, 2005). However, the existence of *Pesantren* in some countries where Muslims as minorities, such as in the Mainland of Southeast Asia and the Philippines (Omar Farouk Bajunid, 2010), still need a strive to reinforce the meaning and function of this institution in the eyes of the local governments (Sheilfa B. Alojamiento 2007, 33-78.).

This study uses a historical approach and *maqashid shariah* to put *Pesantren* in a center of Islamic history in Southeast Asia and let boarding school in Indonesia as a model in Southeast Asia in the role of maintaining the independence of its homeland. The focus of this study is the case study of '*Jihad Resolution*' in *Maqashid Sharia* or Islamic Law Philosophy perspective.

The Portrait of Pre-Indonesian Independence *Pesantren*

In Kapitayan era, *Pesantren* has become the center of the community's education in various fields including religion, art, Kanuragan (martial arts), economy and state administration. Therefore, the religious leaders of the colon, the poets and even the princes of the royal candidates and sultans are all educated in boarding schools or Padepokan. The *Pesantren* system is simple, the *Pandita* or *Kyai* cares for students, *Cantrik* or *Santri* in their daily studies (Said Aqil Siroj 2015, 3).

When the *Alawiyin*, descendants of Imam Ahmad ibn Isa Al-Muhajir was from Hadramawt, Yemen arrived to Nusantara delivering the mission of the Islamic message (Muhammad Diya' Shihab & Abdullah bin Nuh 1977, 16). The *Awliya* 'later known as '*Walisongo*' conveyed Islam with a social, polite, moral, ethical, marriage and trade approach. *Pesantren* which were at the time nuanced with Hinduism-Buddhism began experiencing Islamization. The *Walisongo* did not destroy the *Pesantren* and instead they made the *Pesantren* as the center of civilization and they spread Islam from it. Islam was taught in depth widely in the community by studying the book of *babon* in order to create new scholars or great *Kiyai* who continue the struggle of *Walisongo* (Said Aqil Siroj 2015, 3-4).

Pesantren as a means of *Tafaqquh fiddin* (A. Mustofa Bisri, 2015) was the center of Islamic civilization in Indonesia. *Pesantren* applied the basic method of *Kyai* as a Role Model in various knowledge, such as morals and integrity, morality and professionalism so that it could create new various *Ulama*, *Pujangga* and leaders among the influential Sultan in the history of Islam in Indonesia. PakuBuwono VI, Prince Sambernyowo (Mangkunegoro I), Pangeran Diponegoro are great figures who has skilled in politics and was invincible during war. He was giver education on politics in a *Pesantren*.

In 1900, the colonialist devised an ethical policy. It introduced a system of school education that only taught secular sciences and knowledges wich resulted in a dualism education in Nusantara. Education that was originally integrated in *Pesantren* began to separate religion and non religion sciences since the western education system was not familiar with the science of religion, while the *Pesantren* has long integrated both.

The presence of colonial education that was introduced both persuasively and repressively changed the school into a single education that shifts the position of *pesantren*. When politics was directed to the western paradigm, law and political learning was directed to Western-style schools instead of *pesantren* like the sultans before. Responding this, the *Pesantren*

did not voice a total anti *tasyabuh* or non-cooperative politics, rejected all forms of Dutch Culture. Instead, the *Pesantren* continued to run with its own paradigm and still created great figures who cannot be defeated. Almost all the resistance to the Colonial rule was done by the *Pesantren* and its *Santri* (Said Aqil Siroj 2015, 4-5).

The tradition of *Pesantren* was able to spread Islam throughout Indonesia. The characteristic and typical tradition of knowledge in *Pesantren* was able to undermine the Hindu Buddhist kingdoms. *Pesantren* as the center of Islamic civilization in the archipelago has a distinctive foundation of thought that is able to exist from the Kapytan era to this day. According to Al-Jabiri, a living tradition is a tradition deeply rooted in thought, with the notion that the presence of a tradition should not be regarded as merely a heritage of the past, but as a past as well as present that unite with our actions and ways of thinking (Muhammad Abid Al-Jabiri, 1996). With the foundation of thinking and tradition of science, *Pesantren* spreaded rapidly throughout the archipelago.

Pesantren has given birth many national movement figures such as Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari (Muhammad Asad Syihab 1971, 11). Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari had studied in many *Pesantren* such as Wonokoyo Probolinggo *Pesantren*, Langitan Tuban, Demangan Bangkalan Madura, and Siwalan Surabaya *Pesantren*. Then he continued his study to *Mecca Mukarramah* (Zamakhsyari Dhofir 1982, 95).

Hadratus Shaykh Hashim Asyari returned to Indonesia in 1906 AD, and founded the Tebu Ireng pesantren. With the *pesantren* he founded, Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari instilled the spirit of nationalism and patriotism against colonialism that has been rooted for centuries. The grip of imperialism and colonial hegemony against the people was not limited only to birth aspects such as economics, politics and so forth, but more than that, it had affected and controlled their awareness and thought. Therefore, education and *da'wah* were seen as an effective means of triggering peoples's awareness and awakening it from the oppression during that time. Through his teachings and *fatwas*, Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari sowed consciousness to fight and to be free from colonialism and he ultimately succeed in pushing for a physical revolution to achieve an independence of the Republic of Indonesia (Ach Muhibbin Zuhri 2017, 2-3).

Every *Pesantren* actually has the same objectives that is to bring awareness that Islam is *Rahmatan lil Alamin*. Conversely, the effort to realize Islam *Rahmatan lil Alamin* always failed as it was still in Dutch colonial period. According to Hadratus Shaykh Hashim Asyari "rahmatan lil Alamin" will not be

succeed in a nation still being colonized. Therefore, to unify vision, Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari built consolidation with all the *Pesantren* leaders in remote areas to build unity and build the spirit of nationalism to expel the invaders. Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari also asked blessing from his teacher, Habib Hashim Pekalongan and Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan from Madura to establish a religious social organization called 'Nahdhatul Ulama' or NU (Taufik, 2017, 5-6).

By the agreement of the *Habib* and *Ulama*, the Nahdlatul Ulama organization was established on January 31, 1926. Basically, NU became the media to continue the struggle of *Walisongo* who had a vision to realize Islam which is 'Rahmatan lil Alamin' with the mission to unify the Muslims in Indonesia to expel the invaders Netherlands. Based on the Charter, in the theological arena NU embraced Imam Al-Ash'ari and Imam Al-Maturidi. In *fiqh*, NU follows one of imams of the madzhab i.e Imam Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'i, and al-Hambaly. In *Tasawwuf*, NU follow *Tariqah Sufiyah Mu'tabarrah*. NU is a traditional *Pesantren* organization that has characteristics of *I'tidal* (Balanced), *Tawazun* (proportional), *Tawasuth* (moderate), and *tasamuh* (tolerant). NU lives Communally under the principles of Mabadi 'Khaira Ummah and Maslahah Ummat (Lajnah Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama 2007, 37-44).

On 8-14 July 1936, before the independence of Indonesia, NU held a congress in Banjarmasin to respond to the people's worries about the state, government and nation relations. NU conducted a national *ijtihad* by giving the status of the country and the archipelago from the point of view of Islam. Interestingly, in the NU Congress of 1936 in Banjarmasin, Kalimantan, the decision of congress participants or *Muktamirin* entitled "What is the name of our country Indonesia, an Islamic state (Aziz Masyhuri, 1997)?

The *Muktamirin* (congress participants) conducted a study and legal *istinbath* according to NU tradition, which resulted in a decision, thus: In fact, our country of Indonesia classifies as an Islamic State because it was once fully controlled by Muslims although it was once taken by the pagan invaders (Dutch), but the name of the State of Islam is forever, as in the description of the book *Bughyatul Mustarsyidin*: "Every area where Muslims are able to occupy at a certain time, then the region becomes an Islamic area, which is marked by the Islamic law which is used at its time. Although at the time before that event, the power of Islam is cut off by the unbelievers and forbids them to enter it again and drive them out. If the situation is like that, it is called darul harb. It is only the formal form, but not the law (Sayed Abdurrahman Muhammad Al-Masyhur 1994, 254)."

Thus, it is important to note that area of Batavia and, even the entire land of Java (Nusantara) is a darul Islam, because it was once controlled by Muslims, before being controlled by the Dutch pagans. The decision of NU Congress was declared in Banjarmasin on 19 June 1936 as the Nahdlatul Ulama National Struggle Charter (Abdul Mun'im DZ 2011, 54). KH Achmad Siddiq explained that Darul Islam is not mere political system of state administration, but a fully religious term (Islam), more precisely translated as 'Islamic territory'. Then he also explained that NU refused to join the Dutch East Indies militia because according to Islam, to help the colonial law is illegal even to build an Islamic society, and the colonizers must be removed (Mun'im DZ 2011, 52).

By the existence of NU as a social organization, the *Pesantrens* became more united to expel the invaders. NU is a large *Pesantren*, and a *Pesantren* is a small NU. Therefore, the *Pesantren* and NU cannot be separated. *Ukhuwah Islamiyah* (moleh unity), *Wathaniyah* (nationality), *Insaniyah* (humanity) and Spirit of nationalism and patriotism built by Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari who succeeded in burning the spirit of the students and the community to unite to expel the Dutch colonialists. The Dutch reconstruction of Islam replaced it with Customary Law, and the ulama were tightly monitored and controlled until there were various anti-Dutch resistance and struggle (BJ Boland 1982, 12).

The Dutch surrendered to Japanese who also colonized Indonesia in 1942. Japan sought to learn from Dutch's policy so that it was relatively at peace with Islam. However, the prohibition of political activity and religious social organization by Lieutenant General Imamura, Panglima Imamura triggered conflict. Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari and KH Mahfud Shiddiq were arrested by the Japanese for refusing to do the 'Saikere' ceremony of honoring Tenno Haika by bowing towards Tokyo at sunrise. Even Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari forbids NU members from doing that because it is musyrik. Then, there was a massive protest from the *Pesantren* and the community. Finally, Japan released Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari free. After that, Japan turned their act 180 degrees by being very cooperative with Muslims. NU and Muhammadiyah continued their activities to prepare for the independence of the Republic of Indonesia with the formation of Masyumi (Majlis Shura Muslim Indonesia) in late October 1943 (H.J. Benda 1983, 118).

The Role of *Pesantren* in Post-Independence Indonesia

In the Second World War, Japan surrendered to the Allied Forces unconditionally in August 14, 1945. Then, Indonesia proclaimed *de facto* independence on August 17, 1945 (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto 1984, 81-83). Post-independence, the Allied Forces continued to send their military to Indonesia aiming to thwart Indonesia's independence. The Allied Forces Forced Netherlands East Indies led by General Sir Philip Christison arrived in Jakarta on September 16, 1945 (Budi darma et. al. 1986, 112). They had a mission to bring in Dutch Civilian Officials (NICA). The Dutch Indies escaped government that fled to Australia when Indonesia was occupied by Japan. However, there seemed to be a misuse in this mission, as the UK and the Netherlands in the Civil Affairs Agreement (CAA) at Chequers, agreed to restore the presence of NICA in Indonesia to colonize again. In addition, the allied forces under the leadership of Captain Huiyer captain infiltrated to Surabaya using the International Committee's of the Red Cross (ICRC) (Abd. Latif Bustami 2014, 41-53).

Bung Tomo (It is the National Heroine who is Santri Hadratush Shaykh Hasyim Asyari) said that the atmosphere in Surabaya was fully stressful (Bung Tomo 2008, 15). There were some Dutch soldiers who provoked the Surabaya city leadership by erecting the Netherland's national flag to commemorate the birthday of Queen Wilhemina. Then the peak reached on 19 September 1945, when there was a clash between the people of Surabaya with the Dutch troops at Hotel Oranje (Hotel Majapahit), and people's heroic acts by tearing the blue color on the Netherland's flag flying at the top of the Hotel Oranje leaving only red and white (William H. Freederick 1989, 251-259).

That incident also triggered the people want to seize the weapons of the Japanese army on September 23, 1945. At the headquarters of Kampetai Japan, there was a shoot-out incident between the fighters and the Japanese army. Sporadic battles broke out between Japanese soldiers and fighters, as well as fighters with allied forces and NICA in various regions as effort to preserve the previously achieved freedom. President Soekarno sent his envoy to inquire the ruling for fighting for one's freedom to Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari. Responding to this question, Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari responded firmly, that Muslims must defend their homeland against foreign threats (Zainul Milal Bizawie 2015, 206).

President Soekarno asked Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari because he knew he had great influence and his legitimacy in the among the Ulama and santri. Soekarno once again reiterated the meaning of preserving a newly free Indonesia Republic in the perspective of Islamic law. With this answer, Soekarno became stronger and had legal reasons to defend Indonesia's freedom. Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari answer was based on 'Fatwa Jihad' he issued on September 17, 1945 in Tebuireng (*Harian Kedaulatan Rakjat*, 1945). The fatwa can be read as follows:

First, The ruling of fighting against the infidels our freedom is a *fardu 'ain* for every possible Muslem, even to the disbelievers.

Secondly, the ruling of a person who dies in the battle against the NICA and their accomplices is that he is a martyr.

Thirdly, a person who divides our unity today must be killed (Zainul Milal Bizawie 2015, 205).

Based on this fatwa, Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari gathered the Ulama of Java and Madura in the office of the Nahdlatul Ulama Executive Board in Surabaya to confirm the Resolution of Jihad at the Consul meeting held in October 21-22 1945. The important meeting to respond to the tense atmosphere of Surabaya was also recognized by the Commander of Hezbollah Warri KH. Zainul Arifin. The meeting was chaired by KH Abdul Wahab Chasbullah (Hasyim Latif 1995, 53). The meeting concluded with Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari's speech that sparked the struggle and inflame the Resolution of Jihad to maintain independence and defend Indonesia's sovereignty (Saifuddin Zuhri1987, 339-343).

The contents of the Jihad resolution are as follows (Agus Sunyoto 2017, 153):

REPUBLIC GOVERNMENT

RESOLUTION

to take an appropriate action

Resolution of Nahdatul Ulama Representative from throughout Java-Madura

[N.U. Resolution Concerning Djihad fi Sabilillah]

Bismillahirrochmanir Rochim

Resolution:

Major meeting of representatives of the Regional (Consul 2) Nahdatul Ulama Organization throughout Java-Madura on 21-22 October 1945 in Surabaya.

Heard:

That in every Region throughout Java-Madura, There are great desire of Muslims and Alim Ulama in their own places to defend and uphold RELIGION, THE SOVEREIGN STATE OF INDONESIA REPUBLIC.

CONSIDERED:

- a. that to defend and uphold the State of the Republic of Indonesia according to Islamic law, as a duty for every Muslims.
- b. that in Indonesia, citizen of the State is predominantly composed of Muslim.

Bearing in mind:

- a. That the Dutch side (NICA) and Japanese who came have done crimes and cruelties that disturb peace.
- b. That all that is done by them with the intention of violating the Sovereignty of the Republic of Indonesia and Religion, and want to take over this country again which triggers wars wich has sacrificed many human lives.
- c. That the second battle was largely done by the Muslims who felt obliged according to the Religion to maintain the Independence of the State and its Religion.
- d. That in facing the second event, it is necessary to obtain orders and guidance from the Government of the Republic of Indonesia in accordance with the second event.

Decided:

1. To ask the Government of the Republic of Indonesia to take firm stance and action wich is appropriate to the need to counter those who wish to endanger the freedom, religion, th state Indonesia especially to the Netherland and their accomplices.
2. To give a command to continue the fight "sabilillah" for the establishment of the State of the Republic of Indonesia Merdeka and Islam.

Surabaya, October 22, 1945

Hoofdbestuur, Nahdatul Ulama

According to Bizawie, there are two goals which has achieved through the resolution of this jihad. First, as a warning to the government to take a firm stance against foreign powers who did not want indonesia become an indepent country. Secondly, if the warning addressed to the government was not accepted, then the resolution can be a moral base for Hezbollah and Sabilillah soldiers to determine their own stance and action against foreign powers (Zainul Milal Bizawie 2015, 210).

In a short time, the fatwa of Jihad Resolution fi Sabilillah was disseminated by NU consuls which were present through pesantren, mosques, word of mouth and mass media (such as newspapers *Kedaulatan Rakjat* 26 October 1945, *Antara* 25 October 1945. *Berita Indonesia*, 27 October 1945). Copies of this Jihad Resolution were presented to President Soekarno, the head of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, and to Hizubullah and Sabilillah High Headquarters.

The effect of this Resolution was widespread. Besides Hizbullah and Sabilillah, other 'laskar' (fighter) members went to Surabaya. Through his radio channel, Bung Tomo airs the Resolution of Jihad defending to defend the country. The Takbir which was always there in Bung Tomo's speeches accompany was a suggestion from Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari when Bung Tomo visited him in Tebu Ireng (Zainul Milal Bizawie 2015, 215).

On October 24, two days after the Resolution of Jihad was dissued, the 49th Brigade under the Brigadier General Aulbertin, Walter Sothern Mallaby arrived at the port of Tanjung Perak. He brought 5000 Personnel notorious for their brutality who were assigned to disarm the Japanese army. On the next day, there was negotiation between the Indonesian leaders and the Allied Forces, but British troops entered the city and stayed in their defense post. This was a breach of the initial agreement (Agus Sunyoto 2017, 162).

After a tough negotiation, the Indonesians managed to force Mallaby to agree on the 26 October negotiation. The core deal is disarming only on the Japanese army, the British army helps Indonesia in maintaining security, after the Japanese troops were disarmed. However, the agreement was violated. Instead they occupied Kalisosok and released Dutch prisoners without the permission of the Surabaya government. On October 27, Britain distributed pamphlets to residents of Surabaya and East Java to surrender weapons (Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI 1998, 50).

The British action sparked a spirit of “Resolution of Jihad” to rebel unfairness action of British. Sunday 28 October, santri, youth, police, Hezbollah troops, Sabilillah and TKR prepared to wait for war command from Komanda General Mayor Yonosewoyo. The Command is to invade the posts of the allied forces. All Batlyon and the companies in Surabaya attacked the posts of the allied forces (Departemen Pendidikan 1984, 106).

On October 29, Captain Flower has been hoisting a white flag, but he was still pinned down by the Indonesian fighters. Mallaby contacted British troops in Jakarta for help. The Indonesian leaders in Jakarta did not really want to have an armed confrontation against England. Therefore, on the next day, President Soekarno met Allied Forces in the Surabaya Governor’s Office, with tough negotiations resulting in a decision that the ceasefire of the battle was actually over, on October 30, 1945. General Mallaby was devastated by being halfhearted about the deal. Indonesian-English entourage to International Building, the last British defense post. The Indonesian side wants to deliver the agreement, but inside the building. General Mallaby, who was in the car, was bombed by a santri of Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash’ari named Harun. Mallaby’s death left the British angry and furious. Lt. Gen. Phillip Christison, the AFNEI commander threatened the people of Surabaya to surrender. Among those who defied the AFNEI commander was the santri, and pesantren who composed their power thought Hezbollah with the spirit of ‘Resolution of Jihad’ which fueled the resistance and courage to face martyred (Ahmad Baso at. al., 68-69).

Division V of the British-Indian soldiers landed in Surabaya with 24,000 troops well equipped with modern weaponry. On November 9th, the British issued an ultimatum for Indonesia to surrender and give up their weapon. Various attempts by the Government of Indonesia have been made to revoke the ultimatum but they were rejected. Through RRI, Governor Soerjo broadcasted the results of negotiation with British, and advised the people of Surabaya to maintain a spirit of unity and unity to fight against the British in the next day. The British ultimatum in fact did not fade the spirit of the ‘Resolution of Jihad’. On November 9 and 10 there was not a person, santri, laskar-laskar, TKR (Indonesian Army) who slept. They were always ready to fight to defend their homeland by setting up barricade. In the midst of tension in that night, thousands of students and fighters of various organization gathered in Kampung Blauran Gang V. They queue in turn waiting for *du’a* water from a scholar from Banten, KH Abbas Jamil (Agus Sunyoto 2017, 205).

Frank Palmos noted the contribution of *Ulama* in mobilizing the people of Surabaya and surrounding areas. Including the figure of Ulama who gave water proof water to the fighters. In fact, after giving a *du'a*, this Kiai accompanied the warriors advancing to the frontline (Frank Palmos 2016, 346). In a note of Osman Raliby quoted by Chairul Anam. "... the scholars and magicians are always at the forefront of all our battles. The inner strength of the experts at the time greatly hindered the progress of the enemy movement (Choirul Anam 2017, 369)."

William H Frederick considers that the great battle in Surabaya on 10 November in Surabaya is the most destructive battle because of the failed prediction of Major General E.C. Mansergh. Mansergh predicted that Surabaya would fall within three days, because the santri, laskar, community and TKR will retreat out of town after 100 days of fighting. The four-day war on 26-29 succeeded in defeating 2000 British troops and there are only 300 Indonesians dead. Gugun EL-Guyanie explained that there were two impacts of Jihad Resolution for Indonesia. First, as political impact, the resolution of jihad gives the legitimacy of the religious defense of the nation and the State, and the second impact is military one. The Resolution of jihad gave the spirit of Jihad fi Sabilillah to anyone who was fighting in Surabaya (Gugun el-Guyanie 2010, 100).

Resolution of Jihad in Maintaning Indonesia Philosophy of Islamic Law Perspective

Maqashid Shariah as philosophy of Islamic law (Jasser Auda, 2008) has term '*al-Muhafadzah ala qodimi al-sholih, wal akhdzu bil jadidi al-ashlah*' , or 'preservation of the best of the old traditions, and adopting the more relevant new traditions'. *Maqashid Shari'a* is the study of the establishment of Shariah law on the achieving of *maslahat* (Taufiq, 2020) and prevention of the *mafasadah*, so that the *Mujtahid* can do an exploration to make legal certainty when is no rules on a particular matter in the sharia text (Ahmad Shaleh Bafadhal 2013, 2). *Maqashid Shariah* is the objectives laid down by the Islamic Shariah to bring benefits to a lot of people (Ahmad Al-Raysuny 2015, 251).

In *maqashid shari'a* Islam, there are rules of *kulliyah*. The rules of *kulliyah* include *al-dharuriyat* (primer), *al-hajiyat* (secondary) and *al-tahsiniyat* (tertiary) (As-Syatiby 1436 H, 117). *Al-Dharuriyat* is a plural word of *dharury* which means something that is really needed to reach the emergency level. Includes; protection of religion (*hifdz al-din*), protection of life (*hifdz al-*

nafs), protection of mind (*hifdz al-'aql*), protection of lineage (*hifdz al-nasl*), protection of property (*hifdz al-mal*). Maslahat according to the term, Imam al-Ghazali defines by keeping the goal of Islamic law which is summarized in five basic principles (read, *Kulliyatu al-Khamsh*) (Al-Ghazaly 1993, 174). Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Buthy defines maslahat as a benefit which becomes the goal of Islamic law, by upholding religion, keeping the soul, mind, descendants, and property, based on a certain classification (Muhammad Said Ramadhan al-Buthy 2005, 37).

In the perspective of the Maqashid methodology, the jihad resolution in maintaining Indonesia, which is categorized as Sabilillah Jihad is the political ijtihad of Hadratus Shaykh Hashim Asyari. Ijtihad is actually not separated from the congress decision in Banjarmasin 1936 which stated that the territory of Indonesia is Darul Islam so that anyone who colonize and disturb the power of NKRI must be fought. It is based on al-Quran letter al-Baqarah 190 and Prophet's Hadith narrated on Haji Wada' (Ahmad bin Hambal 2001, 285). Then Shaykh Zakariya Al-Ansari confirmed that if the enemy attacks the Muslim territory, then the law of jihad is fardu 'ain (Zakariya Al-Anshari, 178, Muhammad Khair Haikal 1992, 880).

In the perspective of the Maqashid Shariah, according to the author, the Resolution of Jihad is to defend the homeland issued by Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari is merely for Indonesian people. The benefit is to keep the five basic concepts of Maqashid Shariah as follows:

First, Protection of Religion (*hifdz al-din*). Defending the homeland is Jihad fi Sabilillah because Indonesia is Darul Islam which becomes the region to bring the benefit. Jihad is the best means to establish religion. If the law of jihad says that keeping religion is obligatory then the law of jihad in keeping the country is also obligatory because Indonesia is a territory to uphold religion (As-Syatiby 1436 H, 196-198).

Second, Protection of Life (*hifdz al-nafs*). What does it meant to keep Soul here is to guard every person in a country which is guaranteed by Islam, non-Muslims who are obedient to pay taxes and security agreements (Ibnu Qudamah 1405 H, 148). Jihad in defending homeland is a preventive effort of murder due to colonialism. Preventive efforts are actually a means of keeping the Soul (Muhammad Sa'ad bin Ahmad Al-Alyuby, 1436).

Third, Protection of Mind (*hifdz al-'aql*), Jihad in defending the homeland is a preventive action to against colonialism because it can kill educational activities, destroy educational facilities and kill the character of a nation's education (Abdullah bin Ahmad al-Qadiri 1410 H, 114).

Fourth, Protection of Lineage (*hifdz al-nasl*). Jihad to defend the homeland is a truly preventive act towards colonialism in terms of descent. Because colonization can lead to rape, human extinction due to murder and torture (Muhammad Sa'ad bin Ahmad Al-Alyuby, 1436, 247).

Fifth, Protection of Property (*hifdz al-mal*). Jihad to defend the homeland is a jihad to stabilize the country's economy because colonialism resulted in economic instability, looting of property and expropriation of natural resource so that jihad is a means to keep property (Muhammad Sa'ad bin Ahmad Al-Alyuby 1436, 279).

Conclusion

Pesantren is the oldest civilization that must always be maintained, cared for, and developed. Nahdlatul Ulama is an organization founded by Ulama. Habib and Kyai *pesantren* able to inspire and give a real contribution to the independence of Indonesia. By the existence of *Pesantren*, Republic with rich culture, religion, language, and tribes can live together with respect, tolerance, and peace. After Indonesian was declared as independent Country, *Pesantren* contributed significantly in maintaining the state's sovereignty and independence with the "Resolution of Jihad". *Pesantren* able to *ijtihad* factually and actual based on *syariah* and *maqashid syariah* to always keep NKRI. The author deeply regretted, seeing anti-nationalist organizations that damage the NKRI by saying that the Unitary Republic of Indonesia is a system of thogut and there is no *dalil* about nationalism. Those Organizations do not appreciate the contribution of *pesantren*, *santri*, people and heroes who fought to keep indonesia as the independent country. Based on the author's analysis, the authors conclude that the jihad resolution can save the homeland to maintain nationalism which is struggled by Hadratush Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari and his students based on the Qur'an, Hadith, *Shariah* which aims to protect the five basic principles of the philosphy of Islamic law (*Maqashid Shariah*).

REFERENCES

- Abd Latif Bustami. (2011) 'The Acceptance level of International Committee of the red cross in Indonesia's Culture'. *Research Report*. Geneva: ICRC.
- _____. (2014) 'Palang Merah di Negeri Bulan Bintang'. *Jurnal Sejarah dan Budaya*; Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (VIII). 1 Juni 2014.
- Abdul Mun'im DZ. (2011). *Piagam Perjuangan Kebangsaan*. (Jakarta: Setjen PBNU Online.
- Agus Sunyoto. (2017) *Fatwa dan Resolusi Jihad: Sejarah Perak Rakyat Semesta di Surabaya, 10 Nopember 1945*. Jakarta: Lesbumi PBNU dan Pustaka Pesantren Nusantara,
- Ahmad Baso dkk., *KH Hasyim Asyari; Pengabdian Seorang Kyai untuk Negeri*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Ahmad Shaleh Bafadhal. (2013). *al-Muhadarah fi Maqashid al-Syariah*. Tarem, al-Tashwer.
- Al-Ghazaly. (1993) *al-Mustashfa*. Beirut, Dar al-Kotob, I.
- As-Syatiby. (1436 H). *Al-Muwafaqat fi Ushul Fiqh*. KSA: Dar ibn al-Jauzy, VI.
- Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama, Hasil Mukhtar dan Munas Ulama Kesatu-1926 s/d Kedua Puluh Sembilan 1994, (Surabaya: Dinamika press, 1997.
- Azyumardi Azra dan Jamhari. (2006) "*Pendidikan Islam Indonesia Dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Sosio-Historis.*" dalam *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia*, Ed. Jajat Burhanuddin dan Dina Afrianty. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badrut Tamam. (2015) "*Pesantren, Nalar dan Tradisi*" (Jogjakarta: Pustaka Fajar, I.
- BJ Boland. (1982). *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Hague: Verhandelingen KITLV. Volume 59. Revised Edition.
- Budi darma, dkk. (1986). *Pertempuran Surabaya Citra Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Surabaya*. Surabaya: Panitia Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan 10 november 1945.
- Bung Tomo. (2008). *Pertempuran 10 November 1945; Kesaksian dan Perjalanan Seorang Aktor Sejarah* Jakarta: Visi Media.
- Choirul Anam. (2017). *KH. A. Wahhab Chasbullah: Hidup dan Perjuangannya* (Surabaya: Duta Aksara Mulia.

- Departemen Pendidikan. (1984). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Timur, (1945-1949)*, Surabaya.
- Dr. Abdullah bin Ahmad al-Qadiri, (1410 H). *Al-Islam wa Darurati al-Hayah*, (Jeddah: dar al-Mujtama', II.
- Dr. Ahmad Al-Raysuny, (2015). *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, Cairo, Dar al-Kalema, V.
- Dr. H Ach Muhibbin Zuhri, M.Ag. (2017). *KH. Hasyim Asyari: Fatwa Jihad & Perjuangan Kemerdekaan*, (Surabaya: Jurnal NU, 11/1.
- Dr. Jaseh Audah. (2008) *Maqashid Syariah as Islamic Philosophy Islamic Law*. (London: The International Institute Islamic Thought.
- Dr. Muhammad Khair Haikal. (1992). *al-Jihad wal Qital fi al-Siyasah al-Syariah*. Cairo, Dar Ibn Hazm.
- Dr. Muhammad Sa'ad bin Ahmad Al-Alyuby. (1436). *Maqashid al-Shariah al-Islamiyah wa alaqatuha bil adillah al-syar'iyah*. KSA: Dar ibn al-Jauzy, VI.
- Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy (2005). *Ḍawabitul al-Maṣlaḥat fi al-Syariah al Islāmiyah*, Dar al-Fikr, Demasyqus, cet. IV.
- Fatah, H Rohadi Abdul, Taufik, M Tata, Bisri, Abdul Mukti. (2005). *Rekontruksi Pesantren Masa Depan*, Jakarta Utara: PT. Listafariska Putra.
- Frank Palmos. (2016). *Surabaya 1945; Sakral Tanahku*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Gugun el-Guyanerie. (2010). *Resolusi Jihad Paling Syar'i*. Yogyakarta: LKIS.
- H.J. Benda. (1983). *The Grescent and the Rising Sun Indonesian Islam under The Japanese Occupation 1942-1945*. (Netherland Holland Dordrech: KILTV Foris Publications Holland.
- Ibrahem Narongsaksakhet. "Pondoks and Their Roles in Preserving Muslim Identity in Southern Border Provinces of Thailand," in Knowledge and Conflict Resolution 2005: The Crisis of the Border Region of Southern Thailand, Ed. Uthai Dulyakasseem dan Lertchai Sirichai. Nakhon Si Thammarat: School of Liberal Arts, Walailak University, The Asia Foundation, The William and Flora Hewlett Foundation.
- Imam Ahmad bin Hambal. (2001). *Musnad Ahmad*. Beirut: Muassasah Risalah, I.
- Isma-ae Alee, et al. (2000). Pattani College of Islamic Studies, Prince of Songkla University.
- Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. (2004). "Metamorfosis Pemikiran Intelektual Muda NU: Suatu Pandangan Dari Outsider NU." Millah 2004),1:111-26.
- KH Hasyim Latif. (1995). *Laskar Hizbullah Berjuangh Menegakkan Negara RI* (Jakarta: LTN PBNU.

- Lajnah Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama, (2007). *East Java, Aswaja An-Nahdiyah*, Surabaya: Khalista.
- M. Taufik Ahaz. (2017) *NU, NKRI & Maqashid Shariah: Sinergi Islam Kebangsaan*. (Jakarta: KMNU, Oktober.
- Muhammad Abid Al-Jabiri, (1996). *Ad-din wa ad-daulah wa tathbiq asy-syari'ah*. (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah Al-Arabiyah.
- Muhammad Asad Syihab, (1971). *Al-Allamah Hasyim Asyari*, Beirut. Dar Shadiq. I.
- Muhammad Diya' Shihab & Abdullah bin Nuh, (1977 M). *Al-Islam fi Indonesia*. (Manuskrip Perpustakaan Hasan Nashruddin Balingka. II.
- Mun'im DZ. (2011). *Piagam Perjuangan Kebangsaan*. Jakarta: Setjen PBNU Online.
- Omar Farouk Bajunid. (2010). "Islamic Education in Mainland Southeast Asia: The Dilemmas of Muslim Minorities," in *Islamic Studies and Islamic Education in Contemporary Southeast Asia*. Ed. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad dan Patrick Jory. Kuala Lumpur: Yayasan Ilmuwan.
- Periksa Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (eds). (1984). *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: PN Balai Bustaka.
- Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA. (2015). *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara menuju Masyarakat Mutamaddin*, Jakarta: LTN NU.
- Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. (1998). *Pertempuran Surabaya*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Saifuddin Zuhri. (1987). *Berangkat dari Pesantren*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sayed Abdurrahman Muhammad Al-Masyhur. (1994). *Bughyatul Musytarsyidin*. Beirut: Dar el-Fikr.
- Sheilfa B. Alojamiento. (2007). "Armed Conflict in Sulu: A Local Perspective," Tambara 24.
- Shukri Ahmad. (2001) "Implikasi Pengaruh Ulama Terhadap Halatuju Perubahan Pemikiran Politik Masyarakat Dalam Wilayah Utara Semenanjung Malaysia Dari 1950-an Hingga 1990-An." (Journal of Ushuluddin 14.
- Syamsuddin ibn Qudamah, (1405). *Raudhatu al-Thalibi wa 'umdatu al-Muftiin*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, II.
- Taufiq, M. (2020). A Critique against the Perspective of Al-Thufy on the Contradiction of Maslahat and the Holy Text. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5(2), 121–128. <https://doi.org/10.18326/mlt.v5i2.121-128>

- William H. Frederick. (1989). *Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Zainul Milal Bizawie. (2015). *Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad; Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Pustaka Compass.
- Zakariya Al-Anshari, *Asnay Mathalib*, (Beirut: Dar al-Kutub).
- Zamakhsyari Dhofir. (1982). *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai masa depan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, IX.

Religious Orthodoxy Or Environmental Disaster? Finding The Cause For The Absence Of Figurative Motifs In The Indigenous Textiles Of Lombok

Muchammadun

Department of Islamic Community Development,
State Islamic University of Mataram (UIN Mataram)
muchammadun@uinmataram.ac.id

Abstract

The recent Lombok, Sumbawa and Palu earthquakes and Anak Krakatoa tsunamis (July-December 2018) are a reminder of the devastation that natural disasters inflict on local populations. On Lombok, the earthquake's destruction of Sasak villages disrupted all aspects of community life at a time when many cultural traditions are being lost. Among the recent changes said to have occurred in Sasak weaving is the substitution of geometric and vegetal patterns for motifs depicting human figures and animals. This is often attributed to the influence of Islamic religious reformism in Wetu Telu communities. The paper proposes an alternate explanation for the disappearance of figurative motifs may be the catastrophic volcanic eruption of Mount Tambora (1815) on neighbouring Sumbawa Island. The eruption decimated Lombok's communities, and caused widespread casualties, likely annihilating a generation of weavers who customarily transmitted textile patterns to daughters and granddaughters. The impact of Islamic orthodoxy possibly played only a subsequent secondary role in the stylistic movement away from figurative art at a time when many of those older patterns were already forgotten as a result of the Tambora cataclysm. The paper, based on both field research and surveys of Sasak textiles held in international collections, examines the historical consequence of an environmental catastrophe for communities where indigenous spiritual traditions and Islamic values are expressed in weaving practices. This preliminary investigation examines the example of Sasak ritual textiles, known as usap, and their related forms, whose special relevance are their preservation over generations as treasured heirlooms for use in rites of passage that testify to the compatibility of Islam with indigenous cultural belief.

Keywords: Textile History, Indigenous Belief, Islamic Orthodoxy, Lombok, Tambora, Sasak, Usap, Umbaq, Pesujutan.

INTRODUCTION

During the twentieth century, Lombok acquired a reputation as one of the most strongly Islamic regions in Indonesia (Telle, 2019). As elsewhere in the Muslim world, textiles in the indigenous Sasak communities have “fulfilled more than the functions normally expected of them in other societies (Golombek, 1988).” The value placed on cloth from the time of the Prophet Muhammad has meant that textiles became a favourite metaphor in Islam for faith and piety, where God Himself is understood as the master weaver (Schimmel, 1994).

The earliest converts to Islam on Lombok evidently incorporated pre-existing uses of ritual textiles as a visual semiotic to express the new faith. The significance of textiles on Lombok is such that Cederroth (1992) invokes the term ‘sacred cloth religion’ (*agama umbaq*) to describe spiritual practices of the Wetu Telu sect that maintains many features derived from indigenous ancestral worship. Wetu Telu also contains elements of the Hindu religion that was practiced on the island prior to the arrival of Islam and is still today upheld among immigrant Balinese communities descended from Lombok’s neighboring island (Cederroth, 1992). The *usap* is a supplementary weft-woven textile used in Sasak mortuary, as well as other ceremonies, and the name has various religious associations. It relates to the Indonesian term *mengusap* (to wipe), referencing the ritual washing of the deceased in preparation for burial and also describing the cleaning of graves (Cederroth, 1992). Kartiwa (1986) presents an alternate explanation that *usap* refers to the wiping of the face after ritual prayer (Kartiwa, 1996). Waktu Lima communities, adherents to reformist Islam, often refer to the same type of textile as *pesujutan*, a word derived from *sujut* meaning either the act of prostration during prayer or the actual prayer mat (Maxwell, 2003).

Among the *usap* preserved in major international public and private collections is a small group of unique designs that depict stylised standing figures (Maxwell, 2003). [ILLUSTRATION 1 – NGA *usap*] The figurative motif, often depicted frontally standing in rows, suggests representations of ancestors. Several *usap* depict the figures interspersed with houses further implying a connection to clan or family forebears, as houses are powerful symbols of kinship identity in Sasak society. The significance of the ancestral realm for Sasak people is articulated in a rare surviving sculpture of a human head, carved in a style similar to ancestor depictions in the eastern Indonesian archipelago, crowning a nineteenth century Qur’an box

from Bayan, North Lombok (Bennett, 2011). [ILLUSTRATION 2 – AGSA box] The typical hieratic stance of the *usap* figures evoke similar representational motifs occasionally appearing on songket textiles produced in Bima in the eastern part of neighbouring Sumbawa. Although Sumbawa was under the suzerainty of Makassar during the seventeenth to eighteenth century, with its strong Islamic faith, the island's textiles suggests a shared past with Lombok.

Prior to the early twentieth century there appears to have been an immense variety of interpretations of Islam in Lombok (Hägerdal, 2001). It was the Dutch administration (1894-1942) that first promulgated a definable division between the Waktu Lima and Wetu Telu practices, said to represent the dichotomy between *agama* (religion) and *adat* (custom), through their categorisation of Sasak communities as adherents to either one tradition or the other (Telle, 2014). There is little evidence that doctrinal *dakwah* had an important role in the spread of Islam to Lombok until the late nineteenth century (Hägerdal). Traditional accounts portray the early saints (*wali*) more in the style of masters of the occult who were capable of harnessing unseen forces through their spiritual powers. Datu Wetu Milir, a student of the Javanese *wali*, is said to have introduced Islam from Giri, East Java, in the sixteenth century. Sasak stories celebrate his miraculous deeds, such as the creation of the sacred springs at Lingsar, rather than his role as one of the orthodox ulama. Sasak belief was articulated not through a codified theology but through narratives associated with places that also extended to objects, particularly textiles.

As Kari Telle relates in her study of Sasak architecture (2007), textiles on Lombok existed in a 'domain in which "objects" merge with "people" by virtue of the social relations between persons and things' in pre-modern times (Telle). The late Bapak Satriah, a Sasak ritual specialist from Jonggat, Central Lombok, ascribed the origin of *umbaq* textiles to the supernatural marriage of a Sasak chief (*datu*) and a *jinn* princess. The survival of such narratives passed down as oral histories, like the skills required for the dyeing and weaving of cloths, were dependent on community continuity that is vulnerable to environmental catastrophes. The extent that volcanic disturbances can disrupt local art traditions is demonstrated in the explosion of Krakatoa in 1883 that destroyed Lampung coastal weaving communities, such as Kalianda, and ended the custom of carving monumental *sesako* throne-rests for display in *pepadun* ceremonies (Holmgren, 1989).

Studies on the cultural history of Lombok often overlook the devastating eruption of Mount Tambora located 200km east from Lombok on neighbouring Sumbawa Island (Klingaman, 2013). [ILLUSTRATION 3 – Tambora eruption image] The eruption, lasting from 5–10 April 1815, was ten times more powerful than Krakatoa and killed an estimated 100,000 people globally (Wood, 2014). Within twenty-four hours, the volcano expelled an ash cloud expanding to an area approximately the size of Australia with temperatures possibly dropping as much as 20F (Klingaman, 2013). The catastrophe decimated all aspects of Lombok society and this almost certainly included weaving knowledge and skills.

The resulting loss of skilled craftswomen and textiles surely reduced the variety of patterns available to weavers after 1815. It appears likely this included figurative patterns whose disappearance has been commonly attributed to the effect of changing religious values in the late nineteenth and early twentieth century. Further support for the Tambora theory can be found by examining characteristics of Sasak society. The historical response to Islam was through assimilation into indigenous spiritual practices rather than discarding them. A *lontar* manuscript recounts a story of the two sibling ancestors of the Sasak people. The older brother, Ki Nurcahya, was founder of the Waktu Lima while the younger brother, Ki Nursada, was founder of Wetu Telu traditions (Cederroth). This origin myth articulates Sasak perceptions regarding the ‘brotherly’ compatibility of the new and old beliefs and contextualises the significance of weaving of ancestral textiles such as *usap*.

DISCUSSION

The sasak society and socio-cultural practice of textiles in the historical context

The indigenous Sasak people of Lombok are located in the Lesser Sunda archipelago of eastern Indonesia. The archipelago’s islands share certain underlying Austronesian cultural and spiritual values that are deeply rooted in the pre-historic past. These traits include reverence for the ancestors and affirming an intimate connection between the seen and unseen realms (Fathurrahman, 2017). Sasak people call these beliefs *inen paer*, which may be loosely translated as ‘cosmic balance’, and they encapsulate a holistic view of human interaction with social, physical and spiritual environment. Similar beliefs are deeply embedded within all the Austronesian aesthetic traditions, particularly weaving, that have continued to be meaningful following the arrival of more dominant religions in the archipelago.

The distinction between Wetu Telu and Waktu Lima has led to conflict over the passed hundred years and this has had a considerable impact on art styles in Lombok. Today the distinctions are not always clear as many Wetu Telu communities now embrace reformist Islam while some reformist leaders, whose religious credentials as graduates of Middle East theological studies are impeccable, continue to acknowledge local Sasak customs. The use of textiles for ceremony is much more limited than was practiced one hundred years ago but they still express an important sacred function for the Sasak. Sadly, commercially manufactured fabrics now often replace old hand-woven heirloom cloths that have been sold or lost. This is despite the ritual power attributed to the arduous task of dyeing and weaving hand-spun cotton. The substitution with shop-purchased fabric is seen at the Kemaliq complex of Lingsar springs. [ILLUSTRATION 4 – photo of wrapped Lingsar stones] Naturally weathered stones, said to represent Sasak ancestors, are ceremonially wrapped in machine-woven white synthetic fabric just as occurs in shrines at Hindu temples in Lombok and Bali.

Lombok is often presented as a rare example of a society where a Hindu sovereign and governing caste once ruled over a Muslim majority population. Some early accounts refer to the island already being under the rule of Balinese lords as long ago as the first half of the seventeenth century (Hägerdal, 1998). The Dutch colonial view of an insurmountable socio-religious division between the Balinese rulers and Sasak Muslim subjects derives mainly from European orientalism and the Dutch desire to justify the brutal invasion of Mataram-Cakranegara in 1894 (Hägerdal). Inter-island contact and cultural exchange between Lombok and Bali is almost certainly is far older than either the arrival of Hinduism or Islam. In recent centuries Sasak people who served under Balinese lords comfortably identified themselves 'Balinese' while a nineteenth century European visitor observed the differences between the two ethnic groups were so slight they may have originated from the 'same stem' (Hägerdal, 2001). The presence of the Balinese had a profound cultural impact on Lombok as documented in the Sasak textile traditions discussed below.

There is still further research to be conducted into the heritage of Lombok textile art yet the powerful forces of globalization mean that the circumstances supporting the creation of quality Sasak textiles are increasingly fragile and threatened (Ekbis NTB, 2018). The commercialisation of songket weaving techniques, and the replacement of designs with factory printed versions, has led to the inevitable disappearance of spiritual and esoteric meaning.

During the late Dutch East Indies period much scholarship investigating Sasak ritual cloths focussed on the linguistics of weaving terminology rather than the oral histories articulating the significance of individual patterns and cloths (Cederroth,). The rapidity of loss surrounding this knowledge is documented in the example of a group of North Lombok cloths identified as *ragi lempot* in 1925 but which were unrecognisable to local informants fifty years later (Cederroth,).

the figurative style in sasak textiles and its wider contextualization

Robyn Maxwell in her seminal 2003 study of Southeast Asian textiles proposes that ‘changes in religious beliefs have affected [Lombok] textiles... the patterns on the Sasak cloths have become far simpler and figurative scenes have given way to geometric and schematic patterns (Maxwell,). [ILLUSTRATION 5 – AGSA usap] Nevertheless, information documenting the development of Sasak textiles before the nineteenth century is fragmentary (Hägerdal). Thus it is difficult to verify this connection between changing religious belief and changing styles. Anecdotal accounts by individual Sasak weavers attributing the phenomenon of change to religious piety may not always reflect general historical trends.

Determining a precise chronology for the age of surviving figurative *usap* patterns is possible through the C-14 radiocarbon testing of cloths. To the authors’ knowledge no *usap* has yet been dated scientifically as the procedure is expensive and invasive of the fabric body. Nevertheless, radiocarbon testing of textiles found in other parts of Indonesia has revealed dates of creation far older than many scholars had anticipated. These test results include an indigo batik cloth, likely Javanese, dated fifteenth to sixteenth century now in the collection of the Art Gallery of South Australia. Similar C-14 dates have been recorded for a South Sumatran weft ikat cloth and West Timorese sash, both in the Mary Hunt Kahlenberg Collection, among other examples.

Lombok *usap* display many similarities to square *tampan* (ship cloths) from Lampung and this includes the use of both figurative and geometric patterns Gittinger, ‘A reassessment of the tampan of South Sumatra’ in Mattiebelle (Gittinger, 1989). Significantly, scientific tests made on several square *tampan* (ship cloths) from Lampung in the collection of the Tropenmuseum have produced dates ranging from the fifteenth to eighteenth century (Hout, 2017). The damaged weave and darkened dyes of the Tropenmuseum cloths is very similar in appearance to a number of surviving *usap*. Future C-14 radiocarbon testing of the Lombok textiles may be expected to reveal dates much older

than the nineteenth to early twentieth century period usually attributed to them. This is especially likely as Sasak families customarily preserved *usap* as sacred heirlooms (*pusaka*) over generations (Golombek).

Historical sources testify that Lombok was not an underdeveloped cultural backwater prior to the Dutch invasion in 1894. The importance of textiles in pre-modern Sasak society is documented in an early seventeenth century Dutch report stating that Javanese frequently purchased cotton cloth from Lombok (Hägerdal:75). The island was very much part of the cosmopolitan *pesisir* world of the archipelago, including its textile fashions, in the sixteenth to eighteenth century. *Babad Lombok* makes repeated references to Lombok's contacts with surrounding islands in the archipelago and one unique early surviving *usap* features a depiction of a figure in a boat. [ILLUSTRATION 6 – Abbott *usap*] As well as having close trade contacts with Java and Bali, Lombok's connections extended as far as Pattani on the Malaysian peninsula (Hägerdal, 77). *Babad Lombok* describes Javanese *dodot* garments as obligatory dress for Sasak lords when appearing at court (Suparman, 1994). The *dodot* were likely either Javanese batik or Indian trade cloth copies of the Javanese garment that featured geometrical and floral patterns. The complexity of cultural interaction between Java, Bali and Lombok recognised shared values that acknowledged the ritual importance of textiles, the most archaic of which were remarkably similar in appearance. Such is the significance attributed to heirloom *umbaq* among Sasak people that the late Bpk Satriah commented: 'It is better to bury such a cloth in the graveyard than sell it (Museum and Art Gallery of the Northern Territory, 2005). An almost exactly similar style of sacred striped textile is found in Bali where it is known as *bebali*. Hauser-Schäublin et al (1991) suggests both the Lombok and Balinese cloths derive from a shared source in Majapahit textile traditions of the East Javanese Hindu-Buddhist period (Schäublin, 1991). [ILLUSTRATION 7 – AGSA or NGA *bebali*]

Islamic reformism and sasak textile patterns

It is tempting to assume that the geometric and floral patterns appearing on many surviving *usap* document the influence of Islamic proscriptions against the depiction of figurative forms. However, the Waktu Lima movement only gained strength in the north and west of the island in the second half of the twentieth century long after when most surviving *usap* were woven. Although a Dutch anthropologist in 1941 commented on the 'divisive conflict' between

the two sects, it was not until the upheavals following 1965 fall of President Soekarno that Islamic reformism became ascendant through exploiting anti-communist rhetoric to oppress Wetu Telu adherents (Cederroth, 1992). During this period vast numbers of Wetu Telu ritual textiles and other art objects were destroyed (Cederroth, 1981). Reformism increased in further prominence after the collapse of the New Order in 1998 and has continued to determine religious discourse on the island until the present.

Many geometrical *usap* were inspired by Indian textile designs imported into Indonesia by the Dutch East India Company (1602-1800) or by subsequent nineteenth century European factory-printed copies. The exchange in the India textiles, as part of the spice trade, ensured their wide distribution throughout the Indonesian archipelago. A magnificent surviving ritual textile, consisting of nine panels, each in the style of a *usap* cloth, from Central Lombok, displays elegant *wayang* figures holding umbrellas and accompanied by animals (Holmgren and Spertus, 1989). [ILLUSTRATION 8 – Holmgren and Spertus 1989] Notably, one panel features the direct copy of an Indian geometric pattern also copied by weavers in Bali, Lampung and elsewhere. Indian floral chintz was also imported into Lombok and their popularity is testified in the sculptures of Arab, Chinese and South Asian persons decorating the ‘floating pavilion’ (*bale kambing*) at Taman Mayura, Cakranegara. A variety of chintz patterns embellish the garments of the statues. It is likely that the Sasak weavers interpreted the Indian designs, and their local versions, with their own local symbolic meanings. [ILLUSTRATION 9 – MAGNT *usap*, 10 – AGSA trade textile] It was the Sasak tendency to conceptualise their worldview through arboreal references that privileged botanical imagery in many aspects of cultural expression, including textiles (Telle, 2009).

Other designs on Sasak *usap* may owe their inspiration to Balinese textiles produced in West Lombok (Hägerdal, 1998). There was a long history of Sasak women marrying Balinese men or being procured as household slaves whose tasks included the production of cloth (Telle, 2009). As weavers, they presumably adopted and copied motifs from Balinese textiles. Balinese songket textiles rarely depicted figurative motifs, such as gods, demons and heroes, before the early twentieth century (Schäublin, 2018). The popularity of geometric and stylised floral textiles patterns is documented in a surviving photograph of Balinese aristocrats in Lombok. [ILLUSTRATION 11] Hence, Islamic orthodoxy may only have exerted a minor role to the stylistic evolution of patterns. An alternate explanation needs to be sought for the small number of figurative motifs found in Lombok *usap* and this may be the Tambora volcanic catastrophe.

Tambora eruption and its consequences

In 2004, a joint-team of Indonesian and American European archaeologists commenced excavations at Desa Oibura at the foot of Mt Tambora (wikipedia.org, 2018). The present day village is on the site of a considerable sized settlement buried under a three-metre layer of volcanic ash and pyroclastic flow deposited by the 1815 eruption. Among the various domestic artefacts uncovered in the excavation, the remains of back-strap weaving tools were found at each dwelling site (Geria, 2012). [ILLUSTRATION 12 – excavation photo] The number of weaving implements uncovered at Desa Oibura testifies to the important role of textile production in Tambora's communities. Contemporaneous European accounts record the production of cotton and indigo dye production for inter-island trade. According to an eyewitness account by the Raja of Sanggar, shortly after the eruption, only around half-dozen people out of a population of 10,000 inhabitants of Tambora survived (Stamford, 1988). The three West Sumbawa kingdoms of Tambora, Pekat and Sanggar totally disappeared and the local pre-Austronesian language of Tambora was lost forever (Geria, 1984). Today nothing is known of the designs and techniques of Tambora textiles before the destruction wrought by the volcano.

Tambora's eruption was so powerful that the reverberations on the first day resounded in Cirebon in West Java. By the evening of the next day the explosions of lava from the mountain had intensified enough to be heard as far away as Bengkulu (1800 km), and even further, in Sumatra as well as in Borneo, South Sulawesi and Maluku (1400 km) (Stothers, 1984). The eruption produced a volcanic ash cloud that extended 1300 km. Within an area covering 600 kms at least there was utter darkness during daylight hours for several days. In the following weeks over one hundred thousand people died from the eruption and its consequences (Wood, 2014). Tambora altered global climates so dramatically that 2015 became known in Europe as the 'year without summer'.

Thomas Stamford Raffles in his monumental *History of Java*, published in 1817, recounts the report of an English officer, Lieutenant Owen Phillips, who investigated West Sumbawa shortly after the eruption. Phillips described the scene: 'The extreme misery to which the inhabitants have been reduced is shocking to behold... villages are almost deserted and the houses fallen down, the surviving inhabitants have dispersed in search of food (Raffles, 1988). Due

to the prevailing winds at the time of the eruption, the direst consequences of the eruption were felt west of Tambora where falling ash produced a layer 60cm thick on Lombok and 30 cm on Bali (Stothers, 1984). A Dutch traveller, H.A. van den Broek writing in 1835, twenty years after the eruption, observed how the ash-rain caused widespread crop failure, epidemics and starvation on Lombok (Bloch, 2007). It is estimated as many as 44,000 people died on the island while perhaps 100,000 migrated as environmental refugees to Java in the aftermath (De Boer, 2022).

This devastation of Sasak communities certainly had a dramatic effect on the textile practices of the island where weaving skills and patterns were customarily passed down from mother to daughter. Not only is it probable that a generation of weavers were lost but valuable loom equipment, such as excavated at Desa Oibura, as well as many cloths and the pattern sticks that recorded the designs were also destroyed in the cataclysm (Holmgren, 1989). This likely resulted in the disappearance of many motifs, including the figurative patterns of *usap*.

CONCLUSION

The history of *usap* and *umbaq* is a salutary reminder of the need for caution when attributing Islamic influence to textile patterns. The apparent antiquity of the figurative motifs on surviving *usap*, possibly predating the 1815 eruption of Tambora volcano, suggests the cloths were woven prior to the ascendancy of reformist Islam. The loss of the figurative tradition may be due to the Tambora catastrophe and its impact destroying the continuity of weaving traditions on Lombok.

Our knowledge of the historical development of indigenous Sasak textiles requires further investigation, especially considering the potential for C-14 radiocarbon dating of old cloth samples. It is a reminder that the study of Indonesian textiles cannot be separated from environmental history. Natural disasters, such as volcanic activity, earthquakes and tsunami, profoundly affect communities. Interdisciplinary research can assist us to better understand the complex interrelationship between art and religion, when seen in the context of nature's uncertainty, as most certainly occurred for the Sasak people of Lombok following the eruption of Tambora.

REFERENCES

- Barnes, Ruth and Mary Hunt Kahlenberg, 2010, *Five Centuries of Indonesian Textiles*, Munich: Delmonico Brooks Prestel.
- Bennett, James, 2011, *Beneath the Winds: Masterpieces of Southeast Asian Art from the Art Gallery of South Australia*, Adelaide: Art Gallery of South Australia.
- Bennett, James and Russell Kelty, 2015, *Treasure Ships: Art in the Age of Spices*, Adelaide: Art Gallery of South Australia.
- Bloch, Peter, 2007, *Mads Lange: The Bali Trader and Peacemaker*, Denpasar: The Bali Purnati Center for the Arts.
- Cederroth, Sven, 1981, *The Spell of the Ancestors and the Power of Mekkah: A Sasak community on Lombok*, Gothenburg: Acta Universitatis Gothoburgensis Goteborg.
- Cederroth, Sven, 1992, *A Sacred Cloth Religion? Ceremonies of the Big Feast Among the Wetu Telu Sasak (Lombok, Indonesia)*, Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies
- De Boer, Jellie Zeilinga and Donald Theodore Sanders, 2002, *Volcanoes in Human History: The Far Reaching Effects of Major Eruptions*, Princeton: Princeton University Press.
- Fathurrahman, H.L Agus, 2017 *Kosmologi Sasak Risalah Inen Paer*. Mataram: Penerbit Genius.
- Geria, I Made, 2012, "Komoditi Perdagangan Kesultanan Tambora Kajian Pendahuluan Hasil Ekskavasi Situ Tambora", *Forum Arkeologi*, 25, no.2 (2012): 117-130.
- Gittinger, Mattiebelle, 1979, *Splendid Symbols Textiles and Traditions in Indonesia*. Washington, D.C.: The Textile Museum.
- Gittinger, Mattiebelle, editor, 1989, *To Speak with Cloth: Studies in Indonesian Textiles*, Lo Angeles: UCLA Museum of Cultural History.

- Golombek, Lisa, 1988, "The Draped Universe of Islam" in Priscilla Parsons Soucek (editor), *Content and Context of the Visual Arts in Islam: Papers from a Colloquium in Memory of Richard Ettinghausen, Institute of Fine Arts, New York University*, 2-4 April 1980, New York: College Art Association of America.
- Hägerdal, Hans, 1998, "From Batuparang to Ayudhya: Bali and the outside world. 1636-1656", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 154, no.1 (1998): 55-94.
- Hägerdal, Hans, 2001, *Hindu Rulers, Muslim Subjects: Lombok in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Bangkok: White Lotus Press.
- Harnish, David D, 2014, "Balinese and Sasak Religious Trajectories in Lombok" in Brigitta Hauser-Schäublin and David D. Harnish, *Between Harmony and Discrimination: Negotiating Religious Identities within Majority-Minority Relationships in Bali and Lombok*, Leiden: Brill.
- Hauser-Schäublin, Brigitta, Marie-Louise Nabholz-Kartaschoff and Urs Ramseyer, 1991, *Textiles in Bali*, Singapore: Periplus Editions.
- Hitchcock, Michael J. and Roana Waterson, 1984, "Is this evidence for the lost kingdoms of Tambora?", *Indonesia and the Malay World*, 12, no.33 (1984): 30-39.
- Holmgren, Robert J. and Anita E. Spertus, 1989, *Early Indonesian Textiles from Three Island Cultures: Sumba – Toraja – Lampung*, New York: The Metropolitan Museum of Art.
- Hout, Itie van, 2017, *Indonesian Textiles at the Tropenmuseum*, Volendam: LM Publishers.
- Kartiwa, Suwati, 1986, *Kain tenun tradisional Nusa Tenggara*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Klingaman, William K. and Nicholas P. Klingaman, 2013, *The Year without Summer: 1816 and the Volcano that Darkened the World and Changed History*, New York: St. Martins Press.
- Kraan, Alfons van der, 1997, "Lombok Under the Mataram Dynasty, 1839-94" in Anthony Reid (editor) *The Last Stand of Asian Autonomies: Responses to modernity in the diverse states of Southeast Asia and Korea 1750-1900*, London and New York: MacMillan Press.

- Lavigne, Franck, Jean-Philippe Degeai, Jean-Christophe Komorowski, Sebastian Guillet, Vincent Robert, Pierre Lahitte, Clive Oppenheimer, Marcus Stoffel, Celine M. Vidal, Surono, Indyo Pratomo, Patrick Wassmer, Irka Hajdas, Danang Sri Hadomoko and Edouard de Belzal, 2013, "Source of the Great AD 1257 Mystery Eruption Unveiled, Samalas Volcano, Rinjani Volcanic Complex, Indonesia", *PNAS*, 110, no. 43, (2013): 16742-16747.
- Maxwell. Robyn, 2003, *Textiles of Southeast Asia: Tradition, Trade and Transformation*, Oxford: Oxford University Press, 2003
- Museum and Art Gallery of the Northern Territory, 2005, *Speaking with Cloth: Cerita Dalam Kain*, Darwin: MAGNT.
- Raffles, Thomas Stamford, 1988, *The History of Java: Complete Text with an Introduction by John Bastin*, Singapore: Oxford University Press.
- Schimmel, Annemarie, 1994, *Deciphering the Signs of God: A Phenomenological Approach to Islam*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Stothers, Richard B, 1984, "The Great Tambora Eruption in 1815 and its Aftermath", *Science AAAS*, 224, no. 4654, (1984): 1191-1198.
- Suparman, Lalu Gede, 1994, *Babad Lombok*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DPK.
- Telle, Kari, 2007, "Entangled Biographies: Rebuilding a Sasak House", *Ethnos*, 72, no.2, (2007): 195-218.
- Telle, Kari, 2009, "Spirited Places and Ritual Dynamics among Sasak Muslims on Lombok", *Anthropological Forum*, 19, no.3, 2009.
- Telle, Kari, 2014, 'Changing Spiritual Landscapes and Religious Politics on Lombok' in Brigitta Hauser-Schäublin and David D. Harnish, *Between Harmony and Discrimination: Negotiating Religious Identities within Majority-Minority Relationships in Bali and Lombok*, Leiden: Brill.
- Telle, Kari, "Changing Spiritual Landscapes and Religious Politics on Lombok" in Brigitta Hauser-Schäublin and David D. Harnish, 2014, *Between Harmony and Discrimination: Negotiating Religious Identities within Majority-Minority Relationships in Bali and Lombok*, Leiden: Brill.
- Wood, Gillen D'Arcy, 2014, *Tambora: The Eruption that Changed the World*, Princeton and Oxford: Princeton University Press.

PENGARUH BRAND, PRICE DAN QUALITY KOSMETIK HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN

Munawwarotul mukarromah

IAIN Kudus

mukarromah5121@gmail.com

Abstrak

Pengaruh Halal lifestyle semakin membuat para produsen melakukan yang terbaik dalam meningkatkan kehalalan produk-produk mereka, mulai dari promosi dan penggunaan label halal pada kemasan. Salah satunya adalah pada bidang kosmetik. Wardah merupakan salah satu kosmetik yang pertama kali mencanangkan label halal pada produksi kosmetiknya karena semakin banyak kosmetik ilegal yang beredar dipasaran dengan penggunaan bahan baku yang berbahaya bagi tubuh manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh dari brand atau merek, price serta kualitas suatu brand kosmetik terhadap keputusan pembelian pada kosmetik halal. Objek dari penelitian ini adalah merek Wardah dan Muslimah/perempuan muslim yang menggunakan kosmetik dan penduduk Jawa Tengah merupakan kriteria yang diperlukan bagi responden ketika memanfaatkan purposive sampling dengan pendekatan quota sampling. Dengan demikian sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden. Hasil dari penelitian adalah terdapat sebesar 27.4% pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara parsial dan simultan kepada keputusan pembelian kosmetik halal di Jawa Tengah.

Kata Kunci: *Kosmetik halal, Wardah, Keputusan pembelian, merek, harga dan kualitas*

Abstract

The influence of Halal lifestyle increasingly makes manufacturers do their best in improving the halal and their products, starting from promotion and the use of halal labels on packaging. A single one of them works in the cosmetics. Wardah is one of the cosmetics that first launched a halal label on its cosmetic production because there are more and more illegal cosmetics circulating in the market with the use of raw materials that are harmful to the human body. This research was conducted to see how much influence the brand, price and quality of a cosmetic product on purchasing decisions in halal cosmetics. The object of this study is the Wardah brand and sampling techniques using purposive sampling with a quota sampling approach along with the criteria for respondents needed are Muslimah / women, using cosmetics, Muslim religion, and living in the Central Java area. Thus obtained a sample of 100 respondents. The result of the study was that there was 27.4% influence given by independent variables both partially and simultaneously on the decision to purchase halal cosmetics in Central Java

Keywords: *Halal cosmetics, Wardah, Purchasing decisions, brands, prices and quality*

PENDAHULUAN

Kosmetik adalah elemen penting untuk kehidupan sehari-hari dan telah menjadi cara hidup, terutama untuk wanita. Persaingan antar perusahaan yang memproduksi kosmetik saat ini sangat ketat. Contoh kosmetik ternama di Indonesia adalah Wardah, La Tulipe, Pixy, Sari Ayu Martha Tilaar, Mustika Ratu, PAC, dll. Terlebih lagi, Konsumsi kosmetik harus mematuhi peraturan keselamatan Pemerintah. Bagi konsumen Muslim, kosmetik juga harus halal. Halal berarti diperbolehkan atau diizinkan dalam Islam (Al-Qur'an, 2010). Kosmetik halal adalah kosmetik yang tidak mengandung bahan-bahan yang tidak diperbolehkan seperti alkohol atau bahan kimia berbahaya, lemak, plasenta, atau gelatin dari babi (hewan tidak disembelih menurut aturan-aturan Islam).

Ada lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk yang dikonsumsi oleh Muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah Badan Pengawasan dan Distribusi Obat dan Makanan – Majelis Ulama Indonesia (MUI LPPOM). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan memberikan sertifikasi halal pada produk tersebut. Produk yang telah memiliki sertifikat tersebut mampu memberikan label halal padaemasannya. Ini berarti bahwa produk-produk ini telah melewati proses dan isinya telah diperiksa dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Untuk itu, produsen kosmetik berlomba-lomba untuk berinovasi dengan mencantumkan label halal yang jelas pada setiap paket untuk menarik konsumen muslim di Indonesia.

Konsumen atau pengusaha muslim harus memiliki kesadaran akan konsep halal dalam sebuah produk. Halal yang baik dari segi bahan baku dan prosesnya. Kesadaran halal adalah levelnya pengetahuan yang dimiliki konsumen muslim untuk mencari dan mengkonsumsi produk halal sesuai dengan hukum Islam. Menurut survei yang dilakukan oleh Kasih Dia Konsultasi, menemukan bahwa tingkat realisasi di kalangan muslim kosmetik halal masih rendah.

Tidak hanya dari perspektif hukum, faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian adalah harga. Harga adalah salah satu elemen dari bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan sementara yang lain dari biaya produksi (Keller, 2009). Harga adalah biaya moneter dari semua bentuk yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, memiliki, menggunakan kombinasi item bersama dengan layanan suatu produk. Harga bagi konsumen memiliki peran penting dalam mempertimbangkan pembelian. Karena, pada dasarnya, setiap konsumen memiliki jumlah pendapatan yang berbeda-beda.

Brand atau Merk adalah seperangkat asosiasi unik yang dibuat atau dipertahankan oleh pemasar untuk menarik konsumen, di mana pada asosiasi ini sebenarnya menyatakan merek dagang apa dan apa yang dijanjikan kepada konsumen. Dengan merek dagang yang positif, konsumen akan tertarik untuk mempertahankan konsumsi. Konsumen juga harus memiliki persepsi positif terhadap brand image itu sendiri. Kemudian Wardah mengutamakan bahan-bahan yang halal dan alami sebagai manfaatnya. Sungguh menakjubkan bagaimana Wardah telah berkembang menjadi salah satu pembuat kosmetik regional. Menurut data dari majalah SWA, Wardah, yang menempati posisi keenam dalam kategori lipstik pada tahun 2012, naik ke posisi pertama. Juga peringkat pertama adalah produk bedak wajah, yang pada tahun 2012 berada di peringkat keempat. Wardah, yang menduduki peringkat ketujuh dalam kategori bubuk kompak pada tahun 2012, menempati posisi kedua dalam kategori tersebut pada tahun 2013.

Dengan perkembangan pesat yang dialami oleh produk wardah sendiri menjadikan konsumen percaya bahwa produk wardah ini termasuk kosmetik yang baik. Wardah merupakan produk kosmetik pertama yang menawarkan kehalalan dalam pembuatan produk dan dalam promosi yang dilakukan juga mencantumkan slogan halal pada iklan produk wardah di televisi maupun media elektronik lainnya.

Kosmetik halal pertama yang menyandang label Indonesia diciptakan oleh kosmetik Wardah. Karena Wardah adalah merek halal dan menggunakan operasi internal dan eksternal baru yang khusus untuk memenuhi permintaan konsumen, wardah dianggap sebagai inovasi di sektor kosmetik. (Mohezar, S., Zailani, S., & Zainuddin, 2016). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Oscar & Keni pada tahun 2019, brand memiliki dampak yang kuat dan penting pada keputusan pembelian pelanggan. Namun, dari peneliti pra-survei menemukan bahwa 52,6% responden (kuesioner, 2020) tidak menganggap halal label dalam produk kosmetik (Oscar, Y & Keni, 2019).

Keputusan pembelian secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas produk selain harga dan mereknya. Masalah ini muncul sebagai akibat dari penemuan zat berbahaya dalam kosmetik yang dapat mempengaruhi kualitas produk akhir. Penemuan kosmetik yang mengandung zat berbahaya ini dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap kaliber barang kosmetik dalam negeri atau impor, yang mungkin berdampak buruk pada ekspansi industri, terutama bagi produsen lokal Indonesia. Salah satu strategi utama untuk memposisikan pemasar adalah kualitas produk. Kualitas terkait erat dengan nilai dan kepuasan konsumen karena secara langsung mempengaruhi seberapa baik kinerja barang atau layanan. (Kotler, P., & Armstrong, 2008).

KAJIAN LITERATUR

A. Kosmetik Halal

Kosmetik halal adalah produk yang berasal dari bahan halal dan diproduksi sesuai dengan sistem halal yang digunakan pada bagian-bagian tubuh tertentu untuk tujuan mempercantik, membersihkan, melindungi dan mengubah penampilan tubuh . Kenapa harus menggunakan halal kosmetik? Karena mengkonsumsi makanan atau menggunakan sesuatu yang halal dan baik adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim menurut (Surah Al-Baqarah / 2: 168). Ketentuan untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang-barang halal juga berlaku dalam memakai make-up dan kecantikan atau kosmetik.

Perbedaan utama antara kosmetik halal dengan yang konvensional dapat dibagi menjadi tiga hal utama, mulai dari bahan kosmetik, proses pembuatan, dan pemasaran. Berdasarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), kosmetik halal tidak boleh mengandung bahan apapun seperti, halal plasenta hewan, bulu (rambut, tanduk bangkai hewan), siput, cacing, plasma darah, telur ayam embrocated, kepompong kepompong / ulat sutera, dan partikel emas; karena itu, jika kosmetik memang mengandung salah satu bahan seperti yang disebutkan sebelumnya, dapat diklasifikasikan sebagai kosmetik konvensional atau berdasarkan hukum Islam yang dikategorikan sebagai produk haram. Dari sudut pandang Muslim, hal tersebut penting untuk mengetahui asal usul bahan baku dan proses pembuatan barang konsumsi karena persyaratan syariah untuk menyatakan bahwa setiap muslim harus mengkonsumsi barang-barang halal dan utuh saja. Situasi ini semakin kritis karena verifikasi dan otentikasi produk halal sangat penting untuk menjaga kesucian agama Muslim (Mursyidi, 2013).

Selain hal-hal tersebut, konsep halal dalam proses pembuatannya juga mencakup perawatan kepada para pekerja yang berkontribusi pada proses tersebut. Nabi Muhammad Shallallahualaihiwasallam telah memberikan 5 (lima) kali pijatan tentang cara merawat para pekerja; 1) Segera Beri Upah, 2) Jangan zalim pada upah, 3) Sama dengan bos, 4) Bos harus Tawwadu' dan 5) Tidak berlaku keras dan kasar kepada bawahan.

Menurut pendapat peneliti, fullfilment terakhir dari suatu kosmetik untuk dianggap halal kosmetik adalah proses pemasaran kosmetik halal sesuai dengan hukum Islam, sebenarnya tidak ada persyaratan khusus untuk proses pemasaran yang disediakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Peneliti telah menemukan beberapa kriteria yang cocok untuk kasus pemasaran

kosmetik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hasyim dan Iskandar, mereka menggabungkan teori bauran pemasaran Philip Kotler dengan konsep Islami menjadi bauran pemasaran islami 7P, adalah sebagai berikut; 1) Pragmatisme & produk, 2) Keterkaitan & promosi, 3) Paliiasi & harga, 4) Dukungan sejawat & orang, 5) Pedagogi & lingkungan fisik, 6) Ketekunan & proses dan 7) Kesabaran & tempat.

B. *Brand Image*

Brand image adalah “persepsi dan keyakinan konsumen, seperti yang diungkapkan dalam hubungan yang disimpan dalam memori konsumen,” yaitu persepsi dan keyakinan pelanggan, sebagaimana tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam ingatan konsumen sehubungan dengan merek produk yang dilihat, dipikirkan dan dibayangkan. Dengan menciptakan citra merek yang tepat untuk produk, pasti akan sangat membantu para produsen, karena citra merek akan berdampak pada penilaian konsumen terhadap alternatif merek yang diharapkan. Tidak hanya bisa bertemu kebutuhan konsumen, namun hal itu dapat memberikan kepuasan dan keamanan yang lebih baik. Semakin baik citra merek yang melekat pada produk, semakin banyak konsumen akan tertarik untuk membeli hasil (Kotler, P., & Keller, 2012). Konsumen masih akan memilih merek berdasarkan citra mereka (Schiffman, L. G., & Kanuk, 2010).

Jika konsumen tidak memiliki pengalaman dengan suatu produk, mereka tampaknya “percaya” merek yang favorit atau terkenal. Citra merek yang positif berkaitan dengan loyalitas pelanggan, kepercayaan konsumen pada nilai merek yang positif, dan kemauan untuk mencari merek. Identitas merek yang positif juga membantu meningkatkan minat pelanggan dalam kegiatan pemasaran yang kompetitif (Edris, Indaryani, & Gunawan, 2014). Brand image merupakan kombinasi dari kenangan tentang brand yang diciptakan dan terpatri di benak konsumen. Penggunaan merek secara konsisten oleh konsumen dapat mempengaruhi penggunaan suatu citra merek secara konsisten (Oscar, Y & Keni, 2019).

Sebuah merek di pasar mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menganalisis fakta tentang bagaimana pelanggan melihat identitas merek, menangani strategi pemasaran merek, dan mengkomunikasikan nilai merek untuk konsumen (Mohammadzadeh, 2015). Brand image adalah persepsi pelanggan terhadap produk atau kesan keseluruhan dari produk yang dihasilkan dalam pikiran mereka. Indikator dari brand image adalah sebagai berikut (Ratri, 2007):

1. Atribut produk adalah hal-hal yang berhubungan dengan merek itu sendiri, seperti kemasan, rasa, harga, dll.
2. Manfaat konsumen (*consumer benefit*) adalah penggunaan produk dari brand tersebut.
3. *Brand personality* adalah asosiasi mengenai kepribadian brand ketika brand itu manusia

H1 : Brand berpengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik halal

C. Price

Strategi penetapan harga memiliki peran penting dalam memberikan nilai kepada pelanggan, membentuk bagaimana pelanggan memandang suatu produk, dan memengaruhi keputusan pembelian mereka. Harga berdampak pada pasokan dan saluran pemasaran serta pendapatan. Namun, faktor yang paling penting adalah bahwa pilihan harga harus sejalan dengan rencana pemasaran secara keseluruhan. Metode penetapan harga dapat didekati dengan memilih harga akhir dengan memasukkan faktor-faktor seperti penetapan harga psikologis, di mana konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas, dan kebijakan penetapan harga perusahaan dengan tujuan memberikan kuota harga kepada tenaga penjualan untuk digunakan dalam berurusan dengan pelanggan dan untuk profitabilitas bisnis.

Hak barang atau jasa atas kepemilikan atau penggunaan ditukar dengan nilai moneter atau ukuran lain, seperti barang dan jasa lainnya. Pemahaman ini konsisten dengan gagasan pemasaran perdagangan. Oleh karena itu, dapat diklaim bahwa kemampuan penjual atau pembeli untuk bernegosiasi akan menentukan harga akhir. Awalnya, penjual akan menetapkan harga tinggi dan pembeli akan menetapkan penawaran dengan harga serendah mungkin.

Biaya barang atau jasa mempengaruhi permintaan di pasar. Konsumen memperhatikan harga saat melakukan pembelian barang atau jasa. Pelanggan lebih cenderung melakukan pembelian berulang barang yang sama jika mereka yakin harganya adil. Menurut teori ekonomi, jika pasar barang atau jasa kompetitif, tinggi dan rendahnya harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar.

H2: Price berpengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik halal

D. Quality

Ide yang paling krusial dalam menghasilkan suatu produk adalah kualitas. Produk yang berkualitas adalah produk yang diperoleh klien sesuai dengan keinginan dan preferensi mereka. Produk adalah segala sesuatu yang dapat dijual di pasaran untuk dilihat, diperoleh, dipakai, atau dikonsumsi untuk memenuhi permintaan atau keinginan konsumen (Kotler, P., & Armstrong, 2008). Akibatnya, bisnis perlu menyadari keinginan dan preferensi konsumen *"Product functionality is a measure of a product's quality. It encompasses the product's general dependability, accuracy, simplicity of use and maintenance, and other value-related characteristics. Some of these characteristics are quantifiable. However, from a marketing perspective, quality should be evaluated in terms of how customers perceive it"*. Kemampuan suatu produk untuk menjalankan fungsinya, yaitu kombinasi dari daya tahan, keandalan, presisi, kemudahan perawatan, dan fitur produk lainnya, dapat diartikan sebagai kualitas suatu produk

Profesional pemasaran harus mengukur kualitas berdasarkan bagaimana pelanggan memandangnya dan bagaimana mereka bereaksi terhadapnya. Dalam skenario ini, preferensi individu memiliki peran besar. Oleh karena itu, menjaga kualitas produk umumnya harus mempertimbangkan utilitas yang diproyeksikan. Lima tingkat produk dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu produk, termasuk:

1. *The primary service of benefit that the consumer is actually purchasing is referred to as the "core benefit"*. (manfaat inti), yaitu manfaat utama yang diincar oleh seorang konsumen ketika membeli suatu produk atau barang
2. *Generic product, specifically the product's entry-level model*, maksudnya bahwa *generic product* (produk dasar) yaitu deskripsi fisik suatu produk
3. *A set of characteristics and requirements that purchasers typically anticipate and accept before agreeing to purchase an expected product*, maksudnya bahwa produk yang diharapkan, yaitu sejumlah atribut dan keadaan yang umumnya diharapkan dan disetujui oleh pembeli pada saat membeli produk tersebut.

4. *An enhanced product is one that provides extra services and distinguishes the company's offer from that of its rivals*, maksudnya bahwa manfaat tambahan produk, yaitu suatu produk yang dapat membedakan produk tersebut dengan produk pesaing
5. *Potential Product, i.e., all the future alterations and modifications that this product might experience*, maksudnya bahwa potensi produk, yaitu perluasan perubahan yang mungkin dialami oleh suatu produk di masa yang akan datang.

H3 : Quality berpengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik halal

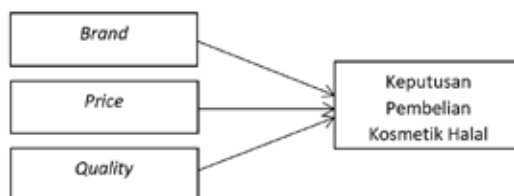
E. Keputusan Pembelian

Konsumen melalui proses membuat penilaian tentang apa yang harus dibeli untuk memenuhi keinginan mereka dan mendapatkan nilai terbaik. Langkah pertama dalam apa yang dilakukan pelanggan untuk membeli suatu produk adalah kesadaran untuk memenuhi persyaratan dan preferensi mereka (Japarianto, 2012).

Ketika pelanggan menerima layanan dari penyedia layanan dan menyatakan kepuasan atau ketidakpuasan, konsumen dapat memutuskan untuk melakukan pembelian. Saat bertindak, pelanggan harus membuat keputusan; beberapa faktor mungkin berdampak pada pilihan pembelian mereka. Pelanggan yang telah membuat keputusan untuk membeli produk akan puas dan melakukan pembelian tambahan. Komponen untuk mengukur kebahagiaan pelanggan tercantum di bawah ini (Kotler, P., & Keller, 2012):

1. Tingkat kepuasan umum pelanggan dengan produk perusahaan.
2. Minat pelanggan dalam pembelian berulang barang-barang perusahaan.
3. Kesiediaan untuk Merujuk: Tanda penting dari penelitian dan tindak lanjut adalah kesiediaan untuk merekomendasikan suatu produk kepada teman atau kerabat.
4. Karena manfaat dan biaya barang yang mereka jual dapat memengaruhi pengambilan keputusan calon pelanggan, pebisnis yang ingin mengiklankan barang mereka secara efektif harus secara aktif mempengaruhi klien.

H4 : Brand, Price dan Quality berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian kosmetik halal



Gambar 1. Kerangka Teoritis

METODE PENELITIAN

Teknik kausalitas dengan pendekatan kuantitatif adalah metodologi penelitian yang digunakan. Desain penelitian penjelasan digunakan. Empat variabel membentuk subjek penelitian: *brand* (X1), *price* (X2), *quality* (X3), dan keputusan untuk membeli kosmetik halal (Y). Wanita Muslim yang tinggal di Jawa Tengah merupakan demografis penelitian ini..

Purposive sampling menggunakan pendekatan *quota sampling* digunakan dalam teknik sampling, dan persyaratan bagi responden antara lain menjadi muslim/perempuan, menggunakan kosmetik, beragama muslim, dan tinggal di wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian, sampel 100 responden diperoleh.

Dalam penelitian ini digunakan kuesioner berskala likert sebagai metode pengumpulan data. Regresi linier berganda adalah metode analisis data yang telah diterapkan. Uji-t statistik, uji-f statistik (simultan), dan koefisien penentuan akan ditawarkan untuk pemrosesan data dan pengujian hipotesis dalam teknik regresi linier berganda (R2). Metode analisis regresi berganda linier dilakukan dengan rumus sebagai berikut untuk memperkirakan dampak *brand* (X1), *price* (X2), dan *quality* (X3) terhadap keputusan pembelian kosmetik halal (Y):

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + e$$

Keterangan :

Y : Keputusan pembelian kosmetik halal

a : konstanta

b : koefisien regresi

X1 : *Brand*

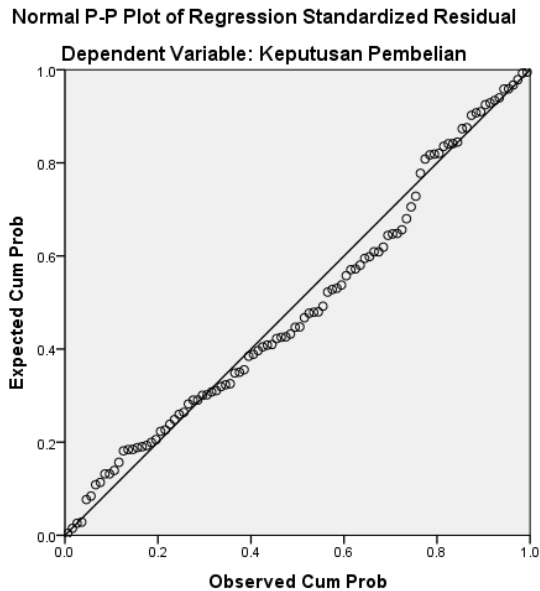
X2 : *Price*

X3 : *Quality*

e : Error

PEMBAHASAN

Hasil analisis olah data menggunakan *software* SPSS versi 21. Dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Probability Plot

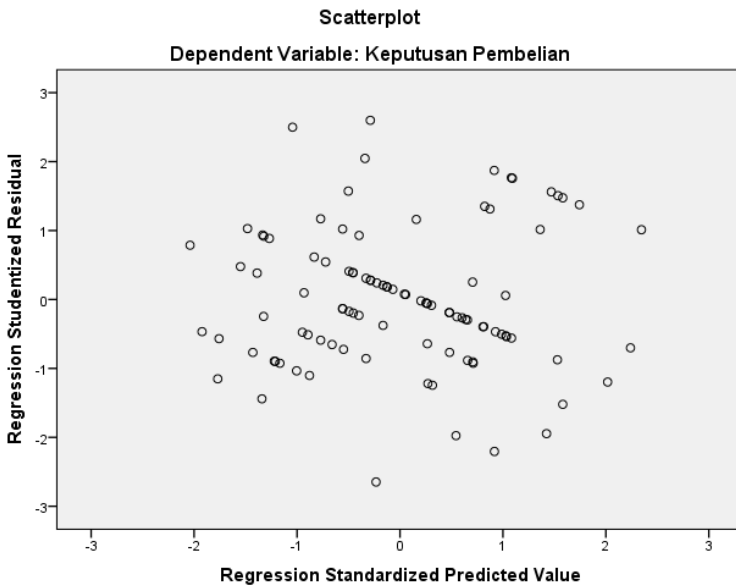
Model regresi dikatakan berdistribusi dengan normal jika data plotting (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Dari hasil pada gambar 2 diatas, terlihat bahwa titik-titik mengikuti garis diagonal sehingga sebagaimana dasar pengambilan keputusan maka kesimpulan uji normalitas adalah model regresi ter distribusi dengan normal.

Tabel 1. Uji Multikolinearitas Tolerance dan VIF

Model B		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig. Tolerance	Collinearity Statistics	
		Std. Error	Beta				VIF	
1	(Constant)	12.224	2.441		5.008	.000		
	Brand	-.174	.056	-.274	-3.139	.002	.991	1.009
	Price	-.055	.076	-.063	-.720	.473	.990	1.010
	Quality	.405	.078	.454	5.205	.000	.996	1.005

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Tidak terjadi gejala multikolinieritas jika nilai dari *Tolerance* > 0.100 dan nilai VIF < 10.00. Dari data uji multikolinieritas diatas, untuk *Brand*, *Price* dan *Quality* memiliki nilai berurutan sebesar 0.991, 0.990 dan 0.996 sehingga nilai *tolerance* dari ketiga variable independen tersebut jelas lebih besar dari 0.100 dan untuk nilai VIF variable *Brand*, *Price* dan *Quality* memiliki nilai VIF berurutan sebesar 1.009, 1.010, 1.005 yang mana nilai tersebut juga lebih kecil dari 10.00. Sehingga, dalam uji multikolinieritas tidak ada gejala multikolinieritas.



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas Scatterplots

Pada uji heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak ada gejala heteroskedastisitas. Jika dilihat pada gambar 3 diatas, maka terlihat bahwa titik-titik *scatterplot* tidak membentuk pola yang jelas atau berantakan dan juga menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Tabel 2. Uji T Parsial

Coefficients^a

Model B		Unstandard- ized Coeffi- cients		Standard- ized Coef- ficients	t	Sig. Toler- ance	Collinearity Statistics	
		Std. Error	Beta				VIF	
1	(Con- stant)	12.224	2.441		5.008	.000		
	Brand	-.174	.056	-.274	-3.139	.002	.991	1.009
	Price	-.055	.076	-.063	-.720	.473	.990	1.010
	Quality	.405	.078	.454	5.205	.000	.996	1.005

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Pada uji t parsial menunjukkan pengaruh variable independen terhadap variable dependen secara sendiri-sendiri atau terpisah. Jika nilai sig. < 0.05 maka artinya variable independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variable dependen. Dilihat dari tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa variable independen *brand* (X1) memiliki nilai sig. 0.002 yang artinya lebih kecil dari 0.05, kemudian untuk *price* (X2) memiliki nilai sig. 0.473 yang artinya lebih besar dari 0.05 dan untuk *quality* (X3) memiliki nilai sig. 0.000 yang mana jelas lebih kecil dari 0.05. Kesimpulannya, variable independen *brand* dan *quality* memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik halal dan untuk *price* tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik halal.

Tabel 3. Uji F Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	110.398	3	36.799	12.083	.000 ^b
	Residual	292.362	96	3.045		
	Total	402.760	99			

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

b. Predictors: (Constant), Quality, Brand, Price

Pada uji f simultan menunjukkan pengaruh variable independen terhadap variable dependen secara bersamaan atau simultan. Jika nilai sig. < 0.05 maka artinya variable independen (X) secara simultan berpengaruh terhadap variable dependen. Dilihat dari tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa nilai sig. adalah 0.000 yang artinya lebih kecil dari 0.05. Kesimpulannya, variable independen *brand* (X1), *price* (X2) dan *quality* (X3) secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik halal (Y).

Tabel 4. Pengaruh variable X1, X2 dan X3

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.524 ^a	.274	.251	1.745	1.800

a. Predictors: (Constant), Quality, Brand, Price

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Pengaruh yang diberikan variable independen (X) baik secara parsial maupun simultan terhadap variable dependen (Y) adalah 27.4%.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan diatas mengenai pengaruh brand, price dan quality terhadap keputusan pembelian kosmetik halal sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pada gambar 2, terlihat bahwa titik-titik mengikuti garis diagonal sehingga sebagaimana dasar pengambilan keputusan maka kesimpulan uji normalitas adalah model regresi terdistribusi dengan normal.
2. Dari data uji multikolinieritas pada tabel 1, untuk *Brand*, *Price* dan *Quality* memiliki nilai berurutan sebesar 0.991, 0.990 dan 0.996 sehingga nilai *tolerance* dari ketiga variable independen tersebut jelas lebih besar dari 0.100 dan untuk nilai VIF variable *Brand*, *Price* dan *Quality* memiliki nilai VIF berurutan sebesar 1.009, 1.010, 1.005 yang mana nilai tersebut juga lebih kecil dari 10.00. Sehingga, dalam uji multikolinieritas tidak ada gejala multikolinieritas.
3. Jika dilihat pada gambar 3, maka terlihat bahwa titik-titik *scatterplot* tidak membentuk pola yang jelas atau berantakan dan juga menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.
4. Dilihat dari hasil pada tabel 2, menunjukkan bahwa variable independen *brand* (X1) memiliki nilai sig. 0.002 yang artinya lebih kecil dari 0.05, kemudian untuk *price* (X2) memiliki nilai sig. 0.473 yang artinya lebih besar dari 0.05 dan untuk *quality* (X3) memiliki nilai sig. 0.000 yang mana jelas lebih kecil dari 0.05. Kesimpulannya, variable independen brand dan quality memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik halal dan untuk price tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik halal.
5. Dilihat dari hasil pada tabel 3, menunjukkan bahwa nilai sig. adalah 0.000 yang artinya lebih kecil dari 0.05. Kesimpulannya, variable independen *brand* (X1), *price* (X2) dan *quality* (X3) secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik halal (Y).
6. Pengaruh yang diberikan variable independen (X) baik secara parsial maupun simultan terhadap variable dependen (Y) adalah 27.4%.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, T. *Al-Baqarah*. , (2010).
- Edris, M., Indaryani, M., & Gunawan, B. (2014). Industrial Development Strategy of Cluster-Based Embroidery and Garment in Kudus , Central Java , Indonesia. *International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology*, 1(7), 444–453.
- Japarianto, F. &. (2012). Analisis Pengaruh Food Quality dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Roti Kecil Toko Roti Ganep's di Kota Solo. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 1(1), 1–6.
- Keller, K. and. (2009). *Manajemen Pemasaran* (13th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Kotler, P.,& Armstrong, G. (2008). *Marketing an Introduction*. New Jersey: Prentice Hall.
- Kotler, P., & Keller, K. (2012). *Principles of Marketing*. New Jersey: Prentice Hall.
- Mohammadzadeh, R. (2015). The Effect of Brand Image and Purchase Intention on Cosmetic Products: Evidence from North Cyprus. *Eastern Mediterranean University*.
- Mohezar, S., Zailani, S., & Zainuddin, Z. (2016). Halal cosmetics adoption among young Muslim consumers in Malaysia: Religiosity concern. *Global Journal Al-Thaqafah*, 6(1), 47–59.
- Mursyidi, A. (2013). Chemical Analysis Authentication Role in Halal and Food Pharmaceutical Products. *Journal of Food and Pharmaceutical Science*, 1, 1–5.
- Oscar, Y & Keni, K. (2019). Pengaruh Brand Image, Persepsi Harga, dan Service Quality terhadap Keputusan Pembelian Konsumen. *Jurnal Muara Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 20–28.
- Ratri, L. E. (2007). Relationship Between Brand Image operator cell with Brand loyalty to students that use a cell phone (Study Case to faculty of Economic regular University Diponegoro). *Research Paper*.
- Schiffman, L. G., & Kanuk, L. (2010). *Consumer Behavior*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.

**Pengaruh Kepedulian Orang Tua Dan Motivasi Belajar
Terhadap Hasil Belajar Kognitif Mata Pelajaran IPA Kelas IV
Di MI Mamba'unnidhom Bulungan Pati
Tahun Pelajaran 2021/2022**

Novi Fitriyana - Pascasarjana IAIN Kudus

novifitriyana1@gmail.com

Masrukhin - IAIN Kudus

muzdalifah@iainkudus.ac.id

Fifi Nofiaturrahmah - IAIN Kudus

fifinofiaturrahmah@iainkudus.ac.id

Muzdalifah - IAIN Kudus

muzdalifah@iainkudus.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepedulian orang tua dan motivasi belajar terhadap hasil belajar kognitif mata pelajaran IPA di kelas IV MI mamba'unnidhom Bulungan Pati. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi lapangan di MI Mamba'unnidhom Bulungan Pati, yakni pada ruang lingkup kelas IV. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari peserta didik kelas IV A, B, C dan D sejumlah 90, kemudian diambil sampel 90 dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dan regresi ganda serta korelasi linier sederhana dan korelasi ganda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara kepedulian orang tua dan motivasi belajar terhadap hasil belajar kognitif di MI Mamba'unnidhom Bulungan Pati, dengan persamaan regresi yaitu $\hat{Y} = 26,270 + 0,15 X_1 + 0,264 X_2$. Kepedulian orang tua dan motivasi belajar secara simultan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan hasil belajar kognitif sebesar 0,339 yang termasuk dalam kategori rendah dan dapat memberi kontribusi bagi peserta didik dalam mengembangkan hasil belajar kognitif peserta didik sebesar 11,5 %.

Kata Kunci: Kepedulian Orang Tua, Motivasi Belajar, Hasil Belajar Kognitif.

ABSTRACT

This study to examine the effect of parental care and learning motivation on cognitive learning outcomes of science subjects in grade IV MI mamba'unnidhom Bulungan Pati. This type of research is included in the type of field research, namely research in which researchers go directly to the field to obtain data or information directly by visiting respondents. The method used is a quantitative method. In this study, the author conducted a field study at MI Mamba'unnidhom Bulungan Pati, namely in the scope of class IV. The population in this study consisted of 90 graders A, B, C and D, then 90 samples were taken using the saturated sample technique. In this analysis uses statistical analysis, namely simple linear regression and multiple regression as well as simple linear correlation and multiple correlation. The results showed that there is a significant effect between parental care and learning motivation on cognitive learning outcomes at MI Mamba'unnidhom Bulungan Pati, with the regression equation = $26.270 + 0.15 X_1 + 0.264 X_2$. Parental concern and learning motivation simultaneously have a positive and significant relationship with cognitive learning outcomes of 0.339 which are included in the low category and can contribute to students in developing students' cognitive learning outcomes of 11.5%.

Keywords: Parental Concern, Learning Motivation, Cognitive Learning Outcomes.

PENDAHULUAN

Dalam pendidikan peran keluarga sangat penting, ayah dan ibu memiliki dampak besar pada sekolah anak-anak. Rumah tangga memiliki kewajiban utama untuk mengasuh dan menjaga anak-anak dari masa bayi hingga tahun-tahun pembentukan untuk muncul sebagai anak yang mandiri. Pengenalan anak pada tradisi nilai dan norma keberadaan jaringan dimulai di dalam keluarga sendiri. Agar kepribadian anak menjadi ideal dan masuk akal, mereka harus tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, dalam iklim kebahagiaan, cinta, dan informasi. Ayah dan ibu adalah pendidik utama dan utama bagi anak-anaknya, karena dari merekalah anak-anak mendapatkan pendidikan. Maka bentuk pendidikan pertama ditemukan dalam kehidupan keluarga. Ibu dan ayah tidak juga sebagai pendidik tetapi juga sebagai mentor dan penanggung jawab pada anak-anak mereka.

Sangat pentingnya pendidikan keluarga, maka Islam memandang keluarga itu sebagai lembaga hidup manusia yang menentukan baik buruknya dan celaka ataupun bahagiannya di dunia dan diakhirat kelak. Nabi Muhammad sendiri di utus oleh Allah SWT, pertama-tama diperintahkan untuk mengajarkan islam, lebih dahulu kepada keluarga sebelum masyarakat luas. Perhatian yang banyak dikuatkan oleh banyaknya rangsang atau keadaan yang menyertai aktivitas atau pengalaman batin.⁷

Kepedulian orang tua terbukti dalam bantuan yang diberikan dengan bantuan ayah dan ibu kepada anak-anak ketika anak-anak memiliki masalah belajar yang berdampak pada prestasi anak di masa depan. Ketertarikan ayah dan ibu juga dapat ditemukan melalui penyediaan fasilitas belajar yang diharapkan dengan bantuan siswa bisa membantu sistem pengajaran dan penguasaan agar dapat berpengaruh pada prestasi siswa. Terkadang siswa sudah tidak semangat lagi, disinilah fungsi ayah dan ibu untuk mewaspadai anak-anaknya dalam bentuk memberi motivasi dan semangat. Jika perlu, ayah dan ibu berinisiatif untuk berbicara dengan pelatih yang khawatir untuk mengetahui perkembangan belajar anak mereka.

Selain kepedulian orang tua, motivasi belajar siswa menjadi hal yang penting juga bagi siswa dalam meraih hasil belajar yang baik. Ciri-ciri motivasi belajar yaitu: memiliki ketekunan dalam mengerjakan tugas (bekerja secara maksimal dan tidak berhenti ketika pekerjaannya belum usai), memiliki keuletan ketika menghadapi hal sulit atau tidak mudah menyerah. Tidak membutuhkan dorongan eksternal dalam menggapai prestasi dengan baik dan tidak mudah puas dengan apa yang didapatkannya, memperlihatkan

minat mengenai berbagai persoalan berupa permasalahan yang berkenaan dengan moral, tindak kriminal, pemberantasan korupsi, keadilan, ekonomi, politik, pembangunan agama dan lainnya, memiliki sikap untuk bekerja secara mandiri, memiliki sikap bosan dengan tugas yang rutin erulang, mekanis dan kurang kreatif, memiliki kemampuan untuk mempertahankan argumentasi ketika meyakini sesuatu, tidak mudah goyah keyakinannya dan memiliki rasa senang terhadap pemecahan masalah dan pencarian solusi (Sardiman, 2016: 83)

Penelitian Panuntun di Jepara ditemukan ada korelasi antara kepedulian orang tua dengan perilaku belajar yang dibuktikan dengan persamaan regresi $Y=12,782+0,958X$, Hasil analisis korelasi didapatkan nilai $r=0,682$, mengartikan hubungan kedua variable cukup kuat dimana *Coefficient of deterprestasiion* (r)=46,2 (Panuntun, 2013). Penelitian yang hamir sama dari Sihombing di Parbutaran Simalungu. Kajian tersebut ditemukan perhatian orang ua berpengaruh terhadap hasil belajar matematika di Kelas IV SD Negeri . hasil kajian tersebut dibuktikan dari nilai koefisien yaitu 0,732 mengartikan rhitung ($0,732 \geq r_{tabel} (0,349)$ maka H_a diterima (Sihombing, 2020). Penelitian Sandy ditemukan adanya pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Penelitian menggunakan metode deskriptif verifikatif dan pendekatannya survey dan *ex post facto*, hasil penelitiannya ialah (1) perhatian orang tua mempengaruhi terhadap peningkatan prestasi belajar siswa, (2) motivasi belajar mempengaruhi terhadap peningkatan belajar siswa, (3) pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar secara bersamaan mempengaruhi terhadap peningkatan prestasi belajar, (4) adanya korelasi diantara perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap peningkatan prestasi belajar siswa (<https://www.neliti.com/id/publications/37074>) .

Penelitian Mahmudi dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam kajian ini ditunjukkan bahwa data perhatian orang tua dengan kelas sangat cukup diperoleh 9 siswa dengan persentase 24,3%, perhatian orang tua dengan kelas cukup diperoleh 12 siswa dengan persentase 32,4%, perhatian orang tua pada kelas kurang. diperoleh 11 siswa dengan persentase 29,7 %, perhatian orang tua di kelas wa sangat sedikit diperoleh 5 siswa dengan persentase 13,6 %. Rata-rata hasil belajar kognitif siswa dengan kategori sangat baik diperoleh 20 siswa dengan persentase 54,1%, rata-rata hasil belajar kognitif siswa dengan kategori baik diperoleh 11 siswa dengan persentase 29,7%, rata-rata hasil belajar kognitif siswa dengan kategori cukup diperoleh 6 siswa dengan persentase 16,2% (Sandy, 2017).

Fenomena yang terjadi di MI Mamba'unnidhom Bulungan Pati berbeda dengan penelitian di atas. Salah seorang guru yaitu guru kelas IV menyatakan bahwa dalam permasalahan yang dihadapi oleh siswa kelas IV adalah kepedulian orang tua yang kurang sehingga dapat mengakibatkan hasil belajar kognitif siswa menurun dari sebagian besar siswa dari golongan keluarga yang orangtuannya pergi keluar negeri, petani, serta bekerja diluar. Dengan kesibukan orang tua dalam bekerja mengakibatkan kurangnya kepedulian orang tua dan motivasi belajar dirumah menurun sehingga mempengaruhi hasil belajar kognitif yang diperoleh siswa. Dalam hal ini seorang siswa membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang tua agar proses belajar siswa berjalan dengan baik dan terkendali. Dengan demikian kepedulian orang tua terhadap motivasi belajar siswa sangat penting.

Berdasarkan hasil observasi data awal yang diperoleh peneliti di MI Mamba'unnidhom Bulungan Pati bahwa pengaruh kepedulian orang tua kepada siswa sangat kurang. Dikarenakan dari pemantauan dini yang periset jalani pada 14 September 2021 kepada 90 peserta didik didapat hasil belajar kognitif dari kelas IV A dengan jumlah siswa 25 yang nilai KKM 75 memiliki nilai tuntas 75 % sedangkan yang tidak tuntas 27 %, hasil belajar kognitif dari kelas IV B dengan jumlah siswa 25 yang nilai KKM 75 memiliki nilai tuntas 56 % sedangkan yang tidak tuntas 44 %, hasil belajar kognitif dari kelas IV C dengan jumlah siswa 20 yang nilai KKM 75 memiliki nilai tuntas 62 % sedangkan yang tidak tuntas 38 %, hasil belajar kognitif dari kelas IV D dengan jumlah siswa 20 yang nilai KKM 75 memiliki nilai tuntas 70 % sedangkan yang tidak tuntas 30 %. Perihal itu membuktikan kalau kenyataan yang nampak di kelas IV MI Mamba'unnidhom Bulungan Pati merupakan anak-anaknya pada tingkatan hasil belajar kognitif masih kurang serta belum maksimum dengan bagus dalam menyerap pembelajaran IPA materi energi alternatif.

Dari penjelasan di atas, maka sangat penting kiranya dilakukan penelitian terkait dengan pengaruh kepedulian orang tua Dan motivasi belajar terhadap hasil belajar kognitif mata pelajaran IPA Kelas IV di MI Mamba'unnidhom Bulungan Pati Tahun Pelajaran 2021/2022. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Walaupun terdapat sebagian kecocokan hendak namun dengan cara totalitas tidak terdapat yang serupa. Dari riset terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, bersama mengulas mengenai kepedulian orang tua, motivasi belajar serta hasil belajar kognitif. Tetapi ada pula perbedaan-perbedaan semacam elastis yang berlainan, ilustrasi yang berlainan, posisi riset yang berlainan, subyek riset yang berlainan dan dari keempat riset diatas dapat dipakai sebagai sebuah acuan dalam rangka meningkatkan hasil

belajar kognitif peserta didik dimadrasah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah pengaruh kepedulian orang tua dan motivasi belajar terhadap hasil belajar kognitif mata pelajaran IPA di kelas IV MI Mamba’unnidhom Bulungan Pati tahun pelajaran 2021/2022 ?”.

KAJIAN LITERATUR

1. Kepedulian Orang Tua

Kepedulian menurut kamus besar bahasa indonesia, kepedulian berasal dari ungkapan peduli. Peduli berarti memperhatikan, menghiraukan dan mengindahkan (KBBI, 2008). Indikator kepedulian orang tua sebagai berikut :

1) Memotivasi anak agar semangat belajar

Motivasi diambil dari kata dasar “motif” dengan artian daya yang memberikan dorongan kepada manusia untuk bertindak. Makna lainnya yaitu usaha yang mendorong manusia dalam menjalankan suatu kegiatan (Whiterington, 1984: 73).

2) Menasihati anak untuk berperilaku baik

Memberi nasihat berarti memberi saran-saran untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan pikiran sehat. Nasihat merupakan suatu dorongan yang dapat mengubah tingkah laku anak kepada sebuah kebenaran dalam berperilaku. Nasihat yang diberikan orang tua terhadap anak hendaknya tidak bersifat memarahi, atau menghukumnya, semisal mencaci, memukul, menempeleng dan lain sebagainya yang bersifat kekerasan. Adapun hukuman yang dapat diberikan ialah hukuman yang bersifat mendidik tetapi bukan dengan kekerasan (Nurfinah, 2019). Jika hal itu yang dilakukan oleh orang tua, kemungkinan besar apa yang menjadi harapan orang tua tidak akan terwujud.

3) Memberi *Reward*

Reward merupakan hal yang menggembirakan dalam berperilaku. *Reward* juga bisa menjadi alat pendidikan yang sifatnya represif dan preventif serta mampu menjadi motivasi atau dorongan dalam belajar anak. *Reward* ialah pemberian hadiah dibarengi perjanjian atau syarat. *Reward* bisa digunakan sebagai pemicu demi keberhasilan anak bukan sebagai sarana bagi anak menggapai barang atau hal yang menuju pada terpenuhinya materi dimana hal ini akan membuat pola

pikir yang salah dalam diri anak. Pola pikir anak yaitu berkenaan dengan prestasi bukanlah materi. Salah satu contoh *reward* ialah ketika orang tua menjanjikan akan memberikan suatu hadiah bisa berupa sepeda, mainan atau yang lain ketika anak mampu mencapai prestasi tertentu (Idris, 2008: 19).

4) Kontrol waktu belajar anak

Keberhasilan anak di sekolah juga disebabkan adanya peran dari orang tua. Peran orang tua bisa sebagai penyemangat belajar dan juga teman dekat yang selalu siap ketika dibutuhkan oleh anak untuk mengarahkan dan membimbingnya berkenaan dengan aktivitas belajar anak. Orang tua berperan menjadi guru ketika di rumah dan harus melakukan *control* waktu dan cara anak belajar, menjadi pengingat bagi anak untuk selalu belajar disetiap harinya menyelesaikan pekerjaan rumah dan melakukan review materi yang guru berikan.

5) Memberi *Punishment*

Punishment digambarkan dengan bentuk pembalasan atau retaliasi. *Punishment* sering digunakan saat suatu tujuan tidak terpenuhi atau ketika tindakan anak tidak sejalan dengan harapan sekolah. Zainuddin memberikan pandangan bahwasannya *punishment* ialah tindakan di mana seseorang secara sadar dan aktif menyebabkan kerugian bagi orang lain untuk memperbaiki atau membela diri dari berbagai pelanggaran.

2. Motivasi Belajar

Kesiapan untuk melakukan usaha tingkat tinggi mencapai tujuan, dan mengkondisikan kecakapan dimana usaha ini demi terpenuhinya kebutuhan manusia adalah definisi motivasi Gibson. Selain itu David McClelland dalam Uno menjelaskan bahwasannya "*Amotive is the redintegration by a cue of a change in a affective situation*" atau "motif merupakan implikasi dari hasil pertimbangan yang telah dipelajari dengan ditandai suatu perubahan pada situasi afektif." (Uno, 2010: 65) Ciri-ciri motivasi belajar yaitu:

- 1) Memiliki ketekunan dalam mengerjakan tugas (bekerja secara maksimal dan tidak berhenti ketika pekerjaannya belum usai).
- 2) Memiliki keuletan ketika menghadapi hal sulit atau tidak mudah menyerah. Tidak membutuhkan dorongan eksternal dalam menggapai prestasi dengan bak dan tidak mudah puas dengan apa yang didupatkannya.

- 3) Memperlihatkan minat mengenai berbagai persoalan berupa permasalahan yang berkenaan dengan moral, tindak criminal, pemberantasan korupsi, keadilan, ekonomi, politik, pembangunan agama dan lainnya.
- 4) Memiliki sikap untuk bekerja secara mandiri.
- 5) Memiliki sikap bosan dengan tugas yang rutin erulang, mekanis dan kurang kreatif.
- 6) Memiliki kemampuan untuk mempertahankan argumentasi ketika meyakini sesuatu.
- 7) Tidak mudah goyah keyakinannya.
- 8) Memiliki rasa senang terhadap pemecahan masalah dan pencarian solusi (Sardiman, 2016: 83).

3. Hasil Belajar Kognitif

Hasil belajar ialah perubahan yang terdapat dalam diri siswa dan menjadi akibat dari aktivitas belajar ditinjau dari unsur kognitif, efektif, dan psikomotorik (Susanto, 2013: 5). Purwanto menjelaskan bahwasannya hasil belajar diketahui dengan mengartikan "hasil" dan "belajar". Hasil mengarah pada didapatkannya sesuatu setelah menjalankan kegiatan atau proses yang berakibat pada perubahan input secara fungsional (Purwanto, 2013; 44).

Hasil Belajar Kognitif Siswa Pembelajaran IPA adalah disiplin ilmu terpenting bagi pendidikan Indonesia yang diajarkan di tingkat dasar. IPA ialah dianggap sebagai pelajaran menantang oleh seluruh siswa di semua jenjang (Susanto, 2013: 165). Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam atau (IPA) dalam pandangan Djaumana terbagi kedalam dua hal yaitu proses dan produk. Memandang IPA sebagai proses sebagai pembelajaran yang mempunyai dimensi pengembangan sikap ilmiah, hasil dan proses. IPA juga dimaknai dengan ilmu pengetahuan yang sifatnya objektif dan rasional yang berfokus pada alam semesta dan isinya.

Tujuan dari pembelajaran IPA di MI dalam pandangan BSNP atau Badan Nasional Standar Pendidikan, diantaranya yaitu:

- a) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya.
- b) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- c) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat.

- d) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan.
- e) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam.
- f) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan.
- g) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dijalankan berjenis "*field research*" atau penelitian lapangan. Penelitiannya dijalankan dalam keadaan yang alamiah namun terdapat intervensi (campur tangan) dari peneliti. Intervensi ini dilakukan dengan tujuan realitas yang diinginkan oleh peneliti segera muncul untuk diamati. Hal ini menandakan adanya kontrol atau kendali parsial di situasi lapangan (Susanto, 2013 : 171-172). Penelitian ini akan langsung dilakukan di MI Mamba'unnidhom Bulungan Pati dengan kelas IV sebagai fokus penelitiannya dengan tujuan memperoleh data real mengenai "pengaruh kepedulian orang tua dan motivasi belajar terhadap hasil belajar kognitif mata pelajaran IPA.

Selain itu penelitian survey yang dijalankan dengan tujuan generalisasi melalui sampel atau pengamatan terbatas dan kesimpulannya diberlakukan bagi populasi. Keuntungannya responden penelitian sangatlah luas dan banyak dengan mengkodifikasi data melalui *quesioner*. Melalui survey ini peneliti hendak memahami mengenai pengaruh kepedulian orang tua dan motivasi belajar terhadap hasil belajar kognitif mata pelajaran IPA pada peserta didik kelas IV.

PEMBAHASAN

Uji Signifikansi Hipotesis Asosiatif Regresi Linier Sederhana Kepedulian Orang Tua (X1) dan Motivasi Belajar (X2) terhadap Hasil Belajar Kognitif (Y) di MI Mamba'unnidhom Bulungan Pati

Berdasarkan uji regresi ganda ditemukan ada signifikansi pengaruh yang signifikan diantara kepedulian orang tua (X1) dan motivasi belajar (X2) secara simultan terhadap hasil belajar kognitif (Y) di MI Mamba'unnidhom

Bulungan Pati. Temuan tersebut dibuktikan dengan nilai Freg atau Fhitung tersebut sebesar 5,652 (hasil output SPSS 17.0 di lampiran 9c) kemudian dibandingkan dengan nilai Ftabel dengan db = m sebesar 2, lawan n- m-1 = 90-2-1 = 87, ternyata harga Ftabel 5% = 3,96. Jadi nilai Freg lebih besar dari Ftabel (5,652 > 3,96). Kesimpulannya yakni “Ho ditolak atau Ha tidak dapat ditolak.” Artinya koefisien regresi yang didapatkan yaitu “terdapat pengaruh yang signifikan antara kepedulian orang tua (X1) dan motivasi belajar (X2) terhadap hasil belajar kognitif di MI Mamba’unnidhom Bulungan Pati.

Dalam pengujian diatas bahwa kepedulian orang tua dan motivasi belajar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar kognitif di MI Mamba’unnidhom Bulungan Pati. Persamaan regresinya yaitu $\hat{y} = 26,270 + 0,15X1 + 0,264X2$. Artinya, apabila kepedulian orang tua dan motivasi belajar diadakan secara bersama maka hasil belajar kognitif juga akan meningkat. Kepedulian orang tua dan motivasi belajar secara simultan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan hasil belajar kognitif sebesar 0,339. Berdasarkan hasil koefisien determinasi, peneliti menyimpulkan bahwa kepedulian orang tua dan motivasi belajar secara simultan memberikan kontribusi sebesar 11,5% terhadap hasil belajar kognitif di MI Mamba’unnidhom Bulungan Pati.

Hasil penelitian tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Panuntun yang berjudul pengaruh kepedulian orang tua terhadap perilaku belajar siswa. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil korelasi antara kepedulian orang tua dengan perilaku belajar siswa diperoleh $r = 0,682$, berarti hubungan kepedulian orang tua dengan perilaku belajar siswa pada SMK 17 Agustus Bangsri Kabupaten Jepara adalah cukup kuat. Dikatakan cukup kuat karena nilai dari korelasi tersebut berada di antara nilai interpretasi 0,600 sampai dengan 0,800, jadi variabel kepedulian orang tua mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan variabel perilaku belajar siswa. Sedangkan hasil *Coefficient of deterprestasiion* ($2r$) 46,2%, hal ini berarti variabel bahwa variabel kepedulian orang tua mempengaruhi perubahan terhadap perilaku belajar siswa pada SMK 17 Agustus Bangsri Kabupaten Jepara sebesar 46,2% sedangkan variabel lain mempengaruhi perubahan perilaku belajar siswa sebesar 53,8%. Variabel lain tersebut misalnya sistem pembelajaran yang belum sesuai dengan keinginan siswa, karena setiap siswa membawa kepribadian dan prinsip yang lain-lain. Sehingga jika ssebagian siswa tersebut tidak sesuai dengan sistem pembelajaran

yang diterapkan seorang guru akan mengakibatkan siswa tersebut sulit untuk menerima atau bahkan tidak bisa menerima. Hal ini akan mengakibatkan perilaku siswa akan menurun atau sulit untuk meningkat, jadi seorang guru sebaiknya memperhatikan sistem pembelajaran juga. Contoh variabel yang lainnya adalah fasilitas yang lengkap untuk proses belajar mengajar. Seorang siswa akan memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada pada sekolah tersebut sebelum mereka masuk atau daftar jadi siswa, ini terbukti bahwa fasilitas juga menjadi pertimbangan mereka untuk belajar. Jadi fasilitas juga perlu diperhatikan guna meningkatkan perilaku belajar siswa pada SMK 17 Agustus Bangsri Kabupaten Jepara (Panuntun, 2013).

Kepedulian dari orang tua sangatlah dibutuhkan oleh anak atau siswa. Karena kepedulian orang tua dapat menjadi pendorong yang kuat untuk anak giat belajar dan mencapai hasil belajar yang baik. Bentuk kepedulian orang tua dapat berupa bimbingan belajar, pemberian penghargaan atau hukuman, pemenuhan fasilitas belajar dan memperhatikan kesehatan anak. Semakin baik dan tinggi kepedulian orang tua yang diberikan ke anak, maka akan semakin berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif siswa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Pengaruh Kepedulian Orang Tua Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Kognitif Mata Pelajaran IPA Kelas IV Di MI Mamba'unnidhom Bulungan Tahun Pelajaran 2021/2022" yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut: Kepedulian orang tua (X1) dan motivasi belajar (X2) secara simultan terhadap hasil belajar kognitif (Y) di MI mamba'unnidhom Bulungan, dengan nilai koefisien korelasi ganda sebesar 0,339. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut masuk kategori rendah rendah, dalam interval 0,20-0,399. Sehingga kepedulian orang tua dan motivasi belajar secara simultan mempunyai hubungan yang cukup positif dan signifikan terhadap hasil belajar kognitif di MI mamba'unnidhom Bulungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Disekolah Dasar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Arifudin Mahmudi, "The Relationship Of Parental Attention To Student's Cognitive Learning Outcomes", *Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran*, Vol 3 No 1, Tahun 2020, p-ISSN: 2614-3909 e-ISSN: 2614-3895, diakses pada tanggal 15 Februari 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JP2/article/view/24435>.
- Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya (Analisis di Bidang Pendidikan)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Lilis Lela Sandy, "Pengaruh Perhatian Orang Tua Dan Motivasi Belajar Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa", *e-Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Banten*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, diakses pada tanggal 6 Januari 2022, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JPBK/article/view/3023>.
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luring*, Jakarta: Divisi Bahasa Indonesia, 2008.
- Nurfinah, "Peran Perhatian Orang Tua dalam Membentuk Perilaku Positif Anak Didesa Masolo Kabupaten Pinrang", *Skripsi Bimbingan Konseling Islam, IAIN Parepare* 2019. Diakses pada tanggal 5 Juli 2022, <https://www.google.com/search?q=kepedulian+orang+tua+dalam+menasehati+anak+dalam+berperilaku+baik&oq=kepedulian+orang+tua+dalam+menasehati+anak+dalam+berperilaku+baik&aqs=chrome..69i57.31827j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- Sugih Panuntun, "Pengaruh Kepedulian Orang Tua Terhadap Perilaku Belajar Siswa Kelas XII SMK 17 Agustus Bangsri Jepara Tahun Pelajaran 2009/2010", *Jurnal Pendidikan Ekonomi IKIP Veteran Semarang*, Vol. 01 No. 01, Juni 2013, diakses pada tanggal 6 Januari 2022, <https://www.neliti.com/id/publications/37074/pengaruh-kepedulian-orang-tua-terhadap-perilaku-belajar-siswa-kelas>.

Saurma Sihombing, “*Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Di Kelas IV SD Negeri 097350 Parbutaran Simalungun*”, SEJ (*School Education Journal*) Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Vol. 10 No. 4 Desember 2020, diakses pada tanggal 6 Januari 2022, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/school/article/view/20936>.

Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Gramedia Grasindo, 2016.

Tasnim Idris, *Penerapan Metode Targhib dan Tahrib Dalam Pendidikan Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.

Whiterington, *Psikologi Pendidikan, Alih Bahasa, Agus Sahari*, Jakarta: Aksara baru, 1984.

**Pelaksanaan (*Actuating*)
dalam Manajemen Pendidikan Islam
Perspektif Qur'an Hadits**

Naily Fatkhiyati

Pascasarjana IAIN Kudus
naifa6399@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan (actuating) merupakan salah satu fungsi dari manajemen setelah fungsi perencanaan (planning) dan pengorganisasian (organizing) dilaksanakan. Pelaksanaan (actuating) dalam manajemen sangat penting guna mencapai tujuan sebuah organisasi atau lembaga pendidikan. Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan (actuating) dalam manajemen pendidikan yakni proses pembimbingan, pengarahan, ataupun peringatan sebagaimana dalam Q.S Ali Imron ayat 104 dan Al-Kahfi ayat 2. Kisah raja Thalut pada Q.S Al-Baqarah ayat 249 menggambarkan salah satu pelaksanaan fungsi actuating yaitu directing, dengan memberi peringatan agar tidak lalai dalam melaksanakan tugas. Gambaran kisah penerapan actuating juga dijelaskan dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Hadits Riwayat Muslim yang mengisyaratkan pelaksanaan manajemen pendidikan hendaknya saling mengingatkan akan tujuan yang akan dicapai sehingga implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah sebelumnya disusun dan dalam penerapan actuating berupa pemberian motivasi, kegiatan, pengertian, sehingga dalam sebuah tim saling bekerja sama dan mendukung untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga sesuai tugas masing-masing.

Kata Kunci: *Actuating*; Pelaksanaan; Manajemen Pendidikan Islam

Abstract

Actuating is one of the functions of management after planning and organizing functions are implemented. Actuating in management is very important in order to achieve the goals of an organization or educational institution. Al-Qur'an and Hadith provide clear guidelines regarding the implementation (actuating) in education management including the process of guidance, direction, or warning as in Q.S Ali Imron :104 and Al-Kahf :2. The story of king Thalut in Q.S Al-Baqarah verse 249 describes directing as one of the implementations of the actuating function, by warning him not to be negligent in carrying out his duties. Description of story of the application of actuating is also explained in the Hadith History of Bukhari and Hadith History of Muslim which implies that the implementation of education management should remind each other of the goals to be achieved so that the implementation of all forms of plans, concepts, ideas, and ideas that have been previously prepared and in the application of actuating in the form of giving motivation, activity, understanding, so that in a team work together and support each other to achieve organizational or institutional goals according to their respective duties.

Keywords: *Actuating; Implementation; Islamic Education Management*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan salah satu fungsi dari manajemen setelah fungsi perencanaan (*planning*) dan pengorganisasian (*organizing*) dilaksanakan. Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang pada akhirnya pelaksanaan (*actuating*) merupakan pusat sekitar aktivitas-aktivitas manajemen.

Sebuah organisasi atau lembaga dibangun dengan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh seluruh anggota organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan akan tercapai apabila dalam sebuah lembaga atau organisasi mampu secara optimal memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan, dalam ilmu manajemen dikenal dengan fungsi manajemen. Fungsi dalam manajemen dikenal dengan *Planning, Organizing, Actuating, dan Controring (POAC)* (Aditama 2020:10).

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan non manusia pada pelaksanaan tugas. Semua sumber daya manusia yang ada harus harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Fungsi pelaksanaan (*actuating*) berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Oleh karena itu, seorang pemimpin pendidikan dalam membina kerjasama, mengarahkan dan mendorong semangat kerja bawahannya perlu memahami faktor-faktor manusia dan pelakunya (Indrawan 2015:4). Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan (*actuating*) dalam manajemen pendidikan yakni proses pembimbingan, pengarahan, ataupun peringatan sebagaimana dalam ayat maupun hadits.

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan non manusia pada pelaksanaan tugas. Semua sumber daya manusia yang ada harus harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Pelaksanaan (*actuating*) dalam manajemen sangat penting guna mencapai tujuan sebuah organisasi atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, perlunya membahas mengenai *actuating* baik dari segi pengertian, fungsi, hingga bagaimana *actuating* dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits.

KAJIAN LITERATUR

Manajemen pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang berupa pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan agar kegiatan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien (Indrawan 2015:2). Manajemen harus mengetahui perbedaan tiap individu pekerja mereka dan harus mencoba untuk mengeksplorasi kebutuhan individu mereka dan memotivasi mereka sesuai, sehingga guru atau pegawai dapat memberikan yang terbaik di tempat kerja dan tetap terlibat dengan baik dengan pekerjaan dan berkomitmen dengan organisasi juga (Siddique dkk. 2011:733).

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Dengan kata lain, sebuah pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah sebelumnya disusun, baik level manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan, yaitu, visi dan misi organisasi (Aditama 2020:16).

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang kompleks dan merupakan ruang lingkup yang cukup luas serta sangat berhubungan erat dengan sumber daya manusia yang pada akhirnya pelaksanaan (*actuating*) merupakan pusat sekitar aktivitas-aktivitas manajemen (Indrawan 2015:4). Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi (Hasanah 2021:23).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan (*actuating*) dalam Manajemen Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an

1. Q.S Ali Imran ayat 140

Fungsi pelaksanaan (*actuating*) berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Oleh karena itu, seorang pemimpin pendidikan dalam membina kerjasama, mengarahkan dan mendorong semangat kerja bawahannya perlu memahami faktor-faktor manusia dan pelakunya (Indrawan 2015:4). Setiap SDM harus bekerja sesuai tugas, fungsi dan peran, serta keahlian untuk mencapai visi, dan misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. *Actuating* memiliki fungsi pengarahan (*commanding*), bimbingan (*directing*), dan komunikasi (*communication*) dan berperan sebagai upaya untuk mejadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan pengarahan dan pemotivasian (Qurtubi 2019:127).

Allah Swt berfirman dalam Q.S Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemah : "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Abu Ja'far berkata, makna adalah hendaknya diantara kalian wahai kaum mukmin, sekelompok umat yang mengajak orang lain kepada Islam dan syariat yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya (Al-Amali dan Al-Tabari 2006:90). Ungkapan *وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ* maknanya dalah memerintahkan yang ma'ruf. Artinya memerintahkan manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawanya dari Allah SWT. ungkapan *وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ* maknanya adalah melarang manusia dari kufur kepada Allah Swt serta mendustakan MuhammadSAW berserta segala yang dibawanya, dengan jihad tangan, hingga mereka tunduk. Ungkapan *وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* berarti orang-orang yang sukses di Jalan Allah, yang kekal dalam surga dan kenikmatannya (Al-Amali dan Al-Tabari 2006:91).

Pengetahuan yang dimiliki seseorang, bahkan kemampuannya mengamalkan sesuatu akan berkurang, bahkan terlupakan dan hilang, jika tidak ada yang mengingatkannya atau tidak dia ulang-ulangi mengerjakannya. Di sisi lain, pengetahuan dan pengamalan saling berkaitan erat, pengetahuan mendorong kepada pengamalan dan meningkatkan kualitas amal sedang

pengamalan yang terlihat dalam kenyataan hidup merupakan guru yang mengajar individu dan masyarakat sehingga mereka pun belajar mengamalkannya. Kalau demikian itu halnya, maka manusia dan masyarakat perlu selalu diingatkan dan diberi keteladanan. Inilah inti dakwah Islamiah. Dari sini lahir tuntunan ayat ini dan dari sini pula terlihat keterkaitannya dengan tuntunan yang lalu (Shihab 2005:175).

Pada Q.S Ali Imron ayat 104, terdapat kalimat yang merupakan inti dari pelaksanaan (*actuating*), yaitu pada kata يَدْعُونَ (menyeru), يَأْمُرُونَ (menyuruh), dan يَنْهَوْنَ (mencegah). Ketiga kata tersebut menunjukkan bahwa hal pokok yang harus dilakukan dalam pelaksanaan *actuating* adalah melakukan pengarahan yang merupakan tugas pokok pimpinan untuk mencapai keberhasilan suatu kegiatan yang direncanakan (Setiawan 2021:35).

2. Q.S Al-Kahfi ayat 2

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Kahfi ayat 2

قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Terjemah : "sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik,"

قَيِّمًا pada Al-Qur'an setelah menafikan sifat (عَوَجًا) penyimpangan, sebagai bentuk penegasan. Hal ini karena bisa saja sesuatu yang terlihat lurus tidak luput dari bengkok sekecil apa pun setelah dilakukan penelitian dan pengujian terhadapnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat tersebut ialah Al-Qur'an merupakan kitab suci yang paling lurus dari segenap kitab suci yang pernah ada sebagai pembenar terhadap kitab-kitab tersebut, dan saksi atas keshahihan isinya. Pendapat lain mengatakan, maksudnya adalah isi Al-Qur'an sesuai dengan masalah hamba dan mengandung hukum-hukum syariat sebagai kewajiban mereka (az-Zuhaili 2013b:204).

لِّيُنذِرَ maksudnya, untuk memperingatkan dan menakut-nakuti orang kafir dengan Al-Qur'an tersebut mengenai adzab yang sangat pedih dan hukuman yang akan mereka terima di dunia, juga yang akan mereka terima di akhirat yaitu neraka Jahannam. Firman Allah مِّنْ لَّدُنْهُ artinya berasal dari Allah SWT (az-Zuhaili 2013b:204).

وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang Mukmin melalui Al-Qur'an, yaitu mereka yang menopang keimanan mereka dengan amal saleh. Sesungguhnya, mereka mendapatkan ganjaran yang indah dari Allah, yaitu surga sebagai tempat tinggal bagi orang-orang bertakwa dan berbakti, dan sebagai tempat tinggal abadi bagi orang-orang pilihan yang berbuat baik (az-Zuhaili 2013b:204).

Pada surat Al-Kahfi ayat 2 terdapat beberapa kata yang disebut sebagai inti pelaksanaan (*actuating*), diantaranya adalah kata قَيِّمًا (bimbingan), لِيُنذِرَ (peringatan), وَيُبَشِّرَ (memberi kabar gembira). Hal pokok yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan terutama oleh pimpinan adalah pemberian bimbingan dalam penciptaan iklim kerja dalam sebuah tim. Selain itu, pemberian apresiasi terhadap keberhasilan dan pemberian peringatan terhadap kegagalan jika tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan, merupakan hal yang tidak dilupakan oleh sosok pimpinan (Setiawan 2021:36).

Dari surat Al-Kahfi ayat 2 diketahui bahwa pelaksanaan atau *actuating* merupakan proses kegiatan pengelolaan yang menyertakan lingkungan dan orang lain dengan tata cara yang baik sehingga akan mendapatkan hasil yang baik pula (Dewi dan Mashar 2019:111). Keseluruhan proses dimana terdapat pemberian motif kerja, perintah, petunjuk dan nasihat kepada bawahan dengan keterampilan komunikasi sehingga dapat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan dalam organisasi. Pelaksanaan merupakan inti dari manajemen yang digunakan dalam manajemen dan terdapat fungsi *leading* juga dalam *actuating*, dimana harus ada prinsip efisiensi dan komunikasi yang baik dalam menjalankan organisasi (Dewi dan Mashar 2019:110).

3. Q.S Al-Baqarah ayat 249

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 249:

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهَ كَمِ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ يَأْذِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٩٤٢)

Terjemah: Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, "Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barangsiapa meminum (airnya), dia bukanlah pengikutku. Dan barangsiapa tidak

meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan.” Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia (Thalut) dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, “Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya.” Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, “Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah.” Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.”

Allah menguji dengan adanya sungai, ujiannya adalah minum sedikit air sungai itu, supaya kelihatan siapa yang taat dan siapa yang membangkang. (وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ) (فَلَيْسَ مِنِّي) maka ia bukan termasuk pengikutku. menciduk dengan telapak tangan. Yang dibolehkan adalah minum satu ciduk saja, tidak boleh lebih. (وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) orang-orang yang beriman bersamanya. yaitu mereka yang minum air sungai itu hanya satu ciduk. Mereka berjumlah tiga ratus sekian belas. لَا طَاقَةَ tidak punya kekuatan. بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ yakni: kita tidak sanggup memerangi mereka. Mereka sudah merasa kecut hati, dan orang-orang yang minum banyak dari air sungai itu tidak menyeberanginya (az-Zuhaili 2013a:622). Kisah raja Thalut yang melarang prajuritnya untuk meminum air di sungai juga untuk menguji ketaatan prajurit terhadapnya. Hasil ujian ini menunjukkan bahwa mereka semua minum karena mereka sudah biasa melanggar perintah dan karena iman mereka lemah, kecuali sedikit dari mereka, yaitu orang-orang yang beriman, yang tulus mengikuti sang pemimpin, dan yang ikhlas dalam agama.

Kisah raja Thalut di atas merupakan salah satu contoh dari fungsi *actuating* yaitu *directing*. *Directing* atau memberi arahan seperti apa tanggungjawab pekerjaan yang harus diembannya. Seorang bawahan harus tahu persis apa yang harus dilakukan sesuai dengan arahan pemimpin (Nurcholiq 2018:147). Kisah tersebut contoh dalam memberi peringatan agar tidak lalai dalam melaksanakan tugas. Memberikan teguran atau punishment kepada bawahan yang tidak disiplin, lalai dalam melaksanakan tugasnya. Dengan punishment yang diberikan kepada seseorang akan menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan hal serupa di masa yang akan datang. Agama menganjurkan adanya peringatan kepada orang lain khususnya bawahan, dengan harapan supaya bawahan bisa selalu konsisten dalam pekerjaannya. Kalaupun ada kesulitan, bisa dikonfirmasi kepada atasan atau sejawatnya (Nurcholiq 2018:140).

Pelaksanaan (*actuating*) dalam Manajemen Pendidikan Islam Perspektif Hadits

1. Hadits Riwayat Bukhori

Rasulullah Saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا (أَبُو نُعَيْمٍ) , قَالَ حَدَّثَنِي (زَكَرِيَاءُ) قَالَ سَمِعْتُ (عَامِرًا) يَقُولُ سَمِعْتُ (النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَفْنَا لَوْ أَنَّا خَرَفْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْفًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَّوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا (رواه البخاري)

Terjemah: Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Zakariyya'] berkata, aku mendengar [Amir] berkata, aku mendengar [An-Nu'man bin Basyir radiallahu 'anhuma] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan sebagian lagi di bagian bawah perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu bila mereka mencari air untuk minum mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas seraya berkata; "Seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami". Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan tangan mereka maka mereka akan selamat semuanya". (H.R Bukhari)

Makna Hadits ini adalah menjelaskan tentang sesuatu yang di terima bagi orang-orang yang menaati segala perintah dan larangan Allah serta orang yang mengingkarinya, orang yang menaati perintah dan larangan Allah ia akan selamat dan bagi orang-orang yang mengingkarinya ia akan mengalami kerugian. Kandungan lain dari hadis ini adalah; dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat ataupun dalam sebuah organisasi agar senantiasa bersabar atas tingkah laku tetangga/rekan sejawat yang terkadang membuat hati tak berkenan, hadis ini juga mengisyaratkan pentingnya saling mengingatkan sesama untuk senantiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena sekelompok orang bisa jadi akan terkena dampak negatif dari ulah segelintir manusia saja (Malik 2006:10).

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Dengan kata lain, sebuah pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah sebelumnya disusun, baik level manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan, yaitu, visi dan misi organisasi (Aditama 2020:16).

Hadits di atas menjelaskan contoh pembagiaan tugas dalam sebuah organisasi atau lembaga yang diibaratkan dalam sebuah kapal, sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas (فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا), dan sebagian lagi di bagian bawah perahu (وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا). Hadis tersebut juga mengisyaratkan pentingnya saling mengingatkan sesama untuk senantiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena sekelompok orang bisa jadi akan terkena dampak negatif dari ulah segelintir manusia saja. Dalam pelaksanaan manajemen pendidikan hendaknya saling mengingatkan akan tujuan yang akan dicapai sehingga implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah sebelumnya disusun, baik level manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan, yaitu, visi dan misi organisasi. Karena apabila dalam pelaksanaan terjadi penyelewengan tugas maka tujuan organisasi tidak akan tercapai.

2. Hadits Riwayat Muslim

Rasulullah Saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَبْذِعُ فِي فَاخِمِلِي فَقَالَ مَا عِنْدِي فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ
أَجْرٍ فَاعِلِهِ (رواه المسلم)

Terjemah : “Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Abu Kuraib] dan [Ibnu Abu Umar] dan ini adalah lafadz Abu Kuraib, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Mu’awiyah] dari [Al A’masy] dari [Abu ‘Amru As Syaibani] dari [Abu Mas’ud Al Anshari] dia berkata, “Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam seraya berkata, “Wahai Rasulullah, jalan kami telah terputus karena hewan tungganganmu telah mati, oleh karena itu bawalah saya dengan hewan tunggangan yang lain.” Maka beliau bersabda: “Saya tidak memiliki (hewan

tunggangan yang lain).” Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berkata, “Wahai Rasulullah, saya dapat menunjukkan seseorang yang dapat membawanya (memperoleh penggantinya).” Maka beliau bersabda: “Barangsiapa dapat menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya.” (HR. Muslim)

Rasulullah SAW bersabda: “ من دل على خير فله مثل أجر فاعله “ “Barang siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala yang serupa dengan pahala orang yang mengerjakannya.”. Seperti sabdanya: “ من جهز غارياً فقد غزا “ “Barangsiapa yang mempersiapkan seorang pejuang telah menyerang”: artinya, dia mendapat pahala berbuat baik dan pahala penaklukan, dan jika dia tidak menambah semua dua kali lipat pahala orang yang memberi kebaikan dan pahala hadiah dari penyerbu; Karena di dalam hal-hal tersebut masih banyak lagi amalan dan amal saleh lainnya, dan penanda yang tidak bersamanya tidak bergabung dengannya kecuali dengan niat kebaikan semata (Iyad t.t.:317).

Rasulullah SAW bersabda: “ من دل على خير فله مثل أجر فاعله “ “Barang siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala yang serupa dengan pahala orang yang mengerjakannya.”. Hadits tersebut menjelaskan mengenai keutamaan menunjukkan kebaikan, menasehati, dan membantu mengerjakannya, dan mengajarkan ilmu maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya.

Actuating merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerjasama antar staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pelaksanaan (*actuating*) dalam hadits di atas diistilahkan dengan memberi bimbingan, motivasi, memberikan arah, memberikan komando, serta mengingatkan. *Actuating* merupakan kemampuan seseorang untuk memberikan motivasi, kegiatan, pengertian, sehingga dalam sebuah tim saling bekerja sama dan mendukung untuk mencapai tujuan organisasi atau .(lembaga sesuai tugas yang dibebankan masing-masing (Muhyi dkk. t.t.:159

SIMPULAN

Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan (*actuating*) dalam manajemen pendidikan yakni proses pembimbingan, pengarahan, ataupun peringatan sebagaimana dalam Q.S Ali Imron ayat 104, terdapat kalimat yang merupakan inti dari pelaksanaan (*actuating*), yaitu pada kata *يَدْعُونَ* (menyeru), *يَأْمُرُونَ* (menyuruh), dan *يَنْهَوْنَ* (mencegah). Pada surat Al-Kahfi ayat 2 terdapat beberapa kata yang disebut sebagai inti pelaksanaan (*actuating*), diantaranya adalah kata *فَيِّمًا* (bimbingan), *لِيُنذِرَ* (peringatan), dan *وَيُبَشِّرَ* (memberi kabar gembira). Hal pokok yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan terutama oleh pimpinan adalah pemberian bimbingan, pemberian apresiasi terhadap keberhasilan dan pemberian peringatan terhadap kegagalan jika tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan. Dan pada Q.S Al-Baqarah ayat 249 merupakan salah satu pelaksanaan fungsi *actuating* yaitu *directing*, kisah tersebut contoh dalam memberi peringatan agar tidak lalai dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan HR. Bukhari mengisyaratkan dalam pelaksanaan manajemen pendidikan hendaknya saling mengingatkan akan tujuan yang akan dicapai sehingga implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah sebelumnya disusun. Dalam HR. Muslim terdapat istilah memberi bimbingan, motivasi, memberikan arah, memberikan komando, serta mengingatkan. *Actuating* merupakan kemampuan seseorang untuk memberikan motivasi, kegiatan, pengertian, sehingga dalam sebuah tim saling bekerja sama dan mendukung untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga sesuai tugas yang dibebankan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Roni Angger. 2020. *Pengantar Manajemen*. Malang: AE Publishing.
- Al-Amali, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib, dan Abu Ja'far Al-Tabari. 2006. *Jami' Al-Bayan fii Takwil Al-Qur'an*. Maktabah Syamilah 2.0.0.04.
- Dewi, Indah Kusuma, dan Ali Mashar. 2019. *NILAI-NILAI PROFETIK DALAM KEPEMIMPINAN MODERN PADA MANAJEMEN KINERJA*. Gre Publishing.
- Hasanah, Siti Nurhidayatul. 2021. *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*. disunting oleh U. K. Abidin. Lamongan: Academia Publication.
- Indrawan, Irjus. 2015. *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Iyad, Qadi. t.t. "Ikmal Al Mu'lim Bifawaidi Muslim Juz 6." *Shameela*. Diambil 6 Desember 2021 (<https://shamela.ws/book/122406/3502#p1>).
- Malik, Ibnu Bathol Abu Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul. 2006. *Syarah Shahih Bukhari libni Bathol Juz 7*. Maktabah Syamilah 2.0.0.04.
- Muhyi, Abdul, Muhammad Irawan Shobirin, Cecep Ridwan, Alam Ferdiansyah, dan Adnani. t.t. *Etika Pendidikan Islam Perspektif Tafsir Manajemen Pendidikan*. Cipta Media Nusantara (CMN).
- Nurcholiq, Mochamad. 2018. "ACTUATING DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN AL-HADITS (Kajian Al-Quran Dan Al-Hadits Tematik)." *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1(2):137–50. doi: 10.32478/evaluasi.v1i2.69.
- Qurtubi, Ahmad. 2019. *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori dan Implementasi)*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Setiawan, Hasrian Rudi. 2021. *Manajemen Peserta Didik: (Upaya Peningkatan Kualitas Lulusan*. Medan: umsu press.

- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siddique, Anam, Hassan Aslam, Mannan Khan, dan Urooj Fatima. 2011. "Impact of academic leadership on faculty's motivation, and organizational effectiveness in higher education system." *INTERNATIONAL JOURNAL Of ACADEMIC RESEARCH* 3:730–37.
- az-Zuhaili, Wahbah. 2013a. *Tafsir Al-Munir Jilid 1: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*. Jakarta: Gema Insani.
- az-Zuhaili, Wahbah. 2013b. *Tafsir Al-Munir Jilid 8: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*. Jakarta: Gema Insani.

**Peran Keteladanan Guru
Dalam Membentuk Akhlak Peserta Didik di TPQ Sabibal
Muhtadin Clering**

Ninik Kurniawati

ninikkurnia286@gmail.com

Pascasarjana IAIN Kudus

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui tentang Pemberian keteladanan guru dalam membentuk akhlak peserta didik di TPQ Sabibal Muhtadin Clering. (2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan akhlak peserta didik di TPQ Sabibal Muhtadin Clering. (3) untuk mengetahui hasil keteladanan guru dalam membentuk akhlak peserta didik di TPQ Sabibal Muhtadin Clering.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang mengemukakan secara spesifik tentang permasalahan akhlak yang sedang terjadi di tengah-tengah lingkungan TPQ Sabibal Muhtadin Clering. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang menekankan pada pencarian gejala mengenai suatu fenomena di masyarakat serta disajikan dalam bentuk naratif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara, teknik observasi dan teknik dokumentasi.

Penelitian ini berhasil memperoleh tiga temuan, yaitu (1) Pemberian keteladanan guru dalam membentuk akhlak peserta didik di TPQ Sabibal Muhtadin Clering yaitu: keteladanan menjalankan salat asar berjamaah, keteladanan dalam berpakaian, sopan santun dan keteladanan berbicara baik. (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan akhlak peserta didik di TPQ Sabibal Muhtadin Clering. faktor pendukungnya adalah: komitmen guru dan kepedulian orang tua peserta didik. Faktor penghambatnya adalah: faktor kesadaran dalam diri peserta didik dan pengaruh teman sebaya. (3) Hasil keteladanan guru dalam membentuk akhlak peserta didik di TPQ Sabibal Muhtadin Clering yaitu peningkatan akhlak kepada Allah SWT, Peningkatan akhlak kepada diri sendiri dan Peningkatan akhlak terhadap sesama.

Kata Kunci: *Tata Tertib, Keteladanan Guru, Akhlak*

ABSTRACT

This study aims: (1) To find out about giving exemplary teachers in shaping the morals of students at TPQ Sabilal Muhtadin Clering. (2) to determine the supporting and inhibiting factors in the moral formation of students at TPQ Sabilal Muhtadin Clering. (3) to find out the results of the teacher's example in shaping the morals of students at TPQ Sabilal Muhtadin Clering.

This research is a field research, which specifically addresses the moral problems that are currently occurring in the TPQ Sabilal Muhtadin Clering environment. This study uses a qualitative approach, which is a study that emphasizes the search for symptoms regarding a phenomenon in society and is presented in a narrative form. The data collection techniques are using interview techniques, observation techniques and documentation techniques.

This study succeeded in obtaining three findings, namely (1) Providing teacher examples in shaping the morals of students at TPQ Sabilal Muhtadin Clering, namely: examples of carrying out Asar prayers in congregation, exemplary in dress, good manners and exemplary speaking well. (2) Supporting and inhibiting factors in the moral formation of students at TPQ Sabilal Muhtadin Clering. the supporting factors are: teacher commitment and parental care of students. The inhibiting factors are: the awareness factor in students and the influence of peers. (3) The results of the teacher's example in shaping the morals of students at TPQ Sabilal Muhtadin Clering are improving morals to Allah SWT, improving morals to oneself and improving morals towards others.

Keywords: *Discipline, Teacher's Example, Morals*

PENDAHULUAN

Akhlik merupakan cerminan kepribadian seorang muslim. Seseorang yang mempunyai sikap atau kepribadian menurut ajaran al-Qur'an dan Sunah adalah orang yang mempunyai akhlak mulia. Allah mengutus Nabi Muhammad Saw. untuk menyempurnakan dan mengajarkan akhlak mulia. Dalam proses pendidikan, akhlak merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena salah satu tujuan pendidikan adalah mencetak generasi muda yang berakhlakul karimah (Euis Rosyida, 2019).

Dalam pelaksanaan pendidikan saat ini, ada beberapa realitas permasalahan yang terjadi dan harus segera ditangani dengan baik. Permasalahan tersebut berkaitan dengan akhlak peserta didik yang kurang bagus. Peserta didik di TPQ Sabibal Muhtadin belum mampu menanamkan akhlak yang baik dalam kesehariannya, termasuk saat mengikuti pelajaran di TPQ. Contoh akhlak negatif dari peserta didik yaitu, terlambat dalam mengikuti Salat Asar berjamaah, bertengkar dengan teman sebaya, berbicara kurang sopan, memakai baju tidak sesuai aturan, sering tidak berangkat, berbicara sendiri saat diajar guru, dan lain sebagainya.

Dalam pembentukan akhlak, guru mempunyai peranan yang sangat penting. Secara sederhana guru merupakan orang kepercayaan yang dijadikan sebagai sosok panutan (digugu dan ditiru). Kata digugu mempunyai arti dipercaya atau diindahkan. Sedangkan ditiru adalah dicontoh dan diikuti perilakunya. Guru berasal dari bahasa sansekerta, yang tergabung dari kata *gu* dan *ru*. Kata *gu* artinya adalah kegelapan, keterbelakangan, kekelaman dan kejudaman. Sedangkan kata *ru* adalah melepaskan, membebaskan, dan menyingkirkan. Sehingga, dapat dipahami bahwasannya guru adalah seorang manusia atau insan mulia yang berjuang secara konsisten dan gradual, berusaha keras untuk melepaskan manusia lain dari kegelapan kebodohan (Abdul Aziz Hamka, 2012, p. 19).

Permasalahan di TPQ Sabibal Muhtadin hampir sama dengan masalah akhlak yang terjadi di MAN 2 Kuningan Jawa Barat. Sebagian besar peserta didik di sekolah tersebut kurang memiliki akhlak yang baik. Peserta didik tidak tepat waktu dalam masuk sekolah, tidak mengikuti tadarusan sebelum pembelajaran dilaksanakan, gaduh dalam kelas, tidak memperhatikan guru saat proses pembelajaran, tidak berpakaian rapi, rambut dan kuku yang panjang, tidak mengerjakan tugas pekerjaan rumah, merokok, bolos dan lain sebagainya (Siti Nurjanah, 2020, p. 57). Setelah guru menerapkan pembiasaan positif dan menampilkan keteladanan, maka ada perubahan peningkatan pengetahuan

dan akhlak peserta didik di MAN 2 Kuningan Jawa Barat. Keberhasilan tersebut seperti meningkatnya prestasi akademik dan non akademik peserta didik, meningkatnya keimanan peserta didik, perubahan sikap menjadi lebih baik, gemar membaca serta kepedulian terhadap lingkungan meningkat (Siti Nurjanah, 2020, p. 70). Dari penelitian pembentukan akhlak berbasis pembiasaan dan keteladanan di MAN 2 Kuningan Jawa Barat, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran keteladanan guru dalam membentuk akhlak peserta didik di TPQ Sabial Muhtadin.

KAJIAN LITERATUR

1. Keteladanan Guru

a. Pengertian Keteladanan Guru

Guru merupakan sosok yang mempunyai beberapa julukan positif, salah satu yang paling terkemuka adalah sebutan “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”. Julukan tersebut, telah menunjukkan dan menampakkan identitas guru sebagai orang yang berjasa besar, berpengaruh positif, terhadap dunia pendidikan. Maka dari itu, guru sangat pantas disebut sebagai seorang pahlawan yang berwibawa (Ngainun Naim, 2016, p. 1).

Guru mempunyai peran untuk terlibat secara langsung dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik agar mereka mempunyai wawasan pengetahuan yang luas dan terbuka. Selain hal tersebut, ternyata guru berperan penuh dalam mencetak generasi muda yang tangguh sebagai penerus bangsa yang akan datang. Dalam menjalankan tugasnya guru selalu aktif memberi pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan dan evaluasi terhadap seluruh proses yang telah dijalankan. Dalam proses evaluasi, guru berkewajiban untuk terus mengoreksi, menelaah dan memperbaiki kegiatan yang telah berlangsung selama ini (Abuddin Nata 2010, p. 139).

Dalam mempengaruhi orang lain, keteladanan dapat diterapkan sebagai salah satu model yang sangat efektif. Di dalam Islam, keteladanan sering digunakan sebagai media untuk berdakwah dan menerapkan pendidikan. Keteladanan menjadi hal utama dalam menyukkseskan pendidikan karena mempunyai daya pengaruh yang kuat dalam menyampaikan pesan kepada orang lain (Ulil Amri Syafri, 2014, p 142).

Keteladanan guru merupakan sikap positif yang ditampilkan dan dapat mempengaruhi orang lain. Seorang guru dapat menampilkan keteladanan yang dimiliki melalui, sikap, perilaku, perkataan dan perbuatan yang positif agar dapat dijadikan sebagai contoh oleh peserta didik. Di lingkungan sekolah, seorang guru diumpamakan sebagai aktor utama yang diberikan wewenang untuk menjadi panutan bagi peserta didiknya (Muhammad Yaumi, 2014, p. 148)

b. Dalil Keteladanan Guru

Di bawah ini akan ditampilkan mengenai dalil keteladanan. Allah berfirman dalam Q.S. Surat An-Nahl ayat 120 yaitu sebagai berikut:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. dan sekali-kali bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. (QS. Surat An-Nahl ayat 120). (Departemen Agama RI, 2007, p. 281)

c. Dampak Negatif Hilangnya Keteladanan Guru

Ketika keteladanan ditampilkan dengan begitu kuat, maka hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perilaku peserta didik, karena mereka secara sadar dan konsisten memperhatikan apa yang telah ditampilkan oleh seorang guru (Sigit Setyawan, 2013, p. 87). Dengan diberikannya sebuah keteladanan, maka peserta didik ataupun orang lain yang melihatnya akan memperoleh sebuah contoh perilaku positif serta bantuan (*scaffolding*) dalam bertindak dan berperilaku (Sigit Setyawan, 2013, p. 91). Keteladanan memberikan suatu pengaruh besar proses pembentukan karakter atau perilaku positif peserta didik. Akan sangat rugi jika seorang guru tidak mampu memberikan keteladanan dalam proses pendidikan, dan menimbulkan beberapa dampak negatif di antaranya yaitu:

- 1) Tidak Terbentuk Hubungan Emosional antara Guru dengan Peserta Didik

Pada hakikatnya, hubungan guru dan peserta didik bukan hanya terjalin sebatas interaksi fisik semata, melainkan harus ada ikatan murni lahir dan batin berupa hubungan emosional yang erat yang saling menenteramkan. Ketika guru tidak bisa memberikan keteladanan, maka hubungan yang terjalin hanya sebatas hubungan lahir. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran yang disampaikan guru tidak akan membekas secara permanen dalam hati ataupun jiwa peserta didik.

2) Diacuhkan Peserta Didik

Pada hakikatnya seorang peserta didik membutuhkan sosok figur panutan yang dapat dicontoh untuk memperbaiki kualitas diri. Ketika dalam proses pendidikan, seorang guru hanya memberikan ceramah atau nasihat tanpa menampilkan keteladanan, maka peserta didik tidak akan memercayainya dan bersikap acuh tak acuh pada guru yang berangkutan. Kebanyakan peserta didik tidak akan memercayai apa yang didengarnya, karena mereka tidak melihat contoh dari apa yang disampaikan guru. Guru tidak bisa menampilkan perkataannya dalam sebuah tindakan nyata. Sehingga, proses bimbingan dan pendidikan tidak dapat berjalan efektif serta sulit mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3) Tidak Ada Perubahan Perilaku

Ketika guru tidak mampu memberikan keteladanan dalam proses pembelajarannya, maka pelajaran apapun yang disampaikan berpeluang rendah akan membawa dampak perubahan positif dalam diri peserta didik. Perubahan yang dimaksud dikhususkan pada sikap, karakter, perilaku peserta didik sebagai salah satu inti dari tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa perubahan adalah inti dari pendidikan. Ketika guru tidak mampu mengubah perilaku negatif menjadi positif, maka guru tersebut menunda kesuksesannya dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik.

4) Dikeluarkan dari Tempat Mengajar

Seorang guru yang tidak dapat menampilkan keteladanan positif untuk peserta didik bahkan berani berperilaku menyimpang dari norma masyarakat, agama, dan negara maka akan ada konsekuensi buruk yang harus diterimanya. Sebelum konsekuensi buruk tersebut diterima, tentunya pihak instansi yang bersangkutan telah memberikan peringatan terlebih dahulu agar ia mampu memperbaiki perilakunya. Namun ketika batas kesempatan tersebut telah habis dan guru tidak mampu memberikan perubahan, maka jalan terbaik yang harus dilakukan adalah mengeluarkannya dari tempat mengajar demi menyelamatkan proses pendidikan. Pada hakikatnya, dalam melaksanakan proses pendidikan dibutuhkan seorang guru yang unggul dalam wawasan ilmu pengetahuan serta memiliki perilaku terpuji (Jamal Ma'mur Asmani, 2010, p. 83-86).

2. Hakikat Akhlak

a. Pengertian Akhlak

Akhlak adalah jamak dari kata *al-khulq* yang berarti suatu perangai, kebiasaan, ataupun tabiat. Secara sederhana, akhlak adalah suatu perilaku yang ada pada diri manusia yang telah menjadi kebiasaan (Lia Utari, dkk. 2020, p. 80). Sedangkan di dalam kitab *ikhya' ulum al-din*, pengertian akhlak adalah suatu sifat yang sebelumnya telah tertanam kuat di dalam jiwa seseorang sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan secara alami tanpa adanya pertimbangan pemikiran terhadap perilaku tersebut (Yolanda Aditama, dkk, p. 7).

b. Macam-macam Akhlak

1) Akhlak Terhadap Allah SWT

Seseorang yang mempunyai akhlak mulia kepada Allah SWT, maka ia akan menampilkan perbuatan-perbuatan mulia seperti yang diperintahkan Allah, misalnya dengan melaksanakan salat, puasa, haji, ibadah sunah dan lain sebagainya. Selain itu, ia akan selalu menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT dengan hati yang lapang. Di bawah ini akan ditampilkan beberapa contoh akhlak yang baik terhadap Allah SWT yaitu sebagai berikut:

- a) Beriman, yaitu meyakini dengan sepenuh hati dan tanpa keraguan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada selain-Nya, serta ditunjukkan melalui perbuatannya.
- b) Taat, yaitu menjalankan segala perintah Allah SWT serta menjauhi semua larangannya dengan hati yang ikhlas tanpa suatu paksaan.
- c) Ikhlas, yaitu suatu kerelaan untuk melaksanakan segala sesuatu agar mendapat keridhoan Allah SWT.
- d) Syukur, yaitu suatu sikap rasa terima kasih yang ditunjukkan kepada Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah diterimanya.

2) Akhlak Terhadap Manusia

a) Akhlak Terhadap Diri Sendiri

Ada beberapa contoh akhlak terpuji yang ditampilkan untuk diri sendiri yaitu, menjaga kebersihan diri, mengatur pola makan dan minum, memakai pakaian yang bersih serta sopan dan lain sebagainya.

b) Akhlak Terhadap Orang Tua

Ada beberapa contoh akhlak terpuji yang ditampilkan kepada orang tua yaitu, selalu menaati nasihat baik yang

diberikan oleh orang tua, menyayangi dan menghormati orang tua, berucap dengan sopan ketika berbicara dengan orang tua, selalu mendoakan untuk kebaikan orang tua, dan perilaku-perilaku mulia lainnya.

c) Akhlak Terhadap Tetangga

Ada beberapa contoh akhlak terpuji yang terkait dengan interaksi terhadap tetangga yaitu, saling menghormati dan bertegur sapa dengan sopan. Selain itu, bisa saling memberi ketika mempunyai sesuatu sebagai sikap saling memperhatikan satu sama lain.

3) Akhlak Terhadap Alam Semesta

Sebagai manusia yang berakhlak mulia, tentu harus bertanggung jawab untuk mencintai dan menjaga memelihara alam semesta dengan sebaik mungkin. Karena tugas manusia tidak lain menjadi khalifah di bumi ini. Salah satu sikap yang dapat ditampilkan yaitu, menjaga kebersihan lingkungan, tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan, dan lain sebagainya (Euis Rosyidah, 2019, p. 183-184).

c. Faktor-Faktor Pengaruh Terbentuknya Akhlak

1) Adat atau Kebiasaan

Akhlak seseorang dapat terbentuk dengan adanya kebiasaan mengulang perbuatan secara terus menerus atau konsisten setiap harinya.

2) Keturunan

Setiap orang tua pasti akan menurunkan karakteristik kemiripan fisik serta sifat-sifat kepada keturunannya. Sifat-sifat tersebut seperti kecerdasan, kesopanan, kedermawanan dan lain sebagainya.

3) Lingkungan

Lingkungan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akhlak seseorang. Dikarenakan lingkungan adalah masyarakat yang hidup berdampingan setiap harinya. Jika lingkungan tersebut baik, maka akan berpengaruh baik pula begitupun sebaliknya.

4) Naluri

Naluri merupakan suatu tabiat yang dibawa sejak lahir oleh manusia yang bersangkutan (Euis Rosyidah, 2019, p. 185).

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian langsung di lapangan (*field research*). Artinya peneliti mengamati keadaan objek penelitian secara langsung di tempat kejadian. Penelitian lapangan dilaksanakan dengan mengamati kehidupan sebenarnya yang sedang terjadi, misalnya penelitian mengenai kurangnya akhlak remaja dan lain sebagainya. Pada dasarnya, penelitian lapangan merupakan cara, metode atau langkah-langkah untuk menggali, menemukan dan mengemukakan secara jelas mengenai suatu permasalahan atau penyelewengan yang terjadi pada kehidupan masyarakat tersebut (Mardalis, 2009, p. 28). Penelitian lapangan memiliki tujuan yang sangat penting yaitu untuk mengetahui suatu hasil penelitian berupa keadaan dan interaksi sosial baik kelompok besar ataupun kecil pada suatu lingkungan yang diteliti (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, p. 46).

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulis memilih menggunakan dan mengaplikasikan pendekatan kualitatif. Secara sederhana, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang sangat menekankan proses pencarian data berupa gejala-gejala yang nampak pada suatu keadaan di masyarakat serta hasilnya ditulis dan disajikan dalam bentuk naratif (A. Muri Yusuf, 2015, p. 329).

Metode kualitatif digunakan oleh peneliti untuk menggali, menemukan, mengungkapkan serta memahami permasalahan di balik fenomena yang belum diketahui. Selain itu, metode kualitatif digunakan sebagai alat untuk menemukan pengetahuan baru serta dapat memberi rincian yang kompleks dan mendalam mengenai kejaian yang sulit diungkapkan dengan menggunakan metode kuantitatif (Anselm Strauss dan Juliet Corbin, 2003, p. 5).

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan ketika penelitian berlangsung di lapangan. Secara sederhana wawancara merupakan suatu interaksi timbal balik antara pewawancara (pencari

berita) dan narasumber (pemberi informasi) melalui percakapan atau komunikasi secara langsung. Peneliti menyiapkan dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai objek yang diteliti kepada narasumber yang terkait (A. Muri Yusuf, 2015, p. 372).

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara secara terencana dan terstruktur. Wawancara terencana terstruktur merupakan model wawancara dimana peneliti sebelumnya telah menyusun dan menyiapkan beberapa pedoman pertanyaan secara sistematis sesuai kebutuhan dan format yang baku. Dengan adanya pedoman wawancara terstruktur peneliti mempunyai pegangan yang kuat sehingga tidak akan kebingungan saat berada di lapangan bersama narasumber. Selanjutnya peneliti hanya menyampaikan pertanyaan yang telah ditulis sebelumnya kemudian menyimak dan mencatat jawaban narasumber secara tepat (A. Muri Yusuf, 2015, p. 376).

Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara terstruktur, peneliti juga menerapkan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur tersebut dapat dikategorikan sebagai teknik *in-dept interview*, artinya pelaksanaan wawancara akan lebih fleksibel atau bebas jika dibandingkan dengan teknik wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan dan mengumpulkan data secara lebih terbuka dan tidak kaku dalam pelaksanaannya (Sugiyono, p. 73).

b. Teknik Observasi

Selain menggunakan teknik wawancara, peneliti juga menggunakan teknik observasi. Secara sederhana, observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian selama proses penelitian berlangsung. Langkah-langkah observasi biasanya dilakukan dengan cara mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan cara merasakan, melihat, mendengar yang kemudian dicatat secara obyektif sesuai kenyataan di lapangan (W. Gulo, 2010, p. 116)

Ketika menggunakan teknik observasi, maka harus dapat dipastikan bahwa peneliti harus diterima dengan baik sebagai bagian dari kelompok atau orang dari para responden. Hal tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya teknik tersebut memerlukan kepercayaan

penuh terhadap kehadiran peneliti. Ketika peneliti diterima dengan baik oleh responden, maka peneliti juga akan mendapatkan data yang dicari dengan mudah tanpa ada yang ditutupi atau dirahasiakan oleh pemilik berita (responden) (Hamidi, 2005, p. 72).

c. Teknik Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan data penelitian melalui sumber informasi yang bersumber dari catatan-catatan (dokumen) penting milik suatu lembaga, organisasi, serta perorangan. Jadi peneliti dapat mengetahui sumber data dari dokumen-dokumen tersebut (Hamidi, 2005, p. 72).

Secara sederhana dokumen dapat dimaknai sebagai catatan suatu kejadian, kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi dan berlalu. Dokumen dapat ditampilkan dengan berbentuk catatan atau tulisan, contohnya adalah arsip-arsip, catatan harian, peraturan yang telah ditetapkan, kebijakan perbaikan, serta biografi dari orang yang bersangkutan. Selain berbentuk tulisan, ada juga dokumen yang ditampilkan berbentuk gambar, misalnya foto-foto, gambar hidup, lukisan, sketsa, dan lain sebagainya (Masrukhin, 2017, p. 107).

PEMBAHASAN

1. Temuan tentang Pemberian Keteladanan Guru dalam Membentuk Akhlak Peserta Didik di TPQ Sabial Muhtadin Clering

a. Keteladanan Menjalankan Salat Asar Berjamaah

Dalam pembentukan akhlak mulia termasuk akhlak kepada Allah SWT, maka guru dapat memberikan beberapa keteladannya kepada peserta didik agar dapat ditiru dan diaplikasikan. Sehingga dengan adanya keteladanan yang ditampilkan secara konsisten, hal yang diajarkan dapat menjadi kebiasaan yang tertanam dalam perilaku peserta didik. Salah satu pembentukan akhlak yang baik adalah dengan menerapkan peraturan pelaksanaan salat asar berjamaah. Ketika telah masuk waktu salat asar, guru selalu menasehati peserta didik untuk segera melaksanakannya. Guru tidak hanya sekedar menasehati, tetapi beliau memberikan contoh dengan segera berwudhu dan ikut serta mengarahkan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan hati yang ringan karena ia mendapat contoh bukan hanya sekedar nasehat.

b. Keteladanan dalam Berpakaian

Pembentukan akhlak positif untuk diri sendiri adalah dengan memberikan keteladanan yang baik dalam berpakaian. Seorang guru perempuan selalu mengenakan pakaian yang bersih, rapi dan menutup seluruh auratnya. Guru selalu mengenakan hijab dengan baik dan benar sehingga rambutnya tidak terlihat. Begitupun guru laki-laki, ia mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Pemberian keteladanan yang ditampilkan oleh guru, maka sedikit banyak dapat mempengaruhi cara berpakaian peserta didiknya. Selain itu, jika masih ada peserta didik yang memakai pakaian tidak sesuai, maka guru menegurnya dengan bahasa halus, agar anak merasa dihargai.

c. Sopan Santun

Secara umum, para guru yang mengajar di TPQ Sablilal Muhtadin telah menampilkan sikap sopan santun terhadap sesama rekan guru, peserta didik maupun masyarakat sekitar. Contoh sikap sopan santun yang ditampilkan guru adalah selalu mengucapkan salam dan berjabat tangan (jika sesama jenis). Ketika guru melihat kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik, maka beliau mengingatkan atau mengoreksi dengan bahasa yang sopan. Artinya guru tidak langsung menampakkan kemarahannya di depan umum. Guru bersikap tenang, menjelaskan bagaimana baiknya, dan mengarahkan peserta didik. Dengan demikian guru tersebut, telah memberikan keteladanan terbaiknya dalam hal memperlakukan orang lain dengan penuh penghargaan dan kesopanan.

d. Keteladanan Berbicara Baik

Setiap guru di TPQ Sablilal Muhtadin memberikan contoh dalam bertutur kata yang baik dan sopan. Hal tersebut dapat terlihat saat guru memerintahkan peserta didik yang mendapat tugas piket untuk membersihkan tempat belajar. Dimana beliau mengawalinya dengan meminta tolong. Kata tolong merupakan kata-kata sederhana namun memiliki makna yang luar biasa dalam pendidikan. Dimana kata-kata tersebut mencerminkan sikap penghargaan kepada orang yang bersangkutan. Selain itu, guru berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan halus dalam berbicara, menyampaikan pendapat ataupun nasihat. Dengan pemberian contoh dan pembiasaan yang dilakukan secara konsisten, maka seiring berjalannya waktu dapat mempengaruhi gaya bicara peserta didik menjadi lebih baik.

2. Temuan tentang Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembentukan Akhlak Peserta Didik di TPQ Sabilal Muhtadin Clering

a. Faktor Pendukung Pembentukan Akhlak Peserta Didik di TPQ Sabilal Muhtadin Clering

Ada beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan pembentukan akhlak di TPQ Sabilal Muhtadin Clering, yaitu sebagai berikut:

1) Komitmen Guru

Guru di TPQ Sabilal Muhtadin sangat berkomitmen untuk membentuk akhlak mulia pada peserta didiknya. Dimana mereka selalu mengkomunikasikan segala sesuatu mulai dari pemberian materi pendidikan, pembentukan karakter dan akhlak mulia dan lain sebagainya. Guru menanamkan nilai-nilai pembentukan akhlak melalui keteladanan dan kegiatan pembiasaan. Dimana seorang guru memiliki peran penting sebagai seorang pengawas dan selalu menertibkan peserta didik agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar.

2) Kepedulian Orang Tua Peserta Didik

Kepedulian orang tua peserta didik menjadi faktor pendukung yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembentukan akhlak yang baik. Dari hasil pengamatan, banyak orang tua yang mengantarkan anaknya untuk belajar di TPQ Sabilal Muhtadin. Hal tersebut menjadi bukti kepedulian orang tua terhadap keberhasilan anak di dalam proses pendidikan. Salah satu alasan orang tua memasukkan anak di TPQ tersebut agar anak mendapat wawasan keagamaan, pelatihan membaca al-qur'an dan pembentukan akhlak yang baik. Orang tua juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penguatan pembentukan akhlak, karena mereka akan membantu anaknya untuk menumbuhkan kesadaran agar bersikap lebih baik.

b. Faktor Penghambat Pembentukan Akhlak Peserta Didik di TPQ Sabilal Muhtadin Clering

1) Faktor Kesadaran dalam Diri Peserta Didik

Salah satu faktor penghambat pembentukan akhlak adalah kurangnya kesadaran dalam diri peserta didik sendiri. Hal tersebut dikarenakan, umur peserta didik yang masih kecil. Sehingga sifat kekanak-kanakannya masih melekat dalam diri. Namun, guru tetap berusaha mendidik mereka dengan sebaik mungkin. Proses kegiatan pembiasaan yang positif diyakini mampu merubah anak menjadi lebih baik nantinya. Tetapi, hal tersebut tentu memerlukan proses yang panjang dan ketekunan (keteladanan) maksimal.

2) Pengaruh Teman Sebaya

Selain faktor kesadaran diri, pengaruh teman sebaya juga menjadi penghambat pembentukan akhlak peserta didik di TPQ Sabilal Muhtadin. Teman sebaya sedikit banyak dapat mempengaruhi pembentukan akhlak terhadap individu lain. Ketika peserta didik telah mempunyai bawaan sikap yang baik, tetapi ia terpengaruh oleh teman yang buruk, maka seiring berjalannya waktu ia akan mengikuti kebiasaan temannya tersebut. Dengan demikian, harus ada sosok guru atau orang tua yang terus mendidik keduanya agar mempunyai akhlak yang mulia.

3. Temuan tentang Hasil Keteladanan Guru dalam Membentuk Akhlak Peserta Didik di TPQ Sabilal Muhtadin Clering

Pembentukan dan pembinaan akhlak peserta didik di TPQ Sabilal Muhtadin melalui keteladanan telah memperoleh hasil peningkatan yang signifikan. Salah satu peningkatan akhlak kepada Allah SWT adalah peserta didik telah mampu menjalankan ibadah salat asar dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, peserta didik juga telah mampu membaca al-Qur'an dengan baik, walaupun masih ada beberapa anak yang masih berproses. Peningkatan akhlak kepada diri sendiri contohnya adalah peserta didik telah berpakaian secara rapi dan sopan. Sekarang tidak ada peserta didik perempuan yang memakai atasan pendek. Semuanya memakai bawahan dan atasan panjang, dipadukan dengan hijab yang rapi. Peningkatan akhlak terhadap sesama contohnya adalah peserta didik telah mampu berkomunikasi dengan guru, orang tua, ataupun masyarakat sekitar dengan bahasa yang sopan. Walaupun ada beberapa peserta didik yang belum bisa menerapkannya dalam berkomunikasi.

Dari temuan-temuan di atas, guru dapat menampilkan keteladanan yang dimiliki melalui, sikap, perilaku, perkataan dan perbuatan yang positif agar dapat dijadikan sebagai contoh oleh peserta didik. Di lingkungan sekolah, seorang guru diumpamakan sebagai aktor utama yang diberikan wewenang untuk menjadi panutan bagi peserta didiknya (Muhammad Yaumi, 2014, p. 148). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian di lapangan, bahwasannya guru di TPQ Sabilal Muhtadin telah menampilkan keteladanan terbaiknya agar dapat dicontoh oleh peserta didik. Guru telah memberikan contoh perkataan dan perbuatan yang positif. Misalnya, keteladanan menjalankan salat asar berjamaah, keteladanan dalam berpakaian, sopan santun dan keteladanan berbicara baik.

Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk akhlak peserta didik diantaranya adalah adat kebiasaan, keturunan, lingkungan dan naluri. Adapun faktor pendukung pembentukan akhlak peserta didik di TPQ Sabilal Muhtadin adalah adat kebiasaan. Guru-guru di TPQ Sabilal Muhtadin telah mengajar peserta didik dengan memberikan pembiasaan-pembiasaan baik dan menampilkan keteladanan setiap harinya. Adapun faktor penghambat pembentukan akhlak peserta didik di TPQ Sabilal Muhtadin adalah teman sebaya/lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan yang terjadi, dimana peserta didik yang kurang baik dapat memberikan pengaruh kepada temannya lainnya. Misalnya mempengaruhi cara berbicara dan bersikap.

Dalam mempengaruhi orang lain, keteladanan dapat diterapkan sebagai salah satu model yang sangat efektif. Di dalam Islam, keteladanan sering digunakan sebagai media untuk berdakwah dan menerapkan pendidikan. Keteladanan menjadi hal utama dalam mensukseskan pendidikan karena mempunyai daya pengaruh yang kuat dalam menyampaikan pesan kepada orang lain (Ulil Amri Syafri, 2014, 142). Hal ini sesuai dengan pendidikan pembentukan akhlak di TPQ Sabilal Muhtadin. Guru telah menampilkan keteladannya untuk peserta didik. Dengan menampilkan keteladanan yang konsisten, terbukti bahwasannya ada peningkatan perbaikan akhlak, yaitu peserta didik telah mampu berkomunikasi dengan guru, orang tua, ataupun masyarakat sekitar dengan bahasa yang sopan. Walaupun ada beberapa peserta didik yang belum bisa menerapkannya dalam berkomunikasi.

SIMPULAN

Dalam meningkatkan akhlak peserta didik di TPQ Sabilal Muhtadin, maka guru telah melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Guru memberikan pengajaran secara maksimal dan menampilkan keteladanan. Keteladanan yang ditampilkan yaitu: keteladanan menjalankan salat asar berjamaah, keteladanan dalam berpakaian, sopan santun dan keteladanan berbicara baik. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pembentukan akhlak peserta didik di TPQ Sabilal Muhtadin. Faktor pendukungnya adalah komitmen guru dan kepedulian orang tua peserta didik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor kesadaran dalam diri peserta didik dan pengaruh teman sebaya. Adapun hasil keteladanan guru dalam membentuk akhlak peserta didik di TPQ Sabilal Muhtadin yaitu: peserta didik telah mampu menjalankan ibadah salat asar dengan baik dan tepat waktu. Sebagian besar peserta didik juga telah mampu membaca al-Qur'an dengan baik. Peserta didik telah berpakaian secara rapi dan sopan. Peserta didik berkomunikasi dengan orang lain dengan sikap sopan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. 2009. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Aditama, Yolanda. dkk, *Pengaruh Aktivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Keteladanan Guru Terhadap Akhlak Siswa di SMP Negeri 7 Dumai*, Jurnal Wibawa, Vol 1, No. 2.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2010. *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif*, Yogyakarta: Diva Press.
- Aziz, Hamka Abdul. 2012. *Karakter Guru Profesional*, Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Corbin, Juliet dan Anselm Strauss. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardalis. 2009. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Naim, Ngainun. 2016. *Menjadi Guru Inspiratif: Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nata, Abuddin. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Rosyidah, Euis. *Upaya Guru Pendidik Agama Islam Dalam Pembentukan Akhlak Peserta Didik di TPQ Al-Azam Pekanbaru*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 9, No. 2, 2019.
- Setyawan, Sigit. 2013. *Guruku Panutanku*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syafri, Ulil Amri. 2014. *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utari, Lia. dkk, *Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Peserta Didik Autis*, Juornal of Education and Intruction Vol. 2, No. 1, Juni 2020.
- Yaumi, Muhammad. 2014. *Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, dan Implementasi*, Jakarta: Kencana.
- Yusuf,A. Muri. 2015. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

IMPROVEMENT OF MEMORY WITH DISCIPLINED BEHAVIOR OF STUDENTS IN MEMORY OF THE QUR'AN IN ROUDLOTUL MUTA'ALLIMAT BOARDING SCHOOL

Putri Pungkas Sari
(Graduate Student of IAIN Kudus)
putri.pungkas16@gmail.com

Abstract

Education is humanization, which is an effort to humanize humans or efforts to help humans to be able to realize themselves in accordance with their human dignity. Humans seek knowledge to improve self-quality and to live religion or to achieve prosperity in life in this world and in the hereafter. The trick is to study with a kiai, ustad and ulema in a boarding school. Islamic Boarding School is the oldest Islamic education institution in Indonesia. Islamic boarding schools play an important role in providing education for the Indonesian people, especially religious education. The presence of Islamic boarding schools in the community is not only an educational institution, but also as a religious and socio-religious broadcasting institution. As a religious broadcasting institution, Islamic boarding schools carry out da'wah activities among the community, in the sense of carrying out activities to foster religious awareness to carry out Islamic teachings consequently as followers of the Islamic religion.

Keywords: *student, islamic boarding school and discipline*

INTRODUCTION

Every santri who memorizes the Qur'an repeats words, muroja'ah so that he always remembers what he has memorized. Remembering and growing sharp memory so that the memorization is not easy to forget, it is obligatory for a student to keep it. It is not easy to keep and remember rote, but the effort and prayer that is always said will pick up one's success. Because actually the Qur'an is already in their hearts and themselves.

Memory will grow because it is often used. The more you learn, the more connections memory can make. Unconsciously, through continuous learning, memory will continue to improve. To improve memory for learning memory must focus fully on the things that are remembered. The more attention paid, the stronger the memory imprint. on the contrary, the less attention is paid, the weaker the trace of memory.

Discipline is one of the efforts to improve a child's character, so that they are able to be more responsible, this of course can make children more organized and directed and can make children further increase their sense of responsibility, and is expected to be achieved and applied. optimally.

The application of this disciplinary attitude shows which discipline between the santri or female students and ordinary school children; Discipline can be applied to every individual if he has an environment that supports him, has a coach who does direct and is also aware from within the individual, so there is no guarantee that the santri or female students are more disciplined than ordinary school children and vice versa.

This article will discuss about how the education of students in Islamic boarding schools and in schools about the memory of students in memorizing the Qur'an and the discipline of students in memorizing the Qur'an.

This type of research is field research, which is viewed from the characteristics of the problem based on functional categories as descriptive research, namely research aimed at systematically and accurately describing facts and characteristics regarding a particular field. Due to its descriptive nature of a case or natural phenomenon, this research is quite broad in its discussion. This means that researchers are looking for and collecting data about the application of the tikkur method in improving the memory of students and the supporting and inhibiting factors for the application of the tikkur method at the Roudlotul Muta'allimat Islamic boarding school, Kaligunting 115 Kajeksan Kudus, namely primary data and secondary data.

DISCUSSION

1. Memorizing the Qur'an

Memorizing the Qur'an is a great virtue, and the position is always coveted by all the righteous, and a sincere aspirant, and hope for worldly and ukhrawi pleasures so that human beings will become citizens of God and be honored with perfect respect.¹

Memorizing the Qur'an keeps the Qur'an in our hearts. Being a memorizer of the Qur'an means making the Qur'an as the main meal every day, in the morning, noon, evening, and night.

A memorizer of the Qur'an always tries to take care of himself and his memorization, because he does not want to lose something very valuable from his heart, namely the memorization of the Qur'an.

Keeping the Qur'an in the heart nurtures and waters the plant of pious deeds so that it grows into ahsanu 'amala, the best of deeds, and makes it free from various pests of liver disease that can kill it. Memorizing the Qur'an glorifies oneself with His words, calms the soul with remembrance of Him, and becomes a member of Allah SWT in the world with His glory.²

The main purpose of memorizing the Qur'an is to uphold it or read it every night and day. This act also has the purpose of remembering all the contents of the verses related to the knowledge of God and the hereafter. That is the knowledge that will give birth to happiness and a good life for every human being, give birth to fortitude when life crises arise, and produce strength for the people to always be ready to face their enemies.

In fact, memorizing the verses of the Qur'an is only a means and not a goal, namely a means to memorize the meanings contained in it, and take its benefits to live life. As for if it is only limited to memorizing the lafadz, then it is only limited to carrying out the things of the Qur'an, but out of the main goal of always guarding it, taking advantage of it to live life in this world and the hereafter.³

1 H. Sa'dulloh, *9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur'an*, (Gema Insani : Jakarta), 2008, hlm. 23

2 Amin M Ariza, *Jatuh Cinta Pada Al-Qur'an*, (PT.Gramedia:Jakarta), 2016, hlm. 51-54

3 Dr. Khalid 'Abdul Karim Al-Lahim, *10 Resep Menyelami Makna Al-Qur'an*, (Insan Kamil: Surakarta), Cetakan 1-2010, hlm. 145-146

2. How to memorize the Qur'an

Memorizing the Qur'an enjoys the most delicious food for the heart. It is a pleasure in itself. Memorizing the Qur'an maintains taqwa. So that fear, hope, love only for Him, remain in the chest forever.

Memorizing the correct Al-Qur'an is an educational memorization, and can be formulated in the following steps:

- a. The memorization of the Qur'an should be started from the letter An-Nas then Al-Falaq and so on.

This method aims to make memorization run to make it easier for someone to memorize and read and repeat it at each prayer. This method also makes it easier to memorize short and easy suras first, before proceeding to juz juz which are arranged from the beginning and then onwards.

- b. Memorizing is divided into two types: *first*, new memorization. *Second*, read (repeat) the memorization in prayer.
- c. Specify the time of day, namely sunrise to sunset to memorize new verses.
- d. Specializing in the night time, namely from the Maghrib call to prayer until the Fajr call to prayer to repeat the memorization in the night prayer.
- e. Divide the new memorization into two parts, memorizing and takrar.
- f. Reducing the number of memorized verses (new ones) and focusing more on repeating verses that have been memorized so that memorization is stronger and more perfect.
- g. Divide time for muraja'ah
- h. The time for taking the vows must be adjusted with additional memorization so that it is not easily erased or lost
- i. It is better to do tasmi '(listening to) memorization to other people or friends in order to help each other and remind each other to memorize. ⁴

4 Dr. Khalid 'Abdul Karim Al-Lahim, *10 Resep Menyelami Makna Al-Qur'an*, (Insan Kamil: Surakarta), Cetakan 1-2010, hlm. 146-150

3. The adab of reading the Qur'an

In order for reading the Qur'an to be more blessed, it is important for us to pay attention to etiquette in reading the Qur'an. Among these etiquette, are:

- a. It is recommended to purify yourself from hadas, clean your teeth before reading the Qur'an, and wear decent clothes.
- b. It is recommended to face the Qibla.
- c. Reading ta'awudz when starting to read the Qur'an.
- d. You should concentrate and try to reflect on everything you read.
- e. Trying to be solemn 'or focus the heart until the feeling is carried away by what is read.
- f. Try to read correctly, clearly, and in a good voice. It is also recommended to read with tartil, which is to read slowly and clearly each letter, the Prophet also recommends us to improve our voice when reading the Qur'an.
- g. It is permissible to read the Qur'an while standing, in a vehicle, or lying down.
- h. Do not read too loudly so as to disturb others who are praying or sleeping. As narrated in a hadith which means "The person who hardens the reading of the Qur'an is like the person who shows alms. People who are slow in reciting the Qur'an are like those who give alms secretly." (Narrated by Ahmad and Nasa'i)
- i. The Messenger of Allah (saw) forbade finishing less than three days. Because it's too fast to be able to contemplate the meaning.
- j. Perform prostration of recitations when reading the prayer mat.
- k. Read it with tadabbur⁵

Tadabbur is thinking perfectly and leading to a deep understanding of a problem.

The meaning of tadabbur Al-Qur'an is to think and explore the meaning of the verses of the Qur'an to be able to understand it, know the content of meaning and wisdom as well as the intent of it. ⁶

5 Ahsin W Al-Hafidz, *Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur'an*, (Sinar Grafika offset: Jakarta), 2000, hlm. 33

6 Khalid 'Abdul Karim AL-Lahim, *10 Resep Menyelami Makna Al-Qur'an*, (Insan Kamil: Surakarta), cet-1 2010, hlm. 33

4. Student discipline in memorizing the Qur'an

Memorizing the Qur'an is a noble job in the sight of Allah swt, people who always read the Qur'an and practice its contents. Among several things that must be fulfilled before a person enters the period of memorizing the Qur'an⁷, are:

- a. Able to empty his mind of thoughts and theories or problems that would disturb him.
- b. Sincere intention

The main thing that must be done by people who will memorize the Qur'an is to make up their mind to memorize the Qur'an by only hoping for the pleasure of Allah swt.

A person who has a strong desire to become a hafidz should set his intention to be sincere, never expect praise from others, expect respect and authority from others, do *riya'* by making memorizing the Qur'an only for competitions in hopes of prizes. and trophies, and expect a decent living by relying on memorizing the Qur'an.

- c. Have determination and patience

The process of memorizing the Qur'an will encounter many kinds of obstacles, maybe boredom, maybe environmental disturbances due to noise or noise, maybe mental disturbances or maybe because of facing certain verses that may be difficult to memorize, and so on, especially in preserving sustainability. memorize the Qur'an.

Therefore, to be able to preserve memorization requires determination and patience, because the main key to the success of memorizing the Qur'an is perseverance and repeating the verses that have been memorized.

- d. Istiqamah

Istiqamah is consistent, while maintaining consistency in the process of memorizing the Qur'an. A memorizer of the Qur'an must always maintain continuity and efficiency with respect to time.

- e. Stay away from immorality and despicable traits

If someone who memorizes the Qur'an is afflicted with despicable diseases, the effort in memorizing the Qur'an will be weak if no one else pays attention to it. These despicable traits must be removed by

7 Ahsin W Al-Hafidz, *Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur'an*, (Sinar Grafika offset: Jakarta), 2000, hlm. 48-54

someone who is in the process of memorizing the Qur'an, because these qualities are heart diseases that will greatly interfere with the smooth memorization of the Qur'an.

f. Permission of parents, guardian or husband

Asking for the blessing of parents, guardians or husbands is very influential on the smooth process of memorizing the Qur'an.

g. Able to read well.

For the process of memorizing the Qur'an, the teacher must recite the Koran, so that the reading is really good and fluent and good at reading. Because the memorization process is not to play around, but to keep Allah's verses that will be accounted for in the hereafter.

Memorizing the Qur'an does not have to be intelligent. The proof is that people who are mentally retarded and have below average intelligence can memorize the Qur'an. Memorizing the Qur'an does not require brain intelligence, but only requires sincere intentions and clarity of heart. If our intentions are sincere and our hearts are clear, Allah swt will collect the Qur'an in our chests.⁸

The method applied by Mrs. Hj. Umi Hanik Achmadi has a goal in improving the memory of students in memorizing, especially in memorizing the Qur'an with *Rosm Ottoman* and following *Imam Hafis*, to always recite the Qur'an and musyafahah Al-Qur'an, to correct mistakes and perfecting what is lacking, in order to achieve the ultimate goal of memorizing the Qur'an properly in accordance with expectations.

Habituation programs and disciplinary activities in daily deposits at the Roudlotul muta'allimat Islamic boarding school as follows:

- a. Ziyadah Deposit (Additional) is a deposit process that is handled by Ms. Hj. Umi Hanik Achmadi is held in the morning starting at 8. Additional deposits start from 1-2 pages, there is also a memory deposit of 5 pages or according to the ability of students. In order to increase the memorization with istiqomah and smoothly when depositing the memorization.
- b. Tikraran Deposit (Repeat) is a deposit process facilitated by Ustadz Ali Imron carried out at night ba'dha Isya '. The tikrar method is carried out by every student who has memorized the Qur'an and the ziyadah deposit to Mother has exceeded 5 juz, then depositing the deresannya

⁸ Amin M Ariza, *Jatuh Cinta Pada Al-Qur'an*, (PT.Gramedia:Jakarta), 2016, hlm. 164-166

starting from a quarter (5 pages) juz 1, or half (10 pages) juz 1 or directly 1 juz until the deadline ziyadah deposit. In order to help students remember the memorization that has been passed, because forgetting is human nature that is used to it. But on the other hand, a santri who memorizes the Qur'an must be able to maintain memorization and maintain the integrity of the memorization, existence and purity of the Qur'an.

The habituation of disciplinary activities and daily deposit programs at the Roudlotul Muta'allimat Islamic boarding school has applied the ziyadah method and the tikrar method to memorize the Qur'an.

The level of success and ability of students is supported by self-will by gathering sincere intentions to memorize the Qur'an. From the mother's side and the ustadz ustadz also play a very important role in motivating the students to memorize the Qur'an.

Another discipline attitude is that before reciting the Koran and depositing it with Ustadz Ali, the Roudlotul Muta'allimat Islamic Boarding School runs Fashohah learning activities, in order to support Tahfidz learning or just recitation of the Qur'an. This activity is filled by Ustadz Nawir, so that students who study the Qur'an can read properly and correctly according to the teachings of recitation.

Learning in the tikrar method or repetition of verses for students who memorize the Qur'an always motivates and fosters a disciplined attitude towards the activities that they do within themselves so that they have sincere and strong intentions in maintaining their memorization. To always repeat the memorization and always pay attention to the rules of recitation.

A memorizer of the Qur'an needs to do a row of tikraran with his comrades to listen to each other. It is more helpful for the rote mat process. This process is carried out before sending the memorized tikrar (repeat) to the ustadz, and to deposit the memorization of ziyadah and deresan to Mother with friends, where the attitude of helping each other is very useful.

Being successful in memorizing the Qur'an is the dream of everyone who memorizes the Qur'an. therefore motivate yourself strongly to overcome the challenges and obstacles that will be passed. Cultivate self-motivation as if he had a direct dialogue with Allah, seeking His pleasure. The motivation and support of both parents, family and friends are also influential in fostering enthusiasm in memorizing the Qur'an.

Studying the Qur'an is very necessary for Muslims from an early age, to bring them together with the belief that Allah is their Lord, and the Qur'an is His word. A teacher or parent must pay attention when a child reads the Koran by providing a concise and simple explanation so that the meanings of the Koran are open to the child's mind and heart. Not only in reading, writing the Qur'an is also very important for the next generation of Muslims. Therefore, repeating the reading of the Qur'an and understanding the rules of recitation is very important to support the success of memorizing the Qur'an.

The problem of rote repetition, depending on the level of a person's memory. If a person has a good level of memorization, then he can mark his memorization as many as several pages in a day. And if someone has a weak level of memorization, then he commits to memorizing only one or two pages a day, so that his memorization is maintained and his memorization is still good.⁹

Learning and disciplining students by applying the Tikrar method is a plan from the caretaker of the Roudlotul Muta'allimat Islamic boarding school in Kaligunting Kajeksan Kudus. The Tikrar method is a method as a complement for students to repeat memorization that has been buried by new memorization. Therefore, the ustadz in teaching must be able to understand the students. Because the students who memorized the Al-Qur'an in remembering their memorization there were easy ones directly with one tikraran, some were not smooth.

Effectiveness is everything that is done correctly, correctly so that the desired goals can be successful in accordance with what is expected. And the continuity of what is being carried out according to the target is carried out according to the method applied by educators and students can live it well.

Effectiveness is used as a benchmark for the success of memorization at the Roudlotul Muta'allimat Islamic boarding school by applying the Tikrar method as a memory booster for the hafidz in their memorization so that they can match the target of taking memorization according to a certain period of time.

The memorization of the students of the tahfidz program at the Roudlotul Muta'allimat Islamic Boarding School by applying the Tikrar method in their daily lives has succeeded in producing the memorizers of the Qur'an and according to the desired target. As for delays, it's normal and natural. What is unnatural is to stop memorizing halfway out of desperation.

9 M Taqiyul Islam Qori, *Cara Mudah Menghafal Al-Qur'an*, Gema Insani, Jakarta, 2006, hlm. 33

CONCLUTION

The application and refraction of students by applying the discipline of the Koran in carrying out the Tikrar method in improving the memory of students on Hafidz Al-Qur'an at the Roudlotul Muta'allimat Islamic Boarding School in Kaligunting Kajeksan Kudus aims to make students who memorize the Qur'an can fully hold and maintain memorization and the existence of the Qur'an. With the application of the Tikrar method, it produces intelligent students as he has used his brain to think continuously to remember and improve memory in his memorization clearly and according to the rules of recitation.

REFERENCES

- H. Sa'dulloh. 2008. *9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Ariza, Amin M. 2016. *Jatuh Cinta Pada Al-Qur'an*. Jakarta: PT.Gramedia
- Al-Lahim, Dr. Khalid 'Abdul Karim. 2010. *10 Resep Menyelami Makna Al-Qur'an*. Surakarta: Insan Kamil.
- Al-Hafidz, Ahsin W. 2000. *Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur'an*. Jakarta: Sinar Grafika offset.
- Qori, M Taqiyul Islam. 2006. *Cara Mudah Menghafal Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.

Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Audio Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PAI di SMP Negeri 1 Juwana

Rifqi Maulana Mochtar

Program Studi MPI Pascasarjana IAIN Kudus

Kikiinderpool97@gmail.com

Abstract

The use of audio-visual learning media is one of the tools to help support the implementation of the teaching and learning process whose use involves electronic equipment in the classroom. This research is one of the activities to analyze the use of audio-visual learning media in increasing the learning motivation of class VIII students and what factors are supporting and inhibiting them. As it is known that the learning media. This type of research is field research. The approach used by the researcher is a descriptive qualitative approach. The sources in this research data are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation using inductive qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that (1) There are three types of audio visual learning media used in class VIII SMP Negeri 1 Juwana, namely video, Power Point (PPT), and film. And the use of audio-visual learning media is adjusted to the material that will be conveyed to students. (2) To find out that the use of audio-visual learning media can increase the learning motivation of class VIII SMP Negeri 1 Juwana students, a comparison of values before and after the use of audio-visual learning media can be seen in the appendix, in table 4.4 and table 4.5. The table shows the value of student learning outcomes for VIII last year and this year. From the comparison of these values, it can be concluded that with the use of audio-visual learning media there is an increase in test scores in Islamic Religious Education subjects. (3) The supporting and inhibiting factors for the use of audio-visual learning media in increasing the learning motivation of class VIII students of SMP Negeri 1 Juwana are as

follows: the following, the supporting factors are the teacher's ability to use and package material in audio-visual learning media and adequate infrastructure such as comfortable classrooms, and projectors, while the inhibiting factor in using audio-visual learning media is the power outage which is sometimes too long so that it takes time. teachers in using audio-visual learning media, the implication is that the use of audio-visual learning media can increase students' motivation to learn in Islamic Religious Education subjects for class VIII SMP Negeri 1 Juwana.

Keywords: *Audio Visual Media, Learning Motivation*

Abstrak

Penggunaan media pembelajaran audio visual merupakan salah satu alat untuk membantu menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar yang penggunaannya melibatkan peralatan elektronik di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu kegiatan untuk menganalisis penggunaan media pembelajaran audio visual dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII serta faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan menghambat. Seperti yang diketahui bahwa media pembelajaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif. Sumber dalam data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Jenis media pembelajaran audio visual yang digunakan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Juwana ada tiga yaitu video, Power Point (PPT), Film. Dan penggunaan media pembelajaran audio visual tersebut disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan pada siswa. (2) Untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran audio visual dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII SMP negeri 1 Juwana diadakan perbandingan nilai sebelum dan sesudah digunakannya media pembelajaran audio visual yang dapat dilihat di lampiran, pada tabel 4.4 dan tabel 4.5. Dalam tabel tersebut telah tertera nilai hasil belajar siswa VIII pada tahun lalu dan tahun ini. Dari perbandingan nilai tersebut dapat menyimpulkan bahwasannya dengan adanya penggunaan media pembelajaran audio visual terjadi peningkatan nilai ulangan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. (3) Faktor

pendukung dan penghambat penggunaan media pembelajaran audio visual dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Juwana adalah sebagai berikut, faktor pendukungnya adalah kemampuan guru dalam menggunakan dan mengemas materi dalam media pembelajaran audio visual dan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, serta proyektor, adapun faktor penghambat dalam penggunaan media pembelajaran audio visual adalah pemadaman listrik yang terkadang terlalu lama sehingga menyita waktu guru dalam menggunakan media pembelajaran audio visual, implikasinya penggunaan media pembelajaran audio visual dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Juwana.

Kata Kunci: *Media Audio Visual, Motivasi Belajar*

Pendahuluan

Media pembelajaran ialah alat bantu yang digunakan oleh pendidik dalam proses belajar-mengajar di kelas. Media pembelajaran berfungsi sebagai pembawa pesan yang berasal dari komunikator (pendidik) kepada komunikan (peserta didik). (Drs Daryanto, 2016). Media pembelajaran sangat penting adanya bagi seorang pendidik sebab dengan media pembelajaran, peserta didik akan lebih termotivasi untuk menyukai pelajaran yang diajarkan pendidik. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa dalam peningkatan mutu pendidikan terdapat beberapa hal untuk memenuhi kriteria sistem pendidikan, yakni “standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan.”

Pada dasarnya, seorang pendidik dapat mengelola kelasnya dengan baik ketika ia memiliki kemampuan pedagogik yang baik. Dalam mengajar, seorang pendidik harus memiliki perencanaan tentang bagaimana dan seperti apa ia akan mengajar. (Drs Didi Supriadi., 2013) Selain seorang pendidik dalam mengajar sebaiknya juga memperhatikan cara penyampaian yang natural dan didasari oleh perencanaan yang baik. Seorang pendidik dalam proses belajar mengajar ia harus mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dalam suasana yang menyenangkan pada situasi pembelajaran di kelas. Pendidik harus mampu mengembangkan model pembelajaran yang dapat

meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam menerima pembelajaran, salah satunya dengan cara menggunakan media pembelajaran audio visual pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. “Menurut Najmi Hayati, dkk. mengemukakan bahwa materi Pendidikan Agama Islam yang disampaikan oleh guru di dalam kelas kurang dipahami oleh siswa karena dalam proses pembelajaran di kelas, guru lebih mendominasi pembelajaran dibandingkan siswa dan komunikasi pembelajaran hanya bersifat satu arah saja, di mana komunikasi hanya dari guru ke siswa dan tidak ada timbalbaliknya, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung siswa merasa cepat bosan dan hal ini yang menyebabkan siswa keluar masuk kelas, kurang bersemangat, dan mengganggu teman lainnya yang sedang belajar”. (Cucu Suhana 2014). Dari kutipan di atas bisa disimpulkan bahwaminat belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam masih dianggap kurang menarik bagi siswa. Oleh karena itu perlu adanya penggunaan media pembelajaran salah satunya adalah media pembelajaran audio visual dalam pembelajaran. “Dalam pandangan Hamalik, yang dikutip Azhar Arsyad mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa” (Cucu Suhana, 2014). Di samping menjadi pembangkit motivasi bagi siswa, media pembelajaran pun membantu siswa dalam peningkatan pemahaman, karena dengan media pembelajaran materi dapat tersaji secara menarik, mempermudah dalam pemahaman, serta informasi yang tersaji lebih padat dan terpercaya.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini menjadi sebuah kebutuhan pokok dalam kehidupan yang tidak terbantahkan lagi. Pengaruh teknologi hari ini sudah merasuki di setiap sendi kehidupan manusia dalam berbagai hal apapun. Hal ini dipengaruhi karena teknologi mampu mempermudah kerja manusia. Termasuk dalam dunia pendidikan, pembelajaran yang berorientasi terhadap penggunaan teknologi mampu mengubah bentuk fiosoфи pembelajaran dari pembelajaran berpusat pada guru (*teacher centered*) kepada pembelajaran berpusat kepada siswa (*student centered*) (Rinaldi et al., 2017). Oleh sebab itu, penggunaan teknologi untuk pembelajaran mampu memberikan proses belajar yang efektif dan efisien kepada siswa (Kristanto et al., 2017).

Dalam proses belajar, salah satu perangkat pembelajaran yang menjadi bagian tidak terpisahkan yang harus mampu dipilih dan digunakan serta dimanfaatkan oleh guru ialah media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting karena kehadiran mediadi dalam proses

belajar mengajar akan mampu mempermudah siswa dalam menangkap konsep dasar dan ilmu pengetahuan dari sebuah materi ajar. Manfaat lain dari media pembelajaran adalah bahwa media akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa karena kehadirannya memberikan suatu hal yang mampu menarik perhatian siswa (Asmara, 2015, Ainina, 2014, Milosevic, 2017). Oleh sebab itu, penting bagi guru untuk memiliki kemampuan memilih, mengembangkan dan menerapkan media pembelajaran karena media pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting bagi kesuksesan pembelajaran.

Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran berbasis audio visual yang memiliki peranan yang sangat penting bagi pembelajaran (Hasan, 2017). Salah satu pertimbangan menggunakan media audio visual ini adalah karena media ini dapat melatih konsentrasi dan fokus siswa pada materi yang sedang diajarkan. Penayangan video sebagai salah satu contohnya selain menarik perhatian siswa, focus perhatian siswa akan terpusat karena detik demi detik para siswa tidak akan pernah rela untuk melewatkannya (Ode, 2014). Penayangan video pembelajaran ini juga mampu menghadirkan pengalaman nyata karena media audio visual dapat menampilkan relitas dari materi sehingga siswa terdorong untuk melakukan aktivitasnya sendiri (Fujiyanto et al., 2016).

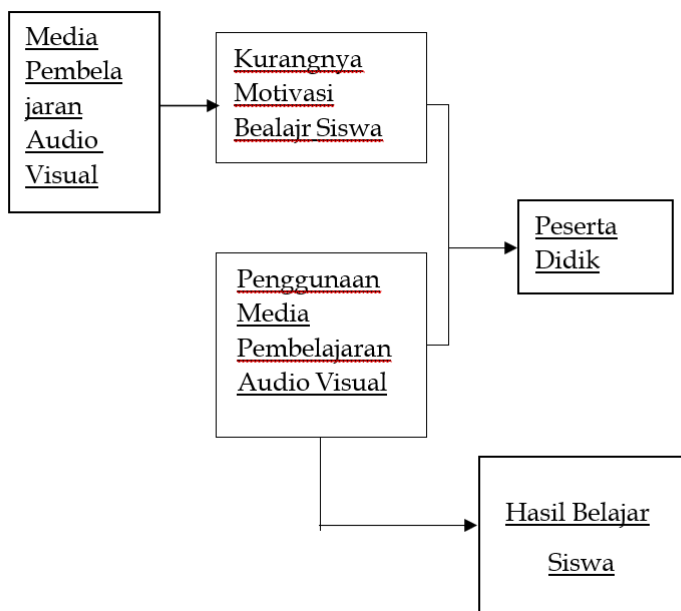
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini didapatkan melalui penyelidikan secara langsung dari lapangan tempat penelitian ini dilakukan, dalam kaitannya dengan masalah dan relevansinya. (Neong Muhadjir, 2002) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni metode yang akan meneliti objek, kondisi, atau sekelompok manusia dalam suatu sistem atau suatu peristiwa dengan tujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi mengenai fakta-fakta, juga sifat hubungan suatu fenomena yang dilakukan dengan sistematis, akurat, juga faktual. (Moh Nazir., 1988) Hal ini berarti peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, yaitu di SMP Negeri 1 Juwana yang terletak di Desa Kudukeras, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati untuk mengetahui permasalahan secara konkrit.

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Juwana yang terletak di jalan Silugonggo, kecamatan Juwana, kabupaten Pati. Alasan peneliti mengadakan penelitian di lokasi tersebut adalah untuk mendapatkan informasi yang

lebih lengkap sebagai bahan materi penelitian kali ini, dengan tujuan mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai penggunaan media pembelajaran audio visual dalam meningkatkan motivasi belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Juwana, Pati Tahun Pelajaran 2019/2020. Subyek Penelitian adalah sumber utama yang akan dikenai kesimpulan dari hasil penelitian. Data-data mengenai variabel dalam penelitian, didapat dari subjek penelitian ini. Subyek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Juwana sebagai pembimbing mata pelajaran Pendidikan Agama Islam serta siswa-siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Juwana. Sumber data penelitian ialah asal dari mana data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut didapatkan. Contohnya ketika pengumpulan data dalam penelitian, peneliti menggunakan wawancara atau kuesioner, maka sumber data yang dibutuhkan peneliti adalah responden, sebab dari respondenlah peneliti mendapatkan data-datayang dibutuhkan berkenaan dengan penelitiannya.

2.1 Skema Kerangka Berfikir



Hasil Penelitian

Gambaran umum SMP Negeri 1 Juwana ini meliputi sejarah berdirinya sekolah, identitas sekolah, visi, misi, dan tujuan sekolah, tenaga kependidikan, keadaan peserta didik, serta sarana prasarana sekolah. Adapun gambaran umum mengenai SMP N 1 Juwana akan disajikan sebagai berikut:

Di bawah ini, akan ditampilkan secara lengkap dan terperinci mengenai identitas SMP Negeri 1 Juwana sebagai berikut:

Nama Sekolah	: SMP Negeri 1 Juwana
NPSN	: 20339110
Jenjang Pendidikan	: SMP
Status Sekolah	: Negeri
Alamat Sekolah	: Jl. Silugonggo 46 Juwana
Kode Pos	: 59185
RT/RW	: 1/1
Kelurahan	: Kudukeras
Kecamatan	: Juwana
Kabupaten	: Kab. Pati
Provinsi	: Jawa Tengah
Negara	: Indonesia
Tahun Berdiri	: 25-01-1960
Status Kepemilikan	: Negeri

1. Visi, Misi SMP Negeri 1 Juwana

Di bawah ini, akan ditampilkan secara lengkap dan terperinci mengenai visi, misi SMP Negeri 1 Juwana, yaitu:

Visi	“Berprestasi, Berkompetisi, berbudi pekerti berwawasan internasional berdasarkan iman dan taqwa.”
Misi	<ul style="list-style-type: none">▪ Lulusan yang mempunyai kompetensi atau kemampuan bertaraf internasional

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lulusan yang cerdas, kompetitif, cinta tanah air, beriman dan bertakwa. ▪ Nilai –nilai pendidikan Agama bagi kenikmatan hidup bagi peserta didik dan mampu beradaptasi dengan perkembangan budaya global sesuai jatidiri bangsa. ▪ Sekolah inovatif, kreatif, dinamis dan berwawasan internasional ▪ Dokumen-1 atau buku-1 KTSP bertaraf Internasional. ▪ Perangkat kurikulum yang bertaraf internasional lengkap, mutakhir dan berwawasan ke depan. ▪ Manajemem berbasis sekolah yang tangguh manajemen bertaraf internasional. ▪ Pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu dan tangguh serta memiliki kompetensi yang bertaraf internasional ▪ Fasilitas sekolah yang relevan dan mutakhir dan berwawasan kedepan serta beraraf internasional. ▪ Kemampuan olahraga yang tangguh dan kompetitif tingkat internasional. ▪ Pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar dan adil sesuai tuntunan yang bertaraf internasional. ▪ Penilaian pendidikan yang tingkat validitas dan realibilitasnya bertaraf internasional. ▪ Nilai solidaritas bagi kehidupan sekolah, masyarakat berbangsa dalam kancah dunia internasioanl. Mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, rindang, asri dua bersih ▪ Kemampuan sei yang tangguh dan kompetitif dan mampu berdaya saing internasional ▪ Kemampuan KIR yang cerdas dan komprtitif serta berdaya saing internasional
--	---

1. Kepala **Sekolah**

Nama : Amin Aolawi
Status : Kepala Sekolah
Tempat : Pati
Tanggal Lahir : 25 Maret 1970
Pendidikan : S2

b. Tenaga Kependidikan SMP Negeri 1 Juwana

Tenaga kependidikan yang ada di SMP Negeri 1 Juwana berjumlah 64 tenaga pengajar. Di bawah ini akan ditampilkan mengenai jenjang pendidikan yang telah ditempuh guru SMP Negeri 1 Juwana pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Data Jenjang Pendidikan Guru di SMP Negeri 1 Juwana

No	NAMA	Jenjang Pendidikan
1	Adityaningtyas Dewi Parasika	S1
2	Agus Setiawan	S2
3	Alex Bayu Purwanto	S1
4	Ali Muktar	S2
5	Alis Wahyuni	S1
6	Anna Nur Widhiastuti	S1
7	ARIE YUNI KURNIANINGRUM	S1
8	Asrofi	S1
9	Astuti Indahningtyas	S1
10	Avendi Supar	S1
11	Baryah	S1
12	Chriswandani Retno Wahyuningsih	S2
13	Diyah Imayasasi	S1
14	Dwi Astuti	S1
15	Erina Nur Hidayati	S1
16	Ermi Agustina	S1

17	Farida Rohmawati	S1
18	Hariyanti	S1
19	HESTI AGESTINA	S1
20	Ika Dian Suasana Sari	S1
21	Ita Ayu Rahmawati	S1
22	Juli Isdiyanto	S1
23	Jumiati	S1
24	Juwarti	S1
25	Liliek Subagya	S1
26	Marwati	S1
27	Mashuri	S2
28	Mastini	S2
29	Milka Wiwiek Suprapti	S1
30	Moh Madukin	S1
31	Mohamad Nabhan Ulinnuha	S2
32	Mohammad Slamet Riyadi	S1
33	Mulyono	S1
34	Narwoso	S1
35	Nunik Sri Apriyani	S1
36	Nur Indah Sesantiningrum	S1
37	Ovi Feriani	S1
38	Ovi Yuliana	S1
39	Purjono	S1
40	Rinawati Ariesta	S2
41	Rr Sri Kamtini	S1
42	Rubiyati	S1
43	Sarno	S1
44	Sartawi	S1
45	Sata Risdiana	S2
46	Siti Muddatul Millah	S1
47	Siti Rokhanah	S1
48	Sri Mukti Astuti	S1
49	Sri Pujoningsih	S1
50	Sri Yatun	S1

51	Sudiro	S1
52	Suharto	S1
53	Supeni	S1
54	Supeni	S1
55	Suryati	S1
56	Sutarni	S1
57	Syafruddin	S1
58	Titik Lestari	S1
59	Umbarwati	S1
60	Umi Kulsum	S1
61	Untung Hariyono	S2
62	Wiji Wahyu Setyorini	S1
63	Windiharto	S1
64	Yaman	S1

c. Keadaan Peserta Didik SMP Negeri 1 Juwana

Berupa hasil temuan berupa dokumen, peneliti memperoleh data jumlah keseluruhan peserta didik yang menimba ilmu di SMP Negeri 1 Juwana. Dibawah ini akan ditampilkan mengenai jumlah peserta didik pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Data Peserta Didik di SMP Negeri 1 Juwana

Kelas	L	P	Total
VII	141	185	326
VIII	130	168	298
IX	122	177	299
Jumlah	393	530	923

1) **Sarana Prasarana SMP Negeri 1 Juwana**

Dalam dunia pendidikan, sarana prasarana mutlak terpenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar. Sarana prasarana yang ada di SMP Negeri 1 Juwana diantaranya adalah ruangan³. Dibawah ini akan ditampilkan ruangan SMP Negeri 1 Juwana pada Tabel 4.3.

Di bawah ini akan ditampilkan daftar ruangan yang ada di SMP Negeri 1 Juwana pada Tabel 4.3

Tabel 4.3.**Data Ruangan di SMP Negeri 1 Juwana**

No	Nama Prasarana	Keterangan	Panjang	Lebar
1	Joglo	0	7	6
2	Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki	18	6	3
3	Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan	18	6	3
4	Kolam Renang	800	20	40
5	Lapangan Growong Lor	9900	110	90
6	Lapangan Utama	810	27	30
7	Lapangan volly	162	18	9
8	Musholla	160	16	10
9	Ruang Arsip	72	9	8
10	Ruang BK	72	9	8
11	Ruang Gamelan	72	9	8
12	Ruang Gudang	72	9	8
13	Ruang Guru/Staf	198	22	9
14	Ruang Ibadah Kristen	36	9	4
15	Ruang In door	880	40	22
16	Ruang Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki	24	6	4
17	Ruang Kantin	35	7	5
18	Ruang Kasek	40	8	5
19	Ruang Kelas 7A	63	9	7
20	Ruang Kelas 7B	63	9	7
21	Ruang Kelas 7C	63	9	7
22	Ruang Kelas 7D	63	9	7
23	Ruang Kelas 7E	63	9	7
24	Ruang Kelas 7F	63	9	7
25	Ruang Kelas 7G	63	9	7

26	Ruang Kelas 7H	63	9	7
27	Ruang Kelas 7I	63	9	7
28	Ruang Kelas 7J	120	15	8
29	Ruang Kelas 7K	72	8	9
30	Ruang Kelas 8A	72	9	8
31	Ruang Kelas 8B	72	9	8
32	Ruang Kelas 8C	72	9	8
33	Ruang Kelas 8D	64	8	8
34	Ruang Kelas 8E	63	9	7
35	Ruang Kelas 8F	63	9	7
36	Ruang Kelas 8G	63	9	7
37	Ruang Kelas 8H	63	9	7
38	Ruang Kelas 8I	72	8	9
39	Ruang Kelas 8J	72	8	9
40	Ruang Kelas 9A	63	9	7
41	Ruang Kelas 9B	63	9	7
42	Ruang Kelas 9C	63	9	7
43	Ruang Kelas 9D	63	9	7
44	Ruang Kelas 9E	63	9	7
45	Ruang Kelas 9F	63	9	7
46	Ruang Kelas 9G	63	9	7
47	Ruang Kelas 9H	63	9	7
48	Ruang Kelas 9I	63	9	7
49	Ruang Kelas 9J	63	9	7
50	Ruang Ketrampilan	63	9	7
51	Ruang KM/WC Guru Perempuan	20	5	4
52	Ruang KM/WC Siswa	54	18	3
53	Ruang Komite	36	9	4
54	Ruang Koperasi	63	9	7
55	Ruang Koperasi Siswa	60	12	5
56	Ruang Lab TIK 2	112	16	7
57	Ruang Lab. Bahasa	120	15	8
58	Ruang Lab. IPA Biologi	120	15	8

59	Ruang Lab. IPA Fisika	120	15	8
60	Ruang Lab. IPS	96	12	8
61	Ruang Lab. Matematika	120	15	8
62	Ruang Lab. TIK 1	120	15	8
63	Ruang Lab. TIK 3	90	10	9
64	Ruang Lab. TIK 4	72	8	9
65	Ruang makan Koperasi Siswa	240	30	8
66	Ruang Miting	72	9	8
67	Ruang Multimedia	120	15	8
68	Ruang Musik	72	9	8
69	Ruang OSIS	36	6	6
70	Ruang Pameran	180	20	9
71	Ruang Parkir Guru	133	19	7
72	Ruang Parkir sepeda siswa	280	70	4
73	Ruang Penjaga 1	72	12	6
74	Ruang Perpustakaan	162	18	9
75	Ruang Pos Satpam	6,25	2,5	2,5
76	Ruang Serbaguna	162	18	9
77	Ruang TU	120	15	8
78	Ruang UKS	108	12	9
79	Rumah Penjaga 2	48	8	6
80	Warung Sekolah	36	12	3

Kesimpulan

Jenis media pembelajaran merupakan alat penting untuk mencapai sebuah keberhasilan, memilih jenis media pembelajaran audio visual yang tepat dengan situasi dan kondisi siswa harus diperhatikan. Masing-masing jenis media pembelajaran yang akan di sampaikan kepada siswa memiliki pengalaman yang beragam dan latar belakang yang variatif. Jenis media pembelajaran audio visual yang digunakan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Juwana ada tiga yaitu video, *Power Point* (PPT), Film. Penggunaan media pembelajaran audio visual tersebut disesuaikan dengan materi yang akan di sampaikan pada siswa. Untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran audio visual dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII SMP negeri 1 Juwana diadakan perbandingan nilai sebelum dan sesudah digunakannya

media pembelajaran audio visual yang dapat di lihat pada tabel 4.4 (lampiran) dan tabel 4.5 (lampiran) Dalam tabel tersebut telah tertera nilai hasil belajar siswa VIII pada tahun lalu dan tahun ini. Dari perbandingan nilai tersebut dapat dilihat bahwasannya dengan adanya penggunaan media pembelajaran audio visual dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Juwana pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Faktor pendukung dan penghambat penggunaan media pembelajaran audio visual dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Juwana.

Daftar Pustaka

- Hayati, Najmi, dkk, "Hubungan Penggunaan Media Pembelajaran Audio Visual Dengan Minat Peserta Didik Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Bangkinan Kota".Jurnal Al Hikmah No. 2 2017)
- Hikmasari, Miftahurohman, "Peran Media Audio Visual Dalam Meningkatkan Minat Belajar PAISiswa Kelas III SD Muhammadiyah Capitsari", (Skripsi, Universitas Islam Negeri SuananKalijaga,2016)
- Muhadjir, Neong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002)
- Sanjaya, Wina, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Kencana Prenadamedia Group, 2006).

Persepsi Pedagang Muslim Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pedagang di Lingkungan Kampus IAIN Kudus)

Siti Khoiriyah

Institut Agama Islam Negeri Kudus

riyakhoo99@gmail.com

Abstrak

Warga muslim yang tinggal di sekitar lingkungan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus sebagian memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Zakat perdagangan merupakan zakat yang wajib ditunaikan bagi pedagang muslim yang telah memenuhi ketentuan nisab dan haul. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana persepsi pedagang muslim mengenai zakat perdagangan beserta dengan implementasinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari wawancara langsung, dan dari data tersebut diperoleh hasil bahwa (1) Pedagang muslim di lingkungan kampus IAIN Kudus masih memiliki persepsi bahwa zakat fitrah dan zakat perdagangan. (2) Implementasi dari zakat perdagangan belum berjalan dengan baik dan kebanyakan para pedagang muslim masih membayarkan zakat secara tradisional.

Kata Kunci: Persepsi; Pedagang Muslim; Zakat Perdagangan

Abstract

Some of the Muslim residents who live around the campus of the Kudus State Islamic Institute (IAIN) have a livelihood as traders. Trade zakat is zakat that must be paid for Muslim traders who have met the provisions of nisab and haul. This research was conducted to see how the perception of Muslim traders regarding trade zakat and its implementation. The data used in this study is primary data sourced from direct interviews, and from these data it is obtained that (1) Muslim traders in the IAIN Kudus campus still have the perception that zakat fitrah and zakat trade. (2) The implementation of zakat trading has not been going well and most Muslim traders still pay zakat traditionally.

Keywords: Perception; Muslim Traders; Trade Zakat

PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan dilakukan guna memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari, mengingat kebutuhan manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari begitu banyak. Kebutuhan tersebut mencakup dalam hal dasar seperti sandang, pangan dan papan. Namun dewasa ini, kebutuhan manusia bertambah dan menjadi lebih kompleks. Islam mengajarkan umatnya agar bekerja keras guna memenuhi kehidupannya. Selain dapat mencukupi kehidupan sehari-hari, dengan bekerja keras kita dapat mempunyai banyak manfaat, yakni diantaranya hidup menjadi lebih nyaman, sejahtera dan tentram.

Berdagang menjadi salah satu kegiatan muamalah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, bahkan beliau memulai kegiatan berdagang sedari remaja yakni ketika Rasulullah masih berusia 12 tahun. Kegiatan jual beli atau berdagang ini berperan penting dalam membangkitkan berbagai perputaran berbagai sektor industri, baik dalam sektor industri, pertanian, peternakan, hasil olahan hingga jasa. Selain itu, penyebaran ajaran Islam di Indonesia sendiri salah satunya didorong oleh banyaknya pedagang yang datang ke Selat Malaka sehingga menyebabkan berdirinya kota pelabuhan dan kerajaan Islam di jalur perdagangan seperti kerajaan Samudera Pasai dan Malaka. Hal tersebut selaras dengan arus dagang hingga abad ke enam belas, yang mana pada saat itu mana pedagang-pedagang yang beragama Islam yang berasal dari negara Arab, Persia dan India melakukan perjalanan dagang ke Indonesia dan sekaligus menyebarkan ajaran Islam (Yatim, 2013: 201).

Allah SWT sangat menyukai perdagangan yang jujur dan akan memberikan rahmat-Nya kepada hamba-hambanya yang melaksanakannya. Dalam kegiatan berdagang atau bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Dimana hal tersebut telah dijelaskan pada Surah Quran Al-Baqarah tepatnya ayat 275 yang menyinggung tentang hukum jual beli, dimana disebutkan bahwa Allah memandang aktivitas jual beli merupakan sesuatu yang halal, namun riba masuk dalam kategori haram. Maka dalam pelaksanaan jual beli atau berdagang kita harus senantiasa memperhatikan cara berdagang kita dengan tidak memperjualbelikan barang atau jasa yang sifatnya dilarang agama, namun aktivitas jual beli juga harus tetap mempertimbangkan sikap dan norma yang ada, misalnya sikap kejujuran, amanah, dapat membedakan hak dan yang bathil, dan selalu menjalankan kewajiban beribadah meskipun tengah sibuk. Salah satunya ibadah termasuk di dalamnya adalah berzakat.

Zakat adalah ibadah yang sifatnya diwajibkan. Pentingnya pelaksanaan zakat dapat tercermin bahwasannya kata zakat disebutkan sama dengan banyaknya kata sholat, artinya urgensi tersebut didasarkan atas banyaknya manfaat dari pelaksanaan zakat, dimana selain untuk mensucikan harta bagi si pemilik harta yang menzakatkan hartanya juga dapat membantu sesama, mengentaskan kemiskinan serta dapat mewujudkan kesejahteraan yang sebaik-baiknya kesejahteraan (*falah*). Oleh sebab itu, umat muslim diperintahkan untuk membayar zakat dari hasil kegiatan dagang mereka untuk tanda terimakasih kepadaNya telah memberikan kemudahan rejeki dan juga keberkahan (Qardawi, 1991: 297).

Berhubungan dengan kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa, Kudus menjadi salah satu destinasi bagi masyarakat muslim di berbagai daerah untuk datang ke kota Kudus. Banyak dari mereka bertujuan untuk berwisata religi ke Makam Sunan Kudus dan Sunan Muria. Jumlah wisatawan yang datang setiap tahunnya terus bertambah, selaras dengan hal tersebut jumlah pedagang di Kudus pun ikut bertambah dan berkembang. Masyarakat muslim di kota Kudus memilih cara untuk mencari rezeki dengan berdagang. Selain datang untuk berwisata religi, banyak pula pendatang yang datang untuk menimba ilmu. Salah satu tempat menimba ilmu adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Para pendatang yang datang untuk menempuh pendidikan di IAIN Kudus tentulah memberikan manfaat pulau bagi masyarakat muslim di lingkungan tersebut.

Masyarakat muslim di lingkungan Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, baik itu dari pedagang kaki lima, warung makan kecil, agen sembako, hingga memiliki usaha produksi genteng. Beberapa muslim yang berdagang di sekitar lingkungan kampus IAIN Kudus didapati belum memahami sepenuhnya mengenai zakat perdagangan. Sebagian lagi memahami bahwasannya zakat ialah sebuah kewajiban yang wajib dijalankan oleh orang-orang beragama Islam. Namun, dalam praktiknya terdapat syarat dan rukun zakat yang perlu diketahui dan dipenuhi oleh pedagang untuk menjalankan kewajiban menunaikan zakat yang telah disesuaikan dengan ajaran Islam.

Penunaian zakat menjadi wajib bagi seorang muslim yang hartanya sudah mencapai batasan haul dan nisab yang telah ditentukan. Sayangnya, nyatanya masih ditemui banyak sekali pedagang yang belum menunaikan zakatnya, sebagian lagi tidak tahu menahu tentang tata caranya. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa. Zakat, infak dan juga sedekah mempunyai pemahaman yang sama, padahal ketiganya sangatlah berbeda.

Zakat perdagangan termasuk ke dalam salah satu jenis zakat mal, dengan pelaksanaan zakat mal yang sesuai dengan prosedur diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan. Potensi zakat yang begitu besar dan mampu mengentaskan kemiskinan, ini juga diungkapkan oleh Salman Ahmed Shaikh dalam artikelnya yang berjudul *Welfare Potential of Zakat: An Attempt to Estimate Economy wide Zakat Collection in Pakistan* yang menjelaskan bahwa pengumpulan zakat di Pakistan mencapai sekitar 7% dari total PDB dan cukup untuk menutupi kesenjangan kemiskinan di Pakistan (Salman, 2015).

Pelaksanaan ini tentunya perlu kesadaran dari masyarakat muslim dan kesadaran ini dapat muncul ketika para masyarakat muslim paham sepenuhnya mengenai kewajibannya menunaikan zakat mal. Sebagaimana hal ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan Mhd. Solledudin Shuib, dkk. dengan judul *Customer Perception on Zakat Mal Mustafad in Kedah* di mana dalam kajian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat di Negara Kedah setuju dengan kewajiban untuk membayarkan zakat penghasilan dank arena pemahaman tersebut, masyarakat juga sadar pentingnya ditunaikannya zakat penghasilan (Shuib, 2020). Terdapat pula penelitian terdahulu yang membahas mengenai zakat perdagangan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Munawar Badruddi dan Norhafizah Binti Abdul Razak yang berjudul *Reorientasi Tentang Zakat Perniagaan: Pengalaman Malaysia*. Pada hasil kajian ini didapati bahwa zakat perniagaan/perdagangan ini bisa membantu kesejahteraan sosial bagi umat muslim (Badruddin, 2011).

Kajian ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam mengenai persepsi dan pemahaman para pedagang muslim yang berdagang di sekitar lingkungan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus terhadap zakat perdagangan.

KAJIAN LITERATUR

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Asal kata Persepsi ialah dari Bahasa Latin *percipere*, yang artinya yakni menerima. Persepsi juga diartikan sebagai pandangan. Diluaskan lagi, persepsi adalah persepsi dapat didefinisikan sebagai kemampuan otak dalam menerjemahkan sesuatu melalui indera manusia. Mempersepsikan sesuatu dengan baik /positif maupun buruk/negative, dapat mempengaruhi manusia dalam bertindak (Sobur, 2011: 445).

Penginderaan merupakan suatu proses yang mendahului persepsi. Penginderaan sering dipahami sebagai suatu proses penerimaan stimulus oleh individu dengan perantara alat indera yang kita miliki, dimana selanjutnya akan diteruskan ke otak. Dalam otak stimulus tersebut diolah menjadi persepsi. Setiap saat penginderaan dapat terjadi, hal tersebut karena indera terus alat stimulus yang mengenai diri . dengan adanya alat indera setiap individu dapat terhubung dengan dunia luar (Walgito, 2010: 99).

Pengertian lain menjelaskan bahwa persepsi adalah proses interpretasi dan evaluasi dari apa yang telah seseorang lihat, rasakan dan amati baik itu dari bentuk, sifat, keadaan bahkan hingga ke kualitasnya (Walgito, 2003). Obyek yang dapat dijadikan persepsi tidak hanya sumber dari luar saja, akan tetapi diri sendiri juga dapat menjadi obyek. Ketika mempersepsikan diri sendiri, kita akan dapat melihat bagaimana keadaan diri sendiri, lalu menyadari keadaan diri kita sendiri dan akan melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri.

Dari pengertian-pengertian mengenai persepsi di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya persepsi adalah pandangan seseorang dalam menafsirkan yang melibatkan stimulus sensoris, yang mana persepsi tersebut secara tidak langsung juga berpengaruh pada apa yang sedang kita lakukan.

2. Faktor yang mempengaruhi persepsi

Suatu hal tidak dapat terjadi tanpa adanya sebuah proses, begitu pula dengan persepsi

Di bawah ini dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya persepsi seseorang (Walgito, 2003), yaitu :

a. Obyek persepsi

Faktor pertama yang mempengaruhi persepsi adalah objek, dimana obyek ini akan menimbulkan stimulus yang akan ditangkap oleh alat indera manusia, lalu diproses oleh otak dan terciptalah persepsi.

b. Alat persepsi

Alat persepsi ialah indera-indera yang ada di tubuh manusia. Selain itu juga melibatkan saraf motorik yang dibutuhkan sebagai alat untuk merespon sesuatu.

c. Perhatian

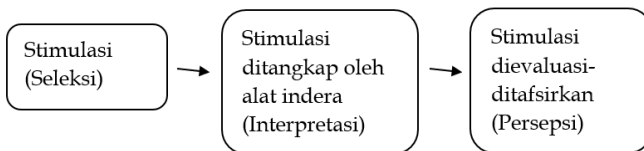
Perhatian menjadi faktor ketiga yang berperan dalam persepsi yakni sebagai langkah awal atau dapat disebut sebagai suatu persiapan. Hal tersebut karena pemusatan dan konsentrasi dari seluruh kegiatan diawali dari perhatian.

3. Proses Terjadinya Persepsi

Terdapat teori yang menjelaskan proses terjadinya persepsi. Di bawah ini adalah bagan dari proses pembentukan persepsi yang terjadi pada manusia (Sobur, 2011). Berikut bagan yang menampilkan tiga komponen utama yang membentuk persepsi:

Gambar 1

Proses terbentuknya persepsi



Dari bagan tersebut digambarkan bahwa penyaringan atau seleksi dilakukan sebelum stimulasi atau informasi tersebut diorganisir sehingga memiliki arti. Setelah itu barulah diterjemahkan dalam sebuah reaksi yang berbentuk tingkah laku.

4. Faktor pengaruh terbentuknya persepsi manusia.

a. Faktor fungsional

Fungsional merupakan faktor yang diperoleh dari kebutuhan, rasa gembira, serta pengalaman di masa lalunya.

b. Faktor structural

Structural merupakan faktor yang muncul atau diperoleh dari stimulan dan efek normal dari apa yang dihasilkan dari aktivitas saraf tertentu.

c. Faktor situasional

Faktor situasional kebanyakan memiliki hubungan dengan bahasa non-verbal. Beberapa faktor situasional yang berpengaruh terhadap persepsi adalah petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah dan petunjuk paralinguistik.

d. Faktor internal

Faktor ini banyak dipengaruhi dari dalam diri seseorang itu sendiri, misalnya pengalaman, motivasi dan karakter seseorang.

B. Perdagangan dalam Islam

Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya adalah dengan berdagang. Seseorang yang menjadikan kegiatan-kegiatan perdagangan sebagai mata pencaharian mereka disebut dengan pedagang. Selain pedagang dalam perdagangan juga melibatkan interaksi dari pembeli, dimana hubungan antara penjual atau pedagang dan pembeli tidak saling merugikan dan sama-sama memberikan manfaat.

Konsep perdagangan dalam Islam memiliki makna penting. Dalam Al-Qur'an kata "perdagangan" disebutkan tidak hanya merujuk kepada sikap ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT, akan tetapi dapat pula diartikan sebagai suatu ibadah (Jusmaliani, 2008). Lalu, ilmu ekonomi mengartikan sebagai hasil dari kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melepaskan dan menerima barang tersebut secara sah.

Perdagangan ini merupakan suatu bentuk usaha yang legal, dan terdapat beberapa sahabat yang menganjurkan untuk berdagang. Tidak sedikit pula ulama fikih yang berpendapat bahwa berdagang merupakan kegiatan mencari kekayaan melalui penukaran kekayaan atau dengan barang yang dimiliki. Kekayaan dagang yang dimaksudkan ialah semua yang biasa diperdagangkan dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan. Namun, ada pula beberapa ulama fikih yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang mempunyai tujuan ditawarkan ke pembeli untuk memperoleh laba.

C. Zakat Perdagangan

1. Pengertian Zakat

Zakat mempunyai beberapa arti, yaitu berkah, suci, dan tuntas (Hafidhuddin, 2022). Ditinjau dari segi istilah, zakat ialah sebagian harta seseorang yang sengaja dikeluarkan untuk memenuhi sayarat yang tela diwajibkan sesuai dengan jaraan Islam. Sebagaimana hal ini juga dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 103 (Depag, 2014):

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ط إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi maha Mengetahui."

Zakat menjadikan harta dan jiwa manusia menjadi lebih bersih dengan harapan seseorang tersebut terhindar dari sikap-sikap buruk, kikir dan rakus. Hal ini dikarenakan, harta yang telah diperoleh manusia, ialah rejeki yang telah Allah berikan kepadanya untuk dicari, dijaga dan dikelola dengan baik. Namun, dari itu semua, juga harus dimengerti bahwasannya harta yang telah diperoleh bukan sepenuhnya menjadi haknya sehingga manusia menjadi lalai. Sebagian harta tersebut adalah milik fakir miskin, anak yatim dan anak-anak yang ditelantarkan.

Oleh sebab itu zakat hukumnya adalah wajib (Arifin, 2016). Perintah wajib zakat bagi umat muslim terjadi di tahun kedua hijrah. Namun aturan penimbangan dan lainnya, belum ditentukan pada masa itu. Setelah tahun kedua hijriyah, diterangkan tentang zakat lengkap dengan jenis, takaran dan sasarannya. Kewajiban menunaikan zakat bagi umat Islam disebut sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an.

Zakat dibagi menjadi dua, pertama yaitu Jenis zakat fitrah dan zakat mal. Sebagaimana disebutkan bahwasanya zakat fitrah adalah zakat yang bersifat wajib harus ditunaikan umat muslim di bulan ramadhan dengan syarat tertentu. Orang-orang yang wajib membayar zakat fitrah diantaranya ialah anak baru lahir, beragama Islam, orang yang kaya, dan yang telah menikah. Barang-barang yang termasuk dapat disahkan untuk membayar zakat fitrah diantaranya adalah bahan kebutuhan pokok sehari-hari, misalnya beras, gandum, kurma, susu, keju atau kismis.

Kedua yakni zakat mal. Zakat mal ialah jenis zakat yang harus ditunaikan oleh seseorang atau kelompok yang telah dibebankan untuk penanggungan sebagian dari hartanya. Harfiahnya, mal bermakna harta. Dalam Islam, disebut mal apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu dimiliki dan dapat diambil manfaatnya (Fadilah, 2016). Zakat mal sendiri terdiri dari hasil tani, tambang emas, peternakan, dagang dan profesi.

2. Zakat Perdagangan

Harta yang didapatkan dari hasil perdagangan ialah suatu harta yang harus dikeluarkan apabila sudah memenuhi ketentuan nisab dan haul. Harta ini dicirikan dengan cara perolehannya melalui akad tukar menukar ataupun jual yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan diperoleh melalui usaha sendiri. Hukum menunaikan zakat perdagangan adalah fardhu ain, yakni zakat dari harta dagang tersebut wajib dikeluarkan tiap-tiap orang Islam yang sudah mampu dan telah sesuai syarat.

Menurut Mardani, berikut syarat yang harus seseorang penuhi untuk melaksanakan zakat (Madani. 2013) yaitu:

a. Beragama Islam

Sarat pertama yang mewajibkan seseorang mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat ialah ia adalah seorang muslim. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW:

“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku adalah utusan-Nya. Jika mereka menantimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasannya Allah SWT mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang yang fakir di antara mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hal ini ketika Rasulullah memerintahkan Muadz untuk mengajak masyarakat Yaman memeluk Islam dan mewajibkannya untuk menunaikan zakat mereka sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah.

b. Niat untuk berdagang

Suatu komoditas tidak bisa dengan mudah menjadi harta hasil perdagangan, kecuali jika si pemilik komoditas tersebut memiliki niat untuk memanjakannya. Karena jika harta tersebut diperdagangkan maka hukumnya menjadi barang dagangan.

c. Telah cukup Nisab

Nisab artinya ialah batasan dari jumlah minimum diwajibkannya seorang muslim untuk mengeluarkan hartanya untuk zakat. Batasan ini adalah alat pengukur untuk menentukan harta yang dimiliki seseorang. Artinya apabila seorang muslim telah memiliki harta mencapai minimum nisab yang ditentukan, maka baginya sudah wajib melaksanakan zakat.

Sumber zakat perdagangan harus mencapai nisab setelah dikurangi dengan biaya operasional, kebutuhan primer dan utang yang harus dibayar. Nisab dari zakat perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas.

d. Telah mencapai satu tahun atau satu haul

Harta yang dizakatkan harus minimalnya sudah melampaui batas satu tahun kepemilikan.

3. Perhitungan Zakat Perdagangan

Ketika seorang muslim yang berdagang telah memiliki harta hasil dari perdagangan mencapai nisab, yaitu senilai dengan 85 gram emas dan sudah melewati masa kepemilikan selama satu sejak harta tersebut diniatkan untuk berdagang, maka hukumnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Pedagang muslim setiap tahun harus membuat neraca atau perhitungan harta benda yang diperdagangkannya. Tahun perniagaan dihitung mulai dari saat pertama kali kita akan mulai untuk berdagang.

Pedagang yang telah memiliki harta perdagangan mencapai nisab dan haul, maka ia mempunyai kewajiban mengeluarkan zakatnya senilai 2,5% dari jumlah keseluruhan setelah dikurangi biaya operasional. Ada beberapa hal yang menyebabkan biaya operasional ketika berdagang tidak wajib dikeluarkan zakatnya (Mufriani,2008) yakni:

- a. Harta tersebut bukan dipersiapkan sebagai bahan dagang namun agar dikonsumsi.
- b. Harta tersebut diperuntukkannya sebagai keperluan menddasar dalam usaha.
- c. Harta termasuk dalam faktor yang harus terdapat pada proses produksi dan jual beli.

Gambar 2

Perhitungan zakat perdagangan

$$\text{BESAR ZAKAT} = (\text{Modal} + \text{Keuntungan} + \text{Piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{Utang} + \text{Kerugian}) \times 2,5\%$$

4. Mustahiq Zakat

Orang berhak menerima zakat atau mustahik sudah tertuang dalam QS. at-Taubah: 60, yakni:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ فَلَوْ بُهْمَ فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ طَوَّالَهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah (fisabilillah), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai pembantu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat di atas, mustahik zakat memiliki delapan *asnaf* (bagian). Adapun masing-masing mustahik yang termasuk *asnaf* penjelasannya ialah:

- a. *Fakir*, ialah seseorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari dikarenakan tidak dapat berusaha untuk memenuhinya.
 - b. *Miskin*, ialah orang yang sudah berupaya memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi tetap tidak bisa mencukupinya.
 - c. *Amil*, ialah seseorang yang bertanggung jawab mengelola zakat, dari mengumpulkan hingga menyalurkannya.
 - d. *Muallaf*, ialah seseorang yang baru masuk Islam, zakat diberikannya untuk menunjukkan dukungan dan semangatnya terhadap mukallaf.
 - e. *Riqob*, ialah membebaskan seorang budak dari perhambaan, dengan demikian membebaskan orang tersebut dari ikatan dengan tuannya.
 - f. *Gharim*, ialah seseorang yang mempunyai hutang dan tidak dapat membayarnya kembali.
 - g. *Fisabilillah*, ialah segala bentuk aktivitas atau seseorang yang berjalan di jalan Allah SWT.
 - h. *Ibnu Sabil*, ialah seseorang yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mempunyai harta dalam melanjutkan perjalanannya.
5. Manfaat dan Hikmah Zakat

Zakat adalah sebuah ibadah dalam bidang harta, yang memberi sebuah manfaat dan hikmah yang mulia dan besar, baik yang berhubungan pada orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*), yang menerima zakat (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, atau masyarakat.

Didin dalam bukunya menjelaskan manfaat dan hikmah sebagai berikut (Hafidhuddin, 2022):

- a. Menjadi seseorang yang beriman kepada Allah SWT.,
 - b. Mensyukuri nikmat-Nya yang membuat hidup tenteram dan menjadikan hartanya bertambah dan bersih.
 - c. Mustahik berhak berzakat karena zakat merupakan penolong para mustahik khususnya bagi asnaf fakir miskin, tujuannya agar para mustahik tersebut bisa dibina dan dibimbing untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan menjadi lebih tentram dan sejahtera sehingga kebutuhan mereka dapat tercukupi, tenang dalam beribadah kepada Allah SWT, jauh dari bahaya kekufuran dan menghindari kecemburuan dan dengki dan hasad yang dapat muncul ketika melihat orang kaya yang mempunyai harta lebih dari yang mereka miliki.
 - d. Sebagai pilar saling beramal (jama'i) antar orang kaya yang hidup berkecukupan, dan para *mujahid* yang hidup dan waktu mereka dihabiskan berjuang di jalan Allah SWT, sehingga ia tidak mempunyai waktu dan kesempatan dalam berusaha dan ikhtiyar dalam keperluan nafkah diri serta kelaurganya dikarenakan kesibukannya.
 - e. Berperan sebagai sumber pendanaan untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana yang perlu dimiliki umat, misalnya sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, pembangunan sosial dan ekonomi, serta sumber daya pembangunan manusia muslim yang berkualitas.
 - f. Bisa memasyarakatkan etika bisnis yang baik, karena zakat tidak hanya membersihkan harta yang kotor, namun juga menghilangkan sebagian hak orang lain dari harta kita yang diusahakan secara baik dan benar berdasarkan ketetapan Allah SWT.
 - g. Zakat merupakan salah satu alat pemerataan pendapatan dalam rangka membangun kesejahteraan rakyat. Dengan pengelolaan yang baik, zakat membantu membangkitkan dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi secara merata.
6. Organisasi Pengelola Zakat

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Namun, karena Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dirasa sudah tidak relevan dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat maka dilakukan pembaruan melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Organisasi pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat didirikan oleh masyarakat (UU 38. 1999).

BAZNAS mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara Nasional beserta fungsi yang harus dijalankan, sebagaimana yang tercantum dalam pembaruan pada Pasal 5, Undang-undang No. 23 tahun 2011 yakni:

- a. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Mengendalikan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat

Baznas Provinsi dan Kabupaten/Kota didirikan oleh pemerintahan dalam memudahkan mengelola zakat. Untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan Zakat Baznas provinsi dan Kabupaten/kota diizinkan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam organisasi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha daerah, badan usaha swasta, dan perwakilan negara Republik Indonesia di luar negara dan membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan dan nama lain atau tempat lainnya.

PEMBAHASAN

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Kudus. Selain sebagai tempat menimba ilmu bagi mahasiswanya IAIN Kudus juga menjadi salah satu sektor yang menggerakkan roda ekonomi masyarakat di lingkungan tersebut. Maka dari itu, kebanyakan masyarakat di lingkungan tersebut bermata pencaharian sebagai pedagang. Selain itu, pedagang-pedagang baru juga terus bermunculan mengingat begitu besar peluang dagang yang ada.

Fenomenologi digunakan dalam penelitian ini agar dapat melihat perilaku manusia, baik berupa apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan seseorang sebagai produk dari cara orang tersebut memaknai dunianya sendiri. Sebagai sebuah sumber data, terdapat beberapa pedagang yang telah diwawancarai, yakni:

Tabel 1
Identitas Narasumber

Nama	Jenis Usaha
Khuzafah	Pedagang Sayur
Siti Maemunah	Pedagang Gorengan
Ni'matul Aidah	Penjual Jus
Puji	Warung Sembako
Masturoh	Laundry
Alfiyah	Warung makan
Khasbuna	Fotocopy
Ali Jodi	Pemilik Kost

Sumber: data diolah oleh peneliti

Terdapat berbagai macam usaha dagang yang ada, diantaranya yakni pedagang kaki lima, pedagang kuliner, pedagang sembako hingga pedagang sayur. Selain menjajakan dagangan berupa barang, ada pula pedagang yang menyediakan jasa seperti jasa fotocopy dan laundry. Dari berbagai jenis pedagang yang ada, tentunya dalam hal pendapatan penghasilan mereka juga berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak semua pedagang memenuhi nisab zakat perdagangan.

Table 2

Penghasilan Pedagang

No	Jumlah Penghasilan per Bulan	Jenis Usaha
1	≥ Rp 3.000.000-4.500.000	Pedagang Sayur
		Pedagang Gorengan
		Penjual Jus
2	Rp 4.500.000- 6.000.000	Warung Sembako
		Laundry
3	Rp 6.000.000-7.000.000	Warung makan
		Fotocopy
4	Rp 7.500.000	Pemilik Kost

Sumber: data diolah oleh peneliti

Harga emas saat ini adalah Rp 869.602/gram, jika dihitung nisabnya maka nisab dari zakat perdagangan yakni Rp 73.916.170. Data tersebut menunjukkan bahwa yang memiliki penghasilan Rp 7.500.000, telah wajib menunaikan zakat perdagangan.

A. Persepsi Pedagang Muslim terhadap Zakat Perdagangan

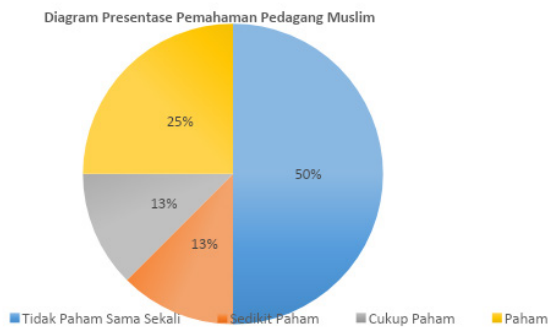
Setiap variabel yang ada memiliki pola tersendiri, begitu pula dengan cara pandang dari setiap individu yang tak sama setiap orangnya. Begitu pula dengan para pedagang muslim yang memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai kewajiban menunaikan zakat perdagangan. Zakat perdagangan masih terasa asing bagi kebanyakan orang, termasuk juga bagi para pedagang muslim di lingkungan perguruan tinggi IAIN Kudus. Banyak yang berpendapat bahwa zakat, infak dan sedekah merupakan hal sama. Hal tersebut seperti yang diungkap oleh Ali:

“Mengenai zakat saya menunaikannya setiap Ramadhan. Untuk hasil usaha saya ya ada juga untuk di sedekahkan” (Wawancara, Ali Jodi).

Ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa Ali memahami zakat perdagangan sama dengan zakat fitrah dan juga sedekah. Selaras dengan Ali, Khuzairah juga menjelaskan bahwa zakat perdagangan sama dengan infak, yakni:

“Zakat untuk dagang biasanya saya infakkan ke masjid atau mushola yang ada di sini. Saya biasanya menyisihkan uang hasil dagang untuk infaq minimal sebulan sekali (Wawancara, Khuzaifah).”

Data yang disajikan di atas menjelaskan bahwa para pedagang menganggap bahwa zakat perdagangan sama dengan infak dan sedekah, yang mana hanya dikeluarkan seikhlasnya saja dan tidak mementingkan masalah nisab ataupun kadar yang perlu dikeluarkan. Pemahaman pedagang muslim mengenai bagaimana menghitung kadar harta dagang yang wajib dikeluarkan sebagai zakat perdagangan dapat diketahui dari persentase berikut.



Gambar 3

Pemahaman pedagang muslim mengenai perhitungan zakat perdagangan

Variasi jawaban yang diberikan oleh setiap narasumber dapat terbaca dari tabel di atas, di mana tingkat pemahaman pedagang muslim masih rendah mengenai bagaimana menghitung zakat yang harus dikeluarkan dari harta dagang mereka. Hampir separuh dari 8 (delapan) narasumber mengungkapkan bahwa pemahaman mereka mengenai perhitungan zakat perdagangan masih minim. Dan hanya ada satu narasumber yang paham mengenai perhitungan zakat perdagangan, yakni ketika melakukan wawancara dengan Hasbuna:

“Zakat perdagangan biasanya dikeluarkan jika sudah mencapai nisab dan haulnya selama satu tahun. Untuk mengeluarkan zakat perdagangan, uang kita harus dikurangi dengan utang dan modal dulu. Nah setelah itu baru dikeluarkan 2,5%.”(Wawancara, Khasbuna).

Hal tersebut juga sama dengan yang dikatakan oleh Alfiah yang menjelaskan bahwa:

“Sepengetahuan saya zakat perdagangan dikeluarkan dari hasil dagang kita dikurangi sama bahan-bahan dan utang (Wawancara, Alfiah).” Penjelasan di atas menjelaskan bahwa beliau memahami tentang perhitungan zakat perdagangan. Dimana zakat perdagangan harus dikeluarkan setelah mencapai nisab dan telah dimilikinya selama setahun penuh serta yang dizakatkan adalah harta dagang berupa laba bersih setelah dikurangi modal dan utang. Lalu, kadar yang harus dikeluarkan untuk zakat perdagangan adalah 2,5%.

B. Implementasi Zakat Perdagangan

Hasil wawancara didapati bahwa hanya sejumlah kecil pedagang muslim saja yang memahami kewajiban menunaikan zakat perdagangan. Padahal dari mereka cukup banyak yang telah memenuhi syarat, yakni mencapai nisab dan haul. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman sebagian besar pedagang muslim mengenai kewajiban melaksanakan zakat perdagangan. Bagi pedagang muslim yang memiliki pemahaman tentang zakat perdagangan mengatakan bahwa mereka belum menunaikan kewajibannya melaksanakan zakat perdagangan. Akan tetapi mereka selalu menyisihkan uang hasil usaha atau dagangan untuk disedekahkan. Hal tersebut seperti yang diungkap oleh Masturoh dan Siti Maemunah, yakni:

“Setiap penghasilan yang saya peroleh dari berdagang biasanya saya selalu sisihkan untuk saya sedekahkan (Wawancara, Masturoh).”

“Zakat perdagangan saya sih belum melakukannya, tadi setiap bulan saya sedekah dari hasil dagang saya walaupun tidak banyak jumlahnya (Maemunah, Wawancara).”

Selain disedekahkan ada pula pedagang yang menginfakkan hasil dari dagangnya untuk orang yang lebih membutuhkan, seperti yang dilakukan oleh Khuzaifah dan Ni'matul Aidah sebagai berikut:

“Saya biasanya menyisihkan uang hasil dagang untuk infak minimal sebulan sekali (Wawancara, Khuzaifah).”

“Biasanya saya menggunakan hasil dagang untuk berinfak saja sih, karena mengenai zakat perdagangan saya belum terlalu mengerti (Wawancara, Aidah).”

Jelas dapat dipahami dari data tersebut bahwa dalam pelaksanaan zakat perdagangan masih banyak pedagang muslim yang belum melaksanakannya. Hal tersebut karena, masih banyak yang beranggapan bahwa jika telah menyedekahkan dan menginfakkan hasil dagang kita maka tidak perlu mengeluarkan zakat perdagangan lagi. Selain itu, alasan lainnya adalah masih minimnya sosialisasi mengenai pelaksanaan zakat perdagangan yang mengakibatkan minimnya pemahaman para pedagang muslim mengenai pelaksanaan zakat perdagangan. Pendistribusiannya pun dilakukan oleh warga sendiri tanpa melalui perantara baik Lembaga Amil Zakat(LAZ) ataupun Badan Amil Zakat (BAZ). Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ali, yakni:

“Menyalurkan zakat-zakat yang telah saya lakukan, saya biasanya langsung berikan kepada mustahiknya (Wawancara, Ali Jodi)”

Begitu pula yang di paparkan oleh Puji, yang mana beliau langsung mendistribusikan zakatnya kepada marbot masjid setempat, berikut penuturannya:

“Ibu dalam pelaksanaan zakat ya langsung saja, bawa lalu saya berikan kepada marbot masjid terdekat di sini (Wawancara Puji).”

Penjelasan kedua narasumber memberikan kesimpulan bahwa dalam hal penyaluran zakat masih banyak warga yang memilih untuk mendistribusikannya sendiri. Pelaksanaan zakat perdagangan yang baik merupakan impian besar bagi peneliti. Banyaknya manfaat dari implementasi zakat menjadi alasannya. Dengan pengoptimalan pengelolaan zakat, maka manfaat yang diperoleh juga menjadi maksimal. Selain dapat memecahkan masalah sosial di negara kita, tidak dapat dipungkiri pula bahwa zakat merupakan salah satu solusi untuk sektor ekonomi, di mana zakat dapat membantu memecahkan masalah kemiskinan di Indonesia. Dari persepsi para pedagang muslim, sedikit banyak menyadari bahwa terdapat hak orang lain atas harta yang diperolehnya dari hasil perdagangan, namun masih terdapat hambatan dalam pengimplementasiannya, yakni:

1. Pemahaman yang minim mengenai zakat. Para pedagang muslim hanya mengetahui gambaran umum saja tentang zakat, tidak sampai menyeluruh seperti cara perhitungan ataupun syarat-syaratnya seperti nisab dan haul.
2. Kurangnya rasa kepercayaan. Minimnya rasa percaya pedagang muslim terhadap lembaga pengelola juga menjadi hambatan dalam pengimplementasian zakat perdagangan. Untuk itu perlunya pengelolaan lembaga zakat yang baik agar dapat menarik *trust* dari para Muzaki.

3. Sikap tradisional. Masalah lain yang muncul adalah sifat tradisional kita yang masih percaya bahwa zakat lebih baik disalurkan sendiri kepada para pimpinan agama dan tidak disalurkan ke delapan asnaf zakat. Inilah yang menyebabkan pendistribusian dana zakat menjadi tidak merata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi pedagang muslim terhadap kewajiban membayar zakat perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Masih ada separuh pedagang muslim di lingkungan kampus IAIN Kudus yang memiliki persepsi bahwa zakat perdagangan itu sama dengan zakat fitrah yang dilakukan setiap tahun pada bulan Ramadhan. Padahal antara zakat fitrah dengan zakat perniagaan sangatlah berbeda. Zakat perdagangan merupakan zakat dari penghasilan kita yang di mana termasuk dalam jenis dari zakat mal.
2. Implementasi nyata dalam pelaksanaan zakat perdagangan oleh pedagang muslim di lingkungan kampus IAIN Kudus belum sepenuhnya dijalankan dan pendistribusiannya masih dilaksanakan dengan cara tradisional.

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat penulis simpulkan:

1. Perlunya pemberian edukasi mengenai kewajiban melaksanakan zakat perdagangan, baik berupa sosialisasi, kampanye maupun kajian yang dilakukan secara langsung atau melalui media sosial perlu diadakan oleh Baznas Kabupaten Kudus ataupun LAZ yang ada di Kudus. Edukasi dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kepentingan menunaikan zakat perdagangan dan agar pengelolaan dana zakat lebih optimal.
2. Baik dan memberikan pengarahan kepada mustahik zakat khususnya mustahik zakat perdagangan. Pendekatan ini bermaksud agar rasa percaya tumbuh di hati mustahik, sehingga para mustahik mau mendistribusikan dana zakatnya melalui LAZ atau BAZ.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed Shaikh, Salman, 'Welfare Potential of Zakat: An Attempt to Estimate Economy Wide Zakat Collection in Pakistan', *The Pakistan Development Review*, 54.4 (2015), 1011–27
- Arifin, Gus, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah : Dilengkapi Dengan Tinjauan Dalam Fiqh 4 Madzhab* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016)
- Badruddi, Munawwar, and Norhafizah Binti Abdul Razak, 'Reorientasi Tentang Zakat Perniagaan: Pengalaman Malaysia', *Media Syariah*, 13.2 (2011), 227–41 <<http://dx.doi.org/10.22373/jms.v13i2.1790>>
- Fadilah, Sri, *Tata Kelola Dan Akuntansi Zakat* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016)
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*
— — —, *Undang-Undang No. 38 Tahun 1999*
- Madani, El, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2013)
- Mohd, Solehuddin Shuib, Suhaimi Ishak, Mohamad Naimi Mohamad Nor, Amirul Faiz Osman, Raja Rizal Iskandar Raja Hisham, Mohammad Taqiuddin Mohamad, and others, 'Customer Perception on Zakat Mal Mustafad in Kedah', *International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam (IRJSMI)*, 2.3 (2020), 23–31 <<https://doi.org/10.35631/IRJSMI.23002>>
- Mushaf, Lajnah Pentashihan, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2014)
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991)
- Sobur, Alex, *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi, 2010)
— — —, *Pengantar Sosial* (Yogyakarta: Andi, 2003)

Wawancara dengan Alfiyah (Pemilik Warung Makan)

Wawancara dengan Ali Jodi (Pemilik Kost)

Wawancara dengan Khasbuna (Pemilik Fotocopy)

Wawancara dengan Khuzaifah (Pedagang Sayur)

Wawancara dengan Masturoh (Pemilik Laundry)

Wawancara dengan Ni'matul Aidah (Pedagang Jus)

Wawancara dengan Puji (Pedagang Sembako)

Wawancara dengan Siti Maemunah (Pedagang Gorengan)

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013)

Islamic Microfinance Institutions As A Doctrine Of Reducing Poverty

Rosyda Auliya Rahma

Institut Agama Islam Negeri Kudus
rosydarahma1208@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan sebuah kajian untuk melihat bagaimana lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan sebuah doktrin dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di Indonesia. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar peran dari lembaga keuangan syariah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dari hasil analisis ini yang telah dilakukan ditemukan bahwa peran dari lembaga keuangan mikro syariah sangat penting untuk membantu dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, mempunyai potensi yang besar namun realitanya banyak lembaga keuangan mikro syariah yang belum berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Data yang digunakan dari berbagai macam sumber referensi lainnya yang dapat dijadikan bahan penelitian data. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa lembaga keuangan mikro syariah telah makin besar berkembang di Indonesia dan dibentuk guna membantu masyarakat ekonomi menengah kebawah dan diharapkan menjadi peran dalam mengentaskan kemiskinan melalui produk-produk yang ditawarkan.

Kata kunci : LKS, LKMS, kemiskinan

Abstract

This research is a study to see how Islamic microfinance institutions are a doctrine in alleviating poverty, especially in Indonesia. So the purpose of this study is to see how big the role of Islamic financial institutions is in alleviating poverty in Indonesia. From the results of this analysis, it was found that the role of Islamic microfinance institutions is very important to assist in alleviating poverty in Indonesia, has great potential but in reality many sharia microfinance institutions have not run according to what has been regulated. In this study, the method of literature study was used. The data used are from various other reference sources that can be used as data research material. Based on the results of the study, it was concluded that Islamic microfinance institutions have increasingly developed in Indonesia and were formed to help the lower middle economic community and are expected to play a role in alleviating poverty through the products offered.

Keywords: LKS, LKMS, poverty

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara besar di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 210 juta jiwa menjadi sebuah potensi besar dalam pengelolaan segala sektor salah satunya ekonomi dan bisnis. Namun dapat dikatakan perekonomian Indonesia memang sekarang masih belum dikatakan stabil, tumpuan aktivitas ekonomi masih belum fokus dan terkonsep dengan jelas. Lembaga keuangan menjadi salah satu sektor ekonomi yang memiliki andil besar untuk mempengaruhi stabilitas perekonomian mikro maupun makro.

Di Indonesia banyak lembaga keuangan mikro syariah yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Tidak sedikit bahkan lembaga mikro syariah yang berhenti beroperasi karena permasalahan stabilitas lembaga dengan beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, faktor internal maupun eksternal lembaga tersebut. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah dengan jumlah yang signifikan pada beberapa daerah di Indonesia kurang didukung faktor-faktor pendukung yang memungkinkan lembaga keuangan mikro syariah itu untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik.

Fakta dilapangan menunjukkan banyak lembaga keuangan mikro syariah yang tenggelam dan bubar. Fenomena seperti ini dipandang belum mampu menjawab permasalahan ekonomi yang sesungguhnya dikalangan masyarakat. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain, belum memadainya sumber daya manusia yang profesional, tentang manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha masyarakat kita masih lemah, permodalan yang relatif rendah dengan biaya pengembalian yang cukup tinggi dibanding lembaga non syariah, serta kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan mikro syariah menjadi faktor yang menghambat perkembangan pula.

Sektor lembaga keuangan mikro syariah merupakan bidang penelitian yang penting untuk menemukan bukti bahwa pengentasan kemiskinan dapat diatasi secara efektif melalui lembaga ini (Tamanni & Haji Besar, 2019). Dalam sisi lain Islam memiliki lembaga yang berorientasi dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat seperti BAZNAS dan BWI adalah contoh lembaga-lembaga yang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan mikro syariah namun dengan catatan jika dilakukan dengan serius menggunakan konsep yang tepat dan implementasi nya sesuai aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan salah satu solusi untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin. (Salem, R., El Kayaly, D., & El-Bassiouny, N 2018) Lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia diberi nama Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang merupakan salah satu sumber pendanaan mikro di dalam negeri. Keuangan mikro Islam pada praktiknya yang lebih etis daripada motif tradisional untuk mencari keuntungan maksimal, dan mendorong perpanjangan waktu pelunasan jika debitur dalam kesulitan. (Alam, A. S. A. F., Mia, M. A., Bhuiyan, F., & Ghani, A. B. A 2019).

Lembaga keuangan mikro syariah dalam realita lapangannya terdapat distingsi dari berbagai sisi dan terdapat kesenjangan literatur tentang permasalahan ini dan posisi lembaga keuangan mikro syariah sebagai lembaga pembiayaan masyarakat menengah kebawah yang mendorong upaya mengentaskan kemiskinan. Dalam praktiknya banyak lembaga keuangan mikro syariah yang tidak sepenuhnya menggunakan konsep yang benar, yang hanya mengedepankan keuntungan satu pihak tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dan konsep lembaga keuangan mikro syariah yang sesungguhnya.

Lembaga keuangan mikro syariah atau BMT selain bidang keuangan, berhasil pula dalam penyaluran dana sosial yang bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat. Ini membuktikan bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro syariah bermanfaat bagi aspek duniawi dan akhirat, bergerak di fungsi ekonomi, sosial dan religi. Terlepas dari itu masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi agar tetap eksis di masyarakat dan tetap berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Secara konsepsi memang lembaga keuangan mikro syariah yang eksistensinya dibutuhkan masyarakat terutama kalangan mikro, akan tetapi dalam bidang operasional masih memiliki banyak kelemahan. Problematika tersebut harus dapat diatasi dengan baik agar mampu mewujudkan terciptanya citra positif bagi lembaga keuangan mikro syariah yang bersih serta terpercaya oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kajian kepustakaan dengan mengambil judul *Islamic Microfinance Institutions As A Doctrine Of Reducing Poverty* dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang peran doktrin dari lembaga keuangan syariah, penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar peran dari lembaga keuangan syariah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.. Dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

KAJIAN LITERATUR

A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang bekerja dan beroperasi menggunakan prinsip *profit loss sharing* sebagai metode utama. Prinsip keuangan syariah memiliki cara pengaplikasian yang luas dalam suatu sistem perekonomian yang tidak hanya terfokus dalam sistem bagi hasil tetapi juga secara sempurna menanamkan kode etik seperti moral, sosial dan agama dalam menuju tujuan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Lembaga keuangan syariah mengutamakan hubungan kemitraan yang berbasis utama pada bagi hasil.

Prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya terdiri atas :

1. Pelanggaran terhadap (suku bunga)
2. Karena dilarang system bunga, maka penyedia dana menjadi investor.
3. Uang bukan sebagai modal tetapi akan menjadi modal jika sudah dipindahtanggankan dengan sumber daya untuk melaksanakan aktivitas yang produktif sehingga uang diartikan sebagai konsep yang mengalir (*flow concept*),
4. Pelarangan terhadap perilaku spekulasi
5. Prinsip ta'awun, tolong menolong untuk meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme ekonomi dan bisnis.
6. Prinsip tijarah (bisnis), prinsip mencari laba dibenarkan oleh lembaga keuangan islam harus dikelola dengan professional.
7. Disamping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan juga menjalankan tugas sebagai lembaga sosial.(Irman Firmansyah 2018)

Lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip syariah dalam setiap operasionalnya. Lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip syariah seperti BMT, BPR Syariah dan koperasi syariah.(Alissa Qotrunnada Murdianah 2021). Lembaga mikro syariah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang juga berperan sosial. (ridwan 2004) .

BMT adalah kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal Wat Tamwil yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT memiliki dua fungsi yaitu Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta) dan Baitul Mal (rumah harta). (adiwarman karim 2002) BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai syariah.(Andri Soemitra 2009).

Fungsi BMT, Fungsi dari aktivitas yang dijalankan oleh BMT sebagai upaya konkret pencapaian tujuan yang diharapkan yang telah dijelaskan di atas. menjelaskan Baitul Mal Wat Tamwil berfungsi sebagai : 1. Pengembangan potensi ekonomi masyarakat dan anggotanya untuk mencapai kesejahteraan. 2. Peningkatan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami. 3. Sebagai perantara keuangan baik fungsi Maal maupun Tamwil untuk usaha produktif.

Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT memiliki peran sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok muamalat, dan daerah kerjanya. 2. Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. 3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. 4. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) di antaranya sebagai shohibul maal dengan duaifa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah.(A. Syifaul Qulub, 2019).

B. Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, kemiskinan biasanya diukur dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan dibagi menjadi dua bagian; a. kemiskinan absolut, diartikan sebagai jumlah penduduk yg hidup dibawah garis kemiskinan yg tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hidup layak lainnya. b. kemiskinan relatif, diartikan sebagai keadaan perbandingan antar kelompok masyarakat dengan pendapatan yang sudah berada diatas garis kemiskinan.(Haviluddin, Siti Sriningsih 2021).

Kemiskinan dapat ditinjau dari dua sisi yaitu pertama kemiskinan absolut didefinisikan banyaknya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu, dimana perhitungan berdasarkan standar hidup minimal Negara, standar hidup minimal ini dapat berbeda dari suatu Negara dengan Negara lain. Kedua kemiskinan relatif yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing- masing golongan pendapatan.(nur rianto

2010). Kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, seperti ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Islam menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup dan hati serta perasaannya merasa aman dengan nikmat Allah SWT.(fitri raya 2013).

Sudut pandang Islam mengatakan kemiskinan terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu:

1. Miskin iman

Maksudnya adalah orang yang jiwanya tidak ada kontak atau hubungan dengan Allah, atau jika ada hubungan pun terlalu tipis yaitu hanya ingat pada Allah saat susah saja. Hidup akan terombang-ambing inilah yang kita lihat di seluruh dunia ini, peperangan, kemiskinan, perkelahian, bentrokan, krisis, dan berbagai macam kemungkaran yang menyusahkan mereka sendiri. Krisis multidimensi ini melanda bangsa ini pun ditengarai oleh meningkatnya krisis iman seseorang.

2. Miskin ilmu

Miskin ilmu menjadi penyebab kedua mengapa manusia mengalami kesusahan, miskin dan tidak tahu cara menyelesaikan hidup. Wahyu yang diturunkan Allah pertama kali adalah perintah untuk membaca, namun saat ini membaca belumlah menjadi budaya yang tercipta dalam tubuh setiap muslim, hal ini menjadi salah satu penyebab ketertinggalan dan keterbelakangan kaum muslim dibanding kaum non muslim.

3. Miskin harta

Para ulama madzhab Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah mendefinisikan miskin adalah sebagai seseorang yang masih memiliki kemampuan untuk bekerja berusaha dalam rangka memperoleh harta dan menghidupi keluarganya secara halal tetapi hasil yang didapat masih belum mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan dirinya dan keluarga. Islam memandang baik fakir maupun miskin sama-sama harus dibantu terlepas definisi secara bahasa. Fakir adalah keadaan serba kekurangan dan tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Miskin adalah keadaan seseorang sudah bekerja tetapi masih belum mencukupi kebutuhan hidupnya. Islam sangat memandang penting permasalahan kemiskinan ini karena kefakiran akan dapat menyebabkan lemahnya iman.(nur rianto 2010).

Penyebab kemiskinan, Tercatat tiga macam pendekatan yang mencoba menjelaskan mengenai sebab-sebab kemiskinan, yaitu *system approach*, *decision-making model*, *structural approach*. *system approach* menekankan pada adanya keterbatasan pada aspek geografi, ekologi, teknologi dan demografi. Kondisi kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor dianggap lebih banyak menekan warga masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau pedalaman. Yang harus diupayakan dalam kondisi seperti ini adalah membangun dan memperbaiki prasarana transportasi dan komunikasi public yang memungkinkan daerah tersebut bisa terbuka.

Pendekatan kedua menekankan pada kurangnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian. Pendekatan ini melihat bahwa sebagian warga masyarakat kurang memiliki kemampuan inovasi atau tidak memiliki empati pada kewirausahaan untuk mengelola yang lebih baik. Pendekatan ini menghendaki ditingkatkannya kemampuan yakni keahlian dan keterampilan SDM seperti pembentukan dan pengembangan motivasi, mendorong mobilitas meningkatkan pendidikan pada orang-orang miskin supaya memiliki jiwa inovasi. Pendekatan ketiga melihat bahwa kemiskinan terjadi karena adanya ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan faktor produksi. Saran untuk pendekatan ini adalah menerapkan kebijaksanaan politik pembangunan yang langsung mengidentifikasi dan menghapus sumber ketimpangan itu sendiri.

C. Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pengentasan kemiskinan

Kaitan antara lembaga keuangan mikro dengan Kemiskinan Fungsi intermediasi di dalam perekonomian dijalankan oleh lembaga keuangan mikro, dimana uang (kredit/pembiayaan) menjadi darahnya perekonomian, terutama akses modal kepada masyarakat miskin sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan berbagai sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung seperti melalui pemberdayaan usaha produktif melalui pinjaman dalam bentuk kredit mikro. Kaitan antara pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan kredit mikro merupakan pintu masuk bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula agar mereka mendapat kesempatan untuk mengembangkan ide dan kreatifitas usahanya sehingga diharapkan akan memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitar.

PEMBAHASAN

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan hasil dari klasifikasi data pada penelitian relevan yang berhubungan dengan penelitian. Adapun penyajian data dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Data 1

Penelitian dilakukan oleh Widya Gina , Jaenal Effendi dengan judul *Financing Program in Microfinance Institution (LKMS) of Welfare Enhancing for Micro Business Enterprises (Study Case in BMT Baitul Karim Bekasi)*. Metode penelitian adalah metode *Ordinary Least Square (OLS) dan metode logistic*. Hasil dalam penelitian ini adalah Jumlah pembiayaan yang diambil responden berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro dengan didukung oleh variabel-variabel lain seperti jumlah anggota keluarga yang memiliki penghasilan, tingkat pendidikan, dan variabel etika dan moral nasabah. Jumlah pembiayaan yang diambil responden berpengaruh signifikan pada kesejahteraan berdasarkan opini responden dengan didukung oleh variabel lain seperti lamanya menjadi anggota BMT, pengeluaran makan, dan pendapatan responden. (Jaenal Effendi 2020).

Data 2

Penelitian dilakukan oleh Supanji Setyawan, Chaidir Iswanaji Dengan Judul *Peran Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah Variabel pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa nasabah UMKM yang menggunakan pembiayaan untuk kegiatan perekonomian pribadi. BMT Bima mampu mengurangi kemiskinan melalui penyaluran dana ZISWAF (baitul maal) yaitu zakat, infak, shadaqah, dan wakaf kepada masyarakat yang membutuhkan di luar status sebagai nasabah. (Chaidir Iswanaji, 2021).

Data 3

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Hidayat dengan judul *Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19*, menggunakan metode deskriptif analisis dengan hasil Temuan penelitian ini menjelaskan kinerja pembiayaan mikro untuk penguatan UMKM sudah baik. Dari aspek permodalan, LKMS telah mampu meningkatkan modal bagi UMKM, sehingga kuantitas produksi UMKM

tersebut menjadi meningkat. Terdapat beberapa model pembiayaan mikro untuk penguatan UMKM yang mungkin dapat diterapkan oleh Lembaga keuangan Islam yaitu model kelompok solidaritas, model perbankan desa, model grameen, dan model individu.(Agus Hidayat 2021).

Data 4

Penelitian yang dilakukan oleh irwan Suriadi, Haviluddin, Siti Sriningsih dengan judul Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengurai Kemiskinan Di Kota Mataram. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis melalui fgd (*forum Group Discussion*) menghasilkan menunjukkan bahwa Faktor pendukung dapat dilihat dari kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Mataram yaitu Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kota mataram harus memiliki lokasi yang strategis dan pemberdayaan masyarakat Oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Faktor Penghambat dapat dilihat dari kelemahan dan ancaman yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Mataram yaitu kurangnya sosialisasi dan Bank syariah yg menggarap pasar mikro, Strategi kebijakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam menghadapi ancaman yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Mataram harus terus menerus mengembangkan diri secara kreatif, inovatif dan selalu memiliki perbaikan dalam pelayanan kepada nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah.(Haviluddin, Siti Sriningsih 2021).

Data 5

Penelitian yang dilakukan oleh Nizar Nazarulloh dengan judul Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, metode yang digunakan analisis deskriptif dengan observasi dan pengumpulan data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Program Pemberdayaan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Makmur sejahtera mampu meningkatkan kesejahteraan nasabahnya Mayoritas nasabah menyatakan bahwa setelah adanya Program Pemberdayaan Koperasi sampai saat ini memang berperan besar dalam membantu meningkatkan perekonomian nasabah. Pada saat ini nasabah telah mengalami sejahtera selaras dengan teori menurut Sugiharto bahwa indikator kesejahteraan antara lain pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasuki anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. (nizar 2020).

Data 6

Penelitian yang dilakukan Jaka Sriyana dan Fitri Raya dengan Judul Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Bantul Dengan Metode Analisis Regresi dengan Data-Data Persepsi dari Anggota. Berdasarkan Hasil Analisis, Variabel Edukasi Usaha, Pemanfaatan Dana Baitul Maal, dan Pemberian Motivasi Bekerja kepada Anggota Memiliki Peran yang Signifikan pada Peningkatan Pendapatan Anggota. Faktor Pemanfaatan Dana Baitul Maal Merupakan Variabel yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Anggota. Faktor Motivasi Kerja Anggota Juga Merupakan Variabel yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Anggota. Variabel ini Memiliki Peran yang Sangat Kuat untuk Meningkatkan Pendapatan Anggota. Dari Hasil ini Dapat Diambil Implikasi bahwa Persepsi Anggota terhadap Keberadaan dan Peran BMT terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat dalam Rangka Penurunan Tingkat Kemiskinan terutama disebabkan pada Kegiatan-kegiatan yang Bersifat Sosial, Pendidikan, dan Peningkatan Motivasi Bekerja. (Fitri Raya 2013).

Data 7

Penelitian dilakukan oleh Subhabrata Bobby Banerjee dan Laurel Jackson dengan Judul Microfinance and the business of poverty reduction: Critical perspectives from rural Bangladesh dengan Metode Analisis Deskriptif dengan Hasil Mencerminkan Gambaran yang Berbeda. Kita Menemukan Keuangan Mikro Menyebabkan Peningkatan Tingkat Hutang di Antara yang Sudah Miskin Masyarakat dan Memperburuk Kerentanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Kita Temuan Berkontribusi pada Literatur yang Muncul tentang Peran Modal Sosial dalam Mengembangkan Kemampuan Kewirausahaan di Masyarakat Miskin dengan Menyoroti Proses Dimana Modal Sosial Dapat Dirusak oleh Langkah-langkah Berbasis Pasar seperti Keuangan Mikro. (Laurel Jackson n.d.).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mempunyai Peran Penting dalam Ekonomi Masyarakat karena Lembaga tersebut Adalah Lembaga yang Paling Dekat dengan Masyarakat Kalangan Menengah Bawah. Salah satu Tujuan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah Adalah untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterakan Umat melalui Produk dan Program dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah tersebut, Namun Memang Secara Aplikasi Lapangan Kurang Begitu Berjalan Maksimal, Hal tersebut Perlu Mendapat Penanganan dari Pihak yang Berkaitan atau Bahkan Pengawas dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

SIMPULAN

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan salah satu solusi untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin. Lembaga keuangan mikro syariah dalam realita lapangannya terdapat distingsi dari berbagai sisi dan terdapat kesenjangan literatur tentang permasalahan ini. Lembaga keuangan mikro syariah atau BMT selain bidang keuangan, berhasil pula dalam penyaluran dana sosial yang bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat. Ini membuktikan bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro syariah bermanfaat bagi aspek duniawi dan akhirat, bergerak di fungsi ekonomi, sosial dan religi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syiful Qulub, Evi Nur Fitria. 2019. "Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6 No. 11.
- Alam, A. S. A. F., Mia, M. A., Bhuiyan, F., & Ghani, A. B. A, Begum. 2019. "Development of Islamic Microfinance: A Sustainable Poverty Reduction Approach." *Journal of Economic and Administrative Sciences* volume 35 no 3.
- Alisa Qotrunnada Murdianah, Yasmin Afnan Solekha. 2021. "Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)." *Journal of Sharia Finance and Banking* Volume 1 Number 1.
- Andri Soemitra, andri soemitra. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. 1st ed. Jakarta: kencana.
- Chaidir Iswanaji, Supanji Setyawan. 2021. "Peran Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 9, No. 2.
- Haviluddin, Siti Sriningsih, Irwan Suriadi. 2021. "MODEL Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengurai Kemiskinan Di Kota Mataram." *Ekonomis* Volume 7, No. 1.

- Hidayat, Agus. 2021. "Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* volume 1 no. 1.
- Irman Firmansyah, Aam S. Rusydiana. 2018. "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas." *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 9, Nomor 1,.
- Jaenal Effendi, Widya Gina. 2020. "Financing Program in Microfinance Institution (LKMS) of Welfare Enhancing for Micro Business Enterprises (Study Case in BMT Baitul Karim Bekasi)." *Jurnal Al- Muzara'ah* Vol. 3, No. 1.
- Adiwarman Karim, Adiwarman Karim. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: the international institute of islamis thought (IIIT).
- Laurel Jackson, Subhabrata Bobby Banerjee. n.d. "Microfinance and the Business of Poverty Reduction: Critical Perspectives from Rural Bangladesh." *Journals Permissions* vo, 70 no. 1.
- Nizar, Nazarullah. 2020. "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 5 no. 1.
- Fitri Raya, Jaka sriyana. 2013. "Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kab. Bantul." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 1.
- Al Arif, Nur Rianto 2010. *Teori Makroekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. UII Press.
- Salem, R., El Kayaly, D., & El-Bassiouny, N, El Ebrashi, R. . 2018. "What Potentials Does Islamic Microcredit Have?: An Empirical Investigation in the Egyptian Context." *Journal of Islamic Marketing* volume 9 no 2.

Religious Moderation In Reflection Of Islamic Education Patterns In The Era Of Disruption

Sri Rokhmiyati

Universitas Islam Negeri Salatiga

rohmyabieta@iainsalatiga.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to examine religious moderation in the reflection of Islamic education patterns in the era of disruption. This article collaborates on the overall procession of practice and mastery of Islamic education in the midst of a religious shift towards conservativeness. In the era of disruption, it is necessary to explore and develop more deeply related to the use of technology. The purpose of Islamic education to internalize the values of religious moderation in students can be achieved as expected. The method used in this research is a qualitative method. With a qualitative approach, researchers can have more flexibility in observing, exploring and analyzing more precisely with regard to religious moderation in the reflection of Islamic education patterns in the era of disruption. The results of the study describe Islamic education in forming patterns of religious moderation with mastery of information communication and technologies (ICT), the substance of the PAI curriculum is oriented to exemplary, moderate character, coaching and mentoring of student activities, and evaluation. Forming an attitude of religious moderation is an effort to create awareness and respect for diversity in a comprehensive manner.

Keywords: Religious Moderation, Islamic Education, Era Of Disruption

Abstrak

Tujuan riset ini adalah mengkaji moderasi beragama dalam refleksi pola pendidikan Islam di era disrupsi. Artikel ini mengkolaborasi proses keseluruhan praktik dan penguasaan pendidikan Islam di tengah bergesernya keagamaan mengarah ke konservatif. Pada era disrupsi perlu digali dan dikembangkan lebih mendalam terkait pemanfaatan teknologi. Tujuan pendidikan Islam guna menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada peserta didik bisa tercapai sesuai yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif peneliti bisa lebih memiliki keleluasaan dalam observasi, mendalami dan menelaah lebih tepat berkaitan dengan moderasi beragama dalam refleksi pola pendidikan Islam di era disrupsi. Hasil penelitian menggambarkan pendidikan Islam dalam membentuk pola sikap moderasi beragama dengan penguasaan information communication and technologies (ICT), substansi kurikulum PAI diorientasikan kepada keteladanan, karakter moderat, pembinaan dan pendampingan aktivitas peserta didik, dan dilakukannya evaluasi. Membentuk sikap moderasi beragama menjadi usaha mewujudkan kesadaran dan menghargai keberagaman secara komprehensif.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Pendidikan Islam, Era Disrupsi

INTRODUCTION

Muslims in the perspective of the Koran are the best people who want to realize the truth and keep away evil. Goodness can be obtained by having moderate character (*ummatan wasathan*), which encourages goodness and justice. Full mastery of moderation as the essence in implementing a concept of nature in the context of moderation. The intended concept becomes an integral component of Islam itself. Therefore, as a Muslim, it is necessary to balance understanding moderation with efforts to apply it in daily life. In its implementation, it must start from oneself, family, to moderate (*wasathiyah*) as an honor for the wider community.

This term is very interesting conceptually and sounds elegant, namely that religion is not allowed to be extreme, right or left. Even in a plural and multicultural Indonesian situation, moderation is something that is certain based on their views. However, is it true that such religious moderation is understood? Or are they trapped in religious pluralism which presents the belief of all religions as the same?

Muhyiddin (2021), *statement* that fanaticism on the absolute truth of religion is a must. While fanaticism in group and individual arguments will lead to individual culture and cult understanding, this is prohibited in Islam. Moderation of religion in the Islamic perspective is only for the field of muamalah, if it does not destroy the faith of the people. It is dangerous for the creed of Muslims to appeal to coercion in the form of instructions (Junaidi, 2021).

Islam from its initial appearance has explained the rules in religion, such as the word of Allah Swt in QS. Al-Baqarah: 143 “*And similarly We have created you (Muslims) as a middle nation so that you may be witnesses of (deeds) of mankind and that the Messenger (Muhammad) may be witnesses of (deeds) you.*”

The meaning of *the washat community* is the people who are in the middle position, do not have a tendency to the extreme right or left, namely to hold tightly to the revelation of Allah Swt. The meaning of extreme itself needs to be interpreted correctly, because often people *justify* extreme people even though they actually adhere to the true Islamic Shari’ah. Based on the verse in QS. Al-Baqarah: 143, it is interpreted that Islam has presented a medium set of revelation guidelines (*wasatan*), which does not exceed the limits and makes it easy. The context of the verse relates to the story of Prophet Isa

alaihisalaam, where the Jews exaggerated by thinking that Prophet Jesus was the child of adultery, while the Christians exaggerated in believing that Prophet Jesus was the son of God. That way Islam is in a position between the two, namely Prophet Isa is the son of the holy virgin Mary and became His prophet and apostle (Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, 2019).

Referring to the meaning of religious moderation, the fact is that Islam is complete and perfect as in His word; *this day have I perfected for you your religion, and have sufficed for you My favors, and have pleased Islam to be your religion*. QS. Al-Maidah: 3. Returning to these verses, Islam has been perfect, managing all aspects of human life enshrined in the religious attitude of both communal, individual, and community. Similarly, the religious attitude towards fellow Muslims and adherents of other religions, Islam has managed the whole.

In addition to these verses, there are many verses and hadiths that tell us to be religious without excess. The words of the Prophet Muhammad SAW; *people, stay away from your attitude that is too extreme (excessive) in religion. The real reason (thing) that destroyed the ummah before you is because the attitude is too excessive in religion* (HR Ibn Majah). This hadith clearly commands not to be excessive in religion, by stating that one should be religious in accordance with what has been explained in the sunnah of the Prophet and His book.

This effort tries to refer to the text of the Qur'an and Hadis as the basic *framework* and concept, but with a textual understanding and free from historical conditions. Times are constantly evolving and changing, Islam is seen to be a stagnant, exclusive, and unable to keep pace with modernity. Both attitudes do not benefit Muslims. The first possibility causes Islam to lose its identity, because it dissolves and melts and in other civilizations and cultures. Second, gaining a negative image in the international world as well as Muslims themselves, religions and community groups that teach violence in their preaching. First, open and loose to deceive the basic teachings of religion itself is very strict and even has a tendency to close oneself in the attitude of religiosity. (Shihab, 2014).

Islamic law can be understood well if the source of the teachings of the Qur'an and Hadith is understood not partially but comprehensively, because with each other the Qur'an means each other (*yufassiru ba'duhu ba'dan*). By reading the verses of the Qur'an in full will be able to be given the conclusion

that jihad in the Qur'an does not always have the connotation of armed war against the enemy, but can mean jihad against lust. Similarly, understanding the Qur'an will appear to be a *blessing lil 'alamin*, peaceful and tolerant, if on the contrary if the verse *qital* (war) is observed regardless of the connection and context with other verses, then the Qur'an has the effect of being a cruel teaching, intolerant, and harsh.

The primacy of Islam is a religion that always runs with space and time, so it does not fall into the possibility of being desperate to incorporate various thoughts and views from foreign civilizations and cultures that are now dominated by materialistic views. There is an assumption that Islam and Muslims are now in a position of backwardness and backwardness in various fields. Often divisions and conflicts arise from the many misconceptions that emerge from the digital space. The size of the digital space is used deliberately in order to create narratives that fall apart. In substance, all religions expect a moderate, harmonious, and peaceful life. The growth of information technology in the face of the politics of global acceleration and capitalism in terms of the era of disruption. In a digital space controlled by human existence undergoing an essential change, the electronic speed of a body form running in space, as a body form that simply absorbs every information passed and stays in place through electronic simulation. (Virilio, 1989). The next digital space as a place of competition and contestation (Primayana & Dewi, 2021).

At this point, certain communities use digital space to revive identity politics and foster conflict. The digital space now tends to be dominated by religious values that lead to exclusivity. The situation is so worrying because it can bring about rejuvenation of ulama and shift religious authority. In the theory of *Religious Social Shaping of Technology* presented by Heidi Campbell in her work *When Religion Meets New Media* (2010), it is explained that the consequences of the era of disruption through people's religious ways, among others, are the shifting of religious authority, the fading of affiliation in religious institutions, the change from pluralism into tribalism, and the strengthening of individualism. Meanwhile, religious studies and narratives become competitive arenas that have great power produced by certain communities to develop religious symbols, ideas, and ideas for the public. Religious studies as a wet arena that is easy to narrate and play with according to subjective desires (Zulkifli, 2013). In such a situation, it is realized that today's religious community is still far from substantive values and merely symbols.

The proliferation of communication media and the dominance of information technology continues to grow rapidly by bringing modern human life into a new era, namely the era of disruption. The term *disruption* itself was first introduced by Christensen (1995) in *Disruptive Technologies* (1995) and *The Innovator's Dilemma* (1997), describing that disruption is a situation when information technology makes rapid progress to affect communication and relationship patterns. (Lasmawan, 2019). Based on Kasali (2017), the symptoms of this disruption start from investment and finance, activities in the world, but then the influence of this disruption becomes widespread on various aspects of life such as education, social, political, cultural, entertainment world, to aspects of diversity and religion. (Raḥman, 2002).

Islamic moderation as an effort that must be implemented across time and space, pays attention to epistemology based on the Qur'an and hadith, both implicitly and explicitly. Islamic teachings ground the values of moderation covering all aspects, be it Sufism, sharia, or theology. The integration of the value of moderation in the Islamic trilogy shows that Islam is a religion that is anti-violence and freedom.

LITERATURE REVIEW

Resistance to moderate Islamic terminology is due to three factors, namely; first, the attitude of moderate Islam does not show clarity in attitude, especially the basic theological issues which essentially need crystallization of Islamic identity and affirmation. Second, the concept of moderate Islam does not show a strong and strong spirit of *religiosity*. Third, the history of moderate Islam is a Western concept that does not have theological roots in the tradition of Islamic thought which is merely an engineering to destroy Islamic thought and identity (Hilmy, 2012). There are also several groups who admit that moderate Islam is Islam that has been applied by the Prophet Muhammad and his companions. The benchmark is the relevance of experience or sayings with the experiences and sayings of the companions of the prophet and the tabi'in. The community claims that the meaning of the word *ummatan wasaḥṭan* in Surah Al-Baqarah/2: 143 is only directed at the companions of the Prophet. (Shihab, 2019).

The explanation of the crystallization of the identity of Islamic moderation towards certain generations is denied by Quraish Shihab (2019), that although moderation (*wasatīyah*) is identical with Islam, it is certainly

not natural to only identify certain groups. This is because *wasa'iyah* is not only one school of thought in Islam, nor is it a new school, but among its main characteristics is Islamic understanding which instills the values of balance. Moderate characteristics in Islam, based on Quraish Shihab (2018), moderation (*wasathiyah*) in the middle meaning is related to its guidance, both regarding God or nature, humans, and the world (Shihab, 2007).

According to Azyumardi Azra (2019), the visible moderation of religion in Indonesia is Muslims. The current situation has been established with the existence of *wasatiyyah*, in interpreting the religion of a few Indonesian people who are extreme right and left. The peculiarity of Indonesia's Islamic Moderation is that Muslims are the majority, but the ulama and leaders can accept the four pillars of nationality; Pancasila, the 1945 Constitution, Bhineka Tunggal Ika, and the Unitary State of the Republic of Indonesia. This is what makes European researchers amazed why Indonesian Muslims are not an Islamic country, even though Islam is the majority (Azra, 2019).

In the modernist community, modern is equated *tajdid* which has the meaning of reviving what has been forgotten from religious understanding to reform the lives of Muslims in general for the better. (Zarkasyi, 2013). In simple terms, modernization means returning something that has been lost and applying it in life, although denying the idea that modernization is *tajdid*, it means more *taghrib* or *westernization*. Fazlur Rahman (1919), in his work *Islam and Modernity*, there are three discussions about modernity that Fazlur Rahman tries to explain, namely: Islamic education, Islamic *heritage (keislaman)*, opportunities and challenges for Muslims in the future. According to Fazlur Rahman, the treasures (*khazanah*) owned by Islam provide benefits to bring back the Al-Qur'an and Sunnah into two important parts of modernism regulations in the Islamic world. (Zarkasyi, 2009).

Moderation in the view of Kamali (2015), has the same meaning as *wasathiyah*, which means *i'tidal* or balance in morality, beliefs, as well as personality in the method of considering others and in applying the system of government and socio-political rules. Referring to the view above, practically religious moderation in the era of disruption in the context of this study is an effort to convey universal, inclusive, and moderate Islamic values through Islamic activities by adhering to the principle of balance (*wasathiyah*) and guided by norms. -Socio-cultural norms and comply with government regulations (Kamali & Ramadan, 2015).

Wasatiyyah *equal* tendency between two opposing aspects, does not lead to one and opposes the other, and does not reduce more than the other. In Arabic tradition, the word *wasath* has the meaning of excellence, goodness, nobility, and justice. This word was adopted in the world of football, namely the referee. If as a referee, you must be able to act fairly, put the truth. Agree with Abdullah Ibn Sulaiman, *wasatiyyah* in syar'i is goodness, justice, middle between ifrad and tafriid, that is not excessive and reckless. As a middle way or justice which contains virtue (Qardhawi, 2020).

According to Al-Qaradhawi, *wasatiyyah* is defined as a method of thinking, behaving, and interacting based on a balanced attitude (*tawazun*) in responding to two situations of action that tend to be compared and analyzed to a state of behavior that is not contrary to the principles of religious teachings and traditions of local groups (Qardhawi, 2020). Moderate attitude always prioritizes a balanced state in terms of morals, character, and beliefs, both treating other people as personal. The implementation of a moderate attitude in religion requires controlled and balanced emotions, correct understanding or knowledge, and caution and vigilance (Shihab, 2019).

The Muslim, should be complete with the issue of tolerance, because everything is clear, there is an explanation. Indeed, to those who are truly there is guidance for those who know (Ar-Rum: 22). Uniformity doesn't have to be the same, even in various ways. There's a history behind it since the 16th century out there, conceptualizing it, then bringing it here. However, this continues to be renewed and exhaled, which disrupts the tolerance that actually exists and is well established in Indonesia.

In this context the attitude is excessive in one or more of the essence of the religion. One of the triggers is the lack of understanding of the main causes of interpretation, radical extremism, and rigid intolerance. An effective strategy to prevent the younger generation from being influenced by extremism and radicalism is to instill the value of religious moderation with Islamic education.

DISCUSSION

The conceptual study of religious moderation Religious

Moderation must go hand in hand and cannot move alone for the expected target. Creating religious moderation into *framing* is the key word together to become the substance of managing religious life that is

tolerant and moderate in a pluralist society. Technological developments encourage earnestly in broadcasting appropriate and appropriate content for the digital community, which incidentally is the millennial generation. Therefore, moderate Islam is a state of balance in all the problems of worldly and hereafter life which must always be followed by efforts to adapt to the conditions experienced based on religious instructions and the objective conditions that are being lived. The adjustment is because moderation is not a recipe that has already been detailed, but rather an effort to find the substance of value and apply it continuously.

Moderation of Islam there is moderate thought in Islamic teachings. Understanding all of them as the character of Islam, which is a thought that recommends not to be excessive and radical in religion. Islam always uses the “middle way” in its guidance. so that in time Muslims are required to have a moderate attitude and understanding (*ummatan wasathan*). In principle, moderation (*wasathiyah*) is one of the many characteristics of Islamic teachings. In the context of moderation, being a religion, Islam encourages its followers in their daily practice to be moderate. On the one hand, there is knowledge and teachings, while on the other side there are religious expressions and attitudes.

Although Islam teaches moderation, in reality you will find some Muslims who do not have a moderate attitude. Therefore, there are groups who do not agree with the concept of moderate Islam. The logical consequence of this will be to present the designations of Islam as fundamental, liberal, radical, and others, which are reducing the meaning of Islam *kaffah* and dichotomous. Even though it is not Islam that is liberal, extreme, radical, and others, it is the followers who often slip against this attitude. Rejects the idea of modernity offered by Fazlur Rahman and assumes that modernization is implemented as a component of the pattern of religious liberalization. In addition to modernization, attempts at Islamic typology such as traditionalists, fundamentalists, modernists, and secularists are part of the westernization project.

The concept of religious moderation is not widely known in religious education institutions for all religions. However, the value of religious moderation is basically found in the teachings of each religion in various terms and forms, in line with the main and core teachings of each religion. As a supporter of Islamic civilization, *wasatiyyah* puts itself into a form of sincerity, continuity with full sincerity in order to get *output* without distinguishing

between religion and state duties, technically the construction of the *wasathiyah* focuses on several aspects including; good government based on Islamic principles and democracy, inclusive economic development based on Islamic economic principles, *leaders* with high moral integrity, bringing peace, harmony, and cooperation with non-Muslims, improving education holistically, awareness to shape the mentality of the Muslim generation, and synergy and balance between technological, scientific, and Islamic religious traditions.

Religious Moderation in Building Islamic Education Patterns

From a practical point of view, moderation in religion can be realized by prioritizing the consistency and balance of religious experience, so that it can be applied on campus or schools based on knowledge, emotional control so that mistakes do not occur and education that can help participants want take proper and quality education, as well as between being careful in attitude. Therefore, religious moderation can be said as understanding as well as practicing a religious teaching in a balanced and fair manner. In religious moderation, one can make a person who is not excessive in anything and is not extreme in practicing religion, because there can be no religion that teaches extremism.

The strategy of developing religious education to include students is an effort to create an encouraging climate in the teaching and learning process. Social roles are classified as genuine roles that have a religious nature and roles that are not merely religious. This role is essentially cultural and socio economic. The main cultural role is to create a view of life that is formulated in a value system. The value system has the function of being the creator of correlation among the community, as a means of *filtering* new values that arise from outside. creating community community, values that are practiced and developed in their own environment.

In this study, it is an attitude where as a Muslim does not consider or do not interfere with other religions. Do not disturb what is meant in this sense is not to attack, oppress and destroy but it cannot be said that this is respect, because one religion may not respect another religion. In the Qur'an it is stated that *Innal ladzina kafaru min expertl kitaabi wal musyrikina*, the disbelievers from the people of the book and the polytheists go to hell in

Islam are said to be like that, the beliefs of Muslims that cannot be tolerated or cannot be reconciled, believe that it belongs to them. All religions are separate and legal, but what is not allowed in this country is attacking each other, not respecting the truth of other religions, then participating in rituals of other religions in Islam is not taught, if other religions allow it, it is a matter of other religions.

In Islam what is forbidden is to follow the rituals of other religions. Now this is an era in Western civilization called the modern era that postmodernism is an understanding that contains relativism and teachings that convey that there is no absolute truth. Where the truth lies in the meaning, the meaning of every word, that meaning can be interpreted by anyone. This means that the truth belongs to everyone, this is what is called postmodernism. Religion is a social reality if it is said that all religions are the same, it means that there is no truest religion, maybe those who say it is a country that has no religion, but a Muslim cannot say that, because they believe that our religion is the most correct. Christians say their religion is the most correct, people who say their religion is the most true have no problem. a belief now for example people in the west believe that humanism is the most correct understanding it is a mistake to listen, but still say that humanism is the best is the best, while people who don't like humanism will deny that Faith is not the best, the best is belief ritualism.

Now is the time to fight over the meaning of the word moderate oneself and even the words *wasatiyyah* become a struggle for meaning, so whoever gave the first name wins, must have confidence that our religion is enough to provide instructions and teachings on how to live in a pluralistic country or country. heterogeneous. Meanwhile, if there are people who are not tolerant of other religions than a few people, they are unscrupulous people, then all Muslims are judged as radicals and finally a regulation is issued for all Muslims, a policy that is not in accordance with the actual reality.

This state of mind does not tolerate differences, positively encourages the use of power to maintain and gain political power, in public expressions even though it is unclear and ambiguous regarding the matter, especially when in a weak state. Extremists generally have a closed-minded tendency that is inflexible, following *monocausal* of the world on their side. Religious moderation is the core or essence of religious understanding, while radical extremism is a form of alienation from religion, both in practice and in thought.

Political decisions and social support have an influence on the goals of Islamic educational institutions which are self-evaluated to develop themselves and provide services to Muslims. Growing constituents in order to support its existence, because Islamic educational institutions *depend* on community support. The existence and sustainability of these Islamic educational institutions deserve appreciation and a positive response in maintaining the quality of faith of the Indonesian Muslim community.

The condition of Islamic education institutions in Indonesia is very varied in the form of religious understanding, curriculum, and institutions which are reflected in the style of Islam as a religion and view of life in groups of Muslims whose manifestations are diverse. The national political situation has an influence on the education policies expected by the government. The educational curriculum in Islamic educational institutions is intensely influenced by the national education system, until finally Islamic boarding schools are integrated with the national education system.

This phenomenon takes place both in modern boarding schools and traditional boarding schools. There are examples of problems that show the response of Islamic education, specifically Islamic boarding schools to state instruments, namely; accommodate the government education curriculum and then collaborate with the pesantren's internal curriculum unit as its identity, not using the government curriculum because there is an assumption that it is more appropriate to use its own curriculum, and provide a balanced portion between the pesantren's internal curriculum unit and the government curriculum so that both can be implemented properly.

Application of Religious Moderation in the Era of Disruption

Information technology has an important role in accelerating the folding of space and time. The many virtual worlds that are easily accessible have led people to paradoxical problems. On the one hand, people are highly motivated to express and renew Islamic characteristics, but on the other hand, various digital spaces are colored by religious narratives that are not objective, and even have a tendency to contain fanaticism values that instill hatred in other communities. This matter is classified into an Islamization cycle which is supported by the need for information on religious understanding. The more religious a person is, they will prefer to understand religious texts that tend to be more Islamic, pragmatic and practical.

The importance of communication and technology skills in various fields, is a distinct advantage if you have *skills* as capital for the future. Seeing the low level of technological competence makes interest in conducting research with the aim that *skills* are capital that must be held in life with the provision of various kinds of *soft skills* to support future life.

Internalization of modern values as an integral element in the education and teaching process in Islamic boarding schools. The integration of two education systems, both the modern education system and the pesantren. Idealism, spirit, and philosophy of life as well as the dormitory system are oriented to the world's treasures of pesantren, but the management is carried out effectively and efficiently, which is a characteristic of the modern education system. The implication of this integration is that all student activities both inside and outside the classroom are educational activities.

CONCLUSION

The basic concept of religious moderation needs to be given comprehensively to religious education institutions for all religions. The essence of the values of religious moderation is obtained from the understanding of each religion in various terms and forms, in accordance with the core and main teachings of each religion. As a Muslim, we must respect and respect the religion and beliefs of others by not interfering with other religions in worship. This is the essence of Islam as a mercy for all nature (*Rahmatan lil'alamiin*).

All of the religious practices carried out by the companions of the Prophet and the *tabi'in* have become a religious laboratory that must be implemented in every time and place. Change requires humans to have readiness and responsiveness in the face of changes that occur. Everyone needs to develop creativity to deal with changes in the era of disruption.

BIBLIOGRAPHY

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Jejak Publisher.
- Asrori, S. (2019). Mengikuti Panggilan Jihad; Argumentasi Radikalisme Dan Ekstremisme Di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(1).
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Jakarta: Prenada Media.
- Bruinessen, M. V. (2015). *Kitab kuning, pesantren dan tarekat*. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Hilmy, M. (2012). Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(2).
- Ika, F. (2020). *Dakwah Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA (Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Ceramah Pemuda Milenial Di Channel Youtube Audio Dakwah)* [PhD Thesis]. Universitas_Muhammadiyah_Mataram.
- Junaidi, M. (2021). *Konten Islam | Kenali Fakta Hadapi Realita | Portal Berita | Konten Islam | Berita Islam | Berita Indonesia*. <https://www.kontenislam.com/2021/12/beredar-surat-imbauan-pemasangan.html>
- Kamali, M. H., & Ramadan, T. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: University Press.
- Kiptiyah, S. M. (2020). *Warisan Islam Nusantara: Tafsir Al-Qur'an Carakan dan Narasi Reformisme*. Semarang: eISA Press.
- Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat. (2019). Islam Wasathiyah. *Majelis Ulama Indonesia*. <https://mui.or.id/bimbingan-syariah/paradigma-islam/28522/apa-yang-dimaksud-islam-wasathiyah-2/>
- Kusmira, D. (2018). Moderatism Of Pesantren Education In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pesantren*, 4(2).
- Lasmawan, I. W. (2019). Era Disrupsi Dan Implikasinya Bagi Reposisi Makna Dan Praktek Pendidikan (kaji Petik Dalam Perspektif Elektik Sosial Analisis). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1).
- McLuhan, M. (1962). *The Gutenberg galaxy: The making of typographic man*. Toronto: University Of Toronto Press.

- Moleong, L. J., & Edisi, P. (2004). *Metodologi penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Mustaqim, A. (2018). *Tafsir Jawa: Eksposisi Nalar Shufi-Isyâri Kiai Sholeh Darat, Kajian Atas Surat Al-Fatihah dalam Kitab Faidl Al-Rahmân*. Yogyakarta: Idea Press.
- Primayana, K. H., & Dewi, P. Y. A. (2021). Manajemen Pendidikan Dalam Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital. *Tampung Penyang*, 19(1).
- Qardhawi, Y. (2010). *Fiqih jihad: Sebuah karya monumental terlengkap tentang jihad menurut al-Quran dan Sunnah*. Bandung: PT Mizan Publika.
- Qardhawi, Y. (2020). *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan Dalam Beragama*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Rahman, F. (2002). *Islam & modernity: Transformation of an intellectual tradition*. London: The University of Chicago Press.
- Schwedler. (2011). *Can Islamists Become Moderates? Rethinking the Inclusion-Moderation Hypothesis*. *World Politics*, 63(2).
- Shihab, M. Q. (2007). *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Shihab, Q. (2014). *Membumikan Al-Qur`an*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Shihab, Q. (2019). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Islam*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sokowati, M. E. (2015). *Agama, Media, dan Pemasaran dalam Masyarakat Majemuk*. Yogyakarta: Litera]
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Virilio, P. (1989). *Looking Back on the End of the World | The MIT Press*. <https://mitpress.mit.edu/books/looking-back-end-world>
- Zarkasyi, A. F. (2013). Tajdid dan Modernisasi Pemikiran Islam. *TSAQAFAH*, 9(2).
- Zarkasyi, H. F. (2005). Worldview sebagai Asas Epistemologi Islam, dalam Islamia. *Majalah Pemikiran Dan Peradaban Islam*.
- Zarkasyi, H. F. (2009). Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis. *TSAQAFAH*, 5(1).
- Zuhdi, M. (2010). Challenging moderate Muslims: Indonesia's Muslim schools in the midst of religious conservatism. *Religions* 9(10)]
- Zulkifli, Z. (2013). The Ulama In Indonesia: Between Religious Authority and Symbolic Power. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 37(1).

Pengaruh Ibn ‘Atiyyah atas al-Qurthubi dalam Tafsir *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*

Subi Nur Isnaini - UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
subi.isnaini@uin-suka.ac.id

Fauzan Adim - IAIN Kudus
fauzanadim@iainkudus.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji keterpengaruhannya Imam al-Qurthubi (w. 671 H) dari Ibn Atiyyah (w. 451 H) dalam tafsir al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an. Tafsir al-Qurthubi ini merupakan salah satu tafsir yang sangat masyhur, diakui dan dirujuk dalam tradisi keilmuan Islam, baik di Barat maupun di Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dan kitab al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an serta al-Muharrar al-Wajiz sebagai sumber primer. Sedangkan sumber sekunder didapatkan dari artikel, buku, dan penelitian lainnya tentang tafsir al-Qurthubi dan Ibn Atiyyah. Artikel ini berangkat dari keniscayaan keterpengaruhannya dalam setiap pemikiran dan keilmuan. Setiap penafsir pasti berada dalam situasi tertentu yang dapat mempengaruhi pemahaman dan interpretasinya atas teks yang ditafsirkan, atau dalam hermeneutika Gadamer disebut dengan historically effected consciousness. Artikel ini menemukan bahwa keterpengaruhannya al-Qurthubi dari Ibn Atiyyah sangat besar, baik dari sisi metodologis maupun pemikiran. Pengaruh Ibn Atiyyah dalam tafsir al-Qurthubi terlihat dari banyaknya pendapat dan pemikiran Ibn Atiyyah yang dinukil al-Qurthubi dalam tafsirnya, baik dari aspek tafsir bi al-ma’tsur, aspek qira’at, gramatikal nahwu, fikih dan hukum Islam. Selain itu dalam beberapa hal, al-Qurthubi juga mendiskusikan, mengomentari, dan mengkritik pendapat Ibn Atiyyah dalam al-Muharrar al-Wajiz.

Kata Kunci: *al-Qurthubi, Ibn Atiyyah, Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*

Abstract

This article aims to examine the influence of Imam al-Qurtubi (d. 671 H) of Ibn Atiyyah (d. 451 H) in the al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Tafsir al-Qurtubi is one of the most well-known interpretations, recognized and referred to in the Islamic scientific tradition, both in the West and in the East. This research is a qualitative research using analytical descriptive method. This research is library research and the book of al-Jami' li Ahkam al-Qur'an and al-Muharrar al -Wajiz as primary sources. While secondary sources are obtained from articles, books, and other research on the interpretation of al-Qurtubi and Ibn Atiyyah. This article departs from the necessity of being influenced in every thought and science. Every interpreter must be in certain situations that can affect his understanding and interpretation of the interpreted text, or in Gadamer's hermeneutics it is called historically effected consciousness. This article finds that the influence of al-Qurtubi from Ibn Atiyyah is very large, both in terms of methodological and thought. The influence of Ibn Atiyyah in the interpretation of al-Qurtubi can be seen from the many opinions and thoughts of Ibn Atiyyah that al-Qurtubi adopted in his interpretation, both from the aspect of bi al-ma'tsur interpretation, qira'at aspects, grammatical nahwu, balaghah, fiqh and Islamic law. In addition, in several respects, al-Qurtubi also discussed, commented on, and criticized Ibn Atiyyah's opinion in al-Muharrar al-Wajiz.

Keywords: *al-Qurthubi, Ibn Atiyyah, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*

PENDAHULUAN

Dalam artikelnya yang berjudul “Preliminary Remarks on the Historiography of Tafsir in Arabic: a History of the Book Approach”, Saleh membagi karya tafsir dalam dua genre, yakni ensiklopedis dan *madrasah*. Di antara tafsir yang masuk dalam genre ensiklopedis, yaitu tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Imam al-Qurthubi karena banyaknya jumlah referensi dan merangkum banyak karya-karya sebelumnya di bidang tafsir (Saleh, 2010). Tidak hanya sekedar menyampaikan pendapat *mufassir* sebelumnya, al-Qurthubi juga tak jarang mendiskusikan pendapat tersebut, mengomentari ataupun mengkritiknya. Ketika menulis biografi al-Qurthubi dalam *Thabaqat al-Malikiyyah*, Makhluף mengakui keilmuan dan otoritas tafsir karya al-Qurthubi ini. Ia menyatakan bahwa tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi yang terdiri dari 12 jilid ini merupakan salah satu karya tafsir yang agung dan berharga serta banyak menjelaskan aspek hukum, *istinbath* dalil, *qira'at*, *i'rab*, dan *nasihkh mansukh* (Makhluף, 2003).

Kekayaan ilmiah tafsir al-Qurthubi banyak menyedot perhatian para ulama dan mempengaruhi para *mufassir* setelahnya, baik *mufassir* di Kawasan Barat Islam (Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania dan Andalusia atau Spanyol saat ini) maupun Timur Islam. Syeikh Sirajuddin ibn al-Mulaqqin al-Andalusi (w. 804 H) menulis sebuah karya yang meringkas tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi (Khalifah, 1941). Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) menukil pendapat al-Qurthubi terkait dengan *istiwa'* dalam karyanya *al-Shawa'iq al-Mursalah 'ala al-Jahmiyyah wa al-Mu'aththalah* (Al-Jauziyyah, 1310 H; Bal'am, 1998). Ibn Katsir (w. 774 H) dalam karyanya *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* banyak merujuk pada tafsir al-Qurthubi dan menukil pernyataan-pernyataannya (Katsir, 1999). Begitu juga Imam al-Syaukani (w. 1250 H) dalam *Fath al-Qadir al-Jami' bain Fannay al-Riwayah wa al-Dirayah min 'ilm al-Tafsir* juga banyak merujuk *al-Jami' li Ahkam al-Qur'annya* al-Qurthubi (Al-Syaukani, 1414). Mohamed Said Ararou menjelaskan keterpengaruhannya ketiga *mufassir* ini dengan Imam al-Qurthubi dalam artikelnya, *Al-Harakah al-Tafsiriyyah fi al-Andalus bain al-Ta'tsir wa al-Ta'atstsur* dan memaparkan contoh-contohnya (Ararou, 2011). Begitu juga dengan *mufassir-mufassir* lainnya, seperti Muhammad al-Syirbini al-Khathib (w. 977 H) dalam *al-Siraj al-Munir fi al-I'nanah 'ala Ma'rifah Ba'dh Ma'ani Kalam Rabbina al-Hakim al-Khabir* (Al-Syirbini, 1285), Sulaiman bin Umar al-'Ajili (w. 1204 H) dalam *al-Futuhah al-Ilahiyyah bi Taudhih Tafsir al-Jalalain li al-Daqaiq al-Khafiyyah* (Al-Jamal, 2018), Abu al-Thayyib al-Qannuji al-Hindi (w. 1307 H) dalam *Fath al-Bayan fi Maqashid al-Qur'an* (Al-Qannuji, n.d), dan lainnya.

KAJIAN LITERATUR

Keterpengaruhannya dalam setiap pemikiran dan tradisi keilmuan menjadi sebuah keniscayaan. Sahiron menjelaskan bahwa setiap penafsir pasti berada dalam situasi tertentu yang dapat mempengaruhi pemahaman dan interpretasinya atas teks yang ditafsirkan (Syamsuddin, 2017), atau dalam hermeneutika Gadamer disebut dengan *historically effected consciousness* (Gadamer, 2004). Dalam konteks al-Qurthubi, selain memberikan pengaruh yang besar atas pemikiran dan tradisi keilmuan selanjutnya, di sisi lain al-Qurthubi juga terpengaruh dengan pemikiran dan keilmuan tokoh-tokoh tafsir sebelumnya, seperti al-Thabari (w. 310 H) dalam *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, al-Mawardi (w. 450 H) dalam *al-Nukat wa al-'Uyun*, Abu Ja'far al-Nahhas (w. 338 H) dalam *l'rab al-Quran* dan *Ma'ani al-Qur'an*, al-Zamakhsyari (w. 538 H) dalam *al-Kasysyaf*, dan Ibn Atiyyah (w. 541 H) dalam *al-Muharral al-Wajiz*. Bahkan, tafsir Ibn Atiyyah merupakan kitab tafsir yang menjadi rujukan utama dalam tafsir al-Qurthubi.

Kajian tentang al-Qurthubi telah banyak dilakukan oleh para sarjana, baik dari aspek metode penafsiran, linguistik, hukum Islam, qira'at, ushul fikih, ataupun lainnya. Dalam artikelnya, Ararou mengulas pengaruh al-Qurthubi atas *mufassir* di Kawasan Timur Islam, seperti Ibn Qayyim, Ibn Katsir, dan al-Syaukani. Selain itu, ia juga menyinggung keterpengaruhannya al-Qurthubi atas *mufassir* sebelumnya, seperti al-Thabari, al-Mawardi, dan al-Kasysyaf. Namun, ia tidak secara spesifik menjelaskan tentang keterpengaruhannya Ibn Atiyyah atas al-Qurthubi dalam tafsirnya. Padahal, keterpengaruhannya tersebut cukup besar, baik secara metodologi maupun substansi pemikiran (Fayd, 1973). Karena itu, dengan menggunakan analisis teori kesadaran keterpengaruhannya sejarah, penulis ingin mengkaji seberapa besar keterpengaruhannya al-Qurthubi dari Ibn Atiyyah dalam tafsirnya dengan mengulas aspek-aspek keterpengaruhannya tersebut dan memberikan contohnya.

PEMBAHASAN

Biografi al-Qurthubi dan Tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*

Al-Qurthubi memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Faraj al-Anshari al-Khazraji al-Qurthubi (Al-'Imad, 1351). Imam al-Qurthubi lahir di Cordoba, salah satu kota besar di Andalusia dan wafat di Mesir tahun 671 H (Al-Dzahabi, 1987). Para sejarawan yang membahas biografinya tidak menuliskan kapan al-Qurthubi lahir dan melakukan perjalanan ke Kawasan Timur Islam hingga menetap dan wafat di Mesir. Namun, mereka memperkirakan bahwa al-Qurthubi lahir pada awal abad ke-7 Hijriyah atau akhir abad ke-6 Hijriyah.

Tidak banyak keterangan dalam sumber sejarah tentang keluarga al-Qurthubi, kehidupan pribadi al-Qurthubi pada umumnya, terutama pada di masa kecil dan mudanya. Tidak ditemukan penjelasan terkait bagaimana pertumbuhannya dalam keluarganya, serta kehidupannya bersama istri, dan anaknya. Al-Muqri dalam *al-Nafkh al-Thayyib* menuturkan bahwa al-Qurthubi menikah dengan Wanita Muslimah asal Andalus yang juga pindah ke Mesir dan menetap tinggal di Asyuth, Mesir (Al-Muqri, 1939). Al-Suyuthi dalam *Thabaqat al-Mufassirin* menambahkan bahwa al-Qurthubi memiliki putra yang bernama Syihabuddin Ahmad yang disinyalir mendapatkan ijazah atas periwiyatan kitab tafsir al-Qurthubi (Al-Suyuthi, 1396).

Sosok Imam al-Qurthubi sendiri dikenal sebagai seorang yang 'alim, *wira'i* dan *zuhud*. Al-Qurthubi menghabiskan waktunya untuk ibadah, membaca, dan menulis. Keilmuannya ia peroleh dari belajar kepada para *masyayikh* di Andalus, Maghrib dan Mesir. Para guru ini yang tentunya mempengaruhi pada pembentukan karakter dan keilmuan al-Qurthubi. Di antara guru-guru al-Qurthubi: Abu al-'Abbas Ahmad bin Umar al-Qurthubi (w. 656 H) seorang pakar hadis dan fikih di Cordoba (Muhammad, n.d; Katsir A. a.-F., n.d); Rabi' bin Abdurrahman al-Asy'ari (w. 633 H) seorang Qadhi Cordoba, pakar bahasa, hadis dan sastra (Al-Qadha'i, 1995; Al-Dzahabi, 1987); Abu Ja'far Ahmad al-Qaisi al-Qurthubi (w. 643 H), pakar qira'at kota Sevilla (Al-Dzahabi U. , 1404; Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, 1964), dan Abdul Mu'thi Abu Muhammad al-Lakhamy, seorang ulama di kota Alexandria (Al-Dzahabi, 1987); Abdul Wahhab ibn Ruwaj (w. 648 H), ulama fikih dan hadis (Al-Qurthubi, Al-Tidzkar fi Afdhal al-Adzkar, 1355); Abu al-Hasan Ali bin Hibatullah (Al-Qurthubi, Al-Tidzkar fi Afdhal al-Adzkar, 1355); Abu Abdillah Muhammad al-Anshari al-Tilmisani; Abu Ali al-Hasan al-Naisabury (Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, 1964), dan lainnya.

Setelah belajar dan mengaji dengan ulama Alexandria dan Mesir, al-Qurthubi wafat pada tahun 671 H di kota al-Minya, Asyuth, Mesir. Al-Qurthubi menulis beberapa karya, di antaranya: *Al-Tidzkar fi Afdhal al-Adzkar*, *Al-Tadzkirah bi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah*, *Qam' al-Hirsh bi al-Zuhd wa al-Qana'ah*, *al-Muqtabas fi Syarh al-Muwaththa'*, *Al-Asna fi Syarh Asma' Allah al-Husna*, *Al-Luma' al-Lu'lu'iyah*, *Al-I'lam fi Ma'rifah Maulid al-Mushthafa*, *Manhaj al-'Ibad wa Mahajjah al-Salikin wa al-Zuhhad*, *Al-Taqrub li Kitab al-Tamhid*, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubin lima Tadhammanah min al-Sunnah wa Ayy al-Furqan* yang sedang kita kaji sekarang, dan karya-karya lainnya.

Pengaruh Ibn Atiyyah atas Imam al-Qurthubi

Pengaruh Metodologis

Al-Muharrar al-Wajiz karya Ibn Atiyyah merupakan salah satu kitab tafsir yang menjadi rujukan utama dalam tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Fayd, 1973). Karena keluasan isi dan banyaknya referensi yang digunakan Walid Saleh memasukkannya dalam kategori tafsir ensiklopedis (Saleh, 2010). Ibn Khaldun merekam tafsir Ibn Atiyyah sebagai tafsir yang merangkum tafsir-tafsir sebelumnya dan memilah riwayat-riwayat yang shahih dari yang tidak. Lebih jauh, Ibn Khaldun menambahkan bahwa metode ini diikuti oleh al-Qurthubi (Khaldun, 1379). Ibn Farikhun mengomentari tafsir al-Qurthubi sebagai tafsir yang paling bermanfaat dan berkontribusi besar dalam tradisi keilmuan Islam (Al-Maliki, n.d).

Dalam pendahuluan (*muqaddimah*) tafsirnya, al-Qurthubi menuliskan metode yang ia ikuti dalam tafsirnya secara garis besar (Al-Qurthubi, 1964):

“Dan syarat saya dalam kitab ini menisbahkan perkataan kepada siapa yang mengatakan, hadis-hadis pada perawinya, karena dikatakan bahwa di antara berkahnya ilmu adalah ketika pernyataan-pernyataan dinisbahkan kepada pemiliknya. Dan seringnya hadis-hadis dalam kitab fikih dan tafsir sifatnya *mubham*, tidak diketahui siapa perawinya kecuali dengan mengkajinya di kitab-kitab hadis.... Dan saya tidak menuliskan kisah-kisah yang dituliskan para *mufassir* dan para sejarawan kecuali yang memang diperlukan dan tidak bisa ditinggalkan dalam penjelasan makna ayat ataupun hukum tertentu. Saya menggunakannya untuk menjelaskan hukum dari masalah-masalah fikih, mengarahkan pembelajar pada hukum-hukum tersebut, sehingga setiap ayat yang mencakup satu, dua atau lebih hukum terdiri dari *masail* yang kami jelaskan di dalamnya *asbab al-nuzul*, penjelasan kata-kata *gharib*, dan hukum. Sedangkan ayat yang mengandung hukum, maka saya berikan penjelasan tafsir atau ta'wil ayat tersebut.”

Jika kita bandingkan apa yang disampaikan al-Qurthubi ini dengan metode penafsiran Ibn Atiyyah dalam *al-Muharrar al-Wajiz*, maka terlihat bahwa al-Qurthubi terpengaruh dengan metode Ibn Atiyyah dalam tafsirnya dengan menggunakan dan menggabungkan *tafsir bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'y*. Hal ini terlihat dari ungkapan al-Qurthubi menisbahkan perkataan kepada siapa yang mengatakan, hadis-hadis pada perawinya, menjelaskan *asbab al-nuzul*, dan menjelaskan tafsir dan takwil ayat. Akan tetapi, al-Qurthubi lebih unggul dari Ibn Atiyyah dalam hal takhrij hadis dalam tafsirnya. Al-Qurthubi

merespon apa yang belum dilakukan oleh Ibn Atiyyah, yaitu melengkapi hadis-hadis yang ia tuliskan dalam tafsirnya dengan mentakhrijnya (Al-Qurthubi, 1964; Bal'am, 1998).

Selain itu, jika kita menelaah dan mengkaji dalam tafsir Ibn Atiyyah, akan kita dapati bahwa al-Qurthubi juga terpengaruh dari Ibn Atiyyah dalam hal metodologi, seperti menyebutkan ragam qira'at dan menjelaskan qira'at yang mutawatir, *syadz*, dan yang shahih, serta memberikan porsi yang besar dalam mengkaji sisi bahasa dan gramatikal Arab (Fayd, 1973). Namun, metode al-Qurthubi berbeda dari Ibn Atiyyah terkait dengan sikap keduanya atas riwayat-riwayat Isra'iliyyat. Al-Qurthubi lebih banyak menuliskan riwayat-riwayat Isra'iliyyat dan terkadang tidak memberikan komentar ataupun kritikan atas riwayat tersebut. (Al-Qurthubi, 1964; Zalath, n.d). Dalam hal ini, al-Qurthubi tidak konsisten dalam menerapkan metode yang ia sampaikan di *muqaddimah* tafsirnya (Al-Qurthubi, 1964): "*wa adhribu 'an katsir min qashash al-mufassirin wa akhbar al-muarrikhin illa ma la budda minhu wa la ghaniyya 'anhu li al-tabyin*. Redaksi yang disampaikan al-Qurthubi mirip dengan pernyataan Ibn Atiyyah dalam *muqaddimah* tafsirnya (Al-Andalusy, 1422): "*la adzkur min al-qashash illa ma la tanfakku al-ayah illa bih*."

Ketiga aspek utama tersebut, menggunakan dan menggabungkan metode tafsir bil ma'tsur dan birra'yi, menyebutkan ragam qira'at disertai penjelasan yang mutawatir, serta besarnya perhatian atas aspek bahasa dan gramatikal Arab merupakan bentuk keterpengaruhannya al-Qurthubi atas Ibn Atiyyah dari sisi metodologi. Sedangkan, keterpengaruhannya al-Qurthubi dari sisi substansi penafsiran akan dipaparkan dalam pembahasan selanjutnya.

Pengaruh Substansi Penafsiran

Keterpengaruhannya al-Qurthubi dari Ibn Atiyyah dalam kitabnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* dapat dilihat melalui dua hal, yaitu: pernyataan-pernyataan Ibn Atiyyah yang dinukil oleh al-Qurthubi, dan komentar-komentar serta kritikan al-Qurthubi atas pendapat Ibn Atiyyah.

Pendapat-pendapat Ibn Atiyyah yang Dinukil al-Qurthubi

Al-Qurthubi banyak menukil pernyataan serta pendapat Ibn 'Atiyyah dalam beberapa aspek, yaitu: aspek tafsir bil ma'tsur, aspek qira'at, aspek gramatikal nahwu, aspek balaghah, serta aspek fikih dan hukum. Berikut penjelasan dan contoh nukilan-nukilan tersebut untuk menunjukkan keterpengaruhannya tersebut.

Aspek Tafsir bi al-Ma'tsur

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa al-Qurthubi terpengaruh dengan Ibn Atiyyah dari sisi metodologis, di antaranya dari aspek *tafsir bil ma'tsur*. Dalam hal ini, al-Qurthubi banyak menukil pernyataan dan pendapat Ibn Atiyyah atas riwayat-riwayat serta pendapat para ulama sebelumnya seperti dalam penafsiran Q.S. al-Baqarah: 35. Ketika menjelaskan makna ayat ini, al-Qurthubi menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan *al-syajarah* yang dimasud dalam ayat. Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair dan Ja'dah bin Hubairah mengatakan bahwa pohon yang dimaksud dalam ayat ini adalah anggur, karena itu *khamr* diharamkan. Pendapat lain dari Ibn Abbas, Abu Malik, dan Qatadah menyatakan bahwa pohon yang dimaksud adalah tangkai yang bijinya seperti ginjal sapi, rasanya lebih manis dari madu dan lebih lembut dari yogurt, sebagaimana dikatakan oleh Wahb bin Munabbih. Dan ketika Allah menerima taubatnya Nabi Adam, Allah menjadikannya makanan bagi anak keturunan Adam. Al-Juraij meriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa yang dimaksud adalah pohon tin, senada dengan yang diriwayatkan oleh Sa'id dari Qatadah. Al-Qurthubi menutup perbedaan pendapat di antara para ulama dengan menukil pendapat Ibn Atiyyah: "Dan pendapat-pendapat tentang *ta'yin al-syajarah* ini tidak ada sumbernya dari hadis Nabi, dan sikap yang benar adalah yakin bahwa Allah telah melarang Adam dari mendekat ke pohon, lalu Adam melanggar larangan tersebut dan makan buah dari pohon itu." (Al-Qurthubi, 1964)

Contoh lain adalah ketika al-Qurthubi menafsirkan Q.S. al-Baqarah: 187, dalam masalah yang kelima al-Qurthubi menyebutkan perbedaan pendapat para ulama tentang makna ayat "*wabtaghu ma kataba Allah lakum*", Ibn Abbas, Mujahid, Hakam bin Uyainah, Ikrimah, Hasan, Saddi, Rabi', dan al-Dhahak berkata bahwa makna *ma kataba Allah lakum* adalah anak, sesuai dengan keterkaitannya dengan *lafaz* sebelumnya "*fal ana basyiruhunn*". Selain itu, Ibn Abbas juga berpendapat bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah adalah al-Qur'an. Hal ini dikuatkan oleh *statement* al-Zujaj bahwa maknanya adalah raihlah al-Qur'an dengan apa yang diharamkan bagimu dalam al-Qur'an dan apa yang diperintahkan kepadamu. Diriwayatkan dari Ibn Abbas dan Mu'adz bin Jabal bahwa maknanya adalah raihlah lailatul qadar, sedangkan Qatadah berpendapat bahwa yang dimaksud adalah raihlah *rukhsah* dan *tawassu'ah*. Al-Qurthubi mengakhiri perbedaan pendapat ini dengan menukil pendapat Ibn Atiyyah yang mengatakan bahwa perkataan Qatadah merupakan pernyataan yang baik. (Al-Qurthubi, 1964)

Dalam dua kasus ini, terlihat bahwa al-Qurthubi menyebutkan ragam pendapat yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan makna ayat yang dimaksud, dan mengakhirinya dengan menukil pendapat Ibn Atiyyah yang mengkritik pendapat-pendapat sebelumnya pada contoh pertama, dan mengapresiasi pendapat Qatadah pada contoh kedua. Di sini, al-Qurthubi seolah menyetujui dan mengamini pendapat Ibn Atiyyah serta mengambil sikap yang serupa terkait dengan penafsiran ayat 35 dan 187 dari surat al-Baqarah.

Aspek Qira'at

Ibn Atiyyah dikenal sebagai *mufassir*, ahli bahasa serta pakar qira'at. Tafsirnya, *al-Muharrar al-Wajiz* menjadi rujukan terutama dalam hal qira'at bagi tafsir-tafsir setelahnya, seperti Abu Hayyan al-Andalusi, al-Zamakhshari, dan al-Qurthubi.¹ Jika kita menelaah tafsir al-Qurthubi, akan kita dapati banyaknya pendapat Ibn Atiyyah terkait dengan qira'at yang dinukil oleh al-Qurthubi. Di antaranya yaitu ketika menafsirkan Q.S. al-Baqarah 229

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ

“...Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)...”.

Terkait penjelasan ayat ini Imam al-Qurthubi mengatakan:

“Ayat ini merupakan ketentuan dan nasehat dari Allah SWT bagi pemohon untuk mengikuti keputusan dengan baik, dan melakukannya dengan baik juga. Namun apakah ketentuan ini dianjurkan (*sunnah*) atau sebagai ketentuan yang wajib. Jika kalimat *fatyibaun bil ma'ruf* dibaca dalam bentuk *i'rab raf'u* menjadi *fattibaun bil ma'ruf* maka bagi siapa saja yang memperoleh maaf dari saudaranya, wajib baginya mengikutinya dengan baik, dan membayar *diat* (tebusan) kepadanya dengan baik (pula), hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Nahhas, bahwa kalimat *faman 'ufiya* sebagai *jawab wa syarth*, maka kata *fattiba'* yang ber-*i'rab rafa'* sebagai *mubtada'* yang kemudian berimplikasi bahwa menjadi keharusan untuk melakukan dan mengikuti dengan baik. Namun demikian, untuk narasi teks selain al-Quran, bisa saja dibaca dengan *fattiba'an* dan *ada'an* dalam bentuk *masdar*. Ibn 'Atiyyah menyebutkan bahwa Ibrahim bin Abi Ablah membaca dengan *fattiba'an* (dibaca *nashab*). Sedangkan kalau dibaca *rafa'* memiliki makna wajib seperti pada firman Allah

pada Q.S. al-Baqarah: 229, *fa imsakun bi ma'ruf* (hendaknya dapat menahan untuk tetap menjadi istrinya dengan baik), Adapun dalam arti sunnah atau dianjurkan dalam bentuk nashab seperti pada firman Allah Q.S. Muhammad: 4, *fadhbar riqab* (maka pukullah batang leher mereka)." (Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, 1964)

Contoh lain pendapat Ibn 'Atiyah dari aspek qiraat yang dinukil oleh

Al-Qurthubi yaitu pada firman Allah Q.S. al-Baqarah: 51

وَأَذِّبْنَا مَوْسَىٰ وَزَبِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Kami menjanjikan kepada Musa empat puluh" malam. Kemudian kamu (Bani Israil) menjadikan (patung) anak sapi (sebagai . "sesembahan) setelah (kepergian)nya, dan kamu (menjadi) orang yang zalim

Dalam penafsirannya atas Q.S. al-Baqarah: 51, al-Qurthubi membahas *lafaz* «وعدنا» dan mengulas pendapat ulama terkait dengan aspek qira'ah lafaz tersebut:

"Abu Amr membaca kata«وعدنا» tanpa alif mad setelah huruf wawu, bacaan ini juga dipilih dan dikuatkan oleh Abu Ubaid dan menolak bacaan «واعدنا» dengan alif setelah huruf wawu. Abu Ubaid menyebutkan bahwa *al-muwa'adah* (melakukan perjanjian) sebagai bentuk Masdar dari kata *واعد* hanya dilakukan oleh manusia dan tidak dilakukan oleh Allah Swt, Allah sebagai Dzat yang Esa dan Tunggal dalam memberikan *al-wa'du* dan *al-wa'id* (memberi janji dan ancaman). Berdasarkan konteks ini, maka didapati dalam al-Qur'an, seperti dalam Q.S. Ibrahim: 22, Q.S. Al-Fath: 29 dan Q.S. Al-Anfal: 7, seperti disebutkan Al-Makki bahwa secara *dhahir* memang Allah Swt. melakukan perjanjian dengan Musa dan bukanlah janji dari Musa, karenanya secara *dhahir* nash Al-Qur'an tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan melakukan perjanjian itu dinisbahkan kepada Allah Swt. yang melakukan perjanjian dengan Musa, dan bukanlah janji dari Musa. Qira'ah *وعدنا* ini sesuai dengan qiraah al-Hasan, Abu Raja, Abu Jakfar, Syaibah dan Isa bin Amr serta Imam Qatadah dan Ibn Abi Ishaq. Hal ini dikuatkan juga oleh komentar dari Abu Hatim bahwa bacaan atau qiraah yang umum di kalangan mereka adalah *وعدنا* tanpa alif setelah huruf wawu, sebab *al-muwa'adah* secara umum dipakai antara sesama makhluk dan kelompok yang berada dalam posisi setara, seperti seseorang yang melakukan perjanjian dengan sahabatnya. Al-Makki menyebutkan bahwa *al-Muwa'adah* aslinya berasal dari dua pihak, namun demikian sejumlah kata dalam bahasa Arab yang ber-wazan *al-mufa'alah*, seperti *al-Muwa'adah* dilakukan oleh satu pihak saja. Karenanya

lafadz *al-Muwa'adah* diartikan perjanjian dari Allah hanya khusus untuk Nabi Musa As. saja dan semakna dengan kata وعدنا karena itu, dua bacaan tersebut dalam satu arti yang sama. Al-Nuhhas menyebutkan bahwa bacaan atau qiraah «واعدنا» lebih baik dan lebih bagus sebagaimana pendapat atau qiraah dari Mujahid, al-A'raj, Ibn Katsir, Nafi dan Al-A'masy, Hamzah dan al-Kisa'i. hal ini dikarenakan sebagai bentuk pemenuhan janji oleh Nabi Musa As. dan tidak dalam arti *al-wa'du* dan *al-waid* (memberi janji dan ancaman). Abu Ishak al-Zujaj juga mendukung pendapat ini (qira'ah «واعدنا») karena lebih baik sebab ketaatan untuk menerima dan melaksanakan janji dalam koridor *al-muwaadah*, Allah memberikan janji dan Musa menerima dan mengikuti janji tersebut. Ibn 'Atiyyah berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Ubaidah di awal pembahasan ini dengan menguatkan qiraah «واعدنا» tidaklah benar dan kurang tepat sebab penerimaan Musa terhadap janji Allah dan konsistensi serta komitmennya dalam koridor *al-muwaadah* kepada Allah Swt. Abu Ishaq mengatakan bahwa «واعدنا» di sini baik dibaca dengan alif, karena ketaatan dalam menerima setara dengan *muwa'adah*, maka dari Allah ia berarti janji, dan dari Musa berarti menerima dan mengikuti yang setara dengan *muwa'adah* (perjanjian). Hal ini dikatakan oleh Ibn 'Atiyyah."

Dalam penjelasan Q.S. al-Baqarah 229, al-Qurthubi mengulas perbedaan qiraat *lafaz fattiba'* dan implikasi maknanya dengan menukil perkataan Ibn 'Atiyyah. Begitujuga pada penjelasan Q.S. al-Baqarah: 51, al-Qurthubi mengulas perbedaan pendapat antara ulama tentang qira'at *lafaz wa'adna*, dan mengutip diskusi dari setiap pendapat yang diambil Ibn 'Atiyyah dalam tafsirnya *al-Muharrar al-Wajiz*. Al-Qurthubi juga mengutip dan mengimani pendapat Ibn 'Atiyyah yang *mengcounter* perkataan Abu 'Ubaidah yang merajihkan qira'ah *wa'adna* (tanpa alif). (Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, 1964)

Aspek Gramatikal Bahasa

Di antara karakter para ahli tafsir di Kawasan *al-Gharb al-Islami* (Kawasan Barat Islam) selain perhatian terhadap qiraat, mereka juga memiliki perhatian yang kuat terhadap kajian gramatikal bahasa Arab. Demikian halnya juga yang dilakukan oleh Al-Qurthubi yang juga sering menyebutkan pendapat Ibn Atiyyah terkait gramatikal Bahasa Arab pada ayat. Beberapa di antaranya adalah, pada firman Allah Q.S. An-Nisa: 85.

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيمًا

"... dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Dalam menjelaskan makna ayat ini, al-Qurthubi membahas aspek gramatikal Bahasa Arab *lafaz muqita*:

bermakna *muqtadira* (Maha Kuat). Pemaknaan kata “مقيتا” *Lafaz* muqita dengan *muqtadira* oleh Al-Qurthubi menukil apa yang disebutkan oleh Ibn ‘Atiyyah berdasarkan syair Arab yang disampaikan oleh Al-Zubair bin ...
وَكُنْتُ عَلَى مَسَاءَتِهِ مَقِيْتَا
:Abdul Muthalib, salah satu paman Nabi Saw. yaitu

Dan orang yang memiliki sifat dendam aku menutup diri darinya, dan Aku *muqita* (kuat) terhadap segala hinaannya.

Maksud dari ayat tersebut di atas adalah bahwa Allah Swt. memberikan kepada setiap orang kekuatan. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw. قوله عليه السلام: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقويت»

Sabda Nabi Saw.: “Cukuplah dosa bagi seseorang yang menyia-nyiaikan siapa saja yang menjadi atau dalam kekuatannya”. Yaitu siapa saja yang berada dalam tanggung jawabnya yang menjadi kewajibannya, seperti keluarga dan lainnya, demikian disebutkan oleh Ibn ‘Atiyyah.” (Al-Qurthubi, Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, 1964)

Selain contoh di atas, Al-Qurthubi juga di antaranya menukil dari Ibn ‘Atiyyah dari sisi kebahasaan saat membahas Q.S. al-Baqarah: 217 terkait :melakukan peperangan di bulan-bulan haram atau suci. Firman Allah

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah...” (Q.S. al-Baqarah: 217)

Al-Qurthubi menjelaskan:

“Kata “وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ” sebagai muftada’, dan kata “وَكُفْرٌ بِهِ” *athaf* kepada kata “صَدٌّ”. Sedangkan kata “وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ” *athaf* kepada kata “سَبِيلِ اللَّهِ”, “أكبر منه” *athaf* kepada kata “صَدٌّ”, sedang *khavar*-nya adalah “عند الله” maksudnya adalah dosa yang lebih besar dari melakukan peperangan di bulan-bulan haram, demikian yang disebutkan oleh Al-Mubarrad dan lainnya. Pendapat ini adalah pendapat yang benar, karena panjangnya masa dalam melarang orang melakukan thawaf di Kabah. «وَكُفْرٌ بِهِ» maksudnya adalah

kufur kepada Allah, ada yang berpendapat ingkar terhadap pelaksanaan haji dan masjidil haram. “وإخراج أهله منه أكبر” yaitu lebih besar dosan dan akibatnya dari sisi Allah dibandingkan dengan melakukan peperangan di bulan-bulan haram. Al-Farra’ menyebutkan bahwa kata « صد » athaf kepada kata « كبير » sedangkan kata « المسجد » athaf kepada huruf « ه » pada « به », dengan demikian maka perkataan ini menjadi sesuai, bersambung dan tidak terputus. Ibn ‘Atiyyah memberi komentar bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Farra’ ini tidaklah tepat, karena meng-athafkan kata « وكفر به » yaitu kufur kepada Allah kepada kata « كبير », dengan arti seperti ini maka mengusir para pengunjung masjid al-haram lebih besar dosanya bila dibandingkan dengan kufur kepada Allah dan ini tidaklah benar. Makna yang sebenarnya seperti pendapat jumhur ulama adalah bahwa kalian kaum kafir Quraisy telah membesar-besarkan kesalahan atas kami terkait dengan peperangan di bulan-bulan haram, padahal sesungguhnya apa yang kalian kerjakan berupa mencegah dan melarang orang menuju jalan Allah dan masuk Islam, atas kekafiran kalian dan pengusiran yang kalian lakukan bagi pengunjung masjid al-haram sebagaimana yang kalian lakukan kepada Rasulullah dan para sahabatnya itu lebih besar dosa dan kesalahannya di hadapan Allah.” (Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, 1964)

Dari dua contoh aspek gramatika bahasa yang dinukil Al-Qurthubi dari tafsir *al-Muharrar al-Wajiz Ibn ‘Atiyyah*, terlihat jelas kecenderungan Al-Qurthubi lebih menguatkan pendapat Ibn ‘Atiyyah meskipun tidak secara langsung tertulis dalam tafsirnya Al-Qurthubi. Hal itu bisa dibaca saat al-Qurthubi menampilkan pendapat dan komentar Ibnu ‘Atiyyah di akhir setiap diskusi permasalahan kebahasaan yang dimunculkan.

Aspek Fikih dan Hukum Islam

Jika sebelumnya telah disebutkan aspek qiraat dan gramatikal kebahasaan yang dinukil Al-Qurthubi dari tafsir *Al-Muharrar Al-Wajiz* karya Ibn ‘Atiyyah, selanjutnya akan dijabarkan bagaimana seorang Al-Qurthubi menyebut dan mengungkap pendapat Ibn ‘Atiyyah dalam kaitannya dengan fikih dan hukum Islam. Kita ketahui, kedua mufassir Al-Qurthubi dan Ibn ‘Atiyyah secara pemahaman fikih bermadzhab Maliki, sebagaimana kebanyakan para mufassir dari negara-negara yang berada di Kawasan Barat Islam. Selain itu, Al-Qurthubi melalui kitab tafsirnya *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* memang menggunakan corak, *lawn* atau pendekatan *fiqhi* dalam menafsirkan Al-Qur’an meskipun tidak fanatik dengan madzhab yang dianutnya yaitu Madzhab Maliki.

Beberapa contoh dukungan Al-Qurthubi kepada Ibn Atiyyah dalam aspek fikih dan hukum Islam, antara lain saat menjelaskan tentang tema melamar perempuan pada Q.S. Al-Baqarah: 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu”
“.dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati

Disebutkan oleh Al-Qurthubi dalam pembahasan kedua terkait ayat 235 Al-Baqarah menukil apa yang disampaikan oleh Ibn ‘Atiyyah bahwa para ulama sepakat bahwa tidak dibolehkan bagi seorang laki-laki menyampaikan perkataan yang berisi keinginan untuk menikahi seorang perempuan atau perkataan yang mengarah kepada keinginan untuk menikahi perempuan, sedangkan si perempuan dalam masa iddahnya. Demikian juga tidak dibolehkan menyebutkan kata-kata *jima’* (persetubuhan) atau yang mengarah dan semisal dengan kata tersebut, namun dibolehkan selain kata-kata tersebut. Perkataan sindirian pernah disampaikan oleh Rasulullah dan hampir mendekati pernyataan secara langsung ketika menyampaikannya kepada Fathimah binti Qais, “Hendaklah kamu bersama Ummu Syuraik dan janganlah engkau mendahulukan aku terhadap dirimu”. Tidak boleh melamar secara *ta’ridh* (sindiran bukan perkataan secara jelas) perempuan yang dithalaq raj’i secara *ijma’* karena posisi si perempuan seperti seorang istri. Sedangkan bagi perempuan yang ditalak bain, maka menurut pendapat yang benar adalah dibolehkan dengan perkataan sindiran untuk melamarnya. (Al-Qurthubi, Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, 1964

Setelah mengutip perkataan Ibn ‘Atiyyah, al-Qurthubi menjelaskan *lafaz ta’ridh* melamar yang secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: seorang pria menyampaikan kepada wali dari si perempuan, seperti perkataan “jangan engkau dahulukan aku terhadapnya. Kedua, seorang laki-laki yang langsung mengatakan maksud mengatakan maksud hatinya tanpa melalui perantara, seperti mengatakan, “saya ingin menikah, atau engkau sungguhlah cantik, atau engkau perempuan yang sholihah, atau mengatakan sungguh Allah akan mengirimkan kepadamu kebaikan, saya menginginkanmu, jika Allah menghendaki sesuatu, maka akan terjadi dan kalimat-kalimat lain yang semakna.

Seorang laki-laki juga dibolehkan menyebutkan kebaikan dan kelebihan yang ada pada dirinya sendiri sebagai sindirian untuk menyampaikan keinginannya menikahi seorang perempuan, seperti yang dilakukan oleh

Muhammad bin Ali bin Husain, Sakinah binti Handzalah berkata, Muhammad bin Ali bin Husain minta izin kepadaku yang saat itu aku belum selesai dari masa iddahku setelah kematian suamiku, ia berkata, “Engkau tahu tentang hubungan nasab aku dengan Nabi Muhammad Saw. dan Ali bin Abi Thalib juga posisiku di kalangan bangsa Arab. Sakinah binti Handzalah menjawab, Allah mengampunimu wahai Muhammad bin Ali bin Husain, sungguh engkau adalah seorang laki-laki yang telah mendapatkan persetujuan lamaran di masa iddahku. Muhammad bin Ali bin Husain menjawab, saya hanya menyampaikan hubungan kekerabatan saya dengan Rasulullah Saw. dan Ali bin Abi Thalib.” Al-Qurthubi berpendapat bahwa perkataan seperti itu termasuk ungkapan melamar dengan dalil hadis Nabi bahwa Rasulullah Saw. pernah mendatangi Ummu Salamah yang telah ditinggal meninggal suaminya dan berkata, “Sungguh engkau tahu bahwa aku Rasul Allah dan yang paling baik di antara mereka juga posisiku di kalangan kaumku”.

Lebih lanjut, al-Qurthubi menyatakan bahwa memberi hadiah kepada perempuan yang sedang menjalankan masa iddahnya dibolehkan dan itu termasuk dalam sindiran untuk melamar. Ia menyandarkan pendapat ini kepada sejumlah ulama seperti Sahnun dan lainnya. Di akhir penjelasan, al-Qurthubi mengutip pendapat Ibnu ‘Atiyyah terkait dengan perkataan Nabi Muhammad Saw. kepada Fathimah binti Qais, bahwa yang dimaksud adalah bahwa Nabi Saw. menyerahkan keputusan kepada Fathimah binti Qais dengan siapa ia akan menikah, bukan dalam maksud Nabi menginginkan Fathimah binti Qais untuk diri Nabi Saw. (Al-Qurthubi, Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, 1964)

Ketika mengutip perkataan dan pendapat Ibn ‘Atiyyah, al-Qurthubi seringkali menisbarkannya kepada Ibn ‘Atiyyah. Namun, pada beberapa kesempatan, Al-Qurthubi menukil pendapat Ibn ‘Atiyyah namun tidak menyebutkan dan tidak menisbarkannya kepada Ibn ‘Atiyyah, seperti saat menafsirkan firman Allah, Q.S. Al-Baqarah: 27.

الَّذِينَ يَتَّفِقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

“(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.”

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang maksud kata *al-‘ahd* (perjanjian), ada yang berpendapat perjanjian tersebut

saat Allah mengeluarkan mereka dari rahim ibu-ibu mereka, ada juga yang berpendapat bahwa *al-'ahd* pada ayat tersebut bermakna pesan Allah kepada para makhluknya, dengan perintah menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka, dan menjauhi larangan-Nya seperti apa yang dituturkan oleh para nabi melalui kitab-kitab-Nya. Ada juga yang berpendapat bahwa *al-'ahd* dalam ayat tersebut menunjukkan ke-Esa-an Allah Swt. dalam penciptaan langit, bumi dan seluruh alam raya ini. Pendapat lain tentang *al-'ahd* adalah perjanjian Allah terhadap mereka yang diberikan kitab (sebelum diturunkannya Al-Quran) untuk menjelaskan tentang kenabian Muhammad Saw. dan tidak menyembunyikannya, maka dengan makna ini, ayat dimaksud tertuju kepada kaum ahli kitab. Abu Ishaq Al-Zujaj menyebutkan bahwa 'ahdullah (perjanjian Allah) apa yang diambil dari para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka untuk tidak mengingkari Nabi Muhammad Saw. hal itu berdasarkan firman Allah, Q.S. Ali Imran: 81.

Catatan di atas yang disebutkan oleh Al-Qurthubi dalam tafsirnya, sama seperti penjelasan Ibn 'Atiyyah saat menafsirkan ayat yang sama dalam tafsirnya, *al-Muharrar al-Wajiz* (Al-Andalusy, 1422), namun Al-Qurthubi tidak menyebutkan bahwa penafsirannya tersebut berasal dari kitab al-Muharrar al-Wajiz-nya Ibn 'Atiyyah. Hal serupa juga terjadi saat Al-Qurthubi menjelaskan versi bacaan atau qiraat ayat tentang khamr pada Q.S. Al-Baqarah: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ تَنفَعِيهِمَا

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya....”

Al-Qurthubi menjelaskan pada pembahasan kedelapan, bahwa Hamzah dan Al-Kisai membaca «كثير» (banyak) dengan huruf “tsa” menggantikan huruf “ba”. Dalilnya adalah sabda nabi yang menjelaskan bahwa tentang laknat Nabi Saw. terhadap khamr dan 10 pihak yang memiliki sangkut paut dengan khamr. Namun demikian jumhur ulama membacanya dengan «كبير» (besar) dengan huruf “ba” dengan alasan bahwa dosa judi dan minum khamr termasuk bagian dari *al-Kabair* (dosa-dosa besar), karenanya disifati dengan kata «كبير» (besar) lebih tepat dan lebih pantas, yang kemudian lebih pas dengan kata selanjutnya yaitu «أكبر» sebagai alasan yang menguatkan bahwa «كبير» lebih tepat dan para ulama tidak sepakat dengan «أكثر» seperti yang ditulis dalam mushaf Ibnu Masud yaitu «قل فيهما إثم كثير وإثمهما أكثر». (Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, 1964)

Apa yang ditulis Al-Qurthubi terkait dengan qiraat dalam contoh di atas, sama dengan apa yang disebutkan oleh Ibn 'Atiyyah dalam kitab tafsirnya (Al-Andalusy, 1422), namun sekali lagi Al-Qurthubi tidak menyebutkan bahwa apa yang dijelaskannya tersebut berasal dari kitab *al-Muharrar al-Wajiz*-nya Ibn 'Atiyyah.

Pada saat tertentu, Al-Qurthubi juga menukil pendapat Ibn Atiyyah namun ia mengklaim bahwa itu bagian dari pendapatnya dan tidak menyebutkan sebagai pendapat Ibn 'Atiyyah. Seperti saat menjelaskan tentang makna ayat Q.S. Al-Baqarah: 174

إِنَّ الدِّينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

“Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Kitab, dan menjualnya dengan harga murah,...”

Al-Qurthubi menyebutkan bahwa «ويشترون به» (dan mereka menjualnya) dengan cara sembunyi-sembunyi «ثمنًا قليلًا» (dengan harga murah) dengan menerima suap. Disebut dengan harga murah karena akan segera terputus pemanfaatannya dan akibat buruk yang akan menyimpannya. Disebutkan juga bahwa suap yang mereka terima sangatlah sedikit, dan meskipun ayat ini ditujukan untuk para pendeta nashrani, namun juga termasuk di dalamnya siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang sengaja menyembunyikan kebenaran untuk tujuan dunia yang akan mereka dapatkan. Jika kita cermati, maka kita dapati perkataan al-Qurthubi tersebut sama dengan pernyataan Ibn 'Atiyyah ketika menjelaskan ayat yang sama. (Al-Andalusy, 1422)

Selain menukil pendapat-pendapat Ibn 'Atiyyah, baik menyandarkannya secara langsung kepada Ibn 'Atiyyah ataupun tidak, atau bahkan mengklaimnya sebagai pendapatnya sendiri dengan ungkapan *qultu*, al-Qurthubi juga mendiskusikan pendapat Ibn 'Atiyyah, mengomentari, menambahkan penjelasan, dan bahkan mengkritiknya. Berikut beberapa contoh komentar dan kritik al-Qurthubi atas pemikiran Ibn 'Atiyyah yang ia paparkan dalam tafsirnya.

Komentar dan Kritik al-Qurthubi atas Pemikiran Ibn Atiyyah

Jika memperhatikan penafsiran Al-Qurthubi terhadap sejumlah ayat Al-Qur'an memang tidak jarang ditemui keterpengaruhannya secara objektif beliau terhadap pendapat-pendapat Ibn 'Atiyyah. Namun demikian bukan berarti Al-Qurthubi menerima mentah-mentah pendapat Ibn 'Atiyyah dan tidak

memberikan kritik secara ilmiah terhadap pendapat Ibn 'Atiyyah. Contoh kementar dan kritik Al-Qurthubi terkait dengan kriteria menafsirkan ayat berdasarkan hadis Nabi Saw. bahwa siapa saja yang mengatakan tentang makna suatu ayat dalam al-Qur`an dengan akalinya kemudian apa yang dikatakan itu benar, maka ia telah salah. Terkait dengan hadis ini, Ibn 'Atiyyah menyebutkan jika ada seseorang yang bertanya tentang maksud dari ayat al-Qur`an, kemudian dia memutuskan untuk mencari maksudnya sendiri tanpa bertanya kepada para ulama dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan seperti ilmu nahwu dan ushul fiqh. Dan tidak termasuk dalam kategori hadis ini bagi para ahli bahasa saat menafsirkan al-Qur`an sesuai dengan kepakarannya di bidang bahasa, juga para ahli nahwu sesuai kepakarannya, para ahli fikih terkait dengan makna ayat, dan setiap orang menjelaskan al-Qur`an berdasarkan ijtihad mereka sesuai kaidah-kaidah keilmuan dan kepakaran yang mereka miliki, maka kelompok ini tidak dimasukkan seperti yang disebutkan oleh Nabi, yaitu menafsirkan al-Qur`an dengan akalinya. (Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, 1964)

Menjawab komentar Ibn'Atiyyah tersebut, Al-Qurthubi membenarkan apa yang disampaikan Ibn 'Atiyyah dan itu disampaikan oleh sebagian besar para ulama muslim, hanya saja siapa di antara mereka yang menjelaskan tentang al-Qur`an dengan sesuatu yang terlintas dalam ilusinya, yang terbetik dalam pikirannya tanpa mengungkap dalil sesuai dengan kaidah-kaidah yang semestinya maka disebut sebagai orang yang salah dalam memahami dan menjelaskan tentang al-Qur`an, karenanya mereka yang memahami dan menjelaskan al-Qur`an sesuai dengan kaidah-kaidah dasar penafsiran al-Qur`an yang diakui dan disepakati oleh para ulama, maka itu yang dibenarkan. (Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, 1964)

Demikian juga saat menafsirkan Q.S. al-Baqarah: 177, Imam Al-Qurthubi menjelaskan perkataan Ibn 'Atiyyah dalam pembahasan ketujuh tentang ayat tersebut. Ibn 'Atiyyah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, "على حبه" sebagai penekanan yang sangat dalam perkataan. Lalu Al-Qurthubi menambahkan bahwa apa yang disebutkan Ibn 'Atiyyah sama halnya dengan yang disebutkan oleh firman Allah Q.S. Al-Insan: 8 yaitu, "ويطعمون" "ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك" inilah yang disebut dengan tatmim yang termasuk dalam bagian pembahasan ilmu balaghah. (Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, 1964)

Contoh di atas lebih kepada komentar tambahan dan penguatan yang disampaikan Al-Qurthubi terhadap penjelasan Ibn 'Atiyyah. Berikut akan disampaikan di antara kritik yang disampaikan Al-Qurthubi terhadap pendapat Ibn 'Atiyyah, seperti pada penafsiran Ibn 'Atiyyah pada Q.S. Al-Baqarah: 30.

قَالُوا آتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ

“... Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu...”

Al-Qurthubi berbeda pendapat terkait makna *al-taqdis* (نقدس) menukil pendapat Qatadah artinya adalah berdoa dan melakukan sholat. Namun pendapat ini dianggap lemah oleh Ibn 'Atiyyah. Al-Qurthubi menambahkan apa yang disampaikan Qatadah adalah benar karena *al-taqdis* dengan makna berdoa dan sholat meliputi mengagungkan, memuliakan dan mensucikan Allah Swt. (Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, 1964)

Hal yang sama dilakukan Al-Qurthubi terhadap pendapat Ibn 'Atiyyah saat menjelaskan makna kata *salwa* pada Q.S. Al-Baqarah: 57. Ibn 'Atiyyah menyebutkan bahwa ijma' ulama mengartikan *salwa* sebagai jenis burung. Namun Al-Qurthubi mengambil makna yang lain, dan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *salwa* adalah madu, sekaligus juga mengkritik Ibn 'Atiyyah yang menyebutkan bahwa pemaknaan *salwa* dengan sejenis burung sebagai ijma' para ulama padahal sesungguhnya tidak demikian. Untuk mendukung pendapatnya tersebut, Al-Qurthubi mendasarkannya dengan beberapa syair Arab yang menyebutkan bahwa makna *al-salwa* adalah madu, di antaranya berdasarkan penjelasan Al-Jauhari yang mengatakan bahwa *al-salwa* adalah madu merujuk pada bait syair dari Al-Hadzli, demikian juga disebutkan bahwa kata *al-salwa* berasal dari kata bahasa Arab Kinanah, salah satu kaum dari bangsa Quraisy Arab. Namun demikian, di balik kritik yang disampaikan oleh Al-Qurthubi terhadap Ibn 'Atiyyah, Al-Qurthubi tidak mengatakan bahwa apa yang menjadi pendapat dan tafsir dari Ibn 'Atiyyah sebagai sesuatu yang salah. (Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, 1964)

Dari penjelasan dan sejumlah contoh yang dipaparkan sebelumnya, terlihat begitu jelas keterpengaruhannya Al-Qurthubi dengan Ibn 'Atiyyah, baik yang secara langsung menyebutkan bahwa ia menukil dari Ibn 'Atiyyah maupun tidak menyebutkannya. Dalam proses penukilannya, ada kalanya Al-Qurthubi memberikan keterangan sebagai penguat dan penjelasan tambahan, maupun sebagai bentuk kritik atau membuka ruang diskusi.

SIMPULAN

Sebuah karya ataupun pemikiran tidak lahir dari ruang hampa. Namun, ia lahir dalam diskursus pemikiran di masanya yang juga dipengaruhi oleh kondisi dan situasi zamannya. Dalam tafsirnya, al-Qurthubi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama sebelumnya seperti al-Thabari, al-Mawardi, Abu Ja'far al-Nahhas, al-Zamakhshari, Ibn Atiyyah, dan lainnya. Ibn Atiyyah dengan *al-Muharrar al-Wajiz*nya banyak mempengaruhi al-Qurthubi, baik dalam aspek metodologis maupun substansi penafsiran. Pengaruh Ibn Atiyyah dalam tafsir al-Qurthubi tersebut terlihat dari banyaknya pendapat Ibn Atiyyah yang dinukil al-Qurthubi dalam tafsirnya, baik dari aspek tafsir bi al-ma'tsur, aspek qira'at, gramatikal nahwu, fikih dan hukum Islam. Selain itu, al-Qurthubi juga banyak mendiskusikan, mengomentari, dan terkadang mengkritik pendapat Ibn Atiyyah dalam *al-Muharrar al-Wajiz*. Keterpengaruhannya ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gadamer bahwa setiap penafsir pasti terpengaruh oleh situasi dan pemikiran pada masanya. Kesejarahan hidup, baik keilmuan, situasi sosial, budaya maupun politik yang dialami secara sadar mempengaruhi pemikiran dan karya seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Andalusy, I. A. (1422). *Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Dzahabi, M. b. (1987). *Tarikh al-Islam wa Wafayat al-Masyahir wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby.
- Al-Dzahabi, U. (1404). *Ma'rifah al-Qurra' al-Kibar 'ala al-Thabaqat wa al-A'shar*. Beirut: Dar al-Risalah.
- Al-'Imad, A. a.-H. (1351). *Syadzarat al-Dzahab fi Akhbar Man Dzahab*. Cairo: Maktabah al-Qudsy.
- Al-Jamal, S. b. (2018). *al-Futuh al-Ilahiyyah bi Taudhih Tafsir al-Jalalain li al-Daqaiq al-Khafiyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1310 H). *al-Shawa'iq alMursalah 'ala al-Jahmiyyah wa al-Mu'aththalah*,. Cairo: Mathba'ah al-Imam.
- Al-Maliki, I. F. (n.d). *Al-Dibaj al-Madzhah fi Ma'rifah A'yan Ulama al-Madzhah*. Cairo: Dar al-Turats li al-Thab' wa al-Nasyr.
- Al-Muqri, A. b. (1939). *Nafh al-Thayyib fi Ghushn al-Andalus al-Rathib*. Cairo: Maktabah al-Azhariyyah al-Mishriyyah.
- Al-Qadha'i, A. A. (1995). *Al-Takmilah li Kitab al-Shilah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qannuji, S. H.-T. (n.d). *Fath al-Bayan fi Maqashid al-Qur'an*. Cairo: Mathba'ah al-'Ashimah.
- Al-Qurthubi. (1355). *Al-Tidzkar fi Afdhal al-Adzkar*. Cairo: Maktabah Amin al-Khanji.
- Al-Qurthubi. (1964). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Cairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- Al-Suyuthi, J. (1396). *Thabaqat al-Mufassirin*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Syaukani, M. (1414). *Fath al-Qadir al-Jami' bain Fannay al- Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Syirbini, M. a.-K. (1285). *Al-Siraj al-Munir fi al-l'annah 'ala Ma'rifah Ba'dh Ma'ani Kalam Rabbina al-Hakim al-Khabir*. Mesir: Dar al-Thiba'ah al-'Amirah.

- Ararou, M. S. (2011). Al-Harakah al-Tafsiriyyah fi al-Andalus bain al-Ta'tsir wa al-Ta'atstsur: al-Imam al-Qurthubi Namudzajan. *Majallah al-Turats* , 39-53.
- Bal'am, M. a.-S. (1998). *Al-Qurthubi Hayatuh wa Atsaruh al-'Ilmiyyah wa Manhajuh fi al-Tafsir*. Libya: Dar al-Kutub al-Wathaniyyah.
- Fayd, A. W. (1973). *Manhaj Ibn Atiyyah fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*, . Cairo : al-Hai'ah al-'Ammah li Syu'un al-Mathabi' al-Amiriyyah.
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and Method, terj. Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall*. London: Shed & Ward.
- Katsir, A. a.-F. (n.d). *Al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beirut: Maktabah al-Ma'arif.
- Katsir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Riyadh: Dar al-Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzi'.
- Khaldun, I. (1379). *Al-Muqaddimah*. Cairo: Mathba'ah Lajnah al-Bayan al-'Araby.
- Khalifah, H. (1941). *Kasyf al-Dzunun* . Istanbul : Wikalah al-Ma'arif al-Jalilah.
- Makhluf, M. (2003). *Syjarah al-Nur al-Zakiyyah* . Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, .
- Muhammad, A. a.-Q.-W. (n.d). *Al-Jawahir al-Madhiyyah fi Thabaqat al-Hanafiyyah*. Karachi: Mir Muhammad Katb Khan.
- Saleh, W. A. (2010). "Preliminary Remarks on the Historiography of Tafsir in Arabic: a History of the Book Approach". *Journal of Qur'anic Studies*, 6-40.
- Syamsuddin, S. (2017). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawesea Press.
- Zalath, A.-Q. M. (n.d). *Al-Qurthubi wa Manhajuh fi al-Tafsir*. Beirut: Al-Markaz al-'Araby li al-Tsaqafah wa al-Ulum.

The Concept of Hadharah (Civilization) according to the thought of Shaikh Taqiyuddin An-Nabhani

**Suryo Ediyono, Alif Al Hilal Ahmad, Muhammad Farkhan Mujahidin, Abdul
Malik, dan Ahmad Jazuli**

Faculty of Cultural Science, Sebelas Maret University
Email: ediyonosuryo@staff.uns.ac.id

Abstrak

Peradaban (hadharah) merupakan kumpulan dari konsep kehidupan yang berupa aspek ciptaan manusia sendiri dengan pengetahuannya atau aspek spiritual transendental. Peradaban manusia bersumber pada konsep-konsep yang disepakati untuk dijadikan landasan. Hal ini dilatarbelakangi ketidakadilan sistem demokrasi, memunculkan solusi-solusi yang sudah lama timbul tenggelam digaungkan kembali yaitu wacana khilafah. Beberapa golongan tertentu mewacanakan pemikiran sistem negara khilafah sebagai peredam ketidakadilan dan menciptakan suatu tatanan politik baru yang bernafaskan Islam yaitu sistem khilafah Islamiah. Hadharah khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh umat muslim di dunia untuk menegakkan hukum syariat. Sistem yang telah dibatasi dalam Islam hanya khilafah, bukan monarki, federasi maupun republik. Landasan dan hukum-hukum yang diberlakukan oleh khilafah menunjukkan gambaran sebuah negara bukan hanya nilai-nilai dan norma-norma. Syariat Islam yang menjadi dasar hukum memiliki kekuatan politis untuk menjaga kedaulatan dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Tujuan penelitian mengetahui konsep hadharah (peradaban) Islam menurut pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani. Apakah konsep ini bisa dilaksanakan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menekankan proses pemahaman dan proses analisis dari berbagai sumber Pustaka pemikiran An-Nabhani. Hasilnya pemikirannya dalam menegakkan kembali hadharah khilafah Islamiyah Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani berisi: kepribadian dalam Islam, pandangan terhadap masyarakat, peradaban dan makna kebangkitan.

Kata Kunci: Hadharah , Islam, An-Nabhani, Khilafah

Abstract

Civilization (hadharah) is a collection of concepts of life in the form of aspects of human creation itself with knowledge or transcendental spiritual aspects. Human civilization is based on agreed concepts to be used as a basis. This is motivated by the injustice of the democratic system, giving rise to solutions that have long been reborn, namely the caliphate discourse. Certain groups discuss the idea of a caliphate state system as a reducer of injustice and create a new political order that breathes Islam, namely the Islamic caliphate system. Hadharah khilafah is the general leadership of all Muslims in the world to enforce sharia law. The system that has been limited in Islam is only the caliphate, not a monarchy, federation or republic. The foundations and laws enacted by the caliphate show a picture of a country not just values and norms. Islamic law which is the basis of law has the political power to maintain sovereignty and spread Islamic da'wah throughout the world. The purpose of this research is to know the concept of hadharah (civilization) of Islam according to the thought of Shaykh Taqiyuddin an-Nabhani. Can this concept be implemented in Indonesia based on Pancasila? This research is qualitative by emphasizing the process of understanding and analyzing processes from various sources in the An-Nabhani thought library. The result of his thoughts in re hadharah of the Islamic caliphate of Shaykh Taqiyuddin An-Nabhani contains: personality in Islam, views on society, civilization and the meaning of resurrection.

Keywords: *Hadharah; Islam; An-Nabhani; Khilafah.*

INTRODUCTION

An-Nabhani's educational history tells that he attracted the attention of his friends and lecturers regarding his accuracy in thinking. Ali (2018: 13) reveals the strong foundation in every debate and thought discourse organized by Cairo scientific institutions. Even though his education at Al Azhar still follows the old method, he still shows his sincerity and determination to learn. By choosing and following Arabic halaqah, interpretation, hadith, ushul fiqh and knowledge of kalam as well as various tools from the Shaykhs of al-Azhar. His involvement in politics after leaving the education department has shown many conditions that require him to contribute knowledge and shape his thoughts. Reality awareness takes part in the formation of the party, Rofiuddin (2015: 33) mentions that there are historical reasons. Hizb ut-Tahrir was founded in response to the decline of Muslims, since the 19th century when the role of the colonizers and the West was increasingly dominating to replace the existence of the caliphate which had collapsed. His view of reality that is associated with science, he pours out a lot in books that discuss various fields. He argues that problem solving does not only rely on this field, but is always related to other fields, so that various fields of life cannot be separated absolutely (An-Nabhani, 1953). An-Nabhani's thinking is complex in seeing the facts and proposing solutions that come from sources of Islamic law and ijihad. The following is a basic view of a thought that will construct an understanding of various aspects of life according to an-Nabhani. An-Nabhani argues that reason is a tool (material) for understanding facts and texts (transcendental kalam). Intellect is a thought process, not just a part of the human body. This thinking process must involve four elements to produce a thought. *First*, it begins with the fact or reality as a sensed object. *Second*, the five human senses as distributors of fact information to the brain. *Third*, the human brain as a processor is associated with the *fourth*, namely previous information or information related to facts (Dodiman, 2018: 30). In the rules of life in Islam that he wrote, an-Nabhani (2010: 6) emphasizes the last element, namely edicts related to facts. He views the rise of man as dependent on his thoughts on life, the universe and man and the relationship of the three to something that existed before the world and after it. Because with thought, humans form and strengthen the perception of everything. Perception occurs through the process of sensing the facts through the five senses to the brain accompanied by the information used to interpret these facts. This definition of reason is at the same time a refutation of the theories of thought expressed by socialists.

The concept of this thought process will place the understanding of Islam as a filler of previous information. This method is very important to form people who have *aworld view*. Islam. As stated by an-Nabhani, that the rise of man lies in his thinking, so that the paradigm of thinking that uses Western eyes must be changed based on Islam. To define this high thought, Muhammad Hawari (2003:27) in his book *syarah* points out two mandatory characteristics. *First*, it is profound (*'amiq*), namely thinking which includes the substance of the case, the basic structure of its formation and its source. *Second*, it is comprehensive (*syamil*) which includes all aspects of the case that is the object of discussion.

METHODS

Methods are ways, strategies for understanding reality, systematic steps to solve a series of causes and effects. This study uses a type of qualitative research that is oriented towards a literature review of an-Nabhani's thoughts on *Hadharah*. This qualitative research relates to the analysis of data from various sources related to an-Nabhani. In this study, literature study was used to obtain data. Qualitative research methods are ways of understanding based on text and social values. Analysis of Shaykh Taqiyuddin An-Nabhani's thoughts on the concept *hadharah* (civilization).

DISCUSSION

These two characteristics of thought will form a fundamental thought for realizing the resurrection. Because these thoughts will be the basis for the awakening of thinking to discuss all matters in depth and thoroughly, so that nothing is not discussed. Here we describe the main points of an-Nabhani's thoughts on *hadharah* (civilization), which contains: personality in Islam, views on society, civilization and the meaning of resurrection.

Personality in Islam

The understanding of personality expressed by an-Nabhani is contrary to psychology which usually discusses it. The uniqueness of this view of personality is the reason the author tries to express it. In general, the assessment of personality rests on four things, which include physical values, non-physical values, genetic values and external values such as education, economy, social and political conditions (Prasetyadi, 2016: 40). However,

according to him, with in-depth study and research, it is mentioned in one of his books *asy-syakhsiyyah al-Slamiyyah*, personality based on the above is not quite right. Personality is not influenced by physical, origin, habits or descent. The elements that make up the human personality only consist of mindsets and attitude patterns. *'Aqliyah* or mindset is a method used to think in issuing and deciding the law about something based on a belief that is believed. *Nafsiyah* or attitude pattern is a method used by a person to fulfill his instincts and physical needs based on a rule that he believes in.

Islam besides religion is also a type of personality, when a person in his mindset and attitude pattern uses Islamic rules, it is called an Islamic personality. However, these two components must go hand in hand, if the rules of Islam are only in the mindset, then it cannot be said to have an Islamic personality. According to an-Nabhani, every Muslim has the obligation to increase his personality capacity by honing *aqliyah* by increasing the understanding of sharia laws, so that he can determine the value of his actions. The stability of this mindset will affect the attitude patterns that determine personality. In this case, the ulema make a rule of action that goes hand in hand with the *syara'* that the law of origin of the deed is bound by the *syara'* law. Personality can be concluded based on an-Nabhani's view is behavior that arises from certain understandings that are installed in one's thinking. So personality is a behavior that can be formed and not innate from someone's birth.

View of Society

Society according to an-Nabhani is seen as not just a collection of individuals living together as the capitalist view. Society is a collection of individuals with thoughts, feelings and rules that bind them. So to measure or change society, it is necessary to pay attention to the elements of thought, feeling and the rules. He stated that society is an integral part, individuals cannot be separated from society. Society is seen according to experts as a collection of humans who live in one place and have conventions against something. The convention is what makes interactions among members orderly. When society is only seen in terms of a collection of individuals, it cannot be said to be a society. In the civilization of capitalism, individual freedom is exalted, because this ideology has an influence on interactions based on the perspective of seeing things. A society will have its own characteristics based on the ideology applied in its country. Islam has determined how to view a society. In it there must be certain pillars so that the predicate of Islamic society is formed.

It was from this view of society that an-Nabhani determined the da'wah strategy. Changing the condition of society cannot only improve individual aspects. Conventions in Islamic society are laws that come from the sources of Islamic teachings. The existence of a group of Muslim individuals without the conventions of Islamic law does not create an Islamic society. Besides conventions, Islamic thoughts and feelings must be formed before realizing an Islamic society. Meanwhile, to enforce the convention, it is necessary to appoint leaders as reflections of society and law enforcement. So the function of the leader is to implement and maintain these conventions.

Civilization

In one of the books he wrote, an-Nabhani (2002: 7) discusses the issue of civilization. He defined it as a collection of concepts about life. In terms of terms, civilization is referred to as *hadharah* to say a set of concepts and *madhaniyah* as a physical form of civilization. Linguistically, *hadharah* is a place to live in an area that has etiquette like a city. While *al-present* is a term for people who live in areas both in cities and villages (Faiz, 2002: 10). The meaning *madana* in a place, means that is where he lives. *Madana* also means arriving at the city (Medina). So the two words have almost the same meaning. In this case, *hadharah* is more often used to mean all things related to thought, so it is more appropriate to mean a collection of concepts about life. In al-Qamus al-Muhith the word *hadura* is similar to *nadusa* which means people who speak and are knowledgeable. It was said by someone who was *present* in the Arabic oral book, that he brought something good. Thus *hadharah* is closer and consistent to refer to a set of life concepts than the word *madhaniyah*. Meanwhile *madhaniyah* itself is more appropriate to interpret physical objects as the product of a *hadharah*.

Civilization (*hadharah*) is a collection of concepts of life in the form of aspects of human creation itself with knowledge or transcendental spiritual aspects. Human civilization is based on agreed concepts to be used as a basis. Examples of this human civilization as in the civilizations built by the West, the Indians, Persians etc. While spiritual civilization comes from revelation according to its adherents, Islam is classified as a civilization because it has a conceptual basis for a perspective on life. So to classify between spiritual and man-made civilizations, even though there are similarities, it is because the concept is only a branch of the foundation, it cannot be taken except with the foundation. Nor is it because of an agreement of thought, if civilization is taken, it will be automatic along with its foundation. So with the differences

in the basis of each civilization, if there is a similarity it does not need to be considered. Like Islamic civilization with the West which allows people to eat meat, wear silk and so on.

Civilization will give birth to the beliefs held by its adherents. Islam has various concepts of life such as economics, politics, education, health and culture. As stated by Prof. Azyumardi Azra, Islam has built a civilization when realizing this concept. So that Islam can be categorized as a religious civilization. Christianity, even though it is the reason for the rise of capitalism, is not classified as a civilization. Because there is no defined concept of life in Christianity. While the capitalist, although not a religion, but classified as civilization because it has a concept of life. So that capitalists and socialists are included in a civilization that is the result of human creation. Clashes between civilizations will occur (Faiz, 2012: 5) on the grounds of differences in the basis that will be mediated by dialogue between civilizations. Equalizing the two civilizations is one way to find a middle way to build peaceful interactions, including with Islamic civilization. Because, if an open challenge to Muslims is carried out, it will inspire the revival of Islam, because basically the basic beliefs of Islam are still owned by almost every Muslim.

Efforts to bridge between civilizations by means of dialogue or comparison are not the recommended path. Because the standard concept of Islam has given a clear position for adherents and opponents. This difference is seen as a clear boundary that should not be blurred. In building interactions between civilizations, according to an-Nabhani (2002: 56) quoting from verse 9: 6 “and if one of the polytheists asks for protection from you, then protect him so that he can hear the word of Allah then send him to a safe place for him”. Based on this basis, it is interpreted that there is no dialogue between civilizations, because the opportunity is only carried out in one direction and determines the mushrikin as *mukhotob*, namely the target of speaking. So there is no need for dialogue to find out the opinions and assessments of civilizations outside of Islam. Faiz added that what needs to be done so that they listen to the verses of the Qur’an is to strive. *Shira’* or war, which is termed a clash between civilizations, occurred long ago, even when the Prophet Muhammad first conveyed Islam in the community. The Messenger of Allah, who was known for his high morals among the Arab tribes, immediately became hostile to him because of what he said. The existence of contradictions between old ideas that are about to be replaced with new ideas, namely Islam, allows clashes to occur. This clash is not only experienced by Islamic civilization, but also among all civilizations in the world who are trying to elevate the existence and domination of each civilization.

The clash continued even when Islam had become a strong nation in Medina and the death of the Prophet Muhammad. Naturally, according to Faiz, the event is in accordance with the verse quoted from 16: 125 to call on groups from different civilizations, with three main points. Calling with wisdom (*burhan al-aqil*) which is rational and unbreakable evidence, good lessons as good warnings (*tadzkir jamil*) and good rebuttals. Establishing the concept of an alternative civilization, according to Faiz, is the goal of holding a dialogue between civilizations. Finding the meeting point between the runway intersections so that the dividing bulkhead is solved. This has led to a middle ground convention which is expected to achieve the development and spread of peace. However, in this case an-Nabhani (2002: 33) views the concept of equality between civilizations as a kufr idea. The mention of kufr diction is used for the concept of the equation as a form of big denial. In KBBI V (online kbbl.kemendikbud.go.id) kufr leads to denial of God, where his position is higher than humans, so it is classified as an act that is very transgressing.

In the concept of accepting other opinions, an-Nabhani continues in the discussion of accepting religion and other opinions for the purpose of knowing without justifying judgments and rebuttals not including Islamic methodology (2002: 41). He refers to the statements of the Qur'an when explaining thoughts and statements of kufr are always associated with true statements as well as refutation of the kufr. In his conclusion it is stated that a clash of civilizations must occur. To quote the US Secretary of State's staff, Phyllis Oakley, "we agree that the notion of a clash of civilizations is unavoidable". Because the loss of the collision has signaled the melting of one civilization over another. This, according to him, happened in the Islamic world during the collapse of the caliphate institution. The domination of Islam was replaced by the rise of capitalism through dialogue and the middle way. The alignment of Islamic civilization with capitalism is a fundamental distortion of the concept of Islam. Ori Speer as a member of the Jewish delegation in the Oslo and Wye River treaties stated in his book *The Course* "the headscarf of Muslim women are starting to disappear and their dresses are getting shorter. This was welcomed by Larson who considered it a sign of the desire of Muslims to normalize with Western civilization."

The existence of Islam is believed by the West like Richard Nixon, president of the US (1971) as a fundamental idea that will bring the world back to the past. So according to him, Islam is an ideological enemy. In his book *The Favorable Opportunity* he states that Islam is not just a religion, but the

foundation of a great civilization. So he said that Islam wants the return of the glory of civilization in the past by implementing law in a country. At the same time Nixon expressed regret for capitalist civilization "But our civilization is not more advanced than theirs. Islamic civilization defeated the communists far more strongly than Western efforts. Their opposition to materialism and the moral degradation that befell Western society is their strength and not their weakness." Faiz mentions various types of special clashes of civilization between the West and Islam in aspects of life. The dominance of the mass media, educational curricula and schools and universities, the aim is to provide *basis* of civilization and the elimination of the Arabic language. In the political aspect, it can be seen in the control of natural resources, the replacement of gold coins with currency, developing countries as consumptive markets. Meanwhile, in the political aspect of Western domination, it appears in the abolition of the Khilafah institution which is considered a normative institution of Islamic law and builds a nationalistic spirit.

The Meaning of Resurrection

Realizing the revival of Islam is the ideal of every Islamic movement. However, the real form of the revival is often still vague in the minds of the Muslims. An-Nabhani revealed that the meaning of resurrection lies in one's thoughts on life, the universe and humans (2010: 7). This paradigm is also fundamental when the ideals of revival will be instilled in Muslims. This perspective of revival is also written by Muhammad Hawari (2003: 27) in his book *Hacking a New Way of Struggle for Islamic Political Parties*. Islamic ideology which includes ideas and methods as the fundamental paradigm to achieve this revival.

Comprehensive thinking about the universe, humans and life is contained in the Islamic faith which is able to answer human problems (an-Nabhani, 2010: 9). So to strengthen perception, it is closely related to the behavior carried out by humans, because humans themselves act based on the understanding that they believe in. The existence of the Islamic revival can be concluded that it does not lie in human facilities, but is at the level of being stingy which produces a pattern of attitudes. So that the pattern of attitudes and understanding of Islam will certainly affect the aspect of human facilities. This is because the encouragement of an understanding of Islam that conveys the best of humans is the most useful.

CONCLUSION

Civilization will give birth to the beliefs held by its adherents. Islam has various concepts of life such as economics, politics, education, health and culture. Islam has built a civilization when realizing this concept. So that Islam can be categorized as a religious civilization. The view of Taqiuddin an-Nabhani gave birth to the concept of purification of Islam which has been mixed with Western views. This was done as a step to restore the Islamic caliphate as did the Prophet Muhammad, among these concepts are: The thought process according to an-Nabhani must have four components, namely: facts as objects, human senses to perceive facts, brains to process and information obtained beforehand or notice. In the process of thinking, information is very important to form one's understanding in responding to an event. Islamic personality according to an-Nabhani is a mindset and attitude pattern that is in accordance with Islam. Islamic personality is Islamic behavior that arises from the understanding of Islam that is installed in one's mind. Islamic society according to an-Nabhani is a collection of individuals who have Islamic thoughts, feelings and are bound by rules that come from Islam as well. In this case, an-Nabhani defined the people of Medina when the Prophet Muhammad succeeded in forming the strength of the Muslims. Islamic civilization is defined by an-Nabhani as a collection of concepts of life originating from the transcendental aspect. Civilization will have an influence on the perspective and distinctive physical objects. The meaning of resurrection according to an-Nabhani is an increase in the level of individual or communal thinking in viewing humans, life and the universe. Someone who has high morals and thoughts will emerge when Islam is made a law of life such as the harmony of natural law. The meaning of the caliphate is a formal institution as a form of Islamic state based on sharia sources. The Khilafah applies all Islamic law formally, so as to guarantee the existence of humans and the universe. After the collapse of the Islamic caliphate there was a humanitarian disaster and a decline in the thinking of the Muslims as a whole.

REFERENCES

- A Herdiansyah, Deden. 2016. *Behind the Fall of the Ottoman Turks*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Abdurrahman, Dudung. 2014. *Multicultural Communities in Classical Period Islamic History*. Jogjakarta: Publisher Ombak
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2010. Trans. Abu Amin *Rules of Life in Islam*. Jakarta: Hizb ut-Tahrir Indonesia.
- _____, Taqiyuddin. 2017. *Islamic State*. trans. Jakarta: Islamic Fikrul Library.
- _____, Taqiyuddin. 2007. *Formation of an Islamic Political Party*. trans. Zakaria. Jakarta: Islamic Fikrul Library.
- Arliani, NYS Junita. *Hizb ut-Tahrir's Political Strategy in Internationalizing the Idea of Re-establishing the Islamic Caliphate*. Proceedings of the Interdisciplinary Postgraduate Student Conference. PPs UMY.
- Dodiman, M Ali. 2018. *Memoirs of Shari'ah and Khilafah Fighters*. Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing.
- Harb, Muhammad. 2013. *Memoirs of Sultan Abdul Hamid II*. trans. Masturi Inspiration. Jakarta: Al Kautsar Library.
- Hawari, Muhammad. 2003. *Party Politics*. Bogor: CV IdeA Main Library.
- Houriya Ahmed & Hanna Stuart. 2010. *Profile: Hizb in the UK*. Publisher: Hudson Institute.
- Ikhwan, Munirul. 2016. *Interpretation of the Qur'an and the Development of the Times: Reconstructing Context and Finding Meaning*. Yogyakarta: Postgraduate at UIN Sunan Kalijaga.
- Khoiriyah, Nuriana. 2016. *The Concept of the Islamic Caliphate of the Muslim Brotherhood Movement According to Hasan Al-Banna's Thought (1906-1949 AD)*. Surakarta.
- Muhyar, Fanani. 2017. *The Khilafah System in History*. Digilib undip.
- Nata, Abdul. 2011. *Comprehensive Islamic Studies*. Jakarta: Kencana.

- Pankhurst, Reza. 2013. *The Inevitable Caliphate: a History of the Struggle Global Islamic Union, 1924 to the Present*. New York: Oxford University Press.
- Prasetyadi, Yan S & Wahyu Ichsan. 2016. *Contemporary Islamic Da'wah Materials*. Solo: Kaffah Media.
- Rais, M Dhiauddin. 2001. Trans. *Islamic Political Theory*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Riyadi, Dedi Slamet. 2008. *Analysis of the Khilafah Concept According to Hizb ut-Tahrir*. Semarang.
- Samarah, Ihsan. 2002. *Short Biography of Shaykh Taqiyuddin An-Nabhani*. trans. Moh. Shidiq. Bogor: al-Azhar Press.
- Literature, Ahmad. 2019. *Khilafah: Obligations and Necessities*. In *Al Wa'ie* XIX: 14-17. Jakarta.
- Typhoon, Mohamad. 2013. *Power According to Taqiyuddin An-Nabhani in a Review of Political Ethics*. Journal of Philosophy Volume 23, no 2. Yogyakarta: Postgraduate Faculty of Philosophy UGM.
- Za'rur, Abu. 2014. *Regarding the Islamic Movement*. Al-Azhar Press: Bogor.

Internet

- BennyMetika *Radical Constructivism and Cognitive Biology*. <<http://benny-metika.blogspot.com/2011/03/konstruktivisme-radikal-dan-biologi.html?m=1>> (accessed on Thursday, November 21, 2019).
- Fatkhurrozi, M. *History of the decline and colonization of Muslims from time to time*. <<https://www.facebook.com/336610730177480/posts/987462485092298/?app=fb>> (accessed Tuesday, December 01, 2020).
- FDD. *The Caliph-Stropic Debate*. <<https://www.fdd.org/analysis/2006/10/23/the-caliphate-stropic-debate/>>. (accessed Tuesday, December 01, 2020).

Farouki, ST *Hizb ut-Tahrir al-Islami: Evaluating the Thread Posed by a Radical Islamic Group that Remains Nonviolence*. <https://reaserchgate.net/publication/233181900_Hizb_ut-Tahrir_al-Islami_Evaluating_the_thread_Posed_by_a_Radical_Islamic_Group_That_remains_Nonviolent>. (accessed Monday, November 30, 2020).

Historynewsnetwork.org. *The Caliph Tropical Debate*. <<https://historynewsnetwork.org/article/31036-the-chalip-stropic-debate>>. (accessed August 13, 2020. Accessed Sunday, July 26, 2020).

Huge, AJ *Do Your Duty with Honor*. <<https://youtu.besHuUu14UB3k>> (accessed on Sunday, November 29, 2020).

Saididah, N. *The Standard Model of the Islamic State*. <<https://www.muslimahnews.com/2020/12/23/model-baku-negara-islam-khilafah/>>. (accessed on Wednesday, 02 December 2020).

vice.com. *Why does this world have to have borders between countries?* <https://www.vice.com/amp/id/article/pae4xb/why-sih-di-dunia-ini-mus-ada-border-antar-country?utm_source=viceidtw&twitter_impression=true> (accessed October 29 2020).

.Implementation Of Multicultural Values In The Curriculum Of The Islamic Education Management Study Program

Tria Ina Utari

tria.ina.utari94@gmail.com

IAIN Ambon

Abstrak

Pendidikan multikultural merupakan upaya untuk mengintegrasikan bangsa sebagai manifestasi dari kondisi sosial budaya Indonesia yang beragam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pengembangan kurikulum berbasis nilai-nilai multikultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk memeriksa keabsahan data agar dapat diuji tingkat kepercayaan, transferabilitas, reliabilitas dan komparabilitasnya digunakan untuk memeriksa keabsahan data yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konformabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kurikulum pada program studi manajemen pendidikan Islam dengan mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengkajian kurikulum. Dosen diberi ruang untuk mengembangkan multikulturalisme sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan, sehingga eksklusivitas dan kesenjangan yang memicu konflik dapat dikurangi.

Kata Kunci: *multikultural, kurikulum, program islami*

Abstract

Multicultural education is an effort to integrate the nation as a manifestation of Indonesia's diverse socio-cultural conditions. The purpose of this study was to determine the implementation of curriculum development based on multicultural values. This study uses a qualitative approach. Data collection uses primary data and secondary data. To check the validity of the data so that the level of trustworthiness, transferability, reliability and comparability can be tested, it is used to check the validity of the data, namely credibility, transferability, dependability, and conformability. The results show that curriculum management in the Islamic education management study program by integrating multicultural values is carried out through the stages of planning, implementing, monitoring and reviewing the curriculum. Lecturers are given space to develop multiculturalism according to the subjects being taught, so that exclusivity and gaps that trigger conflict can be reduced.

Keywords: *multicultural, curriculum, islamic program*

INTRODUCTION

Multicultural values build a critical understanding of the meaning of ethnicity and race because it can build and foster a positive understanding of other ethnic and racial groups. In addition, multicultural values also train and build the character of students to be able to be democratic, humanist, and pluralist in their environment. (Yaqin, 2005). The formation of a democratic Indonesian multicultural society cannot be underestimated. Rather, it must be pursued systematically, pragmatically, integrally and continuously. One of the most strategic steps is through the inculcation of multicultural values which is carried out through all educational institutions, both formal and non-formal and even informal in the wider community. Bernstein (1994) multicultural education hinders assimilation and the division of society.

The conflict in Ambon (Maluku) is an example the strongest is inter-religious conflict, between Muslims and Christians in 1999. This impression is not only reson ate at the national level, but also to the foreign countries. Society in general is filled with tension and fear between the religious population. And since that riot, the whole city and the island of Ambon is strictly segregated between Muslim areas with Christianity. Those with different religions don't never had physical contact, except for the volunteers humanity, at least business people, and officers government. Even that is limited to being done in place relatively few neutrals. The Muslim community in Ambon was strengthened by Jihad forces from Java, and the Christians began to call for the intervention of UN troops. Now, the province is safe, but the friction and vulnerability and vigilance are still the government's top priorities. Hooks (1994) explains that the weakness of multicultural attitudes causes the narrowness of nationalism, isolationism, and xenophobia than looking at the world's perspective with appreciate a variety of points of view and perspectives.

Many studies are related to multiculturalism but few are related to the development of college-level curricula. Such as Sigelman and Welch (1993) and Sigelman et al. (1996) studied the racial attitudes of blacks on whites. Powers and Ellison (1995) studied the relationship between race and friendship on understanding black people. Ethnic and racial group issues can form anti-multicultural attitudes which are further exacerbated if they are based on religious differences which if left unchecked will lead to prolonged conflict. Advocacy for multicultural education, as it is defined and practiced today in US schools, has become a superficial application of bicultural education. Multicultural education is considered by most educators to be done only in times of crisis or only as a celebration whenever possible (Banks & Banks, 2002).

Delpit (1995), Nieto (2000), Banks and Banks (2002), Fuller (1992), and many other scholars have argued that curricula are monocultural and teacher education programs are largely due to the gaps European American women. Dilg (1995) so that the white teacher approach to multicultural education (mostly aspects of the multicultural education curriculum) in fighting ignorance. The research that the author conducted looks at multicultural education differently. The curriculum approach as the role of universities to provide multicultural understanding needs to be looked at carefully. Serious attention to a generation in order to create a brotherhood without being racist. Educators seem to have to see broadly that multicultural education is an appreciation of cultural, racial, ethnic, and religious differences.

Universities also contributed to the birth of a multicultural society, especially in Maluku Province. Ambon State Islamic Institute as the first Islamic university in this province, echoes the inculcation of multicultural values as adoption to be used as guidelines in developing its curriculum. Students will have their own characteristics according to the culture in their family. These differences will provide an explanation that every human being does have their own culture, it cannot be generalized between one another. So that the cultivation of multicultural values will foster a positive understanding in the environment. How is the implementation of curriculum development based on multicultural values in the Islamic education management study program?.

LITERATURE

Multicultural

The term multiculturalism comes from the origin of the word culture. Banks (1993) revealed that originally appeared in the United States in the 1960s as civil rights movement. So that it becomes interesting about multicultural research this education. (Banks, 1993; Banks, 2001a, 2001b, 2004, 2006a, 2007; Banks & Banks, 2001; Cochran-Smith, 2001; Ladson-Billings, 1995, 1999a, 1999b; Ladson-Billings, 2003, 2006; Perry, Moore, Acosta, Edwards, & Frey, 2006; Sleeter, 2008, 2009; Sleeter & Stillman, 2005; more slippery, 1991, 2001, 2008; Sleeter & Bernal, 2004).

The definition of culture according to Elizabeth Taylor dan L.H. Morgan in Yaqin (2005), means a culture that is universal for humans in various levels that is embraced by all members of society. Emile Durkheim dalam Yaqin (2005) explain culture as a group of people who adhere to a set of symbols

that bind in society to be applied. Nieto (1996) multicultural education is “anti-racist” education is the most important process for all students”.

Mahfud (2011) Etymologically, multiculturalism is formed from the words multi (many), culture (culture), and ism (school/understanding). Essentially, that word contains an acknowledgment of the dignity of human beings who live in communities with their own unique culture.

Thus, each individual feels valued and at the same time feels responsible for living with his community. From these characteristics, an understanding of multiculturalism can be developed, namely as an understanding of diverse cultures. In this situation of cultural diversity requires understanding, mutual understanding, tolerance, appreciation, respect, cooperation and others in order to create a peaceful and prosperous life and avoid conflict and violence. (Naim, 2010)

From the above understanding, it can be concluded that multiculturalism is actually a concept of a community in the context of nationality that can recognize diversity, difference, and cultural pluralism both race, ethnicity, ethnicity and religion. The concept that provides an understanding that a plural or plural nation is a nation filled with diverse cultures. A multicultural nation is a nation in which existing ethnic and cultural groups can coexist peacefully on the principle of co-existence which is characterized by a willingness to respect other cultures.

Multicultural Education Paradigm

The Indonesian nation is a nation whose society is very diverse or pluralist. Pluralism has become the hallmark of the Indonesian nation. This plurality can be seen from two perspectives, namely: horizontal and vertical perspectives. In a horizontal perspective, the diversity of our nation can be seen from the differences in religion, ethnicity, regional language, geography, and culture. Whereas in a vertical perspective, the plurality of the Indonesian nation can be seen from the differences in the level of education, economy, and socio-cultural level. This plurality phenomenon is like a double-edged sword, on the one hand it has a positive impact, namely we have a wealth of diverse cultural treasures, but on the other hand it can also have a negative impact, because sometimes this diversity can trigger conflicts between community groups which in turn can lead to instability. security, socially, politically and economically.

Indonesia's history is heavily influenced by other nations. This country with a population of 273.5 million. Based on the Central Statistics Agency, Indonesia has 1,340 ethnic groups. The motto that has always been the grip of the life of the Indonesian people is *Bhineka Tunggal Ika*, which is different but still one which is then reflected in the symbol of the state, namely *Pancasila*. In supporting development and civilization, the government is present by including civic education as an inseparable part of inculcating the spirit of *Bhinneka Tunggal Ika*. Multicultural understanding is an inseparable part, but few institutions take the role of multicultural education as a guide. Some implement multicultural education in their curriculum depending on the characteristics of the region and the level of vulnerability to divisions such as in the Maluku province, Indonesia.

In facing this cultural pluralism, a new paradigm that is more tolerant and elegant is needed to prevent and solve the problem of cultural clashes, namely the paradigm of multicultural education. This is important to direct students in responding to the reality of diverse societies, so that they will have an appreciative attitude towards the diversity of these differences. The clear evidence of rampant riots and conflicts with ethnic, customary, racial, and religious backgrounds shows that our education has failed to create awareness of the importance of multiculturalism.

Banks (2007), Multicultural education is a way of looking at reality and a way of thinking, and not just content about various ethnic, racial, and cultural groups. Specifically, Banks stated that multicultural education can be conceptualized on five dimensions, namely: 1) Content integration; 2) The process of compiling knowledge; 3) Reduce prejudice; 4) Equality pedagogy; and 5) Empowering culture and organizational structure.

For this reason, lecturers who provide multicultural education must have the belief that; cultural differences have strengths and values, universities must be role models for the expression of human rights and respect for cultural and group differences, social justice and equality must be of primary importance in the curriculum, universities can provide knowledge, skills and character to help students from various backgrounds, universities with families and communities can create an environment that supports multiculturalism.

METHODS

This study uses a qualitative approach. Qualitative research is research that is used to examine the condition of natural objects (naturalistic), where research is the key instrument. The place of this research was carried out at the Islamic Education Management Study Program IAIN Ambon, Dr. H. Tardmizi Taher Street. The study was carried out in March 2021.

In this study, key informants or key informants were carried out using the purposive sampling method. Namely sampling data sources with certain considerations. As for the next informant determination, it is done by using snowball sampling technique, which is asking the previous informant to show other people who can be used as the next informant. (Bogdan dan Biklen in Sugiyono, 2017). So that the primary data in this study were obtained through key informants, namely the head of the Islamic education management study program, the second informant was the quality group of the Islamic education management study program. Secondary data were obtained from reference books and curriculum documents in the Islamic education management study program.

Data analysis in qualitative research is carried out during data collection, and after completion of collection within a certain period. Miles and Huberman in Sugiyono (2017) argued that the activities in data analysis were carried out interactively and continuously so that the data was saturated. To check the validity of the data so that it can be tested for the level of trustworthiness, transferability, reliability and comparability, then used to check the validity of the data credibility, transferability, dependability, and conformability.

RESULT AND DISCUSSION

The curriculum of the Islamic education management study program at IAIN Ambon was compiled with a standard setting mechanism through several stages, namely following the Focus Group Discussion (FGD) activity of the Association of Islamic education management study programs referring to the KKNi and SN-DIKTI guided by the development of the PTKI curriculum.

This is in line with the statement of the head of the study program, Mr. Dr. Kapradja Sangadji who stated that: "...The formulation of policies related to the implementation of education involves competent internal and external interests, partners/stackholders to ensure the implementation of the first mission of the IAIN Ambon Islamic education management study program, namely to organize education and teaching of Islamic education management that integrates Islamic values, science, and multicultural-based technology in 2024 in eastern Indonesia".

Mrs. Habiba Waliulu, M.Pd as the quality group for the Islamic education management study program also added that:

"...Updating the Islamic education management curriculum involves internal and external stakeholders and is reviewed by experts in the field of study program. This curriculum update is carried out in curriculum redesign activities."

The quality group for the Islamic education management study program also added that: "The guideline for curriculum development in Islamic education management contains the first; graduate profile, learning outcomes, study materials, curriculum structure, and lesson plans. Second; there is a mechanism for determining curriculum"

The Islamic education management study program has a curriculum implementation document that includes: 1) planning, 2) implementation, 3) monitoring, 4) and curriculum review.

This is in accordance with the statement from the head of the Islamic education management study program that::

"In conducting evaluations related to learning standards in study programs, we together with the vice chancellor for academics, LPM, the senate and the Dean held a meeting covering the implementation of the curriculum"

The curriculum development of the Islamic education management study program is structured based on the curriculum structure by making conformity in the formation of learning outcomes, breadth, depth, study material for the weight of course credits, abilities and integration between courses with additional performance indicators (IKT), namely integrating values-based learning multiculturalism.

This is in line with the statement of the quality group of the Islamic education management study program that:

“...The learning achievements of the MPI study program curriculum, one of which is being able to describe the values of Islam, science, and multicultural-based technology in accordance with several Islamic education figures, Ahmad Sonhadji, Abidin Wakano, Hasbollah Toisuta, Muqowim, and Imam Machali which are then integrated into study materials such as Islamic religious education courses, introduction to multicultural, Islamic and local history and culture, interpretation of management verses, and Islamic study methods”

The learning process in the Islamic education management study program is structured by taking into account the characteristics of the learning process which consists of interactive, holistic, integrative, scientific, contextual, thematic, effective, student-centered collaborative characteristics. The quality cluster for the Islamic education management study program stated that:

“...The planning of each lecturer’s learning process must be reflected in these characteristics to produce a graduate profile that is in accordance with the learning outcomes planned by the curriculum. The learning plan for this semester is developed by the lecturer independently/group.”

The implementation of the learning process in the Islamic education management study program is contained in the semester learning plan (RPS) by paying attention to learning resources, the environment, lecturers, and students. This is in line with the statement of the head of the Islamic education management study program:

“...To support learning outcomes and the establishment of interactions in learning, lecturers are required to make RPS, so that monitoring of the suitability of the process against the plan runs effectively”

Monitoring and evaluation of the implementation of the learning process in the Islamic education management study program is carried out centrally by the Quality Assurance Institute (LPM) IAIN Ambon, periodically once a year. This was revealed by the quality group of the Islamic education management study program that:

“...LPM IAIN Ambon conducts monitoring and evaluation once a year to measure the achievement of CPL in Islamic education management study programs.”

However, in the monitoring carried out in 2019, related to additional performance indicators, namely integrating multicultural values-based learning, it has not been achieved. This was revealed by the quality group of the Islamic education management study program based on the results of the tracer study, that: "...only 30% of learning materials have multicultural values as evidenced by the RPS of lecturers, the results of the evaluation of LPM IAIN Ambon, stated that there were no lecturers who carried out learning by integrating learning based on multicultural values."

One of the obstacles to the integration of learning based on multicultural values is that 50% of lecturers of the Islamic education management study program do not understand this integration. This was revealed by the head of the Islamic education management study program that: "It has not been properly socialized how to integrate learning based on multicultural values, so we study and make improvements to learning by doing teacher-centred instruction in stages with a student-centered learning approach.

Identification of Multicultural Values in Learning Outcomes

From the identification process, it was found that several learning outcomes of the study program emphasized the development of values related to multiculturalism, including:

- 1) Demonstrate a responsible attitude towards work in their area of expertise independently. This integration shows competencies that lead to multicultural values in the scientific context, in the form of understanding the diversity of jobs in the field of expertise so that students feel a sense of responsibility for work in their fields.
- 2) Have the spirit to fight for justice, leadership, and a responsible attitude. Multicultural integration is part of social attitudes. According to Sulalah (2011) the concept of multicultural education is based on: (a) social justice and equal rights for all people must be the pinnacle of interest in designing and implementing the curriculum, (b) attitudes and values that can shape a democratic society are necessary to be promoted in the community, universities, and (c) cooperation with families and communities to create an environment that supports multiculturalism. With regard to the values contained in the demands for integration above, this is in accordance with the multicultural concept by Sulalah.

- 3) Able to demonstrate independent, quality and measurable performance. This integration of multicultural values shows part of the attitude of the individual (student). Freedom and equality of rights between everyone in performance so that they are able to form graduates of democratic Islamic education management in the midst of diversity.
- 4) Demonstrate work ethic, pride in being a prospective teacher, prospective consultant, prospective education manager and self-confidence. This integration shows the scientific competence of students in addition to being a form of self-respect as well as a form of responsibility of the institution/university to express the meaning of human rights and respect human rights. This expression then becomes the provision of students in the world of work which is shown through their work ethic, confidence, and pride in their profession to play a role in education, both as teachers, consultants, and education managers..
- 5) Collaborate and have social sensitivity with various parties who have diverse backgrounds, views, and beliefs. This integration requires students to understand, exemplify, and practice cooperative attitudes and social sensitivity. Hasan, (2000) explained that the implementation of multicultural learning must be guided by curriculum principles, including: cultural diversity is the basis in determining the philosophy, theory, and relationship of universities with the local socio-cultural environment. Competence to work together and have social sensitivity with various parties who have diverse backgrounds, views, and beliefs in accordance with the development introduced by Likona in Sulalah (2011) in the form of moral knowing, moral feeling, and moral action.
- 6) Able to manage learning with dedication and responsibility. This integration requires lecturers to be able to manage learning with dedication both in class and be responsible even though they are outside the classroom. This will be an example for students, so that they are able to give birth and integrate science as learning outcomes of Islamic education management study programs.

DISCUSSION

The unique vulnerabilities in competing for religious areas in Maluku Province are used as opportunities to detonate and maintain riots for intruders. Strict regional segregation makes it difficult for some communities in Ambon to develop. The powerlessness of the community to cope their problems and the need to intervene by outsiders is an opportunity for the Ambon State Islamic Institute to take a role.

The Ambon State Islamic Institute proclaimed in its vision to run programs based on multicultural values. The Islamic Education Management study program takes on a role by reorienting the curriculum towards multiculturalism. The implementation of multicultural values-based learning in the curriculum of the Islamic education management study program is carried out by introducing values, integrating values into student behavior every day through a continuous learning process in the classroom or outside the classroom on subjects through the integration of multicultural values. while studying or graduating. Learning activities in addition to mastering the targeted material competencies, are designed and carried out so that students are familiar, aware/sensitive, so that they are able to integrate multicultural values and make them behave well. An important goal of multicultural education is to help educators minimize the problems related to diversity and to maximize its educational opportunities and possibilities. (Banks, James A, 2017)

In the curriculum of the Islamic education management study program at IAIN Ambon, the curriculum structure of the study program is arranged by making conformity in the formation of learning outcomes, breadth, depth, study materials, as well as capabilities and integration between courses contained in the study materials 1) Ukhuwah Islamiyah, 2) Tawhid, 3) Faith, 4) Morals, 5) Tolerance, 6) Multicultural, 7) Maluku local wisdom, 8) Maluku local culture, 9) History, 10) MPI interpretation studies, 11) and Hadith studies related to management, which are then contained in courses 1) Islamic Religious Education, 2) Introduction to Multiculturalism, 3) History of Islamic and local culture, 4) Interpretation of management verses, 5) Islamic study methods.

Evaluation of learning outcomes in the curriculum of the Islamic education management study program is carried out to determine changes in student behavior and competency formation, both in the form of class assessments, ability tests, final assessments of education units and certification, benchmarking, and program assessments. (Mulyasa. E, 2007)

Nieto (2004) explains that an increase in cultural/ethnic diversity causes educators to recognize and have a need to broaden their understanding of multicultural education, especially in public schools. Lecturers are the most important factor in translating multicultural values in classroom learning. Lecturers need to deepen and participate in scientific discussions so that the inculcation of this value is pioneered by them. The main lecturer preparation program is responsible for designing programs that suit the needs of their knowledge. Development of a multicultural values curriculum basically challenges lecturers to leave their “comfort zone” but this program is the result of studying and increasing understanding of cultural diversity in lectures (Ball, 2000; Cruz, 1999; Garcia & Willis, 2001; Gays, 2002)

This is also consistent with the findings of Aرسال, Z. (2019) The analysis shows that teachers exposed to critical multicultural education programs showed significantly greater progress in their multicultural attitudes compared to teachers in the control group. When lecturers and program administrators understand students’ learning needs and recognize how these needs can differ from the needs of students from the dominant culture, real learning occurs. In the assessment of multicultural values in learning in the Islamic education management study program, lecturers carry out an assessment of learning processes and outcomes on an ongoing basis. Lecturers evaluate through tests and non-tests and orient learning to student center learning.

Instilling the value of multiculturalism ultimately improves existing intercultural communication with the achievement of the student attitude aspect of “why” he does what we do”. Gudykunst (1998) states that multiculturalism includes not only knowledge of culture and language, but also attitudes and behavioral skills.

In line with that in the research of Hifza, et al (2020), the development of multicultural education can be carried out through religious, historical, psychological, sociocultural and geographical foundations. So that the strategy for developing multicultural values is through an approach to socialization and internalization of scientific activities, multicultural education innovation, curriculum revision, education and training programs for educators, and local wisdom programs that accommodate multicultural spirit and values in institutions. Muizzudin (2021), The development of multicultural values can be done through a habituation, exemplary, emotional, rational and functional approach. This strategy can also help lecturers translate in their learning in class through moral knowing, moral feeling and loving, and moral modelling.

The implementation of this multicultural values curriculum program is in accordance with the 'decentre' theory. That is, students have an attitude of being willing to accept the relative values, beliefs, and behaviors of themselves, and do not assume that they are the only ones who are right and can see how they are also seen from the perspective of others. Perspective of others who also share a set of values, beliefs, and behaviors (Byram, Gribkova & Starky, 2002).

Study Implication

- 1). Must be accepted by implementers such as lecturers, campus bureaucrats, and study programs to integrate multicultural values into teaching is a very difficult process. However, we must accept that the integration and translation of multicultural values is an important requirement, in order to produce quality graduates in accordance with the campus vision and mission.
- 2). The output of graduates can become agents of reform that form individual tolerance and avoid external intervention and provocation, this problem must be resolved for the benefit of all groups and peace in Maluku province.
- 3). The findings show that the multicultural-based Islamic education management curriculum development program has been running in a structured manner by involving bureaucrats, the implementation of focus group discussions (FGD). Ideally, the level of integration should continue to be socialized and grounded into a cultural order that is born from the behavior of lecturers and the entire academic community.
- 4). Islamic education management study programs must continue to study and research on the translation of multicultural values and researchers must find out issues that promote multicultural values
- 5). The study program requires more drastic strategies and actions so that the translation and communication problems of multicultural values in teaching can be resolved in the near future.
- 6). Currently, it is very much realized that to help all students of different ethnicities, traditions, religions, socioeconomic status, and mental abilities, multicultural education is needed, so that they can grow and develop optimally.

CONCLUSION

The translation of multicultural values in education is very important for learning implementers, namely lecturers. There needs to be a definition of multicultural values that become the reference for institutions to obtain appropriate graduate outputs. Leaders with communication skills play an important role in communicating the vision of multicultural values education. Lecturers and the entire community need to understand 'why I do what the institution expects'. Self-awareness and prejudice are the first steps to interacting positively and learning from others. This process lies at the core of multicultural learning." (Martins, 2008, p. 203)

The curriculum is a guideline for implementing learning activities that are used to achieve learning outcomes in the Islamic Education Management study program. The vision and mission of the study program are set out in the curriculum tools that produce graduate learning outcomes. The achievement of Islamic education management curriculum learning begins with the preparation of graduate profiles that refer to the results of association agreements and curriculum reorientation activities. Multicultural values are additional performance indicators in the implementation of the curriculum in the Islamic education management study program which is contained in the study material, especially in Islamic religious education courses, introduction to multicultural, Islamic and local history and culture, interpretation of management verses, and Islamic study methods.

REFERENCES

- Arsal, Z. (2019), "Critical multicultural education and preservice teachers' multicultural attitudes", *Journal for Multicultural Education*, Vol. 13 No. 1, pp.106-118. <https://doi.org/10.1108/JME-10-2017-0059>
- Ball, A. F. (2000). Preparing teachers for diversity: Lessons learned from the US and South Africa. *Teaching and Teacher Education*, 16 (4), 491-509
- Banks, J. A. (1993). Multicultural education: Developments, dimensions, and challenges. *Phi Delta Kappan*, 75, 22–28.
- Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (Eds.). (2002). *Handbook of research on multicultural Education*. 2nd Ed. San Francisco. Jossey-Bass.
- Banks, J. A. (2001b). *Cultural diversity and education: foundations, curriculum, and teaching*. 4th ed: Allyn and Bacon.
- Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (2001a). *Multicultural education: issues and perspectives*. 4th ed: John Wiley.
- Banks, J. A., & McGee, C. A. (Eds.). (2001b). *Handbook of Research on Multicultural Education*. San Francisco, CA: Jossey-Bass
- Banks, J. A. (2006a). *Cultural diversity and education: foundations, curriculum, and teaching* (5th ed.). Boston: Pearson/Allyn and Bacon.
- Banks, J. A. (2006b). Improving Race Relations in Schools: From Theory and Research to Practice. [Feature DER: 20060915]. *The Journal of Social Issues*, 62(3), 607-614.
- Banks, J. A. (2007). *Educating citizens in a multicultural society* (2nd ed.). New York: Teachers College Press.
- Bernstein, R. (1994). *Dictatorship of virtue: multiculturalism and the battle for America's future*. New York: Vintage Books
- Byram, M. (1997). *Teaching and Assessing Intercultural Communication Competence*. Clevedon, UK: Multilingual Matters.
- Cochran-Smith, M. (2001). Multicultural education: solution or problem for American schools? [Feature DER: 20010425]. *Journal of Teacher Education*, 52(2), 91-93

- Cruz-Janzen, M. I. (1999). Lives on the crossfire: The struggle of biethnic and biracial Latinos for acceptance and humanity. Annual conference for the National Association for Hispanic and Latino Studies (NAHLS). Houston, TX. February 11, 1999
- Delpit, L. (1995). Other people's children. New York: The New Press
- Dilg, M. A. (1995) .The Opening of the American Mind: Challenges in the Cross-Cultural Teaching of Literature. *English Journal*, 18-25
- Fuller, D. (1992) Monocultural teachers and multicultural students: A demographic clash. *Teaching Education*, 4(2). In Willis, Arlette Ingram. *Exploring Multicultural Literature as Cultural Production. Reading Across Cultures: Teaching Literature in a Diverse Society.* Theresa Rogers and Anna O. Soter, eds. New York: Teachers College Press and NCTE, 1997.
- Garcia, E. E. (1994). Educating Mexican American students. In J.A. Banks and C.A.M.
- Gay, G. (2000). The importance of multicultural education. *Educational Leadership*, 61(4)
- Gudykunst, W. B. (1998). Applying anxiety/uncertainty management (AUM) theory to intercultural adjustment training. *International Journal of Intercultural Relations*, 22(2), 227-50.
- Hasan, H. S. (2000). Multiculturalism for Completion of the National Curriculum. *Journal of Education and Culture*, 26(6).
- Hifza, Hifza and Antoni, Antoni and Syakhrani, Abdul Wahab and Hartati, Zainap (2020) The Multicultural Islamic Education Development Strategy on Educational Institutions. *Jurnal Iqra Jurnal Kajian Pendidikan*, 5 (1). pp. 158-170. ISSN 2548-7892
- Hooks, B. (1994). *Black Looks: Race and Representation*. Boston: South End, 1992. *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom*. New York: Routledge
- Ladson-Billings, G. (2006). From the Achievement Gap to the Education Debt: Understanding Achievement in U.S. Schools. *Educational Researcher*, 35(7), 3-12
- Mahfud, C. (2011). *Multicultural Education*. Student Library.

- Martins, I. F. (2008). Learning to live together: The contribution of intercultural education. *European Journal of Education*, 43(2), 197-206
- Mulyasa. E. (2007). *Management Based Management*. PT Youth Rosdakarya.
- Naim, N. dan A. S. (2010). *Multicultural Education, Concepts, and Applications*. Ar-Ruzz Media.
- Nieto, S. (2000). *Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education* (3rd ed.). New York: Longman
- Perry, G., Moore, H., Acosta, K., Edwards, C., & Frey, C. (2006). Dialogue on diversity teaching. In N. Peters-Davis & J. Shultz (Eds.), *Challenges of multicultural education: Teaching and taking diversity courses B2 - Challenges of multicultural education: Teaching and taking diversity courses* (81-111). Boulder, CO: Paradigm Publishers
- Sleeter, C. (2008). An Invitation to Support Diverse Students Through Teacher Education. [Feature DER: 20080506]. *Journal of Teacher Education*, 59(3), 212-219.
- Sleeter, C. (2009). Developing Teacher Epistemological Sophistication About Multicultural Curriculum: A Case Study. [Feature DER: 20090923]. *Action in Teacher Education*, 31(1), 3-13.
- Sleeter, C., & Stillman, J. (2005). Standardizing Knowledge in a Multicultural Society. *Curriculum Inquiry*, 35(1), 27-46.
- Sleeter, C. E. (1991). Multicultural Education and Empowerment. In C. E. Sleeter (Ed.), *Empowerment through multicultural education B2 - Empowerment through multicultural education* (1-23). Albany: State University of New York Press.
- Sleeter, C. E. (2001). *Preparing teachers for culturally diverse schools: Research and the overwhelming presence of Whiteness* (Vol. 52).
- Sleeter, C. E. (2008). *Studying diversity in teacher education: Historical trends and issues* American Educational Research Association Conference New York, NY B2 - American Educational Research Association Conference New York, NY). New York, NY.

- [37] Sleeter, C. E., & Bernal, D. D. (2004). Critical pedagogy, critical race theory, and antiracist education: Implications for multicultural education. In J. A. Banks & C. A. McGee Banks (Eds.), *Handbook of research on multicultural education B2 - Handbook of research on multicultural education* (Vol. 2nd, 240-258). San Francisco: Jossey-Bass.
- [38] Sugiyono. (2017). *Quantitative, Qualitative, and R&D Research Methods*. Alfabeta CV.
- [39] Sulalah. (2011). *Multicultural Education: Didactic of National Universality Values*. UIN Maliki Press.
- [40] Yaqin, A. (2005). *Multicultural Education*. Media Pillar.

Penanaman Nilai-Nilai Religius Dalam Kegiatan Manaqib Syeh Abdul Qodir Aljailani

Untung Ali Romdon
aliromdon27@gmail.com
IAIN Kudus

Abstrak

Penanaman nilai-nilai religius tidak bisa dibentuk begitu saja, perlu upaya untuk membentuk nilai-nilai tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan rutin manaqib Syeh Abdul Qodir Aljailani Jawahirul Ma'ani. Kitab manaqib Syeh Abdul Qodir Aljailani Jawahirul Ma'ani merupakan karya tulis yang istimewa yang dibuat sebagai perwujudan mahabbah dan cinta kepada para waliyulloh dan Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai religius dalam kegiatan manaqib Syeh Abdul Qodir Aljailani Jawahirul Ma'ani di Musholla Al Ikhlas Desa Karangmlati Demak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai religius dalam kegiatan manaqib Syeh Abdul Qodir Aljailani Jawahirul Ma'ani di musholla Al Ikhlas Desa Karangmlati yang rutin dilaksanakan pada malam tanggal 11 setiap bulan hijriah. Manaqib dibaca oleh seorang Imam Musholla Al Ikhlas yaitu K. Saktullah. Dari kegiatan tersebut ada nilai-nilai religius yang dapat di gali yaitu : kejujuran, dermawan, sabar, murah hati, taqwa dan warak, serta tanggung jawab.

Kata Kunci: *Nilai-nilai, Religius, Manaqib, Syeh Abdul Qodir Aljailani.*

Abstract

The cultivation of religious values cannot be formed just like that, it takes efforts to shape these values. One of these efforts is to carry out routine activities for the manaqib of Sheikh Abdul Qodir Aljailani Jawahirul Ma'ani. The Manaqib of Sheikh Abdul Qodir Aljailani Jawahirul Ma'ani is a special written work made as an embodiment of mahabbah and love for the saints and the Prophet Muhammad SAW. This study aims to analyze religious values in the manaqib activities of Syeh Abdul Qodir Al Jailani Jawahirul Ma'ani at Al Ikhlas Mosque, Karangmlati Village, Demak. This research is a type of field research using a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by interview, documentation and observation. The results of the study indicate that there are religious values in the manaqib activities of Sheikh Abdul Qodir Aljailani Jawahirul Ma'ani at the Al Ikhlas prayer room in Karangmlati Village which is routinely held on the night of the 11th of every Hijri month. Manaqib is read by an Imam of the Al Ihlas Mosque, namely K. Sakdullah. From these activities there are religious values that can be explored, namely: honesty, generosity, patience, generosity, piety and character, and responsibility.

Keywords: *Values, Religious, Manaqib, Syeh Abdul Qodir Aljailani.*

PENDAHULUAN

Peranan agama sangat utama dalam membangun masyarakat, agama Islam harus mampu mengubah masyarakat agar kualitas hidup semakin baik yaitu dengan meningkatnya kesalehan yang tinggi pada Allah. dengan ilmu pengetahuan akan syariat Islam maka masyarakat akan terlepas dari kebodohan, oleh karena itu maka peran agama sangat penting bagi masyarakat tanpa agama hidup seperti tanpa pegangan menuju jalan kebenaran. Yang harus kita ketahui bahwa agama Islam memerintahkan berusaha dengan sungguh-sungguh tidak mengenal putus asa untuk meraih prestasi dalam aspek kehidupan baik di sekolah pekerjaan karir dan lain sebagainya usaha itu harus dibarengi dengan ketaatan kepada Allah.

Doa merupakan ajaran inti dalam agama Islam, doa diibaratkan otak ibadah. Padahal kita tahu bahwa hakikat kehidupan adalah ibadah atau pengabdian kepada Allah. Penanaman nilai-nilai religius sangat penting untuk menanamkan pengetahuan tentang bagaimana manusia seharusnya dalam bersikap dan berperilaku di kehidupan dunia dan akhirat, ajaran itu berupa bagaimana nilai akhlak dan keimanan ibadah yang mana menjadikan wahyu Allah sebagai landasannya. Tujuannya adalah manusia mampu mengamalkan ilmu pengetahuannya di kehidupan keseharian dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan.

Kitab Manaqib sering dibaca pada kegiatan keagamaan oleh warga muslim di Indonesia seperti pada saat hajatan kemudian juga rutinan setiap sebulan sekali dan pada jamiyah di masjid maupun mushola. Manaqib adalah suatu kisah wali yang dapat dibaca pada waktu kapan saja dan dimanapun saja. Manaqib berisi kisah Syeh Abdul Qodir Al Jaelani seorang wali yang ahli di bidang fiqh yang dikenal dengan Sulton Aulia rajanya para ulama yang lahir di di Jilan sebelah utara negara Iran tahun 1077 M /

471 H. banyak Riwayat mengenai budi pekerti manusia yang sangat bermanfaat bagi sesama, kemudian selain itu juga pendidikan rohani. Orang menganggap membaca manaqib mendapat pahala

Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya tapi hanya sedikit yang mengetahui. agar masyarakat dapat mengambil pembelajaran yang ada di dalam Kitab Manaqib ulama yang menterjemahkan Manaqib tersebut diantaranya yaitu Syekh Jafar Al Barzanji.

Masyarakat sekitar mushola Al-Ikhlas Desa Karangmlati dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan diperoleh dalam kegiatan Manaqib yang mana Manaqib ini merupakan sejarah Riwayat kehidupan manusia. Kalimat Manaqib mempunyai arti kebaikan-kebaikan merupakan suatu Riwayat yang berisi kebaikan-kebaikan kepada Allah maupun kepada sesama manusia.

Menurut Bahasa Arab kata manaqib artinya biografi. Manaqib dari kata jamak mufrodat *man aqobah* yang artinya diantaranya kisah Riwayat

hidup seseorang yang terpuji yang baik akhlaknya. Tradisi di pulau Jawa diantaranya manaqib ini sangat sering dilaksanakan.

Manaqib muncul sesuai dengan ajaran Alquran yang mana artinya sebagai berikut :

“Sungguh pada kisah-kisah mereka adalah pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal dan Alquran itu bukanlah cerita yang diadakan tetapi membenarkan kisah-kisah terdahulu dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman” (Surat Yusuf ayat 111)

Kegiatan Manaqib di mushola al-ikhlas Desa Karangmlati dilaksanakan setiap tanggal malam 11 pada bulan Hijriyah yang dibaca adalah kitab manaqib Syekh Abdul Qodir Al Jaelani yaitu Jawahirul ma’ani dalam kitab tersebut menjelaskan berbagai macam-macam nilai-nilai religius diantaranya tentang Tauhid fiqih zikir tahlil dan lainnya. Pelaksanaan Manaqib dipimpin oleh imam Mushola tersebut yaitu Kyai Saktullah, beliau merupakan Nazir dari mushola Al-Ikhlas Desa Karangmlati.

Menurut Imam Ibnu Rajab, Syekh Abdul Qodir Aljailani meninggal pada hari Sabtu tanggal 9 Rabiul Akhir, bertepatan pada tahun 561 H di kota Babul Azaj. Syekh Abdul Qodir Aljailani hijrah ke Baghdad waktu masih muda, beliau belajar kepada ulama Ibnu Aqil, Abu Sa’ad Al Mukharimi, Abu Husain, Al Farra, dan Syekh Abdul Qodir Aljailani belajar dengan tekun sehingga mampu mengusia berbagai ilmu-ilmu penting

KAJIAN LITERATUR

1. Pengertian Nilai

Kata nilai bersumber dari Bahasa latin *vele're* yang dapat diartikan berguna, berlaku, mampu akan, berdaya jadi nilai dapat diartikan sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat serta paling benar menurut keyakinan seseorang. Nilai merupakan suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, dikejar, berguna untuk orang lain yang mana bagi yang menghayati dapat menjadikan bermartabat. (Adisusilo, 2012)

Kata Nilai dalam kamus Bahasa Indonesia mengandung beberapa pengertian, diantaranya sebagai berikut :

1. Harga (dalam arti taksiran harga)
2. Harta uang (dibandingkan dengan harga uang yang lain)
3. Angka kepandaian, biji, ponten
4. Banyak sedikitnya isi, kadar mutu
5. Sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan
6. Sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.

Nilai adalah sesuatu yang abstrak. Nilai-nilai dapat dirasakan oleh individu-individu sebagai daya untuk mendorong hal ini menjadi prinsip yang sangat penting dalam kehidupan sampai pada suatu titik yang mereka lebih siap mengorbankan hidup dari pada mengorbankan nilai. (Rosyadi, 2004)

Muhaimin dan Abdul Mujib mempunyai pendapat, nilai bersifat praktis dan efisien dalam jiwa dan Tindakan manusia serta melembaga secara objektif didalam masyarakat. (Muhaimin, 1993).

Nilai merupakan suatu hal yang bersifat objektif, tidak bergantung pada subjek atau kesadaran menilai , sebaliknya nilai merupakan hak subyektif jika eksistensinya dan aktifitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penelitian tanpa mempertimbangkan apakah itu bersifat piskis atau fisis. (Fronidizi, 2007)

1. Pengertian Religius

Istilah religius berasal dari bahasa latin *religi* atau *releegre* yang berarti membawa atau mengumpulkan. Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia adalah bersifat religi, bersifat keagamaan , yang bersangkutan-paut dengan religi.

Religius dan agama memang saling berkaitan dengan erat, tetapi memiliki makna yang berbeda. Religi dapat diartikan lebih luas daripada agama, jika sesuatu ada ikatan atau pengikatan diri maka kata religious berarti menyerahkan diri tunduk dan taat. Agama biasanya hanya terbatas pada ajaran-ajaran dan peraturan. Dalam agama Islam dan Kristen aturan tersebut menjurus pada dogma (Atmosuwito, 1989)

Manusia religious secara sederhana dapat diartikan manusia yang berhati nuranim taat, soleh dan patuh kepada ajaran agama. Jika religious ditambahkan kata islam maka tentu saja ini menjadi tegas tentang keyakinan yang berate Nurani dan sholeh menurut agama Islam. (Sitanggang, 2003)

Religious lebih melihat aspek yang ada didalam hati, sikap personal, riak getaran hati Nurani yang merupakan sekiti banyak misterius bagi orang lain, karena mendapatkan fasilitas jiwa "*du Coeur*" dalam arti cinta rasa yang mencakup identitas total termasuk rasio rasa manusiawi dalam pribadi manusia.(Mangunwijaya, 1988)

2. Pengerian Manaqib

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia manaqib adalah kisah kekeramatan para wali (manaqib Syeh Abdul Kadir Jailani). (Poerwadarminta 1990) sedangkan menurut istilah manaqib merupakan kisah cerita-cerita para wali yang biasanya dapat didengar para juru kunci makam, para keluarga dan murid-muridnya atau dibaca dalam sejara-sejarahinya. (Aceh 1989)

Kata Makaqib mempunyai sinonim dengan kata sejarah, Hikayat, Kisah dan Biografi. Manaqib merupakan sesuatu yang diketahui dan dikenal seseorang karena perbuatan dan perilaku yang terpuji, mempunyai sifat yang baik, yang mampu membawa perubahan, etika yang baik, kepribadian yang luhur, ksempurnaan yang tinggi dan agung, serta karomah yang agung di sisi Allah. (Al Ishaqy, 2010)

Dalam Bahasa arab manaqib berasal dari lafadz "*naqaba. Naqabu, Naqban*" yang berarti menyelidiki, melubangi, memeriksa dan menggali. (Al-Kaaf 2004)

Sedangkan yang dimaksud dengan manaqib secara istilah adalah memebaca kisah tentang orang-orang yang sholeh dengan tujuan untuk menaladani kisah mereka yaitu akhlak yang terpuji yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang indah.

PEMBAHASAN

A. Kegiatan Manaqib di Musholla Al Ikhlas

Musholla Al Ikhlas merupakan salah satu musholla yang ada di Desa Karangmlati Kecamatan Demak Kabupaten Demak tepatnya di depan Balai Desa Karangmlati. Jumlah kaum musholla Al Ikhlas sekitar 38 kepala keluarga yang mana secara administrasi wilayah kaum musholla Al Ikhlas tinggal di beberapa RT, yaitu di RT. 01, 02, 05 dan 06 yang semuanya masuk dalam wilayah RW. 02 Dukuh Karang Pandan.

Kegiatan Manaqib ada di musholla Al Ikhlas rutin dilaksanakan pada malam sebelas bulan Hijriyah. Kegiatan ini dipimpin oleh Kyai Sakdullah dia adalah Imam utama musholla Al Ikhlas. Kyai Sakdullah merupakan bagian dari tokoh agama yang ada di Desa Karangmlati.. Kegiatan Manaqib di musholla Al Ikhlas sudah berjalan sejak lama yang puluhan-puluh tahun, tetapi pelaksanaan pada saat ini berbeda dengan yang dahulu. Saat ini pelaksanaan manaqib selalu menggunakan ingkung yaitu ayamjago yang dimasak.

Kegiatan Manaqib di sini dibuat seperti jamiyah jadi warga iuran, setiap keluarga Rp10.000,- dari hasil iuran tersebut kemudian dibelikan ayam dan dimasak oleh salah satu pengurus. Program ini sudah berjalan sekitar 2 tahun semenjak kepengurusab takmir yang baru terbentuk. Kitab yang dibaca adalah jenis Manaqib Jawahirul ma'ani karya KH. Jauhari Umar dari Pasuruan Jawa Timur, kenapa yang dibaca ini karena membacanya cukup singkat kurang lebih setengah jam pembacaan sudah selesai. Kegiatan dilaksanakan setelah shalat Isya tetapi terkadang kalau ada hal-hal atau kegiatan tertentu pelaksanaan manaqib dilaksanakan setelah shalat magrib. Hampir 80% semua warga kaum musholla Al Ikhlas mengikuti kegiatan ini karena selepas kegiatan biasanya disampaikan juga pengumuman-pengumuman terkait kegiatan takmir dan juga laporan keuangan musholla Al-Ikhlas. Setiap bulan keuangan cukup transparan karena selalu ditempel di papan pengumuman bagaimana posisi keuangan saat ini.

Kyai Sakdullah dalam kegiatan Manaqib selalu memberi mauidoh hasanah atau nasehat-nasehat kepada kaum musholla Al Ikhlas untuk selalu meningkatkan iman dan taqwa, meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan juga sulthon Aulia Syekh Abdul Qodir Aljailani. Kita harus selalu berbuat kebaikan di manapun berada itu pesan yang sering disampaikan oleh Kyai Sakdullah sebelum melaksanakan pembacaan kitab Manaqib. Membaca atau mendengarkan kitab ini sangat besar manfaatnya diantaranya kita

menjadi ingat akan kematian dan kita menjadi semakin taat pada perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Di dalam kegiatan Manaqib juga ada makna kebersamaan dan juga sosial yang mana beberapa kaum membawa shodaqoh untuk dimakan bersama-sama di mushola, ada yang membawa pisang, nasi, ketan, buah, minuman dan lain sebagainya.

Kegiatan Manaqib ini sangat positif dilaksanakan di mushola Al Ikhlas. Kegiatan yang rutin dilaksanakan ini membuat masyarakat semakin taat dalam menjalankan perintah Allah SWT. Pembacaan Manaqib berjalan setengah jam kemudian ditambahi dengan Dzikir dan Tahlil sehingga berakhir sampai sekitar jam 21.00 WIB. setelah selesai membaca Manaqib kemudian sedakah dan juga ingkung dimakan bersama-sama. Kegiatan Manaqib ini juga ada puncaknya yaitu pada saat bulan Haul Syekh Abdul Qodir AlJailani yaitu pada bulan Rabiul Akhir tahun Hijiriyah, di sini sebagian besar warga membawa Ingkung jadi tidak hanya satu tapi bisa lebih dari 10 sampai 15 ingkung.

Fadhilah Membaca Manaqib

Menurut Kyai Sakdullah membaca kitab manqib sangat banyak sekali fadhilahnya diantaranya :

1. Mudah mendapat rizki
2. Cepat naik haji
3. Bisa mendapat ilmu laduni
4. Hajatnya cepat terkabul
5. Mudah mendapat jodoh
6. Mudah naik pangkat
7. Terbebas dari hutang, dll

Tentu saja membacanya harus rutin dan istiqomah

B. Nilai – Nilai Religius Dalam Kegiatan Manaqib

Begitu banyak pembelajaran yang dapat diambil dari kisah Syeh Abdul Qodir Aljailani yang terdapat dalam kitab manaqib. Banyak sekali teladan yang dapat kita ambil yang meningkatkan keimanan seseorang. Akhlak yang mulia, ilmu yang karomah, keteguhan hati dalam menjalankan syariat agama dan lain sebagainya. Dengan mendengar kitab manaqib ada energi spriritual untuk mendorong seseorang menjadi pribadi yang baik.

Kegiatan manaqib merupakan kegiatan yang positif bagi kaum musholla Al Ikhlas Desa Karangmlati. Kitab yang dibaca adalah kitab Manaqib Syeh

Abdul Qodir Aljailani Jawahirul Ma'ani karya KH. Jauhari Umar. Ada beberapa nilai religius yang dapat dipetik dari kegiatan manaqib di Musholla Al Ikhlas Desa Karangmlati.

Nilai religius adalah sikap dan perilaku yang baik yang terbentuk dari keadaan yang seseorang yang patuh dan tunduk pada ajaran agama. Nilai religius melekat pada pribadi seseorang. Adapun nilai-nilai religious yang dapat diteladani dari Manaqib Syekh Abdul Qodir Aljailani adalah sebagai berikut :

1. Kejujuran

Syekh Abdul Qodir Aljailani memiliki sifat jujur yang dapat diteladani oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus jujur dalam berbicara dan bertindak.

Perilaku kejujuran berdasarkan pada upaya untuk menjadikan diri pada orang yang dapat dipercaya. Kepercayaan yang diperoleh seseorang atas kejujurannya akan memberikan keuntungan baik dari segi keluarga maupun lingkungan sosial. Perilaku kejujuran moral tidak terbatas pada kata-kata, tetapi pada tindakan dan Tindakan, serta keadaan pikiran manusia.

Syekh Abdul Qodir Aljailani yang sejak kecil selalu di dikik untuk berbuat jujur. Itu merupakan pembelajaran yang dipetik dari keluarganya, terutama dari ibunya adalah menumbuhkan Syeh Abdul Qodir Aljailani menjadi orang yang mempunyai sifat jujur dan tidak suka berbohong. Dalam hal ini Syekh Abdul Qodir Aljailani menyatakan: *"Kejujuran adalah batas antara yang rahasia dan yang nyata. Ia muncul setelah derajat nubuwah sebagai realisasi Allah SWT"*

2. Dermawan

Orang yang demawan adalah orang yang senang jika dapat membantu mereka yang membutuhkan. Memiliki kepribadian yang dermawan membuat hidup lebih bahagia. Hal ini karena kemurahan hati memperluas dada. Orang yang dermawan secara sosial dicintai banyak orang sehingga orang tidak ragu untuk bergaul dengan mereka. Kebalikan dari dermawan adalah serakah. Orang serakah akan selalu gelisah.

Syekh Abdul Kodir Jairani memiliki kepribadian yang mulia dan, meskipun dia sendiri dalam kemiskinan, menyumbangkan kekayaannya kepada orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Dia

suka memberi makan. Setiap malam setelah kemakmuran di dunia, dia memerintahkan untuk memberi makan dan makan dengan tamu, duduk dengan yang lemah, bersabar dalam mencari ilmu, dan mempercayai orang yang bersumpah kepadanya.

Syekh Abdul Qodir Aljailani berkata :

“Semua amal akan diperiksa, maka di dalamnya tidak ditemukan hal yang lebih baik daripada memberi makanan,. Aku berharap seandainya dunia ada ditanganku, akan aku berikan ia kepada orang-orang kelaparan. Telapak tangan ini berlubang hingga tidak bisa menahan sesuatu. Jika datang kepadaku 1000 dinar, aku tidak akan menyimpannya”

3. Kesabaran

Syekh Abdul Qodir Aljailani merupakan sosok yang terkenal dengan pribadi yang sabar dalam berbagai hal. Sifat ini dapat diteladani oleh warga kaum mushola Al Ikhlas Desa Karangmlati, contohnya bagi orang tua sabar dalam menghadapi anaknya, sabar dengan kelaparan, kemiskinan dan perlakuan buruk dari orang-orang yang menentangnya. Selain itu juga sabar dalam kemewahan dan nafsu dunia.

Lihat ketika dia berkata:

“Aku tidak pernah melarikan diri dari perkataan Syekh dan kekerasan hatinya, namun aku bisu dan buta di hadapan mereka. Wabah-wabah datang kepada mereka, sementara aku diam tak bergerak. Sedangkan kau tidak sabar dan ingin ahagia. Tidak, kau tidak memiliki kemuliaan. Makna kesabaran adalah kau tidak mengadu kepada seseorang dan tidak pula menggantungkan pada suatu alasan. Maka, barang siapa menginginkan ilmu, hendaklah ia bersabar, arang siapa ingin mencapai cita-citanya, hendaklah bersabar hingga akhir. Dan jika tujuan tersebut adalah Allah Swt., dan keridhaan-Nya, itu tiada akhir”

4. Murah Hati

Kualitas lain yang bisa ditiru oleh Syekh Abdul Qodir Aljailani yaitu murah hati. Sifat ini dapat dipraktikkan bagi masyarakat dengan tidak melakukan sesuatu yang semena-mena terhadap penghuni lain atau merugikan orang lain.

Hamba Allah yang rendah hati adalah orang yang berjalan dengan tidak menyombongkan diri, tenang dan mantab dimuka bumi ini.

Andaikan kebetulan ia sedang diberi nikmat oleh Allah berupa nikmat kekayaan, maka ia tidak memamerkan kekayaannya kepada orang lain dengan tujuan mengagungkan dirinya semata. Andaikan ia diberi ilmu oleh Allah maka ia tidak sombong karena ilmunya. Andaikan ia berpangkat, maka pangkat dan jabatan tersebut tidak untuk merendahkan orang lain.

5. Taqwa dan Warak

Saat melakukan ibadah seperti shalat, Anda dapat secara sadar mempraktikkan ketakwaan. Sifat warak dapat dipraktekkan dengan tidak berpakaian berlebihan atau gaya hidup lainnya. Syekh Abdul Qodir Aljailani lahir di keluarga yang saleh. Keluarganya membimbingnya untuk selalu menjalankan ajaran agama dan berakhlak mulia. Seseorang melihat karakternya dalam perjalanan ke Bagdad. Dia tidak ingin berbohong meskipun tubuh dan jiwanya dalam bahaya. Selain itu waktu Syekh Abdul Qodir Aljailani belajar di Bagdad an menjadi ulama besar karakternya juga terlihat, Dia tidak tergoda oleh pengaruh duniawi.

6. Tanggung jawab

Sifat tanggung jawab dapat dicapai dengan memenuhi kewajiban sebanyak-banyaknya, misalnya saat melaksanakan tugas. Suatu ketika, Syekh Abdul Qodir Aljailani tidur di tempat peristirahatan Raja Kisra di Madain pada malam yang sangat dingin dia menerima ujian mimpi Junub, kemudian Dia segera pergi ke sungai untuk mandi, lalu dia tidur lagi kemudian mimpi lagi, dia langsung ke sungai dan mandi lagi, begitu seterusnya hingga 40 kali. Kemudian Dia naik ketembok untuk menjaga kesucian, dan karena khawatir akan junub lagi, kemudian sholat 2 rokaat.

SIMPULAN

Kitab *Manaqib Syekh Abdul Qadir Aljailani Jawahirul Ma'ani* karya KH Jauhari Umar merupakan karya tulis yang istimewa yang dibuat sebagai perwujudan mahabbah dan cinta kepada para waliulloh dan Nabi Muhammad SAW serta perwujudan rasa hormat dan taat kepada para ulama. Dalam kitab *manaqib Syekh Abdul Qadir Aljailani Jawahirul Ma'ani* karya KH Jauhari Umar mengandung nilai-nilai religius yaitu : Kejujuran, dermawan, sabar, murah hati, taqwa dan warak, serta tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Abu Bakar. 1989. *Pengantar Sejarah Sufi Dan Tasawuf*. Solo: Ramadhani.
- Adisusilo, Sutarjo, JR. 2012. *Pembelajaran Nilai Karakter*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Al Ishaqy, Achmad Asrori. 2010. *Apa Manaqib Itu?* Surabaya: Al Wafa.
- Al-Kaaf, Habib Abdullah Zaqy. 2004. *Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani : Perjalanan Spiritual Sulthonul Auliya'*. Bandung: Bandung.
- Atmosuwito, Subijantoro. 1989. *Perihal Sastra Dan Religiusitas Dalam Sastra*. Bandung: Sinar Baru.
- Fronzidi, Risieri. 2007. *Pengantar Filsafat Nilai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mangunwijaya, Y.B. 1988. *Sastra Dan Religiositas*. 2nd ed. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhaimin, Abdul Mujib. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Trigenda Karya.
- Narbuko, Cholid. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rianse, Usman. 2012. *Metodologi Sosial Dan Ekonomi*. Bandung: Alfabeta.
- Rosyadi, Khoiron. 2004. *Pendidikan Profetik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sitanggang, S.R.H, Joko Adi S., dan Maini Trina J. 2003. *Religiusitas Dalam Tiga Novel Modern*. Jakarta: Pudst Bahasa.

Menyatukan yang Berbeda: Upaya Pondok Pesantren La Royba dalam Membangun Kerukunan Beragama

Vanida Wasfa, Elyna Hidayati, Aulia Nur Jannah, Naila Ulya, Tassya Elvitasari, Itakhillah Rezki Nashira, dan Irzum Farihah

Institut Agama Islam Negeri Kudus

vaneedawasfa@gmail.com, elynahidayati90@gmail.com,

auliyajepara14@gmail.com, nailauliyashofa@gmail.com,

tassyaelvitasari@gmail.com, rezkyeppeo@gmail.com, irzumf@yahoo.co.id

Abstract

This journal reviews about uniting the different efforts of the La Royba Islamic Boarding School in building religious harmony at the La Royba Bali Bina Insani Islamic Boarding School. This study aims to build harmony in the midst of diversity between Islamic boarding schools and the Balinese Bina Insani community, who are predominantly Hindu, by teaching tolerance to students so that they always respect those who are different. This study uses a qualitative research method with a phenomenological approach, and the data obtained through interviews and direct observation as well as through social media. So that we can find out the tolerance between the La Royba Islamic boarding school and the surrounding community who are very harmonious.

Keywords: La Royba Islamic Boarding School, Harmony, Tolerance

Abstrak

Jurnal ini mengulas tentang menyatukan yang berbeda upaya Pondok Pesantren La Royba dalam membangun kerukunan beragama di Pondok Pesantren La Royba Bali Bina Insani. Penelitian ini bertujuan untuk membangun kerukunan di tengah keberagaman Antara pondok pesantren dengan masyarakat Bali Bina Insani yang mayoritas beragama Hindu, dengan mengajarkan toleransi kepada santri agar selalu menghormati yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dan data yang didapatkan melalui wawancara dan observasi secara langsung serta melalui media sosial. Sehingga dapat mengetahui toleransi Antara pondok pesantren La Royba dengan masyarakat sekitar yang sangat rukun.

Kata Kunci: Pondok Pesantren La Royba, Kerukunan, Toleransi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki pluralitas penduduk yang tinggi, beraneka ragam agama dan kepercayaan, suku, bahasa, etnis dan budaya. Keragaman budaya (multikultural) merupakan peristiwa alami sebab bertemunya berbagai budaya dan berinteraksinya berbagai individu serta kelompok dengan membawa perilaku budaya masing-masing. Hal ini menyebabkan rawan adanya perselisihan antar masyarakat satu dengan yang lain. Konflik berbasis kekerasan di Indonesia seringkali berakhir menjadi bencana kekerasan yang cenderung berkembang dan meluas. Namun masalah ini dapat diatasi dengan beberapa cara, antara lain yaitu sikap toleransi, khususnya toleransi antar umat beragama.(Akhmadi 2019) Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam hal persaudaraan sesama manusia. Jika pemaknaan ini dijadikan pegangan bagi masyarakat Indonesia, maka keharmonisan dan toleransi adalah hal ideal yang didambakan oleh masyarakat Indonesia. Eksistensi kerukunan ini sangat penting, di samping karena merupakan keniscayaan dalam hal perlindungan hak asasi manusia (HAM), juga karena kerukunan ini menjadi syarat terwujudnya integrasi nasional (Rusydi and Zolehah 2018).

Semua agama pada dasarnya mengajarkan toleransi kepada pemeluknya. Begitu pula agama Islam yang menjunjung tinggi toleransi. Konsep toleransi dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan yang ada, karena hal tersebut termasuk persoalan akidah dan keimanan yang harus selalu dijaga oleh umat Islam. Toleransi dalam Islam juga bukan membenarkan agama lain dan cara ibadah umat agama lain, karena dalam Islam tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Toleransi dalam Islam menyangkut urusan muamalah dan kehidupan sosial bermasyarakat (Bakar, Sultan, and Riau 2015).

Ada beberapa macam upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan dengan umat agama lain. Mulai dari faktor komunikasi yang memegang peranan penting dalam hal kerukunan. Melalui kajian komunikasi antar budaya dan agama diharapkan dapat terbentuk adanya sikap saling percaya dan saling menghormati antar pemeluk agama dan sebagai bangsa yang berbudaya dalam rangka memperkokoh hidup berdampingan secara damai, serta dapat menerima perbedaan budaya dan agama sebagai berkah daripada bencana dan melakukan upaya damai dengan mereduksi perilaku agresif dan menciptakan forum-forum dialog untuk mencapai kesepahaman (Aktualisasi 2011).

Untuk mengakomodasi pelayanan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, pemerintah juga membentuk suatu lembaga untuk menjaga harmoni kerukunan beragama yaitu dengan mendirikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan bersama. Masyarakat harus hidup dalam bingkai kebhinekaan yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan daripada mempertentangkan perbedaan ideologi atau perbedaan keyakinan (Wiranata 2018).

Dalam mewujudkan keharmonisan hidup berbangsa dan beragama, maka dibutuhkan moderasi beragama yaitu sikap beragama yang sedang atau tengah-tengah, tidak mengklaim diri atau kelompoknya yang paling benar hingga menyalahkan kelompok agama yang lain, tidak menggunakan paksaan apalagi kekerasan, dan netral terhadap kepentingan politik. Moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, dan kebangsaan, bukan pada asas keimanan (Jamrah 2017).

Peranan pemerintah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama menjadi sangat penting seiring dengan kuatnya pengaruh globalisasi, perubahan sosial budaya, juga kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang di masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan organisasi-organisasi militan yang gigih menjaga kemurnian ajaran agama dan budaya masyarakat setempat yang sering berbenturan dengan kelompok yang menjunjung tinggi kebebasan dalam kehidupan beragama (kelompok liberal). Namun untuk mendamaikan dua kubu yang berlawanan ini, pemerintah mendapat dukungan dari organisasi-organisasi penengah yang moderat seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (Rusydi and Zolehah 2018). Toleransi yang dibangun oleh Santri Lasem dengan orang Tionghoa juga terjalin dengan baik. Salah satunya yaitu dengan kenyataan sosial berupa pernikahan silang antara etnis Cina dan Jawa (Atabik 2016).

Fokus penelitian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain yaitu terdapat pada upaya-upaya Pondok Pesantren La Royba Bali Bina Insani untuk menyatukan yang berbeda dan membangun keharmonisan dengan pemeluk agama lain, yang mana Pondok Pesantren La Royba Bali Bina Insani termasuk minoritas namun bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk masyarakat sekitar dengan kegiatan kemanusiaan dan beberapa upaya lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian berada di Pondok Pesantren La Royba Bali Bina Insani tepatnya di Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali. Informan penelitian adalah asatidz dan santri Pondok Pesantren La Royba Bali Bina Insani yang berjumlah 4 orang. Data yang didapatkan melalui wawancara dan observasi secara langsung serta melalui media sosialnya (website dan whatsapp). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil fokus kajian mengenai bagaimana upaya Pondok Pesantren La Royba Bali Bina Insani dalam membangun kerukunan antar umat beragama di tengah keragaman. Sumber utamanya berasal dari informan, sedangkan sumber pendukung berasal dari e-journal maupun peristiwa lain yang berkaitan. Aspek-aspek yang ditanyakan dalam penelitian ini adalah seputar kapan didirikannya Pondok Pesantren La Royba Bali Bina Insani, bagaimana hubungan Pondok Pesantren Bali Bina Insani dengan masyarakat sekitar yang beragama Hindu, kegiatan apa saja yang pernah dilakukan oleh Pondok Pesantren La Royba Bali Bina Insani dengan masyarakat Hindu, bagaimana upaya asatidz dalam mensosialisasikan terkait dengan kerukunan kepada para santri, serta bagaimana sikap para santri terhadap masyarakat Hindu.

KAJIAN LITERATUR

Solidaritas menurut Emile Durkheim adalah perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Kalau orang saling percaya maka mereka akan menjadi satu atau menjadi persahabatan, menjadi saling hormat-menghormati, menjadi terdorong untuk bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan sesamanya (Lawang 2015).

Talcott Parsons terkenal dengan empat imperatif fungsional bagi sistem "tindakan" yaitu skema AGIL. AGIL berfungsi sebagai suatu aktivitas yang di arahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem. Imperatif fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons diantaranya adalah (A) *adaptation*, (G) *goal*, (I) *integration* dan (L) *latency* atau pemeliharaan pola.

- a. *Adaptation* (Adaptasi) merupakan sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.
- b. *Goal* (Tujuan) merupakan sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya.

- c. *Integration* (Integrasi) merupakan sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut (A,G,I).
- d. *Latency* (pemeliharaan pola) merupakan sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.

Parsons mendesain skema AGIL agar dapat digunakan pada semua tingkatan sistem teoritisnya. Keempat asumsi Parsons tentang AGIL itu merupakan peralatan analisis untuk menganalisis kehidupan nyata (Alhogbi 2017). Menurut M. Amin Abdullah setidaknya ada lima hal yang diharapkan dari dialog antar umat beragama:

- a. Saling mengenal (*al-ta'aruf*). Sering kita jumpai fenomena saling tidak mengenal antar tetangga dikarenakan perbedaan agama. Padahal, saling tidak mengenal merupakan sumber kekakuan. Fenomena seperti ini sangat rawan sekali timbulnya prasangka buruk sehingga mudah mendapat provokasi dari luar maupun melalui media sosial yang tidak ramah terhadap golongan agama lain.
- b. Saling memahami (*al-tafahum*). Setelah saling mengenal sebagai pintu awal dialog antar umat beragama, tahap berikutnya yaitu saling memahami. Saling memahami di sini dapat diartikan sebagai keinginan untuk memahami orang atau kelompok lain secara langsung. Hal ini ditimbulkan dari rasa tidak puas dengan metode perolehan informasi melalui lisan, artikel, maupun buku yang mengandung motif kebencian pengarangnya. Oleh sebab itu saling memahami di sini mutlak diperlukan, apa lagi jika kedamaian dan keharmonisan yang menjadi tujuannya.
- c. Saling mengasihi (*al-Tarahum*). Hampir mustahil rasa saling mengasihi bisa muncul apabila kedua proses sebelumnya tidak dilalui. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya syiar kebencian antar agama, terkhusus di daerah rawan konflik. Padahal, saling mengasihi tidak sebatas pada intern saja namun juga ekstern umat beragama.
- d. Saling bersinergi membangun solidaritas (*al-tadhamun*). Solidaritas merupakan kunci utama dari perdamaian sejati. Terlepas dari perbedaan agama, seharusnya sebagai saudara sebangsa dan setanah air rasa tidak tega akan muncul apabila terjadi tekanan, bencana, dan penindasan oleh siapapun itu.

- e. Hidup berdampingan secara damai, tanpa konflik (*al-ta'ayus al-silmi*). Apabila keempat tahapan di atas dapat terlalui, maka bisa dipastikan akan terbentuklah sebuah modal kultural dan sosial yang tidak ternilai harganya. Pergolakan politik di Arab dapat menjadi bukti konkrit bahwa mendialogkan kelompok keagamaan bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu budaya hidup berdampingan dari jalinan modal kultural dan sosial ini patut dijaga kelestariannya.

PEMBAHASAN

1. Profil dan Sejarah Pondok Pesantren La Royba Bali Bina Insani

Pondok Pesantren La Royba Bali Bina Insani berdiri pada tanggal 27 Oktober 1991, merupakan pondok pesantren yang berdiri di tengah-tengah mayoritas masyarakat yang beragama Hindu. Dulunya cita-cita pendiri Pondok Pesantren La Royba Bali Bina Insani, Ayahanda K. H Ketut Imaduddin ingin mendirikan sebuah yayasan sosial (panti asuhan). Kemudian, saat K. H Ketut Imaduddin mengisi pengajian di salah satu Masjid Denpasar, beliau mengisi pengajian tentang anak yatim dan orang yang tidak mampu, kemudian ada salah satu jamaah yang bernama Hj. Sofiyah mengusulkan agar apa yang disampaikan oleh K. H Ketut Imaduddin tidak hanya teori saja, melainkan ada praktik nyata. Atas usulan tersebut Hj. Sofiyah siap mewakafkan tanah tempat tinggalnya. Setelah semuanya tuntas, maka dicarilah anak-anak yatim di Bali, dan mendapatkan 7 orang anak.

Anak-anak yatim tersebut dididik dengan baik, dan seiring berjalannya waktu semakin berkembang pesat sampai tidak cukup ruang untuk menampung anak yatim lagi. Karena K. H Ketut Imaduddin merupakan orang asli Bali dan cara beliau bergaul dengan masyarakat sekitar sangat baik, maka beliau sangat dihormati oleh masyarakat muslim maupun non muslim, sehingga banyak orang yang mengusulkan agar didirikan pondok pesantren, dan yang pertama berdiri adalah MTs Bali Bina Insani pada tahun 1997, kemudian MA Bali Bina Insani berdiri pada tahun 2001. Memang pada tahun 1991-1996 berada di daerah Sembung, kemudian pada tahun 1997 pindah ke daerah Kerambitan. Berdirinya pondok dan sekolah Bali Bina Insani merupakan saran dari saudara yang beragama Hindu. Karena Pondok Pesantren La Royba Bali Bina Insani berdiri ditengah-tengah masyarakat orang yang beragama Hindu, maka kebingungan dalam mencari guru untuk mengajar. Kemudian masyarakat Hindu yang sudah menjadi guru di sekolah umum lainnya, dengan

suka rela menyempatkan waktu untuk mengajar di sekolah Bali Bina Insani dengan mengampu mata pelajaran umum seperti bahasa Bali, matematika, sains dan lainnya. Diantara guru Muslim dan Hindu dalam posisi strategis tidak pernah dibedakan, semuanya sama. Namun, dalam hal kepemimpinan, guru non muslim tidak disarankan menjadi kepala sekolah, kedudukan tertinggi seorang guru non muslim hanya di wakil kepala sekolah. Maka dari itu, lahirnya Pondok Pesantren Bali Bina Insani sudah diwarnai dengan toleransi yang tinggi.

Nama daerah Karimbitan menjadi sangat terkenal karena keberadaan pondok pesantren Bali Bina Insani yang sering dikunjungi oleh pejabat, menteri-menteri luar negeri maupun dalam negeri. Kedatangan beliau hanya ingin melihat toleransi yang dibangun oleh Pondok Pesantren Bali Bina Insani. Ajaran dari ayahanda K. H Ketut Imaduddin tidak boleh membedakan antara masyarakat Muslim dengan Hindu, yang dikedepankan adalah persamaannya, karena cita-cita didirikannya Pondok Pesantren La Royba Bali Bina Insani sebagai wadah untuk mencerdaskan anak bangsa (Observasi, 15 Maret 2022).

2. Upaya Pondok Pesantren dalam Menyatukan yang Berbeda

Dalam toleransi adalah sesuatu pendidikan yang akan mencetak generasi muda untuk mempunyai kearifan lokal dalam negara Indonesia. Pada satu sisi akan lebih indah jika menerapkan kekuatan sosial satu sama lain yang akan bersinergi dan saling bekerja sama untuk membangun bangsa. Pondok pesantren Bali Bina Insani merupakan pondok yang sangat kuat dengan toleransinya, seperti:

a. Membangun Harmoni Antar Warga

Hubungan pondok pesantren la rayba dengan masyarakat Hindu ini adalah sangat mengedepankan toleransi dengan masyarakat sekitar, yang mana para santri di ajarkan tasamuh sebagai salah satu syariat dalam agama, dengan melafalkan “lakum dinukum waliyadin” (untukmu agamamu dan untukku agamaku), tidak membuka perbedaan yang berarti selalu sama dengan tujuan saling menghormati bagi yang beragama islam dan Hindu. Contohnya saja santri wajib cium tangan kepada para guru dari yang Islam atau Hindu, kemudian hal ini diamalkan oleh masyarakat Hindu di rumahnya yang mana cium tangan ini tidak ada dalam keluarga Hindu, namun mereka sangat menjunjung tinggi toleransi sehingga diajarkan kepada keluarganya di rumah.

Kemudian bentuk hubungan yang lain adalah ketika ada salah satu guru beragama Hindu yang mengajar di pondok pesantren mengatakan bahwa selama mereka mengajar di Bina Insani tidak ada diskriminasi dari para pengajar muslim ataupun dari para santri, mereka saling menghargai dan berinteraksi dengan biasa dan tidak membeda-bedakan. Salah satu bentuk hubungan toleransi pondok la rayba yang diterapkan dengan masyarakat Hindu sekitar adalah ketika hari raya Islam atau acara keagamaan Islam lain, para guru non muslim libur dan tidak mengajar selayaknya guru lain serta ada juga masyarakat sekitar yang hadir untuk membantu, dan sebaliknya jika terdapat hari-hari besar Hindu seperti hari raya Nyepi para santri dan guru muslim lainnya mereka juga membuat hari libur untuk menghormati para guru non muslim dan masyarakat Hindu sekitar. Toleransi selanjutnya yang ada di pondok la rayba para guru tidak diwajibkan dalam berpakaian contoh saja guru perempuan non muslim tidak harus berjilbab ketika mengajar namun tetap menggunakan busana yang sopan.

H. Ketut Imaduddin Jamal sendiri selaku Ketua Yayasan, mengatakan bahwa hadirnya pondok pesantren ini memiliki tujuan untuk membentuk generasi yang sekarang dan yang akan datang dengan penguatan karakter Islam. Serta menunjukkan bahwa Islam sebagai Rahmatan lil alamin melalui berbagai kegiatan aktivitas pengabdian kepada masyarakat dengan tidak adanya diskriminasi dan mengutamakan kebersamaan tanpa memikirkan perbedaan dengan menjalin hubungan antar pondok pesantren dengan masyarakat hindu yang saling menghormati dan memiliki toleransi yang tinggi.

Salah satu guru non muslim yang mengajar di sana mengatakan selama mereka mengajar di Bina Insani tidak ada perbedaan dari para pengajar muslim ataupun dari para santri, mereka saling menghargai dan berinteraksi dengan baik. Salah satunya lagi bentuk toleransi yang diterapkan dengan masyarakat sekitar yaitu ketika hari Raya umat Islam atau acara-acara Islam lainnya para guru non muslim ikut libur dan tidak mengajar selayaknya guru lain serta ada juga masyarakat sekitar yang hadir untuk membantu, sebaliknya jika terdapat hari-hari besar Hindu seperti hari Raya Nyepi para santri dan guru muslim lainnya mereka juga membuat hari libur untuk menghormati para guru non muslim dan masyarakat sekitar. "Jadi itu merupakan cara kami untuk menghormati saudara Hindu yang sedang merayakan hari besar keagamaan" ungkapnya. I Ketut Djamal menegaskan toleransi inilah yang begitu penting untuk dilakukan untuk tetap menjaga kedamaian di bumi ini. Apalagi, tidak pernah ada konflik atau penolakan dari warga setempat terkait keberadaan ponpes ini dari sejak berdiri pada 1991 silam. "Ini karena rasa kebersamaan kita dan kita rasa ini adalah keluarga juga meskipun berbeda" tegasnya.

Dalam keseharian mereka selalu mengedepankan toleransi terhadap agama lain. Terutama kepada Guru Hindu dan juga masyarakat sekitar. Selain itu ponpes juga membiasakan diri untuk menerapkan setidaknya tiga Bahasa yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Arab hingga Bahasa Inggris. Sesuai dengan namanya, Pondok Pesantren Bina Insani fokus membina insan-insan muda untuk menjadi manusia berintegritas. Keberagaman di ponpes ini bukan merupakan suatu penghalang, justru dianggap sebagai sebuah keindahan.

Menurut Durkheim untuk sentral dari eksistensi sosial adalah masalah keteraturan yang bagaimana mencapai solidaritas sosial dalam masyarakat. Masyarakat dengan tipe yang berbeda-beda mencapai solidaritas sosial dengan cara yang berbeda pula. Pada masyarakat yang modern, dimana manusia hidup dengan cara yang hampir sama satu sama lain yaitu solidaritas dicapai secara kurang lebih otomatis. Emile Durkheim mengambil pendekatan kolektivitas dalam pemahaman yang mengenai masyarakat yang melibatkan berbagai bentuk solidaritas. Solidaritas dalam berbagai lapisan masyarakat bekerja sebagai perekat sosial. Dalam hal ini dapat berupa nilai, adat istiadat dan kepercayaan yang bisa dianut bersama dari anggota masyarakat.

b. Sosialisasi Pesantren Kepada Santri

Dapat kita ketahui bahwasanya ustadz adalah berperan penting dalam kehidupan santri-santri, salah satunya mengajarkan bagaimana agar bisa hidup rukun di tengah masyarakat hindu. Salah satunya mengajarkan toleransi, toleransi adalah sebuah sikap untuk saling menghargai, menghormati, membiarkan pendapat pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Para ustadz mengajarkan toleransi kepada para murid agar menghormati mereka walaupun berbeda agama, sebagai guru yang berada di Pondok Pesantren La Royba adalah beragama Hindu tetapi guru tersebut tidak diwajibkan untuk menggunakan atribut agama islam seperti kerudung atau kopia akan tetapi hanya menggunakan pakaian sopan saja. Salah satu guru non-muslim yang mengajar di sana mengatakan selama mereka mengajar di Bina Insani tidak ada perbedaan dari para pengajar muslim atau pun dari para santri, mereka saling menghargai dan berinteraksi dengan baik.

Tidak pernah bosan para asatidz mengingatkan para santri untuk saling menghargai dengan sesama manusia, Para asatidz memberikan pengetahuan kepada para santri dengan cara mensosialisasikan tentang kerukunan dan toleransi antar umat beragama, agar para santri mempunyai rasa toleran dalam menghadapi masyarakat yang mayoritas beragama Hindu. Dan dapat mewujudkan sikap saling menghormati kepada sesama pemeluk beragama di lingkup Bina Insani. Maka sebab itu pentingnya sikap toleransi agar para santri mengerti bahwa perbedaan dan saling menghormati itu menciptakan harmoni yang sangat indah dan damai.

Sementara menurut M. Amin Abdullah ada lima hal yang diharapkan untuk berdialog antar umat beragama: 1) saling mengenal, 2) saling memahami, 3) saling mengasihi, 4) saling bersinergi membangun solidaritas, 5) hidup berdampingan secara damai tanpa konflik. Jika santri bisa melalui lima tahapan ini maka bisa terbentuklah modal kultural yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu tidak mudah hidup berdampingan yang melibatkan perbedaan Antara budaya, agama dan sosial patut dijaga perdamaian dan kelestariannya.

c. Kegiatan Kemanusiaan

Toleransi bukan hanya sekedar tidak menyakiti kelompok atau agama lain namun juga dengan membantu sesama saling dan bekerja sama seperti dalam Pondok pesantren La Royba. Pondok pesantren ini termasuk dari salah satu pondok pesantren yang sangat menjunjung tinggi toleransi sebab tempatnya yang berdampingan dengan masyarakat Hindu. Pondok pesantren dan masyarakat di Desa Meliling Bali ini patut di contoh seluruh umat beragama sebab toleransinya yang tinggi, pondok pesantren ini juga sering menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian antar sesama.

Salah satu kegiatan Pondok Pesantren yang merajut harmoni bersama agama lain yaitu yang *pertama* pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi hampir seluruh dunia, Indonesia termasuk salah satu negara dengan penyebaran virus covid19 tercepat sebab itu pemerintah melarang kerumunan dan diberlakukannya PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang menjadikan masyarakat kesulitan dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Termasuk pada masyarakat Bali juga terdampak oleh virus tersebut

sehingga beberapa masyarakat kesulitan dalam perekonomian sehingga salah satu masyarakat saling bersimpati dan berempati untuk membantu masyarakat yang kesulitan. Guna mempererat silaturahmi dan membantu antar masyarakat, pondok pesantren Bina Bali Insani La Royba berbagi makanan dan bantuan berupa sembako kepada warga sekitar. Seluruh pengurus pondok pesantren baik pembina, pimpinan Yayasan, para guru, hingga para santrinya ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk membagikan makanan dan sembako kepada warga sekitar yang kurang mampu termasuk terhadap umat Hindu setempat.

Salah satu pengurus dari pondok pesantren La Royba memang menyatakan bahwa “berdirinya pondok pesantren ini tak lepas dari peran masyarakat Hindu sekitar. Sebab hampir setiap hari para pengurus dan santri saling berbaur dengan masyarakat Hindu sekitar, yang penting saling menghormati dan memupuk toleransi agar tidak ada konflik antar agama. Serta sudah sepatutnya kita sebagai manusia saling membantu meskipun tidak dalam jumlah yang besar diharapkan ini bisa sedikit meringankan kondisi ekonomi masyarakat sekitar”.

Yang *kedua*, yaitu kebersamaan saat salah satu ada acara, misalnya ketika ada acara adat Hindu di daerah sekitar pondok pesantren para pengurus pondok dan para santri akan datang dan ikut membantu dan juga sebaliknya ketika pondok pesantren sedang melakukan suatu kegiatan dan membutuhkan bantuan dari masyarakat Hindu, masyarakat juga dengan senang hati akan membantu.

Salah satu pengajar di Yayasan Bali Bina Insani mengungkapkan “selain di lingkungan sekolah, saat Hari Raya umat Islam warga sekitar akan diberikan makanan seperti daging kambing dan sebagainya dan jika yayasan Bali Bina Insani mengadakan acara buka puasa bersama, masyarakat Hindu sekitar juga akan diundang dalam kegiatan buka bersama”.

Bentuk kerukunan umat beragama di pondok pesantren bukan hanya itu namun juga saat masyarakat sekitar yang beragama Hindu saat sedang melakukan acara adat seperti pengabenan atau odalan, perwakilan pondok pasti berbaur dengan masyarakat sekitar untuk membantu begitupun sebaliknya. Keharmonisan antar umat agama ini terus berlangsung dan sudah menjadi kebiasaan pondok pesantren dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia.

Untuk mencapai keharmonisan dalam menjalin toleransi ini tidak mudah, dalam Fungsionalisme struktural menurut Talcott Parsons apabila terjadi ketidak fungsian salah satu bagian, penyimpangan dan ketegangan, maka akan terselesaikan dengan sendirinya melalui adaptasi dan berjalannya proses pelembagaan dengan rentan waktu yang panjang. Teori ini sangat berkesinambungan dengan bentuk kerukunan umat beragama Pondok Pesantren Bali Bina Insani dengan masyarakat sekitar, dalam masa awal pembangunan pondok pesantren pasti terjadi konflik baik kecil maupun besar namun dengan berjalannya waktu masyarakat dan para jajarannya pondok pesantren saling beradaptasi satu sama lain sehingga menimbulkan keharmonisan dalam kerukunan umat beragama.

SIMPULAN

Pondok Pesantren La Royba Bali Bina Insani merupakan pondok pesantren yang berdiri di tengah-tengah mayoritas masyarakat yang beragama Hindu, serta memiliki hubungan baik dengan masyarakat Hindu yang mengedepankan toleransi dengan masyarakat sekitar melalui ajaran tasamuh yang dilakukan oleh santri dengan tujuan saling menghormati bagi agama Islam dan Hindu.

Tidak ada perbedaan diantara mereka karena pondok ini berupaya untuk menyatukan yang berbeda di tengah keragaman yang ada, dengan membangun harmoni antar warga melalui kegiatan kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada perbedaan antara para santri dan warga Hindu, mereka saling menghormati pada acara-acara yang ada sehingga keharmonisan antar umat beragama ini terus berlangsung dan menjadi kebiasaan warga pondok pesantren dan masyarakat Hindu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, Agus. 2019. "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity." *Jurnal Diklat Keagamaan* 13 (2): 45–55.
- Aktualisasi, Konsep D A N. 2011. "Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama" 9 (2): 127–36.
- Alhogbi, Basma G. 2017. "Talcott Parsons: Teori Struktural Fungsional." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 21–25.
- Atabik, Ahmad. 2016. "Harmonisasi Kerukunan Antar Etnis dan Penganut Agama di Lasem." *Fikrah* 4 (1): 36. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1511>.
- Bakar, Abu, 2015. "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, *103.193.19.206* 7 (2): 123–31.
- Jamrah, Suryan A. 2017. "Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam." *Jurnal Ushuluddin* 23 (2): 185–200.
- Lawang. 2015. "Solidaritas Komunitas Waria dan Respon Masyarakat Di Kelurahan Penjaringansari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya." *Uin Sunan Ampel Surabaya* 14: 27–39.
- Rusydi, Ibnu, dan Siti Zolehah. 2018. "Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian." *Journal for Islamic Studies* 1 (1): 170–81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161580>.
- Wiranata, Irawan Hadi. 2018. "Kerukunan Antar Umat Beragama Sebagai Dasar City" 3: 64–73.

**Model of Islamic Education with Nationality Insight
for Terrorist Prisoners in Class II B Prisons,
Lamongan Regency**

Nur Fitrotul Islamiyah dan Winarto Eka Wahyudi

Universitas Islam Lamongan
ekawahyudi1926@unisla.ac.id

Abstrak

Artikel ini hendak berargumen bahwa penanganan pelaku terorisme tidak hanya berhenti pada level penindakan, namun juga perlu upaya pembinaan dan Pendidikan Islam. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa terorisme merupakan sebuah paham kekerasan, yang dapat dihilangkan atau minimal diminimalisir melalui upaya perubahan kognitif melalui Pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Lamongan. Kajian ini berhasil menemukan bahwa upaya Pendidikan Islam berwawasan kebangsaan pada napi teroris harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis, dialogis dan mengarahkan mereka kepada komitmen terhadap eksistensi negara Indonesia. Disamping itu, model Pendidikan Islam pada napi teroris tak hanya dilakukan dengan upaya pembinaan yang bersifat pengajaran saja, namun juga diimbangi dengan cara-cara persuasif yang mengedepankan pendekatan sosial dan psikologi untuk mengarahkan mereka pada kesadaran dalam beragama dan berbangsa yang baik secara bersamaan.

Kata Kunci: *Model, Pendidikan Islam, wawasan kebangsaan, Napi, Teroris.*

Abstract

This article would like to argue that the handling of terrorists does not only stop at the level of prosecution but also requires efforts to develop and provide Islamic education. This is based on the fact that terrorism is an ideology of violence that can be eliminated or minimized through cognitive change efforts through Islamic education. This study uses a qualitative method with a case study approach at the Class II B Correctional Institution in Lamongan Regency. This study succeeded in finding that Islamic education efforts with a national perspective on terrorist prisoners must be carried out with a humanist, dialogical approach and direct them to a commitment to the existence of the Indonesian state. In addition, the Islamic education model for terrorist prisoners is not only carried out with coaching efforts that are teaching but also balanced with compelling ways that prioritize social and psychological approaches to direct them to awareness of religion and a good nation at the same time.

Keywords: *Model, Islamic education, national insigh, terrorist convict*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar, dengan maraknya aksi teror bom di sejumlah tempat. Tersangka teroris yang berhasil diamankan belum cukup memutus jaringan teroris di Indonesia. Berbagai motivasi yang melatarbelakangi semakin membesarnya jaringan teroris sangat beragam, diantaranya dari hasil observasi dengan Heru selaku pamong dalam bidang pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan menghasilkan informasi menarik. Salah satunya ketika dilakukan penggalian informasi kepada narapidana teroris terkait motif bergabung dengan jaringan radikal ialah karena faktor ekonomi.

Dari 250 orang narapidana diantaranya dua orang teroris tersebut berasal dari wilayah Aceh yang pada saat itu berhasil diamankan sebelum berangkat ke Thailand. Memahami motif bergabungnya narapidana teroris dari Aceh dalam jaringan teroris adalah faktor ekonomi maka pamong Lapas melakukan pendekatan khusus pada napi teroris tersebut. Diantara pendekatan yang dilakukan oleh pamong kepada napi teroris selain memberikan materi terkait materi keislaman adalah pendekatan personal yakni memenuhi beberapa kebutuhan pribadi napi teroris seperti makanan, baju, uang saku (Wawancara, 2021). Meskipun terkesan melakukan tindakan gratifikasi tetapi motif utama pemberian barang tersebut agar napi teroris memunculkan minat untuk menerima materi pembinaan. Hal ini sangat mempengaruhi berhasilnya proses pembinaan. Tidak salah jika Lapas kelas IIB Lamongan menjadi contoh dalam proses pembinaan narapidana teroris.

Pelaksanaan pembinaan narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan terdiri dari pembinaan kemandirian, keislaman dan kebangsaan. Tentunya segala macam bentuk pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan bertujuan agar para teroris kembali memiliki kesadaran kewarganegaraan yang baik serta tidak kembali melakukan aksi teror. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana teroris Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan didukung melalui kerja sama dengan beberapa pihak antara lain Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) wilayah Jawa Timur, TNI, Polri dan Lingkar perdamaian. Pelaksanaan pembinaan di Lapas kelas IIB Lamongan menggunakan pendekatan-pendekatan yang sangat *soft*, sehingga penyampaian materi terkait bagaimana Islam itu memberi rasa aman dan tenteram di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses mengembalikan orientasi radikal menjadi nasionalis disebut dengan “Deradikalisasi”.

Pembinaan kemandirian yang dilakukan berupa pembinaan keterampilan yang bersifat produktif seperti produksi barang dan pertanian hidroponik, tujuan diadakannya kegiatan semacam ini untuk menstabilkan kondisi psikologis narapidana teroris. Selain kegiatan kemandirian terdapat pembinaan dari pihak eksternal yang meliputi materi wawasan kebangsaan (Observasi, 2021), materi Disrupsi Belajar Agama (Observasi, 2021), dan pemberian motivasi kepada narapidana teroris supaya semangat menjalani kehidupan yang nasionalis (Observasi, 2021).

Proses pembinaan merupakan bentuk lain dari pendidikan. Dalam proses pendidikan Islam suatu pendekatan dan metode mempunyai persamaan yang sangat baik guna mencapai sebuah tujuan yang baik pula (Nurjannah, 2015). Pendidikan Islam bukan hanya soal transfer keilmuan saja tetapi di dalamnya terdapat nilai-nilai tertentu yang bisa merubah seseorang menjadi baik secara pengetahuan maupun tingkah lakunya. Di dalam proses pendidikan khususnya di dalam pendidikan Islam dalam hal ini memiliki arti yang sangat luas. Dari segi pengetahuan itu tidak terbatas pada satu sudut pandang, tetapi di dalamnya banyak ketrampilan-ketrampilan sebagai pendukung dalam proses pendidikan Islam tersebut (Sukiman, 2008).

Kajian tentang Pendidikan Islam pada teroris ini, misalnya pernah dilakukan oleh Rachmayanti yang mengkaji tentang pembinaan teroris pada Lapas yang memiliki tingkat sekuritas tinggi. Dalam kajiannya ini, ditemukan bahwa pengamanan teroris melalui *super maximum security* dirancang untuk membatasi pergerakan narapidana teroris yang beresiko tinggi, bahkan dilakukan untuk membatasi komunikasi antara teroris satu sama lain, bahkan dengan pegawai Lapas. Selain itu, implementasi keamanan tipe *super maximum security* ini dirancang untuk memberikan keamanan yang super ketat dengan terpisahnya narapidana teroris di dalam sel (*one man one sel*) (Rachmayanthi, 2020).

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Nurhuda yang membahas tentang proses deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Semarang. Dalam risetnya tersebut disimpulkan bahwa upaya deradikalisasi dilakukan sebagai penangkalan dari paham radikal, yang didalamnya memuat pembinaan-pembinaan terkait dampak dari paham tersebut. Deradikalisasi di lapas kedungpane memiliki 2 program yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian (Febriansyah, dkk, 2017).

Selanjutnya adalah kajian yang ditulis oleh Kamaludin (2013). Dalam risetnya ia mengkaji tentang pembinaan napi teroris di wilayah Jawa Barat. Melalui temuannya ia berargumen bahwa proses deradikalisasi yang dilakukan di Jawa Barat yang terdiri dari reorientasi motivasi, reedukasi dan resosialisasi belum spesifik karena keterbatasan sarana dan prasarana. Selain itu, faktor kompetensi petugas juga menjadi hambatan yang cukup krusial dalam pembinaan para pelaku teroris.

Dari kajian sekilas yang dipaparkan, belum membahas tentang bagaimana pola Pendidikan Islam yang mengembangkan wawasan kebangsaan dijadikan sebagai cara pandang dalam pola pembinaan napi teroris selama di Lapas. Kajian yang ada, lebih membahas tentang kebijakan, sarana dan pola pembinaan. Sehingga, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena para pelaku teroris juga menggunakan Islam sebagai legitimasi tindakannya. Sehingga, penggunaan Istilah Islam dalam pendidikan berwawasan kebangsaan menjadi satu kajian yang relevan untuk dilakukan.

Salah satu model pendidikan Islam yang tidak kalah penting yaitu pendidikan Islam berwawasan kebangsaan, ini merupakan dua keilmuan yang harus ada pada diri warga negara Indonesia. Pendidikan Islam dianggap sangat penting karena merupakan pondasi utama yang akan menjadi kekuatan. Begitu juga dengan wawasan kebangsaan yang harus benar-benar tertanam pada diri, hal ini agar jiwa manusia selalu memiliki rasa nasionalisme, selain itu wawasan kebangsaan mencegah dari kefanatikan yang berlebihan. Sikap seperti ini juga akan menimbulkan dampak positif (Sumadi, 2016). Salah satu contoh kefanatikan agama yang tidak diimbangi dengan rasa toleransi dalam sosial tercermin dalam sejarah pembunuhan pada cucu Rasulullah, Peristiwa ini kemudian memunculkan pemikiran bahwa tidak ada hukum kecuali hukum dari Allah. bahkan tidak bisa digantikan dengan hukum manusia sekalipun. Melihat peristiwa di atas maka muncullah yang namanya “Radikalisme Islam” yang tidak didasari dengan rasa kemanusiaan dan rasa nasionalisme sehingga menjadi manusia yang memiliki jiwa yang sadis (Wahyudi, 2018).

Selaras dengan pendapat dari KH. Wahid Hasyim dalam bukunya bahwa “*Spirit rahmatan lil ‘ alamin*” yang memiliki makna Islam membawa ajaran dan mengajarkan sesuatu yang bersifat baik, hal yang baik tersebut akan menciptakan kestabilan dalam kehidupan. Namun di sisi lain ada sebagian manusia yang kini menjadikan “payung” Agama Islam dengan cara yang tidak baik. Dimulai dari tindakan terorisme, bentrokan dan pertumpahan darah dalam melawan penganut agama lain (Hasyim, 2011).

Sebagai umat Islam yang memegang teguh perdamaian maka untuk menindaklanjuti aksi-aksi radikal tersebut maka penulis berharap Lembaga Pemasarakatan kelas II B wilayah Lamongan bisa sebagai jembatan atau sebagai wadah yang memegang peran untuk membimbing, diantaranya kasus teroris. Lembaga pamasarakatan diselenggarakan untuk mendidik warga binaan agar menjadi manusia yang lebih baik, bisa berfikir serta sadar akan kesalahan-kesalahan, disamping itu agar lebih maksimal dalam memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Sehingga bisa diterima kembali oleh lingkup masyarakat ketika sudah menyelesaikan masa hukuman, aktif berperan dalam kegiatan positif, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang memiliki jiwa nasionalis (Kamaludin, 2013).

Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana proses pendidikan Islam berwawasan kebangsaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lamongan guna menggambarkan proses tersebut berdampak pada sikap narapidana teroris sehingga dapat diketahui kontribusi dalam program pembinaan.

KAJIAN LITERATUR

1. Pendidikan Islam Berwawasan Kebangsaan

Islam merupakan suatu ajaran yang menuntun manusia menjadi *insan kamil*, kemudian yang disebut wawasan adalah kemampuan seseorang dalam memandang serta memahami konsep-konsep dan direalisasikan dengan perilaku baik sesuai dengan pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang disebut dengan kebangsaan adalah usaha sadar sikap seseorang sebagai warga negara yang memiliki keterkaitan sosio-kultural dalam hal ini disebut dengan bangsa Indonesia.

Pendidikan Islam merupakan suatu proses mengubah tingkah laku seseorang dalam kehidupan dirinya secara pribadi, masyarakat, maupun lingkungan sekitarnya, dengan melalui pengajaran sebagai suatu aktivitas yang memberikan dampak ke arah yang positif. Pendidikan Islam dalam artian pembentukan kepribadian seorang muslim, atau perubahan sikap serta tingkah laku yang sudah sesuai pedoman dalam Agama Islam. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang memiliki tujuan untuk membentuk *insan kamil*, mengembangkan potensi secara keseluruhan baik jasmani maupun rohani (Sakir, 2016).

Dalam hal ini pendidikan Islam diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan baik dan sistematis yang berguna untuk mengembangkan potensi peserta didik yang bertumpu pada kaidah-kaidah Agama Islam. Menurut Hasan Langgulung Pendidikan Islam bertujuan untuk menyiapkan generasi muda dalam mengisi peran dan menguasai pengetahuan keislaman yang sekaligus diamalkan kepada umat manusia (Azra, 2014). Pendidikan Islam memiliki tujuan untuk mencapai sebuah keseimbangan dalam diri pribadi manusia secara keseluruhan, tentunya untuk melatih jiwa, akal, kecerdasan, psikologi serta panca indera. Tujuan akhir dari sebuah pendidikan adalah membentuk tingkah laku yang berdasar keimanan kepada Allah dan sumber hukum Islam Al-Qur' an dan Hadits (Azra, 2014).

Pendidikan Islam dalam arti luas berfungsi sebagai persiapan untuk generasi-generasi muda yang memiliki pengetahuan untuk menyeimbangkan diri di lingkungan masyarakat. Menurut Ibnu taimiyah ada 4 tujuan pendidikan Islam diantaranya tercapainya pendidikan tauhid, kedua akhlak , ketiga cara menghargai sesama manusia, dan menghargai cara berpikirnya akal (Sakir, 2016).

Pemaknaan pendidikan Islam di atas tidak lepas dari teori konstruktivisme dan behaviorisme dalam setiap prosesnya. Konstruktivisme berasal dari kata *"to construct"* yaitu membuat struktur atau proses pengorganisasian, dalam ilmu psikologi konstruktivisme menekankan pada proses pengetahuan. Sedangkan behaviorisme adalah suatu tindakan untuk merubah tingkah laku seseorang.

Berbagai teori yang sudah berkembang telah memenuhi ruang pendidikan. Begitu juga pemikiran dari para tokoh dalam memunculkan teori telah memberikan banyak kemajuan dalam sebuah proses pendidikan. Munculnya teori yang telah memberikan warna di dalam pembaruan dunia pendidikan baik dari sistem pendidikan, manajemen, proses maupun metode. perubahan pola serta metode pengajaran yang diberikan kepada peserta didik merupakan penerapan teori dalam ranah pendidikan.

a. Tujuan Pendidikan Islam Berwawasan Kebangsaan

Berbicara mengenai tujuan pendidikan Islam berwawasan kebangsaan yang paling awal sebagai manusia sosial harus memahami bahwa negara Indonesia merupakan negara majemuk. Pendidikan Islam sebagai pondasi utama dalam membentuk jiwa rakyat Indonesia agar memiliki rasa toleransi yang sesuai dengan ajaran Islam dan menanamkan

kepribadian yang nasionalisme. Begitu pula di dalam pendidikan Islam memuat rasa persatuan dan kebangsaan sangat diperlukan guna memberikan pengetahuan keislaman yang komprehensif, tekstual dan kontekstual. Akan tetapi apabila pendidikan Islam gagal maka bangsa terpecah menjadi bagian-bagian kecil dengan batasan perbedaan antar suku maupun agama atau bahkan segi ekonomi juga mengalami penurunan, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terangkum tentang persatuan dan kesatuan bangsa.

Wawasan kebangsaan yang sebelumnya sudah termuat dalam UUD 1945 merupakan sebuah pandangan yang menjadi cermin dari sikap serta kepribadian bangsa Indonesia dan memiliki rasa cinta terhadap negara, menjunjung tinggi rasa solidaritas antar sesama baik secara individu maupun kelompok tanpa menghilangkan budaya bangsa (Mursidin, 2019). Jadi yang dimaksud dalam pendidikan Islam kebangsaan ialah sebuah pendidikan yang mengandung serta merealisasikan nilai sosial masyarakat dengan berlandaskan ajaran Islam. Disadari maupun tidak, dalam kehidupan bermasyarakat selain memenuhi hak dan kewajiban diri sendiri juga harus memenuhi hak orang lain (Sinal, 2017).

Islam sebagai Agama yang memiliki fungsi menyempurnakan ajaran terdahulu, disamping itu Islam mampu memberikan solusi atas problem umat dalam berbagai jenis dan rentang waktu. Dalam menghadapi permasalahan kebangsaan tentunya Agama Islam sangat antusias dan berupaya demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Pada awalnya Islam memiliki citra maupun cerita yang positif, penyebaran Islam dilakukan dengan strategi perdamaian dan berperan untuk meningkatkan peradaban manusia. "Bahkan jika dilihat dari segi politis Islam menjadi kekuatan besar dan mampu menyangga, mempersatukan masyarakat di seluruh nusantara dalam sebuah identitas yaitu bangsa Indonesia.

Dasar dari pendidikan Islam selanjutnya tentang nilai sosial yang harus dilestarikan dalam hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an atas prinsip mendatangkan kemanfaatan. Disamping itu Pendidikan Islam harus memiliki strategi dan pendekatan yang sesuai, agar senantiasa menciptakan usaha-usaha pendidikan berdasarkan kepentingan baik di kalangan peserta didik, masyarakat Islam, dan umat manusia secara menyeluruh (Sinal, 2017).

Seperti yang sudah diuraikan di atas Pendidikan Islam dan nilai kebangsaan memiliki hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan . Disisi

lain keduanya memiliki kesamaan tujuan yaitu mengimplementasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang memiliki budi pekerti yang baik. Di samping menanamkan sikap budi pekerti yang luhur, wawasan kebangsaan juga mampu mengubah pribadi seseorang agar bisa memahami, mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila, dengan demikian untuk menjadi warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab harus mencakup pada dimensi pengetahuan kebangsaan, keterampilan serta nilai-nilai dalam Pendidikan Islam.

b. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Perspektif Kebangsaan

Pada dasarnya, pendidikan Islam memiliki keunikan tersendiri yang saling terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Keunikan tersebut adalah menyublimasinya secara dialektis antara perilaku, akal dan syariat (Wahyudi, 2018)). Hal ini dikarenakan pendidikan Islam diarahkan untuk membentuk masyarakat yang berpengetahuan, sadar akan perbedaan dan memiliki pemahaman multikultural. Selain itu ada satu konsep penting dalam Pendidikan, yaitu konsep “tata krama” yang bisa dianggap sebagai *output* Pendidikan. Yakni sebuah kualitas mental-kognitif seseorang baik sebagai seorang beragama (*hablum minallah*) maupun bersosial (*hablum minannas*).

Kemudian jiwa patriotisme tidak bisa terbentuk begitu saja dengan mengandalkan kecerdasan akal saja, karena di dalam proses membangun kesadaran dalam bermasyarakat memerlukan latihan-latihan yang dikemas melalui desain pendidikan, dalam hal ini juga memerlukan dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar. selanjutnya, dalam hal ini berikut nilai-nilai pendidikan dengan semangat kebangsaan yaitu :

- 1) Tegaknya nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan
- 2) Menciptakan nilai positif dengan berbagai macam karakter Masyarakat
- 3) Berkompetensi dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap problem sosial masyarakat Indonesia (Wahyudi, 2018).

Dalam arti luas, pendidikan Islam harus mampu mengembangkan *mindset* masyarakat Indonesia secara baik dan membawa pada karakter nasionalis. Kemudian pendidikan Islam juga sebagai benteng yang harus dikokohkan dalam bentuk menjaga peserta didik dari gerakan-gerakan transnasional yang mengancam kokohnya pilar negara dalam menjunjung persatuan dan kesatuan.

2. Radikalisme Agama

Radikalisme berasal dari kata *radix* yang bermakna “akar”. *Radix* merupakan suatu paham dengan menghendaki suatu perubahan dan besar untuk mencapai tujuan. Menurut ilmu sosial, radikalisme berhubungan erat dengan sikap yang menginginkan perubahan dengan cara menghancurkan secara total, kemudian menggantinya dengan sesuatu yang baru dan sangat berbeda. Suatu paham radikalisme merupakan perbuatan yang memberikan respons pada kondisi yang sedang berlangsung. Respons tersebut berupa penolakan, bahkan pemberontakan. Sejumlah masalah yang ditolak oleh paham tersebut mengenai sebuah asumsi, lembaga, ide, maupun sebuah nilai-nilai tertentu (Laisa, 2014).

Secara umum paham radikalisme memiliki sebuah pemikiran dan sikap yang ditandai oleh beberapa hal beserta karakteristiknya, yaitu:

- a. Sikap intoleran, yaitu suatu sikap yang tidak bisa menghargai pendapat serta keyakinan orang lain.
- b. Sikap fanatik, yaitu sikap selalu merasa dirinya paling benar diantara orang lain di sekitarnya.
- c. Sikap eksklusif, yaitu sikap membedakan diri dari kebiasaan orang lain.
- d. Sikap revolusioner, yaitu sikap yang menekankan pada kekerasan demi mencapai tujuan.

Sikap intoleran tersebut melahirkan radikalisme ke dalam agama kemudian aksi yang membawa kekerasan dan teror ini dipelopori baik dari perorangan bahkan kelompok organisasi Muslim di Indonesia (Robingaton, 2017). Dengan tanpa rasa bersalah mereka membawa nama Islam yang sampai sekarang mendapatkan tudingan sebagai awal penyebab dari segala perbuatan kekerasan di berbagai wilayah negara baik itu negara Indonesia dan negara luar Indonesia. Mereka beranggapan sikap tersebut adalah bentuk dari konsep jihad dan mengharapkan balasan berupa surga Allah. Akan tetapi disisi lain, tidak menyadari tindakan yang dilakukan memiliki dampak sangat negatif terhadap agama, perbuatan dengan membawa kekerasan ini diaplikasikan dengan rasa sangat kejam terhadap sekelompok manusia yang tidak memiliki kesalahan atas mereka.

Munculnya gerakan yang membawa kedok agama tetapi mengimplementasikan Agama berlatar belakang terhadap teks tanpa berfikir lebih jauh dalam pemaknaan teks tersebut. Di dalam Al-Qur'an

terdapat ayat yang seolah memberikan perintah untuk melakukan kekerasan. Pada dasarnya teks tersebut sangat tergantung kepada siapa ayat itu dibaca, kemudian penafsir juga menjadi penentu baik buruknya kajian ayat-ayat yang dipelajari pada suatu kelompok radikal tersebut. Jika ayat Al Qur'an dipahami sebagai kekerasan dan baku bunuh maka ayat tersebut menjadi legitimasi perbuatan yang merugikan individu lain dalam arti aksi kekerasan.

Oleh karena itu dalam memaknai teks maupun ayat-ayat Al-Qur'an harus memiliki sikap waspada dalam memahami hukum-hukum yang ada di dalamnya, dengan demikian kaedah-kaedah atau bunyi dari suatu teks tersebut tidak keluar dari konteksnya (Robingatun, 2017). Dari segi identitas paham radikal memiliki beberapa indikator diantaranya:

- a. Memiliki anggapan pemerintahan Indonesia adalah *thogut*.
- b. Menolak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya maupun menolak hormat kepada bendera merah putih.
- c. Pengajian dan pengkaderan dilakukan secara eksklusif atau tertutup.
- d. Membayar tebusan ketika kelompoknya melakukan dosa
- e. Menganggap fasik umat Islam selain pengikutnya dan bahkan menganggap kafir sebelum mereka melakukan *hijrah*.
- f. Selalu enggan mendengarkan *tausiyah* mubaligh yang tidak masuk dalam anggota kelompoknya (Sefriyono & Mukhibat, 2017).

Secara Umum paham radikal ini selalu berkaitan dengan terorisme, Secara etimologi terorisme berasal dari bahasa Latin, *terrere* yang bermakna membuat gemetar atau menggetarkan. Teror juga bisa dimaknai dengan *extreme fear* dalam artian rasa takut yang luar biasa kemudian *a terrifying person or thing* yang berarti sesuatu yang mengerikan. Terorisme dimaknai sebagai kejahatan kemanusiaan dan yang menimbulkan ancaman serius bagi peradaban dan menjadi kehancuran kedaulatan negara, termasuk membawa dampak negatif terhadap perdamaian dunia, selain itu masyarakat juga merasa terganggu dengan aksi-aksi teror tersebut.

Terorisme merupakan sebuah kejahatan yang terbentuk melalui organisasi dengan karakter transnasional atau sebuah pemikiran yang melampaui batas kemanusiaan, aksi ini digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak memandang individu maupun kelompok lainnya, selain itu terorisme dicirikan dengan kerusakan dan anarkis yang tidak ada batasan aturan, hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa takut terhadap manusia lain (Sefriyono & Mukhibat, 2017).

PEMBAHASAN

1. Formulasi Pendidikan Islam pada Napi Teroris di Lapas II B Lamongan

Pendidikan berbasis anti terorisme adalah pendidikan yang anti terhadap segala bentuk kekerasan. Baik kekerasan langsung (*direct violence*) ataupun kekerasan tidak langsung (*indirect violence*). Budaya kekerasan dengan ragam bentuknya sebenarnya bertentangan dengan spirit Islam, sekaligus semangat pendidikan yang senyatanya bertujuan untuk memanusiakan manusia, khususnya pendidikan agama yang senantiasa menyeru kedamaian (*rahmatan lilalamin*).

Paradigma Pendidikan Islam semacam inilah yang sepertinya disadari oleh Heru selaku pamong para napi teroris. Ia sadar bahwa menyampaikan ajaran Islam tak hanya dilakukan dengan jalan menyampaikan nilai-nilai Islam melalui kata-kata, namun juga perbuatan. Sebagaimana yang ia lakukan kepada napi teroris melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka selama berada di Lapas. Hal ini juga tak bisa dilepaskan dari faktor finansial yang melatarbelakangi keterlibatan mereka dalam jaringan teroris, yang tentu saja diperkuat dengan faktor ideologi agama.

Selain itu, ideologi kekerasan para napi teroris juga dilatarbelakangi oleh pemahaman atas ajaran agama secara tekstual dan tertutup (eksklusif). Karenanya, para napi teroris di Lapas II B Lamongan merasa tidak memiliki semangat kebangsaan karena menganggap pemerintah tidak menjalankan hukum yang berlandaskan ajaran Islam. Istilah seperti “kafir”, “thoghut” dan “jihad” menjadi istilah dogmatis yang menjadikan para pelaku teror sangat percaya diri melakukan tindakan kekerasan karena merasa bagian dari menjalankan ajaran Islam.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa pendidikan berwawasan kebangsaan pada teroris perlu dilakukan dengan berbasis pada paradigma dialektis dan inklusif. Hal ini sebagai antitesis dari pola pemahaman mereka terhadap Islam yang dogmatis-revolusioner. Paradigma inklusif merupakan model pembelajaran yang senantiasa menekankan pada penerimaan atas perbedaan, perbedaan pendapat, cara pandang, dan latar belakang. Bahkan, perbedaan agama yang dipahami sebagai sebuah keniscayaan dalam hidup. Pemberian ruang yang sama atas entitas yang plural merupakan aspek terpenting dalam pendidikan anti terorisme. Pola pendidikan dengan paradigma inklusif akan menghasilkan output pendidikan yang mempunyai pengetahuan, mental dan perilaku toleran atas dasar kesadaran berbangsa dan bernegara.

Selain itu, formulasi pendidikan Islam berwawasan kebangsaan dapat dilakukan melalui dua tahapan.

Pertama, tahapan filosofis yaitu pengembangan epistemologi ilmu dan pendidikan agama Islam yang tidak dikotomis. Arti non dikotomis disini adalah bahwa orientasi Pendidikan Islam diformulasikan untuk mengintegrasikan kesadaran bahwa para teroris sejatinya adalah orang yang tidak hanya beragama, tapi juga berbangsa. Dalam istilah lain, muara dari wawasan kebangsaan adalah agar para nabi teroris memiliki pemahaman yang baik dalam beragama, sekaligus menjadi warga negara yang baik.

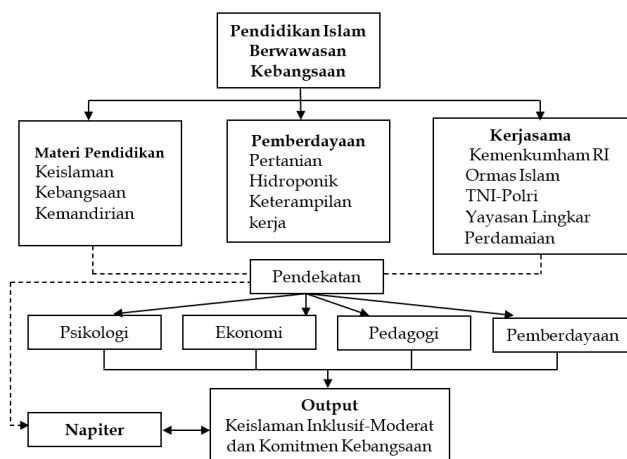
Berdasarkan epistemologi Islam, semua ilmu bersumber dari Allah sebagai Zat Maha Guru (*al-'alimu*) yang mengajarkan manusia berbagai pengetahuan yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Manusia dengan potensi ilmiahnya (*aql*, *qalb*, dan *nafs*) melakukan pengkajian atas ayat-ayat Allah yang terbentang di jagad raya dan yang termaktub di dalam Kitab Suci sebagai bagian dari Amanah kemanusiaan yang harus dijaga sebagai seorang *khalifah*. Khazanah ilmu pengetahuan merupakan produk ikhtiar manusia dalam memahami ciptaannya. Perbedaan studi berbagai bidang ilmu pengetahuan timbul karena perbedaan metodologi, bukan karena sumbernya yang berbeda. Berbagai bidang ilmu pengetahuan tidak berarti bahwa yang satu lebih utama dari yang lainnya. Aspek ini penting untuk diingat, karena pendidikan yang dikotomis telah terbukti melahirkan pengetahuan yang timpang, seperti yang diyakini oleh pelaku terorisme.

Kedua, tahapan pedagogis; bagaimana pendidik mengembangkan *desain* dan *metode* pembelajaran agama Islam yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku teror. Dalam hal ini adalah mereka sangat membutuhkan paham keagamaan yang terbuka, menghormati perbedaan dan toleran. Selain itu, ideologi kekerasan yang ingin melawan status quo pemerintahan negara, juga menjadi isu utama dalam pembelajaran Islam para teroris. Untuk itu, segala upaya harus dilakukan dalam menyisipkan materi keislaman yang dibingkai dengan kesadaran atas dasar kemanusiaan yang hakiki dan komitmen bernegara.

Oleh sebab itu, pola pembelajaran harus dilakukan secara tematik, yaitu memprioritaskan materi-materi khusus yang menjadi kebutuhan mereka. Maka sangat masuk akal jika pelaksanaan pembinaan narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan terdiri dari pembinaan kemandirian, keislaman dan kebangsaan. Segala bentuk pembinaan yang diberikan bertujuan agar para teroris kembali memiliki kesadaran

berkewarganegaraan yang baik serta tidak kembali melakukan aksi teror. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana teroris dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa pihak yang berkompeten, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) wilayah Jawa Timur, TNI, Polri dan Lingkar Perdamaian.

Dalam pembelajaran ini, suatu pokok bahasan dilihat dari berbagai sudut pandang dan pendekatan berbeda beda. Karena dengan demikian peserta didik terbiasa menghadapi sesuatu yang berbeda yang selanjutnya akan memunculkan perilaku menghargai atas perbedaan itu sendiri. Dalam pembelajaran tematik, pendidik dituntut untuk mampu melakukan kontekstualisasi doktrin Islam dengan ragam persoalan yang ada sesuai dengan setting sosialnya. Kontekstualisasi dapat dilakukan melalui upaya reinterpretasi doktrin Islam. Misalnya, bagaimana kontekstualisasi konsep “jihad” dengan pemberantasan korupsi. Dengan demikian agama tidak melulu dipahami pada aspek transendensi saja, akan tetapi agama bisa dipahami melalui sisi kemanusiaannya, dengan ukuran sejauh mana agama didekati dengan prinsip-prinsip humanisme.



Bagan: Model Pendidikan Islam Berwawasan Kebangsaan
Lapas Kelas IIB Lamongan

2. Nalar Kebangsaan dalam Pendidikan Islam pada Napi Teroris

Semangat nasionalisme menjadi simpul penting yang dilakukan oleh Lapas kelas IIB Lamongan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam berwawasan kebangsaan pada napi teroris. Kenyataan ini menjadi satu keniscayaan karena seorang yang secara *inkrah* melakukan tindakan atau terlibat dalam aksi terorisme merupakan orang-orang yang pernah mengalami dekadensi nalar kebangsaan. Nalar Pendidikan Islam yang mengaitkan pada kecintaan terhadap tanah air merupakan kebutuhan paling vital, karena dalam benak para pelaku teror antara Islam dan kebangsaan menjadi dua entitas yang dibenturkan.

Pilihannya, jika tidak negara Islam, maka secara otomatis menjadi negara kafir yang diklaim abash untuk diperangi. Sebagai agama, beberapa komunitas Islam tak sedikit yang memberi stigma bahwa Islam adalah agama yang tak selaras dengan nasionalisme.

Padahal antara Islam dan kebangsaan tidak bersifat kontra produktif, keduanya bahkan menyublimasi, mampu merangkul dan dirangkul. Nilai-nilai Islam juga selaras dengan saripati Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Untuk itu, menjadi sangat relevan untuk mengikis fenomena pemberontakan Negara “atas nama agama” apapun itu agamanya, melalui pendidikan, dalam hal ini Islam. Sehingga, dasar kebangsaan menjadi sangat krusial di tengah keniscayaan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang beragam.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka menjadi sangat relevan nilai-nilai kebangsaan diintegrasikan secara jelas dalam agenda pendidikan Islam pada para Napiter di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lamongan (Roqib, 2009). Adapun pendidikan Islam, dalam pengertian yang bersifat normatif merupakan suatu proses spiritual, akhlak, intelektual dan sosial untuk membimbing manusia sekaligus memberikan kepada mereka nilai-nilai, prinsip-prinsip dan teladan ideal dalam kehidupan, dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Pendidikan Islam berparadigma kebangsaan pada hakikatnya adalah pendidikan yang menempatkan isu kebangsaan sebagai salah satu visi pendidikan dengan karakter utama yang bersifat inklusif, egaliter dan humanis, namun tetap kukuh pada nilai-nilai spiritual dan ketuhanan yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah.

Secara operasional, pendidikan Islam berwawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Lapas kelas IIB Lamongan didasarkan pada nilai-nilai keislaman dalam bingkai kebangsaan yang direalisasikan melalui layanan pembinaan Bersama BNPT, ormas Islam, Yayasan Lingkar Perdamaian dan secara berkala juga dilakukan pengajaran atau pelatihan untuk meningkatkan paham, rasa, dan semangat kebangsaan yang baik pada pelaku teroris. Keberhasilan strategi ini, ditunjukkan dengan pengakuan mereka atas eksistensi negara, menghargai pandangan keagamaan yang berbeda atau minimal tidak melegitimasi Tindakan kekerasan atas dasar agama. Dengan demikian, mereka mengutamakan tingkah laku bersaudara, demokratis, saling menerima dan menghargai, serta saling menolong dalam berinteraksi sosial dengan sesama warga Indonesia.

Dengan narasi yang lebih tegas, pendidikan Islam berwawasan kebangsaan diarahkan pada pembentukan rasa nasionalisme napi teroris untuk masa kini dan masa mendatang, yaitu target pendidikan Islam harus bertumpu pada usaha untuk melahirkan manusia Indonesia seutuhnya.

Konsep manusia seutuhnya yang menjadi basis paradigma Pendidikan Islam pada napiter ini, adalah seseorang yang mau berkontribusi untuk membangun bangsanya dalam menjaga marwah kedaulatan. Maka tidak heran jika proses pendidikan Islam yang dikembangkan oleh Lapas kelas II B Lamongan diartikulasikan tak hanya memiliki misi pembelajaran (*ta'lim, instructional mission*) yang diharapkan mampu membentuk manusia Indonesia yang baik secara intelektual, namun juga harus mempunyai strategi untuk memperkuat identitas nasional (*national identity; wathaniyah*), yaitu dengan jalan menjawab serta memenuhi kebutuhan akan identitas nasional melalui upaya internalisasi nilai-nilai kebangsaan pada mantan teroris yang sebelumnya sangat membenci, mengkafirkan dan mengutuk pemerintah dengan narasi-narasi berbalut agama (Mas'ud, 2002). Upaya ini dilakukan dengan berbagai macam upaya, salah satu yang sering dilakukan adalah dengan mengundang BNPT, para korban bom bunuh diri, atau para mantan teroris untuk memberikan wawasan kebangsaan dalam rangka menyadarkan para napiter.

Pendidikan Islam yang didasarkan pada paradigma kebangsaan ini, berorientasi pada penanaman keshalehan berbangsa yang dewasa ini semakin menemukan relevansinya. Hal ini mengingat fenomena munculnya friksi, pengutuban sosial dan disintegrasi bangsa, justru cenderung dilakukan dengan mengangkat isu atau sensitivitas agama, dalam hal ini Islam. Di

beberapa belahan dunia, bahkan Islam mengalami *stereotype* sebagai agama teror, agama yang tidak memiliki sisi kemanusiaan. Dimana ada Negara berpenduduk muslim terbesar, maka dapat dipastikan Negara tersebut minim nilai-nilai kebangsaan. Sehingga konflik tak berkesudahan seakan menjadi pemandangan yang biasa di Negara tersebut.

Melihat realitas inilah maka para pamong dan otoritas Lapas kelas II B Lamongan, melakukan Pendidikan Islam bagi napiiter melalui berbagai macam cara dan sarana, yang dikembangkan tak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas spiritual, namun juga harus mengandaikan pengembangan kapasitas kebangsaan sebagai pendulum kedaulatan sebuah Negara-bangsa (*nation state*) (Barizi, 2011).

SIMPULAN

Usaha untuk mengurai benang kusut terorisme, tidak boleh hanya mengampanyekan dengan menyatakan terorisme tidak terkait agama. Hal ini didasarkan atas realitas bahwa para pelaku teroris mengakui bahwa tindakannya atas dorongan dan naluri membela serta menjalankan ajaran agama. Maka, perlu ada kesadaran kolektif bahwa dorongan kejahatan dari agama memang benar adanya. Klaim ini bisa dihadapi bahwa ada banyak doktrin agama yang dipahami sebagai pendorong paling kuat atas kekerasan sehingga menjadi kekerasan berbasis agama. Maka dalam praksis pendidikan Islam berwawasan kebangsaan pada napi teroris, perlu diformulasikan dengan orientasi khusus sehingga berbeda dengan formulasi Pendidikan Islam berwawasan nasionalisme pada objek yang tidak terlibat dalam kejahatan luar biasa ini.

Melalui penelitian ini, dapat dikatakan bahwa model pendidikan Islam berwawasan kebangsaan yang dikembangkan oleh Lapas kelas II B Lamongan dalam menggeser ideologi radikal pada napi teroris menuju Islam ramah berjalan secara integratif. Ia tak hanya mengadopsi pendekatan normatif, namun juga secara adaptif melakukan upaya-upaya yang lebih manusiawi dengan pendekatan psikis dan ekonomi agar para teroris merasa dimanusiakan. Sehingga, visi Pendidikan Islam yang akan disampaikan kepada napiiter lebih mudah diterima dan diinternalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurjannah, Rianie "Pendekatan Dan Metode Pendidikan Islam (Sebuah Perbandingan Dalam Konsep Teori Pendidikan Islam Dan Barat)," *Jurnal: Management of Education* 1, no. 2 (2015): 105–17.
- Sukiman, "Teori Pembelajaran Dalam Pandangan Konstruktivisme Dan Pendidikan Islam," *Kependidikan Islam* 3, no. 1 (2008): 59–70.
- Sumadi, Eko. "Keislaman Dan Kebangsaan : Modal Dasar Pengembangan Organisasi Dakwah," *Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 1 (2016): 167–84.
- Wahyudi, W. Eka. *Mendidik Kader Bangsa Nasionalis Religius*. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2018.
- Hasyim, A. Wahid. *Revitalisasi Humanisme Religius dan Kebangsaan*. Jombang : Pesantren Tebuireng, 2011.
- Kamaludin, lip. "Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Sakir, Moh. "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2016): 103.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Jakarta : Prenada Media Group, 2014.
- Sakir, Moh. "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2016): 103.
- Mursidin, "Pendidikan Agama Islam Berbasis Nasionalisme," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019): 566–76.
- Sinal, Mohamad. *Pancasila Konsensus Negara-Bangsa*. Malang : Madani, 2017.
- Laisa, Emna. "Islam Dan Radikalisme," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2014): 1–18.
- Robingaton, "Radikalisme Islam Dan Ancaman Kebangsaan," *Empirisma* 26, no. 1 (2017): 97–106.

- Sefriyono and Mukhibat, "Radikalisme Islam: Pergulatan Ideologi Ke Aksi," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2017): 205.
- Roqib, Moh. *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Paradigma Pendidikan Integratif*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2009.
- Mas'ud, Abdurrahman. *Menggagas Format non Dikotomik*. Yogyakarta: Gama Media. 2002.
- Barizi, Ahmad. *Pendidikan Integratif: Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Rachmayanthi, dkk, "Pembinaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan *Super Maximum Security* (SMS) Dalam Perspektif Pemasyarakatan", *Journal of Correctional Issues*, 2020, Vol.2 (1), 65-81.
- Febriyansah, Mochamad Nurhuda dkk, "Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane Semarang", *Seminar Nasional Hukum, Universitas Negeri Semarang*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, 91-108

Urgensi Sejarah dalam Keberagaman di Indonesia

Yulia Novianti

Pendidikan Agama Islam (PAI)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
yulianovianti123@gmail.com

Abstrak

Pentingnya mempelajari sejarah diharapkan seseorang dapat mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan, sejak zaman lahirnya sampai masa sekarang. Sejarah tidak hanya memiliki manfaat yang sangat besar dalam pembangunan dan pengembangan peradaban, namun dapat pula menyelesaikan problematika pada masa kini. Keberagaman mencakup perbedaan budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi dan sebagainya. Tujuan penulisan ini adalah membahas sejarah dalam keberagaman budaya bangsa Indonesia, dalam keragaman dan peran penyuluh agama dalam mewujudkan kedamaian bangsa Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka. Kesimpulan kajian ini adalah mengetahui urgensi sejarah dalam keberagaman di Indonesia.

Kata kunci : *Urgensi, Sejarah, Keberagaman*

Abstract

The importance of studying history is expected that someone can know and understand the growth and development, from the time of his birth to the present. History not only has enormous benefits in the development and development of civilization, but can also solve the problems of the present. Diversity includes differences in culture, religion, race, language, ethnicity, tradition and so on. The purpose of this paper is to discuss the history of the cultural diversity of the Indonesian nation, in diversity and the role of religious educators in realizing the peace of the Indonesian nation. The method used is library research. The conclusion of this study is to find out the historical urgency in diversity in Indonesia.

Keywords: *Urgency, History, Diversity*

PENDAHULUAN

Sejarah itu cabang dari semua cabang ilmu, karena tanpa sejarah kita tidak mengenal ilmu-ilmu yang beragam dan berkembang. Sebagai sebuah ilmu, sejarah memiliki prosedur penelitian ilmiah yaitu, pengumpulan sumber-sumber atau data-data sejarah (heuristik), kritik sumber atau verifikasi data, penafsiran (interpretasi) dan diakhiri dengan penulisan peristiwa sejarah (historiografi) untuk dapat digunakan dalam menggali kembali masa lalu (Kuntowijoyo, 2013; Sukardi & Sepriady, 2020).

Masa lalu yang berisi peristiwa-peristiwa penting perlu untuk digali secara lebih lanjut guna direkonstruksikan kembali, terutama peristiwa sejarah suatu bangsa. Bagi suatu bangsa, sejarah bangsa merupakan suatu tonggak yang penting karena di dalam sejarah bangsa mengandung nilai-nilai luhur dan menjadi bagian dari identitas bangsa.

Sejarah selalu dikaitkan dengan pernyataan peristiwa atau kejadian masa lalu. Dalam cerita sejarah sumbernya adalah kejadian pada masa silam berdasarkan peninggalan sejarah. Peninggalan itu berupa hasil perbuatan manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Rustam, manfaat mempelajari sejarah adalah kita akan dapat lebih berhati-hati agar kegagalan itu tidak terulang kembali. Tepatlah kata Confutse, seorang filsuf China berkata "sejarah mendidik kita supaya bersikap bijaksana".

Manfaat lain dari ilmu sejarah adalah memperluas wawasan berpikir kita. Artinya sejarah secara terbuka terus memberikan pedoman dan perspektif tentang perkembangan selanjutnya, hal ini sesuai dengan pandangan yang dikemukakan Dr. Douwes Dekker memandang bahwa : Hendaknya tugas setiap ahli sejarah jangan hanya terkungkung pada zaman masa lampau saja. Melainkan menarik terus garis zaman lampau itu sejauh mungkin ke masa depan. Dari sedikit banyak fakta fakta sejarah yang tampaknya simpang siur itu, ahli sejarah harus pandai menemukan garis besarnya, dan menarik terus garis besarnya melalui masa sekarang ke masa depan. Bukan hanya tugas ahli sejarah saja, guru-guru sejarah dalam proses belajar mengajar juga harus menerapkan hal seperti dipaparkan di atas, yakni dapat mengetahui garis besar dari materi sejarah yang akan diajarkan kepada peserta didiknya. Agar pengalaman masa lampau itu dapat dijadikan pengajaran di masa yang akan datang. (Rusman. 2012:7).

Keberagamaan dari dasar kata agama yang berarti segenap kepercayaan kepada Tuhan. Beragama berarti memeluk atau menjalankan agama. Sedangkan keberagaman adalah adanya kesadaran diri individu dalam menjalankan suatu ajaran dari suatu agama yang dianut. Keberagaman juga

berasal dari bahasa inggris yaitu *religiosity* dari akar *religy* yang berarti agama. *Religiosity* merupakan bentuk kata dari *religious* yang berarti beragama, beriman. (Purwadarminto, 1982:204)

Beragama berarti mengadakan hubungan dengan sesuatu yang kodrati, hubungan makhluk dengan khaliknya, hubungan ini diwujudkan dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya.

Adapun perwujudan keagaan itu dapat dilihat melalui dua bentuk atau gejala yaitu gejala bati yang sifatnya bastrak (pengetahuan, pikiran dan perasaan keagamaan), dan gejala lahir yang dilakukan secara individual dalam bentuk ritus atau upacara keagamaan dalam bentuk muamalah sosial kemasyarakatan.

Dari uraian diatas adapun rumusan masalah dalam kajian ini adalah (1) Apa Pengertian dan Ruang Lingkup Urgensi Sejarah, dan (2) Bagaimana Keberagaman di Indonesia.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep urgensi sejarah dalam keberagaman di Indonesia, adapun tujuan spesifik penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Apa Pengertian dan Ruang Lingkup Urgensi Sejarah, dan (2) Untuk mengetahui Bagaimana Keberagaman di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian dan Ruang Lingkup Urgensi Sejarah

Pengertian sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *syajaratun*, yang memiliki arti pohon kayu. Pengertian pohon kayu disini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan atau pertumbuhan tentang suatu hal (peristiwa) dalam suatu kesinambungan (komunitas) .

Pengertian sejarah sekarang ini dilihat secara umum dari para ahli ialah memiliki makna sebagai cerita, atau kejadian yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu. Kemudian depdiknas yang memberikan sejarah sebagai mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dari masa lampau hingga masa kini, namun yang jelas kata kunci bahwa sejarah merupakan suatu penggambaran ataupun rekonstruksi peristiwa, kisah, maupun cerita yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu. Pada umumnya para ahli sepakat untuk membagi peranan dan kedudukan sejarah yang terbagi atas tiga hal, yakni sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cerita. (Supardan, 2007:27)

1. Sejarah sebagai peristiwa

Adalah sesuatu yang terjadi pada masyarakat manusia dimasa lampau. Para ahli pun mengelompokkan sejarah agar dapat memudahkan untuk memahaminya yaitu:

- a. Pembagian sejarah secara sistematis, yaitu pembagian sejarah atas beberapa tema. Contoh : sejarah sosial, politik, sejarah kebudayaan, sejarah perekonomian, sejarah agama, sejarah pendidikan, sejarah kesehatan, sejarah intelektual, dan sebagainya.
- b. Pembagian sejarah berdasarkan periode waktu. Contoh sejarah Indonesia. Dimulai dari zaman prasajarah, zaman pengaruh Hindu-Budha, zaman pengaruh islam, zaman kekuasaan Belanda, zaman pergerakan nasional, zaman pendudukan jepang, zaman kemerdekaan, zaman revolusi fisik, orde lama, orde baru, dan orde reformasi. (Supardan, 2007:64)
- c. Pembagian sejarah berdasarkan unsur ruang. Dalam sejarah regional dapat menyangkut sejarah dunia, tetapi ruang lingkupnya lebih terbatas oleh persamaan karakteristik, baik fisik maupun sosial budaya. Contoh: sejarah Eropa. Sejarah Asia Tenggara, sejarah Afrika Utara, dan sebagainya.

2. Sejarah sebagai Ilmu

Sejarah dikategorikan sebagai ilmu karena dalam sejarah pun memiliki “batang tubuh keilmuan”, metodologi yang spesifik. Sejarah pun memiliki struktur krilmuan sendiri, baik dalam fakta, konsep, maupun generalisasinya. Kedudukan sejarah didalam ilmu pengetahuan dibagi menjadi beberapa kelompok:

- a. Ilmu sosial, karena menjelaskan perilaku sosial. Fokus kajiannya menyangkut proses-proses sosial (pengaruh timbal balik antara kehidupan aspek sosial yang berkaitan satu sama lain) beserta perubahan-perubahan sosial.
- b. Seni atau art. Sejarah digolongkan dalam sastra, sejarah dimasukkan ke dalam ilmu-ilmu kemanusiaan, karena dalam sejarah , karena dalam sejarah memelihara dan merekam warisan budaya serta menafsirkan makna perkembangan umat manusia. Itulah sebabnya dalam hidup tahap historigrafi dan eksplanasinya, sejarah memerlukan sentuhan-sentuhan etika atau keindahan.

3. Sejarah sebagai cerita

Dalam sejarah sebagai cerita merupakan sesuatu karya yang dipengaruhi oleh subjektivitas sejarawan. Artinya memuat unsur-unsur dari subjek, si penulis sebagai subjek turut serta mempengaruhi memberi warna, rasa sesuai dengan kacamata atau selera subjek. (Supardan, 2007:64-65)

Tinjauan Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas tentang urgensi sejarah dalam keberagaman di Indonesia antara lain:

Supardan dan Dandang (2017) menulis penelitian tentang Ilmu Sejarah. Kajian tersebut berisi tentang ruang lingkup, dan berbagai macam tentang sejarah.

Rizal Mubit (2016) menulis penelitian tentang Peran Agama Dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia. Kajian tersebut membahas tentang bagaimana peran agama dalam multikulturalisme yang terdapat pada masyarakat Indonesia.

Agus Akhmadi (2019) menulis penelitian tentang Moderasi Beragama Dama Keragaman Indonesia. Kajian tersebut membahas apa itu moderasi beragama dan bagaimana keberagaman agama yang ada di Indonesia.

Keberagamaan di Indonesia

Jalaludin Rahmad mendefinisikan keberagaman sebagai perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada Nash. Keberagaman juga diartikan sebagai kondisi pemeluk agama dalam mencapai dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan atau sekedar kerukunan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ajaran dan kewajibannya melakukan sesuatu ibadah yang menurut agama.

Sehingga dapat disimpulkan tingkat keberagaman yang dimaksud adalah seberapa jauh seseorang taat kepada ajaran agama dengan cara menghayati dan mengamalkan ajaran agama tersebut yang meliputi cara berfikir, bersikap, serta berperilaku baik dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial masyarakat yang dilandasi ajaran agama Islam (*Hablum Minallah* dan *Hablum Minannas*) yang diukur melalui dimensi keberagaman yaitu keyakinan, praktek agama, pengalaman, pengetahuan, dan konsekuensi atau pengalaman. (Djudi dan Fauzan, 1991:9)

Keberagaman (*religiosity*) dalam dataran situasi tentang keberadaan agama diakui oleh pakar sebagai konsep yang rumit (*complicated*) meskipun secara luas ia banyak digunakan. Secara substansi kesulitan itu tercermin terdapat kemungkinan untuk mengetahui kualitas untuk beragama terhadap sistem ajaran agamanya yang tercermin pada berbagai dimensinya. (Taufik dan Rusli, 1982: 6-7)

METODE PENELITIAN

Kajian penelitian adalah kajian pustaka, yaitu penampilan argumentasi penalaran keilmuan. Kajian pustaka yang di dalamnya memuat beberapa gagasan dan proporsi yang berkaitan dengan kajian didukung oleh data dan informasi yang diperoleh dari sumber pustaka.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam kajian ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni, (1) Data primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan/digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi (Arikunto, 2000: 64). (2) Data sekunder meruakan bahan pustaka dan dipublikasikan oleh penulisan yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang didiskripsikan atau bukan penemu teori (Hajar, 1999: 84).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau informasi yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak, yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan (Poerwadarminto, 1984: 256). Sedangkan menurut Riyanto (2001:24) metode dokumentasi adalah cara menyimpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data atau informasi merupakan sesuatu yang penting demi terwujudnya *validitas* penelitian, karena analisa ilmiah terhadap data yang terkumpul memberikan arti tertentu. Untuk menganalisa data dalam penelitian pustaka ini, penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu analisa data *reflektif thinking*.

Maksudnya teknik analisa data dengan proses pemikiran hilir mudik. *Pertama*, dengan proses induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus suatu peristiwa yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan umum. *Kedua*, diteruskan dengan proses deduktif yaitu berangkat dan bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian bersifat khusus (Sudjana, 1997: 7).

Selain itu, untuk menganalisa data yang ada, penulis juga menggunakan metode komparatif, yaitu meneliti faktor-faktor dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan dari satu faktor dengan faktor lain (Arikunto, 1996: 145).

PEMBAHASAN

Urgensi Sejarah

Mempelajari sejarah bukan hanya bertujuan untuk mengetahui kejadian atau peristiwa penting di masa lalu namun juga mengajarkan berbagai bentuk pengalaman yang terjadi sepanjang sejarah manusia baik keberhasilan maupun kegagalan.

Sehingga mempelajari sejarah sangatlah penting bagi kita agar dapat mengetahui dan mengenal akar sejarah diri kita, karena mau tidak mau, kita adalah hasil dan pencapaian dari peristiwa sejarah tersebut.

Bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar dan merdeka seperti saat ini tidak lepas dari jasa dan pengorbanan para pendahulu kita yang berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari cengkaman penjajah.

Dengan mengetahui akar sejarah kita sebagai bangsa Indonesia dapat membuat kita menjadi bukan hanya sekedar manusia biasa yang sekedar hidup di bumi, melainkan sebuah pencapaian dari peradaban serta perjuangan para pahlawan (Daliman, 2012:18).

Manfaat Sejarah Bagi Kehidupan Bangsa

1. Membantu Kita Memahami Orang dan Masyarakat

Manfaat sejarah yang pertama adalah dapat membantu kita memahami orang dan masyarakat. Sebab, sejarah menawarkan segudang informasi tentang bagaimana orang dan masyarakat berperilaku (Supardan, 2007:13).

Bagaimana kita bisa memahami kejeniusan, pengaruh inovasi teknologi atau peran dimainkan kepercayaan dalam membentuk kehidupan keluarga, jika kita tidak menggunakan apa yang kita ketahui tentang pengalaman di masa lalu? Bagaimana kita bisa menilai perang jika bangsa dalam keadaan damai dalam ketidaktahuan kecuali kita menggunakan bahan sejarah?

Dalam kata lain sejarah menawarkan satu-satunya basis bukti yang luas untuk kontemplasi dan analisis tentang bagaimana masyarakat berfungsi, dan orang perlu memiliki pemahaman tentang bagaimana masyarakat berfungsi hanya untuk menjalankan kehidupan mereka sendiri. (Supardan, 2007:13)

2. Sejarah Berkontribusi pada Pemahaman Moral.

Manfaat sejarah berikutnya adalah berkontribusi pada pemahaman moral. Dalam hal ini sejarah menyediakan medan untuk kontemplasi moral, mulai dari mempelajari kisah individu dan situasi di masa lalu yang memungkinkan untuk seseorang belajar dari kisah-kisah tersebut. Studi tidak hanya membahas tentang pahlawan yang diakui, tetapi juga orang-orang biasa yang memberikan pelajaran keberanian dan ketekunan. (Supardan, 2007:13)

3. Sejarah Memberikan Identitas

Mempelajari sejarah keluarga sendiri adalah penggunaan yang paling sederhana dan paling jelas dari sejarah, karena ini memberikan fakta tentang silsilah dan sebagai dasar untuk memahami bagaimana keluarga telah berinteraksi dengan perubahan sejarah yang lebih besar.

4. Sejarah Membuat Kita Belajar Lebih Hati-Hati

Sejarah dapat berperan dalam proses pembelajaran pada salah satu kejurusan atau keterampilan tertentu seperti navigasi, jurnalistik, senjata/militer dan lain sebagainya. Belajar sejarah membuat kita jadi lebih hati-hati mengenai banyak hal salah satunya agar menghindari kesalahan yang mungkin saja sebelumnya sudah pernah terjadi termasuk dalam hal pekerjaan.

5. Sejarah Dapat Memberikan Kesenangan

Berkaitan dengan fungsi rekreasi, belajar sejarah dapat memberikan rasa kesenangan maupun keindahan. Seorang pembelajar sejarah dapat terpesona oleh kisah sejarah yang mengagumkan atau menarik perhatian membaca, baik itu berupa roman maupun cerita-cerita peristiwa lainnya. (Supardan, 2007:14)

Keberagamaan di Indonesia.

Sebelum kita membahas macam-macam dimensi keberagamaan Glock & Stark maka akan dibahas terlebih dahulu apa itu dimensi keberagamaan. Kata dimensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai ukuran (panjang, lebar, tinggi, dan sebagainya).

Sedangkan Keberagamaan di pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu terhadap agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasikan ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya. (Mawardi, 2014:75)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dimensi keberagamaan adalah seluruh aspek atau sisi kehidupan manusia yang dalam menjalani kehidupannya didasarkan pada aturan-aturan atau nash dalam sebuah agama, yang berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkannya diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya terhadap Tuhan, semua manusia serta alam sekitarnya.

Adapun pembagian dimensi-dimensi religiusitas, menurut Glock dan Stark terdiri dari lima dimensi keberagamaan, yaitu :

1. Dimensi Keyakinan (Ideologis)

Dimensi ideologis (ideologikal), yaitu dimensi yang mengacu pada serangkaian kepercayaan yang menjelaskan eksistensi manusia vis-à-vis Tuhan dan makhluk Tuhan yang lain. Pada dimensi inilah orang Islam memandang manusia sebagai Khalifatullah fi al-Ard.

Dimensi keyakinan atau akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya, perbuatan amal saleh. Akidah demikian itu mengandung arti bahwa orang yang beriman tidak ada rasa dalam hati, atau ucapan di mulut dan perbuatan melainkan secara keseluruhan menggambarkan iman kepada Allah, yakni tidak ada niat, ucapan dan perbuatan yang dikemukakan oleh orang yang beriman itu kecuali yang sejalan dengan kehendak Allah. (Abuddin, 2013: 84)

2. Dimensi Pengetahuan (Intelektual)

Kata pengetahuan, dalam bahasa Arab dikenal dengan "alilm". Menurut terminologi, al'ilm ialah bentuk, sifat, rupa, atau gambar sesuatu yang terdapat di akal. Sidi Gazalba, sebagaimana dikutip dari

Mawardi mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan secara sistematis ialah apa yang dikenal atau hasil pekerjaan tahu. Hasil pekerjaan tahu itu, merupakan hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai.

Dimensi intelektual (dimensi pengetahuan), yaitu dimensi yang menunjukkan tingkat pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Dimensi ini juga disebut sebagai dimensi ilmu. Di dalam agama Islam, dimensi ini termasuk dalam pengetahuan tentang Ilmu Fiqh, Ilmu Tauhid, dan Ilmu Tasawuf.

3. Dimensi Pengalaman (Eksperiensial)

Dimensi pengalaman disebut juga sebagai dimensi empiris agama. Istilah "empiris" dalam ungkapan ini, hanya dikehendaki untuk menunjukkan hubungan metodologis antara si peneliti dan objek yang diteliti (agama) sebagai sasaran penelitian. Jadi yang dikehendaki dengan dimensi empiris agama adalah segi-segi agama yang dapat dialami oleh seorang peneliti ilmiah untuk mendapatkan keterangan ilmiah. (Abuddin, 2013: 85)

Menurut Robert C. Monk, dalam Jalaludin, mengatakan bahwa pengalaman agama umumnya bersifat individual. Tetapi, karena pengalaman agama yang dimiliki umumnya selalu menekankan pada pendekatan keagamaan bersifat pribadi, hal ini senantiasa mendorong seseorang untuk mengembangkan dan menegaskan keyakinannya itu dalam sikap, tingkah laku, dan praktik-praktik keagamaan yang dianutnya.

Dimensi pengalaman agama juga, biasanya berkaitan dengan pengalaman keagamaan seseorang, perasaan-perasaan tertentu, persepsi-persepsi seseorang, dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan. Misalnya, merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa atau merasa do'a yang dikabulkan, diselamatkan Tuhan dan sebagainya.

4. Dimensi Peribadatan atau Praktik Agama (Ritualistik)

Dimensi ini berkenaan dengan upacara-upacara keagamaan, ritus-ritus religius, seperti solat, misa, dan lain-lain. Praktik-praktik keagamaan ini terdiri atas dua kelas penting, yaitu ritual dan ketaatan.

a. Ritual

Ritual, adalah teknik (cara, metode, praktek) membuat suatu adat kebiasaan menjadi suci (sanctify the custom). Menurut Riaz Hasan

dalam Al Ayubi, ritual merupakan bagian integral dari agama formal. Ia mencakup praktik-praktik keagamaan termasuk ibadah dan hal-hal yang dilakukan manusia dalam melaksanakan perintah agamanya.

Dalam agama Islam, perilaku ibadat dikenal dengan Rukun Islam, yaitu mengucapkan kalimah syahadat, melaksanakan shalat, membayar zakat, melaksanakan puasa bulan Ramadhan dan menjalankan ibadah haji bagi yang mampu.

b. Ketaatan

Syaikhul Islam sebagaimana dikutip dari Al-Qaradhawi mengatakan di dalam risalahnya tentang "Al-Ubudiyah", "Agama itu mencakup makna ketundukan dan kerendahan diri. Dikatakan: *dintuhu fa dana*, maksudnya aku membuatnya merendahkan diri, maka dia pun merendahkan dirinya. Dikatakan : *Yadinullah wa yadinu lillah*, maksudnya menyembah, mentaati dan tunduk kepada Allah. Maka, *dinullah* (agama Allah) berarti menyembah, taat, dan tunduk kepadaNya."

Ini berarti bahwa di dalam agama, ritual dan ketaatan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai bentuk penghambaan seseorang terhadap Tuhannya maka hendaknya ritual dan ketaatan harus beriringan. (Al Ayubi, 2009 :40-41)

5. Dimensi Pengamalan (Konsekuensial)

Konsekuensi komitmen agama berlainan dari keempat dimensi yang sudah dibicarakan di atas. Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Istilah "kerja" dalam pengertian teologis digunakan disini. Walaupun agama banyak menggariskan bagaimana pemeluknya seharusnya berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, tidak sepenuhnya jelas sebatas nama konsekuensi-konsekuensi agama merupakan bagian dari komitmen atau semata-mata berasal dari agama. Misalnya apakah dia mengunjungi tetangganya yang sakit, menolong orang yang kesulitan, mendermakan harta dan sebagainya. Dimensi ini bisa disebut juga sebagai dimensi Amal. (Yusuf, 2005:32)

SIMPULAN

Mempelajari sejarah sangatlah penting bagi kita agar dapat mengetahui dan mengenal akar sejarah diri kita, karena mau tidak mau, kita adalah hasil dan pencapaian dari peristiwa sejarah tersebut.

Keberagamaan adalah seluruh aspek atau sisi kehidupan manusia yang dalam menjalani kehidupannya didasarkan pada aturan-aturan atau nash dalam sebuah agama, yang berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya terhadap Tuhan, semua manusia serta alam sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ayubi, Sholahudin. 2009. *Agama & Budaya*. Banten: FUUD Press.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2005. *Ibadah Dalam Islam Jakarta: Akbar*.
- Arikunto, Suharismi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daliman. A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Djudi Al-Falasani dan Fauzan Na'if, 1991. *Kiat Sukses Belajar Bagi Pelajar dan Mahasiswa*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Hajar, Ibnu. 1999. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jalaluddin. 2001. *Theologi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Sleman: Tiara Wacana.
- Mawardi, Udi Mufradi. 2014. *Teologi Islam*. Serang: FUD Press.
- Nata, Abuddin *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminto. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwadarminto. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rusman. 2012. *Model- Model Pembelajaran*. Jakarta PT RajaGrafindo Persada
- Sudjana, Nana. 1997. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Supardan, Dadang. 2007. *Pengantar Ilmu Sosial*. Bandung: PT Bumi Aksara.
- Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim. 1982. *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

THE POLITICAL FACE BEHIND RELIGIOUS SYMBOLS
(Islamic Studies with A Political Approach)

Eny Hamdanah

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
enyhamdanah@gmail.com

Abstrak

Studi Islam dapat dikaji dengan berbagai pendekatan, baik pendekatan teologi, tasawuf, syariah/ hukum, sosiologi maupun antropologi. Hal yang tidak kalah penting dengan macam-macam pendekatan tersebut adalah pendekatan ilmu politik. Mengapa studi Islam dengan pendekatan politik dikatakan penting dan menarik untuk dikaji?. Hal itu karena dalam sejarah perkembangannya, Islam selalu diwarnai oleh dinamika politik dari para pemeluknya yang seringkali berebut dan bersaing dalam masalah kuasa. Bahkan seringkali terjadi kasus pemutarbalikan fakta dan penafsiran agama yang keliru dan menyelewengkan tafsiran ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah. karena itulah, penelitian ini akan mengkaji Islam dengan pendekatan politik. Penelitian ini menghasilkan beberapa penemuan antara lain adalah bahwa perilaku-perilaku keagamaan dan simbol-simbol keagamaan seringkali bersumber dari motivasi di luar agama seperti motivasi politik. masalah fenomena timbulnya Aliran Wahabisme misalnya, bukanlah murni urusan agama tetapi ia juga lahir dari motivasi politik yang melatarbelakangi tumbuhnya semangat nasionalisme Arabisme dan lahirnya sebuah Kerajaan Saudi Arabia. Demikian pula halnya dengan fenomena organisasi keagamaan Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah yang sering kali tampak sebagai lembaga-lembaga dakwah Islam namun ternyata kalau dilihat dengan seksama dari kacamata ilmu politik akan terlihat bahwa kedua organisasi Islam itu merupakan aktor-aktor politik yang berebut kuasa di ruang publik. Berebut pengaruh di tengah-tengah masyarakat muslim.

Kata kunci : *Studi Islam, pendekatan Politik, Wahabi, Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah.*

Abstract

Islamic studies can be studied with various approaches, both theological approaches, Sufism, sharia/law, sociology and anthropology. No less important than the various approaches is the political science approach. Why is Islamic studies with a political approach said to be important and interesting to study? This is because in the history of its development, Islam has always been colored by the political dynamics of its adherents who often scramble and compete in power issues. In fact, there are often cases of distorting facts and erroneous religious interpretations and distorting the interpretation of the verses of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet. Therefore, this research will examine Islam with a political approach. This research resulted in several findings, among others, is that religious behaviors and religious symbols often originate from non-religious motivations such as political motivation. The problem of the phenomenon of the emergence of Wahhabism, for example, is not purely a religious matter, but it is also born from the political motivation behind the growth of the spirit of Arabism nationalism and the birth of a Kingdom of Saudi Arabia. Likewise, the phenomenon of the religious organizations of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, which often appear as Islamic da'wah institutions, however, when viewed carefully from the point of view of political science, it will be seen that the two Islamic organizations are political actors fighting for power in the public sphere. Struggle for influence in the Muslim community.

Keywords: *Islamic Studies, Political Approach, Wahabizm, Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah.*

PENDAHULUAN

Agama Islam sebagai agama yang terakhir dan penutup dari semua agama yang telah ada, bisa dikaji lebih mendalam melalui ilmu studi Islam. Ilmu studi Islam telah hadir cukup lama seiring dengan hadirnya agama Islam itu sendiri. Seiring dengan dinamika dan perkembangan zaman, kesempatan untuk mempelajari studi Islam bisa melalui segala hal, Islam memberikan kesempatan secara luas kepada manusia untuk menggunakan akal fikirannya secara maksimal untuk mempelajarinya, namun dalam penggunaannya jangan sampai melampaui batas dan keluar dari rambu-rambu ajaran Allah SWT. (Chuzaimah Batubara, 2018, p.1)

Studi Islam bisa didekati dengan berbagai pendekatan, baik pendekatan teologi, Tasawuf, syariah/hukum, sosiologi maupun antropologi, tidak kalah pentingnya dari pendekatan tersebut adalah studi Islam dengan pendekatan politik.

Mengapa studi Islam dari pendekatan politik dikatakan menarik dan penting, hal itu karena dalam sejarah perkembangannya Islam selalu diwarnai oleh dinamika politik para pemeluknya yang berebut/bersaing dalam masalah kuasa, bahkan seringkali terjadi kasus pemutarbalikan ajaran Islam yang menyelewengkan penafsiran Al Qur'an dan hadist dalam rangka mencapai tujuan kuasa . Selain itu masalah politik menarik perhatian masyarakat pada umumnya karena politik selalu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tertib, aman dan damai sejahtera lahir dan batin tidak dapat dilepaskan dari sisitem politik yang diterapkan. Karena itulah, penulis ingin mengkaji masalah ini dengan sebuah tema “ Studi Islam dengan pendekatan politik”.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang mirip atau serupa dengan penelitian penulis :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ipah Latifah, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul “Pendekatan Politik dalam Studi Islam”.
2. Penelitian Dewi Alhaa dengan tema “ Pendekatan Politik Dalam Studi Islam”.
3. Penelitian Mansur dengan tema “Pendekatan Politik Dalam Study Islam”
4. Penelitian Ridwan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, dengan tema “ Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan al-Banna.

Perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, artikel ini lebih menekankan pentingnya mengkaji Islam dari kaca mata ilmu politik, artinya Islam dilihat dari aspek ilmu politik yang seringkali menampilkan hubungan-hubungan politik, intrik-intrik politik yang semua itu tidak akan bisa dilihat dengan baik kalau tidak dikaji dengan pandangan ilmu politik, contoh kasus keberadaan ormas NU dan Muhammadiyah yang tampak keduanya adalah bergerak dalam bidang dakwah Islam. Perselisihan antara keduanya adalah perselisihan pendapat tentang masalah-masalah keagamaan seperti kasus qunut, tahlil, dan ziarah kubur dan lain-lain. Tetapi penelitian ini melihatnya berbeda karena kedua ormas tersebut ternyata memiliki hubungan persaingan politik. Keduanya berusaha merebut kuasa dan pengaruh yang seluas-luasnya dari masyarakat muslim.

KAJIAN LITERATUR

1. Pengertian Studi Islam dan Politik

Secara etimologis studi Islam merupakan terjemahan dari bahasa Arab Dirasah Islamiyah. Sementara di barat studi Islam dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka secara harfiah studi Islam adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum, sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologis tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Dengan perkataan lain, Studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Banyak definisi tentang politik. Politik bisa di artikan sebagai usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). Politik juga bisa diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara.

Secara etimologi dalam bahasa Arab politik disebut siyasah, yang selanjutnya kata ini kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrisnya disebut poitics. Politik itu sendiri berarti cerdik dan bijaksana, yang dalam pembicaraan sehari-hari diartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan. Tetapi para ahli politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi untuk ilmu politik. (Inu Kencana Syafie, 2009, p.57)

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, Karangan W.J.S. Poerwadarminta, politik diartikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan dan sebagainya, dan dapat pula berarti segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan), siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan sesuatu Negara atau terhadap Negara lain.(Muhammad Dhiauddin Rais, p.4). Dalam penelitian ini penulis mengartikan politik sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

2. Apa itu studi Islam dengan pendekatan politik?

Islam bukan hanya agama, tetapi sebuah komunitas (umat) tersendiri yang mempunyai pemahaman, kepentingan dan tujuan-tujuan politik sendiri. Banyak orang beragama Islam menganggap Islam adalah agama individual, dan lupa kalau Islam merupakan kolektivitas. Sebagai kolektivitas, Islam mempunyai kesadaran, struktur dan mampu melakukan aksi bersama. (Kuntowijoyo, 1997, p.27). Selanjutnya Kuntowijoyo menjelaskan dalam bukunya secara menyakinkan bahwa Islam memiliki konsep tentang politik. Keterkaitan agama Islam dengan aspek politik selanjutnya dapat diikuti dari uraian Harun nasution dalam bukunya Islam Ditinjau Dari berbagai Aspeknya jilid II. Dalam bukunya beliau menegaskan bahwa persoalan pertama-tama yang timbul dalam Islam menurut sejarah, bukanlah persoalan tentang keyakinan melainkan persoalan politik.(Harun Nasution, 1979, p.92)

Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam bisa diteliti lewat teks karangan ulama, kandungan dari teks, pemeluknya dan kebudayaannya (Perilaku umat Islam). Islam bisa dikaji lewat pendekatan politik, ini artinya Islam sebagai objek sedangkan ilmu politik sebagai subjek.

Pendekatan politik adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada lembaga sosial agar timbul motivasi/ keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan serta perdamaian pada masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan politik dimaksudkan untuk mengkaji masyarakat muslim atau budayanya dari aspek politik.

Pendekatan politik dibagi menjadi 5 (Chuzaimah Batubara, 2018, p.179):

a. Pendekatan Dekonfessionalisasi

Pendekatan dekonfessionalisasi adalah pendekatan/usaha dengan meninggalkan seluruh identitas keyakinan yang berupa

symbol dalam sementara waktu untuk menyatukan perbedaan dalam kelompok dan memelihara hubungan politik bersama dalam sebuah Negara agar tercapai suatu kesatuan dan kebersamaan yang lebih besar.

Pancasila sebagai ideologi yang digunakan Bangsa Indonesia untuk menjadikan bernegara, hal tersebut bukan berarti Islam kalah dengan pancasila melainkan di dalam pancasila tersimpan nilai-nilai Islam yaitu keesaan Tuhan, demokrasi, keadilan sosial dan kemanusiaan.

b. Pendekatan politik demostikasi Islam

Pendekatan yang dikembangkan Harry J Bena menggambarkan hebatnya Islam berkembang di Indonesia tetap lumpuh karena didominasi kekuatan lokal. Dalam Daniel Dokhada, Benda berpandangan bahwa bangkitnya Mataram Islam sebenarnya adalah kekuatan Hindu Jawa bukan Islam itu sendiri.

c. Pendekatan politik Skismatik dan Aliran

Robert Jay dan Clifford Goerta meruapakan tokoh yang mengembangkan pendekatan ini, mereka memberikan gambaran tentang adanya realitas kelompok aliran dalam kehidupan sosial, budaya dan politik serta agama dalam masyarakat Jawa. Dari penjelasannya dapat disimpulkan bahwa kekuatan diluar Islam yang senantiasa menyaingi bahkan menjinakkan adalah kelompok abangan dan priyayi.

d. Pendekatan politik Trikotomi

Pendekatan ini dikembangkan Allan Samson, dalam aliran ini menjelaskan karakteristik Islam tidak dapat di lihat secara tunggal seperti santri yaitu mereka yang tetap mempertahankan Islam sebagai baris dan norma dalam berpolitiknya. Politik santri dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Fundamentalis, yaitu menetapkan agama dalam aspek kehidupan, termasuk bernegara.
- 2) Reformis, yaitu menempatkan secara rasional posisi Islam dalam kehidupan politik termasuk membangun relasi bagi penerapan kepentingan Islam.

- 3) Akomodisionis, yaitu kelompok santri yang lebih terbuka walau sepintas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dari metode gerakan tersebut merupakan langkah terpenting sebagai jalan berfikir/alat negosiasi dalam politik.

- e. Pendekatan Politik kultural atau Diversifikasi

Teori ini dikembangkan Emmersoon, menurutnya kultural menjelaskan Islam sebagai kekuatan budaya yang berhasil dalam kekuatan politik.

3. Wahabi

Wahabiyah adalah suatu bagian firqoh (golongan Islamiyah), golongan ini dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1702 M-1787 M). Musuhnya memberi nama wahabiyah akan tetapi pengikutnya memberi nama “ Al Muwahhidun” dan nama thariqoh mereka “ Al Muhammadiyah”. Aliran wahabiyah ini dalam bidang fiqh mengikuti madzhab Hambali versi Ibnu Taimiyah. (Sirojuddin Abbas, 2006, p.352). Wahabiyah adalah suatu bagian firqoh (golongan Islamiyah), golongan ini dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1702 M-1787 M). Musuhnya memberi nama wahabiyah akan tetapi pengikutnya memberi nama “ Al Muwahhidun” dan nama thariqoh mereka “ Al Muhammadiyah”. Aliran wahabiyah ini dalam bidang fiqh mengikuti madzhab Hambali versi Ibnu Taimiyah. (Sirojuddin Abbas, 2006, p.352)

Dalam masalah furuiyah keagamaan, golongan ini bertentangan dengan ahlussunnah waljamaah seperti masalah tahlil, talqin, ziarah kubur, tawasul, qunut dan lain-lain. Golongan sering menvonis bid'ah kepada siapapun yang tidak sepaham dengan ajaran mereka.

4. NU

Nahdhatul ulama didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 M. Kelahiran NU pada dasarnya merupakan muara dari perjalanan panjang ulama pesantren di awal abad 20 yang berusaha mengorganisir diri dan berjuang melestarikan budaya keagamaan kaum muslim tradisional disamping kesadaran untuk mengobarkan semangat nasionalisme. NU menganut Ahlu al-sunnah wa al-Jamaah yang merujuk pada

Alquran, sunnah Nabi Muhammad dan khulafaur rasyidin yang secara teoritis dan faktual banyak terkait hadist, dengan konsep teologis Abu Hasan Al asy'ari dan Abu Hasan Al Maturidi serta empat madzhab dalam fiqh Islam.

NU menilai tidak semua tradisi itu buruk, asing dan tidak mempunyai relevansi kekinian, bahkan tidak jarang tradisi bisa memberikan inspirasi bagi munculnya modernisasi Islam. Para ulama umumnya telah memiliki jamaah (komunitas warga yang menjadi kelompoknya) dengan ikatan hubungan yang akrab, yang terbentuk dalam pola hubungan kyai-santri, terutama pada masyarakat dilingkungan pondok pesantren.

Pola hubungan tersebut mempunyai kesinambungan dengan pola dakwah Nahdhatul Ulama' yang mengambil wilayah dakwah kultural. Ini menyebabkan arah dan perjuangan dakwah Nahdhatul Ulama' tidak bisa dilepaskan dari proses dan perkembangan budaya dan tradisi yang ada di masyarakat.

5. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang di dirikan KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912 M, kata Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad yaitu nama Rasulullah SAW yang diberi tambahan ya' nisbah dan ta' marbutoh. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi munkar berakidah Islam bersumber dari Alquran dan sunnah, organisasi ini muncul untuk menjawab tantangan zaman berkaitan situasi modern di Indonesia.

Awalnya Muhammadiyah hanya ada di daerah-daerah karisedenan seperti Yogyakarta, Solo dan Pekalongan. Namun, saat ini persebarannya ada di berbagai daerah di Indonesia. Organisasi ini didirikan dengan tujuan memberikan dukungan pada upaya pemurnian ajaran Islam yang pada saat itu identik dengan hal-hal mistik. Muhammadiyah bergerak dibidang keagamaan dan pendidikan bertujuan mengajak masyarakat Indonesia untuk menjalankan ajaran Allah yang sebenarnya. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis tetapi juga dinamis.

Muhammadiyah dibangun dengan tata kelola yang baik dan terstruktur keberadaannya. Mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan ke desa-desa. Setiap tingkatan juga di kelola dengan baik.

Muhammadiyah menerapkan manajemen yang terstruktur guna menunjang segala aktivitas dakwahnya.

Dalam anggaran dasar Muhammadiyah butir ke-6 dinyatakan : “ melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi “ , mengandung makna pentingnya organisasi sebagai gerakan yang niscaya. Dampak positif dari organisasi ini ditandai telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan diseluruh Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library Reseach) dengan menggunakan pendekatan ilmu politik. Artinya, penelitian ini mengkaji masalah-masalah agama dan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat muslim dengan menggunakan disiplin ilmu politik.

Metode Penelitian berisi: jenis penelitian, populasi dan sampel, sampling method, alat analisis dan alasan penggunaannya. (Font: Book Antiqua size 12)

PEMBAHASAN

A. Studi Islam dengan pendekatan politik

1. Pengertian studi Islam dan politik

Secara etimologis studi Islam merupakan terjemahan dari bahasa Arab Dirasah Islamiyah. Sementara di barat studi Islam dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka secara harfiah studi Islam adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum, sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologis tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Dengan perkataan lain, Studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Banyak definisi tentang politik. Politik bisa di artikan sebagai usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). Politik juga bisa diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara.

Secara etimologi dalam bahasa Arab politik disebut siyasah, yang selanjutnya kata ini kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut politics. Politik itu sendiri berarti cerdas dan bijaksana, yang dalam pembicaraan sehari-hari diartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan. Tetapi para ahli politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi untuk ilmu politik. (Inu Kencana Syafie, 2009, p.57)

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, Karangan W.J.S. Poerwadarminta, politik diartikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan dan sebagainya, dan dapat pula berarti segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan), siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan sesuatu Negara atau terhadap Negara lain. (Muhammad Dhiauddin Rais, p.4). Dalam penelitian ini penulis mengartikan politik sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

2. Apa itu studi Islam dengan pendekatan politik?

Islam bukan hanya agama, tetapi sebuah komunitas (umat) tersendiri yang mempunyai pemahaman, kepentingan dan tujuan-tujuan politik sendiri. Banyak orang beragama Islam menganggap Islam adalah agama individual, dan lupa kalau Islam merupakan kolektivitas. Sebagai kolektivitas, Islam mempunyai kesadaran, struktur dan mampu melakukan aksi bersama. (Kuntowijoyo, 1997, p.27). Selanjutnya Kuntowijoyo menjelaskan dalam bukunya secara menyakinkan bahwa Islam memiliki konsep tentang politik. Keterkaitan agama Islam dengan aspek politik selanjutnya dapat diikuti dari uraian Harun nasution dalam bukunya Islam Ditinjau Dari berbagai Aspeknya jilid II. Dalam bukunya beliau menegaskan bahwa persoalan pertama-tama yang timbul dalam Islam menurut sejarah, bukanlah persoalan tentang keyakinan melainkan persoalan politik. (Harun Nasution, 1979, p.92).

Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam bisa diteliti lewat teks karangan ulama, kandungan dari teks, pemeluknya dan kebudayaannya (Perilaku umat Islam). Islam bisa dikaji lewat pendekatan politik, ini artinya Islam sebagai objek sedangkan ilmu politik sebagai subjek.

Pendekatan politik adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada lembaga sosial agar timbul motivasi/keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan serta perdamaian pada masyarakat. Studi Islam dengan

pendekatan politik dimaksudkan untuk mengkaji masyarakat muslim atau budayanya dari aspek politik.

Pendekatan politik dibagi menjadi 5 (Chuzaimah Batubara, 2018, p.179):

1. Pendekatan Dekonfessionalisasi

Pendekatan dekonfessionalisasi adalah pendekatan/usaha dengan meninggalkan seluruh identitas keyakinan yang berupa symbol dalam sementara waktu untuk menyatukan perbedaan dalam kelompok dan memelihara hubungan politik bersama dalam sebuah Negara agar tercapai suatu kesatuan dan kebersamaan yang lebih besar.

Pancasila sebagai ideologi yang digunakan Bangsa Indonesia untuk menjadikan bernegara, hal tersebut bukan berarti Islam kalah dengan pancasila melainkan di dalam pancasila tersimpan nilai-nilai Islam yaitu keesaan Tuhan, demokrasi, keadilan sosial dan kemanusiaan.

2. Pendekatan politik demostikasi Islam

Pendekatan yang dikembangkan Harry J Bena menggambarkan hebatnya Islam berkembang di Indonesia tetap lumpuh karena didominasi kekuatan lokal. Dalam Daniel Dokhada, Benda berpandangan bahwa bangkitnya Mataram Islam sebenarnya adalah kekuatan Hindu Jawa bukan Islam itu sendiri.

3. Pendekatan politik Skismatik dan Aliran

Robert Jay dan Clifford Goerta meruapakan tokoh yang mengembangkan pendekatan ini, mereka memberikan gambaran tentang adanya realitas kelompok aliran dalam kehidupan sosial, budaya dan politik serta agama dalam masyarakat Jawa. Dari penjelasannya dapat disimpulkan bahwa kekuatan diluar Islam yang senantiasa menyaingi bahkan menjinakkan adalah kelompok abangan dan priyayi.

4. Pendekatan politik Trikotomi

Pendekatan ini dikembangkan Allan Samson, dalam aliran ini menjelaskan karakteristik Islam tidak dapat di lihat secara tunggal seperti santri yaitu mereka yang tetap mempertahankan Islam sebagai baris dan norma dalam berpolitiknya. Politik santri dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Fundamentalis, yaitu menetapkan agama dalam aspek kehidupan, termasuk bernegara.
- b. Reformis, yaitu menempatkan secara rasional posisi Islam dalam kehidupan politik termasuk membangun relasi bagi penerapan kepentingan Islam.
- c. Akomodisionis, yaitu kelompok santri yang lebih terbuka walau sepiintas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dari metode gerakan tersebut merupakan langkah terpenting sebagai jalan berfikir/alat negosiasi dalam politik.

5. Pendekatan Politik kultural atau Diversifikasi

Teori ini dikembangkan Emmersoon, menurutnya kultural menjelaskan Islam sebagai kekuatan budaya yang berhasil dalam kekuatan politik.

B. Contoh-contoh Studi Islam dengan pendekatan Politik

1. Kemunculan aliran wahabi dan implikasi politiknya terhadap kelahiran kerajaan Arab Saudi.

Wahabiyah adalah suatu bagian firqoh (golongan Islamiyah), golongan ini dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1702 M-1787 M). Musuhnya memberi nama wahabiyah akan tetapi pengikutnya memberi nama “ Al Muwahhidun” dan nama thariqoh mereka “ Al Muhammadiyah”. Aliran wahabiyah ini dalam bidang fiqh mengikuti madzhab Hambali versi Ibnu Taimiyah. (Sirojuddin Abbas, 2006, p.352)

Beberapa ajaran aliaran wahabi ini diantaranya : (Sirojuddin Abas, 2006, p. 359-360)

- a. Tidak boleh membunyikan radio, gromopon
- b. Tidak boleh melagukan bacaan Alquran, adzan dan qashidah
- c. Tidak boleh menyelenggarakan perayaan maulid Nabi pada bulan rabiul awal dan perayaan isra’ mi’raj pada malam 27 Rajab
- d. Boleh ziarah tetapi tidak boleh menghadap makam Nabi, harus menghadap kiblat dan membelakangi makan Nabi
- e. Dilarang keras berdoa dengan bertawasul, karena dianggap syirik
- f. Seorang imam sholat tidak membaca basmalah di awal suroh al fatihah dan tidak membaca doa qunut ketika sholat subuh.

Aliran wahabi ini dinilai sebagai aliran radikal, hal ini dikarenakan tindakan-tindakan mereka yang tergolong radikal. Mengutip pendapat John L. Eposito diantara ciri Islam Radikal atau Islam Revivalis adalah : (Khairul Muhtadin, 2015, p.250-251)

- a. Kebencian terhadap barat. Barat seolah diposisikan sebagai musuh
- b. Membentuk pemerintahan Islam sebagai kewajiban syariat Islam yang mutlak
- c. Pemerintahan yang tidak berdasarkan syariat Islam dianggap tidak sah dan dianggap kafir walaupun dibentuk oleh kaum muslimin
- d. Wajib oposisi terhadap pemerintah yang tidak berdasar Islam
- e. Wajib jihad/ memerangi pemerintah yang tidak berdasar Islam
- f. Kaum Kristen dan Yahudi buanlah ahli kitab dan dianggap sebagai rekanan dalam konspirasi melawan Islam dan dunia Islam.

Diantara ciri-ciri yang dipaparkan Jhon Eposito diatas, tidaklah semua ciri harus melekat pada golongan tersebut, cukup satu diantaranya sudah mencukupi untuk dikatakan bahwa golongan tersebut beraliran radikal. Jika dilihat dari ciri-ciri tersebut, maka aliran wahabi dan variannya termasuk kategori dalam Islam radikal.

Sebelum abad ke 20 dunia Arab termasuk tanah Hijaz itu merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Turki Ustmani, sebuah kerajaan Islam terbesar yang hampir menguasai seluruh wilayah dunia Islam. Kerajaan Turki Ustmani yang beraliran ahlussunnah wal jamaah dianggap oleh masyarakat dunia Islam sebagai pewaris Kekuasaan Islam yang menyerukan dakwah Islam dan mengibarkan panji-panji Islam ke seluruh dunia. Tetapi ketika abad ke 20 muncullah gerakan wahabi yang membangun sentimen arab dan ingin melepaskan diri dari kekuasaan turki Ustmani yang berfaham ahussunnah wal jamaah.(Fabe Armanions, 2013, p.1).

Gerakan wahabi ini selanjutnya membangun Nasionalisme Arab dan berkolaborasi dengan seorang jenderal yang bernama Abdul Aziz dan selanjutnya mereka mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Saudi Arabia. Ibnu Abdul Aziz sebagai raja, sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pendiri gerakan wahabi berperan sebagai mufti Agung Negara. Dari pembahasan ini dapat kita ketahui bahwa gerakan wahabi yang tampak sebagai gerakan aliran keagamaan semata tetapi kalau kita lihat dari kaca mata ilmu politik ternyata gerakan ini sarat dengan kepentingan politik.

1. Muhammadiyah Versus Nahdlatul Ulama: Sebuah Persaingan Kuasa

Nahdhatul ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi terbesar di Indonesia. Pengaruh dari dua organisasi ini sangat terasa di tengah masyarakat. Meskipun berbeda masanya, kedua organisasi ini tetap menjadi tempat bernaung orang-orang Islam yang ingin terlibat dalam bidang sosial keagamaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari seluruh aktifitas keagamaan. (M. Alfian, 2001, p.19) Dalam sejarah Indonesia keberadaan NU dan Muhammadiyah memang amat menarik. Sepanjang perjalanan organisasi terbesar di Indonesia ini, senantiasa diwarnai kooperasi, kompetisi sekaligus konfrontasi.

Nahdhatul ulama didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 M. Kelahiran NU pada dasarnya merupakan muara dari perjalanan panjang ulama pesantren di awal abad 20 yang berusaha mengorganisir diri dan berjuang melestarikan budaya keagamaan kaum muslim tradisional disamping kesadaran untuk mengobarkan semangat nasionalisme. NU menganut Ahlu al-sunnah wa al-Jamaah yang merujuk pada Alquran, sunnah Nabi Muhammad dan khulafaur rasyidin yang secara teoritis dan faktual banyak terkait hadist, dengan konsep teologis Abu Hasan Al asy'ari dan Abu Hasan Al Maturidi serta empat madzhab dalam fiqh Islam.

NU menilai tidak semua tradisi itu buruk, asing dan tidak mempunyai relevansi kekinian, bahkan tidak jarang tradisi bisa memberikan inspirasi bagi munculnya modernisasi Islam. Para ulama umumnya telah memiliki jamaah (komunitas warga yang menjadi kelompoknya) dengan ikatan hubungan yang akrab, yang terbentuk dalam pola hubungan kyai-santri, terutama pada masyarakat dilingkungan pondok pesantren.

Pola hubungan tersebut mempunyai kesinambungan dengan pola dakwah Nahdhatul Ulama' yang mengambil wilayah dakwah kultural. Ini menyebabkan arah dan perjuangan dakwah Nahdhatul Ulama' tidak bisa dilepaskan dari proses dan perkembangan budaya dan tradisi yang ada di masyarakat.

Diantara ajaran keagamaan NU :

- a. Membaca qunut dalam sholat subuh
- b. Membaca sholawat/ puji-pjian setelah adzan

- c. Tarawih 20 rakaat
- d. Niat sholat dengan membaca usholli
- e. Tahlilan, Dibaiyah, barjanji dan selamatan (kenduren)
- f. Adzan jumat 2 kali
- g. Menyebut Nabi dengan kata sayyidina Muhammad
- h. Menggunakan madzhab Empat dalam Fiqh (Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi)

Sedangkan Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang di dirikan KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912 M, kata Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad yaitu nama Rasulullah SAW yang diberi tambahan ya' nisbah dan ta' marbutoh. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi munkar berakidah Islam bersumber dari Alquran dan sunnah, organisasi ini muncul untuk menjawab tantangan zaman berkaitan situasi modern di Indonesia.

Awalnya Muhammadiyah hanya ada di daerah-daerah karisedenan seperti Yogyakarta, Solo dan Pekalongan. Namun, saat ini persebarannya ada di berbagai daerah di Indonesia. Organisasi ini didirikan dengan tujuan memberikan dukungan pada upaya pemurnian ajaran Islam yang pada saat itu identik dengan hal-hal mistik. Muhammadiyah bergerak dibidang keagamaan dan pendidikan bertujuan mengajak masyarakat Indonesia untuk menjalankan ajaran Allah yang sebenarnya. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis tetapi juga dinamis.

Muhammadiyah dibangun dengan tata kelola yang baik dan terstruktur keberadaannya. Mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan ke desa-desa. Setiap tingkatan juga di kelola dengan baik. Muhammadiyah menerapkan manajemen yang terstruktur guna menunjang segala aktivitas dakwahnya.

Dalam anggaran dasar Muhammadiyah butir ke-6 dinyatakan : “ melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi “ , mengandung makna pentingnya organisasi sebagai gerakan yang niscaya. Dampak positif dari organisasi ini ditandai telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan diseluruh Indonesia.

Organisasi Muhammadiyah mempunyai beberapa ajaran :

- a. Tidak membaca qunut dalam sholat subuh
- b. Tidak membaca puji-pujian/ sholawat
- c. Tarawih 8 Rakaat
- d. Niat shalat tidak membaca usholli
- e. Tidak boleh Tahlilan, Dibaiyah, berjanzi dan selamatan (kenduren)
- f. Adzan jumat 1 kali
- g. Tidak menggunakan Sayyidina
- h. Tidak terakit pada madzhab dalam fiqh

Keberadaan kaum reformis (Muhammadiyah) dan tradisional (NU) yang saling berhadapan di Indonesia melahirkan sebuah persaingan di antara mereka baik dalam masalah otoritas keagamaan maupun lapangan politik dan kekuasaan. Perbedaan pandangan, prinsip, dan perang wacana dalam masalah furū'iyah keagamaan berlanjut dengan perebutan pengaruh dan rivalitas kuasa di ruang publik.

Meski semula terutama sebelum tahun 1920-an hubungan dua arus besar Islam di tanah air ini cukup harmonis. Ini tercermin, misalnya, dalam sosok diri Kiyai Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan salah satu tokoh kaum tradisional, ketika masih belajar di Makkah ia mendirikan Sarikat Islam (SI) cabang Makkah. Demikian pula ketika kembali ke tanah air, bersama-sama dengan Mas Mansyur (salah seorang tokoh kaum reformis, alumni al-Azhar), dia mendirikan Nahdlatul Wathan di Surabaya pada tahun 1916. (Yudi Latif, 2005, p.282)

Situasi berbeda ketika pada tahun 1920-an, pengaruh ajaran reformasi dan pembaruan Islam semakin kuat menembus kantong-kantong masyarakat muslim tradisional dan membawa ancaman serius bagi para ulama tradisional. Dalam kondisi seperti ini, Mas Mansur meninggalkan Nahdlatul Wathan dan teman-temannya di komunitas ulama tradisional dan selanjutnya bergabung dengan barisan kaum reformis dan masuk anggota Muhammadiyah. Pada masa-masa selanjutnya konflik-konflik di antara dua sayap masyarakat muslim Indonesia itu terus berlangsung bahkan semakin tajam. Tambahan lagi konflik-konflik tersebut seringkali diperparah dengan adanya permusuhan personal di antara mereka yang sebelumnya pernah berteman akrab. (Yudi Latif, 2005, p. 283)

Dalam rangka untuk memperluas pengaruhnya, kaum reformis melebarkan sayapnya ke wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis pengaruh kaum tradisional. Persatuan Islam dan Muhammadiyah misalnya, terus melebarkan sayap pengaruhnya di Jawa. Muhammadiyah saat itu telah

berhasil memasuki wilayah Jawa Timur yang menjadi basis kaum tradisional (Nahdlatul Ulama). Deliar Noer melaporkan bahwa setidaknya ada tiga agen reformis yang berhasil menanamkan pengaruhnya di Jawa Timur. Mereka adalah Mas Mansur, Pakih Hasyim, dan Ahmad Dahlan sendiri. Mas Mansur (1896-1946) setelah menamatkan pendidikannya di Kairo, Mesir ia kembali pulang ke Surabaya tahun 1913 dan bersama-sama dengan Abdul Wahab Hasbullah ia mendirikan sekolah Nahdlatul Wathan (kebangkitan tanah air) mereka berdua aktif mengajar dan mengelola lembaga pendidikan yang mereka dirikan itu. Tetapi kemudian, demikian menurut Deliar Noer, Mas Mansur mengundurkan diri dari sekolah tersebut karena tidak cocok dengan system dan metode yang dipakai oleh lembaga itu. Kemudian ia mendirikan sekolah sendiri yang diberi nama Hizbul Wathan (tentara tanah air). (Deliar Noer, 1988, p.246).

Sedangkan Pakih Hasyim merupakan pemuda asal Minangkabau, murid dari Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul), yang datang ke Surabaya untuk tujuan bisnis. Di sela-sela kegiatan bisnis, ia juga aktif berdakwah dan ikut andil dalam menyebarkan paham kaum reformis di Surabaya. Ia telah menggoncangkan dunia kaum tradisional karena metode dan isi dakwahnya yang kontroversial. Ia melarang praktik niat shalat dengan memakai *uṣalli*, menyerang amalan-amalan keagamaan yang dipraktikkan oleh ulama tradisional, serta menganjurkan masyarakat muslim untuk tidak hanya taqlid pada kitab-kitab mazhab saja tetapi melanjutkan kajiannya (ijtihad) dari sumber asli yaitu, al-Quran dan sunnah. Kegiatan Pakih Hasyim sebagai agen dakwah reformasi Islam ini pada gilirannya juga menggugah hati Ahmad Hassan untuk mengkaji dan merenungkan ide-ide reformasi Islam yang telah disampaikan.(Deliar Noer, 1988, P.247.

Bisri Affandi dalam penelitian tesis masternya yang berjudul *Shaykh Ahmad al-Surkati: His Role in al-Irsyad Movement in Java in the Early Twentieth Century* melaporkan bahwa kaum reformis yang dipelopori oleh Mas Mansur, Ahmad Surkati, dan Pakih Hasyim membuat kalang kabut barisan ulama tradisional. Seruan-seruan reformasi dan pembaruan yang disampaikan oleh Pakih Hasyim telah membuat goncang dan resah kaum muslim tradisional karena dakwahnya tentang ajaran Islam berlawanan dengan ajaran ulama kaum tradisional. Ia menyerang orang yang membaca *uṣalli* ketika niat shalat dan mencela amalan-amalan yang biasa dipraktikkan kaum tradisional. Kecuali itu ia juga mendesak agar masyarakat muslim meninggalkan kitab-kitab mazhab dalam mempelajari Islam dan sebaliknya menganjurkan agar mengkaji Islam secara langsung dari sumber aslinya yaitu al-Quran dan Hadits Nabi SAW.(Bisri Affandi, 1999, p. 223)

Dua golongan yang sama-sama muslim ini saling berhadapan dan mencela satu sama lain sebagai kafir dan musyrik. Meski kaum tradisional terbuka untuk menerima perubahan dalam hal pendidikan dengan membuka sekolah modern dalam system pendidikan pesantren, tetapi menolak perubahan kurikulum keagamaan terutama berkaitan dengan pengajaran kitab-kitab mazhab atau yang populer dengan kitab kuning. (Bisri Affandi, 1999, p.223)

Kemudian pada tahun 1920 Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah juga datang di Surabaya dan bertemu dengan tokoh-tokoh Islam di wilayah itu. Ia menjelaskan perlunya melakukan kajian lansung (ijtihad) dari sumber asli yaitu, al-Qur'an dan Sunnah dan tidak semata-mata taklid kepada kitab-kitab fikih karya ulama klasik. Seruan Ahmad Dahlan ini mendapatkan sambutan yang hangat. Karena itu pada tanggal 1 November 1921 mereka yang sudah terpengaruh dengan ide-ide reformasi dan pembaruan Islam baik dari pengikut Mas Mansur, Pakih Hasyim, maupun pengikut Ahmad Dahlan sendiri bersama-sama mendirikan cabang Muhammadiyah di ibu kota wilayah Jawa Timur itu. (Bisri Affandi, 1999, p.247)

Satu hal yang membuat hati kaum tradisional sakit dan meradang dalam perebutan pengaruh di ruang publik ini adalah wilayah Kapanjen, Jawa Timur yang selama ini menjadi basis kaum tradisional, ternyata telah terpengaruh oleh ide-ide reformis dari Muhammadiyah. Kapanjen memang memiliki hubungan dagang terutama kain batik dengan Solo dan Yogyakarta. Dari hubungan bisnis inilah kemudian paham dan pemikiran reformasi Islam dapat ditularkan. Ahmad Dahlan sering berkunjung ke wilayah ini kecuali urusan dagang batik juga organisasi Sarekat Islam di mana Ahmad Dahlan sebagai penasihat Central Sarikat Islam. Di Kapanjen ini, ia terus menyampaikan ide-ide reformisnya kepada masyarakat muslim. Buah pikiran Ahmad Dahlan ini banyak diterima oleh masyarakat Kapanjen. Di sisi lain, ada juga seorang ulama lain dari golongan tradisional yang datang dari Kudus Jawa Tengah, Kiyai Haji Raden Asnawi yang juga memiliki hubungan bisnis dengan orang-orang Kapanjen. Mengetahui kondisi masyarakat muslim di Kapanjen telah terpengaruh oleh ide-ide dari Muhammadiyah, Kiyai Asnawi mulai mencela dan menjelaskan kelemahan-kelemahan argumen dari pikiran-pikiran Muhammadiyah itu dan mengajak orang-orang muslim Kapanjen melakukan hal yang sama. Dengan demikian Kota Kapanjen telah menjadi ajang perebutan pengaruh antara kaum reformis dan tradisional. (Deliar Noer, 1988, p.247)

Konflik yang berlangsung semakin tajam antara kaum reformis dan tradisional ini secara politik amat merugikan umat Islam secara keseluruhan karena, di sisi lain, tekanan politik dan bargaining power dari kaum komunis dan kelompok-kelompok politik yang lain semakin meningkat yang butuh dihadapi umat Islam dengan kekuatan bersama. Melihat gelagat yang tidak menguntungkan tubuh umat Islam itu, kelompok elit Sarikat Islam (SI) melakukan langkah-langkah yang berusaha menyatukan umat Islam dari perpecahan. Dalam rangka mencapai tujuan itu, pada tanggal 31 Oktober—November 1922 diselenggarakan Kongres Pertama al-Islam di Cirebon dengan dua agenda utama, yaitu; pertama, perdebatan mengenai perkara-perkara furū' dan khilāfiah yang menjadi ajang konflik umat Islam harus ditinggalkan atau minimal dikurangi. Kedua, mengajak seluruh elemen umat Islam untuk bersatu di bawah kepemimpinan khilāfah. Namun, pada kenyataannya, Kongres Pertama al-Islam itu tidak memuaskan semua pihak. Kelompok elit SI yang kebanyakan terdidik secara Barat dan tokoh-tokoh terkemuka dari kaum reformis yang umumnya dari daerah perkotaan lebih dominan menguasai kepemimpinan Kongres. Sebaliknya, tokoh-tokoh dan ulama kaum tradisional diabaikan dan ditempatkan dalam posisi yang marginal. Posisi tidak seimbang ini semakin tampak pada Kongres Kedua al-Islam Mei 1924 yang diselenggarakan di Garut karena yang hadir mengikuti kongres hanya dari kalangan kaum reformis-modernis. (Yudi Latif, 2005, p.283)

Selanjutnya umat Islam Indonesia mengadakan lagi Kongres al-Islam ketiga di Surabaya pada tanggal 24-26 Desember 1924. Kongres ini mempunyai agenda utama untuk memilih anggota-anggota delegasi yang mewakili Indonesia ke Kongres Kairo, Mesir. Hal itu berkaitan dengan para ulama al-Azhar yang dipimpin oleh Rasyid Ridha yang berencana menyelenggarakan “Kongres Islam se-Dunia” guna merespon penghapusan system kekhalifahan di Turki yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938) pada bulan Pebruari 1924. Kekecewaan kaum ulama tradisional semakin dalam pada hasil Kongres al-Islam yang ketiga ini karena yang terpilih menjadi anggota-anggota delegasi hanyalah dari kaum reformis. (Yudi Latif, 2005, p. 283-284)

SIMPULAN

1. Sebagai kita pahami bahwa Islam bisa dikaji lewat teks karangan ulama, kandungan dari teks, dari pemeluknya dan kebudayaannya. Makalah ini mencoba memandang Islam dalam hal ini budaya pemeluknya dari aspek politik yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :
2. Studi Islam Pendekatan politik adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada lembaga social agar timbul motivasi/keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan serta perdamaian pada masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan politik dimaksudkan untuk mengkaji masyarakat muslim atau budayanya dari aspek politik.
3. Studi Islam dari pendekatan politik dikatakan menarik dan penting. Pertama, karena dalam sejarah perkembangannya Islam selalu diwarnai oleh dinamika politik para pemeluknya yang berebut/bersaing dalam masalah kuasa, bahkan seringkali terjadi kasus pemutarbalikan ajaran Islam yang menyelewengkan penafsiran Al-Qur'an dan hadist dalam rangka mencapai tujuan kuasa . Kedua, masalah politik menarik perhatian masyarakat pada umumnya karena politik selalu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tertib, aman dan damai sejahtera lahir dan batin tidak dapat dilepaskan dari sisitem politik yang diterapkan.
4. Studi Islam dengan pendekatan politik dapat dilakukan dengan 5 pendekatan: : Pertama, Pendekatan politis Dekonfessionalisasi. Kedua, pendekatan politis Demostikasi Islam. Ketiga, pendekatan politik Skismatik dan Aliran. Keempat, Pendekatan politik Trikotomi. Kelima, Pendekatanpolitik kultural atau Diversifikasi.
5. Gerakan aliran wahabi di Saudi Arabia yang tampak sepintas adalah murni gerakan keagamaan akan tetapi setelah kita kaji menurut kaca mata ilmu politik, gerakan mereka sangat sarat dengan muatan politis, terbukti dari keberhasilan mereka mendirikan sebuah Negara kerajaan Saudi Arabia.
6. NU dan Muhammadiyah yang tampak sebagai gerakan social keagamaan yang mengusung dakwah Islam dan keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah furu'iyah keagamaan tetapi ketika kita lihat dari kaca mata ilmu politik, kedua ormas itu tidak hanya berbeda pandangan dalam masalah agama tetapi juga memiliki persaingan yang ketat dalam masalah politik dan kekuasaan, berebut pengaruh dan akses-akses kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Mawardi, Abu Hasan, *al-ahkam al-Suthaniyyah*. (1983). Kairo. Dar al-Fikr
- Al-Razi, Fahrudin, *Mafatih al-Ghoib* (Cairo : Mauqi' al-Tafsir, tt), vol 7
- al-Raziq, Ali abd, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, (kairo: Tp., 1925)
- al-Syaukani, *Fathal-Qadir*, (Cairo: Mauqi' al Tafasir,tt). Vol5.
- Ayoob, Mohammed(ed), *The Poitics of Islamic Reassertion*, London: Croom Helm, 1981)
- Ayubi, Nazih, *PoliticallyIslam: Religion and Politics in The Arab World*, (London dan New York: Routledge, 1991)
- Azra, Azyumardi, *Pergolaan Politik Islam: Dari Fundamentalisme , Modernisme Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996)
- Binder, Leonard, *Religion and politics in Pakistan*, (Berkeley dan Los Angele: University of California Press, 1963)
- Chuzaimah Batubara, dkk. (2018). *Handbook Metodologi Studi Islam*, cetakan 1. Jakarta Timu. PrenadaMedia.
- <http://m.merdeka.com>. Di akses pada pukul 12:00 WIB tanggal 4 Oktober 2021
- Yudi Latif, (2005). *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Cet. 1. Bandung. Mizan.
- Deliar Noer. (1988). *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. terjemahan Deliar Noer. Cet. 4. Jakarta: LP3ES.
- Kuntowijoyo. (1997). *IdentitasPolitik Umat Islam*. Cet 1. Bandung. Mizan.
- Harun Nasution. (1979). *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jilid II. Jakarta : UI Press.
- Sirojuddin Abbas. (2006). *I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah*. Jakarta. CV Pustaka Tarbiyah.
- Muhammad Dhiauddin Rais. (2001). *Teori Politik Islam*. Terj. Jakarta. Gema Insani Press.

- Khairul Muhtadin. (2015). *Deradikalisasi Politik Wahabi-Syi'ah Dalam Konteks Madzhab Tafsir keIndonesiaan*,: Jurnal Syariat studi Al-Qur'an dan Hukum. Vol 1 No 02. November 2015.
- Fabe Armanions, "*The Islamic Tradition Of Wahabism and Salafiyya*", dalam CRS Report for Conggres, www.fas.org/sgp/crs/misc/RS21695.pdf. (20 Maret 2013)
- (M. Alfian"NU Muhammadiyah dan civil Islamdalam kompas 19 desember 2001)
- Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligencia Muslim Indonesia Abad ke-20*, Cet. 1, (Bandung: Mizan, 2005
- Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*, terjemahan Deliar Noer, Cet. 4 (Jakarta: LP3ES, 1988),
- Bisri Affandi, *Shaykh Ahmad al-Surkati: His Role in al-Irsyad Movement in Java in the Early Twentieth Century* , terjemahan dalam Bahasa Indonesia, Editor Katamsi Ginano, Cet.1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999),
- Eposito, John L. (ed), *Islam and Politics*, (Syracuse: Syarcuse University Press, 1984)
- Halliday, Fred dan Hamzah alavi (eds), *State and Ideology in the Middle East and Pakistan*, (New York Monthly Review Press, 1988)
- Ibn Hanbal, Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad, *Masnad Ahmad*, (Cairo: mauqi' Qazarat al-Auqaf al-Mishriyyah,tt)
- Ibn Khaldun, abd al-Rahman, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1958)
- Mortimer, Edward, *Faith and poer: the Politics of Islam*, (London Faber aand Faber, 1982)
- Jalaluddin Rakhmat, Said AqilSiraj, dan Masdar F. Mas'udi, "*Kaum Beriman*," dalam: *Lautan Wahyu: Islam Sebagai Rahmatan Lil 'alamin*, episode 4, Supervisor Program: KH A Musthofa Bisri, LibForAll Foundation 2009)

PERADABAN ISLAM PADA MASA KHULAFURRASYIDIN

Moh Ferry Rochman Chakim - Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kudus
ferryrochmanchakim@gmail.com

Mualimul Huda - Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
mualimulhuda@iainkudus.ac.id

Abstrak

Abu Bakar yang diangkat sebagai penerus khalifah Nabi berdasarkan musyawarah yang diadakan di Tsaqifah Bani Sa'idah antara Ansar dan Muhajirin, mendapat baiat dari mayoritas umat Islam, tetapi tidak dari Ali bin Abi Thalib kecuali enam bulan. nanti. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dapat menyelamatkan umat Islam dari krisis yang sangat kritis karena munculnya orang-orang murtad, nabi-nabi palsu dan yang enggan membayar zakat, Abu Bakar bertindak tepat untuk memerangi mereka hingga kembali kepada kebenaran. Karena itulah Abu Bakar dikenal sebagai khalifah penyelamat Negara Islam. Umar bin Khathab yang terpilih sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar melakukan pembenahan administrasi negara, membentuk lembaga peradilan, Baitul Mal, lembaga kepolisian, lembaga pertahanan negara dan memperluas wilayah Islam ke front timur dan barat. Sehingga ia dikenal sebagai khalifah yang berhasil membenahi penyelenggaraan pemerintahan Islam. Utsman bin Affan yang terpilih sebagai khalifah pengganti Umar, menggantikan pejabat yang diangkat oleh Umar, kecuali Muawiyah di Syrio, membubarkan dewan Baitul Mal, membeli dan menjual tanah Negara yang mengakibatkan munculnya kerusuhan. Akibatnya, orang-orang berjalan dari Mesir, Kufah dan Bahsah ke ibu kota Negara Madinah menuntut Utsman mengundurkan diri, jika tidak mampu memperbaiki keadaan. Akhirnya para pemberontak dibubarkan dan membunuh Khalifah Utsman. Ali bin Abi Thalib yang diangkat oleh para pemberontak sebagai khalifah tidak mendapatkan bai'at dari para sahabat, seperti Thalhah, Zubeir dan Muawiyah, termasuk Aisyah. Mereka menuntut balas dendam atas kematian Utsman yang tidak bisa dipenhi oleh Khalifah Ali. Akibatnya, perang Jamal dan perang Shiffin terjadi, yang memakan banyak korban Muslim.

Kata kunci: Khulafaur Rashidin, khalifah, penerus Nabi.

Abstract

Abu Bakar, who was appointed as the successor of the Prophet's caliph, based on a discussion held at Tsaqifah Bani Sa'idah between the Ansar and the Muhajirin, received allegiance from the majority of Muslims, but not from Ali bin Abi Talib except six months later. Appointment of Abu Bakr as caliph can save Muslims from a very critical crisis because of the emergence of apostates, false prophets and who are reluctant to pay zakat, Abu Bakr acts appropriately to fight them until they return to the truth. That's why Abu Bakr is known as the caliph savior of the Islamic State. Umar bin Khathab, who was chosen as the caliph to replace Abu Bakr, made improvements to the state administration, formed a judicial institution, Baitul Mal, police institutions, state defense institutions and expanded Islamic territory to the east and west fronts. So that he is known as the caliph who succeeded in fixing the administration of Islamic government. Uthman bin Affan who was chosen as Umar's successor caliph, replaced the officials appointed by Umar, except Muawiyah in Syria, dissolved the council of Baitul Mal, bought and sold State land resulting in the emergence of riots. As a result, the people walked from Egypt, Kufa and Bahsah to the capital of the State of Madinah demanding that Uthman resign, if not able to improve the situation. Eventually the rebels were disbanded and killed Caliph Uthman. Ali ibn Abi Talib, who was appointed by the rebels as caliph, did not get the bai'at of the companions, such as Thalhah. Zubeir and Muawiyah. including Aisha. They demanded revenge for the death of Uthman which Caliph Ali could not meet. As a result, the Jamal war and the Shiffin war took place, which took many Muslim victims.

Keywords: *Khulafaur Rashidin, caliph, successor of the Prophet.*

PENDAHULUAN

Selama hidupnya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mewariskan kepada siapapun siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin Islam setelah wafatnya. Ini menunjukkan bahwa dia telah menyerahkan. atas masalah kepemimpinan dan kepala negara kepada seluruh umat Islam. Tak lama setelah kematiannya, dan sebelum jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai kota sa'idah, kota Madinah, untuk merundingkan siapa yang akan menjadi pemimpin pemerintahan menggantikannya. Dengan semangat ukhu wah yang tinggi, akhirnya terpilihlah Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai pemimpin menggantikan Nabi.

Pada masa berikutnya, umat Islam dipimpin oleh khalifah yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rashidin bijih para khalifah yang arif dan bijaksana. Mereka adalah empat sahabat yang terpilih menjadi para pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Khilafah adalah posisi yang sangat besar dan tanggung jawab yang begitu besar. Karena. Dengan kedudukan ini, seorang khalifah berkewajiban mengurus dan mengatur berbagai urusan umat Islam. Khalifah adalah orang pertama yang paling bertanggung jawab. (al-Azizi, 2017: 61-62).

Ibnu Khaldun, sebagai seorang pemikir Islam tentang masyarakat dan negara, merumuskan bahwa negara adalah masyarakat yang memiliki wasi dan mulk, yaitu memiliki otoritas dan kekuasaan. Oleh karena itu, seorang khilafah harus selalu memegang dua prinsip. Prinsip pertama yang harus diyakini dan dipatuhi adalah bahwa semua kekuatan di bumi ini ada di Allah, karena Dialah yang menciptakan. Prinsip kedua adalah bahwa syariat Islam telah ditetapkan oleh Allah untuk membimbing umat manusia dalam menjalankan fungsi khilafahnya di muka bumi. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, negara yang diatur menurut syariah Islam secara teknis disebut: Khilafah al-Islamiyah.

Al-Maududi menegaskan bahwa negara dan pemerintahan Islam tidak lahir secara ajaib dengan kesempurnaan yang tiba-tiba, tetapi melalui upaya yang besar dan menyeluruh termasuk proses pembinaan dan pembentukan pikiran rakyat jelata. Banyak yang berpikir. bahwa negara Islam identik dengan harem, pemimpin jahil yang cenderung hedonistik yang memakai topeng agama sebagai alat untuk mengelabui rakyat untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok. Keberadaan khilafah adalah suatu keharusan (wajib/fardhu) kewajiban tersebut berdasarkan ijma para sahabat dan tabi'in. Para pemikir Muslim berbeda pendapat tentang sumber dalil kewajiban ini. Sebagian berpendapat bahwa kewajiban kepemimpinan didasarkan pada

argumentasi rasional (aqli) semata, bukan bersumber dari syariat. Berbicara tentang bentuk khilafah yang telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin telah memberikan kontribusi yang signifikan, terutama sebagai simbol persatuan umat Islam. Sejak dihapuskannya sistem khilafah di era Usmani telah menimbulkan kemarahan masyarakat khususnya para pemikir Islam.

Banyak upaya telah dilakukan oleh kelompok tertentu untuk menghidupkan kembali Hukum Islam (sistem khilafah) bahkan sampai sekarang. Bahkan, isu hukum Islam telah diperluas menjadi khilafah Islam, ada perdebatan. Sebagian kalangan menganggapnya mutlak untuk diterapkan, dengan mengacu pada kondisi kekhalifahan zaman. Yang lain berpendapat bahwa tidak ada konsep negara Islam pada masa Nabi, sebenarnya bukan negara Islam tetapi pada peradaban Islam. Dalam hal ini terjadi penyerahan kekuasaan khilafah setelah Nabi yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Antara bentuk dan transfer kekuasaan. Setelah Nabi Muhammad saw. Perlu diketahui bahwa jabatan sebagai khalifah bukanlah jabatan turun-temurun seperti yang dilakukan oleh raja-raja Roma dan Persia, melainkan dipilih secara perwakilan. Pada masa Khulafaur Rasyidun terhitung selama 30 tahun yang terdiri dari empat khalifah, yaitu: Abu Bakar As-Siddiq, Umar Bin Khatab, Utsman Bin Affon, dan Ali Bin Abi Thalib. (Marziah, 2020: 2-3).

Para khalifah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah Muslim. Mereka berfungsi sebagai:

- a. pemimpin Muslim,
- b. penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi,
- c. kepala negara dan kepala pemerintahan, serta
- d. mengembangkan dan memperluas wilayah Islam.

Adapun nama-nama Khulafaur Rashidin yang menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad adalah sebagai berikut:

- a. Abu Bakr as-Siddiq (632-634 AD/11-13 H)
- b. Umar bin al-Khattab (634-644 AD/13-23 H)
- c. Utsman bin Affan (644-656 M / 23-35 H).
- d. Ali bin Abi Thalib (656-661 M/35-40 H)

Sejak era Khulafaur Rasyidin, Islam telah berkembang sangat pesat dan telah berhasil menguasai sepertiga dunia. Semua ini tidak terlepas dari kesungguhan umat Islam dalam menaklukkan dan mendakwahkan ajaran Islam ke berbagai penjuru dunia. (al Azizi, 2011: 61-62). Faktor lain pada masa

Khulafaurasyidin adalah kemajuan yang pesat, ditandai dengan perkembangan zaman di berbagai bidang yaitu, perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, pendirian lembaga baitul mol, pembangunan sarana ibadah, pembukuan Al-Qur'an. perkembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. -lainnya, (Yatim, 1998: 41-42).

Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa soal yang hendak dikaji dan didalami dalam Jurnal ini, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pergantian kepemimpinan dari masa Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin?
2. Bagaimana kepemimpinan negara dari masa Rasulullah hingga masa Khulafaur Rasyidin?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berpijak pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pergantian kepemimpinan dari masa Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin.
2. Untuk mengetahui kepemimpinan negara dari masa Rasulullah hingga masa Khulafaur Rasyidin.

Tinjauan Studi Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang Al Khulafaurasyidin antara lain:

Asih Setiyowati, dkk. (2021), Menulis tentang. *Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin "Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib"*, Berbicara tentang manajemen kepemimpinan Islam pada masa Khulafaur Rashidin. Fokus penelitian ini membahas manajemen kepemimpinan pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-shidiq, Umar bin Khatab, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen dan model kepemimpinan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode

penelitian review paper, dimana peneliti mempelajari dan memahami penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terjadi kekosongan kepemimpinan umat Islam dan Nabi tidak meninggalkan wasiat siapa yang akan melanjutkan kepemimpinannya karena Nabi menyerahkan segalanya kepada umat Islam. Terpilihnya Khulafaur Rasyidin sebagai penerus Nabi dilakukan dengan dua cara, yaitu musyawarah. dan penunjukan langsung. Model kepemimpinan Abu Bakar bersifat sentral, yaitu terus melakukan musyawarah, Umar menerapkan model kepemimpinan yang tegas dan koersif namun tetap mengutamakan.

Taqwatul Uliyah (2021), Menulis tentang, *POLA PENDIDIKAN DALAM ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN*, Berbicara Tentang Setelah Nabi Muhammad wafat, Ansor ingin mengganti khalifah dari kalangan mereka sendiri. Ali bin Abi Thalib ingin menjadi khalifah, karena menantu dan kerabat terdekat Nabi. Tetapi mayoritas Muslim menginginkan Abu Bakar. Kemudian dia terpilih sebagai khalifah. Mereka yang tadinya ragu-ragu, segera mendatangi Baiah Abu Bakrgave. Kemudian khilafah disusul oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan khalifah. terakhir Ali bin Abi Thalib. Khalifah peduli dengan pendidikan, ajaran agama, dan negara Islam yang maha kuasa. Materi pendidikan yang telah dicontohkan Nabi adalah: pendidikan tauhid, pendidikan ibadah (sholat), pendidikan adab dalam keluarga dan, kehidupan masyarakat, pendidikan kepribadian, dan pendidikan bela diri.

Abdul Adib (2021), Menulis tentang. *POLA PENDIDIKAN ISLAM PERIODE KHULAFUR RASYIDIN*, Berbicara tentang sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kaum Anshar menginginkan agar orang yang berhasil menjadi ustadz berasal dari kalangan mereka. Ali bin Abi Thalib menginginkan dia menjadi khalifah, karena dia adalah menantu dan kerabat dekat Nabi. Tapi kebanyakan Muslim menginginkan Abu Bakar. Jadi dia terpilih menjadi khalifah. Mereka yang ragu-ragu, segera mengucapkan sumpah setia kepada Abu Bakar. Selanjutnya khilafah dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Usman bin Affan dan yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib. Para khalifah memusatkan perhatian mereka pada pendidikan, pesan agama, dan kekuatan Negara Islam. Materi pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bijih: pendidikan tauhid, pendidikan harta (ibadah), pendidikan budi pekerti dalam keluarga dan masyarakat (kehidupan bermasyarakat), pendidikan kepribadian, dan pendidikan hankam.

Mohammad Adnan (2019), Menulis Tentang, *Wajah Islam Priode Makkah Madinah Dan Khulafaurrasyidin*, Berbicara tentang Islam yang ada saat ini merupakan kelanjutan dari Islam yang telah menjadi sejarah di masa lalu. Artinya, ketika kita mencoba mengungkap esensi makna yang ada dalam Islam saat ini, tentu kita harus melihat bagaimana Islam di masa lalu (membaca sejarah). Dalam konteks ini, ketika kita berbicara tentang sejarah Islam, tentunya kita tidak akan pernah lepas dari sejarah awal kemunculan Islam itu sendiri. Pengetahuan sejarah sangat penting karena akan menambah wawasan dan pemahaman terhadap suatu keadaan masa lalu dan memberikan perbandingan keadaan masa lalu dengan keadaan saat ini.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban variabel terhadap suatu masalah, sampai data terbukti dan semuanya terkumpul. Sedangkan Sutrisno Hadi mengatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya, dan masih perlu dibuktikan kebenarannya. Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih bersifat umum dan perlu dirumuskan kembali bahkan diuji kebenarannya kembali, antara hubungan dua variabel atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah penelitian.

HI : Faktor Keberhasilan Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin,

H2 : Faktor Pertumbuhan Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin,

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah literature review, yaitu munculnya argumentasi-argumentasi nalar ilmiah. Tinjauan pustaka yang memuat beberapa gagasan dan proporsi yang berkaitan dengan penelitian didukung oleh data dan informasi yang diperoleh dari sumber pustaka.

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Oleh karena itu pengumpulan data dilakukan melalui perpustakaan dengan studi pustaka dengan memuat tema. sesuai dengan judul saya.

Data sekunder adalah data atau bahan yang memberikan penjelasan tentang data primer, sedangkan bahan data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku, skripsi, jurnal, artikel, dan data dari internet yang berkaitan dengan topik. (Suprpto, 1981:11). Dalam penelitian ini dapat dijadikan contoh data sekunder, seperti: *Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin "Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib"* Karya Asih Setiyowati. dkk. *Pola Pendidikan Dalam Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin*, Karya Taqwatul Uliyah. *Pola Pendidikan Islam Periode Khulafaur Rasyidin*, Karya Abdul Adib.

Metodologi

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, artikel jurnal saya difokuskan tentang peradaban Islam pada masa al-Khulafa al-Rasyidin. Melalui kerangka fokus penelitian ini, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan melalui perpustakaan dengan studi pustaka dengan memuat tema-tema yang sesuai. Sumber data artikel berasal dari literatur peradaban Islam pada masa al-Khulafa al-Rasyidin berupa buku, jurnal, artikel, dll. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis isi yang diartikan sebagai metode menganalisis isi pesan sesuai dengan tema.

Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sehingga teknik yang digunakan adalah teknik Studi Dokumentasi (Literature Study), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data atau informasi penting untuk terwujudnya validitas penelitian, karena analisis ilmiah terhadap data yang terkumpul memberikan makna tertentu. Untuk menganalisis data dalam penelitian kepustakaan ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis data berpikir reflektif, yaitu teknik analisis data dengan proses berpikir bolak-balik. Pertama, dengan proses induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-

fakta khusus dari suatu peristiwa konkret dan kemudian menarik kesimpulan umum. Kedua, dilanjutkan dengan proses deduktif, yaitu berangkat dan berangkat dari pengetahuan umum untuk menilai peristiwa tertentu (Sudjana, 1997: 7). Selain itu, untuk menganalisis data yang ada, penulis juga menggunakan metode komparatif, yaitu meneliti faktor-faktor dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya (Arikunto. 1996: 145).

PEMBAHASAN

Pengertian dan Pembentukan Khilafah

Setelah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, perjuangan menyebar. Islam berpaling kepada empat sahabat terdekatnya, yang dikenal sebagai khulafaur rasyidin. Siapakah khulafaur rasyidin itu?

Khulafaur Rashidin adalah penerus jabatan Nabi Muhammad SAW. Sebagai pemimpin negara. Maka setelah beliau wafat, posisi kepemimpinan negara dilanjutkan oleh mereka, ada empat khalifah Rasyidun, dan keempatnya menjadi khalifah secara bergantian, yaitu Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Ustman Bin Affand, dan Ali Bin Abi Thalib. Nah, keempat khalifah tersebut adalah khalifah yang jujur dan menjunjung tinggi kebenaran dan mereka tetap menjunjung tinggi ajaran Islam hingga ke luar Jazirah Arab. Kata (khalifah) biasanya diterjemahkan sebagai pengganti atau seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Istilah khalifah muncul dalam Al-Qur'an.

"Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat: 'Aku akan menjadi khalifah di bumi.' memuji-Mu dan mensucikan-Mu?" Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 02). Secara istilah, khalifah adalah seorang pemimpin yang diangkat setelah wafatnya Nabi menggantikan Nabi dan melanjutkan tugasnya sebagai pemuka agama dan pemerintah. Memahami dasar khilafah tentang syariah, khilafah digunakan untuk merujuk pada lembaga kekuasaan yang menggantikan Nabi Muhammad dalam kepemimpinan Negara Islam. Inilah yang dimaksud pada masa awal Islam.

Disimpulkan bahwa Khalifah berarti penerus Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan pemimpin agama. Dengan demikian, khalifah bertugas menggantikan Nabi sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin agama, bukan menggantikan Muhammad SAW sebagai Nabi, karena posisi

kenabian tidak dapat digantikan oleh siapa pun. Rasulullah SAW wafat tanpa mengangkat seorang khalifah menggantikannya sebagai pemimpin. Dia tidak pernah memberikan indikasi rinci tentang penunjukan pemimpin pengganti Nabi. Kemudian masyarakat bermusyawarah untuk menentukan khalifah pengganti Nabi. Umat menamakan sistem khilafah ini sebagai “khilafah yang adil dan benar” atau “Al-Khilafah ar-Rasyidah/Al-Khulafa al-Rasyidun” dan itulah satu-satunya cara yang benar untuk menggantikan posisi Rasulullah menurut kaum Muslim.

Al-Khulafa al-Rasyidun adalah seorang pemimpin Islam dari kalangan para sahabat, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.⁶ Mereka adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme demokrasi. Al-khulafa al-Rasyidun adalah penerus Nabi. Islam sebagai ajaran dan Islam sebagai lembaga negara mulai tumbuh dan berkembang saat itu. Sistem suksesi dan pengangkatan khalifah sebagai kepala negara merupakan pola terpenting pemerintahan khalifah Rashidun. Keempat khalifah dipilih dengan cara yang sama. Pola pemilihan dapat dikategorikan sebagai pemilihan langsung yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah pemilihan sosok khalifah, sedangkan tahap kedua, penegasan legitimasi khalifah terpilih melalui baiat (janji setia).

Pada prinsipnya, pemilihan empat khalifah didasarkan pada petunjuk Al-Qur'an yang menekankan bahwa “dalam menyelesaikan semua masalah yang dihadapi harus dilakukan dengan cara musyawarah” Surah Ash-Syura ayat 38: “Dan (untuk) orang-orang yang menerima (menaati) panggilan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Dan itu dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 159: “Maka karena rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jika Anda keras hati dan keras hati, mereka akan menjauhkan diri dari semua di sekitar Anda. Maka ampunilah mereka, mintalah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam masalah itu. Kemudian ketika kamu telah memutuskan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (Taufikurrahman dan Usman, 2020:112-113).

Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq (632-634 M)

Abu Bakar, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra Islam bernama Abdul Ka'bah, kemudian digantikan oleh nabi menjadi Abdullah. Dia termasuk salah satu teman utama. Dijuluki Abu Bakar karena dialah orang pertama yang memeluk Islam. Ia mendapatkan gelar Ash-Shiddiq karena ia langsung membenarkan dalam berbagai acara, terutama Isra dan Mi'raj. Sering menemani Nabi pada saat-saat penting atau jika terhalang, Nabi mempercayainya sebagai pengganti untuk menangani tugas agama dan atau mengurus masalah di Madinah. (Amin, 2009. 93-94).

Kepribadiannya dan Tsaqifah Bani Sa'idah

Abu Bakar lahir dalam lingkungan kesukuan yang berpengaruh. Dengan demikian, ia memiliki hubungan yang luas di antara suku Quraisy. Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam. Masuknya Abu Bakar ke dalam Islam karena ia sangat mengenal kepribadian Nabi. Karena itu, ketika Rasulullah mengundangnya. untuk masuk Islam dia langsung menerimanya karena dia percaya bahwa apa yang dikatakan Nabi itu pasti benar. Sikap ini juga ditunjukkan oleh Abu Bakar ketika mengimani Isra Mi'raj Nabi..

Pengorbanan Abu Bakar untuk Islam telah diakui secara luas oleh para sejarawan. Berkat dia, banyak teman dekatnya masuk Islam. Mereka yang masuk Islam diundang oleh Abu Bakar untuk kemudian menjadi tokoh penting dalam penyebaran Islam lebih lanjut. Berkat pengorbanannya yang besar dalam Islam, tidak mengherankan jika Abu Bakar kemudian menjadi tangan kanan Nabi.

Peristiwa Tsaqifah Bani Saidah juga merupakan bukti pengorbanan besar Abu Bakar dalam Islam setelah wafatnya Rasul. Seperti diketahui, setelah Rasul wafat dan jenazah Nabi belum juga dikuburkan, sebagian umat Islam baru ini sibuk dengan siapa yang akan menggantikan Rasul. Masing-masing Muhajirin, Ansur, dan Boni Hasyim mengklaim bahwa merekalah yang paling berhak menggantikan Rasul. Perselisihan ini terjadi di sebuah rumah bernama Tsaqifah Bani Sai dah. Abu Bakar yang saat itu sedang mengurus jenazah Nabi mendapat laporan tentang pertemuan dan perselisihan tersebut. Dia kemudian buru-buru pergi ke tempat pertemuan. Sesampainya di sana, Abu Bakar bertemu dengan para pemimpin Muhajirin dan para Ansur sedang berdebat sengit tentang keunggulan masing-masing. Debat semakin memanas.

Abu Bakar yang melihat kondisi yang semakin memanas kemudian berinisiatif dengan mengatakan, "Ini Umar dan Abu Ubaidah, siapa yang kalian kehendaki di antara mereka berdua, lalu baiat. Namun, perkataan Abu Bakar tidak diterima oleh keduanya. Mereka berdua keberatan dengan alasan Abu Bakar menjadi imam menggantikan Rasul ketika sakit. Oleh karena itu, dia berhak menggantikan Rasul. Selanjutnya Basyir bin Sa'ad segera berbai'at kepada Abu Bakar disusul Umar dan Abu Ubaidah, lalu disusul umat Islam lainnya pada 13 Rabiul Awal 11 H.

Dengan diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah, potensi perpecahan umat Islam dapat dihindari. Semua pihak bisa menerima Abu Bakar sebagai khalifah penerus Nabi, termasuk Ali bin Abi Thalib. Dalam memimpin umat Islam, yang masih sangat muda Abu Bakar sepenuhnya menganut apa yang dilakukan oleh Nabi. Ia akan menolak dan menindak tegas setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Nabi. (Sari, 2015: 28-30)

Sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasul, Abu Bakar disebut sebagai Khalifah Rosulillah (pengganti Rasul) yang pada pertumbuhan berikutnya disebut khalifah saja. Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun 632 M dan usia kepemimpinannya hanya dua tahun, karena pada tahun 634 M Abu Bakar wafat. (Nasution, 1985: 57). Waktunya yang singkat banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, terutama tantangan atau pembangkangan suku-suku Arab yang tidak mau tunduk kepada pemerintah Madinah. (Yatim, 1999: 36).

Alasan yang sangat substansial atas sikap kemaksiatan adalah munculnya kemunafikan dan kemurtadan. Hal ini disebabkan anggapan bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, semua perjanjian dengan Nabi menjadi terputus. Adapun orang-orang murtad pada waktu itu ada dua, yaitu: Orang-orang yang mengaku nabi dan pengikutnya termasuk orang-orang yang meninggalkan shalat, mengeluarkan zakat dan kembali kepada kebiasaan jahiliyah, dan mereka membedakan antara shalat dan zakat. Atas dasar ini, mereka kemudian mengambil sikap menentang Abu Bakar, sebagai pemimpin umat Islam. Karena sikap membangkang, menentang dan keras kepala yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, Abu Bokr menyelesaikan masalah tersebut dengan apa yang disebut dengan Perang Riddah (perang melawan kemurtadan). Dalam perang Riddah ini, Khalid ibn al-Walid adalah seorang jenderal besar dalam mengatasi perang. (Nasution, 1985: 51).

Setelah Abu Bakar, menyelesaikan masalah dalam negeri, kemudian mulai mengirim pasukan ke luar Arab. Khalid ibn al-Walid dikirim ke Irak dan mampu menguasai al-Hirah pada tahun 634 M. Ke Syria sebuah ekspedisi dikirim di bawah pimpinan tiga jenderal yaitu Amr Ibn al-Aas, Abu Ubaidah, Yazid ibn Abi Sufyan, dan Syurabil bin Hasanah. Sebelumnya pasukan tersebut dipimpin oleh Osama yang berusia 18 tahun. Kemudian untuk memperkuat tentara ini. Khalid ibn al-Walid diperintahkan untuk meninggalkan Irak, melalui padang pasir yang jarang dilalui dan dia tiba di Suriah delapan belas hari kemudian. (Yatim, 1999: 36).

Pada tahun 634 M. Abu Bakar meninggal, sedangkan garis depan pasukan Islam berada di Palestina, Irak dan kerajaan Hiroh. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa bahwa kematiannya sudah dekat, ia berkonsultasi dengan para pemimpin para sahabat dan mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya untuk mencegah kemungkinan perselisihan dan perpecahan di antara kaum Muslim. (Hassan, 1989: 38). Kebijakan Abu Bakar diterima oleh kaum muslimin dan secara massal berjanji setia kepada Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah kedua.

Menurut Fachruddin, Abu Bakar dipilih untuk memimpin Umat Islam setelah Rasulullah karena beberapa alasan:

1. Dekat dengan Nabi baik dari ilmunya maupun persahabatannya.
2. Sahabat yang dipercaya oleh Nabi.
3. Dipercaya orang, hingga mendapat gelar As-Siddiq, orang yang sangat amanah.
4. Orang yang murah hati.
5. Abu Bakar adalah sahabat yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjadi Imam Shalat jama'ah.
6. Abu Bakar termasuk orang pertama yang memeluk Islam. (Fahrudin. 1985: 19-20).

Masa Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M)

Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Lahir empat tahun sebelum kelahiran Nabi. Dia adalah seorang yang berbudi luhur, fasih berbicara, adil dan berani, Umor masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi dan digunakan sebagai referensi oleh Nabi pada hal-hal penting. Dengan memilih dan berjanji setia kepada Abu Bakar, ia mendapat kehormatan tinggi dan menjadi "tangan kanan" Abu Bakar. (Amin, 2009: 99).

Kepemimpinan Umar

Umar memimpin sebuah negara baru yang memiliki kekuasaan yang luas dan besar. Kekuatan negara adidaya baru ini meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, Mesir, dan Persia. Dalam memimpin negara, Umar memiliki keterampilan sebagai pemimpin negara. Ia dikenal sebagai negarawan, administrator, dan reformis. Semua kemampuan tersebut diterapkan dengan sistem pemerintahan yang menanamkan semangat demokrasi. Umar sering mengadakan musyawarah dengan rakyat untuk memecahkan masalah umum dan kenegaraan yang muncul dari waktu ke waktu. Sebagai seorang pemimpin, Umar memiliki pandangan yang sangat maju atau visioner. Ia juga seorang reformis yang berani membuat terobosan-terobosan untuk kemajuan umat Islam. Salah satu terobosan penting dilakukan oleh Umar adalah keberaniannya dalam ijtihad dan menafsirkan Qur'an dan Hadist Nabi. Dia adalah pemimpin yang bisa melihat situasi dan kondisi masyarakatnya dalam menegakkan hukum.

Sejarah menyebutkan bahwa dulu Umar tidak menghukum tangan pencuri. Padahal Al-Qur'an dengan jelas memerintahkan untuk memotong tangan orang yang melakukan pencurian. Umar tidak memotong tangannya, itu tidak dimaksudkan untuk mendurhakai Al-Qur'an, tetapi dia memiliki interpretasi bahwa pencuri tidak boleh dihukum dengan memotong tangannya jika dia melakukan pencurian dengan paksa. Dengan kata lain pencuri yang melakukan pencurian hanya mengisi perutnya yang lapar. Selain itu, pada saat terjadi pencurian kondisi umat Islam pada saat itu sedang dalam keadaan kelaparan. Umar lebih lanjut berpendapat bahwa dia tidak boleh memotong tangan pencuri karena barang curian itu milik tetangganya yang kaya tetapi tidak memberikan bantuan kepada pencuri itu.

Peristiwa tidak potong tangan pencuri itu bukanlah peristiwa sederhana tanpa makna. Kejadian ini menunjukkan keluasan pemikiran seorang Umar. Kejadian tersebut juga menunjukkan bahwa dalam menerapkan hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Umar memberi contoh yang jelas kepada umat Islam bahwa ijtihad adalah hal terpenting dalam hidup. Tanpa ijtihad kehidupan umat Islam akan terhambat karena tanpa ijtihad pikiran akan beku (jumud).

Peradaban Islam Pada Masa Umar

Peradaban Islam pada masa Umar berkembang sangat pesat. Itu karena Umar memiliki kecerdasan dan keberanian. Jauh sebelum dia ditunjuk adalah Sebagai khalifah, Umar menyumbangkan pemikiran-pemikiran cemerlang kepada Abu Bakar mengenai koleksi Al-Qur'an. Meski awalnya Abu Bakar dan Zaid bin Tsabit menolak saran Umar namun Umar tidak menyerah. Dia bahkan bersumpah dengan mengatakan, -Tidak akan ada dosa jika tuantuan melakukannya. Demi Alloh! Memang ada satu kebaikan di dalamnya. (Al-Hamidi, 1957: 6465) Berkat argumentasi dan keyakinannya, Abu Bakar akhirnya menerima usulan Umar. Dan terbukti bahwa apa yang dikatakan Umar adalah benar. Padahal, tidak hanya satu kebaikan yang diperoleh dari kumpulan Al-Qur'an, tetapi kebaikan lainnya yang tak terhitung banyaknya.

Berkat nasehat Umar, Al-Qur'an dapat dinikmati oleh umat Islam hingga saat ini. Kejeniusan Umar berlanjut ketika ia menjadi khalifah. Berkat kejeniusan dan keberaniannya, selama kepemimpinannya pasukan Islam berhasil menguasai banyak daerah. Keberanian Umar lah yang menyebabkan Kekaisaran Persia bertekuk lutut kepada pasukan Islam. Padahal, saat itu pasukan Islam adalah pasukan yang tidak ada apa-apanya, baik dari segi jumlah maupun perlengkapan kerja, jika dibandingkan dengan pasukan Persia. Namun berkat kepemimpinan Umar, tentara Persia dapat dikalahkan dan wilayah Persia menjadi wilayah Islam hingga sekarang. (Sari, 2015: 34-35).

Pada masa Umar bin Khattab, perluasan wilayah dakwah terjadi dengan pesat, sehingga khalifah Umar bin Khattab segera mendirikan administrasi negara dengan meniru pemerintahan yang telah berkembang, khususnya di Persia. Pemerintahan pemerintahan diatur dalam delapan wilayah provinsi, yaitu: Mekkah, Madinah, Syam, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Beberapa departemen dianggap perlu untuk didirikan. Saat itu, sistem pembayaran gaji dan pajak tanah mulai diatur dan ditertibkan. Pengadilan didirikan untuk memisahkan yudikatif dari eksekutif. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dibentuklah departemen kepolisian. Hal yang sama berlaku untuk posisi pekerjaan umum. (Nu'man, 1981: 264-276 dan 324-418). Selain itu, Umar juga mendirikan Boit al-Mai, memalsukan mata uang, dan menciptakan tahun hijrah. (Abdullah dan Endjat, 1987: 263).

Pada masa Umar, sistem administrasi pemerintahan diatur dengan rapi dan sistematis sehingga wilayah kekuasaan yang luas dapat berjalan dengan baik. Umor membentuk beberapa lembaga untuk mendukung kelancaran pemerintahannya. lembaga itu antara lain:

1. Baitul Mal (Lembaga Keuangan Negara)
2. Dewan al-Jund (lembaga militer)
3. Nazar al-Nafiat (Badan Pekerjaan Umum)
4. Dewan al-Addots (Badan Kepolisian)
5. Dewan al-Kharraj (Badan Pajak)

Selain pembentukan lembaga-lembaga tersebut, Umar juga mendirikan sistem peradilan yang ketat dan adil. Di antara peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan Umar bijih bahwa hakim harus memahami kasus baru dan kemudian memutuskan kasus itu, kebenaran dan keadilan adalah masalah universal, dan larangan mendengar ketika mereka emosional. Umar juga menekankan bahwa setiap orang sama di depan hukum sehingga hukum harus ditegakkan pada setiap orang, termasuk dirinya sendiri. Masih banyak lagi peraturan-peraturan peradilan yang relevan diterapkan saat ini. (Sari, 2015: 35-36).

Pemerintahan Umar bin Khattab selama sepuluh tahun (13-23 H/634-644 M) dan masa jabatannya berakhir dengan kematian, karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah seorang budak dari Persia. Untuk menentukan penggantinya, Umar bin Khattab tidak mengikuti jalan Abu Bakar. Umar bin Khattab mengangkat enam sahabat, yaitu: [1] Usman, ibn Affan [2] Ali ibn Abi Thalib, [3] Talhah, [4] Zubair, [5] Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan [6] Abdurrahman ibn Auf, dan meminta mereka untuk memilih salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah. Setelah Umar bin Khattab wafat, tim ini berkonsultasi dan berhasil mengangkat Usman bin Affan sebagai khalifah ketiga, tentunya melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali bin Abi Thalib. (Yatim, 1999: 38).

Masa Khalifah Usman ibn Affan (644 – 655 M)

Nama lengkapnya Ustman bin Affan bin Abdil Ash bin Umayyah dari suku Quraisy. Dia memeluk Islam atas undangan Abu Bakar, dan menjadi salah satu sahabat dekat Nabi. Melalui persaingan sengit dengan Ali, tim formasi bentukan Umar ibn al-Khattab akhirnya memberikan amanat khilafah kepada Ustman bin Affan. Masa pemerintahannya adalah yang terlama dari semua khalifah pada masa al-Khulafa 'arRasyidin, yaitu 12 tahun. (Syukur, 2008: 55).

Pribadi dan Pengangkatannya sebagai Khalifah

Utsman dikenal sebagai saudagar kaya raya yang dermawan dan alim. Ketika memeluk Islam, ia tidak segan-segan membelanjakan hartanya untuk kepentingan Islam. Di antara tindakan filantropisnya yang sering terdengar adalah dia membeli sebuah danau milik seorang Yahudi seharga 12.000 dirham dan menyumbangkannya kepada umat Islam ketika mereka hijrah ke Yatsrib. Utsman juga menyumbangkan tanahnya sebesar 15.000 dinar untuk perluasan Masjid Nabawi. Utsman mendapat gelar Dzun Nurain karena menikahi dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Umm Kulthum.

Usman diangkat menjadi khalifah menggantikan Umar setelah tiga hari jenazah Umar dimakamkan. Proses pengangkatannya melalui forum yang telah ditunjuk oleh Umar. Pengurus formasi tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman, Saad bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, dan Talhah bin Ubaidillah. Sesuai wasiat Umar, keenam anggota tersebut memilih salah satu dari mereka untuk menjadi penggantinya. Rincian mekanisme pemilihan tersebut adalah (1) yang berhak menjadi khalifah adalah yang memiliki suara terbanyak, (2) jika suara berimbang, maka Abdullah bin Umar berhak menentukannya. Dalam hal ini, Abdullah bin Umar menjadi anggota dewan formasi yang tidak memiliki hak untuk dipilih, melainkan hanya hak untuk memilih. (3) jika calon Abdullah bin Umar tidak diterima, calon yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf harus diangkat sebagai khalifah. Jika masih ada yang menentang keputusan tersebut, maka lawannya dapat dibunuh (Ibrahim Hasan, 1954: 254-255). Setelah melalui rapat, akhirnya Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah ketiga. Utsman memerintah selama kurang lebih 12 tahun.

Pembentukan majelis formasi yang dilakukan Umar merupakan contoh ijtihad dalam pemilihan khalifah. Setelah sebelumnya Umar diangkat langsung oleh Abu Bakar, kemudian Umar berijtihad membentuk forum untuk memilih seorang khalifah menggantikannya. Ijtihad Umar menunjukkan fakta bahwa pemilihan khalifah tidak dalam satu cara, tetapi dalam banyak hal. Pilihan metode atau metode selain keputusan khalifah sebelumnya juga disesuaikan dengan kondisi dan masyarakat saat itu. Dengan demikian, pemilihan khalifah atau pemimpin dapat dilakukan dengan berbagai cara selama umat Islam sepakat dengan cara tersebut. (Sari, 2015: 36-37).

Perluasan Wilayah Pada Masa Utsman

Pada masa Utsman, perluasan wilayah terus berlanjut. Pemerintahan Utsman berhasil memperluas wilayahnya ke Kabul, Herat, Ghazni, Asia Tengah, Armenia, Tunisia, Siprus, dan Rhodes. Beberapa wilayah Persia yang memberontak juga berhasil ditumpas oleh Utsman.

Pada masa Utsman ada perang yang belum pernah terjadi. Pada zaman Nabi, Abu Bakar, dan Umar, perang itu disebut Perang Zatis Sawari (Perang Yang Paling Banyak). Perang yang terjadi di Laut Mediterania dekat kota Alexandria ini melibatkan pasukan Romawi di bawah Kaisar Konstantinus dan pasukan Islam di bawah Abdullah bin Abi Sarah. Konon perang ini tidak pernah terjadi di masa lalu karena sebelumnya kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Islam hanya terjadi di daratan. Sementara pertempuran Zatis Sawari ini terjadi di laut. (Sari, 2015: 38).

Pemerintahan Usman bin Affan berlangsung selama 12 tahun dan terjadi perluasan wilayah dan dakwahnya ke Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan sisa bagian Persia, Transoksonia, dan Tabaristan berhasil. Apa yang disebut ekspansi Islam pertama berhenti di sini. Pada masa pemerintahan Usman bin Affan, terjadi perpecahan di kalangan umat Islam karena pemerintahan masalah. Ada perasaan tidak puas dan kecewa terhadap sistem pemerintahan. Kepemimpinan Usman bin Affan memang sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar bin Khattab, hal ini mungkin dikarenakan usianya yang sudah lanjut (diangkat pada usia 10 tahun) dan sifatnya yang lemah lembut. Selain itu, salah satu faktor yang membuat banyak orang kecewa dengan kepemimpinan Usman adalah kebijakannya mengangkat keluarga pada posisi yang tinggi. Yang terpenting di antara mereka adalah Marwan bin Hakam dan pada dasarnya dialah yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Usman hanya bergelar khalifah. (Amin, 1987: 87).

Setelah banyak anggota keluarganya yang duduk di posisi penting. Usman seperti boneka di depan kerabatnya. Dia tidak bisa berbuat banyak dan terlalu lemah terhadap keluarganya. Ia juga tidak tegas tentang kesalahan bawahan dan aset negara, yang dibagikan oleh kerabatnya tanpa dikendalikan oleh Usman sendiri. Akhirnya pada tahun 35 H/655 M, Usman dibunuh oleh pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa. (Yatim, 1999: 39). terhadap kebijakan pemerintahannya dan sebagai penggantinya adalah Ali bin Abi Thalib. Jasa Khalifah Usman termasuk membangun bendungan untuk menahan arus banjir besar dan mengatur distribusi air ke kota-kota. Usman juga membangun jalan, jembatan, masjid dan memperluas masjid Nabawi di Madinah. (Amin, 1987: 39).

Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (656-661 M)

Ali bin Abi Thalib adalah anak dari Abdul Muthalib, dia adalah sepupu dan menantu Nabi. Ali lahir di Makkah pada hari Jumat tanggal 13 Rajab. (Moh. Jafri, 2003: 13). dia masuk Islam di usia muda dan menemani nabi dalam perjuangan menegakkan Islam di Makkah dan Madinah. Ali adalah orang yang memiliki banyak kelebihan, kepribadiannya penuh vitalitas dan energi, pembuat kebijakan dengan pandangan jauh ke depan, pahlawan yang gagah berani, penasihat hukum yang ulung, pemegang tradisi yang teguh, teman sejati, dan dermawan. Ia telah bekerja keras hingga akhir hayatnya dan merupakan orang paling berpengaruh kedua setelah nabi Muhammad saw. (Amin, 2009: 109).

Pribadi dan Pengangkatannya Sebagai Khalifah

Selain sebagai sepupu dan sahabat Rasul, Ali juga menantu Rasul. Ia menikahi putri Nabi, yaitu Fatimah. Kepribadian Ali dibentuk langsung oleh Rasul. Ini karena dia diasuh langsung oleh Rasul. Selain dikenal sebagai orang yang cerdas dan bijaksana, Ali juga dikenal pemberani. Dalam beberapa perang, dia adalah orang pertama yang maju ke medan perang. Kedekatan Ali dengan Rasul menyebabkan munculnya aliran Syiah yang menganggap Ali sebagai pewaris sah Rasul.

Proses pengangkatan Ali sebagai khalifah dilakukan dalam kondisi yang kacau balau. Demonstran dari Mesir masih berada di Madinah dan menuntut khalifah segera diangkat. Jika khalifah tidak segera diangkat, maka mereka tidak akan meninggalkan Madinah. Setelah melalui proses yang berat, Ali akhirnya dilantik sebagai khalifah. Namun ada beberapa sahabat senior yang tidak mau berbai'at kepada Ali, di antaranya adalah Saad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Maslamah, Hasan bin Tsabit, dan Abdullah bin Salam.

Ali sendiri awalnya tidak terima diangkat menjadi khalifah. Menurutnya, para demonstran dari Mesir bertanggung jawab atas kematian Utsman, sehingga mereka harus mencari khalifah dan menyelesaikan kekacauan itu sendiri. Namun, setelah melihat kekacauan dan tekanan yang semakin parah dan meluas dari umat Islam di Madinah, akhirnya Ali menerima pengangkatannya sebagai khalifah. (Sari, 2015: 40-41). Ali bin Abi Thalib memerintah hanya enam tahun dan nasibnya sama dengan khalifah Umar bin Khattab dan Usman bin Affan, yaitu dibunuh. Pada masa pemerintahannya, Ali menghadapi berbagai tantangan dan pergolakan, sehingga pada masa pemerintahannya tidak ada sedikitpun masa yang dapat dikatakan stabil.

Setelah menduduki jabatan sebagai khalifah, Ali bin Abi Tahlid mulai memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Ali meyakini bahwa pemberontakan itu terjadi karena kecerobohan mereka. Selain itu, ia juga menarik kembali tanah yang telah diberikan Usman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan menggunakan kembali sistem pembagian pajak tahunan di kalangan umat Islam seperti yang telah dilaksanakan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. (Hassan, 1989: 62).

Ali bin Abi Thalib, mendapat tantangan dari pendukung Usman bin Affan, khususnya Mu'awiah, Gubernur Damaskus, dari kelompok Talhah dan Zubeir di Mekah dan dari Khawarij. Ali bin Abi Thalib, menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak ingin menghukum pembunuh Usman bin Affan dan mereka menuntut untuk membela diri dari darah Usman yang tertumpah secara zalim. Ali sebenarnya ingin menghindari perang, sehingga Ali mengirim surat kepada Talhah dan Zubair meminta mereka untuk berunding untuk menyelesaikan masalah secara damai. Namun ajakan itu ditolak dan terjadi pertempuran. antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Ada botol mengerikan yang disebut "Perang Jamal" (Perang Unta) dan Aisyah (putri Nabi) terlibat dalam perang melawan Ali bin Abi Thalib dengan unta, Ali bin Abi Thalib berhasil mengalahkan lawannya, Zubair dan Talhah terbunuh ketika mencoba melarikan diri, sementara Aisyah ditangkap dan dikirim kembali ke Medina. (Yatim, 1999: 40).

Kebijakan Ali bin Abi Thalib tersebut, juga mengakibatkan perlawanan dari Gubernur Damaskus Mu'awiyah yang didukung oleh sejumlah mantan pejabat tinggi yang merasa telah kehilangan kedudukan dan kejayaan. Maka, setelah Ali bin Abi Thalib berhasil menumpas pemberontakan Zubair, Thalhah dan Aisyah, barulah Ali pindah dari Kufah ke Damaskus dengan sejumlah besar prajuritnya. Pasukan Ali bertemu dengan pasukan Mu'awiyah di Shiffin dan pertempuran pun tak terhindarkan. Pertempuran yang terjadi di sini antara Ali dan Mu'awiyah dikenal sebagai "perang shiffin". Perang ini berakhir dengan tahkim [arbitrase], tetapi tahkim tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan munculnya kelompok ketiga, yaitu kelompok al-Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib yang berbalik melawan Ali. dan Muawiyah. Pada akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi tiga kekuatan politik, yaitu: [1] kelompok Mu'awiyah, [2] kelompok Syiah [pengikut] Ali, dan [3] kelompok al -Kelompok Khawarij [sekelompok orang yang keluar dari jajaran Ali bin Abi Talib]. Tampaknya situasi ini tidak menguntungkan Ali bin Abi Thalib, karena pasukannya semakin lemah dan posisi Mu'awiyah semakin kuat. Maka pada tanggal 20 Ramadhan 40 H (660 M), Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang anggota Khawarij.

Jabatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah kemudian dijabat oleh putranya Hasan selama beberapa bulan. Namun posisi Hasan lemah, sedangkan Mu'awiyah semakin kuat dan Hasan akhirnya membuat perjanjian damai. Kesepakatan ini dapat menyatukan kembali umat Islam dalam satu kepemimpinan politik di Indonesia di bawah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Namun di sisi lain, perjanjian itu juga menguntungkan Mu'awiyah yang menjadikannya penguasa mutlak dalam Islam. Maka tahun 41 H [661 M], tahun persatuan, dikenal dalam sejarah Islam sebagai tahun Jama'ah (am Jama'ah). Dari samping dicatat sebagai sejarah akhir dari apa yang disebut Khulafaur Rasyidin, dan kemudian sebagai awal pemerintahan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam (Yatim, 1999: 40).

Faktor-faktor Kejayaan Pertumbuhan Peradaban Islam Masa Khulafaurasyidin

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan peradaban Islam selama ini. Khulafaurasyidin adalah sebagai berikut:

Faktor dari segi pemerintahan dan sistem politik

Pada masa pemerintahan Abu Bakar terdapat kebijaksanaan dalam bidang pemerintahan dan politik, yaitu bahwa segala keputusan diambil dengan musyawarah. Keahlian Khalifah Abu Bakar dalam menghancurkan gerakan riddat, sehingga gerakan tersebut dapat dihancurkan dan dalam waktu satu tahun kekuasaan Islam dipulihkan. Ketelitian Khalifah Abu Bakar dalam menghadapi orang yang menolak zakat. Ia memutuskan untuk membasmi dan menundukkan kelompok tersebut dengan serangan yang kuat sehingga sebagian dari mereka menyerah dan kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Abu Bakar membentuk kekuatan militer di bawah komando Kholid bin Walid yang dikirim ke Irak dan Persia.

Pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab, dewan-dewan diatur; mendirikan Baitul Mal, menempa mata uang, membentuk tentara untuk menjaga dan melindungi perbatasan, mengatur gaji, mengangkat Hakim, mengatur perjalanan pos, membuat tahun hijrah. (Syalabi, 1997: 263). Khalifah Umar tidak hanya membuat peraturan baru, ia juga mengoreksi dan melakukan perbaikan terhadap peraturan yang perlu direvisi dan diubah. Misalnya aturan-aturan yang telah berjalan mengenai sistem pertanahan, bahwa kaum muslimin diberikan hak untuk menguasai tanah dan segala sesuatu yang diperoleh dengan cara berperang.

Pada masa Ustman Al-Mushaf lima ditulis, empat dikirim ke wilayah Islam untuk disalin dan diikuti, satu disimpan di Madinah untuk Khalifah Ustman sendiri dan naskah ini disebut naskah Al-Imam dan dikenal sebagai naskah Usmani. (Diakses pada 19/10/2014). Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, para gubernur yang diangkat oleh Usman diberhentikan. Ali, meyakini bahwa pemberontakan itu terjadi karena kecerobohan mereka. Selain itu, ia juga menarik kembali tanah yang telah diberikan Usman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan menggunakan kembali sistem pembagian pajak tahunan di kalangan umat Islam seperti yang telah dilaksanakan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. (Hassan, 1989: 62).

Faktor dari segi perluasan daerah kekuasaan (wilayah)

Pada masa Khulafaurrasyidin yang sangat menonjol adalah perluasan wilayah kekuasaan sebagai lahan dakwah dan pendapatan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemekaran yang sangat pesat yaitu:

- a. Islam selain ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, Islam juga memperhatikan pembentukan masyarakat.
- b. Dalam diri para sahabat Nabi terdapat keyakinan akan kewajiban menyampaikan ajaran Islam ke seluruh dunia. Dan ada kegemaran orang Arab untuk berperang, sehingga bertemu antara kegemaran berperang dengan keyakinan akan kewajiban menyampaikan ajaran Islam dalam ekspansi yang dahsyat mengalahkan tetangga yang tangguh, Byzantium dan Persia.
- c. Byzantium dan Persia, dua kekuatan yang menguasai Timur Tengah saat itu, mulai memasuki masa kemunduran dan kelemahan. Karena kedua negara sering berperang dan masing-masing negara memiliki masalah masing-masing. Di daerah-daerah di bawah kekuasaan Bizantium terjadi konflik antar pemeluk agama. Sementara itu, di wilayah Persia, selain konflik antar pemeluk agama, juga terjadi perselisihan antar anggota keluarga kerajaan dalam perebutan kekuasaan.
- d. Kekaisaran Bizantium memaksa sekte-sekte yang dianutnya kepada rakyat yang dikuasainya, sehingga rakyat merasa kehilangan kemerdekaannya. Hal ini berbeda dengan Islam yang dibawa ke daerah taklukan dan tidak memaksa masyarakat untuk pindah agama. Yang wajib bagi umat Islam adalah menyampaikan, maka diserahkan kepada yang bersangkutan

untuk masuk Islam atau tidak. Umumnya mereka tetap dalam agamanya masing-masing, tetapi diharuskan membayar semacam pajak yang disebut jizyah.

- e. Orang-orang Sami di Syria dan Palestina dan orang-orang Hami di Mesir melihat orang-orang Arab lebih dekat dengan mereka daripada orang-orang Eropa Bizantium yang memerintah mereka.
- f. Daerah-daerah yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir, Syria dan Irak kaya akan kekayaan, sehingga memudahkan untuk menutupi biaya ekspansi selanjutnya. (Amin, 2009: 17-18).

Hasil dan Pembahasan

Yang membedakan antara Jurnal saya dengan Jurnal lainnya itu terletak dibagian Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, karena dibagian itu saya menerangkan dengan secara detail, dan juga dijurnal ini saya menerangkan mengenai Faktor-faktor Kejayaan Pertumbuhan Peradaban Islam Masa Khulafaurrasyidin.

Dan menurut saya dari pembahasan Jurnal saya diatas, maka saya mengambil kesimpulan dalam Jurnal ini ialah sebagai berikut:

1. Pertama, menurut saya perkembangan peradaban Islam pada masa khulafaur Rasyidun berkembang sangat pesat, saya tandai dengan perkembangan di berbagai bidang. Misalnya: pemekaran wilayah, pertahanan militer, pembangunan armada laut, pendirian lembaga baitul mal, pembangunan tempat ibadah, pembukuan Alquran, pengembangan ilmu, dll.
2. Dan kedua, menurut saya dalam Islam sangat benar bahwa mereka masih berpegang teguh pada tali lurus agama Allah. Dalam arti ajaran Islam dijadikan dasar negara. Apa yang diperintahkan oleh agama diyakini sebagai kebenaran mutlak dan mereka tidak meragukan ajaran Islam itu sendiri. Amirul mukmin sebagai pelopor langsung penegakan hukum Islam. Ajaran Islam menjadi ruh perjuangan mereka.
3. Dan yang ketiga menurut saya, meski hanya berlangsung 30 tahun, era Khulafaurrasyidin merupakan periode penting dalam sejarah Islam. Khulafaurrasyidin berhasil menyelamatkan Islam, mengkonsolidasikan dan meletakkan dasar bagi kebesaran umat Islam. Khalifah Abu Bakar menyelamatkan umat Islam dari perpecahan karena masalah pergantian kepemimpinan setelah wafatnya Nabi. Dia juga menyelamatkan Islam

dari bahaya besar murtad dan nabi palsu, juga membela kebenaran Islam. Khalifah Umar berhasil mengkonsolidasikan Islam di Arabia, mengubah anak-anak gurun pasir menjadi bangsa pejuang yang disiplin, menghancurkan kerajaan Persia dan Bizantium, dan membangun kerajaan yang sangat kuat yang meliputi Persia, Irak, Kasdim, Syria, Palestina, dan Mesir. Khalifah Usman menambahkan ekspansi lebih lanjut dari kerajaan Arab di Asia Tengah dan Tripoli. Bagi saya, pemerintahannya layak untuk dikenang karena pembentukan angkatan laut Arab. Khalifah Ali berusaha keras mengatasi kekacauan di negerinya sendiri.

SIMPULAN

Pada masa Khulafaur Rasyidin, bentuk negara dikenal dengan khilafah. Namun dari bentuk peralihan kekuasaan antar khalifah terdapat perbedaan. Pengalihan kekuasaan dari Abu Bakar Ash-shiddiq kepada Umar bin Khattab berupa pengangkatan Umar sebagai penggantinya. Dari Umar kepada Utsman bin Affan berupa keputusan Majelis Seleksi atau tim formatur, dari Utsman kepada Ali bin Abi Thalib dalam bentuk bai'at secara masal oleh masyarakat. Sedangkan dari Ali bin Abi Thalib hingga Umayyah bin Abi Sufyan berupa perundingan damai selama perang. Pada masa Bani Umayyah, peralihan kekuasaan dilakukan melalui pewarisan kepada putra mahkota hingga negara berbentuk pemerintahan.

Dan pada masa Umar sistem administrasi pemerintahan diatur dengan rapi dan sistematis sehingga wilayah kekuasaan yang luas dapat berjalan dengan baik. Umar membentuk beberapa lembaga untuk mendukung kelancaran pemerintahannya. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

1. Baitul Mal (Lembaga Keuangan Negara)
2. Dewan al-Jund (lembaga militer)
3. Nazar al-Nafiat (Badan Pekerjaan Umum)
4. Dewan al-Addots (Badan Kepolisian)
5. Dewan al-Kharraj (Badan Pajak)

Saran

Kepada peneliti selanjutnya perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk upaya peningkatan diskusi terhadap Peradaban Islam pada Masa Khulafaurasyidin, karena didalam jurnal saya ini masih banyak sekali yang harus diteliti lebih mendalam, sehingga untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Syalabi, 1997. *Sejarah dan Kebudayaan Islam Jilid I*, Jakarta: PT. Al-Husna Zikra,
- Abdullah, Taufiq, dan Endjat, 1987. *Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jilid I*, Jakarta: Pustaka Alhusna, cet.v.
- Abdullah, Taufiq, dan Endjat, 1997. *Sejarah dan Kebudayaan Islam Jilid II*, Jakarta: PT. Al-Husna Zikra.
- Al-Azizi, Abdul Syukur, 2017. *Sejarah Terlengkap Peradaban Islam*, Yogyakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Amin, Ahmad, 1987. *Islam dari Masa ke Masa*, Bandung: CV Rusyda, Cet. Pertama.
- Amin, Samsul Munir, 2009. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah.
- Amin, Samsul Munir, 2009. *Sejarah Perkembangan Islam*, Jakarta: Amzah.
- Arikunto, Suharismi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fachruddin, Fuad Muhammad, 1985. *Al-Qur'an Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Hassan, Ibrahim Hassan, 1989. *Sejarah dan Kebudayaan Islam. Terj. Jahdan Ibnu Human*, Yogyakarta: Kota Kembang.
- <http://agantuger.wordpress.com/2014/02/02/peradaban-islam-pada-masa-khulafaur-rasyidin/>. Diakses pada tgl 19/10/2014.
- Jafri, Syed Hussain Moh, 2003. *Moralitas Politik Islam*, terj. Ilyas Hasan, Jakarta: Pustaka Zahra.
- Marziah, Nur Ainun, 2020. *Model Negara Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Khulafaur Rasyidin*. Banda Aceh: Makalah.
- Nasution, Harun, 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press
- Nu'man, Syibli, 1981. *Umar Yang Agung*, Bandung: Pustaka.
- Samsul Munir Amin, 2009. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah.
- Sari, Kartika, 2015, *Sejarah Peradaban Islam*. Bangka Blitung: Shiddiq Press.

- Sudjana, Nana. 1997. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Suprpto. 1981. *“Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran”*, Jakarta: Fakultas Ekonomi.
- Syukur, Fatah, 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taufikurrahman dan Mohammad Usman. 2020. *Pada Masa Al-Khulafa Al-Rasyidin*. *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam Vol.15, No.2, Desember 2020*.
- Yatim, Badri, 1999. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainudin, Ely, *Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin*, *Jurnal Intelegesia-Vol. 03. No. 01 Januari-Juni 2015*.

ANALISIS KURIKULUM PAI PERSPEKTIF SEJARAH KURIKULUM DI INDONESIA DALAM MENJAWAB ERA 5.0

Afthonul Afif

Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

afifahtonul02@gmail.com

Abstrak

Kurikulum merupakan bagian utama dari pendidikan. Pengembangan kurikulum dalam pendidikan Islam sangat berarti sebab pergantian kurikulum harus terjalin dari waktu ke waktu. Bersamaan dengan pendidikan Islam yang saat ini mengalami tantangan besar ialah belum berakhirnya transisi ke Revolusi Industri 4.0, yang kemudian saat ini muncul industry society 5.0. Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (Library research). Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu: 1). Kurikulum pendidikan Islam dalam tinjauan sejarah dari masa kemerdekaan sampai masa reformasi terus mengalami perubahan yang sesuai dengan keadaan serta kebutuhan. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam dibagi menjadi 3 masa ialah orde lama, orde baru, serta reformasi. 2). Pendidikan Islam wajib mempunyai keahlian dalam pemecahan masalah, keahlian berfikir secara kritis, serta keahlian berkeaktivitas dalam menjawab tantangan yang ditimbulkan dari masa society 5.0. 3). Pendidikan Islam dalam menjawab masa society 5.0 harus mempunyai sumberdaya yang mencukupi dalam dunia pendidikan seperti guru, dosen maupaun tenaga kependidikan yang lain.

Kata Kunci: Kurikulum PAI, Sejarah Kurikulum Di Indonesia, Era 5.0

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu siswa dalam upaya menggapai tujuan pembelajaran. Pendidikan merupakan suatu proses pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus serta diatur sedemikian rupa supaya memperoleh hasil yang maksimal. Tetapi, tiap aktivitas pendidikan tidak lepas dari tantangan serta rintangan. Di antara tantangan pendidikan yang kerap terdengar merupakan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI).

Pendidikan Agama Islam (PAI) ialah mata pelajaran yang identik dengan kehidupan tiap hari baik berkaitan dengan Tuhan, manusia, maupun makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi barometer kemajuan suatu peradaban.

Dalam sejarah kurikulum, semenjak tahun 1945 era kemerdekaan sampai saat ini, kurikulum nasional selalu menghadapi pergantian antara lain pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 (KBK), 2006 (KTSP), serta saat ini yang digunakan merupakan kurikulum K-2013.¹ Dengan memandang sejarah dari tahun ke tahun selalu berganti-ganti pengembangan kurikulum masih dipengaruhi kokoh oleh paradigma politik, serta kekuasaan yang menyelimuti sistem pembelajaran Indonesia. Dinamika sejarah pergantian kurikulum tersebut terbilang relatif, apalagi terdapat sebutan menarik, ialah “jika ganti menteri pendidikan, maka ganti pula kurikulumnya”. Sementara itu pergantian kurikulum ialah perihal biasa-biasa saja untuk sebuah negara dalam menyokong relevansi pendidikan terhadap tantangan era 5.0 yang makin maju, sehingga kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan Indonesia tidak bisa stagnan.

Menurut Icha Fara Diba, Abdul Muhid, pada abad 4.0 pendidikan diisyarati dengan munculnya teknologi yang sangat pesat, kemudian timbul mindset tiap orang menuntut kualitas kerja keras dari manusia, sehingga ada banyak sekolah yang belum siap dengan sasaran kualitas lulusan.² Sedangkan menurut Pristian Hadi Putra, perkembangan masa industri 5.0 menjadi tantangan tertentu untuk dunia pendidikan Islam dikala zaman ini, sehingga para guru mau tidak mau harus mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.³ Bagi Syamsul Bahri, dunia

1 Mufarrihul Hazin and Nur Rahmawati, “Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam (Studi Histori Dan Regulasi Di Indonesia),” *Journal EVALUASI* 5 (September 11, 2021): 293.

2 Icha Fara Diba and Abdul Muhid, “Pentingnya Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Era 4.0,” *Attanwir : Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 13, no. 1 (March 24, 2022): 44–60, accessed July 6, 2022, <https://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/attanwir/article/view/145>.

3 Pristian Hadi Putra, “Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.0,” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 02 (December 31, 2019): 99–110, accessed June 29, 2022, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/458>.

pendidikan wajib mengimbangi akselerasi yang terjalin di era ini, dimana dapat berubah-ubah dengan waktu yang sangat cepat dalam menajaki masa *society* 5.0.⁴

Dengan demikian, kurikulum PAI pada era *society* 5.0 perlu melakukan terobosan-terobosan yang paten dalam upaya menghadapi tantangan yang akan ditimbulkan *society* 5.0. Selain itu, kompleksitas tantangan tersebut wajib di barengi dengan keahlian yang mencukupi yang dipunyai oleh guru, siswa dan masyarakat. *Society* 5.0 merupakan warga yang bisa menuntaskan bermacam tantangan serta kasus sosial dengan menggunakan bermacam inovasi yang lahir di masa revolusi industri 4.0 semacam *Internet on Things* (internet untuk segala sesuatu), *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan), *Big* Informasi (informasi dalam jumlah besar), serta robot buat tingkatkan mutu hidup manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka agar dapat terhindar dari terjadinya perulangan dari penelitian yang dihasilkan serta pembahasan masalah yang serupa dengan peneliti lainnya, mulai dari bentuk penulisan serta yang dihasilkan dan berbagai keseragaman yang lain, dengan demikian peneliti memberikan pemaparan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian yang dihasilkan tersebut, yang akan peneliti jadikan landasan teoritis maupun perbandingan terhadap penelitian, guna pengupasan secara tuntas mengenai masalah yang dibahas, serta menjadi harapan munculnya penemuan terbaru di bidang penelitian terkait. Pada penelitian ini, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Kajian Kurikulum PAI dan Tantangan Era 5.0, dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, menurut Fauzan, dkk hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a) Kebijakan Kurikulum 2013 di Indonesia dan Kurikulum 2008 di Thailand mengacu pada hukum sistem pendidikan nasional di setiap negara.
- b) Keduanya memiliki standar kompetensi lulusan yang sama, yaitu menjadi orang yang saleh dan terampil dalam kehidupan,
- c) Standar konten kedua kurikulum mengacu pada SKL, di Indonesia diturunkan menjadi standar kompetensi inti dan kompetensi dasar sedangkan Kurikulum 2008, diturunkan menjadi standar pembelajaran dan kompetensi dasar,
- d) Standar Proses dalam Kurikulum 2013 diimplementasikan melalui pendekatan ilmiah yang terdiri dari mengamati, mempertanyakan, mengaitkan, bereksperimen, dan berjejaring.
- e) Standar penilaian Kurikulum 2013 menggunakan penilaian otentik yang mencakup tes, kinerja, proyek, dan portofolio untuk semua nilai

4 Syamsul Bahri, "KONSEP PEMBELAJARAN PAI DI ERA SOCIETY 5.0," *edupedia* 6 (January 2022): 133.

di semua tingkatan. Kurikulum 2008 dinilai dengan menggunakan penilaian komunikasi pribadi, penilaian kinerja, penilaian otentik, dan portofolio untuk semua nilai di setiap tingkat sistem pendidikan nasional.⁵

Kedua, menurut Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan Islam dalam tinjauan sejarah dari masa kemerdekaan hingga era reformasi terus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam terbagi atas 3 masa; yaitu pertama, masa orde lama, terjadi 3 kali perubahan yaitu kurikulum tahun 1947, 1952, dan kurikulum 1964; kedua, masa orde baru, terjadi 4 kali perubahan yaitu kurikulum 1968, 1975, 1984, dan Kurikulum 1994; ketiga, masa reformasi, terjadi 3 kali perubahan yaitu kurikulum 2004 (KBK), Kurikulum 2006 (KTSP), kurikulum 2013 yang dipakai hingga kini. Sedangkan dalam tinjauan regulasi kurikulum pendidikan Islam terdapat 4 kategori yakni: pertama, regulasi kurikulum madrasah mengikuti UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional; kedua, regulasi kurikulum pesantren mengikuti UU nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren; ketiga, regulasi kurikulum perguruan tinggi keagamaan Islam menginduk UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi; dan keempat, regulasi kurikulum pendidikan agama Islam untuk sekolah/kampus umum menginduk UU nomor 20 tahun 2003.⁶

Ketiga, Pristian Hadi Putra, menjelaskan dalam hasil penelitiannya yaitu: 1). Pendidikan Islam harus memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah, Kemampuan untuk bisa berfikir secara kritis, dan Kemampuan untuk berkeaktifitas dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan dari munculnya era society 5.0. 2). Pendidikan Islam dalam menghadapi era society 5.0 harus tersedianya sumberdaya yang memadai dalam dunia pendidikan seperti guru, dosen maupaun tenaga pendidikan lainnya.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat kesamaan dengan penelitian pertama yakni sama-sama melakukan kajian mengenai standar kurikulum PAI yang meliputi standar kurikulum pelaksanaan, penilaian serta lulusan peserta didik. Sedangkan persamaan dengan penelitian kedua, yakni sama-sama melakukan kajian sejarah perkembangan kurikulum dari waktu

5 Fauzan Fauzan, Ayup Lateh, and Fatkhul Arifin, "Analisis Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia dan Thailand (Studi kebijakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2008 di tingkat SMA)," *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 14, no. 2 (December 15, 2019): 297–332, accessed June 29, 2022, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/5989>.

6 Hazin and Rahmawati, "Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam (Studi Histori Dan Regulasi Di Indonesia)."

7 Putra, "Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.0."

ke waktu. Persamaan dengan penelitian ketiga yakni sama-sama membahas mengenai kemampuan kurikulum PAI dalam menjawab tantangan era 5.0. Maka dapat di simpulkan bahwa berbeda dengan penelitian ini yang memiliki perbedaan dalam pengkajian teoritis tentang “Kurikulum”.

Sehubungan dengan uraian tersebut, melihat perkembangan zaman yang semakin hari semakin pesat dan mengingat bahwa posisi kurikulum sangat memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Maka dengan berbagai rasionalisasi serta alasan, kurikulum di Indonesia terus menerus mengalami perbaikan dan pengembangan dari masa ke masa. Namun inti kurikulum pendidikan Islam, isi materi belajar wajib mencerminkan idealitas Al-Qur’an yang tanpa pilih ataupun memilah disiplin ilmu. Kesempurnaan ajaran agama akan tercapai apabila mampu menserasikan antara ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan ilmu agama.

Tulisan artikel ini mencoba menguraikan tentang kurikulum PAI perspektif sejarah kurikulum di Indonesia dalam menjawab era 5.0.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun artikel ilmiah dan sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman atau metode penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, diperlukan metode yang baik dan dapat dipercaya. Dalam hal ini metode penelitian yang dimaksud adalah sebagai citra yang dipakai untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, serta cara mengelola data-data tersebut sehingga menjadi kesimpulan yang dapat diuraikan dalam analisis data.⁸

Adapun jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*Library research*). Penelitian pustaka adalah suatu penelitian menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, sehingga lebih kepada dokumentasi (*documentation research*).⁹ Langkah yang dilakukan adalah dengan cara meneliti dan menelaah buku-buku yang memuat tentang Analisis Kurikulum PAI Perspektif Sejarah Kurikulum di Indonesia Dalam Menjawab Era 5.0.

8 Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 99.

9 Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 15.

Sedangkan pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.¹⁰ Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penemuan kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bakat teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian kualitatif digunakan juga masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.¹¹ Dalam hal ini maka peneliti mengkaji analisis kurikulum PAI perspektif Sejarah Kurikulum di Indonesia dalam menjawab era 5.0.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan mengumpulkan buku-buku makalah, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Langkah ini biasanya dikenal dengan metode dokumentasi. Suharsimi, berpendapat bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah prasasti notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya. Teknik ini digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data yang mengkaji tentang analisis kurikulum PAI perspektif sejarah kurikulum di Indonesia dalam menjawab era 5.0. Adapun sumber yang relevan dengan objek kajian metode pengolahan data ada dua tahap yang penulis lakukan dalam metode pengolahan data ini, yaitu tahap *pertama* mengidentifikasi suatu data kemudian dikorelasikan dengan buku referensi, setelah data terkumpul, *kedua* adalah menganalisis isi (*Content analysis*), yaitu dengan mengategorikan teori-teori dan data suatu informasi yang didapat dari rujukan-rujukan terlebih dahulu, kemudian akan dipilih dengan sistematis, digeneralisasikan dan kemudian ditarik sebuah benang merah yang dapat merumuskan semua itu secara lugas.

10 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999).

11 Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Media Ilmu Press, 2015), 15.

KAJIAN LITERATUR

1. Definisi Kurikulum

Secara etimologis kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya pelari atau *curere* berarti tempat berpacu.¹² Menurut istilah kurikulum digunakan sebagai makna majazi dari mengejar mata pelajaran demi mencapai ijazah dan gelar.¹³

Menurut Crow & Crow, yang dikutip oleh Abuddin Nata, kurikulum adalah desain pembelajaran yang mencakup serangkaian mata pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai syarat untuk diselesaikannya suatu program pendidikan tertentu. Addamardasyi Sarhan dan Munir Kamil, sebagaimana dikutip Al-Syaibany, kurikulum adalah seperangkat pengalaman pendidikan, budaya, sosial, olahraga dan seni yang diberikan sekolah kepada siswa di dalam dan di luar sekolah, dan semuanya membantu siswa berkembang sepenuhnya. Hal tersebut dapat menyebabkan perubahan perilaku siswa sesuai dengan aspek kehidupan dan tujuan pendidikan yang diterapkan.¹⁴

Abdurrahman an-Nahlawy, kurikulum adalah keseluruhan program pendidikan yang meliputi metode, tujuan, jenjang pendidikan, kelas mata pelajaran, mata pelajaran yang ditawarkan oleh setiap siswa pada setiap mata pelajaran, dan masalah aktivisme.¹⁵

Dengan demikian kurikulum ialah segala rencana pendidikan yang dijadikan pedoman setiap civitas akademika yang ada dalam lembaga pendidikan resmi ataupun nonformal dalam rangka menggapai tujuan yang di cita-citakan.

2. Era 5.0

Menurut Pristian Hadi, *society 5.0* dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*). Contoh aplikasi yang akan diterapkan oleh pemerintah Jepang dengan adanya konsep peradaban baru ini diantaranya bahwa masyarakat 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*humancentered*) dan berbasis teknologi (*technology based*) yang dikembangkan oleh Jepang.¹⁶ Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia.

12 Haitami Salim and Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 198.

13 Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 127.

14 Omar Mohammad al-Toumy, *Falsafah Pendidikan Islam : Terjemah Hasan Langgulung* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 485.

15 Al-Nahlawi, *Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah, Dan Masyarakat : Terjemah. Shihabuddin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 130.

16 Putra, "Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.0."

PEMBAHASAN

1. Kurikulum PAI Perspektif Sejarah Kurikulum di Indonesia

Kurikulum ialah alat yang digunakan mendidik generasi muda dengan baik serta membantu mereka untuk membuka, meningkatkan kemampuan mereka yang bermacam-macam, mempersiapkan mereka dengan baik dalam rangka melaksanakan hak serta kewajiban, memikul tanggung jawab terhadap setiap individu, keluarga, masyarakat serta bangsa. Tidak hanya itu, kurikulum pula ialah alat yang menghasilkan perubahan tuntutan pada masyarakat, keyakinan, sistem, serta gaya hidup.

Menurut Roihana Alhadaad, kurikulum apabila diaplikasikan dalam pendidikan Islam, maka kurikulum merupakan alat pedoman yang digunakan oleh pendidik dalam membimbing siswanya agar kearah tujuan yang paling tinggi dalam pendidikan Islam, lewat penumpukan beberapa pengetahuan, keahlian serta perilaku.¹⁷ Menurut Ifham Choli, kurikulum pendidikan Islam di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang.¹⁸

Sebagaimana Abuddin Nata yang dikutip oleh Agus Setiawan, menjelaskan bahwa mengulas tentang Permenag No. 2 Tahun 2008, yaitu: Pertama, dilihat dari segi cakupan dan sistematikanya, Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 telah cukup baik, yakni sesuai dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kedua, cakupan kurikulum PAI dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tersebut telah mencakup mata pelajaran agama Islam untuk tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah sebagai Sekolah Umum yang berciri khas agama Islam, termasuk pula di dalamnya kurikulum PAI untuk Madrasah Aliyah program bahasa dan program agama. Ketiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kurikulum PAI belum memuat tentang prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam menyusun silabus yang berbasis pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, serta langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses penyusunan silabus tersebut. Keempat, pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kurikulum (Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi PAI) di Madrasah harus diikuti dengan pengembangan

17 Muhammad Roihan Alhaddad, "HAKIKAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM," *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 3, no. 1 (June 17, 2018): 57–66, accessed July 11, 2022, <https://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah/article/view/23>.

18 Ifham Choli, "Hakikat Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam," *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 10, no. 2 (2019): 100–127.

strategi dan model pembelajaran yang efektif. Kelima, pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kurikulum (Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi) PAI di Madrasah harus bergerak dari paradigma Ulum al-Din ke al-Fikr al-Islami dan Islamic Studies (Kajian Islam) dengan menggunakan pendekatan pembelajaran holistik yang berbasis karakter. Keenam, guna mendukung berbagai pendekatan dan metode pembelajaran yang efektif, holistik, emansipatoris dan kontekstual sebagaimana tersebut di atas, maka perlu didukung oleh penciptaan kultur keagamaan (religious culture) yang kuat, dukungan kemauan dan komitmen yang kuat dari seluruh sivitas sekolah.¹⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kurikulum dijadikan pedoman pembelajaran yang wajib direncanakan serta diimplementasikan guna menggapai tujuan dari pembelajaran. Tidak hanya itu, mempersiapkan lulusan yang memiliki jiwa serta kepribadian yang utuh ialah fokus dari kurikulum pembelajaran Islam. Kurikulum ini secara adaptif diorientasikan buat merespon serta melawan dekadensi moral, rendahnya pengetahuan serta keahlian dan kemerosotan moral yang terjalin.

Kurikulum pendidikan Islam mempunyai visi serta misi dalam menterjemahkan kitab suci Al-Qur'an & Al-Hadits guna meningkatkan mutu kehidupan manusia kearah yang lebih baik. Penulis berupaya menguraikan secara pendek terpaut dengan sejarah kurikulum pendidikan Islam yang terdapat di Indonesia semenjak dari masa pasca kemerdekaan hingga dikala ini antara lain selaku berikut:

a. Kurikulum Pendidikan Islam Masa Orde Lama

Pelaksanaan kurikulum pada masa orde lama ini dibagi jadi 2 ialah kurikulum tahun 1947 serta kurikulum tahun 1952 sampai tahun 1964. Memiliki karakteristik khas semacam corak dari pembelajaran jaman Jepang ataupun juga jaman Belanda ini ada dalam kurikulum 1947.²⁰ Sebaliknya kurikulum tahun 1952 dalam penerapan pembelajarannya, kurikulum ini diatur lewat Undang Undang No 4 Tahun 1950 tentang Pokok Pembelajaran serta Pengajaran. Perihal ini berlaku sampai terdapatnya SKB 2 menteri yang mengatakan kalau pembelajaran agama Islam harus dilaksanakan di satuan pembelajaran minimun 2 jam dalam se- minggu.

19 Agus Setiawan, "KAJIAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM TINJAUAN HISTORIS, SOSIOLOGI, POLITIS, EKONOMIS DAN MANAJEMEN NEGARA," *DARUL ULUM Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 9 (2018): 286.

20 Ahmad Dhaifi, "PERKEMBANGAN KURIKULUM PAI DI INDONESIA," *EDURELIGIA: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* 1, no. 2 (April 4, 2018): 76–88, accessed June 30, 2022, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/edureligia/article/view/47>.

Menurut Mawardi, Kementerian Agama Republik Indonesia berupaya menawarkan pelajaran agama Islam di sekolah dan pondok pesantren pada masa orde lama, untuk itu dibentuk tim pengembangan kurikulum agama dengan menunjuk K.H Imam Zarkasyi dari Gontor. Pada saat itu tim berhasil menyusun kurikulum agama, yang disetujui oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 1952. Pendidikan agama menyumbang 25% dari semua mata pelajaran. Hal itu didapat setelah Kementerian Agama berhasil mengembangkan kurikulum.²¹ Dengan demikian dari uraian tersebut, madrasah lebih menekankan pada ilmu agama sebagai materi pendidikan dan ilmu umum hanya sebagian kecil. Saat ini madrasah ada dalam lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia.

b. Kurikulum Pendidikan Islam Masa Orde Baru

Pada era orde lama kurikulum beralih ke kurikulum orde baru yang mempengaruhi wajah pendidikan nasional di Indonesia. Pada masa orde baru transisi dari kurikulum orde lama mengalami beberapa kali perubahan. Masa orde baru mampu menyatukan berbagai kurikulum pendidikan agama Islam dari tahun 1968, 1975, 1984 hingga 1994 dan dilengkapi dengan kurikulum 1999 yang pada akhirnya menyatu dengan sistem pendidikan nasional.²²

Kurikulum 1968 merupakan pelengkap dari kurikulum 1964 dengan model kurikulum yang komprehensif dan sistematis. Pada kurikulum 1975 kajian tentang pendidikan agama Islam, kemudian pada tahun 1975 mengalami perubahan kurikulum yang sangat signifikan, yaitu dengan adanya surat keputusan bersama yang disebut SKB, yang terdiri dari 3 menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri). Pada tahun 1975 terjadi perumusan kurikulum madrasah, yang dimana pendidikan Agama Islam menyumbang 30%, sedangkan pendidikan umum menyumbang 70%. Untuk mendapatkan lulusan madrasah yang sama dengan lulusan sekolah umum, siswa dari madrasah dapat mengajukan permohonan untuk pindah ke sekolah umum.

21 Dhaifi, "PERKEMBANGAN KURIKULUM PAI DI INDONESIA."

22 Dhaifi, "PERKEMBANGAN KURIKULUM PAI DI INDONESIA."

c. Kurikulum Pendidikan Islam Masa Reformasi

Prinsip prioritas transparansi dan keterbukaan yang berimplikasi pada dunia pendidikan nasional sedang dalam masa reformasi.²³ Integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional memperkuat kehadiran pendidikan Islam dan semakin diakui selama periode reformasi ini.²⁴ Pengembangan kurikulum yang ada pada masa reformasi meliputi pembuatan sistem kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Sifat kebijakan pendidikan yang revolusioner dan transformative ini diperkuat dengan ketentuan UU No. 1, UU No. 2 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) menggantikan UU No. 20 Edisi 2 tahun 1989. Selama proses pembelajaran, metode yang digunakan adalah Contextual Teaching (CTL) yang berdampak pada penerapan kurikulum 2004 dan kurikulum KTSP 2006 terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) hanya berlangsung sampai tahun 2013. Pada tahun 2013 terjadi perubahan kurikulum yaitu K-13. Ada empat bidang penilaian dalam mata pelajaran ini, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku. Dengan adanya perubahan kurikulum ini, dalam pendidikan Islam tentang peraturan kurikulum akhirnya diganti dengan nomor 165 tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah akhirnya di rubah lagi dan tetap berlaku sebagai Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan Bahasa Arab di Madrasah.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) hanya berlangsung hingga 2013. Perubahan kurikulum 2013 bahasa Indonesia sekarang menjadi K-13. Silabus ini memiliki empat aspek evaluasi: pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku. Perubahan silabus dalam pendidikan Islam ini akhirnya menjadi peraturan silabus dengan terbitan 165 Tahun 2014 berdasarkan pedoman silabus Madrasah, dan akhirnya direvisi kembali dan masih berlaku sampai sekarang. Dengan kata lain, itu adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019. Tentang silabus PAI Madrasah dan bahasa Arab.

23 Amirah Mawardi, "PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA," *TARBAWI : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (January 20, 2017): 29–36, accessed June 30, 2022, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/350>.

24 Miftahul Huda, "Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya Penguatannya dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Journal of Islamic Education Research* 1, no. 02 (June 29, 2020): 39–53, accessed June 30, 2022, <https://jier.iain-jember.ac.id/index.php/jier/article/view/24>.

Dengan demikian, dari ketiga masa perkembangan kurikulum Pendidikan Islam yang ada di Indonesia dapat diambil benang merah sebagai berikut.

Tabel 1
Ringkasan Histori Perkembangan Kurikulum

No	Aspek	Masa Orde Baru	Masa Orde Lama	Masa Reformasi
1	Waktu	19-45-1966	1967-1999	1999-sekarang
	Landasan Undang-Undang	UU No. 4 Tahun 1950 tentang Pokok Pendidikan dan Pengajaran.	UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
	Isi Kurikulum	Selama Orde Lama, terjadi 3 kali pergantian kurikulum, yaitu: 1. Kurikulum 1947 2. Kurikulum 1952 3. Kurikulum 1964	Selama Orde Baru, kurikulum berganti hingga 4 kali, yaitu: 1. Kurikulum 1968 2. Kurikulum 1975 3. Kurikulum 1984 (CBSA/SAL) 4. Kurikulum 1994	Berganti sebanyak 3 kali; 1. Kurikulum berbasis Kompetensi (KBK 2004) 2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006) 3. Kurikulum K-13 (2013)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum selalu mengalami perubahan kebijakan dan selalu dikembangkan. Pengembangan kurikulum mengikuti zaman dan kondisi merupakan sebuah keniscayaan yang pasti terjadi. Dalam tinjauan sepanjang sejarah, sejak kemerdekaan hingga saat ini sudah terjadi sepuluh (10) kali perubahan kurikulum. Hal ini tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat atau menengah kedepan pun akan terjadi perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan zaman.

2. Era 5.0

Pendidikan pada abad ke-18 lebih menitikberatkan pada pengelolaan keahlian kognitif lewat uraian konseptual manual. Mereka yang berjuang abad ini hanya bisa mengandalkan keahlian mereka untuk berpikir dari sumber-sumber yang disediakan dalam buku maupun kertas. Oleh sebab itu, hasil yang diperoleh berbentuk uraian konseptual. Pendidikan pada abad ke-20 sudah memunculkan teknologi semacam alat komunikasi. Begitu sangat pesatnya perkembangan ilmu teknologi, hingga sampai merambah masa revolusi industri 5.0.

Menurut Hadi Putra, *society 5.0* dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat berbasis teknologi yang berpusat pada manusia.²⁵ Menurut Syamsul Bahri era *society 5.0*, atau periode masyarakat 5.0 ialah yang wajib diwaspadai pada saat ini. Guna menanggulangi tantangan abad ini, pendidikan Indonesia wajib terlebih dulu memperhitungkan infrastruktur, meningkatkan sumber energi manusia, menyelaraskan pendidikan maupun industri.²⁶ Menurut Icha Fara Diba & Abdul Muhid menjelaskan dari bermacam rujukan yang sudah ditelaah sebagian tantangan yang dialami tiap lembaga pendidikan wajib sanggup mempersiapkan bermacam trobosan yang inovatif supaya senantiasa eksis serta diperlukan oleh masyarakat.²⁷

Berikut ini adalah contoh aplikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Jepang berdasarkan konsep peradaban baru ini. *Society 5.0* adalah konsep masyarakat teknologi yang berpusat pada manusia yang dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir sebagai evolusi dari Revolusi Industri 4.0 yang konon berpotensi mengecilkan peran manusia.

Beberapa uraian dari teori di atas. Penulis menekankan jika masa *society 5.0* merupakan masa yang sangat perlu untuk dicermati. Sehingga menjawab abad ini, sistem pendidikan Indonesia perlu terlebih dulu mengevaluasi infrastruktur kurikulum, meningkatkan bakat serta mengkoordinasikan pembelajaran serta industri. Oleh sebab itu, dalam proses pendidikan yang berkepanjangan, pendidik PAI butuh menyadari serta sanggup menggunakan kemajuan teknologi. Tidak hanya, untuk menunjang aktivitas pendidikan dalam agama Islam, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran bertujuan menunjang pemerintah guna melakukan digitalisasi area pendidikan.

25 Putra, "Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.0."

26 Bahri, "KONSEP PEMBELAJARAN PAI DI ERA SOCIETY 5.0."

27 Fara Diba and Muhid, "Pentingnya Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Era 4.0."

Perihal ini senada dengan Metka Kordigel Aberšek dan Boris Aberšek, menjelaskan bahwa *"in society 5.0. Motto of future school could be, 'to provide educators with the skills and competences that will not only enable them to survive in this rapidly changing society, but also to be able to lead and manage these changes and lead our society towards progress and prosperity.' It is not enough to just point out that we are a society of knowledge."*²⁸ Maksudnya adalah dalam masyarakat masa depan adalah membekali pendidik dengan keterampilan dan kompetensi yang tidak hanya akan memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam masyarakat yang sangat cepat berubah ini, tetapi juga untuk dapat memimpin dan mengelola perubahan ini serta dapat membawa masyarakat menuju kemajuan dan kemakmuran. Tidak cukup hanya menunjukkan bahwa masyarakat kita berpengetahuan.

Lebih lanjut, statment Times Mataram yang mengutip komentar direktur Hafecs (*High Performance Education Consulting Services*) kalau guru butuh belajar lebih kreatif serta dinamis di dalam kelas. Mengingat artinya pendidik dalam sistem pembelajaran, guru wajib bisa menolong siswa ikut serta langsung dengan apa yang mereka katakan serta memerlukan program pembelajaran yang pas serta efisien. Hasilnya, kita dapat memesatkan transformasi pembelajaran di masa *society 5.0*.²⁹ Menurut Muhajir sebagaimana yang dikutip oleh Fara Diba dan Abdul Muhid, bahwa kompetensi yang wajib dipunyai oleh siswa antara lain: mempunyai keahlian berpikir kritis, mempunyai keahlian dalam berinovasi serta kreatif, mempunyai kecakapan dalam berbicara, bisa bekerjasama ataupun kerja sama dengan sahabat sebaya serta yang terakhir merupakan siswa dapat meningkatkan percaya diri dilingkungan sosialnya.³⁰

Selain itu, menurut penulis dalam menjawab pendidikan Islam di era *society 5.0* adalah kurangnya sumber daya yang memadai di dunia pendidikan, seperti guru dan tenaga kependidikan lainnya. Menyikapi tantangan pendidikan Islam yang sangat kompleks dalam menghadapi era 5.0 yang semakin tercermin di Jepang, tentunya akan berdampak dan berdampak bagi Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu menjawab tantangan masa depan. Selain itu, pendidikan Islam juga harus memiliki

28 Metka Kordigel Aberšek and Boris Aberšek, "NEW DIGITAL COMPETENCE FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING EDUCATION," *Journal of Baltic Science Education* 21, no. 1 (February 28, 2022): 108–120, accessed July 11, 2022, <http://www.scientiasocialis.lt/jb-se/?q=node/1161>.

29 "Zulkifar Alimuddin: Era Masyarakat 5.0, Guru Harus Lebih Inovatif Dalam Mengajar | TIMES Indonesia," accessed June 30, 2022, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/214466/zulkifar-alimuddin-era-masyarakat-50-guru-harus-lebih-inovatif-dalam-mengajar>.

30 Fara Diba and Muhid, "Pentingnya Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Era 4.0."

seluruh elemen masyarakat dan keterampilan terpenting yang harus dimiliki oleh pendidikan Islam. Tiga keterampilan utama tersebut adalah:

a. Kemampuan dalam memecahkan masalah

Menurut Mariam, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa “adanya proses pemecahan masalah merupakan faktor penting dalam menggabungkan masalah kehidupan nyata”.³¹ Polia mengartikan bahwa ia berusaha mencari jalan keluar dari kesulitan dalam memecahkan masalah.³²

Polia menjelaskan empat tahap pemecahan masalah: memahami masalah, membuat rencana penagihan, membuat perhitungan, dan menegaskan kembali hasil yang diperoleh.³³

b. Kemampuan berfikir secara kritis

Ide-ide yang terus-menerus diperkenalkan dan harus digunakan adalah ide-ide yang harus disesuaikan di masa depan: analitis, kritis dan kreatif. Ide ini disebut *Higher Thinking Skills (HOTS)*. Berpikir ala *HOTS* bukanlah berpikir biasa, melainkan berpikir kompleks, selangkah demi selangkah, sistematis.

c. Kemampuan untuk berkeaktifitas

Kreativitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa dan menghasilkan solusi yang unik untuk masalah yang berbeda.³⁴ Orang kreatif dapat berpikir mandiri, berimajinasi, mengambil keputusan dengan percaya diri, dan tidak mudah dipengaruhi orang lain.

Oleh karena itu, kemampuan berkreasi merupakan keterampilan yang harus dilandasi oleh rasa percaya diri dan rasa percaya diri agar dapat melakukan hal-hal yang baik dalam hidup. Lebih lanjut lagi, tiga keterampilan yang harus dimiliki setiap orang untuk dapat memecahkan masalah-masalah dunia sosial dan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Pendidikan Islam harus mampu menghadapi tantangan yang

31 Maryam Sajadi, Parvaneh Amiripour, and Mohsen Rostamy-Malkhalifeh, “The Examining Mathematical Word Problems Solving Ability under Efficient Representation Aspect,” *Mathematics Education Trends and Research* 2013 (February 1, 2013).

32 Polya, G, *How to Solve It*. (New Jersey: Princeton University Press, 1973), 3.

33 Polya, G, *How to Solve It*, 10.

34 Semiawan Conny R, *Perkembangan Dan Belajar Peserta Didik*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Guru Sekolah Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), 89.

muncul dari fajar Society 5.0 yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, komponen individu harus mampu memecahkan berbagai masalah yang muncul. Kita harus mampu bertahan dan menghadapi berbagai krisis, dan apa yang telah dicapai melalui pendidikan Islam tidak boleh hilang. Pendidikan Islam perlu senantiasa meningkatkan kemampuannya di segala bidang, terutama pendidikan. Dan pendidikan Islam harus selalu dapat diperbaharui menjadi lebih baik, dan tidak boleh tertinggal atau tergerus oleh perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini.

SIMPULAN

Meninjau kembali sejarah dari era kemerdekaan hingga era reformasi, kurikulum pendidikan Islam terus mengalami perubahan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Perkembangan kurikulum Islam dibagi menjadi tiga periode. Jadi, pertama, ada tiga perubahan pada masa orde lama. Yakni, silabus 1947, silabus 1952, dan 1964. Kedua, pada masa Orde Baru, terjadi empat kali perubahan kurikulum: 1968, 1975, 1984, dan 1994. Ketiga, pada masa reformasi, ada tiga perubahan: Silabus 2004 (KBK), Silabus 2006 (KTSP), dan sebelumnya Silabus 2013. Ada dua kategori. , Peraturan Kurikulum Madrasah 2003 UU No. 20. Kedua, regulasi kurikulum Pesantren sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ketiga, pengaturan kurikulum pendidikan tinggi agama Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Keempat, pengaturan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah/kampus umum berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003.

Tantangan pendidikan Islam memberikan inspirasi bahwa misi pendidikan Islam adalah menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan. Namun tidak lepas dari berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan generasi untuk mendorong mereka agar lebih kompetitif dan berpartisipasi dalam desa global tanpa batas. Menghadapi *society* 5.0, tantangan pendidikan Islam sangatlah kompleks. *Society* 5.0 semakin menemukan dampak di Jepang yang pasti akan berdampak pada Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu menjawab tantangan masa depan. Selain itu, pendidikan Islam juga harus memiliki seluruh elemen masyarakat dan keterampilan terpenting yang harus dimiliki oleh pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhaddad, Muhammad Roihan. "HAKIKAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM." *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 3, no. 1 (June 17, 2018): 57–66. Accessed July 11, 2022. <https://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah/article/view/23>.
- Al-Nahlawi. *Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah, Dan Masyarakat : Terjemah. Shihabuddin*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Bahri, Syamsul. "KONSEP PEMBELAJARAN PAI DI ERA SOCIETY 5.0." *edupedia* 6 (January 2022): 133.
- Basri, Hasan. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Choli, Ifham. "Hakikat Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam." *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 10, no. 2 (2019): 100–127.
- Conny R, Semiawan. *Perkembangan Dan Belajar Peserta Didik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Guru Sekolah Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999.
- Dhaifi, Ahmad. "PERKEMBANGAN KURIKULUM PAI DI INDONESIA." *EDURELIGIA; JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* 1, no. 2 (April 4, 2018): 76–88. Accessed June 30, 2022. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/edureligia/article/view/47>.
- Fara Diba, Icha, and Abdul Muhid. "Pentingnya Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Era 4.0." *Attanwir : Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 13, no. 1 (March 24, 2022): 44–60. Accessed July 6, 2022. <https://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/attanwir/article/view/145>.
- Fauzan, Fauzan, Ayup Lateh, and Fatkhul Arifin. "Analisis Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia dan Thailand (Studi kebijakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2008 di tingkat SMA)." *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 14, no. 2 (December 15, 2019): 297–332. Accessed June 29, 2022. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/5989>.
- Hazin, Mufarrihul, and Nur Rahmawati. "KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM (Studi Histori Dan Regulasi Di Indonesia)." *Journal EVALUASI* 5 (September 11, 2021): 293.

- Huda, Miftahul. "Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya Penguatannya dalam Sistem Pendidikan Nasional." *Journal of Islamic Education Research* 1, no. 02 (June 29, 2020): 39–53. Accessed June 30, 2022. <https://jier.iain-jember.ac.id/index.php/jier/article/view/24>.
- Kordigel Aberšek, Metka, and Boris Aberšek. "NEW DIGITAL COMPETENCE FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING EDUCATION." *Journal of Baltic Science Education* 21, no. 1 (February 28, 2022): 108–120. Accessed July 11, 2022. <http://www.scientiasocialis.lt/jbse/?q=node/1161>.
- Masrukhin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kudus: Media Ilmu Press, 2015.
- Mawardi, Amirah. "PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA." *TARBAWI : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (January 20, 2017): 29–36. Accessed June 30, 2022. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/350>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Polya, G. *How to Solve It*. New Jersey: Princeton University Press, 1973.
- Putra, Pristian Hadi. "Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.0." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 02 (December 31, 2019): 99–110. Accessed June 29, 2022. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/458>.
- Sajadi, Maryam, Parvaneh Amiripour, and Mohsen Rostamy-Malkhalifeh. "The Examinig Mathematical Word Problems Solving Ability under Efficient Representation Aspect." *Mathematics Education Trends and Research* 2013 (February 1, 2013): 1–11.
- Salim, Haitami, and Syamsul Kurniawan. *Studi Ilmu Pendidikan Islam*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Setiawan, Agus. "KAJIAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM TINJAUAN HISTORIS, SOSIOLOGI, POLITIS, EKONOMIS DAN MANAJEMEN NEGARA." *DARUL ULUM Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 9 (2018): 286.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

al-Toumy, Omar Mohammad. *Falsafah Pendidikan Islam : Terjemah Hasan Langgulung*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

"Zulkifar Alimuddin: Era Masyarakat 5.0, Guru Harus Lebih Inovatif Dalam Mengajar | TIMES Indonesia." Accessed June 30, 2022. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/214466/zulkifar-alimuddin-era-masyarakat-50-guru-harus-lebih-inovatif-dalam-mengajar>.

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER
DALAM AL-QURAN SURAH AL-AN'AM AYAT 151-153
DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
(Studi Analisis terhadap Tafsir Al-Munir
Karya Wahbah Az-Zuhaili)**

Muhammad Khabiburrohman

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
alkhabib.1998@gmail.com

Abstrak

Pada pendidikan Islam, karakter merupakan salah satu bagian yang sangat diperhatikan dalam Al-Qur'an. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu sarana pengembangan karakter. Oleh karena itu pengembangan pendidikan karakter yang sesuai dengan Al-Qur'an mutlak dilakukan. Di dalam Al-Qur'an ada begitu banyak nilai-nilai karakter yang dapat diacu dalam melaksanakan pendidikan Islam, yang mana nilai-nilai tersebut tentunya akan lebih relevan dan sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. Q.S *Al-An'am* ayat 151-153 memiliki kandungan nilai-nilai karakter yang patut untuk digali dan dikembangkan lebih lanjut, karena itu penelitian ini diharapkan dapat menggali nilai-nilai karakter yang ada di dalamnya, dan mengimplementasikannya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) tafsir dan kandungan Q.S. *Al-An'am* ayat 151-153 yang terdapat dalam tafsir al-Munir, 2) nilai pendidikan karakter dalam Q.S. *Al-An'am* ayat 151-153 yang terdapat dalam tafsir al-Munir, 3) implementasi nilai-nilai pendidikan karakter tersebut dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*), karena penelitian ini menganalisis interpretasi Wahbah az-Zuhaili terhadap Q.S. *Al-An'am* ayat 151-153 dalam tafsir al-Munir. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah studi kepustakaan. Data-data yang terkumpul lalu dianalisis dengan pemrosesan satuan, kategorisasi, dan penafsiran data. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa penelitian menunjukkan terdapat nilai-nilai pendidikan karakter dalam Q.S. *Al-An'am* ayat 151-153. Nilai-nilai tersebut adalah: takwa, kasih sayang, tanggung jawab, cinta damai, peduli sosial, dan adil. Nilai takwa yang terdapat pada karakter religius merupakan karakter yang kompleks. Tidak hanya sebatas penyembahan terhadap Allah, tetapi juga berimplikasi pada karakter yang lain. Nilai-nilai pendidikan karakter tersebut dapat diimplementasikan tidak hanya dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas, tetapi juga lewat lingkungan pendidikannya yaitu sekolah, serta pendidiknya. Dalam pendidikan karakter beberapa metode yang dapat dipakai antara lain metode *targhib*, kisah, pembiasaan, perintah, larangan, dialog (debat) dan *qudwah*.

Keywords: Nilai, Pendidikan Karakter, QS. Al-An'am ayat 151-153, PAI

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter kali ini memang menjadi isu utama pendidikan. Selain menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak anak bangsa, pendidikan karakter ini pun diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia, sehingga keberhasilan suatu bangsa dalam memperoleh tujuannya tidak hanya ditentukan oleh melimpah ruahnya sumber daya alam, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya.

Terkait dengan pendidikan karakter yang dicanangkan Kemendikbud, dalam tujuan pendidikan nasional pun sudah tercantum bahwa tujuan pendidikan ialah peningkatan kualitas manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 yaitu sebagai berikut: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab".

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia, pendidikan Islam pun memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi manusia dimana karakter merupakan salah satu aspek yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Lebih dari itu, karakter atau dalam perspektif agama Islam lebih sering disebut dengan akhlak, ini tidak dapat lepas dari aspek lain, misalnya aspek akidah. Pembahasan tentang akhlak selalu terkait dengan akidah, sebab akhlak merupakan salah satu indikator keimanan seorang muslim

Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pendidikan karakter ini tentu harus dipelajari bahkan juga harus mampu diaplikasikan dalam kehidupan. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu sarana pengembangan karakter. Oleh karena itu pengembangan pendidikan karakter yang sesuai dengan Alquran mutlak dilakukan.

Tidak hanya sebatas penyembahan terhadap Allah, tetapi juga berimplikasi pada karakter yang lain. Nilai-nilai pendidikan karakter tersebut dapat di implementasikan tidak hanya dalam proses pembelajaran PAI di kelas, tetapi juga lewat lingkungan pendidikannya yaitu sekolah, serta pendidiknya.

Pendidikan dan pengembangan karakter menjadi tugas bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk mempersiapkan generasi muslim yang tangguh. Setiap muslim, baik sebagai individu maupun komunitas, harus berupaya mewujudkan generasi yang berkualitas dalam semua aspek kehidupan manusia, sebab karakter menjadi tolak ukur keberhasilan suatu bangsa.

Di dalam Alquran itu sendiri tentu banyak nilai-nilai karakter yang dapat di jadikan sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan pendidikan.

Sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-An'am ayat 151-153 sebagai berikut:

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (Nya).

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat".

"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa". (Q.S.alAn'am ayat 151-153).

Dari ayat di atas terdapat nilai-nilai karakter yang patut digali dan dikembangkan lebih lanjut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat di dalam Q.S.al-An'am ayat 151-153 adalah taqwa,

kasih sayang, tanggung jawab, cinta damai, peduli sosial, dan adil. Semua ini merupakan hal yang perlu ada dalam diri seseorang agar ia mampu menjadi insan kamil. Nilai taqwa yang terdapat pada karakter religius merupakan karakter yang kompleks.

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa diantara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia (Asmani, 2011: 29).

Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan. Kemudian nilai-nilai tersebut dapat terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat. (Asmani, 2011: 35).

Terkait dengan pendidikan karakter, akhir-akhir ini orang semakin menyadari betapa pentingnya pendidikan karakter atau dalam Islam disebut dengan istilah pendidikan akhlak mulia (*al-akhlak al-karimah*). Hal ini karena kecerdasan intelektual tanpa diikuti dengan karakter atau akhlak yang baik maka tidak akan gunanya. Sehingga pendidikan karakter merupakan sesuatu yang sangat mendasar dan saling melengkapi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam AlQuran Surah Al-An’am Ayat 151-153 Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili).”**

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Nilai

Nilai diartikan “sebagai seperangkat moralitas yang paling abstrak dan seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu idealitas dan memberikan corak khusus pada pola pemikiran, perasaan, dan perilaku”. Misalnya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai moral, baik itu kebaikan maupun kejelekan (Nurdin, 2008: 209).

Nilai adalah suatu kualitas yang dibedakan menurut: kemampuannya untuk berlipat ganda atau bertambah meskipun sering diberikan kepada orang lain dan kenyataan atau hukuman bahwa makin banyak nilai diberikan kepada orang lain, makin banyak pula nilai serupa yang dikembalikan dan diterima oleh orang lain (Abdul Majid, 2013: 42).

Menurut Fraenkel nilai adalah “standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya dijalankan dan di pertahankan. Pengertian ini menunjukkan bahwa hubungan antara subjek dengan objek memiliki arti yang penting dalam kehidupan subjek”. (Lubis, 2009: 16).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang berharga yang terdapat pada manusia yang kemudian diaplikasikan melalui perilaku serta cara untuk memperlakukannya terhadap orang lain, serta merupakan kualitas yang dibedakan menurut kemampuannya untuk berlipat ganda atau bertambah meskipun sering di berikan kepada orang lain dan kenyataan atau hukuman bahwa makin banyak nilai di berikan kepada orang lain, makin banyak pula nilai serupa yang di kembalikan dan diterima oleh orang lain.

Adapun Macam-Macam Nilai yaitu:

- a. Dilihat dari kemampuan jiwa manusia nilai dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: nilai yang statis seperti kognisi, emosi, konasi, dan psikomotor, dan nilai kemampuan yang dinamik seperti motif berkuasa dan motif berprestasi.
- b. Ditinjau dari segi hakikatnya nilai dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu nilai hakiki dan nilai instrumental. Nilai-nilai yang hakiki itu bersifat universal dan abadi, sedangkan nilai-nilai instrumental dapat bersifat lokal, pasang surut dan temporal.
- c. Dilihat dari segi ruang lingkup dan keberlakuannya, nilai dapat dibagi menjadi nilai-nilai universal dan nilai-nilai lokal. (Lubis, 2009: 18)..

Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan “sebuah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, membuat yang tidak tertata atau liar menjadi semakin tertata, semacam proses penciptaan sebuah kultur dan tata keteraturan dalam diri maupun dalam diri orang lain”. (Koesoema, 2007: 53).

Pendidikan adalah “usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan bagi peranannya di masa yang akan datang”. (Daud, 2011: 20).

Menurut Vittorino Doefetre, pendidikan adalah “menumbuhkan seseorang dari segala segi akal, budi pekerti dan tubuh, tidak untuk yang bekerja tertentu, tetapi untuk menjadi penduduk yang baik dan bermanfaat bagi masyarakatnya, juga mampu untuk melaksanakan kewajiban umum dan khusus”. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas No 20 tahun 2003, pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. (Al Hamdani, 2014: 4).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar, terencana, mempunyai visi dan misi yang jelas dan di turunkan melalui berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga memiliki kemampuan dan pemahaman dari berbagai aspek, baik dalam bidang keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya dan masyarakat yang dilaksanakan melalui lembaga pendidikan formal dan pendidikan non formal atau yang kita kenal dengan pendidikan berbasis masyarakat.

Pengertian Karakter

Karakter dalam bahasa Yunani dan latin, *Character* berasal dari kata *Charassein* yang artinya, mengukir corak yang tetap dan tidak terhapus. Karakter adalah cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup bekerja sama, baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Daryanto, 2013: 9).

Secara etimologi, akar kata karakter dapat dilacak dari bahasa Inggris: *character*; Yunani: *character*, dari *charassein* yang berarti membuat tajam, membuat dalam (Lorens Bagus, 392: 392).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimana karakter diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter juga bisa diartikan tabiat, yaitu perangai atau perbuatan yang selalu dilakukan atau kebiasaan. Karakter juga diartikan watak, yaitu sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku atau kepribadian (Poerwadarminta, 1997: 20).

Menurut Doni Koesoema Albertus, karakter diasosiasikan dengan temperamen yang memberinya sebuah definisi yang menekankan unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Karakter juga dipahami dari sudut pandang behaviorial yang menekankan unsur somatopsikis yang dimiliki oleh individu sejak lahir. Di sini, karakter dianggap sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri, karakteristik, gaya atau ciri khas dari diri seseorang, yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya pengaruh keluarga pada masa kecil dan bawaan seseorang sejak lahir. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat.

(Asmani, 2011:28).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum karakter adalah sesuatu yang harus dikembangkan untuk dimiliki oleh seseorang, karena karakter merupakan faktor pendukung keberhasilan seseorang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, serta menempatkan posisi paling penting untuk kelangsungan hidup manusia dalam masyarakat.

Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter adalah “sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran, individu, tekad, serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa, sehingga akan terwujud *insan kamil*”. (Aunillah, 2011: 18).

Pendidikan karakter menurut Megawangi adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungannya. (Bestari, 2013:

13).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan moral, pendidikan watak, atau pendidikan budi pekerti yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Tujuan Pendidikan Karakter

Tujuan pendidikan karakter adalah “penanaman nilai dalam diri siswa dan pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu”. (Asmani, 2011: 24).

Pendidikan karakter juga bertujuan “meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan.”(Asmani, 2011: 25).

Adapun tujuan pendidikan karakter menurut Daryanto (2013 : 45) dalam bukunya yang berjudul *“Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah”*, yaitu:

- 1) Membentuk bangsa yang teguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- 2) Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai standar kompetensi kelulusan.

Prinsip Pendidikan Karakter

Ada beberapa prinsip pendidikan karakter untuk membentuk karakter (Q-Anees & Hambali, 2008:104). Yaitu:

- a) Manusia adalah makhluk yang dipengaruhi dua aspek, pada dirinya memiliki sumber kebenaran dari luar dirinya ada juga dorongan atau kondisi yang mempengaruhi kesadaran.
- b) Menganggap bahwa perilaku yang dibimbing oleh nilai-nilai utama sebagai bukti dari karakter, pendidikan karakter tidak meyakini adanya pemisah antara roh, jiwa dan badan.
- c) Pendidikan karakter mengutamakan munculnya kesadaran pribadi peserta didik untuk secara ikhlas mengutamakan karakter positif.
- d) Pendidikan karakter mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia *ulul albab* yang tidak hanya memiliki kesadaran diri, tetapi juga kesadaran untuk mengembangkan diri, memperhatikan masalah lingkungannya dan memperbaiki kehidupan sesuai dengan pengetahuan dan karakter yang dimilikinya.

Tinjauan Tentang PAI

Pendidikan agama diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk manusia agamis dengan menanamkan aqidah keimanan, amaliah, dan budi pekerti atau akhlak yang terpuji untuk menjadi manusia yang taqwa kepada Allah SWT. (Basyiruddin, 2002: 4).

Syekh Muhammad Al-Naquib Al-Attas mendefinisikan pendidikan Islam sebagai pengenalan dan pengakuan, yang berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu didalam tatanan penciptaan sedemikian rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan terhadap Tuhan yang tepat.

Muhammad Fadhil Al-Djamali, menyatakan pendidikan Islam adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan mengangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar dan kemampuan ajarnya. (Armai, 2009: 33).

Tujuan pendidikan Islam secara umum adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan cara pengajaran ataupun dengan cara lain. Tujuan itu meliputi seluruh aspek yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pandangan, serta yang paling penting adalah bentuk insan kamil dengan pola takwa harus dapat tergambar pada pribadi seseorang yang sudah dididik. Tujuan pendidikan Islam harus dikaitkan pula dengan tujuan pendidikan nasional negara tempat pendidikan Islam itu dilaksanakan dan harus dikaitkan pula dengan tujuan institusional lembaga yang menyelenggarakan pendidikan itu (Daradjat, 2008: 30).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian pendidikan Islam adalah suatu proses penanaman nilai-nilai Islam melalui pengajaran, bimbingan, dan latihan yang dilakukan dengan sadar dan penuh tanggungjawab dalam rangka pembentukan, pembinaan, pendayagunaan, dan pengembangan pikir, zikir, dan kreasi manusia, sehingga terbentuk pribadi muslim sejati, yang mampu mengembangkan kehidupannya dengan penuh tanggung jawab dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu cara kerja tertentu yang bermanfaat untuk mengetahui pengetahuan ilmiah dari suatu dokumen yang dikemukakan oleh ilmuwan masa lalu maupun sekarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak memperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat dan perilaku seseorang, di samping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbang balik. Dalam konteks penelitian ini, jenis penelitian kualitatif tampak, karena tidak satupun temuan-temuan dalam penelitian ini yang diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Temuan-temuan dalam penelitian ini berupa hasil pemahaman terhadap isi teks yang diperoleh melalui prosedur analisis isi.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Metode analisis menurut Ulfatin (2013: 219) adalah teknik yang digunakan peneliti untuk mempelajari isi dokumen dan menemukan karakteristik pesan serta menarik suatu kesimpulan. Dengan menggunakan metode analisis isi, akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap berbagai isi pesan yang di sampaikan oleh media massa, kitab suci, atau sumber informasi lain secara objektif, sistematis dan relevan. Metode ini digunakan karena penelitian ini bersifat menganalisis content buku *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, karya Wahbah az-Zuhaili, khususnya tentang interpretasi az-Zuhaili mengenai Q.S. Al-'Anam ayat 151-153, dan buku-buku lain yang relevan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di muka.

Selain itu dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan mengacu pada beberapa sumber data yang berkaitan dengan judul peneliti yang dikaji. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dapat digunakan adalah data primer dan data sekunder. a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kitab *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* Karena tafsir ini sebagai sumber utama dari penelitian ini, yang dapat

memberikan banyak data bagi peneliti untuk menemukan jawaban sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan hasil penggunaan sumber-sumber lain yang tidak langsung dan sebagai dokumen yang murni ditinjau dari kebutuhan peneliti. (Winarno, 1994: 134). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa alManhaj*. b) pendidikan karakter karya Abdullah Munir c) buku panduan internalisasi pendidikan karakter di sekolah karya Jamal Ma'mur Asmani.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. (Sukardi, 2007: 3).

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, khususnya buku *Al-*

Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj, karya Wahbah azZuhaili sebagai sumber primer. Adapun sumber sekundernya adalah bukubuku lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Keabsahan Data/Dokumen

Dalam hal ini yang di maksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, memperbolehkan keputusan luar yang dapat di buat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusankeputusannya serta mendemonstrasikan nilai yang benar. Maka dalam tafsir Al-Munir Q.S. al-An'am ayat 151-153 menjelaskan tentang beberapa karakter yang perlu di gali dan di kembangkan oleh setiap individu. Adapun diantara nilai-nilai karakter yang terdapat dalam Q.S. al-An'am ayat 151-153 yaitu, nilai taqwa, kasih sayang, tanggungjawab, cinta damai, peduli sosial dan adil.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik *content analisis*, yaitu analisis tekstual dalam studi pustaka melalui interpretasi terhadap isi pesan suatu komunikasi sebagaimana

terungkap dalam literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini yang berorientasi pada upaya mendeskripsikan sebuah konsep atau memformulasikan suatu ide pemikiran melalui langkah-langkah penafsiran terhadap teks tafsir Al Munir Q.S. Al-Anām ayat 151153.(Moeleang, 1991: 163).

Data yang ada kemudian direduksi yang dilakukan dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga tetap berada di dalamnya.

Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemrosesan satuan, yakni informasi dan data yang telah direduksi kemudian dianalisis menjadi bagian terkecil yang mengandung makna yang bulat dan dapat berdiri sendiri terlepas dari bagian yang lain.
- b. Kategorisasi, yakni informasi dan data yang telah dianalisis kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
- c. Penafsiran data, yakni menganalisis data yang telah melalui tahap kategorisasi agar diperoleh deskripsi data atas masalah penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga langkah, yaitu pemrosesan satuan, kategorisasi, dan penafsiran data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir 'Atiyah Kecamatan Faiha, Provinsi Damaskus, Suriah, pada tanggal 6 Maret 1932 M/1351 H. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Mustafha az-Zuhaili. Ayahnya bernama Mustafha az-Zuhaili yang merupakan seorang petani yang sederhana dan terkenal keshalehannya sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafha Sa'adah yang merupakan seorang perempuan yang memiliki sifat wara' dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.

Wahbah az-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb,

Muhammad abu Zahrah Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.

Adapun karya-karyanya diantaranya yaitu: *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi Dirāsah Muqāranah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1963, *Al-Wasit fi Ushūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966, *Al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-

Hadits, Damaskus, 1967, *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar’iyyah*, Maktabah alFarabi, Damaskus, 1969, *Nazāriat al-Damān*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970, *AlTafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991.

2. Nilai Pendidikan Karakter dalam Q.S. Al-An’am ayat 151-153 Menurut Tafsir Al-Munir

1) Surat Al-an’am ayat 151.

Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (Nya).

Dalam ayat 151 ini terdapat nilai-nilai karakter yaitu, nilai religius, dimana dalam hal ini ada larangan untuk tidak menyekutukan Allah dalam arti bahwa dalam hal ini lebih kepada menjaga ketauhidan seseorang agar tidak terjerumus kepada jalan yang salah. Terdapat nilai akan cinta damai yang di tunjukan oleh sikap atau tingkah laku agar berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian larangan untuk membunuh anak karena takut kemiskinan, hal ini merupakan salah satu nilai kepedulian sosial dimana adanya sikap saling menghargai akan hak setiap manusia, tidak bersikap semena mena akan orang lain, serta harus mengetahui akan apa yang Allah perintahkan dan apa yang dilarang-Nya.

2) Surat Al-an'am ayat 152

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (Q.S. al-An'am, 6: 152).

Dalam ayat 152 terdapat nilai peduli sosial yang ditunjukkan dengan adanya larangan mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, dalam arti tidak diperbolehkan kepada siapapun akan harta anak yatim itu sendiri apalagi sampai dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang tentunya itu tidak boleh dilakukan.

Larangan yang menyangkut harta dimulai dengan larangan mendekati harta kaum lemah, yakni anak-anak yatim. Ini sangat wajar karena mereka tidak dapat melindungi diri dari penganiayaan akibat kelemahannya. Dan karena itu pula, larangan ini tidak sekedar melarang memakan atau menggunakan, tetapi juga mendekati.

Dengan cara menjaga harta anak yatim maka dengan tidak kita sadari bahwa itu merupakan sesuatu hal yang mencerminkan bahwa kita memiliki sikap peduli sosial terhadap sesama dan tentunya itu merupakan sesuatu yang baik. Adapun diperbolehkan menggunakan akan harta anak yatim itu dengan cara yang baik dan tentunya bermanfaat dan *maslahat* bagi orang lain.

Dalam ayat 152 terdapat nilai kejujuran serta keadilan dengan adanya rasa tanggungjawab atas apa yang menjadi tnggungjawabnya baik itu dilakukan kepada orang lain ataupun terhadap dirinya sendiri, jadi tidak adanya diskriminasi antara dirinya dan orang lain dalam hal apapun yang sesuai dengan syariat Islam.

Ini dikemukakan untuk mengingatkan bahwa memang dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah mengukur, apabila menimbang, yang benar-benar mencapai kadar adil yang pasti, tetapi kendati demikian, penimbang dan penakar hendaknya berhati-hati senantiasa melakukan penimbangan dan penakaran itu semampu mungkin.

3) Surat Al-an'am ayat 153

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. (Q.S.al-An'am ayat 153).

Dalam ayat terakhir yaitu ayat 153 terdapat nilai karakter yaitu nilai rasa ingin tahu, dimana dengan cara kita mencari tahu bagaimana mengikuti jalan yang benar sehingga tidak mengikuti jalan yang salah yaitu dengan cara melakukan perintah Allah yang tentu baik bagi makhluk-Nya dan tentunya hal tersebut ada pada Ridha-Nya.

3. Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai nilai pendidikan karakter dalam al-quran surat al-An'am ayat 151-153, maka dapat di implementasikan kedalam pembelajaran PAI, yaitu dengan cara menerapkan kebiasaan yang mencerminkan sikap religius dari para peserta didik, sehingga dengan demikian nilai karakter tersebut dapat langsung di aplikasikan oleh peserta didik.

Dengan halnya dalam pembelajaran peserta didik dituntut agar memiliki sikap kasih sayang terhadap sesama sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Adapun peran pendidik dalam hal mengenai nilai karakter tanggungjawab dapat di aplikasikan ketika pendidik memberikan tugas kepada peserta didik yang harus di kerjakan, maka disitulah terdapat nilai karakter tersebut.

Melalui pembelajaran PAI tidak hanya diajarkan sebatas teori saja akan tetapi lebih kepada mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bersikap adil serta peduli terhadap sesama itu semua diajarkan dalam pembelajaran PAI, sehingga mampu menjadikan peserta didik lebih memahami dari apa yang dipelajarinya. Di sinilah mata pelajaran PAI menjadi sangat penting untuk menjadi pijakan dalam pembinaan karakter peserta didik. Maka pada implementasinya, nilai-nilai karakter dapat diintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran PAI. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai karakter pada mata pelajaran PAI perlu dikembangkan, dieksplisitkan dan dikaitkan dengan konteks kehidupan

sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat.

Melalui proses pembelajaran khususnya dalam pembelajaran PAI agar dapat memberikan nilai-nilai karakter yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, perilaku dan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, bertakwa dan berakhlak mulia dan mengamalkan ajaran Islam dari sumber al-quran dan hadist. Sedangkan dalam proses pembelajaran, guru dalam mengajar Pendidikan Agama Islam ke peserta didik memuat pendidikan karakter.

Dengan demikian pendidikan agama di sekolah merupakan salah satu wadah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam meningkatkan pemahaman keagamaan, yakni meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah serta kemuliaan akhlak. Pengajaran agama Islam diberikan pada sekolah umum dan sekolah agama, baik negeri atau swasta. Seluruh pengajaran yang diberikan di sekolah atau madrasah diorganisasikan dalam bentuk kelompok-kelompok mata pelajaran yang disebut bidang studi dan dilaksanakan melalui sistem kelas. (Sulistiyowati, 2012: 56).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam al-quran surah al-an'am ayat 151-153 dan implementasinya dalam pembelajaran pendidikan agama islam (studi analisis terhadap tafsir al-munir karya wahbah az-zuhaili), maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Kandungan surah al-An'am ayat 151-153 menurut tafsir al-Munir terdapat sepuluh wasiat yang terdiri dari lima larangan dan lima perintah yaitu: menjauhi kemusyrikan kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, penghormatan mengubur anak perempuan, penghormatan melakukan tindakan keji, larangan membunuh nyawa dengan tanpa hak, menjaga harta anak yatim, menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil, berlaku adil dalam ucapan dan hukum dan memenuhi janji.
2. Nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam Q.S. Al-An'am ayat 151-153 adalah: nilai religius, kasih sayang, jujur, tanggung jawab, rasa ingin tahu, cinta damai, peduli sosial, dan adil.
3. Nilai-nilai karakter tersebut dapat diimplementasikan melalui pembelajaran dikelas, yaitu dengan cara menerapkan kebiasaan yang mencerminkan sikap religius dari para peserta didik, sehingga dengan demikian nilai karakter tersebut dapat langsung diaplikasikan oleh peserta didik semata-mata untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah swt serta kemuliaan akhlak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamdani. M. Djaswidi. (2014). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Media Cendekia Publisher.
- Al Maraghi, A. Mustafa. juz VIII. 1993. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Cv.Toha Putra.
- Aunillah Isna N. (2011). *Panduan menerapkan pendidikan karakter di sekolah*. Jogjakarta: Laksana.
- Armai Arief. (2009). *Pembaharuan Pendidikan Islam di Minangkabau*, Jakarta: Suara ADI.
- Asmani Ma'mur J. (2011). *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jogjakarta: Diva Press.
- Bagus, Lorens. (2000). *Kamus Filsafat* Jakarta: Gramedia.
- Basyiruddin, Usman. (2002). *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, Jakarta: Ciputat Pers.
- Bestari & Saepudin. (2013). *Teori dan Praktek Pendidikan Karakter & Kewirausahaan*. Bandung: Cv. Mugni Sejahtera.
- Daradjat, Zakiah. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*. PT Bumi Aksara, Cetakan Ketujuh: Jakarta.
- Daryanto. (2013). *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*, Yogyakarta: Gava Media.
- Depag. RI. (2005). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Duta ilmu.
- Endah, Sulistyowati .(2012). *Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter*, Yogyakarta: Citra Aji Parama.
- Ghofur, Saiful Amin. (2008). *Profil Para Mufasir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Ihsan Fuad. (2005). *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Koesoema Doni. (2007). *Pendidikan Karakter*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Lubis Mawardi. (2009). *Evaluasi pendidikan Nilai*. Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Majid, Abdul dan Dian Andayani. (2011). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep Dan Implementasi Kurikulum 2004)*. Bandung: Remaja Rosyda Karya.
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mubarak Zaim.(2008). *Membumikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyana, Rohmat. (2004). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta..
- Munir Abdullah. (2010). *Pendidikan karakter*. Yogyakarta: PT Bintang Pusaka Abadi.
- Nazarudin. (2007) *Manajemen Pembelajaran: Implementasi Konsep, Karakteristik dan Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum*, Yogyakarta: Teras.
- Nurdin Muslim,dkk. (2008). *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Rohmat Mulyana. (2004) .*Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Samani, Muchlas & Hariyanto. (2011). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Shihab Quraisy. (1994). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Siswanto. (2013). *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Religius*. Yogyakarta:Pustaka Belajar.
- Sukardi. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan:Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistyowati, Endah. (2012). *Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Citra Aji Parama.
- Ulfatin, Nurul. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan Teori dan Aplikasinya*. Malang. Bayumedia publishing.
- Partanto, Pius A & Al Barry, Dahlan. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Poerwadarminta. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahbah, az-zuhaili. (2016). Jilid 4. *Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj*. Jakarta: Gema Insani.
- Q-Anees,Bambang & Hambali, Adang. (2008). *Pendidikan Karakter Berbasis AlQuran*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Zuhairini,dkk. (1977). *Metodik Khusus Pendidikan Agama*. Surabaya: Usaha Nasional.

SISI PERADABAN DINASTI LAIN DALAM ISLAM; STUDY HISTORISITAS

Syafrie Fitriyanto

Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

syafriefitriyanto@gmail.com

Abstrak

Dalam artikel ini akan membahas tentang sisi peradaban serta sejarah dinasti-dinasti yang lain yang tidak masyhur oleh banyak orang yakni Dinasti Fatimiyah, Dinasti Idrisian, Dinasti Agrabia, Dinasti Samania, Dinasti Safariya, Dinasti Tulum dan Dinasti Hamdaniya. Dalam sejarah peradaban Islam, dinasti lain di dunia setelah pemerintahan Huraafar al- Rasyid digantikan oleh penguasa yang membentuk kekuasaan dengan sistem keluarga atau dinasti. Dinasti-dinasti yang berkuasa setelah Huraafar Rasidin, seperti Bani Umayyah, Abbasiyah, Bani Umayyah di Andalusia, dan beberapa dinasti lain yang menguasai beberapa bagian dunia Islam, selain dinasti-dinasti tersebut di atas. Perkembangan peradaban di dunia Islam antara lain Dinasti Fatimiyah, Dinasti Idrisian, Dinasti Agrabia, Dinasti Samania, Dinasti Safariya, Dinasti Tulum dan Dinasti Hamdaniya. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan historis atau pendekatan sejarah. Pendekatan historis atau pendekatan sejarah merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian tentang objek sejarah, agar mampu mengungkapkan banyak dimensi dari peristiwa tersebut.

Kata Kunci: Peradaban, Dinasti lain, Sejarah

Abstract

In this article, we will discuss the civilization side and the history of other dynasties that are not well-known by many people, namely the Fatimid dynasty, the Idrisian dynasty, the Agrabian dynasty, the Samania dynasty, the Safariya dynasty, the Tulum dynasty and the Hamdaniya dynasty. In the history of Islamic civilization, other dynasties in the world after the reign of Huraafar al-Rashid were replaced by rulers who formed power with a family system or dynasty. The dynasties that ruled after Huraafar Rasidin, such as the Umayyads, Abbasids, Umayyads in Andalusia, and several other dynasties that controlled several parts of the Islamic world, in addition to the dynasties mentioned above. The development of civilization in the Islamic world included the Fatimid dynasty, the Idrisian dynasty, the Agrabian dynasty, the Samania dynasty, the Safariya dynasty, the Tulum dynasty and the Hamdaniya dynasty. The approach in this study uses the historical approach or historical approach. The historical approach or historical approach is one approach that can be used in conducting research on historical objects, in order to be able to reveal the many dimensions of the event.

Keywords: Civilization, Other Dynasties, History

PENDAHULUAN

Peradaban Islam mulai dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, ketika berhasil merumuskan masyarakat Madani dan Piagam Madinah, kemudian dilanjutkan oleh Khulafa alRasyidin (Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, Utsman Ibn Affan, dan Ali Ibn Thalib). Sistem yang dikembangkan pada saat itu adalah sistem demokrasi di mana pucuk pimpinan dipilih melalui Musyawarah oleh beberapa orang yang ditunjuk oleh kaum muslimin atau khalifah sebelumnya, pasca meninggalnya

Ali dan naiknya Muawiyah, sistem pemerintahan dalam Islam berubah drastis dari sistem kekhilafahan ke Monarkhi Absolut. Monarkhi Absolut dibuktikan dengan dipilihnya Yazid sebagai putra mahkota, kemudian mengangkat dirinya sebagai Khalifah fi Allah, mulailah babak baru dalam pemerintahan Islam dan berlangsung terus-menerus sampai kepada Khalifah Turki Usmani sebagai konsep pemerintahan Khalifah (penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat) terakhir dalam dunia Islam.

Kesempurnaan Agama Islam bukan hanya terletak pada aspek aqidah, ibadah dan kepercayaan serta akhlak. Lebih dari pada itu, Islam memiliki syariat bagi ummatnya yang menjadi pedoman kebahagiaan di dunia dan akhirat. Syariat inilah yang menjadi pokok beradabnya suatu bangsa. Tanpa syariat/tuntunan, manusia tidak lebih baik dari binatang yang saling memusuhi satu sama lain, walau berakal.

Hal tersebut juga tidak terlepas dari sejarah dan peradaban yang ada pada ajaran agama Islam sejak awal keberadaannya. Hingga di zaman modern saat ini begitu banyak peradaban dan ajaran Islam disalah-artikan, dan disalah gunakan. Kemurnian Islam sedikit demi sedikit pudar karena terinfeksi oleh budaya yang menyimpang jauh dari ajaran Islam. Sepeninggalnya dinasti abasiah ternyata masih banyak dinasti-dinasti yang terkdang orang belum mengetaahui dan mengenalnya apa dinasti- dinasti itu? yakni Dinasti Fatimiyah, Dinasti Idrisian, Dinasti Agrabia, Dinasti Samania, Dinasti Safariya, Dinasti Tulum dan Dinasti Hamdaniya yang penting untuk kita ketahui.

TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum jauh membahas mengenai Dinasti lain disini disajikan dua artikel jurnal dari Syahreni tahun 2016 yang berjudul "Dinasti-Dinasti Kecil Bani Abasiah" hanya membahas satu pokok dinasti saja demikian juga jurnal dari Muhammad tahun 2020 dengan judul "Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Dinasti fatimiyah di Mesir". Sehingga artikel ini berbeda dengan usraian simpel dengan tujuan mudah dipahami untuk pemula mengenal dinasti-dinasti lain yang tidak atau kurang masyhur.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan suatu pendekatan yaitu pendekatan historis atau pendekatan sejarah, hal ini sangat relevan dengan judul penelitian. Pendekatan historis atau pendekatan sejarah merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian tentang objek sejarah, agar mampu mengungkapkan banyak dimensi dari peristiwa tersebut. Mengenai pengumpulan data penulis melakukannya dalam bentuk library research, yakni mengumpulkan beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas baik buku dan majalah, maupun tulisan lain, yang akan dijadikan bahan acuan dalam penulisan ini. Penulis membaca beberapa buku yang berhubungan dengan objek kajian, tentu saja yang ada hubungan dengan pembahasan.

PEMBAHASAN

A. Dinasti Idrisiyah (789 M- 926 M)

Wilayah kekuasaan dinasti Idrisiyah adalah Magribi (Maroko). Didirikan oleh Idris bin Abdullah, cucu Hassan bin Ali bin Abi Thalib, dinasti yang pertama menjadi Syiah, terutama di Maroko dan Afrika Utara. Sultan terbesar Idrisia adalah Yahya IV (292 H/905 M-309 H/922

M), yang berhasil mengembalikan kota Romawi Volubilis menjadi Fes. Dinasti Idrisiyah berperan dalam menyebarkan budaya dan agama Islam kepada orang-orang barbar dan lokal. Dinasti tersebut bubar setelah ditaklukkan oleh Dinasti Fatimiyah pada tahun 374/985 M. Dinasti Idrisian dan lainnya meninggalkan Masjid Calaviin dan Masjid Andalusia yang dibangun pada 244/859 M. (Syukur, 2009)

1. Sejarah Pembentukan

Keberhasilan dan kejayaan Dinasti Abbasiyah menumbangkan Dinasti Umayyah didukung dan dibantu oleh beberapa kelompok yang berperan penting dalam menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah yaitu kelompok Alawiyun. Mereka berharap bahwa ketika Abbasiyah berkuasa, mereka akan mendapatkan apa yang Umayyah hilangkan dan rampas. Namun ketika usaha itu berhasil, mereka merasa dikhianati oleh Abbasiyah, dan akhirnya kelompok Allawiyun ini melancarkan pemberontakan oleh dua bersaudara keturunan Ali bin Abi Thalib, pemilik al-Nafs al Zakakiyyah bergelar Muhammad dan Ibrahim, keduanya putra Abdullah bin Hassan. Ibnu Ali. Namun, pemberontakan mereka kembali ditekan oleh penguasa Abbasiyah yang saat itu masih sangat kuat. Ketika khilafah berada di tangan Hadi, kelompok Allawiyun kembali melancarkan pemberontakan yang dipimpin oleh Husein bin Ali bin Hassan ±6 mil antara Mekkah dan Madinah. Hassan tewas dalam pemberontakan dengan keluarga Allawiyun, dua dari keluarga Allawiyun berhasil melarikan diri, Idris bin Abdullah dan saudaranya Yahya bin Abdullah. Idris bin Abdilah kemudian dikenal sebagai cikal bakal berdirinya Dinasti Idrisiyah. Dinasti ini menguasai wilayah al- Maghrib (Maroko) dari akhir abad ke-8 hingga abad ke-10 dan ke-25. (Fuadi, 2011)

2. Kemajuan yang Dicapai

Saat dinasti Idrisiyah dikepalai oleh Idris II sampai Yahya IV, pemerintahan Idrisiyah mampu melebarkan sayapnya dengan bagus. Idris kemudian menjadikan kota Fez sebagai ibu kota pemerintahan pada tahun 808 M. Dinasti Idrisiyah memiliki saham dan andil besar dalam perkembangan kultur masyarakat Barbar, selain itu peradaban luar biasa yang diukir oleh dinasti ini adalah pendirian Universitas Qairawan yang megah dan terkenal

3. Kemunduran dan Kehancuran

Saat dinasti dikepalai oleh Muhammad al-Muntashir, beberapa wilayah kekuasaan dinasti mengalami keretakan. Kondisi yang demikian inilah yang rentan akan serangan dari luar, seperti ancaman serius yang datang dari kelompok khawarij

Rustamiyah di Aljazair bagian barat, meskipun pada akhirnya dapat dikalahkan. Dan bahaya lain dari dinasti baru yang lebih besar yaitu Fathimiyah. Akhirnya melemahnya kekuatan Idrisiyah inilah mengakibatkan kekalahan dan kehilangan kekuasaannya di tangan dinasti Fathimiyah pada tahun 985 M.

B. Dinasti Aghlabiyah (800M-909M)

Pusat pemerintahan dinasti Aghlabiyah terletak di Qairawan, Tunisia. Wilayah dinasti Aghlabiyah termasuk Tunisia dan Afrika Utara. (Mustaghfirin, 2019) Pemimpin pertama dinasti ini adalah komandan Khurasan Ibrahim bin Agrab. Aghlabiyah berperan penting dalam menggantikan bahasa Latin dengan bahasa Arab dan menjadikan Islam sebagai agama dominan. Dinasti ini berhasil menaklukkan Sisilia dan sebagian besar Italia selatan, Sardinia, Corsica, dan bahkan pantai Alpine pada abad ke-9. Dinasti Aghlabiyah berakhir ketika ditaklukkan oleh Dinasti Fatimiyah. Sisa-sisa dinasti ini termasuk Masjid Agung Qerawan dan Masjid Agung Tunis.

1. Sejarah Pembentukan

Dinasti Aghlabiyah adalah dinasti yang berbasis di Tunisia yang berlangsung selama sekitar satu abad dan mengambil namanya dari Ibrahim ibn al-Aghlab, seorang Khurasan yang kemudian menjadi perwira di tentara Abbasiyah. Untuk mempertahankan pemerintahan Abbasiyah, Harun al-Rasyid mengirim pasukan ke Ifriqiyah, di bawah pimpinan Ibrahim ibn al-Aghrab, yang telah berhasil mengalahkan kelompok Khawarigi, ia mengusulkan ke wilayah The Vriquier dan keturunannya dianugerahkan kepadanya. Tidak hanya itu, jika tawarannya diterima, dia akan membayar 40.000 dinar setahun ke Bagdad. Akhirnya ia resmi diangkat menjadi Gubernur Tunisia pada tahun 184H/800M. Dengan demikian, Ibrahim ibn Agrab dan keturunannya memerintah wilayah tersebut, yang dikenal sebagai dinasti Aghlabiyah. (Syahreni, 2016)

2. Kemajuan yang Dicapai.

Beberapa kemajuan yang dicapai dalam pemerintahan Aghlabiyah diantaranya dalam bidang politik, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan ekonomi. Dalam dalam bidang politik ialah perluasan wilayah, yang sebelumnya hanya wilayah ke gubernuran,

saat itu meluas hingga daratan Eropa, Sisilia dan pulau-pulau yang berdekatan dengan Tunisia, kota Pantai Italia dan kota Roma serta pantai Yugoslavia. Dalam bidang kebudayaan terdapat pembangun masjid Qairawan dan 10.000 benteng pertahanan di Afrika Utara, sedangkan kemajuan dalam bidang ekonomi ialah pengembangan dalam sektor pertanian, perdagangan dan industri. Dinasti ini membangun bendungan untuk irigasi, selain itu juga mengembangkan perkebunan anggur dan kurma sebagai usaha pengembangan dalam pertanian. Sementara itu untuk memajukan bidang perdagangan, dibangunlah jalan-jalan, angkutan, serta lalu lintas perdagangan. Di sektor industri, mendirikan manufaktur alat-alat pertanian, pengolahan emas, perak.

3. Kemunduran dan kehancuran

Dinasti Aghlabiyah mulai mengalami kemunduran disebabkan oleh propaganda dari golongan Syiah yang dipelopori oleh Abu Abdullah al-Syih atas perintah Ubaidillah al-Mahdi, pendiri dinasti Fatimiyah. Propaganda Syiah ini berpengaruh kuat dikalangan orang-orang Barbar yang kemudian menjadi kekuatan militer tangguh dan siap mengalahkan dinasti-dinasti disekitarnya. Kuatnya pasukan Syiah dari sekte Ismailiah ini kemudian mampu menggulingkan dinasti Aghlabiyah pada tahun 909M. (Fuadi, 2011)

C. Dinasti Samaniyah (874M-999M).

Wilayah kekuasaan Dinasti Samaniyah meliputi daerah Khurasan (Irak) dan Transsoxania (Usbekistan) yang terletak di sebelah timur Baghdad. Ibu kotanya adalah Bukhara. Dinasti Samaniyah didirikan oleh Ahmad bin Asad bin Samankhudat, keturunan seorang bangsawan Balkh (Afghanistan Utara). Puncak kejayaannya tercapai pada masa pemerintahan Ismail bin Ahmad (Ismail I), Penguasa ketiga dinasti ini. Ismail II AL-Muntasir, Khalifah terakhir Samaniyah, tidak dapat mempertahankan wilayahnya dari serangan Dinasti Qarakhan dan Dinasti Ghaznawi. Dinasti Samaniyah berakhir setelah Ismail terbunuh pada tahun 395 H/1005 M peninggalan Dinasti Samaniyah berupa Mausoleum Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, seorang ilmuwan muslim.

1. Sejarah Pembentukan

Dinasti Samaniyah di dirikan oleh Ahmad bin Asad bin Samankhudat, keturunan seorang bangsawan Balkh (Afganistan Utara). Wilayah kekuasaan Dinasti Samaniyah meliputi daerah Khurasan (Irak) dan Transoxania (Uzbekistan) terletak disebelah timur Baghdad, dengan ibu kota Bukhara. Nama Ahmad ibn Asad cukup terkenal karena ia pemimpin yang adil dan bijaksana, namun kemudian diganti oleh Nashr sepeninggalnya. Ditanganya dinasti ini mampu merebut wilayah yang berada dibawah kekuasaan dinasti Thahiriyah, akhirnya iapun memindahkan ibu kota wilayah dari Bukhara ke Samarkand pada tahun 873M.

2. Kemajuan yang dicapai

Dinasti Samaniyah ini berkuasa dalam kemajuannya yaitu dalam bidang politik, memelihara pusat yang strategis bagi daulat Islam ditimur, dan mengembangkan kekuasaan Islam sampai kewilayah Turki, sedangkan dalam bidang kebudayaan, menjadikan Bukhara sebagai tempat menetapnya ulama serta sebagai kiblatnya para pujangga, memiliki perpustakaan yang di dalamnya kitab-kitab masyhur dari berbagai disiplin ilmu yang tidak terdapat ditempat lainya, selain itu perkembangan ilmiah dan kesustraan serta filsafat memuncak di era Samaniyah. Hal ini ditandai dengan banyaknya kemunculan para pemikir Islam, seperti al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Razi, al-Firdausi.

3. Kemunduran dan kehancuran

Dinasti Samaniyah mulai mengalami kemunduran setelah sepeninggal Ismail, kemudian kepemimpinanya dilanjutkan oleh Ismail II Al-Muntasir khalifah terakhir Samaniyah, namun dimasa kepemimpinanya tersebut, Ismail II Al-Muntasir tidak mampu mempertahankan wilayahnya dari serangan dinasti Qarakan dan dinasti Ghaznawi. Akhirnya masa daulah Samaniyah berakhir setelah Ismail terbunuh dalam pelariannya pada tahun 395H/1005M (Fuadi, 2011) Hal. 179

D. Dinasti Safariyah(867M-903M)

Wilayah kekuasaan Dinasti Safariyah mencakup kawasan Sijistan, Iran. serta adalah dinasti yg paling lama berkuasa di global islam. Pendiri dinasti ini merupakan Yaqub bin Lais Alaihi Salam-Saffar, seorang pemimpin grup khawarij di provonsi Sistan (Irak). Dinasti Safariyah di bawah kepemimpinan Amr bin Lais berhasil melebarkan daerah kekuasaanya sampai ke Afghanistan Timur. pada masa itulah kekuasaan Dinasti Safariyah mencapai puncaknya.

1. Sejarah Pembentukan

Dinasti Safariyah adalah dinasti paling usang berkuasa di dunia Islam. Pendiri dinasti ialah Yaqub bin Lais Alaihi Salam-Saffar, seorang pemimpin grup Khawarij di propinsi Sistan (Iran). Yaqub kecil hidup beserta dengan adiknya Amr ibn al-Lais dengan bekerja menjadi tukang barang-barang kuningan/tembaga. namun perjuangan ini tidak berlangsung usang serta mulai mengalami kemrosotan sejak ayahnya meninggal. Akhirnya dia serta adiknya menetapkan buat masuk ke kelompok penyamun (perampok/tukang begal). Masuknya Yaqub serta adiknya ke dalam keliru satu kelompok tersebut dianggap menjadi hal yg masuk akal, sekalipun ia orang penyamun, tetapi ia senang memberi serta tak jarang membantu orang-orang yang tertindas. Lambat laun kelompoknya sebagai pasukan yang besar , teratur serta mempunyai kedisiplinan yg tinggi, dan waktu Yaqub telah mulai bertenaga, ia memulai gerakannya buat melakukan ekspansi wilayah dan memproklamasikan dirinya menjadi penguasa ke Sijistan dan Punjab di tahun 253H/867M

Kemajuan yang dicapai. Selesainya Yaqub memproklamasikan dirinya menjadi penguasa baru, beliau melanjutkan ekspansi kewilayah-wilayah disekitarnya, mirip penguasaan atas kota Kabul dan kota bentang Balkh. ia jua merebut Khurasan di tahun 260H/873M, meskipun kesuksesan telah poly dicapai oleh Yaqub tapi hubungannya dengan pemerintahan Abbasiyyah masih baik. Hal inilah yang seolah menjadi penguat dinasti, sebab pemerintahan Abbasiyyah semakin mengukuhkan anugerah khalifah atas beberapa kota

krusial padanya, mirip Balkh, Thurkhanistaan, Kirman, Sijistan serta daerah lainnya. Kegemilangan Yaqub pada perluasan wilayah ini menjadikannya berkeinginan menguasai Baghdad, namun upayaini tak berhasil

2. Kemunduran kehancuran

Kemunduran serta keruntuhan ditimbulkan karena ketamakan para penguasa yg selalu berkeinginan memperluas daerah kekuasaan. seperti halnya dinasti Saffariyah ditangan Amr, dia tetap bersih kukuh ingin menguasai dan memperluas kekuasaan hingga wilayah Transoxania, yg waktu itu secara formal berada dibawah kekuasaan Bani Samaniyyah, yg mana dinasti ini lebih bertenaga berasal di Shaffariyah. Akhirnya pasukan Amr bisa dikalahkan sang pasukan Ismail ibn Ahmad dari Bani Samaniyyah, serta Amr sendiripun berhasil ditangkap. sehingga semua akibat penaklukan terlepas pulang serta hanya Sijistan yg masih berada pada kekuasaan dinasti Saffariyah.

E. Dinasti Thuluniya(868M-905M)

Wilayah kekuasaan Dinasti Tulun meliputi Mesir dan Suriah, Dinasti islam yang masa pemerintahannya paling cepat berakhir. Pendirinya adalah Ahmad bin Tulun, putra seorang Turki yang diutus oleh gubernur Transoxania (Uzbekistan) membawa umpeti ke Abbasiyah.

1. Sejarah Pembentukan

Awal pendirian dinasti ini tak terlepas dari kisah seorang tawanan perang Turki yang lalu dijadikan menjadi pegawai istana al- Mustain, namanya Bayakbek, yang juga ayah dari ibn Thulun. Bayakbek diangkat menjadi seorang gubernur Mesir sang al-Mutaz, oleh Bayakbek sendiri jabatan itu tak dipegangnya, tetapi diberikan pada anaknya Ibn Thulun, ia berikutnya menjadi pendiri dinasti Thuluniyah pada abad 9M.

Pada tahun 263M Ibn Thulun secara resmi diangkat menjadi gubernur di Mesir tahun 254H. dalam sejarah selanjutnya, Ibn Thulun melepaskan diri berasal Abbasiyah, bahkan beliau bisa menaklukkan Damaskus, Homs, Hamat, Aleppo dan Antiokia.

2. Kemajuan yang dicapai

Sebagaimana dinasti-dinasti lain yg mengalami masa keemasan, dinasti ini pula banyak mengalami kemajuan dalam beberapa bidang kehidupan, seperti segi keamanan : ibn Thulun menciptakan armada laut yg tangguh menggunakan berpangkalan pada Akka (Acre), segi ekonomi: pengembangan sektor pertanian menggunakan cara memperbaiki nilometer (perbaikan sungai Nil), bendungan, irigasi, pengembangan sektor perdagangan menggunakan cara menciptakan jembatan, terusan serta armada perhubungan darat, sungai serta bahari, pengembangan sektor industri dengan cara mendirikan industri senjata, sabun, gula dll, segi kebudayaan dan ilmu pengetahuan: pembangunan masjid yang dikenal menggunakan sebutan Jami Ibnu Thulun yang berukuran $\pm 1/17$ dari seluruh ayat suci al-Quran menggunakan gaya Arab Kufi. Kemajuan bidang budaya ini juga semakin disempurnakan sang Khumarawaih, putra serta pengganti Ibn Thulun yang mendirikan gedung –gedung dengan golden hall, kolam renang berlapis emas didepan istana dan berbagai ragam tumbuhan bunga. (Azizi, 2017)

3. Kemunduran kehancuran

Dinasti Thuluniyah mulai mengalami kemunduran selesainya sepeninggal Khumawaraih serta digantikan oleh Abu Asakir al-Jaisy yang ternyata dia terkait menggunakan peristiwa pembunuhannya terhadap pamannya yaitu Mudhar Ibn Ahmad Ibnu Thulun. Hal ini mengakibatkan gencar-gencarnya perlawanan antara pihaknya dengan fuqahaserta qadhi yang pada akhirnya ke-amiran Jaisy dibatalkan. serta diangkatlah Abu Musa Harun sebagai amir baru dalam usia 14 tahun. sepertinya dengan usia yang cukup beliau untuk memimpin pemerintahan berakibat Harun kurang cakap dalam mengendalikan suasana yang semakin kacau itu, sementara pada Syam sendiri sudah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Qara mitha yang pula tidak berhasil dikendalikan. Akhirnya khalifah al- Muktafipun mengambil alih balik pemerintahan Thuluniyah ketangan kekhalfahanya. (Muziyana, 2014)

F. Dinasti Hamdaniyah(905M-1004M)

1. sejarah pembentukan

Dinasti ini didirikan oleh Hamdan bin Hamdun yang bergelar Abu Al-Haija. Wilayah kekuasaannya meliputi Aleppo (Suriah) dan Mosul (Irak). Dinasti Hamdaniyah di Mosul dipimpin oleh Hasan yang menggantikan ayahnya, Abu Al-Haija, sedangkan dinasti Hamdaniyah di Aleppo didirikan oleh Ali Saifuddawlah yang berhasil merebut Aleppo dari dinasti Ikshydiyah. (Amin, 2010)

2. Kemajuan yang dicapai

Prestasi gemilang yang diukir sang dinasti Hamdaniyah terutama lebih tampak di daerah politiknya. Dinasti ini bisa memainkan kiprah penting menjadi pagar betis buat mempertahankan kekuasaan dinasti Abbasiyah, bahkan dinasti Hamdani ini sebagai suatu kekuatan yang bisa menunda pasukan Romawi buat merebut semua daerah Suriah. Selain kemajuan dibidang kemiliteran juga mengalami beberapa kemajuan pada aneka macam bidang, mirip didunia intelektual yg ditandai dengan kemunculan beberapa nama mirip al-Farabi, al-Isfahani serta al-Firas. sebagai akibatnya meskipun dinasti ini bukan terbiatng dinasti akbar tetapi capaiannya kentara tampak.

3. Kemunduran dan kehancuran

Kemunduran telah mulai terasa semenjak meninggalnya Saif al- Daulat di tahun 967M, kepemimpinan selanjutnya digantikan sang putranya Saad al-Daulat Syarif I, lalu oleh Sad Daulat Sad, Ali II dan Syarif II. Para penggantinya ini kurang memiliki kemampuan buat mengimbangi kekuatan-kekuatan asing yg besar waktu itu yaitu Buwaihi, Romawi, dan Fathimiyah. Dinasti Fathimiyah yang sudah terdapat semenjak 1004M, akhirnya bisa menguasai dinasti Hamdaniyah. (Syahreni, 2016)

G. Dinasti Fathimiyah(909M-1171M)

1. Sejarah Pembentukan

Berdirinya Dinasti Fathimiyah pada latar belakang yang sangat melemahnya Dinasti Abbasiyah. Lalu Ubaidillah Mahdi mendirikan Dinasti Fathimiyah yang lepas asal kekuasaan Abbasiyah. (Muhammad, 2020) Kebudayaan berkembang pesat pada masa Dinasti Fathimiyah yang pada tanda menggunakan berdirinya Masjid Al-Azhar yang berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam serta ilmu pengetahuan. Dinasti ini berakhir setelah Al-Adid, khalifah terakhir Dinasti Fathimiyah yang jatuh sakit.

2. Kemajuan yang Dicapai

a. Administrasi

Administrasi pemerintahan Dinasti Fathimiyah secara garis besar tidak sama menggunakan administrasi Dinasti Abbasiyah. Khalifah menjabat sebagai kepala negara baik duniawi juga spiritual. Khalifah berwenang mengangkat dan sekaligus menghentikan jabatan-jabatan dibawahnya. Pada bidang kemiliteran terdapat 3 jabatan utama, yaitu : (1) Amir yang terdiri dari pejabat tinggi militer dan pegawai khalifah, (2) petugas keamanan, dan (3) banyak sekali resimen yang mana tugas mereka adalah mendirikan serta mengelola pusat-pusat armada laut pada Alexandria, Damaskus, Ascalon dan di beberapa pelabuhan Syria.

a. Kondisi sosial

Mayoritas khalifah Fathimiyah bersikap moderat dan penuh perhatian kepada urusan agama non muslim. Selama masa ini pemeluk Kristen Mesir diperlakukan secara bijaksana, hanya Khalifah Al-Hakim yang bersikap agak keras terhadap mereka. Orang-orang Kristen tidak pernah merasakan kemurahan dan keramahan melebihi sikap pemerintahan muslim.

b. Ilmu pengetahuan

Khalifah Fathimiyah mendirikan beberapa lembaga ilmu pengetahuan seperti Dar Al-Hikmah (pusat penelitian astronomi) dan beberapa karya sastra terkait keislaman, syair, astrologi. Selain itu pada masa dinasti ini juga sangat banyak ditemui berbagai seni arsitektur, ini dibuktikan dengan banyaknya bangunan masjid dimasanya sangat megah dan menjadikan ciri khas masjid di zaman Fathimiyah seperti masjid agung Al-Azhar dan masjid agung Al-Hakim menandai kemajuan arsitektur zaman Fathimiyah. (Amin, 2010)

c. Kemunduran dan Kehancuran

Keruntuhan Dinasti Fatimiyah disebabkan oleh beberapa kelemahan yang ada pada masa pemerintahannya. Kelemahan-kelemahan itu antara lain:

1. Sistem pemerintahan berubah menjadi sistem parlementer.
2. Terjadinya persaingan perebutan wazir.
3. Adanya resistensi dari orang-orang Sunni dan Nasrani di Mesir
4. Terjadinya perebutan kekuasaan antara bangsa Barbar dan bangsa Turki terutama dalam bidang militer.
5. Adanya pemaksaan ideologi syiah kepada rakyat yang mayoritas sunni.
6. Datangnya serbuan dari tentara salib.
7. Lemahnya para khilafah.
8. Para penguasanya selalu tenggelam dalam kehidupan yang mewah.
9. Kondisi al-Adhid (sakit) yang dimanfaatkan oleh Nur ad-Din. (Nasution, 2013)

Demikian pembahasan mengenai sejarah dan ahal-hal yang berkaitan dengan Dinasti-dinasti yang lain dalam artikel ini.

SIMPULAN

Dinasti kecil sebagian berasal dari Arab memecah wilayah kekuasaan Khalifah asal Barat. di masa kekuasaan bani Abbasiyah terdapat lima dinasti kecil yang berada pada sebelah barat Baghdad, yakni: Dinasti Idrisiyah, (789 M - 926 M) Dinasti Aghlabiyah, (800 M - 909 M) Dinasti Thulunyah (868 M - 905 M) Dinasti Ikhsidiyah(935 M - 969 M) Dinasti Hamdaniyah (905 M - 1004 M). Proses yang sama sudah terjadi pada Timur terutama dilakukan sang orang Turki serta Persia, di masa kekuasaan Bani Abbasiyah ada 3 dinasti kecil yang berada di sebelah timur Baghdad, yakni: Dinasti Thahiriyyah(820 M - 872 M) Dinasti Shaffariyyah (867 M – 1495 M) Dinasti Samaniyyah (819 M - 1005 M). Proses yang sama dilakukan di Mesir Pada Masa dinasti Abbasiyah yaitu munculnya Dinasti Fatimiyah. Dalam masa memerintah, masing-masing Dinasti memiliki masa kemajuan dan masa kemunduran tersendiri dan berbeda-beda, yang mana telah di paparkan dalam uraian pembahasan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. M. (2010). Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Amzah.
- Azizi, A. S. (2017). Sejarah Terlengkap Peradaban Islam. Yogyakarta: Noktah.
- Fuadi, I. (2011). Sejarah Peradaban Islam . Yogyakarta: Teras.
- Muhammad. (2020). Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Dinasti fatimiyah di Mesir. Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam No 1, 18(01), 14.
- Mustaghfirin, A. (2019). Islamisasi Di Afrika Sub Sahara. Jurnal Studi Islam dan Peradaban, 14(02).
- Muziyana. (2014). Sejarah Peradaban Islam 2. Surabaya: UIN Sunan Ampel urabaya.
- Nasution, S. (2013). Sejarah Perkembangan Peradaban Islam. Riau: Yayasan Pusaka.
- Syahreni, A. (2016). Dinasti-Dinasti Kecil Bani Abasiah. Jurnal Rihlah, No. 1 Vol. IV.
- Syukur, F. (2009). Sejarah Pradaban Islam . Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Pendidikan Islam dalam Tantangan Era Metaverse

Umi Henik

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
u.miehenikmenik@gmail.com

Mualimul Huda

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
mualimulhuda@iainkudus.ac.id

Abstrak

Maraknya kecanggihan teknologi memudahkan segala sendi kehidupan, berakibat era online metaverse (konsep yg ditulis sang Neal Stephenson pada novel Snow Crash dalam 1992) menjadi ruang (global virtual) buat beinteraksi satu sama lain. Seiring maraknya ICT tersebut, tantangan bermunculan sesuai kebutuhan buat generasi mendatang (gen z).

Penelitian ini bertujuan mengetahui konflik pendidikan Islam yg sedang terjadi & bagaimana tantangan pendidikan Islam kedepan. Kemudian bagaimana solusi bagi global pendidikan Islam supaya bisa bersaing bahkan sebagai acuan pada aplikasi pendidikan pada Indonesia.

Metode penelitian memakai studi literatur menggunakan mengumpulkan data menurut dokumentasi memakai metode deskriptif-analisis. Dalam menyambut era online metaverse, pendidikan wajib melakukan transformasi secara masif. Sistem pendidikan wajib mengedepankan proses pembelajaran yg inovatif & kreatif. Untuk itu beberapa hal yg wajib diperhatikan dalam pendidikan untuk menyambut era metaverse, yaitu; pendidikan yg mengarah pada kecakapan penggunaan teknologi, pendidikan yg merujuk pada kecerdasan emosional, & pendidikan yg merujuk dalam pengembangan Iman & Takwa.

Kata Kunci; Pendidikan Islam; Teknologi; Era Metaverse

Abstract

The rise of technological sophistication facilitates all aspects of life, making the online metaverse era (a concept written by Neal Stephenson in the novel Snow Crash in 1992) as a space (virtual world) to interact with one another. Along with the rise of ICT, various challenges arise according to the needs of future generations.

This study aims to determine the current problems of Islamic education and how the challenges of Islamic education will be in the future. Then how is the solution for the world of Islamic education to be able to compete and even become a reference in the implementation of education in Indonesia.

The research method uses literature study by collecting data from documentation using descriptive-analytical method. In welcoming the online metaverse era, education must make a massive transformation. The education system must promote an innovative and creative learning process. For this reason, there are several things that must be considered in the world of education to welcome the metaverse era, namely; education that leads to mastery of technology, education that leads to emotional intelligence, and education that leads to the development of faith and piety.

Keywords; *Islamic Education; Technology; Metaverse Era*

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai metaverse menjadi hangat setelah salah satu platform media sosial terbesar, Facebook melakukan rebranding menjadi Meta *Platforms Inc*, atau disingkat Meta. Dengan rebranding yang dilakukan Facebook, akan hadir dengan ide-ide futuristik dengan membawa tema metaverse. Gagasan ini menjadi arah baru bagi dunia teknologi masa yang akan datang. (Kompasiana.com, 2022)

Metaverse adalah salah satu akibat dari kemajuan teknologi. Derasnya informasi yang masuk membawa dampak negatif kepada masyarakat. Disinilah peran agama menjadi sangat penting. Sebagai pengendali sikap dan tingkah laku, ia tidak boleh dilepaskan dari kemajuan teknologi.

Perkembangan teknologi telah membawa bangsa ini memasuki era baru pendidikan, akan tetapi permasalahan yang ada itu berakibat pada ketidakmampuan untuk menuju goal pendidikan. Kelemahan anak bangsa dalam memanfaatkan teknologi sebanding dengan lemahnya pendidikan. Hal ini didukung oleh banyaknya sekolah atau lembaga pendidikan yang masih belum mampu menciptakan milieu belajar yang baik. Keterbatasan sarana dan prasarana pun menjadi alasan buruknya pendidikan di Negeri ini. (Wafi, 2020)

Kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan agama akan sia-sia, bahkan ia dapat menjadi bumerang yang dapat menyerang balik. Agama Islam memandang teknologi sebagai sesuatu yang sangat penting. Dalam surah Al Mujadalah ayat 11;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemah Kemenag 2019

11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (*Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10, n.d.*)

Islam menegaskan betapa mulianya orang berilmu atau yang mengetahui teknologi. Maka merupakan suatu hal yang keliru ketika ada beberapa golongan yang menuduh Islam adalah agama yang jadul, agama yang ketinggalan zaman. Karena faktanya, dalam ajarannya Islam memerintahkan umatnya untuk belajar.

Kita sebagai umat Islam tidak diperkenankan untuk melepaskan diri dari teknologi, dan menganggapnya sesuatu yang bid'ah, karena dengannya kita dapat menghadapi tantangan zaman yang ada. Selain itu, teknik non-agama dapat merusak sistem kehidupan. Selain itu, Islam dan segala nilai dan ajarannya menjadi faktor yang sangat penting dalam menyeimbangkan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, nilai dan ajaran tersebut harus meresapi anak negeri sejak dini. Salah satu caranya adalah dengan mengingat pendidikan Islam di sekolah dan masyarakat. Gerakan Islamisasi ilmu yang terus menerus, banyaknya iklan/ ajakan kehidupan beragama, dan banyaknya kegiatan keagamaan merupakan contoh penerapan pendidikan Islam dalam kehidupan.

Akhirnya, Islam tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi. Dengan mempelajarinya, kita dapat menjauhkan diri dari dampak kemajuan teknologi yang pesat. Teknologi yang tidak sesuai dengan pendidikan Islam merupakan salah satu penyebab hancurnya peradaban. Memang, jika kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi, mereka akan menjadi sumber kemajuan dan sumber kejayaan bangsa.

Beranjak dari permasalahan kompleks diatas, tujuan yang ingin disampaikan adalah bahwa permasalahan pendidikan Islam tidak boleh dipandang sebagai hal yang biasa oleh stakeholder yang ada agar pendidikan Islam mampu bersaing dan menjadi acuan baru dalam pelaksanaan pendidikan di tanah air. Sehingga pendidikan yang membentuk insan kamila seperti cita-cita pendidikan dapat tercapai.

Lantas bagaimana pendidikan islam dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat di era online (metaverse)? Bagaimana ia dapat memanfaatkan peluang yang ada dan sekaligus pada saat yang sama menjawab tantangan serta mengatasi hambatan yang tidak ringan? Maka tulisan ini berusaha memotret dinamika pendidikan islam di era metaverse.

PEMBAHASAN

1. Pendidikan Islam dan Tujuannya

Pengertian Pendidikan Islam

Pengertian pendidikan telah cukup banyak dirumuskan oleh para ahli pendidikan. Secara umum, definisi yang dikemukakan oleh para ahli menurut penulis, sebenarnya mempunyai essensi yang sama, walaupun dalam bentuk redaksinya berbeda.

Menurut Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, antara kata تاديب dan kata تزييه transliterasi yang digunakan sebagai pendidikan adalah kata تاديب karena dalam struktur konseptualnya ta'dib sudah mencakup unsur-unsur pengetahuan atau ilmu, pengajaran ta'lim, dan pengasuhan yang baik tarbiyah. Oleh karena itu ta'dib merupakan istilah yang paling tepat dan cermat untuk menunjukkan pendidikan dalam arti Islam.

Pendidikan Islam menurut Syed Muhammad al-Naquib al-Attas adalah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat - tempat yang benar dan segala sesuatu didalam tatanan penciptaan sehingga membimbing kearah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat didalam tatanan wujud dan kepribadian.(Al-Attas, n.d.)

Menurut Nuqaib Ta'dib merupakan istilah yang paling tepat untuk menunjukkan arti pendidikan dalam Islam karena pada kata ta'dib, sudah mencakup didalamnya unsur-unsur pengetahuan atau ilmu termasuk didalamnya juga mengandung makna pengajaran dan juga pengasuhan yang baik. Sedangkan pendidikan Islam adalah berbagai macam usaha yang dilakukan untuk mengenalkan setelah mengenalnya maka akan mengakuinya tentang ketuhanan dan ketauhidan dan mewujudkannya dalam kepribadiannya.

Pendidikan Islam yang sebenarnya adalah pendidikan yang mampu mengkoordinasikan segala keinginan, menggali segala potensi, mengenali kapabilitas dan kecenderungan yang ada, kemudian membekalinya dengan ketrampilan sehingga mampu berinteraksi dengan realita yang ada dan ikut bangkit mencapai idealisme dan sasaran-sasaran yang memungkinkan untuk di capai, yang sesuai dengan ajaran islam yaitu ajaran yang terdapat pada Al qur'an dan Hadits.

Hakekat Pendidikan Islam

Berbeda dari pendidikan pada umumnya yang dibangun atas dasar konsep manusia dalam basis filosofinya masing-masing, pendidikan Islam dibangun dengan berangkat dari konsep manusia dalam basis Islam. Dalam pandangan Islam, manusia adalah "*khalifatullah*" di muka bumi. Oleh karenanya, manusia dibekali oleh Allah dengan segenap potensi sebagai bekal kekhalfahannya. Potensi tersebut terwujud dalam dua bentuk yaitu kecenderungan ke hal-hal yang positif dan kecenderungan ke hal-hal yang negatif.

Beberapa potensi yang positif antara lain adalah: diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dijadikan sebagai makhluk yang mulia, menurut fitrahnya ia adalah makhluk religius, merdeka dan bertanggung jawab, mempunyai kapasitas intelegensia yang paling tinggi, tidak semata-mata terangsang oleh motivasi duniawi saja tetapi dalam banyak hal manusia mengejar tujuan yang “*ultimate*”, yakni keridloan Allah. Sedangkan beberapa potensi yang negatif antara lain adalah amat *dzalim* dan amat bodoh, bersifat tergesa-gesa, bersifat lemah, selalu tidak berterima kasih, sombong ketika mendapat kesenangan dan berputus asa ketika mendapat kesusahan, suka membantah, melampaui batas, bersifat keluh kesah dan kikir. Pendidikan Islam adalah suatu aktivitas pendidikan yang berangkat dari konsep manusia seperti di atas.

Pendidikan agama Islam, pada hakekatnya adalah usaha untuk mengarahkan, membimbing semua aspek (potensi) yang ada pada manusia secara optimal (Rohman, 2009). Pendidikan agama Islam menurut para tokoh ialah sebagai berikut: Pertama menurut Ahmadi, pendidikan agama Islam adalah segala usaha untuk memelihara fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*insan kamil*) yang sesuai dengan normal Islam. Kedua, menurut Syekh Musthafa Al-Ghulayani, pendidikan adalah upaya menanamkan akhlak mulia dalam jiwa murid serta menyiraminya dengan petunjuk dan nasehat, sehingga menjadi kecenderungan jiwa yang membuahkan keutamaan kebaikan serta cinta belajar yang berguna bagi tanah air.

Dalam definisi di atas terlihat jelas bahwa pendidikan agama Islam membimbing anak didik dalam perkembangan dirinya, baik jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama pada anak didik nantinya yang didasarkan pada hukum-hukum Islam. (SM, 2008) Secara sederhana pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran dan al Hadits serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktik sejarah umat Islam.

Tujuan Pendidikan

Menurut Muhammad Fadhil al-Jamaly, tujuan pendidikan Islam menurut Al Qur'an meliputi (1) menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia di antara makhluk Allah lainnya dan tanggung jawabnya dalam kehidupan ini; (2) menjelaskan hubungannya sebagai makhluk sosial dan tanggung jawabnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat; (3) menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya untuk mengetahui hikmah penciptaan dengan cara memakmurkan alam semesta; (4) menjelaskan hubungannya dengan Khalik sebagai pencipta alam semesta (Nizar, 2002).

Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan yang terbagi menjadi tiga hal. Pertama, Pendidikan Islam sebagai lembaga diakuinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Kedua, Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ketiga, Pendidikan Islam sebagai nilai (value) yakni ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan (Daulay, 2009).

Walaupun demikian, pendidikan Islam tidak luput dari problematika yang muncul di era global ini. Terdapat dua faktor dalam problematika tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama Faktor Internal. (a) Relasi Kekuasaan dan Orientasi Pendidikan Islam. Tujuan pendidikan pada dasarnya hanya satu, yaitu memanusiaikan manusia, atau mengangkat harkat dan martabat manusia atau human dignity, yaitu menjadi khalifah di muka bumi dengan tugas dan tanggung jawab memakmurkan kehidupan dan memelihara lingkungan. Tujuan pendidikan yang selama ini diorientasikan memang sangat ideal bahkan, lantaran terlalu ideal, tujuan tersebut tidak pernah terlaksana dengan baik.

Orientasi pendidikan, sebagaimana yang dicita-citakan secara nasional, barangkali dalam konteks era sekarang ini menjadi tidak menentu, atau kabur kehilangan orientasi mengingat adalah tuntutan pola kehidupan pragmatis dalam masyarakat Indonesia. Hal ini patut untuk dikritisi bahwa globalisasi bukan semata mendatangkan efek positif, dengan kemudahan-kemudahan yang ada, akan tetapi berbagai tuntutan kehidupan yang disebabkan olehnya menjadikan disorientasi pendidikan. Pendidikan cenderung berpijak pada kebutuhan pragmatis, atau kebutuhan pasar lapangan, kerja, sehingga ruh pendidikan Islam sebagai pondasi budaya, moralitas, dan social movement (gerakan sosial) menjadi hilang. (Rembangy, 2010)

2. Era Metaverse

Berpindah dari serangkaian dunia virtual independen ke jaringan terintegrasi dunia virtual 3D atau Metaverse bertumpu pada kemajuan di empat bidang: realisme imersif, akses dan identitas di mana-mana, interoperabilitas, dan skalabilitas. Untuk setiap area, status saat ini dan perkembangan yang dibutuhkan untuk mencapai Metaverse fungsional dijelaskan. Faktor-faktor yang mendukung pembentukan Metaverse yang layak, seperti minat institusional dan populer dan peningkatan berkelanjutan dalam kinerja perangkat keras, dan faktor-faktor yang menghambat pencapaian tujuan ini, termasuk batasan dalam metode komputasi dan kolaborasi yang belum terealisasi di antara pemangku kepentingan dan pengembang dunia virtual, juga dipertimbangkan. (Dionisio et al., 2013)

Dunia metaverse adalah dunia baru berbasis teknologi digital. Sebagai dunia baru, dalam dunia metaverse, diperkenalkan suatu mode kehidupan versi baru, tidak sebagaimana fisiknya. Untuk bisa merambah kehidupan tersebut dibutuhkan sebuah teknologi yang bisa memperantarainya, antara lain headset, kacamata augmented reality (kacamata virtual), aplikasi telepon pintar, dan beberapa perangkat lainnya.

Di dalam dunia metaverse bukan karakter lagi yang akan memainkan peranan. Kita sendiri secara langsung akan di bawah dalam dimensi virtual. Tentu bukan fisik, melainkan keberadaan kita yang diarahkan dalam ruang virtual. Kita diarahkan untuk bersosialisasi, berniaga, berkomunikasi, dan berinteraksi ke dalam ruang maya layaknya di kehidupan nyata. Semua serba virtual berbasis pada digitalisasi. Itulah masa depan dunia Metaverse.

Konsep Metaverse secara praktis merujuk pada dunia virtual persisten yang berkelanjutan, mencakup virtual reality (VR) dan augmented reality (AR) yang menggabungkan aspek dunia fisik dan digital. AR dapat dijelaskan sebagai bentuk realitas virtual di mana dunia nyata diperluas atau ditingkatkan melalui penggunaan elemen virtual. Perangkat AR memiliki tampilan, perangkat input, sensor, dan prosesor. Perangkat ini dapat berupa monitor, layar yang dipasang di kepala, kacamata, lensa kontak, konsol game, bahkan sekadar ponsel pintar atau smartphone.

Sedangkan VR merupakan lingkungan yang dihasilkan komputer yang memungkinkan pengguna mengalami realitas yang berbeda. Perangkat VR biasanya disematkan di kepala, dan secara visual memisahkan pengguna dari ruang apa pun yang saat itu ditempati secara fisik.

Gambar yang dihasilkan perangkat VR diumpun ke mata pengguna dari dua lensa kecil. Melalui VR, pengguna dapat melakukan banyak hal mulai dari mendaki gunung, berkeliling negara, menikmati film seolah-olah menjadi bagian film tersebut, dan bahkan membenamkan diri dalam video game tanpa meninggalkan sofa.

Sebenarnya, dalam bentuk yang sederhana, metaverse sudah bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Hanya saja, banyak yang tidak sadar akan hal tersebut. Contoh sederhana adalah aplikasi game online, aplikasi pembelajaran jarak jauh.(Kompasiana.com, 2022)

3. Tantangan Pendidikan Islam di Era Metaverse

Pendidikan dan teknologi merupakan dua hal yang saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Keduanya membangun dua pola sebab-akibat yang tidak bisa terelakkan. Pendidikan bisa mempengaruhi teknologi yang berkembang. Begitu pun demikian, teknologi juga berpengaruh terhadap sistem pendidikan yang berlaku.

Perlahan tapi pasti dunia mengalami perubahan yang cukup pesat. Terutama di bidang pendidikan dan teknologi. Peradaban manusia pun mengalami perubahan di setiap periode waktu. Praktisnya, manusia mengalami transisi hidup yang lebih maju berkat teknologi yang diciptakan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga berdampak pada kehilangan nilai dan warisan budaya yang dimiliki oleh manusia. Kehidupan manusia cenderung pragmatis, dan egosentris pun meningkat. Inilah era disrupsi yang mendapatkan perhatian khusus dari sebagian kalangan terutama penggiat pendidikan dan teknologi.

Ini tantangan peradaban manusia baru. Suka atau tidak, manusia harus siap dengan segala konsekuensi yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Kesiapan itu harus dimanifestasikan dalam setiap program kehidupan terutama di dunia pendidikan.

4. Pendidikan dan Era Metaverse

Pada prinsipnya dunia pendidikan merupakan modal utama pengembangan bidang kehidupan yang lain. Dunia pendidikan memberikan ruang riset (penelitian) bagi ilmuwan untuk kemajuan teknologi. Seperti halnya pengembangan teknologi termutakhir yang seringkali kita dengar yaitu metaverse.(Kompasiana.com, 2022)

Sekalipun metaverse hanya merupakan ide untuk teknologi masa depan namun perlu direspon secara baik. Butuh persiapan yang matang agar tidak terbawah oleh arus teknologi. Sekalipun metaverse hanya merupakan ide untuk teknologi masa depan namun perlu direspon secara baik. Butuh persiapan yang matang agar tidak terbawah oleh arus teknologi. Dunia pendidikan seyogyanya merespon cepat terhadap isu-isu perkembangan teknologi yang mutakhir.

Bagi dunia pendidikan, perkembangan metaverse tidak boleh dianggap hanya sebagai ilusi. Perkembangan teknologi bukan hal yang mustahil bagi para ilmuwan. Selama manusia masih berpikir selama itu teknologi akan terus berkembang. Pendidikan selalu merespon seluruh perkembangan teknologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Suka atau tidak proses pendidikan mengarahkan peserta didik untuk melek teknologi. Sebab, masa depan dunia akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

Dalam menyambut era metaverse, pendidikan harus melakukan transformasi secara masif. Sistem pendidikan harus mengedepankan proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Untuk itu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam dunia pendidikan Islam untuk menyambut era metaverse, yaitu;

a. Pendidikan yang mengarah pada penguasaan teknologi

Saatnya dunia pendidikan meninggalkan sistem lama yang kurang inovatif dan kurang kreatif. Sistem pendidikan yang cenderung berorientasi pada hasil. Yang mengabaikan seluruh aspek “proses” sehingga tidak menghasilkan individu-individu yang melek teknologi.

Pengenalan siswa pada teknologi yang mutakhir menjadi sangat penting. Tidak hanya itu. Siswa dituntut untuk menguasai teknik dengan baik dan tepat. Menggunakan teknik yang tepat dapat menghasilkan kinerja yang sangat baik. Pola kerja manusia modern selalu berbasis teknologi.

b. Pendidikan yang mengarah pada kecerdasan emosional

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, mengevaluasi, mengelola, dan mengontrol emosi dirinya dan orang lain. Dalam hal ini, emosi adalah perasaan informasi tentang suatu hubungan. Kecerdasan emosional mendikte setiap individu untuk bertindak bijaksana.

Dalam kaitannya dengan Metaverse, kecerdasan emosional berlaku untuk semua individu yang berpartisipasi. Tekanan di dunia Metaverse lebih besar daripada di dunia nyata. Di dunia virtual seperti Metaverse, setiap orang bertindak tanpa batas menurut pendapat mereka sendiri.

Setiap kedewasaan emosional yang memasuki dunia Metaverse harus lebih diperkuat. Jangan membuat orang merasa kesepian. Merasa kesepian dalam hiruk-pikuk kesuksesan teknis. Ini merupakan langkah yang perlu diantisipasi oleh dunia pendidikan.

Oleh karena itu, pembelajaran harus melibatkan interaksi siswa secara langsung. Ini terutama melibatkan interaksi antara siswa dalam kelompok kerja. Mengajarkan siswa untuk berkomunikasi dengan tegas dan bertanggung jawab.

Selain itu, melatih siswa untuk memecahkan masalah mereka sendiri atau dalam kelompok. Jenis kegiatan ini mematangkan emosi siswa. Di dunia Metaverse, kecerdasan emosional digunakan ketika satu orang berinteraksi dengan orang lain.

c. Pendidikan yang mengarah pada pengembangan Iman dan Takwa

Iman adalah keyakinan yang utuh atas kepemilikan hidup Tuhan Yang Maha Esa. Iman adalah jalan bagi seseorang untuk mencapai Takwa. Tanpa keyakinan, mustahil untuk mencapai Takwa.

Takwa adalah kemampuan untuk menjalankan semua perintah Tuhan dan menahan diri dari semua larangan Tuhan. Ini penting karena orang-orang di dunia Metaverse harus terus mengakui keberadaan mereka sebagai makhluk Tuhan. Alhasil, apa yang dilakukannya di dunia Metaverse tidak melanggar batas atau norma agamanya.

Pendidikan harus mengedepankan nilai dan norma agama. Pendidikan bukan hanya berbicara tentang surga dan neraka dan hal-hal simbolis. Selain itu, pendidikan mengarahkan manusia untuk bertindak/bertindak sesuai dengan perintah dan adat istiadat agamanya masing-masing. Tegaskan pesan bahwa perkembangan teknologi adalah anugerah terbesar Tuhan. Teknologi dan agama terkait erat untuk mencapai tujuan hidup terbesar. Teknologi diharapkan dapat meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam dunia teknologi, perubahan pasti akan terus berlanjut. Oleh karena itu, persiapan merupakan langkah awal dalam menghadapi arus perubahan. Salah satunya adalah pendidikan Islam.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini merupakan kajian awal tentang landasan teori dan praktik dalam Pendidikan Islam dalam menghadapi Era Metaverse, sehingga diperlukan adanya tindak lanjut yang lebih mendalam dalam membahas landasan teori dan praktik dalam Pendidikan Islam dalam menghadapi Era Metaverse. Pada penelitian berikutnya bisa menggunakan penelitian studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik Pendidikan Islam dalam menghadapi Era Metaverse ini dengan membuat penelitian pengembangan ataupun penerapan dengan rujukan pustaka mengenai landasan teori dan praktik Pendidikan Islam dalam Era Metaverse.

Penulis memahami konsep metaverse sebagai aktivitas kehidupan yang divirtualisasikan dalam dunia maya dengan bantuan internet. Sekiranya konsep ini dibangun atas dasar pemahaman tentang dunia virtual 3D. Perlu dicatat bahwa metaverse merupakan gagasan tentang kemajuan teknologi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. (n.d.). *Konsep Pendidikan dalam Islam*.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1—10*. (n.d.).
- Dionisio, J. D. N., III, W. G. B., & Gilbert, R. (2013). 3D Virtual worlds and the metaverse: Current status and future possibilities. *ACM Computing Surveys*, 45(3), 34:1-34:38. <https://doi.org/10.1145/2480741.2480751>
- Kompasiana.com. (2022, January 10). *Kesiapan Dunia Pendidikan Menyambut Era Metaverse*. KOMPASIANA. <https://www.kompasiana.com/eduardusfromotiuslebe/61dab46b4b660d18ec329502/kesiapan-dunia-pendidikan-menyambut-era-metaverse>
- Rembangy, M. (2010). Pendidikan Transformatif: Pergulatan kritis merumuskan pendidikan di tengah pusaran arus globalisasi. *Yogyakarta: Teras*.
- SM, I. (2008). Strategi Pembelajaran Ilmu Agama Islam Berbasis PAIKEM. *Jakarta: Rasail Media Group*.
- Wafi, B. (2020, March 18). Pendidikan Islam dan Kemajuan Teknologi. *Pendidikan Agama Islam*. <https://pai.unida.gontor.ac.id/pendidikan-islam-dan-kemajuan-teknologi/>

KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF IMAM GHAZALI

Tri Mulyono

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
trimulyono002@gmail.com

Mualimul Huda

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
mualimulhuda@iainkudus.ac.id

Abstrak :

Dalam pendidikan Islam kurikulum memegang peran penting untuk menentukan sebuah keberhasilan pembelajaran islam serta dapat dijadikan sebuah acuan atau landasan program pendidikan islam dalam berbagai jenjang. Dasar itulah yang menjadikan alasan utama sebuah kurikulum pendidikan islam menjadi komponen terpenting pada lembaga keagamaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep kurikulum pendidikan Islam perspektif Imam Ghazali. kemudian mampu merelevansikan konsep kurikulum tersebut dengan kurikulum pada saat ini. Penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk mendeskripsikan konsep kurikulum pendidikan Islam perspektif Imam Ghazali serta relevansinya pada lembaga jenjang MTs. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan datanya serta metode analisis isi (Content Analisis). Penelitian ini berhasil memperoleh dua temuan, yaitu : 1) konsep kurikulum perspektif Imam Ghazali didasarkan pada Klasifikasi ilmu pengetahuan, yakni kurikulum yang berdasarkan dari Ilmu Fardlu 'ain dan kurikulum yang berdasarkan pada ilmu fardlu Kifayah sehingga dari klasifikasi tersebut mampu menghasilkan komponen- komponen yang terdapat pada sistem kurikulum yakni komponen tujuan, materi, metode, proses pembelajaran dan evaluasi kurikulum. 2) Relevansinya kurikulum perspektif Imam Al-Ghazali dengan kurikulum pada lembaga jenjang MTs bahwa dalam mengimplementasikan materi, metode, proses pembelajaran serta evaluasi pendidikan harus berdasarkan tujuan dalam pendidikan yakni mendekati diri kepada Allah SWT.

Kata Kunci : Kurikulum Pendidikan Islam; Imam Ghazali

PENDAHULUAN

Dalam pendidikan Islam kurikulum memegang peran penting untuk menentukan sebuah keberhasilan pembelajaran islam serta dapat dijadikan sebuah acuan atau landasan program pendidikan islam dalam berbagai jenjang. Dasar itulah yang menjadikan alasan utama sebuah kurikulum pendidikan islam menjadi komponen terpenting pada lembaga keagamaan. Karena dengan hal itu proses pembelajaran dalam pendidikan semakin terarah dan terkonsep perencanaannya, langkah apa serta bagaimana pola sistem pendidikan yang akan diterapkan untuk guru dan siswa pada lembaga keagamaan.

Kondisi kurikulum di negara Indonesia saat ini sudah mengalami banyak pergantian, karena kurikulum disusun menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman saat ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna dari hasil sebuah pendidikan. Kondisi pendidikan saat ini adalah pendidikan kontemporer yang menekankan aspek pengetahuan saja hal tersebut dikarenakan selama beberapa tahun ini negara sedang dilanda virus Covid-19 sehingga aspek sikap kurang begitu diperhatikan oleh sistem pendidikan.

Siti Zaleha dalam jurnalnya yang berjudul gagasan Kurikulum Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali menyampaikan bahwa bahwa tujuan akhir pendidikan Islam ialah kedekatan diri kepada Allah dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, rumusan tujuan inilah yang menjadi rumusan tujuan kurikulum dan sekaligus merupakan rumusan yang harus dipegang dalam merumuskan tujuan kurikulum pada setiap jenjang dan lingkup pendidikan. Di dalam menerapkan materi kurikulum pendidikan Islam, agar sesuai dan searah dengan tujuan kurikulum tersebut, maka al-Ghazali, sesuai dengan pembagian ilmu pengetahuan, ia menitik beratkan al-ilm al-syariah sebagai ilmu yang wajib diberikan untuk setiap individu, baik dalam bentuk ilmu pengetahuan yang bersifat *ilm fardu`ain* maupun yang bersifat *ilm fard kifayah*. Di samping itu, sebagai penunjang diberikan juga ilmu pengetahuan *gair al-syariah* baik yang bersifat *fard kifayah* maupun yang bukan *fard kifayah* tetapi terpuji serta dimungkinkan pula untuk memasukkan ilmu pengetahuan yang bersifat *mubah* (dibolehkan).³⁵

Jurnal oleh Adi Fadli dengan judul konsep pendidikan Imam Al-Ghazali dan relevansinya dalam sistem pendidikan di Indonesia menyimpulkan

35 Siti Zaleha et al., "Gagasan Kurikulum Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 2 (June 9, 2021): 254, accessed July 11, 2022, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/11344>.

bahwa Konsep pendidikan Al-Ghazali dapat diketahui dengan cara memahami pemikirannya berkenaan dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan yaitu tujuan pendidikan, kurikulum, etika guru dan murid, serta metode pembelajaran. Konsep pendidikan yang dicetuskan oleh Imam Al-Ghazali sangat relevan dengan sistem pendidikan di Indonesia yang ditinjau dari tujuan pendidikan, konsep pendidik dan peserta didik, metode pembelajaran, serta kurikulum yang diterapkan saat ini khususnya pendidikan karakter, dimana pada tataran aplikasi sangat mengedepankan pada aspek pengembangan intelektual, moral, dan spiritual sehingga mampu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³⁶

Dari kedua penelitian diatas , terdapat perbedaan judul maupun pembahasan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Jurnal yang pertama hanya membahas konsep kurikulum pendidikan Islam perspektif Imam Ghazali saja

sedangkan jurnal yang kedua hanya membahas konsep pendidikan perspektif Imam Ghazali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah pengembangan dari jurnal yang sudah ada dengan tujuan untuk menganalisa konsep kurikulum pendidikan Islam perspektif Imam Ghazali. kemudian mampu merelevansikan konsep kurikulum tersebut dengan kurikulum pada saat ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau literature search. Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan hanya atas dasar dokumen yang diterbitkan dan tidak diterbitkan dengan memeriksa semua sumber perpustakaan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini, dokumen yang dikaji sebagai literasi merupakan teori penelitian dengan pendekatan filosofis, yaitu suatu pendekatan yang menggali pikiran para tokoh dan mengungkap segala esensi yang muncul dari berbagai teks tertulis dan manuskrip yang diterbitkan. Islam memiliki universalitas dalam ajarannya dan mengandung hikmah untuk semua.³⁷

36 Adi Fadli, "KONSEP PENDIDIKAN IMAM AL-GHAZALI DAN LEVANSINYA DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA," *El-Hikam* 10, no. 2 (2017): 276, accessed July 12, 2022, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/3087>.

37 Muh Shofi Al Mubarak and Sudarno Shobron, "Dakwah Dan Jihad Dalam Islam: Studi Atas Pemikiran K.h.m. Hasyim Asy'ari," *Profetika* 16, no. 2 (December 17, 2015): 138, accessed July 11, 2022, <https://www.neliti.com/publications/162444/>.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Kurikulum

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan aturan tentang tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan metode yang digunakan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.³⁸

Menurut Crow and Crow, kurikulum adalah rencana studi atau kumpulan semua pelajaran yang disusun untuk menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu.³⁹

William B. Ragan dalam bukunya *Modern Elementary Curriculum*, kurikulum dalam arti luas mencakup semua program dan kehidupan di sekolah, artinya pengalaman semua siswa menjadi tanggung jawab sekolah. Kurikulum tidak hanya mencakup bahan ajar, kurikulum juga mencakup semua bentuk kegiatan kelas. Oleh karena itu, Williams menyimpulkan bahwa kurikulum juga mencakup hubungan guru-siswa, metode pengajaran, model pendidikan, dan penilaian guru.⁴⁰

Dari beberapa pengertian di atas, maka kurikulum adalah seperangkat alat perencanaan kegiatan pembelajaran, termasuk seperangkat isi dan beberapa bahan ajar yang sistematis terkait dengan berbagai kegiatan dan komunikasi dengan masyarakat yang akan dilakukan. Kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik. Dengan kata lain, pengertian kurikulum yang lebih luas tidak hanya mencakup bahan ajar, tetapi juga metode, model, penilaian, dan segala bentuk kegiatan yang terdapat di sekolah.

Al Ghazali tidak menjelaskan pengertian kurikulum. Oleh karena itu, untuk memahami konsep kurikulum Al Ghazali, perlu mempelajari situasi pendidikan dan bagaimana konsep kurikulum itu diterapkan dalam kehidupannya (zaman klasik). Pada zaman klasik atau Ghazali mengenal banyak jenis dan jenjang lembaga pendidikan, antara lain: Lembaga penelitian, observatorium, rumah sakit, dll.⁴¹

38 Haiatin Chasanatin, *Pengembangan Kurikulum*, 2016th ed. (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, n.d.), 15.

39 Farid Hasyim, *Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, 2015th ed., n.d., 11.

40 Dr Hj Sutiah M.Pd, *PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI TEORI DAN APLIKASINYA* (NLC,2020), 13.

41 Sabda Syaifuddin, *Konsep Kurikulum Pendidikan Islam (Refleksi Pemikiran Al-Ghazali)*, 2008, 77, accessed July 12, 2022, <https://idr.uin-antasari.ac.id/348/>.

2. Biografi Imam Ghazali

Nama lengkap Imam Ghazali adalah Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali lebih dikenal dengan nama Al Ghazali.⁴² Tetapi ada juga yang mengatakan nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad, karena kedudukannya yang tinggi dalam Islam, maka dia digelari dengan “*Hujjatul Islam*”.⁴³ Ia lahir pada tahun 450 H/1058 M di sebuah kota kecil yaitu di desa Ghozalah, Thusia, wilayah Khuroson, Persia atau sekarang dikenal dengan Negara Iran.⁴⁴ Nama Ghazali masih sering dibicarakan dan kadang-kadang diucapkan Ghazaly (dua z) karena profesi ayahnya adalah pemintal wol. yang berarti pemintal benang. Sedang Al Ghazali dengan huruf z berasal dari kata Ghazalah, yakni nama kampung halaman Al Ghazali, nama inilah yang sering digunakan oleh banyak orang.⁴⁵

Imam Al-Ghazali adalah anak yang lahir dari keluarga miskin. Ayahnya adalah seorang pemintal wol (pengrajin) yang kemudian menjual produknya sendiri, sehingga kehidupan sehari-harinya didasarkan pada bisnis tenun wolnya sendiri. Ayahnya mengajarnya gaya hidup sederhana dan jujur, serta harus bisa hidup mandiri tanpa bantuan dari luar. Ayahnya setiap hari semakin tertarik dan mencintai kehidupan sufi, sehingga sebelum kematiannya ia menjadi sahabatnya Muhammad Arazikani, seorang ahli sufi untuk mendidik keduanya. Setelah kematiannya, sahabatnya tersebut telah dipercayakan pendidikan kedua putranya.⁴⁶

Al-Ghazali adalah anak berbakat dengan tingkat kecerdasan dan minat belajar yang tinggi. Hal itu terlihat dari kemauannya untuk belajar. Selama beliau hidup dengan teman-teman ayahnya, Al-Ghazali mempelajari banyak ilmu diantaranya ilmu fikih, riwayat hidup para wali serta tentang kehidupan spiritual mereka. Namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama karena para sufi yang mengalami kemiskinan, sehingga situasi pada tahun tersebut menjadikan Ghazali dan adiknya diberikan kepada Madrasah untuk mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak. Di madrasah

42 “Ihya-Ulumuddin-Bahasa-Indonesia-Jilid-1.Pdf” n.d., 24, accessed July 12, 2022, <https://rahmadkhairul.files.wordpress.com/2018/07/ihya-ulumuddin-bahasa-indonesia-jilid-1.pdf>.

43 Abu Muhammad Iqbal, *Konsep Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan* (Madiun: Jaya Star Nine, 2013), 1.

44 Nisrokha Nisrokha, “Konsep Kurikulum Pendidikan Islam:,” *Madaniyah* 7, no. 1 (January 31, 2017):155, accessed July 12, 2022, <https://journal.stitpematang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/82>.

45 Abidin Ibnu Rusn and Kamdani Kamdani, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan* (Pustaka Pelajar, 1998), 9

46 Iqbal, *Konsep Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, 2.

inilah Al Ghazali mengembangkan potensi intelektual dan spiritualnya. Tetapi dengan perkembangan zaman serta kondisi budaya dan structural masyarakat yang mempengaruhi pemikirannya, ia harus memperluas pandangan dan wawasannya.⁴⁷

Seperti yang dikatakan Sharif, pada mulanya Al-Ghazali berguru kepada Ahmad Ibnu Muhammad Al-Razikani di Thus hingga ia remaja. Darinya, Al-gazali belajar ilmu hukum. Setelah memperdalam dasar-dasar hukum, ia mulai melakukan perjalanan ke Yordania untuk mencari pengetahuan untuk memperluas visinya tentang hukum. Setelah belajar di Jorjan, ia kembali ke Thus dan tinggal di sana selama kurang lebih tiga tahun. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Al Ghazali untuk mempelajari tasawuf dan mengamalkan berbagai ajaran tasawuf dalam kehidupan sehari-hari di bawah bimbingan Yusuf Al-Nassaj, serta berguru pada salah seorang guru yang bernama AbuAl-Ma'ali Abd Al-Malik bin Abi Muhammad al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Beliau merupakan salah seorang ulama ternama di madrasah Nizham al- Muluk. Di madrasah inilah Al-Ghazali belajar ilmu teologi, falsafah, hukum, logika, ilmu pengetahuan alam dan tasawuf. Al-Ghazali sangat cerdas dibandingkan dengan siswa lainnya. Karena kecerdasannya yang tinggi, Al- ghazali bahkan dapat dengan cepat memahami bahwa kemampuannya melebihi gurunya, tetapi itu tidak membuatnya sombong, ia tetap tawadlu. dan menghormati gurunya yakni Imam Al Haramain.⁴⁸

Selama di Naisabur Al-Ghazali belajar tidak hanya dengan Imam Al-Haramain, tetapi juga dengan guru-guru yang lain, terus menerus mempelajari berbagai ilmu, ia belajar dengan seorang ahli tasawuf yang merupakan murid dari pamannya yang juga merupakan ahli tasawuf pula yaitu Abu A-Fadl Ibnu Muhammad Ali Al-Farmadhi. Dengan gurunya tersebut ia belajar teori serta praktek-praktek ilmu tasawuf. Selain itu dengan secara mandiri, ia melakukan pertapaan dan mempraktekkan ajaran tasawuf. Hal tersebut dijalankan sampai Al-Farmadhi wafat pada tahun 447 H/1084 M.⁴⁹

Sekitar dua puluh delapan tahun setelah meninggalnya Al-Farmadhi, pendidikan Al-Ghazali secara formal juga telah berakhir, tetapi bukan Al-Ghazali namanya jika berhenti dalam belajar. Pada usia ini, ia memperoleh pengetahuan yang tidak dimiliki anak muda lainnya. Ia sudah memiliki keahlian dalam berbagai disiplin ilmu, antara lain filsafat, teologi, retorika,

47 Nisrokha, "Konsep Kurikulum Pendidikan Islam," 156.

48 Muhammad Edi Kurnanto, "PENDIDIKAN DALAM PEMIKIRAN AL-GHAZALI," *Khatulistiwa* 1, no. 2 (Summer 2011): 161, accessed December 7, 2022, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/896106>.

49 Edi Kurnanto, "Pendidikan dalam Pemikiran Al-Ghazali," 162.

hukum Islam, moralitas, tasawuf, pendidikan Islam, dan psikologi. Karena Dia ambisius, cerdas, dan ingin belajar, jadi dia melanjutkan perjalanannya ke Bagdad.⁵⁰

Pada tahun 481 H/1091 M Al-Ghazali memulai kehidupannya yang baru yaitu menjadi seorang pengajar pada sebuah universitas yang didirikan oleh Nizham Al-Muluk di Bagdad. Kemudian di tahun 484 H/1091 M Al-Ghazali menerima jabatan tinggi dalam universitas tadi. Ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu syariat Islam. Pada saat diangkat sebagai guru besar usianya masih terbilang sangat belia yakni 3 puluh empat tahun, sedangkan jika dibandingkan dengan guru besar yang lainnya usia masih diatasnya. Setelah beberapa tahun menerima jabatan tersebut beliau pula diberi tugas untuk menjadi rektor dari Universitas Nizham Al-Muluk di Bagdad.⁵¹

Al-Ghazali adalah pengikut paham Syafiya di bidang Fiqh sedangkan mengikuti mazhab Asy'ari di bidang teologi mengikuti madzhab Asy'ariyah. Pada waktu Bagdad memang sebuah kota besar yang menjadi tempat berkumpulnya para pemikir dari berbagai kalangan, pengikut dari berbagai madzhabpun sering berkumpul di kota tersebut. Selama di Bagdad, Ghazalie tidak membatasi pergaulannya, ia berkencan dengan semua orang sambil tetap berpegang pada keyakinannya. Dia bercampur dengan Kristen, Yahudi, ateis, penyembah api, penyembahan berhala, dan pemikir dari berbagai aliran. Bagdad juga memiliki materialis, naturalis, dan filsuf. Situasi ini yang menyebabkan sering terjadi diskusi dan diskusi di antara mereka.⁵²

Setelah empat tahun menjadi profesor dan presiden di Universitas Bagdad, Ghazalie mengalami kegembiraan dan kebingungan. Seringnya pertemuan dengan berbagai kalangan di Bagdad mempengaruhi pemikirannya, tidak hanya mengubah pola hidupnya secara total, tetapi ia mulai mencari kebenaran dan kebebasan berpikir. Dia mulai berpikir tentang cara berpikir yang berbeda tentang aliran mana yang benar dan mana yang salah. Setelah itu, ia memutuskan untuk berhenti dan melanjutkan perjalanannya ke Syam, mengadopsi gaya hidup beribadah, mengembara ke berbagai gurun pasir dan meninggalkan posisi terbaiknya di Bagdad. Hal ini dilakukan untuk melatih diri, menjauhi barang-barang ilegal/dilarang, meninggalkan kemewahan hidup, dan memperdalam ilmu pengetahuan spiritualitas dan penghayatan keislaman.⁵³

50 Iqbal, *Konsep Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, 5.

51 Iqbal, *Konsep Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, 3.

52 Iqbal, *Konsep Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, 4.

53 Iqbal, *Konsep Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, 5.

Pada usia yang ke 49 tahun Al-Ghazali dipanggil oleh Fahr Al-Mulk salah satu putra Nidzam Al-Mulk untuk kembali mengajar di Madrasah Nidzamiyah. Namun hal itu tidak berlangsung lama hingga ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Thus. Di kota ini, Ghazali mendirikan sekolah dengan hanya calon sufi khusus, dan dia memerintahkannya sampai wafat. Tepat pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 H/19 Desember 1111 M Al-Ghazali wafat, ia wafat pada usia 55 tahun. Dengan didampingi oleh saudara laki-lakinya yaitu Abu Hamid Mujiduddin.⁵⁴

3. Konsep Kurikulum Pendidikan Islam Perspektif Imam Ghazali

Konsep kurikulum yang dikemukakan oleh al Ghazali erat kaitannya dengan konsep ilmu pengetahuan. Kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum dalam arti sempit, yaitu kumpulan pengetahuan yang diturunkan dari guru kepada siswa. Dalam kitab *Ihya' Ulum al-Dinn* al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu menjadi beberapa kelompok :

1) Klasifikasi Ilmu Pengetahuan Menurut Sumbernya

Berdasarkan sumber aslinya.. Klasifikasi ilmu dapat dibagi menjadi dua kategori, ilmu Syari'ah dan ilmu Syari'ah.⁵⁵

a) Ilmu Syariat

Menurut al-Ghazali ilmu pengetahuan syari'ah merupakan segala sesuatu yang diambil dari Nabiullah (shalawatullah 'alaihim wasalamuhu) serta akal tidak menunjukkannya seperti berhitung, bukan juga sebuah percobaan seperti kedokteran, dan bukan juga pendengaran seperti bahasa.

b) Ilmu Ghairu Syariat

Ilmu ghairu syari'ah adalah ilmu yang didapatkan dari akal manusia karena sumbernya dari akal manusia yang tentunya mempunyai keterbatasan dalam hal pengetahuan dimana akal memiliki keterbatasan yang membuat jadi sebab bahwa akal belum tentu benar. Oleh sebab itu ilmu ghairu syari'ah dibagi menjadi tiga bagian, yakni ilmu yang terpuji, tercela dan sesuatu yang mubah.⁵⁶

54 Iqbal, *Konsep Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, 4

55 Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumudin* (Libanon: Cetakan Edisi Ke-7, 1971), 30.

56 Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumudin*, 31.

2) Klasifikasi Ilmu Pengetahuan Menurut Fungsi Sosial⁵⁷

- a) Ilmu tercela adalah ilmu yang tidak ada gunanya baik di dunia maupun di akhirat, seperti ilmu perbintangan, ghaib, dan ilmu perdukunan. Sekali ilmu ini dipelajari, akan merugikan orang yang memilikinya dan orang lain, serta meragukan keberadaan Allah SWT.
- b) Ilmu yang terpuji seperti tauhid dan agama. Jika ilmu ini dipelajari, maka dapat mengantarkan manusia kepada jiwa yang suci, bebas dari kerendahan hati dan keburukan, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- c) Ilmu terpuji pada tingkat tertentu dan tidak boleh dipelajari karena dapat menyebabkan guncangan keyakinan seperti ilmu filsafat.

3) Klasifikasi Ilmu Pengetahuan Menurut Dimensinya⁵⁸

a) Ilmu Mukasyafah

Menurut al-Ghazali jelas bahwa pandangan Allah dapat dicapai dengan membersihkan cermin ini dari kotoran ini, yang merupakan hijab Allah SWT, untuk mengetahui sifat dan perbuatanNYa. Pengetahuan ini termasuk pengetahuan masa depan. Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya`* menjelaskan bagaimana mengamalkan ilmu mukasyafah untuk mencapai tujuan keilmuan tersebut.

b) Ilmu Muamalah

Ilmu muamalah adalah ilmu tentang praktik kebaktian mencakup doktrin dan praktik sekaligus.

4) Klasifikasi Ilmu Pengetahuan Menurut Tingkat Kewajibannya⁵⁹ Secara garis besar klasifikasi ilmu menurut kewajibannya dibagi menjadi:

a) Ilmu Fardhu Ain

Pengertiannya adalah ilmu mengenai cara mengamalkan kewajiban. Maka barang siapa yang telah mengetahui kewajiban dan waktu wajibnya maka ia telah mengetahui ilmu yang menjadi fardhu'ain.

57 Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumudin*, 28–31

58 Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumudin*, 36.

59 Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumudin*, 30–31.

b) Ilmu Fardhu Kifayah

Fardhu kifayah adalah setiap ilmu yang tidak dapat tidak dibutuhkan dalam dalam menegakkan urusan-urusan dunia seperti kedokteran, karena kedokteran adalah suatu kepastian (dharuri) dalam kebutuhan dalam menjaga kekalnya tubuh. Dan seperti berhitung karena itu pasti dibutuhkan dalam pergaulan, membagi wasiat, warisan dan lain-lain. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ilmu yang termasuk fardhu kifayah adalah segala jenis ilmu baik dari ilmu syari'ah maupun ghairu syari'ah yang mana ilmu tersebut berhubungan dengan kemaslahatan suatu negeri. Yang mau tidak mau harus ada yang menguasai dalam batasan cukup karena merupakan suatu yang pokok dalam suatu negeri, contohnya ilmu kedokteran dan ilmu kalam.

Dari klasifikasi ilmu diatas dapat disimpulkan bahwa Imam Ghazali tidak menjelaskan secara khusus tentang pengertian dari kurikulum, melainkan beliau hanya mengklasifikasi ilmu menjadi beberapa bagian kemudian beliau mengkonsep ilmu tersebut sebagai mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik.

Imam Al-Ghazali menyatakan ilmu-ilmu pengetahuan yang harus dijadikan bahan kurikulum lembaga pendidikan yaitu:⁶⁰

1. Ilmu-ilmu yang fardu'ain yang wajib di pelajari oleh semua orang Islam meliputi ilmu-ilmu agama yakni ilmu yang bersumber dari kitab suci Al- Qur'an dan Al-Hadits.
2. Ilmu-ilmu yang merupakan fardhu kifayah, terdiri dari ilmu-ilmu yang dapat di manfaatkan untuk memudahkan urusan hidup duniawi, seperti ilmu hitung (matematika), ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu pertanian dan industri.

Dalam menyusun kurikulum pelajaran, Al-Ghazali memberi perhatian khusus pada ilmu-ilmu agama dan etika sebagaimana yang di lakukannya

terhadap ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Kurikulum menurut Al-Ghazali di dasarkan kepada dua kecenderungan sebagai berikut:⁶¹

60 Nisrokha, "Konsep Kurikulum Pendidikan Islam," 160.

61 Nisrokha, "Konsep Kurikulum Pendidikan Islam," 161

1. Kecenderungan Agama dan Tasawuf Kecenderungan ini membuat Al- Ghazali menempatkan ilmu-ilmu agama di atas segalanya dan memandangnya sebagai alat untuk menyucikan diri dan membersihkannya dari pengaruh kehidupan dunia.
2. Kecenderungan Pragmatis Al-Ghazali beberapa kali mengulangi penilaian terhadap ilmu berdasarkan manfaatnya bagi manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ia menjelaskan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat bagi manusia merupakan ilmu yang tak bernilai. Menurut Al- Ghazali setiap ilmu harus dilihat dari fungsi dan kegunaannya dalam bentuk amaliah.

4. Analisis Konsep Kurikulum Pendidikan Islam Perspektif Imam Ghazali

Sebagai seorang ilmuwan, Al Ghazali memiliki pemikiran dalam semua ilmu filsafat, ilmu hukum, ilmu sosial dan ilmu alam, termasuk pemikiran tentang pendidikan. Oleh karena itu, dalam rangka menggali khazanah ilmu, dipandang penting untuk membahas dan melengkapi kembali teori pendidikan, termasuk khazanah pendidikan di Indonesia. Secara umum, ada dua aspek penting dalam konsep pendidikan Ghazali. Artinya, mengajarkan akhlak agama tanpa mengabaikan kepentingan dunia. Pandangan kurikulum Al Ghazali membawa aspek pembagian disiplin ke dalam tempat dan tujuan yang tepat.

Kurikulum yang dimaksud adalah seperangkat pengetahuan yang diberikan pendidik kepada peserta didik untuk mencapai tujuannya. Mirip dengan kurikulum saat ini, pembagian pengetahuan dalam hal ini adalah pembagian mata pelajaran pada rasio yang sebenarnya, dan pembagian tersebut memperkenalkan sudut pandang keluaran pengetahuan, tetapi sudut pandang ini sebenarnya adalah kehidupan nyata mereka.

Sistematika pembagian Kurikulum Al-Ghazali didasarkan kepada tujuan dari masing-masing kurikulum itu sendiri, dalam hal ini Mata Pelajaran. Ada banyak bidang ilmu, sehingga kita perlu membagi lagi bidang ilmu yang disebut kurikulum.. Perbedaan penetapan kurikulum AlGhazali dengan kurikulum saat ini adalah AlGhazali juga menerapkan nilai kemanfaatannya atau status hukum pembelajaran terkait dengan nilainya: fardhu 'ain dan fardu kifayah. Artinya ada Ilmu yang memang perlu untuk dipelajari dan tidak perlu dipelajari tetapi perlu ada diantara orang-orang untuk belajar Pada titik ini, jika kita memperhatikan lembaga pendidikan kita, moral agama, dan humaniora umum lainnya, ilmu pengajaran moral agama memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk mencapai hasil yang maksimal.

Begitulah individualitas dan kedewasaan berpikir seorang siswa terbentuk setelah siswa tersebut selesai belajar di sekolah. Pertimbangan penting lainnya dalam konsep Al-Ghazali adalah menumbuhkan nilai-nilai agama dalam proses pendidikan guna membentuk kepribadian siswa yang matang dan tangguh untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Al-gazali tidak mendukung pantangan mempelajari ilmu umum, Al-gazali mendukung mencari ilmu tersebut berdasarkan ilmu agama. Oleh karena itu, kualitas dan pengetahuan siswa secara komprehensif dapat membantu kemajuan dunia Islam secara keseluruhan.

Dari berbagai analisis di atas, dapat kita simpulkan bahwa konsep kurikulum pendidikan Islam dari perspektif Imam Ghazali masih sangat relevan dengan pendidikan Islam saat ini. Menghadapi situasi pendidikan saat ini, di mana kemajuan teknologi begitu besar, yang tidak pernah mengubah tujuan dan gagasannya sendiri, sehingga semua bentuk mata pelajaran yang diusulkan dalam kurikulum saat ini selalu mendukung konsep keilahan dan pendidikan moral. Hal ini sejalan dengan konsep kurikulum yang dianut oleh Imam Ghazali dan sangat mengedepankan perkembangan peradaban Islam yang semakin ditunjang oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

SIMPULAN

Al Ghazali tidak menjelaskan pengertian kurikulum. Oleh karena itu, untuk memahami konsep kurikulum menurut Al Ghazali, perlu dikaji situasi pendidikan pada saat itu dan bagaimana konsep kurikulum itu tersebar luas. Kurikulum didasarkan pada karakteristik masing-masing lembaga, bukan dipertimbangkan atau selangkah demi selangkah berdasarkan jenjang atau jenis pendidikan.

Imam Ghazali merancang kurikulum berdasarkan klasifikasi keilmuannya, yang terbagi menjadi beberapa ilmu. Klasifikasi pandangan Imam al-Ghazali tentang ilmu dapat dilihat dari empat perspektif, yaitu : 1) dari segi sumbernya, 2) dari segi fungsi sosialnya, 3) dimensinya, serta 4) dari segi kewajibannya. Klasifikasi ilmu dari segi sumbernya di bagi menjadi dua, yakni ilmu syari'ah dan ilmu ghoiru syari'ah. Dari segi fungsi sosialnya ilmu di klasifikasikan menjadi dua, yakni ilmu terpuji dan tercela. Dari segi dimensinya ilmu diklasifikasikan menjadi dua, yakni *ilmu mukasyafah* dan *ilmu muamalah*. Dan ilmu dilihat dari kewajibannya diklasifikasikan menjadi dua yakni *ilmu fardhu 'ain* dan *ilmu fardhu kifayah*. Selain itu, al-Ghazali menyajikan konsep kurikulum berdasarkan ilmu fardlu 'ain dan kurikulum berdasarkan ilmu fardlu kifayah. Ghazali tidak hanya menekuni studi agama saja, tetapi juga menaruh perhatian besar pada ilmu umum guna menghasilkan kemaslahatan hidup dalam ilmu Faldu Kifayah. Dari konsep klasifikasi ilmu, Imam Ghazali menentukan berbagai jenis ilmu yang harus dipelajari siswa pendidikan dasar dan tinggi. Dari konsep tersebut, Imam Ghazali juga secara tidak langsung menentukan tujuan, materi, metode, proses pembelajaran, dan penilaian yang merupakan bagian dari komponen kurikulum.

Konsep kurikulum Perspektif Imam Ghazali sangat relevan dengan komponen-komponen kurikulum di tingkat lembaga pendidikan saat ini dengan menggunakan kurikulum 2013. Dalam hal tujuan, materi, metode, proses pembelajaran, dan penilaian, kedua konsep tersebut masih sering digunakan dalam sistem kurikulum saat ini, bersamaan dengan sistem teknis siap pengembangan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Ibnu Rusn, & Kamdani, K. (1998). *Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Abu Hamid Al-Ghazali. (1971). *Ihya Ulumudin*. Cetakan Edisi Ke-7.
- Al Mubarak, M. S., & Shobron, S. (2015). Dakwah Dan Jihad Dalam Islam: Studi Atas Pemikiran K.h.m. Hasyim Asy'ari. *Profetika*, 16(2), 136–143. <https://doi.org/10.23917/profetika.v16i2.1847>
- Chasanatin, H. (2016). *Pengembangan Kurikulum*. Kaukaba Dipantara.
- Edi Kurnanto, M. (2011). PENDIDIKAN DALAM PEMIKIRAN AL-GHAZALI. *Khatulistiwa*, 1(2), 161–176. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/896106>
- Fadli, A. (2017). KONSEP PENDIDIKAN IMAM AL-GHAZALI DAN RELEVANSINYA DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA. *El-Hikam*, 10(2), 276–299. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/3087>
- Hasyim, F. (n.d.). *Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (2015th ed.). *Ihya-ulumuddin-bahasa-indonesia-jilid-1.pdf*. (n.d.). Retrieved July 12, 2022, from <https://rahmadkhairul.files.wordpress.com/2018/07/ihya-ulumuddin-bahasa-indonesia-jilid-1.pdf>
- Iqbal, A. M. (2013). *Konsep Pemikiran al-Ghazali tentang Pendidikan*. Jaya Star Nine.
- M.Pd, D. H. S. (2020). *PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI TEORI DAN APLIKASINYA*. NLC.
- Nisrokha, N. (2017). Konsep Kurikulum Pendidikan Islam: *Madaniyah*, 7(1), 154–173. <https://journal.stitpemelang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/82>
- Syaifuddin, S. (2008). *Konsep Kurikulum Pendidikan Islam (Refleksi Pemikiran Al-Ghazali)*. <https://idr.uin-antasari.ac.id/348/>
- Zaleha, S., Wahyudi, H., Saridin, M., Abbas, A., Kurniawan, H., & Dasri, M. (2021). Gagasan Kurikulum Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.24014/af.v19i2.11344>

**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah
dalam Meningkatkan Profitabilitas
Perspektif Manajemen Syariah
(Studi Kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi)**

Fatikha Rizqya Nur dan Tri Septiana Wulandari

Ekonomi Syariah - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

fatikharizqya14@gmail.com

Abstrak

Manajemen risiko ialah sebuah runtutan prosedur yang dilakukan guna melakukan identifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan risiko dari aktivitas operasional yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Manajemen risiko pembiayaan murabahah yang diimplementasikan oleh masing-masing bank itu berbeda. Jenis penelitian ini merupakan jenis riset kualitatif dengan pengolahan data secara deskriptif. Penelitian ini memiliki tujuan guna melihat implementasi manajemen risiko oleh BPR Syariah Artha Mas Abadi, khususnya pada pembiayaan murabahah yang dikaitkan dengan tingkat profitabilitas bank dan sisi manajemen syariahnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya manajemen risiko pembiayaan murabahah di BPR Syariah Artha Mas Abadi telah terlaksana dengan baik, yang mana terdapat 4 tahapan seperti identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Guna meminimalisir risiko, bank juga menjalankan analisa 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy pada calon nasabah pembiayaan murabahah. Manajemen risiko yang diimplementasikan juga berdampak pada meningkatnya profitabilitas bank di angka 80%-90%, serta telah sesuai dengan konsep manajemen syariah seperti mengedepankan keadilan, keterbukaan, kekeluargaan dan terhindar dari unsur risywah.

Kata Kunci : Manajemen risiko, Pembiayaan *Murabahah*, Profitabilitas dan Perspektif Manajemen Syariah.

Abstract

Risk management is a series of procedures carried out to identify, measure, monitor and control risks from operational activities carried out by Islamic financial institutions. The risk management of murabahah financing implemented by each bank is different. This type of research is a type of qualitative research with descriptive data processing. This study aims to examine the implementation of risk management by BPR Syariah Artha Mas Abadi, especially in murabahah financing which is associated with the level of bank profitability and sharia management. The results of this study conclude that the risk management of murabahah financing at BPR Syariah Artha Mas Abadi has been carried out well, in which there are 4 stages such as identification, measurement, monitoring and risk control. In order to minimize risk, the bank also carries out a 5C analysis, namely character, capacity, capital, collateral, and condition of economy for prospective murabahah financing customers. Implemented risk management also has an impact on increasing bank profitability at 80%-90%, and is in accordance with sharia management concepts such as promoting justice, openness, kinship and avoiding the element of risywah.

Keywords: *Risk management, Murabahah Financing, Profitability and Sharia Management Perspective.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan menurunnya perekonomian masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, hal ini akan membuat masyarakat terpaksa melakukan pinjaman di bank dengan tingkat bunga yang cukup fantastis. Nah, dengan adanya bunga bank ini, masyarakat Indonesia khususnya umat muslim lumayan keberatan karena bunga bank diharamkan dalam Islam. Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, BPRS hadir untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf ekonomi rakyat golongan menengah kebawah. BPRS adalah badan berbentuk PT, yang memiliki peran sebagai lembaga penghubung pihak deficit dengan surplus (Permenkumham, 2008). BPRS akan menghimpun dan menyalurkan dananya sesuai dengan konsep syariah serta aturan yang ditetapkan oleh BI.

BPRS pada prinsipnya hadir sebagai alternatif bagi masyarakat kecil menengah yang membutuhkan dana untuk keperluan konsumtif ataupun produktif. Seperti bank syariah, BPRS juga memiliki berbagai macam produk.. pembiayaan, antara lain pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *salam*, *istishna*, dll. Pada penelitian ini memfokuskan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* ialah sebuah pembiayaan berbasis akad kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana dana ini akan dipercayakan kepada nasabah yang terampil dalam mengelola usaha dengan produktif sekaligus halal. Singkatnya, pembiayaan *murabahah* ini adalah sebuah akad jual beli, yang mana pihak bank akan mengungkapkan harga beli barang kepada nasabah, dan setelah itu pihak bank akan mendapat sebuah *margin* yang sudah disepakati oleh pihak yang bersangkutan (nasabah dengan bank) (Muhamad, 2016). Sesuai dengan fakta yang ada, ternyata pembiayaan *murabahah* ini adalah pembiayaan yang paling banyak peminatnya dibanding dengan pembiayaan lain. Hal ini dibuktikan dengan tabel komposisi berikut: (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

Tabel 1. 1 Komposisi Pembiayaan BPRS di Indonesia (dalam Juta Rupiah)

Akad	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Mudharabah</i>	124.497	180.956	240.606	260.651	253.795
<i>Musyarakah</i>	776.696	837.915	1.121.004	1.551.953	1.766.408
<i>Murabahah</i>	5.904.751	6.940.379	7.457.774	7.648.501	7.806.594
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Istishna</i>	21.426	35.387	67.178	72.426	74.619,15
<i>Ijarah</i>	22.316	46.579	41.508	53.318	66.007,45
<i>Qardh</i>	189.866	185.360	176.856	222.678	238.585
<i>Multijasa</i>	724.398	857.890	838.394	871.973	879.140
Jumlah	7.763.951	9.084.467	9.943.320	10.681.499	11.085.149

Dengan adanya pemberian pembiayaan *murabahah*, pasti tidak terlepas dari adanya risiko yang kemungkinan akan muncul, salah satunya risiko pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Rustam pada tahun 2013 menyatakan bahwa risiko pembiayaan bermasalah ialah suatu risiko yang muncul atas kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya ke pihak bank yang telah diperjanjikan dan disepakati sebelumnya. Berikut ialah tabel data tingkat *Non Performing Financing* (NPF) masih terbilang tinggi dan masih belum stabil pada periode 2021.

Tabel 1. 2 Presentase NPF Bank Syariah

Juni	Juli	Agustus
3,25%	3,23%	3,25%

Untuk meminimalisir adanya risiko-risiko yang mungkin terjadi, maka pihak BPRS akan menghadirkan sebuah konsep manajemen risiko yang tersistem, khususnya manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah*.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai sebuah ilmu yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi bisa mengatasi berbagai masalah dengan menerapkan pendekatan manajemen secara tersistem dan komprehensif (Fahmi, 2016). Peraturan BI No. 11/25/PBI/2009 menjelaskan bahwasannya BUS harus melakukan manajemen risiko guna mengatasi berbagai risiko seperti risiko kredit, likuiditas, operasional ataupun pasar (Wandayanik, 2015). Sebuah manajemen risiko ini penting karena untuk menstabilkan BPRS jika terjadi sebuah risiko.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, BPR Syariah Artha Mas Abadi ialah sebuah BPRS yang dalam pengimplementasiannya berjalan sesuai dengan konsep syariah, dimana badan usaha ini adalah salah satu bagian dari Ponpes Maslakul Huda yang dipelopori oleh Alm. KH. MA Sahal Mahfudh. BPR Syariah Artha Mas Abadi akan menyediakan berbagai kebutuhan pembiayaan untuk lingkup mikro, salah satunya ialah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi ini sangat banyak peminatnya. Dengan banyaknya peminat dari pembiayaan *murabahah* ini, maka tingkat profitabilitas bank juga akan meningkat. Profitabilitas diartikan sebagai sebuah kemampuan bank untuk menghasilkan laba atas penjualannya, total aktiva dan modal jangka panjang (Nizar, 2015). Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa meningkatnya pembiayaan juga akan memunculkan suatu risiko. Untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dari pembiayaan *murabahah* ini, BPR Syariah Artha Mas Abadi mempunyai tips dan trik dalam manajemen risiko yang berlandaskan konsep syariah.

Pada penelitian sebelumnya, yaitu oleh Saputro pada tahun 2017, dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri” menyatakan bahwasannya strategi penyelesaian atas permasalahan pembiayaan tersebut ialah dengan menerapkan *stay strategy* (restrukturisasi pembiayaan) dan *exit strategy* (SP, somasi dan lelang). Sedangkan penelitian oleh Siregar pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada PT Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk” menyatakan bahwasannya manajemen risiko yang diterapkan ialah dengan memantau dan mengawasi proses pembiayaan serta mengimplementasikan prinsip kehati-hatian sebelum mencairkan sebuah pembiayaan. Dengan adanya perbedaan manajemen risiko yang diterapkan berbagai bank, serta ketidakadaan variabel profitabilitas dan manajemen syariah di penelitian sebelumnya, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk menjalankan penelitian tentang manajemen risiko pembiayaan *murabahah* yang dikaitkan dengan tingkat profitabilitas

bank dan juga dilihat dari sisi manajemen syariahnya. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian tentang “**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi)**”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan *murabahah* yang akan meningkatkan profitabilitas BPR Syariah Artha Mas Abadi sesuai dengan pandangan manajemen syariah.

KAJIAN LITERATUR

Pembiayaan Murabahah

Murabahah diartikan sebagai bagian akad jual beli. Saytid Sabiq mengemukakan bahwa pembelian diartikan sebagai pengalihan harta atas dasar kerelaan mitra atau pengalihan harta dengan hak substitusi untuk menghindari transaksi terlarang. Menurut peraturan Bank Indonesia, *murabahah* diartikan sebagai penjualan barang sebesar harga pokoknya dengan jumlah *margin* yang sudah diperjanjikan sebelumnya (Sukmana, 2018).

Pembiayaan *murabahah* dapat dikenal sebagai pembiayaan dengan sistem *Natural Certainty Contracts*, yang berarti sebuah pembiayaan jual beli dengan mengungkapkan harga pokok barang plus *margin* atas perjanjian nasabah dan bank (Chelhi, 2015). Bank akan melakukan pembelian barang yang diperlukan nasabah ke pemasok, dan barang itu akan dijual kembali ke nasabah dengan mengungkapkan harga beli dan *margin* yang ditetapkan. Bank harus transparan dan jujur dalam mengungkapkan harga pokok dari barang tersebut, kemudian pihak bank akan menetapkan *margin* yang didapat dengan kesepakatan nasabah (Gundogdu, 2014).

Manajemen Risiko

Manajemen risiko diartikan sebagai sebuah runtutan prosedur yang berguna untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau sekaligus mengendalikan risiko yang timbul dari sebuah aktivitas di lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah (Fahmi, 2016). Terdapat berbagai tahapan yang harus ditempuh untuk melakukan manajemen risiko, antara lain:

1. Identifikasi risiko, ialah sebuah proses untuk melakukan penyelidikan terkait dengan sebuah risiko yang kemungkinan akan terjadi sekaligus bagaimana risiko tersebut bisa muncul. Identifikasi ini merupakan sebuah analisis pada karakteristik risiko yang ada pada aktivitas perbankan.
2. Pengukuran risiko, ialah sebuah proses untuk mengukur sejauh mana risiko itu bisa terjadi. Pengukuran risiko bisa dilakukan melalui cara evaluasi intens terhadap prosedur yang dipakai dalam mengukur risiko.
3. Pemantauan risiko, ialah sebuah proses mengawasi dan mengontrol risiko yang kemungkinan akan terjadi dengan melakukan evaluasi pada eksposur risiko.
4. Pengendalian risiko, ialah sebuah usaha ataupun upaya untuk mengendalikan dan meminimalisir risiko yang telah terjadi, sehingga lembaga tidak akan mengalami kerugian yang sangat fatal.

Manajemen risiko ini juga bisa dikendalikan dengan melakukan analisa pembiayaan dengan menggunakan proses 5C + 1S, diantaranya:

1. *Character*, dalam menganalisis nasabah pembiayaan yaitu dengan melakukan penilaian pada watak nasabah, apakah nasabah memiliki iktikad baik ataukah buruk. Guna mengetahui karakter nasabah, bank akan mengecek data dan informasi nasabah dari pihak lain dan melalui *BI Checking*.
2. *Capacity*, tahap analisis ini bank akan menganalisis tingkat kemampuan keuangan nasabah agar tidak terjadi sebuah risiko yang tidak diharapkan dan nasabah bisa memenuhi kewajibannya secara tepat waktu sekaligus tidak terjadi penunggakan angsuran.
1. *Capital*, apabila nasabah memiliki modal yang besar, maka tingkat kepercayaan bank akan nasabah tersebut semakin tinggi.
2. *Collateral*, ialah seorang analis harus mempertimbangkan agunan nasabah dalam pengajuan pembiayaannya. Jaminan ini bisa meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi.
3. *Condition of Economic*, seorang analis menganalisis keadaan ekonomi nasabah dan usaha nasabah pada saat ini maupun dimasa mendatang.
4. *Sharia*, ialah melakukan analisa pembiayaan dengan berpacu pada konsep syariah.

Profitabilitas

Profitabilitas didefinisikan sebagai sebuah kemampuan lembaga untuk mendapat laba dari besarnya penjualan, total aktiva sekaligus modal jangka panjangnya (Nizar, 2015). Rasio profitabilitas akan mengukur tingkat keuntungan yang didapat oleh perbankan. Semakin tinggi laba, aktiva dan modal bank, maka bank tersebut dapat dikategorikan memiliki tingkat profitabilitas yang baik.

Manajemen Syariah

Manajemen syariah merupakan sebuah pengelolaan sumber daya pada sebuah organisasi yang dikelola secara syariah guna mencapai tujuan yang efektif, efisien serta tidak keluar dari konsep syariah (Harahap, 2017). Terdapat beberapa prinsip manajemen syariah, antara lain:

1. Menegakkan sebuah kebenaran
2. Menjunjung tinggi keadilan
3. Amanah
4. Profesional (tanggung jawab)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yang mana pendekatan ini dilakukan untuk membuat sebuah penjelasan yang tersistem dan aktual terkait dengan fakta yang terjadi disebuah lapangan ataupun fenomena yang ingin diketahui oleh peneliti (Nasir, 1998). Guna memperoleh data penelitian, maka peneliti akan terjun langsung pada obyek penelitian agar mendapatkan informasi yang valid, yang mana objek penelitiannya yaitu di kantor BPR Syariah Artha Mas Abadi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara, observasi sekaligus dokumentasi. Wawancara akan dilakukan dengan memberikan sebuah pertanyaan secara terstruktur kepada praktisi BPR Syariah Arta Mas Abadi (pimpinan cabang dan *funding officer*), sedangkan observasi ini akan dilakukan oleh peneliti dalam jangka waktu satu minggu untuk memperoleh data penelitian yang valid. Sedangkan pencarian data dengan dokumentasi ini dilakukan dengan mencari sumber-sumber ilmiah, seperti buku, jurnal, brosur ataupun arsip-arsip yang dimiliki oleh BPR Syariah Artha Mas Abadi.

PEMBAHASAN

Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* ialah sebuah pembiayaan bagian dari *Natural Certainty Contracts*. Pembiayaan *murabahah* didefinisikan sebagai sebuah akad jual beli, Dimana harga perolehan akan diungkapkan oleh pihak penjual beserta besaran *margin* yang ditelah disepakati oleh penjual dan pembeli (Afrida, 2016). Pihak bank akan membeli barang yang dipesannya ke *supplier*, dan nantinya akan dijual ke nasabah (Muhamad, 2016). Pembiayaan *murabahah* ini memberi fasilitas nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, pengadaan barang dagangan, membeli bahan baku produksi, ataupun pembelian barang lainnya yang sesuai dengan konsep syariah.

Murabahah ialah sebuah akad pembiayaan berdasar akad jual beli, sesuai dengan dalil pada Al-Qur'an dan Al-Hadist:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
(QS. Al-Baqarah: 275)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)

Terdapat 3 tahap yang dilakukan dalam memberikan pembiayaan oleh BPRS Syariah Artha Mas Abadi kepada nasabahnya, diantaranya: (A. Hidayatullah, 2021)

1. Perencanaan (*planning*)

BPR Syariah Artha Mas Abadi memberi pembiayaan untuk nasabahnya dengan berpacu pada SOP pembiayaan, dimana SOP ini berisi terkait dengan aturan yang mendisiplinkan pegawai dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*, serta menjadi dasar hukum bila dikemudian hari terjadi penyimpangan di pembiayaan *murabahah*.

2. Pelaksanaan (*actuating*)

Tahap berikutnya ialah tahap pelaksanaan. BPR Syariah Artha Mas Abadi akan menyeleksi data nasabah pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah, sebelum pihak bank memutuskan untuk memberi pembiayaan *murabahah* pada calon nasabah tersebut. BPR Syariah Artha akan menyeleksi data dengan seksama dan penuh kehati-hatian. Apabila calon nasabah lolos dalam tahap seleksi data, maka selanjutnya bank akan melakukan analisis kelayakan nasabah dengan menganalisis 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economic*.

Pihak BPR Syariah Artha akan mensurvei agunan, watak nasabah ataupun kondisi ekonomi nasabah untuk mendapatkan kevalidan data. Survei akan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kebenaran data nasabah.

3. Pengendalian (*controlling*)

Apabila BPR Syariah Artha Mas Abadi telah menyetujui pembiayaan *murabahah* yang telah diajukan oleh nasabahnya, maka BPR Syariah Artha Mas Abadi akan melakukan pengawasan dan control pada nasabah tersebut agar tidak melanggar aturan yang ditetapkan sebelumnya. Pihak bank akan memastikan bahwa calon nasabah tetap bisa membayar angsuran setiap bulannya.

Berikut ini ialah tahap-tahap pengajuan pembiayaan *murabahah* BPR Syariah Artha: (*Brosur Pembiayaan BPR Syariah Artha Mas Abadi, n.d.*)

1. Nasabah akan mengunjungi BPR Syariah Artha dengan membawa berkas syarat-syarat pembiayaan *murabahah*, seperti fotokopi KTP berlaku pemohon (suami istri) rangkap 5; fotokopi KTP berlaku salah satu orang tua (bila pemohon masih lajang) dan fotokopi KK pemohon. Apabila pengajuan pembiayaan dengan mengagunkan kendaraan bermotor, maka nasabah harus membawa fotokopi BPKB dan STNK ataupun asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin. Apabila nasabah mengajukan pembiayaan dengan agunan berupa tanah ataupun rumah, maka nasabah harus membawa fotokopi sertifikat.
2. Setelah membawa beberapa berkas itu, selanjutnya nasabah pembiayaan diminta untuk mengisi formulir pendaftarannya.
3. Pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi akan mengecek kelengkapan berkas dan menyeleksi berkas tersebut dengan mempertimbangkan riwayat keuangan calon nasabah diperbankan lain (jika sebelumnya pernah mengajukan pembiayaan).

4. Apabila nasabah pembiayaan *murabahah* telah lolos seleksi, pihak BPRS melakukan studi lanjut untuk mensurvei nasabah melalui analisa 5C+1S.
5. BPR Syariah Artha Mas Abadi akan menganalisis dan mengajukannya ke pihak atasan yang memiliki kewenangan dalam memutuskan persetujuan pembiayaan.
6. Jikalau pengajuan tersebut telah di acc oleh pihak atasan, maka tahap selanjutnya yaitu nasabah akan dibuatkan akad pembiayaan sebagai tanda terima.
7. Setelah melakukan akad pembiayaan *murabahah*, BPRS akan melakukan pengawasan dan pemantauan pembiayaan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha ini diwujudkan dalam bentuk memberikan biaya modal kerja, kendaraan bermotor, bahan baku ataupun pembiayaan perabotan rumah tangga.

Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Sebuah risiko ini akan muncul dikarenakan adanya sebuah ketidakpastian atas sesuatu. Jadi ketidakpastian ini menunjukkan sebuah keadaan yang mungkin tidak membawa kerugian. Risiko dapat didefinisikan sebagai sebuah keadaan tidak pasti yang ditimbulkan oleh sistem pekerjaan dan memiliki sebuah dampak terhadap harapan (Partamihardja, 2016). Risiko tidak selalu memiliki dampak buruk, melainkan risiko bisa menimbulkan sebuah dampak yang positif, atau biasa disebut dengan peluang.

Berikut ialah risiko yang ada pada pembiayaan *murabahah* BPR Syariah Artha yang telah diungkapkan informan : (A. Hidayatullah, personal communication, June 10, 2021)

1. Risiko internal BPR Syariah Artha Mas Abadi

Risiko internal ialah sebuah risiko yang ditimbulkan dari dalam BPR Syariah Artha Mas Abadi. Risiko ini dapat dijuluki dengan risiko operasional, yang mana risiko ini timbul karena gagalnya sistem serta lemahnya sistem informasi sekaligus sistem pengawasannya. Risiko ini juga dapat disebabkan oleh kekeliruan SDM yang dilakukan dengan sengaja.

Jadi, risiko ini bisa terjadi karena terdapat kesalahan dalam proses analisa pembiayaan *murabahah* nasabah. Pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi saat mengecek berkasnya kurang teliti, sehingga data-data yang didapatkan kurang valid. Dimana, nasabah yang tidak layak mendapat pembiayaan *murabahah*, justru malah dinyatakan layak mendapat pembiayaan tersebut. Hal ini merupakan sebuah kesalahan yang nantinya akan memunculkan sebuah risiko, yang mana risiko yang terjadi adalah risiko gagal bayar oleh nasabah. Tentunya, hal ini akan menimbulkan kerugian bagi BPRS tersebut.

2. Risiko Nasabah BPR Syariah Artha Mas Abadi

Risiko ini timbul karena ulah dari nasabah pembiayaan BPR Syariah Artha. Risiko yang terjadi dalam pembiayaan *murabahah* yang terjadi karena nasabahnya ini ialah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan ini terjadi dikarenakan nasabah gagal untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya. Risiko pembiayaan ini juga biasa disebut dengan risiko gagal bayar. Sorang nasabah ini tidak punya kemampuan untuk melunasi angsurannya dengan full serta tepat waktu.

Risiko ini muncul dikarenakan adanya sebuah masalah yang tidak terduga sebelumnya pada kontrak pembiayaan *murabahah*. Risiko ini terjadi karena timbul dari faktor internal nasabah, seperti gagalnya sebuah usaha yang dijalankan nasabah sehingga pendapatan nasabah berkurang. Atas faktor tersebut, maka akan menyebabkan nasabah tidak mampu untuk membayar angsurannya kepada pihak BPRS. Selain itu, risiko ini terjadi karena nasabah menggunakan dana pembiayaannya untuk keperluan yang lebih mendesak (biaya berobat, pendidikan, ataupun yang lainnya).

3. Risiko eksternal BPR Syariah Artha Mas Abadi

Risiko eksternal yang terjadi di BPR Syariah Artha ini ialah berasal dari sebuah bencana yang tidak terduga, seperti terdapat beberapa nasabah yang membawa dananya untuk membayar angsuran, tetapi terdapat sebuah kejadian pencurian oleh orang lain. Sehingga, atas hal tersebut nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaannya dengan full dan tepat waktu.

Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Profitabilitas

Manajemen risiko yaitu sebuah rangkaian prosedur yang dilakukan guna mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko oleh sebuah lembaga keuangan syariah.(Fahmi, 2016).

Manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi diimplementasikan dan telah terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan bahwa hasil wawancara dan observasi oleh informan, terdapat 95 nasabah aktif pembiayaan *murabahah*, hanya terdapat 5 nasabah pembiayaan yang macet. Manajemen risiko pembiayaan *murabahah* yang diterapkan terbukti memberikan dampak positif bagi profitabilitas BPR Syariah Artha Mas Abadi. Profitabilitas ini didefinisikan sebagai sebuah kemampuan lembaga keuangan untuk mendapat laba atas penjualannya, total aktiva sekaligus modal jangka panjang. Hal ini dibuktikan bahwasannya pendapatan/*income* dari BPR Syariah Artha terus mengalami peningkatan walaupun terdampak pandemi covid-19, yaitu telah berada pada posisi 80% - 90%.

BPR Syariah Artha Mas Abadi melaksanakan proses manajemen risiko melalui 4 tahapan, antara lain identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Manajemen risiko ini dilakukan guna meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Artha Mas Abadi. Berikut ialah beberapa tahapan manajemen risiko yang diimplementasikan:

1. Mengidentifikasi Risiko

Identifikasi risiko berarti proses guna menentukan risiko yang kemungkinan terjadi, mengapa risiko itu terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Jadi, pihak bank akan melakukan identifikasi risiko ke calon nasabah pembiayaan *murabahah* terlebih dulu sebelum pihak bank memutuskan untuk memberikan pembiayaan. Hal ini dilakukan guna mencegah risiko pembiayaan bermasalah.

Dari hasil menunjukan bahwasannya dalam tahap identifikasi risiko ini terdapat langkah-langkah yang dilakukan BPR Syariah Artha, seperti melakukan pengecekan kelengkapan sekaligus keaslian data calon nasabah pembiayaan *murabahah*. Pengecekan data identitas nasabah ini dilakukan di Dukcapil dan melalui *bank checking* untuk melihat baik ataupun tidaknya riwayat pembiayaan calon nasabah pembiayaan.

Identifikasi risiko di BPR Syariah Artha Mas Abadi dilakukan dengan proses 5C + 1S, yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Condition of Economic* serta *Sharia*, seperti dibawah ini:(A. Hidayatullah, personal communication, June 10, 2021)

Character (karakter), berarti BPR Syariah Artha Mas Abadi akan menjalankan penilaian karakter calon nasabah pembiayaan, apakah mereka memiliki iktikad yang baik atau justru malah sebaliknya. Pihak BPRS menjalankan penilaiannya dengan melakukan sebuah survei atas karakter nasabah dengan menanyakan karakter nasabah kepada tetangganya. Selain itu, penilaian karakter oleh BPRS juga dilakukan melalui *BI Checking* (Nizar, 2015).

Capacity (kemampuan), dimana BPR Syariah Artha Mas Abadi menganalisis kemampuan nasabah pembiayaan dalam mengangsur pembiayaannya. BPRS menganalisisnya melalui laporan keuangan nasabah, slip gaji sekaligus rekening tabungannya. Selain itu, dari pihak *funding officer* nya juga melakukan survei ke usaha nasabah untuk memastikan kemampuan bayarnya.

Capital (modal), pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi akan menganalisa modal calon nasabah pembiayaannya dengan mempertimbangkan modal usaha yang dimiliki nasabah. Apabila modal yang dimiliki nasabah besar, maka tingkat kepercayaan dari BPRS ini juga akan semakin tinggi dan yakin untuk memberika pembiayaan *murabahah* kepada nasabah pembiayaan.

Collateral (jaminan), yang mana BPR Syariah Artha Mas Abadi akan meminta sebuah jaminan nasabah pembiayaan sebagai alat yang diagunkan bila nasabah tersebut tidak bisa melunasi pembiayaannya.

Condition of Economic (keadaan ekonomi), yaitu BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan analisa keadaan ekonomi nasabah pembiayaan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis kedepannya, apakah bisa *sustainable* ataukah tidak.

Sharia (syariah), berarti BPR Syariah Artha Mas Abadi menganalisis bisnis yang dimiliki nasabah dengan cara melihat legal dan halalnya sebuah bisnis yang dijalankan. BPRS akan memberikan surat penolakan pengajuan pembiayaan nasabah bila nasabah tersebut menjalankan bisnis yang tidak sesuai dengan konsep syariah.

2. Mengukur Risiko

Pengukuran risiko bisa dilaksanakan dengan mengevaluasi secara intens pada sumber data dan prosedur yang dipakai guna mengukur sebuah risiko (Fawziyah, 2020). Pengukuran risiko dilakukan dengan menyempurnakan sistem pengukuran risiko, bila ada perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang material.

Pengukuran risiko BPR Syariah Artha Mas Abadi ini dilakukan guna memperkirakan risiko yang kemungkinan terjadi akibat aktivitas lembaga. Pengukuran risiko yang dilakukan BPRS ini yaitu dengan melakukan pengelompokan pembiayaan *murabahah* nasabah berdasar kolektibilitas serta kelancaran nasabah dalam mengangsur pembiayaan.

Tabel 1. 3 Kolektibilitas Pembiayaan

Kolektibilitas	Rentang Waktu
Lancar	-
Dalam Perhatian Khusus	90 hari
Kurang Lancar	90-180 hari
Diragukan	180 – 270 hari
Macet	Lebih dari 270 hari

Jikalau angsuran pembiayaan oleh nasabah ini berada dikategori “dalam perhatian khusus” dan “kurang lancar”, BPR Syariah Artha akan menagih angsuran nasabah tersebut secara intens. Dan bila pembiayaan nasabah dikategorikan “diragukan” dan “macet”, maka BPR Syariah Artha akan tetap melakukan penagihan, dan jikalau pihak nasabah mengabaikan penagihan yang dilakukan oleh bank, maka nasabah tersebut akan diberikan SP1, SP2, dan yang terakhir ialah SP3. Apabila SP3 tidak dihiraukan nasabah, maka pilihan terakhir yang dilakukan oleh BPR Syariah Artha ialah dengan mengeksekusi jaminan nasabah pembiayaan tersebut.

3. Pemantauan risiko

Pemantauan risiko dilakukan dengan mengevaluasi pada eksposur risiko (Fikruddin, 2015). Kemudian juga dapat dijalankan dengan menyempurnakan proses pelaporan bila ada perubahan aktivitas usaha, produk, faktor risiko, transaksi ataupun perubahan teknologi informasi. BPR Syariah Artha Mas Abadi memantau nasabahnya dengan melakukan survey secara intens pada bisnis yang dijalankan oleh nasabah.

4. Mengendalikan risiko

Pengendalian risiko ialah sebuah usaha untuk menyelamatkan perusahaan dari sebuah kerugian (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Kerugian bisa terjadi karena adanya pembiayaan bermasalah dari seroang nasabah pembiayaan.

Pengendalian risiko oleh BPR Syariah Artha dilakukan dengan menagih nasabah yang terindikasi dalam kategori nasabah macet. BPR Syariah mengendalikan risiko dengan menyelesaikannya dengan rasa kekeluargaan dan memberi kesempatan kepada nasabahnya untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan, entah itu pelanggaran dalam bentuk penangguhan jangka waktu ataupun dengan merubah angsurannya.

Jikalau nasabah macet telah diberi SP3 dan nasabah tersebut tidak memiliki iktikad baik untuk mengangsur pembiayaannya, maka BPR Syariah Artha Mas Abadi akan mengeksekusi agunan nasabah yang diselesaikan dengan cara musyawarah. Dan bila nasabah tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah, maka pihak bank akan mengurus masalah tersebut ke jalur pengadilan.

Manajemen Risiko Perspektif Manajemen Syariah

Manajemen syariah didefinisikan sebagai sebuah seni untuk mengelola sumber daya sesuai dengan prinsip islam yang tujuan akhirnya yaitu guna mencapai goal yang diharapkan. BPR Syariah Artha Mas Abadi telah menerapkan konsep manajemen risiko syariah. Hal ini dibuktikan bahwasannya dalam identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko ini dijalankan dengan menghindari 6 unsur yang dilarang Islam, yaitu riba, dzalim, *gharar*, *risywah*, maksiat dan haram.

Pengimplementasian manajemen risiko oleh BPR Syariah Artha juga tidak terlepas dari peran DPS. Tujuan pengawasan oleh DPS ini ialah guna memastikan bahwa kegiatan operasionalnya dijalankan dengan baik dan manajemen risikonya dikelola dengan tersistem yang berpegang teguh pada landasan syariah (Kementerian Riset Dikti, 2016).

Peran dari DPS ini ialah melakukan pengawasan kegiatan operasional BPRS, mulai dari memeriksa kontrak oleh nasabah, perjanjiannya, produk, kegiatan transaksi, manajemen risiko ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan BPRS.

Untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, BPR Syariah mengimplementasikannya dengan berpacu pada prinsip syariah, antara lain:(A. Hidayatullah, personal communication, June 10, 2021)

1. Menegakkan keadilan

Keadilan ialah sebuah prinsip fundamental yang ada pada ideologi Islam. Adil ini memiliki arti dengan tidak membedakan satu sama lain. Al-Qur'an telah memberikan perintah kepada penganutnya bahwa dalam mengambil sebuah keputusan itu harus menjunjung tinggi asa keterbukaan dan kesetaraan.

BPR Syariah Artha tidak membedakan nasabah pembiayaan satu dengan yang lainnya. BPRS tetap melayani nasabah dengan kualitas yang sama, walaupun nasabah tersebut termasuk dalam kategori macet.

2. Amanah

Menurut Hafidhuddin, amanah diartikan sebagai sebuah sikap untuk bertanggung jawab dalam menjalankan sebuah tugas yang diembannya. Amanah ini diwujudkan dalam memberikan informasi secara terbuka, melayani nasabah dengan baik dan jujur dalam menyampaikan suatu hal. Pihak bank harus menjunjung tinggi rasa amanah dalam mengelola dana nasabah. Bank harus memberi data dan informasi secara transparan kepada nasabah. Dalam hal ini adalah data yang dirasa penting untuk diketahui nasabah.

BPR Syariah Artha Mas Abadi mengedepankan keadilan dan keterbukaan atas semua informasi pembiayaan kepada nasabah, termasuk harga beli dan margin yang akan didapatkan oleh BPRS.

3. Profesional/Tanggung Jawab

Seorang manajer dan karyawan harus memiliki kompetensi manajerial, teknikal, sosial dan intelektual dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan bidangnya. BPR Syariah Artha Mas Abadi telah memenuhi tanggungjawab yang diembannya, baik itu dalam sisi pendanaannya, pembiayaan maupun dalam mengatasi risiko yang terjadi.

4. Musyawarah/Keluargaan

Dalam hal penyelesaian konflik pembiayaan, maka akan dilakukan dengan cara damai ataupun bisa melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (mediator) (Harahap, 2017). Apabila terdapat nasabah macet, BPR Syariah Artha tidak mengatasi risiko tersebut dengan sepihak. Seorang nasabah yang pembiayaannya masuk dalam kategori “macet”, maka BPRS akan menindaki hal tersebut berdasar dengan SOP bank dan diselesaikan dengan cara keluarga. Antara nasabah dengan BPRS ini akan melakukan negosiasi yang diwujudkan dalam bentuk pembiayaan ulang. Dan bila nasabah tidak punya iktikad baik untuk membayar, maka BPRS akan melakukan sita agunan nasabah.

Manajemen risiko yang diterapkan BPR Syariah Artha Mas Abadi telah terhindar dari sebuah hal yang dilarang oleh Islam, diantaranya ialah:(A. Hidayatullah, personal communication, June 10, 2021)

1. Riba

Saat melakukan transaksi pembiayaan, BPR Syariah Artha Mas Abadi menghindari prinsip riba, dimana riba ini diartikan sebagai dana tambahan terhadap modal yang ditimbulkan atas transaksi hutang piutang, dimana tambahan ini akan diberikan kepada pemilik modalnya. BPR Syariah Artha tidak menjalankan prinsip bunga pada angsuran pembiayaannya, namun menjalankan prinsip bagi hasil yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. *Gharar* (penipuan)

Pada pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi ini tidak terdapat unsur ketidakjelasan objek, akad, cara pembayaran maupun dalam hal menyerahkan barang yang dipesan. Dalam hal akad, barang ataupun cara penyerahan barangnya ini telah diungkapkan didalam akad pembiayaan yang dipilih oleh nasabah.

3. *Maysir* (perjudian)

BPR Syariah Artha Mas Abadi tidak menegimplementasikan transaksi yang terdapat unsur judi. Pada kegiatan operasionalnya, BPR Syariah Artha Mas Abadi menjalankannya dengan terbuka atau transparan, misalnya BPR Syariah menjabarkan dengan transparan terkait bagi hasil serta jumlah angsuran nasabah di awal pembiayaan, serta dalam pengimplementasian pembiayaan ini dilakukan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

4. *Risywah* (suap)

Risywah diartikan sebagai sebuah sikap memberi sesuatu kepada pihak lain dengan maksud dan tujuan tertentu, yaitu untuk mendapat sesuatu yang tidak menjadi haknya. Kegiatan operasional BPR Syariah Artha Mas Abadi ini berjalan dengan tidak terdapat unsur *risywah*. Dalam proses manajemen risikonya, pihak bank bagian manajemen risiko ini menyatakan dengan terbuka dengan nasabahnya terkait dengan masalah pembiayaannya. Apabila ada sebuah masalah antara nasabah dengan bank yang hanya bisa diselesaikan oleh jalur ketiga (pengadilan), maka BPR ataupun nasabah tidak boleh melakukan suap kepada pengadilan untuk memenangkan perkara. Dalam mengatasi manajemen risiko harus berlandas pada manajemen syariah.

SIMPULAN

Pemberian pembiayaan *murabahah* PT BPR Syariah Artha Mas Abadi ini dilakukan melalui 3 tahapan, antara lain tahap perencanaan (*planning*) yang sesuai dengan SOP bank, lalu tahap pelaksanaan (*actuating*) pembiayaan serta tahap pengendalian (*controlling*) dengan mengontrol dan mengawasi nasabah pembiayaan. Untuk mengatasi dan meminimalisir risiko gagal bayar/pembiayaan bermasalah, BPR Syariah Artha Mas Abadi menerapkan manajemen risiko. Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di BPRS tersebut telah berjalan dengan optimal dan sesuai dengan regulasi dan SOP BPR Syariah Artha Mas Abadi. Hal ini terbukti bahwa dari 95 nasabah aktif pembiayaan *murabahah*, hanya ada 5 nasabah pembiayaan *murabahah* yang bermasalah.

Manajemen risiko yang dilakukan BPR Syariah Artha Mas Abadi yaitu dengan melakukan identifikasi risiko 5C + 1S, yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Condition of Economic* serta *Sharia*. Lalu, mengukur risiko dengan mengelompokkan kolektibilitas nasabah pembiayaan. Kemudian, melakukan pemantauan risiko serta mengendalikan risiko yang diselesaikan secara musyawarah dengan memberi nasabah kesempatan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* ini mendatangkan dampak positif bagi profitabilitas BPR Syariah Artha Mas Abadi. Hal ini terbukti bahwasannya *income* dari BPRS ini stabil dan mengalami peningkatan walau ditengah kondisi pandemi, yaitu pendapatannya berada pada posisi 80% - 90%. Manajemen risiko yang dijalankan oleh BPRS Artha Mas Abadi telah berjalan berpacu pada konsep manajemen syariah, yaitu mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, kekeluargaan dalam mengatasi konflik akibat penunggakan angsuran oleh nasabah pembiayaan *murabahah*.

Penulisan jurnal ini tentunya jauh dari kata sempurna, untuk itu bagi peneliti berikutnya bisa melakukan pengembangan penelitian tentang manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan profitabilitas bank. Terimakasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penelitian, sehingga jurnal ini bisa tersusun dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 157.
- Brosur Pembiayaan BPR Syariah Artha Mas Abadi*. (n.d.).
- Chelhi, K. (2015). Estimation of Murabaha Margin. *Journal of Applied Finance & Banking*, 7(5), 1792.
- Fahmi, I. (2016). *Manajemen Risiko*. Alfabeta.
- Fawziyah, Z. W. dan I. (2020). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di PT BPRS Artha Madani Kantor Pusat Bekasi. *Paradigma*, 17(2), 14.
- Fikruddin, T. (2015). Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se Kabupaten Demak. *Equilibrium*, 3(2), 258.
- Gundogdu, A. S. (2014). Margin Call in Islamic Finance. *International Journal of Economics and Finance*, 6(8). <https://doi.org/10.5539/ijef.v6n8p205>
- Harahap, S. (2017). Implementasi Manajemen Syariah. *At-Tawassuth*, 2(1), 216.
- Hidayatullah, A. (2021, June 10). *Wawancara oleh Penulis* [Personal communication].
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Manajemen Risiko*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Riset Dikti. (2016). *Industri Jasa Keuangan Syariah*. Kemenriset Dikti.
- Muhamad. (2016). *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*. UPP STIM YKPN.
- Nasir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nizar, M. (2015). Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas. *Jurnal An-Nisbah*, 2(1), 243<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.i/index.php/nisbah/article/view/255> & ved.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik Perbankan Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Mei-2021.aspx>
- Partamihardja, B. (2016). *Managemmen Risiko Pengembang Properti Perumahan*. Teknosan.
- Permenkumham. (2008). *UU No. 12 Tahun 2008, Perbankan Syariah*".
- Sukmana, M. Z. A. (2018). The Effect of Customers' Income, Business Capital, Margin and Collateral Value on Murabahah Financing Demand At Bank BNI Syariah Mikro Kantor Cabang Pembantu Praya. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 99–112.
- Wandayanik, R. (2015). Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. *El-Qist*, 5(1), 967.

PENERAPAN PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR'AN DENGAN METODE QIRO'ATI

Lailaturrohmaniah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

Lailaturrohmaniah273@gmail.com

Abstrak

Salah satu metode untuk membaca Al-Qur'an adalah metode Qiro'ati, metode ini diterapkan di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati untuk pembelajaran baca AlQur'an. Dari KH. Al-Habib Zamzuri selaku pengasuh/ketua lembaga mengatakan bahwa: TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati menggunakan metode Qiro'ati dalam pembelajaran Al-Qur'an ini sangat cocok karena metode Qiro'ati sendiri mudah dipahami serta memperhatikan makhroj bacaan tidak serta merta hanya asal membaca Al-Qur'an akan tetapi mengerti cara membaca Al- Qur'an dengan baik dan benar". Hasil wawancara dengan Ustadzah KHomsatun selaku pengajar TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati mengatakan bahwa: "Metode Qiro'ati sendiri merupakan metode membaca Al-Qur'an yang praktis dan mudah dipahami oleh santri. Metode Qiro'ati sendiri bukan yang terbaik tapi bisa menghasilkan yang terbaik bisa dibuktikan dengan membaca Al-Qur'an dan setiap tahunnya mampu menghatamkan, jadi TPQ ini sudah pas dan yakin menerapkan metode Qiro'ati".

Abstract

One method for reading the Qur'an is the Qiro'ati method, this method is applied at TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati for learning to read the Qur'an. From KH. Al-Habib Zamzuri as the caretaker/chairman of the institution said that: TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati using the Qiro'ati method in learning the Qur'an is very suitable because the Qiro'ati method itself is easy to understand and pays attention to the macros of reading it does not necessarily only come from read the Qur'an but understand how to read the Qur'an properly and correctly. The results of an interview with Ustadzah KHomsatun as a teacher of TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati said that: "The Qiro'ati method itself is a method of reading the Qur'an that is practical and easy to understand by students. The Qiro'ati method itself is not the best but it can produce the best, it can be proven by reading the Qur'an and every year being able to finish it, so this TPQ is right and sure to apply the Qiro'ati method".

PENDAHULUAN

Dalam mempelajari Al-Qur'an, suatu metode bukan sebaik-baiknya yang dapat menjadi acuan terjaminnya hasil yang maksimal, akan tetapi metode memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan siswa. Dengan adanya metode tersebut siswa mampu untuk memahami pembelajaran dengan mudah. Keberhasilan dalam pembelajaran tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi siswa, yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa (lingkungan). Pertama faktor dari dalam diri siswa berkaitan dengan inovasi, psikologi dan minat siswa. Sedangkan yang kedua faktor dari luar diri siswa yaitu guru, sarana prasarana, kurikulum, metode, atau teknik dalam pembelajaran, fasilitas pendukung serta lingkungan lainnya.⁶²

Kelancaran dalam baca tulis Al-Qur'an tidak mampu terpisahkan dari proses kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Jadi, didalam agama islam, pembelajaran Al- Qur'an tidak hanya merupakan suatu keharusan yang perlu dijalankan sebagai seorang muslim, akan tetapi hal tersebut merupakan kegiatan suci nan mulia. Sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban yang dalam membaca Al-Qur'an harus memperhatikan kaidah ilmu tajwid dan makharijul hurufnya agar bacaan-bacaan benar dan baik, dikarenakan belajar ilmu tajwid mempunyai hukum fardhu kifayah dan membaca Al-Qur'an dengan menggunakan tajwid hukumnya fardhu ain.

Untuk baik dan benarnya dalam membaca Al-Qur'an tetntu membutuhkan seorang mentor, guru maupun pembimbing yang cakap perihal pengetahuan tentang Al-Qur'an, karena hasil seorang siswa dalam membaca Al-Qur'an dipengaruhi oleh guru dan pembimbingnya. Seperti halnya kisah Rosulullah SAW menyuruh para sahabt yang benar-benar ahli dalam bidang membaca dan mengajarkan Al-Qur'an, para sahabat tersebut yaitu Salim Maulana Abi Khudaifah Muad bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, serta Ubay bin Ka'ab.

Perlu diketahui dalam membaca Al-Qur'an realita banyaknya seorang muslim yang hanya sekedar mampu membaca tanpa diiringi dengan bacaan tajwid, hal tersebut bukan hanya terjadi pada kalangan muslim awam saja, akan tetapi kaum intelektual, pelajar, bahkan seorang tokoh agama pun banyak yang belum mampu membaca Al-Qur'an secara baik dan benar. Keadaan tersebut cukup membuat khawatir karena mereka yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan agama yang diyakini akan mampu melanjutkan ajaran risalah mengenai islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW.⁶³

62 Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (cet. 3; Bandung: Argesindo, 1995), hal. 39

63 Syaifullah Mahyudi, *Permata Al-Qur'an*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), cet.1, hal. 5

Oleh karena itu, sebagai kaum muslim sepatutnya untuk berusaha mendalami Al-Qur'an agar mampu membacanya dengan baik dan benar, diharapkan pula bukan hanya mampu membaca saja akan tetapi mampu mengkaji dan memahami serta mengamalkan isi dari firman-firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tokoh agam dan masyarakat menyadari akan hal tersebut, salah satunya yaitu KH> Dahlan Salim Zarkasyi, sosok pencetus metode Qiroati yang lahir di Semarang, 28

Agustus 1928 dan wafat pada 20 Januari 2001

Metode Qiroati merupakan metode pembelajaran baca tulis Al-Qur'an yang menekankan bacaan yang baik dan benar, meliputi makharijul huruf washifatuha, bacaan tartil serta kaedah-kaedah yang berlaku dalam ilmu tajwid. Qiroati bukanlah metode yang terbaik, namun Qiroati dengan kedisiplinannya berani menjanjikan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu Qiroati harus disampaikan dengan baik oleh seorang guru yang baik pula. Maka sebagai konsekuensinya, Untuk menjadi guru Qiroati, seseorang diharuskan memiliki surat ijin mengajar (SIM) yang diberikan dalam bentuk Syahadah yang diterbitkan oleh Koordinator Pusat/Cabang. Sehingga dengan demikian tidak semua orang dapat mengajarkan Qiroati namun semua orang dapat belajar Qiroati.

Dalam membangkitkan sekaligus mempermudah siswa mempelajari Al- Qur'an terutama pada anak-anak, dibutuhkannya suatu metode yang efektif dan tepat agar tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal, dan juga keprofesionalan guru serta sarana prasarana yang dapat menunjang proses belajar mengajar tersebut, baik dilembaga pendidikan formal maupun non formal.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pembelajaran

Pembelajaran yaitu proses di mana seorang siswa terlibat dengan pendidik atau sumber belajar dalam suatu bidang pembelajaran. Pembelajaran membantu pendidik memperoleh pengetahuan dan pengetahuan, memperoleh keterampilan dan kepribadian yang terlibat dalam proses pembentukan perilaku, sikap, dan keyakinan peserta didik. Salah satu konsep yang diperkenalkan oleh gagne (1977) yaitu bahwa belajar ialah sepasang peristiwa dari luar (ekstern) yang disusun guna menunjang pembelajaran dari dalam (intern).

Kualitas pembelajaran sangat bergantung terhadap motivasi pelajar dan kreativitas pendidik. Peserta didik bermotivasi tinggi yang didukung oleh guru dapat menumbuhkan motivasi ini dan membantu mereka mencapai tujuan dan keberhasilan pencapaian target mereka.⁶⁴

2. Membaca

Hakikatnya membaca bukan hanya sekadar mengucapkan tulisan, tetapi juga menyangkut aktivitas visual, berpikir, metakognitif, dan psiko linguistik. Aktivitas visual yaitu proses penerjemahan simbol tulis atau huruf ke dalam pengucapan lisan. Sedangkan proses berpikir yaitu aktivitas pengenalan kata, pemahaman kreatif, membaca kritis, interpretasi, dan pemahaman literal.⁶⁵

Membaca merupakan suatu kegiatan untuk menganalisa, menginterpretasi, meresapi, agar pesan yang disampaikan oleh penulis dalam media tulisan dapat diterima oleh pembaca. Membaca memiliki macam-macam yaitu nyaring dan dalam hati. Membaca nyaring merupakan kegiatan membaca dengan suara keras dihadapan umum. Sedangkan membaca dalam hati merupakan suatu kegiatan dengan maksud agar pembaca memahami dan mengerti tujuan atau arti yang ditulis oleh penulis dalam media tertulis. Membahas tentang baca tulis siswa kelas rendah Sekolah Dasar tidak jauh dari tujuan pembelajaran, metode, materi, dan hasil akhir dari kemampuan baca tulis siswa tersebut. Tahapan dalam proses belajar membaca siswa Sekolah Dasar kelas awal disebut membaca permulaan. Agar siswa mampu menguasai teknik dalam membaca dan memahami isi bacaan maka harus dengan. Oleh sebab itu, seorang pengajar perlu perlu membuat rancangan pembelajaran dengan baik pula. Jika suda ada timbal balik antara pengajar dan siswa, maka akan mampu menimbulkan rasa gemar membaca siswa tersebut. Sesuai tingkatannya yaitu membaca permulan, pembaca belum mempunyai banyak kemampuan membaca yang semestiya, akan tetapi pembaca masih perlu tahapan belajar agar dapat membaca dengan sempurna. Pada tingkatan ini, membaca merupakan kegiatan pengenalan tulisan, dengan tulisan tersebut siswa diminta agar menyuarakan lambang-lambang bunyi bahasa.

64 Noor Hayati, *Pembelajaran Di era Pandemi*, 32

65 Farida Rahim, *Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011, hlm.2

3. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang diturunkan perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Seluruh umat manusia dianjurkan untuk mempelajari isi Al-Qur'an serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap ucapan, perbuatan maupun sikap manusia harus dilandaskan dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Qur'an menjadi petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.

Dalam bahasa Arab Qara'a memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan, sedangkan Qira'ah diartikan sebagai pengumpulan huruf satu dengan huruf yang lainnya secara tersusun rapi, sehingga dapat diucapkan dengan baik. Masdar dari Al-Qur'an yaitu qara'a, qira'atan, qur'an.

Seperti firman Allah antara lain :

Artinya "Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu" (al-Qiyamah.17-18)

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam lafal bahasa Arab dan dalam arti yang benar, yang benar-benar ia menjadi Rasulullah, hukum bagi manusia, memberi mereka petunjuk dan memberikannya agar menjadi cara mereka mendekatkan diri dengan ibadah kepada Allah dengan cara membaca Al-Qur'an tersebut. Membaca Al-Qur'an adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Al-Qur'an disusun dalam mushaf dan dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Disampaikan dan telah diturunkan kepada kami secara mutawatir, tertulis dan lisan dari generasi ke generasi. Disimpan dan dipelihara dari pergantian atau perubahan.⁶⁶

Al-Qur'anul karim diturunkan kepada Rasulullah SAW yang ummi, yang tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas bagi kaum yang mau menggunakan akal. Al-Qur'an baik lahiriyah maupun bathiniyah tidak meninggalkan yang kecil apalagi yang besar kecuali mencatatnya, bahkan memperhatikan segala hal untuk mencatatnya dan menjelaskan dalil-dalilnya baik secara dahir maupun batin.⁶⁷

66 Abuddin Nata, *Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers, 1993), cet.1, hal. 51.

67 Jamaluddin Mahran & Abdul Azhim Hafna Mubasyir, *Al-Qur'an Bertutur tentang Makanan dan Obat-Obatan*, (yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006) Cet. 2, hal. 35

4. Metode Qiro'ati

Metode Qiroati ialah sebuah metode sederhana dalam belajar baca tulis Al-Qur'an yang tertua setelah Metode Baghdadiyah (Turutan) dan terkemuka diantara berbagai metode pembelajaran Al-Qur'an yang terdapat di Indonesia. Setidaknya terdapat kurang lebih 74 metode pembelajaran Al-Qur'an, tercatat di Jawa timur terdapat 34 metode, di Jawa tengah terdapat 17 metode dan lainnya terdapat di beberapa wilayah di Indonesia. Metode Qiroati merupakan metode pembelajaran dalam Al-Qur'an yang menekankan bacaan yang baik serta benar, meliputi makharijul huruf washifatuha, bacaan tartil serta kaedah-kaedah yang berlaku dalam ilmu tajwid.⁶⁸

Metode Qiroati mulai dikenalkan penyusunnya yakni KH. Dahlan Salim Zarkasyi di tahun 1963 di Semarang, Jawa tengah. Pada awalnya metode tersebut disusun dalam bentuk buku kecil 10 jilid, akan tetapi setelah itu disederhanakan menjadi 6 jilid untuk murid yang berada di tingkat TK, 4 jilid untuk murid yang berada di tingkat SD, 3 jilid untuk murid yang berada di tingkat SMP atau SMA, serta 2 jilid untuk pelajar yang berada di tingkat kuliah. Disisi lain juga terdapat buku praktis untuk belajar bacaan Ghorib dan ilmu Tajwid yang diperuntukkan bagi santri yang telah khatam materi tingkat dasar.⁶⁹ Metode Qiroati bukanlah metode yang terbaik, namun Qiroati dengan kedisiplinannya berani menjanjikan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu Qiroati harus disampaikan dengan baik oleh seorang guru yang baik pula. Maka sebagai konsekuensinya, Untuk menjadi guru Qiroati, seseorang diharuskan memiliki surat ijin mengajar (SIM) yang diberikan dalam bentuk Syahadah yang diterbitkan oleh Koordinator Pusat/Cabang. Sehingga dengan demikian tidak setiap orang boleh mengajar qiroati akan tetapi setiap orang boleh belajar mengenai qiroati.⁷⁰

Buku Qiroati memiliki keistimewaan serta kelebihan yang tidak dipunyai oleh metode lain. Buku Qiroati bukan dari hasil fikiran manusia, Qiroati bukanlah karangan dari Bapak KH. Dachlan Salim Zarkasyi, Akan tetapi Qiroati merupakan Inayah dan Hidayah minallah. Hal ini sesuai dengan pesan Bapak KH. Dachlan Salim Zarkasyi (1) Qiroati bukan hasil pola pikir seseorang, saya bukan pihak yang mengarang qiroati, metode ini ialah inayah serta hidayah minAllah. Pada saat saya sedang duduk saya melihat tulisan. Sehingga

68 Imam Murjito, *Pedoman Metode Praktis Pengajaran Ilmu Baca Al-Qur'an Qiraati*. (Semarang : Koordinator Pendidikan Al-Qur'an, 2000), 7-8.

69 Abdullah Habib, Achmad Chalimi, dkk., *Pak Dachlan Pembaharu dan Bapak TK Al-Qur'an*(Semarang: Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Raudhatul Mujawwidin, 2000), 53

70 Abdullah Habib, Achmad Chalimi, dkk., *Pak Dachlan Pembaharu dan Bapak TK Al-Qur'an* (Semarang: Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Raudhatul Mujawwidin, 2000), 58

apabila kalau ditanya, “mengapa pelajaran ikhfa di jilid 4 sedangkan idhar di jilid 6? jawabnya, Tidak tahu, saya tidak ikut ngarang.” (2) Saya tidak memperjualbelikan buku, yang saya inginkan hanyalah anak-anak bisa ngaji secara benar, kalau tujuan saya hanya menjual buku, untuk siapa saya repot-repot membuat tim koordinator, buku-buku tersebut bisa dititipkan di toko buku, selesai. (3) Saya tidak berharap pada jumlah pemakai qiroati banyak, namun saya hanya ingin anak yang mengaji memakai qiroati itu ngajinya benar”. (4) qiroati tidak pernah disebarluaskan, saya juga tidak pernah menyebarkannya, namun qiroati menyebar karena Allah. Menurut Ustadz Al-Wafa Wajih selaku Koordinator Qiroati Cabang Gresik, bahwa sedikitnya ada tiga kemiripan Qiroati dengan Al-Qur’an antara lain : Al-Qur’an ialah Wahyu dari Allah, sedangkan Qiroati merupakan ilham dari Allah, Al-Qur’an diturunkan untuk seorang yang Ummi sedangkan Qiroati diberikan kepada seorang yang tidak tamat sekolah SR (Sekolah Rakyat), Al-Qur’an pada awalnya menyebar secara bebas, lalu pada zaman sahabat Utsman Al-Qur’an dikodifikasi dan harus melalui seorang guru dan musyafahah. Sedangkan Qiroati dahulu dapat dipakai secara bebas dapat dibeli ditoko-toko, kemudian pada tahun 1988 Qiroati harus lewat tashih dan musyafahah.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis dan Pendekatan, pada penelitian dalam survei atau penelitian ini yaitu penulis menguraikan bagaimana dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data secara selengkap mungkin dan secara langsung tentang subjek penelitian dengan menggunakan penerrapanmetode Qiro’ati ketika belajar membaca Al-Qur’an di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati agar semakin meningkat. Teknik penelitian deskriptif kualitatif ini digunakansebagai pendekatan penelitian untuk memahami fakta sebagai realitas subjatif dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an dengan metode Qiro’ati di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati.

2. Subjek Penelitian

Penggunaan subjek penelitian ini menggunakan teknik bertujuan atau populer disebut dengan purposive sampling karena untuk menentukan seseorang yang nantinya akan menjadi sampel.⁷¹ Subjek penelitian ini

71 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm.64

adalah Pengasuh, Ustadz, dan Santri TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati. Alasan pemilihan subjek ini adalah Pengasuh, karena mengetahui dan bertanggung jawab atas TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati. Ustadz, sebagai pendamping sekaligus pengajar santri dalam semua kegiatan di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati. Dan Santri, sebagai objek utama penelitian karena metode Qiroati ini diterapkan pada santri.

Beberapa pertanyaan yang ajukan peneliti kepada subyek penelitian yaitu, Apa alasan TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati menggunakan metode Qiro'ati?, Apa saja persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan TPQ dimulai?, Bagaimana proses kegiatan belajar mengajar di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati?, Bagaimana cara evaluasi pembelajaran Qiro'ati?, Apa faktor pendukung pembelajaran metode Qiro'ati di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati?, dan Apa faktor penghambat pembelajaran metode Qiro'ati di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati? Penelitian ini berlokasi di lingkungan Dusun Sono Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber yang digunakan, diperlukan pengumpulan data sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar. Nantinya metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Metode Observasi Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang seharusnya peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi sangat baik untuk mengawasi perilaku subyek penelitian, seperti perilaku dalam lingkungan, waktu, dan keadaan tertentu. Tetapi dalam mengawasi perilaku tidak semua perlu diamati, melainkan hanya yang relevan dengan data yang dibutuhkan. Dalam melakukan pengamatan, peneliti terlibat secara pasif, artinya peneliti tidak terlibat dalam kegiatankegiatan subyek penelitian dan tidak berinteraksi dengan mereka secara langsung.⁷² Teknik observasi ini penulis gunakan untuk mengamati dan memperkuat data terhadap objek yang diteliti. Peneliti menggunakan metode observasi untuk memperoleh data sebagai berikut: kondisi lingkungan TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati, Sarana dan Prasarana yang

72 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Al Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 165.

ada di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati, dan penerapan metode Qiroati pada santri TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati.

- b. Metode Wawancara pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada wawancara, khususnya wawancara mendalam dan intensif. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas pada penelitian kualitatif, lebih lanjut dinyatakan bahwa cara utama yang dilakukan pakar metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang-orang adalah dengan wawancara mendalam dan intensif. Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi.⁷³ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Pengasuh untuk mengetahui sejarah berdirinya TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati, wawancara dengan Ustadz untuk mengetahui sistem pembelajaran dan penerapan metode Qiroati, wawancara dengan santri untuk mengetahui lebih dalam respon, sikap dan tanggapan santri dalam penerapan metode Qiroati.
- c. Metode Dokumentasi, Metode dokumentasi merupakan upaya mengumpulkan data yang berkenaan dengan persoalan yang diteliti berupa arsip yang telah dibuktikan. Dokumentasi tersebut bisa berupa surat, catatan harian, laporan maupun kasus yang pernah terjadi, dan khususnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.⁷⁴ Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan untuk melengkapi data yang dapat diperoleh dari observasi, wawancara dan catatan lapangan dari data tersebut dapat berbentuk foto, rekaman suara, video, catatan dan lainnya, yang semuanya itu berfungsi sebagai penguat peneliti dari hasil penelitian yang dihasilkan atau didapatkan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷⁵ Peneliti menggunakan prosedur analisis data untuk menganalisis data kualitatif ini, berikut prosedur

73 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Al Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 175.

74 Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 144.

75 Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2015 hlm. 272

analisis data : 1. Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 2. Reduksi Data Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.⁷⁶ Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik dan diverifikasi. 3. Penyajian Data Penyajian data merupakan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penyajian data berbentuk naratif. Tujuannya adalah agar mempermudah membaca dan menarik kesimpulan. 4. Penarik kesimpulan Penarik kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi penelitian berlangsung. Makna- makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya, sehingga validitas terjamin⁷⁷.

HASIL

Salah satu metode untuk membaca Al-Qur'an adalah metode Qiro'ati, metode ini diterapkan di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati untuk pembelajaran baca AlQur'an. Dari KH. Al-Habib Zamzuri selaku pengasuh/ketua lembaga mengatakan bahwa: TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati menggunakan metode Qiro'ati dalam pembelajaran Al-Qur'an ini sangat cocok karena metode Qiro'ati sendiri mudah dipahami serta memperhatikan makhroj bacaan tidak serta merta hanya asal membaca Al-Qur'an akan tetapi mengerti cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar". Hasil wawancara dengan Ustadzah KHomsatun selaku pengajar TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati mengatakan bahwa: "Metode Qiro'ati sendiri merupakan metode membaca Al-Qur'an yang praktis dan mudah dipahami oleh santri. Metode Qiro'ati sendiri bukan yang terbaik tapi bisa menghasilkan yang terbaik bisa dibuktikan dengan membaca Al-Qur'an dan setiap tahunnya mampu menghatamkan, jadi TPQ ini sudah pas dan yakin menerapkan metode Qiro'ati".

Proses Persiapan Pelaksanaan Metode Qiro'ati Sebelum proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan yang harus dipersiapkan pengajar adalah mengkondisikan para santri, baris dihalaman, memberikan

76 Basrowi dan Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm, 209.

77 Basrowi dan Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm, 210

motivasi pada anak, hafalan do'a sehari-hari dan surat pendek di halaman TPQ sebelum santri masuk ke ruang kelas masing-masing. Hal ini seperti diungkapkan oleh saudara Mustafit salah satu pengajar di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati, Wawancara dengan KH. Al- Habib Zamzuri Pengasuh/ketua TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati pada tanggal 15 Desember 2021, Wawancara dengan Ustadzah Zulaikah pengajar TPQ Darussalam pada tanggal 15 April 2021. Persiapan proses belajar mengajar wajib dilakukan didalam metode Qiro'ati membaca surat Al-Fatihah yang diberikan kepada kanjeng Nabi, Sahabat, Pendiri Qiro'ati, dan para pendahlu kita karena supaya mendapat keberkahan. didalam Qiro'ati tidak hanya membaca surat Al-Fatihah saja tapi untuk mengkondisikan santri dilakukan baris dan membaca surat pendek dan do'a sehari-hari.

Kegiatan Belajar Mengajar Berdasarkan hasil observasi, kegiatan pembelajaran dimulai pukul 14.00-17.30 WIB setiap hari kecuali pada hari jum'at libur. Pembelajaran di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati menggunakan metode klasikal, dengan pembelajaran membaca Qiro'ati, hafalan surat pendek, hafalan do'a- do'a, hadist-hadist nabi, dan ilmu tajwid. selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ustadzah Zuliana salah satu pengajar di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati memperkuat bahwa, Pembelajaran di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati menggunakan metode klasikal diawali dengan klasikal dan diakhiri dengan klasikal. saat pembukaan dengan salam, member hormat pada guru, membaca Qiro'ati dengan alat peraga secara bersama, setelah membaca peraga membaca Qiro'ati individu secara klasikal dan diakhiri dengan membaca do'a.

Cara Evaluasi Pembelajaran Qiro'ati Untuk mengetahui hasil dari pembelajaran, maka perlu dilakukan suatu evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan dalam pembelajaran di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati. Evaluasi pembelajaran Qiro'ati dilaksanakan saat kenaikan jilid oleh pengajar. Hal ini juga dikatakan oleh Ustadzah Zulaikah pengajar TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati pada tanggal 18 Desember 2021. salah satu pengajar di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati terkait evaluasi pembelajaran Qiro'ati di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati, yaitu Evaluasi hafalan do'a-do'a, kalau bacaan santri lancar tidak ada kesalahan atau sangat sedikit kesalahannya maka santri tersebut wajib mengikuti ujian kenaikan jilid, nantinya yang akan melakukan pengujian adalah kordinator kecamatan (korcam) dan wajib didampingi oleh orang tua supaya orang tua bisa melihat hasil belajar anaknya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan santri dalam menggunakan metode Qiro'ati dan ditambah dengan do'a-do'a yang sudah ditetapkan

oleh Qiro'ati pusat sebagai tambahan metode Qiro'ati. Jika santri belum sesuai dengan kriteria kenaikan jilid, lebih baik diulang hingga benar-benar memenuhi criteria yang sudah ditentukan Qiro'ati pusat.

Berdasarkan teori, hasil wawancara dan observasi bahwasanya penerapan metode Qiro'ati di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati merupakan metode yang cocok diterapkan di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati setelah berbagai metode digunakan sebelum metode Qiro'ati, dikarenakan metode Qiro'ati praktis dan mudah dipahami dan juga memperhatikan makhroj bukan sekedar membaca AlQur'an tetapi mengerti cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ada beberapa proses dalam penerapan metode Qiro'ati dalam pembelajaran baca Al-Qur'an di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati yaitu pertama, proses persiapan pelaksanaan pembelajaran, dengan melakukan pengkondisian santri, baris dihalaman dan membaca do'a sehari-hari dan surat pendek, yang kedua yaitu kegiatan belajar mengajar yang menggunakan metode klasikal, dan yang terakhir yaitu proses evaluasi pembelajaran Qiro'ati yang dilakukan oleh penguji dari kordinator kecamatan pada saat kenaikan jilid.

Faktor Pendukung Metode Qiro'ati di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati, Faktor pendukung merupakan hal sangat penting dalam sebuah proses belajar mengajar, karena dengan adanya faktor pendukung maka kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Menurut Khomsatun salah satu pengajar di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati dalam wawancara terkait faktor pendukung dalam metode Qiro'ati di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati adalah: Faktor pendukung adalah tempat yang nyaman, santri semangat dalam belajar, dukungan orang tua, dan guru yang sudah professional dengan dibuktikan adanya syahadah guru. Selain itu dari hasil observasi yang peneliti temukan dilapangan bahwasanya guru yang mengajar di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati semuanya merupakan guru yang professional hal ini dikarenakan sebelum diizinkan untuk mengajar Qiro'ati wajib bagi para pengajar mengikuti metodologi, ppl dan sudah hatam Qiro'ati jilid 1-6 ditambah dengan ghorib maupun ilmu tajwid, setelah syaratsyarat diatas terpenuhi dan dinyatakan lulus maka baru mendapatkan syahadah untuk mengajar Qiro'ati, akan tetapi jika syahadah tersebut tidak dimanfaatkan untuk persyaratan mengajar selama tiga bulan, syahadah tersebut dinyatakan hangus atau tidak dapat digunakan lagi sebagai persyaratan mengajar metode Qiro'ati, jika nantinya sudah hangus tetapi kemudian hari ingin mengajar Qiro'ati lagi maka harus mengikuti metodologi lagi dari awal sampai akhir lagi. Tidak hanya itu setiap

satu bulan guru wajib mengikuti pertemuan guru Qiro'ati untuk membahas permasalahan yang ada dilapangan untuk mencari solusi atau bertukar pikiran kepada sesama guru Qiro'ati yang membuat guru berpengalaman dan membuat santri menjadi berkualitas khususnya dalam membaca Al-Qur'an. Selain guru yang professional peneliti juga menemukan faktor pendukung lain yaitu tempat yang nyaman dan bersih dalam melaksanakan proses pembelajaran, karena tempat belajar mengajar menggunakan gedung baru dan memadai untuk melaksanakan proses belajar mengajar dan setiap hari melaksanakan piket wajib untuk para santri sehingga tempat belajar mengajar menjadi bersih, rapi dan nyaman.

Faktor Penghambat Metode Qiro'ati di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati Adanya faktor pendukung yang mempermudah kegiatan belajar mengajar, ada juga faktor penghambat yang dapat menghambat jalanya kegiatan belajar mengajar. Hasil wawancara dengan Rozikin pengajar di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati mengungkapkan bahwa, Faktor penghambatnya adalah tidak adanya sanksi bagi santri yang bermain, mengganggu teman dan tidak memperhatikan pengajar, waktu pembelajaran yang cukup singkat, ada santri yang terlambat akibatnya santri ketinggalan materi dan mengharuskan guru mengulang materi supaya santri benar- benar paham.

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi faktor penghambat adalah keterbatasan waktu, keterlambatan santri, dan santri kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Setelah peneliti melakukan observasi menemukan hambatan yang dialami oleh pengajar yaitu:

- a. Keterbatasan Waktu, Waktu yang digunakan untuk pembelajaran pada TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati setiap kelasnya yaitu 60 menit akan tetapi efektifnya hanya 40 menit, hal ini sangat menghambat proses pembelajaran dan kurang maksimal, akibatnya pembelajaran dipercepat dalam belajar individu atau sorogan dan santri kurang maksimal dalam menerima materi.
- b. Keterlambatan Santri Hambatan yang dialami para pengajar yaitu banyaknya santri yang terlambat dalam mengikuti pembelajaran sehingga santri ketinggalan materi, hal ini dikarenakan banyaknya santri yang rumahnya jauh dari TPQ dan tidak ada kendaraan untuk antar jemput santri, hal ini sangat mengganggu proses mengajar di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati sendiri.

- c. Santri kurang memperhatikan materi Dalam proses pembelajaran tidak sedikit santri yang tidak memperhatikan materi dan akhirnya mengakibatkan kelas ramai, santri asyik bermain sendiri, dalam hal ini mengganggu proses pembelajaran santri yang rajin atau yang serius dalam memperhatikan materi. Juga memakan banyak waktu dan tenaga guru, karena harus mengulang materi supaya santri benar-benar paham dalam materi yang disampaikan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode pembelajaran Qiro'ati di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati. Setelah ditelusuri, peneliti akhirnya mendapatkan hasil dari deskriptif kualitatif metode Qiro'ati yang diterapkan di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati. Data yang diperoleh peneliti dari teknik pengumpulan data dan pihak yang berkaitan akan dikaji dan dianalisis oleh peneliti.

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati menggunakan metode Qiro'ati sebagai metode pembelajaran membaca Al-Qur'an karena lebih praktis dan mudah dipahami dibandingkan metode lain yang digunakan oleh TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati, dan siswa dapat mengikuti tata tertib tajwid membaca makhraj, kelancaran dan tartil. Dalam persiapan sebelum kegiatan TPQ, para santri (siswa) berbaris didiepan TPQ sesuai dengan kelasnya masing-masing dan membaca surah Al-Fatihah, surah pendek, dan doa harian yang dipimpin oleh ketua yayasan. Proses kegiatan belajar mengajar membaca Al-Qur'an di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati dimulai dengan siswa memasuki kelas masing-masing, kemudian membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas, dan dilanjutkan dengan membaca alat peraga pada 15 menit diawal, selanjutnya 30 menit kemudian individu, dan 15 menit terakhir membaca lagi alata peraga bacaan. Cara mengevaluasi pembelajaran metode Qiro'ati yaitu dengan cara mengeluarkan kartu prestasi yang berisi hasil atau niali hasil tes setiap siswa membaca Al-Qur'an dalam setiap hari. Hal ini dilakukan dengan cara siswa membaca Al-Qur'an dengan menggunakan metode Qiro'ati dan guru mendengarkan dan menyimak. Jika ada kesalahan dealam membaca Al-Qur'an tersebut, maka siswa akan dibenarkan, kartu ini juga digunakan untuk memberitahu dan menginformasikan kepada orag tua siswa tentang prestasi belajar siswa tersebut.

Adapun faktor pendukung penerapan metode Qiro'ati TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati adalah tempat belajar mengajar yang nyaman dan strategis, fasilitas yang memadai, guru yang profesional, dorongan orang tua dan semangat siswa yang tinggi untuk belajar membaca Al-Qur'an menggunakan metode Qiro'ati. Kendala atau faktor penghambat penerapan metode Qiro'ati di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati adalah siswa tidak memperhatikan materi, sering terlambat masuk kelas, dan pada saat hujan siswa malas untuk berangkat, dan juga siswa yang tidak memiliki kendaraan.

Penerapan metode Qiro'ati di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati merupakan metode membaca Al-Qur'an yang secara langsung menekankan pada praktik membaca. Sejak tahun 2005 peneliti sendiri menggunakan metode Qiro'ati di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati yang diharapkan dapat mempermudah siswa dalam membaca Al-Qur'an dengan berbasi makhroj dan ilmu tajwid yang baik.

Prinsip metode Qiro'ati bukanlah mengeja tetapi membaca langsung atau lancar, cepat, tepat, dan benar atau juga disingkat dengan LCTB. Metode Qiro'ati juga memiliki beberapa ciri, yaitu metode pengajarannya tidak dituntun, hanya menunjuk bacaan, guru tidak dapat menuntun siswa dalam bacaan. Mengajar yang dilakukan dalam persiapan sekolah sebelum proses belajar mengajar yaitu dengan siswa berbaris di halaman dengan membaca doa harian dan membaca surah-surah pendek bersama-sama dengan siswa lainnya. Selain itu guru juga harus mampu mengelola kelas sesuai dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Pembelajaran membaca Al-Qur'an menggunakan metode Qiro'ati strategi yang digunakan dalam metode Qiro'ati di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati ini dilaksanakan setiap hari kecuali hari Jum'at, mulai pukul 15.00 sampai 17.00 WIB melalui penggunaan metode klasikal individu. Metode evaluasi ini untuk setiap pertemuan dan peningkatan kelas atau jilid yang ditulis dalam buku nilai atau prestasi siswa. Jika siswa atau santri dapat fasih dalam membaca Al-Qur'an dan tidak ada kesalahan pada pembacaan jilid atau paling banyak tiga kesalahan, maka siswa atau santri akan dapat naik jilid selanjutnya., tetapi ketika siswa atau santri banyak kesalahan pada saat ujian maka memperbaiki atau mengulangi jilid dan tidak dapat naik jilid selanjutnya. Penerapan metode Qiro'ati ini berpengaruh baik karena siswa atau santri dapat membaca Al-Qur'an sesuai dengan makhroj dan kaidah ilmu tajwid yang benar, hal tersebut menggambarkan keberhasilan penerapan metode Qiro'ati di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati.

Pada penelitian di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati yang menerapkan metode Qiro'ati mempunyai faktor pendukung dan penghambat, mulai dari proses observasi, wawancara bahkan dokumentasi yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dengan ketua lembaga atau pengasuh dan pendidik. Dalam proses belajar mengajar pun tidak selalu sesuai dengan rencana. Pemebrian pengetahuan dan motivasi serta bimbingan berharap mampu meningkatkan kemahiran dalam membaca Al-Qur'an dan menerapkan sikap yang baik sehingga dapat membentuk pribadi siswa atau santri yang sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat. Hal ini, tidak terlepas dari pedoman umat muslim yaitu Al-Qur'an.

Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan metode Qiro'ati yaitu :

1. Faktor Pendukung

- a. Faktor yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dalam metode Qiro'ati di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati yaitu tenaga pendidik yang professional dengan berupa bukti adanya syahadah Qiro'ati. Selain itu sebagai pembimbing, pendidik, juga memotivasi santri atau siswa agar terus merasa haus akan ilmu. Selain itu, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai dilakukannya pembacaan surahpendek dan doa harian dihalaman gedung TPQ dengan barisan sesuai kelas masing-masing, , tujuannay agar santri mampu terbiasa sehingga hafal surah-surah pendek serta doa harian. Kemudian, santri atau siswa masuk kelas dan membaca peraga Qiro'ati dan klasikal individual.
- b. Santri Pelaksanaan belajar mengajar membaca Al-Qur'an, santri merupakan faktor pendukung, santri yang masuk tepat waktu dan tidak terlambat, aktif dalam pembelajaran, dan taat kepada pengajar. Dan banyak juga santri yang rajin belajar dirumah sehingga pada saat kalsikal individu atau sorogan santri sudah siap dan lancar hal ini mempermudah guru dan membuat efektif dalam pembelajaran. Rata-rata hasil prestasi santri dalam kenaikan jilid dua bulan, presentasenya dalam satu kelas ada 20 santri yang bisa naik jilid dalam waktu dua bulan sekitar 19 santri berhasil naik jilid, hasil ini membuktikan tingkat keberhasilan santri dalam menggunakan metode Qiro'ati sangat tinggi.

- c. Sarana dan Prasarana Salah satu faktor pendukung yang disediakan adalah sarana dan prasarana yaitu tempat yang luas, strategis, ruang belajar nyaman, kantor dan tempat nyaman dari lalu lalang kendaraan sehingga tidak terjadi kebisingan suara kendaraan saat proses belajar mengajar berlangsung karena jalan raya masih pedesaan nyaman dan asri. 4) Orang Tua Orang tua menjadi faktor pendukung karena dapat memberi motivasi terhadap santri agar rajin dalam mengikuti setiap pembelajaran di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati. Perhatian orang tua juga dibutuhkan, seperti mengantar putra-putrinya ke tempat belajar, adanya buku penghubung antara orang tua dan guru, dan mendampingi anak saat ujian kenaikan jilid. B
2. Faktor Penghambat, Selain adanya faktor pendukung ada juga faktor penghambat. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, faktor penghambat dalam penerapan metode Qiro'ati di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati yaitu:
 - a. Waktu Belajar Faktor yang menghambat dalam kegiatan pembelajaran adalah keterbatasan waktu pembelajaran, yaitu 60 menit akan tetapi waktu yang tersedia hanya 40 menit, sehingga pembelajaran santri kurang maksimal, akhirnya dampak dari keterbatasan waktu ini mengakibatkan tertundanya kenaikan jilid.
 - b. Santri Santri yang datang terlambat pada saat proses pembelajaran, minat yang tidak tertentu dan paksaan dari orang tua sehingga membuat santri menjadi ramai sendiri saat proses pembelajaran, hal ini menjadi faktor penghambat pembelajaran membaca Al-Qur'an. Santri yang tidak aktif dan tidak mau mengulang sehingga tetap berada pada jilid yang sama juga merupakan penghambat dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an.
 - c. Minat Minat santri yang naik turun menjadi salah satu faktor penghambat, dan juga santri yang bisa cepat menyerap materi dan bisa naik jilid tapi malas bisa juga menjadi faktor penghambat dalam kenaikan jilid.
 - d. Sanksi/Hukuman Tidak adanya sanksi atau hukuman bagi santri yang ramai sendiri dan mengganggu sesama teman juga menjadi faktor penghambat pembelajaran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Metode Qiro'ati digunakan di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati untuk belajar membaca Al-Qur'an. Sebelum melanjutkan kegiatan belajar membaca Al-Qur'an di TPQ, siswa diminta untuk berbaris di halaman dan mengingat doa harian dan surah pendek, kemudian berbaris untuk masuk kelas dan bersiap-siap untuk melakukan kegiatan yang harus dilakukan, hal tersebut yaitu kartu penilaian siswa, berpartisipasi dalam kegiatan klasikal, seperti membaca Al-Qur'an sesuai kelas (jilid). Setiap pertemuan pembelajaran akan dievaluasi, dan hasilnya ditulis di buku nilai siswa, yaitu ketika nilai jumlah siswa meningkat, dan ketika nilai ujian siswa meningkat. Hal tersebut ditulis di buku nilai siswa. Selain itu, bagi siswa yang ingin mengikuti imtihan dan khataman, dari pihak koordinator yang menjalankan atau melakukan tes, dari hasil tersebut merupakan bukti keberhasilan metode Qiro'ati.

Dalam mempelajari Metode Qiro'ati ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam membaca Al-Qur'an di TPQ Ittihadul Athfal Sukolilo Pati. Faktor pendukungnya antara lain yaitu guru profesional dibuktikan dengan mempunyai syahadah, guru atau pengajar yang memperlakukan siswa dengan sabar, tegas, baik hati dan berkompeten di bidangnya, orang tua dan guru yang selalu mendorong siswa untuk tekun belajar, tempat pembelajaran yang luas dan strategis, kecocokan antara siswa dan guru, serta dukungan dari orang tua siswa dan lingkungan masyarakat sekitar. Faktor penghambat antara lain yaitu siswa terlambat, siswa yang kurang konsentrasi, dan waktu yang relatif singkat sehingga menghambat siswa dalam belajar Al-Qur'an dengan metode Qiroati.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qattan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Bogor: Litera AntarNusa, 2013.
- Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ghony, M. Djunaidi. Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Habib, Abdullah. dkk., *Pak Dachlan Pembaharu dan Bapak TK Al-Qur'an Semarang*: Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Raudhatul Mujawwidin, 2000.
- Mahrhan, Jamaluddin. Dkk. *Al-Qur'an Bertutur tentang Makanan dan Obat-Obatan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.
- Mahyudi, Syaifullah. *Permata Al-Qur'an*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Murjito, Imam. *Pedoman Metode Praktis Pengajaran Ilmu Baca Al-Qur'an Qiraati*. Semarang : Koordinator Pendidikan Al-Qur'an, 2000.
- Nata, Abuddin. *Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers, 1993.
- Qiroati Pusat "Selamat Datang Qiraaty: Pesan-Pesan KH. Dachlan Salim Zarkasyi"
diakses pada tanggal 15 Agustus 2020, . <http://qiraati.org/pusat.>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020.
- Rahim, Farida. *Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011.
- Sudjana, Nana. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Argesindo, 1995.
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2015.
- Suwardi, Dkk. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Examining the Future of Character Education in Islamic Education in the VUCA Era

Yusuf Falaq

IAIN Kudus

yusuffalaq@iainkudus.ac.id

Abstrak

Artikel ini merupakan hasil pemikiran tentang posisi pendidikan karakter dalam bingkai pendidikan islam di Era VUCA. Kompleksitas tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan semakin beragam. Tuntutan agar dapat menyesuaikan dengan integrasi dan kemajuan teknologi mutlak dalam pendidikan, termasuk dalam pendidikan islam. Revitalisasi dan modernisasi pendidikan islam berbasis pendidikan karakter menjadi sebuah kebutuhan zaman milenial. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan karakter erat kaitannya dengan nilai kesatuan moral dari masyarakat yang saling terkait demi mewujudkan tujuan bersama. Pada sisi lain, di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity) membuat perubahan yang terjadi seringkali diiringi dengan ketidakpastian, kompleksitas yang tidak menentu, serta ambiguitas yang tidak mudah dijabarkan. Revitalisasi dan modernisasi pendidikan islam juga turut mengalami terimbas akan hal ini. Transformasi pendidikan islam yang meliputi manajemen, penguatan kepemimpinan hingga reformasi kebijakan pendidikan islam mutlak diperlukan agar terbentuk generasi yang unggul berdaya saing, serta mampu menghadapi perubahan maupun ketidakpastian dalam era VUCA dimasa kini maupun dimasa depan.

Kata Kunci: Pendidikan karakter; Pendidikan Islam; VUCA

Abstract

This article is the result of thinking about the position of character education in the frame of Islamic education in the VUCA Era. The complexity of the challenges that must be faced in education is increasingly diverse. The demand to be able to adapt to the integration and absolute technological progress in education, including in Islamic education. The revitalization and modernization of Islamic education based on character education is a necessity for millennials. In the life of the nation and state, character education is closely related to the value of the moral unity of the interrelated community in order to realize a common goal. On the other hand, in the VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) era, changes that occur are often accompanied by uncertainty, uncertain complexity, and ambiguity that is not easily explained. The revitalization and modernization of Islamic education has also been affected by this. The transformation of Islamic education which includes management, strengthening leadership to reform of Islamic education policies is absolutely necessary in order to form a superior generation that is competitive, and able to face changes and uncertainties in the VUCA era today and in the future.

Keywords: *Character Building; Islamic education; VUCA*

INTRODUCTION

Islamic education is the oldest education in Indonesia with a history (Faizin, 2017), has experienced a long period and persists with its methods even today. Today, being tested with the advent of the digitalization era and rapid technological changes, this is a new problem that must be faced in addition to the existing classic problems. According to Mustofa Rembangy (2010): "Islamic education problems are influenced by internal factors including power relations and educational orientation, curriculum aspects, learning approaches/methodologies, HR professionalism, costs, and the educational environment. While external factors, namely the phenomenon of globalization-multicultural, poverty, and government policies.

According to experts in Umiarso and Asnawan (2017) identify problems that arise due to: First, the orientation of the curriculum format is not clear. Second, the implementation level is studying classical science and so it does not touch modern science. Third, be lulled by past glories. So it is difficult to make updates (Nanik Masruroh and Umiarso, 2011). This resulted in stakeholders only westernizing Islamic education by taking the concept of western education carelessly and making modest adjustments (Umiarso and Asnawan, 2017).

Fourth, the learning model maintains a verbalistic intellectual approach and negates educational interactions and doctrinal humanistic communication (Nanik Masruroh and Umiarso, 2011). So that students have difficulty developing critical and creative thinking skills according to the demands of modern education (Sulistiyowati & Rohman, 2020) because of teacher and student interactions such as subjects and objects. Fifth, the essence of Islamic teachings is interpreted as a matter of sharia, muamalah, and aqidah, so that they do not respond to social realities. As a result, students are far from their socio-cultural environment.

Sixth, conceptual-theoretical problems. The dichotomy between religion and non-religion, revelation and reason, the world and the hereafter. Seventh, teaching materials and materials are not in accordance with the development of contemporary literature. Eighth, the learning method focuses on rote memorization, not logical thinking processes. Ninth, the error of the educator's perspective on students. So that the educational process is disoriented to the discovery of the identity of intelligent, creative, critical learners. Tenth, the low quality of intellectual, technological, and professional educators. Eleventh, the form of a secular curriculum but few in the area of applied science, skills

or technology, and its studies at the level of rational, intellectual, ethical, and irfani. Twelfth, the occurrence of western epistemological imperialism against Islamic thought. Thirteenth, Islamic education is generally considered a second class education.

Problems that make it sad are cases of corruption in educational institutions (Widianto, 2015) and even in the ministry of education (Hairani, 2013; Prabowo, 2019). This is due to (1) the weak quality of human resources, (2) the disintegrity of education providers (Rembangy, 2010). (3) Poor Education Management. (4) Capitalization of education.

On the other hand, the penetration of character education at the student level has decreased/not reached the level of implementation practice. As a result, moral decadence occurs, due to new cultural phenomena as a result of globalization and technological sophistication (Basyari, 2019) that are not in accordance with the norms that exist in society. Immoral cases among teenagers/students, drugs, brawls between students, motorcycle gangs, content abuse, clicks and share-hoaxes on social media, creating useless and disturbing video application entertainment content are the excesses of the lack of character education for students.

From these changes, it can be identified that the world is starting to shift into the VUCA era. VUCA stands for Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. The term VUCA was introduced around 1987 which is based on the leadership theory developed by Warren Bennis and Burt Nanus (Sinha and Sinha, 2020). Subsequently, this term developed widely and became a topic of discussion in other sciences, not only in the field of leadership. VUCA is meant to be the embodiment of a world that continues to evolve, change and never stagnate. The pace of change occurring today is at an unpredictable pace, and the complexity, ambiguity and uncertainty of how it will lead to change is unpredictable.

On the other hand, the community also demands Islamic education for the output of students, namely superior humans who have a high creative, productive, competitive and religious spirit who are the catalysts of the three entrepreneurial souls that are fostered by students in the world of education.

Moving on from the complex problems above, the goal to be conveyed is that the problem of character education in Islamic education should not be viewed as a matter of course by the existing stakeholders, especially in the VUCA era, so that Islamic education can compete and become a new reference in the implementation of education in the country. So that education that forms superior students such as educational ideals can be achieved.

LITERATURE

The literature review in this article is based on several things, including: *First*, research on Islamic education conducted by Faizin (2017) states that Islamic education with a long history in Indonesia has experienced various challenges and has persisted with its methods to date. Faizin argues that Islamic education is being tested with the advent of the era of digitalization and rapid technological change. This is a new problem in addition to the existing classic problems. Gunawan (2015) mentions almost the same thing about the challenges of Islamic education. Gunawan (2015) argues that in the last 10 years, the transformation of Islamic education has become a role model in education in Indonesia. This is marked by the emergence of religion-based schools such as the Tahfidz school, the Integrated Islamic School, the Modern Islamic Boarding School-based school and various program offers such as the Entrepreneurship Islamic Boarding School that are increasing from time to time. Jarkasih (2019) states that if you want to progress, Islamic education must have three elements of a learning process that are foreign to the old culture, namely: interactive, participatory and discourse. Therefore, Jarkasih (2019) suggests a new pattern of learning that makes it easier for students and teachers, so they will be more motivated, think dynamically, creatively, innovatively, and have fun.

Second, research on character education conducted by Falaq (2020) which states that character education must include aspects of knowledge (cognitive), attitude (affective), feelings (felling) and action (action). Character education is implicitly a system of inculcating character values for citizens which includes components of knowledge, awareness or willingness, and actions to implement these values, both to God Almighty, oneself, the environment and the nation so that they become citizens. intact., Yusuf Falaq. In line with this, Oxfam (2015) says that character education is when they are able to become global citizens who have a sense of their own role as citizens of the world; respect and value diversity; willing to act to make the world a more just and sustainable place; take responsibility for their actions.

Third, Research on the VUCA Era conducted by Sinha (2020) which states that the world is beginning to shift into the VUCA era. VUCA stands for Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. The term VUCA was introduced around 1987 which is based on the leadership theory developed by Warren Bennis and Burt Nanu (Sinha, 2020). VUCA itself, described by Aribowo with four components of change, (1) Volatility. The changes taking place at this time could be said to be at an unfathomable speed. (2)

Uncertainty. In the process of achieving goals, uncertainty will always be found at every stage. Uncertainty can be controlled with information. (3) Complexity. Complexity arises along with developments that continue to occur. The more development that is carried out, the more layered the components that fill, the more complex things are faced. (4) Ambiguity. At this time, it is difficult to find a clear decision that leads to one point.

Third, Research related to Era Society 5.0. Hayashi (2017) mentions that Society 5.0 will have an impact on all aspects of life ranging from health, urban planning, transportation, agriculture, industry and education. Almost a similar opinion expressed by (Government, 2018) era of Society 5.0 can be interpreted as the concept of a human-centered and technology-based society. With the birth of the era of society 5.0, it is hoped that technology will primarily in the field of education not change the role of teachers in teaching moral education, morals and role models for students. Society 5.0 is a new concept of life in society. Era Society 5.0 is expected to be more comfortable for humans. Meanwhile, Ozdemir (2018) states that Society 5.0 will have an impact on all aspects of life ranging from health, urban planning, transportation, agriculture, industry and education.

METHODOLOGY

The research method uses library research by collecting data from writings (literacy) that are related to the topics discussed, namely Islamic Education in Era 4.0. The researchers took the data from documentation in the form of books, research journals, and supporting articles. The discussion method uses descriptive-analytical methods, namely explaining and elaborating the main ideas related to the topics discussed. Then present it critically through primary and secondary library sources related to the theme (Sugiyono, 2014)

DISCUSSION

1. Character Education in Islamic Education

Education as its target nature is human, it contains complexity of aspects and traits. Based on the complex nature, there are no adequate limits in explaining the meaning of education in full. The limits on education vary from experts and their contents differ from one another. Based on its function, education can be divided into 4 functions:

- a. As a process of cultural transformation. Education is defined as cultural inheritance activities from one generation to the next
- b. As a process of personal formation. Education is defined as a systematic and systemic activity directed at the formation of the learner's personality
- c. As a process of preparing citizens. Education has the meaning of a planned activity to equip students to become good citizenship
- d. As a workforce preparation. Education is defined as the activity of guiding students the basic ability to work (Tirtarahardja, 2005).

Education is closely related to life and values that exist in society and culture. Dewey cited by Rahmi (Rahmi, 2013) states education as a process of forming intellectual and emotional fundamental abilities towards nature and fellow humans. Meanwhile, Ghufron (Ghufron, 2010) states that character is the identity, personality and character inherent in a person. Character is always attached to the physical and psychological dimensions of individuals. According to him, the nation's character is the identity of the results of the accumulation of the characteristics of the citizens of a nation.

Character education by Thomas Likona is understood as character which involves aspects of knowledge (cognitive), attitude (affective), feeling (feeling) and action (action). Character education is implicitly a system of instilling character values for citizens which includes a component of knowledge, awareness or will, and actions to carry out these values, both to God Almighty, self, environment and nationality so as to become a complete citizen (Afandi, 2016).

The mindset of developing character education places education as one of the basic strategies of nation's character development. Citizenship education as a compulsory subject in Higher Education has a very strategic position to support the success of character education.

Character building is carried out with a systematic and integrative approach involving families, education units, government, civil society, legislative members, mass media, the business world and industry as shown in the following chart:



Figure 1. Flowchart of Character Development

Source: (Character Building Book, Ministry of National Education, 2010)

Based on the flowchart of the chart above, education is one of the basic strategies of building the nation's character which in its implementation is carried out simultaneously with several other strategies. Dissemination or awareness, empowerment, acculturation and cooperation of all components of the nation are the scope of the strategy carried out (Nasional, 2010).

2. The Era of Society 5.0 and The Era of VUCA

Humans are faced with technology that allows access in cyberspace that feels like physical space. In technology society 5.0, AI supports human work (Hayashi, 2017). Unlike the case with the 4.0 era which emphasizes business alone, but with the era of society 5.0 technology created new values that will eliminate social inequalities, age, gender, language and provide products and services specifically designed for a variety of individual needs and the needs of many people.

The basic principle of the era of society 5.0 is as a solution to the problems created during the industrial revolution era 4.0, including the problem of reduced socialization between communities, employment, and other internalization impacts (Faruqi, 2019). Technology in the era of society 5.0 is expected to be able to prosper the lives of all humans. In the field of

education, for example, students may be in the process of learning directly dealing with robots specifically designed or controlled by lecturers from a distance. It is not impossible the teaching and learning process can occur anywhere and anytime, whether there is a teacher or not, as shown in the figure 2.

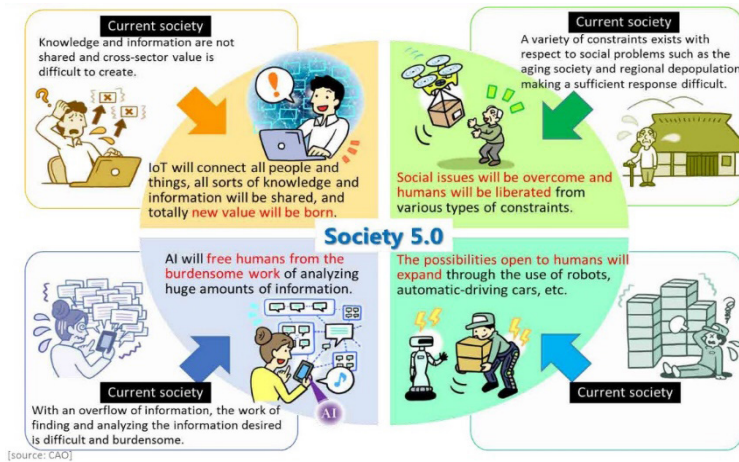


Figure 2. Changes to Society 5.0

Source: (Government, 2018)

The VUCA concept, which stands for Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity, is a situation where change occurs and is full of uncertainty (Aribowo and Wirapraja, 2018). VUCA components can be described in the following points;

- a. Volatility. The changes taking place at this time could be said to be at an unfathomable speed. The frequency, magnitude and estimation of these changes cannot be predicted, therefore, this is the cause of instability. Volatility does not only occur in the fields of technology and business, but also socially and economically. These factors affect the rate of change.
- b. Uncertainty. In the process of achieving goals, uncertainty will always be found at every stage. Uncertainty can be controlled with information. The more information and understanding that is gathered, the less likely it is that uncertainty will arise. However, even though a large amount of information has been gathered as a form of anticipation,

there are many unknown variables that could influence the results. There are many impenetrable boundaries that create these unexpected variables.

- c. Complexity. Complexity arises along with developments that continue to occur. The more development that is carried out, the more layered the components that fill, the more complex things are faced.
- d. Ambiguity. At this time, it is difficult to find a clear decision that leads to one point. There will always be two sides to anything. In contrast to uncertainty, ambiguity refers more to the message conveyed by the information obtained. The information obtained does not refer to a single purpose; so therein lies the ambiguity. Meanwhile, uncertainty is more influential on the presence or absence of information that can affect the results to be achieved.

Studying how the VUCA elements affect change, if it is associated with character education in Islamic education, this can be a challenge in itself in how to respond to the changes that occur.

3. Character Education in Islamic Education in the VUCA Era

Islamic education has so far made a transformation at the paradigm, method and strategy of developing Islamic education so that it becomes current and relevant to global situations and conditions. And remain in the corridor of educational ideals and goals that rely on the Qur'an and Hadith and are based on national education goals, state foundations and philosophy. Adhering to the principle of "maintaining good traditions and adopting better novelties" is the mantra of a progressive paradigm, continuity, openness with innovation to transfer knowledge and technology that is beneficial for the development of Islamic education.

In the last 10 years, Islamic education has continued to develop into a role model for education, marked by the emergence of Islamic religion-based schools such as the Integrated Islamic School (Rahman, 2019), Boarding Schools, Modern Islamic Boarding Schools, and Tahfidz Schools. Not only changes in "face", excellent content and programs are also offered, such as the entrepreneurship boarding school program (Gunawan, 2015), and others.

If this is done with the right process approach, it will produce graduates who are productive, researchers, inventors, explorers, and developers of

knowledge. The logical consequences of this are (1) Eliminating the paradigm of the dichotomy of religion and general science. (2) Changing the pattern of indoctrinal Islamic education into a participatory pattern of education. (3) Changing the ideological paradigm into a scientific paradigm based on the revelation of Allah swt. (4) It is necessary to reconstruct the curriculum.

The paradigm of Islamic education tends to be more oriented towards the humanities and social sciences, whereas modern science (physics, chemistry, biology and mathematics) and the development of advanced technology are absolutely necessary. This science has not received the appreciation and proper place in the Islamic education system (Azra, 2014). This means that the integration of Islamic education in the perspective of transformation towards quality Islamic education combining science, spirituality with character education as a characteristic of a nation is absolutely necessary. Education in Islam itself is an integration between the power of reason (rational), empirical, and sourced from revelations originating from the Qur'an and Hadith.

The trend of education returns to religiosity (Umiarso and Asnawan, 2017) given a touch of global insight, the Islamic generation must be prepared for global constellation competition. So that the transformation of the goals of Islamic education is no longer just creating workers, but humans who are able to compete (Azra, 2014) who create their own opportunities (jobs) on an innovative, creative, character and entrepreneurial spirit (Rembangy, 2010). So that it has a direct impact on the welfare, progress, and independence of the nation's economy.

Changes in Islamic education will automatically change the methods in teaching and learning that are carried out on students, these changes include first, critical and creative learning with problem solving, because in human life the ability to analyze, find ways to overcome them, and try to find solutions is needed. formulated (trial and error). Educators as facilitators, mentors, motivators, and movers towards dialogical learning. While students are active subjects, learning partners, and individuals who have experience.

Second, changing the character of the subject in learning. The teacher paradigm as centered learning must be transformed into a teacher as a professional who guides and directs learning to students so that they are able to express opinions, think systematically, appear confident, and be able to solve problems with their knowledge. Third, learning resources are not limited to textbooks, but can be based on the experiences experienced by students, the internet, print media, electronics, or other media (Rembangy, 2010).

Related to this, Drijvers, Boon, and Van Reeuwijk (2010) suggest three didactic functions of technology in Islamic Education Learning, namely: (1) Technology for doing, functions as a substitute for paper and pencil media in learning activities. (2) Technology for practicing skills, serves as a learning environment to hone skills in, (3) Technology for developing conceptual understanding, serves as a learning environment for developing conceptual understanding. If technology is well integrated into learning, it will bring up new, contemporary and fun learning patterns. Amin Abdullah said that “creative imagination” is part of how to bring together ideas, even two different framework concepts, so that they are arranged into a fresh configuration (Abdullah et al., 2014).

According to H.A.R. Tilaar (2012, pp. 151–156) to face the era of globalization it is necessary to carry out an educational revolution in Indonesia, the areas that need to be revolutionized are: (1) Science education, Indonesian students have won many world science competitions, Olympics, and robotics. However, based on the 2019 PISA (The Program for International Student Assessment) test, the quality of literacy, science, and mathematics is far below China, Singapore, and Maccau (Harususilo, 2019). (2) Creativity Education. In the era of the sea of information, it is necessary to filter information and grow new ideas. Japan and Singapore prioritize creativity education for students, so that they become developed countries without abundant natural resources. (3) Digital education, using information technology, namely computers and application programs (Kurniawan, 2019) contained in it. (4) Higher Education, this institution has an important role in maintaining, developing, and pioneering the application of science. (5) Character education must be sourced from what students do every day, not only at the theoretical level at school.

Modernization in education becomes a futile thing if it is not supported by the competence of educators, because they are the spearhead of the implementation of education. For this reason, educators will be required to: First, have mastery of digital technology (Tilaar, 2002). Second, agents of cultural transformation. Third, pedagogical development (Lince, 2016). Fourth, personality-social competence. Fifth, Professional Development. Sixth, innovative-creative-adaptive (Umiarso and Asnawan, 2017). In addition, strengthening Islamic educational institutions also needs attention, including strengthening Islamic education management, strengthening Islamic education leadership, and reforming educational policies with reference to a global education curriculum that has proven its success and is integrated into an Islamic education curriculum that breathes character education in it.

Character education is integrated in every lesson by inculcating an attitude of love for the homeland, culture, language, customs and being an agent of preserving the unity and national unity through national insight. Students can apply in the association between students, students with teachers, students with employees and the community and vice versa. This is necessary because the life of the millennial society is borderless.

Therefore, Islamic education is transformed by being oriented to character education. The application of character education methods for children, according to AlGhazali (Latif, 2016) by: (1) Lectures, (2) Guidance and memorization, (3) Discussions, (4) Storytelling, (5) Exemplary, (6) Demonstrations, (7) Rihlah (a journey to get moral education), (8) Giving assignments, (9) Mujadah and riyadhoh, (10) Questions and answers, (11) Giving gifts and punishments. Meanwhile, according to Ratna Megawangi, the application of the character education method is done by knowing, loving, wanting and doing (knowing the good, loving the good, desiring the good, and acting the good), character is something that exists that must be known, loved, desired and done.

The implementation of character education in madrasas can be done by the method of (1) Teaching, namely providing direct understanding or inviting speakers. (2) Exemplary, effective learning in children is to see, analyze and imitate. (3) Determining priorities, so that the results are evaluated by setting standard characters, which must be understood by students, parents and the community. (4) Priority praxis, education is not only knowledge and skills, but values virtues in people's lives such as getting used to politeness and honesty. (5) Reflection, the opportunity for students to convey understanding of character through writing that can be accessed by others (Koesoema, 2011).

Curriculum changes in Islamic schools are carried out by dividing into three groups: (1) Science group, (2) Language and skills group, (3) Character and religious study group. Groups of science subjects include mathematics, integrated science (biology, physics, chemistry), integrated social studies (history: world, Indonesia and Islamic history, economics, and geography).

Language and Skills group includes: Indonesian, English, Foreign Language: Arabic, Mandarin or other international language as an option, Local Language, is an implementable subject within the scope of the school, for example on Mondays all school members are required to use Indonesian, Tuesday Bahasa Indonesia English, and so on. Meanwhile, skills, including operating application programs, computing, networking, simple technology and robotics, are required extracurricular options as well as sports, arts and local wisdom culture.

Character groups and religious studies emphasize the daily practice of students, such as the application of siddiq, tabligh, fathonah, trustworthiness in relationships, good citizenship attitudes based on religious attitudes in everyday life, and applying the attitude of carrying out daily worship both in the school environment at home and in the community. In madrasas themselves, the portion of learning time for religious group subjects (Akidah Akhlak, Fiqh, Qur'an Hadith, and Islamic History) is very small, namely 8-12 hours of lessons per week. Such a portion assumes that students at home also take religious education in informal channels, such as madin, recitation in mosques, in surau/musholla, and local religious leaders. If the madrasa is integrated with the Islamic boarding school, it may be appropriate, otherwise, the output of religious scholarship has not met expectations.

Education is no longer oriented to passing grades but the results of a comprehensive assessment include mastery of science, language and skills, character and religious knowledge. Equipping students with life skills including entrepreneurial, creative, innovative and independent generations who can solve problems in life, create jobs with original ideas.

CONCLUSION

In seeing the future, an educator in the VUCA era must think about all possibilities. The possibilities that will occur can be realized in the form of educational transformation. Stakeholders of Islamic education must make changes to the face and content of the curriculum in accordance with the demands of the times as well as a bulwark against moral decline. Changes in moral content in character education with competitive advantages, cognitive, affective, psychomotor and spiritual. On the same side, the formation of innovative, creative, democratic, character, entrepreneurial and religious students must continue to be encouraged by all parties. The forms of transformation of Islamic education include: Improvement of applicable regulations; Future needs oriented education; Curriculum review and improvement; Improving the Quality of Management and Teacher Competence, School Leadership Capacity and Capability; Community involvement in developing schools; and Digitizing Academic, administrative and learning services in schools.

REFERENCES

- Abdullah. 2017. "Pendekatan Dan Model Pembelajaran Yang Mengaktifkan Suswa." *Jurnal Edureligia* 1(1).
- Afandi, Rifki. 2016. "Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar." *PEDAGOGIA* 1(1):85–98.
- Aribowo, H., and A. Wirapraja. 2018. "STRATEGI INOVASI DALAM RANGKA MENJAGA KEBERLANJUTAN BISNIS DALAM MENGHADAPI ERA VOLATILITY, UNCERTAINTY, COMPELXITY, DAN AMBIGUITY (VUCA)." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)* 9(1):51–58.
- Basyari, I. 2019. "Sebagian Kasus Kenakalan Remaja Dipicu Media Sosial." *Kompas*, December 20.
- Faizin, I. 2017. "LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN DAN TANTANGAN GLOBAL." *Journal of Chemical Information and Modeling* 8(9):1–18.
- Falaq, Yusuf. 2020a. "Education of Citizenship in Higher Education as A Fortress of Nation Characters in Facing Era Society 5.0." *Journal of Educational Sciences* 4(4):802. doi: 10.31258/jes.4.4. p. 802-812.
- Falaq, Yusuf. 2020b. *METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN IPS*. Kudus: JF Press.
- Faruqi, U. A. 2019. "Survey Paper: Future Service in Industry 5.0." *Jurnal Sistem Cerdas* 2(1):67–79.
- Ghufron, Anik. 2010. "Integrasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa Pada Kegiatan Pembelajaran." *Cakrawala Pendidikan* 29(1):13–24.
- Government, C. O. 2018. *Society 5.0*. Japan.
- Gunawan. 2015. *Percikan Pemikiran Pendidikan Islam: Antologi Konfigurasi Pendidikan Masa Depan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hairani, L. 2013. "Korupsi Di Kementerian Pendidikan Capai Rp 700 M." *Tempo*. Co.
- Harususilo, Y. E. 2019. "Skor PISA Terbaru Indonesia, Ini 5 PR Besar Pendidikan Pada Era Nadiem Makarim." *Kompas*, December 4.

- Hayashi, H. S. 2017. "International Standardization for Smarter Society in The Field Of Measurement, Control And Automation." in *56th Annual Conference Of The Society Of Instrument And Control Eng.*
- Jarkasih, Sodikin. 2019. "Education Answers the Millennial Challenge." in *Proceedings of the First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)*. Paris, France: Atlantis Press.
- Koesoema, Doni A. 2011. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak Di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Latif, L. 2016. *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Pendidikan Akhlak*. Surabaya: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Lince, R. 2016. "Strategi Peningkatan Profesionalisme Guru Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Digital." Pp. 164–79 in *Prosiding Temu Ilmiah Nasional Guru (Ting), VIII*.
- Masruroh, N., and Umiarso. 2011. *Modernisasi Pendidikan Islam – Ala Azyumardi Azra*. Jakarta: Arruz Media.
- Oxfam. 2015. "Education for Global Citizenship. A Guide for School." *Oxfam GB* 1(5).
- Özdemir, V. 2018. "Birth Of Industry 5.0: Making Sense Of Big Data With Artificial Intelligence,'The Internet of Things' And Next-Generation Technology Policy." *Omics: A Journal of Integrative Biology* 22(1):65–76.
- Prabowo, D. 2019. "Menag Fachrul Razi Singgung Soal Korupsi, Ini 4 Kasus Di Kemenag." *Kompas*, November 1.
- Rahmi. 2013. "Kontribusi Matematika Dalam Pembentukan Karakter Siswa." *Jurnal Ekotrans* 12(1).
- Rembangy, M. 2010. *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*. Jakarta: Teras.
- Sinha, D., and S. Sinha. 2020. "Managing in a VUCA World: Possibilities and Pitfalls." *Journal of Technology Management for Growing Economies*, 11(1):17–21.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sulistyowati, Endah, Fatchur Rohman, and Ibrohim Ibrohim. 2020. "Perangkat Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbantuan Handout Berbasis Potensi Lokal Hutan Mangrove Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Sikap Peduli Lingkungan." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* 5(3):374. doi: 10.17977/jptpp.v5i3.13272.
- Tilaar, H. A. R. 2012. *Pengembangan Kreativitas Dan Entrepreneurship Dalam Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas.
- Tirtarahardja, Tirtaraharja Umar La Sulo and Umar. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka.
- Umiarso, and Aswanan. 2017. *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam Dalam Bingkai Ke Indonesiaan*. Jakarta: Kencana.
- Widianto, E. 2015. "Tak Transparan, Lembaga Pendidikan Suburkan Korupsi." *Tempo.Co*.

ISLAMIC STUDIES IN GLOBALIZING CHALLENGES

Perbincangan seputar globalisasi dalam hubungannya dengan studi Islam belakangan Kembali menjadi perhatian bahkan banyak yang berpolemik. Ada yang menganggap globalisasi sebagai tantangan yang di dalamnya juga terdapat peluang bagi pengembangan kajian ke-Islaman. Di sisi lain, tidak sedikit sarjana yang melihat globalisasi lebih banyak mengandung eksek negatif yang dapat mengancam masa depan kehidupan beragama. Terlepas dari polemik tersebut, tidak ada yang menolak bahwa globalisasi adalah keniscayaan yang harus disikapi dengan bijak. Kumpulan tulisan dalam proceeding ini, bertujuan untuk ikut membicarakan seputar globalisasi dalam konteks yang lebih spesifik yakni studi Islam. Dari beberapa tulisan terlihat jelas bagaimana para penulis menyikapi globalisasi, serta apa implikasinya terhadap masa depan studi Islam. Meskipun tema yang diangkat dalam setiap tulisan sangatlah bervariasi, tapi pada ujungnya semuanya satu pandangan bahwa studi Islam dihadapkan pada tantangan untuk mengubah cara pandang terhadap realitas-realitas baru dalam dunia global.

The discussion about globalization concerning Islamic studies has recently become many people's attention, even polemic. Some consider globalization as a challenge in which there is also an opportunity to develop Islamic studies. On the other hand, many scholars see globalization as having more negative effects that can threaten the future of religious aspects. Apart from this polemic, no one denies that globalization is a necessity that we must handle wisely. The collection of writings in this proceedings aims at participating in discussing globalization in a more specific context, namely Islamic studies. From several essays, it is clear how the authors respond to globalization and its implications for the future of Islamic studies. Although the themes presented in each article are very varied, eventually, they all share one belief: Islamic studies are facing the challenge of changing how people view new realities in a globalized world.



Jl. Ledak, Pegarijan, Kec. Bae, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah 59333 Kudus
☎ 0896-8941-6324
✉ dutadnamikamedia@yahoo.co.id



Jl. Conge Ngembalejo, Ngembal Rejo,
Ngembalejo, Kec. Bae, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah 59322

